ENSIKLOPEDI KERAJAAN-KERAJAAN NUSANTARA

HIKAYAT DAN SEJARAH

ENSIKLOPEDI KERAJAAN-KERAJAAN NUSANTARA

HIKAYAT DAN SEJARAH

ENSIKLOPEDI KERAJAAN-KERAJAAN NUSANTARA
Hikayat dan Sejarah

Ivan Taniputera

Editor: Aziz Safa & Meita Sandra
Proofreader: Moh Faiz
Desain Cover: Anto
Desain Isi: Joko P.

Diterbitkan Oleh:
AR-RUZZ MEDIA
Jl. Anggrek 126 Sambilegi, Maguwoharjo,
Depok, Sleman, Yogyakarta 55282
Telp./Fax.: (0274) 488132
E-mail: arruzzwacana@yahoo.com

ISBN: 978-602-313-180-8 (jil. 2)
Cetakan I, 2017

Didistribusikan oleh:
AR-RUZZ MEDIA
Telp./Fax.: (0274) 4332044
E-mail: marketingarruzz@yahoo.co.id

Perwakilan:
Jakarta: Telp./Fax.: (021) 22710564
Malang: Telp./Fax.: (0341) 560988

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Ivan Taniputera
ENSIKLOPEDI KERAJAAN-KERAJAAN NUSANTARA: Hikayat dan Sejarah/Ivan Taniputera-Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017
xiv + 1018 hlm, 18,5 X 25,5 cm
ISBN: 978-602-313-178-5 (no. jil. lengkap)
978-602-313-180-8 (jil. 2)

1. Sejarah
I. Judul II. Ivan Taniputera

PENGANTAR PENULIS

Bagi negeri kita yang terdiri dari ribuan pulau dengan beragam suku bangsa, adat istiadat, dan bahasa, sejarah lokal sesungguhnya merupakan bagian sejarah nasional yang sangat penting dan tak terpisahkan. Sebelumnya, riwayat berbagai kerajaan di Kepulauan Nusantara setelah keruntuhan Majapahit selaku sejarah lokal masih belum banyak disentuh. Kemungkinan disebabkan oleh minim dan terseraknya berbagai sumber sejarah. Dewasa ini, tampak kebangkitan minat masyarakat kita terhadap sejarah, baik umum maupun lokal. Banyak buku kajian sejarah lokal telah ditulis, baik oleh para sejarawan dalam maupun luar negeri. Buku ini dimaksudkan sebagai pelengkap kepustakaan sejarah lokal di negeri kita, dan seiring dengan tumbuhnya minat masyarakat dan kaum cendekiawan, penulis terdorong merangkum sejarah berbagai kerajaan tersebut.

Dengan mencermati berbagai peristiwa penting di berbagai kerajaan itu, yang umumnya tumbuh dan berkembang semenjak abad 16 hingga awal abad 20, pandangan terhadap sejarah nasional secara keseluruhan akan menjadi makin utuh. Kerajaan-kerajaan di Kepulauan Nusantara merupakan bagian khazanah budaya bangsa yang berharga. Penelaahan sejarah berbagai kawasan di seluruh penjuru tanah air akan melengkapi wawasan sejarah bangsa kita.

Tentu saja buku ini masih jauh dari sempurna; terdapat lebih dari 300 kerajaan di Kepulauan Nusantara yang eksis hingga akhir abad 19 dan awal abad 20, dan sumber-sumber sejarah yang tersedia masih sangat minim dan tidak selalu terdapat informasi memadai bagi masing-masing kerajaan. Oleh karena itu, penulis menyadari

bahwa karya ini merupakan rintisan dan perlu penyempurnaan lebih lanjut. Pada mulanya, sebelum menyusun buku ini timbul perasaan pesimis dalam diri penulis. Meskipun demikian, akhirnya timbul pemikiran jika tidak memberanikan diri merintis penulisan karya semacam ini, kapan lagi kita akan mempunyai dokumen sejarah lengkap mengenai kerajaan-kerajaan di negeri kita.? Selain itu, penulis teringat akan pepatah "Perjalanan ribuan kilometer hanya dimulai dari satu langkah saja." Itulah sebabnya, penulis memberanikan diri menghasilkan karya tentang sejarah yang masih jauh dari sempurna ini, dengan harapan membangkitkan minat masyarakat terhadap riwayat kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Bumi Nusantara. Buku ini juga ditujukan membantu para guru sejarah menggali muatan lokal di daerahnya masing-masing. Dengan demikian, besar pula harapan penulis agar karya ini sedikit banyak sanggup memberikan sumbangsih bagi kemajuan pendidikan sejarah di negeri kita.

Terdapatnya gambar lambang negara kita pada sampul buku ini memperlihatkan bahwa para raja Nusantara telah mempersiapkannya sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 semenjak lama, meskipun wujudnya telah mengalami beberapa kali perubahan. Sebagai contoh, Raja Airlangga telah mempergunakan garuda sebagai simbol kerajaannya. Pencantuman gambar tersebut mencerminkan pula tekad para raja menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika.

DAFTAR ISI

Bab 4

KERAJAAN-KERAJAAN DI BALI

Sumber-sumber sejarah awal berbagai kerajaan di Pulau Bali setelah keruntuhan Majapahit kebanyakan berasal dari *babad-babad* (riwayat-riwayat) yang tentu saja tidak semuanya terbukti kebenarannya. Kendati demikian, sumber sejarah tradisional tersebut juga tidak dapat diabaikan sepenuhnya karena kemungkinan di dalamnya tetap mengandung kebenaran sejarah. *Babad-babad* itu antara lain *Babad Pasek*, *Babad Dalem*, *Babad Arya Kutawaringin*, *Babad Buleleng*, dan lain sebagainya. Berbagai *babad* tersebut menghubungkan para penguasa Bali dengan Kerajaan Majapahit yang tersohor itu. Kendati demikian, tidak jarang masing-masing di antaranya memberikan keterangan yang berbeda-beda. Sebelum ditaklukkan Majapahit, Bali memang pernah mempunyai raja-rajanya sendiri. Setelah penaklukan, Bali diperintah oleh keluarga Raja Majapahit. Oleh karenanya, semenjak saat itu boleh dikatakan kancah perpolitikan di Bali terkait erat dengan Majapahit. Hal ini terbukti dari ditemukannya dua prasasti, yakni Prasasti Telukbiyu berangka tahun 1305 Saka (1383 Masehi) dan Prasasti Buyan-Sanding-Tamblingan berangka tahun 1320 Saka (1398 Masehi). Dalam kedua prasasti itu dicantumkan nama Paduka Parameswara Sri Wijayarajasa (Cancu Kudamerta) yang berkedudukan di Wengker. Tokoh ini dikatakan *moksa ring Wisnubhawana* (wafat di Wisnubhawana). Berdasarkan silsilah raja-raja Majapahit, dapat diketahui bahwa ia merupakan paman dan mertua Rajasanagara dan berputrikan Paduka Sori, yang belakangan diperistri

oleh Hayam Wuruk. Terdapat kesimpulan yang menyatakan bahwa Rajasanagara mengawasi sendiri pemerintahan di Bali secara langsung sehingga saat ia meninggal, Bali belum memiliki penguasa sendiri.[1]

Seiring dengan melemahnya Majapahit dan keruntuhannya pada kurang lebih abad 16, pengaruh kekuasaan Jawa terhadap kancah perpolitikan di Bali mulai sirna. Semenjak saat itu, bukti-bukti sejarah tidak diperoleh lagi dari prasasti, melainkan dari sumber-sumber tertulis pada lontar yang lazim dinamakan *babad*. *Babad Dalem, Babad Pasek,* dan *Babad Arya Kutawaringin* mengisahkan bahwa para pemuka Majapahit yang berkedudukan di Bali (Kesatria Majapahit) menghadap Raja Majapahit seraya meminta seorang tokoh yang layak diangkat menjadi Raja Bali. Pemerintah pusat Majapahit lalu mengutus seorang keturunan pendeta di Kadiri bernama Sri Kresna Kapakisan guna dinobatkan sebagai raja di Bali memenuhi keinginan mereka pada 1352. Raja Bali yang baru ini berkedudukan di Samprangan sehingga ada yang menyebut kurun waktu ini periode Kerajaan Samprangan.

A. PERIODE KERAJAAN SAMPRANGAN

Sri Kresna Kapakisan dikatakan merupakan putra Danghyang Kresna Wambang Kapakisan, seorang brahmana dari Kadiri. Samprangan dipilih karena pernah menjadi markas tentara Majapahit saat menaklukkan Raja Bali terakhir, Sri Asta Astura yang berkedudukan di Bedahulu/ Bedulu. Kendati demikian, berbagai *babad* memberikan keterangan berbeda mengenai asal usul Danghyang Kresna Wambang Kapakisan. *Babad Buleleng* menyebutkan bahwa tokoh tersebut dilahirkan dari batu (*aweka ta sira umetu sakin batu*) dan dikatakan merupakan seorang yang tinggi ilmunya. Ia memiliki tiga orang putra dan seorang putri. Oleh Gajah Mada, anaknya yang tertua dijadikan penguasa di Baranbangan (Balambangan), adiknya diangkat sebagai penguasa di Pasrahan (Pasuruan), sedangkan putranya yang bungsu menjadi penguasa di Pulau Bangsul (Bali) dan berkedudukan di Samprangan. Selain dikenal dengan nama Sri Kresna Kepakisan, ia juga disebut sebagai I Dewa Wawu Rawuh.

Sumber lain, *Babad Dalem*, menyebutkan bahwa Danghyang Kresna Wambang Kapakisan merupakan anak Mpu Asokanata (Mpu Tantular), penggubah Kitab *Sutasoma*–jadi tidak dilahirkan dari batu sebagaimana yang dinyatakan dalam *Babad Buleleng*. Disebutkan pula bahwa Mpu Tantular merupakan anak Mpu

1. Lihat *Istana Dewa Pulau Dewata*, halaman 132.

Bahula, sedangkan kakek Mpu Tantular adalah Mpu Pradah (Baradah) yang berhasil menundukkan kesaktian janda dari Desa Jirah. Silsilah yang dimuat dalam *Babad Arya Tabanan* juga pada dasarnya sama. Hanya saja ada beberapa nama yang ditambahkan seperti nama Mpu Bahula yang ditambahkan menjadi Mpu Bahula Candra. Nama janda sakti dari Jirah itu disebut sebagai Wale Nateng Jirah.

Semua sumber *babad* setuju bahwa penguasa Bali yang baru tersebut merupakan putra bungsu brahmana dari Kadiri di atas. Mengenai tahun pemerintahan Sri Kresna Kapakisan, berbagai sumber juga memberikan keterangan yang berbeda-beda; yakni 1350–1380 menurut *Babad Buleleng*, 1349–1383 menurut *Babad Arya Kutawaringin*; dan 1352–1380 menurut *Babad Dalem*. Perbedaan ini terjadi karena *babad-babad* tersebut ditulis jauh setelah peristiwa terjadinya sehingga tidak mustahil terjadi kesalahan dalam pencatatan tahun pemerintahan. Kendati demikian, semuanya sepakat bahwa Sri Kresna Kapakisan memerintah pada abad 14, atau sezaman dengan Raja Rajasanagara (1350–1389) dari Majapahit.

Menurut *Babad Dalem,* pada masa awal pemerintahan Sri Kresna Kapakisan beberapa desa di Bali masih kerap memberontak. Untuk itulah, Sri Kresna Kapakisan mengutus beberapa bawahannya menemui Patih Gajah Mada di Majapahit. Oleh patih kenamaan tersebut, mereka diberikan petunjuk-petunjuk tentang tata cara pemerintahan. Majapahit juga berjanji tetap memberikan perlindungan kepada raja-raja yang ditempatkan di sana. Setelah kondisi Bali menjadi lebih aman, Sri Kresna Kapakisan memerintahkan perbaikan enam pura utama di sana serta meminta rakyat bekerja bakti demi kepentingan raja dan kerajaan. Ia juga membagikan benih-benih padi kepada para pejabat di daerah dengan pesan agar rakyat mengolah tanah pertanian dengan baik.

Babad Arya Kutawaringin menyebutkan bahwa pengganti Sri Kresna Kapakisan yang bernama Dalem Hile/ Ile (Dalem Agra Samprangan) bukan pemimpin yang cakap. Sehari-hari ia hanya bersenang-senang demi kepentingan dirinya sendiri saja. Para pembesar yang hendak menghadap sering merasa kecewa karena mereka harus menunggu raja yang tidak kunjung muncul hingga sore hari. Oleh karenanya, para menteri yang dipimpin oleh Bandesa Gelgel bernama Klapodyana meminta adik raja, Ida I Dewa Ketut Angulesir, agar bersedia mendirikan pusat pemerintahan baru di Gelgel. Inilah cikal bakal Kerajaan Gelgel.

B. PINDAHNYA PUSAT KEKUASAAN KE GELGEL

Kerajaan Gelgel mulai berdiri pada 1383 dengan Ida I Dewa Ketut Angulesir sebagai rajanya yang pertama. Gelarnya setelah menjadi penguasa baru adalah Dalem Ketut Smara Kapakisan. Sementara itu, kerajaan yang berpusat di Samprangan mulai dilupakan orang. Dalem Hile meski masih berkuasa sebagai raja tetapi tak mempunyai kekuasaan lagi dan kerajaannya berakhir tatkala ia wafat. Pada masa pemerintahan raja baru ini, rakyat dikatakan hidup sejahtera, bahkan ia sempat menghadap raja Majapahit sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab *Nagarakertagama* 81:5. Dalam *Babad Dalem* disebutkan bahwa raja bertolak ke Majapahit diiringi para menteri dan pembesar kerajaannya. Mereka berangkat dari Bali dengan menggunakan perahu dan perjalanan pulang pergi itu memakan waktu satu bulan. Penampilan Raja Bali itu, menurut *Babad Dalem,* sanggup mengesankan hadirin lainnya karena ketampanannya yang bagaikan Dewa Smara (Kama).

Masih menurut sumber yang sama, Dalem Ketut Smara Kapakisan digantikan oleh putra mahkotanya yang bergelar Dalem Batur Enggong (Dalem Watu Renggong) atau Sri Waturenggong pada 1458. Pada zamannya, Bali dikatakan mencapai masa keemasannya. Penguasa ini, jika memang benar-benar ada, tentu menyaksikan kemunduran dan keruntuhan Majapahit. Bali saat itu berhasil mengembangkan pengaruhnya hingga Blambangan, Pasuruan, Nusa Penida, dan Sumbawa yang ditaklukkannnya pada 1512. Sasak (Lombok) ditundukkan pada 1520 sehingga masuk ke dalam lingkaran pengaruh Bali. Dalam bidang keagamaan, datanglah seorang pendeta dari Jawa yang bernama Danghyang Nitartha. Ia membawa pembaharuan bagi kehidupan keagamaan Hindu di Bali. Sebelum mangkat pada 1558, raja meminta pendeta tersebut "membersihkan" dirinya.

Sesudah zaman Sri Waturenggong, catatan sejarah Bali selanjutnya agak kacau. Berdasarkan sumber-sumber yang ada, pengganti raja tersebut adalah putra tertuanya yang bernama I Dewa Pemahyun (Dalem Bekung) (1558–1580). Kala itu usianya masih belum dewasa sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan kerajaan ia didampingi oleh paman-pamannya, seperti I Dewa Nusa, I Dewa Gedong Artha, dan I Dewa Anggungan. Kepemimpinan Dalem Bekung boleh dikatakan lemah sehingga pecah pemberontakan besar-besaran yang dipimpin oleh patih Gelgel bernama Rakryan Batan Jeruk (I Gusti Arya Batan Jeruk) pada 1556. Patih yang memberontak itu ternyata bersekutu dengan paman raja sendiri, yakni I Dewa Anggungan. Kendati

pemberontakan itu dapat dipadamkan, tetapi kondisi Gelgel menjadi tidak aman seperti dahulu lagi. Intrik-intrik di kalangan keluarga kerajaan menjadi sering terjadi sehingga pamor raja makin menurun. Para petinggi kerajaan berpendapat bahwa kemimpinan raja tidak dapat dipertahankan lagi. Karena itu, mereka mengangkat adiknya yang bernama I Dewa Anom Seganing (Dalem Seganing, memerintah dari 1580–1665) menjadi raja baru. Penguasa baru ini sanggup memulihkan kewibawaan Gelgel. Daerah-daerah yang lepas dari Gelgel, seperti Lombok dan Sumbawa, berhasil ditaklukkan kembali. Sehubungan dengan pembagian daerah pengaruh, Dalem Seganing mengadakan perjanjian dengan Gowa pada 16 Maret 1624, yang dikenal sebagai Perjanjian Seganing. *Babad Gelgel* mengisahkan bahwa raja ini memiliki banyak istri dan 16 orang anak.

Pada Februari 1597, datanglah tiga kapal Belanda di bawah pimpinan Aernodt Lintgens. Turut serta dalam ekspedisi itu Emanual Roodenburch dan seorang Portugis bernama Joan de Portugis yang direkrut sebagai penerjemah. Salah satu kapal berlabuh di pantai Jembrana. Kapal kedua berlabuh di Kuta, sedangkan yang ketiga mendarat di Labuan Amuk. Lintgens melaporkan bahwa ia diterima dengan penuh keramahan di Bali. Tetapi saat ditanya oleh raja mengenai letak Negeri Belanda, sama seperti dengan yang dilakukan de Houtman di Aceh, ia bercerita secara berlebihan atau berbohong mengenai negerinya. Ia melebih-lebihkan luas Negeri Belanda. Raja merasa terkejut karena di peta luas Bali hanya seukuran ujung jarum saja. Raja meminta Lintgens agar mengizinkannya membeli meriam yang ada di kapal. Namun, Lintgens menjawab bahwa komandan armadanya tak akan bersedia memberikan meriam itu. Lintgens dan rombongannya meninggalkan Bali pada 25 Februari 1597.

Rombongan Belanda datang lagi pada 1601 yang kali ini dipimpin oleh Cornelis Heemskerk. Kali ini kunjungannya bersifat setengah resmi karena membawa surat Pangeran Maurits, pemimpin *Bataafse Republiek* (Republik Batavia), yang isinya berupa ajakan membina persahabatan. Utusan tersebut juga membawa berbagai hadiah bagi Raja Bali. Selain memperkenalkan Heemskerk, Pangeran Maurits menyarankan agar kedua kerajaan hendaknya menjalin hubungan perniagaan. Dalam rangka menghadapi Mataram, *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) mengutus Jan Oosterwijk[2] pada 1633 menjumpai Raja Bali dan mengajaknya membentuk aliansi atau pakta pertahanan bersama. Tetapi misi ini gagal karena *Coninck van Bali* (Raja Bali) tidak

2. Lihat *Sedjarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok*, halaman 144.

berani menanggung risiko berperang dengan Mataram yang sangat kuat angkatan perangnya itu. Pada 1635 memang pecah peperangan dengan Mataram, tetapi pemicunya bukanlah ajakan Belanda melainkan serangan Mataram atas Blambangan. Utusan VOC kedua tiba pada 1651 yang dipimpin oleh Jacob Bacherach. Kendati demikian, tak ada hasil nyata yang dicapainya.

Raja Gelgel selanjutnya adalah Ida I Dewa Anom Pemahyun yang mulai memerintah semenjak 1665. Namun, masa awal pemerintahannya kembali dilanda badai konflik. Beberapa pembesar ternyata tidak menyukai kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan raja. Di bawah pimpinan Kryan Agung Maruti, mereka mencalonkan adik raja yang bernama I Dewa Dimade sebagai raja Gelgel baru. Menyadari adanya gerakan yang hendak menggulingkan dirinya tersebut, Ida I Dewa Anom Pemahyun bersedia mengundurkan dirinya ke Desa Purasi pada 1665. Ia berdiam di bekas istana Dalem Bekung dulu dan memperbaiki Puri Ukir Anyar pada 1668.

I Dewa Dimade yang selanjutnya bergelar Dalem Dimade (1665–1686) menggantikan kakaknya sebagai raja. Sementara itu, pembesar yang memimpin pejabat lainnya menggulingkan raja terdahulu, Kryan Agung Maruti, diangkat sebagai patih. Raja memerintah Gelgel dengan dibantu patihnya tersebut. Saat itu, Bali mengalami kemunduran karena berbagai wilayah taklukan Bali, seperti Blambangan dan Lombok, ingin melepaskan diri. Sementara itu, sang patih juga berniat melakukan pemberontakan. Patih beserta pengikutnya lalu mengepung istana Gelgel tempat kedudukan raja. Meskipun demikian, raja berhasil meloloskan diri dan menetap di Desa Guliang, Bangli. Dengan demikian, berakhir sudah Dinasti Sri Kresna Kepakisan di Gelgel dan Patih Kryan Agung Maruti lalu menduduki takhta kerajaan tersebut. Tetapi patih Gelgel yang merebut singgasana itu sesungguhnya tidak pernah berkuasa atas seluruh Bali karena seiring dengan kudeta yang dilancarkannya itu, muncul beberapa kerajaan kecil yang masing-masing dipimpin oleh para *ksatrya dalem* (keturunan *ksatrya* yang berasal dari seorang brahmana Kediri yang bernama Mpu Kepakisan), seperti Karangasem, Buleleng, Sideman, Badung, Tabanan, Tamanbali, Payangan, Singarsa, dan lain-lain. Mereka tidak tunduk lagi terhadap Gelgel sehingga semenjak saat itu Bali terpecah belah menjadi beberapa kerajaan kecil.

C. TERPECAHNYA BALI MENJADI BEBERAPA KERAJAAN

Semasa pemerintahan Kryan Agung Maruti, Bali mulai terpecah menjadi beberapa negeri kecil yang saling jatuh bangun. Keturunan atau anggota dinasti Sri Kresna Kapakisan berupaya menyusun kekuatannya kembali dan mengusir Kryan Agung Maruti dari Gelgel. Salah seorang putra Dalem Dimade–bekas Raja Gelgel yang telah mangkat di pengasingannya–bernama I Dewa Agung Jambe pindah ke Puri Ulah di Sidemen. Di sana ia bergabung dengan saudara beserta kaum kerabatnya, yakni anak-anak Dalem Anom Pemahyun yang dahulu menyingkir ke Desa Purasi.

Ida I Dewa Agung Jambe dengan didukung oleh I Gusti Ngurah Sidemen, salah seorang kerabatnya, serta penguasa-penguasa Buleleng, Badung, Tamanbali, dan lain sebagainya, bersama-sama menggempur Patih Kryan Agung Maruti. Pasukan gabungan bertolak ke Gelgel pada 1704 dan pertempuran antara kedua pihak tak terelakkan lagi. Gelgel dapat dikalahkan dan sang patih melarikan diri ke Jimbaran.

Kemenangan ini merupakan wujud ditegakkannya kembali Dinasti Sri Kresna Kapakisan. Tetapi I Gusti Ngurah Sidemen yang telah membantunya merebut kekuasaan menyarankan agar pusat kerajaan dipindah ke Desa Klungkung dan selanjutnya dibangunlah istana baru yang bernama Smarapura. Dengan demikian, lahirlah Kerajaan Klungkung. Jadi, hingga saat itu (awal abad 18) telah ada kerajaan Buleleng, Badung, Bangli, Sideman/ Singarsa, dan Gelgel yang saat itu masih dikuasai Patih Maruti. Ada dua sumber yang menyatakan hal ini, yakni *Babad Dalem* dan *Babad Arya Kutawaringin*. Sementara itu, sumber *Babad Ksatrya Taman Bali* menyebutkan adanya Kerajaan Tamanbali, Bangli, Klungkung, dan Gianyar menjelang runtuhnya kekuasaan Gelgel. Informasi ini tampaknya kurang dapat dipercaya karena berdasarkan sumber lain yang dapat dipercaya, Gianyar berdiri belakangan, yakni pada paruh kedua abad 17. Sementara itu, menjelang abad 19, atau tepatnya saat Perang Jagaraga (1846–1849), terdapat kerajaan Jembarana, Mengwi, Gianyar, Klungkung, Karangasem, dan Buleleng. Jumlah kerajaan ini makin bertambah lagi karena menurut laporan F.A. Liefrinck yang pernah tinggal di Bali semenjak 1877 atau 1878 hingga akhir abad 19, menyebutkan bahwa pada masanya terdapat 10 kerajaan, yakni Klungkung, Karangasem, Buleleng, Mengwi, Tabanan, Badung, Gianyar, Payangan, dan Jembrana.

Kerajaan-kerajaan yang berkembang belakangan di atas saling berperang atau bersekutu satu sama lain, tetapi mereka tetap mengakui bahwa Raja Klungkung (selaku pewaris Sri Kresna Kapakisan) sebagai yang tertinggi di antara mereka.

I. BADUNG

Kerajaan ini kini terletak di Kabupaten Badung. Merupakan federasi tiga kerajaan, yakni Denpasar, Pamecutan, dan Kesiman. Kerajaan-kerajaan ini menguasai tiga *puri* (istana) utama di Badung, yakni Puri Pamecutan, Denpasar, dan Kesiman. Kerajaan Badung kelak menguasai Mengwi. Sebagian daerahnya ada yang subur (Gunung Rata, Sanur, Taman Intaran, Soong, serta Pulau Serang) dan tandus (Legian, Kuta, Tuban, Jimbaran, serta Bukit). Menurut sumber-sumber *babad*, leluhur penguasa Badung dapat dirunut kepada Dewa Made (Sri Magada Nata) dari Tabanan. Dengan demikian, penguasa Badung memiliki keterkaitan dengan Tabanan. Tetapi karena kecewa, Sri Magada Nata mengasingkan dirinya dan menjalani kehidupan pertapaan (lihat uraian mengenai sejarah Kerajaan Tabanan). Dalam pengasingannya, Sri Magada Nata menikahi putri Bandesa Pucangan dan dikaruniai seorang putra bernama Kyai Wuruju atau Kyai Ketut Bandesa (Kyai Pucangan) dengan gelarnya Arya Notor Wandira.[3]

Dia gemar berkelana demi menyelami kehidupan rakyat kecil. Saat malam hari, dia kerap menginap di gubuk atau rumah para petani. Tampaknya Arya Notor Wandira merupakan tokoh yang sakti karena sewaktu dia tidur di tepi jalan, dari kejauhan orang akan melihat nyala api. Tetapi saat didekati lenyaplah nyala api tersebut dan hanya tampak Arya Notor Wandira sedang tidur. Arya Notor Wandira atau Kyai Pucangan menikahi seorang wanita dari desa Buwahan dan dikarunai dua orang putra, yakni Kyai Gede Raka dan Kyai Gede Rai.

Arya Notor Wandira ingin memegang tampuk pemerintahan sehingga ia akhirnya bertapa ke Gunung Beratan dan Batukaru. Setelah beberapa lama menjalani pertapaan, hadirlah Dewa Ida Hyang Giri Luhur Batu Karu yang mengatakan bahwa dia tak dapat menganugerahkan apa-apa kepada Arya Notor Wandira dan menyarankannya bertapa di Gunung Batur guna memohon kemurahan Bhatari Danu. Saran ini dipenuhi Arya Notor Wandira dan dia melanjutkan pertapaannya di Gunung Batur. Tidak berapa lama kemudian, muncul seorang wanita tua berpakaian compang-camping dan berbau busuk dengan badan dipenuhi luka. Nenek tua itu meminta Arya Notor Wandira agar bersedia menyeberangkannya ke tepi danau.

Tanpa berpikir panjang, Arya Notor Wandira segera menggendong wanita tua itu menyeberangi danau. Anehnya, sewaktu berjalan menyeberangi danau tidak – kaki Arya Notor Wandira menginjak air. Sesampainya di seberang, nenek tua tadi berubah

3. Lihat *Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng ke Bali*, halaman 55.

menjadi seorang wanita cantik. Ternyata ia adalah Bhatari Danu sendiri. Karena lulus ujian, Bhatari Danu mengabulkan keinginan Arya Notor Wandira serta menyatakan bahwa dirinya beserta keturunannya akan memperoleh kemuliaan. Pada kesempatan tersebut, Bhatari Danu menganugerahkan Arya Notor Wandira pusaka berupa cambuk serta sumpitan. Setelah itu, menghilanglah Bhatari Danu dari pandangan Arya Notor Wandira.[4]

Selanjutnya, diriwayatkan bahwa Arya Notor Wandira mengabdi di Kerajaan Tegeh Kori yang diperintah pamannya, Kyai Anglurah Tegeh Kori. Setelah beberapa lama, Arya Notor Wandira digantikan putranya, Kyai Gede Raka (Kyai Papak). Ia digantikan kembali oleh putranya bernama Kyai Bebed, yang berjasa memadamkan pemberontakan Kyai Ngurah Janggaran sehingga dianugerahi gelar Kyai Jambe Pule atau Kyai Biket.[5]

Kyai Jambe Pule mempunyai beberapa orang anak, yang terkemuka di antaranya adalah Kyai Anglurah Jambe Merik atau Kyai Anglurah Jambe Mihik dan Kyai Ketut Pemedilan atau Kyai Macan Gading. Kyai Jambe Merik terkenal kepandaiannya bermain sumpit (tulup) sehingga digelari Kyai Hyang Anulup. Semenjak kecil, Kyai Jambe Merik telah memperlihatkan kelebihan dibandingkan kawan-kawan seusianya. Itulah sebabnya, ia dijuluki Arya Wagus Alit (Anak Kecil Yang Cakap dan Pemberani). Adiknya, Kyai Pemedilan, terkenal piawai memainkan cambuk saktinya. Sewaktu menggembala, dia kerap gemar meniup serulingnya serta memainkan cambuknya tersebut. Kurang lebih bersamaan dengan masa kehidupan kedua tokoh ini, Kryan Agung Maruti melancarkan pemberontakannya terhadap Dalem Dimade.

Setelah berakhirnya prahara tersebut, konon timbul musibah lagi dengan kehadiran gagak bencana yang selalu mengganggu hidangan Dalem Dimade. Akibatnya, Dalem Dimade tak lagi dapat menikmati hidangannya dan jatuh sakit. Dia mendengar bahwa di Puri Nambangan terdapat dua orang pemuda yang piawai memainkan sumpit dan cambuk. Kedua orang pemuda itu, yang tak lain dan tak bukan adalah Kyai Anglurah Jambe Merik dan Kyai Pemedilan, lantas diminta tolong membunuh hewan pengganggu tersebut. Ternyata mereka dapat menunaikan tugasnya dengan baik dan memperoleh hadiah berupa pengiring dan barang-barang berharga.[6]

4. Lihat *Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng ke Bali*, halaman 128–129.
5. Lihat *Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng ke Bali*, halaman 135.
6. Lihat *Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng ke Bali*, halaman 139.

Kyai Anglurah Tegeh Kori bermaksud menikahkan putrinya yang bernama Kyai Luh Tegeh dengan Kyai Jambe Merik. Kendati demikian, pernikahan ini dibatalkan karena putrinya itu kemudian dipinang oleh raja Mengwi. Pembatalan ini mengakibatkan ketersinggungan Kyai Jambe Pule sehingga pecahlah peperangan antara kedua belah pihak. Pihak Tegeh Kori mengalami kekalahan dan semenjak itu tercerai-berai ke mana-mana. Sebagai gantinya, berdirilah Puri Alang Badung di bawah kepemimpinan Kyai Anglurah Jambe Merik dan Puri Pemecutan yang dipimpin Kyai Anglurah Ketut Pemedilan (Kyai Pemedilan). Berdirinya kedua puri ini merupakan awal tampilnya Kerajaan Badung ke panggung sejarah.

Kryan Agung Maruti melancarkan serangan besar-besaran ke Gelgel guna menggulingkan kedudukan Dalem Dimade sehingga dia terpaksa mengungsi ke desa Guliang. Para raja turun tangan membantu Dalem Dimade, termasuk Badung. Malangnya, Kyai Anglurah Ketut Pemedilan gugur dalam pertempuran. Meskipun demikian, Puri Alang Badung dan Puri Pemecutan selaku pengejawantahan Kerajaan Badung makin berkibar.

Sebagai putra tertua Kyai Anglurah Jambe Pule, Kyai Anglurah Jambe Merik memegang jabatan sebagai Raja Badung. Sementara itu, adiknya yang berkuasa di Puri Pemecutan memangku kedudukan sebagai wakil raja.[7] Kyai Anglurah Jambe Merik digantikan putranya, Kyai Anglurah Jambe Ketewel, selaku Raja Badung kedua.[8] Semasa pemerintahannya, timbul kerusuhan di Klungkung masalah perebutan takhta. Sebagai pemecahannya, dilakukan pembagian kekuasaan di antara ketiga putra I Dewa Agung Jambe. I Dewa Agung Made melanjutkan pemerintahan dari Klungkung. Sementara itu, saudaranya, Dewa Agung Anom, membangun puri baru di Sukawati. Saudaranya yang lain, Ida Dewa Agung Ketut, membangun kembali puri Gelgel. Dengan demikian, perdamaian dapat dipulihkan. Pembangunan Sukawati sendiri banyak mendapat bantuan Kyai Anglurah Jambe Ketewel.

Suatu ketika, Kyai Anglurah Jambe Ketewel berkunjung ke istana Klungkung. Ketika itu Dewa Gede Gereh, cucu Kanca Den Bancingah dari Tamanbali, tengah membersihkan singgasana Raja Klungkung. Karena hari mulai gelap dan usianya yang telah lanjut, tanpa sengaja Kyai Anglurah Jambe Ketewel menaruh bantalan tempat duduk Raja Klungkung ke atas kepala Dewa Gede Gereh. Setelah menyadari hal

7. Lihat *Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng ke Bali*, halaman 146.
8. Lihat *Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng ke Bali*, halaman 147.

itu, Raja Badung terkejut dan meminta maaf. Meskipun demikian, Raja Klungkung justru tertawa geli menyaksikannya. Dia justru menganugerahkan gelar *Tangkeban* (Yang Ditutupi) kepada Dewa Gede Gereh selaku kenang-kenangan bagi peristiwa tersebut. Belakangan, Dewa Gede Gereh berhasil membangun Tamanbali dan dia beserta keturunannya menyandang gelar Dewa Gede Tangkeban.

Putra Kyai Anglurah Jambe Ketewel bernama Kyai Anglurah Jambe Tangkeban menggantikan ayahnya sebagai Raja Badung ketiga.[9] Meski telah lama menikah, dia belum dikaruniai keturunan. Oleh karenanya, sewaktu Raja Dewa Agung Anom dari Puri Sukawati berkunjung ke Badung, Kyai Anglurah Jambe Tangkeban menyerahkan seorang gadis purinya guna dinikahinya. Pernikahan ini membuahkan seorang putra bernama Kyai Anglurah Jambe Aji (Kyai Jambe Haeng) yang menjadi Raja Badung keempat. Semasa pemerintahannya, dia membangun Puri Jambe Ksatrya. Masih pada zaman Kyai Anglurah Jambe Aji, berlangsung perebutan kekuasaan di Kerajaan Sukawati, yang berujung pada terpecahnya kerajaan itu menjadi dua, yakni Sukawati (dipimpin Dewa Agung Gede) dan Peliatan (dipimpin Dewa Agung Made).

Kyai Anglurah Jambe Aji digantikan oleh putranya, Kyai Anglurah Jambe Ksatrya.[10] Raja Badung kelima ini mengalami nasib nahas karena dihabisi nyawanya oleh seorang tokoh bernama I Gusti Ngurah Rai. Pada mulanya, I Gusti Ngurah Rai dari Puri Kaleran dipercaya menangani ayam sabungan raja. Kendati demikian, ia terlibat perselingkuhan dengan salah seorang istri kesayangan Kyai Anglurah Jambe Ksatrya. Perselingkuhan ini terdengar oleh raja akibat tipu daya Dewa Manggis Sakti, Raja Gianyar. Konon karena ayam sabungannya sering kalah, Dewa Manggis Sakti merancang siasat menyingkirkan I Gusti Ngurah Rai. Ia mengetahui hubungan asmara antara I Gusti Ngurah Rai dengan salah seorang selir Raja Badung. Dewa Manggis Sakti lantas membujuk I Gusti Ngurah Rai agar bersedia meminjam cincin istri kesayangan Kyai Anglurah Jambe Ksatrya itu guna dibuatkan tiruannya. Termakan oleh bujukan Dewa Manggis Sakti, I Gusti Ngurah Rai dengan mudah meminta cincin dari wanita selingkuhannya tersebut.

Bertepatan dengan acara sabung ayam yang dihadiri Kyai Anglurah Jambe Ksatrya, Dewa Manggis Sakti sengaja memamerkan cincin pinjamannya. Raja Badung merasa terkejut menyaksikannya karena cincin itu mirip sekali dengan kepunyaan

---

9. Lihat *Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng ke Bali*, halaman 153.
10. Lihat *Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng ke Bali*, halaman 157.

istri kesayangannya. Dia bertanya dari mana benda tersebut diperolehnya. Dewa Manggis menjawab bahwa ia mendapatkannya dari I Gusti Ngurah Rai. Tentu saja, perselingkuhan mereka terbongkar dan Kyai Anglurah Jambe Ksatrya yang dilanda kobaran amarah berniat menjatuhkan hukuman mati kepada I Gusti Ngurah Rai.

Mendengar dirinya dijatuhi hukuman mati, I Gusti Ngurah Rai melarikan diri ke Kerajaan Mataram di Lombok. Setelah menimba berbagai ilmu dan mengumpulkan banyak pengikut, I Gusti Ngurah Rai bertolak kembali ke Bali guna membalaskan dendamnya. Tujuan pertamanya adalah Gianyar, yang rajanya pernah menipunya. Ia menuntut agar Raja Gianyar bersedia membantunya menyerang Badung. Raja Gianyar bersedia memenuhi permintaan itu, asalkan I Gusti Ngurah Rai sanggup memenangkan adu cengkerik (jangkrik). Berkat cengkerik pemberian dewata, I Gusti Ngurah Rai tampil sebagai pemenang. Raja Gianyar terpaksa memenuhi permintaan I Gusti Ngurah Rai dengan menurunkan pasukannya menyerang Badung.

Puri tempat kediaman Kyai Anglurah Jambe Ksatrya sudah dikepung dan dengan tipu muslihat, raja dibawa ke Puri Jro Kuta. Ternyata di sana I Gusti Ngurah Rai beserta pengikutnya telah menantikannya. Raja merasa terkejut tetapi berusaha tetap tenang. Setelah keheningan beberapa saat, I Gusti Ngurah Made Pemecutan dari Puri Kaleran angkat bicara dan meminta raja mengalihkan kekuasaan Badung kepada Puri Kaleran. Kyai Anglurah Jambe Ksatrya bersedia menyerahkan kekuasaannya dan minta dibunuh dengan keris pusakanya bernama Singapraga. Berakhirlah sudah kehidupan Raja Badung kelima tersebut. Kedudukan sebagai Raja Badung ke-6 diemban oleh I Gusti Ngurah Made Pemecutan. Dia mendirikan istana baru yang dikenal sebagai Puri Denpasar sehingga kini kekuasaan beralih dari Puri Alang Badung ke Puri Denpasar.

Sejarah Puri Pemecutan

Seperti yang telah diuraikan di atas, Kyai Jambe Pule mengabdi di Puri Tegeh Kori. Dia senantiasa menunaikan tugasnya dengan baik. Saat itu, bintang kaum keturunan Arya Notor Wandira yang telah mendapat berkah Bhatari Danu makin bersinar. Sebagai tempat tinggal bagi keluarganya, Kyai Jambe Pule membangun Puri Nambangan atau Puri Bandana. Perjuangan Kyai Jambe Pule yang digelari Kyai Anglurah Pemecutan I dilanjutkan oleh putranya Kyai Ketut Pemedilan atau Kyai Macan Gading. Dia mendirikan Puri Pemecutan sesuai dengan keahliannya bermain cambuk (*pecut*). Para penguasa Puri Pemecutan saat itu menduduki jabatan sebagai wakil Raja Badung.

Kyai Ketut Pemedilan inilah yang kemudian digelari Kyai Anglurah Pemecutan II.[11] Dia mempunyai watak yang penyayang disamping sikap pemberaninya. Saat pecah pemberontakan Kryan Maruti melawan Gelgel, Kyai Ketut Pemedilan turut memimpin pasukannya membela Raja Gelgel. Kendati demikian, dia gugur di Cedok Andoga, sebelah timur Pura Batu (Watu) Klotok. Dia digantikan putranya, Kyai Anglurah Pemecutan Sakti, dengan gelar Kyai Anglurah Pemecutan III. Semenjak masa mudanya, Kyai Anglurah Pemecutan III telah memperlihatkan jiwa kepemimpinan dan keberanian yang tinggi. Bahkan dia pernah berperang tanding dengan Gusti Panji Sakti dari Buleleng.[12] Pertarungan berakhir dengan hasil seimbang. Hubungan dengan Puri Alang Badung yang saat itu dipimpin Kyai Anglurah Jambe Ketewel, selaku Raja Badung kedua, tetap terjalin baik.

Puri Pemecutan lalu diwarisi oleh putra Kyai Anglurah Pemecutan III bergelar Kyai Anglurah Pemecutan IV (wafat ± 1713) yang beribukan putri dari Puri Gelogor.[13] Semasa pemerintahannya, dia membangun Puri Ukiran, yang terletak di sebelah utara Puri Kanginan. Dia memiliki putra bernama Sang Arya Mecutan Bhija, yang menggantikannya sebagai Anglurah Pemecutan V. Sama seperti ayahnya, dia memilih berdiam di Puri Ukiran.

Arya Ngurah Gede Raka lalu menggantikan ayahnya dengan gelar Kyai Anglurah Pemecutan VI (1770–1810).[14] Pada masa pemerintahannya, berakhirlah kekuasaan Puri Alang Badung dan digantikan oleh Puri Denpasar dibawah pimpinan I Gusti Ngurah Made Pemecutan bergelar Kyai Anglurah Denpasar I (1779–1813). Oleh karenanya, kini Kerajaan Badung dipimpin oleh dua serangkai Puri Denpasar beserta Puri Pemecutan. Hubungan keduanya dalam memimpin kerajaan tetap terjalin harmonis. Kyai Anglurah Pemecutan VI menikah dengan saudari Kyai Anglurah Made Pemecutan dan menurunkan seorang putra yang kelak menggantikannya sebagai Kyai Anglurah Pemecutan VII (1810–1830). Kawasan Padang Luwah dan Buduk dimasukkan ke dalam daerah kekuasaan Badung. Setelah wafat, dia digelari Mur Ring Gedong.

Kyai Anglurah Pemecutan VII tidak memiliki putra sehingga kedua putri raja lantas dinikahkan dengan Kyai Anglurah Gede Oka dari Puri Kanginan Pemecutan.

11. Lihat *Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng ke Bali*, halaman 169.
12. Lihat *Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng ke Bali*, halaman 172–173.
13. Lihat *Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng ke Bali*, halaman 186.
14. Lihat *Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng ke Bali*, halaman 187.

Kemudian Kyai Anglurah Gede Oka diangkat sebagai Kyai Anglurah Pemecutan VIII (1830–1854)[15] menggantikan mertuanya. Puri Kanginan Pemecutan sendiri diwarisi oleh adiknya, Kyai Agung Lanang Pemecutan. Bersamaan dengan itu, mulai timbul benih-benih permusuhan dengan Raja Mengwi yang kerap menutup saluran air irigasi ke Badung. Masalah suksesi kembali melanda Puri Pemecutan karena Kyai Anglurah Pemecutan VIII tidak berputra. Akhirnya, diputuskan bahwa putra Kyai Agung Lanang Pemecutan bernama I Gusti Lanang Pemecutan atau I Gusti Ngurah Agung Pemecutan diangkat sebagai penggantinya bergelar Kyai Anglurah Pemecutan IX (1854–1906)[16].

Relasi dengan kerajaan-kerajaan sekitarnya tetap diupayakan terjalin baik, yang diwujudkan berupa penandatanganan perjanjian persahabatan pada Mei 1893, antara Badung, Gianyar, dan Tabanan. Sebaliknya hubungan dengan Mengwi makin memburuk, terutama karena masalah irigasi. Gaya kepemimpinan Mengwi saat itu memang cenderung memancing konflik dengan tetangganya yang masih ditambah lagi berbagai persoalan dalam negerinya sendiri. Tidak mengherankan bila pamor Mengwi merosot. Badung, Tabanan, Klungkung, dan Bangli bersatu padu menyerang Mengwi dan mengakhiri riwayat kerajaan tersebut pada 1891. Prahara mulai menerpa Kerajaan Badung dengan kandasnya kapal Sri Kumala di pantai Sanur sehingga berujung pada Perang Puputan, yang akan diriwayatkan di bagian tersendiri dalam buku ini.

Menjelang akhir masa pemerintahannya, Kyai Anglurah Pemecutan IX semakin tua dan sakit-sakitan. Oleh karenanya, urusan pemerintahan Badung banyak ditangani oleh I Gusti Ngurah Made Agung (1902–1906) dari Puri Denpasar. Kedua raja ini tewas dalam Puputan Badung, raja Kesiman telah lebih dahulu dibunuh karena pengkhianatan pengikutnya. Seluruh kerabat Puri Pemecutan menemui ajalnya, terkecuali tiga orang bayi yang ditemukan tergeletak di antara tumpukan mayat-mayat. Mereka adalah I Gusti Ngurah Ketut Jegu atau Anak Agung Gede Lanang dan I Gusti Ngurah Gede Pemecutan, yang merupakan putra I Gusti Ngurah Rai dari Puri Kanginan, serta Anak Agung Sagung Adi, putri I Gusti Ngurah Made. Anak Agung Gede Lanang dan Anak Agung Sagung Adi diselamatkan ke desa Munggu. Sementara itu, bayi I Gusti Ngurah Gede Pemecutan ditemukan oleh Ida Bagus Regig dari Geria Bindu, yang kemudian disembunyikan di Jero Gerenceng.

15. Ada sumber lain yang menyatakan bahwa Kyai Anglurah Pemecutan VII digantikan oleh Anak Agung Lanang (1829–1840, dan baru setelah itu digantikan kembali oleh Kyai Anglurah Gede Oka.
16. Lihat *Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng ke Bali*, halaman 191.

Tidak berapa lama berselang, datanglah kaum kerabat Pemecutan yang masih hidup guna menjemput para putra dan putri raja tersebut dari tempat persembunyiannya. Puri Kanginan dibangun kembali secara gotong royong, yang lantas dinamai Puri Agung Pemecutan. Para putra dan putri yang selamat di atas lantas ditempatkan di sana. Kini giliran mereka berjuang mendapatkan pengakuan dari pihak pemerintah kolonial bahwa keluarga Pemecutan beserta purinya masih ada. Upaya ini ditempuh bahkan dengan aksi mogok makan dan berjemur di depan kantor Asisten Residen Bali-Lombok, Denpasar. Perjuangan ini akhirnya membuahkan hasil dan I Gusti Ngurah Gede Pemecutan diangkat sebagai pegawai di kantor asisten residen pada 30 September 1927. Dilakukan berbagai upacara keagamaan guna menyucikan lingkungan mereka setelah dilanda prahara Perang Puputan bertahun-tahun sebelumnya. Puncaknya, pada 28 Oktober 1939, I Gusti Ngurah Gede Pemecutan dikukuhkan sebagai pemuka Puri Pemecutan dengan gelar Ida Cokorda Ngurah Gede Pemecutan (Kyai Anglurah Pemecutan X). Bersamaan dengan acara tersebut, I Gusti Ngurah Ketut Jegu dikukuhkan pula sebagai wakilnya bergelar Anak Agung Gede Lanang.

Setelah meniti karir di kantor pemerintah kolonial, pada 1 Januari 1935 I Gusti Ngurah Gede Pemecutan diangkat sebagai penggawa Distrik Denpasar. Pada 10 April 1942, dia dipindahtugaskan menjadi penggawa Distrik Kuta, jabatan yang dia emban hingga 1947. Setelah itu, dia diangkat menjadi raja atau kepala Swapraja Badung menggantikan Cokorda Alit Ngurah dari Puri Denpasar pada 1 Mei 1947 hingga 28 Agustus 1955.[17] Swapraja Badung dihapuskan pada 1955 dan beralih menjadi kabupaten. Dia dipercaya menjabat sebagai Bupati Badung terhitung mulai 28 Agustus 1955 hingga 30 September 1960.

Puri Pamecutan telah memiliki kedekatan dengan kaum pegerakan semenjak tahun 1930-an. Penguasa puri tersebut, I Gusti Ngurah Gede Pemecutan, pernah membentuk kelompok Ganesha bersama dengan 2 orang Jawa, 1 orang Ambon, dan 1 orang Bali bernama I Nyoman Pegeg guna mendiskusikan karya-karya Soekarno serta Hatta. Kelompok ini kemudian dilarang oleh Belanda pada 1933 dan sebagai gantinya para anggota mendirikan perguruan Taman Siswa di Bali.

17. Lihat *Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng ke Bali*, halaman 201.

Tandu Raja Pamecutan yang Dibuat Sekitar 1905
(Foto koleksi pribadi, diambil di Museum Nasional Indonesia-Jakarta, pada 24 Juli 2010)

I Gusti Ngurah Gede Pemecutan memiliki andil yang besar dalam perjuangan kemerdekaan. Dukungannya bagi kemerdekaan antara lain tampak pada sumbangan logistik yang diberikannya kepada Letkol I Gusti Ngurah Rai melalui Anak Agung Kompyang Tjandri. Kedekatannya dengan para pejuang ini berhasil membebaskan Anak Agung Gede Agung, Raja Gianyar, dan Cokorda Gede Raka Sukawati dari tawanan para pemuda karena dia yakin bahwa kedua tokoh tersebut dapat dimanfaatkan keahliannya dalam berdiplomasi menuju kemerdekaan Indonesia. Penjajah yang hendak menanamkan kembali kekuasaannya setelah kekalahan Jepang melalui serdadu *Nederlandsch Indië Civil Administratie* (NICA) merasa gerah dengan sepak terjangnya sehingga dia ditahan dan diinterogasi di penjara Pekambingan serta dijadikan tahanan politik selama 8 hari di Bali Hotel. Sumbangsihnya dalam bidang kebudayaan tidak boleh dianggap kecil. Semasa baktinya sebagai Bupati Badung, dia berperan besar dalam pendirian Rumah Sakit Sangklah.

Anak Agung Gede Lanang mangkat pada 8 Januari 1962, sedangkan I Gusti Ngurah Gede Pemecutan mangkat pada 17 Maret 1986. Dengan meninggalnya kedua pemuka Puri Pemecutan tersebut, terjadi kekosongan kepemimpinan keluarga besar Pemecutan. Oleh karena itu, setelah melalui beberapa kali pembahasan, Anak Agung Ngurah Manik Parasara, putra tertua Ida Cokorda Ngurah Gede Pemecutan, dilantik sebagai Ida Cokorda Pemecutan XI. Sebagai wakil raja Pemecutan diangkat

Anak Agung Ngurah Made Darmawijaya, putra sulung Anak Agung Gede Lanang. Peristiwa bersejarah bagi Puri Pemecutan ini berlangsung pada 16 Juli 1989 dengan dihadiri para pewaris puri seluruh Bali beserta undangan lainnya. Di era modern ini, Puri Pemecutan tetap melestarikan seni budaya. Salah seorang seniman terkemuka asal Puri Pemecutan adalah I Gusti Ngurah Gede Pemecutan yang terkenal akan seni lukis sidik jarinya.

Sejarah Puri Denpasar

Kyai Anglurah Jambe Ksatria, Raja Badung kelima, menyerahkan kekuasaannya pada I Gusti Ngurah Made Pemecutan pada 1779. Sebelum dibangunnya puri baru, I Gusti Ngurah Made Pemecutan (1779–1813), selaku Raja Badung kelima dan Raja Denpasar pertama, sementara waktu menempati Puri Jambe Satria atau Puri Agung Satria. Puri baru selesai didirikan pada 1788 dan selanjutnya dinamai Puri Agung Denpasar. Dia menikahi janda Kyai Anglurah Jambe Ksatria.[18]

Semasa pemerintahan I Gusti Ngurah Made Pemecutan ini berlangsung kunjungan Kapten van der Wahl pada 1808 yang menandai kontak pertama antara Badung dengan Belanda. Pada kesempatan tersebut I Gusti Ngurah Made Pemecutan bersedia menemui van der Wahl. Perjanjian di antara mereka diadakan pada 28 November 1808. Isinya antara lain menyatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda mengakui Raja Badung tersebut sebagai Susuhunan Bali dan Lombok–gelar yang hingga saat itu hanya diatributkan kepada Raja Klungkung. Hal ini tentunya tidak dapat diterima raja-raja Bali lainnya. Itulah sebabnya, Gubernur Jenderal Daendels lantas mengabaikan perjanjian ini. Akibat perilakunya yang aneh di Badung, van der Wahl lantas ditarik kembali ke Batavia.

Sepeninggal I Gusti Ngurah Made Pemecutan, singgasana Denpasar beralih kepada putra mahkotanya, I Gusti Gede Ngurah Pemecutan (1813–1817), selaku Raja Denpasar kedua. Kerajaan Mengwi menyerang Badung pada 1817, namun dapat dipukul mundur. Dia memerintah hanya empat tahun saja dan setelah mangkat digelari Bhatara Mur Ring Satrya. Ternyata putra mahkota, I Gusti Made Ngurah Pemecutan (1817–1829)–Raja Denpasar ke-3–masih di bawah umur sehingga pamannya dari Puri Kesiman, Kyai Agung Gede Kesiman, diangkat sebagai wali dan semenjak itu bergelar I Gusti Gede Ngurah Kesiman. Oleh sebab itu, Kerajaan Badung kini dipimpin oleh tiga puri secara bersama-sama, yakni Pemecutan, Denpasar, dan Kesiman.

18. Lihat *Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng ke Bali*, halaman 220.

Karena khawatir terhadap ambisi Inggris yang ingin menanamkan pengaruhnya di Kepulauan Nusantara, pemerintah kolonial mengutus H. A. van den Broek mengadakan pembicaraan dengan seluruh raja di Bali dan Lombok berdasarkan dekrit pada 15 Oktober 1817. Rombongan van den Broek yang disertai oleh wakilnya, Roos, beserta sejumlah serdadu Belanda meninggalkan Batavia pada 1 Desember 1817. Van den Broek sendiri pertama-tama ingin menjumpai Raja Buleleng, I Gusti Gede Karangasem karena sebelumnya Raja Buleleng pernah menjalin hubungan dengan pemerintah kolonial ketika Belanda membantu kerajaannya dengan 9.000 pikul beras saat terjadi gagal panen akibat meletusnya Gunung Tambora.[19]

Meskipun demikian, I Gusti Gede Karangasem sedang berada di Jembrana dalam suatu ekspedisi penaklukan. Raja Jembrana sendiri tewas dalam serangan itu. Van den Broek diterima oleh Raja Buleleng pada 24 Desember 1817. Kendati diterima dengan penuh hormat, van den Broek gagal membujuk Raja Buleleng menandatangani perjanjian apapun dengan pemerintah Hindia Belanda. Walau berkeinginan membina hubungan persahabatan yang lebih baik dengan pemerintah kolonial, I Gusti Gede Karangasem berkeras mempertahankan kemerdekaan negerinya. Karenanya, misi van den Broek berujung pada kegagalan.

Kini van den Broek berupaya menjalin kontak dengan Raja Tabanan. Hal ini pun tidak membuahkan apa-apa karena pada detik terakhir, Raja Tabanan memberitahukan ia tak dapat menjumpai utusan Belanda itu. Alasannya, dia harus menghadiri suatu upacara keagamaan penting. Van den Broek memutuskan pergi ke Badung guna menjumpai para penguasanya. Raja Buleleng tidak dapat menyediakan sarana transportasi yang diperlukan sehingga van den Broek terpaksa mengutus wakilnya ke Banyuwangi guna menyewa kapal yang akan membawanya ke Badung. Ketika itu, negeri Badung berada di bawah pemerintahan bersama Kyai Anglurah Pemecutan VII atau Kyai Ngurah Made Pemecutan (1810–1830), I Gusti Gede Ngurah Kesiman (1817–1865), dan I Gusti Made Ngurah Pemecutan (1817–1829).

Yang paling berpengaruh di antara tiga raja Badung di atas adalah Kyai Ngurah Made Pemecutan, van den Broek mengadakan negosiasi dengannya pada 23 Januari 1818. Sikap Badung tampaknya lebih bersahabat ketimbang Buleleng dan Tabanan. Penguasa Badung ini awalnya bersedia menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial serta mengizinkan pembangunan gudang di negerinya yang dijaga oleh 20

19. Lihat *Bali in the 19 th Century*, halaman 16.

pasukan bersenjata. Tetapi ia mencabut kembali izinnya karena khawatir pendirian gudang akan memancing ketidaksenangan raja-raja Bali lain. Guna memperlihatkan keseriusannya menjalin persahabatan dengan Belanda, Badung berencana mengirim utusan ke Batavia sebagai wujud penghormatan terhadap gubernur jenderal.

Hubungan Badung saat itu dengan Raja Klungkung yang menyandang gelar Susuhunan Bali dan Lombok sedang bergejolak. Di samping itu, Badung terlibat peperangan dengan Lombok. Karenanya, Kyai Ngurah Made Pamecutan dengan cerdik memanfaatkan kesempatan ini meminta bantuan militer pemerintah Hindia Belanda dalam melawan Lombok. Ia bahkan mengatakan bahwa kesediaannya membina persahabatan dengan pemerintah Hindia Belanda bergantung pada disetujui atau tidaknya permohonan bantuan tersebut. Demi meyakinkan van den Broek, ditawarkannya suatu konsep perjanjian yang akan ditandatangani oleh dirinya, Gubernur Jenderal van der Capellen, dan Komisioner C.T. Elout. Perjanjian atau kontrak itu berisikan persahabatan antara Belanda dan Badung serta pembentukan pakta pertahanan bersama. Apabila Badung memerlukan bantuan militer, pemerintah Hindia Belanda akan menyediakannya dan begitu pula sebaliknya.

Dibayangi oleh kegagalannya mengadakan perjanjian dengan Raja Buleleng dan Tabanan, van den Broek tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Van den Broek menyepakati konsep ini asalkan disetujui oleh pemerintah kolonial. Ia berjanji akan membujuk pemerintahnya agar menyediakan kapal pengangkut laskar Badung ke Lombok. Janji-janji ini membangkitkan harapan dalam diri Kyai Ngurah Made Pemecutan. Namun, pemerintah Belanda sendiri akhirnya mengabaikan perjanjian itu. Demi menghormati Raja Badung, van den Broek membatalkan kunjungannya ke Klungkung dan Lombok karena kedua negeri tersebut merupakan seteru Badung. Hal ini tentu saja bertentangan dengan perintah yang diemban van den Broek, yakni mengunjungi seluruh raja di Bali dan Lombok tak terkecuali.

Setelah berhasil mengadakan kontak dengan Badung, van den Broek berniat mengunjungi Raja Dewa Manggis V (1814–1839) dari Gianyar. Ia mengirimkan penerjemahnya ke Gianyar pada 1 Februari 1818 dan menyampaikan pesan bahwa ia akan mengadakan kunjungan kehormatan. Tetapi Raja Dewa Manggis V menolak menjumpainya sehingga van den Broek berniat pulang ke Batavia. Raja Gianyar itu sadar bahwa kendati menawarkan persahabatan serta kerja sama dalam hal perdagangan, tujuan pemerintah kolonial yang sebenarnya adalah menguasai negerinya, sebagaimana

yang pernah terjadi dengan Blambangan. Karena itu, Dewa Manggis menolak menerima hadiah apapun yang ditawarkan Belanda. Dewa Manggis menjawab bahwa dibanding Belanda, pedagang Cina lebih baik; mereka mengunjungi tempat-tempat yang jauh hanya semata-mata untuk berdagang. Hal ini bertolak belakang dengan orang-orang Eropa yang dibalik kedok berdagang berupaya menanamkan kekuasaan politisnya dan bila perlu dengan kekerasan.[20]

Van den Broek merasa terhina mendengar jawaban ini dan berniat membatalkan kunjungannya ke Gianyar. Tetapi Raja Kyai Ngurah Made Pemecutan buru-buru mencegahnya. Ia merasa bahwa persekutuannya dengan Belanda perlu mendapatkan dukungan Raja Gianyar. Ia membujuk van den Broek dengan mengatakan bahwa barangkali penerjemah salah memahami apa yang dimaksud Raja Dewa Manggis. Kyai Ngurah Made Pemecutan yang memiliki hubungan baik dengan Dewa Manggis meminta agar Raja Gianyar itu bersedia menerima van den Broek.

Akhirnya, van den Broek berkunjung ke Gianyar pada 7 Februari 1818. Raja Dewa Manggis V yang ketika itu telah berusia 60 tahun menerimanya dengan ramah, tetapi menolak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan politik. Dapat disimpulkan kunjungan van den Broek tidak mendatangkan banyak manfaat. Pada 9 Februari, van den Broek menerima utusan Mengwi yang menyatakan bahwa Raja Mengwi bersedia menerimanya. Demikianlah, pada 16 Februari tibalah van den Broek di Mengwi.

Rakyat Mengwi baru kali itu melihat orang kulit putih sehingga secara spontan tertawa dan bertepuk tangan. Hal ini semata-mata timbul atas dasar sikap ingin tahu mereka. Kendati demikian, van den Broek salah paham dan menyangka mereka berniat menghinanya. Ketika van den Broek mengadukan ini kepada Raja Mengwi, ia tidak menanggapinya secara serius sehingga menimbulkan kemarahan dalam diri orang Belanda tersebut. Pembicaraan dengan Raja Gusti Made Agung dari Mengwi tidak berjalan baik. Ketika bersiap meninggalkan Mengwi, kembali van den Broek menghadapi kerumunan masyarakat yang bersorak-sorak. Karena tak dapat menahan amarahnya lagi, van den Broek memerintahkan agar para pengikutnya menakuti-nakuti rakyat dengan senjatanya. Raja Mengwi merasa kecewa dengan hal ini karena merasa bahwa rakyatnya tak bermaksud memperlihatkan penghinaan ataupun sikap permusuhan.

---

20. Lihat *Bali in the 19 th Century*, halaman 21.

Misi yang diemban van den Broek ini boleh dikatakan gagal. Pemerintah kolonial tak bersedia mengirimkan bala bantuannya ke Badung sehingga mengecewakan Raja Kyai Ngurah Made Pamecutan. Lama kelamaan Raja Badung itu membuang muka terhadap van den Broek. Uang yang dimiliki utusan pemerintah kolonial itu makin menipis dan beberapa pengikutnya jatuh sakit serta meninggal. Tidak ada alasan bagi van den Broek tinggal lebih lama di Badung sehingga ia kembali ke Jawa pada 24 Juni 1818.

Singgasana Puri Denpasar beralih kepada I Gusti Gede Ngurah Pemecutan (1829–1848) atau I Gusti Gede Ngurah Denpasar. Upacara pembakaran jenazah yang diadakan oleh Raja Denpasar keempat ini bagi almarhum ayahnya merupakan upacara terbesar dibandingkan kegiatan-kegiatan serupa sebelumnya. Waktu itu, I Gusti Gede Ngurah Kesiman tidak bersedia melepaskan kedudukannya sebagai wali raja karena merasa bahwa jabatan itu berlaku seumur hidupnya, dan terus turut serta mengendalikan roda pemerintahan Badung. Salah seorang putra angkat Raja Denpasar yang merasa kurang puas dengan hal itu, menantang I Gusti Gede Ngurah Kesiman melakukan perang tanding, tetapi ia kalah dan terbunuh. Masih pada masa pemerintahan Raja Denpasar keempat ini, Kuta makin ramai sebagai kota niaga pada 1839 seorang pedagang Denmark bernama Mads Lange membuka kantor perwakilan dagangnya atas seizin Raja Badung. Bahkan, ia dipercaya memangku jabatan sebagai syahbandar di Kuta.

Sepeninggal I Gusti Gede Ngurah Pemecutan, putranya yang bernama I Gusti Alit Ngurah Pemecutan (1848–1902), tampil sebagai Raja Denpasar ke-5.[21] Beberapa peristiwa penting yang terjadi pada zaman I Gusti Alit Ngurah Pemecutan adalah runtuhnya Mengwi (1891) dan sebagian wilayahnya digabungkan dengan Badung. Peranan I Gusti Gede Ngurah Kesiman masih besar terutama dalam berhubungan dengan pihak luar dan pedagang asing. I Gusti Alit Ngurah Pemecutan tewas diracun oleh seorang dukun. Seharusnya yang berhak menggantikannya adalah putranya yang bernama I Gusti Alit Ngurah. Namun, karena belum cukup usianya, yang menggantikan sebagai Raja Denpasar keenam adalah saudara tiri almarhum, I Gusti Ngurah Made Agung (1902–1906).[22] Semenjak masa mudanya, ia merupakan sosok yang rajin belajar sehingga memiliki pengetahuan luas dalam bidang kesusastraan.

21. Lihat *Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng ke Bali*, halaman 225.
22. Lihat *Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng ke Bali*, halaman 227.

Pemerintah kolonial Belanda saat itu sedang bergiat meluaskan daerah kekuasaannya ke seluruh penjuru Kepulauan Nusantara, termasuk Bali Selatan. Ambisi penjajah itu akhirnya terwujud ketika sebuah kapal bernama Sri Kumala kandas di perairan Sanur. Belanda memanfaatkan hal ini untuk menekan Badung agar bersedia takluk pada keinginannya. Namun, raja-raja Badung menolak dengan tegas sehingga pecahlah Puputan Badung. Tiga serangkai raja Badung seluruhnya tewas akibat keangkaramurkaan penjajah. Kerajaan Badung lalu diperintah langsung oleh pemerintah kolonial.

Kemenakan I Gusti Ngurah Made Agung, I Gusti Alit Ngurah, selamat dari prahara Puputan Badung karena diungsikan ke desa Kerobokan bersama ibunya, Anak Agung Ayu Ketut Ngurah. Pemerintah kolonial Belanda mengasingkannya yang ketika itu masih berusia 11 tahun ke Lombok pada 17 Januari 1907. Selama pengasingannya di Lombok, dia beserta kerabat dan pengiringnya berdiam di Taman Mayura, yakni bekas istana raja Mataram yang ketika itu telah dikalahkan oleh pemerintah kolonial. Berkat perjuangan para tokoh seperti I Gusti Putu Gria dan Ida Pedanda Kelingan, dia dikembalikan ke Bali pada 1 Oktober 1917.

Setibanya kembali di Bali, Belanda menawarkannya pekerjaan sebagai mandor yang bertugas menangani pembuatan jalan dan fasilitas lainnya. Karena hasil kerjanya yang cukup baik, pemerintah kolonial mengangkatnya sebagai juru tulis di kantor asisten residen dengan gaji fl20 (1920). Kariernya makin menanjak yang terbukti dengan pengangkatannya sebagai mantri polisi pada 24 Februari 1925. Ketika itu, gajinya juga dinaikkan menjadi fl50. Akhirnya, pada 1929 dia diangkat sebagai *regent* (bupati) Badung, dengan gaji fl800 dan uang jalan fl125. Sebagai tempat kediamannya, dibangunlah Puri Satria yang kini terletak di Jalan Veteran.

Bersamaan dengan itu, bangkit semangat kebangsaan di kalangan masyarakat Bali. Berbagai sekolah dan perkumpulan didirikan demi memperbaiki nasib rakyat. Pemerintah kolonial memang memberikan kebebasan dalam berorganisasi, namun melakukan pengawasan ketat. I Gusti Alit Ngurah (Cokorda Alit Ngurah) memberikan dukungan kuat bagi perkumpulan semacam itu, bahkan dia menyediakan berbagai sarana agar rapat-rapat organisasi kebangsaan dapat diselenggarakan. Dia bahkan menjadi anggota perkumpulan Bali Darma Laksana–organisasi yang bertujuan utama mengembangkan kebudayaan Bali dan menyediakan pendidikan dasar bagi masyarakat Bali, didirikan pada 1936–dan mengizinkan pendapa puri dijadikan

tempat penyelenggaraan kongres Bali Darma Laksana kedua.[23] Tidak hanya Bali Darma Laksana saja yang dia dukung, melainkan juga berbagai organisasi lain, seperti Perkumpulan Putri Bali Sadar, Persatuan Guru-Guru Denpasar, dan Taman Siswa. Selain itu, dalam bidang pendidikan, dia menyediakan pula tempat bagi kegiatan belajar mengajar.

Pemerintah kolonial memutuskan memulihkan kembali kedudukan raja-raja di Bali dan membentuk sistem *zelfbestuur* (swapraja). Pemulihan ini diiringi pula oleh pemberian gelar bagi Raja Swapraja Badung berupa gelar *Cokorda*. I Gusti Alit Ngurah yang kemudian digelari Cokorda Denpasar diambil sumpahnya di Pura Besakih pada 30 Juni 1938. Sebagai wakil pemerintah kolonial, hadir Residen J. Caron. Meski telah diangkat sebagai kepala swaparaja, I Gusti Alit Ngurah tetap memperlihatkan penentangannya terhadap pemerintah kolonial. Hal ini terbukti dari seringnya dia tidak masuk kantor sehingga terpaksa dicari oleh petugas pemerintah ke purinya.[24] Dia merupakan pendukung gigih perjuangan kemerdekaan RI, yang terbukti dari dilangsungkannya pembentukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) pimpinan I Gusti Ngurah Rai di Puri Satria pada November 1945. Dia menduduki jabatan sebagai Kepala Swapraja Badung hingga pensiun pada 1 Mei 1947. Semenjak saat itu jabatan Kepala Swapraja atau Raja Badung dipegang oleh Ida Cokorda Ngurah Gede Pemecutan.

Putranya, Cokorda Ngurah Agung, dilahirkan pada 20 Februari 1917, tak berapa lama setelah ayahnya tiba kembali dari pengasingan. Dia mengenyam pendidikan di HIS dan melanjutkan menuntut ilmu di MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) Yogyakarta dan MOSVIA (*Middelbare Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren*) Magelang. Meskipun demikian, dia meninggalkan dunia pendidikan pada 1941 dan memasuki dunia kemiliteran. Peran serta aktifnya bagi perjuangan kemerdekaan tampak nyata dari keikutsertaannya dalam pembentukan TKR di Puri Satria. Bersama I Gusti Putu Merta, dia mendirikan PARRINDO (Partai Rakyat Indonesia) selaku wadah bagi kaum intelektual memperjuangkan kemerdekaan. Karena pengaruhnya yang makin mengakar di Bali, pemerintah kolonial sepakat melarang PARRINDO dan menjebloskan Cokorda Ngurah Agung ke dalam tahanan NICA. Pemerintah kolonial bahkan membujuk Cokora Ngurah Agung agar bersedia menghentikan aktifitasnya

23. Lihat *Cokorda Alit Ngurah: Dari Pembuangan di Lombok Sampai Revolusi Fisik di Bali (1907–1950)*, halaman 77-78.
24. Lihat *Cokorda Alit Ngurah: Dari Pembuangan di Lombok Sampai Revolusi Fisik di Bali (1907–1950)*, halaman 80.

dan menawarkan jabatan menggiurkan dalam pemerintahan NIT (Negara Indonesia Timur). Kendati demikian, dia dengan tegas menolaknya.

Cokorda Ngurah Agung dipindahkan ke Singaraja, namun di sana dia justru turut serta mendirikan PNI (Partai Nasional Indonesia). Itulah sebabnya, pemerintah kolonial memindahkannya lagi ke Denpasar. Raja Denpasar kedelapan yang banyak berjuang demi negerinya ini mangkat pada 29 April 1998. Putra Mahkota Cokorda Ngurah Mayun Samirana, S.H. dinobatkan sebagai Raja Denpasar kesembilan pada 25 November 2005.

Sejarah Puri Kesiman

Sebelum berdirinya Puri Gede Kesiman, telah ada Puri Pemayun Kesiman yang didirikan oleh I Gusti Ngurah Mayun atau Nararya Anglurah Mayun (Pemayun), putra kedua Raja Pemecutan ketiga. Dia ditugaskan ayahnya mengamankan kawasan timur kerajaan yang kerap terjadi tindak kejahatan. Sebagai pegangan, dia diserahi keris pusaka I Cekle. Sewaktu terjadi kekosongan di Puri Pemayun Kesiman, atas kesepakatan Raja Denpasar dan Pemecutan, Kyai Agung Gede Kesiman diizinkan menempatinya. Namun, belakangan para ahli waris yang merasa berhak, menuntut puri itu kembali. Demi menghindari konflik, Kyai Agung Gede Kesiman membangun lagi puri baru di sebelah baratnya dan dinamai Puri Gede Kesiman (sekitar 1800).

Keikutsertaan Kyai Agung Gede Kesiman (I Gusti Gede Ngurah Kesiman) dalam pemerintahan Kerajaan Badung diawali oleh mangkatnya I Gusti Gede Ngurah Pemecutan, Raja Denpasar kedua, pada 1817. Ketika itu, putra mahkota bernama I Gusti Ngurah Made Pemecutan masih kanak-kanak sehingga Kyai Agung Gede Kesiman ditunjuk sebagai walinya.[25] Kerajaan Badung pada saat itu dalam keadaan makmur dan menjalin perdagangan dengan mancanegara.

Setelah kegagalan misi-misi sebelumnya, Belanda kembali tertarik mengadakan hubungan dengan para raja Bali dan Lombok pada 1830-an. Kemerdekaan kerajaan-kerajaan Bali memungkinkan mereka mengadakan hubungan dagang langsung dengan Singapura yang dikuasai Inggris. Oleh sebab itu, Pieter Markus, anggota Dewan Hindia berargumen bahwa Inggris akan dengan mudah menapakkan kakinya di Bali dan Lombok. Mengingkat kedekatan Bali dengan Jawa–pusat pemerintahan Hindia Belanda–tentunya hal ini amat membahayakan. Kemerdekaan para raja-raja di Bali dan Lombok harus segera diakhiri. Gubernur Jenderal Jacque de Eerens menugaskan

25. Lihat *Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng ke Bali*, halaman 260.

Huskus Koopman menjalin komunikasi dengan para raja tersebut dan menerapkan politik kolonial yang baru.

Belum lama berselang, perusahaan dagang Belanda (*Factorij*) di Batavia mengirimkan wakilnya bernama C.A. Grandpré Molière menjajaki peluang usaha di Bali dan Lombok. Pada 28 November 1838, ia meninggalkan Surabaya menuju Bali dengan menumpang kapal Ondernemer. Ia tinggal di Bali hingga 1 Januari 1839 dan setelah itu meneruskan perjalanannya ke Lombok. Misi yang diemban oleh Molière ini cukup berhasil. I Gusti Gede Ngurah Kesiman bersedia meminjamkan sebidang tanah tempat membangun kantor perwakilan *Factorij*. Raja Klungkung bahkan menawarkan bantuan rakyatnya dalam membangun kantor perwakilan dagang di Pelabuhan Kusamba, sebelah tenggara ibu kota Klungkung. Relasi Molière dengan Dewa Agung Klungkung begitu hangat sehingga ia tidak ragu-ragu meminta hadiah dari Molière berupa badak yang masih hidup. Hewan langka itu akan dijadikan persembahan dalam upacara keagamaan yang akan dipimpin oleh Raja Klungkung sendiri.

Factorij memerintahkan agennya bernama Boele Schurman membuka kantor perwakilan dagang sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya dengan raja-raja Bali. Bersama dengan kapal Blora yang ditumpanginya dibawa pula badak hidup sebagai hadiah bagi Dewa Agung Klungkung. Permasalahan timbul manakala kapal berlabuh di pelabuhan Badung, tak seorangpun bersedia membantu Schurman menurunkan binatang tersebut. Ternyata hal ini dipicu oleh permusuhan yang masih berlangsung antara Badung dan Klungkung. I Gusti Gede Ngurah Kesiman kesal karena Dewa Agung memperoleh hadiah yang diinginkannya, sedangkan dirinya hanya memperoleh pemberian yang tak seberapa nilainya.

Terlepas dari semua itu, I Gusti Gede Ngurah Kesiman mengizinkan pembangunan kantor perwakilan dagang di Kuta dengan ketetentuan bangunan itu tak dikelilingi tembok serta tidak begitu berbeda arsitekturnya dengan rumah penduduk sekitarnya. Demikianlah, Schurman ditempatkan sebagai wakil perusahaan dagang Belanda di Kuta dan bertugas hingga 1 November 1840. I Gusti Gede Ngurah Kesiman akhirnya memperkenankan pendirian tembok batu di sekeliling kantor dan hak menggunakan tanahnya selama masih diperlukan.

Mangkatnya Raja Pemecutan menjadikan I Gusti Gede Ngurah Kesiman figur terpenting di Badung. Huskus Koopman untungnya berhasil menjalin relasi yang baik dengannya. Kendati demikian, Huskus Koopman membutuhkan waktu lama dan

harus mengerahkan seluruh kemampuan diplomatisnya demi meyakinkan penguasa Kesiman tersebut agar bersedia menandatangani perjanjian dengan Belanda.

Raja-raja Bali sangat menjunjung tinggi kemerdekaan dan kedaulatan negerinya. Mereka akan mengerahkan segenap jiwa raga demi mempertahankannya. Karena itu, dalam merumuskan suatu perjanjian, Koopman dengan hati-hati menghindari isu yang sensitif mengenai pengakuan atas pertuanan pemerintah Hindia Belanda karena hal ini pasti tak akan diterima oleh para raja tersebut. Dengan cerdik Koopman memanfaatkan tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat Bali. Sudah menjadi kebiasaan apabila seseorang menganggap orang lain sebagai sahabatnya ia akan mengatakan bahwa rumah, sawah, dan segenap harta miliknya adalah juga milik kawannya itu. Sebaliknya, kawannya juga akan mengatakan hal yang sama. Tentu saja, ungkapan ini hanya bersifat basa-basi dan tak memiliki kekuatan hukum apapun.

Memanfaatkan tradisi persahabatan ini, Koopman merumuskan kalimat bahwa para raja di Badung menyatakan negeri mereka sebagai milik pemerintah Hindia Belanda. Para penguasa Badung menyangka bahwa ini hanya ungkapan basa-basi sebagai tanda persahabatan semata antara dua belah pihak dan tak memiliki kekuatan hukum apapun sehingga tanpa curiga menandatanganinya pada 26 Juli 1841 di istana Raja Kesiman. Mereka tak menyadari maksud Koopman sesungguhnya dan yang terpenting bagi pemerintah kolonial para penguasa Badung secara implisit telah mengakui kekuasaan mereka. Butir-butir lainnya, seperti kewajiban mengibarkan bendera Belanda di pelabuhan yang disinggahi kapal-kapal Belanda, larangan mengibarkan bendera negara lainnya, kesediaan memberikan bantuan saat pemerintah kolonial dilanda peperangan, dan lain sebagainya diterima tanpa keberatan oleh raja-raja Badung tersebut. Dengan demikian, secara hukum kolonial, Badung telah jatuh ke dalam cengkeraman Belanda.

Hubungan dengan Belanda memburuk ketika kapal *Overijsel* milik Belanda terdampar di pantai Kuta pada 29 Juli 1841. Sesuai dengan adat penduduk setempat yang menganut Tawan Karang (tawan artinya 'rampasan', karang berarti 'tanah'. Hukum ini menyebutkan bahwa segala eksistensi asing yang masuk ke pulau Bali dengan tidak sesuai prosedur [terdampar atau terkatung-katung] otomatis menjadi milik warga Bali), mereka merampas isi kapal. Untungnya para awak kapal selamat semuanya dan diamankan ke kantor dagang milik *Factorij* serta Mads Lange. Huskus Koopman memprotes tindakan ini kepada I Gusti Gede Ngurah Kesiman yang

memerintahkan rakyatnya agar mengembalikan barang-barang yang dirampas. Kendati demikian, mereka menolaknya karena menurut tradisi, seorang raja tidak dapat mencampuri hak Tawan Karang tersebut. Akibatnya, ia tak dapat melakukan tindakan apa-apa sehubungan dengan persoalan yang baru saja terjadi. Tindakan yang dipandang sebagai perampokan ini mengguncangkan pemerintah kolonial di Batavia.

Gubernur Jenderal Pieter Markus memanggil pulang Huskus Koopman. Setibanya di istana Bogor, gubernur jenderal dengan tegas memarahi Koopman karena lalai menyebutkan Tawan Karang dalam berbagai perjanjiannya dengan raja-raja Bali. Koopman memberitahu Markus bahwa para raja Bali tak mempunyai wewenang menghapus adat yang telah diwarisi para penduduk pantai dari leluhurnya itu. Kendati demikian, gubernur jenderal tak bersedia mendengar penjelasan apapun lagi. Ia menginstrusikan Koopman agar segera kembali ke Bali dan memaksa para rajanya menandatangani perjanjian mengenai Tawan Karang.

Sebenarnya, raja-raja Klungkung, Buleleng, dan Karangasem telah siap menandatangani perjanjian serupa dengan yang pernah ditandatangani oleh Badung. Hanya saja pasal-pasalnya tidak mencakup Tawan Karang. Sesudah para raja menandatangani perjanjian di atas, barulah Koopman berencana membujuk mereka menyepakati penghapusan Tawan Karang. Huskus Koopman mulanya merasa bawa tugasnya ini sungguh sulit, tetapi di luar dugaan raja-raja Bali menyetujui penghapusan adat Tawan Karang. Raja-raja Badung, yakni I Gusti Ngurah Kesiman dari Puri Kesiman, I Gusti Gede Ngurah Pemecutan-Raja Denpasar keempat (1829–1848), dan Kyai Anglurah Pemecutan VIII (1830–1854) dari Puri Pemecutan menandatangani perjanjian ini pada 28 November 1842. Meskipun demikian, perjanjian ini terbukti tidak efektif karena sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, para raja sesungguhnya tak berwenang mencampuri hak rakyatnya tersebut.

Meski Raja Denpasar telah dewasa, I Gusti Gede Ngurah Kesiman tak bersedia meletakkan jabatannya sebagai wali raja. Akibatnya, timbul ketidakpuasan di kalangan kerabat Puri Denpasar. Tokoh yang paling berpengaruh di Badung tersebut mangkat pada 1865. Penggantinya di Puri Kesiman adalah kemenakannya,I Gusti Ngurah Ketut (1865–1875), yang tidak lagi menjabat wali raja, melainkan sebagai pembantu raja. Penggantinya adalah putranya yang bernama I Gusti Ngurah Agung (1875–1890), yang digantikan kembali oleh I Gusti Ngurah Mayun (1890–1906).

Sementara itu, Raja Pamecutan sudah tua dan lemah. Karenanya, Raja Denpasar, I Gusti Ngurah Made Agung, Raja Denpasar keenam (1902–1906), tampil sebagai tokoh terkemuka di Badung. Semasa pemerintahannya, timbul insiden dengan pemerintah Belanda yang dipicu oleh kandasnya kapal Sri Kumala. Pemerintah kolonial menuduh penduduk pantai telah merampas muatan kapal itu berdasar dengan adat Tawan Karang. Lebih jauh lagi, Belanda menuduh Badung tidak bersungguh-sungguh menerapkan janjinya menghapus tradisi tersebut dan meminta ganti rugi.

Raja I Gusti Gede Ngurah Denpasar menolak tuduhan tersebut dengan tegas dan tidak bersedia membayar ganti rugi. Pertikaian ini makin meruncing dan berakhir dengan Puputan Badung (1906) yang akan diulas pada bagian tersendiri. Karena tidak menyetujui perlawanan terhadap penjajah, Ida Brego menikam I Gusti Ngurah Mayun. Rakyat yang menyaksikan pembunuhan tersebut lantas menghabisi Ida Brego. Setelah terjadinya peristiwa itu, kerabat Kesiman mengosongkan purinya sehingga dimanfaatkan oleh serdadu kolonial sebagai markas. Penyerangan lalu dilanjutkan ke Puri Denpasar dan Pemecutan. Dengan demikian, jatuhlah Kerajaan Badung ke tangan penjajah.

Pengganti I Gusti Ngurah Mayun adalah putranya, I Gusti Ngurah Made Kesiman. Dia pernah menduduki jabatan sebagai penggawa Kesiman. Sepeninggalnya, Puri Kesiman diwarisi oleh putranya, I Gusti Ngurah Aung Kusuma Yuda, yang aktif juga dalam perjuangan. Penggantinya adalah putranya yang bernama I Gusti Ngurah Gede Kusumawardana, yang terkenal giat memajukan serta melestarikan seni budaya Bali.[26]

26. Lihat *Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng ke Bali*, halaman 270.

Istana Pemecutan (I)

Istana Pemecutan (II)

Istana Pemecutan (III)

Foto Bersama Antara Penulis (Berpakaian Hitam)
Dengan Paduka Yang Mulia Cokorda Pemecutan XI

Foto Bersama Antara Penulis (Berpakaian Hitam) Dengan Yang Mulia
Bapak Ngurah Putra Selaku Kerabat Puri Pemecutan

II. BANGLI

Kerajaan Bangli terletak di Kabupaten Bangli kini. Keluarga penguasa kerajaan ini masih kerabat Tamanbali dan Nyalian. Sebelumnya, Bangli diperintah oleh Kyai Anglurah Praupan. Konon semasa pemerintahannya, terdapat dua orang penjaga istana Tamanbali yang terlambat bertugas sehingga dijatuhi hukuman. Hukuman itu adalah perintah membunuh Raja Bangli. Sebenarnya, hukuman semacam ini sama saja dengan hukuman mati; karena bila berhasil mereka akan dibunuh oleh para pengawal raja, sedangkan bila gagal mereka juga akan menemui ajalnya. Meskipun demikian, kedua orang abdi Tamanbali ini tidak berani menjalankan tugasnya dan justru menyerahkan diri kepada Kyai Anglurah Praupan yang ketika itu sedang memimpin persidangan.

Setelah diinterogasi oleh Kyai Anglurah Praupan, mereka berdua menceritakan duduk permasalahan mereka. Raja Bangli itu lalu menawarkan jika mereka berhasil menghabisi nyawa tuan mereka maka seisi Tamanbali boleh menjadi milik mereka. Dengan senang hati kedua penjaga itu menerima dan menyanggupi tawaran Kyai Anglurah Praupan. Setelah dijamu dan dibekali persenjataan, kembalilah mereka dengan diam-diam ke Tamanbali.

Mereka menyelinap ke peraduan I Dewa Gede Tangkeban di Tamanbali. Namun, ia mencium bau manusia dan segera mencabut senjatanya sehingga mereka tidak jadi masuk. Salah seorang penjaga itu keluar dan terjadilah perang tanding di antara mereka. I Dewa Gede Tangkeban berhasil menewaskannya. Saat ia masuk kembali ke kamarnya, penjaga yang satunya lagi segera keluar menabraknya. Kembali terjadi perang tanding sehingga raja Tamanbali terluka bahunya. Meskipun demikian, penjaga kedua ini juga berhasil dibinasakan. Luka I Dewa Gede Tangkeban tidak kunjung sembuh hingga ia wafat. Dia digantikan oleh putra mahkotanya, I Dewa Gede Anom Teka.[27]

I Dewa Gede Anom Teka berniat membalas dendam kepada Kyai Anglurah Praupan dan mengirimkan pasukan ke Bangli. Setelah melalui pertempuran yang dashyat, gugurlah Kyai Anglurah Praupan. Dengan demikian, jatuhlah Bangli ke tangan Tamanbali. Salah seorang putra I Dewa Gede Tangkeban bernama I Dewa Prasi lantas diangkat sebagai penguasa Tamanbali.

27. Lihat *Babad Ksatrya Taman Bali*, halaman 25-26.

Sementara itu, sumber lainnya[28] menyebutkan bahwa salah seorang putra I Dewa Anam (Raja Tamanbali) bernama I Dewa Gde Perasi atau I Dewa Gde Den Bencingah pindah ke Bangli dan mendirikan istananya di Bencingah. Ia kemudian bertakhta sebagai raja di Bangli. Ia digantikan oleh putranya. I Dewa Gde Batur Den Bencingah. Selanjutnya, I Dewa Gde Batur Den Bencingah berputra I Dewa Gde Batumadeg yang mempunyai dua orang anak laki-laki, yakni I Dewa Gde Temaja Dhanuh Den Bencingah dan I Dewa Ktut Raka.

I Dewa Gde Temaja Dhanuh Den Bancingah mempunyai putra I Dewa Gde Putra Dhanuh Den Bencingah, yang menjadi Raja Bangli berikutnya. Ia mempunyai seorang putri bernama I Dewa Ayu Den Bencingah, yang menggantikan ayahnya sebagai Ratu Bangli. Semasa pemerintahannya, Kerajaan Nyalian ditaklukkan oleh Klungkung. Putra mahkota Nyalian, I Dewa Kuat, dilarikan oleh ibunya ke Bangli dan selanjutnya diangkat anak oleh Ratu Bangli. Putra mahkota yang melarikan diri ini kelak menjadi Raja Bangli berikutnya dan semenjak saat itu, raja-raja Bangli juga bergelar I Dewa Gede Tangkeban. Pasukan Bangli terkenal keberaniannya dan demikian pula dengan kaum wanitanya. Kerajaan ini pernah terlibat pertikaian dengan Gianyar, Klungkung, dan Mengwi.

Sementara itu, silsilah yang dibuat Prof. Hans Hägerdhal menyebutkan bahwa Dewa Gede Prasi yang juga disebut Dewa Ngurah Den Bancingah merupakan putra Sang Angga Tirtha. Ia digantikan oleh putranya, Dewa Putra Prasi. Selanjutnya, Dewa Putra Prasi digantikan oleh putranya, Dewa Kompiang Prasi. Putri Dewa Kompiang Prasi bernama Dewa Ayu Den Bancingah menjadi Ratu Bangli.[29] Silsilah ini tampaknya dibuat berdasarkan buku karya Drs. I Nyoman Singgih Wikarman.[30] Dalam sumber tersebut disebutkan bahwa I Dewa Perasi diangkat sebagai Raja Bangli pada 20 Februari 1575. Gelar *abhiseka* (pemberkatan khusus) adalah I Dewa Gde Den Bancingah. Putra mahkotanya bernama I Dewa Perasi Putra bergelar I Dewa Putra Den Bancingah, ia merupakan Raja Bangli kedua. Putranya bernama I Dewa Kompiang Perasi naik takhta sebagai Raja Bangli ketiga dengan gelar I Dewa Danu Den Bancingah. Selanjutnya, putrinya, I Dewa Ayu Den Bancingah, menduduki singgasana sebagai penguasa Bangli keempat. Raja wanita ini kemudian menikah dengan I Dewa Anom Rai dari Tamanbali. Pernikahan mereka tidak dikaruniai anak.

28. Lihat *Mengenal Leluhur dari Dunia Babad*, halaman 201–202.
29. Lihat *Kerajaan2 Nusantara*, halaman 31.
30. Lihat *Leluhur Orang Bali dari Dunia Babad dan Sejarah*, halaman 98.

I Dewa Anom Rai konon mampu mengetahui rahasia orang lain berkat roh seseorang bernama Pan Mongsor. Arwah Pan Mongsor menjadi abdi I Dewa Anom Rai sesudah dibunuh dan darahnya ditampung dalam periuk yang diletakkan di bawah tempat tidur I Dewa Anom Rai. Setelah beberapa lama menikah dengan I Dewa Ayu Den Bancingah, I Dewa Anom Rai menikahi seorang selir berkasta sudra. Hubungan mereka makin mesra sehingga I Dewa Ayu Den Bancingah tersisih. Inilah yang memicu kecemburuan Ratu Bangli tersebut. I Dewa Ayu Den Bancingah berniat menghabisi nyawa I Dewa Anom Rai, namun sebelumnya meminta pendapat kaum brahmana terlebih dahulu. Bertanyalah ia hukuman apa yang sekiranya pantas ditimpakan kepada orang yang menyerobot rumah orang lain. Salah seorang di antara mereka menjawab bahwa menurut kitab Sastra Adigama orang itu layak dijatuhi hukuman mati. Kendati demikian, tak seorang pun di antara mereka mengetahui siapakah "penyerobot rumah" yang sebenarnya dimaksud I Dewa Ayu Den Bancingah itu.

Dengan bantuan seorang dukun yang mahir aji *sasirep* (ilmu menidurkan), I Dewa Ayu Den Bancingah menidurkan seluruh penghuni istana dan bergegas menikam I Dewa Anom Rai dengan keris pusakanya bernama Ki Dompo. Berakhir sudah hidup I Dewa Anom Rai. Bersamaan dengan kurun waktu tersebut, Kerajaan Nyalian menemui kehancurannya, tetapi salah seorang putra Nyalian bernama I Dewa Kuat berhasil diselamatkan ke Bangli dan diangkat anak oleh I Dewa Ayu Den Bancingah. Ketika itu timbul peperangan antara Bangli dengan Tamanbali yang dibantu Gianyar.

Pemicu pertikaian antara Bangli dan Tamanbali adalah saling serobot pelatih tari-tarian. Di samping itu, Raja Tamanbali memang berambisi memperluas wilayahnya. Demi mewujudkan keinginannya menguasai Bangli, Raja Tamanbali meminta bantuan Klungkung. Kendati demikian, Raja Klungkung tidak mendapati kesalahan Raja Bangli sehingga ia enggan menurunkan pasukannya. Itulah sebabnya, Raja Tamanbali lantas menghadap Raja Gianyar dan menawarkan sebagian daerah Bangli bila mereka berhasil menguasainya. Gianyar setuju membantu Tamanbali dan mengirimkan pasukannya. Bangli berhasil dikalahkan dan Ratu I Dewa Ayu Den Bancingah melarikan diri ke Gunung Kehen.

Raja Tamanbali berniat menghabisi sisa-sisa pasukan Bangli di Gunung Kehen dan berpamitan kepada Raja Gianyar yang dimintanya menjaga ibu kota Bangli. I Dewa Ayu Den Bancingah membangkitkan semangat pengikutnya bertempur melawan musuh hingga titik darah penghabisan. Mereka segera kembali ke Istana

Bangli dan menghadapi pasukan Gianyar. Dengan demikian, Raja Tamanbali tidak berhasil menyongsong musuhnya di Gunung Kehen. Gianyar berhasil dikalahkan dan bahkan panglima perangnya bernama Cokorda Mas terbunuh. Setibanya di Puri Kehen, Raja Tamanbali beserta pengikutnya mendapati bahwa tempat itu sudah kosong. Tidak lama kemudian disaksikannya asap di sebelah selatan ibu kota Bangli. Ia menjadi marah dan menyangka Raja Gianyar telah menipunya.

Bergegas Raja Tamanbali kembali ke Istana Bangli, tetapi ia tak menjumpai seorang pun prajurit Gianyar karena mereka telah dikalahkan oleh I Dewa Ayu Den Bancingah. Bertambah marahlah Raja Tamanbali karena mengira telah dikhianati oleh Gianyar. Bersamaan dengan itu, datanglah utusan dari Guliang yang melaporkan kedatangan pasukan Klungkung. Raja Tamanbali salah menyangka bahwa pasukan Klungkung berniat menyerang dirinya dan memberikan perintah agar pengikutnya melawan habis-habisan. Padahal kedatangan pasukan Klungkung itu bermaksud menjumpai Raja Gianyar. Pada kesempatan tersebut, pasukan Tamanbali menewaskan putra Raja Klungkung.

Hal ini memancing kemarahan Klungkung, dan rajanya segera menitahkan agar Gianyar dan Bangli bersiap-siap menghabisi Tamanbali. Dengan demikian, sekutu telah berbalik menjadi lawan. Tamanbali akhirnya dihancurleburkan pada 1809 dan segenap hartanya diangkut ke Bangli.

I Dewa Kuat menjadi Raja Bangli menggantikan I Dewa Ayu Den Bancingah dengan gelar I Dewa Gede Tangkeban II (± 1815–1833). Para penggantinya di singgasana Bangli secara berturut-turut adalah Dewa Gede Tangkeban III (Dewa Gede Besakih, 1833–1875), Dewa Gede Oka (1875–1880), Dewa Gede Ngurah (1881–1892), Dewa Gede Cokorda (Dewa Gede Anom Oka, 1894–1911), Dewa Gede Rai (1913–1925), Dewa Gede Taman (1925–1930), dan Anak Agung Ketut Ngurah (1931–1950).

Kerajaan Buleleng yang berniat menebarkan pengaruhnya, menganeksasi wilayah di sekitar Batur milik Bangli. Itulah sebabnya, Raja Dewa Gede Tangkeban III menganggap Raja Buleleng sebagai musuh bebuyutannya dan menantikan saat tepat membalaskan dendamnya.[31] Momen itu tiba ketika Buleleng terlibat pertikaian dengan pemerintah kolonial akibat penerapan adat Tawan Karang terhadap kapal-kapal Belanda yang terdampar di Sangsit dan Perancak. Raja Bangli mengirim surat

31. Lihat *Bali in the 19th Century*, halaman 63.

kepada gubernur jenderal yang isinya menyatakan bahwa negerinya ingin menjaga hubungan baik dengan pemerintah kolonial. Ia meminta pula perlindungan terhadap serangan musuh yang kuat (dalam hal ini adalah Buleleng).

Ketika Perang Jagaraga pecah antara Buleleng-Karangasem melawan Belanda. Raja Bangli mengutus wakilnya menemui Jenderal Michiels dan meminta izin menduduki kawasan Batur demi mencegah tempat strategis tersebut dipergunakan membangun kubu pertahanan oleh Patih Jelantik. Keinginan ini disetujui oleh sang jenderal karena dengan demikian Buleleng beserta Karangasem akan makin terjepit kedudukannya. Pada pertemuan 26 April 1849, masih di tengah-tengah suasana berkecamuknya perang, Raja Dewa Gede Tangkeban meminta izin merebut kembali wilayahnya yang diduduki oleh Buleleng, Gianyar, dan Mengwi. Permintaan ini pun dikabulkan oleh Michiels. Pemimpin pasukan Belanda bahkan menawarkan gelar Susuhunan Bali dan Lombok–gelar ekslusif Raja Klungkung–kepada Dewa Gede Tangkeban III apabila Dewa Agung Klungkung (sekutu Buleleng dan Karangasem) berhasil ditumbangkan. Kendati merasa tersanjung dengan tawaran itu, Dewa Gede Tangkeban menolaknya karena khawatir memancing ketidaksenangan raja-raja Bali lainnya. Di samping itu, hubungan dengan Raja Gusti Gede Ngurah Kesiman dari Badung akan terpengaruh karenanya. Dengan demikian, Belanda membatalkan tawaran di atas.

Gianyar menaklukkan Payangan yang merupakan daerah pengaruh Bangli pada 1854. Menantu Raja Bangli yang merupakan kepala daerah Payangan terbunuh sehingga memicu permusuhan serius antara Bangli dan Gianyar yang baru berakhir ketika Bali berada di bawah pemerintahan langsung pemerintah Hindia Belanda di awal abad 20.

III. BULELENG

a. Cikal Bakal Kerajaan Buleleng

Kerajaan Buleleng ini kini terletak di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Cikal bakal kerajaan ini adalah seorang tokoh bernama Ki Barak Panji, putra Dalem Seganing, Raja Gelgel, dengan seorang wanita bernama Si Luh Pasek (Ni Pasek Panji).[32] Wanita ini berasal dari Desa Panji (daerah Den Bukit) yang menghamba sebagai *penyeroan* (dayang) di istana Raja Dalem Seganing. Ketika Si Luh Pasek sedang mengandung, ia diserahkan kepada abdi raja bernama Arya Jelantik Bogol sebagai

32. Lihat *Sejarah Perang Jagaraga*, halaman 18.

balas jasa atas kesetiaannya. Raja berpesan agar wanita itu jangan dinikahi sebelum anak yang dikandungnya lahir dan apabila telah dilahirkan ia hendaknya dianggap sebagai anak sendiri oleh Arya Jelantik Bogol.[33] Hal ini disambut dengan suka cita oleh Arya Jelantik Bogol karena memang dari perkawinannya yang terdahulu ia belum dikaruniai keturunan.

Raja Dalem Seganing menyambut gembira kelahiran putranya yang diberi nama Ki Barak Panji itu. Tetapi karena khawatir bahwa ia akan menjadi saingan bagi putra mahkota yang kelak menggantikannya sebagai Raja Gelgel, setelah dewasa Ki Barak Panji diperintahkan oleh Dalem Seganing pindah ke desa asal ibunya di daerah Den Bukit. Ki Barak Panji ditugaskan oleh raja mengamankan kawasan tersebut yang masih kerap dilanda keonaran. Sebagai tanda kasih sayang raja terhadap putranya itu, ia menganugerahkan keris pusaka beserta perlengkapan lainnya dan dua orang pengiring setia yang masing-masing bernama Ki Dumpiung dan Ki Dosot. Di desa yang terletak di kawasan Den Bukit terdapat seorang penguasa dan jagoan lokal bernama Pungakan Gendis. Konon ia sangat ditakuti oleh warga sekitar dan gemar menyabung ayam. Pungakan Gendis menghina Ki Barak Panji sehingga timbul perang tanding antara keduanya. Ternyata dalam perkelahian tersebut Pungakan Gendis tewas di tangan Ki Barak Panji. Pengganti Pungakan Gendis, Ki Bendesa Gendis, memiliki kepribadian yang lemah sehingga akhirnya kekuasaan Ki Barak Panji makin besar saja.

Keharuman nama Ki Barak Panji makin tersohor ke mana-mana sehingga akhirnya seluruh kawasan Den Bukit tunduk di bawah kekuasaannya. Ki Barak Panji diangkat sebagai raja dan semenjak saat itu, ia memakai gelar I Gusti Ngurah Panji. Daerah kekuasaannya makin luas dan akhirnya ia membangun pusat pemerintahan di Sukasada. Selain itu, ia mendirikan juga kompleks istana di atas bekas ladang jagung gembal, yang disebut *beleleng.*[34] Kemungkinan inilah yang menjadi asal muasal nama Buleleng. Kompleks bangunan yang didirikan I Gusti Ngurah Panji tersebut dinamai Singajara, sebagai lambang keberaniannya. I Gusti Ngurah Panji memiliki pasukan yang kuat dan tangguh sehingga disebut Taruna Gowak. Wilayah Buleleng dengan cepat meluas hingga ke Jembrana dan Blambangan. Oleh karenanya, raja pertama Buleleng ini juga disebut Panji Sakti atau I Gusti Ngurah Panji Sakti.

---

33. Lihat *Babad Buleleng* 3b, halaman 3.
34. Lihat *Sejarah Perang Jagaraga*, halaman 19.

Setelah I Gusti Ngurah Panji mangkat, ia digantikan oleh putranya, I Gusti Ngurah Panji Gede. Namun, urusan pemerintahan dijalankan oleh adiknya yang bernama I Gusti Ngurah Panji Made. Dengan demikian, boleh dikatakan Buleleng kini diperintah oleh dua orang bersaudara ini. Bersamaan dengan itu, pengaruh Mengwi makin besar di Buleleng. Ketika era keduanya berakhir, singgasana Buleleng beralih pada I Gusti Ngurah Panji Bali, putra I Gusti Ngurah Panji Made. Karena mencintai kedua putranya, Raja I Gusti Ngurah Panji Bali mengangkat mereka semua sebagai *yuwaraja* (putra mahkota). Ketika raja mangkat, keduanya menjadi raja, yakni I Gusti Ngurah Panji yang berkedudukan di Sukasada dan adiknya, I Gusti Ngurah Jelantik, di Singaraja. Masing-masing berambisi menjadi raja seluruh Buleleng dan melenyapkan saingannya. Dengan demikian, terpecahlah Buleleng menjadi dua.

Raja Bliling
(Bliling di sini Tampaknya Adalah Buleleng)
Sumber: *History of the Indian Archipelago, vol III*

b. Perkembangan Kerajaan Buleleng

Demi menyingkirkan saingannya, I Gusti Ngurah Jelantik meminta bantuan Karangasem. Ia berjanji bila kakaknya yang memerintah di Sukasada dapat dikalahkan, sebagian pajak Buleleng akan disetorkan kepada Karangasem, sedangkan urusan pemerintahan akan ditangani bersama. Raja Karangasem bersedia memberikan bantuannya sehingga pada 1804, I Gusti Ngurah Panji dapat dikalahkan dan semenjak saat itu Buleleng diperintah bersama oleh I Gusti Ngurah Jelantik dan

Raja Karangasem, I Gusti Gede Karangasem. Raja I Gusti Ngurah Jelantik sempat melancarkan serangan terhadap Jembrana yang saat itu dikuasai oleh seorang kapten Bugis bernama Patini.

Setelah I Gusti Ngurah Jelantik wafat, Buleleng dengan sendirinya jatuh ke tangan Karangasem. Masuknya Buleleng ke dalam pengaruh Karangasem ini menandai akhir hegemoni Mengwi atas Buleleng. Raja I Gusti Gede Karangasem kini menjadi penguasa atas Buleleng (1806–1818). Sementara itu, putra I Gusti Ngurah Jelantik yang bernama I Gusti Ngurah Jelantik Banjar diangkat sebagai patih di Bangkang. Raja Buleleng berikutnya yang berasal dari garis keturunan Karangasem, Dewa Pahang atau I Gusti Pahang (1818–1823), gemar bertindak sewenang-wenang dan melanggar adat. Keturunan I Gusti Ngurah Panji Sakti kerap menderita karena kebengisan raja ini. Oleh karenanya, dengan disertai rakyat dan para pengikutnya mereka berniat memberontak terhadap raja.

Para bangsawan Buleleng keturunan I Gusti Ngurah Panji Sakti berniat mengadakan perlawanan saat berlangsungnya pertunjukan wayang kulit di istana. Namun, Dewa Pahang telah mencium terlebih dahulu rencana ini dan mengadakan gerakan pembersihan. Seluruh bangsawan, baik berasal dari Puri Sukasada maupun Singaraja, yang ditengarai terlibat dalam gerakan ini terancam dihabisi nyawanya. Karenanya, banyak di antara mereka yang melarikan diri ke Tabanan atau Badung. Pada 1823 karena kebengisan Dewa Pahang, Raja Karangasem bernama I Gusti Lanang Paguyangan, berniat menjatuhkannya dan menyatukan Buleleng dengan Karangasem. Karenanya, I Gusti Lanang Paguyangan lalu menyiapkan pasukannya menggempur Buleleng. Kendati demikian, Dewa Pahang telah mengetahui rencana tersebut dan menghadang pasukan Karangasem. Pertempuran pecah di Desa Bukti dan pasukan Karangasem menderita kekalahan sehingga I Gusti Lanang Paguyangan terpaksa mengundurkan diri ke Desa Selat. Meskipun demikian, Dewa Pahang menjadi mabuk kemenangan dan menyatakan di hadapan pengikutnya bahwa dirinya merupakan raja terhebat di muka bumi. Ia bahkan bertindak lebih jauh dengan menikahi saudarinya sendiri bernama I Gusti Ayu Gabrug, yang merupakan tindakan terlarang. Akibatnya, para pengikutnya merasa muak dan meninggalkannya. Kesempatan ini dipergunakan oleh I Gusti Lanang Paguyangan membalas kekalahannya. Akhirnya, Dewa Pahang berhasil dibunuh.[35]

35. Lihat *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 58.

Raja Buleleng berikutnya adalah I Gusti Ngurah Made Karangasem Sori (1823–1825). Dalam menjalankan pemerintahannya, ia didampingi oleh patihnya bernama I Gusti Ketut Jelantik Gingsir (Gusti Ketut Jelantik). Patih yang bijaksana dan berpandangan luas ini juga merupakan keturunan raja-raja Karangasem. Ia berjuang memulihkan kondisi Buleleng yang terpecah belah akibat ulah Raja I Gusti Pahang. Desa-desa yang tidak mau tunduk karena kebengisan raja terdahulu dipersatukan kembali ke dalam Kerajaan Buleleng. Bangsawan-bangsawan di Puri Sukasada dan Singaraja dipersatukannya pula. Berkat upayanya ini, Kerajaan Buleleng menjadi lebih kuat.

Selanjutnya, yang berkuasa di kerajaan ini adalah Ngurah Made Karangasem (1825–1849), salah seorang pangeran yang berasal dari Karangasem serta masih pula kerabat Kerajaan Mengwi. Bersamaan dengan itu, Belanda yang diwakili Huskus Koopman berniat menanamkan pengaruhnya di Bali karena khawatir terhadap Inggris. Menyusul Badung yang telah mengadakan perjanjian dengan Belanda, Raja Buleleng menandatangani kontrak serupa pada 26 November 1841. Perjanjian ini diperbaharui pada 8 Mei 1843, yang kini memasukkan janji Raja Buleleng menghapuskan hukum Tawan Karang. Pada 1844, beberapa kapal berbendera Belanda terdampar di pantai Sangsit (Buleleng Timur) dan Perancak. Para penduduk pantai melaksanakan adat Tawan Karang dengan merampas muatan kapal sesuai dengan hak mereka secara turun-temurun. Janji penghapusan Tawan Karang itu tak berlaku efektif karena raja-raja Bali tak mempunyai hak menghapuskannya. Tetapi pemerintah kolonial yang tak mengetahui fakta ini menuduh Raja Buleleng telah lalai menepati janjinya. Kurang lebih bersamaan dengan kurun waktu tersebut, kapal Atut Rahman yang berbendera Belanda kandas di pantai Karangasem dan mengalami nasib sama.

Pemerintah Hindia Belanda turun tangan secepatnya menyelesaikan masalah tersebut. Gubernur Jenderal J. C. C. Reijnst mengutus Asisten Residen Banyuwangi, J. Ravia de Ligny, menjumpai Raja Buleleng dan membujuknya memperbaharui perjanjian serta mengumpulkan informasi mengenai kapal-kapal Belanda yang dijarah penduduk. Tetapi Raja Buleleng sama sekali tak bersedia menerimanya. Setelah beberapa waktu berada di Buleleng tanpa mendapatkan kepastian apapun, serta khawatir akan keselamatan jiwanya, Ligny bergegas meninggalkan tempat itu. Menghadapi kegagalan ini, gubernur jenderal mengirim misi berikutnya pada awal Mei 1845. Kali ini yang ditugaskan adalah pejabat dengan pangkat lebih tinggi, yakni

Residen Besuki, J.F.T. Mayor. Dalam rombongannya turut pula Pangeran Syarif Hamid Alkadrie, saudara Sultan Pontianak yang tinggal di Jakarta; Raden Tumenggung Ario Prawiro Adiningrat, bupati Besuki; dan kepala penghulu Besuki. Pangeran Syarif Hamid Alkadrie ditunjuk sebagai penerjemah dalam misi Belanda itu. Kedatangan J.F.T. Mayor dimaksudkan pula menganalisis kekuatan militer Buleleng serta mencari tempat pendaratan yang tepat seandainya agresi terhadap Buleleng hendak dilancarkan.

Guna menekan Raja Buleleng, rombongan menumpang kapal perang Bromo yang tiba pada 5 Mei 1845. Kali ini Raja Ngurah Made Karangasem bersedia menerima delegasi pemerntah kolonial dan menjadwalkan pertemuan pada 8 Mei 1845. Hadir pula Patih Gusti Ketut Jelantik yang bersikap anti-Belanda. Ia menyadari bahwa tujuan Belanda menyodorkan berbagai perjanjian adalah semata-mata menguasai kerajaan-kerajaan di Bali. Patih Gusti Ketut Jelantik tak sudi menerima penghapusan kedaulatan negerinya, kendati demikian ia tidak sanggup mencegah rajanya menandatangani perjanjian terdahulu. Dalam pertemuan yang dilangsungkan dengan wakil Belanda, Mayor menjelaskan tujuan kedatangannya. Ia menanyakan mengapa Raja Buleleng tak bersedia menerima Ligny serta meminta penjelasan masalah penjarahan terhadap kapal-kapal Belanda yang kandas di Perancak dan Sangsit.

Raja menjelaskan bahwa saat kedatangan Ligny ia sedang sakit dan ketika kondisinya membaik ternyata Asisten Residen Banyuwangi itu sudah pergi tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Sehubungan dengan kapal yang terdampar, Raja Buleleng bersedia memberikan ganti rugi sebesar 800 Rixdollar. Tetapi ketika tiba pembicaraan masalah kontrak atau perjanjian, timbul perbedaan pandangan yang tajam dengan Patih Jelantik. Saat Mayor menanyakan mengenai naskah perjanjian yang pernah ditandatanganinya, Gusti Ngurah Made Karangasem menjawab bahwa ia lupa di mana telah meletakkan dokumen itu atau barangkali telah dikirimkan kepada Raja Klungkung selaku Susuhunan Bali dan Lombok.

Patih Jelantik tak dapat menahan dirinya lagi dan dengan penuh amarah mencerca para utusan Belanda itu. Ia mengepalkan tinju di dadanya dan berkata bahwa semua ini merupakan hal yang tak masuk akal. Bagaimana mungkin Belanda hanya berbekalkan selembar kertas hendak menguasai negeri orang lain? Selama dirinya masih hidup hal semacam ini tak mungkin terjadi, namun setelah dia wafat apa yang hendak dilakukan raja adalah haknya sendiri. Nasib Buleleng hanya dapat ditentukan oleh ujung keris.[36]

---

36. Lihat *Bali in the 19th Century*, halaman 66.

Raja Ngurah Made Karangasem cuma menganggukkan kepala saja mendengar ucapan dramatis patihnya. Sementara itu, rakyat yang menyaksikan dan mendengarkan pertengkaran itu dari luar menjadi gelisah serta merangsek maju, tetapi untungnya tak terjadi insiden apapun. Keadaan memanas dan Mayor menyarankan penundaan pertemuan yang ditolak oleh Raja Buleleng. Dengan demikian, perundingan berujung pada kegagalan.

J.F.T. Mayor masih mencoba meminta raja agar menulis surat kepada gubernur jenderal mengenai pandangannya terhadap kontrak. Raja Ngurah Made Karangasem menampiknya dengan alasan bahwa selaku ketua delegasi yang bertanggung jawab melaporkan hasil pertemuan seharusnya adalah Mayor sendiri. Pada 10 Mei 1845, Mayor beserta rombongannya bertolak kembali ke Jawa. Gagalnya perundingan mendorong pemerintah Belanda melancarkan agresinya yang kelak dikenal sebagai Perang Jagaraga. Perang ini akan diulas dalam suatu bagian tersendiri. Peperangan ini berakhir dengan kekalahan Buleleng beserta sekutu-sekutunya; Karangasem dan Klungkung. Patih Jelantik yang gagah berani itu tak diketahui lagi rimbanya, walaupun dapat dipastikan bahwa ia gugur di tengah kancah pertempuran mempertahankan kedaulatan negerinya.

Setelah kejatuhan Buleleng, sebagai balas jasa atas bantuan Bangli terhadap Belanda, pemerintah kolonial menghadiahkan Buleleng kepada Bangli. Namun, Raja Dewa Gede Tangkeban menyerahkannya kembali kepada Belanda pada1854. Pemerintah kolonial menerapkan pemerintahan secara langsung di Buleleng dan seorang asisten residen ditempatkan di sana. Belanda lantas menunjuk salah seorang keturunan Panji Sakti bernama Gusti Made Rahi (1849–1853) sebagai penguasa Buleleng. Ia digantikan oleh Gusti Ngurah Ketut Jelantik (1854–1873) yang pada 20 Desember 1860 diangkat sebagai *regent* (bupati) Buleleng. Belum lama menduduki jabatannya, Gusti Ngurah Ketut Jelantik sudah harus menghadapi cobaan berupa pemberontakan sekelompok brahmana yang dipimpin oleh Ida Made Rai. Pergolakan ini begitu seriusnya sehingga memaksa pemerintah kolonial mengirimkan pasukannya ke Buleleng pada pertengahan 1868.

Gusti Ngurah Ketut Jelantik berusaha memperlihatkan kesetiaannya kepada pemerintah kolonial. Kendati demikian, ia terlibat pula permasalahan dengan pemerintah kolonial dan dituduh menyebarkan kebencian terhadap Belanda. Itulah sebabnya, ia dicopot dari kedudukannya dan diasingkan ke Sumatera Barat pada

1872. Semenjak saat itu, pemerintahan dipegang langsung oleh orang-orang Belanda. Raja Buleleng baru dipulihkan dengan pengangkatan Anak Agung Putu Jelantik (1929–1944) pada 1929, yang digantikan secara berturut-turut oleh oleh Anak Agung Nyoman Panji Tisna (1944–1948) dan Anak Agung Ngurah Ketut Jelantik (1948–1950). Setelah itu berlangsung penghapusan berbagai daerah swapraja, yang dengan demikian mengakhiri Kerajaan Buleleng.

Pura Durga di Buleleng
Sumber: Dreimaal *Dwars Door Sumatra En Zwerftochten Door Bali, Bladz. WW*

IV. GIANYAR

a. Cikal Bakal Kerajaan Gianyar

Kerajaan Gianyar kini terletak di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Gianyar memiliki wilayah yang subur dan cocok bagi kegiatan pertanian. Gianyar pada umumnya menjalin hubungan yang baik dengan Badung, umpamanya saat terjadi pertikaian dengan Klungkung. Kelak, saat Badung terlibat perang dengan Mengwi, Gianyar juga membantunya sehingga turut memperoleh bagian berupa wilayah Mengwi. Cikal bakal raja-raja Gianyar adalah seorang tokoh bernama Dewa Manggis (juga dikenal sebagai Dewa Manggis Kuning atau Dewa Manggis I). Menurut *Babad Manggis* Gianyar, ia adalah putra Dalem Seganing, Raja Gelgel. Konon, suatu kali raja sedang berburu di sekitar desa Manggis, yang terletak 20 kilometer sebelah timur ibu kota kerajaan. Raja terpesona oleh seorang putri desa yang cantik jelita,

dan dari pernikahan mereka lahirlah seorang anak yang kemudian diasuh di Istana Gelgel. Putra tersebut kemudian tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan menarik. Disamping itu karena kepribadiannya yang peramah, ia disenangi oleh para sahabatnya.

Menurut sumber lainnya, Dalem Seganing ketika itu sedang menghadiri upacara keagamaan *Memungkah Agung*, yang diselenggarakan di Pura Indrakila, Desa Manggis. Dia tertarik dengan seorang gadis cantik bernama Ni Desak Ayu Gedong, putri I Dewa Gedong Artha.[37] Pernikahan ini kemudian membuahkan seorang putra bernama I Dewa Anom Kuning karena kulitnya yang berwarna kekuning-kuningan. I Dewa Anom Kuning ini juga disebut Dewa Manggis Kuning.

Ketika Gusti Tegeh Kori, penguasa daerah Badung, menghadap Dalem Seganing, ia tertarik kepada anak muda itu dan memohon kepada Raja Gelgel agar diizinkan membawanya ke Badung. Gusti Tegeh Kori berniat menjadikan Dewa Manggis Kuning sebagai penggantinya apabila ia mangkat kelak. Raja Dalem Seganing menyetujuinya. Dengan demikian, berangkatlah Gusti Tegeh Kori bersama Dewa Manggis Kuning ke Badung. Ternyata, para istri Gusti Tegeh Kori jatuh cinta dan mencoba merayu Dewa Manggis Kuning. Setelah terjadi perselingkuhan dengan salah satu istri Gusti Tegeh Kori, Dewa Manggis Kuning terancam dibunuh sehingga terpaksa melarikan diri ke desa Penatih, di dekat Kesiman, sebelah timur Kabupaten Badung sekarang. Gusti Tegeh Kori tidak tinggal diam dan memerintahkan para anak buahnya mengejar pemuda tersebut. Berkat pertolongan Kepala Desa Penatih bernama Gusti Pahang Penatih, Dewa Manggis berhasil melarikan diri kembali, kendati tempat kediaman mereka telah dikepung pasukan Badung. Bahkan Gusti Pahang Penatih rela menyerahkan putrinya, Gusti Ayu Pahang, menyertai Dewa Manggis Kuning dalam pelariannya.

Berdasarkan sumber lainnya, perselingkuhan tersebut hanya fitnahan pihak-phak yang iri dengan keberhasilan Dewa Manggis Kuning (I Dewa Anom Kuning). Gusti Tegeh Kori termakan hasutan tersebut dan berniat membunuh Dewa Manggis Kuning.[38]

Setelah berhari-hari berjalan menerobos semak belukar, Dewa Manggis Kuning beserta Gusti Ayu Pahang tiba di Hutan Bengkel. Mereka membangun

37. Lihat *Sejarah Gianyar dari Jaman Prasejarah Sampai Masa Baru-Modern*, halaman 235.
38. Lihat *Sejarah Gianyar dari Jaman Prasejarah Sampai Masa Baru-Modern*, halaman 237. Disebutkan pula bahwa hasutan tersebut berhasil memengaruhi Gusti Tegeh Kori karena mereka menggunakan Ilmu Aji Chala.

tempat kediaman darurat dan keduanya kemudian menikah. Kaum pedagang yang biasanya membawa barang dagangannya dengan *pengalu* (kuda) tertarik menetap bersama mereka. Sehingga lambat laun tempat kediaman mereka menjadi sebuah perkampungan dengan Dewa Manggis Kuning dianggap sebagai pemimpinnya.

Kurang lebih pada pertengahan abad 17, Kryan Agung Maruti–Patih Kerajaan Gelgel–merebut kekuasaan dari tangan Raja Dalem Dimade, putra Dalem Seganing. Dalem Dimade sesungguhnya merupakan saudara Dewa Manggis Kuning dari lain ibu. Dalem Dimade terpaksa melarikan diri dan meninggal dalam pengasingannya di Desa Guliang. Putra raja, I Dewa Agung Jambe, beserta kaum kerabatnya menantikan saat yang tepat untuk mengusir Kryan Agung Maruti. Akhirnya, I Dewa Agung Jambe beserta sekutu-sekutunya berhasil mengumpulkan kekuatan dan mengalahkan Kryan Agung Maruti. Tak ketinggalan pula Dewa Manggis Kuning beserta kaum pengikutnya turun membantu I Dewa Agung Jambe yang masih terhitung kemenakannya itu. Atas jasa dan keberaniannya dalam menumbangkan Kryan Agung Maruti, I Dewa Agung Jambe yang berhasil merebut singgasananya kembali, menganugerahkan hadiah kepada Dewa Manggis Kuning berupa 100 orang pengikut. Karena itu, jumlah pengikut Dewa Manggis Kuning bertambah 100 orang lagi.

Kabar mengenai kegagahberanian Dewa Manggis Kuning ini terdengar oleh penguasa Buleleng bernama Gusti Panji Sakti. Rasa cemburu bangkit dalam hati Panji Sakti karena menganggap bahwa Dewa Manggis Kuning adalah saingannya. Ia segera memimpin pasukannya guna mengalahkan Dewa Manggis Kuning di Hutan Bengkel. Dewa Manggis Kuning beserta pengikut-pengikutnya tidak gentar menghadapi kedatangan bala tentara Buleleng yang tak sedikit jumlahnya dan dipimpin sendiri oleh Gusti Panji Sakti dengan menunggang gajah. Dalam pertempuran yang dashyat, tombak sakti milik Dewa Manggis Kuning berhasil melukai alis gajah tunggangan Gusti Panji Sakti sehingga hewan tersebut roboh dan tewas. Menyaksikan kedigdayaan tombak Dewa Manggis Kuning, pasukan Buleleng lari tunggang-langgang.

Tombak sakti yang berhasil melukai alis gajah serta membunuhnya itu kemudian dikenal dengan nama Baru Alis dan menjadi pusaka Kerajaan Gianyar hingga sekarang. Kekalahan pasukan Buleleng ini makin menambah karisma Dewa Manggis Kuning. Pernikahan antara Dewa Manggis Kuning dengan Gusti Ayu Pahang dikaruniai seorang putra benama Dewa Manggis Pahang (Dewa Manggis II) yang kelak menggantikan ayahnya. Ia kemudian digantikan lagi oleh putranya bernama Dewa

Manggis Bengkel (Dewa Manggis III). Saudara-saudara Dewa Manggis Bengkel ini lalu berpencar dan mencari tempat huniannya masing-masing serta mendirikan desa Abiannbase dan Bitera. Mereka selanjutnya menjadi leluhur kaum bangsawan yang mendiami Puri Abianbase dan Bitera.

Dewa Manggis Bengkel menikah dengan putri Raja Tamanbali. Putra tertuanya bernama Dewa Manggis Jorog (Dewa Manggis IV). Ia memindahkan pusat pemerintahannya ke suatu kawasan yang terletak dua kilometer di sebelah selatan Desa Beng. Dengan bantuan Raja Tamanbali, pada 1770 dibangunlah sebuah istana dan diberi nama Geriya Anyar (Tempat Kediaman Baru). Inilah yang menjadi asal mula nama Gianyar. Dewa Manggis IV pindah ke sana pada 1771. Istana yang baru ini menjadi tempat kediaman raja-raja Gianyar berikutnya. Dewa Manggis Jorog meluaskan wilayah kekuasaannya hingga ke sebelah barat dan utara Gianyar sekarang. Dengan demikian, kewibawaannya makin meningkat sehingga ia akhirnya dianggap sebagai seorang raja dan dijuluki pula Dewa Manggis Sakti.

b. Perkembangan Kerajaan Gianyar

Dewa Manggis IV memerintah dalam kurung waktu 43 tahun (1771–1814 atau sumber lain menyatakan 1771–1788). Ia kemudian digantikan oleh putranya Dewa Manggis di Madia (Dewa Manggis V, memerintah 1814–1839 atau 1788–1839). Setelah mangkat, putranya yang bergelar Dewa Manggis di Rangki (Dewa Manggis VI, memerintah 1839–1847) naik takhta menggantikannya. Pemberian gelar anumerta (kenaikan pangkat atau gelar yang diberikan kepada orang yang sudah meninggal) ini dikarenakan dia wafat di salah satu bagian istana Gianyar yang disebut Palebahan Rangki. Penggantinya adalah Dewa Manggis Mantuk di Satria atau Dewa Manggis VII (1847– 892).

Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Gianyar menghadapi cobaan berat karena dimusuhi oleh kelima kerajaan lainnya, yakni Klungkung, Bangli, Badung, Tabanan, dan Mengwi. Permusuhan ini diprakarsai oleh Raja Klungkung yang ingin menguasai Gianyar. Guna menyelesaikan permasalahan ini, Raja Dewa Manggis VII menghadap Raja Klungkung pada 1885. Tetapi rombongan Dewa Manggis VII dicegat di Desa Banjarangkang oleh sekutu Raja Klungkung dan mereka semua ditawan serta diasingkan ke sebuah desa bernama Satria, sebelah timur Klungkung. Semenjak saat itu, Gianyar diduduki oleh Klungkung dan Bangli. Sementara itu, Raja Dewa Manggis VII tetap berada dalam pengasingannya hingga wafat pada 1892.

Kedua putra Dewa Manggis VII yang masing-masing bernama Dewa Pahang dan Dewa Gede Raka beserta anggota keluarganya berhasil meninggalkan tempat pengasingan mereka dan kembali ke Gianyar pada 1893. Salah seorang pengikut setia keluarga kerajaan Gianyar, yakni penggawa Ubud yang bernama Cokorda Gede Sukawati, tetap mempertahankan kedaulatannya ketika Gianyar dikuasai oleh Klungkung beserta Bangli. Berkat dukungan Cokorda Gede Sukawati, Gianyar berhasil mengusir pasukan Klungkung dan Bangli dari negeri mereka. Dengan demikian, Gianyar kembali menjadi kerajaan yang berdaulat di bawah pimpinan Dewa Pahang (1893–1896). Tetapi, ia tak lama memerintah dan mangkat pada 1896. Kedudukannya sebagai Raja Gianyar digantikan oleh Dewa Gede Raka (1896–1913), yang melangsungkan upacara penobatannya sebagai Raja Dewa Manggis VIII pada 1903.

Permusuhan dengan Klungkung tidak berhenti karena Raja Klungkung masih berambisi menaklukkan Gianyar. Peperangan dengan Klungkung yang dibantu oleh Bangli, Badung, dan Tabanan, tampaknya tak terelakkan lagi. Raja Dewa Manggis VIII beserta para penggawanya tidak tahan lagi menyaksikan penderitaan rakyat akibat perang berkepanjangan. Itulah sebabnya, Kerajaan Gianyar lantas mendekati pemerintah Hindia Belanda dan melalui Residen F.A. Liefrinck mengajukan permohonan menempatkan negeri tersebut di bawah payung perlindungan Belanda. Permintaan Raja Dewa Manggis VIII ini disetujui oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda sehingga semenjak 8 Maret 1900 dinyatakan bahwa Kerajaan Gianyar berada di bawah kekuasaan langsung pemerintah kolonial. Raja Dewa Manggis VIII dinyatakan sebagai *stedehouder* atau wakil pemerintah Hindia Belanda di Gianyar. Melalui penetapan ini, kerajaan-kerajaan yang memusuhi Gianyar tidak berani lagi melancarkan serangannya karena dengan menyerang Gianyar berarti memancing perseteruan dengan Belanda. Kendati berada di bawah pemerintahan langsung Belanda, sesungguhnya tatanan di Kerajaan Gianyar tidak banyak berubah. Raja Dewa Manggis VIII tetap dianggap sebagai penguasa tertinggi di kerajaannya.

Raja Dewa Manggis VIII mengajukan permohonan berhenti sebagai *stedehouder* pada Januari 1913 dan digantikan oleh putranya, Dewa Ngurah Agung (Ide Anak Agung Ngurah Agung, memerintah pada 1913–1943). Berbeda dengan ayahnya, Ide Anak Agung Ngurah Agung tidak diberi gelar sebagai *stedehouder* oleh pemerintah Hindia Belanda, melainkan *regent* (bupati) saja. Meskipun demikian, pengertian *regent*

di sini berbeda dengan bupati-bupati lain di wilayah kekuasaan Hindia Belanda, yang semata-mata pegawai pemerintah kolonial. Pada 1917 terjadi gempa bumi yang dahsyat di Pulau Bali sehingga merobohkan banyak rumah penduduk beserta bangunan pura; Istana Gianyar tidak luput dari musibah ini. Raja Dewa Ngurah Agung dibebani tanggung jawab membangun kembali bangunan istana yang roboh karena gempa ini. Pembangunan kembali Puri Gianyar tidak mengubah denah aslinya, hanya saja raja mendirikan bangunan yang lebih besar dan megah dibandingkan sebelumnya.[39].

Semasa pemerintahan Raja Anak Agung Ngurah Agung, organisasi de Utrechtse Zendinggenootschap dalam rangka misi penyebaran Agama Kristen Protestan berniat mendirikan sebuah sekolah rendah (Hollands Inlandse School - HIS) di Bali. Sebelumnya, sejak abad 19 organisasi ini memang aktif mengirimkan para pendetanya ke Bali, namun upaya mereka tidak membuahkan hasil. Oleh karenanya, guna menarik masyarakat mereka kini berencana mendirikan suatu institusi pendidikan, sebagaimana yang baru saja disinggung di atas. Kebijaksanaan de Utrechtse Zendinggenootschap ini diketahui oleh para pemuka masyarakat Bali termasuk Raja Anak Agung Ngurah Agung. Raja merasa bahwa pendirian sekolah semacam ini mengancam kedudukan agama Hindu di Bali. Dengan demikian, dia berupaya menggagalkannya dengan mendekati para raja Bali serta tokoh-tokoh keagamaan lainnya. Mereka kemudian bersatu padu dan mengumpulkan dana guna mendirikan sendiri sekolah rendah tersebut. Rencana pendirian sekolah ini diajukan pada pemerintah kolonial yang segera menyetujuinya. Berkat dana patungan dari segenap lapisan masyarakat di atas, sebuah sekolah rendah (HIS) berhasil didirikan di Klungkung dengan menempati areal istana Kerajaan Klungkung. Sekolah ini kemudian disebut Neutrale Hollands Inlandse School, yang menandaskan bahwa institusi pendidikan ini tidak didasari oleh agama apapun, dan setiap lapisan masyarakat boleh memasukinya tanpa memandang keyakinan yang dianutnya. Itulah sebabnya, sekolah ini juga dinamakan *Siladarma* (filsafat tata hidup yang toleran).[40]

Dalam memoirnya berjudul Lihat *Kenangan Masa Lampau: Zaman Kolonial Hindia Belanda dan Zaman Pendudukan Jepang di Bali*, Ide Anak Agung Gde Agung, putra Raja Anak Agung Ngurah Agung, menguraikan bahwa ayahnya merupakan

39. Lihat *Kenangan Masa Lampau: Zaman Kolonial Hindia Belanda dan Zaman Pendudukan Jepang di Bali*, halaman 13.
40. Lihat *Kenangan Masa Lampau: Zaman Kolonial Hindia Belanda dan Zaman Pendudukan Jepang di Bali*, halaman 22.

seorang tokoh berkepribadian kuat dan tak pernah merasa rendah diri terhadap pegawai pemerintah kolonial Belanda, bahkan termasuk residen dan gubernur jenderal sekalipun. Dia tidak bersedia membungkuk-bungkuk atau memberikan penghormatan berlebihan kepada gubernur jenderal yang merupakan penguasa tertinggi di seantero Kepulauan Nusantara jajahan Belanda. Hal ini terbukti saat kunjungan Gubernur Jenderal de Jonge ke Gianyar. Kendati terdapat serangkaian aturan protokoler yang berkaitan dengan penyambutan gubernur jenderal, tetapi Raja Gianyar ini tetap mempertahankan kepribadiannya yang bebas. Dia menganggap bahwa penguasa tertinggi pemerintah kolonial Hindia Belanda itu sebagai sesamanya dan berbicara seenaknya saja serta tak menunggu disapa terlebih dahulu sebagaimana yang ditentukan oleh protokol. Itulah sebabnya Gubernur Jenderal de Jonge kurang suka melihat sikap Raja Anak Agung Ngurah Agung. Karenanya, Gubernur Jenderal de Jonge memberikan tanggapan negatif terhadap Anak Agung Ngurah Agung dalam memoirnya. Ia menyebut Raja Gianyar itu sebagai "tidak memperlihatkan penampilan menarik, berkepribadian kasar, gemuk, dan gerak-geriknya tak menimbulkan kepercayaan."[41] Pada 1938, kedudukan para raja di Bali dipulihkan dan terbentuklah pemerintahan Swapraja Gianyar. Raja-raja Bali yang sebelumnya hanya menyandang gelar *regent* (bupati), kini diizinkan memakai lagi gelar-gelar lamanya.

Ada lagi peristiwa menarik yang berkaitan dengan Anak Agung Ngurah Agung. Suatu kali, gubernur jenderal hendak mengadakan kunjungan resmi ke istana Gianyar[42]. Oleh karenanya, Residen Bali dan Lombok yang saat itu dijabat oleh de Haze Winkelman memerintahkan agar Raja Anak Agung Ngurah Agung mempersiapkan acara penyambutan sebaik-baiknya. Residen meminta agar raja menyediakan sebuah kamar untuk istri gubernur jenderal dan para wanita pendampingnya merias diri. Waktu itu kamar-kamar di bangunan masih seperti zaman kuno dan temboknya masih dibiarkan tampak bata merahnya. Raja berpikir alangkah baiknya jika kondisi kamar tersebut disesuaikan dengan gaya Eropa yang berwarna putih. Oleh karenanya, raja mengerahkan banyak tenaga untuk mengecat tembok kamar dengan kalkarium putih. Beberapa hari kemudian, residen datang memeriksa

41. Lihat *Kenangan Masa Lampau: Zaman Kolonial Hindia Belanda dan Zaman Pendudukan Jepang di Bali*, halaman 26.
42. Lihat *Kenangan Masa Lampau: Zaman Kolonial Hindia Belanda dan Zaman Pendudukan Jepang di Bali*, halaman 78-80.

kondisi persiapan penyambutan gubernur jenderal. Ternyata cat kalkarium tadi masih basah dan berbau busuk sehingga residen menjadi marah. Anak Agung Ngurah Agung tidak kehilangan akal dan membeli beberapa botol minyak wangi murahan yang biasa dipergunakan kalangan wanita saat berhias bila hendak menghadiri upacara di pura atau pesta adat. Minyak wangi tersebut lantas dituangkan dalam semprotan pengusir nyamuk dan disemprotkan ke tembok yang masih basah catnya itu. Raja mengira bahwa ia telah melakukan solusi yang jitu. Beberapa saat sebelum kedatangan gubernur jenderal, residen datang lagi guna melakukan inspeksi terakhir. Kamar yang diperuntukkan bagi istri gubernur jenderal tersebut diperiksa lagi. Ternyata residen menjadi marah mencium bau parfum murahan itu dan berteriak bahwa kamar itu baunya seperti rumah bordil di Singapura. Setelah celaan residen diterjemahkan ke dalam bahasa Bali, raja spontan menjawab seolah tidak percaya bahwa sang residen kerap mengunjungi tempat pelacuran seperti itu. Terlepas dari apakah ungkapan itu hanya sekedar bersenda gurau atau timbul dari rasa jengkel terhadap residen, hubungan antara keduanya kemudian menjadi merenggang karena residen menyangka bahwa raja tak menghormatinya.

Ide Anak Agung Gde Agung, yang kelak menjadi Raja Gianyar berikutnya dilahirkan pada 21 Juli 1921. Ibunya adalah putri Cokorda Gde Sukawati, penggawa Ubud yang pernah berjasa menegakkan kembali kedaulatan Gianyar. Dia pernah mengenyam pendidikan Belanda, yakni HIS di Klungkung yang diprakarsai ayahnya dan MULO beserta HBS (Hoogere Burgerschool) di Malang. Setelah menamatkan HBS, ayahnya berniat memasukkan Ide Anak Agung Gde Agung ke perguruan tinggi di Negeri Belanda guna mempelajari hukum dan tata negara. Tetapi dengan meletusnya Perang Dunia II, kondisi menjadi tidak menentu sehingga dia mengubah rencananya dan memutuskan agar putranya melanjutkan pendidikan tingginya di Batavia.

Bersamaan dengan masa perkuliahan di perguruan tinggi ini, Perang Dunia II menjalar ke Asia. Dengan demikian, kondisi di Asia juga turut memanas. Pada 8 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Pearl Harbour dan beritanya terdengar hingga ke Gianyar. Karena itu, Ide Anak Agung Gde Agung yang telah menamatkan gelar sarjana muda dalam bidang hukum tak diizinkan ayahnya kembali ke Batavia, aktifitas perkuliahannya pun terhenti untuk sementara waktu. Bala tentara Jepang meneruskan ekspansinya ke Kepulauan Nusantara dan mendarat di pantai Sanur, Bali.

Pasukan Jepang tiba di Gianyar pada 23 Februari 1942. Raja Anak Agung Ngurah Agung menerima komandan pasukan Jepang beserta anak buahnya di halaman paviliun utara Pelebahan Loji (Gedong Bedaja) dengan didampingi oleh Ide Anak Agung Gde Agung. Kendati komandan pasukan Jepang itu tidak menguasai bahasa Melayu ataupun Inggris, tetapi dari percakapan yang terkadang diselingi bahasa isyarat itu dapat dimengeri bahwa mereka meminta agar Raja Gianyar menjalankan tugasnya seperti biasa. Mereka menyatakan akan melanjutkan perjalanannya ke Klungkung dan Karangasem, setelah itu akan kembali dan membangun pangkalan di Gianyar. Pasukan Jepang yang berpangkalan di Gianyar itu kemudian menggunakan bekas rumah kediaman kontrolir Belanda sebagai markasnya. Agar mereka tidak mencari makanan sendiri-sendiri–yang mungkin akan meresahkan masyarakat, raja mengirimkan mereka ayam, itik, dan sayur-sayuran manakala diperlukan.

c. Kerajaan Gianyar Semasa Pendudukan Jepang dan Era Kemerdekaan

Jatuhnya Bali ke tangan bala tentara pendudukan Jepang diikuti pula kejatuhan Pulau Jawa. Pemerintah kolonial Belanda terpaksa menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942 di Subang, Kalijati. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Belanda atas Kepulauan Nusantara untuk selama-lamanya. Pada masa pendudukan Jepang, raja tetap menjadi penguasa tertinggi di kerajaannya, hanya saja gelarnya diganti dengan istilah *suco*. Kendala yang mewarnai hubungan antara raja dengan pejabat militer Jepang adalah masalah bahasa. Oleh karenanya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dibentuklah apa yang dinamakan Panitia Kerajaan. Anggotanya ada lima orang, yakni Dewa Gede Ngurah (penggawa atau kepala distrik Gianyar), I Made Oka (*sedahan agung* atau kepala perbendaharaan Swapraja Gianyar), dan tiga orang lainnya termasuk Ide Anak Agung Gde Agung selaku ketuanya. Tugasnya menangani urusan pemerintahan sehari-hari, sedangkan masalah rumit saja yang disampaikan kepada raja. Dengan demikian, raja tidak perlu lagi terlalu banyak berurusan dengan pejabat militer Jepang, apalagi yang berkaitan dengan masalah-masalah kecil.

Setelah Jepang menata pemerintahan di kawasan yang didudukinya termasuk Gianyar, Panita Kerajaan tidak diperlukan lagi sehingga dibubarkan. Ide Anak Agung Gde Agung kemudian diminta bekerja di kantor *minseibu* (gubernuran) yang berkedudukan di Singajara. Semasa pendudukan Jepang, rakyat mengalami kekurangan sandang maupun pangan. Bahkan, tidak sedikit di antara mereka yang tak berani keluar rumah karena tak memiliki sesuatu pun untuk menutupi tubuhnya.

Guna mengatasi masalah ini, Jepang memaksa rakyat menanam kapas dan setelah itu menyerahkan hasilnya pada pabrik-pabrik pemintalan yang dikelola orang Jepang. Benang yang diproduksi pabrik tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada penduduk guna ditenun menjadi kain. Kendati demikian, hasilnya masih jauh dari memadai sehingga kelangkaan di berbagai bidang masih terus mendera rakyat.

Pemerintah militer Jepang menerapkan tangan besi dalam memerintah jajahannya. Polisi militer Jepang yang disebut *kenpetai* tak segan-segan menindak dengan kejam tokoh-tokoh yang dianggap anti-Jepang. Musibah menimpa Istana Gianyar ketika Raja Anak Agung Ngurah Agung ditangkap oleh *kenpetai* dan selanjutnya diasingkan ke Lombok akibat fitnahan orang-orang yang membencinya pada 1943. Seiring dengan penangkapan ini, turut pula dirampas harta-harta kekayaan Kerajaan Gianyar yang sebagian besar terbuat dari emas. Namun, belakangan karena terbukti benda-benda berharga tersebut diwarisi secara sah, semuanya dikembalikan ke Istana Gianyar. Hanya saja sebutir berlian besar yang sebelumnya terpasang di hulu keris berbahan emas telah hilang.[43]

Setelah ayahnya ditangkap, Ide Anak Agung Gde Agung diangkat sebagai *suco* atau Raja Gianyar (1943–1946) oleh Jepang. Pada 1944, berlangsunglah kunjungan Bung Karno ke Bali, termasuk Gianyar. Bersamaan dengan itu, Jepang mulai terdesak oleh gerak maju pasukan Sekutu. Kekuasaan mereka kini berada di ambang kehancuran. Menariknya, tidak lama sebelum kejatuhan Jepang, rakyat menyaksikan berbagai pertanda alam. Sebagai contoh, pada pertengahan 1945 muncul jutaan kupu-kupu kuning yang tidak jelas asal usulnya berterbangan ke arah timur laut. Kupu-kupu ini lantas dikaitkan dengan bangsa Jepang yang berkulit kuning yang menandakan bahwa mereka akan segera kembali ke negerinya. Selain itu, di ufuk timur tampak bintang berekor yang menandakan akan terjadinya suatu perombakan. Bintang semacam ini menurut penuturan orang-orang tua pernah tampak pula menjelang pecahnya Puputan Badung pada 1906.[44]

Setelah Jepang menyerah kalah dan kemerdekaan RI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Ide Anak Agung Gde Agung diutus oleh *Paruman Agung* (Majelis Utama) menghadiri Konferensi Malino di Denpasar pada Juni 1946 sebagai wakil

43. Lihat *Kenangan Masa Lampau: Zaman Kolonial Hindia Belanda dan Zaman Pendudukan Jepang di Bali*, halaman 188.
44. Lihat *Kenangan Masa Lampau: Zaman Kolonial Hindia Belanda dan Zaman Pendudukan Jepang di Bali*, halaman 202.

Bali. Negara Indonesia Timur (NIT) kemudian terbentuk dan Ide Anak Agung Gde Agung duduk sebagai Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Nadjamoedin Daeng Malewa. Sementara itu, Ide Anak Agung Gde Agung menyerahkan kedudukan sebagai Raja Gianyar kepada adiknya Anak Agung Gede Oka (1946–1950). Pada Oktober 1947, kabinet ini digantikan oleh Kabinet Warrow dan Ide Anak Agung Gde Agung kembali menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri merangkap Wakil Perdana Menteri. Kabinet ini tidak bertahan lama dan jatuh pada 9 Desember 1947. Ide Anak Agung Gde Agung kemudian dilantik sebagai Perdana Menteri NIT yang bertugas membentuk kabinet baru.

Kabinet yang dipimpin Ide Anak Agung Gde Agung ini mengemban tugas hingga 19 Desember 1948. Ia mengundurkan diri sebagai tanda protes terhadap Agresi Militer Belanda II. Dengan kata lain, sikap ini memperlihatkan solidaritasnya terhadap RI. Setelah pengunduran dirinya ini, Ide Anak Agung Gde Agung ditunjuk kembali oleh presiden NIT sebagai Perdana Menteri dan menyusun lagi kabinetnya yang baru pada 31 Desember 1948. Kabinet barunya terbentuk pada 12 Januari 1949. Selain jabatan Perdana Menteri, ia merangkap pula sebagai Menteri Dalam Negeri.

Ide Anak Agung Gde Agung memprakarsai berlangsungnya Konferensi Antar Indonesia pada Juli–Agustus 1949 di Yogyakarta dan Jakarta. Pertemuan yang dihadiri oleh pemerintah RI beserta negara-negara bagian lainnya ini bertujuan mempersiapkan penyelenggaraan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berujung pada penyerahan kedaulatan terhadap bangsa Indonesia dan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS). Presiden Soekarno menunjuk Ide Anak Agung Gde Agung sebagai pembentuk kabinet pertama RIS bersama-sama dengan Drs. Mohammad Hatta, Sultan Hamengkubuwono IX, dan Sultan Hamid, pada 17 Desember 1949. Kabinet pertama RIS ini dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta sebagai perdana menterinya dan dilantik pada 20 Desember 1949. Sehubungan dengan pengangkatannya ini, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagaiPerdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri NIT. Kabinet Hatta dibubarkan pada 1950 karena kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan.

Ide Anak Agung Gde Agung melanjutkan studinya di Universitas Indonesia dalam bidang hukum dan berhasil meraih gelar kesarjanaan. Setelah itu, pemerintah RI menunjuk Ide Anak Agung Gde Agung sebagai duta besar di berbagai negara Eropa seperti Belgia dan Perancis. Pada Agustus 1955, terbentuk Kabinet Burhanuddin

Harahap dan Ide Anak Agung Gde Agung diangkat sebagai Menteri Luar Negeri. Jabatan ini diembannya hingga kejatuhan kabinet tersebut pada Maret 1956. Ide Anak Agung Gde Agung lalu memangku jabatan sebagai pegawai tinggi Kementerian Luar Negeri RI.

Ketika Presiden Soekarno memberlakukan kebijaksanaan Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme), Ide Anak Agung Gde Agung ditahan di Madiun sebagai tahanan politik sejak 16 Januari 1962 karena dianggap menghambat revolusi Indonesia. Dia baru dibebaskan pada Mei 1966 semasa berkuasanya Orde Baru dan direhabilitasi kedudukannya dalam Kementerian Luar Negeri. Ide Anak Agung Gde Agung merupakan seorang peneliti yang andal dalam bidang sejarah dan telah melahirkan banyak buku buku sejarah berharga, antara lain *Twenty Years Indonesia Foreign Policy 1945–1965* (1973), *Renville als keerpunt van de Nederlands-Indonesische Onderhandelingen* (1980), *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat (1985)*, dan *Bali Pada Abad XIX* (1990, terjemahan bahasa Inggris: *Bali in the 19th Century*).

V. JEMBRANA

Kerajaan Jembrana menempati wilayah Kabupaten Jembrana sekarang. Dahulu merupakan bagian Mengwi, tetapi kemudian melepaskan dirinya. Leluhur raja-raja Jembrana adalah Gusti Nginte, yang merupakan patih di Gelgel. Dia mempunyai seorang putra bernama Gusti Agung Widya. Ia menurunkan Gusti Agung Basangtamiang yang merupakan Raja Jembrana pertama. Penggantinya adalah putranya, Gusti Gede Giri (± 1700). Ia memiliki dua orang putra yang secara bersama-sama memerintah Jembrana, yakni Gusti Ngurah Tapa dan Gusti Made Yasa. Pernikahan antara Gusti Made Yasa dengan Gusti Luh Resik dikaruniai seorang putra bernama Gusti Gede Andul yang merupakan Raja Jembrana berikutnya.

Gusti Gede Andul digantikan oleh Gusti Ngurah Agung Jembrana (Gusti Alit Takmung) yang merupakan putra Gusti Agung Nyoman Alangkajeng dari Munggu, Mengwi dengan seorang putri Jembrana. Menurut sumber lainnya, Gusti Ngurah Agung Jembrana (Anak Agung Ngurah Jembrana), yang memerintah dari 1705–1755[45] adalah Raja pertama Jembrana. Para penguasa Jembrana berikutnya secara berturut-

45. Lihat http://sejarah-puri-pemecutan.blogspot.com/2011/02/kerajaan-jembrana.html, diunduh tanggal 12 Desember 2011.

turut adalah Gusti Gede Jembrana yang merupakan cucu Gusti Ngurah Agung Jembrana, Gusti Putu Andul (± 1797–1809) dan Gusti Rahi yang berasal dari Badung (± 1805). Selanjutnya, Jembrana dikuasai oleh seorang kapten Bugis bernama Kapitan Patini (Patimi, ± 1805–1808)[46]. Raja selanjutnya adalah Gusti Putu Sloka (±1809).

Sementara itu, sumber lainnya memaparkan urutan nama raja yang sedikit berbeda, yaitu Anak Agung Gede Jembrana (1755–1790, selaku Raja Jembrana kedua), Agung Putu Agung (putra Raja Jembrana kedua, 1790–1818, selaku Raja Jembrana ketiga), Anak Agung Gde Seloka (putra sulung Raja Jembrana ketiga, 1818–1839, selaku Raja Jembrana keempat), Anak Agung Putu Ngurah (1839–1867, selaku Raja Jembrana kelima), dan Anak Agung Made Rai (1867–1882). Masih menurut sumber yang sama, Anak Agung Gde Sloka memerintah didampingi saudaranya bernama Anak Agung Made Ngurah Bengkol selaku raja muda. Saudaranya ini wafat pada 1828, yang kemudian digantikan oleh Anak Agung Njoman Madangan.[47]

Raja Buleleng, Gusti Gede Ngurah Karangasem, pernah memerintahkan Adipati Agung Gusti Nyoman Jelantik menyerang dan menghancurkan Jembrana pada 1808 karena para pedagang Bugis yang berdiam di daerah Loloan atas permintaan Raja Agung Putu Agung. Jembrana ketika itu merupakan vasal (daerah taklukan) Badung. Kerajaan Badung menempatkan seorang pemimpin dari kalangan Bugis bernama Kapten Patimi. Semenjak saat itu, Jembrana berada di bawah kekuasaan Buleleng hingga 1818, yakni ketika kerajaan tersebut melakukan pemberontakan di bawah pimpinan Raja Anak Agung Gde Seloka (Gusti Ngurah Jembrana) sehingga mengakibatkan terbunuhnya Raja Buleleng, Gusti Gede Ngurah Karangasem. Pada 1821, Gusti Made Pahang, Raja Buleleng berikutnya, sekali lagi menyerang dan menghancurkan Jembrana sehingga kerajaan tersebut kembali berada di bawah kekuasaan Buleleng. Kondisi ini berlangsung hingga 1849.

Menurut sumber lain, pada 1828 pecah peperangan antara Jembrana dan Buleleng. Raja Anak Agung Gde Karangasem dari Buleleng ingin menguasai Jembrana karena kemakmurannya. Akibat serangan tersebut, Anak Agung Putu Seloka (mungkin sama dengan Anak Agung Gde Sloka) mengungsi ke Banyuwangi dengan menggunakan perahu-perahu Bugis. Pasukan Jembrana dipimpin oleh I Gusti Ngurah Gde yang berintikan orang-orang Muslim. Raja Buleleng, Anak Agung Gde

46. Lihat *Kerajaan2 Indonesia*, halaman 99.
47. Lihat http://sejarah-puri-pemecutan.blogspot.com/2011/02/kerajaan-jembrana.html, diunduh tanggal 12 Desember 2011.

Karangsasem tewas dan anak buahnya mengundurkan diri. Anak Agung Made Karang, adik panglima perang Buleleng, melancarkan peperangan dengan kekuatan besar. Serangan ini menewaskan panglima Jembrana, yakni I Gusti Ngurah Gde dan Anak Agung Made Bengkol. Oleh karena itu, pasukan Jembrana terpaksa mengundurkan dirinya guna menyusun strategi. Pasukan Buleleng berhasil merebut Puri Gde Jembrana namun tidak berani mendekati Puri Agung Negara. Dari 1832 hingga 1835, Jembrana mengalami kekosongan pemerintahan. Pada 1835, Buleleng menawarkan perdamaian dan Raja Anak Agung Putu Seloka kembali dari pengungsiannya di Banyuwangi. Karena usianya telah lanjut maka pemerintahan kerajaan diserahkan pada putra sulungnya bernama Anak Agung Putu Ngurah, berkedudukan di Puri Agung Negara. Sementara itu, sebagai wakilnya diangkat Anak Agung Putu Raka, berkedudukan di Puri Gde Jembrana.[48]

Masih menurut sumber yang sama karena sikap raja Anak Agung Putu Ngurah yang dirasa sewenang-wenang, penggawa bernama I Gusti Ngurah Pajeksan Made Pasekan mengadukan hal itu kepada pemerintah Belanda yang diwakili Residen Banyuwangi pada 1855. Surat tersebut diteruskan kepada gubernur jenderal di Batavia. Pecah perang saudara di Jembrana antara para pendukung dan penentang raja. Akhirnya, I Gusti Agung Putu Ngurah menyerahkan diri kepada pemerintah Hindia Belanda dan diasingkan ke Purwakarta pada 1857. Kerajaan Jembrana kini diperintah oleh seorang *regent* (bupati), yang dijabat oleh I Gusti Made Pasekan. Ia menyerahkan tanah hutan Candi Kesuma (Indera Loka) seluas 20.000 bau kepada seorang Belanda bernama Demay van Darwen dengan uang sewa sebesar 15.000 Ringgit setiap tahunnya. Kendati demikian, hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan para penggawa. Pemerintahan I Gusti Ngurah Made Pasekan berakhir pada 1866 ketika ia ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda dan diasingkan ke Banyumas. Penangkapan tersebut disamarkan dengan undangan pesta bagi I Gusti Ngurah Made Pasekan dan keluarganya ke Banyuwangi, perjamuan diselenggarakan di atas sebuah kapal perang dan pada kesempatan tersebut *regent* beserta keluarganya ditangkap. Sebagai gantinya diangkat I Gusti Agung Made Rai yang memerintah hinggal 1906.[49]

Setelah kepemimpinan Gusti Putu Sloka, Jembrana dipimpin oleh Gusti Wayan Pasekan dan saudaranya Gusti Made Pasekan (± 1812–1814). Penguasa berikutnya

48. Lihat *Islam Masuk Jembrana*, halaman 29-30.
49. Lihat *Islam Masuk Jembrana*, halaman 21-23.

adalah Gusti Alit Mas dan Gusti Putu Dorot (± 1835–1840), Gusti Ngurah Made Penarungan (1840–1849), dan Gusti Ngurah Made Pasekan. Ia menjabat sebagai *regent* dari 1840–1849, lalu sebagai patih (1849–1855), dan sebagai raja (1855–1866). Memerintahlah secara berturut-turut Gusti Putu Ngurah Sloka (Gusti Putu Ngurah Jembrana, 1849–1855), Gusti Ngurah Made Pasekan (1855–1866), dan Anak Agung Made Rai (1866–1882).[50] Kemudian Jembrana diperintah langsung oleh pemerintah kolonial Belanda dan kedudukannya sebagai kerajaan baru dipulihkan saat pengangkatan Anak Agung Bagus Negara (1929–1950) sebagai raja Jembrana terakhir. Putranya, Anak Agung Bagus Suteja, pernah menjadi Gubernur Bali (1959–1966).

Selanjutnya, masih ada sumber lain yang menyebutkan bahwa pada 1805 Jembrana diserang oleh Badung.[51] Menurut sumber tersebut, Jembrana diperintah oleh Gusti Ngurah Gde Jembrana, yang tidak dibunuh oleh Raja Badung dan dijadikan raja bawahan. Guna memantau jalannya pemerintahan di Jembrana, Badung menempatkan pasukannya yang terdiri dari orang Bali dan Bugis. Kendati demikian, Gusti Ngurah Gde Jembrana kemudian ingin melepaskan diri dari kekuasaan Badung dan melakukan pemberontakan sehingga menimbulkan kemarahan Raja Badung yang berikrar bahwa ia akan menjadikan kepala pasukan-pasukan Jembrana sebagai atap *bale agung* (Bangunan yang berfungsi sebagai tempat pertemuan para batara ketika berlangsung upacara ngusaba dan setelah upacara penyucian pratima dari batara). Jembrana dikalahkan kembali oleh Badung dan Gusti Ngurah Gede Jembrana dipecat kedudukannya sebagai raja bawahan. Sebagai penggantinya, Raja Badung mengangkat seorang Bugis bernama Patimi (Kapten Patimi). Raja Gusti Ngurah Gede Jembrana kini diturunkan kedudukannya di bawah Patimi.[52] Meskipun demikian, Gusti Ngurah Gede Jembrana merasa tidak puas berada di bawah kekuasaan orang asing sehingga menghimpun para pengikutnya yang masih setia.

Bersamaan dengan pengangkatan Patimi tersebut, makin banyak orang Bugis berdatangan ke Jembrana sehingga menimbulkan kemajuan dalam bidang ekonomi. Raja Buleleng merasa kurang suka dengan hal ini dan mendesak Raja Badung agar mengusir orang-orang Bugis dari Jembrana. Desakan ini didorong oleh laporan orang-orang Jembrana yang melarikan diri ke Buleleng. Mereka melaporkan telah

50. Lihat *Kerajaan2 Indonesia*, halaman 99.
51. Lihat *Puputan Badung 20 September 1906: Perjuangan Raja dan Rakyat Badung Melawan Kolonialisme Belanda*, halaman 67.
52. Lihat *Puputan Badung 20 September 1906: Perjuangan Raja dan Rakyat Badung Melawan Kolonialisme Belanda*, halaman 68,

mendapat tekanan serta perlakuan yang tidak wajar dari Kapten Patimi. Raja Mengwi yang negerinya juga menjadi tujuan para pelarian dari Jembrana mendorong kaum pengungsi tersebut agar menghancurkan kekuasaan Badung dari Mengwi karena Jembrana dahulunya merupakan wilayah Mengwi.[53]

Menanggapi seruan Raja Buleleng agar menghalau orang-orang Bugis, Raja Badung bersikap pasif dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Buleleng. Oleh karena itu, Raja Buleleng lantas mengajak Gusti Ngurah Gde Jembrana yang memang membenci orang-orang Bugis agar menyiapkan para pengikutnya dengan janji kedudukannya sebagai Raja Jembrana akan dipulihkan. Gusti Ngurah Gde Jembrana mengumpulkan 5.000 orang pasukannya dan memerintahkan mereka berpura-pura membantu orang-orang Bugis sehingga tidak menimbulkan kecurigaan sedikitpun. Para pengikut Gusti Ngurah Gde Jembrana lalu bergabung dengan pasukan Buleleng berkekuatan 10.000 orang di bawah pimpinan Gusti Nyoman Jelantik. Pada 1808, mereka bersama-sama menyerang kedudukan orang Bugis di Loloan yang mengakibatkan gugurnya Patimi.

Buleleng kemudian mengambil alih Jembrana dan menempatkan wakilnya, Gusti Wayan dan Made Pasekan, yang memerintah negeri itu selama dua tahun. Selanjutnya, salah seorang kerabat Gusti Ngurah Gde Jembrana bernama Gusti Putu Jembrana yang bersedia bekerja sama dengan Buleleng diangkat sebagai Raja Jembrana. Sementara itu, Gusti Ngurah Gde Jembrana yang sebelumnya dijanjikan akan dipulihkan kedudukannya, ternyata ditawan dan dibawa ke Buleleng serta dibunuh.[54]

Pada 25 Juni 1849 diadakan penandatanganan *Acte van Aanstelling van den Vorst van Djambrana* (Akta Pengangkatan Raja Jembrana)[55] oleh Raja Jembrana. Nama Raja Jembrana yang disebutkan di dalamnya adalah Gusti Putu Ngurah Jembrana (Goestie Poetoe Ngoerah Djambrana). Tampaknya raja ini sama dengan Gusti Putu Ngurah Sloka atau Anak Agung Putu Ngurah. Lima hari kemudian, atau tepatnya 30 Juni 1849, disusul dengan penandatanganan kontrak sepanjang 15 pasal. Gusti Putu Ngurah Jembrana mengundurkan diri pada 17 Desember 1855 yang disetujui oleh pemerintah kolonial dengan dikeluarkannya *Acte van Afstand van Djambrana*.

53. Lihat *Puputan Badung 20 September 1906: Perjuangan Raja dan Rakyat Badung Melawan Kolonialisme Belanda*, halaman 69.
54. Lihat *Puputan Badung 20 September 1906: Perjuangan Raja dan Rakyat Badung Melawan Kolonialisme Belanda*, halaman 70.
55. Lihat *Surat-surat Perdjandjian antara Keradjaan-keradjaan Bali/ Lombok dengan Pemerintah Hindia Belanda 1841 s/d 1938*, halaman 240–242.

Alasannya, dia tidak lagi sanggup menjalankan pemerintahan. Jembrana mengadakan perjanjian dengan Tabanan pada 1860, yakni semasa pemerintahan Gusti Ngurah Made Pasekan yang menggantikan Gusti Putu Ngurah Jembrana. Perjanjian tersebut memuat ketentuan mengenai bea dan cukai barang yang masuk ataupun keluar.[56]

VI. KARANGASEM

a. Cikal Bakal Kerajaan Karangasem

Kerajaan Karangasem terletak di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Wilayahnya yang bergunung-gunung menjadikan tanaman padi hanya sedikit dibudidayakan. Meskipun demikian, warganya sangat terampil dalam mengukir kayu sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian sebelumnya. Semasa pemerintahan Raja Gelgel bernama I Dewa Pemahyun (Dalem Bekung, memerintah 1558–1580), pecah pemberontakan besar-besaran yang diterbitkan oleh patih Gelgel bernama Rakryan Batan Jeruk (I Gusti Arya Batan Jeruk) pada 1556. Sebelumnya, niat sang patih merebut kekuasaan ini telah tercium oleh penasihat raja bernama Dang Hyang Astapaka. Ia menasihatkan agar Rakryan Batan Jeruk jangan mengambil tindakan yang membahayakan tersebut karena pengikut raja masih sangat kuat. Namun, Rakryan Batan Jeruk menganggap sepi saja saran ini. Ia tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Benar saja, pemberontakan itu dapat ditumpas dan Patih Rakryan Batan Jeruk terpaksa melarikan diri ke Desa Bungaya yang masih termasuk dalam wilayah Karangasem. Di sanalah ia dibunuh oleh pasukan Gelgel. Sementara itu, istri dan anak angkatnya yang bernama I Gusti Oka melarikan diri ke desa Budakeling, tempat kediaman Dang Hyang Astapaka.

Penguasa Karangasem saat itu, I Dewa Karangamla, tertarik pada kecantikan janda Rakryan Batan Jeruk dan berniat melamarnya. Oleh Dang Hyang Astapaka, ia disarankan mengajukan syarat terlebih dahulu agar kelak I Gusti Oka diangkat sebagai putra mahkota. Syarat ini ternyata disetujui oleh I Dewa Karangamla dan I Gusti Oka diangkat sebagai penguasa Karangasem berikutnya. Dengan demikian, pemerintahan Dinasti Batan Jeruk di Karangasem berawal. I Gusti Oka memiliki tiga orang istri dan putranya yang tertua, I Gusti Nyoman Karang menggantikannya sebagai penguasa Karangasem ketiga (Penguasa pertama adalah I Dewa Karangamla dan kedua I Gusti Oka). Tetapi dalam buku *Keris di Lombok*, halaman 105, disebutkan

56. Lihat *Sedjarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok*, halaman 117.

bahwa I Gusti Nyoman Karang adalah Raja Karangasem pertama. I Gusti Nyoman Karang berputra I Gusti Anglurah Ketut Karang. Bertakhtanya I Gusti Anglurah Ketut Karang ini berlangsung pada 1660 atau 1661. Ia mendirikan istana bernama Puri Amlaraja atau Puri Klodan.

I Gusti Anglurah Ketut Karang menyerahkan pemerintahan kepada tiga orang putranya, yang secara bersama-sama menjadi raja Karangasem, yakni I Gusti Anglurah Wayan Karangasem, I Gusti Anglurah Nengah Karangasem, dan I Gusti Anglurah Ketut Karangasem.[57] Semasa pemerintahan mereka yang berlangsung dari 1680–1705, terjadi penaklukkan Karangasem atas Lombok pada 1691 dan pendirian Kerajaan Pagesangan beserta Pagutan di pulau tersebut. Selain itu, mereka pernah membantu Kerajaan Buleleng menaklukkan Blambangan pada 1697. Ketika itu, Mas Purba, pewaris Kerajaan Blambangan, menghadap Raja Buleleng dan memohon bala bantuan karena kerajaannya telah ditaklukkan Mataram. Raja Buleleng dan Karangasem mengirimkan pasukannya ke Jawa dan menempatkan kembali Mas Purba di atas singgasananya.

b. Perkembangan Kerajaan Karangasem

Penguasa selanjutnya di Karangasem secara berurut-turut adalah Anglurah Made Karang (putra I Gusti Anglurah Nengah Karangasem), Gusti Wayahan Karangasem (putra I Gusti Anglurah Ketut Karangasem), dan Anglurah Made Karangasem Sakti (putra Anglurah Made Karang) yang juga digelari Bagawan Atapa Rare.[58] Pada 1730-an atau 1750-an, terjadi permusuhan dengan Klungkung. Saat itu, Raja Anglurah Made Karangasem Sakti merupakan seseorang yang sangat giat melakukan kegiatan pertapaan dan mempunyai penampilan serta kebiasaan aneh.[59] Bahkan karena hampir setiap saat menjalani meditasi, ia akan membiarkan kotorannya terjatuh ke mana saja. Ketika melakukan kunjungan kehormatan ke Klungkung, berbagai tindak

57. Dalam buku *Keris di Lombok*, halaman 106, nama mereka adalah I Gusti Wayan Karang Asem, I Gusti Nengah Karang Asem, dan I Gusti Ketut Karang Asem.
58. Buku *Keris di Lombok*, halaman 106, hanya menyebutkan bahwa raja-raja Karangasem berikutnya adalah I Gusti Made Karang, yang tampaknya sama dengan Anglurah Made Karang, dan I Gusti Made Karang Asem Sakti–yang tampaknya sama dengan Anglurah Made Karangasem Sakti. Menurut sumber lainnya, yakni *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 47, disebutkan bahwa Raja I Gusti Anglurah Made Karang berputra enam orang. Yang sulung bernama I Gusti Anglurah Made Karangasem Sakti. Ia dijuluki juga "Sang Atapa Rare," karena gemar menjalankan yoga-semadi dengan bertingkah laku seperti anak-anak. Namun, menurut sumber tersebut, I Gusti Anglurah Made Karangasem Sakti tidak bersedia memegang tampuk pemerintahan sehingga setelah berakhirnya pemerintahan I Gusti Anglurah Made Karang, ia langsung digantikan oleh tiga orang putranya.
59. Lihat *Bali Profile*, halaman 7.

tanduknya mengejutkan dan membangkitkan amarah Raja Klungkung. Oleh sebab itu, ia memerintahkan agar Raja Karangasem tersebut dibunuh saat yang bersangkutan hendak pulang ke negerinya. Sumber lain menyebutkan bahwa Raja Anglurah Made Karangasem Sakti telah mengencingi takhta Klungkung, tetapi ini hanya kiasan saja untuk menunjukkan bahwa Karangasem tak bersedia lagi mengakui kekuasaan Klungkung.[60]

Pembunuhan ini menggusarkan hati ketiga putra Raja Karangasem (menurut buku *Keris di Lombok*, halaman 106, masing-masing bernama I Gusti Made Karangasem [Anglurah Made Karangasem], I Gusti Nyoman Karangasem [Anglurah Nyoman Karangasem], dan I Gusti Ketut Karangasem [Anglurah Ketut Karangasem]) sehingga mereka menggerakkan tentaranya menyerbu Klungkung. Dikarenakan sisa-sisa rasa hormat terhadap Raja Klungkung selaku pemuka spiritual bagi seluruh raja di Bali, mereka menahan diri dari membunuh atau menyingkirkannya. Ketiga putra raja itu hanya memproklamasikan kemerdekaan mereka dan pulang kembali memerintah negerinya tanpa tunduk lagi terhadap Klungkung. Putra tertua bernama Anglurah Made Karangasem (I Gusti Made Karangasem, memerintah 1730/1750–1775) menggantikan ayahnya sebagai raja dan memerintah bersama saudara-saudaranya. Ia menaklukkan Buleleng dan mengangkat adiknya sebagai penguasa di sana. Sementara itu, saudaranya yang lain diserahi kekuasaan atas Lombok. Pada kurun waktu itu, dikeluarkanlah undang-undang bernama *Sara Samuscayagama*. Isinya mengenai larangan yang tak boleh dilakukan terkait perkawinan.[61]

Selanjutnya, Anglurah Made Karangasem beserta kedua saudaranya yang lain digantikan oleh Gusti Gede Ngurah Karangasem (1775–1806). Ketika ia mangkat pada 1806, terjadi masalah suksesi kekuasaan. Tetapi salah seorang putranya yang bernama I Gusti Lanang Paguyangan (I Gusti Gede Ngurah Lanang Karangasem, memerintah: 1806–1828) berhasil merebut kekuasaan. Namun, penguasa ini merupakan tokoh yang kurang populer karena melakukan berbagai kekejaman. Menurut laporan Dr. Medhurst[62], I Gusti Lanang Paguyangan ini terlibat permusuhan dengan kemenakannya, Dewa Pahang (Gusti Gede Ngurah Pahang), Raja Buleleng. Pertikaian ini begitu dalamnya hingga Dewa Pahang bersumpah akan meminum darah pamannya itu dan menyisakan sedikit bagi adiknya perempuannya guna mencuci

60. Lihat *Keris di Lombok*, halaman 106.
61. Lihat *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 47.
62. Lihat *Bali Profile*, halaman 22.

rambutnya. I Gusti Lanang Paguyangan tidak mau kalah dan juga mengikrarkan sumpah yang tak kalah mengerikannya; ia akan memotong leher kemenakannya itu, memotong-motong tubuhnya, serta mengirimkannya pada raja-raja tetangganya. Bahkan ia bersumpah pula membangun kuil yang dihiasi dengan tulang-tulang dan kulit para pengikut kemenakannya.

Awalnya, dewi keberuntungan berpihak kepada Dewa Pahang. Ia berhasil mengalahkan pamannya yang mengungsi ke Desa Selat dan menduduki Karangasem. Akibatnya, Dewa Pahang menjadi sombong dan menyatakan bahwa dirinya merupakan raja paling berkuasa di muka bumi ini. Ia melakukan pernikahan terlarang dengan adik perempuannya sendiri, I Gusti Ayu Gabrug. Tujuannya agar dari perkawinan tersebut lahir bangsawan berdarah murni yang tak terkalahkan.[63] Akibatnya, segenap popularitas beserta dukungan terhadap dirinya memudar dan kemenangan demi kemenangan beralih kepada I Gusti Lanang Paguyangan. Para pengikut Dewa Pahang yang tidak menyenangi keserakahan rajanya lantas meninggalkannya dan kembali ke Buleleng. Karena itu, Dewa Pahang hanya tinggal dengan sedikit pengikutnya saja yang masih tersisa. Kesempatan ini dipergunakan oleh I Gusti Lanang Paguyangan merebut kembali kekuasaannya. Ketika kemenakannya berhasil dikalahkan pada 1823, I Gusti Lanang Paguyangan menyatakan bahwa ia dengan penuh penyesalan terpaksa memenuhi sumpahnya itu; kepala Dewa Pahang dipenggal dan dagingnya dibagi-bagikan pada raja-raja lain sebagai peringatan. Lama kelamaan para pengikut I Gusti Lanang Paguyangan merasa takut terhadap rajanya sehingga sebagian besar di antara mereka meninggalkannya. Bersama dengan sejumlah kecil pengikut setianya, I Gusti Lanang menyingkir ke hutan terdekat dan mengadakan upacara persembahan dengan menyembelih 15 bayi, memanggang, dan mengorbankannya. Kemudian sebagian dagingnya mereka nikmati bersama. Tindakannya yang brutal itu tentu saja tidak disukai para penguasa lainnya.

Beberapa pemuka masyarakat, seperti I Gusti Nengah Sibetan (penggawa Selat) dan I Gusti Bagus Karang (penggawa Tejakula), meminta bantuan Buleleng agar bersedia menggulingkan I Gusti Lanang Paguyangan. Pada 1827 pecah pemberontakan sehingga I Gusti Lanang Paguyangan terpaksa menyingkir ke Lombok bersama dengan anaknya, Ida Ratu.

---

63. Lihat *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 59

Takhta Karangasem kemudian beralih kepada Gusti Bagus Karang (1827–1838). Saat pecah peperangan antara Mataram dengan Singasari di Lombok, Gusti Bagus Karang mengirimkan tentaranya membantu Mataram. Saat raja sedang absen dari negerinya ini, Buleleng menggunakannya sebagai kesempatan menyerbu Karangasem dan mendudukkan adik Raja Buleleng bernama Gusti Gede Ngurah Karangasem (1838–1849) sebagai Raja Karangasem yang baru.[64] Menurut sumber lainnya, Raja Buleleng mendudukkan menantunya bernama I Gusti Gde Cotong di singgasana Karangasem, tetapi ia terbunuh karena perebutan kekuasaan. Sebagai penggantinya, Raja Buleleng mengangkat saudara sepupunya, I Gusti Ngurah Gde Karangasem, ke atas takhta Karangasem.[65] Kini Gusti Bagus Karang kehilangan takhtanya dan menjadi raja tanpa negara. Ketika meminta bantuan Gusti Ngurah Ketut Karangasem, Raja Mataram, untuk mengangkut dirinya beserta pasukannya kembali ke Bali, permohonannya itu ditolak. Raja Gusti Bagus Karang akhirnya bunuh diri karena tak sanggup menanggung peristiwa memalukan ini. Berdasarkan sumber lainnya, perebutan kekuasaan itu baru diketahui oleh Gusti Bagus Karang setelah diberitahu oleh utusan Raja Buleleng. Karena kecewa, ia lantas bertindak sewenang-wenang di Mataram sehingga sebagian besar pengikutnya kembali ke Bali. Pada 1839, ia diserang oleh Raja Mataram dan melakukan perang puputan bersama keluarga beserta beberapa pengikutnya setianya.[66]

Hubungan antara Kerajaan Buleleng dengan Belanda memanas pada 1845. Sebelumnya, pada 1842 dan 1843, Raja Buleleng telah menandatangani kontrak penghapusan adat Tawan Karang. Namun, pada praktiknya isi kontrak tersebut tidak sungguh-sungguh dijalankan karena pelaksanaan adat ini masih berlaku pada 1844 ketika kapal-kapal Belanda terdampar di pantai Perancak dan Sangsit. Adat ini merupakan hak turun-temurun penduduk pantai, raja sendiri pun tak berwenang menghapuskannya. Perampasan terhadap isi kapal yang dilakukan penduduk setempat memicu ketegangan antara Belanda dan Buleleng. Pertemuan diadakan pada 1845 antara pemerintah kolonial Belanda dan Buleleng guna membahas masalah tersebut. Namun, perundingan berakhir dengan ketegangan karena Buleleng menolak meratifikasi perjanjian penghapusan Tawan Karang dan pengakuan terhadap kekuasaan

64. Lihat *Bali in the 19th Century*, halaman 34.
65. Lihat **http://sejarah-puri-pemecutan.blogspot.com/2011/02/sejarah-kerajaan-karangasem.html**, diunduh tanggal 12 Desember 2011. Lihat juga *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 63.
66. Lihat *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 63.

pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Patih Buleleng, Gusti Ketut Jelantik, tidak dapat menerimanya karena akan merendahkan derajat Kerajaan Buleleng menjadi semacam bawahan pemerintah kolonial. Raja Karangasem yang masih adik Raja Buleleng memperlihatkan sikap solidaritasnya dengan turut menolak meratifikasi perjanjian yang disodorkan pemerintah Hindia Belanda. Gusti Gede Ngurah Karangasem tidak bersedia pula membayar ganti rugi bagi kapal *Atut Rahman* yang kandas di perairan Karang Anyar dan isinya telah dirampas oleh warga.

Pemerintah Hindia Belanda yang berambisi menegakkan supremasi atas seluruh Kepulauan Nusantara menganggapnya sebagai tantangan terhadap kekuasaan mereka. Oleh karenanya, demi menundukkan Buleleng dan Karangasem direncanakanlah operasi militer berdasarkan dekrit tertanggal 6 Februari 1846 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal J.J. Rochussen. Pasukan Belanda mendarat pada 27 Juni 1846 di pantai Buleleng. Pertempuran berjalan berlarut-larut hingga 1849. Belanda menggunakan siasat liciknya dengan meminta bantuan Raja Mataram yang memang memendam permusuhan dengan Karangasem. Selain itu, Mataram menginginkan daerah Culik milik Karangasem sehingga tidak keberatan menurunkan pasukan sejumlah 4.000 orang di bawah pimpinan Gusti Gede Rai demi membantu Belanda.

Bantuan dari Mataram ini tiba di daerah Ujung pada 20 Mei 1849. Pasukan Karangasem yang dipimpin oleh Gusti Made Jungutan, Patih Karangasem, bergabung dengan mereka. Patih ini telah mengkhianati rajanya dan menjalin hubungan gelap dengan musuh karena berdasarkan silsilah ia merasa berhak atas takhta Karangasem. Pasukan gabungan ini kemudian menyerbu dan menduduki Istana Karangasem, Raja Gusti Gede Ngurah Karangasem pun gugur dalam serbuan tersebut. Karangasem berhasil dikalahkan dan diduduki Belanda. Sebagai imbalan atas bantuannya, Mataram diizinkan Belanda menduduki daerah Karangasem. Semenjak saat itu, keadaan berbalik karena kini Karangasem menjadi bawahan Mataram. Gusti Made Jungutan diangkat sebagai penguasa Karangasem (1849–1850). Selanjutnya, Anak Agung Gede Oka (I Gusti Gede Oka, memerintah 1850–1890) dan Anak Agung Gede Putu (I Gusti Gede Putu, memerintah 1850–1893) didudukkan sebagai wakil Raja Mataram di Karangasem.[67] Menurut sumber lainnya, mereka berdua adalah kemenakan Raja Mataram. Masih berdasarkan sumber tersebut, Raja Mataram disebutkan bernama I

67. Lihat *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, halaman 100.

Gusti Ngurah Ketut Karangasem yang meninggal pada 14 Januari 1870.[68] ia kemudian digantikan oleh saudaranya, yakni I Gusti Gde Karangasem, yang bergelar Ratu Agung Agung Gde Ngurah Karangasem. Semasa pemerintahannya, saudara kedua wakil Raja Mataram di atas yang bernama Gusti Gde Jelantik ditugaskan membantu saudaranya memerintah di Karangasem. Awalnya Gusti Gde Jelantik ditugaskan sebagai penggawa di Budakeling.[69] Selanjutnya, pada 1887, ia memerintah bersama saudaranya di Karangasem. Dengan demikian, menurut sumber tersebut, memerintahlah tiga orang raja, yakni I Gusti Gede Putu selaku raja utama, dan dua orang saudaranya, I Gusti Gede Oka beserta I Gusti Gede Jelantik sebagai wakil raja.[70]

Penguasa agung Karangasem berikutnya adalah I Gusti Gede Jelantik atau Anak Agung Gusti Gede Jelantik (1890–1908). Dia adalah putra I Gusti Anglurah Made Oka Karangasem. Oleh pemerintah kolonial Belanda, dia digelari *regent* (bupati) pada 1890. Selanjutnya, pada 1893 dia menyandang gelar raja karena Karangasem dipulihkan kedudukannya sebagai kerajaan terpisah. Anak Agung Gusti Gede Jelantik ditunjuk sebagai *stedehouder* (penguasa) Karangasem pada 10 Juni 1896. Semasa pemerintahannya, terjalin hubungan yang baik dengan umat Islam. Dia bahkan memperistri seorang wanita Islam dari kampong Dangin-sema, yang selanjutnya dinamai Jero Saroja, dan melakukan pembangunan banyak masjid di Karangasem. Selain itu, dia juga membiayai beberapa orang menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sewaktu Hari Raya Lebaran, raja menghadiahkan beras dan minyak kelapa kepada umat Islam. Sebaliknya, saat Hari Raya Galungan, beberapa orang wanita berdatangan dari kampung Islam guna mempersembahkan berbagai macam makanan. Di istana Karangasem sendiri juga kerap diadakan acara *madikir* (pengajian) yang dihadiri oleh para haji dari beberapa kampung Islam.

Pada kurun waktu pemerintahan I Gusti Gede Jelantik, terdapat 19 orang Tionghoa di Karangasem. Salah seorang di antara mereka bernama Yap Sian Liat, seorang ahli bangunan yang kemudian diangkat oleh raja menjadi syahbandar di Pasir Putih. Sebagai tempat menerima tamu-tamu Belanda, Raja I Gusti Gede Jelantik membangun gedung dengan gaya campuran Barat dan Cina. Bangunan itu kemudian

68. Lihat *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 108.
69. Lihat *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 109.
70. Lihat *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 109.

dinamai *Amsterdam*, yang dalam pengucapan setempat menjadi *Maskerdam*. Gedung itu bergaya arsitektur Barat, sedangkan pintunya bercorak Tiongkok[71].

Raja I Gusti Gede Jelantik turun takhta pada 28 Desember 1908 dan digantikan oleh kemenakannya, Anak Agung Bagus Jelantik (I Gusti Bagus Jelantik) yang bergelar Anak Agung Agung Anglurah Ketut Karangasem (1908–1950). Ia merupakan putra Anak Agung Gede Putu, tetapi diangkat sebagai anak oleh pamannya, Anak Agung Gusti Jelantik, dan ditunjuk sebagai pewaris takhta Karangasem. Ketika pamannya meninggal, ia diangkat sebagai *regent* (bupati) Karangasem oleh pemerintah kolonial Belanda. Tetapi pengertian *regent* di sini berbeda dengan para bupati lain di Kepulauan Nusantara, yang hanya semata-mata pegawai pemerintah kolonial Belanda. Penyerahan kepada kemenakannya ini, mengundang ketidakpuasan dua calon lainnya, yakni Gusti Ketut Jelantik (Gesah) dan Gusti Gde Putu sehingga mereka berniat menerbitkan kekacauan di Karangasem[72]. Pemerintah colonial segera mengirimkan dua kapal perangnya, yakni *Koningin Regentes* dan *Koningin Wilhemina* beserta dua kapal kecil, *Mataram* dan *Nias* guna mencegah timbulnya pergolakan. Kedua orang itu lantas diasingkan ke Jembrana.

Mulanya, saat memangku jabatan sebagai *regent* pada 1908, dia menyandang gelar Anak Agung Bagus Jelantik I. Belakangan, kedudukannya sebagai raja dipulihkan oleh pemerintah Belanda pada 30 Juni 1938 sehingga terbentuklah Swapraja Karangasem. Dia kemudian mengikrarkan sumpah jabatannya di Pura Besakih pada 29 Juli 1938 dan semenjak saat itu menyandang gelar Anak Agung Agung Anglurah Ketut Karangasem. Semasa pemerintahannya dilakukan perombakan terhadap tatanan pemerintahan, seperti jumlah distrik atau kepenggawaan yang semula 20 dikecilkan menjadi 16 pada 1913. Selanjutnya, pada 1913, jumlahnya dikecilkan kembali menjadi 12 distrik, yakni Karangasem, Bugbug, Selat, Rendang, Culik, Bebandem, Kubu, Manggis, Muncan, Seraya, Abang, dan Sidemen[73].

Putra Raja Karangasem, Anak Agung Bagus Jelantik, yang bernama Anak Agung Gede Jelantik pernah mengikuti kuliah hukum di Batavia. Mata kuliah utama bagi mahasiswa tingkat pertama adalah Pengantar Ilmu Hukum yang dibawakan oleh Prof. Dr. Mr. Wertheim[74]. Ia merupakan pakar hukum yang luar biasa dan sangat keras

71. Lihat *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 153.
72. Lihat *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 180.
73. Lihat *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 182.
74. Lihat *Kenangan Masa Lampau: Zaman Kolonial Hindia Belanda dan Zaman Pendudukan Jepang di Bali*, halaman 96–97.

dalam menilai hasil ujian mahasiswanya. Menurut obrolan di kalangan mahasiswa, apabila seseorang tiga kali tidak lulus ujiannya maka ia akan memberikan saran yang ditakuti; menganjurkan agar mahasiswa yang bersangkutan beralih profesi menjadi pedagang saja. Ini berarti bahwa sampai kapanpun ia tak akan lulus ujian Prof. Wertheim sehingga harus meninggalkan fakultas hukum. Ketika tiga kali Anak Agung Gede Jelantik tidak lulus ujian Prof. Wertheim, ia mendapatkan nasihat yang sama dan terpaksa menghentikan kuliahnya.

Pengalaman menarik yang dialami Raja Anak Agung Bagus Jelantik adalah ketika menaiki kapal dari Buleleng ke Tanjung Perak, Surabaya[75]. Waktu itu, Raja Gianyar Dewa Ngurah Agung juga berada di kapal yang sama. Mereka sepakat mengadakan pembacaan lontar berisikan naskah klasik Ramayana. Biasanya acara semacam itu akan diikuti dengan perdebatan seru mengenai makna kata-kata yang ada dalam karya klasik tersebut. Pembacaan yang penuh semangat dilangsungkan di depan kamar kelas satu Raja Dewa Ngurah Agung hingga jam 1 malam. Akibatnya, para penumpang yang lain merasa terganggu dan melapor kepada kapten kapal. Karena itu, kapten lantas mendekati kedua raja Bali dan menyarankan agar pembacaan lontar dihentikan saja karena mengganggu penumpang lainnya. Dengan kesal kedua raja menghentikan acara kesenangan mereka tersebut.

Pada 1950, Raja Anak Agung Bagus Jelantik mengundurkan diri dan digantikan oleh putra keduanya, Anak Agung Gede Jelantik, yang bergelar Anak Agung Agung Ngurah Ketut Karangasem (1950–1991). Dia menempuh pendidikannya di HIS Denpasar, MULO Malang, dan perguruan tinggi di Batavia. Bersamaan dengan pemerintahannya, berlaku penghapusan berbagai swapraja di Kepulauan Nusantara.

VII. KLUNGKUNG

Kerajaan Klungkung kini menempati wilayah Kabupaten Klungkung. Rajanya bergelar Dewa Agung dan merupakan kerajaan dengan wilayah paling kecil serta miskin. Meskipun demikian, rajanya diakui sebagai yang tertinggi di antara raja-raja Bali lainnya (dengan gelar Susuhunan Bali dan Lombok) karena dianggap keturunan Sri Kresna Kapakisan. Kerajaan-kerajaan Bangli, Gianyar, dan Badung wajib mengirimkan upeti ke Klungkung. Sementara itu, Kerajaan Buleleng dan Karangasem

75. Lihat *Kenangan Masa Lampau: Zaman Kolonial Hindia Belanda dan Zaman Pendudukan Jepang di Bali*, halaman 122–123.

tidak wajib menyerahkan upeti, namun mereka menghormati Klungkung dengan menjamin relasi yang baik dengan kerajaan-kerajaan lainnya.

Raja Ida I Dewa Agung Jambe yang telah memindahkan pusat kekuasaannya ke Klungkung digantikan oleh putranya Dewa Agung Gede (Surawirya, ± 1722–1736). Selanjutnya, yang berkuasa secara berturut-turut di Klungkung adalah Dewa Agung Made (1736–± 1760), Dewa Agung Sakti (± 1760–1790), Dewa Agung Putra I Kusamba (1790–1809), Dewa Agung Putra II (Dewa Agung Gede Putera, ± 1815–1850) yang didampingi Dewa Agung Istri Kanya, Dewa Agung Putra III Bhatara Dalem (1851–1903), Dewa Agung Jambe II (1903–1908), dan Dewa Agung Oka Geg (1929–1950).

Factorij, perusahaan dagang Belanda di Batavia, mengutus C.A. Grandpré Molière merintis pembukaan kantor perwakilan di Bali. Raja Dewa Agung Putra II menjalin relasi yang baik dengan Molière. Bahkan Raja Klungkung tersebut tidak segan-segan meminta hadiah berupa badak hidup darinya. Binatang itu akan dipergunakan sebagai persembahan dalam upacara keagamaan yang tak lama lagi akan dipimpin oleh Dewa Agung. Setelah berhasil mengadakan perjanjian dengan Badung, Huskus Koopman yang ditugaskan pemerintah Belanda mendekati raja-raja Bali dan berusaha membujuk Dewa Agung menandatangani perjanjian serupa. Menurut pemikirannya, kedudukan Dewa Agung sebagai Susuhunan Bali dan Lombok akan memudahkan upayanya menarik kesediaan raja-raja lainnya mengadakan kesepakatan senada dengan pemerintah kolonial.

Tanpa dinyana-nyana sikap Dewa Agung terhadap Belanda berubah menjadi permusuhan. Ia mengirim surat kepada raja-raja lain yang intinya berpesan agar menghindari kontak dengan orang-orang Eropa dan jangan mengadakan perjanjian apapun dengan mereka. Guna menyelesaikan masalah ini, Koopman menghubungi Mads Lange, pedagang Denmark yang terusir dari Lombok akibat kekalahan Kerajaan Singasari di Lombok. Pedagang tersebut berhasil membangun usahanya lagi yang sebelumnya sempat terpuruk. Karena kedekatannya dengan raja-raja Bali termasuk Dewa Agung, Koopman memanfaatkan jasanya. Melalui perantaraan Mads Lange, Dewa Agung berhasil dibujuk agar tidak memperlihatkan sikap permusuhan lagi terhadap Belanda.

Raja Dewa Agung Putra II akhirnya bersedia menandatangani kontrak dengan pemerintah Belanda pada 6 Desember 1841. Perjanjian yang terdiri dari 7 pasal ini

pada intinya merupakan wujud pengakuan Klungkung atas pertuanan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Raja Klungkung berjanji tidak mengadakan perjanjian atau menyerahkan negerinya kepada bangsa asing lain (pasal 3 dan 4). Apabila pemerintah Hindia Belanda terlibat peperangan maka Klungkung wajib membantunya (pasal 6). Berdasarkan perjanjian dengan Belanda tertanggal 24 Mei 1843, Raja Dewa Agung Putra wajib menghapuskan adat Tawan Karang. Selain itu, rakyat Klungkung diharuskan memberi pertolongan semaksimal mungkin bila ada kapal-kapal yang kandas di pantainya (pasal 2). Selanjutnya, raja diwajibkan melaporkan peristiwa tersebut kepada pemerintah Hindia Belanda (pasal 3). Perjanjian yang sama mengharuskan raja mengirim utusan sebagai tanda hormat setiap 3 bulan sekali kepada Gubernur Jenderal Belanda di Batavia (pasal 4).

Kerajaan Klungkung beserta *enclave-enclave*-nya (1914)

I. Sabang
II. Payangan
III. Tampaksiring
IV. Abian Semal

Enclave adalah wilayah suatu negara yang berada di tengah-tengah wilayah negara lainnya.

Kontrak politik kembali ditandatangani oleh Raja Klungkung pada 13 Juli yang isinya secara garis besar mirip dengan perjanjian tertanggal 6 Desember 1841 di atas. Hanya saja, kali ini terdiri dari 16 pasal sebagai berikut.[76]

Pasal 1: Pengakuan terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda atas Klungkung.

Pasal 2: Raja Klungkung tidak akan mengadakan perjanjian dengan bangsa asing manapun terkecuali Belanda atau menyerahkan kerajaannya kepada mereka.

Pasal 3: Tidak akan menerima utusan atau surat dari bangsa asing manapun tanpa sepengetahuan pemerintah kolonial Belanda.

Pasal 4: Tidak mengizinkan orang asing manapun menetap dalam wilayah Kerajaan Klungkung tanpa seizin pemerintah kolonial Belanda.

Pasal 5: Orang asing yang tinggal menetap di daerah Klungkung dengan seizin pemerintah Belanda akan memperoleh perlindungan dari raja.

Pasal 6: Pemerintah kolonial akan menempatkan wakilnya di Klungkung.

Pasal 7: Perahu yang membawa surat bercap Raja Klungkung bila singgah di pelabuhan-pelabuhan Belanda akan memperoleh perlakukan sama dengan perahu dari kerajaan-kerajaan sahabat lainnya.

Pasal 8: Segenap benteng pertahanan yang ditujukan melawan pemerintah Hindia Belanda akan dibongkar oleh Raja Klungkung.

Pasal 9: Raja Klungkung akan membantu Belanda dalam peperangannya.

Pasal 10: Raja Klungkung akan berjanji memerangi perompakan.

Pasal 11: Klungkung sepakat menghapuskan adat Tawan Karang.

Pasal 12: Mengenai kapal yang kandas.

Pasal 13: Penghapusan perbudakan.

Pasal 14: Penjahat atau serdadu Belanda yang melarikan diri akan dikembalikan kepada pemerintah kolonial.

Pasal 15: Hak Raja Klungkung mengatur negerinya sendiri.

Pasal 16: Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, segenap perjanjian sebelumnya menjadi tak berlaku lagi.

---

76. Lihat *Surat-Surat Perdjandjian antara Keradjaan-keradjaan Bali/ Lombok dengan Pemerintah Hindia Belanda 1811 s/d 1938*, halaman 13–20.

Selain kontrak di atas, masih ada lagi perjanjian tambahan yang ditandatangani Raja Klungkung (*Suppletoir Contract Met Klonkong*). Isinya menyatakan bahwa kontrak atau perjanjian di atas berlaku pula bagi Mengwi.

Ketika timbul pertikaian antara Buleleng dengan pemerintah kolonial Belanda, Klungkung memihak Buleleng. Hal ini menimbulkan kebencian Belanda terhadap Klungkung. Karenanya, setelah Buleleng dikalahkan, serangan dialihkan ke Klungkung. Sasaran pertama yang hendak diduduki oleh pasukan kolonial adalah Kusamba. Pasukan yang dipimpin Jenderal Michiels bergerak ke Kusamba pada 24 Mei 1849. Selama operasi militer ini, pasukan kolonial dibagi dua. Yang satu di bawah pimpinan Michiel sendiri dengan target Goa Lawah, sedangkan sisanya dipimpin oleh Letnan Kolonel van Swieten. Laskar Bali yang bertahan di Goa Lawah tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka hanya bersenjatakan tombak dan keris. Mereka mundur ke Kusamba sehingga Goa Lawah dapat diduduki musuh.

Pasukan pemerintah kolonial melanjutkan perjalanannya ke Kusamba. Tetapi saat hendak memasuki Kusamba, mereka disambut oleh laskar-laskar Klungkung. Karena kalah dalam persenjataan, mereka terdesak mundur dan pasukan kolonial menguasai kawasan tersebut. Jenderal Michiels memerintahkan pasukannya beristirahat di sana. Sebenarnya, tempat itu cukup rawan karena tempat sekitarnya masih dikuasai pasukan Bali yang sewaktu-waktu berpeluang menyerang mereka. Sang jenderal bukannya tak menyadari bahaya ini. Akhirnya, apa yang ditakutkannya benar-benar terjadi. Pada 25 Mei 1849 malam, sekonyong-konyong serombongan besar laskar Bali menyerang serdadu Belanda yang sedang kelelahan.

Jenderal Michiels maju ke depan guna memimpin anak buahnya, tetapi peluru yang ditembakkan pasukan Bali mengenai kakinya. Petugas kesehatan menyarankan agar kakinya segera diamputasi, tetapi ia menolaknya. Ia segera diungsikan ke Padang Bai dan dinaikkan ke kapal perang *Etna*. Kakinya terpaksa diamputasi di atas kapal perang tersebut. Namun, kondisinya makin memburuk sehingga Jenderal Michiels meninggal malam hari itu juga. Serangan yang berhasil memorak-porandakan pasukan Belanda ini direncanakan oleh Dewa Agung Istri Kanya. Ia merupakan putri Dewa Agung Putra I Kusamba yang bersama-sama memerintah Klungkung dengan saudaranya, Dewa Agung Putra II.

Setelah kematian Jenderal Michiels, pimpinan pasukan diambil alih oleh Letnan Kolonel van Swieten. Ia menghadapi dilema karena setelah menelan

kekalahan, semangat pasukannya menurun drastis. Meneruskan serangan ke Istana Klungkung terlalu berisiko karena tempat itu dipertahankan oleh ribuan pengikut setia Dewa Agung yang siap mengorbankan jiwa dan raganya hingga titik darah penghabisan. Apalagi berdasarkan informasi yang diterimanya, laskar Gianyar dan Bangli telah bersiap-siaga di Klungkung menghadapi agresi militer Belanda. Itulah sebabnya, van Swieten beserta pengikutnya meninggalkan Kusamba dan mundur ke Padang Bai. Akibat serangan mendadak pada malam hari itu, Belanda kehilangan 7 perwira tingginya serta 28 anggota pasukan lainnya. Pihak Klungkung menderita kerugian yang lebih besar lagi, yakni 800 orang tewas dan 1.000 lainnya menderita luka-luka.

Jika Belanda memaksakan diri menyerang Klungkung, akan terjadi perang puputan besar-besaran membela Dewa Agung yang dianggap oleh rakyat Bali sebagai personifikasi kehormatan dan keagungan Bali. Serdadu Belanda waktu itu tinggal tersisa 2.500 orang. Seperti biasanya, apabila terdesak Belanda menawarkan perundingan dan menyelesaikan permasalahan dengan jalan damai. Dewa Agung menerima ajakan ini dan berencana mengadakan pertemuan dengan seluruh raja-raja Bali guna mencari solusi terbaik. Letnan Kolonel van Swieten menyebarkan undangan pertemuan kepada Dewa Agung–Raja Gianyar, Mengwi, Tabanan, Badung, dan Bangli yang sedianya akan diadakan pada 6 Juni di Padang Bai

Raja Bali mengemukakan bahwa ia tak bersedia menghadiri pertemuan. Sementara itu, Badung yang diwakili oleh Raja Kesiman beserta Pamecutan dan Raja Tabanan merasa khawatir terhadap janji mendiang Jenderal Michiels yang menyatakan bahwa Raja Bangli akan diangkat sebagai Susuhunan Bali dan Lombok apabila Dewa Agung Klungkung telah berhasil disingkirkan. Hal ini tidak diingini ketiga raja di atas. Mereka mempertimbangkan dan menyadari bahwa keris serta tombak yang dimiliki laskar Bali bukanlah tandingan persenjataan modern pasukan kolonial. Apabila Belanda menyerang Klungkung, meski terjadi perang besar-besaran yang menelan banyak korban, pasukan kolonial pasti akan keluar sebagai pemenangnya. Dewa Agung akan jatuh menjadi korban dan gelarnya dialihkan kepada Raja Bangli.

Itulah sebabnya Raja Kesiman dan Pamecutan dari Badung serta Raja Tabanan berupaya mencegahnya. Mereka lantas menyanggupi menjadi juru penengah antara Belanda dan Klungkung. Ketiga orang raja mengadakan kunjungan kehormatan ke Klungkung pada 6 Juni 1849 demi meyakinkan Dewa Agung bahwa penyelesaian

secara damai merupakan yang terbaik bagi mereka semua. Dewa Agung awalnya bersedia menghadiri pertemuan yang ditunda hingga 10 Juni 1849.

Namun, tanpa dinyata, pada 9 Juni 1849 Dewa Agung merubah pendiriannya dan menyatakan bahwa dia tak dapat menghadiri pertemuan tersebut. Dewa Pahang, Raja Gianyar juga mengabarkan bahwa ia harus menghadiri upacara keagamaan sehingga tak dapat datang. Selain itu, ia menambahkan pula di suratnya bahwa pemerintah kolonial Belanda tentunya cukup pintar sehingga dapat menyelesaikan segenap persoalan itu sendiri tanpa memerlukan kehadiran dirinya. Tentunya ini merupakan sindiran bagi Belanda. Raja Mengwi juga tak bersedia memenuhi undangan Belanda.

Perubahan sikap Dewa Agung ini ternyata dikarenakan pengaruh Dewa Agung Istri Kanya, saudari Raja Klungkung sendiri. Wanita berkepribadian kuat yang sebelumnya merencanakan serangan mendadak di atas meyakinkan Dewa Agung bahwa tujuan Belanda sebenarnya hanyalah mematahkan kedaulatan raja-raja Bali. Dengan demikian, segenap upaya pemerintah Hindia Belanda harus digagalkan. Uraian Dewa Agung Istri Kanya ini dirasa masuk akal oleh Raja Gianyar dan putra mahkota Dewa Agung Ketut Agung sehingga mereka bersedia mendukungnya.

Van Swieten memutuskan bahwa penyelesaian secara damai tampaknya sudah menemui jalan buntu. Agresi militer terhadap Klungkung tak dapat ditunda lagi. Tanpa menunggu instruksi gubernur jenderal, pada 10 Juni 1849 van Swieten menggerakkan pasukannya dari Padang Bai ke Kusamba. Setibanya di Kusamba, van Swieten mendengar kabar mengejutkan dari Mads Lange–pedagang Denmark yang terusir dari Lombok–bahwa Badung telah mengirimkan 6.000 pasukan, Tabanan 10.000 pasukan, Gianyar 8.000 pasukan, dan Mengwi 4.000 pasukan. Klungkung sendiri memiliki pasukan sejumlah 5.000 orang. Dengan demikian, secara keseluruhan 33.000 laskar Bali gabungan dari berbagai kerajaan menantikan mereka di Klungkung.

Meskipun persenjataan mereka sangat sederhana, jumlah mereka yang begitu besar tampaknya merupakan lawan yang teramat berat bagi 2.500 serdadu kolonial, kendati bersenjata modern. Suatu pertumpahan darah besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya telah berada di ambang pintu. Itulah sebabnya, Mads Lange menyarankan agar mencoba lagi jalan damai. Ia akan meminta sahabatnya, Raja Kesiman, membuka lagi pembicaraan dengan Dewa Agung. Gusti Gede Ngurah Kesiman, Raja Kesiman, Badung, dengan senang hati menjalankan tugasnya karena ia memang tak rela gelar Susuhunan Bali dan Lombok dialihkan kepada Raja

Bangli. Berkat keahliannya berdiplomasi, Dewa Agung dapat dibujuk menyerah pada keinginan Belanda. Pertumpahan darah besar-besaran berhasil dihindarkan. Permusuhan antara Klungkung dan Belanda ini diakhiri oleh perjanjian perdamaian di Kuta (13–15 Juli 1849). Setelah penandatanganan perjanjian di atas, pamor Dewa Agung merosot drastis. Ia tidak lagi dapat dipandang sebagai Susuhunan Bali dan Lombok. Seperti kerajaan-kerajaan lain di Bali, kedudukannya kini berada di bawah pemerintah kolonial.

Jikalau dicermati secara seksama, yang diuntungkan dalam situasi ini adalah Mads Lange dan Raja Gusti Gede Ngurah Kesiman. Tujuan Mads Lange menghindari pertempuran besar-besaran sedikit banyak didasari alasan bisnis. Apabila pertempuran tidak terjadi, peluang usahanya akan makin cerah. Sementara itu, Gusti Gede Ngurah Kesiman berhasil menjegal peluang Dewa Gede Tangkeban, Raja Bangli, memperoleh gelar Susuhunan Bali dan Lombok. Setelah perjanjian ditandatangani oleh hampir seluruh raja-raja Bali ataupun wakilnya, pada 15 Juli 1849 diadakan pesta besar di rumah Mads Lange guna merayakan peristiwa gembira tersebut.

Dewa Agung Putra II mangkat setahun kemudian (1850). Putra mahkotanya, Dewa Agung Ketut Agung, menggantikannya dengan gelar Dewa Agung Putra III Bhatara Dalem. Raja Klungkung yang baru ini ternyata adalah pribadi yang ambisius. Dia berniat mengembalikan citra Susuhunan Bali dan Lombok yang telah merosot. Dewa Agung Putra III hanya dapat memandang dengan iri kerajaan-kerajaan Bali di sekitarnya yang telah berkembang menjadi negeri yang kuat. Sebenarnya, kerajaan-kerajaan di Bali lainnya tidak keberatan mengakui raja-raja Klungkung sebagai pemimpin spiritual mereka. Kendati demikian, dalam urusan kenegaraan masing-masing mereka merasa sebagai kerajaan merdeka yang terlepas dari Klungkung. Dewa Agung Putra III tidak puas dengan kondisi semacam ini. Ia mendambakan kedudukan seperti para leluhurnya dahulu semasa masih memerintah di Gelgel saat mereka benar-benar merupakan penguasa politik dan spiritual seluruh Bali.

Apabila Dewa Agung Putra III ingin membangkitkan kembali kekuasaan leluhurnya dulu, ia harus menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya dengan kekuatan militer. Tetapi hal semacam ini tampaknya mustahil karena dari segi wilayah, populasi, dan kemiliteran Klungkung lebih lemah dibandingkan mereka. Oleh sebab itu, demi mewujudkan ambisinya itu ia harus menempuh jalan lain, yakni melalui diplomasi. Ia perlu menerapkan strategi pecah belah dan adu domba terhadap raja-

raja lainnya sehingga memberinya kesempatan melakukan intervensi politis. Saat itu, Dewa Agung Putra III didampingi oleh penasihatnya yang cerdik bernama Ida Ketut Pidada, seorang *pedanda* keturunan brahmana. Tokoh yang paling berpengaruh di Bali, Gusti Ngurah Gede Kasiman, Raja Kesiman, Badung, mangkat pada 1861. Dengan demikian, Dewa Agung merasa bahwa kesempatan baginya menebarkan pengaruh telah tiba.

Dewa Agung Putra III menebarkan suasana permusuhan di antara para raja Bali Selatan, khususnya Badung, Tabanan, dan Gianyar–kerajaan-kerajaan yang tergolong paling makmur saat itu. Kerajaan Gianyar diperintah oleh Raja Dewa Manggis VII beserta dua orang penasihatnya yang andal, Made Pasek dan Ketut Pasek bersaudara. Made Pasek menjabat sebagai patih, sedangkan Ketut Pasek bertanggung jawab atas urusan pengadilan. Mereka berdua dengan gigih menolak campur tangan Dewa Agung dalam urusan internal Gianyar. Kedua orang penjabat tinggi Gianyar ini tidak keberatan mengakui Dewa Agung sebagai pemimpin spiritual tertinggi, tetapi hal ini tak berlaku dalam urusan politik atau di luar hal-hal keagamaan. Sikap seperti ini tentu saja bertentangan dengan ambisi Dewa Agung sehingga hubungan antara kedua kerajaan memburuk. Klungkung memandang Gianyar laksana duri dalam daging yang menghalangi rencananya.

Raja Dewa Manggis VII menyatakan bahwa ia telah berupaya memperbaiki hubungannya dengan Klungkung. Namun, usaha ini tampaknya tidak berhasil. Klungkung tetap iri kepada Gianyar, yang menurut laporan Julius Jacobs, merupakan kerajaan paling makmur dan teratur pada 1881. Tidak mengherankan apabila Klungkung ingin menjadikan Gianyar sebagai mangsa pertamanya. Secara tak terduga, Belanda membuat kebijakan baru pada 1 Juli 1882 dengan menempatkan seorang residen di Singajara serta membentuk Karesidenan Bali dan Lombok. Sebenarnya, kebijakan baru tersebut tidak berdampak besar terhadap para raja karena mereka masih diberi kebebasan memerintah wilayah mereka.

Namun, Dewa Agung Putra III berpendapat lain. Ia merasa bahwa penempatan seorang residen itu bertentangan dengan niatnya memulihkan lagi kekuasaan leluhurnya. Dia berpendapat bahwa ini merupakan langkah Belanda selanjutnya dalam menanamkan kekuasaan di Bali. Oleh sebab itu, Dewa Agung menggalang raja-raja Bali yang bersahabat dengan Klungkung, seperti Badung, Tabanan, dan Mengwi, serta menjelaskan kepada mereka betapa berbahayanya manuver Belanda tersebut. Itulah

sebabnya, demi menghadapi Belanda perlu dibentuk suatu aliansi dengan Klungkung sebagai pemimpinnya. Bersamaan dengan itu, Dewa Agung menyatukan mereka dalam satu fron dan mengarahkannya melawan kerajaan-kerajaan yang tidak bersedia mengakui otoritas Klungkung, seperti Gianyar.

Perubahan politik penting terjadi di Gianyar yang dipicu tergodanya Dewa Manggis VII kepada seorang gadis penari muda dari Sukawati. Gadis tersebut berhasil mempengaruhi raja agar mengangkat saudaranya bernama Ketut Sara menjadi perdana menteri dan menyingkirkan Made Pasek. Sebagai seorang yang awam dalam dunia politik dan diplomasi, Ketut Sara jelas bukan tandingan Ida Ketut Pidada–penasihat utama raja Klungkung.

Aliansi antara Klungkung, Badung, Tabanan, dan Mengwi meresahkan Ketut Sara karena akan mengisolasi Gianyar. Menyadari bahwa Ketut Sara merupakan "anak kemarin sore" dalam hal strategi dan diplomasi, Ida Ketut Pidada menyebarkan ketakutan di kalangan petinggi Gianyar bahwa bila pasukan aliansi sampai menyerang kerajaan itu, resikonya sungguh fatal–kehancuran total Gianyar. Ketut Sara menjadi panik dan menyarankan raja menyerah saja pada keinginan Dewa Agung Klungkung. Sebenarnya, hal itu tak perlu terjadi apabila Made Pasek masih menjabat. Sebagai upaya menghadapi ambisi Klungkung, Made Pasek telah membina kerja sama dengan Karangasem yang berjanji akan melindungi Gianyar apabila diserang oleh Dewa Agung beserta sekutu-sekutunya. Kerja sama ini masih berlaku selama Made Pasek menjadi patih, namun kini kondisinya telah berubah.

Tanpa berpikir panjang apalagi meminta saran para menteri beserta *paruman agung* (dewan kerajaan), Dewa Manggis VII memerintahkan Patih Ketut Sara menjumpai Dewa Agung Putra III dan menyampaikan kesediaan menempatkan Gianyar di bawah supremasi Klungkung. Takluknya Gianyar kepada Klungkung ini terjadi tanpa pertumpahan darah dan Ida Ketut Pidada dengan penuh percaya diri menyatakan kepada rajanya bahwa selama ia masih mengabdikan dirinya, Klungkung tak memerlukan seorang prajurit pun guna menaklukkan seluruh Bali ke bawah payung kekuasaannya. Pada 1885, Dewa Manggis VII ditawan dan diasingkan ke Klungkung. Mengwi dan Bangli secara serentak menyerang dan menduduki wilayah Gianyar. Ketut Pasek, saudara Made Pasek, ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Meskipun demikian, tidak seluruh Gianyar jatuh ke tangan Klungkung. Ubud, salah satu distrik yang masih setia kepada raja Gianyar, di bawah pimpinan penggawanya

bernama Cokorda Gede Sukawati sanggup bertahan dan kelak berhasil memulihkan lagi kedaulatan negerinya.

Mengwi yang dahulunya merupakan sekutu Klungkung tidak bersedia menarik pasukannya dari wilayah Gianyar yang didudukinya, kendati Dewa Agung telah mendesaknya berulang kali. Itulah sebabnya, hubungan persahabatan antara Mengwi dan Klungkung segera berbalik menjadi permusuhan. Klungkung mendorong Badung dan Bangli menyerbu Mengwi dan memusnahkan kerajaan tersebut pada 1891. Keturunan Dewa Manggis berhasil menegakkan lagi kedaulatan Gianyar. Raja Dewa Manggis VIII karena khawatir terhadap ancaman Klungkung mendekati pemerintah kolonial dan menawarkan menempatkan negerinya di bawah perlindungan Belanda. Dewa Agung berkali-kali berusaha mencegah hal ini tetapi gagal. Pada 28 Februari 1900, Residen Bali dan Lombok Liefrinck menerima telegram dari Batavia yang pada intinya menyetujui penempatan Gianyar di bawah perlindungan pemerintah kolonial.

Residen mengabarkan hal ini kepada raja Klungkung, Bangli, Badung, dan Tabanan yang memendam permusuhan terhadap Gianyar. Ia memperingatkan pula bahwa setiap serangan terhadap Gianyar akan dianggap sebagai permusuhan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Dewa Agung Putra III sendiri wafat pada 1903 dan digantikan putranya, Dewa Agung Gede, yang menyandang gelar Dewa Agung Jambe II. Berbeda dengan pendahulunya yang ambisius, Dewa Agung Jambe merupakan pribadi yang lunak dan lebih condong menghindarkan diri dari segenap konfrontasi, terutama dengan pemerintah kolonial Belanda.

Setelah berakhirnya Puputan Badung pada 1906, pemerintah kolonial Belanda yang diwakili Rost van Tonningan dan F. A. Liefrinck menghendaki agar Raja Klungkung menandatangani kontrak baru. Dewa Agung Jambe meminta waktu tiga hari dan pada 11 Oktober 1906 mengumumkan, melalui Cokorda Gede Raka Pugog, bahwa dia menerima segenap tuntutan Belanda. Namun, ia menolak datang ke Gianyar guna menandatangani perjanjian dengan alasan sedang sakit. Liefrinck yang mengetahui tradisi dan adat istiadat Bali dengan baik memahami bahwa ini hanya cara Dewa Agung agar tak dianggap sebagai bawahan pemerintah kolonial. Kendati demikian, gubernur jenderal telah memutuskan tidak mengakui kedudukan istimewa Dewa Agung sebagai Susuhunan Bali dan Lombok. Ia mengancam akan menyerang Klungkung jika Dewa Agung tidak datang sendiri ke Gianyar. Akhirnya,

pada 17 Oktober 1906 sekitar pukul 1 siang, Dewa Agung Jambe II tiba di Gianyar dengan disertai oleh Dewa Gede Tangkeban dari Bangli. Penandatanganan kontrak dengan demikian dapat dilaksanakan.

Hingga saat itu, opium merupakan komoditas yang diperjualbelikan secara bebas di Bali. Biasanya para bangsawan memberikan para pedagang Cina hak mengimpor opium yang pada gilirannya membayar pajak kepada mereka. Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijaksanaan monopoli penjualan opium. Pada kenyataannya, konsumsi opium di Bali tidak dapat dikatakan kecil sehingga monopoli Belanda tentunya akan memangkas secara drastis pendapatan kaum bangsawan. Belanda membuka toko-toko opium di Bali. Hanya toko-toko itulah yang diizinkan menjual opium. Hal ini berpotensi menimbulkan gejolak di tengah masyarakat karena di toko-toko semacam itu mereka tak dapat lagi membeli opium secara eceran. Sebelumnya, opium dijual di pasar-pasar dan para pembeli dapat membeli dalam jumlah kecil. Dengan demikian, kebijaksanaan Belanda ini menimbulkan ketidakpuasan baik di kalangan rakyat maupun bangsawan.

Berfoto bersama Raja Klungkung, Yang Mulia Ida Dalem Smara Putra (urutan ketiga dari kiri) dan Yang Mulia Raja Samu Samu VI (urutan keempat dari kiri)
Foto koleksi pribadi

Kerusuhan merebak di Klungkung, yang mengundang invasi militer Belanda ke Klungkung. Akhirnya, terjadilah Puputan Klungkung yang berlangsung pada 28 April 1908 yang akan diulas pada bagian tersendiri. Raja Klungkung tewas beserta para pengiringnya. Semenjak saat itu, Klungkung diduduki oleh pemerintah kolonial Belanda. Baru pada 1929, Belanda memperkenankan pengangkatan Dewa Agung Oka Geg (1929–1950) selaku kepala Swapraja Klungkung. Dia memerintah hingga era kemerdekaan dan penghapusan berbagai swapraja di seantero Kepulauan Nusantara.

VIII. MENGWI

a. Cikal bakal Kerajaan Mengwi

Kerajaan Mengwi terletak di Kabupaten Badung. Sumber tradisi di Mengwi menyatakan bahwa raja-raja mereka merupakan keturunan langsung Patih Gajah Mada dari Majapahit yang tersohor itu. Melalui ikatan perkawinan, keluarga Kerajaan Karangasem, Buleleng, dan Lombok menjadi satu kerabat dengan kerajaan ini. Dahulu Mengwi memiliki wilayah yang luas, yakni meliputi Krama, Kadeatan, Gianyar, dan Marga. Namun, belakangan Gianyar melepaskan diri dari kekuasaan Mengwi dan merebut daerah Krama. Mengwi juga mengakui raja-raja Klungkung sebagai yang tertinggi di antara raja-raja Bali.

Cikal bakal Kerajaan Mengwi adalah seorang tokoh bernama Agung Anom yang pada kurang lebih awal abad 17 berhasil menjadi penguasa desa Kapal (selatan Mengwi).[77] Tetapi kekuasaannya di sana tidak langgeng karena ia dikalahkan oleh penguasa lokal lainnya dan terpaksa melarikan diri ke Tabanan. Agung Anom pindah ke desa Blayu dan menjadi penguasa di sana. Agar kekuasaannya makin kokoh, Agung Anom menjalin aliansi dengan Buleleng yang saat itu diperintah oleh Panji Sakti. Agung Anom menikah dengan putri Panji Sakti agar perlindungan yang diberikan Buleleng terhadap Blayu makin kuat.

Pada 1697, Buleleng mengirimkan ekspedisi militernya ke Blambangan. Agung Anom atau Gusti Agung tentu saja turut menyertai mertuanya. Hubungan antara Blayu dan Buleleng mengalami kemunduran pada 1704 dengan kematian Panji Sakti. Pada kurun waktu tersebut Agung Anom telah berhasil mengukuhkan dirinya sebagai raja Mengwi dengan gelar I Gusti Agung Ngurah Made Agung (1690–1722). Bersamaan dengan itu, Blambangan memberontak. Agung Anom menggunakan kesempatan

77. Lihat *The Spell of Power*, halaman 33.

ini menaklukkan dan menegakkan hegemoninya atas kawasan di penghujung timur Jawa tersebut. Sejarah membuktikan bahwa Agung Anom berhasil membawa Mengwi sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Wilayah Mengwi diperluasnya hingga ke Buleleng di utara, Jembrana di barat, dan Blambangan di Jawa Timur. Ekspansi wilayah ini dilakukan baik dengan jalan kekerasan ataupun damai. Beberapa penguasa setempat menyerahkan diri sebelum diserang. Seiring dengan perluasaan kerajaan, timbul pula cabang-cabang dinasti Mengwi seperti Sibang, Penarungan, Kapal, dan lain sebagainya. Sumber VOC pada 1710 menyebut Agung Anom sebagai "Gusti Hagong van Magoehie." Berdasarkan sumber yang sama disebutkan pula bahwa tokoh tersebut sangat besar pula pengaruhnya di Blambangan dan Buleleng.

Pusat pemerintahan Mengwi dipindahkan dari Blayu ke Desa Mengwi karena letaknya dinilai lebih strategis. Mengingat luasnya wilayah kekuasaan Agung Anom, ia sering berpindah-pindah tempat. Sebagai contoh, pada 1711–1712, 1714, dan 1718 ia berada di Blambangan, guna memastikan agar kawasan tersebut tetap setia kepadanya. Raja besar Mengwi ini harus menjamin pula kesetiaan Buleleng yang sepeninggal Panji Sakti jatuh dalam payung kekuasaan Agung Anom. Meskipun demikian, pada 1718–1719 pengganti Panji Sakti melancarkan ekspedisi militer ke Jawa Timur dan Madura tanpa dapat dicegah oleh Agung Anom.

Agung Anom mendapatkan tantangan pula dari para penguasa setempat di sekitarnya. Ketika Agung Anom sedang berada di Blambangan, roda pemerintahan di Mengwi diwakilkan kepada putranya, Agung Panji. Bersamaan dengan itu, pecah pemberontakan yang didukung oleh penguasa Sukawati. Meletuslah pertempuran sengit antara Mengwi dan Sukawati (1713–1717). Agung Panji gugur dalam pertempuran tersebut dan selanjutnya dikenal sebagai Pahlawan Besar Mengwi. Sebuah pura didirikan di tempat ia gugur. Selain itu, di pura ayahnya yang terletak di desa Blayu dibangun *pelinggih* (tempat pemujaan) untuk mengenangnya. Demi memantapkan dan mengamankan kekuasaannya, Agung Anom lantas menyandang gelar Cokorda Gusti Agung dari Kerajaan Mengwi pada 1717. Namun, penggunaan gelar ini tidak menyurutkan perlawanan musuh-musuhnya hingga ia mangkat pada 1722.

b. Perkembangan Kerajaan Mengwi

Raja Agung Anom digantikan oleh putranya, Agung Alangkajeng (1722–1740). Seperti ayahnya, Agung Alangkajeng melakukan perjalanan suci atau perziarahan ke bekas pusat pemerintahan Majapahit yang diyakini sebagai leluhur mereka. Sebelumnya, Agung Anom pernah berupaya mengadakan perjalanan seperti itu, tetapi gagal karena meletusnya perang antara Mengwi dan Sukawati. Antara 1729–1730, Agung Alangkajeng dengan disertai raja Tabanan dan Klungkung membawa 4.000 tentara Bali melintasi Jawa Timur. Tujuan mereka adalah desa Wirasaba, empat belas jam perjalanan dari Surabaya, yang dipercaya sebagai bekas ibu kota Majapahit. Sayangnya, di tengah jalan rombongan terhalang oleh musim hujan sehingga banyak tentara jatuh sakit.

Terancamnya wilayah Mengwi serta Tabanan oleh serangan Buleleng dan Sukawati memaksa para raja kembali ke Bali. Namun, perjalanan ziarah ini tidak gagal sepenuhnya karena mereka sempat mengadakan upacara besar di Semeru, gunung yang dianggap suci oleh umat Hindu. Bahkan, Agung Alangkajeng melangsungkan upacara pernikahannya dengan putri penguasa Blambangan di gunung ini. Disaksikan oleh Raja Klungkung, Agung Alangkajeng menerima gelar Pangeran Purbanegara (arti harfiahnya adalah 'Pangeran Penguasa Tanah yang Lama') dari *pemangku* agama Hindu di Semeru. *Babad Mengwi-Sedang* tidak menyebutkan mengenai perjalanan ini dan hanya meriwayatkan bahwa Agung Alangkajeng menerima sebilah keris dari Dukuh Smeru (*pemangku* Agama Hindu di Semeru) yang menjadikannya tak terkalahkan.

Hubungan antara Mengwi dan Klungkung makin bertambah erat karena masing-masing saling memerlukan satu sama lain. Pada 1733 meletus peperangan dashyat yang hampir melibatkan seluruh raja-raja di Bali. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 12.000 pasukan terlibat dalam pertempuran ini. Pemicu pertempuran adalah perebutan desa Banjarambengan. Pasukan Mengwi, Klungkung, Tabanan, Sibetan (Karangasem), dan Blambangan di satu pihak berhadapan dengan Buleleng, Sukawati, dan Tamanbali. Peperangan besar ini akhirnya dimenangkan oleh Agung Alangkajeng (Mengwi). Konon, kemenangannya diperoleh berkat keris I Semeru yang dihadiahkan oleh Dewa Pasupati Gunung Semeru.

Orang-orang Madura menyerang Blambangan pada 1739 dan memicu kerusuhan besar di sana. Karenanya, Agung Alangkajeng harus bergerak cepat memadamkannya. Kesempatan ini dipergunakan Gusti Kamasan, penguasa Sibang dan sekaligus putra

Agung Anom, untuk memunculkan pemberontakan terhadap Agung Alangkajeng. Istana kerajaan Mengwi dikepung para pengikut Gusti Kamasan. Agung Alangkajeng menerapkan strategi unik dalam menyelesaikan percobaan makar terhadap dirinya ini. Raja kembali ke Mengwi tetapi berlaku seolah-olah tidak mengetahui pemberontakan tersebut. Ia tak memperlihatkan gelagat hendak menyerang kaum pemberontak. Agung Alangkajeng mengabarkan kedatangannya sebagaimana wajarnya dan bahkan membawa berbagai hadiah untuk Gusti Kamasan.

Gusti Kamasan sendiri beserta pengikutnya bingung dengan sikap dan perilaku raja mereka, para sekutunya lantas meninggalkannya sehingga Gusti Kamasan ketakutan serta melarikan diri ke Badung. Raja Mengwi memperlihatkan jiwa besarnya dengan mengirim pesan kepada Gusti Kamasan yang menyatakan bahwa ia diperbolehkan kembali ke Sibang bila menghendakinya dan Agung Alangkajeng akan menjamin keselamatan jiwanya. Tawaran ini tidak serta merta diterima oleh Gusti Kamasan yang masih merasa malu karena meninggalkan gelanggang peperangan secara tak terhormat. Ia bersedia kembali ke Mengwi asal diperbolehkan datang sebagai pemenang. Raja membiarkan Gusti Kamasan "menyerang" beberapa desa di sekitar Sibang dan memasukkannya dalam daerah kekuasaannya. Semenjak saat itu hubungan antara Mengwi dan Sibang selaku vasalnya berhasil dipulihkan. Para penguasa Sibang diterima kembali sebagai bagian dinasti Mengwi.

Sepeninggal Agung Alangkajeng, terjadi disintegrasi kekuasaan di Mengwi. Penggantinya bukan putranya sendiri, melainkan dua orang kemenakannya yang berasal dari Munggu–salah satu cabang dinasti Mengwi. Mereka masing-masing bernama Agung Putu Mayun dan Agung Munggu. Keduanya merupakan putra Agung Nyoman Alangkajeng, pendiri *puri* (istana) Munggu dan sekaligus saudara raja. Agung Putu Mayun yang lebih tua usianya pindah ke Istana Mengwi, sedangkan adiknya menggantikan ayahnya sebagai penguasa Munggu. Pengakuan sebagai Raja Mengwi telah diperolah oleh Agung Putu Mayun. Namun, ia tak berhasil mengatasi pemberontakan yang berkecamuk di sebelah timur Mengwi.

Penguasa Bun memberontak terhadap Mengwi dengan didukung oleh Sukawati. Agung Putu Mayun beserta adiknya, Agung Munggu, mengerahkan pasukannya ke Bun. Namun, menjelang pertempuran yang menentukan, Agung Munggu pulang ke tempat kediamannya dengan dalih bahwa ia harus menghadiri suatu upacara keagamaan. Tentu saja hal ini menimbulkan kecurigaan dalam diri Agung Putu

Mayun bahwa adiknya menjalin hubungan rahasia denegan pihak musuh. Kendati demikian, ia ingin membuktikan bahwa dia sanggup menghadapi kaum pemberontak sendiri. Ternyata pertempuran tersebut justru menjadi yang terakhir bagi dirinya. Gugurnya Agung Putu Mayun memberi kesempatan bagi Agung Munggu merebut kekuasaan.

Agung Munggu membalas dendam terhadap kekalahan di Bun. Bersama-sama dengan penguasa Kaba-Kaba (cabang dinasti Mengwi lainnya) dan Sibang, ia menaklukkan serta menghancurkan Bun. Istana beserta desanya diluluhlantakkan dan penduduknya tercerai-berai. Yang tak sempat melarikan diri ditawan serta dijadikan budak. Kekuasaan Agung Munggu makin besar dan ia tercatat membangun puri baru menggantikan yang lama guna mengabadikan keagungannya. Seluruh raja-raja di Blambangan dan Bali, terkecuali Tabanan, mengakui kekuasaannya. Wilayah Mengwi saat itu meliputi Blambangan, Buleleng. Jembrana, dan Badung. Meskipun demikian, raja sebenarnya tak memiliki otoritas langsung di sana. Raja Mengwi hanya memegang wewenang penuh di daerah inti kekuasaannya sendiri saja.

Agung Munggu mangkat pada 1770 dan digantikan oleh permaisurinya, Ayu Oka (1770–1807). Setahun kemudian (1771), Badung yang sebelumnya merupakan bawahan Mengwi berupaya memisahkan diri. Meskipun demikian, pemberontakan ini dapat ditumpas oleh Mengwi. Perebutan kekuasaan pecah di Tabahan semenjak 1793. Ketika itu, Raja Tabanan meminta bantuan Mengwi menyingkirkan saingannya. Pasukan Mengwi sanggup mengalahkan kaum pemberontak sehingga Raja Tabanan yang berhasil dipulihkan kekuasaannya merasa berhutang budi kepada Mengwi. Ratu Ayu Oka menganggap bahwa sebagai tanda jasa, Mengwi berhak mencaplok beberapa desa yang menjadi wilayah Tabanan. Akibatnya, hubungan antara Mengwi dan Tabanan menjadi retak. Kedua kerajaan saling mencurigai dan membangun benteng serta menempatkan mata-matanya di sepanjang perbatasan Sungai Sungi.

Blambangan lepas dari tangan Mengwi pada 1771. Ketika itu, terjadi perang perebutan kekuasaan di Blambangan. Salah satu pihak meminta bantuan VOC. Belanda khawatir daerah tersebut akan jatuh ke tangan Inggris sehingga tanpa berpikir panjang menerjunkan pasukannya. Angkatan perang VOC dengan persenjataan yang lebih hebat bukanlah tandingan Mengwi. Meskipun dibantu oleh Jembrana beserta sekutu lainnya, Mengwi terpukul mundur dari Blambangan. Para prajurit Bali

mengakui kedigdayaan VOC dengan menyebut musuhnya itu sebagai "Dewa dengan senjata guruh beserta halilintarnya"[78] (maksudnya tembakan meriam).

Babad Mengwi memuat kisah menarik mengenai kutukan Mas Sepuh (Danuningrat, Raja Blambangan 1736–1767). Konon, ia adalah salah satu di antara pihak-pihak yang berebut kekuasaan di Blambangan. Raja menuduhnya menjalin hubungan dengan VOC dan memerintahkannya menghadap ke Mengwi pada 1764. Setibanya di Mengwi, Mas Sepuh beserta pengikutnya langsung ditawan. Kebetulan saat itu Mengwi dilanda wabah penyakit dan orang-orang yang masih percaya takhayul menimpakan tuduhannya kepada Mas Sepuh. Namun, menurut *babad,* kesalahan sesungguhnya terletak pada pihak kerajaan Mengwi sendiri. Raja Mengwi ingin menyingkirkan Mas Sepuh dari muka bumi. Ia berpura-pura mengizinkan Mas Sepuh pulang ke Blambangan dengan dikawal oleh penguasa Sibang. Di tengah jalan (tepatnya di pantai Seseh), raja memerintahkan agar Mas Sepuh dibunuh. Kendati demikian, sebelum meninggal Mas Sepuh mengutuk Mengwi dan Sibang. Ia mengatakan bahwa Kerajaan Mengwi kelak akan menemui kehancurannya.

Ratu Ayu Oka jatuh cinta dengan Raja Dewa Manggis di Madia (Dewa Manggis V, memerintah 1814–1839 atau 1788–1839) dari Gianyar. Ia merupakan tamu rutin di Istana Mengwi dan tersohor sebagai penari yang hebat. Perannya sebagai Panji sungguh mengesankan Ratu Mengwi. Karena begitu larut dalam cintanya, Ratu Ayu Oka menghadiahkan dua pusaka Mengwi kepada Dewa Manggis di Madia. Salah satunya adalah hiasan kepala yang dikenakan tokoh Panji saat pementasan. Peristiwa ini merupakan tanda-tanda kemunduran bagi Mengwi. Raja Dewa Manggis V belakangan mengirimkan pasukannya dan mencaplok desa Blahbatuh serta Kramas milik Mengwi. Tetapi Ratu Ayu Oka membiarkan begitu saja agresi tersebut.

Masalah suksesi timbul di Mengwi karena putra mahkota yang sedianya diangkat sebagai raja berikutnya mangkat dalam usia muda pada 1794. Akhirnya, yang terpilih sebagai pengganti Ayu Oka adalah cucunya, Gusti Alit Raka, dengan gelar Agung Ngurah Made Agung (1807–1823). Semasa kekuasaannya, kaum bangsawan Mengwi bertambah erat jalinan kekeluargaannya. Mereka menolak menikah dengan orang luar dan lebih memilih pasangan hidup dari kalangan sendiri. Daerah kekuasaan Mengwi makin menyusut karena kerajaan-kerajaan yang lebih kuat kerap mencaplok daerah pinggirannya. Badung sendiri tidak merasa tunduk lagi kepada Mengwi

78. Lihat *Spell of Power*, halaman 119.

dan melepaskan dirinya. Bahkan, Badung merebut dan menanamkan pengaruhnya di Sibang, yang merupakan wilayah Mengwi. Buleleng sendiri jatuh ke tangan Karangasem, kerajaan di ujung timur Bali yang sedang menanjak pamornya.

Kerajaan Mengwi memasuki masa suramnya. Raja malah menyingkirkan orang-orang jujur dan lebih memercayai para pejabat yang berhati busuk. Salah seorang di antara mereka adalah Sagung Nderet yang saat itu menjabat sebagai *sedahan gede*. Ia merupakan pejabat yang hanya memikirkan cara bagaimana memperkaya dirinya saja. Kendati demikian, Sagung Nderet merupakan orang kepercayaan dan kesayangan raja. Para petani dibebaninya pajak yang sangat berat. Perdagangan candu dimonopolinya. I Kemoning adalah pembantu kepercayaan raja yang kini sudah lanjut usianya. Dahulu ia adalah seorang penari terkenal. Tokoh yang setia kepada raja ini berpikir bahwa satu-satunya wujud kesetiaan yang masih dapat diberikan pada tanah airnya sepanjang sisa hidupnya adalah menasihati raja mengenai sepak terjang Sagung Nderet. Ia memperingatkan raja agar berhati-hati pada Sagung Nderet yang berpotensi menggerogoti kekuasaan Mengwi.

Raja bingung mendengarnya dan ragu mengambil keputusan. Sementara itu, pembicaraan tersebut terdengar oleh kaki tangan Sagung Nderet, yang mengambil keputusan membunuh I Kemoning. Orang tua itu telah menyadari bahwa akhir hayatnya hampir tiba dan segera mempersiapkan dirinya. I Kemoning dibawa ke sebuah kuburan desa, tempat ia hendak dihabisi nyawanya oleh pejabat berhati busuk itu. Sebelum eksekusi dijalankan, I Kemoning masih sempat menarikan satu fragmen cerita yang memperlihatkan kesetiaannya pada kerajaan.

Tindakan Sagung Nderet ini memang terbukti melemahkan Mengwi. Perselisihannya dengan Made Tibung–penguasa Padangluah–mengakibatkan Badung turut campur. Kerajaan tetangga di sebelah selatan Mengwi yang diperintah oleh Gusti Ngurah Made Pamecutan II (1817–1828) tersebut berhasil menguasai sejumlah daerah yang dahulu dimiliki Mengwi. Kendati tidak diakui oleh raja-raja Mengwi berikutnya, Raja Agung Ngurah Made Agung terpaksa takluk kepada Badung. Mengwi seolah-olah menjadi bawahan Badung dan harus menyetorkan upetinya kepada kerajaan pemenang. Pada 1823–1828, Mengwi berada di bawah kekuasaan Badung.

Raja Badung mangkat pada 1828 yang kemungkinan karena diracun. Pemicunya barangkali adalah kerja sama Raja Badung dengan Belanda. Tindakan ini tidak disetujui bawahannya yang merasa terancam dengan hadirnya rezim kolonial tersebut

sehingga mereka memutuskan membunuh rajanya. Badung kemudian dilanda kekacauan internal. Terjadi perebutan kekuasaan antara putra raja yang wafat dengan pamannya, Gusti Ngurah Gede Kesiman. Putra mendiang Raja Badung terpaksa melarikan diri ke Klungkung dan menyerahkan Mengwi kepada Raja Klungkung. Oleh karena itu, Raja Klungkung menganggap bahwa dirinya adalah penguasa tertinggi di Mengwi. Meskipun demikian, kesempatan ini dipergunakan Mengwi menegakkan lagi kedaulatannya dan Gusti Agung Ngurah Made Agung Putra (Agung Putra, 1829–1836) diangkat sebagai Raja Mengwi yang baru. Meskipun demikian, memulihkan kekuasaannya di bekas wilayah Mengwi bukan pekerjaan mudah. Para penguasa lokal kerap menentang kewibawaannya. Raja Agung Putra juga bukan penguasa populer karena hubungan percintaan sesama jenisnya dengan para penari pria. Sampai-sampai raja mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai putra mahkota. Tindakan ini menggusarkan hati para bangsawan Mengwi sehingga pamor raja menjadi merosot.

Berbagai faksi kaum bangsawan yang kuat ingin merebut kekuasaan Mengwi. Dua orang bangsawan yang pernah melarikan diri ke Klungkung akibat intrik politik di Mengwi diizinkan kembali oleh Raja Klungkung pada 1835. Mereka adalah Agung Mayun (sepupu Agung Putra) dan Agung Besakih (adik Agung Putra). Riwayat Raja Mengwi berakhir akibat kesalahan putra mahkotanya yang bekas penari itu. Ia melarang seorang kepala desa dari Munggu bernama I Gede Bandem memasuki istana. Tindakan ini menggusarkan hati I Gede Bandem, yang kemudian menghadap Agung Besakih. Di luar dugaan, Agung Besakih justru menyambutnya dengan ramah. I Gede Bandem mengutarakan niatnya hendak membunuh putra mahkota. Agung Besakih tidak memberikan jawaban apa-apa, melainkan tersenyum saja. Isyarat ini dipahami oleh I Gede Bandem sebagai restu atas keinginannya.

Pasukan dari desa Munggu mengepung Istana Mengwi sehingga raja dan putra mahkotanya memutuskan lari ke Tabanan. Di tengah-tengah kegelapan, para pengejar yakin bahwa mereka telah menangkap penari gandrung itu dan membunuhnya. Ternyata yang mereka bunuh adalah Raja Agung Putra sendiri. Kini timbul pertanyaan, siapa yang patut menggantikannya. Pertemuan besar diadakan di Puri Mayun, yang menandakan betapa besarnya pengaruh Agung Mayun saat itu. Kendati demikian, yang mendapat kehormatan menduduki singgasana Mengwi adalah permaisuri Agung Putra, yakni Ratu Biang Agung (1836–1857) dari Sibang. Semenjak saat itu, kekuasaan di Mengwi terpecah menjadi dua, yakni puri utama Kerajaan Mengwi dengan Puri

Mayun. Meskipun Biang Agung secara formal merupakan penguasa tertinggi Mengwi, sebagian besar kekuasaan sesungguhnya terletak di tangan Agung Mayun.

Kendati tidak menduduki singgasana Mengwi, Agung Mayun berhasil membuktikan dirinya sebagai pemimpin andal. Ia merupakan seorang prajurit yang sangat dihormati. Bidang pertanian tidak luput dari perhatiannya. Seluruh kemampuannya menjadikan Agung Mayun sebagai pemimpin dinasti Mengwi yang sesungguhnya. Banyak orang meyakini bahwa Agung Mayun mempunyai kekuatan gaib yang sanggup meredakan wabah atau serangan hama.

Ketika Ratu Biang Agung mendadak meninggal, masalah suksesi merebak kembali dan menghantui Mengwi. Dewa Agung Klungkung berniat menuntut singgasana Mengwi. Di tengah-tengah situasi kritis itu, Agung Mayun berhasil mendudukkan putra keduanya sebagai Raja Mengwi dengan gelar Gusti Agung Ngurah Made Agung (1859–1891). Dengan pengangkatan putranya itu, kekuasaan Agung Mayun makin besar saja. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah penguasa Mengwi yang sebenarnya. Pemimpin besar Mengwi ini mangkat pada 1871 bertepatan dengan Hari Raya Galungan.

Sepeninggal Agung Mayun, Bali dilanda oleh serangkaian wabah dan serangan hama. Semua ini menjerumuskan seluruh Bali selatan dalam krisis dan peperangan yang seolah-olah tanpa akhir. Meskipun demikian, semenjak kematian Agung Mayun, Mengwi tampaknya menjadi kerajaan yang kokoh. Ketiga putra Agung Mayun telah memegang jabatan-jabatan penting di Mengwi. Putra tertuanya menjadi patih dan sekaligus panglima perang. Putra kedua telah dinobatkan sebagai Raja Mengwi, sedangkan putra bungsunya menjadi penguasa timur laut kerajaan. Meskipun demikian, Raja Mengwi sendiri merupakan pemadat, suatu kebiasaan buruk yang akhirnya melumpuhkan kedua kakinya. Akibatnya, Gusti Made Raka memegang kendali atas roda pemerintahan kerajaan menggantikannya.

Helaian sejarah Mengwi selanjutnya dihiasi oleh pertikaian antara Gusti Made Raka dan raja beserta kerabat lainnya yang disebabkan oleh masalah wanita. Agung Kerug, putra tertua Gusti Made Raka berbalik melawan ayahnya dan memihak raja. Akibatnya, Gusti Made Raka makin terisolasi dan memutuskan mengungsi ke Badung pada 1883. Bersama dengan kepergiannya dibawa pula dua bilah keris pusaka. Hengkangnya Gusti Made Raka yang merupakan negarawan andal sebenarnya merupakan kerugian bagi Mengwi.

Agung Kerug memanfaatkan situasi ini dan menggantikan ayahnya sebagai Patih atau Perdana Menteri Mengwi. Namun, ia menerapkan kebijaksanaan yang keras sehingga memancing banyak musuh. Kepala desa yang tak bersedia mematuhi kehendaknya harus siap kehilangan nyawanya. Pajak sawah ditingkatkan jumlahnya dan perdagangan candu dimonopoli. Pada 1885, Mengwi turut terlibat dalam serbuan Klungkung ke Gianyar. Agung Kerug memimpin pasukan Mengwi menduduki Gianyar bagian barat dan menangkap serta membawa Raja Gianyar, Dewa Manggis VII, ke Klungkung. Persekutuan antara Mengwi dan Klungkung tidak berlangsung lama karena Mengwi enggan melepaskan wilayah Gianyar yang telah didudukinya. Hubungan antara kedua kerajaan makin memburuk ketika Mengwi memberikan suaka bagi tiga pelarian Gianyar yang memusuhi Raja Klungkung. Meskipun demikian, Klungkung belum siap mengambil tindakan terhadap Mengwi.

Sementara itu, hubungan antara Mengwi dan dua tetangganya–Badung beserta Tabanan–tetap kurang harmonis. Agung Made Raka yang mengasingkan diri di Badung mangkat pada 1885. Meskipun berselisih dengan ayahnya, Agung Kerug meminta kepada Raja Badung agar bersedia memulangkan jenazah ayahnya. Ia ingin mengadakan upacara *ngaben* (upacara pembakaran jenazah) besar-besaran bagi ayahnya agar dianggap sah sebagai pewaris. Selain itu, Agung Kerug berharap memperoleh dua bilah keris pusaka yang dibawa lari ayahnya.Di luar dugaan, Raja Badung menolak keinginan ini sehingga memantik amarah Agung Kerug yang merasa kehormatannya dilecehkan.

Sebagai balasan atas penghinaan Raja Badung, Agung Kerug memerintahkan penutupan jalur irigasi ke Badung. Terkadang air dibiarkan mengalir, tetapi sudah dicemari oleh kotoran sehingga tidak layak diminum atau dipergunakan mandi. Akibatnya, Badung mengalami gagal panen di sebagian besar wilayahnya dan terancam bahaya kelaparan. Raja Badung meminta bantuan Belanda, tetapi saat itu pemerintah kolonial belum bersedia campur tangan dalam masalah internal Bali. Bantuan dari Klungkung juga mustahil diharapkan karena rajanya sedang sibuk mengonsolidasikan kekuatannya. Akhirnya, hanya Tabanan–musuh bebuyutan Mengwi lainnya–yang dapat diandalkan bantuannya. Tabanan memblokade bagian utara Mengwi sehingga para pedagang tidak diperkenankan keluar atau masuk melalui kawasan tersebut. Tindakan ini dimaksudkan melemahkan Mengwi secara ekonomi.

Kedudukan Agung Kerug dalam negerinya sendiri boleh dikatakan goyah. Ia terlibat pertikaan dengan cabang dinasti Mengwi yang menguasai Sibang dan Kaba-

Kaba. Akibatnya, meski secara wilayah masih termasuk Mengwi tetapi penguasa Sibang mengikat sumpah setia kepada Raja Klungkung. Karena mencurigai bahwa penguasa Kaba-Kaba hendak merebut kedudukannya sebagai patih, Agung Kerug merancang pertikaian masyarakat dan menggunakannya sebagai dalih menyerang serta membunuh penguasa Kaba-Kaba. Kerabat penguasa Kaba-Kaba melarikan diri ke Tabanan dan menunggu kesempatan memperoleh kembali daerahnya.

Di tengah-tengah kondisi internalnya yang kacau seperti itu, Mengwi melibatkan diri kembali dalam permasalahan di Gianyar sehingga jurang permusuhannya dengan Klungkung makin dalam. Kekuatan baru bangkit di sebelah barat Gianyar yang berbatasan dengan Mengwi. Cokorda Gede Sukawati, penguasa Ubud, berhasil membangun kekuatan yang patut diperhitungkan. Karena mereka memiliki musuh bersama, yakni Klungkung, Mengwi memilih menjalin persekutuan dengan Cokorda Sukawati. Serangan bersama antara Mengwi dan Ubud dilancarkan pada Juli 1890 dan Januari 1891. Namun, Klungkung baru dapat dikalahkan pada Mei 1891. Seolah-olah kekuatan militer Klungkung telah dipatahkan, tetapi serangan balik yang tak terduga sanggup mencerai-beraikan angkatan perang Mengwi.

Keterlibatan Mengwi dalam petualangan militer di Gianyar ini lebih banyak kerugian daripada keuntungannya. Cokorda Gede Sukawati sendiri tak sanggup membantu Mengwi karena jumlah musuhnya juga tidak sedikit. Dewa Agung, Raja Klungkung, beranggapan bahwa serangan terhadap Mengwi tidak perlu ditunda lebih lama lagi, yang akhirnya dilancarkan pada awal 1891. Penguasa Sibang memutuskan hubungannya dengan Mengwi dan berbalik mengakui kedaulatan Klungkung. Sebelum dilancarkannya serangan akhir, Klungkung memerintahkan Raja Gusti Agung Ngurah Made Agung agar menyerahkan Agung Kerug. Tetapi keinginan ini ditolak oleh Mengwi. Pada 1890, Liefrinck selaku wakil pemerintah kolonial pernah berkunjung ke Mengwi dan ditemui oleh Agung Kerug sendiri. Kendati demikian, Belanda tidak bersedia terlibat dalam konflik di Bali selatan ini karena masih disibukkan dengan Perang Aceh.

c. Runtuhnya Mengwi

Dewa Agung Klungkung yang berupaya memberikan pukulan terakhir kepada Mengwi mengeluarkan surat keputusan pada Juni 1891 yang menyatakan bahwa ia telah memberhentikan Raja Mengwi, dan kerajaannya sementara waktu diserahkan kepada Badung beserta Tabanan. Kedua kerajaan musuh bebuyutan Mengwi ini segera

menanggapi seruan Raja Klungkung. Bangli tidak mau ketinggalan dan menyerang Carangsari dan Petang. Oleh karena itu, Mengwi dikepung oleh Tabanan, Badung. dan Bangli. Penguasa Carangsari dan Petang menyerah dan mengakui Raja Bangli sebagai tuan mereka. Para penguasa Sibang yang kurang akur dengan pemerintah pusat di Mengwi menikam dari belakang. Agung Kerug beserta pemimpin Mengwi lainnya terluka dan melarikan diri sehingga menurunkan moral pasukan Mengwi.

Setelah para pengikutnya gugur atau melarikan diri, Raja Mengwi terakhir, Gusti Agung Ngurah Made Agung, yang telah lanjut usianya, keluar dari istananya dengan disertai sisa-sisa pengikutnya karena terbunuh dalam istananya sendiri merupakan kehinaan bagi seorang raja di Bali. Pertempuran singkat terjadi antara kedua belah pihak yang diakhiri dengan gugurnya Agung Ngurah Made Agung. Raja Mengwi terakhir itu tewas tertombak oleh tentara Badung di atas tandunya. Semenjak saat itu, sisa-sisa wilayah Mengwi dibagi-bagikan kepada para pemenang. Kerajaan Mengwi dengan demikian tenggelam dalam panggung sejarah. Kutukan Mas Sepuh tampaknya terbukti keampuhannya.

d. Upaya Merestorasi Mengwi

Agung Kerug dan putra mahkota Mengwi, Agung Gede Agung, melarikan diri ke Ubud. Raja Karangasem yang sama-sama bermusuhan dengan Klungkung menjalin persekutuan dengan mereka. Medan peperangan baru segera timbul. Karangasem berperang dengan Klungkung karena masalah perbatasan. Sementara itu, Ubud berupaya menghalau sisa-sisa pasukan Klungkung dari Gianyar. Pada Agustus 1892, para pelarian dari Mengwi berupaya merebut kembali kerajaannya, tetapi gagal. Badung beserta Tabanan melumatkan Mengwi hingga ke akar-akarnya dan banyak warga yang kehilangan tanahnya. Akibatnya, tidak sedikit bekas penduduk Mengwi yang melarikan diri ke Ubud sehingga menambah sumber daya kawasan tersebut.

Dengan kembalinya pewaris takhta Gianyar ke singgasananya, Ubud menjadi bagian Gianyar. Oleh karena itu, para pengungsi Mengwi tidak dapat lagi mengharapkan bantuan penguasa Ubud. Pada 1898 mereka melakukan serangan ke wilayah Mengwi yang dikuasai Badung, namun masih gagal. Kendati demikian, mereka berhasil memantapkan kedudukannya di Desa Abiansemal. Putra mahkota Mengwi–Agung Gede Agung–menetap dan membangun kekuasaannya di sana. Karena itu, Mengwi seolah-olah telah berdiri kembali. Hubungan dengan cabang-cabang dinasti Mengwi dijalin kembali. Gianyar pada saat itu telah menyatakan dirinya berada di

bawah protektorat pemerintah Hindia Belanda. Namun, Agung Gede Agung ingin menjauhkan diri dari pemerintah kolonial sehingga memutuskan hubungannya dengan Gianyar dan menempatkan dirinya di bawah payung pengaruh Klungkung.

Pada 1902, seorang tokoh bernama Gusti Made Ringkus–keturunan Puri Mayun, salah satu cabang dinasti Mengwi–berdiam di Blahkiuh, bagian utara Abiansemal. Ia merupakan seorang yang sanggup membaca situasi politik saat itu. Baginya lebih menguntungkan berlindung di bawah otoritas pemerintah kolonial ketimbang Klungkung. Belanda saat itu telah mencaplok Bali utara dan Lombok sehingga penaklukkan Bali selatan tinggal menunggu waktu saja. Selain itu, kawasan yang baru mereka duduki tersebut rentan diserang oleh Badung dan Tabanan. Oleh karenanya, Gusti Made Ringkus mengirim surat kepada Residen Belanda di Singaraja yang menawarkan daerah kekuasaan sisa-sisa dinasti Mengwi kepada pemerintah kolonial.

Putra mahkota Agung Gede Agung dan Raja Klungkung mengetahui isi surat itu. Raja Klungkung segera mengirim utusan dan mendorong Agung Gede Agung agar tetap setia kepada Klungkung. Agung Gede Agung lantas meneruskannya kepada para pengikutnya. Akibatnya, dinasti Mengwi terpecah menjadi dua kubu, yakni pro dan anti-Belanda, tetapi kubu pro-Klungkung tampaknya lebih kuat sehingga kedudukan Gusti Made Ringkus menjadi terasing. Pemerintah Belanda turun tangan membantu kubu Blahkiuh dengan Gusti Made Ringkusnya. Wilayah yang saat itu dikuasai oleh Mengwi dibagi menjadi dua pada 1902, yang satu berpusat di Abiansemal (pro-Klungkung) dan satunya lagi berpusat di Blahkiuh. Akibat pembagian ini tidak sedikit warga desa harus berpindah tempat ke wilayah tuan mereka.

Pada 1906, Badung diserang oleh pasukan pemerintah kolonial karena menolak membayar ganti rugi kapal *Sri Komala* yang kandas di perairan mereka. Belanda menuduh rakyat Badung telah merampas muatan kapal, tetapi Raja Badung menolak mentah-mentah tuduhan ini. Sikap Raja Badung ini berakhir pada peristiwa Puputan Badung yang mengakibatkan kerajaannya diduduki oleh pemerintah kolonial. Klungkung akhirnya jatuh pula ke tangan otoritas kolonial. Gusti Made Ringkus berhasil meyakinkan garis keturunan penguasa Mengwi di Abiansemal dan Sibang bahwa menyerah kepada pemerintah kolonial merupakan satu-satunya pilihan logis pada masa itu demi kelangsungan hidup dinasti mereka. Pada sisi lain, Gusti Made Ringkus meyakinkan Belanda bahwa ia tak akan mengirimkan bantuan bagi Badung. Akhirnya, Abiansemal dan Sibang menyerah kepada pemerintah kolonial.

Kejatuhan Badung dimanfaatkan Made Ringkus merebut wilayah inti negara Mengwi yang lama. Wilayahnya menjadi makin luas dan ia mendirikan sebuah pelinggih di pekarangan pura Taman Ayun (pura utama Mengwi) sebagai peringatan kembalinya penguasa Mengwi. Made Ringkus sementara waktu berdiam di lokasi Taman Ayun, sedangkan adiknya diserahi tugas memerintah Blahkiuh. Kekalahan Badung merupakan awal penerapan politik kolonial di kawasan tersebut termasuk sisa-sisa wilayah Mengwi. Meskipun kaum keturunan penguasa Mengwi berhasil menegakkan kembali kekuasaannya, Belanda hanya mengangkat mereka sebagai *penggawa*. Wilayah bekas Kerajaan Mengwi pada 1907 dibagi menjadi lima distrik, yakni Mengwi, Kapal, Blahkiuh, Abiansemal, dan Sibang. Dua sub-distrik lagi kemudian ditambahkan, yakni Carangsari dan Sedang/ Angantaka. Belanda mengangkat kaum keturunan dinasti Mengwi sebagai *penggawa* masing-masing distrik tersebut, sedangkan di sub distrik yang ada mereka diangkap sebagai *manca*.

Gusti Made Ringkus diangkat sebagai *penggawa* Mengwi. Adiknya, Gusti Putu Mayun, memperoleh jabatan sebagai penggawa Abiansemal. Sementara itu, Agung Gede Agung-putra mahkota Mengwi yang berkedudukan di Abiansemal-hanya memperoleh jabatan sebagai *penggawa* distrik kecil Abiansemal. Agung Kerug diangkat sebagai kepala sub distrik Sedang, tetapi disingkirkan tak lama kemudian. Pasalnya, Agung Kerug memaksa rakyat menyerahkan bahan bangunan dan mengerahkan tenaga guna merestorasi purinya. Tindakan ini dianggap tak patut oleh pemerintah kolonial sehingga Agung Kerug akhirnya menghadapi pemecatan. Pengangkatan kaum kerabat dinasti Mengwi hanya sebagai *penggawa* ini memperlihatkan bahwa pemerintah kolonial tidak mengakui Mengwi sebagai kerajaan lagi. Pada 1910, *penggawa* Kapal kehilangan kedudukannya karena dituduh korupsi. Pengangkatan atau pemberhentian para *penggawa* di bekas wilayah Mengwi kini juga tergantung pada pemerintah kolonial.

Pemerintah kolonial bertindak lebih jauh dengan menyederhanakan pembagian administrasi pemerintahan di Mengwi pada 1910. Beberapa distrik digabungkan sehingga *penggawa* distrik yang dihilangkan terancam kehilangan kedudukannya. Kapal digabungkan dengan Mengwi dengan Gusti Made Ringkus sebagai kepala distriknya. Pada 1911, distrik Sibang dan Blahkiuh dihapuskan serta digabung dengan Abiansemal. Dengan demikian, pewaris puri Sibang kehilangan kedudukannya dan merosot hanya menjadi kepala desa. Giliran pemecatan Agung Gede Agung tiba pada

1911. Pemerintah kolonial tidak ingin mempertahankannya sebagai penggawa karena kurang bersedia mematuhi kebijakan-kebijakan Belanda. Ia menjadi seorang putra mahkota tanpa kedudukan hingga wafatnya di tahun 1920.

Sebagai pengganti kepala distrik (*penggawa*) Abiansemal, Belanda mengangkat Gusti Putu Mayun, adik Made Ringkus. Reorganisasi administrasi pemerintahan yang dicanangkan Belanda makin memperluas wilayahnya. Kenyataan ini membuktikan bahwa di antara semua cabang dinasti Mengwi, puri Mayunlah yang terkuat saat itu. Kendati demikian, kedudukan mereka belum boleh dikatakan aman. Seiring dengan makin stabilnya dan tertibnya kondisi setempat, Belanda memikirkan bahwa seorang kepala distrik tidak harus diambil dari keturunan bangsawan. Yang patut dinilai adalah kecakapan dan kemampuannya dalam menangani organisasi pemerintahan. Kebijaksanaan baru ini berdampak terhadap Mengwi saat wafatnya Made Ringkus pada 1918. Penggantinya bukan lagi berasal dari kalangan bangsawan Mengwi, melainkan orang luar asal Buleleng bernama Ketut Sandi. Kekecewaan timbul terhadap pengangkatan ini, apalagi Ketut Sandi bukan keturunan bangsawan.

Ketut Sandi telah lama bekerja pada pemerintah Belanda sehingga memperoleh banyak pengalaman administratif. Tugas barunya itu sungguh berat karena ia harus berhadapan dengan anggota dinasti Mengwi yang tak menyukainya. Lawan paling tangguhnya adalah Gusti Ketut Agung, adik almarhum putra mahkota Agung Gede Agung yang mangkat pada 1920. Gusti Ketut Agung kini dianggap sebagai pewaris sah Kerajaan Mengwi. Selain itu, Gusti Putu Mayun juga masih kokoh kedudukannya selaku penggawa. Akibatnya, Ketut Sandi dipindahkan pada 1921. Kini ada kesempatan bagi kaum kerabat dinasti Mengwi menduduki jabatan pemerintahan lagi, namun mereka belum berhasil mengajukan calon yang cocok. Karena itu, Belanda mengangkat orang luar lagi bernama I Ketut Widjanegara. Ia gagal dalam tugasnya karena tentangan yang kuat dari kalangan bangsawan Mengwi. Kariernya di Mengwi berakhir pada 1927 dan ia dipindahkan ke Jembrana.

Kurang lebih pad waktu bersamaan, pada era 1920-an Gusti Ketut Agung pindah dari Abiansemal ke Puri Mengwi. Ia kemudian bertindak sebagai pewaris sah Mengwi. Dibawanya pula berbagai pusaka kerajaan sehingga memperkuat legitimasinya. Ia berharap agar diangkat sebagai penggawa oleh pemerintah kolonial. Kendati demikian, pemerintah kolonial tidak ingin mengangkat tokoh yang gemar menyabung ayam dan bermain wanita ini sebagai pegawainya. Kebiasaan-kebiasaan

semacam ini tentu saja dianggap negatif oleh Belanda, walaupun rakyat kebanyakan tidak memandangnya demikian apabila yang melakukannya adalah kaum bangsawan. Belanda lebih memilih adik Gusti Putu Mayun bernama Gusti Rai Kepakisan. Dengan demikian, perselisihan kini terjadi antara keturunan Puri Mayun dan Puri Gede–puri utama Kerajaan Mengwi. Gusti Rai Kepakisan memanfaatkan kesempatan ini untuk memaklumkan dirinya sebagai penguasa tertinggi di Mengwi.

Gusti Putu Mayun memantapkan posisinya dengan menjadi pegawai pemerintah kolonial yang setia. Ia tidak takut menghadapi perubahan zaman, sebagai buktinya ia membangun kembali purinya berdasarkan gaya Eropa. Pada kenyataannya, dua keturunan Puri Mayun yakni Gusti Putu Mayun dan adiknya, Gusti Rai Kepakisan, merupakan penguasa sebagian besar bekas wilayah Mengwi. Pada 1928, Gusti Putu Mayun membangun Pura Giri Kusuma di Blahkiuh yang dibangun seturut pura Kerajaan Mengwi. Hal ini memperlihatkan bahwa Gusti Putu Mayun hendak menggaungkan lagi restorasi Kerajaan Mengwi.

Ia mengajukan permohonan kepada pemerintah kolonial sehubungan dengan pengembalian status Mengwi sebagai kerajaan. Sebagai bukti legitimasinya tersebut, Gusti Putu Mayun mengarang sebuah *babad* yang berisikan silsilah dinasti Mengwi. Hasil karya sastra itu turut diajukan pula sebagai bukti kepada pemerintah kolonial Belanda. Pewaris sah dinasti Mengwi seharusnya adalah Gusti Ketut Agung, namun ia kurang populer di mata Belanda. Karena itu, Gusti Putu Mayun mengusulkan agar dibentuk suatu dewan dalam memerintah negara. Anggota dewan tentu saja adalah Gusti Putu Mayun beserta adiknya. Dengan demikian, Gusti Ketut Agung yang kurang disukai oleh Belanda tidak akan memiliki kekuasaan apa-apa. Setelah melalui berbagai proses, permohonan restorasi Mengwi ditolak oleh *Binnenland Bestuur* (Departemen Dalam Negeri) pemerintah kolonial Belanda pada 1928. Alasannya, Mengwi telah jatuh pada 1891, sebelum pemerintah kolonial menapakkan kakinya di Badung pada 1906. Belanda tidak bersedia merestorasi kerajaan yang sudah tidak ada lagi pada 1906.

Pura Taman Ayun milik Kerajaan Mengwi
Sumber: *Jawa Timur, Bali, Lombok*

Penolakan ini tidak menyurutkan niat kaum kerabat Mengwi dalam memperjuangkan restorasi negaranya. Tetapi kegagalan terjadi karena pertikaian akut antara Puri Gede dan Puri Mayun. Kerabat Puri Mayun berambisi memegang kendali atas Kerajaan Mengwi apabila negara tersebut berhasil dibangun kembali dengan pengakuan pemerintah Hindia Belanda. Hal ini tentu saja tak dikehendaki oleh Gusti Ketut Agung. Apabila kaum kerabat Puri Mayun berupaya keras merestorasi Mengwi, pihak Puri Gede berjuang sekuat tenaga menjegalnya. Di luar dugaan, popularitas Gusti Ketut Agung mengalami peningkatan. Pada 1930-an terjadi kegagalan panen di Mengwi yang diyakini masyarakat sebagai akibat kekuatan jahat. Rakyat berbondong-bondong memohon kepada Gusti Ketut Agung agar bersedia memercikkan air suci di sawah-sawah mereka. Dengan enggan Gusti Ketut Agung memenuhi permintaan tersebut dan mengunjungi berpuluh-puluh desa, termasuk desa yang berada di bawah kekuasaan Gusti Putu Mayun.

Entah karena kekuatan air suci yang dipercikkannya atau bukan, ternyata panen padi pada 1937 sungguh berlimpah. Masyarakat meyakini bahwa hal ini disebabkan oleh kesaktian Gusti Ketut Agung. Pamor Gusti Putu Mayun merosot karena *pelinggih* yang didirikannya tak sanggup mengusir kekuatan jahat penyebab gagal panen. Ucapan terima kasih datang berbondong bondong kepada Gusti Ketut Agung. Masyarakat beramai-ramai mempersembahkan hasil panen padi pertamanya. Persaingan antara dua cabang dinasti penguasa Mengwi ini makin nyata, meskipun pada 1936 Gusti Ketut Agung dan Gusti Putu Mayun menandatangani permohonan bersama mengenai otonomi bagi Mengwi, setelah itu sedikit sekali kesepakatan yang dicapai antara keduanya.

Departemen dalam negeri pemerintah kolonial menyadari bahwa restorasi bagi Mengwi tidaklah bermanfaat karena dilanda perpecahan internal yang akut. Gusti Putu Mayun dalam pembicaraan pribadinya dengan direktur departemen dalam negeri menyatakan bahwa ia tidak menghendaki otonomi bagi seluruh Mengwi, melainkan cukup bagi distriknya sendiri. Sementara itu, Gusti Ketut Agung yang berupaya mencegah saingannya menguasai singgasana Mengwi menyatakan kepada residen bahwa ia tak menghendaki restorasi.

Gusti Gede Raka meneruskan upaya membangun kembali Mengwi. Ia adalah kemenakan Gusti Putu Mayun dan menjabat sebagai pegawai pemerintah kolonial sehingga sanggup mengakses berbagai arsip penting. Gusti Ketut Agung wafat

pada 7 April 1938. Kesempatan ini dipergunakan oleh Gusti Gede Raka mengirim petisi kepada gubernur jenderal Hindia Belanda, *Volksraad* (parlemen), dan Ratu Wilhemina pada Juni 1938, tentunya setelah melalui persiapan yang matang. Petisi kali ini disertai sejumlah lampiran berupa arsip-arsip karesidenan guna memperkuat argumen bahwa Mengwi masih eksis pada 1906. Beberapa pihak memuji bahwa petisi tersebut merupakan karya yang sangat teliti. Kendati demikian, petisi ini terkatung-katung selama dua tahun. Akibatnya, pada 1938 saat upacara pengukuhan pemulihan raja-raja Bali di Besakih, wakil Mengwi tidak diundang. Baru pada 3 Mei 1940, Ratu Wilhemina mengumumkan penolakannya dengan alasan yang sama seperti sebelumnya–Kerajaan Mengwi dianggap sudah musnah pada 1906. Kenyataan ini menutup harapan keturunan Puri Mayun menghidupkan kerajaan leluhurnya.

Kurangnya dukungan dari Puri Gede yang diwakili oleh Gusti Ketut Agung bagi restorasi kerajaan menggusarkan hati Gusti Gede Raka. Ia menuduh cabang dinasti tersebut sebagai pengkhianat dan tak mengakuinya lagi sebagai pemimpinnya. Setelah mengabdi sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda yang setia selama 30 tahun, Gusti Putu Mayun pensiun dari jabatannya sebagai penggawa pada 1939. Pemerintah kolonial menganugerahkan kepadanya sebuah bintang emas. Bahkan residen dan Raja Klungkung turut menghadiri acara tersebut.

Gusti Ketut Agung yang mangkat pada 1938 di-*aben* pada Agustus 1939. Upacara pembakaran jenazah tersebut berlangsung sangat meriah dan dihadiri banyak orang. Kas Puri Gede sendiri saat itu sangat sedikit jumlahnya, namun mengingat betapa megahnya perayaan itu, dapat disimpulkan bahwa pewaris takhta Mengwi tersebut masih dihormati oleh banyak orang. Suatu kejadian yang dianggap sebagai peristiwa supernatural oleh masyarakat terjadi ketika api dinyalakan. Saat itu, hujan beserta angin keras tiba-tiba mengguyur Mengwi yang dipercaya masyarakat sebagai curahan pembersihan oleh para dewa.

Setelah memasuki masa pensiunnya, Gusti Putu Mayun tinggal di Blahkiuh. Ia kehilangan tiga orang putranya selama masa pendudukan Jepang dan revolusi kemerdekaan. Salah seorang putranya meninggal karena tetanus pada zaman Jepang. Sedangkan dua orang lainnya tewas dibunuh para gerilyawan. Gusti Putu Mayun yang telah lanjut usianya akhirnya pindah ke Jakarta guna menghindari orang-orang yang mendendam kepadanya sesudah berlangsungnya suatu percobaan pembunuhan. Pewaris Gusti Ketut Agung adalah putranya, Cokorda Gede Oka. Ia pernah menjadi

penggawa dan berhenti pada 1950. Dia lalu melakukan berbagai usaha kecil-kecilan. Karisma sebagai pewaris dinasti masih melekat pada dirinya. Camat Mengwi mengakui pada 1983 bahwa ia akan kurang berhasil dalam tugasnya apabila Cokorda Gede Oka menolak bekerja sama. Pura Taman Ayun sendiri yang merupakan pura kerajaan masih dibanjiri orang saat berlangsungnya upacara-upacara keagamaan.

IX. NYALIAN

Cikal bakal Kerajaan Nyalian adalah putra I Dewa Gede Tangkeban bernama I Dewa Pring yang diperintahkan memerintah Desa Nyalian (Brasika). Karena mengalami kesulitan dalam memerintah Nyalian, I Dewa Pring menghadap ayahnya agar diberikan keris pusaka Si Lobar atau Ki Lobar. Kendati demikian, I Dewa Gede Tangkeban merasa berat hati menyerahkannya karena putranya yang banyak jumlahnya, ia tak mau disangka pilih kasih. I Dewa Pring merasa kecewa tidak diberi keris Ki Lobar sehingga mohon agar diizinkan meninggalkan Nyalian. Meskipun demikian, I Dewa Gede Tangkeban kemudian merasa khawatir kawasan Nyalian akan dirampas kerajaan lain akibat tak mempunyai pemimpian. Itulah sebabnya, ia akhirnya bersedia menyerahkan keris I Lobar pada I Dewa Pring. Konon, setelah menerima keris pusaka tersebut I Dewa Pring dapat memimpin kerajaannya dengan baik.[79]

Menurut Drs. I Nyoman Singgih Wikarman, silsilah raja-raja Nyalian adalah I Dewa Pring (Pering) yang juga disebut I Dewa Pering I digantikan secara berturut-turut oleh I Dewa Pering II dan I Dewa Pering III. Raja Nyalian berikutnya adalah I Dewa Gede Oka Sudira yang bergelar I Dewa Gede Tangkeban I. Ia digantikan oleh I Dewa Kuat, yang kelak menjadi raja Bangli dengan gelar I Dewa Gede Tangkeban II[80].

Sumber lain menyebutkan bahwa I Dewa Gde Pering, salah seorang putra I Dewa Anam, Raja Tamanbali, pindah ke Nyalian (Klungkung) dan menjadi Raja Nyalian pertama. Ia mempunyai seorang putra bernama I Dewa Kompiang Raka atau I Dewa Gde Kanca Den Bencingah, yang lalu dinobatkan sebagai raja menggantikan ayahnya. Selanjutnya, ia berputra I Dewa Gereh atau I Dewa Garthajata, yang menurunkan I Dewa Gde Oka atau I Dewa Gde Tangkeban. Ia kemudian dinobatkan sebagai Raja Nyalian berikutnya dan semenjak saat itu, raja-raja Nyalian bergelar I Dewa Gde Tangkeban.

---

79. Lihat *Babad Ksatrya Taman Bali*, halaman 21.
80. Lihat *Leluhur Orang Bali dari Dunia Babad dan Sejarah*, halaman 102.

Keruntuhan Nyalian diawali ketika Raja Dewa Manggis dari Gianyar ingin meminjam keris pusaka Ki Lobar guna dibuatkan tiruannya. Karenanya, ia memohon izin Raja Klungkung. Kendati demikian, Raja Klungkung tak memperkenankannya dengan alasan hal itu berpotensi menimbulkan kekacauan.[81] Itulah sebabnya, Raja Dewa Manggis mengurungkan niatnya meminjam Ki Lobar. Meskipun demikian, belakangan Raja Klungkung juga penasaran dan ingin mengetahui bagaimana wujud Ki Lobar. Ia segera mengirim utusan ke Nyalian guna meminjam keris pusaka itu. Terjadi kesalahpahaman karena I Dewa Gede Tangkeban I menyangka pusaka kerajaannya hendak diambil dan diberikan kepada Gianyar.

I Dewa Gede Tangkeban I menghadap kaum kerabatnya di Bangli dan Tamanbali guna merundingkan hal itu. Ternyata, Raja Bangli dan Tamanbali juga mendukung I Dewa Gede Tangkeban I agar jangan menyerahkan Ki Lobar. Merasa percaya diri karena mendapatkan dukungan Tamanbali beserta Bangli, I Dewa Gede Tangkeban I segera memobilisasi pasukannya.

Raja Klungkung murka mendengarnya dan memerintahkan raja Karangasem beserta Gianyar bersama-sama menyerang Tamanbali. Pecah peperangan dashyat yang pada mulanya berakhir seri. I Dewa Gede Tangkeban I menagih janji Bangli dan Tamanbali, namun keduanya menolak mengirimkan bala bantuan sehingga Nyalian menuai kekalahan. I Dewa Gde Tangkeban I gugur dalam pertempuran tersebut, tetapi putranya yang bernama I Dewa Kuat diungsikan ibunya ke Bangli dengan membawa keris pusaka Ki Lobar. Peristiwa ini mengakhiri Kerajaan Nyalian untuk selama-lamanya. I Dewa Kuat diangkat anak oleh I Dewa Ayu Den Bancingah, Ratu Bangli, dan kelak menggantikan ibu angkatnya sebagai penguasa Bangli. Menurut salah satu sumber, keruntuhan Nyalian ini terjadi pada 1780[82].

X. PAYANGAN

Leluhur Kerajaan Payangan adalah Dewa Agung Pemayun, yang merupakan kakak Dewa Agung Jambe, raja pertama Kerajaan Klungkung. Setelah ayahnya, Dalem Dimade (1665–1686)–Raja Gelgel terakhir–mangkat, Dewa Agung Pemayun mendirikan istana di Tampaksiring. Ia memiliki tiga orang putra yang masing-masing bernama Cokorda Pemayun Putra, Cokorda Made Pemayun, dan Cokorda Anom

81. Lihat *Babad Ksatrya Taman Bali*, halaman34.
82. Lihat *Leluhur Orang Bali dari Dunia Babad dan Sejarah*, halaman 102.

Pemayun. Pada perkembangan selanjutnya, Cokorda Anom Pemayun berputra Cokorda made Sukawati yang mendirikan Kerajaan Payangan pada 1776.[83]

Ia lantas digantikan oleh putranya bernama Cokorda Anom, yang bergelar Dewa Agung Anom. Karena tak mempunyai putra maka salah seorang anak angkatnya, Cokorda Putu Melinggih, diangkat sebagai calon penggantinya. Dia kemudian naik takhta menggantikan ayah angkatnya dengan gelar Dewa Agung Rangki selaku Raja Payangan ketiga. Semasa pemerintahannya dibangun Puri Agung Payangan.[84] Dia menikah dengan Cokorda Istri Pejeng yang berasal dari Puri Pejeng dan Cokorda Istri Petulu yang berasal dari Puri Petak. Keduanya diangkat sebagai permaisuri raja.

Kendati demikian, pernikahan ini tak membuahkan seorang putra pun sehingga akhirnya Cokorda Oka salah seorang putra selir raja diangkat sebagai penggantinya. Gelar Cokorda Oka setelah dinobatkan sebagai Raja Payangan keempat adalah Dewa Agung Gede Agung Gde Oka (Dewa Agung Gde Oka), sedangkan adiknya bernama Cokorda Rai diangkat sebagai wakil raja dengan gelar Dewa Agung Rai.[85] Semasa pemerintahannya diadakan perjanjian pada 25 April 1832 bersama dengan enam kerajaan lainnya, yakni Bangli, Buleleng, Gianyar, Karangasem, Klungkung, dan Mengwi. Perjanjian ini berisikan kerja sama di berbagai bidang antara ketujuh kerajaan tersebut, serta pengakuan bahwa Raja Klungkung merupakan raja tertinggi atas Bali dan Lombok.

Pada 25 April 1837, kembali diadakan perjanjian antara Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Karangasem, Klungkung, Payangan, dan Mengwi, yang mengakui kekuasaan Raja Klungkung selaku penguasa atas Bali serta Lombok. Bersamaan dengan ini, Bangli, Gianyar, dan Klungkung, sama-sama berjanji akan melindungi Payangan. Meskipun demikian, setelah Dewa Agung Istri Kanya mengundurkan diri dari singgasana Klungkung, persatuan antar kerajaan mulai goyah.

Malapetaka bagi Payangan timbul saat Dewa Agung Putra II hendak memperistri Dewa Agung Istri Muter, putri Raja Payangan, namun ditolak. Akibatnya, Dewa Agung Putra II memerintahkan Kerajaan Buleleng agar bersiap menghancurkan Payangan. Amanat ini disambut gembira oleh Raja Buleleng karena ia telah lama berniat menguasai Payangan. Sementara itu, Dewa Agung Gde Oka, mengadakan aliansi dengan Bangli demi melindungi Payangan, yang lalu diperkuat dengan ikatan

83. Lihat *Sejarah Gianyar dari Jaman Prasejarah Sampai Masa Baru-Modern*, halaman 303.
84. Lihat *Sejarah Gianyar dari Jaman Prasejarah Sampai Masa Baru-Modern*, halaman 304.
85. Lihat *Sejarah Gianyar dari Jaman Prasejarah Sampai Masa Baru-Modern*, halaman 304-305.

perkawinan. Kendati demikian, kelak terbukti bahwa aliansi ini tak mampu menjamin keselamatan Payangan.

Pada 1843, dipicu oleh kekacauan di desa-desa utara Payangan dan selatan Buleleng, Raja Buleleng menitahkan patihnya, Gusti Ketut Jelantik, mengamankan kawasan yang mengalami pergolakan tersebut. Kesempatan ini dipergunakan Buleleng melakukan penaklukan terhadap Payangan. Desa Kerta yang merupakan wilayah kekuasaan Payangan berhasil diduduki musuh. Raja Payangan menitahkan patihnya, Sang Made Jumatang, membangun pertahanan di Giri Kusuma. Kendati demikian, pasukan Payangan berhasil dikalahkan dan Sang Made Jumatang gugur di medan laga.

Ibu kota Payangan dikepung oleh laskar Buleleng dan Dewa Agung Gde Oka gugur dalam pertempuran. Sementara itu, Dewa Agung Rai, yang tertimbun mayat dan dikira sudah meninggal, berhasil diselamatkan ke Mengwi. Dewa Agung Istri Muter sendiri juga tewas. Kerajaan Payangan dengan demikian mengalami kehancurannya. Raja Klungkung kemudian menempatkan pengawas di bekas wilayah Payangan di bawah Cokorda Gde Ancak, dengan diawasi oleh Cokorda Kusamba.[86] Pada awal abad 20, kawasan ini menjadi daerah kekuasaan Gianyar.

XI. SUKAWATI

Kerajaan Sukawati berdiri karena Kerajaan Klungkung ingin menghindari perang saudara. Ketika itu, dua orang putra I Dewa Agung Jambe, raja pertama Klungkung, yang masing-masing bernama Dewa Agung Made dan Dewa Agung Anom, memperebutkan singgasana ayahnya. Untunglah para raja lainnya hadir mendamaikan mereka. Raja Mengwi menyarankan agar Dewa Agung Anom, putra kedua I Dewa Agung Jambe mendirikan kerajaan baru di desa Sukawati[87]. Kerajaan baru tersebut di sebelah barat berbatasan dengan Badung, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Klungkung. Dengan demikian, Dewa Agung Anom menjadi raja pertama Kerajaan Sukawati (1710–1770) dan dikenal pula sebagai Dewa Agung Anom Sukawati atau Dewa Agung Anom Wijaya Tanu.

Dewa Agung Anom sendiri pernah berjasa menghabisi nyawa Ki Balian Batur yang mengacau di daerah Sukawati. Raja Mengwi menikahkan salah seorang putrinya bernama I Gusti Ayu Agung Ratu dengan Dewa Agung Anom. Kerajaan Sukawati

86. Lihat *Sejarah Gianyar dari Jaman Prasejarah Sampai Masa Baru-Modern*, halaman 309.
87. Lihat *Sejarah Gianyar dari Jaman Prasejarah Sampai Masa Baru-Modern*, halaman 263.

secara pemerintahan merupakan vasal Kerajaan Mengwi. Semasa pemerintahannya, rakyat hidup aman dan tenteram. Putra bungsunya bernama I Dewa Agung Mayun menggantikan ayahnya sebagai raja kedua dan sekaligus terakhir Sukawati.

Ketika I Dewa Agung Mayun sedang jatuh sakit dan dirawat di Patemon, tiada satupun putranya datang menjenguknya, kendati telah diundang berkali-kali melalui Dewa Manggis Sakti (Dewa Manggis IV), Raja Gianyar, yang juga merupakan menantu I Dewa Agung Mayun. Karena para putranya tak lagi peduli dengan kesehatannya, sebelum mangkat I Dewa Agung Mayun mengundang Dewa Manggis Sakti guna menyampaikan pesan-pesan terakhirnya serta sementara waktu memercayakan pemerintahan dan pusaka-pusaka kerajaan kepada menantunya itu. I Dewa Agung Mayun memberikan ujian kepada putra-putranya yang bersedia mengisap lidahnya saat upacara penyucian jenazahnya.

Ternyata tiada seorang putranya yang bersedia karena hembusan bau busuk berasal dari jenazah. Akhirnya, I Dewa Manggis Sakti yang bersedia melakukannya. Ajaibnya, setelah itu jenazah I Dewa Agung Mayun memancarkan bau harum.[88] Dengan demikian, I Dewa Manggis Sakti berhak menggantikan I Dewa Agung Mayun menjadi Raja Sukawati sehingga kawasan tersebut lantas menjadi daerah kekuasaan Gianyar.

XII. TABANAN

a. Cikal Bakal Kerajaan Tabanan

Menurut *Babad Arya Tabanan*, raja pertama Kerajaan Tabanan adalah Arya Kenceng yang berasal dari Majapahit. Ia dipercaya oleh Sri Kresna Kepakisan memimpin daerah Tabanan. Walau menjadi penguasa Tabanan, Arya Kenceng tetap mengakui Sri Kresna Kapakisan sebagai penguasa tertinggi di Bali. Arya Kenceng memerintah dari istananya di Pucangan dengan batas-batas wilayah yang meliputi,[89]

- Sungai Panahan di sebelah timur
- Sungai Sapwan di sebelah barat
- Bukit Beratan dan Gunung Batukaru di sebelah utara
- Desa Sanda, Kurambitan, Blungbang, Tanggun Titi, dan Bajra di sebelah selatan.

88. Lihat *Sejarah Gianyar dari Jaman Prasejarah Sampai Masa Baru-Modern*, halaman 269-270.
89. Lihat *Babad Arya Tabanan dan Ratu Tabanan*, halaman 91.

Babad Arya Tabanan menyatakan bahwa Arya Kenceng memegang kekuasaannya pada 1256 S (1334 M) dan masih berdasarkan penuturan sumber yang sama, tak seorang pun berani menentang Arya Kenceng karena keramahan serta kewibawaannya. Titah-titah senantiasa ia keluarkan dengan lemah lembut. Di samping itu, Arya Kenceng gemar pula menggeluti ajaran-ajaran *Dharmasastra* (salah satu susastra Hindu yang berkaitan dengan agama, kewajiban dan hukum) dan merupakan pribadi yang pemberani serta gagah dalam peperangan.

Arya Kenceng menikah dengan putri seorang brahmana dari Ketepeng Reges. Pernikahan ini dikaruniai tiga orang putri, yang sulung menikah dengan Sri Kresna Kepakisan, sedangkan yang bungsu menikah dengan Sri Arya Sentong. Selain itu, Arya Kenceng memiliki pula putra-putra bernama Dewa Raka (bergelar Sri Magada Prabu), Dewa Made (bergelar Sri Magada Nata), dan Kyai Tegeh Kori. Dewa Raka, putra sulungnya, tidak ingin menggantikan kedudukan ayahnya; sehingga jabatan sebagai penguasa Tabanan diserahkan kepada adiknya, Sri Magada Nata, dengan gelar Arya Ngurah Tabanan. Sementara itu, Tegeh Kori mencari tempat baru di Badung dan menurunkan Dinasti Tegeh Kori yang kelak berkuasa di kawasan tersebut.

Sri Magada Nata pernah diperintahkan oleh Dalem Ketut Smara Kapakisan, penguasa tertinggi di Gelgel, mengunjungi Pulau Jawa. Konon saat itu, Kerajaan Majapahit sedang dilanda kekacauan berupa pemberontakan para petani, yang ada kaitannya dengan mulai masuknya agama Islam. Setelah melakukan peninjauan di Jawa, Sri Magada Nata kembali ke Bali. Begitu menghadap Dalem Ketut Semara Kepakisan, Sri Magada Nata mendapati bahwa saudarinya yang dahulu diperistri Raja Gelgel tersebut telah diserahkan sebagai istri Kyai Asak, seorang kesatria dari Kediri. Kenyataan ini mengecewakan hati Sri Magada Nata sehingga ia menyerahkan pucuk pimpinan Tabanan kepada putranya, Arya Langwang (Sirarya Ngurah Langwang atau Prabu Singasana), dan meninggalkan istana serta menjalani kehidupan pertapaan.

Semasa dalam pertapaan ini, Sri Magada Nata menikah dengan putri Bandesa Pucangan dan dikaruniai seorang putra bernama Kyai Ketut Bandesa (Kyai Pucangan) dengan gelar Arya Notor Wandira. Ia gemar mempelajari kehidupan rakyat jelata, baik kesusahan maupun kesenangan mereka. Karena itu, ia tidak pernah bermalam di istana dan senantiasa mengembara. Menurut *Babad Arya Tabanan*, ia merupakan seorang tokoh yang sakti. Saat malam hari, orang melihat di sampingnya terdapat

nyala api, tetapi ketika didekati ternyata tidak ada sama sekali. Arya Notor Wandira inilah yang kelak menurunkan raja-raja Badung.

b. Perkembangan Kerajaan Tabanan

Arya Langwang mula-mula beristana di sebelah utara Pura Puseh Tabanan, tetapi kemudian pindah ke istana baru yang disebut Puri Agung Tabanan. Konon lokasi ini dipilih setelah Arya Langwang menyaksikan kepulan asal yang keluar secara ajaib dari sebuah sumur. Karena asap terus mengepul ke luar seperti tabunan, istana yang baru ia dirikan itu dinamai Puri Agung Tabunan. Belakangan pengucapan nama itu berubah menjadi Tabanan.[90] Setelah ia mangkat, putra tertuanya, Ngurah Tabanan (Prabu Winalwan atau Bhatara Mur Makules), naik takhta sebagai penguasa yang baru. Ia pernah diminta bantuan oleh Dalem Dimade, penguasa tertinggi di Bali, memerangi orang-orang Sasak yang dipimpin oleh Kebo Mundur. Pada pertempuran tersebut, Kebo Mundur beserta pasukan Sasaknya dapat dikalahkan.

Ketika permaisurinya yang bernama Gusti Ayu Pamadekan meninggal, raja merasa sangat berduka hingga jatuh sakit dan sekujur tubuhnya terserang jamur. Karenanya, raja mengundurkan diri dan menyerahkan urusan pemerintahan kepada kedua orang putranya, Ki Gusti Wayahan Pamadekan beserta Ki Gusti Made Pamadekan. Raja kemudian bertapa dan melakukan pemujaan kepada Hyang Batukaru di bawah bimbingan seorang pertapa bernama Ketut Jambe. Setelah Raja Ngurah Tabanan sembuh dari sakitnya, ia kembali ke istana. Dia kemudian memperistri beberapa wanita dan memperanakkan Ki Gusti Bola, Ki Gusti Made, Ki Gusti Wongaya, Ki Gusti Kukuh, Ki Gusti Kajianan, Ki Gusti Berengos, Gusti Luh Kukuh, Gusti Luh Kukub, Gusti Luh Dawuh Tanjung, Gusti Luh Tangkas, dan Gusti Luh Ketut.

Kurang lebih pad 1639, Raja Dalem Dimade yang bertakhta di Gelgel memerintahkan Raja Ngurah Tabanan menghalau pasukan Mataram yang hendak menaklukkan Blambangan. Guna memenuhi perintah Dalem Dimade, Raja Ngurah Tabanan mengirim pasukan yang dipimpin dua putranya, Ki Gusti Wayahan Pamadekan dan Ki Gusti Made Pamadekan, dengan dibantu Kyai Ngurah Pacung. Ternyata pasukan Bali terancam kekakalahan melawan Mataram. Demi menjaga kelangsungan singgasana Tabanan, Ki Gusti Wayahan Pamadekan meminta adiknya agar melarikan diri ke Bali. Sementara itu, ia sendiri terus maju menghadapi Mataram

90. Lihat *Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng di Bali*, tanpa nomor halaman, tetapi di bagian berjudul Sirarya Ngurah Langwang.

hingga akhirnya tertangkap. Kendati demikian, Ki Gusti Wayahan Pamadekan dijadikan menantu oleh Raja Mataram dan memiliki anak bernama Raden Tumenggung.

Sementara itu, dalam pelariannya Ki Gusti Made Pamadekan terpaksa bersembunyi dalam hutan. Hampir saja ia tertangkap namun terselamatkan oleh suara burung perkutut. Semenjak saat itu, dia dan keturunannya berikrar tak akan lagi membunuh atau menyakiti burung perkutut, terkecuali dipergunakan dalam upacara *yadnya* (Kurban Suci). Sekembalinya di Tabanan, Ki Gusti Made Pamadekan dinobatkan sebagai raja dengan gelar Da Gusti Ngurah Made Pamadekan (1639–1641).

Ki Gusti Made Pamadekan tak lama menduduki singgasana Tabanan karena ia mangkat tak lama kemudian. Ngurah Tabanan memegang kekuasaan lagi (1641–1646) karena para pewaris kerajaan saat itu masih belum dewasa. Semasa pemerintahannya terjadi perselisihan antara Kyai Ngurah Tamu dari Pacung melawan Kyai Ngurah Ayunan yang memerintah daerah Perean.

Sepeninggal Ngurah Tabanan yang digelari pula Prabu Winalwan, putra Ki Gusti Made Pamadekan bernama Da Gusti Nisweng Penida atau Arya Nisweng Panida telah dewasa dan diangkat sebagai penggantinya dengan gelar Arya Ngurah Tabanan Prabu Singgasana (1646–1648). Pada zamannya, timbul pemberontakan yang dipimpin oleh Ki Nengah Mal Kangin (putra Ki Gusti Wayahan Pamadekan) dan Ki Gusti Kaler, Raja Penida. Sepulangnya dari menghadap raja tertinggi di Gelgel, rombongan Arya Nisweng Panida diserang oleh kaum pemberontak sehingga terbunuhlah raja. Arya Ngurah Tabanan digantikan oleh Kyai Arya Made Dalang (Ki Made Dalang). Kini terdapat dua orang penguasa di Tabanan maka terpecahlah kawasan tersebut menjadi dua. Kyai Made Dalang (1648–1649) memerintah wilayah sepanjang Sungai Dikis, sedangkan Kyai Nengah Malkangin (1648–1650) menguasai sebelah timur sungai itu.

Seiring dengan era pemerintahan kedua raja ini, Kerajaan Tabanan tidak pernah damai dan kericuhan pecah di mana-mana. Apalagi tak berapa lama kemudian, Ki Made Dalang wafat, dan Ki Nengah Mal Kangin menjadi satu-satunya penguasa Tabanan. Putra Da Gusti Nisweng Penida bernama Ki Gusti Alit Dauh (Dawuh) melarikan diri dan bersembunyi di Slingsing karena takut dihabisi nyawanya oleh Ki Nengah Malkangin. Meskipun demikian, berkat bantuan Ki Gusti Agung Badung, Ki Nengah Malkangin dan Ki Gusti Kaler dapat dibunuh. Dengan demikian, kekuasaan keluarga penguasa Tabanan yang lama berhasil dipulihkan.

Ki Gusti Alit Dawuh menjadi pewaris singgasana para penguasa Tabanan dengan gelar Sri Magada Sakti (1650–1725), kondisi di Tabanan mulai tertib semenjak saat itu. Pada perkembangan selanjutnya, Tabanan mulai memisahkan diri dari kekuasaan Gelgel. Ki Gusti Alit Dawuh memperluas wilayah Tabanan dengan menaklukkan Pandak, Kekeran, Kedari, dan Nyitdah, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Ki Gusti Kaler, Raja Penida. Pemberontakan-pemberontakan yang pecah di Kaba-kaba, Bandesa, Kurambitan, Blungbang, dan Sapwan berhasil ditumpasnya sehingga makin meningkatkan pamor Tabanan. Setelah memerintah beberapa lama Ki Gusti Alit Dawuh menyerahkan roda pemerintahan kepada putranya yang bernama Bathara Lepas Pamade (Anglurah Mur Pamade) atau Ida Cokorda Tabanan, bergelar Ratu Singgasana (1725–1750).

Pada zaman Ida Cokorda Tabanan, di seluruh penjuru Pulau Bali mulai tumbuh kerajaan-kerajaan yang saling berebut kekuasaan. Salah satu peristiwa penting yang terjadi adalah pemberontakan Ki Gusti Nyoman Telabah yang berkuasa di daerah Tuakilang. Ida Cokorda Tabanan berhasil mematahkan pergolakan ini sehingga menamatkan kekuasaan tokoh tersebut di Tuakilang. Ketika Ida Cokorda Tabanan mangkat, ia digantikan oleh putranya, Sri Ngurah Sekar atau Ida Cokorda Ngurah Sekar (Gusti Ngurah Sekar, 1750–1800). Sementara itu, putranya dengan seorang selir di Lod Rurung yang bernama Gusti Ngurah Gde diserahi kekuasaan atas istana kerajaan di Kurambitan (Puri Kurambitan) dengan gelar Cokorda Gde Banjar. Kedua orang raja itu kemudian memerintah Tabanan bersama-sama. Salah satu peristiwa penting yang tercatat pada *Babad Arya Tabanan* adalah pembangunan istana baru di Pekandelan dan selanjutnya dikenal sebagai Puri Agung Tabanan.[91]

Sri Ngurah Sekar digantikan oleh putra sulungnya, Ki Gusti Ngurah Gde atau Gusti Ngurah Agung (1800–1838), dengan gelarnya Cokorda Gde Ratu Singasana. Semasa pemerintahannya, kerajaan berada dalam kondisi aman dan damai karena ia merupakan seorang penguasa yang menjalankan *Dharma Sasana* dengan teguh. Raja kedua di Tabanan saat itu adalah Ki Gusti Ngurah Made Rai dengan gelarnya Maharatu Pemade, yang membangun istana di sebelah selatan pasar dan dinamai Puri Kaleran. Ia adalah cikal bakal para bangsawan yang berdiam di istana tersebut. Karena putra-putranya belum dewasa, Ki Gusti Ngurah Gde digantikan oleh adiknya, Ki Gusti Ngurah Made (Gusti Ngurah Made Rai, 1838–1842). Sementara itu, jabatan

91. Lihat *Babad Arya Tabanan dan Ratu Tabanan*, halaman 117.

raja kedua diisi oleh Ki Gusti Ngurah Anom dari Puri Mas. Sebagai patih diangkat Kyai Made Kukuh yang piawai dalam filsafat serta agama. Setelah Ki Gusti Ngurah Made mangkat yang menggantikannya adalah putra sulungnya bernama Kyai Buruan (1842–1844). Ia didampingi saudaranya yang masing-masing bernama Kyai Banjar dan Kyai Beng. Jalannya pemerintahan masih dibantu oleh Ki Gusti Mas, putra Ki Gusti Ngurah Anom.

Timbul benih permusuhan dengan Penebel yang saat itu dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Pemicunya adalah rasa iri hati Kyai Burwan terhadap kemakmuran Penebel, apalagi Ki Gusti Mas turut menghasut raja. Akibatnya, timbul perang saudara antara Kyai Burwan dan I Gusti Rai dari Penebel. Pasukan Kyai Burwan mengalami kekalahan dan Penebel mulai mencaplok kawasan utara Tabanan. Di tengah situasi kacau itu, Ki Gusti Celuk dikembalikan ke Puri Agung Tabanan dan hendak dinobatkan sebagai raja, namun dia wafat tak lama kemudian. Ki Gusti Mas yang berhati licik makin goyah kedudukannya dan dibunuh oleh para menteri Tabanan sewaktu hendak menyerahkan diri ke Penebel.

Kini pemerintahan Tabanan dipegang oleh Ki Gusti Ngurah Rai (1844–1847) dari Penebel. Dia melakukan pembersihan terhadap tokoh-tokoh yang kerap mengacaukan jalannya pemerintahan di Tabanan, seperti Kyai Banjar yang diusir ke Semarapura, Kyai Pandak diusir ke Sukasada, Kyai Pasekan diusir ke Rejasa, dan Kyai Pangkung diusir ke Antosari. Dalam menjalankan roda pemerintahan ia dibantu oleh putranya, Ki Gusti Ngurah Ubung atau Ki Gusti Made Tabanan. Sepeninggal Ki Gusti Ngurah Rai, Ki Gusti Ngurah Ubung (1847–1851) menggantikan ayahnya. Meskipun demikian, ia belum pernah dinobatkan secara resmi karena tidak disetujui para pejabat kerajaan. Kondisi Tabanan saat itu kembali kacau dan tak menentu.

Di tengah-tengah situasi seperti itu, Ki Gusti Ngurah Agung dari Puri Kaleran, putra sulung Ki Gusti Nyoman Panji terdorong merebut kekuasaan. Ada sumber yang menyebutkan bahwa niatan timbul karena petunjuk yang diperoleh dari almarhum ayahnya. Itulah sebabnya pecah peperangan antara Ki Gusti Ngurah Ubung dengan Ki Gusti Ngurah Agung. Dalam pertempuran ini, Ki Gusti Ngurah Ubung berhasil dikalahkan dan ia melarikan diri ke Penebel serta membangun kekuasaan di sana. Ki Gusti Ngurah Agung segera memasuki istana dan menobatkan dirinya dengan gelar Kyai Ngurah Agung Ratu Singgasana (1851–1868). Dengan demikian, pemerintahan Tabanan terpecah menjadi dua, yakni antara Penebel (Ki Gusti Ngurah Ubung) di

utara dan Tabanan (Ki Gusti Ngurah Agung) di selatan. Perseteruan antara keduanya tidak kunjung berakhir. Raja Tabanan meminta bantuan Mengwi menghancurkan Penebel. Penguasa Mengwi mengirimkan pasukannya dan sesudah peperangan berkecamuk selama tiga tahun, Penebel dapat ditaklukkan. Segenap harta pusaka dan kekayaan Penebel diserahkan kepada Mengwi. Meskipun demikian, belakangan timbul sikap tamak dalam diri Ratu Mengwi yang merebut beberapa wilayah Tabanan sehingga hubungan antara Tabanan dengan Mengwi memburuk.

Puri Agung Tabanan dilanda kebakaran sewaktu wafatnya Ki Ngurah Agung pada 1868. Dia digantikan oleh putranya, Sirarya Ngurah Tabanan atau Bhatara Ngeluhur, yang bergelar Sirarya Ngurah Agung Tabanan Ratu Singgasana (1868–1903). Menurut *Babad Arya Tabanan*, Belanda menyerang Klungkung di Kusumba pada 1716 Saka (1794 M).[92] Tetapi tahun yang benar sesungguhnya adalah 1849.[93] Belanda lalu mundur dari Klungkung dan semenjak saat itu, Klungkung, Tabanan, dan Badung bersedia menjalin hubungan yang baik dengan Belanda.

Sementara itu, perselisihan antara Tabanan dan Mengwi masih saja terjadi. Masing-masing pihak mengklaim batas wilayahnya dan melarang warganya melintasi perbatasan tersebut. Oleh karenanya, kerap timbul konflik di daerah perbatasan. Patih Mengwi, I Gusti Agung Made Raka, merampas wilayah Marga dan Parean tetapi Tabanan berhasil merebutnya kembali tak lama berselang. Menjelang masa akhir pemerintahan Arya Angrurah Tabanan, terjadi permasalahan suksesi di Kerajaan Tabanan. Ki Gusti Ngurah Gde Mas yang seharusnya hendak dicalonkan sebagai raja, ternyata kurang cakap memimpin. Ia hanya ahli dalam seni tari saja. Sedangkan calon lainnya, Arya Alit Ngurah Made Kaleran, meninggal karena penyakit cacar. Dengan demikian, terjadilah kekosongan pemerintahan dalam Kerajaan Mengwi.

Kerajaan Mengwi terlibat perselisihan dengan Badung dan juga Tabanan. Selain itu, Klungkung juga berambisi menaklukkan Mengwi. Itulah sebabnya ketiga kerajaan tersebut melancarkan serangannya ke Mengwi pada 1891. Raja Mengwi terakhir, Agung Ngurah Made Agung (1859–1891) tewas dalam penyerbuan tersebut sehingga tenggelamlah Kerajaan Mengwi untuk selama-lamanya. Setelah Mengwi berhasil dihancurkan, wilayahnya dibagi-bagi antara Badung, Tabanan, dan Klungkung.

92. Lihat *Babad Arya Tabanan dan Ratu Tabanan*, halaman 169.
93. Lihat *Sejarah Nasional Indonesia IV*, halaman 239–240.

Sirarya Ngurah Tabanan dikenal sebagai raja yang bijaksana dan gemar belajar. Ia mahir dalam filsafat serta sanggup membaca huruf Arab, Melayu, dan juga berbicara dalam kedua bahasa tersebut. Bahkan secara sembunyi-sembunyi ia pernah berlayar ke Kuta melalui Yeh Gangga demi berguru pada seorang Belanda bernama Tuan Lange.[94]

Kekosongan pemerintahan di Tabanan kemudian diisi oleh Ki Gusti Ngurah Rai Perang atau Arya Ngurah Rai Perang (Da Cokorda Rai Dangin atau I Ratu Puri Donging, memerintah 1903–1906). Kendati demikian, menurut *Babad Arya Tabanan* ia merupakan penguasa yang kurang cakap memerintah. Kegemarannya sehari-hari hanya menyabung ayam dan mengisap candu. Penguasa Puri Kaleran, salah satu cabang lain dinasti penguasa Tabanan yang bernama Anak Agung Ngurah Gede Made Kaleran, juga bertindak demikian. Dengan demikian, praktis tidak ada pemimpin yang andal di Tabanan.

Pada 1904, kandaslah sebuah kapal bernama *Sri Kumala* dari Banjarmasin di Pelabuhan Sanur, yang terletak di wilayah kekuasaan Raja Badung. Pemerintah kolonial Belanda menuduh rakyat Sanur telah merampas muatan kapal tersebut berdasarkan hukum Tawan Karang dan memaksa Raja Badung membayar ganti rugi. Raja Badung menolak tuduhan tersebut. Kendati demikian, pemerintah kolonial Belanda tetap berkeras memaksakan tuduhan dan tuntutannya tersebut. Ketika raja tetap menunjukkan sikap penolakannya, Belanda melancarkan blokade terhadap Badung yang akhirnya berujung pada agresi militer terhadap kerajaan ini. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Puputan Badung (20 September 1906). Dalam insiden ini, Raja Tabanan memihak Badung sehingga setelah Badung berhasil dikalahkan, Belanda mengalihkan serangannya kepada Tabanan (26 September 1906). Karena gentar menyaksikan kedatangan pasukan Belanda bersenjata lengkap, desa-desa di perbatasan menyerah tanpa perlawanan sama sekali. Jenderal Rost van Tonningan memberikan ultimatum kepada pihak Tabanan agar bersedia menyerah tanpa syarat atau peperangan akan dilanjutkan. Raja Tabanan tidak memiliki pilihan selain menerima ultimatum tersebut dan ia beserta keluarganya ditawan oleh Belanda serta dibawa ke Denpasar.

Tiga orang putranya yang masing-masing bernama I Gusti Ngurah Anom (putra mahkota), I Gusti Ngurah Putu Konol, dan I Gusti Ngurah Pegeng turut pula menyertai rombongan tersebut. Selain itu, saudara-saudaranya bernama I Gusti Ngurah Puti dan I Gusti Ngurah Made Batan turut pula ditawan Belanda.

94. Lihat manuskrip *Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng di Bali*.

Dalam perjalanannya ke Denpasar itu, raja selama sehari penuh menahan lapar dan haus. Rombongan ini tiba di Denpasar pada 28 September dan Belanda berniat mengasingkan raja beserta keluarganya ke Lombok keesokan harinya, tetapi Raja Tabanan yang tak bersedia menerima penghinaan tersebut, bunuh diri bersama putra mahkotanya. Raja Gusti Ngurah Agung menghabisi nyawanya sendiri dengan sebilah pisau kecil yang biasanya tersimpan dalam kotak sirih, sedangkan putra mahkota bunuh diri dengan meminum racun.[95]

Peristiwa ini menandai berkuasanya pemerintah Belanda di Tabanan, mereka juga melakukan berbagai perombakan dalam tatanan pemerintahan. Wilayah Tabanan dibagi menjadi 13 distrik pada 1908 yang masing-masing dikuasai oleh seorang penggawa.[96]

1. Distrik kota Tabanan di bawah pimpinan Anak Agung Ngurah Gede Kaleran.
2. Distrik Samsam di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Putu Denpasar.
3. Distrik Timpang di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Made Kaler Puri Anom.
4. Distrik Bongan di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai Anyar.
5. Distrik Banjar Anyer di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Nyoman Karang Jro Beng.
6. Distrik Panebel di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Ketut Jro Kompiang.
7. Distrik Jegu di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai Jro Oka.
8. Distrik Selamadeg di bawah pimpinan Gde Nyoman Sraba Dangin Peken.
9. Distrik Gadungan di bawah pimpinan I Gusti Gede Kompiang Jro Subamia Kawan.
10. Distrik Kurambitan di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Gde Rai Puri Gede.
11. Distrik Kediri di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Made Pangkung.
12. Distrik Marga di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Gede Putra Marga.
13. Distrik Blayu di bawah pimpinan I Gusti Nyoman Oka Blayu.

Para penggawa ini menerima gaji dari pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya, rakyat Tabanan mulai dikenai kewajiban membayar pajak (belasting) dan kerja rodi demi kepentingan penjajah.

---

95. Lihat *Bali in the 19th Century*, halaman 218.
96. Lihat *Babad Arya Tabanan dan Ratu Tabanan*, halaman 145–146.

Bersamaan dengan masa pendudukan Belanda ini, salah seorang saudari Raja Ki Gusti Ngurah Rai Perang bernama Sagung Ayu Wah menghimpun masyarakat Wongaya mengadakan perlawanan terhadap penjajah. Perlawanan yang meletus pada 28 November 1906 ini berhasil dipatahkan dan Sagung Ayu Wah diasingkan ke Lombok. Sementara itu, I Gusti Ngurah Ketut Mecutan dari Puri Mecutan, Tabanan, yang turut diasingkan ke Lombok, dikembalikan ke Tabanan pada 1917 dan menumpang di puri para kerabat raja. Mula-mula dia bekerja magang sebagai *klerk* (juru tulis) dan selanjutnya diserahi jabatan penggawa hingga akhirnya Sedahan Agung.

Pada 1929, berdasarkan *Staatsblaad* tahun 1929 no. 226 tanggal 8 Juli 1929, kedudukan para raja dipulihkan dan terbentuklah delapan negara *bestuur* (pemerintahan). Pemerintah kolonial kemudian mengangkat I Gusti Ngurah Ketut sebagai *bestuurder* (penguasa) Tabanan dengan gelar Cokorda Ngurah Ketut (1929–1939). Bersama dengan raja-raja Bali lain, ia mengikrarkan sumpah di Puri Besakih pada 29 Juli 1929. Puri Agung Tabanan merupakan puri hasil perluasan Puri Mecutan pada 1932 yang baru dibangun di atas lahan milik keluarga Jero Subamia dan diresmikan pada 1930.

Cokorda Ngurah Ketut digantikan oleh putra tertuanya, I Gusti Ngurah Gede atau Cokorda Ngurah Gede. Pada zaman Jepang, ia menjadi *sucho* (kepala swapraja) Tabanan. Pada 15 Juli 1950, Tabanan berubah menjadi kabupaten dengan Cokorda Ngurah Gede menjadi bupati pertamanya. Putranya, I Gusti Ngurah Agung Dharmasetiawan, seharusnya menjadi penggantinya, tetapi telah terlebih dahulu wafat. Oleh karenanya, adik I Gusti Ngurah Agung Dharmasetiawan, I Gusti Ngurah Rupawan dinobatkan sebagai Raja Tabanan pada 21 Maret 2008 dengan gelar Ida Cokorda Anglurah Tabanan.

XIII. TAMANBALI

Kerajaan Tamanbali pernah eksis, tetapi kemudian lenyap dari panggung sejarah. Informasi mengenai sejarah kerajaan ini dapat diperoleh dari *Babad Ksatriya Taman Bali*. *Babad* tersebut dibuka dengan mengisahkan seorang tokoh bernama Bhatara Subali yang bersaudara dengan Bhatara Sekar Angsana. Bhatara Subali berdiam di Tolangkir, sedangkan saudaranya berdiam di Pura Dasar Gelgel. Selanjutnya, disebutkan bahwa ia masih memiliki saudara dan saudari lain ibu, yang masing-masing

bernama Sanghyang Aji Jayarembat (bertempat tinggal di Pura Kentelgumi) dan Ni Mas Kuning (berdiam di Guliang).[97]

Suatu ketika, seorang pendeta sakti bernama Sang Pendeta Wawu Rawuh mengunjungi Bhatara Subali di Tolangkir. Dalam perjalanan pulangnya, ia merasa kehausan dan mencari mata air. Kendati demikian, tak satupun mata air ditemukan sehingga sanggup memuaskan dahaganya. Oleh karena itu, setibanya di jurang Malangit, ia menancapkan tongkatnya ke batu cadas dan memancar keluarlah air yang jernih dan harum. Bersamaan dengan itu, muncul pula seorang gadis cantik. Sang Pendeta Wawu Rawuh lantas menamainya Ni Dewi Njung Asti. Dikarenakan airnya yang harum, mata air yang baru tercipta itu dinamakan Tirta Arum. Sang Pendeta Wawu Rawuh kemudian pulang ke tempat kediamannya, sedangkan Ni Dewi Njung Asti berdiam di sana guna menjaga Tirta Arum.

Konon, keharuman Tirta Arum membumbung hingga surga tempat berdiamnya Bhatara Wisnu. Ia melihat Ni Dewi Njung Asti dan terpesona oleh kecantikannya sehingga saat mandi keluarlah spermanya tertumpah di atas batu.[98] Ni Dewi Njung Asti memakan sperma tersebut dan hamil. Tatkala Bhatara Wisnu kembali ke Tirta Arum, ia berjumpa dengan Ni Dewi Njung Asti dan menanyakan siapakah ayah bayi yang dikandungnya itu. Ia menceritakan apa yang terjadi dan Bhatara Wisnu menyatakan bahwa Ni Dewi Njung Asti pastilah jelmaan bidadari sehingga layak turut serta ke surga.

Bhatara Subali mendengar mengenai keistimewaan Tirta Arum dan mengunjunginya. Ia lantas menitahkan saudaranya, Sanghyang Aji Jayarembat, menjaga mata air tersebut. Bahkan, Bhatara Subali melengkapinya dengan sebuah taman yang menyerupai taman di Majapahit dan menamainya Tamanbali. Demikianlah asal muasal nama Tamanbali. Seiring dengan berjalannya waktu, tibalah saatnya bagi Ni Dewi Njung Asti melahirkan putranya, yang diberi nama Sang Gangga Tirta. Bersamaan dengan itu, Bhatara Subali mengadakan pemujaan kepada Bhatara Wisnu guna memohon seorang putra. Bhatara Wisnu lalu menganugerahkan Sang Gangga Tirta kepada Bhatara Subali.

Pagi itu, Sanghyang Aji Jayarembat yang dititahkan menjaga Tirta Arum sedang memeriksa kualitas air di sana. Sewaktu dia mengatur letak pancurannya, keluarlah

97. Lihat *Babad Ksatrya Taman Bali*, halaman 7.
98. Lihat *Babad Ksatrya Tamanbali*, halaman 8.

seorang bayi dari mulut air terjun, yang tak lain dan tak bukan adalah Sang Gangga Tirta. Bayi itu diangkat dan digendong oleh Sanghyang Aji Jayarembat. Bhatara Subali yang hari itu datang hendak membersihkan dirinya menyaksikan bayi tersebut dan mengatakan bahwa itulah putra anugerah Bhatara Wisnu bagi dirinya. Sang Gangga Tirta lalu diganti namanya menjadi Sang Anom.

Alkisah, putri Bhatara Sekar Angsana bernama Ni Dewa Ayu Mas kerap jatuh sakit dan hanya dapat disembuhkan oleh Sanghyang Aji Jayarembat di Tamanbali. Kendati demikian, setelah kembali ke istananya, Ni Dewa Ayu Mas kambuh lagi penyakitnya sehingga harus dibawa ke Tamanbali. Demikianlah terjadi berulang kali hingga Ni Dewa Ayu Mas beranjak dewasa. Karena seringnya mengunjungi Tamanbali untuk berobat, Ni Dewa Ayu Mas jatuh hati kepada Sang Anom. Hubungan percintaan itu akhirnya menyebabkan Ni Dewa Ayu Mas mengandung sehingga membangkitkan kemurkaan ayahnya. Ia lantas memerintahkan membunuh Sang Anom. Mendengar adanya bahaya yang mengancam dirinya, Sang Anom melarikan diri dari Tamanbali ke arah timur laut. Namun, beberapa waktu kemudian, secara diam-diam Sang Anom menyusup kembali ke negerinya. Di tengah perjalanan, ia menyamar sebagai pencari burung, dan tibalah ia di Hutan Jarakbang.

Sewaktu berada di Jarakbang, Sang Anom mendengar bunyi kentongan di Tamanbali ditabuh bertalu-talu. Bertanyalah ia kepada salah seorang penghuni gubuk di tempat itu, mengapa terdengar bunyi kentongan tersebut. Tetapi yang ditanya tidak menjawabnya dengan serius dan malah memberikan jawaban asal-asalan. Sang Anom merasa kesal dan mengutuk bahwa tempat itu kelak akan dinamai Bangli (dari kata *banggi* yang artinya 'bermain-main'). Penghuni gubuk yang mendengarnya marah dan melaporkannya kepada Raja Gelgel, Bhatara Sekar Angsana, yang masih memburu Sang Anom. Dijelaskannya pula bahwa orang yang mengucapkan kutukan itu berwajah sangat tampan. Bhatara Sekar Angsana merasa curiga jangan-jangan orang itu adalah buronan yang sangat dicarinya. Dia lalu mengutus pengikutnya melakukan penyelidikan ke Hutan Jarakbang.

Akhirnya, Sang Anom berhasil ditangkap oleh para pengikut Raja Gelgel. Meskipun demikian, Bhatara Subali memohonkan ampun bagi Sang Anom. Ternyata Bhatara Sekar Angsana bersedia mengampuni dan menikahkan putrinya, Ni Dewa Ayu Mas, dengan Sang Anom. Setelah beberapa lama mereka berdua menempuh kehidupan berumah tangga, karena merasa ajalnya sudah dekat, Bhatara Subali

memberi berbagai petuah kepada Sang Anom yang kemudian diangkat sebagai penguasa Tamanbali.

Sang Anom berniat melakukan kegiatan pertapaan saat putranya yang dikandung Ni Dewa Ayu Mas hendak dilahirkan. Sebelum berangkat ia berpesan agar putranya itu diberi nama Ki Dewa Garbhajata dan menyerahkan keris pusaka bernama Si Lobar (Ki Lobar), agar diserahkan kepada putranya setelah dewasa. Demikianlah, setelah Ki Dewa Garbhajata dewasa, ia menyusul ayahnya yang sedang bertapa di Hutan Alas Dawa. Pada kesempatan tersebut, Sang Anom mewariskan Kerajaan Tamanbali kepada Ki Dewa Garbhajata. Silsilah Tamanbali selanjutnya adalah I Dewa Garbhajata yang berputra Cokorda Den Bancingah. Ia menikah dengan putri Kyai Jambe Pule dari Badung, putranya adalah Cokorda Pamecutan. Cokorda Pamecutan berputra I Dewa Gede Den Bancingah. I Dewa Gede Den Bancingah berputra I Dewa Gede Kanca Den Bancingah. I Dewa Gede Kanca Den Bancingah berputra I Dewa Gede Tangkeban.[99]

Meskipun demikian, silsilah yang dicantumkan oleh Prof. Hans Hägerdhal agak berbeda dengan silsilah di atas. Sang Angga Tirtha dicantumkan berputra Dewa Kanca Den Bancingah (disebut juga Sang Anom atau Dewa Gede Pring I dari Nyalian), Dewa Ngurah Den Bancingah (Dewa Gede Prasi dari Bangli), Dewa Gede Pindi dari Gaga, Dewa Ketut Kaler dari Getakan, dan Dewa Gede Ngurah Oka Pemecutan dari Tamanbali.[100] Adanya perbedaan ini memerlukan penelitian lebih lanjut para sejarawan. Dewa Gede Ngurah Oka Pemecutan inilah yang kemudian menggantikan ayahnya sebagai Raja Tamanbali. Ia selanjutnya digantikan secara berturut-turut oleh Dewa Gede Ngurah Pamecutan II, Dewa Gede Ngurah Pamecutan III, dan Dewa Gede Ngurah Pemecutan IV yang wafat pada 1809.

Sementara itu sumber lainnya menyebutkan bahwa Raja Tamanbali pertama adalah I Dewa Anam yang mempunyai seorang putra bernama I Gede Oka. Putranya ini kemudian menggantikan ayahnya menjadi Raja Tamanbali kedua. I Gede Oka mempunyai beberapa orang putra, yakni I Dewa Gde Gangga atau I Dewa Gede Kanca Tangaling, I Dewa Gede Pering yang kemudian pindah ke desa Nyalian (Klungkung), dan I Dewa Gede Perasi yang pindah ke Bangli serta mendirikan puri di utara Bancingah. Karenanya, I Dewa Gede Perasi juga disebut I Dewa Gede den Bencingah yang untuk selanjutnya bertakhta sebagai Raja Bangli. I Dewa Gede

99. Lihat *Babad Ksatrya Taman Bali*, halaman 20.
100. Lihat *Kerajaan2 Indonesia*, halaman 31.

Gangga lantas dinobatkan sebagai Raja Tamanbali berikutnya. Ia berputra I Dewa Gede Ngurah Pamecutan yang selanjutnya menurunkan I Dewa Gede Anom. Tokoh ini kemudian bertakhta di Tamanbali dan selanjutkan menjadi cikal bakal raja-raja di kerajaan tersebut.

I Dewa Gede Tangkeban memiliki beberapa orang putra, yakni I Dewa Pring, I Dewa Prasi, I Dewa Pindi, I Dewa Kaler, I Dewa Batanwani, I Dewa Pulasari, I Dewa Mundung, I Dewa Kliki, dan I Dewa Gede Anom Teka.[101] I Dewa Pring kemudian berkedudukan di Nyalian (Brasika) dan menjadi cikal bakal kerajaan tersebut. I Dewa Prasi diangkat sebagai penguasa di Desa Gaga, yang kelak menjadi Raja Bangli.

Ketika itu daerah Bangli dikuasi oleh Kyai Anglurah Praupan (lihat bagian tentang Kerajaan Bangli). Dua orang penjaga istana yang terlambat menjalankan tugasnya dihukum oleh I Dewa Gede Tangkeban dengan diperintahkan membunuh Kyai Anglurah Praupan. Meskipun demikian, mereka malah menyerahkan diri kepada Raja Bangli tersebut. Mereka berdua diampuni dan dikirim balik oleh Kyai Anglurah Praupan ke Tamanbali serta diperintahkan membunuh I Dewa Gede Tangkeban. Adapun imbalannya adalah seisi Kerajaan Tamanbali. Kedua orang ini tewas, namun berhasil melukai I Dewa Gede Tangkeban.

Lama sekali luka I Dewa Gede Tangkeban tidak dapat disembuhkan. Saat ia sedang sakit, salah seorang putranya bernama I Dewa Kaler berselingkuh dengan selir-selirnya. Akibatnya, I Dewa Kaler dijatuhi hukuman diturunkan derajat kebangsawanannya. Setelah I Dewa Gede Tangkeban mangkat, dia digantikan oleh putranya I Dewa Gede Anom Teka. Ia mengirimkan pasukan ke Bangli guna membalaskan dendam ayahnya dan berhasil menewaskan Kyai Anglurah Praupan. Saudaranya, I Dewa Prasi, lalu didudukkan sebagai penguasa Bangli.

Semasa pemerintahan Dewa Gede Ngurah Pemecutan III, Tamanbali diserang oleh Klungkung dengan bantuan Sidemen.[102] Putranya yang masih kecil diselamatkan oleh Raja Dewa Manggis dari Gianyar.[103] Setelah putra itu dewasa, diadakan perundingan antara raja Klungkung, Raja Dewa Manggis dari Gianyar, dan Raja Bangli. Hasilnya, Tamanbali akan dikembalikan pkeada pewarisnya, I Dewa Gede Raka Oka, yang naik takhta dengan gelar Dewa Gede Ngurah Pemecutan IV.[104] Sementara

101. Lihat *Babad Ksatrya Taman Bali*, halaman 20.
102. Lihat *Leluhur Orang Bali dari Dunia Babad dan Sejarah*, halaman 100.
103. Dalam buku *Babad Ksatrya Taman Bali*, halaman 32, disebut bernama I Dewa Gede Tamanbali.
104. Lihat *Leluhur Orang Bali dari Dunia Babad dan Sejarah*, halaman 101.

itu, sumber lain menyebutkan bahwa pengambilalihan kembali tersebut dilakukan melalui peperangan di saat pewaris Tamanbali menyerang Tamanbali dengan dukungan Gianyar.[105] Pada masa itu, salah seorang putra Tamanbali bernama I Dewa Gede Anom Rai menikah dengan I Dewa Ayu Den Bancingah dari Bangli. Dewa Gede Ngurah Pemecutan IV merupakan Raja Tamanbali terakhir. Keruntuhan Tamanbali pada 1809 telah diuraikan pada bagian mengenai Kerajaan Bangli

D. PERBUDAKAN DI BALI

Bali merupakan salah satu penghasil budak utama di Kepulauan Nusantara. Semenjak abad 17 hingga 19, ekspor utama Bali adalah budak yang setiap tahunnya diekspor sebanyak 2.000 orang budak. Meskipun yang kerap terlibat dalam tahapan akhir transaksi adalah orang-orang Cina, sesungguhnya para raja dan kepala daerah juga menuai banyak keuntungan darinya. Orang yang rentan jatuh ke dalam perbudakan adalah tawanan perang, janda-janda yang tak mempunyai anak, orang yang terlilit utang, dan penjahat. Selain itu, pedagang swasta dan pemerintah kolonial Belanda juga turut merangsang praktik perdagangan budak ini serta menimbulkan berbagai penyalahgunaan; tidak hanya orang bersalah saja yang dapat dijual sebagai budak. Hal ini tampak nyata dari laporan seorang misionaris Inggris yang pernah berkunjung ke Bali di awal abad 19.

> sasarannya tidak selalu orang yang bersalah ... tetapi mereka yang kebetulan tidak memiliki teman yang berpihak kepadanya [juga ikut] ditangkap dan dijual, barangkali karena kesalahan yang amat sepele, atau bahkan alasan palsu atau ngawur. Betapapun kenyataan harga tertentu yang ditawarkan per kepala, untuk pemuda yang kekar, akan menggoda para raja untuk lebih cepat menghukum (orang-orang) semacam itu supaya bisa dijual, atau terdorong memerangi tertangganya yang lebih lemah, hanya demi tujuan agar punya bahan untuk memasok pasar Belanda.[106]

Para budak itu dijual di Batavia, Hindia Barat, Afrika Selatan, dan pulau-pulau di Samudera Pasifik dan Hindia guna mengerjakan perkebunan atau pertambangan. Pada pertengahan abad 17, total populasi budak mencapai 18.000 jiwa dan setengahnya adalah orang Bali. Pelarangan perbudakan oleh pemerintahan Inggris (1811–1816)

105. Lihat *Babad Ksatrya Taman Bali*, halaman 33.
106. *Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik*, halaman 34; yang dikutip dari *Journal of a Tour along the Coast of Java and Bali and with a Short Account of the Island of Bali Particularly Bali Baliling* (Singapore Mission Press, 1830) karya Dr. Medhurst halaman 31-32.

menjadi pukulan ekonomi yang berat terhadap para raja. Kendati demikian, perdagangan budak ini terus berlanjut hingga 1860.

E. KONDISI BALI DI ABAD 19 DAN 20

I. Perkembangan Umum di Bali Pada Abad 19 dan Awal Abad 20

Semenjak berabad-abad, kerajaan-kerajaan di Bali sudah sering terlibat perang saudara. Menjelang paruh akhir abad 19, Klungkung terlibat peperangan yang terus menerus dengan Karangasem dan Gianyar. Buleleng dan Bangli terus menerus bertikai satu sama lain. Bahkan pada 1849, Bangli ikut serta dalam ekspedisi militer Belanda menyerang Buleleng. Pada itu juga, Raja Karangasem dibunuh oleh pasukan Kerajaan Mataram di Lombok. Kurang lebih pada kurun waktu yang sama, Jembrana dan Buleleng dilanda perebutan kekuasaan, kericuhan dan pemberontakan. Pasukan gabungan Gianyar, Badung, dan Tabanan menghancurkan Mengwi pada 1891 sehingga mengakibatkan gugurnya Raja Mengwi yang terakhir. Agung Ngurah Made Agung. Dewa Manggis memimpin pemberontakan demi membebaskan Gianyar dari kekuasaaan Klungkung antara 1886–1893. Sesudah 1893, Badung bersekutu dengan Bangli dan Karangasem dalam menghadapi Gianyar, dan pada 1904, terjadi peperangan antara Bangli dan Karangasem. Oleh karenanya, Bali dalam kurun waktu tersebut bukanlah tempat yang sama sekali damai. Pihak yang dulunya kawan dapat dengan sekejap menjadi lawan dan begitu pula sebaliknya.

Mesatia adalah tradisi yang dilakukan janda-janda raja dengan ikut membakar dirinya ketika jenazah almarhum suaminya dikremasi dalam upacara *ngaben*. Pemerintah Belanda menghendaki agar raja-raja Bali melarang *mesatia* di negerinya karena tradisi itu dianggapnya tidak manusiawi. Lembaga Keagamaan Hindu Bali sendiri setuju dengan penghapusan *mesatia*. Raja Tabanan meninggal pada 6 Maret 1903. Putra tertua raja menggantikan ayahnya dengan gelar Gusti Ngurah Agung. Jenazah raja yang meninggal sedianya akan dikremasi dengan upacara *ngaben* pada 25 Oktober. Ketika itu, pemerintah mendesak raja agar mencegah niat para janda untuk melaksanakan *mesatia*. Namun, pada kenyataannya tidak ada pelarangan terhadap penyelenggaraan tradisi tersebut.

Pemerintah Belanda mengirimkan pemberitahuan kepada raja tertanggal 12 Oktober bahwa mereka menentang keras diselenggarakannya *mesatia* saat upacara *ngaben* yang akan berlangsung. Karenanya, Biro Urusan Pribumi akan datang sendiri

ke Tabanan guna membicarakan masalah tersebut lebih lanjut pada 17 Oktober. Raja menjawab bahwa para janda itu telah mengajukan diri secara sukarela pada 29 September dan disahkan tanggal 2 Oktober sehingga menurut raja ketetapan ini tidak dapat ditinjau kembali. Pemerintah Belanda tidak dapat menerima alasan tersebut dan berupaya mengubah pikiran raja dengan mengirimkan dua buah kapal perang. Raja tampak menyetujui tuntutan Belanda, tetapi *mesatia* tetap juga diadakan saat berlangsungnya *ngaben* pada yang telah ditetapkan sebelumnya (25 Oktober).

Gubernur Jenderal Belanda merasa sangat kecewa dengan peristiwa itu dan mengeluarkan tuntutan agar raja beserta keturunan-keturunannya berjanji tidak lagi mengizinkan para janda raja dan kerabat lainnya melakukan *mesatia*. Selain itu, ia dituntut untuk mengirimkan kerabatnya sebagai utusan kepada gubernur jenderal guna menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan tersebut. Bila gagal memenuhi tuntutan di atas, raja terancam dicabut kekuasaannya atau dibuang ke luar daerah. Kemauan pemerintah Belanda itu telah dijawab oleh raja, walau dengan berbagai dalih ia mencoba untuk tidak mengirim utusan. Perjanjian di atas disahkan dalam akta pemerintah Belanda tertanggal 10 Maret 1904 no.1.

Belanda meyakini bahwa penghapusan *mesatia* tidak akan berjalan dengan baik bila kebijaksanaan ini tidak diterapkan secara ketat di negara-negara Bali lainnya. Permasalahan ini harus segera diselesaikan karena jenazah Raja Klungkung (Dewa Agung Putra III) yang meninggal pada 25 Agustus 1903 hendak di-*aben*. Konon, 6 orang jandanya telah siap melakukan *mesatia*. Kontrolir Belanda menyampaikan niat pemerintahnya kepada Raja Dewa Agung Jambe II dari Klungkung mengenai penghapusan *mesatia*. Raja menjawab bahwa belum ada sukarelawan yang mendaftar ingin ikut *mesatia*, tetapi menurut hukum agama kehendak semacam itu tidak dapat dilarang. Pemerintah menekan raja sehingga pada 5 Desember raja memberikan jaminan tertulis. Saat upacara *ngaben* dilangsungkan pada 12 Desember, *mesatia* memang ditiadakan. Di tahun berikutnya, Belanda mengadakan pernjanjian dengan raja lainnya mengenai penghapusan *mesatia*.

G.F. de Bruyn Kops, Residen Bali dan Lombok (1905–1909), pernah memberikan kuliah pada 1909 mengenai buruknya kondisi di Bali yang mengharuskan Belanda melakukan intervensi militer di berbagai kerajaan, seperti Badung, Tabanan, dan Klungkung, demi mewujudkan ketertiban dan membawa peradaban.

> Di kerajaan-kerajaan tersebut, ditemukan kondisi yang tidak bisa lagi ditoleransi oleh negara beradab yang berdaulat di wilayah itu: perang yang kronis, keacakan ekstrim pihak penguasa, sama sekali tak adanya kepastian hukum untuk orang biasa, pembakaran janda, perbudakan, riba, penyelundupan besar-besaran dengan Jawa dan seterusnya. Seluruh pendapatan, seperti pajak, pembayaran kontrak sewa dan denda, mengalir ke kantong raja, yang sedikit pun tidak membelanjakannya untuk kebaikan negeri dan rakyat, tetapi memakainya demi keuntungannya sendiri. Jika seseorang mati tanpa meninggalkan anak lelaki maka bukan saja hartanya menjadi milik raja, tetapi janda dan anak perempuannya pun menjadi budak atau selir raja. Jika perselisihan antara dua pihak atas sebidang tanah tetap tidak terselesaikan maka tanah yang diperkarakan itu langsung menjadi milik raja. Hukuman mati adalah hukuman yang sangat umum, dan sering dijatuhkan tanpa penyelidikan apapun.[107]

Selain itu, ada laporan lainnya bahwa raja-raja Bali gemar mengisap candu.[108] Apa yang disampaikan oleh mantan residen Bali dan Lombok di atas tampaknya merupakan pembenaran bagi intervensi militer Belanda ke Bali. Catatan yang negatif terhadap raja-raja Bali itu barangkali dibuat sebagai alasan moral bagi aksi militer yang dilancarkan Belanda terhadap Bali. Oleh karena itu, tingkat kebenarannya tetap patut dipertanyakan dan diperlukan penelitian lebih lanjut.

II. Perang Jagaraga

Pada 1843, Raja Buleleng, Karangasem, dan lain sebagainya telah menandatangani perjanjian penghapusan adat Tawan Karang, tetapi mereka tidak pernah melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Kapal-kapal Belanda yang terdampar pada 1844 di Perancak dan Sangsit masih dirampas muatannya oleh warga setempat. Timbul perselisihan dengan pemerintah kolonial yang menuduh raja-raja Bali tidak berupaya dengan sungguh-sungguh menepati janjinya. Situasi makin memanas ketika pada 1845, Raja Buleleng menolak pengesahan perjanjian penghapusan Tawan Karang. Patih Buleleng, Gusti Ketut Jelantik, yang bersikap anti-Belanda menampik dengan tegas segenap tuntutan Belanda. Dia menyadari bahwa penolakan itu pasti memancing invasi Belanda ke negerinya. Karena itu, ia menggiatkan latihan kemiliteran dan

107. *Sisi Gelap Pulau Dewata*, halaman 39–40. Diambil dari *Het evolutie tijdperk op Bali, 1906–1909*, *Koloniaal Tijdschrift 4* (1915), halaman 459–479, oleh G.F. de Bruyn Kops. Kuliah disampaikan kepada "*Vereeiniging van Ambtenaren bij het Binnenlands-Bestuur in Nederlandsch-Indie*," 13 Maret 1915.

108. lihat *Ibid*., halaman 39. Catatan kaki nomor 24 menyebutkan bahwa untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ketergantungan raja-raja Bali terhadap candu dan upaya pemerintah kolonial untuk membebaskannya dapat dilihat pada *Eenigen tijd onder de Baliers: Eene reisbechrijving met aanteekeningen betreffende Hygiene, Land en Volkenkunde van de eilanden Bali en Lombok* oleh Dr. Julias Jacobs (Batavia: G. Kolff, 1883).

mengumpulkan persenjataan sebagai antisipasi terhadap hal-hal yang tak diinginkan. Para pedagang Bugis dan Cina dimintanya mengimpor senjata dari Singapura.

Belanda memberikan ultimatum selama tiga hari yang berakhir pada 27 Juni 1846 agar Raja Buleleng mengakui kekuasaan pemerintah kolonial, melaksanakan sepenuhnya penghapusan hukum Tawan Karang, dan melindungi kegiatan perdagangan Belanda. Ternyata hingga tenggang waktu habis, pihak Buleleng tidak memberikan jawaban apapun. Raja Buleleng mengutus Patih Gusti Ketut Jelantik membicarakan masalah ini dengan Klungkung. Dewa Agung, Raja Klungkung yang sama-sama membenci Belanda, mendukung sikap Buleleng tersebut. Selain dukungan yang diperoleh dari Klungkung, Kerajaan Karangasem juga sehaluan dengan mereka dan menyatakan penentangannya terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Pada 27 Juni 1846, Belanda mendaratkan angkatan perangnya di pantai Buleleng. Ekspedisi militer Belanda kali ini berkekuatan 1.700 orang, yang terdiri dari 400 serdadu Eropa, 700 serdadu pribumi, 100 serdadu Afrika, dan 500 pasukan bala bantuan asal Madura. Konflik senjata pertama pecah antara pasukan Belanda dan Buleleng. Kendati demikian, tembakan gencar meriam-meriam Belanda memaksa laskar Bali mundur dari tempat pertahanannya. Satu persatu desa di kawasan pantai jatuh ke tangan Belanda. Pada 29 Juni 1846, kubu laskar Buleleng terpaksa ditinggalkan dan dikuasai musuh. Kini pasukan pemerintah kolonial bergerak ke Singajara, ibu kota Buleleng. Pertempuran sengit kembali terjadi. Meskipun demikian, istana kerajaan berhasil direbut oleh Belanda pada 29 Juni 1846.

Raja Buleleng beserta patihnya mengundurkan diri ke Jagaraga. Mereka bersedia mengadakan perdamaian dengan Belanda. Dalam perjanjian yang diadakan pada 6 Juli 1846, Belanda menuntut agar Buleleng membongkar segenap benteng pertahanannya dan dilarang mendirikan yang baru, 3/4 ongkos ekspedisi militer dibebankan kepada Buleleng, dan pemerintah kolonial diberi izin mendirikan bentengnya di negeri tersebut. Karangasem menyusul mengadakan perjanjian dengan Belanda dan diperintahkan menanggung 1/4 biaya peperangan. Namun, perjanjian ini hanya dipakai sebagai siasat mengulur waktu saja. Raja-raja di atas tidak pernah membayar biaya perang sebagaimana yang dijanjikan.

Tatkala serdadu Belanda ditarik ke Jawa, Buleleng, Klungkung, dan Karangasem memperkuat kembali pasukannya. Penyerangan terhadap segelintir pasukan Belanda yang ditinggalkan di Bali kerap terjadi dan persenjataan mereka dirampas. Patih

Gusti Jelantik memperkuat pertahanan daerah pantai. Kendati berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah ditandatangani ketiga kerajaan mengakui kedaulatan Belanda, namun mereka masih merasa sebagai negara merdeka. Hukum Tawan Karang masih diberlakukan dan menimpa kapal Belanda yang terdampar di pantai Kusumpa pada 1847. Kerajaan Mengwi dan Badung mengambil sikap menentang Belanda pula.

Pemerintah Belanda merasa kesal dengan raja-raja Bali. Mereka mengultimatum raja-raja Bali agar segera melunasi pembayaran ganti rugi terhadap kapal-kapal yang terkena adat *tawan karang*. Selain itu, Belanda menuntut agar seorang utusan Bali segera dikirim ke Batavia guna menyampaikan permintaan maaf para raja kepada pemerintah kolonial. Benteng-benteng Buleleng yang hingga saat itu masih berdiri harus segera diruntuhkan. Belanda menuntut agar Gusti Jelantik yang dianggap sebagai biang keladi perlawanan diserahkan pada mereka. Komisaris Belanda mengingatkan bahwa berdasarkan perjanjian sebelumnya, Buleleng merupakan daerah taklukan Hindia Belanda, tetapi patih yang gagah berani tersebut membantah dan menyatakan bahwa selama ia masih hidup hal semacam itu mustahil terjadi.

Segenap ultimatum dan tuntutan Belanda dianggap angin lalu oleh raja-raja Bali sehingga permusuhan antara kedua belah pihak bagaikan bara dalam sekam. Benar saja, Belanda mengirim kembali ekspedisi militernya pada 6 Juni 1848 yang mendarat di pantai Sangsit. Beberapa kawasan, seperti Sangsit timur dan Bungkulan, berhasil diduduki Belanda yang selanjutnya merangsek maju ke Jagaraga–kubu pertahanan Buleleng. Dalam pertempuran di Jagaraga, 5 opsir dan 74 serdadu Belanda tewas di tangan laskar-laskar Bali. Sebuah benteng Buleleng jatuh ke tangan Belanda, namun tidak besar pengaruhnya. Kali ini, pasukan kolonial terdesak mundur ke daerah pantai.

Sementara waktu peperangan terhenti dan masing-masing pihak bertahan di kubunya masing-masing. Jenderal van der Wick yang memimpin ekspedisi militer mengirim surat ke Batavia dan meminta tambahan bala bantuan sebanyak dua batalion beserta 1.000 orang tenaga kasar. Namun, permintaan tak dipenuhi sehingga pasukan kolonial terpaksa ditarik mundur ke Jawa.

Kegagalan ekspedisi militer pada 1848 ini memperkuat rasa percaya diri raja-raja Bali. Pengaruh dan karisma Gusti Jelantik makin menguat di hadapan penguasa Bali lainnya. Buleleng, Klungkung, Mengwi, dan Karangasem menjalin aliansi dan sepakat bersama-sama menghadapi Belanda. Sementara itu, Raja Badung, Gianyar, Bangli, dan Tabanan belum menentukan sikap, kendati mereka telah dirayu oleh Belanda.

Berbagai kubu pertahanan baru dibangun. Dua puluh orang serdadu Belanda yang melakukan desersi dan beralih kepada Buleleng ditugaskan mengurus serta merawat senjata api. Disamping itu, mereka diminta melatih pasukan Bali menggunakan persenjataan.

Di tahun berikutnya, yakni akhir Maret dan awal April 1849, mendaratlah pasukan kolonial di bawah pimpinan Jenderal Michiels. Kali ini Belanda tidak mau kehilangan muka lagi dan mengirimkan pasukan dengan jumlah jauh lebih besar. Tidak tanggung-tanggung, pasukan infanteri sejumlah 4.177 orang dikirim ke Bali. Jumlah itu masih ditambah lagi dengan 25 pasukan kavaleri, pasukan artileri yang membawa 24 meriam, pasukan zeni beranggotakan 151 orang, pasukan perawat berjumlah 122 orang, tenaga kasar sebanyak 2.000 orang beserta 1.000 cadangannya, dan 29 kapal perang berkekuatan 286 pucuk meriam.

Pasukan Buleleng tidak sanggup menghalangi gerak maju musuh. Raja Buleleng mengirim utusan pada pimpinan pasukan Belanda dan menyatakan bahwa ia bersedia merundingkan perdamaian. Pada 2 April 1849, Raja Buleleng dan Karangasem bersama-sama menyampaikan bahwa mereka ingin berjumpa dengan pucuk pimpinan pasukan kolonial. Namun, karena para utusan Bali dicurigai oleh Belanda, pesan mereka tidak disampaikan kepada Jenderal Michiels. Pagi hari pada 3 April 1849, Raja Karangasem kembali menyampaikan pesan bahwa ia beserta Raja Buleleng dan Patih Gusti Jelantik akan menemui Jenderal Michiels di Singajara. Di samping itu diberitahukan pula bahwa mereka akan membawa pengiringnya sebanyak 1.500 orang. Permintaan ini dikabulkan akan tetapi karena jembatan yang menuju Singajara rusak diterjang banjir, pertemuan ditunda hingga 7 April 1849.

Ketika perundingan akhirnya dilangsungkan, pemerintah kolonial mengulangi tuntutannya agar Buleleng dan Karangasem mengakui kedaulatan Belanda atas negeri mereka, benteng Jagaraga harus dikosongkan serta diserahkan kepada Belanda, benteng-benteng pertahanan agar diruntuhkan, serdadu-serdadu Belanda yang melarikan diri diserahkan secepatnya, senjata-senjata yang dirampas dikembalikan, mematuhi hasil perjanjian-perjanjian terdahulu, dan mengirim utusan ke Batavia guna menyampaikan penyerahan mereka. Raja Karangasem beserta Patih Jelantik menerima tuntutan tersebut dan pertemuan lanjutan dengan raja Buleleng rencananya akan diadakan di Sangsit. Bersamaan dengan itu, Belanda sepakat memindahkan markasnya dari Singajara ke Sangsit.

Pertemuan dengan Raja Buleleng diadakan pada 11 April 1849 di Sangsit. Pada kesempatan tersebut, Raja Buleleng dan Karangasem hadir dengan didahului patih-patih mereka serta dikawal oleh sejumlah besar pasukan Bali bersenjatakan tombak. Belanda mengultimatum agar sebelum 15 April, Benteng Jagaraga harus sudah diruntuhkan, bila tidak perdamaian dianggap batal dan peperangan akan dilanjutkan. Ternyata, Raja Buleleng dan Karangasem beserta Patih Gusti Jelantik hanya bermaksud mengulur waktu saja. Hingga tenggang waktu yang ditentukan, benteng Jagaraga tak kunjung dirobohkan.

Pasukan Belanda berkekuatan 2.400 orang menyerang Jagaraga. Sementara itu, benteng Jagaraga dipertahankan oleh 15.000 laskar Bali. Pihak Bali menembaki pasukan kolonial yang berdatangan dari segala penjuru. Pasukan Belanda mengalami kesulitan yang tidak ringan mengingat sulitnya medan serta kekurangan air minum. Oleh karena itu, pasukan kolonial ditarik mundur. Di luar dugaan, pada 16 April Belanda melancarkan serangan mendadak. Pasukan Belanda justru melewati jalan berbukit-bukit yang sulit dilalui sehingga mengejutkan laskar Bali. Serangan kali ini mampu menghalau pasukan Bali dari bentengnya. Sisa-sisa laskar Buleleng melarikan diri ke Karangasem. Raja Buleleng dan Patih Gusti Jelantik mengundurkan diri ke perbatasan antara Buleleng-Karangasem. Peristiwa ini menandai jatuhnya Buleleng ke tangan Belanda.

Kejatuhan Buleleng menggoyahkan keyakinan raja-raja Bali. Sebagian di antara mereka mengubah sikapnya dan beralih memihak Belanda. Raja Badung sepakat membantu pasukan kolonial menyerang Klungkung. Raja Bangli yang telah berjumpa dengan Jenderal Michiels pada 16 April akan menghalang-halangi pelarian Raja Karangasem dan Klungkung apabila mereka berhasil ditundukkan. Raja Jembrana juga mengikat perjanjian dengan Belanda. Kendati demikian, Klungkung dan Karangasem tetap berdiri tegar menentang Belanda. Karangasem bersama Raja Buleleng dan Gusti Jelantik mengantisipasi serangan pasukan kolonial. Jenderal Michiels mendaratkan pasukannya di Labuhan Amuk–tenggara Karangasem–pada 9 Mei 1849. Belanda meminta bantuan Kerajaan Mataram di Lombok yang bermusuhan dengan Karangasem. Mereka mau membantu Belanda karena ingin memiliki daerah Culik. Di luar dugaan, patih Karangasem bernama Gusti Made Jungutan yang merasa berhak atas takhta Karangasem menjalin hubungan rahasia dengan musuh. Pasukan Lombok berkekuatan 4.000 orang dipimpin Gusti Gede Rai segera bergabung dengan Gusti

Made Jungutan yang mengkhianati rajanya sendiri. Raja Karangasem gugur dalam pertempuran dan kerajaannya diduduki oleh Belanda. Selanjutnya, Karangasem beralih menjadi vasal atau bawahan Mataram.

Serangan kini dialihkan kepada Klungkung, kontak senjata pertama terjadi di Sunda Lawas. Laskar-laskar Klungkung berupaya mempertahankan markas-markasnya yang terletak di sepanjang pantai, tetapi Belanda menyerang dari dua sisi dan sanggup mendesak pasukan Klungkung. Pada 9 Juni 1849, Badung dan Tabanan yang memihak Belanda mengirimkan pasukannya senjumlah 16.000 orang menyerang Klungkung. Raja Klungkung, Dewa Agung Gede Putra, menyerah kepada mereka. Dengan demikian, peperangan ini boleh dikatakan berakhir. Kerajaan Buleleng dan Karangasem jatuh ke tangan Belanda berkat bantuan sesama raja Bali sendiri.

III. Pembentukan Pengadilan Kerta (*Raad van Kerta*)

Setelah Buleleng dan Jembrana serta kerajaan-kerajaan Bali lainnya jatuh ke dalam kekuasaan Belanda, dibentuklah suatu lembaga peradilan adat Bali yang juga disebut *Raad van Kerta* pada 1882. Semenjak awal telah ditetapkan peraturan bahwa anggota lembaga peradilan ini haruslah para pendeta berkasta Brahmana. Tetapi pada 1901 dikeluarkan peraturan baru bahwa batasan sebelumnya tidak berlaku lagi. Kendati demikian, anggota *Raad van Kerta* tetap didominasi oleh kaum Brahmana.

Belanda mendorong penggunaan teks-teks hukum dan keagamaan Bali kuno, seperti *Purwa Agama*, *Agama Adigama*, *Kutara Agama* dan lain sebagainya. Namun, permasalahannya para pendeta pada zaman itu sudah tidak dapat membaca lagi naskah-naskah berbahasa Jawa Kuno tersebut. Oleh karenanya, Belanda lalu melakukan penerjemahannya ke dalam bahasa Bali dan Melayu sehingga dapat dipahami para anggota *Raad van Kerta*. Dengan demikian, dalam kasus ini seolah-olah Belanda telah merekayasa suatu "tradisi" Bali yang mereka anggap telah dikembalikan pada jalurnya yang "benar." Setelah pembentukan *Raad van Kerta* ini, sistem kasta makin dilembagakan. Pemerintah kolonial Belanda melegalkan seperangkat aturan mengenai hak istimewa kasta dan hubungan antar kasta yang sebelumnya tidak pernah ada dalam praktiknya.

IV. Puputan Badung

Agar memperoleh gambaran yang lebih utuh, ulasan mengenai Puputan Badung akan dipaparkan seturut pandangan dan laporan kedua belah pihak. Berdasarkan

laporan Rost van Tonningen[109] dan HM. van Wede dari pihak Belanda, peristiwa ini dipicu oleh terdamparnya kapal layar *Sri Kumala* yang berasal dari Banjarmasin di Pelabuhan Sanur. Karena tidak mendapat bantuan penguasa setempat (dalam hal ini penggawa Sanur) dalam mengamankan kapal tersebut, para awak kapal lalu mengadakan penjagaan sendiri. Pada malam berikutnya, ratusan orang Bali mendatangi dan menaiki kapal. Mereka merampas peti uang dari besi dan sejumlah mata uang Cina. Keesokan harinya saat pembongkaran muatan, dengan berpura-pura hendak memberikan bantuan, orang Bali melakukan pengambilan barang apa saja yang mereka kehendaki.

Karena Kerajaan Badung tidak memberikan bantuan yang diperlukan, sebagaimana perjanjian yang diadakan sebelumnya antara Belanda dengan para raja Bali yang menyatakan bahwa kewajiban penggawa setempat turut serta mengamankan kapal yang terdampar, pemilik kapal mengadukan hal ini pada residen. Sebagai langkah lebih lanjut, residen mengirim serta memerintahkan seorang pegawai Kantor Urusan Pribumi menyelidiki masalah tersebut dan terbukti bahwa pencurian uang kontan, tembaga, beserta tali temali kapal memang benar terjadi. Kendati demikian, raja hanya mengakui pengambilan tembaga dan tali temali kapal serta menyatakan bahwa pembongkaran dilakukan atas perintah Gusti Ngurah Gde Kesiman.

Menurut hasil penyelidikan, perampasan seharusnya dapat dicegah bila Raja Badung–Denpasar saat itu, I Gusti Ngurah Made Agung (1902–1906), menerapkan dengan sungguh-sungguh perjanjian penghapusan Tawan Karang serta pemberian bantuan terhadap kapal-kapal yang terdampar di pantai kerajaannya dan melaporkan hal itu dengan segera ke pemerintah. Tetapi raja ternyata tidak melaksanakannya sehingga dianggap lalai. Oleh karena kelalaian itulah Kerajaan Badung harus memberikan ganti rugi terhadap pemilik kapal sebesar 3.000 Rijksdaalder. Untuk merundingkan masalah ini, residen berkunjung ke ibu kota Badung pada 14 November 1904. Tetapi raja menolak memberikan ganti rugi dengan alasan bahwa itu bukan kesalahannya. Karenanya, diberikan pemberitahuan tertulis pkeada Kerajaan Badung agar mereka segera melunasi ganti rugi tersebut selambat-lambatnya pada 5 Januari 1905 di Singaraja. Bila mereka tidak bersedia memenuhinya, akan diambil jalan kekerasan.

109. lihat *Seabad Puputan Badung*, Rost van Tonningen adalah panglima ekspedisi Bali.

Jawaban raja disampaikan dua hari kemudian yang intinya menyatakan bahwa bawahannya membantah telah melakukan pencurian tersebut sehingga ia menolak membayar ganti rugi dalam bentuk apapun. Sebaliknya, ia menganjurkan membawa masalah ini kepada Dewan Kerta atau pengadilan lokal di Badung. Tentu saja Belanda menolak hal ini dan menegaskan lagi pada 26 Desember 1904 bahwa pemerintah Belanda tetap berpegang pada tuntutannya. Karena hingga tenggang waktu yang ditentukan Kerajaan Badung belum menyelesaikan pelunasan ganti rugi, pada 7 Januari 1905 Belanda mengadakan blokade[110] terhadap Badung dengan mengerahkan kapal Zwaluw dan Spits. Arus barang masuk dan ke luar Badung dihalangi sehingga menimbulkan keluhan di kalangan kaum pedagang yang menanggung rugi sebesar 1.500 *Rijksdaalder* setiap harinya. Karena itu, mereka menyatakan kesediaannya pada raja menanggung ganti rugi tersebut, tetapi raja melarangnya. Raja-raja Bali lain juga mendesak agar Raja Badung bersedia memenuhi tuntutan pemerintah Belanda. Namun, Raja Badung tidak bergeming sedikitpun.

Raja mengajukan protes agar Belanda mencabut blokadenya, tetapi pemerintah kolonial tak menanggapinya dan menjawab bahwa pengepungan akan dihentikan asalkan tuntutan ganti rugi itu dipenuhi. Pada 27 Februari 1905, diadakan pawai besar-besaran di Badung guna memperlihatkan kekuatan bersenjata mereka. Masalah terus berlarut-larut tanpa ada penyelesaian sehingga Belanda merasa bahwa persoalan ini sulit atau mustahil diselesaikan melalui jalan damai. Pemerintah Belanda masih merundingkan lagi penghapusan biaya blokade baik separuh atau sepenuhnya, asalkan Badung bersedia membayar ganti rugi. Tawaran ini tidak diterima oleh raja sehingga Belanda memperketat blokadenya pada 21 Mei 1905. Seluruh barang keluar dan masuk Badung dihentikan sama sekali, kecuali sebagai pemenuhan kebutuhannya sendiri atau dengan izin khusus residen dan pihak yang ditunjuk olehnya. Selain itu, penarikan pajak ekspor kini diambil alih oleh Belanda.

Badung berusaha membangun aliansi dengan kerajaan lainnya. Antara 14 dan 19 Mei 1905, Raja Badung mengunjungi Tabanan dan Raja Tabanan pun mengadakan kunjungan balasan pada 23–30 Juni 1905. Kedua kerajaan sepakat membentuk pakta pertahanan bersama dan menolak segenap tuntutan Belanda. Sepulangnya Raja Tabanan ke negerinya, ia memerintahkan rakyat Tabanan mempersenjatai diri. Sementara itu, Raja Bangli dan Klungkung tidak bersedia berpihak pada mereka.

110. Biaya blokade ditanggungg oleh Badung.

Kebijakan Belanda yang menetapkan penutupan total seluruh Badung tertanggal 21 Mei 1905 itu dipublikasikan dan disampaikan pada seluruh raja-raja di Bali, termasuk Tabanan. Sebelumnya, arus masuk barang masih dapat berlangsung melalui jalan darat. Tetapi Raja Tabanan menolak menutup daerahnya terhadap Badung karena merasa bahwa Raja Badung tidak bersalah atau melanggar perjanjian dengan pemerintah kolonial Belanda.

Berbagai upaya penyelesaian masalah ini secara damai tidak kunjung membuahkan hasil. Pada 17 Juli 1906 diajukan tawaran tertulis mengenai penyelesaian masalah ini melalui perundingan beserta konsekuensi-konsekuensi jika Raja Badung menolaknya. Kedua raja (Badung dan Tabanan) tetap mempertahankan penolakan mereka terhadap tuntutan pemerintah pada akhir Agustus 1906. Dengan demikian, Belanda memutuskan mengadakan aksi militer ke Bali pada awal September tahun itu.

Korban Puputan Badung
Sumber: wikipedia.org

Sesudah dilakukan berbagai pertimbangan, diputuskan bahwa tempat pendaratan yang sesuai adalah pantai Sanur. Pada 10 September, ekspedisi angkatan laut Belanda telah siap sedia di Sanur. Pendaratan mulai dilakukan pada 14 September pagi hari. Keesokan harinya hingga 20 September, mulai terjadi pertempuran-pertempuran kecil. Pasukan bergerak setahap demi setahap menuju Puri Denpasar. Pada kesempatan tersebut Gusti Ngurah Gede Kesiman, penguasa Puri Kesiman, tewas oleh tusukan keris kaum Brahmana yang menolak ikut bertempur. Berdasarkan informasi yang

diperoleh dari mata-mata Belanda diketahui bahwa penduduk di sekitar puri telah mengungsi sehingga Raja Badung di Denpasar hanya dilindungi oleh 1.000 orang kepercayaannya.

20 September pagi, Belanda bergerak makin dekat ke Denpasar. Malam sebelumnya, raja melakukan upacara pembakaran jenazah (*ngaben*) saudaranya. Karena para pengikutnya sudah banyak yang melarikan diri, raja merasa kecil hati dan menyadari bahwa kekalahan sudah di ambang pintu, sementara itu tembakan-tembakan makin gencar terdengar. Oleh sebab itu, pada pagi hari raja beserta pengikutnya yang tersisa bersiap-siap mati secara terhormat di tengah medan pertempuran. Raja dan para bangsawan mengenakan pakaian yang sangat indah bersulamkan benang emas dengan membawa keris bergagang emas berhiaskan batu permata. Semua orang berpakaian merah atau hitam dan rambut disisir rapi dengan minyak wangi. Kaum wanita juga turut serta dan menghias diri mereka dengan sebaik mungkin. Umumnya rambut mereka mengenakan pakaian putih-putih dengan rambut dibiarkan terurai. Raja membakar puri dan menghancurkan barang pecah belah yang ada di dalamnya. Pukul 09.00 diterima kabar bahwa musuh dari arah utara telah berhasil menembus Denpasar. Raja memimpin pawai beberapa ratus[111] orang bersenjatakan tombak dan keris yang tak lama kemudian akan berakhir tragis itu.

Ketika kedua belah pihak telah saling berhadapan satu sama lain, Belanda memberikan komando agar mereka berhenti. Namun, peringatan itu tidak dihiraukan oleh rombongan raja. Mereka terus melangkah maju sehingga mengakibatkan Belanda melepaskan tembakannya. Raja termasuk yang gugur dalam tembakan pertama ini. Keadaan dengan cepat berubah menjadi drama yang mengerikan. Rombongan yang berada di belakangnya terus menyerang sehingga pasukan Belanda terpaksa melepaskan tembakannya tanpa henti. Orang-orang yang terluka ringan menusuk mati rekannya yang terluka berat. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang melakukan bunuh diri:

> Tetapi ketika pasukan kami tidak menembak, mereka segera menusuk dirinya sendiri. Yang luar biasa adalah seorang laki-laki tua yang berjalan kian kemari melangkahi mayat-mayat sambil menusuk-nusuk ke kiri dan ke kanan temannya yang terluka sampai akhirnya dia sendiri terjatuh mati. Seorang perempuan tua menggantikan tugasnya dan akhirnya mengalami nasib yang sama.[112]

111. Sumber Belanda menyatakan 250 orang.(HM. van Weede). Lihat *Seabad Puputan Badung* halaman 75.
112. *Seabad Puputan Badung*, halaman 75.

Kaum wanita juga siap menyongsong ajalnya dengan penuh keberanian. Mereka melemparkan koin emas kepada pasukan Belanda, yang disalah pahami sebagai "ucapan terima kasih" karena telah membunuh mereka.[113] Timbunan mayat bergelimpangan di mana-mana. Puri Denpasar akhirnya berhasil diduduki oleh Belanda.

Kini Belanda bergerak menuju Puri Pamecutan. Kyai Anglurah Pemecutan IX (1854–1906) beserta pengikut-pengikutnya gugur pula dengan cara yang sama. Dengan demikian, pada hari itu gugurlah dua orang penguasa Badung. Ekspedisi militer kini dilancarkan ke Tabanan. Pasukan Belanda mulai bergerak ke sana pada 26 September 1906. Ternyata kampung-kampung yang berada di perbatasan Tabanan sudah menyatakan menyerah. Raja Tabanan meminta pertemuan dengan panglima pasukan Belanda dan ia dipersilakan memilih antara menyerah tanpa syarat atau melanjutkan pertempuran. Raja mengatakan bahwa ia perlu merundingkan dulu dengan anggota keluarganya serta memohon agar tetap diperkenankan tinggal di kerajaannya. Tetapi Belanda tidak bersedia menjamin hal itu. Raja Tabanan akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Belanda. Ia tidak diizinkan pulang ke istananya dan dibawa ke Denpasar untuk selanjutnya diasingkan ke Lombok. Raja Tabanan beserta putranya kemudian bunuh diri dengan tusukan keris. Tabanan lantas dilucuti persenjataannya oleh Belanda.

Aksi militer Belanda ini juga diteruskan ke Bangli dan Klungkung guna menyelesaikan perselisihan yang sering terjadi antara keduanya. Klungkung diperintahkan agar menyerahkan beberapa wilayahnya, yang dipatuhi oleh rajanya. Yang menarik adalah bagaimana sikap rakyat terhadap perang tersebut, seperti yang disebutkan oleh sumber-sumber Belanda. Salah seorang komentator Belanda melaporkan bahwa "rakyat sangat lega karena rajanya yang lalim telah dilengserkan."[114]

Kini kita akan beralih pada sumber Bali sendiri, yakni Kidung *Bhuwanawinasa* karya Ida Pedanda Ngurah dari Griya Gede. Dalam kidung itu dijelaskan bahwa dalam kapal yang terdampar tersebut tidak ditemui barang-barang berharga. Lalu diriwayatkan bahwa setengah bulan setelah peristiwa terdamparnya kapal datanglah utusan dari Batavia yang menuntut agar raja membayar ganti rugi sebesar *tiga sribu kang rajata* (3000 perak). Raja berjanji akan melakukan pemeriksaan dan utusan

113. Padahal koin emas tersebut terlah dimanterai dan dilemparkan pada pasukan kolonial Belanda dengan tujuan untuk mengutuk mereka.

114. *Sisi Gelap Pulau Dewata*, halaman 39. Dalam catatan kaki nomor 25 disebutkan bahwa sumbernya adalah *Een an ander over Bali en zijne bewoners* oleh M. van Geunz; dicetak ulang dari *Soerabajasch Handelsblad*, 24, 27, dan 29 November, serta 1, 4, 6, 11, 14, dan 17 Desember 1906, halaman 16.

Belanda itu menyatakan akan datang sebulan lagi. Raja Badung mengundang pihak yang bertanggung jawab menjaga keamanan pantai Badung, Ida Bagus Ngurah, dan menegurnya mengapa sampai terjadi rakyat mengambil barang-barang yang berada dalam kapal. Kendati demikian, Ida Bagus Ngurah menyatakan bahwa tidak ada penduduk pesisir yang mengambil emas, perak, maupun uang. Ia menambahkan bahwa isi kapal hanya barang-barang tidak berharga.[115] Dengan demikian, sumber Bali sendiri menolak tuduhan pihak Belanda bahwa rakyat Sanur telah merampas berbagai barang berharga dari kapal itu.

Sebagai tambahan, salah seorang anggota parlemen Belanda, H.H. van Kol mengunjungi Bali pada 1911 guna meneliti permasalahan kapal *Sri Kumala*. Ia mengakui dalam bukunya bahwa tuduhan itu hanyalah alasan yang dicari-cari pihak Belanda demi membenarkan ekspedisi militernya ke Badung. Raja sendiri telah memenuhi kewajibannya sebagaimana perjanjian pada 1849. Selain itu, Raja Badung juga bersedia menempuh prosedur hukum yang berlaku, yakni mengajukan kasusnya ke Majelis Kerta. Seluruh penduduk Sanur bersumpah di Pura Tambangan Badung bahwa pencurian dan perampokan yang dituduhkan pada mereka tak pernah terjadi. Bahkan nakhoda Sri Kumala sendiri tak dapat menjelaskan bagaimana bentuk peti uang yang menurut pihak Belanda dirampas oleh warga setempat.

V. Puputan Klungkung

Puputan Klungkung terjadi kurang lebih dua tahun setelah Puputan Badung. Pemicunya adalah kebijakan pemerintah kolonial dalam memonopoli penjualan candu[116]. Sebelumnya, para bangsawan memperoleh penghasilan yang tidak sedikit dari pajak impor candu. Dengan adanya ketetapan baru ini, penghasilan mereka mengalami penurunan drastis. Kini candu hanya boleh dijual di toko-toko milik pemerintah kolonial yang dijalankan oleh orang-orang Jawa. Rakyat biasanya membeli candu di pasar secara eceran. Kini mereka tak dapat lagi membeli opium dalam jumlah kecil di toko atau depot candu semacam itu. Karenanya, boleh disimpulkan monopoli Belanda ini menimbulkan keresahan di kalangan rakyat maupun bangsawan.

Kerusuhan merebak di mana-mana dan depot-depot opium diserang oleh rakyat, sedangkan para penjual asal Jawa dilukai. Residen meminta bantuan pasukan penjaga keamanan di Denpasar menertibkan keadaan. Pada 16 April 1908 di Gelgel terjadi

115. *Seabad Puputan Badung*, halaman 128.
116. Lihat *Bali in the 19th Century*, halaman 255- 256.

pembakaran toko opium dan penjualnya dibunuh. Kerusuhan itu dipicu oleh Cokorda Gelgel–kepala distrik Gelgel yang masih saudara Dewa Agung. Terjadi bentrokan dengan pasukan penjaga keamanan dan tidak sedikit korban berjatuhan. Sekitar 100 orang Bali dan seorang Belanda bernama Haremaker kehilangan nyawanya. Cokorda Gelgel sendiri kemudian melarikan diri dan bersembunyi di istana raja Klungkung.

Residen G.F. de Bruyn Kops melaporkan bahwa Dewa Agung Jambe II, Raja Klungkung, terlibat dalam kerusuhan ini karena melindungi Cokorda Gelgel. Gubernur jenderal van Heutz memutuskan aksi militer terhadap Klungkung. Dewa Agung menyaksikan bahwa dalam insiden tersebut 100 orang rakyatnya telah menjadi korban. Cokorda Gelgel mendesaknya mengambil tindakan. Pertahanan di Istana Klungkung diperkuat. Kaum kerabat dan para pengikut Dewa Agung yang setia berkumpul di puri sambil menantikan kemungkinan terburuk. Pasukan kolonial didaratkan di Kusamba yang terletak 10 kilometer sebelah timur ibu kota Klungkung.

Mereka bergerak maju ke Puri Klungkung tanpa mengalami perlawanan dari rakyat. Pasukan KNIL tiba di depan istana pada 28 April 1908. Tujuan mereka sebenarnya adalah menuntut penyerahan Cokorda Gelgel yang dianggap sebagai dalang bagi kerusuhan sebelumnya. Di luar dugaan, Raja Klungkung berbaris keluar bersama para pengikutnya sambil membawa tombak. Kurang lebih 200 meter dari pasukan KNIL, ia berhenti dan atas saran Cokorda Gelgel menusukkan keris pusakanya ke tanah. Menurut kepercayaan, begitu keris ditusukkan ke tanah sebuah lubang besar yang menelan seluruh pasukan musuh akan muncul. Kemudian sebuah tembakan mengenai kaki Dewa Agung, tetapi ia berdiri lagi dengan bangga hingga akhirnya tewas karena tembakan musuh yang membabi-buta. Cokorda Gelgel dan putra Dewa Agung yang masih kecil tewas oleh terjangan peluru musuh.

Menurut saksi mata, enam orang istri Dewa Agung membunuh dirinya dengan keris. Wanita dan anak-anak yang berada di belakangnya merangsek maju dan menyerang pasukan KNIL dengan tombak, tetapi semuanya tewas. Wanita yang terluka parah membunuhi anak-anak mereka. Orang-orang yang tidak terluka justru mencari keris yang akan dipergunakan membunuh dirinya sendiri. Tampaknya semua orang pada saat itu menghendaki kematian. Yang tersisa pada hari itu adalah tumpukan mayat. Dewa Agung sendiri tewas dengan kepala pecah berantakan. Anggota keluarga kerajaan yang tersisa diasingkan ke Lombok. Istana Klungkung yang disebut Dalem Smarapura rata dengan tanah dan hanya pintu gerbangnya saja masih berdiri. Peristiwa

ini mengakhiri Kerajaan Klungkung yang selanjutnya diperintah langsung oleh pemerintah Hindia Belanda.

VI. Pemulihan Kekuasaan Raja-Raja Bali

Demi meningkatkan kesetiaan para raja yang telah dilucuti kekuasaannya, pada 1929 Belanda berencana menaikkan status penguasa-penguasa tradisional tersebut. Kerajaan-kerajaan di Bali dinaikkan statusnya menjadi negara sehingga penguasanya digelari *negara-bestuurder* (penguasa negara). Hakikat perubahan ini pada dasarnya hanya administratif saja karena para *negara-bestuurder* masih dikendalikan oleh Belanda. Tetapi bagi sebagian besar orang Bali perubahan ini ditafsirkan sebagai pemulihan penuh status para raja. Oleh sebab itu, para raja menggunakan lagi gelar-gelar lama mereka, seperti Anak Agung, Cokorda, dan Dewa Agung. Belanda tidak melarang penyandangan kembali gelar-gelar lama ini dan bahkan melegalkannya melalui amandemen terhadap undang-undang yang berlaku saat itu.[117]

Setelah diperkenankan menyandang gelar lama mereka, para raja mulai menjalankan lagi fungsi adatnya yang semula, seperti menarik pajak dari rakyatnya. Belanda memberikan makin banyak kekuasaan dengan mengizinkan masing-masing kerajaan mengatur keuangannya sendiri. Sebelumnya, pendapatan daerah masuk ke kas karesiden (*onderafdeelingskassen*). Namun, semenjak 1932 negara-negara itu mempunyai apa yang dinamakan kas negara (*negarakassen*). Terdapat beberapa tujuan Belanda dalam memulihkan kekuasaan secara bertahap ini. Seperti yang telah diungkapkan di atas, salah satu tujuannya adalah menarik kesetiaan para raja terhadap pemerintah Hindia Belanda. Tujuan lainnya adalah meringankan beban administrasi dan menjaga tradisi Bali dari gempuran pengaruh-pengaruh luar. Para raja itu dianggap sebagai penjaga nilai-nilai tradisional yang ingin dipertahankan oleh Belanda. Pada masa itu, Belanda memandang Bali sebagai suatu oase budaya yang unik dan patut dilestarikan serta dijaga dari segenap perubahan.

Pemulihan kedudukan para raja secara penuh sebagai kepala swapraja (*zelfbestuurder*) baru berlangsung pada 1938. Tentu saja hal itu juga mengundang berbagai kendala. Sebagai contoh, para penguasa beserta keluarga Kerajaan Badung dan Tabanan pernah mengalami pengasingan serta kematian tragis sehingga tidaklah mudah memilih salah seorang keturunan raja terdahulu sebagai rajanya yang baru.

117. Tabanan dan Badung bergelar *Cokorda*; Buleleng, Jembrana, Bangli, dan Gianyar bergelar *Anak Agung*; Klungkung bergelar *Dewa Agung*; Karangasem bergelar *Anak Agung Agung Anglurah*.

Belum tentu mereka diterima oleh rakyat beserta hambanya. Sementara itu, di Buleleng dan Jembrana yang semenjak berpuluh-puluh tahun diperintah langsung oleh Belanda, kedudukan para penguasanya telah merosot drastis. Hanya di Bangli, Gianyar, dan Karangasem permasalahan ini tidak begitu berarti karena singkatnya masa pendudukan Belanda bagi masing-masing kerajaan tersebut. Selain itu, tanah dan kekayaan mereka tidak disita oleh Belanda. Oleh karenanya, dengan dukungan Belanda, status penguasa ketiga kerajaan di atas akan makin kuat. Permasalahan lain timbul karena persaingan antar puri. Dalam satu kerajaan terdapat beberapa keluarga bangsawan yang masing-masing menguasai suatu istana (puri). Berbagai puri itu saling bersaing merebutkan kedudukan sebagai puri raja atau penguasa tertinggi di seantero kerajaan.

Demikianlah, berdasarkan *Staatsblad* 1938 no. 529 pemerintah kolonial membentuk delapan swapraja yang otonom, yakni Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan. Masing-masing daerah otonom itu dipimpin oleh seorang kepala swapraja, yakni keturunan raja-raja di Bali dahulu. Upacara pengambilan sumpah mereka dilangsungkan pada 29 Juni 1938 dan mengambil tempat di Pura Besakih.[118] Kebetulan hari itu bertepatan dengan perayaan Galungan sehingga acara tersebut berubah menjadi perayaan yang menarik. Laskar-laskar berbusana merah, hitam, dan putih menambah meriah dan semaraknya suasana. Pedanda Gede Manuaba, anggota Raad van Kerta Gianyar membacakan sumpah selama 20 menit. Pada kesempatan itu, Residen Bali dan Lombok berpidato yang kemudian diikuti oleh sambutan Kepala Swapraja Karangasem selaku wakil raja-raja Bali lainnya. Wewenang bagi masing-masing kepala swapraja ditetapkan dua hari kemudian atau tepatnya pada 1 Juli 1938.

Paruman Agung (dewan raja-raja Bali) dibentuk pada 30 September 1938 dengan tujuan mengurusi masalah-masalah umum. Lembaga ini berfungsi seperti dewan pemerintah pusat dan setiap swapraja diwakili pemimpinnya beserta dua orang penasihat. Para raja menurut peraturan pemerintah menerima gaji yang sama, tetapi beberapa di antaranya memperoleh penghasilan lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Sebagai contoh, Raja Bangli, Gianyar, dan Karangasem masih menerima tambahan gaji bulanan mereka yang jumlahnya berkisar antara fl700 hingga fl850 sebagai kompensasi atas dihapuskannya *ayahan dalem* (pelayanan untuk istana). Raja ketiga kerajaan itu masih menikmati pendapatan lainnya yang berasal dari tanah dan

118. Lihat *Pura Besakih: Pura, Agama, dan Masyarakat Bali,* halaman 366.

barang-barang.[119] Pulihnya kedudukan para raja ini ditandai oleh terbentuknya delapan *zelfbesturend landschappen* daerah swaparaja () di Bali selaku penerus kerajan-kerajaan lama; yakni Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan. Peristiwa ini juga mengakhiri pendudukan Belanda secara langsung di Bali.

VII. Bali Semasa Penjajahan Jepang

Pendudukan Jepang di Bali diawali dengan pendaratan bala tentara Jepang di pantai Sanur pada 18 Februari 1942. Kekuatan pasukan kolonial Belanda di Bali sendiri tidaklah besar dan hanya terdiri dari sejumlah prajurit Bali tak berpengalaman di bawah pimpinan beberapa orang Belanda yang tergabung dalam Korps Prayoda. Sementara itu, jumlah penduduk Eropa sendiri di sana, berdasarkan statistik Belanda pada 1941, hanya 63 orang. Karena menyadari betapa lemahnya kekuatan militer mereka, Belanda tidak melakukan perlawanan apapun ketika Jepang mendarat di Bali. Bahkan, beberapa hari menjelang pendaratan Jepang, perwira Tentara Angkatan Darat Kerajaan Hindia Belanda (Koninklijk Nederlands Indisch Leger ; KNIL) memerintahkan penghancuran seluruh kendaraan militer dan persediaan minyak dan gas alam yang disimpan di dekat Denpasar serta Singaraja. Hal ini dilakukan agar perlengkapan militer dan bahan bakar tersebut tidak digunakan oleh bala tentara Jepang.

Ketika bala tentara Jepang telah makin mendekat, perwira KNIL memerintahkan agar pasukan Korps Prayoda mundur ke daerah pedalaman dari kedudukannya di sepanjang pantai selatan Bali dan Denpasar. Selanjutnya, komandan KNIL yang berada di Penebel, Tabanan, memerintahkan agar anak buahnya meletakkan senjata, mengganti seragamnya, dan pulang ke rumah masing-masing. Dengan demikian, Korps Prayoda yang dibentuk pada 1938 untuk mempertahankan daerahnya dari serbuan Jepang kini dibubarkan. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di Bali.

Kedatangan Jepang pada mulanya dianggap sebagai pembebas oleh kebanyakan orang Bali. Kekaguman rakyat Bali timbul karena kesanggupan mereka memukul mundur Belanda yang sebelumnya tampak bercokol kuat di Bali. Sisa-sisa perwira sipil Belanda ditawan dan dikirim ke kamp-kamp interniran di Jawa. Sementara itu, yang belum tertangkap melarikan diri ke daerah-daerah yang belum diduduki Jepang dan berusaha menyeberang ke Australia. Dengan demikian, terjadi kekosongan pada

119. Laporan H.J.E. Moll pada 1938. Lihat *Sisi Gelap Pulau Dewata* halaman 69.

pos-pos yang dahulunya diduduki oleh orang-orang Belanda. Oleh karenanya, Jepang lalu menempatkan kaum terpelajar Indonesia guna mengisi kekosongan tersebut.

Bali memiliki nasib yang lebih "beruntung" karena pada Mei 1942 pasukan Angkatan Darat Jepang yang terkenal kebrutalannya digantikan oleh pasukan Angkatan Laut Jepang yang relatif "lebih beradab" perilakunya. Menjelang Juni 1942, Jepang mulai menyusun kembali tatanan pemerintahan di Bali dengan struktur yang tidak berbeda dengan Belanda. Seperti pada zaman Hindia Belanda, Bali dan Lombok dijadikan satu *minseibu* (karesiden) yang dalam bahasa Jepang disebut *Syo Sunda Minsebu* (Karesidenan Sunda Kecil). Ibu kotanya berada di Singaraja dan dipimpin oleh seorang Residen Jepang yang disebut *Cokan*. Seorang pejabat yang berasal dari kantor gubernur ditugaskan sebagai kepala administratif Bali yang fungsinya kurang lebih sama dengan asisten residen pada zaman Belanda. Residen masih dibantu oleh 11 orang Indonesia, yang fungsinya tak pernah jelas. Sehubungan dengan pemerintahan kerajaan, Jepang mengakui kekuasaan para raja, yang kini disebut *suco*–sebagai ganti sebutan *zelfbestuurder* (kepala swapraja) pada zaman Belanda. Di tiap kerajaan ditempatkan lagi seorang penasihat Jepang (*bunken karikan*) yang fungsinya sama dengan kontrolir semasa pemerintahan kolonial Belanda. *Paruman Agung* sebagai suatu majelis atau lembaga juga masih ada dan fungsinya adalah perantara formal antara para raja dan pemerintahan pendudukan Jepang. Sementara itu, birokrasi pemerintahan dari raja ke bawah boleh dikatakan tidak berubah.

Demi menutupi kebutuhan perangnya yang makin meningkat, Jepang melakukan eksploitasi terhadap rakyat Bali, baik berupa tenaga maupun bahan pangan. Dalam hal ini, Jepang menerapkan pula politik pemerahan "tidak langsung"; mereka memanfaatkan para raja Bali melakukan eksploitasi terhadap rakyatnya. Segenap keputusan mengenai bahan pangan maupun pengerahan tenaga kerja dibuat oleh Jepang dan disampaikan kepada raja. Selanjutnya, giliran raja meneruskannya kepada para bawahannya, mulai dari penggawa, *sedahan*, *perbekel*, dan seterusnya hingga rakyat. Apabila gagal memenuhi target yang diminta Jepang, para raja dan pejabat itu dapat dengan mudah dijatuhi hukuman, diasingkan, atau bahkan dibunuh. Sebagai contoh adalah Raja Gianyar yang diasingkan ke Lombok dan digantikan oleh putranya bernama Anak Agung Gede Agung. Oleh karenanya, tidak mengherankan apabila para birokrat tersebut kemudian menjadi kepanjangan tangan yang baik bagi Jepang dalam menekan rakyat.

Beras dengan jumlah yang telah ditentukan Jepang kemudian dibeli oleh suatu lembaga bernama Mitsui Bussan Kaisha dengan harga yang sangat rendah. Hal ini memberatkan dan merugikan para produsan beras, yang bertambah parah seiring dengan membumbungnya ongkos tenaga kerja dan peralatan. Penggawa distrik Kubutambahan menyatakan pada Juni 1945 bahwa harga beras itu setidaknya perlu dinaikkan hingga 50% guna mengimbangi biaya produksinya. Rakyat Bali yang sudah kekurangan dan terancam biaya kelaparan tetap dipaksa menyerahkan berasnya. Sebenarnya, secara teoretis, beras yang terkumpul akan dibagi-bagikan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Namun, pada praktiknya, justru rakyat menderita kelaparan yang serius karena tidak memadainya jatah bagi mereka. Pada 1944, jatah gabah giling ditetapkan 400 gram per orang di Buleleng, tetapi jatah bagi penduduk daerah yang minus atau berkekurangan merosot menjadi 200 gram pada 1945.

Para raja dan pejabat sendiri berulang-ulang menyatakan kepada penduduk yang kelaparan untuk berupaya mengatasi masalah mereka sendiri dan tidak mengharap bantuan dari daerah yang "plus" atau "berkelebihan." Raja Buleleng berpesan pada 1944 bahwa para penggawa yang daerahnya kekurangan bahan pangan agar berupaya sedapat mungkin berusaha dengan anggapan bahwa tidak akan ada bantuan dari daerah "berkelebihan." Penduduk di daerah itu agar berusaha memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Kekurangan ini masih diperparah dengan terjadinya bencana kekeringan di berbagai tempat.

Sebagai tanggapan atas kekurangan beras ini, Jepang merencanakan kuota bagi produksi singkong, jagung, kentang, dan tanaman lainnya yang dapat dijadikan bahan pangan. Oleh sebab itu, tanaman yang dirasa mereka tidak perlu akan dibabat dan diganti dengan jagung beserta singkong. Dengan kata lain, petani dipaksa menanam tumbuhan yang diperlukan Jepang saat itu. Agar rencanannya terlaksana, Jepang mengeluarkan instruksi agar semua *sedahan* mengawasi para petani agar bercocok tanam sesuai ketentuan pemerintah, dan bagi yang melanggarnya akan ditindak tegas. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan Jepang, para petani hanya boleh menanami 10% lahan garapannya dengan tumbuhan yang sesuai dengan keinginannya sendiri, sedangkan sisanya harus ditanami sesuai dengan yang ditetapkan oleh Jepang.

Jepang mengeksploitasi Bali demi kepentingan industrinya. Semenjak 1942, ribuan hektar sawah ditanamai kapas yang hasilnya dirampas oleh Jepang guna dijadikan tekstil sebagai bahan pakaian para prajurit. Demi memenuhi kebutuhannya

akan minyak, Jepang memaksa para petani menanam pohon jarak dan menghancurkan tanaman yang sudah ada, seperti kopi dan buah-buahan. Padahal tanaman itu telah dibudidayakan selama bertahun-tahun dan menjadi tumpuan hidup masyarakat.

Bali juga menjadi sumber *romusha* (tenaga kerja paksa) yang disebut Barisan Pekerja Sukarela Bali (BPSB). Antara Juli hingga November 1944, kurang lebih 2.500 orang Bali direkrut oleh Jepang sebagai tenaga *romusha* ini. Mereka diharuskan bekerja keras demi kepentingan Jepang di bawah kondisi yang mengenaskan, seperti membuka hutan, membangun jalan, menggali gua, mendirikan benteng pertahanan, dan lain sebagainya. Banyak anggota BPSB yang terserang penyakit dan mati kelaparan. Saat perang berakhir, hanya sedikit saja di antara mereka yang pulang kembali ke kampung halamannya.

VIII. Bali Setelah Proklamasi Kemerdekaan

Penyerahan tanpa syarat Jepang baru tersiar di Bali pada 23 Agustus 1945. Masyarakat Bali saat itu terpecah menjadi dua, yakni antara yang mendukung republik (kaum Republikan) dan mengharapkan kembalinya kekuasaan pemerintah Belanda (kaum Loyalis). Ketika pasukan KNIL mendarat kembali di pantai Sanur untuk memulihkan kekuasaan Belanda pada 2 Maret 1946, mereka menjumpai keadaan yang kacau dan harus menghadapi perlawanan gerilya rakyat yang tak menghendaki pulihnya kekuasaan asing. Sikap kerajaan-kerajaan di Bali juga berbeda-beda sehubungan dengan proklamasi kemerdekaan RI. Tabanan, Badung, dan Buleleng tampaknya mendukung Republik. Karangasem dan Klungkung lebih pro kepada Belanda. Bangli dan Gianyar terpecah antara pendukung dua kubu tersebut. Sedangkan, Jembrana pernah menjadi basis pendukung Republik, tetapi hal ini tak berlangsung lama. Bahkan di kerajaan-kerajaan yang pro Republik sekalipun masih dapat dijumpai orang-orang yang mendukung Belanda. Persaingan antar bangsawan justru memperuncing perpecahan antara kaum Republikan dan loyalis.

Di Kerajaan Badung terjadi persaingan antara bangsawan Puri Pamecutan dan Puri Denpasar (Puri Satria). Meskipun pemimpin kedua istana tersebut memegang kekuasaan bersama selaku kepala pemerintahan Badung, pemerintah kolonial Belanda mengangkat penguasa Puri Denpasar selaku *bestuurder* (kepala daerah) pada 1929 dan memulihkan kekuasaannya sebagai *zelfbestuurder* (raja atau kepala swapraja) pada 1938, hal ini menimbulkan kekecewaan bagi Puri Pamecutan. Pada masa penjajahan Jepang, Puri Denpasar masih memegang kekuasaan, tetapi lemah dari segi politik

maupun ekonomi karena penguasa puri tersebut tidak berkuasa atas sebagian besar wilayah kerajaan Badung. Kedua putra penguasa Puri Denpasar terlibat dalam Komite Nasional Indonesia (KNI) dan (Badan Keamanan Rakyat/ Tentara Keamanan Rakyat) BKR/TKR setempat. Itulah sebabnya raja tidak mengambil tindakan tegas terhadap pendukung Republik Indonesia. Sebaliknya, Puri Pamecutan saat itu lebih unggul dari segi ekonomi dan memiliki pendukung kuat di Badung. Kendati telah aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung kebangkitan nasional Indonesia semenjak era 1930-an (lihat uraian tentang Kerajaan Badung), Belanda berupaya menarik kesetiaan penguasa puri tersebut dengan memecat penguasa Puri Denpasar dalam statusnya sebagai Raja Badung dan mengalihkannya kepada penguasa Puri Pamecutan pada April 1946. Melalui politik pecah belah ini, Belanda dapat membangkitkan kembali perseteruan di antara kedua puri di atas sehingga makin melemahkan gerakan nasionalisme di Badung. Ada berbagai kalangan yang menyatakan bahwa dengan menerima jabatan sebagai raja, Puri Pamecutan dianggap telah mengkhianati perjuangan. Meskipun demikian, ada pula sumber yang menyebutkan bahwa penguasa Puri Pamecutan telah meminta pendapat I Gusti Ngurah Rai sebelum menerima jabatan tersebut dari Belanda karena khawatir bahwa tindakan itu dapat merugikan perjuangan. Tetapi I Gusti Ngurah Rai malah mendorong penguasa Pamecutan untuk menerimanya dengan harapan dapat membantu perjuangan secara diam-diam.

Buleleng diwarnai dengan persaingan antara Puri Agung–yang penguasanya merupakan Raja Buleleng–melawan Puri Sukasada. Konflik ini telah berlangsung semenjak 1849 ketika Belanda menanamkan kekuasaannya di sana. Karena beberapa anggota keluarga Puri Sukasada tidak bersedia mengakui otoritas Belanda maka mereka dijatuhi hukuman pengasingan. Penguasa Puri Agung lalu dijadikan raja atas seluruh Buleleng hingga 1882 ketika pemerintahan langsung oleh Belanda diberlakukan. Saat kedudukan para raja dipulihkan pada 1929, Puri Agung tetap dianggap sebagai penguasa atas seluruh Buleleng. Setelah masa pengasingan usai, para penguasa Puri Sukasada banyak menjadi penggawa kota. Meskipun demikian, persaingan antara keduanya belum usai. Hingga 1945, Puri Agung dan Sukasada sama-sama mengklaim sebagai pewaris takhta yang sah. Pihak Sukasada menuduh bahwa para penguasa Puri Agung yang diangkat oleh Belanda pada 1849 hanya keturunan patih sehingga kurang berhak atas takhta Buleleng. Dari segi orientasi politik, Puri Sukasada sendiri lebih condong pada Republik. I Gusti Ketut Puja yang

diangkat sebagai Gubernur Provinsi Sunda Kecil berasal dari Sukasada. Puri Agung sebenarnya juga bersimpati pada republik, tetapi rajanya, Anak Agung Nyoman Panji Tisna (1944–1947) lebih menyukai cara-cara yang damai ketimbang revolusioner sehingga bertentangan dengan aspirasi pemuda masa itu.

Di Gianyar, terjadi persaingan antara Puri Agung Gianyar selaku pemegang kekuasaan atas seluruh Gianyar dan puri-puri lainnya, seperti Ubud, Mas, Peliatan, Pejeng, dan Sukawati. Puri Agung Gianyar tampaknya lebih condong kepada Belanda, sedangkan puri-puri lainnya merupakan pendukung Republik. Pada akhir 1945, Raja Gianyar membentuk milisi yang disebut Pemuda Pembela Negara (PPN). Singkatan ini kemudian dipelesetkan menjadi Pemuda Pembela NICA. Banyak anggota puri-puri pesaing Puri Agung Gianyar yang bergabung dengan BKR sehingga kerap terjadi bentrokan antara mereka dengan PPN. Pada September 1945, Raja Gianyar, Ide Anak Agung Gde Agung (1943–1946), dua kali diculik oleh para pemuda yang kelihatannya didalangi oleh Puri Ubud dan Peliatan. Setelah mengalami penculikan-penculikan ini, Anak Agung Gde Agung membentuk milisi PPN yang anti-republik tersebut. Meskipun demikian, kaum Republikan dan puri-puri saingannya tidak dapat meruntuhkan kekuasaan Puri Agung Gianyar. Persaingan ini masih terjadi hingga jauh setelah zaman kemerdekaan. Pada era 1950-an, Puri Agung Gianyar menjadi basis Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang tangguh, sedangkan banyak pengikut puri saingannya yang mendukung partai-partai lawannya.

Puri Jero Pasekan dan Puri Agung Negara merupakan dua puri yang berebut kedudukan sebagai Raja Jembrana. Belanda memilih mengakui penguasa Puri Agung Negara sebagai raja. Meskipun demikian, raja dan putranya (Anak Agung Bagus Suteja yang kelak menjabat sebagai Gubernur Bali) condong kepada kaum Republikan. Banyak aktivis gerakan nasionalis yang merupakan anggota atau pegawai Puri Agung Negara. Tetapi perlawanan ini tidak berlangsung lama karena Belanda menangkap putra Raja Jembrana. Puri Jero Pasekan yang merupakan saingan Puri Agung Negara bersikap anti terhadap Republik. Dengan dukungan Belanda, penguasanya, Westra Utama, membentuk sebuah milisi bernama Badan Pemberantas Pengacau (BPP) yang kerap dipelesetkan sebagai Badan Penjilat Pantat Belanda. Milisi itu ditujukan untuk menghadapi kaum Republikan.

Dewa Agung Oka Geg selaku Raja Klungkung sangat anti terhadap Republik. Ia merupakan satu-satunya raja di Bali yang dengan tegas menolak mengibarkan

bendera merah putih baik di istana maupun kantor-kantor pemerintah. Demi membenarkan sikapnya, Raja Klungkung berdalih bahwa menurut naskah-naskah kuno yang dimilikinya, tanggal itu bukanlah hari yang baik. Dari segi internal, Dewa Agung mempunyai sedikit sekali pesaing dalam kerajaannya. Pesaing raja hanyalah penggawa kota dan *sedahan agung*. Namun, penggawa kota sendiri tidak tergolong dalam *triwangsa* (Brahmana, Kesatria, dan Waisya) sedangkan *sedahan agung* berasal dari Bangli sehingga dianggap sebagai "orang luar." Kedua orang ini tidak mempunyai basis kekuatan dan finansial kuat dalam menandingi raja. Kendati demikian, mereka mencoba melakukannya dengan bergabung dengan kaum Republikan. Akibatnya, milisi yang dibentuk raja, BKN, menghabisi nyawa mereka pada Maret 1946. Penentangan raja terhadap kaum Republikan dilandasi oleh pandangannya bahwa kelompok ini erat hubungannya dengan kerajaan-kerajaan sesama Bali yang menjadi musuh bebuyutan lamanya, seperti Badung, dan Bangli, serta agresi pihak luar (Islam Jawa).

Raja Tabanan, Cokorda Ngurah Gede, pada mulanya menyatakan dukungan pada Republik Indonesia dengan menghelat pertemuan yang dihadiri 5.000 orang, tetapi setelah itu berubah sikap. Di Tabanan sendiri terdapat banyak puri yang terpecah menjadi dua faksi, yakni Republikan dan Loyalis. Puri Gde Tabanan tempat kedudukan raja sendiri boleh dikatakan lemah dan tidak mempunyai pendukung yang kuat. Oleh karena itu, raja biasanya bersifat pasif dan mengikuti saja arus perubahan yang terjadi di sekitarnya. Puri Gde mengikuti Puri Dangin, Taman, Oke, Anom, Anyar, dan Jero Subamia yang bersikap anti-Republik. Sementara itu, di pihak lain, Puri Kaleran, Kediri, Jero Gde Beng, Kompiang, dan Tegeh berdiri di bawah panji-panji Republik.

Secara umum, administrasi pemerintahan yang ditegakkan oleh pemerintah RI di Bali pada era 1945–1946 masih lemah. Mereka belum memegang kendali atas satuan-satuan kepolisian dan laskar-laskar yang berdiri sendiri-sendiri. Gubernur Puja yang ditunjuk oleh pemerintah Republik menyadari kelemahan ini. Ia memahami bahwa beberapa raja masih cukup kuat otoritasnya. Bahkan banyak pemimpin pemuda pejuang Bali, termasuk yang berkasta rendah, juga sepakat bahwa raja tidak boleh dimusuhi. Tujuan perjuangan bukanlah menyingkirkan para raja, melainkan demi mencapai kemerdekaan. Oleh karenanya perlu digalang kerja sama dengan para raja tersebut dan membina mereka sebagai sekutu Republik. Untuk mewujudkan hal ini,

KNI pada 29 Januari 1946 mengeluarkan keputusan untuk menyerahkan otoritas politik pada lembaga *Paruman Agung* yang telah didirikan semenjak 1938. Lembaga ini terdiri dari dua badan, yakni Dewan Raja-raja yang beranggotakan 8 raja di Bali dengan salah seorang di antara mereka sebagai ketuanya, dan Majelis Rakyat yang beranggotakan 29 orang hasil pilihan 8 anggota *Paruman Negara* (badan yang diketuai oleh raja masing-masing kerajaan atau swapraja).

Pada sisi lain, penyerahan otoritas kepada lembaga tradisional Bali ini memperlihatkan kelemahan administrasi Republik, yang makin terbukti dengan penangkapan Gubernur Puja pada 11 Maret 1946 setelah masuknya kembali pasukan Belanda. Mereka menangkap pula kaum pendukung Republik lainnya, menduduki kembali bekas kediaman residen Belanda yang menjadi kantor gubernur, dan mengibarkan bendera Belanda. Peristiwa ini mengakhiri pemerintahan Republik di Bali yang sebelumnya berbagi kekuasaan dengan *Paruman Agung*.

Berdasarkan Persetujuan Linggarjati, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik di Jawa, Sumatera, dan Madura. Oleh karena itu, guna mengokohkan kekuasaannya, Belanda mulai membentuk berbagai negara boneka di wilayah-wilayah yang sepenuhnya belum berada di bawah kendali Republik. Pada Konferensi Denpasar yang diadakan pada 18–24 Desember 1946, terbentuklah Negara Indonesia Timur (NIT). Delegasi Bali dalam Konferensi ini berangotakan Cokorda Gede Raka Sukawati, Anak Agung Gede Agung, Gede Paneca, I Gusti Bagus Oka, Anak Agung Nyoman Panji Tisna, dan Made Mendra. Negara boneka ini diratifikasi oleh Belanda pada 25 Maret 1947. Tentu saja pihak Republikan menolak pembentukan negara boneka ini dan tidak mengakuinya. Karenanya, para pejuang mengubah taktiknya dengan tidak lagi menerapkan perlawanan frontal, melainkan melalui politik dan diplomasi. Secara umum, garis-garis besar perjuangan yang baru adalah melalui parlemen, propaganda, dan diplomasi. Penentangan terhadap NIT dan tuntutan agar Bali dijadikan satu dengan Sumatera, Jawa, dan Madura sebagai bagian Republik Indonesia harus terus disuarakan. Dilakukan pula pendekatan terhadap *Paruman Agung* dan para wakil NIT agar mereka ikut memboikot negara boneka tersebut.

Presiden NIT, Cokorda Gede Raka Sukawati dan perdana menterinya, Ide Anak Agung Gde Agung, sama-sama berasal dari Gianyar. Beberapa sumber menyatakan bahwa dukungan Ide Anak Agung Gde Agung adalah semata-mata taktik perjuangan. Meskipun demikian, sejumlah sumber lain menyatakan bahwa Ide Anak Agung

Gde Agung bertanggung jawab atas penangkapan, penyiksaan, dan eksekusi kilat terhadap para pejuang di Gianyar selama tiga tahun pertama masa perjuangan kemerdekaan. Bahkan ada sumber yang menyatakan bahwa perintah penangkapan dan pembunuhan itu dikeluarkan sendiri oleh Ide Anak Agung Gde Agung dan dijalankan oleh milisi bentukannya, PPN, yang beroperasi di bawah panji-panji bendera Belanda. Dengan demikian, Belanda tidak perlu mengotori tangannya dengan darah para pejuang karena pekerjaan itu telah dilaksanakan oleh Ide Anak Agung Gde Agung dengan baik. Salah satu korbannya adalah penggawa Puri Peliatan yang pro-Republik. Peristiwa pembunuhan ini makin memperlebar jurang antara Puri Peliatan dan Puri Agung Gianyar. Demi meredakan ketegangan ini, pada 1948 dilangsungkan pernikahan antara Anak Agung Gede Oka (adik Ide Anak Agung Gde Agung) dengan Cokorda Istri Sri Mas, putri pemimpin penggawa Puri Peliatan, yang tewas dibunuh tersebut.

Pada kenyataannya, demokrasi tidak berjalan dengan baik di Bali selama keberadaan Negara Indonesia Timur. Menurut konstitusi, *Paruman Agung* di Bali berbagi kekuasaan legislatif dengan Dewan Raja-raja. Namun, secara praktik, *Paruman Agung* justru berada di bawah kekuasaan Dewan Raja-raja. Anggotanya tampak enggan mengkritik atau menentang raja-raja yang menjadi anggota Dewan. *Paruman Agung* jarang mengajukan undang-undang dan hanya melakukan perubahan atau amendemen kecil saja terhadap undang-undang yang diajukan oleh Dewan Raja-raja. Ketika berlangsung pemilihan umum guna memilih anggota *Paruman Agung* pada 1947, para kandidat pro-Republik menang telak, namun para raja memutuskan untuk membatalkan hasilnya. Alasan para raja adalah para pejuang yang mereka sebut "ekstremis" telah menekan rakyat sehingga memilih "anggota-anggota yang tak dapat diterima."[120] Sikap anti-demokrasi ini juga berlaku pada penempatan wakil-wakil Bali yang duduk dalam parlemen NIT. Delapan anggotanya tidak dipilih rakyat secara demokratis, melainkan ditunjuk oleh Dewan Raja-raja bersama Paruman Agung pada Desember 1947. Dilarangnya partai-partai politik juga menjadi penyebab mengapa instrumen demokrasi tidak dapat berfungsi dengan baik.

Menjelang akhir 1948, Ide Anak Agung Gde Agung mengubah haluan politiknya dengan lebih banyak memihak kepada Republik. Tetapi hal ini hanya sedikit sekali mengubah reputasinya di hadapan para pemimpin Republikan di Bali. Mereka

120. Lihat *Sisi Gelap Pulau Dewata*, halaman 267.

menganggap bahwa tindakannya itu merupakan wujud sikap oportunis. Menurut salah satu sumber, hal ini disebabkan ia tidak lagi mendapatkan dukungan penuh dari dua tokoh kunci pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, yakni van Mook dan Residen Boon. Oleh karena itu, ia lalu menyeberang ke pihak Republik. Ide Anak Agung Gde Agung sendiri terkadang bertabrakan dengan petinggi-petinggi Belanda. Ia pernah menyatakan kepada Residen Boon bahwa berdasarkan konstitusi NIT, residen–orang Belanda itu–secara administratif berada di bawah kekuasaan menteri seperti dirinya.

Pada Maret 1949, Karesidenan Bali-Lombok dihapuskan dan Bali menjadi salah satu dari 13 distrik di NIT. Serah terima kekuasaan secara resmi dari Residen Boon kepada ketua Dewan Raja-raja, Anak Agung Gede Oka (Raja Gianyar), berlangsung pada 3 Maret 1949. Peristiwa ini dapat dianggap sebagai tahapan berakhirnya kekuasaan Belanda di Bali. Sebelumnya, pada awal 1948, para kontrolir Belanda yang biasa mendampingi para raja semenjak zaman kolonial mulai dicabut dari kedudukannya dan digantikan oleh para penasihat politik asal Bali sendiri. Hak-hak istimewa residen beserta asistennya mulai dialihkan kepada Dewan Raja-raja. Pegawai sipil Belanda ditarik pula secara bertahap hingga pada akhir 1949 hanya tersisa tiga saja di antaranya.

Kancah perpolitikan Bali pada 1950-an didominasi oleh Dewan Raja-raja dan Paruman Agung yang telah tercoreng namanya karena kerja sama mereka dengan Belanda. Karena menyadari makin melemahnya kekuasaan Belanda, Paruman Agung membentuk Badan Pelaksana Sementara pada 22 Mei 1950 dengan tanggung jawab dan otoritas mengatur seluruh tugas pemerintahan federasi kerajaan-kerajaan di Bali. Sebagai anggotanya diangkat kaum nasionalis serta kaum terpelajar yang moderat, dengan Anak Agung Gde Oka, Raja Gianyar, sebagai ketuanya.

Pada 17 Agustus 1950, NIT dibubarkan dan Bali kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan itu, peran raja-raja dalam kancah perpolitikan mulai pudar. Pada akhir September 1950, Paruman Agung dan Dewan Raja-raja dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali (DPRD) serta Dewan Pemerintahan Daerah Bali (DPD) Bali. Meskipun perubahan ini merupakan pukulan telak terhadap kedudukan para raja dan bangsawan, dampaknya tidaklah fatal mengingat masih besarnya otoritas raja walaupun ia tidak berperan secara langsung dalam politik.

F. SISTEM PEMERINTAHAN

Tatanan pemerintahan di Bali dapat dianggap sebagai kelanjutan Kerajaan Majapahit. Raja-raja di Bali menganggap Raja Klungkung sebagai yang tertinggi di antara mereka, walaupun secara politis berbagai kerajaan lain di Bali memiliki otonominya sendiri-sendiri. Raja Klungkung juga dipandang sebagai pemimpin spiritual bagi raja-raja lainnya. Itulah sebabnya dalam berbagai perjanjian dengan Klungkung dipergunakan istilah *Keizer Over de Einlanden Bali en Lombok* (Susuhunan Bali dan Lombok). Sementara itu, bagi masing-masing kerajaan di Bali, raja secara teoretis memegang posisi sentral. Ia dipandang sebagai pemilik seluruh tanah di kerajaan. Kendati demikian, kedudukan ini terkadang mengundang pesaing dari cabang anggota kerajaan lainnya. Cabang-cabang anggota kerajaan ini menempati istana atau purinya sendiri dan bila kedudukan mereka cukup kuat, raja terpaksa berbagi kekuasaan dengan mereka. Sebagai contoh, di Badung selain terdapat penguasa Puri Denpasar, terdapat pula penguasa Puri Pamecutan dan Kesiman. Ketiga penguasa puri tersebut saling berbagi kekuasaan di Badung. Di Mengwi, kerap terjadi persaingan dengan penguasa Puri Sibang.

Pejabat kerajaan yang turut menentukan jalannya roda pemerintahan adalah seorang patih atau *mantri*. Jabatan yang setara dengan perdana menteri ini bertanggung jawab atas urusan-urusan sipil dan militer kerajaan. Raja mengangkat *mantri* dari kalangan kerabat kerajaan sendiri. Yang patut diingat, kedudukan setingkat perdana menteri ini tak selamanya berada di bawah raja dan mungkin pula setara dengannya. Tidak jarang pengangkatan sebagai patih dilakukan demi menghindari perselisihan antara cabang anggota keluarga kerajaan. Kaum brahmana yang bergelar *bhagawanta* (*purahita*) berperan sebagai penasihat raja.

Di bawah raja terdapat para penggawa yang diserahi tugas memimpin daerahnya masing-masing. Tugasnya adalah memutuskan berbagai kasus yang berkenaan dengan agama dan adat istiadat. Pengangkatan dan pemberhentian seorang penggawa berada di tangan raja. Para penggawa ini biasanya diangkat dengan mempertimbangkan keturunan atau silsilah keluarganya. Selanjutnya, di bawah penggawa terdapat *perbekel* atau kepala desa. Di samping itu masih ada lagi kepala *banjar* yang disebut *klian*. Mereka memiliki tugas yang berbeda. Seorang *perbekel* biasanya bertugas mengurusi kegiatan keagamaan desanya. Sedangkan seorang *klian* bertanggung jawab menangani permasalah-permasalahan warganya di luar hal-hal keagamaan.

G. SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN PEREKONOMIAN

Sistem kemasyarakatan di Bali tersusun berdasarkan lapisan-lapisan yang disebut *wangsa* atau kasta. Pembagian semacam ini ditentukan oleh keturunan. Ada keluarga yang sejarah keturunan atau silsilahnya dapat dilacak hingga zaman penaklukkan oleh Majapahit (berdasarkan *babad*, *pamancangah*, atau *prasasti*). Masyarakat Bali mengenal empat kasta, sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab kuno, yakni Brahmana, Satria (Kesatria), Wesia (Waisya), dan Sudra. Ketiga kasta yang pertama disebut *triwangsa*. Sementara itu, kasta keempat, Sudra, juga disebut sebagai Jaba. Anggota *triwangsa* ini jumlahnya tidak banyak dan hanya sebesar kurang dari 15 % saja dari keseluruhan masyarakat Bali. Anggota masing-masing kasta ini tinggal pada tempat-tempat yang terpisah.

Gelar atau nama bagi mereka juga berbeda-beda. Kaum Brahmana biasanya menggunakan gelar Ida Bagus (bagi pria) dan Ida Ayu (bagi wanita). Gelar Cokorda dipergunakan oleh kaum Satria dan Gusti oleh kasta Wesia.[121] Terdapat larangan pernikahan antara wanita berkasta lebih tinggi dengan pria berkasta lebih rendah, namun peraturan semacam ini telah dihapuskan. Dahulu pendeta-pendeta hanya berasal dari kasta Brahmana, tetapi kini tidak harus demikian. Bahkan pendeta-pendeta yang berasal dari kasta lebih rendah telah dianggap setara dengan pendeta berkasta Brahmana.

Masyarakat Bali hidup dari pertanian, peternakan, dan perdagangan. Mayoritas penduduk hidup sebagai petani, terutama di kawasan Bali bagian selatan yang tanahnya lebih cocok bagi kegiatan tersebut. Untuk kegiatan pengairan sawah warga desa menciptakan sistem yang disebut *subak*. Apabila persediaan air cukup maka penanaman padi dilakukan terus menerus tanpa diselingi palawija (sistem *tulak sumur*). Namun, sebaliknya bila air kurang maka pembudidayaan padi diselingi dengan palawija, yang membutuhkan lebih sedikit air dibanding padi (sistem semacam ini disebut *kertamasa*). Semua kegiatan ini diatur oleh organisasi *subak*. Organisasi pengairan ini dikepalai oleh seorang *klian subak*, serta bawahannya yang mengatur penanaman pada wilayah tertentu. Selain itu, subak juga mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, misalnya upacara-upacara ritual tertentu.

---

121. Lihat *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, halaman 300.

Masalah pengairan ini sering memicu pertikaian, yang tidak jarang melibatkan kerajaan-kerajaan yang saling berbatasan satu sama lain. Sebagai contoh adalah perselisihan antara Bangli dan Gianyar pada pertengahan Maret 1904. Saat itu pipa aliran air Pejeng yang terletak di distrik Tampaksiring, 1 km dari perbatasan Gianyar, telah dirusak sehingga airnya mengalir kembali ke Sungai Pakerisan. Akibatnya, sawah-sawah di Gianyar terancam kekurangan air dan mengalami gagal panen. Setelah pemerintah Gianyar mengadakan penyelidikan ternyata pengrusakan itu melibatkan Raja Bangli. Rakyat di daerahnya yang tinggal di seberang sungai, atau tepatnya di Desa Petak telah merusak pipa air itu, yang kemungkinan atas hasutan dua orang bekas warga Gianyar. Mereka adalah pelaku kejahatan berupa pencurian terhadap penggawa Ubud yang telah ditangkap, tetapi berhasil melarikan diri dan mendapatkan perlindungan Raja Bangli. Ketika orang-orang Gianyar hendak memperbaiki saluran itu, mereka diganggu oleh warga Bangli. Akar permasalahannya cukup rumit. Pada saat kedua pipa air di Sungai Pakerisan dibuat, kawasan itu masih termasuk Gianyar. Namun, saat perusakan terjadi, wilayah itu sebagian telah direbut oleh Klungkung dan Bangli pada 1900. Pipa air yang dirusak itu kebetulan masuk dalam wilayah Bangli. Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah Hindia Belanda terpaksa turun tangan.

Peternakan juga salah satu sumber penghidupan rakyat Bali. Hewan ternak yang banyak dipelihara di Bali adalah babi dan sapi. Babi biasanya dipelihara kaum wanita sebagai tambahan penghasilan bagi rumah tangganya. Sedangkan sapi dipelihara untuk membajak sawah atau diambil dagingnya.

Semasa berkuasanya kerajaan-kerajaan di Bali, uang *kepeng* banyak digunakan dalam transaksi pembayaran di Bali. Uang semacam ini disebut *pis bolong* atau *jinah bolong*[122] dalam bahasa setempat. Apa yang dimaksud uang *kepeng* adalah uang logam Cina yang berlubang berbentuk bujur sangkar di tengahnya berbahan tembaga.

122. Lihat *Nilai Historis Uang Kepeng*, halaman 1.

Uang kepeng di Bali

Uang semacam ini telah beredar di Kepulauan Nusantara semenjak zaman Majapahit, yakni kurang lebih pada 1300. Di Bali, yang menjadi bagian Majapahit, tentunya juga berlaku alat tukar yang sama. Belakangan, selain memiliki nilai ekonomis, uang *kepeng* mendapatkan pula fungsi magis religiusnya, yakni dianggap memiliki kekuatan gaib dan dipergunakan pula dalam upacara-upacara keagamaan.

Hubungan perdagangan antara Bali dan Cina telah berlangsung semenjak lama. Pada kurang lebih abad 19 telah ada perkampungan Cina yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pedagang.[123] Sebagai contoh, di Kerajaan Buleleng terdapat perkampungan Cina yang dipimpin oleh seorang *kapitein*. Selain itu, di Sangsit terdapat perkampungan yang dipimpin oleh seorang *majoor*. Di Kerajaan Gianyar, perkampungan Cina terdapat di Gumicik, Sukawati, dan Blahbatuh. Peranan orang-orang Cina pada masa itu adalah sebagai pedagang, pemberi pinjaman, dan pembeli atau penyewa tanah yang dimiliki oleh rakyat. Kaum bangsawan memberikan pula izin mengimpor candu kepada mereka. Sebagai imbalannya para pedagang Cina membayar pajak kepada para bangsawan tersebut.

H. ISTANA DI BALI

Istana para raja Bali juga disebut puri. Hingga saat ini puri-puri yang masih lengkap adalah Puri Gianyar, Puri Gede Karangasem, Puri Amlapura, dan Puri Ubud.

123. Lihat *Nilai Historis Uang Kepeng*, halaman 49.

Sementara itu, istana Kerajaan Mengwi dan Klungkung sudah tidak utuh lagi. Selain itu, di Badung, yakni di Denpasar, masih ada puri-puri lain seperti Puri Pamecutan. Seperti yang telah diuraikan di atas, Kerajaan Badung diperintah oleh tiga penguasa secara bersamaan yang salah satunya adalah penguasa Puri Pamecutan tersebut. Dewasa ini, puri-puri di Bali telah menjadi obyek wisata yang berharga sehingga menarik perhatian turis baik dari dalam maupun luar negeri.

Pola umum puri di Bali sedikit banyak mencerminkan atau mengikuti tata letak pemukiman atau desa yang dianut rakyat pulau tersebut. Ciri khas utama adalah adanya dua jalan utama yang saling menyilang; utara-selatan dan timur-barat. Karena persilangan itu membentuk suatu perempatan maka disebut juga *pempatan agung*. Selanjutnya, setelah ditentukan mata angin utama tersebut–poros utara-selatan dan barat-timur–barulah sembilan sektor atau arah lainnya dapat ditentukan berdasarkan prinsip *nawasanga*. Menurut prinsip itu, kesembilan arah mata angin ditempati oleh dewa-dewa tertentu dan hanya cocok digunakan untuk mendirikan bangunan guna keperluan tertentu pula. Poros tengah juga dianggap sebagai arah dan disebut *puseh* dalam bahasa Bali. Selanjutnya, dibuatlah suatu pola yang terdiri dari sembilan petak, seperti gambar di bawah ini. Masing-masing petak dikuasai oleh dewa-dewa tertentu.
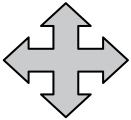
Diagram di bawah menunjukkan berbagai petak dengan dewa penguasanya masing-masing, seperti arah utara (*kaja*) yang berada di bawah Dewa Kuwera, arah timur laut (*kajakangin*) di bawah Dewa Isana, arah timur (*kangin*) di bawah Dewa Indra, dan lain sebagainya. Sebagai tambahan, pola ini juga disebut *sanga mandala*.
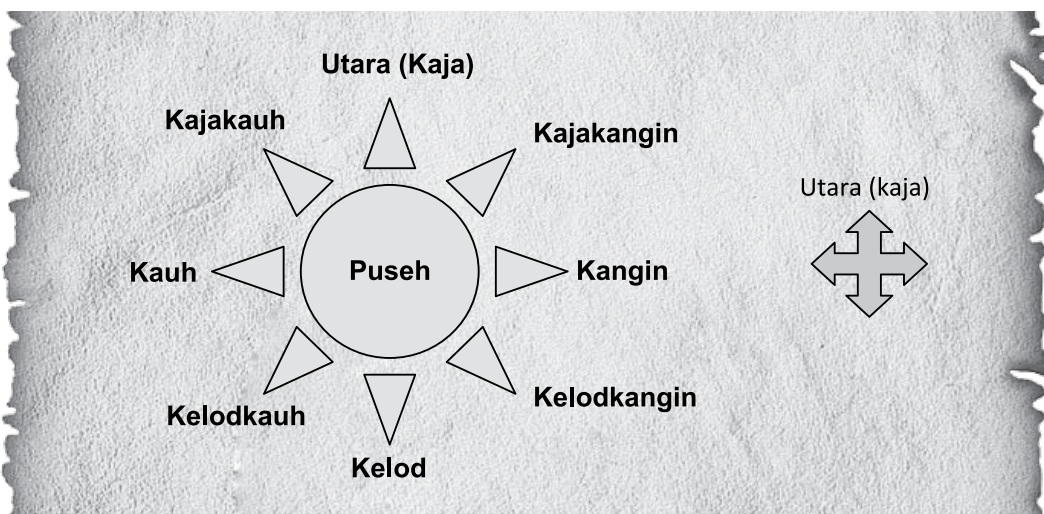
Selanjutnya berdasarkan pola *sanga mandala* di atas dilakukan pengaturan berbagai bangunan dan tempat dalam puri kerajaan. *Saren kangin* yang merupakan tempat tinggal sehari-hari raja biasanya di tempatkan di sektor timur, yakni arah yang dikuasai Dewa Indra. Paseban sebagai tempat para pejabat kerajaan menantikan kehadiran raja, biasanya diletakkan di sektor tengah. Pamerajan Agung atau tempat suci untuk memuliakan leluhur keluarga raja biasanya diletakkan di sektor timur laut (*kajakangin*). Lumbung atau tempat menyimpan padi dan beras diletakkan di daerah barat laut kompleks istana. *Saren kaja* atau tempat tinggal istri-istri raja umumnya ditempatkan di sektor utara. *Pewaregan* atau dapur umumnya ditempatkan di sektor tenggara istana. Ini bersesuaian dengan arah itu yang dikuasai oleh Agni atau dewa api. *Rangki* yang berfungsi sebagai tempat memeriksa tamu, menggelar persidangan, serta pemeriksaan diletakkan di sebelah barat. *Sumanggen* atau tempat melaksanakan *pitra yandnya* (upacara kematian) bagi keluarga raja biasanya ditempatkan di sektor selatan. Ini bersesuaian dengan arah tersebut yang dikuasai oleh Yama atau dewa kematian. *Ancak saji* atau *bancingah* yang merupakan halaman paling depan dan tempat mempersiapkan diri bagi para pengunjung yang hendak memasuki istana biasanya ditempatkan di sudut barat daya. Demikianlah dasar-dasar pembagian letak dalam kompleks istana di Bali. Tentu saja, pada perkembangannya dilakukan berbagai penyesuaian sehingga terjadi perbedaan antar berbagai puri dan polanya tidak tepat lagi mengikuti *sanga mandala*.

Wayu	**Kuwera**	**Isana**
Waruna	**Gunung Mahameru**	**Indra**
Nirtti	**Yama**	**Agni**

Utara (kaja)

Raja di Bali dianggap sebagai manifestasi dewa yang berada di tengah-tengah manusia. Dengan demikian, puri dapat dianggap sebagai bangunan yang menghubungkan antara dewa (raja) dan manusia (rakyat). Apabila di pura Bali terdapat *pelinggih* atau *pesimpangan* sebagai sarana memuja dewa yang tak kasat mata maka di istana raja terdapat paseban dan *rangki* tempat para raja berjumpa dengan pejabatnya. Selain itu, masih ada lagi tempat di istana raja Bali yang disebut *bale lembu agung* atau

bale angin-angin, yakni tempat raja duduk-duduk. Saat raja berada di sana, manusia (rakyat) dapat menyaksikan dewa (raja) secara nyata. Suatu istana dapat pula dianggap kehilangan tuah atau wibawanya jika penguasanya telah dikalahkan oleh kerajaan lain. Sebagai contoh adalah Puri Agung Gelgel yang ditinggalkan karena pernah diduduki oleh Kryan Agung Maruti (1684–1704) selaku pemberontak. Puri-puri Mengwi dan Tamanbali merupakan contoh puri yang tidak dianggap lagi sebagai tempat suci, walaupun kondisi fisik bangunannya masih ada, karena rajanya telah ditaklukkan sehingga kerajaannya juga secara otomatis dianggap berakhir.

KERAJAAN-KERAJAAN DI BALI
©Ivan Taniputera
BULELENG
JEMBRANA
TABANAN
MENGWI
GIANYAR
BANGLI
KARANGASEM
KLUNGKUNG
BADUNG
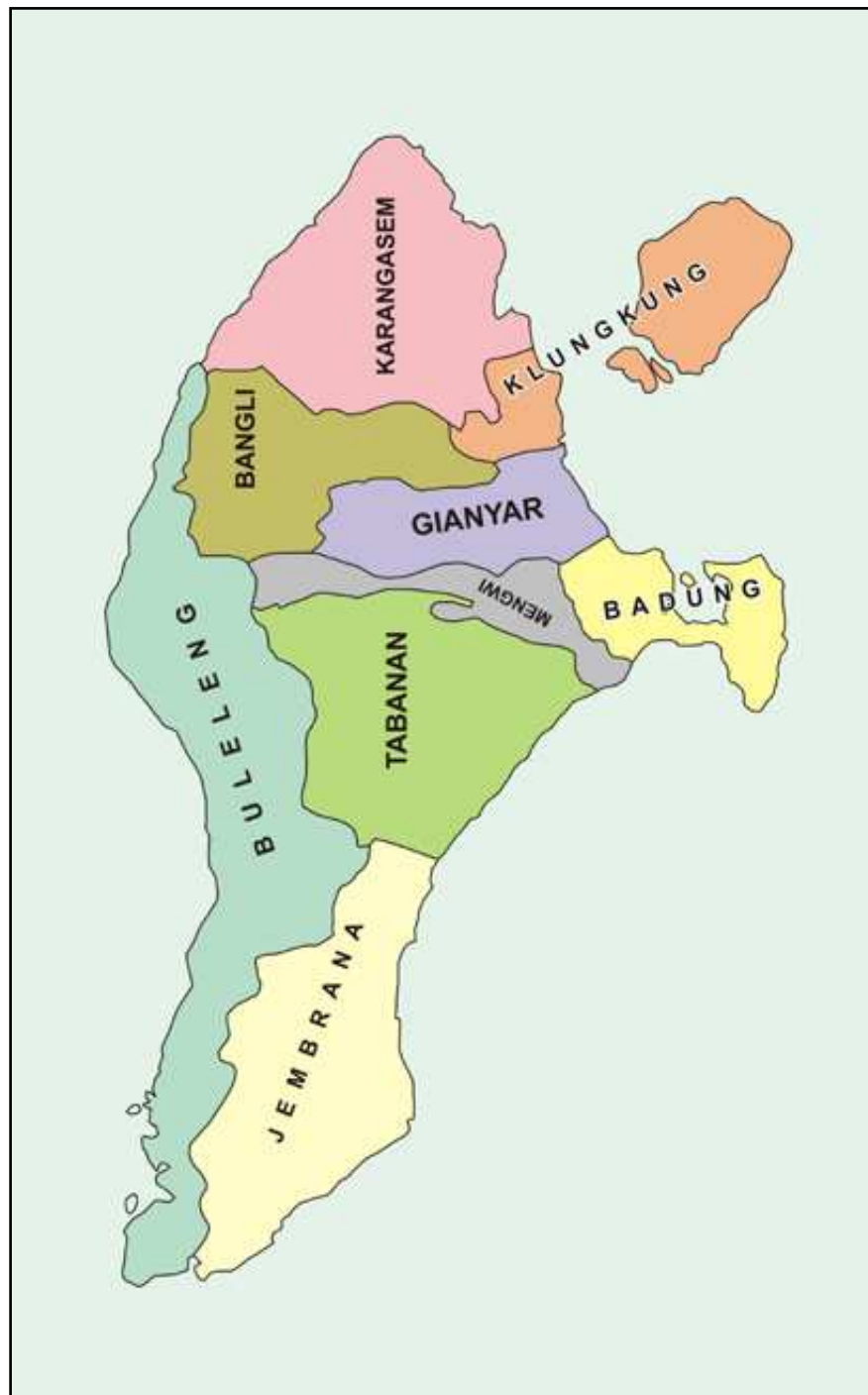
Bab 5
KERAJAAN-KERAJAAN DI KALIMANTAN

A. KERAJAAN-KERAJAAN DI KALIMANTAN BARAT

I. BUNUT

Leluhur raja-raja Bunut adalah Abang Riyang yang bergelar Kyai Riyang (Kiyai Patih Riang) bin Sumbung Batik yang berasal dari Embaluh. Dia berputra Abang Turan, yang bergelar Kyai Pati Turan. Ia memimpin rakyatnya membangun perkampungan di Ulak Alai, sebelah hilir Nanga Bunut pada kurang lebih abad 18 (1701).[124] Adapun arti *ulak* adalah 'lekukan sungai yang airnya bertahan sesaat,' sedangkan *alai* berarti 'rencana memulai.' Mereka berpindah ke Kirin Temiang pada 1795. Meskipun demikian, pada 1799 dengan dipimpin seorang tokoh bernama Abang Maduh, mereka meninggalkan Kirin Temiang dan membuka pemukiman baru di Nanga Pilin. Di sana mereka terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama dipimpin oleh Kyai Pati Turan yang mendirikan pemukiman di Nanga Lipat. Kelompok satunya lagi mendirikan Nanga Embaluh di bawah pimpinan Kiyai Mangku Abang Ubal. Ketika itu masyarakat masih menganut animisme. Agama Islam tersiar ke kawasan ini kurang lebih pada 1800, dibawa oleh seorang ulama asal Aceh bernama Haji Abdul Malik atau dikenal pula sebagai Tuan Alim.

124. Lihat *Sejarah Berdirinya Kota Putussibau yang Diawali dari Berdirinya Kerajaan Bunut*, butir ketiga.

Putra Abang Turan adalah Abang Barita (Adi Sutrie) yang bergelar Panembahan Adi Paku Negara, seorang pedagang Melayu di Selimbau yang kelak mendirikan Bunut. Ia menikah dengan Dayang Patimah, putri Kyai Pati Anom Abang Sunjung dari Selimbau pada 1815. Belakangan, dia memperoleh gelar Raden Suta dari Raja Selimbau. Pernikahan Abang Barita dengan Dayang Patimah dikaruniai tiga orang putri, yakni Dayang Baiyah (Ratu Pati), Dayang Lumut (Ratu Panembahan Haji Hadijah), dan Dayang Ajar (Nyai Mas). Dayang Lumut kelak menikah dengan Pangeran Muhammad Abbas Suryanegara, Raja Selimbau.

Setelah beberapa lama berdiam di Selimbau, Abang Barita berniat mendirikan tempat pemukiman baru di Nanga Bunut guna mengumpulkan kerabat-kerabatnya. Ia lalu memohon izin Raja Selimbau. Setelah diperkenankan oleh Raja Selimbau, berangkatlah Abang Barita beserta para pengikutnya membuka perkampungan di Nanga Bunut. Di tempat kediaman baru itulah, Dayang Patimah memperoleh lagi seorang putri bernama Dayang Suntai. Abang Barita lantas digelari Pangeran Lawuk. Baru sesudah lanjut usianya, ia dikenal sebagai Panembahan Lawuk. Demikianlah, Kerajaan Bunut berdiri pada 1821.

Masa-masa awal Bunut diwarnai dengan berbagai gejolak, antara lain pertikaian antara orang-orang Dayak Batang Lupar dengan rakyat Nanga Bunut, yang berujung pada pertumpahan darah. Pangeran Muhammad Abbas Suryanegara turun tangan mendamaikan kedua belah pihak. Orang-orang Boyan terlibat perselisihan dengan Gilang. Oleh karenanya, pihak Boyan meminta bantuan Bunut, namun Abang Barita tidak sanggup menolong sehingga mereka lantas memohon pertolongan Pangeran Muhammad Abbas Suryanegara, Raja Selimbau. Melihat kedatangan bala tentara Selimbau, warga Gilang ketakutan dan menyerah.[125]

Kyai Pati Turan, ayah Abang Barita, dibunuh oleh orang Embaluh Kapuas. Itulah sebabnya, Abang Barita berniat pergi ke sana guna menuntut *pati* (ganti rugi menurut adat) atas pembunuhan tersebut. Saat hendak menagih *pati* ini, Abang Barita meminta bantuan Selimbau dan berangkatlah ia ke Embaluh. Perkara ini kemudian berhasil diselesaikan setelah ganti ruginya dibayarkan. Menjelang wafatnya, Abang Barita berpesan agar jenazahnya kelak dimakamkan ke Selimbau karena ia merasa berhutang budi pada negeri tersebut yang telah banyak membantu dirinya dan Bunut.

---

125. Lihat *Kesaksian Sejarah di Masa Kejayaan Kerajaan Selimbau Darussalam.*

Abang Barita mangkat pada 1861 dan digantikan oleh menantunya yang bernama Abang Jaya Surian karena putranya, Abang Ijal dan Abang Ajan (Raden Sura Suta Diwangsa), masih belum dewasa. Setelah cukup umur, putra Abang Barita lantas menuntut singgasana Bunut. Meskipun demikian, Abang Tela, cucu Abang Jaya Surian, juga merasa berhak menjadi panembahan Bunut. Itulah sebabnya, demi menghindari konflik berkepanjang, disepakati bahwa Bunut akan dipimpin oleh dua orang raja, yakni Raden Sura Suta Diwangsa (bergelar Panembahan Pakunegara) dan Abang Tela (bergelar Pangeran Surapati). Pada 1863, didirikanlah Masjid Agung Bunut yang dirancang oleh seorang ulama asal Palembang. Masjid ini diperbaiki dan diperluas pada 1867. Saat Raden Sura Suta Diwangsa bersama Abang Tela menunaikan ibadah haji, Abang Tela telah membeli sebidang tanah yang dipergunakan sebagai tanah wakaf bagi para jemaat haji yang berasal dari negerinya. Oleh karenanya, sepulang dari tanah suci, ia digelari Gusti Haji Muhammad Arief.

Ternyata Raden Sura Suta Diwangsa kurang puas dengan adanya dua orang penguasa di Bunut. Pada 1865, ia mengajukan kasus ini kepada Gubernur Jenderal van den Bosch dan memohon agar pemerintah kolonial turun tangan menuntaskannya. Pemerintah kolonial memutuskan agar Raden Sura Suta Diwangsa saja yang menjadi panembahan Bunut, dengan Raden Prabu Anom Dulaga sebagai putra mahkota. Tetapi ketetapan ini tentu saja ditentang oleh Abang Tela dan Abang Tana Adi Hasan, putra lain Abang Jaya Surian atau Pangeran Adipati Mangku Negara. Belanda berbalik mendukung Abang Tela dan Abang Tana sehingga Raden Sura Suta Diwangsa beserta putra mahkotanya justru terusir dari Istana Bunut. Pada mulanya mereka mengundurkan diri ke kampung Peredah, namun karena dikejar-kejar oleh Belanda, mereka pindah dan mendirikan kampung Nanga Kalis. Ternyata pemerintah kolonial masih belum puas mengejar mereka sehingga terpaksa berpindah kembali ke Nanga Boyan pada 1905.

Abang Tana Adi Hasan kini berkesempatan menduduki singgasana Bunut pada 1865. Ia bergelar Pangeran Adi Pakunegara. Sementara itu, Raden Sura Suta Diwangsa yang terusir dari Bunut, menyingkir ke Peredah dan Nanga Kalis karena terus menerus dikejar pasukan pemerintah kolonial. Abang Tana menandatangani *Korte Verklaring* pada 1903. Ia merupakan penganut agama Islam yang taat sehingga tak mengherankan apabila bidang keagamaan mengalami perkembang pesat pada zaman pemerintahannya. Pada 1905, disusunlah undang-undang Kerajaan Bunut yang didasari oleh hukum

Islam. Pangeran Adi Pakunegara sendiri akhirnya diasingkan oleh Belanda ke Batavia karena dituduh melakukan kesalahan pada 28 Juli 1910. Dengan demikian, berakhirlah Kerajaan Bunut.

Sementara itu, ada sumber lain yang memaparkan rangkaian raja-raja Bunut adalah Abang Barita yang digantikan oleh menantunya bernama Abang Suria (1855–1859), bergelar Pangeran Adipati Mangku Negara. Ia digantikan lagi oleh putranya, Abang Utih (1859–1876). Raja Bunut berikutnya adalah Abang Tella (1876–1884), bergelar Pangeran Adipati Mangku Negara–sama dengan Abang Jaya Surian, yang diasingkan pada 1884. Selanjutnya, demi mengisi kekosongan takhta Bunut diangkatlah Abang Tanah, bergelar Pangeran Ratu Adi Paku Negara (1884–1909) sebagai penguasa baru. Pada 1909, kerajaan ini dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Menurut Veth, secara geografis Bunut wilayahnya terbagi dua oleh Sungai Bunut. Di *hoofdnegerie*-nya (ibu kota), Nanga Bunut, terdapat 20 rumah. Sementara itu, penduduknya secara keseluruhan berjumlah 1682 orang, yang terdiri dari 500 Melayu, 12 Cina, dan 1170 Dayak.[126]

Peta Kerajaan Bunut

126. Lihat *Borneo's Wester-Afdeeling*, jilid 1, halaman 55.

II. HULU AIK (ULU AIK atau HULU AIR)

Raja pertama Hulu Aik bernama Pang Ukir Empu Gremeng.[127] Selanjutnya, kerajaan ini diperintah oleh seorang tokoh bernama Duhung Klung atau Bihukng Tiung, selaku penguasa sementara. Dia digantikan oleh Bansa Pati, yang menyandang gelar sebagai Raja Hulu Aik kedua karena Duhung Klung merupakan penguasa sementara saja. Bansa Pati lalu membangun pusat pemerintahan di Lamun Paluh, Sungai Demit. Raja Hulu Aik ketiga adalah Ira Bansa yang dinobatkan pada 1914. Dia memindahkan pusat pemerintahan ke Laman Tempasi, Desa Menyumbung. Selanjutnya, singgasana Hulu Aik beralih kepada Temenggung Jambu atau Patinggi Jambu pada 1928. Setelah itu, pemerintahan sementara dipegang oleh Bebek dan kerajaan berpusat di Congkon Baru. Sementara itu, pusat pemerintahan berada di Laman Sengkuang. Raja Hulu Aik berikutnya adalah Poncin selaku penguasa kelima. Ia digantikan oleh adiknya bernama Singa Bansa pada 1997.

III. JONGKONG

Kerajaan Jongkong sebelumnya juga dikenal sebagai Kerajaan Ulak Lamau. Kini terletak di Kabupaten Kapuas Hulu. Pendirinya adalah Kiai Pati Udah (Kiyai Patih Uda, Abang Jumbo, atau Abang Jembu) bin Abang Tedung.[128] Orang tua Kiai Pati Udah adalah bangsawan Embaluh (Embaloh) yang berasal dari sekitar Sungai Palin[129]. Pada 1823, Kiai Pati Udah tercatat menandatangani kontrak politik dengan Belanda. Ia digantikan oleh putranya bernama Raden Nata (memerintah hingga 1840). Karena Raden Nata tidak mempunyai anak laki-laki, ia digantikan oleh cucunya yang bernama Raden Abdul Arab, anak Dayang Mesinto, putrinya, dengan seorang Dayak Palin Muslim bernama Abang Buja. Putra tertua Abang Abdul Arab bernama Abang Unang menggantikannya pada 1864 dengan gelar Pangeran Sulaiman Suriya Negara. Pada 1882, Jongkong dijadikan *landschap* (daerah swapraja) oleh pemerintah Hindia Belanda. Ketika ia wafat pada 1886, putra tertuanya bernama Abang Alam belum dewasa sehingga pemerintahan Jongkong dipegang oleh tiga orang wali, yakni Raden Suma, Abang Ali, dan Abang Kiyung. Abang Alam kemudian resmi menggantikan ayahnya pada 1899 dan naik takhta dengan gelar Pangeran Muda Gusti Alam.[130]

127. Lihat *Peta Tematik Kebudayaan dan Sejarah Pemerintahan Kalimantan Barat*, halaman 73.
128. Lihat *Peta Tematik Kebudayaan dan Sejarah Pemerintahan Kalimantan Barat*, halaman 133.
129. Lihat *Ilmu Gaib di Kalimantan Barat*, halaman 21.
130. Lihat *Ilmu Gaib di Kalimantan Barat*, halaman 15.

Swapraja Jongkong dihapuskan pada 1917 dan diperintah langsung oleh pemerintah kolonial. Pangeran Muda Gusti Alam memperoleh ganti rugi sebesar 1.000 Gulden dan diberhentikan sebagai raja. Jongkong kemudian disatukan dengan *Districtshoofd* (Kepala Distrik) Embau dan hanya diperintah oleh kepala kampung bernama Raden Nata–bekas menteri Kerajaan Jongkong. Dengan demikian, berakhirlah status Jongkong sebagai kerajaan.

Berdasarkan keterangan Veth, Kerajaan Jongkong terdiri dari 11 *huizen* (rumah) dan 100 penduduk[131]. Negeri ini diperintah oleh seorang *vorstje* (penguasa kecil) bergelar raden.

IV. KUBU

a. Cikal Bakal Kerajaan Kubu

Kerajaan Kubu berlokasi di Kecamatan Kubu Kabupaten Pontianak. Peletak dasar Kerajaan Kubu adalah 45 orang asal Hadramaut, Yaman. Yang terkemuka di antara mereka adalah Syarif Idrus (lahir tahun 1732 di Al Raidhah, Trim, Hadramaut),[132] Syarif Akhmad, Syarif Abdurrakhman as-Sagaf, dan Syarif Husein Alkadrie. Syarif Idrus sendiri merupakan leluhur raja-raja Kubu, sedangkan Syarif Husein Alkadrie kelak menurunkan raja-raja Pontianak. Konon pelayaran mereka pada sekitar pertengahan abad 18 itu ditujukan mencari daerah baru yang subur sesuai pesan guru besar mereka. Rombongan yang berasal dari Hadramaut tersebut memutuskan berlayar ke Kepulauan Nusantara. Pada mulanya mereka berlabuh di Palembang, lalu meneruskan perjalanannya ke arah timur, yakni ke Semarang, dan setelah itu Kalimantan Barat.

Rombongan tiba di Sukadana dan kemudian bertolak ke Mempawah. Setelah menyebarkan Agama Islam di Mempawah, Syarif Idrus berniat mencari daerah lainnya. Ia menyusuri Sungai Kapuas Kecil yang di tepi-tepinya masih ditutupi hutan belantara. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan, Syarif Idrus tiba di daerah yang menarik perhatiannya, yakni Suka Pinang atau persimpangan Sungai Rasau. Setelah melalui perundingan, anggota rombongan lain juga menyukai daerah tersebut dan ingin berdiam di sana. Demikianlah, mereka mulai membuka perkampungan baru di kawasan itu. Suku Dayak yang berlalu lalang sering menengok perkampungan

131. Lihat *Borneo's Wester-Afdeeling*, jilid 1, halaman 54.
132. Lihat *Dari Kobou ke Kubu Raya*, halaman 1

tersebut dan karena tertarik dengan tata cara memimpin serta pranata kehidupan yang baru, mereka ingin bergabung dengan para pendatang tersebut. Itulah sebabnya perkampungan yang dibuka Syarif Idrus menjadi makin ramai. Dengan bijaksana ia memerintah negeri barunya. Perdagangan hasil hutan di sana makin maju dan banyak menarik pedagang dari luar daerah. Tentu saja, kaum *lanun* (perompak) juga ikut tertarik menyaksikan prospek daerah pemukiman tersebut. Karenanya, demi alasan keamanan, Syarif Idrus memutuskan memindahkan kampungnya agak ke dalam. Ia berupaya membangun pula suatu sistem pertahanan. Sungai-sungai yang berada di dekatnya ditimbuni dengan kayu guna menghadang gerak maju musuh. Semenjak saat itu, orang menyebut kampung ini dengan nama Kubu (dari kata *kubu pertahanan*)

Lama-kelamaan perkampungan ini menjelma menjadi sebuah kerajaan yang berdiri sendiri pada 1775, yang ditandai dengan penobatan Syarif Idrus (1775–1794) sebagai raja pertamanya bergelar Tuan Besar Kubu. Dalam menjalankan pemerintahannya, Syarif Idrus dibantu oleh tiga rekannya, yang masing-masing bernama Sayid Hamzah Al Baraqbah, Sayid Ali As Shahabuddin, dan Syekh Ahmad Faluga. Mereka semua juga berasal dari Yaman, sama seperti Syarif Idrus sendiri. Benteng pertahanannya berkali-kali terbukti sanggup menahan serangan perompak, hingga suatu kali musuh dari Siak berhasil menerobosnya dan membunuh Syarif Idrus yang saat itu tengah bersembahyang. Konon Syarif Idrus sangat terkejut dengan serangan mendadak itu dan tanpa sadar terduduk ke atas meja. Tanpa menunggu waktu lama, musuh dengan segera menyarangkan senjatanya ke leher Syarif Idrus hingga menewaskannya. Rakyat Kubu merasakan dendam kesumat mendalam akibat pembunuhan pemimpinnya yang sangat mereka cintai sehingga bersumpah tak sudi menikah atau dinikahi oleh orang Siak. Pada 1780, sebelum wafat, Syarif Idrus sempat menandatangani kontrak politik (*Korte Verklaring)* dengan Belanda.

b. Perkembangan Kerajaan Kubu

Setelah mangkatnya Syarif Idrus, ia digantikan oleh putra mahkota, Syarif Muhammad. Penguasa yang baru ini juga diwajibkan menandatangani kontrak politik dengan Belanda pada 7 Juni 1823. Saudaranya yang bernama Syarif Alwi bin Idrus tidak setuju dengan kontrak itu sehingga memutuskan meninggalkan Kubu menuju ke Gunung Ambawang dan akhirnya menetap di Serawak karena terus menerus dikejar oleh Belanda. Tampaknya, Syarif Alwi lebih cocok dengan Inggris ketimbang Belanda karena saat itu Serawak berada dalam kekuasaan Inggris. Semenjak wafatnya Syarif

Muhammad, tidak pernah terjadi lagi serangan terhadap Kerajaan Kubu. Sebagai penerusnya adalah putranya bernama Syarif Abdurrahman yang menandatangani perjanjian politik dengan Belanda pada 7 Juni 1839. Takhta Kerajaan Kubu beralih kepada Syarif Ismail bin Abdurrahman yang menandatangani kontrak pada 28 Mei 1841.

Putra mahkota Syarif Zin bin Ismail saat itu belum dewasa sehingga pamannya, Syarif Hassan bin Abdurrahman, yang menjadi raja berikutnya. Ia menandatangani kontrak politik pada 27 Juni 1871. Setelah memerintah selama 29 tahun, Syarif Hassan mangkat. Pemerintah Belanda mengalihkan pewarisan takhta pkeada putranya yang bernama Syarif Abbas, padahal yang lebih berhak adalah putra mahkota Syarif Zin. Penandatanganan *Korte Verklaring* oleh penguasa Kubu yang baru itu berlangsung pada 8 November 1900.

Sewaktu Syarif Hassan berkuasa di Kubu, pembangunan daerah digalakkannya. Ia banyak membangun berbagai infrastruktur, seperti jalan dan lain sebagainya. Dengan demikian, Kerajan Kubu boleh dikatakan mencapai puncak kegemilangannya. Setelah mangkat, Syarif Zin menuntut takhta yang sudah menjadi haknya. Belanda sepakat untuk mengangkatnya sebagai penguasa baru Kubu, yang dikukuhkan dengan penandatanganan *Korte Verklaring* pada 26 November 1911.

Pada masa kekuasaan Syarif Abbas, Belanda membentuk suatu badan bernama *Bestuurscommissie* pada 1910 untuk membantu menangani pemerintahan Kerajaan Kubu. Sebagai ketuanya diangkat Syarif Kasimin, yang diberi wewenang memerintah daerah Tanjung Bunga, sementara itu anggotanya adalah Syarif Saleh yang diberi tugas memerintah daerah Kubu hingga Padang Tikar. Syarif Zin tercatat pernah memindahkan ibu kotanya ke Kerta Mulia. Perpindahan ini disebabkan karena putranya, Syarif Agel bin Zin, menikah dengan Syarifa binti Syarif Said pada 1900. Syarif Said pernah menghadiahkan sebidang tanah yang luas di perbatasan Tanjung Bunga kepada menantunya.

Syarif Agel tidak pernah menaiki takhta Kerajaan Kubu dan hanya menduduki jabatan sebagai menteri saja. Ketika Syarif Zin (Zain) wafat, putra mahkota Syarif Hasan bin Zin masih kanak-kanak sehingga pemerintahan Kubu diwakili oleh Syarif Saleh bin Idrus. Sebagai pengesahannya adalah penandatanganan *Korte Verklaring* pada 13 Oktober 1919. Masuknya bala tentara Jepang mendatangkan penderitaan luar biasa bagi rakyat Kubu, bahkan Syarif Saleh menjadi salah seorang korban kebiadaban

Jepang. Saat Jepang masuk ke Indonesia pada 1943, Syarif Hassan kembali ke Kubu dan diangkat sebagai ketua *bestuur komite* oleh Jepang. Ia ditangkap oleh Jepang pada 20 Februari 1944 dan keesokan harinya giliran raja muda Kubu, Syarif Ahmad. Sebagai penggantinya, diangkatlah Syarif Hasan yang saat itu telah dewasa. Sebelum menjadi raja, ia pernah mengenyam pendidikan di sekolah HIS Pontianak dan sesudah itu bekerja sebagai asisten residen hingga 1930. Selanjutnya, ia beberapa kali dipindahkan pada berbagai jabatan lainnya, dan terakhir ia sempat ditugaskan di Batavia.

Tatkala Jepang menyerah kalah pada 1945, Syarif Hasan diangkat oleh Belanda sebagai kepala Swapraja Kubu dan menandatangani *Korte Verklaring* pada 16 Agustus 1949. Ia terus memegang jabatan ini hingga 1958 ketika pemerintah RI menghapuskan berbagai swapraja, yang menandai berakhirnya Kerajaan Kubu.

Sementara itu, menurut sumber lain, sepeninggal Syarif Saleh, atas kehendak *Bunken Kanrikan* (Petugas Manajemen Prefektur) dibentuklah suatu dewan pemerintahan yang disebut *Kubu Zitiryo Hyogikai.* Adapun anggotanya adalah Syarif Yusuf bin Said Alkadrie, Syarif Jaafar Al Idrus-mantan kontrolir Padang Tikar, dan Syarif Hasan bin Zain Al Idrus (pegawai kantor Sutji Tyo, Pontianak).

Setelah kekalahan Jepang, pada November 1945 pasukan NICA mengunjungi Istana Kubu dan diterima oleh putra tertua almarhum Raja Kubu, yakni Syarif Husin Al Idrus dan putranya, Syarif Yusuf Al Idrus. Selaku pewaris Kubu, Syarif Husin diminta menemui Sultan Hamid II Alkadrie di Pontianak. Atas kehendak Belanda yang hendak menanamkan kekuasaannya kembali, *Kubu Zitiryo Hyogikai* dinyatakan bubar pada 28 Februari 1946. Sebagai gantinya dibentuklah *Bestuurscommisie Kubu* tanggal 1 Maret 1946. Anggotanya adalah Syarif Hasan bin Zain (ketua merangkap anggota) dan Syarif Yusuf bin Husin bin Saleh Al Idrus (anggota). Selanjutnya, semenjak 1 Juni 1946, diangkatlah seorang *onderafdeelingschef* (OAC) yang berfungsi sama seperti kontrolir atau *gezaghebber* di zaman penjajahan dahulu.[133] Syarif Yusuf kemudian meminta berhenti terhitung mulai 1 Maret 1949 dan memilih bekerja pada kantor polisi umum. Dengan demikian, anggota *Bestuurscommisie* Kubu tinggal seorang, yakni Syarif Hasan. Namun, ia kemudian diberhentikan dan urusan pemerintahan di Kubu ditangani oleh OAC.[134]

133. Lihat *Dari Koubou ke Kubu Raya*, halaman 9.
134. Lihat *Dari Koubou ke Kubu Raya*, halaman 9.

c. Kerajaan Ambawang

Sebagaimana yang telah dituturkan di atas, Syarif Alwi bin Idrus meninggalkan Kubu menuju Gunung Ambawang. Ia lantas mendirikan Kerajaan Ambawang. Pusat pemerintahannya berada di Kampung Pasir Putih, kaki Gunung Ambawang. Dalam menjalankan pemerintahannya, ia dibantu oleh menteri kerajaan bernama Sekh Ahmad Yamani[135]. Ketika itu, sebagian besar warga Ambawang terdiri dari orang Bugis dan Melayu. Belanda menyodorkan kontrak politik ke Ambawang pada 4 Juni 1823.

Syarif Alwi mangkat pada 1833 dan digantikan putranya, Syarif Khalid (1833–1837). Semasa pemerintahannya, dibukalah beberapa kawasan pemukiman baru, seperti

- Telok Penyengat yang dihuni orang-orang Melayu asal Perak, di bawah pimpinan Enci' Kedai sehingga akhirnya dikenal sebagai Telok Enci' Kedai atau Telok Pakedai.
- Tanjung Kuala Selat Remis yang dibuka oleh masyarakat Bugis.
- Selat Remis yang dibuka dan dipimpin oleh putra Syarif Khalid bernama Syarif Zain.

Putra Syarif Khalid lainnya bernama Syarif Ahmad diangkat sebagai pemimpin Parit Langgar, sedangkan putranya yang bernama Abdurrahman berdiam di Pontianak. Setelah Syarif Khalid mangkat di Batavia pada 1837 dan dikebumikan di Parit Makam, Sungai Bemban, Kerajaan Ambawang dihapuskan dan disatukan kembali dengan Kubu.

V. LANDAK

a. Cikal Bakal dan Perkembangan Kerajaan Landak

Kerajaan Landak terletak di Kabupaten Landak. Konon, Kerajaan Landak didirikan oleh seorang bangsawan Singasari yang pindah ke kawasan tersebut guna membangun kerajaan baru sehingga berdirilah suatu dinasti yang rajanya bergelar Sang Nata Pulang Pali[136] I hingga VII. Raja Sang Nata Pulang Pali VII dalam mimpinya melihat seorang putri yang cantik jelita. Ia jatuh cinta kepada gadis dalam mimpinya itu dan memerintahkan pengikutnya mencarinya. Meskipun demikian, mereka tak kunjung menemukannya juga. Akhirnya, mereka menemukan seorang gadis di desa

135. Lihat *Dari Koubou ke Kubu Raya*, halaman 10.
136. Dalam buku *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat* halaman 154 disebut Pulang Pali.

Salimpat, yang sesuai dengan gambaran Raja Pulang Pali VII, bernama Dara Itam. Namun, Dara Itam yang mahir dalam ilmu pengobatan menolak undangan raja karena ia telah memiliki seorang kekasih bernama Ria Sinir. Dengan tipu muslihat, raja menyatakan sakit dan mengundang Dara Itam mengobatinya. Gadis itu kemudian bersedia memenuhi undangan raja dan langsung dinikahi.

Tak berapa lama berselang terdapat seseorang dari Banjer Massin yang diperintahkan pemimpinnya mengayau (membunuh orang untuk diambil kepalanya [sebagai adat kebiasaan beberapa suku bangsa yang masih primitif]). Setelah mendapatkan seorang korban dari kalangan rakyat Raja Pulang Pali, ia melarikan diri. Raja Pulang Pali sangat marah dan mengeluarkan sayembara bagi siapa yang sanggup membunuh dan membawa kepala pengayau akan dipenuhi apapun keinginannya. Ternyata yang sanggup memenangkan sayembara itu adalah Ria Sinir, bekas kekasih Dara Itam. Sebagai hadiahnya, ia meminta salah seorang istri raja. Karena terikat oleh janjinya, Raja Pulang Pali tak dapat menolaknya, tetapi ia khawatir kalau yang diminta Ria Sinir adalah Dara Itam. Oleh karenanya, ia lantas memerintahkan agar tubuh Dara Itam dihitamkan dengan jelaga. Kendati demikian, Ria Sinir tetap dapat mengenalinya. Raja Pulang Pali dengan berat hati memberikan Dara Itam kepada Ria Sinir[137].

Saat itu, Dara Hitam dalam keadaan mengandung dari hasil pernikahannya dengan Raja Pulang Pali dan melahirkan seorang anak bernama Raden Ismahayana. Ia kemudian diangkat sebagai raja menggantikan orang tuanya dengan gelar Raja Dipati Karang Tanjung Tua (1472–1542). Semasa pemerintahannya, agama Islam tersiar ke Landak dan raja menjadi salah seorang penganutnya sehingga selanjutnya digelari Raja Abdul Kahar. Ia memindahkan ibu kota kerajaan ke kaki bukit yang berhadapan dengan Sungai Menyuke (percabangan Sungai Landak). Lokasi baru itu kemudian diberi nama Kota Ayu atau Munggu (Mungguk Ayu) dan menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Landak.

Rangkaian raja-raja Landak yang memerintah di Mungguk Ayu setelah Raden Ismahayana adalah Raden Pati Karang atau Raja Adipati Karang Tanjung Muda (1542–1584), Raden Cili Pahang Tua (1584–1614), Raden Karang Tedung Tua (1614–1644), Raden Cili Pahang Muda (1644–1653), Raden Karang Tedung Muda (1653–1679, wakil raja), Raden Mangku Tua (1679–1689, wakil raja), Raden Kusuma

137. Hikayat ini tercantum dalam *Borneo's Wester Afdeeling, jilid 1*, halaman 194–195.

Agung Tua (1689–1693), dan Raden Mangku Muda (1693–1703, wakil raja)[138]. Sumber dokumen Belanda menyebutkan urutan raja-raja Landak adalah Abdoelkahar (Abdulkahar), Pangeran Doepati Kesoema Sari, Pangeran Agoeng Towea, Pangeran Agoeng Modea, Panembahan Setjenata Toewa, Panembahan Setjenata Moeda, Panembahan Kesoema Adiningrat (1822–1844), Panembahan Goesti Ismail (Pangeran Mangkoeboemi, juga dikenal sebagai Panembahan Hadji, 1844), Panembahan Machmoed Akamoedin (1844–1847), Panembahan Adi Kesoema Amaroeddin (Panembahan Amar, 1847–1874), Wakil Panembahan Goesti Doha (Pangeran Mangkoeboemi, 1874–1880), Panembahan Goesti Abdul Madjid (Panembahan Kesoema Adiningrat, 1881–1882), Wakil Panembahan Goesti Mohamed Tabri (Pangeran Wiranata, 1883–1890), Wakil Panembahan Goesti Achmad (Pangeran Mangkoeboemi, 1890–1898), Panembahan Goesti Abdoel Adjis Han (Panembahan Soeria Kesoema Abdoel Adjid Akamoeddin, 1898–1900), Wakil Panembahan Goesti Boedjang (Pangeran Mangkoeboemi, 1901–1922), dan Panembahan Goesti Abdoel Hamid (1922–saat ditulisnya dokumen Belanda tersebut).

Menurut Prof. Hans Hägerdhal, urutan raja-raja Landak adalah Abdul Kahar, Raja Dipati Karang Tedung (wakil raja), Raja Dipati Karangsari Tua, Pangeran Mangkubumi (wakil raja), Pangeran Agung Tuwa, Pangeran Agung Muda, Panembahan Secanata Tuwa (kurang lebih 1699), Pangeran Anom Jaya Kesuma (wakil raja), dan Panembahan Secanata Muda (±1779)[139]. Dengan demikian, terdapat banyak perbedaan sehingga perlu diskusi lebih lanjut oleh para sejarawan. Veth menyebutkan mengenai Putri Bunku yang merupakan keturunan Abdul Kahar[140]. Ia menikah dengan Panembahan Giri Kusuma dari Sukadana. Menurut Prof. Hans Hägerdhal, Raja Sukudana tersebut memerintah ±1590–1608[141]. Sementara itu, Putri Bunku dicantumkannya sebagai putri Raja Landak, Prabu Landak.

Putri Bunku ini meracuni suaminya, Panembahan Giri Kusuma dari Sukadana. Setelah kematian suaminya itu, ia memegang kekuasaan atas Landak dan Sukadana sekaligus. Adapun pemerintahannya di Sukadana itu dilaksanakan selaku wakil bagi putranya, Giri Mustaka yang belum dewasa[142]. Gelarnya adalah Ratoe di Atas Negri. Semasa pemerintahannya, utusan Belanda bernama Samuel Bloemaert mengadakan

138. Lihat melayuonline.com, diunduh tanggal 22 Juli 2010.
139. Lihat *Kerajaan2 Indonesia*, halaman 127.
140. Lihat *Borneo's Wester Afdeeling, jilid 1*, halaman 195.
141. Lihat *Kerajaan2 Indonesia*, halaman 230.
142. Lihat *Borneo's Wester Afdeeling*, jilid1, halaman 201.

kontrak perdagangan, yang merupakan awal berdirinya kantor perwakilan dagang Belanda (*kantoor*) di Sukadana. Bloemaert melaporkan mengenai kondisi di Kalimantan Barat serta sarannya guna memperluas perdagangan intan. Disebutkannya pula seorang pesaing perdagangan intan yang kuat bernama Tjili Pahang. Tak lama sebelum kedatangan Bloemaert, Tjili Pahang telah memborong seluruh intan yang ada, yakni dua dari delapan karat.[143] Setelah Giri Mustaka dewasa, Putri Bunku turun takhta sehingga ia berkesempatan menjadi satu-satunya penguasa tunggal di Sukadana.

Veth meriwayatkan mengenai asal mula intan Danau Raja yang terkenal. Konon, intan itu ditemukan oleh seorang Dayak di Batangoeloe (Batang Hulu) semasa pemerintahan Pangeran Setja Nata.[144] Penemunya kemudian diberi gelar Kiai Jaga di Laga. Kendati demikian, kerajaan-kerajaan tetangga Landak merasa iri dengan penemuan berlian tersebut dan berupaya memilikinya. Salah satunya adalah Sultan Sukadana. Ia memiliki seorang putri yang sudah cukup umur namun belum menikah. Sultan kemudian menawarkan putrinya itu menjadi istri adik Raja Landak, Nia Abbas, namun syaratnya harus menyerahkan intan Danau Raja sebagai mas kawinnya. Raja Landak merasa agak terhina namun tidak berani menolaknya. Nia Abbas lalu berangkat ke Sukadana dengan membawa batu mulia nan berharga tersebut.

Dengan cerdik Nia Abbas berhasil mencegah Sultan Sukadana menguasai intan Danau Raja. Ia mengatakan bahwa hanya istrinya saja yang boleh menyimpan intan tersebut. Selama tiga tahun putri raja Sukadana membawa berlian itu dalam ikat pinggangnya. Akhirnya, adik raja Landak merasa tidak suka dengan istrinya yang kurang cantik dan begitu pula kehidupan di Sukadana sehingga berencana melarikan diri. Malam hari saat istrinya sedang tidur, Nia Abbas mengambil berliannya dan dengan menumpang sebuah perahu melarikan diri ke kampung halamannya.

Sultan Sukadana merasa terhina dan merencanakan penyerangan ke Landak. Rakyat Landak tidak siap menghadapi serbuan mendadak yang berlangsung pada 1698 itu dan dapat dikalahkan dengan mudah. Raja Landak melarikan diri dan mereka yang tertinggal dibunuh. Kota Mungguk Ayu (dalam buku Veth disebut Monggo) lalu dibakar. Landak berniat membalas dendam kepada Sukadana. Dua orang utusan dikirim menghadap Sultan Banten guna meminta bala bantuan. Sebagai hadiah bagi Sultan Banten mereka membawa intan sebesar 54 karat. Sultan Banten

143. Lihat *Borneo's Wester Afdeeling,* jilid 1, halaman 202.
144. Lihat *Borneo's Wester Afdeeling, jilid 1*, halaman 228-229.

waktu itu, Abdu'l Mahasin Muhammad Zainul Abidin (1690–1733) menurunkan pasukannya membantu Landak. Namun, Banten saat itu sangat bergantung kepada VOC sehingga mau tidak mau mereka melibatkan pula perusahaan dagang Belanda tersebut.

Belanda yang tergiur dengan kawasan penghasil intan tersebut serta ingin menanamkan pengaruhnya di pantai barat Kalimantan sebelum didahului Inggris, sepakat mendukung ekspedisi militer mengalahkan Sukadana. Armada Belanda ketika itu dipimpin oleh Roelof Goens. Sukadana berhasil ditundukkan pada 1699 oleh pasukan gabungan Banten, VOC, dan Landak. Sukadana kini harus membayar upeti kepada Banten. Meriam yang dahulu milik Sukadana diserahkan kepada Landak, sebagai tanda bahwa Landak tidak perlu lagi membayar upeti kepada Sukadana.

Pusat pemerintahan Landak lalu dipindahkan ke Bandong karena ibu kota mereka telah musnah dilalap api. Raja-raja Landak yang memerintah dari Bandong adalah Raden Kusuma Agung Muda (1703–1709), Raden Purba Kusuma (1709–1714, wakil raja), Raden Nata Tua Pangeran Sanca Nata Kusuma Tua (1714–1764), dan Raden Anom Jaya Kusuma (1764–1768)[145]. Terdapat sumber yang meriwayatkan bahwa pada zaman Raden Anom Jaya Kusuma berlangsung peperangan antara Landak dan Tanjungpura (Sukadana). Pemicu peperangan adalah tuntutan Landak agar Intan Kobi yang pernah dibawa oleh Ratu Mas Jaintan, yakni putri Landak yang menikah dengan Panembahan Sori atau Giri Kusuma dari Tanjungpura, dikembalikan ke Landak. Intan itu ditemukan kembali ketika jenazah Ratu Mas Jaintan sedang dimandikan. Peperangan ini dimenangkan oleh Tanjungpura sehingga Raden Anom Jaya Kusuma tertawan. Tahun terjadinya peperangan ini juga berbeda-beda menurut berbagai sumber, pada 1698[146] atau 1700.[147] Meskipun demikian, ada sumber yang menyamakan Ratu Mas Jaintan dengan Putri Bunku[148] sehingga masa hidupnya tentu lebih awal lagi. Apalagi Ratu Mas Jaintan ditawan oleh Mataram pada 1622.

145. Lihat melayuonline.com, diunduh tanggal 22 Juli 2010.
146. Lihat Lihat *Peta Tematik Kebudayaan dan Sejarah Pemerintahan Kalimantan Barat*, halaman 64.
147. Lihat *Peta Tematik Kebudayaan dan Sejarah Pemerintahan Kalimantan Barat*, catatan kaki nomor 4, halaman 161: "Dalam M. Dardi D. Has, halaman 10, dinyatakan bahwa pertikaian tersebut terjadi pada 1700." Karya yang dimaksud adalah *Tanjungpura: Dari Benua Lama ke Mulia Kerta*, Pontianak: naskah sumber tidak diterbitkan.
148. Lihat http://en.rodovid.org/wk/Person:305400, diunduh 26 Juli 2011.

Yang Mulia Pangeran Ratu Kerajaan Landak Gusti Suriansyah
Foto koleksi pribadi

Ibu kota Landak berpindah lagi ke Ngabang hingga saat ini. Penguasa-penguasa Landak yang memerintah dari Ngabang adalah Raden Nata Muda Pangeran Sanca Nata Kusuma (1768–1798), Raden Bagus Nata Kusuma (1798–1802, wakil raja), Gusti Husin (1802–1807, wakil raja), Panembahan Gusti Muhammad Aliuddin (1807–1833), Haji Gusti Ismail (1833–1835, wakil panembahan), Panembahan Gusti Mahmud Akamuddin (1835–1838), Ya Mochtar Unus (1838–1843, wakil panembahan), Gusti Muhammad Amaruddin Ratu Bagus Adi Muhammad Kusuma (1843–1868), Gusti Doha (1868–1872), Gusti Abdulmajid Kusuma Adiningrat (1872–1875), Gusti Andut Muhammad Tabri (1875–1890), Gusti Ahmad (1890–1895), Gusti Abdulazis Kusuma Akamuddin (1895–1899), Gusti Bujang Isman

Tajuddin (1899–1922), Gusti Abdul Hamid (1922–1943), Gusti Sotol (1943–1945, wakil panembahan), Gusti Muhammad Appandi Ranie (1946, wakil panembahan), dan Pangeran Ratu Haji Gusti Amiruddin Hamid[149].

Pengaruh Belanda makin besar ketika pada 26 Maret 1778, Banten yang telah turun pamornya menyerahkan Landak dan Sukadana (sebelumnya merupakan vasal Banten) kepada VOC. Demikianlah, pada 7 Juli 1779, Willem Adriaan Palm mengunjungi Ngabang guna menjumpai Raden Nata Muda Pangeran Sanca Nata Kusuma atau Pangeran Sanca Nata Muda (1768–1798) sebagai realisasi peresmian serah terima di atas[150]. Wilayah Landak makin berkurang dengan pendirian Kesultanan Pontianak. Dengan persetujuan Belanda, Pontianak mengambil alih sebagian wilayah Landak. Tentu saja Landak tidak puas dengan kebijakan baru ini dan mengadukannya kepada Sultan Banten. Tetapi Banten yang sudah lemah kedudukannya tidak sanggup berbuat apa-apa, terlebih lagi ia telah melepaskan kawasan tersebut kepada VOC. Akibat masuknya pengaruh Belanda ini, Panembahan Gusti Mahmud Akamuddin (Panembahan Machmoed Akamoedin, 1844–1847 atau 1835–1838) terpaksa mengadakan perjanjian dengan pemerintah kolonial pada 31 Mei 1845. Belakangan, Panembahan Gusti Muhammad Amaruddin Ratu Bagus Adi Muhammad Kusuma (Panembahan Adi Kesoema Amaroeddin atau Panembahan Ratu Adi Kesuma Amaruddin, 1847–1874 atau 1843–1868) menandatangani kontrak politik berupa *Lange Verklaring* pada 7 dan 17 Juli 1859.

Perjanjian perbatasan ditandatangani pada 12 Agustus 1886 antara Landak dan Pontianak. Landak saat itu diwakili oleh Wakil Panembahan Gusti Andut Muhammad Tabri (Goesti Mohamed Tabri atau Gusti Kandut Muhammad Taberi atau Pangeran Wiranata atau Pangeran Wiranata Kusuma, 1883–1890 atau 1875–1890), sedangkan Kesultanan Pontianak diwakili oleh Sultan Syarif Yusuf. Saksi di pihak Landak adalah Ya' Dimbul Bin Pangeran Suta. Saksi di pihak Pontianak adalah Syarif Jafar Alkadrie Pangeran Bendahara, Syarif Muhammad bin Harun Alkadrie, dan Pangeran Syarif Ali Alkadrie. Perjanjian ini ditandatangani di hadapan Residen Borneo Barat beserta dua orang kontrolir, yakni Landak dan Mandor[151].

Rangkaian-rangkaian perjanjian dengan Belanda masih ditambah lagi dengan kontrak politik (8 Oktober 1909) dan *Korte Verklaring* (19 Mei 1922) yang

149. Lihat melayuonline.com, diunduh tanggal 22 Juli 2010.
150. Lihat *Landak di Balik Nukilan Sejarah*, halaman 22.
151. Lihat *Landak di Balik Nukilan Sejarah*, halaman 22.

ditandatangani oleh Gusti Bujang Isman Tajuddin. Isi kontrak politik pada 1909 itu mempersempit ruang gerak Kerajaan Landak karena administrasi pemerintahan hendak dikendalikan oleh Belanda melalui kontrolir atau *gezaghebber*. Selanjutnya, jabatan menteri dihapuskan dan diganti dengan kepala onderdistrik atau distrik. Sistem *apanage* diganti dengan pajak (*belasting*) yang harus dipikul rakyat Landak. Selain itu, mereka masih diwajibkan bekerja rodi sehingga menambah beban penderitaan rakyat.

Pada abad 19, raja-raja Landak makin merasa dirugikan oleh Belanda. Oleh karena itu, pecahlah pemberontakan yang dipimpin Ratu Adi pada 1831 dan Gusti Andut pada1890. Kedua pemberontakan ini dapat dipadamkan oleh Belanda dengan mudah karena Belanda memang sedang berada dalam puncak kejayaannya akibat menerapkan sistem Tanam Paksa yang memberikan keuntungan berlimpah-limpah. Meskipun demikian, semangat perlawanan raja bersama rakyat Landak tidak pernah padam. Pada 1899 pecah lagi pemberontakan yang dipimpin oleh Gusti Abdurrani dengan dibantu oleh Panglima Daud, Panglima Anggu, dan Ja' Bujang. Pemberontakan ini juga dapat ditumpas oleh Belanda. Gusti Abdurrani kemudian diasingkan seumur hidup ke Bengkulu. Selama dalam pengasingannya hingga wafat pada 1920, ia tidak pernah menerima bantuan keuangan dari Belanda dan bekerja keras mencari nafkah sendiri. Pada 1944, Raja Gusti Abdul Hamid ikut menjadi korban kekejaman Jepang. Sepeninggal panembahan, pemerintahan Landak dijalankan oleh Gusti Sotol selaku wakil panembahan, yang digantikan oleh Gusti Muhammad Appandi Ranie (Gusti Muhammad Affandi Rani Pangeran Mangkubumi).

Demi mendukung cita-cita kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan, dibentuklah organisasi bernama Persatuan Rakyat Indonesia (PRI). Dalam kepengurusannya yang dibentuk pada 29 Maret 1946, Gusti Muhammad Appandi Ranie diangkat sebagai kepala penanggungjawab PRI *Onderafdeeling* Landak. Sebagai wakilnya, diangkatlah Bardan Nadi Sutrisno. Para penasihatnya terdiri dari Ya' Abdulhamid Daham Noor, Umar Digul, dan A. Hamid Zakaria. PRI ini kemudian dibubarkan pada 9 Oktober 1946 dan diganti menjadi Gerakan Rakyat Merdeka (GERAM). Selama berlangsungnya perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Gusti Muhammad Appandi Ranie turut bergerilya bersama pimpinan dan laskar GERAM[152].

---

152. Lihat *Landak di Balik Nukilan Sejarah*, halaman 46-51.

Pada 1999, orang-orang Melayu Landak mendekati keluarga kerajaan dan meminta mereka menghidupkan kembali istana Landak. Oleh karena itu, Gusti Suriansyah yang pernah menuntut ilmu politik di Universitas Gajah Mada dinobatkan sebagai panembahan Landak pada 2000[153].

Landak merupakan daerah penghasil intan. Berlian terbesar yang digali di kawasan itu adalah intan Danau Raja dengan ukuran 367 karat. Kemudian terdapat berlian bernama Segima yang menurut Veth berada di tangan Raja Matan. Yang ketiga berlian sebesar 54 karat dihadiahkan oleh Raja Landak kepada Sultan Banten pada 1686 (dalam buku Veth tercantum 1686, namun di bagian sebelumnya disebutkan tahun 1698. Tampaknya 1698 inilah yang benar). Raffles mengatakan bahwa panembahan Landak mengenakan berlian masing-masing sebesar 18 dan 14 ½ karat (*Raffles zegt ons, dat de toenmalige Vorst van Landak een diamant droeg van 18 en een anderen van 14 ½ karaat*[154]). Ini belum termasuk berlian hitam sebesar 42 karat yang terlalu keras untuk dikerjakan.

b. Sosial Kemasyarakatan

Upacara adat yang masih dilaksanakan hingga hari ini adalah Upacara Tumpang Negeri. Upacara ini biasa diadakan oleh keluarga Kerajaan Landak dengan ditandai pelarungan ke sungai atau laut berbagai sesajian yang disebut *tumpang*. Sesajian itu berupa daging ayam kampung panggang, nasi pulut beraneka warna, dupa, kemenyan, dan lain sebagainya. Berbagai sajian itu harus sesuai dengan persyaratan atau tradisi ritual, umpamanya ayamnya adalah ayam kampung, bila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, masyarakat yakin akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Sebelum sesajian itu dilarung, dilakukan ziarah terlebih dahulu ke makam Raja Abdul Kahar.

VI. MELIAU

Kerajaan Meliau terletak di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Menurut legenda, raja pertama kerajaan ini adalah Raden Mancar, putra ketiga Brawijaya dari Kerajaan Majapahit. Semula ia berdiam di daerah Tanjungpura, tetapi karena daerah itu kerap terlibat pertempuran dengan kerajaan lain, ia lalu meninggalkannya untuk mencari daerah baru di pedalaman Kalimantan

---

153. Lihat *Adat Dalam Politik Indonesia*, halaman 165.
154. *Borneo's Wester-Afdeeling*, jilid 1, halaman 80.

dengan disertai saudara-saudaranya yang lain, seperti Gusti Likar. Raden Mancar lalu menetap di Meliau, sedangkan Gusti Likar berdiam di Tayan dan menjadi leluhur raja-raja Tayan. Untuk melindungi daerahnya dari serangan suku Dayak, Raden Mancar menggunakan jimat berupa tanah yang diambil dari tungku menanak nasi Raja Tanjungpura (Sukadana). Raja-raja yang pernah memerintah Meliau adalah Pangeran Prabu Anom, Pangeran Adimijaya, Pangeran Suma Ningrat, dan Pangeran Mangku Negara (?–1819).

Menjelang akhir abad 19 takhta Meliau diduduki oleh Pangeran Adipati Mangku Negara (1819–1866) yang mengundurkan diri pada 1866. Roda pemerintahan Meliau sementara waktu dijalankan oleh Pangeran Perdana Mantri (1866–1869). Saat itu, putra mahkota meninggalkan istana dan tidak diketahui keberadaannya. Ternyata belakangan ia ditemukan berada di Minahasa, Sulawesi Utara, dan telah menjadi pedagang serta menganut agama Kristen. Belanda membujuknya kembali ke Meliau guna dinobatkan sebagai panembahan atau raja baru. Putra mahkota menyetujui hal itu dan diangkat sebagai penguasa baru Meliau pada 1869 dengan gelar Panembahan Anum Paku Negara (1869–1885). Ia kembali memeluk agama Islam dan mendirikan istana yang indah. Ketika Panembahan Anum Paku Negara wafat pada 1885, putranya yang bernama Abdul Salam menjabat sebagai jaksa di Batavia. Ia diangkat menggantikan ayahnya dengan gelar Panembahan Ratu Muda Paku Negara (1885–1889). Namun, karena kurang puas dengan penghasilannya, pada 2 Agustus 1889, ia mengundurkan diri dan kembali ke Batavia. Abdul Salam meninggal pada 1897 tanpa meninggalkan keturunan.

Karena tidak ada lagi pewarisnya, Belanda memutuskan penggabungan Meliau dengan Tayan yang didasari oleh ketetapan pemerintah no.23, tertanggal 15 Januari 1890. Saat itu, yang memerintah Tayan adalah Gusti Muhammad Ali. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Raja Tayan berikutnya, kawasan Meliau diambil alih kembali oleh Belanda dan diperintah secara langsung.

VII. MEMPAWAH

a. Berdiri dan Berkembangnya Kerajaan Mempawah

Kerajaan Mempawah kini terletak di Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat. Mempawah sendiri merupakan ibu kota Kabupaten Pontianak dan namanya konon berasal dari nama pohon yang banyak tumbuh di kawasan tersebut. Menurut legenda,

pada kurang lebih abad 14 telah berdiri suatu kerajaan Dayak di Mempawah. Pusatnya dikatakan berada di Pegunungan Sidiniang, Sangkling, Mempawah Hulu. Rajanya bernama Patih Gumantar yang konon pernah mengundang Patih Gajah Mada dari Majapahit untuk berkunjung ke kerajaannya guna membahas rencana penyatuan Nusantara. Gajah Mada memenuhi undangan tersebut sepulangnya dari Siam dalam misi membendung serangan Mongol. Bukti lawatan Gajah Mada itu adalah keris Susuhan yang kini masih tersimpan di Istana Mempawah.

Kerajaan Mempawah boleh dianggap sebagai kerajaan yang jaya pada masa itu. Kenyataan ini menimbulkan iri hati kerajaan suku Biaju di Sungkung sehingga menyerang Mempawah. Patih Gumantar yang tekenal gagah berani berhasil dikalahkan oleh serangan mendadak musuh dan kepalanya dikayau atau dipenggal. Legenda mencatat bahwa Patih Gumantar memiliki tiga orang anak yang masing-masing bernama Patih Nyabakng, Patih Janakng, dan Putri Dara Hitam. Sepeninggal Patih Gumantar, Kerajaan Mempawah mengalami kemerosotan dan tidak terdengar lagi kabar beritanya. Ada pula sumber lain yang menyebutkan adanya seorang raja bernama Ne' Rumaga yang merupakan ayah Patih Gumantar dan berkedudukan di Bahana (kini terletak 22 km dari ibu kota Kecamatan Karangan).

Kurang lebih pada 1610, tampil pemimpin baru di Mempawah yang bernama Panembahan Kudong atau Kudung, yang disebut pula sebagai Panembahan Yang Tidak Berpusat. Ia dicatat telah memindahkan ibu kota Mempawah ke Pekana (Karangan). Setelah Raja Kudong mangkat pada 1680, takhta kerajaan beralih kepada Panembahan Senggauk. Ibu kota kerajaan kembali ke Senggauk, hulu Sungai Mempawah. Ia menikah dengan Putri Cermin dari Kerajaan Indragiri di Sumatera. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Ratu Mas Indrawati yang dinikahkan dengan Panembahan Muhammad Zainuddin dari Kerajaan Matan. Dari pasangan ini terlahir seorang putri cantik bernama Puteri Kusumba yang kelak menikah dengan Opu Daeng Manambun, cucu Raja La Madusalat dari Kerajaan Luwu di Sulawesi Tengah. Raja La Madusalat mempunyai tiga orang putra, yakni Pajung, Opu Daeng Biasa, dan Opu Daeng Rilekke. Opu Daeng Manambun merupakan salah seorang di antara lima putra Opu Daeng Rilekke[155]. Ketika terjadi perang saudara di Kerajaan Tanjungpura (Matan)

155. Saudara-saudaranya yang lain bernama Opu Daeng Merewah, yang diangkat sebagai raja muda Johor dengan gelar Yang Tuan Muda di Johor; Opu Daeng Perani, yang menikah dengan saudara Sultan Johor; Opu Daeng Celak, yang menikah dengan Tengku Sandak dari Riau; dan Opu Daeng Kemasi, yang menikah dengan adik Raja Adil.

akibat Sultan Muhammad Zainuddin dikudeta oleh saudaranya, Pangeran Agung, kelima saudara putra Opu Daeng Rilekke itu membantu sultan memperoleh kembali takhtanya. Sebagai balas budi atas jasa mereka, Opu Daeng Manambun dinikahkan dengan Puteri Kusumba.

Setelah bertahun-tahun menetap di Kerajaan Tanjungpura (Matan), Opu Daeng Manambun memutuskan memboyong keluarganya ke Mempawah. Ketika Panembahan Senggauk wafat pada 1740, Ompu Daeng Manambun naik takhta menggantikannya dengan gelar Pangeran Mas Surya Negara. Ia memindahkan pusat pemerintahannya ke Sebukit Rama yang berjarak 10 km dari kota Mempawah. Dengan demikian, Opu Daeng Manambun merupakan keturunan Bugis yang menjadi raja di Mempawah. Ia dikatakan memerintah dengan bijaksana dan Kesultanan Mempawah mulai berkembang. Agama Islam juga mengalami kemajuan semasa pemerintahannya. Pada saat itu pula, seorang ulama terkenal dari Arab yang tinggal Matan bernama Habib Husein Alkadrie pindah ke Mempawah. Opu Daeng Manambun menikahkan putrinya yang bernama Utin Candramidi dengan putra ulama itu, Syarif Abdurrahman Alkadrie (kelak menjadi sultan pertama Pontianak).

b. Turut Campurnya Belanda Dalam Pemerintahan Kesultanan

Setelah Opu Daeng Manambun wafat pada 1766, ia digantikan oleh putranya, Gusti Jamiril (1766–1790), yang menyandang gelar Panembahan Adiwijaya Kusuma Jaya. Ia merupakan pemimpin yang sangat anti terhadap Belanda, bahkan sampai mengatakan bahwa jenazahnya haram dimakamkan di tanah yang pernah diinjak Belanda. Dengan dibantu oleh dua orang putranya, Gusti Mas dan Gusti Jati, ia dengan gigih menentang Belanda. Kesultanan Mempawah mengalami masa kejayaannya semasa pemerintahan Panembahan Adiwijaya, walau mendapat rongrongan dari pihak Belanda. Karena kesal dengan tindak tanduknya, Belanda dengan dibantu pasukan Kerajaan Pontianak pernah memutuskan untuk menyerang Mempawah. Meskipun demikian, kekuatan dan siasat Panembahan Adiwijaya tetap lebih unggul dibanding Belanda. Menyadari kondisi yang berbahaya ini, Panembahan Adiwijaya memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah pedalaman yang disebut Malinsam dan dari sana tetap memimpin perlawanan terhadap Belanda. Ia bahu membahu dengan suku Dayak dalam menentang penjajahan Belanda. Satu persatu, Panembahan Adiwijaya dapat merebut kembali daerah-daerah kerajaan yang dikuasai Belanda. Setelah Belanda berhasil dipukul mundur dari pusat kerajaan, putra-putranya berniat

memindahkan pusat pemerintahan kerajaan ke Pantai Mempawah, tetapi Panembahan Adiwijaya lebih suka tetap mendiami ibu kota kerajaan yang lama daripada berpindah ke tempat yang pernah diduduki Belanda.

Ketika panembahan wafat pada 1790, Belanda memanfaatkan kesempatan ini melakukan intervensi terhadap pemerintahan Mempawah. Mereka mengangkat Pangeran Syarif Kasim Alkadrie dari Kesultanan Pontianak sebagai pengisi kekosongan kekuasaan di Mempawah, tetapi karena Syarif Kasim harus menggantikan posisi ayahnya sebagai sultan maka jabatan tersebut diserahkan pada adiknya, Syarif Husein. Pemimpin yang didudukkan Belanda ini tidak bertahan lama karena Gusti Jati beserta Gusti Mas dapat menggulingkannya. Gusti Jati dinobatkan sebagai sultan pada 1820 dengan gelar Sultan Muhammad Zainal Abidin. Sebagai pemimpin baru Mempawah, Gusti Jati banyak memusatkan perhatian pada perdagangan dan pertahanan kerajaannya. Sultan memindahkan kembali pusat pemerintahannya ke Pulau Pedalaman. Mempawah menjadi makin tersohor sebagai kerajaan yang kuat dan pusat perniagaan yang ramai. Sementara itu, Gusti Mas tetap membantu saudaranya dalam menjalankan roda pemerintahan Mempawah. Semasa kekuasaannya, Sultan Syarif Kasim dari Pontianak melancarkan serangannya sehingga memaksa Gusti Jati mengundurkan diri. Guna mengisi kekosongan di singgasana Mempawah ini, Belanda mengangkat Gusti Amin sebagai penguasa baru dengan gelar Panembahan Adinata Krama Umar Kamaruddin (1831–1839). Setelah Gusti Amin wafat, Belanda makin banyak campur tangan terhadap urusan pemerintahan Mempawah. Raja-raja berikutnya harus diangkat berdasarkan persetujuan Belanda, termasuk pengganti Gusti Amin bernama Gusti Mukmin yang bergelar Panembahan Mukmin (1839–1858). Ia setuju melakukan kerja sama dengan Belanda. Panembahan selanjutnya bernama Gusti Makhmud (1858) dan Gusti Usman (1858–1872). Tidak ada catatan mengenai peristiwa yang terjadi sewaktu pemerintahan panembahan-panembahan tersebut.

Semasa pemerintahan Panembahan Ibrahim Muhammad Syafiuddin (1872–1887), Belanda menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat Mempawah, misalnya yang berkenaan dengan pembayaran pajak. Sebagai akibatnya, meletuslah Perang Sangking. Panembahan Ibrahim mangkat pada 1887 dan seharusnya digantikan oleh putranya, Gusti Taufik Muhammad Accamuddin[156]. Namun, karena belum dewasa

---

156. Dalam buku *Peristiwa Mandor Berdarah*, namanya dieja Mohammad Taoefik Aqamaddin.

roda pemerintahan sementara dipegang oleh Gusti Intan yang bergelar Panembahan Anom Kesuma Yuda (1887–1902). Setelah putra mahkota dewasa, pada 1902 barulah takhta kerajaan diserahkan kepadanya. Panembahan Taufik Muhammad Accamuddin (1902–1944) menikah dengan Ratu Mutiara, putri Sultan Sambas, dan dikaruniai seorang putri bernama Utin Ketumbar dan putra bernama Pangeran Ukar; tetapi keduanya meninggal saat masih kecil. Sultan menikah lagi dengan Encek Kamariyah yang digelari Ratu Mas Sri Utama. Mereka memiliki empat orang putra yang masing-masing bernama Pangeran Mohammad (H. Jimmi Mohammad Ibrahim), Pangeran Faisal Taufik, Pangeran Taufikiah, dan Pangeran Abdullah.

c. Kerajaan Mempawah Selama Penjajahan Jepang

Pada kurun waktu 1941–1942, Jepang mulai bercokol di Kalimantan Barat menggantikan Belanda yang kalah perang. Jepang yang mengaku-aku sebagai "saudara tua" ternyata banyak melakukan kebengisan terhadap rakyat. Akibatnya, meletuslah perlawanan di mana-mana. Oleh karenanya, Jepang mencurigai para sultan dan pemuka masyarakat di Kalimantan Barat hendak menggerakkan pemberontakan melawan mereka. Itulah sebabnya, pada 1944 mereka melakukan penangkapan dan pembunuhan besar-besaran terhadap sejumlah sultan, pemuka masyarakat, dan orang kaya di kawasan Kalimantan Barat, tidak terkecuali Sultan Mempawah. Ternyata tuduhan Jepang ini belakangan tidak terbukti. Detik-detik penangkapan Sultan Mempawah dikisahkan sendiri oleh putra sultan bernama Pangeran Mohammad (juga dikenal sebagai H. Jimmi Mohammad Ibrahim) dalam buku karya Syafaruddin Usman dan Isnawita Din.[157]

Tatkala tragedi yang memilukan itu terjadi, Jimmi (panggilan Pangeran Mohammad) masih kelas IV SD. Semenjak zaman Belanda, ia bersekolah di Pontianak dan telah terbiasa indekos di rumah sahabat-sahabat ayahnya. Pada zaman Belanda ia indekos di rumah seorang Belanda, tetapi setelah Jepang menguasai Kalimantan Barat, ia pindah ke rumah Panangian Harahap. Jimmi ikut menyaksikan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai hendak melakukan pemberontakan terhadap Jepang di rumah indekosnya itu. Ia dibangunkan pada pukul 02.00 dini hari oleh seorang serdadu Jepang yang membawa senapan dan sangkur terhunus. Tampaknya, mereka saat itu sedang mengadakan penggeledahan. Seluruh penghuni rumah diperintahkan berkumpul di ruang tengah. Kemudian, salah seorang serdadu

157. Lihat *Peristiwa Mandor Berdarah*, halaman 95–97.

membacakan sebuah daftar dan menyebutkan nama Panangian Harahap dan Gusti Jafar Panembahan Tayan. Kedua orang itu langsung ditawan oleh Jepang. Kepala mereka ditutup dengan kain hitam dan tangan mereka diikat ke belakang. Mereka lalu digiring naik ke sebuah truk yang ditutup terpal.

Pagi-pagi sekali, Jimmi diminta oleh istri Panangian, Nurlela Panangian, ke sebuah rumah di Jalan Sikishima-dori (pada zaman Belanda disebut Palmenlaan atau Jalan Merdeka sekarang) untuk menemui ayahnya yang menginap di sana bersama para raja lainnya. Sebelumnya, memang Jepang telah mengundang para raja datang ke Pontianak guna menghadiri Konferensi *Nissinkai* (organisasi yang dibentuk Jepang). Namun, ini sesungguhnya hanya jebakan saja untuk menangkap mereka. Di sana, Jimmi mendapati ayahnya sedang makan bersama Sultan Muhammad Tsafiuddin dari Sambas. Begitu mendengar penuturan Jimmi, kedua sultan ini bergegas ke kantor *syuutizityo* (karesidenan). Baru menjelang magrib, ayahnya pulang sendirian sambil berjalan kaki dengan wajah yang letih. Ia menyatakan bahwa sultan Sambas dan raja lainnya telah ditangkap oleh Jepang.

Selang waktu dua bulan kemudian, dua orang serdadu Jepang mendatangi Istana Mempawah untuk menjemput sultan dengan mengendarai mobil sedan. Waktu itu panembahan sedang makan siang. Mereka menunjukkan sikap hormat dan mengizinkannya menyelesaikan santap siangnya. Menurut mereka, raja akan dibawa mereka menghadap *syutizi* (pejabat residen). Saat penangkapan tersebut, mata ayahnya tidak ditutup seperti tawanan lainnya dan bahkan ia masih diperbolehkan membawa koper. Serdadu itu membantu mengangkatkan kopernya ke dalam mobil. Itulah saat terakhir panembahan terlihat hidup. Setelah itu, Istana Amantubillah Kerajaan Mempawah dipasangi tulisan *warui hitto* oleh Jepang, yang artinya 'orang jahat.' Mereka mengisolasi istana itu dan tidak mengizinkan warganya menerima tamu. Menjelang jatuhnya Jepang pada sekitar Juli 1945, Jimmi dinobatkan sebagai panembahan baru guna mengisi kekosongan kekuasaan di Istana Mempawah. Saat upacara penobatannya, Jimmi diperintahkan membacakan naskah pidato yang telah dipersiapkan Jepang. Ternyata hal itu dilakukan karena Jepang menyadari bahwa kekalahannya sudah di ambang pintu. Hingga saat ini, tidak diketahui nasib panembahan yang ditawan Jepang tersebut.

Ketika Jepang menyerah kalah dan pasukan Sekutu mendarat di Kalimantan pada 1946, mereka berniat menobatkan Jimmi untuk kedua kalinya. Meskipun demikian,

Jimmi menolaknya dengan alasan masih ingin meneruskan sekolah. Oleh karenanya, Belanda mengangkat Gusti Musta'an sebagai wali hingga 1975. Sampai beranjak dewasa, Jimmi tetap tidak mau diangkat sebagai panembahan Mempawah. Ia lebih memilih melanjutkan studinya di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

d. Sosial Kemasyarakatan

Kerajaan Mempawah telah mengadakan hubungan dagang dan budaya dengan kerajaan-kerajaan lain di Kepulauan Nusantara. Pengaruh budaya dari luar yang paling kuat adalah Bugis karena raja pertama Mempawah, Opu Daeng Manambun, berasal dari keturunan Bugis. Hingga saat ini, ia masih dikenang dalam perayaan yang disebut Robo-robo. Upacara adat ini dilangsungkan setiap tahun sekali, atau tepatnya pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Dipilihnya bulan Safar karena masyarakat yakin bahwa pada bulan tersebut banyak terjadi malapetaka bagi umat manusia. Karenanya, perayaan ini dimaksudkan pula untuk memohon keselamatan atau tolak bala. Upacara dilangsungkan di berbagai tempat, seperti makam Opu Daeng Manambun di Sebukit Minyak makam para penguasa Mempawah selanjutnya di Pulau Pedalaman, tempat yang pertama kali disinggahi Opu Daeng Manambun, jalan-jalan kecil di Mempawah, serta di sepanjang tepian Sungai atau Kuala Mempawah. Dengan demikian, perayaan adat ini terdiri dari tiga aspek, yakni ziarah yang mengunjungi makam Opu Daeng Manambun serta raja-raja Mempawah, kenduri guna memohon keselamatan, dan hiburan berupa lomba sampan di sungai-sungai. Kini, upacara ini bermakna kebersamaan dan dirayakan oleh berbagai suku yang berdiam di Mempawah, termasuk Melayu, Bugis, Jawa, Tionghoa, dan lain sebagainya.

VIII. PIASA

Menurut legenda, pendiri Kerajaan Piasa adalah bangsawan keturunan putri Majapahit yang bernama Raden Jaka Lemana. Sementara itu, ada sumber lain yang meriwayatkan bahwa Raden Jaka Lemana ini berasal dari Labai Lawai. Selanjutnya, penguasa Piasa pertama yang menganut agama Islam adalah Kiai Adipati Merenggang[158]. Penguasa Piasa pertama yang menandatangani kontrak politik dengan Belanda pada 1823 adalah Abang Suwara, yang bergelar Kiyai Dipati Martapura. Penandatanganan ini terjadi bersamaan dengan ekspedisi Hartmann. Putra sulungnya,

---

158. Lihat *Peta Tematik Kebudayaan dan Sejarah Pemerintahan Kalimantan Barat*, halaman 134.

Abang Nuh, menggantikannya pada 1859 dengan gelar Osman (Usman) Dirja Kesuma Negara (1859–1896).

Guna memperkuat jalinan persaudaraan dengan kerajaan-kerajaan lainnya, Abang Nuh menikahi Ratu Cu beserta Dayang Galuh, yang berasal dari Selimbau, dan Meramun dari daerah Embau[159]. Pernikahan dengan Meramun ini membuahkan seorang putra bernama Abang Santuk. Ketika Abang Nuh mangkat, Belanda mengangkat Abang Santuk sebagai penggantinya, padahal yang lebih berhak adalah Abang Bijak (cucu Abang Nuh). Belanda kurang memercayai Abang Bijak karena ia adalah putra Abang Tella, penguasa Bunut yang diasingkan karena dianggap anti-Belanda. Kendati demikian karena menolak menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial, Abang Santuk yang bergelar Raden Pati Kusuma Negara, diasingkan ke Johor, Malaysia, pada 1917. Dengan demikian, berakhirlah Kerajaan Piasa, yang selanjutnya berubah menjadi kademangan.

Menurut penuturan Veth, Kerajaan Piasa terdiri dari 10 *huizen* (rumah) dengan 180 penduduk. Selanjutnya, disebutkan bahwa penguasanya yang bergelar Kiai tak mempunyai daerah kekuasaan yang sesungguhnya (*deze Vorst heeft voor het overige geen eigenlijk gebied*)[160]. Penduduknya hidup dari perladangan yang berpindah-pindah, terkadang di sebelah utara Kapuas dan pada kesempatan lain di sebelah selatannya (*de bevolking legt hare tijdelijke ladangs, nu benoorden, dan bezuiden de Kapoeas*).[161]

IX. PONTIANAK

a. Cikal Bakal Kesultanan Pontianak

Kesultanan Pontianak juga disebut sebagai Kesultanan Kadriyah, yang berasal dari nama pendirinya, Syarif Abdurrahman Alkadrie. Leluhur sultan-sultan Pontianak adalah seorang ulama asal Hadramaut bernama Habib Husein Alkadri. Ia dilahirkan di sebuah kota kecil bernama Trim pada kurang lebih 1706. Sejak kecil, Habib Husein telah dididik orang tuanya mempelajari agama Islam. Tatkala menginjak usia 18 tahun, ia melanjutkan pelajarannya di Kulandi kepada seorang guru bernama Syekh Sayid Muhammad bin Hamid. Selain mempelajari agama, Habib Husein kerap turut berlayar bersama para pedagang hingga ke Kalkuta di pantai barat India. Lambat laut

159. Lihat *Buku Panduan KKL IV: Kota Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Sejarah Kerajaan di Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat*, halaman 103.
160. *Borneo's Wester Afdeeling*, halaman 54
161. Ibid. Halaman 54.

timbul keinginannya bersama tiga orang sahabatnya–Sayid Abubakar Alaydrus, Sayid Umar Bachsan Assegaf, dan Sayid Muhammad Ibnu Ahmad Quraisy–berlayar lebih jauh ke timur karena mendengar bahwa di Kepulauan Nusantara banyak terdapat kerajaan-kerajaan Islam.

Niat menyebarkan dan mengajarkan agama Islam ini disampaikan kepada guru beserta orang tua mereka. Setelah mendapat restu mereka, keempat sahabat ini berlayar ke Kepulauan Nusantara. Tempat pertama yang diinjak oleh rombongan dari Hadramaut adalah Aceh. Setelah berdiam di sana selama setahun, diputuskan bahwa Sayid Abubakar Alaydrus akan tetap tinggal di Aceh. Sebagai guru agama ia sangat disenangi oleh masyarakat sehingga digelari Tuan Besar Aceh.[162] Sayid Umar Bachsan Assegaf meneruskan perjalanannya hingga ke Siak dan menetap di sana. Ia tersohor sebagai ulama besar dan digelari Tuan Besar Siak. Sayid Muhammad Ibnu Ahmad Quraisy berkelana di Semenanjung Malaka dan akhirnya tinggal di Marang, Trengganu. Ia diangkat sebagai pemuka agama dan digelari Datuk Marang, pemuka agama Negeri Trengganu.

Habib Husein sendiri teringat pesan gurunya yang menganjurkannya mencari daerah subur dan dipenuhi pepohonan. Ia lantas meninggalkan Aceh dan berlayar ke Batavia. Selama tujuh tahun ia bermukim di Batavia, tetapi hatinya belum mantap karena kota tersebut telah berada di tangan Belanda. Ia pindah ke Semarang dan menetap di sana. Ternyata di kota tersebut ia banyak berjumpa dengan sesama pedagang dan penyebar agama Islam asal Arab. Salah seorang di antara mereka adalah Syekh Salam Hambal. Habib Husein lantas tinggal bersamanya. Syekh Salam Hambal merupakan pedagang besar yang telah sering berniaga ke Matan, Kalimantan. Suatu ketika, Habib Husein menyaksikan Syekh Salam Hambal yang hingga malam hari masih bekerja memperbaiki bagian dasar perahunya dari dalam sungai berlumpur di muara Kali Terboyo. Peristiwa ini membuka hati Habib Husein mengenai beratnya hidup di dunia.

Bersama dengan Syekh Salam Hambal, Habib Husein berlayar ke Matan. Selain berdagang mereka membuka pusat pengajaran agama Islam. Saat itu, yang menjabat sebagai pemimpin peradilan agama di Matan adalah seorang ulama asal Arab bernama Sayid Hasyim Yahya. Ia juga dikenal sebagai Tuan Janggut Merah karena mengecat janggutnya yang telah memutih dengan pacar merah. Sayid Hasyim Yahya merupakan

162. Lihat *Syarif Abdurrahman Alkadri: Perspektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak*, halaman 16.

seorang ulama yang keras. Ke mana-mana ia selalu membawa tongkat besi dan menghancurkan patung ataupun gambar di rumah beserta perahu milik penduduk yang dianggapnya sebagai berhala. Tindakan ini justru menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Suatu ketika, Syekh Salam Hambal bersama Habib Husein diundang menghadiri perjamuan oleh Sultan Muhammad Muazzuddin dari Kerajaan Matan. Pada kesempatan tersebut hadir pula Sayid Hasyim Yahya. Sebagai pembukaan diedarkanlah sirih dan pinang. Kacip (gunting tajam sebelah dan sendinya ada di ujung) yang dipergunakan membelah pinang berasal dari Bali dan ada hiasan ukiran kepala ular. Menyaksikan ukiran seperti itu, Sayid Hasyim Yahya menjadi marah dan menganggapnya bertentangan dengan ajaran agama. Diambilnya kacip itu dan dipatahkan serta ditumbuknya hingga hancur dengan tongkat besi. Sultan sebenarnya merasa kurang enak dengan kejadian itu, tetapi ia tidak menegurnya karena Sayid Hasyim Yahya adalah hakim agama Kerajaan Matan.

Di luar dugaan, Habib Husein memungut kacip yang telah remuk. Ia menatanya kembali, membaca doa, dan mengusapi dengan air liurnya. Ajaibnya, kacip tersebut utuh kembali. Hadirin merasa kagum karena dengan pertolongan Allah, Habib Husein berhasil memperbaiki kacip yang dianggap syirik oleh Sayid Hasyim. Sultan Matan bersimpati kepada Habib Husein dan mengangkatnya sebagai salah seorang pemuka agama di kalangan istana. Hal ini memantapkan Habib Husein berdiam di Matan. Sultan bahkan menganugerahkan jabatan *qadhi* (hakim) Pengadilan Agama Matan kepadanya.

Habib Husein menikah dengan Nyai Tua, salah seorang putri Matan. Pernikahan ini membuahkan dua orang putra dan dua orang putri, yakni Syarifah Khadijah (putri), Syarif Abdurrahman (putra), Syarifah Mariyah (putri), dan Syarif Alwie (putra). Kemashyuran Habib Husein tersebar hingga ke Kerajaan Mempawah sehingga Opu Daeng Manambun bermaksud mengundang Habib Husein. Namun, undangan ini belum bersedia dipenuhi oleh Habib Husein hingga 17 tahun kemudian.

Kepindahan Habib Husein ke Mempawah dipicu oleh ketidakcocokannya dengan Sultan Matan. Setelah mengabdi selama 17 tahun, datanglah kapal yang dinakhodai oleh seorang bernama Ahmad asal Siantan (Riau). Ia melakukan kesalahan dengan mengganggu seorang wanita istana. Sultan Muhammad Muazzuddin sangat marah dan ingin membunuhnya. Perkara ini dilimpahkan kepada Habib Husein dan

sultan tentunya berharap agar nakhoda itu dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi, Habib Husein justru membebaskannya dari hukuman mati dan menyarankannya bertobat, meminta ampun kepada sultan, serta membayar sejumlah denda. Nakhoda Ahmad lantas menjumpai sultan dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Sultan berpura-pura menerimanya dan menitahkan dua buah perahu mengiringi kepulangan Ahmad ke kampung halamannya. Setibanya di muara sungai, para pengawal kerajaan tiba-tiba menyerang dan membunuh nakhoda Ahmad beserta seluruh anak buahnya. Barang-barang dagangan miliknya dirampas dan dibawa ke Muara Kayong.

Peristiwa ini mengecewakan Habib Husein yang menganggap bahwa sultan tak lagi menghormati keputusannya. Habib Husein teringat akan undangan Opu Daeng Manambun dan berniat pindah ke Mempawah. Tanpa pikir panjang, Habib Husein menulis surat pada Opu Daeng Manambun yang menyatakan kesediaannya bermukim di Mempawah. Apabila Opu Daeng Manambun berkenan, ia minta dibuatkan sebuah rumah dan langgar di aliran kuala Mempawah. Opu Daeng Manambun sangat gembira menerima surat Habib Husein. Ia memerintahkan agar putra keduanya bernama Gusti Haji Jaladri (Pangeran Mangku) menjemput Habib Husein dengan membawa dua perahu besar. Ternyata Sultan Matan juga merestui kepergian Habib Husein ini.

Kedatangan Habib Husein ke Mempawah ini terjadi pada sekitar 1755. Dua tahun kemudian, Opu Daeng Manambun menikahkan putrinya, Utin Candramidi, dengan Syarif Abdurrahman Alkadrie, putra Habib Husein.[163] Tempat pemukiman yang didiami oleh Habib Husein menjadi bertambah ramai dan menarik banyak pendatang. Karena makin banyak perahu yang ditarik galah bambu tertambat di dekat langgar Habib Husein, tempat itu kemudian dinamai Galah Herang. Enam belas tahun lamanya, Habib Husein berdiam di Mempawah. Sebagai penghormatan, ia digelari Tuan Besar Mempawah. Ia wafat pada 1770 pukul 2 siang dalam usia 64 tahun.

b. Berdiri dan Berkembangnya Kesultanan Pontianak

Kesultanan ini diawali ketika Syarif Abdurrahman Alkadrie beserta saudara-saudaranya mengikuti pesan ayahnya mencari tempat kediaman baru. Setelah ayahnya wafat pada 1770, dengan menggunakan 14 perahu, Syarif beserta saudara dan para pengikutnya menyusuri Sungai Peniti hingga tiba di sebuah tanjung bernama Kelapa Tinggi Segendong. Beberapa waktu mereka tinggal di sana, tetapi Syarif kemudian

163. Syarif Abdurrahman Alkadrie menikah pula dengan putri Banjar bernama Syarifah Anum (Syahranum atau Syaribanon).

merasa bahwa tempat itu kurang cocok didiami. Oleh karena itu, mereka melanjutkan perjalanannya kembali ke hulu sungai dengan melayari Sungai Kapuas Kecil. Di tengah jalan, mereka menemukan sebuah pulau kecil yang bernama Batu Layang. Dikisahkan bahwa rombongan diganggu hantu-hantu yang mendiami pulau tersebut sehingga Syarif memerintahkan para pengikutnya untuk mengusir para makhluk halus itu. Setelah singgah sejenak di sana, rombongan melanjutkan kembali perjalanannya. Ada sumber yang mengatakan bahwa apa yang dimaksud makhluk-makhluk halus itu sesungguhnya adalah para perompak yang menjadikan kawasan itu sebagai sarangnya.

Pada 23 Oktober 1771, mereka tiba di daerah pertemuan antara Sungai Kapuas dan Landak. Rombongan memutuskan untuk menetap dan mendarat di sana. Mereka lalu menebang pepohonan yang berada di kawasan tersebut guna membangun tempat kediaman, masjid, dan istana. Inilah cikal bakal kota Pontianak. Pendaratan rombongan Syarif Abdurrahman Alkadrie di atas kini diperingati sebagai hari jadi kota Pontianak (23 Oktober 1771). Selama delapan tahun (1771–1778) Syarif Abdurrahman membangun Pontianak.

Syarif Abdurrahman Alkadrie akhirnya dinobatkan sebagai Sultan Pontianak yang pertama dengan gelar Syarif Abdurrahman Ibnu Al Habib Alkadrie (1778–1808) pada 1778. Penobatan itu dihadiri pula oleh raja-raja Riau, Mempawah, Landak, Kubu, dan Matan. Pada 1778, terjadi konflik dengan Sanggau karena rajanya tidak mengizinkan Armada Syarif Abdurrahman melewati wilayahnya. Dengan dibantu oleh Raja Haji, putra Opu Daeng Celak–saudara Opu Daeng Manambun, pasukan Syarif Abdurrahman berhasil menduduki Sanggau. Bahkan dalam perjanjian 5 Juli 1779, VOC menyebut Pontianak dan Sanggau sebagai satu kerajaan.[164]

Berdirinya Kesultanan Pontianak tidak menyenangkan Kerajaan Landak karena menganggap bahwa wilayah yang ditempati oleh kerajaan baru itu merupakan daerah kekuasaannya. Negosiasi antara Pontianak dan Landak tak kunjung membuahkan hasil. Karenanya, Panembahan Landak lantas membawa kasus ini kepada Sultan Banten karena dahulu Banten pernah mengklaim Landak dan Sukadana sebagai wilayahnya. Belanda melihat pertikaian antara Landak dan Sukadana ini sebagai kesempatan memperluas pengaruhnya. Pada akhir 1778, Belanda mengutus Nicholas de Cloek ke Pontianak, tetapi tidak berhasil menjumpai Sultan Pontianak karena ia sedang berlayar ke Batavia guna menjumpai Gubernur Jenderal VOC.

164. Lihat *Perspektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak*, halaman 16.

Kerabat Kesultanan Pontianak menyambut baik kehadiran de Cloek. Mereka mengirim para dayang untuk membawakan sirih dan hadiah lainnya ke kapal utusan VOC tersebut. Namun, de Cloek salah sangka dan mengira bahwa pihak Pontianak hendak menyuapnya. Ia menolak segenap pemberian itu. Belakangan, Sultan Syarif Abdurrahman menjelaskan bahwa memang demikianlah adat istiadat menyambut tamu di negerinya. De Cloek lantas menempatkan pasukannya di seberang istana, yakni di tepi Sungai Kapuas. Kendati demikian, penempatan ini dilakukan tanpa meminta izin kepada Sultan Pontianak terlebih dahulu.

Di lain pihak, sultan mengutus putranya, Syarif Kasim, mengirim hadiah berupa berlian kepada Gubernur Jenderal VOC. Hal ini sebenarnya merupakan bagian strategi yang diterapkan Sultan Syarif Abdurrahman agar VOC tidak bercokol di Pontianak. Sultan sama sekali tak menginginkan de Cloek terlalu banyak berperan di negerinya. Pada 26 Desember 1778, VOC mengakui sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Pontianak dan Sanggau. VOC merasa berhak memberikan pengakuan ini karena berdasarkan perjanjian pada 26 Maret 1778, Sultan Banten telah menyerahkan kawasan Landak (termasuk Pontianak) dan Sukadana kepada VOC. Dengan demikian, tamatlah kekuasaan Banten di sana. De Cloek kemudian dipanggil pulang dan dianggap gagal dalam misinya.

VOC ingin mendirikan kantor perwakilan dagang di Pontianak dan mengutus Willem Adriaan Palm ke sana pada awal Juli 1779. Sebuah perjanjian akhirnya ditandatangani Palm dan Sultan Pontianak pada 5 Juli 1779. Isinya menyatakan bahwa Belanda meminjamkan kawasan Pontianak dan Sanggau kepada Sultan Pontianak. Peristiwa ini merupakan benih berkuasanya Belanda di Pontianak. Setelah itu, Palm meneruskan perjalanannya ke Ngabang, ibu kota Kerajaan Landak. Ia menjelaskan perihal perjanjian yang telah dilangsungkan dengan Sultan Pontianak kepada Pangeran Sanca Natakusuma dari Landak. Raja Landak sesungguhnya tidak dapat menerima penyerahan sebagian wilayahnya kepada Pontianak, ia merasa bahwa kawasan tersebut masih berada di bawah kekuasaannya. Sebaliknya, VOC yang menerima penyerahan Landak dan Sukadana dari Banten menganggap sah-sah saja perjanjian di atas. Pertikaian antara Landak dan Pontianak masalah perbatasan baru terselesaikan pada 3 Agustus 1886.

Langkah Belanda selanjutnya dalam menguasai Pontianak dituangkan dalam wujud monopoli perdagangan. Pontianak wajib menyerahkan segenap komoditas

yang dikehendaki Belanda. Penanaman hasil bumi diawasi dengan ketat. Pajak ekspor dan impor harus dibagi dua antara VOC dan Kesultanan Pontianak. Selain itu, sultan mengizinkan VOC mendirikan benteng di sebelah barat Sungai Kapuas.

Sultan Syarif Abdurrahman menyerang dan menaklukkan Mempawah. Ia lantas mendudukkan putranya, Syarif Kasim sebagai Panembahan Mempawah pada 1787. Sementara itu, Gusti Jamiril, Raja Mempawah terpaksa melarikan diri ke Karangan. Dengan demikian, Pontianak kini berkuasa pula atas Mempawah. Sebenarnya, Sultan Syarif Abdurrahman ingin menguasai Landak pula. Namun, dihalangi oleh Belanda yang juga ingin menanamkan kekuasaannya di daerah penghasil intan itu. Pendiri Kesultanan Pontianak, Syarif Abdurrahman, mangkat pada 18 Februari 1808 dan dimakamkan di Batu Layang.

Atas persetujuan pemerintah kolonial Belanda, putra Syarif Abdurrahman yang bernama Syarif Kasim Alkadrie (1808–1819) dinobatkan sebagai Sultan Pontianak kedua. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Raja atau Panembahan Mempawah. Pada saat itu, Syarif Kasim menjalin hubungan langsung dengan pemerintah kolonial Belanda dan menandatangani kontrak politik tertanggal 27 Agustus 1787. Penandatanganan ini dilangsungkan saat ayahnya yang menjabat sebagai sultan Pontianak masih hidup. Sultan Syarif Abdurrahman tidak senang dengan perjanjian tersebut, tetapi sebenarnya ini strategi Belanda dalam menerapkan strategi pecah belah antara sultan dengan putranya.

Akibatnya, Sultan Syarif Abdurrahman tidak sudi menerima kehadiran putranya di Pontianak. Sultan lantas menunjuk putranya yang lain, Syarif Usman Alkadrie, sebagai calon penggantinya. Saat sultan mangkat pada 1808, Syarif Kasim pulang ke Pontianak agar dapat memberikan penghormatan terakhir pada ayahnya. Syarif Usman yang merasa masih terlalu muda usianya mengalah kepada kakaknya dan bersedia menyerahkan kedudukan sultan kepada Syarif Kasim. Sebenarnya, kaum bangsawan dan rakyat Pontianak lebih menyukai Syarif Usman. Demi menarik simpati mereka, Syarif Kasim berjanji bahwa ia akan menduduki singgasana selama sepuluh tahun saja dan melunasi segenap utang orang tuanya.

Demikianlah, pada 12 Maret 1808, Sultan Syarif Kasim Alkadrie melapor kepada gubernur jenderal di Batavia bahwa ia menjadi sultan Pontianak menggantikan ayahnya. Ternyata sultan Pontianak kedua ini merupakan pribadi yang kurang populer karena buruk perangainya. Ia ingkar janji dan tidak berhasil melunasi utang orang

tuanya. Bahkan ia malah menambah utang-utang baru dengan pedagang Inggris dan Cina. Tak jarang pula sultan secara licik menghabisi nyawa musuh-musuhnya. Sultan Syarif Kasim banyak menjual barang-barang dan perabotan istana sehingga sultan berikutnya terpaksa membeli berbagai perlengkapan guna mengisi keratonnya. Perilaku sultan yang sewenang-wenang membangkitkan ketidaksenangan di kalangan kerabat Kesultanan Pontianak. Tatkala sultan mengunjungi kerabatnya di Surabaya, ia dihadiahi sebuah cermin, suatu perlambang agar sultan bersedia berkaca demi memperbaiki kelakuannya.

Kekuasaan atas Kepulauan Nusantara sementara waktu beralih ke tangan Inggris (1811–1816). Sultan Syarif Kasim menjalin hubungan yang harmonis dengan Inggris. Ketika Inggris hengkang dari Indonesia, Belanda menempatkan pasukan di Pontianak pada 1818 atas permintaan Syarif Kasim. Peristiwa ini menandai kembalinya kekuasaan Belanda. Pemerintah kolonial menyodorkan perjanjian kepada Sultan Syarif Kasim Alkadrie yang ditandatangani pada 12 Januari 1819. Pokok isinya adalah sebagai berikut.[165]

- Kekuasaan atas Kesultanan Pontianak akan dijalankan oleh sultan beserta pemerintah kolonial Belanda.
- Pemerintah kolonial akan melindungi sultan.
- Pajak ekspor-impor, penjualan candu, dan monopoli garam akan diatur oleh pemerintah kolonial.
- Peradilan terhadap orang-orang Eropa dan Cina merupakan wewenang Belanda, sedangkan peradilan orang-orang pribumi tetap merupakan wewenang sultan.
- Belanda akan membangun markasnya di Pontianak.

Tidak semua kerabat kesultanan setuju dengan perjanjian-perjanjian yang diikat sultan dengan pemerintah kolonial. Oleh karenanya, sebagian pihak yang tidak setuju lalu memilih meninggalkan istana dan membangun perkampungannya sendiri. Tempat pemukiman mereka selanjutnya dikenal sebagai Kampung Luar. Sultan Syarif Kasim Alkadrie mangkat pada 25 Februari 1819.

Saudaranya, Syarif Usman Alkadrie (1819–1855) menjadi sultan Pontianak menggantikannya. Belanda mengadakan perjanjian dengan sultan pada 16 Maret 1822. Salah satu istinya adalah sultan tidak memperoleh lagi pembagian hasil dari

165. Lihat *Syarif Abdurrahman Alkadri: Perspektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak*, halaman 112.

pemerintah Belanda dan sebagai gantinya akan memperoleh tunjangan sebesar 42.000 Gulden per tahunnya. Pada perjanjian tertanggal 14 Oktober 1823, peradilan yang berada di bawah wewenang Belanda diperluas kepada orang-orang pribumi. Sultan Syarif Usman dikenal sebagai perintis pembangunan Masjid Jamik yang pendiriannya diawali pada 1812. Sultan ketiga Pontianak ini merupakan pelopor pembangunan istana kesultanan yang lebih besar. Tiang bendera di depan istana yang didirikannya masih berdiri kokoh hingga sekarang. Sultan menulis surat kepada Gubernur Jenderal van der Cappellen tertanggal 27 Mei 1823 yang mengabarkan bahwa ia telah menerima 20 pucuk senjata serta harta bendanya yang tertinggal di Semarang.[166] Pada 1855, sultan mengundurkan dirinya dan digantikan oleh putra tertuanya, Syarif Hamid Alkadrie (1855–1872), ia sendiri wafat lima tahun kemudian (1860).

Syarif Hamid Alkadrie selaku Sultan Pontianak keempat menand-tangani perjanjian pada 1856. Isinya tidak begitu berbeda dengan perjanjian-perjanjian sebelumnya. Salah satu perubahan adalah besaran tunjangan bagi sultan yang dinaikkan menjadi 50.400 Gulden. Sementara itu, keluarga Sultan Syarif Kasim dan Syarif Usman akan mendapatkan tunjangan 6.000 Gulden per tahunnya. Semenjak saat itu, wewenang peradilan di lingkungan Kesultanan Pontianak diserahkan kepada Residen Belanda. Berdasarkan surat keputusan Residen Borneo Barat pada 4 Januari 1857, Belanda memasukkan distrik Cina di Mandor ke dalam wilayah Kesultanan Pontianak, sebagai imbalan sikap netral sultan saat berlangsungnya Perang Kongsi. Sultan Syarif Hamid wafat pada 22 Agustus 1872.

Putra tertuanya, Syarif Yusuf Alkadrie (1872–1895) tampil sebagai sultan Pontianak berikutnya. Semasa pemerintahannya datang seorang ulama dari Singapura bernama Sayed Muhammad Saleh, ia menyebarkan ajaran Islam yang fanatik dan menganggap dirinya sebagai orang suci[167] sehingga meresahkan masyarakat. Oleh karenanya, pihak kesultanan dan pemerintah kolonial Belanda mengembalikannya ke Singapura. Berdasarkan perjanjian pada 22 Agustus 1872, kekuasaan kepolisian di luar daerah yurisdiksi pemerintah kolonial Belanda akan diserahkan kepada Kesultanan Pontianak. Orang-orang Bugis Banjar, Bangka, dan Belitung banyak bermigrasi ke Pontianak semasa pemerintahan Sultan Syarif Yusuf Alkadrie, mereka juga membangun perkampungannya masing-masing. Peristiwa penting lainnya adalah diselesaikannya

166. Lihat *Iluminasi dalam Surat-surat Melayu Abad ke-18 dan ke-19*, halaman 111.
167. Lihat *Syarif Abdurrahman Alkadri: Perspektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak*, halaman 125.

sengketa perbatasan antara Pontianak dan Landak yang dituangkan dalam perjanjian pada 3 Agustus 1886.

Sepeninggal Syarif Yusuf Alkadrie, Sultan Syarif Muhammad Alkadrie (1895–1944) mewarisi singgasana Pontianak dari ayahnya. Wewenang kekuasaan Sultan Pontianak makin diperkecil Belanda berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 26 Maret 1912[168] yang berbunyi

- Pegawai kesultanan ditentukan oleh pemerintah kolonial Belanda.
- Hukum pidana dan perdata Belanda ditetapkan di lingkungan kesultanan (dihapuskannya Hukum Islam).
- Seluruh pegawai kesultanan akan digaji oleh Belanda.

Berdasarkan ketetapan di atas, Kesultanan Pontianak tidak diperkenankan lagi mengangkat atau memberhentikan pegawainya tanpa persetujuan pemerintah kolonial. Meskipun peran kesultanan makin kecil, sektor pendidikan semakin berkembang pesat di Pontianak. Berbagai institusi pendidikan baik di bawah pembinaan organisasi Islam, misi Katolik, atau zending Protestan mulai bermunculan di Pontianak. Sultan Syarif Muhammad sendiri mendirikan Perguruan Alkadriah, suatu lembaga pendidikan Islam bagi keluarga kesultanan. Selain itu, ia turut mendorong pendirian sekolah-sekolah demi mencerdaskan rakyatnya, juga dalam kegiatan kepanduan peran sultan tidaklah kecil.

Syarif Muhammad merupakan penguasa Pontianak pertama yang mengenakan pakaian kebesaran model Eropa sebagai seragam resminya, selain busana ala Melayu. Kerabat kesultanan lainnya juga mengenakan seragam yang sama. Kemajuan dalam bidang perekonomian dan perdagangan dialami Pontianak semasa pemerintahan Sultan Syarif Muhammad. Para petani Melayu dan Tionghoa berhasil memajukan perkebunan karet sebagai salah satu komoditas ekspor. Sementara itu, orang-orang Bugis tidak mau ketinggalan membuka perkebunan kelapa di daerah Sungai Kakap, Sungai Rengas, Jungkat, dan Peniti.

Organisasi politik berkembang pula di Pontianak dan anggota keluarga Kesultanan Pontianak tanpa terkecuali turut berkiprah di dalamnya. Berbagai organisasi pergerakan nasional masa itu adalah Parindra (Partai Indonesia Raya), Muhammadiyah, dan PAB (Persatuan Anak Borneo). Beberapa kerabat kesultanan

---

168. Lihat *Syarif Abdurrahman Alkadri: Perspektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak*, halaman 138.

merupakan penentang Belanda yang gigih. Pangeran Bendahara Syarif Jakfar–paman Sultan Syarif Muhammad–dengan berani memprotes *belasting* (penerapan pajak) yang sangat membebani rakyat pada 1912. Karena bersikeras menolak membayar pajak, pemerintah kolonial mengusir Pangeran Bendahara Syarif Jakfar dari Pontianak. Ia akhirnya memutuskan pindah ke Mekkah. Kepergiaannya beserta anggota keluarganya diiringi oleh masyarakat Pontianak yang bersimpati terhadap perjuangannya.

Kerabat lainnya, Pangeran Adipati Syarif Husein tidak kalah beraninya. Ia bahkan pernah memukul pemungut *belasting* dengan tongkatnya. Pangeran Adipati tak ketinggalan berpartisipasi dalam organisasi pergerakan nasional dan menjadi salah satu pengurus PAB. Belanda berniat melemahkan Parindra dengan memberikan bantuan kepada PAB, tetapi Parindra menyusupkan anggotanya ke dalam PAB sehingga niat Belanda tersebut gagal. PAB malah menjadi salah satu wadah perjuangan nasional. Suatu ketika, Parindra mengadakan rapat tertutup di gedung bioskop Excelent. Sebagai wujud simpatinya terhadap pergerakan nasional, Pangeran Adipati bersama 30 kerabat kesultanan lainnya menghadiri pertemuan tersebut.

Sultan Syarif Muhammad kerap mengadakan kunjungan ke berbagai daerah di lingkungan Hindia Belanda. Pada 1930, ia mengunjungi Istana Mangkunegaran di Solo. Saat ulang tahun Ratu Wilhemina pada 31 Januari 1938, Sultan Syarif Muhammad diundang ke Negeri Belanda. Tidak lama kemudian pecah Perang Dunia II dan Jepang yang berambisi menjadi penguasa Asia melakukan ekspansi militernya. Mendung kini membayangi Asia, termasuk Kepulauan Nusantara. Tamatnya kekuasaan pemerintah kolonial Belanda kini tinggal menghitung hari saja.

c. Kesultanan Pontianak Selama Penjajahan Jepang

Penjajahan Jepang membawa penderitaan bagi rakyat Pontianak. Penyerbuan Jepang ke Pontianak diawali pada 19 Desember 1941, sekitar pukul 11.00 siang. Pesawat tempur Jepang menjatuhkan bom secara brutal sehingga banyak warga sipil yang tewas. Tujuan pengeboman ini sebenarnya adalah tangsi (asrama) militer Belanda yang ada di Kampung Bali, tetapi tetap saja banyak penduduk yang menjadi korban. Pengeboman terus dilanjutkan pada 22 dan 27 Desember 1941 sehingga Kampung Bali, Parit Besar, dan bagian Pontianak lainnya rata dengan tanah. Tidak sedikit pula kapal-kapal yang menjadi sarana transportasi saat itu ditenggelamkan. Pesawat tempur yang melakukan misi penyerangan terhadap Pontianak ini jumlahnya ada sembilan dan

berpangkalan di Davao, Mindanao Selatan–yang telah ditinggalkan pasukan Amerika. Itulah sebabnya kejadian ini disebut Peristiwa Kapal Terbang Sembilan.

Setelah diluluhlantakkan oleh bom, armada Jepang baru mendarat di Pontianak pada 22 Januari 1942 dengan kekuatan berjumlah 3.000 orang. Para anggota *kaigun* (Angkatan Laut Jepang) itu merupakan bagian satuan tempur Pasukan ke-29 yang sebelumnya telah menguasai Sarawak. Pendaratan itu tidak mengalami perlawanan berarti karena pasukan Belanda (KNIL) telah hancur lebur. Belanda tidak mempunyai pilihan selain mengundurkan pasukannya, kendati sempat bertahan sebentar di Gunung Pendering, 45 km sebelah timur Singkawang. Sambil melakukan pengunduran diri, angkatan perang Belanda menghanguskan kota-kota yang ditinggalkannya yang justru menambah penderitaan rakyat.

Jepang membagi dua pasukannya setelah menguasai Pemangkat dan Singkawang, yakni ke arah selatan dan timur. Pasukan yang bergerak ke selatan bergabung dengan pasukan yang telah mendarat terlebih dahulu di muara Sungai Kapuas. Mereka kemudian berupaya merebut Pontianak. Sementara yang bergerak ke arah timur ditugaskan merebut pangkalan udara Sanggau Ledo Singkawang II. Dengan direbutnya pangkalan udara ini, secara praktis kekuatan militer Belanda mengalami kelumpuhan total. Kekuasaannya boleh dikatakan telah tamat.

Kota Pontianak dikuasai Jepang sepenuhnya pada awal Februari 1942. Pasukan Belanda yang melarikan diri berhasil ditawan oleh Jepang. Pegawai pemerintah Belanda banyak mengalami nasib yang tragis, seperti dua orang pegawai bank pemerintah di Pontianak yang dipancung kepalanya oleh Jepang. Pada mulanya, Jepang dianggap sebagai pembebas dari kekuasaan Belanda. Mereka mempropagandakan kebencian terhadap bangsa Barat. Namun, pada kenyataannya mereka justru melakukan kejahatan dan kebengisan yang luar biasa terhadap bangsa Indonesia. Jepang melakukan eksploitasi besar-besaran baik terhadap sumber daya alam ataupun manusia di wilayah-wilayah yang didudukinya. Para pekerja paksa yang disebut *romusha* diperlakukan dengan penuh kekejaman, yakni dipaksa bekerja tanpa batas waktu dan memperoleh jatah makanan seminim mungkin sehingga banyak di antara mereka yang meninggal, padahal mereka memprogandakan bahwa para tenaga *romusha* adalah pahlawan-pahlawan bangsa. Bahkan gelombang pertama *romusha* dilepas dengan upacara kebesaran. Pemerasan Jepang terhadap kekayaan alam negeri jajahannya menimbulkan kehancuran ekonomi sehingga kekurangan terjadi di segala bidang.

Jepang memanfaatkan pula cara-cara teror dalam mengintimidasi rakyat. Mereka menculik pula kaum wanita untuk dijadikan pemuas nafsunya. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila perlawanan terhadap Jepang meletus di mana-mana.

Pada kurang lebih tahun 1943–1944, Jepang mencurigai adanya gerakan di Kalimantan Barat yang hendak memberontak terhadap kekuasaan mereka. Oleh karenanya, Jepang menangkapi dan membunuh para sultan, pemuka masyarakat, serta kaum pedagang yang sebagian besar berasal dari etnis Cina. Sultan Pontianak, Syarif Muhammad Alkadrie (1895–1944) juga tidak luput dari kekejaman ini. Berikut ini adalah kisah penangkapannya sebagaimana yang termuat dalam buku karya Syafaruddin Usman dan Isnawita Din.[169]

Peristiwa menyedihkan tersebut terjadi pada 24 Januari 1944 sekitar pukul 03.00. Sepasukan tentara Jepang mendatangi Istana Kadriah, Kampung Dalam, Pontianak, dengan membawa senjata lengkap. Suasana saat itu sungguh mencekam. Mereka berpencar dan menggedor rumah-rumah yang didiami keluarga Alkadrie dengan membawa bayonet terhunus. Mereka memasuki rumah-rumah dengan membawa lampu senter dan daftar berisikan nama-nama orang yang dicari beserta fotonya. Seluruh penghuni rumah dikumpulkan dan dipilih mana yang termasuk dalam daftar tersebut. Para korban kemudian diikat dengan benda seadanya, baik itu taplak meja, karung, dan lain sebagainya. Sultan Muhammad saat itu baru saja selesai makan setelah menunaikan salat tahajud. Ketika diberi tahu mengenai penangkapan oleh Jepang itu, ia tampak tenang-tenang saja dan mengatakan bahwa Jepang sedang mencari orang-orangnya, tetapi tiba-tiba muncul tentara Jepang yang hendak menangkapnya. Awalnya sultan hendak diperlakukan seperti korban-korban lainnya, namun ia menolak dan menyatakan dengan berwibawa bahwa ia tak akan melarikan diri. Di samping istana, Ratu Anom Bendahara mendapatkan pukulan dari serdadu Jepang karena memprotes perlakuan terhadap suami dan anggota keluarganya yang lain.

Jepang juga merampok harta kekayaan kesultanan, termasuk senjata-senjata bertatahkan berlian dan mahkota emas murni. Para korban kemudian dikumpulkan di dekat tiang bendera yang ada di halaman istana sebelum dinaikkan ke atas motor air. Hingga petang keesokan harinya, istana masih dikepung oleh orang-orang Jepang. Selain mencari orang-orang yang belum ditemukan, mereka juga masih berupaya menjarah benda-benda berharga lainnya.

169. Lihat *Peristiwa Mandor Berdarah*, halaman 91–95.

Salah seorang putra Sultan Muhammad yang bernama Syarif Abdulmuthalib berhasil meloloskan diri dengan mengelabui tentara Jepang. Karena tidak berhasil menemukannya, Jepang membuat janji palsu dengan mengatakan bahwa bila pangeran menyerahkan diri maka sultan akan dikembalikan. Atas desakan saudari-saudarinya yang mengharapkan kepulangan sultan dan juga karena kehendak sendiri, pangeran itu menyerahkan dirinya. Ternyata mereka semua tidak pernah pulang dalam keadaan hidup. Semenjak saat itu, keluarga kesultanan dilanda kecemasan, terutama setelah mendengar berita pada 1 Juli 1944 yang dimuat harian *Borneo Sinbun* mengenai pembantaian masal yang dilakukan Jepang.

Setelah Jepang menyerah kalah, kalangan istana dan keluarga korban lainnya mengadakan perjalanan ke ladang pembantaian di Mandor. Mereka disertai pula anggota pasukan Sekutu dan penunjuk jalan orang Jepang yang diborgol. Pemandangan yang dijumpai saat itu sungguh mengerikan. Tulang belulang tampak berserakan di mana-mana. Jenazah Sultan Muhammad baru ditemukan belakangan atas informasi seorang hukuman bernama Mat Kapang yang ikut mempersiapkan tempat penguburannya di belakang kompleks susteran Pontianak. Segera dilakukan penggalian dan ternyata kondisi jenazah masih dalam keadaan utuh. Setelah dibawa ke Rumah Sakit Soengai Djawi dan mendapat visum dari dr. Soedarso, sultan dimakamkan dengan upacara kebesaran di pemakaman raja-raja, Batu Layang, Pontianak. Sementara itu, jenazah korban-korban lain dari kalangan Kesultanan Pontianak tidak pernah ditemukan.

d. Kesultanan Pontianak Pada Era Kemerdekaan

Musibah yang menimpa kesultanan menyulitkan pencarian calon pengganti bagi almarhum Sultan Syarif Muhammad Alkadrie. Hingga menyerahnya bala tentara Jepang, jabatan sultan Pontianak tetap lowong. Pada 29 Agustus 1945 kerabat kesultanan mengadakan musyawarah memilih sultan baru. Berdasarkan tradisi, dua orang putri sultan yang masing-masing bernama Syarifah Maryam dan Syarifah Fatimah berhak menggantikan ayahnya. Namun, keduanya menolak karena tidak sanggup mengemban tanggung jawab yang berat dan selain itu belum pernah ada penguasa wanita dalam sejarah Kesultanan Pontianak. Kerabat kesultanan akhirnya sepakat memilih di antara lima cucu sultan; yakni

- Syarif Thaha, berusia 18 tahun dan masih bersekolah di Pontianak.
- Syarif Yan Ahmad, berusia 16 tahun dan masih bersekolah di Makassar.

- Syarif Hasyim, berusia 15 tahun dan masih bersekolah di Makassar.
- Syarif Ibrahim, berusia 17 tahun, bersekolah di Pontianak.
- Syarif Yusuf, berusia 15 tahun, bersekolah di Pontianak.

Tiga putra yang disebut pertama kali merupakan anak Syarifah Fatimah, sedangkan sisanya adalah putra Syarifah Maryam. Pengangkatan sultan baru juga dilangsungkan atas desakan warga suku Dayak.

Di antara mereka berlima, Syarif Thaha terpilih menjadi Sultan Pontianak. Organisasi PPRI (Pemuda Penyongsong Republik Indonesia) yang didirikan pada 5 September 1945 sebagai wujud dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan RI menyambut gembira pengangkatan Syarif Thaha Alkadrie sebagai sultan Pontianak karena ia bersimpati terhadap perjuangan. Pada 14 Oktober 1945, pasukan Sekutu yang dipimpin Kolonel Cotton mendarat di Pontianak. Belanda dengan NICA-nya yang hendak menegakkan kembali supremasinya atas Kepulauan Nusantara turut membonceng kehadiran Sekutu. Suasana menjadi kacau karena menimbulkan bentrokan dengan para pemuda PPRI yang siap mempertahankan kemerdekaan tanah airnya. Tanpa mengindahkan proklamasi kemerdekaan RI yang telah dikumandangkan, NICA membentuk pemerintahannya. Dr. van der Zwaal diangkat sebagai Residen Kalimantan Barat pada 22 Oktober 1945.

Putra sulung Sultan Syarif Muhammad bernama Syarif Hamid Alkadrie semasa penjajahan Jepang ditahan di penjara Batavia. Ia memasuki akademi militer di Negeri Belanda (KMA) pada 1933 dan lulus empat tahun kemudian (1937). Setelah itu, ia dilantik sebagai perwira KNIL dengan pangkat letnan dua. Syarif Hamid selanjutnya ditugaskan di berbagai tempat, seperti Malang, Balikpapan, dan lain sebagainya. Sebagai seorang perwira KNIL, ia dipenjara oleh Jepang. Bersamaan dengan mendaratnya pasukan Sekutu, ia dibebaskan dari tahanan. Syarif Hamid Alkadrie kemudian mendengar mengenai musibah yang menimpa kaum kerabatnya di Pontianak. Letnan gubernur jenderal van Mook melihat potensi Syarif Hamid selaku seorang pemimpin yang sanggup memimpin daerahnya bersama Residen NICA. Karena itu, pada 17 Oktober 1945 Syarif Hamid bersama van Mook terbang ke Pontianak.

Ternyata Syarif Thaha telah dinobatkan sebagai sultan Pontianak. Syarif Hamid segera menjumpai kemenakannya itu dan menanyakan berapa usianya, dijawab lah kalau ia berusia kurang lebih dari 18 tahun. Syarif Hamid mengatakan bahwa Syarif Thaha masih terlampau muda dan belum saatnya menjadi sultan. Namun, dengan

berani Syarif Thaha menjawab bahwa ia diminta rakyat menjadi sultan dan bila tak bersedia maka suku Dayak akan memberontak. Pamannya membujuk agar Syarif Thaha bersedia mengundurkan dirinya mengingat kondisi keamanan yang belum kondusif dan menyerahkan kedudukan sultan kepada dirinya.

Syarif Thaha akhirnya bersedia meletakkan jabatannya dan Syarif Hamid diangkat menjadi Sultan Pontianak dengan gelar Sultan Hamid II Alkadrie (1945–1950). Setelah pengunduran dirinya itu, Thaha Alkadrie meneruskan sekolahnya di Pontianak. Ia belakangan diangkat sebagai Camat Sambat, Wedana Pontianak, anggota BPH Pemda Kodya Pontianak, Kabag Pemerintahan Pemda Kodya Pontianak, dan Kepala Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Hingga wafat pada 27 September 1984, ia menjabat sebagai Ketua DPRD Tk. II Kodya Pontianak.

Pelantikan Sultan Hamid II Alkadrie sebagai sultan berlangsung pada 29 Oktober 1945. Dia merupakan pendukung konsep federal yang dianggap bertentangan dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, sebagian kalangan mengatakan bahwa hal ini tidak berarti Sultan Hamid II bukan seorang nasionalis, hanya saja pandangannya yang berbeda mengenai bentuk negara. Pada mulanya, Sultan Hamid II berpangkat kolonel, tetapi setelah menjabat sebagai sultan pangkatnya dinaikkan menjadi jenderal mayor. Ia pernah memperoleh jabatan kehormatan sebagai ajudan Ratu Belanda.

Para pemuda menganggap Sultan Hamid II terlalu dekat dengan Belanda, dan karena memandang bahwa bentuk federal merupakan yang terbaik bagi bangsa Indonesia, ia mendukung dibentuknya berbagai negara bagian. Padahal negara-negara tersebut sesungguhnya dimaksudkan Belanda memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Kendati demikian, sebagian kaum nasionalis justru memanfaatkannya sebagai wadah perjuangan. Sultan Hamid II menghadiri Konferensi Malino pada 5 Juli 1946 yang bertujuan mempersiapkan terbentuknya berbagai negara bagian. Belanda melakukan Agresi Militer I dan II terhadap pemerintah RI yang menuai kecaman dunia internasional. Perjuangan demi mencapai kemerdekaan dilakukan pula melalui meja perundingan. Presiden Soekarno mengadakan Konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta pada 19–23 Juli 1948 antara RI dan BFO.[170] Sultan Hamid II yang menjadi ketua BFO menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB) di Negeri

170. *Bijeenkomst voor Federaal Overleg*, suatu badan yang dibentuk dengan tujuan memecahkan pertentangan antara Belanda, Republik Indonesia, dan berbagai negara bagian yang ada.

Belanda. Bung Karno dan Bung Hatta merangkul Sultan Hamid II agar menyatukan visinya. Hasilnya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan terbentuklah RIS (Republik Indonesia Serikat).

Sultan Hamid II yang juga menjabat sebagai kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat diserahi jabatan sebagai Menteri Negara *Zonder Portofolio* dalam kabinet RIS. Hal ini mengecewakan Sultan Hamid II karena ia berharap diserahi jabatan yang lebih penting. Ia menyatakan bahwa semasa menjadi menteri, tugasnya hanyalah menyiapkan gedung parlemen dan merancang lambang negara. Padahal, Sultan Hamid II mendambakan posisi sebagai menteri pertahanan. Selain itu, ia kecewa pula terhadap dominasi TNI dalam APRIS (Angkatan Perang RI). Di samping itu, Komite Nasional Kalimantan Barat berniat mengangkat Dr. Sudarso sebagai kepala daerah menggantikannya dengan alasan bahwa Sultan Hamid dianggap teleh melepaskan jabatannya karena duduk sebagai menteri RIS.

Kekecewaan ini berpuncak pada kerjasama antara Sultan Hamid II dengan Westerling yang sepakat menyerbu sidang dewan menteri RIS pada 24 Januari 1950 di Pejambon, Jakarta. Menurut skenarionya, penyerbuan itu harus menembak mati Sultan Hamengkubuwono IX (menteri pertahanan), Ali Budiarjo (sekretaris jenderal), dan Kolonel Simatupang. Agar tidak dicurigai, Sultan Hamid II juga akan dilukai, tetapi ringan saja. Kemudian sebagai langkah selanjutnya, Sultan Hamid II akan meminta izin Presiden Soekarno membentuk kabinet baru dengan dirinya sebagai menteri pertahanan. Kendati demikian, ia lantas menyadari kesalahannya dan mengupayakan agar rencana itu tak jadi dilaksanakan. Sidang dewan menteri bubar sebelum waktu yang direncanakan sehingga rencana pembunuhan menjadi gagal.

Meskipun rencananya diurungkan, Sultan Hamid II tetap dianggap bersalah dan dijatuhi hukuman penjara sepuluh tahun. Ia pernah mengajukan grasi kepada Presiden Soekarno tetapi ditolak. Daerah Istimewa Kalimantan Barat kemudian dibubarkan. Sesudah dibebaskan dari tahanan, semenjak 1967 hingga akhir hayatnya, Sultan Hamid II menjabat sebagai presiden komisaris PT. Indonesia Air Transport. Ia wafat pada 30 Maret 1978 dan dikebumikan di Batu Layang, Pontianak. Semasa hidupnya, Sultan Hamid II menikah dua kali, pertama dengan seorang wanita Belanda bernama Dina van Delden. Pernikahan ini dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Syarif Yusuf Alkadrie (Max Nico Alkadrie) dan Syarif Zohrah Alkadrie

(Edith Denise Corrie Alkadrie), yang kedua dengan seorang wanita asal Yogyakarta bernama Ny. Reni.

e. Perekonomian dan Sosial Kemasyarakatan

Kerajaan Pontianak atau Kadriah menjadi salah satu pusat perdagangan di pesisir barat Kalimantan. Barang-barang atau komoditas yang diperdagangkan adalah hasil bumi berupa karet, kopra, lada, pinang, rotan, kelapa, tepung sagu, dan lain sebagainya. Selain itu, barang tambang berupa emas dan berlian juga turut diperjualbelikan. Karena kedudukannya sebagai pusat perniagaan di Kalimantan, tidak mengherankan apabila Pontianak menarik banyak pendatang semenjak zaman dahulu, baik dari Kepulauan Nusantara sendiri (Bugis, Bali, Banjar, dan lain sebagainya) ataupun luar negeri (Cina dan Arab). Selain perdagangan, rakyat juga menggantungkan hidup dari aktivitas pertanian, perladangan, dan perkebunan.

Kaum pendatang yang tujuannya berniaga tidak jarang menetap di Pontianak. Oleh karenanya, Pontianak lalu terkenal dengan masyarakatnya yang multietnis. Penduduk biasanya tinggal berkelompok menurut etnisnya masing-masing sehingga ada kampung Arab, Cina, Melayu, dan lain sebagainya. Agama yang dianut juga beraneka ragam. Warga Melayu pada umumnya menganut agama Islam. Sementara itu, suku Dayak yang dianggap penduduk asli, ada yang masih menganut kepercayaan lamanya atau telah masuk agama Islam. Kaum keturunan Cina ada yang menganut agama Buddha atau kepercayaan leluhurnya. Dengan demikian, Pontianak juga memperlihatkan heterogenitas dalam hal keagamaan.

X. SAMBAS

a. Berdiri dan Berkembangnya Kesultanan Sambas

Konon silsilah Kerajaan Sambas berkaitan dengan Kesultanan Brunai, yang dapat ditelusuri hingga seorang raja bernama Sultan Muhammad.[171] Menurut legenda, saat itu ada dua orang menteri bernama Wong Sin Teng dan Wang Kung[172] yang diutus kaisar Cina mencari benda pusaka berupa mutiara naga di puncak Gunung Kinibalu. Mutiara tersebut berada di mulut naga buas dan sudah banyak orang yang tewas saat hendak mengambilnya. Untunglah Wong Sin Teng memperoleh akal untuk

171. Dalam kronologi Brunai, sultan ini diperkirakan memerintah sekitar abad ke-15.

172. Lihat *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat kalimantan Barat*, halaman 132, yang juga dimuat dalam buku *Sejarah Kebudayaan Kalimantan*, halaman 24.

Istana dan Peninggalan Kesultanan Pontianak

Sumber foto: Johan

Istana Kadriah-Kesultanan Pontianak

mendapatkannya, yakni dengan menaruh peti kaca beserta sebatang lilin sebagai sarana mengalihkan perhatian naga buas itu. Naga melihat bayangannya sendiri dan tanpa sengaja melepaskan mutiara dari mulutnya. Wong Sin Teng cepat-cepat merebut mutiara tersebut dan mengajak rekannya pulang ke negeri Cina. Di tengah jalan mereka berebut benda pusaka tersebut dan timbul pertarungan di antara keduanya. Wong Sin Teng kalah dan dilemparkan ke laut, tetapi karena nasibnya sedang mujur, ia berjumpa dengan kapal yang hendak berlayar ke Brunai dan ditolong para awak kapal itu. Ia lalu berjumpa dengan Sultan Brunai dan berniat mengabdi kepadanya serta tidak pulang lagi ke negerinya. Karena pribadinya yang baik, Sultan Muhammad mengizinkan Wong Sin Teng menikah dengan putrinya. Bahkan Wong Sin Teng dijadikan penggantinya dengan gelar Sultan Akhmad.

Wong Sin Teng ini sebenarnya seorang tokoh bernama Huang Senping (黄森屏) atau Ong Sum Ping dalam dialek Hokkian yang mengunjungi Brunai semasa awal Dinasti Ming (1375). Ia menikah dengan Ratna Dewi, putri Sultan Muhammad Shah dari Brunai, dan dianugerahi gelar Pengiran Maharaja Lela serta diserahi daerah Kinabatangan. Menurut *Salasilah Raja-raja Brunei* yang ditulis berdasarkan tradisi lisan semasa pemerintahan Sultan Muhammad Hassan (1582–1598) dan terus menerus disalin serta diperbaharui isinya, Huang Senping menggantikan mertuanya sebagai sultan dengan gelar Sultan Akhmad. Hal ini dicatat pula dalam *Sejarah Melayu* karya Tun Sri Lanang (1612). Meskipun demikian, *Batu Tarsilah* atau silsilah raja-raja Brunai yang ditulis pada 1807 menyebutkan bahwa Sultan Akhmad adalah saudara Sultan Muhammad Shah dan bukannya Huang Senping. Versi *Batu Tarsilah* inilah yang diterima sebagai sejarah resmi Brunai.

Keturunan Sultan Akhmad yang ke-8 bernama Abdul Jalil Akbar (sekitar abad 16) dan memiliki seorang anak bernama Raja Tengah. Ia mengadakan kunjungan ke Kerajaan Tanjungpura di Kalimantan dan karena budi pekertinya yang baik, ia dinikahkan dengan Ratu Surya, putri Raja Tanjungpura. Dari pernikahan ini lahirlah seorang putra yang bernama Raden Sulaiman. Pada saat itu, terdapat pula kerajaan lain yang berpusat di Kota Lama, Kecamatan Telok Keramat (36 km dari Sambas), dan dipimpin seorang wanita bernama Ratu Sepudak. Ia memiliki dua orang putri, yang sulung dinikahkan dengan kemenakannya, Raden Prabu Kencana, sedangkan yang bungsu dinikahkan dengan Raden Sulaiman. Bersamaan dengan itu, agama Islam juga mulai tersebar dan penganutnya di kalangan rakyat makin meluas.

Ketika Ratu Sepudak wafat, ia digantikan oleh kemenakan dan sekaligus menantunya, yakni Raden Prabu Kencana yang selanjutnya bergelar Anom Kesuma Yuda. Raja dibantu oleh dua orang perdana menteri, yakni adik kandungnya yang bernama Pangeran Mangkurat sebagai perdana menteri utama, bertugas mengurusi perbendaharaan kerajaan serta mewakili raja dalam kesempatan-kesempatan tertentu, dan Raden Sulaiman selaku perdana menteri kedua dengan tugasnya menangani urusan dalam dan luar negeri kerajaan. Ternyata rakyat lebih menghargai Raden Sulaiman sehingga menimbulkan benih-benih rasa iri dalam hati Pangeran Mangkurat. Ketika Raja Anom Kesuma Yuda sedang mengadakan kunjungan ke Johor, Pangeran Mangkurat menyebarkan desas-desus bahwa Raden Sulaiman sedang merencanakan perebutan kekuasaan. Isu ini sampai ke telinga raja sehingga ia mempercepat kepulangannya. Ternyata yang terjadi justru Kiyai Setia Bakti, tangan kanan Raden Sulaiman, dibunuh oleh pengikut Pangeran Mangkurat. Dengan kata lain, Pangeran Mangkurat yang mencari gara-gara terlebih dahulu. Raden Sulaiman melaporkan insiden ini kepada raja, namun ia tidak mengambil tindakan apapun untuk menyelesaikannya. Karena kecewa dengan sikap raja, Raden Sulaiman memutuskan meninggalkan kerajaan tersebut dan mengembara mencari daerah baru.

Raden Sulaiman beserta para pengikut setianya lalu mendirikan sebuah pemukiman baru yang bernama Kota Bangun. Pendukung mereka makin banyak karena rakyat berbondong-bondong mengikuti Raden Sulaiman berpindah ke sana. Setelah melalui perundingan damai antara kedua belah pihak, disepakati bahwa Anom Kesuma Yuda akan memindahkan pusat pemerintahannya ke Kota Balai Pinang. Setelah Anom Kesuma Yuda dan Pangeran Mangkurat mangkat, putranya yang bernama Raden Bekut diangkat sebagai penguasa baru dengan gelar Panembahan Kota Balai. Ia menikah dengan Mas Ayu Krontiko, putri Pangeran Mangkurat. Keturunan mereka, Raden Mas Dungun merupakan raja terakhir Kota Balai. Raden Sulaiman lalu mengundang sisa-sisa kaum kerabat kerajaan ini bergabung bersamanya. Mereka sepakat mendirikan ibu kota baru di Lubuk Madung yang berlokasi di daerah pertemuan tiga sungai, yaitu Sambas Kecil, Subah, dan Teberau. Di tempat yang juga bernama Muara Ulakan ini, Raden Sulaiman membangun istananya yang masih dapat disaksikan hingga sekarang. Ia lalu naik takhta dengan gelar Sultan Muhammad Syafiuddin I sehingga mengawali berdirinya Kesultanan Sambas.

b. Perkembangan Kesultanan Sambas

Sultan Muhammad Syafiuddin I mengangkat saudara-saudaranya, Raden Badaruddin sebagai Pangeran Bendahara Sri Maharaja dan Raden Abdulwahab sebagai Pangeran Tumenggung Jaya Kesuma, pada 1687. Mereka adalah perdana menteri-perdana menteri Sambas yang pertama. Putra Raden Sulaiman yang bernama Raden Bima merantau ke Kerajaan Tanjungpura dan menikah dengan Puteri Indra Kusuma, adik bungsu Sultan Zainuddin dari Tanjungpura. Mereka mempunyai seorang putra bernama Raden Meliau, yang namanya diambil dari nama sungai di Tanjungpura.

Setelah setahun menetap di Sambas, mereka berpamitan kepada Sultan Zainuddin dan pulang ke Sambas. Setibanya kembali di kampung halamannya, Raden Bima dititahkan Raden Sulaiman pergi ke Brunai guna mengunjungi keluarga leluhur mereka. Sepeninggal ayahnya, Raden Bima dinobatkan sebagai sultan baru dengan gelar Muhammad Tajuddin, sesuai dengan gelar yang dianugerahkan oleh sultan Brunei saat ia melawat ke sana. Saat itu yang menjadi Pangeran Bendahara Sri Maharaja adalah Raden Akhmad, putra Raden Abdulwahab. Setelah ia wafat, putra mahkota Raden Meliau meneruskan singgasana Sambas dengan gelar Sultan Umar Akamuddin I. Berkat dukungan permaisurinya, Utin Kemala (gelar: Ratu Adil), raja dapat memerintah dengan bijaksana. Permaisuri raja ini merupakan putri Raden Dipa, seorang bangsawan Kerajaan Landak, yang menikah dengan Raden Ratna Dewi, putri Sultan Muhammad Syafiuddin I dari Sambas. Selanjutnya, Sambas diperintah secara berturut oleh Sultan Umar Akamuddin I, Abubakar Kamaluddin (Raden Bungsu), dan selanjutnya Abubakar Tajuddin I (wafat 1815).

Semasa pemerintahan Sultan Abubakar Tajuddin I, atau tepatnya pada 24 Juli 1812, datanglah kapal perang EIC (East Indian Company, serikat dagang milik Inggris) yang bertujuan menyerang Sambas sebagai balas dendam atas ditenggelamkannya kapal milik Inggris di perairan Banjarmasin pada 1789. Pasukan Inggris saat itu gagal menembus pertahanan Sambas. Oleh karena itu, mereka menyuap penduduk asli daerah itu agar bersedia menunjukkan jalan terbaik dalam menaklukkan Sambas. Pasukan Inggris lalu melayari Sungai Sambas Besar dan mendarat di Kartiasa. Mereka meneruskan perjalanannya ke arah selatan melayari Sungai Sambas Kecil dan tiba di Kota Sambas. Baku tembak terjadi dan korban dari kedua belah pihak berjatuhan. Pasukan Sambas banyak yang gugur dan demikian pula dengan para panglimanya. Pasukan Inggris terus maju dan membumihanguskan sebuah kampung yang hingga

saat ini oleh rakyat disebut Kampung Angus. Karena Inggris mempunyai persenjataan yang lebih hebat, Sambas terpaksa bertekuk lutut pada 1813.

Peristiwa penting lain yang patut dicatat pada sekitar kurun waktu itu adalah serbuan Raja Ismail (Sultan Ismail Abdul Jalil Rakhmat Syah)[173] dari Siak Sri Indrapura pada 1779 yang berhasil dipukul mundur oleh Sambas. Serangan ini diulangi kembali pada 1801 di bawah pimpinan Sultan Said Ali dari Sia, namun tetap gagal menundukkan Sambas. Konon, pada saat itu permaisuri Siak ikut dalam peperangan dan gugur oleh tembakan meriam Sambas.[174] Berikutnya, pada 1799 pernah terjadi sengketa perbatasan dengan Mempawah namun dapat diselesaikan dengan baik.

Sultan Abubakar Tajuddin I digantikan oleh Pangeran Anom atau Raden Pasu yang bergelar Muhammad Ali Syafiuddin I (1815–1828). Ia merupakan sultan Sambas yang terbesar dan sulit dicari tandingannya. Peranannya sungguh besar dalam membasmi kaum *lanun* (perompak) yang saat itu sering mengganas di wilayah kekuasaannya sehingga menimbulkan penderitaan bagi rakyat. Pangeran Anom menjadikan Pulau Lemukutan sebagai basis pertahanannya. Pada masa pemerintahannya, Belanda mengadakan perjanjian perdagangan dan mendirikan markas di seberang istana sultan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semenjak saat itu pengaruh Belanda mulai masuk ke Sambas serta kelak akan banyak ikut campur dalam suksesi dan pemerintahan para sultan Sambas.

Setelah Sultan Muhammad Ali Syafiuddin I mangkat, putranya, Raden Ishak, masih berusia enam tahun. Oleh karenanya, pemerintahan sementara dipegang oleh saudara sultan yang bernama Pangeran Bendahara Sri Maharaja dengan gelar Sultan Usman Kamaluddin (1828–1831). Ketika ia wafat, penggantinya, selaku wali sultan yang belum dewasa, adalah saudaranya yang bernama Pangeran Tumenggung Jaya Kesuma dengan gelar Sultan Umar Akamuddin III (1831–1845). Ketika Sultan Umar Akamuddin III mangkat pada 5 Desember 1845, barulah Raden Ishak yang telah cukup umur memangku tanggungjawabnya sebagai sultan baru Kerajaan Sambas dengan gelar Sultan Abubakar Tajuddin II (1845–1855). Berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda tertanggal 17 Januari 1848, putra sulung sultan yang bernama Syafiuddin diangkat sebagai putra mahkota dengan gelar Pangeran Adipati. Pada 1855, Sultan Abubakar Tajuddin II diasingkan ke Cianjur hingga 1879. Sebagai

173. Menurut daftar raja-raja Siak Sri Inderapura di **melayuonline** memerintah dari 1778–1781. Raja ini tidak tercantum namanya dalam daftar wikipedia.
174. Lihat *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, halaman 137.

wakil sultan yang diasingkan itu diangkatlah Sultan Umar Kamaluddin (1855–1866), sedangkan Syafiuddin dikirim ke Jawa atas kehendak Belanda untuk bersekolah. Selanjutnya, pada 5 April 1861 ia diangkat sebagai sultan muda dan diizinkan pulang ke Sambas pada 23 Juli 1861 dengan menumpang kapal *Arjuna*. Pada 15 Agustus 1866 ia diangkat sebagai penguasa baru Sambas dengan gelar Sultan Muhammad Syafiuddin II. Ia mendirikan sebuah sekolah dan masjid pada 1872 dengan biayanya sendiri. Sultan juga memerhatikan pembangunan infrastruktur daerahnya dengan membangun jalan raya Sambas-Pemangkat dan Singkawang-Bengkayang.

Sultan Sambas terakhir, Muhammad Mulia Ibrahim (Muhammad Tsafiuddin, disebut juga Mohammad Ibrahim Tsafioedin atau Soeltan Mohammad Ibrahim Moelja Tsafieoedin dalam buku *Peristiwa Mandor Berdarah*) dibunuh oleh Jepang pada 1944 karena saat itu Jepang mencurigai adanya gerakan bawah tanah yang hendak melawan mereka dan menangkapi para pemuka masyarakat dengan semena-mena.

c. Perang Kongsi

Karena maraknya perdagangan emas, Sultan Sambas dan Raja Mempawah mendatangkan para pekerja Tionghoa guna diperkerjakan di tambang-tambang emas kurang lebih pada 1740.[175] Areal pertambangan pertama yang hendak dieksplorasi terletak di kawasan Sungai Duri, di perbatasan antara kedua kerajaan tersebut. Didatangkannya para pekerja Cina ini dikarenakan keahlian mereka dalam seni pertambangan yang melebihi orang-orang Dayak. Teknik dan kemampuan organisatoris yang mereka kuasai sanggup mendulang lebih banyak emas. Komunitas para penambang Tionghoa ini menjadi makin luas dan terbentuklah serikat-serikat pertambangan emas yang disebut kongsi.

Beberapa kongsi bersatu membentuk federasi atau perkumpulan yang lebih besar. Tiga federasi besar di Kalimantan semasa abad 19 adalah Fosjoen (Heshun) yang berpusat di Monterado, Lanfang (Lanfang) yang berpusat di Mandor, dan Samtiaokioe (Santiaogou). Pada mulanya Samtiaokioe adalah bagian dari Fosjoen tetapi kemudian memisahkan diri pada 1819. Serikat-serikat ini sanggup mengumpulkan ratusan hingga ribuan orang. Mereka memiliki *zongting* (balai sidang) sendiri dan wakil kongsi-kongsi besar yang menjadi anggotanya bertugas dalam pemerintahan sehari-hari serta mengatur anak buahnya. Kongsi Lanfang didirikan oleh Lo Fong Pak (Luo Fangbo), yang tiba di Kalimantan pada 1772 dari

175. Lihat *Penambang Emas, Petani, dan Pedagang di "Distrik Tionghoa" Kalimantan Barat*, halaman 40.

Meixian, Guangzhou. Terbentuknya federasi-federasi ini makin memperkuat kedudukan dan kemandirian para pendatang Tionghoa.

Sumber-sumber Belanda menyebut "kongsi" dengan istilah “republik” dan mencatat bahwa mereka memilih pemimpinnya secara demokratis, tetapi penyederhanaan seperti ini tidak dapat diterapkan pada semua kasus. Kongsi yang ada di Monterado memang memilih pemimpinnya setiap empat bulan sekali, walaupun terkadang tokoh yang sama masih menduduki jabatan tersebut atau bergilir menempati kedudukan lainnya dalam organisasi. Sementara itu, para pemimpin Lanfang mempertahankan jabatannya selama bertahun-tahun dan penggantinya tidak jarang merupakan putra atau kerabat dekat mereka.

Pemerintah kolonial Belanda yang makin kuat pengaruhnya di pesisir Kalimantan Barat kurang suka dengan kehadiran kongsi Tionghoa ini. Mereka merebut banyak hal yang sebenarnya diinginkan oleh pemerintah kolonial. Dengan kata lain, Belanda menganggap kongsi-kongsi yang ada sebagai biang keladi berkurangnya keuntungan mereka. Sebagai contoh, daerah-daerah yang ditempati kongsi boleh dianggap sebagai kawasan otonom dan merdeka dari kekuasaan Belanda. Orang-orang Cina yang menjadi anggota kongsi menolak membayar pajak dan menentang sistem monopoli pemerintah kolonial. Lambat laun, sultan-sultan di pesisir Kalimantan Barat merasa kedudukannya terancam oleh para penambang Tionghoa tersebut dan mulai berpaling serta menyambut baik kedatangan Belanda. Kendati demikian, hal ini bukanlah satu-satunya alasan mengapa para sultan bersemangat menjalin hubungan dengan pemerintah kolonial. Penyebab penting lainnya adalah persaingan antara kerajaan-kerajaan di pesisir barat Kalimantan sendiri.

Belanda berupaya menjalin hubungan dengan berbagai kongsi guna memaksa mereka mengakui kekuasaan pemerintah kolonial. Residen Sambas, Georg Muller, mengirimkan wakilnya kepada Samtiaokioe dengan tujuan memaksa orang-orang Tionghoa membayar pajak kepada pemerintah kolonial. Upaya ini tidak membuahkan hasil sehingga ia datang sendiri pada akhir November 1818. Ia mengibarkan bendera Belanda dan memerintah anggota kongsi membayar seluruh pajak yang harus mereka lunasi kepada pemerintah kolonial. Perjanjian lantas ditandatangani antara wakil-wakil Samtiaokioe yang kala itu masih merupakan bagian Fosjoen.

Residen Mempawah, C.J. Prediger mengunjungi Monterado tanpa menyadari bahwa kawasan itu sebenarnya adalah wilayah Sambas. Ia menyangka bahwa

Monterado adalah milik Mempawah. Setibanya di Mempawah pada 1 Desember 1818, diadakan perjanjian dengan orang-orang Tionghoa, padahal mereka belum lama berselang menandatangani kesepakatan bersama dengan Georg Muller. Ini merupakan suatu kesalahan konyol dan orang-orang Tionghoa segera mengirim delegasi untuk mengadukannya kepada Sultan Sambas. Mereka mengatakan bahwa orang-orang Belanda hendak mengalihkan Monterado ke Mempawah sehingga sultan kesal karenanya. Prediger yang merasa terancam di Monterado berupaya meninggalkan tempat tersebut, tetapi ditahan oleh orang-orang Tionghoa. Ia baru diizinkan pergi apabila menyerahkan salinan surat perjanjiannya. Sepasukan kecil tentara Belanda kemudian ditinggalkan di Monterado oleh Prediger.

Akibat pengaduan delegasi orang Tionghoa, Muller mengetahui kekeliruan yang dibuat oleh rekannya sesama residen Belanda itu. Ia merasa marah dan secepatnya bertolak ke Monterado. Di sana ia memerintahkan agar pasukan yang ditinggalkan Prediger menyerah padanya. Bendera Belanda yang sudah dikibarkan diturunkan tetapi setelah itu dinaikkan lagi. Tindakan simbolis yang menandakan penyerahan Monterado ke bawah yurisdiksi Muller tentu saja dipandang menggelikan oleh orang-orang Tionghoa.

Hubungan kongsi dengan pemerintah kolonial tidak harmonis walaupun ada kalanya anggota suatu kongsi yang terdesak meminta bantuan Belanda. Pada 1819, anggota Lanfang menyerang garnisun Belanda di Pontianak, tetapi dapat dipukul mundur. Relasi antar kongsi sendiri terkadang diliputi pertikaian dan perpecahan. Kongsi Sjipngfoen (Shiwufen = Lima Belas Saham) dan Limtian (Lintian) memisahkan diri dari Samtiaokoe. Ketika Samtiaokioe berselisih dengan kongsi Thaikong, para anggotanya meminta bala bantuan kepada Sultan Sambas dan Belanda. Tanpa menyelidiki duduk perkaranya terlebih dahulu, Belanda mengirimkan pasukan ke Monterado dan membakar balai utama Thaikong pada 1823.

Guna mengatasi perselisihan antar kongsi, Belanda menerapkan pembagian tanah yang tegas terhadap kongsi-kongsi yang ada. Kondisi damai dan permusuhan datang silih berganti dengan cepat pada kurun-kurun waktu berikutnya. Pada Januari 1824, Fosjoen bersedia membayar pajak kepala (Pajak ditetapkan seragam dengan jumlah yang tetap per individu) kepada Belanda, namun di akhir tahun tersebut, sisa-sisa pasukan Fosjoen memukul mundur pasukan Belanda di Singkawang. Anggota Thaikong menyerang pula kedudukan Belanda. Fosjoen menegaskan kemerdekaannya dari kekuasaan kolonial. Bersamaan dengan itu, meletus Perang Diponegoro

sehingga Belanda sementara waktu tak sanggup melakukan tindakan apapun guna menyelesaikan masalah kongsi.

Sepanjang 1830–1840-an, hubungan Belanda dengan kongsi memburuk. Samtiaokioe tidak mau tundukke pada pemerintah kolonial. Pada 1832, seorang pegawai Belanda dibunuh karena suatu perselisihan. Antara 1838–1846, para pejabat kolonial Belanda bahkan tak diperkenankan memasuki kawasan pedalaman yang dikuasai kongsi. Pajak-pajak yang ditunggak oleh kongsi juga sangat besar jumlahnya. Meskipun demikian, belum ada tindakan terhadap berbagai kongsi itu.

Campur tangan pemerintah Belanda baru terjadi pada 1850 ketika pecah pertikaian berdarah antara Samtiaokioe dan Thaikong. Samtiaokioe mengubah haluannya dan bersedia tunduk kepada pemerintah kolonial. Belanda lantas mengirimkan pasukannya menindak Thaikong. Meskipun tidak dapat dihancurkan sepenuhnya, sisa-sisa pasukan Thaikong kemudian mengajukan perdamaian kepada pemerintah kolonial. Belanda lalu memutuskan bahwa Thaikong harus dibubarkan. Upacara pembakaran cap yang secara simbolis mengakhiri kongsi tersebut dilangsungkan pada 14 Januari 1853. Acara ini dihadiri pula oleh anggota Lanfang dan wakil sultan Pontianak, Pangeran Bendahara. Ia membacakan doa secara agama Islam agar seluruh upaya ini sanggup mendatangkan perdamaian.

Ternyata pembubaran Thaikong tidak mengakhiri episode sejarah ini. Kongsi Thaikong bangkit lagi dalam bentuk Kongsi Kioe Long (Jiulong), Ngee Hin (Yixing), dan Sam Tiam Fui (Sandianhui). Mereka melancarkan pemberontakan pada 1854 dan orang-orang Cina yang dianggap pro-Belanda menjadi sasaran tindak kekejaman. Meskipun demikian, pemberontakan ini dapat dipadamkan. Sesudah Thaikong dihancurkan, kini giliran kongsi-kongsi lain dibubarkan oleh Belanda. Anggota-anggota Samtiaokioe sendiri banyak yang mengungsi ke Serawak selepas pertikaian berdarah mereka dengan Thaikong sehingga perannya tidak besar lagi.

Kongsi yang sanggup bertahan paling lama adalah Lanfang berkat hubungan khususnya dengan pemerintah kolonial. Bahkan pada 1824 Residen Pontianak setuju memberikan pinjaman kepada Lanfang demi memperluas usaha pertambangannya. Pada era 1860–1880-an, Lanfang dipimpin oleh Lioe A Sin yang digelari *kapthai* (kapitan besar). Belanda membatasi kegiatan kongsi ini, tetapi belum berniat membubarkannya sebagaimana kongsi-kongsi lainnya. Kapthai Lioe kerap membantu

pemerintah kolonial mengatasi orang-orang Tionghoa yang membangkang terhadap kebijakan Belanda. Oleh karena itu, ia dipercaya oleh pemerintah kolonial. Lioe A Sin mengundurkan diri pada 1876 dan mengangkat putranya yang bernama Lioe Liong Kwon sebagai pemimpin kongsi. Kendati demikian, putranya meninggal pada 1880 dan Lioe A Sin mengambil alih kembali pimpinan.

Kondisi Lanfang sendiri berada di ambang kebangkrutan sehingga Kapthai Lioe A Sin harus merogoh kantungnya sendiri demi menghidupi Lanfang. Banyak tambang emas telah terkuras habis cadangannya sehingga tak lagi menjanjikan. Ia terjerat hutang kepada seorang Melayu dan harus kehilangan haknya atas penjualan candu. Pemerintah kolonial menawarkan pinjaman tanpa bunga sebesar fl100.000 tetapi ditolak olehnya. Kapthai Lioe A Sin setuju Lanfang dibubarkan setelah ia wafat, yang benar-benar terjadi pada 22 September 1884, tak lama setelah ia melangsungkan pesta ulang tahunnya ke-71 yang dihadiri oleh pejabat Belanda, Melayu, maupun Tionghoa.

Wilayah Kongsi Lanfang beserta penduduknya yang keturunan Tionghoa kini diperintah langsung oleh Belanda. Gedung balai sidang milik Lanfang diambil alih oleh Belanda dan selanjutnya ditempati oleh seorang kontrolir. Papan nama dan patung-patung dewa dipindahkan ke sebuah tempat pemujaan baru yang pembangunannya akan dibiayai pemerintah kolonial. Belanda melakukan kesalahan besar karena menyangka bahwa gedung itu hanya berfungsi administratif saja dan mengabaikan fungsi keagamaannya. Karenanya, pemindahan arca-arca dewa itu dipandang oleh sebagian kalangan sebagai penodaan agama.

Sekonyong-konyong, pada 23 Oktober 1884, serombongan orang memasuki gedung balai sidang bekas milik kongsi dan membunuh kontrolir beserta tiga polisi. Mereka memasang kembali arca-arca dewa dan papan penghormatan terhadap Lo Fong Pak, pendiri kongsi. Peristiwa ini menandai pecahnya pemberontakan terhadap Belanda. Pasukan kolonial telah siap menyerang Mandor, tetapi dibatalkan ketika janda mendiang Kapthai Lioe menawarkan perdamaian. Mandor diduduki lagi oleh pemerintah kolonial pada 26 November 1884. Benda-benda keagamaan lantas disingkarkan dari gedung balai sidang.

Pemberontakan masih berlanjut dan para pemimpinnya menjalin perserikatan dengan orang-orang Dayak. Salah seorang pemuka suku Dayak bernama Pa Gunang memberikan perlindungan kepada Liong Lioe Njie, salah seorang pimpinan pemberontakan. Pa Gunang yang kehilangan anaknya lantas mengangkat Liong Lioe

Njie sebagai putranya. Belanda menerapkan politik adu domba dengan mengerahkan orang-orang Dayak untuk membantai orang-orang Tionghoa. Satu persatu pemimpin pemberontakan tertawan. Pada 1 Mei 1885, Pa Gunang menyerah dan mengikat sumpah setia kepada Belanda. Secara umum perlawanan orang-orang Tionghoa boleh dikatakan berakhir pada 1885. Pemerintah kolonial menepati janjinya dan memberikan dana untuk membangun kelenteng tempat menghormati arca dewa-dewa yang dipindahkan dari gedung bekas milik kongsi. Era berbagai kongsi di Kalimantan Barat usai sudah.

XI. SANGGAU

a. Cikal Bakal Kerajaan Sanggau

Kerajaan Sanggau kini terletak di Kabupatan Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Namanya diambil dari nama pohon yang tumbuh di muara sungai tempat tertambatnya perahu-perahu yang ditumpangi Dara Nante beserta pengikutnya saat mencari Babai Cinga, suaminya. Kedua tokoh tersebut merupakan cikal bakal Kerajaan Sanggau. Konon Dara Nante telah berpisah dengan suaminya semenjak lama. Oleh karena kerinduan yang mendalam, Dara Nante memutuskan mencari suaminya. Di tengah jalan, perahu mereka terhalang pohon-pohon besar. Selama berhari-hari mereka berupaya menebanginya, tetapi gagal. Dara Nante terus menerus mencari akal demi mengatasi hambatan itu, hingga akhirnya suatu malam ia bermimpi didatangi seseorang yang memberitahukan padanya cara mengatasi hambatan tersebut. Katanya, untuk menaklukkan pohon-pohon tersebut harus menggunakan jarum perenda milik Dara Nante. Keesokan harinya tatkala saran yang diperoleh melalui mimpi itu dipraktikkan, memang benar bahwa halangan berupa pohon-pohon besar tersebut berhasil diatasi. Mereka dapat melanjutkan perjalanannya dengan leluasa.

Akhirnya, Dara Nante dapat menjumpai suaminya di sebuah anak sungai yang bernama Sungai Entabai. Setelah memuaskan rindunya, Dara Nante pulang kembali meninggalkan suaminya menuju ke kampung Labai. Dalam perjalanan pulang, berjumpalah mereka dengan seseorang bernama Dakkudak, yang konon diserahi tugas memimpin kawasan Sanggau, tetapi ia gagal dalam tugasnya karena kurang pandai mengambil keputusan. Selain itu, ia tidak begitu mengenal pula adat istiadat setempat. Karena kegagalan ini, ia lalu meninggalkan Sanggau. Sebagai pengisi kekosongan pemerintahan di Sanggau, Dayang Mas, keturunan Dara Nante diangkat

sebagai penggantinya. Dayang Mas lantas memindahkan pusat pemerintahannya ke Mengkiang. Selama memerintah, ia dibantu oleh suaminya, Nurul Kamal, yang konon adalah keturunan Kiyai Kerang dari Banten. Penggantinya adalah seorang wanita yang bernama Dayang Puasa dengan gelar Nyai Sura. Ia dibantu pula oleh suaminya, Abang Awal, seorang keturunan Raja Embau. Pada masa ini telah terjalin persahabatan dengan Raja Jubair dari Sintang.

Selanjutnya, Sanggau diperintah oleh seseorang bernama Abang Gani yang bergelar Kiai Dipati Kusuma Busu Negara. Setelah ia mangkat, putranya, Abang Basun, naik takhta dengan gelar Pangeran Mangkubumi. Ia didampingi oleh saudaranya yang bernama Abang Abon (Pangeran Sumabaya) dan sepupunya, Abang Guneng. Semasa pemerintahannya, Raja Tanjungpura menikahi salah seorang putri Sanggau yang bernama Dayang Seri Gemala (Ratu Ayu). Pernikahan ini membuahkan dua orang anak, masing-masing pria dan wanita. Namun, selanjutnya terdengar kabar bahwa Raja Tanjungpura menikah lagi. Pihak keluarga Kerajaan Sanggau merasa tidak senang karenanya dan berniat memulangkan Dayang Seri Gemala ke negerinya. Tentu saja hal ini tidak dapat dilakukan dengan cara serampangan karena berpeluang membangkitkan amarah Raja Tanjungpura. Kendati demikian, dengan bujukan dan diplomasi yang bijaksana, akhirnya putri itu dapat dipulangkan kembali ke negerinya. Bahkan meriam kerajaan yang biasa dibunyikan saat penobatan raja baru dapat dibawa oleh mereka.

b. Perkembangan Kerajaan Sanggau

Setelah Abang Basun mangkat, takhta kerajaan beralih kepada putranya, Abang Bungsu (Uju), yang merupakan anak dengan istri ketiganya karena keturunan dengan istri-istri lain yang lebih berhak seluruhnya anak perempuan. Gelarnya adalah Sultan Muhammad Jamaluddin. Konon, ia pernah berkunjung ke Cirebon dan membawa pulang tiga buah meriam, yang diberi nama Bujang Juling, Dara Kuning, dan Dara Hijau. Ketiganya masih dipelihara oleh rakyat Sanggau dengan baik hingga saat ini. Sultan Muhammad Jamaluddin mempunyai dua orang putra, yakni Abang Kamaruddin selaku putra mahkota, dan adiknya yang bernama Abang Taberani (Panembahan Ratu Surya Negara). Keduanya bekerja sama memajukan negerinya. Sebelum wafat, sultan pernah mengamanatkan bahwa prioritas menduduki takhta Sanggau pertama-tama adalah putra mahkota dan setelah itu adiknya.

Sultan telah membuatkan masing-masing sebuah tempat kediaman bagi kedua anaknya itu. Abang Kamaruddin mendapatkan rumah yang letaknya agak ke

darat sehingga ia lalu diberi pula julukan Abang Saka. Setelah Sultan Muhammad Jamaluddin mangkat, putra mahkota menggantikannya dengan gelar Sultan Akhmad Kamaruddin. Sementara itu, adiknya diangkat sebagai pembantunya. Suatu ketika, sultan jatuh sakit. Saat itu, adiknya menanyakan kapankah dirinya akan diangkat sebagai raja sesuai amanat ayahnya saat kakaknya mangkat. Pertanyaan itu diajukan berulang-ulang sehingga menimbulkan siksaan batin bagi sultan. Dengan mengajukan pertanyaan seperti itu, dapat disimpulkan bahwa sang adik mengharapkan dirinya cepat berpulang ke alam baka. Sultan akhirnya menyerahkan kekuasaan kepada adiknya yang naik takhta dengan gelar Panembahan Surya Negara. Sebagai tambahan, ia dijuluki pula Abang Sebilang Hari karena terus meneruskan menanyakan kapan ia akan diangkat sebagai raja. Tatkala Panembahan Surya Negara masih memerintah, terjadi tukar menukar hadiah dengan Kesultanan Pontianak. Sultan Pontianak waktu itu menghadiahkan sebuah meriam yang diberi nama Segenter Alam. Sebagai balasannya, Raja Sanggau mengirimkan balok-balok kayu belian yang kini ada di depan Istana Pontianak.

Raja Sanggau berikutnya adalah Panembahan Muhammad Thahir I dan selanjutnya beralih kepada Pangeran Usman yang bergelar Panembahan Usman Paku Kesuma Negara yang pada masanya terjalin hubungan pernikahan dengan Kerajaan Sekadau dikarenakan Raja Sekadau menikahi Ratu Godok, putri Panembahan Usman Paku Kesuma Negara. Pada 1812, terjadi serangan oleh Sultan Pontianak, tetapi berhasil digagalkan. Panembahan Usman mangkat dan digantikan oleh Panembahan Muhammad Ali Mangku Negara (1814–1825). Setelah itu, singgasana kerajaan beralih kepada Sultan Ayub Paku Negara (1825–1830). Ia merupakan pendiri masjid jami yang hingga kini masih berdiri di Sanggau.

Sultan Ayub menyerahkan kekuasaan kepada saudaranya, Ade Akhmad, yang dinobatkan dengan gelar Panembahan Akhmad Paku Negara (1832–1875). Ia digantikan oleh Panembahan Muhammad Thahir II yang pernah merundingkan masalah perbatasan dengan Brunai. Wujud disepakatinya perjanjian mengenai perbatasan adalah sebuah meriam yang dinamakan Meriam Naga dan hanya dibunyikan saat seorang raja mangkat. Semasa pemerintahan Panembahan Muhammad Thahir II, datanglah wakil pemerintah Belanda yang minta agar diberikan tempat bagi kediaman wakil-wakil mereka. Panembahan berbaik hati dengan memberikan sebidang tanah yang letaknya berhadapan dengan Kampung Ilir di kota Sanggau sekarang. Namun,

lokasi ini kurang memuaskan Belanda. Sehingga, mereka meminta lokasi yang lain. Raja masih berbaik hati dengan memberikan lokasi sesuai keinginan Belanda. Semenjak saat itu, Belanda secara perlahan-lahan mengikis kekuasaan Raja Sanggau dan mulai ikut campur dalam permasalahan internal Kerajaan Sanggau.

Pada 23 Maret 1876, Panembahan Muhammad Thahir II wafat dan digantikan oleh Ade Sulaiman yang bergelar Panembahan Haji Sulaiman Paku Negara (1876–1908). Takhta kerajaan beralih kepada Panembahan Gusti Muhammad Ali Surya Negara (1908–1915). Raja berikutnya adalah Panembahan Gusti Muhammad Said Paku Negara (1915–1921). Pada 1921, ia memutuskan pensiun dan sebagai penggantinya diangkat Panembahan Thahir Surya Negara (1921–1941).

c. Kerajaan Sanggau Zaman Penjajahan Jepang dan Kemerdekaan

Pengganti Panembahan Thahir Surya Negara adalah Gusti Muhammad Arif, bersamaan dengan masa pemerintahannya, masuklah bala tentara Jepang ke Kalimantan. Karena curiga terhadap gerakan yang melawan mereka, Jepang mengadakan pembersihan terhadap pemuka-pemuka masyarakat di Kalimantan Barat. Gusti Muhammad Arif merupakan salah satu korbannya. Untuk mengisi kekosongan kekuasaan di Sanggau, Panembahan Gusti Ali Akbar diangkat sebagai penggantinya. Ketika Jepang menyerah kalah, Belanda datang kembali dengan membonceng pasukan Sekutu dan berniat melanggengkan penjajahannya. Asisten Residen Belanda bernama Riekerk diutus untuk mencampuri pemerintahan Kerajaan Sanggau dengan menurunkan Panembahan Gusti Ali Akbar dan menggantinya dengan Panembahan Gusti Muhammad Thaufiq pada 1946.

Selanjutnya, sesudah penyatuan kembali dengan Republik Indonesia, ia diangkat sebagai wedana merangkap kepala swapraja. Terakhir, daerah Swapraja Sanggau dipimpin oleh Uray Muhammad Johan. Pada saat itu, pemerintahan memutuskan penghapusan berbagai daerah swapraja. Pada 2 Mei 1960, berlangsunglah upacara serah terima kekuasaan kepada Bupati Sanggau yang bernama M. Th. Djaman. Dengan demikian, berakhirlah Kerajaan Sanggau.

XII. SEKADAU

Kerajaan Sekadu terletak di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Konon namanya diambil dari nama pohon yang tumbuh di sepanjang Sungai Sekadau, penduduk setempat menyebutnya Batang Adau. Menurut legenda, cikal

bakal kerajaan ini adalah serombongan orang yang dipimpin oleh Singa Patih Bardat dan Patih Bangi. Mereka selanjutnya terpisah menjadi dua kelompok. Rombongan Singa Patih Bardat menjadi leluhur suku Kematu, Benawas, Sekadau dan Melawang, sedangkan kelompok satunya lagi menjadi nenek moyang suku Dayak Melawang yang menurunkan raja-raja Sekadau.

Awalnya, pusat Kerajaan Sekadau terletak di Kematu, kurang lebih 3 km dari hilir Rawak. Penguasa pertama Sekadau bernama Pangeran Engkong yang memiliki tiga orang putra; Pangeran Agong, Pangeran Kadar, dan Pangeran Senarong. Karena putra keduanya dianggap sanggup memahami kehendak rakyat, ia dianggap lebih bijaksana dibandingkan yang lainnya dan diangkat sebagai pengganti ayahnya. Pangeran Agong merasa kecewa dan meninggalkan negeri itu menuju ke kawasan Lawang Kuwari. Ia kemudian menjadi cikal bakal raja-raja Belitang.

Setelah Pangeran Kadar wafat, Pangeran Suma diangkat sebagai penguasa baru Sekadau. Ia pernah dikirim orang tuanya untuk belajar agama Islam di Mempawah karena saat itu Islam sedang berkembang pesat di negeri tersebut. Pada zamannya, ibu kota negara dipindahkan ke Sungai Bara dan sebuah masjid kerajaan dibangun di sana, pada masa ini pula terjadi kontak dengan Belanda. Pangeran Suma digantikan oleh putra mahkotanya, Abang Todong, yang bergelar Sultan Anum. Ia digantikan oleh Abang Ipong (gelar Pangeran Ratu) yang sesungguhnya bukan keturunan raja, tetapi diserahi takhta Sekadau karena putra mahkota belum dewasa. Setelah putra mahkota dewasa, ia dinobatkan sebagai raja dengan gelar Sultan Mansur.

Takhta Sekadau beralih kepada Panembahan Gusti Mekah Kesuma Negara karena putra mahkota, Abang Usman, belum dewasa. Oleh ibunya, putra mahkota kemudian dikirim ke Nanga Taman. Gusti Mekah digantikan oleh Panembahan Gusti Akhmad Sri Negara. Namun, ia diasingkan oleh Belanda ke Malang, Jawa Timur, karena dituduh menghasut para tumenggung untuk melawan Belanda. Panembahan Haji Gusti Abdullah ditunjuk sebagai wakil raja, tetapi meninggal tidak lama setelah itu. Berikutnya, Sekadau secara berturut-turut diperintah oleh Gusti Akhmad, Gusti Hamid, dan Gusti Kelip.

Ketika Jepang menguasai Kalimantan Barat, mereka mencurigai adanya gerakan perlawanan sehingga mengumpulkan serta membantai para pemuka masyarakat. Gusti Kelip merupakan salah satu korban pembantaian Jepang yang terjadi pada 1944. Sebagai penggantinya, Jepang mengangkat Gusti Adnan yang berasal dari

Belitang sebagai penggantinya. Seiring dengan penghapusan daerah-daerah swapraja setelah era kemerdekaan, Gusti Adnan beserta Gusti Kolen dari Belitang menyerahkan pemerintahannya kepada pemerintah Republik Indonesia pada Juni 1952. Dengan demikian, Kerajaan Sekadau dapat dikatakan berakhir.

Menurut manuskrip karya Hans Hägerdal,[176] leluhur raja-raja Sekadau adalah kepala suku Dayak bernama Cuat. Ia memiliki putra bernama Nang Malang. Nang Lukis, putra Nang Malang, menjadi Raja Sekadau pertama. Putrinya, Dayang Sri Bunga, menikah dengan Abang Busang yang merupakan Raja Sekadau kedua. Putra mereka bernama Kiai Dipati Suma Negara yang menggantikan ayahnya sebagai Raja Sekadau ketiga. Penggantinya adalah menantunya, Abang Itam, yang menikah dengan putrinya, Dayang Kacang. Raja-raja Sekadau berikutnya secara berturut-turut adalah Abang Kadrang (Kiai Dipati Tumbah Baya), Abang Narung dari Belitang (menikah dengan Dayang Ineh, putri Abang Kadrang), Pangeran Agung (±1780), Pangeran Suta Abang Kadar), Pangeran Kusuma Negara (± 1822–± 1830), Sultan Anom Muhammad (± 1830–1861), Sultan Mansur Kusuma Negara (1861–1867), Panembahan Gusti Mekka Muhammad Kusuma Negara (1867–1902), Panembahan Ahmad Ratu Seri Negara (1902–1911), Haji Gusti Muhammad (1911–1931), Gusti Muhammad Hamid (1931–1942), Panembahan Gusti Kelip (1942–1944), dan Abang Kolin (Gusti Kolen, 1944–1952).

XIII. SELIMBAU

Selimbau merupakan kerajaan kecil yang terletak di Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Konon pendiri kerajaan ini adalah seorang suku Dayak bernama Guntur Baju Binduh atau Raja Abang Bhindu yang bergelar Guntur Baju Bhindu Kilat Lambai Lalu pada kurang lebih abad 18. Selanjutnya, kerajaan ini diperintah kepala suku Abang Aji Lindi, Abang Tedung, Abang Jambal Megat Sari, Abang Upak Pati Agung Nata, Abang Bujang Natasari, Abang Ambal Dipati Kluarga, Abang Tela Agung Jaya, Abang Para Ira, Abang Gunung Agung, Abang Tedung Suryanata, dan Abang Mahidin (Abang Idin Agung Sri).[177]

Abang Mahidin merupakan kepala suku pertama yang menganut agama Islam. Abang Mahidin digantikan oleh Abang Tajak, penguasa pertama yang menyandang

---

176. Lihat *Kerajaan2 Indonesia*, halaman 208.
177. Lihat *Kesaksian Sejarah di Masa Kejayaan Kerajaan Selimbau Darussalam*.

gelar raja serta nama kehormatan Sura di Laga Paku Negara. Selanjutnya, Selimbau diperintah oleh Dayang Payung Surya Negara yang bersuamikan Abang Upak. Pewaris takhta berikutnya adalah cucu Abang Tajak bernama Abang Genah (Kina Agung Nata Negara), tetapi ada sumber lain yang menyebutkan bahwa pengganti Abang Tajak adalah Abang Upak. Selanjutnya, Selimbau diperintah oleh Abang Keladi Agung Cakranegara, Abang Sasap Agung Kusuma Negara, dan Abang Telapati (Abang Tella) Setia Negara. Pada 1823,[178] Abang Telapati mengadakan perjanjian dengan Kontrolir Hartmann, pejabat kolonial pertama yang melayari Sungai Kapuas hingga jauh ke daerah pedalaman.

Para pengganti Abang Telapati adalah Pangeran Kunjan Jaya Mengkunegara, Pangeran Muhammad Jalalludin Sutakasuma, dan Raden Mahidin Suta Natanegara. Pangeran Haji Muhammad Abas Suryanegara (1830–1878)[179] kemudian menduduki singgasana Selimbau. Ia pernah membantu suku Undup dan Kantu' menghadapi serangan Skrang beserta Saribas. Suku Dayak Taman pernah pula meminta bantuannya menyerang orang-orang Dayak Embaluh yang bersalah kepada mereka. Orang Dayak Taman kemudian menyatakan takluk kepada Selimbau.

Salah seorang kepala suku Dayak Kayan bernama Si Gulung tatkala hendak meninggal dunia, menyerahkan rakyatnya ke bawah perlindungan Selimbau. Ia kemudian menyampaikan kepada rakyatnya, "Kalian semuanya sudah aku serahkan kepada Pangeran Muhammad, Raja Selimbau, dan apa-apa titah dan perintahnya engkau turuti semuanya dan turutilah."[180] Rakyat Kayan menyepakati perkataan kepala sukunya itu. Sebagai wujud penerimaan itu, Pangeran Muhammad meminta rakyat Kayan menyediakan *sampan bong* (sampan besar), *kelauk* (perisai), *perangkaian* (mandau panjang), dan *beriyut* (tas dari rotan). Demikianlah, Selimbau melindungi rakyat Kayan sehingga tak ada yang berani mengganggu mereka.

Suatu ketika, Raja Bunut berniat menikahkan putranya, Abang Kidara, dengan seorang wanita Kayan bernama Bawang. Namun, Bawang tak menghendaki hal ini. Akibatnya, Bunut bersiap menyerang orang-orang Kayan. Mereka segera meminta bantuan Pangeran Muhammad, Raja Selimbau, guna menyelesaikan perkara ini.

---

178. Menurut buku *Kesaksian Sejarah di Masa Kejayaan Kerajaan Selimbau Darussalam*, kontrak ini tampaknya berlangsung pada 15 November 1823 atau 11 Rabiulawal 1279 H.
179. Terdapat sumber yang menyebutkan bahwa setelah Abang Tella terdapat penguasa bernama Abang Muhammad Jalaluddin. Pada masa kekuasaannya dilaporkan terjadi serangan suku Dayak Iban.
180. *Kesaksian Sejarah di Masa Kejayaan Kerajaan Selimbau Darussalam,* pasal 2.

Dia segera menyanggupinya dan membicarakannya dengan Raja Bunut. Setelah diselesaikan secara adat, orang-orang Kayan boleh kembali bernafas lega.

Selimbau pernah pula terlibat perselisihan dengan Sekadau. Ketika itu, Selimbau dibantu oleh orang-orang Dayak Embaluh Leboyan. Sewaktu terjadi serangan ke perbatasan Sintang di Ketungau, pasukan Dayak Embaluh Leboyan juga turut membantu Selimbau. Orang Dayak Batang Lupar kerap membunuhi rakyat Selimbau dan baru pada zaman Pangeran Muhammad mereka menyatakan takluk kepada Selimbau. Dia lantas memindahkan mereka ke Seriyang, Tangit, Sumpak, Senunuk, dan Tanjak. Ketika Selimbau melancarkan serangan ke Ketungau, orang-orang Dayak Batang Lupar turun tangan pula mendukung Pangeran Muhammad.

Pangeran Suma, Raja Suhaid, pernah memerintahkan Raden Surya Pulung menambang batu arang di sungai Kenepai, yang merupakan wilayah Selimbau, dan mengangkutnya ke Sintang.[181] Kebetulan Pangeran Muhammad sedang berada di Sintang dan mendengar perihal tersebut. Ia lalu mengadukannya kepada Tuubish, Asisten Residen Sintang. Berdasarkan keputusan asisten residen, batu arang tersebut hendaknya dikembalikan ke Selimbau dan berapapun harganya wajib dibayarkan kepada Pangeran Muhammad. Pangeran Suma tak diperkenankan lagi memerintahkan orangnya menambang batu arang di Kenepai. Pangeran Muhammad bersedia memaafkan Pangeran Suma dan menerima penyelesaian kasus ini secara damai. Semasa pemerintahannya, Pangeran Muhammad dua kali menandatangani kontrak dengan pemerintah kolonial Belanda, masing-masing pada 5 Desember 1847 (25 Zulhijah 1263 H) dan 27 Maret 1855 (7 Rajab 1271 H).

Pada 1878, Pangeran Muhammad digantikan oleh putranya, Panembahan Haji M. Saleh Pakunegara atau Panembahan Haji Agung Muda Pakunegara (1878–1890), ia menandatangani kontrak pada Juli 1855 (24 Syawal 1371 H). Sepeninggalnya, Selimbau diperintah oleh Pangeran Haji M. Yunus Indra Sri Negara selaku raja sementara. Pengangkatan ini dikarenakan putra-putra Panembahan Haji M. Saleh Pakunegara masih kecil. Kemudian putra Panembahan Haji M. Saleh Pakunegara, Haji Muhammad Usman, mewarisi takhta Selimbau. Kerajaan ini dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1923 karena luas wilayahnya yang dianggap terlampau kecil. Pewaris Selimbau yang sekarang adalah Raden Asbi bergelar

181. *Kesaksian Sejarah di Masa Kejayaan Kerajaan Selimbau Darussalam,* pasal 11.

Panembahan Agung Pakunegara II. Dia terpilih sebagai Raja Selimbau pada 14 Mei 2004 dan diresmikan pada 29 Januari 2005.

XIV. SILAT

Kerajaan Silat sebelumnya bernama Jempulin Panjang.[182] Legenda menyebutkan bahwa leluhur penguasa Silat adalah Babai Becingah yang merupakan keturunan putri Majapahit dan seorang suku Dayak bernama Demung Nutup. Konon, ia menderita penyakit kulit mengerikan hingga ia sembuh saat berjumpa dengan Puteri Junjung Buih yang memandikannya dan dijilati oleh ikan-ikan sembuhlah penyakitnya. Penguasa Silat pertama yang menganut agama Islam adalah Penyalu atau Abang Acit bin Siu.[183] Menurut keterangan, keturunan Kerajaan Silat di kampung Silat diperoleh beberapa nama leluhur Silat, namun tak diketahui apakah mereka memang memerintah negeri tersebut atau tidak, yakni Abang Cundin, Panembahan Bagun, Panembahan Titi, Panembahan Bagup, dan Gusti Masjuman. Nama yang disebut terakhir itu memerintah Silat dengan gelar Pangeran Ratu Muda Sultan Silat.[184] Sementara itu, sumber lain menyebutkan bahwa Silat diperintah oleh Pangiran Ahmad Kesuma Negara Silat yang digantikan putranya, Pangiran Ratu Muda Paku Negara.[185] Kerajaan Silat berakhir pada 1910 dan seterusnya diperintah langsung oleh pemerintah kolonial Belanda dengan status kademangan. Veth memaparkan bahwa Silat memiliki penduduk sebanyak 9.470 jiwa, yang terdiri dari 300 Melayu, 70 Cina, dan sisanya Dayak. Meskipun demikian, orang-orang Dayak ini sebagian besar bebas dan tak membayar *schatting* (upeti) kepada raja.[186] Beberapa tahun sebelumnya, Silat memiliki reputasi buruk akibat perdagangan budaknya (*slavenhandel*).

XV. SIMPANG

a. Berdirinya Kerajaan Simpang

Kerajaan Simpang terletak di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Kerajaan ini merupakan pecahan Kerajaan Tanjungpura karena perselisihan antara

182. Lihat *Buku Panduan KKL IV: Kota Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Sejarah Kerajaan di Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat*, halaman 104.
183. Lihat *Peta Tematik Kebudayaan dan Sejarah Pemerintahan Kalimantan Barat*, halaman 135.
184. Lihat *Buku Panduan KKL IV: Kota Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Sejarah Kerajaan di Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat*, halaman 104.
185. Lihat *Peta Tematik Kebudayaan dan Sejarah Pemerintahan Kalimantan Barat*, halaman 135.
186. Lihat *Borneo's Wester-Afdeeling*, jilid 1, halaman 52.

tiga putra raja (lihat bagian mengenai Kerajaan Tanjungpura). Pada 1735, Pangeran Ratu Agung yang mendapat bagian Kerajaan Simpang berangkat menuju daerah kekuasaan barunya dan membangun ibu kota atau pusat pemerintahan. Panembahan Ratu Agung memerintah Simpang hingga 1824. Setelah itu, Sultan Jamaluddin (Mu'aziddin) pernah diangkat oleh Belanda untuk menjadi penguasa Kerajaan Tanjungpura yang merangkap Simpang. Raja Tanjungpura kemudian mengangkat Gusti Asma (1845–1853) sebagai panembahan Simpang yang digantikan oleh Gusti Makhmud dengan gelar Panembahan Anom Suryaningrat (1853–1892). Gubernur Jenderal Belanda pernah mengirimkan surat kepadanya yang ditulis dengan huruf Jawi berbahasa Melayu. Isinya mengabarkan mengenai mangkatnya Raja Belanda, Willem III (William, memerintah 1849–1890) pada 23 November 1890. Petikan surat itu adalah sebagai berikut:

> ... kabar dari negeri Nederland yang menjadikan duka cita yaitu Maha Baginda Raja Olanda Yang Maha Mulia Willem yang III pada ketika 23 hari bulan November 1890 dengan takdir Tuhan yang Maha Tinggi telah meninggal dunia di dalam umur 73 tahun 9 bulan 4 hari. Sesudahnya gering beberapa lama ialah bagi kita dikasihani dan dicintai oleh segala masyarakat memegang pemerintahan dengan adil dan penuh kasih sayang kepada sekalia anak buah dan dengan bijaksana yang sekarang sangat berdukacita karena sebag kematiannya...[187]

Berdasarkan surat di atas, kita mengetahui bahwa Simpang telah berada di bawah pengaruh Belanda semenjak abad 19.

187. *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, halaman 108.

Willem III
Sumber: wikipedia.org

b. Perkembangan Kerajaan Simpang Selanjutnya

Setelah Panembahan Anom Suryaningrat mangkat, takhta kerajaan beralih kepada Gusti Roem (1892–1902) yang menikah dengan Siti Fatimah, putri Raja Karimata. Oleh mertuanya, Gusti Roem dihadiahi sebuah meriam bernama Bujang Koreng, disebut demikian kemungkinan karena besinya telah berkarat sehingga tampak seperti koreng. Gelar Gusti Roem setelah naik takhta adalah Panembahan Kusuma Yuda. Setelah itu, putra mahkota Gusti Panji naik takhta menggantikannya dengan gelar Panembahan Gusti Panji (1902–1920). Ia merupakan penguasa Simpang yang sangat anti-Belanda sehingga menolak menandatangani kontrak politik dengan Belanda. Menurut cerita rakyat, karena tidak mau menandatangani kontrak pendek dengan Belanda, Gusti Panji hendak diasingkan ke Pontianak menggunakan kapal yang telah disediakan untuk mengangkutnya. Sebelum menaiki kapal, Gusti Panji telah memperingatkan serdadu Belanda agar mengimbangi kapal di sisi yang lain

karena begitu ia naik, kapal akan miring sebelah. Tentu saja, para prajurit Belanda itu menertawakannya. Ternyata memang benar bahwa setelah ia naik, kapal menjadi miring. Pasukan Belanda yang panik dengan segera mengimbangi di sisi satunya lagi agar kapal tidak terbalik. Di tengah perjalanan, kapal itu kandas karena menabrak sepotong kayu dungun yang besar. Rakyat kemudian menamai tempat itu Dungun Kapal. Dengan demikian, rencana mereka untuk mengasingkan Gusti Panji boleh dikatakan gagal.

Pada masa pemerintahannya, meletuslah apa yang disebut Perang Belangkait (1912). Peristiwa ini dipicu oleh pungutan pajak oleh Belanda terhadap rakyat yang miskin hidupnya. Sebelumnya, telah diulas bahwa Belanda gagal memaksa Gusti Panji menandatangani kontrak karena isinya mewajibkan rakyat membayar berbagai macam pungutan yang berat kepada Belanda. Berkali-kali Belanda memaksa Gusti Panji menandatangani kontrak, tetapi selalu ditolaknya. Akhirnya, Belanda menagih sendiri pajakke pada rakyat dengan kekerasan. Gusti Panji menjadi marah, tetapi tidak tahu harus berbuat apa.

Di tengah-tengah kegelisahan tersebut, muncul seorang tokoh bernama Abdul Samad yang disebut juga Ki Anjang Samad. Ia ikut prihatin dengan penderitaan rakyat saat itu. Sebelumnya, rakyat membayar upeti atau pajak kepada Panembahan secara suka rela tanpa paksaan. Panembahan tidak menerima begitu saja pemberian rakyatnya. Ia membalasnya dengan memberikan pakaian, makanan, tembakau, dan alat-alat pertanian. Dengan bersemboyan "Lebih baik mati daripada membayar pajak (*belasting*) kepada Belanda", Ki Anjang Samad memimpin perlawanan terhadap Belanda. Rencana ini disampaikan kepada Panembahan yang merestui gerakan tersebut. Orang muda yang kuat dilatih untuk bertempur. Siasat lalu dirundingkan bersama seluruh kepala distrik yang ada di Simpang. Suku Dayak yang juga turut menderita di bawah penindasan Belanda ikut bangkit pula melawan. Barisan pasukan Dayak diturunkan di bawah pimpinan Panglima Ropa dan lima panglima lainnya (Panglima Ida, Panglima Gani, Panglima Enteki, Panglima Etol, dan Panglima Gencok) dengan membawa mandau, tombak beserta perisai. Kedatangan mereka makin membakar semangat juang rakyat Simpang.

Serangan mulai dilakukan terhadap markas-markas pasukan Belanda yang ada di Sukadana dan lain sebagainya, tetapi ternyata markas itu sedang kosong. Belanda yang mengetahui serangan itu menurunkan pasukan di Belangkait. Serangan terhadap

Belanda dilancarkan pada pagi harinya dan pertempuran antara kedua belah pihak tak dapat dielakkan lagi. Konon saat itu ada seorang bernama Kek Jula Laji, anak buah Ki Anjang Samad yang katanya kebal peluru. Ketika ditembak bertubi-tubi oleh Belanda hanya pakaiannya saja yang koyak, tetapi tubuhnya tidak luka sedikitpun. Namun, dalam pertempuran itu Ki Anjang Samad gugur. Selanjutnya, satu persatu para panglima juga gugur atau ditawan. Semenjak saat itu, tidak diadakan lagi perang secara frontal. Pasukan Simpang menggunakan siasat perang gerilya sehingga tidak sedikit pasukan Belanda yang menemui ajalnya.

Oleh karena itu, kekejaman Belanda terhadap rakyat makin menjadi-jadi. Tidak jarang rakyat yang menentang penjajah dibantai oleh Belanda. Mereka juga dipaksa membayar pajak yang lebih berat lagi. Karena tidak tahan dengan penindasan Belanda, rakyat melarikan diri ke hutan-hutan. Dengan demikian, saat datang menagih pajak, Belanda hanya menjumpai desa-desa yang kosong. Belanda akhirnya menyesali tindakannya dan meminta agar Panembahan Gusti Panji memanggil rakyatnya kembali ke kampung halamannya masing-masing. Panembanan menyetujui hal itu, asalkan pasukan Belanda berjanji agar tidak melakukan kekejaman kepada rakyat lagi. Dengan kesepakatan itu, Perang Belangkait dapat dikatakan berakhir dan rakyat pulang kembali ke tempat kediamannya. Sesudahnya, kehidupan rakyat boleh dikatakan tenang. Pada masa pemerintahan pengganti Gusti Panji, Gusti Muhammad Roem (1920–1940), ibu kota pemerintahan dipindahkan ke Teluk Melano. Pada 1940, Gusti Muhammad Roem menyerahkan takhta Simpang kepada putranya, Gusti Mesir (1940–1944).

c. Kerajaan Simpang Pada Masa Penjajahan Jepang dan Kemerdekaan

Perekonomian Simpang mengalami masa yang cerah semasa Panembahan Gusti Muhammad Roem dan Gusti Mesir, terutama berkat hasil hutan, perkebunan, dan karet, tetapi masa kemakmuran ini harus berakhir dengan kedatangan penjajah Jepang pada 1942. Sejak saat itu, kehidupan rakyat boleh dikatakan sengsara. Kebutuhan hidup menjadi sulit diperoleh dan rakyat harus hidup seadanya. Ini masih belum terhitung lagi teror-teror yang dilakukan Jepang kepada rakyat. Oleh karenanya, perekonomian Simpang mengalami kelumpuhan total.

Jepang mengadakan pertemuan dengan mengundang para raja di Kalimantan Barat, termasuk Gusti Mesir. Ia berangkat memenuhi undangan Jepang tersebut dengan disertai iparnya bernama Mas Raijin, yang biasa mempersiapkan segenap keperluannya selama bepergian. Jepang yang mencurigai adanya gerakan perlawanan

menangkap para raja itu, tetapi Gusti Mesir dibebaskan seminggu kemudian atas perintah Siama, kepala Maskapai Durian Sebatang. Gusti Mesir juga meminta agar iparnya dibebaskan. Ternyata sulit menemukannya karena semua tawanan kepalanya ditutupi. Namun, untungnya karena kakinya yang pincang, Mas Raijin dapat ditemukan.

Beberapa hari setelah Panembahan tiba kembali di Simpang, diadakan musyawarah antar para pemuka kerajaan mengenai langkah yang hendak diambil untuk menyelamatkan panembahan, ada yang menyarankan untuk sebisa mungkin melawan Jepang, ada pula usulan untuk melaporkan bahwa panembahan meninggal dimangsa buaya karena memang saat itu buaya sedang mengganas di Simpang, ada yang menyarankan agar panembahan melarikan diri dan bersembunyi saja di hutan. Semua usulan itu ditolak oleh Gusti Mesir dengan alasan rakyat akan menjadi korbannya. Ia mengatakan lebih baik dirinya saja yang menjadi korban.

Panembahan telah merasa bahwa Jepang akan kembali untuk menangkapnya. Dia dengan tabah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan demi melindungi rakyat dan keluarganya. Karena itu, ia selalu dalam keadaan siap, bahkan saat tidur pun juga mengenakan sepatu. Di tengah-tengah kondisi yang mencekam tersebut, terdapat seorang kepala *Staatwech* (mata-mata Belanda) yang melarikan diri ke Teluk Melano. Jepang meminta panembahan agar mengerahkan rakyat mencari buronan tersebut yang akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke Ketapang. Beberapa hari kemudian, datanglah dua orang anggota *kenpeitai* dengan mengendarai motor air ke Istana Simpang untuk menangkap panembahan. Saat itu, mereka memainkan samurainya seolah-olah hendak memancung burung-burung yang ada di sana, barangkali dengan tujuan menakut-nakuti orang yang berada di sekitarnya. Meskipun demikian, tidak seekor pun yang terkena sabetan samurai mereka. Apa yang telah dirasakan panembahan itu kini terbukti. Pada kesempatan tersebut, Jepang juga membawa Gusti Thawi Manteri Tani, adik Panembahan Gusti Mesir; Panembahan Gusti Muhammad Roem, Gusti Umar, kakak Gusti Mesir, Tengku Ajong, suami Utin Temah, adik Panembahan Gusti Mesir; Dolah, sopir panembahan; dan seorang bernama Bujang Kerepek. Mereka semua kemudian tidak diketahui lagi nasibnya.

Setelah Jepang menyerah kalah kepada Sekutu, Gusti Machmud naik takhta dengan gelar Panembahan Gusti Machmud, hingga wafat pada 1954. Saat dia mangkat, putra mahkota Gusti Ibrahim masih kecil sehingga tidak dapat dinobatkan

sebagai panembahan baru. Selain itu, pada era 1960-an, pemerintah Republik Indonesia menghapuskan berbagai daerah swapraja sehingga Kerajaan Simpang berakhir sudah.

XVI. SINTANG

a. Cikal Bakal Kerajaan Sintang

Wilayah Kerajaan Sintang kini terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Menurut cerita rakyat, asal mula kata tersebut dari bahasa suku Dayak setempat yang berbunyi *senentang* karena banyak terdapat aliran sungai yang saling "tentang-menentang" satu sama lain. Di kawasan yang kelak menjadi kerajaan ini ditemukan beberapa peninggalan yang bercorak Hindu, seperti sebuah arca perunggu berlengan empat yang mirip Siwa di Desa Temian Empakan, Kecamatan Sepauk serta batu *lingga* dan *yoni* di Desa Tabelian, Nanga Sepauk. Oleh karena itu, diduga bahwa di Sintang telah ada suatu kerajaan Hindu yang tidak diketahui kapan berdirinya sebagai cikal bakal Kesultanan Sintang yang beragama Islam kelak. Menurut legenda, penguasa kerajaan bercorak Hindu itu bernama Aji Melayu, ada yang mengatakan bahwa ia adalah penyebar agama Hindu yang berasal dari Semenanjung Malaya. Pada mulanya ia berdiam di Kunjau dan selanjutnya pindah ke Desa Tabelian Nanga Sepauk hingga akhir hayatnya. Aji Melayu menikah dengan seorang putri Dayak setempat bernama Putung Kempat (juga dikenal sebagai Junjung Buih) dan dikaruniai seorang anak bernama Dayang Lengkong. Tokoh ini dikatakan menurunkan para penguasa yang kelak menjadi raja-raja Sintang.

Sebelumnya, akan diriwayatkan terlebih dahulu suatu legenda yang berkaitan dengan keluarga Putung Kempat. Konon menurut cerita rakyat, leluhur raja-raja Sintang adalah pasangan suami istri yang bernama Sabung Mengulur dan Pukat Mengawang. Mereka berdiam di suatu daerah yang disebut Gunung Kujau. Pasangan suami istri tersebut dikaruniai tujuh orang anak, yakni enam pria dan seorang wanita. Anak-anak lelakinya bernama Puyung Gana, Belang Pinggang, Terentang Temanai, Suluh Duik, Buku Labuk, dan Buih Nasi. Sedangkan yang perempuan bernama Putung Kempat. Putra sulungnya yang bernama Puyung Gana telah meninggal sebelum dilahirkan sehingga menjadi hantu dengan wujud aneh dan mengerikan. Pakaiannya terdiri dari kerumunan lebah, berikat pinggang ular, cawatnya berupa ular yang melilit, alas kakinya berupa kura-kura, dan tongkatnya berupa biawak.

Pada zaman itu, pernikahan antara manusia dengan makhluk halus sering terjadi dan di antara saudara-saudaranya hanya Putung Kempat yang menikah dengan manusia biasa. Sebagai contoh, salah seorang saudaranya ada yang menikah dengan makhluk halus bernama Jubata Air, yang konon dapat menyemburkan air penyebab penyakit kusta. Saat itu, di antara mereka belum ada yang makan nasi. Makanan mereka adalah sesuatu yang dianggap ganjil oleh sebagian besar umat manusia di zaman sekarang, seperti ulat, arang, dan lain sebagainya. Menurut legenda, Buih Nasi dilahirkan dengan segenggam nasi sebagai bekal kelahirannya. Karena jumlahnya yang sedikit, tidak lama kemudian nasi itu habis. Tatkala sudah besar, Buih Nasi terkenang akan makanannya semasa balita tersebut dan terus menerus merengek meminta nasi. Ayah dan ibunya tentu saja menjadi sedih mendengar rengekan anaknya ini. Oleh karenanya, mereka memohon petunjuk kepada dewata.

Dewata memberikan petunjuk bahwa demi mendapatkan nasi mereka harus mengorbankan dirinya sendiri. Dengan sedih orang tuanya memberitahukan hal itu kepada anak-anaknya. Sabung Mangulur lalu memerintahkan anak-anaknya membuat sebuah lumbung yang terbuat dari kulit kayu. Bila lumbung telah selesai dibuat, Sabung Mangulur beserta istrinya akan masuk ke dalam dan setelah itu anaknya harus menutupnya rapat-rapat lumbung itu selama tujuh hari. Begitu lewat masa yang ditentukan, mereka membukanya untuk melihat apa gerangan yang terjadi. Ternyata orang tua mereka sudah raib dan berubah menjadi berbagai jenis bibit yang berlimpah ruah. Sebelumnya, orang tua mereka telah berpesan agar benih itu jangan dihabiskan seluruhnya, melainkan disisakan sebagian untuk ditanam dan dibudidayakan kembali. Menyaksikan hal itu, anak-anaknya merasa gembira bercampur sedih. Mereka bergembira karena mendapatkan bibit dan bersedih karena kehilangan orang tuanya.

Segera dilakukan perundingan mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap bibit-bibit tersebut. Akhirnya, diputuskan membuka ladang sebagai tempat membudidayakannya. Barangkali legenda ini mencerminkan berawalnya usaha pertanian di kalangan suku tersebut yang sebelumnya hidup dari hasil hutan. Mereka sepakat pula membagi tanah di antara mereka. Tatkala perundingan sedang hangat-hangatnya, tiba-tiba muncul Puyung Gana meminta tanah bagiannya. Karena merasa jijik terhadap penampilan kakak sulungnya itu, tanpa pikir panjang Buih Nasi mengambil sebongkah tanah dan melemparkan padanya seraya berkata, “Ini ambillah tanah bagianmu dan pergilah dari sini.” Puyung Gana yang merasa marah

dan tersinggung lalu lenyap secara gaib dari pandangan mereka karena dia sejenis makhluk halus.

Keesokan harinya mereka mulai membuka ladang dengan menebangi pepohonan di hutan. Namun, betapa terkejutnya mereka ketika menyaksikan bahwa pohon-pohon yang ditumbangkan pada hari sebelumnya telah berdiri tegak kembali seperti sedia kala. Demikianlah keanehan yang terjadi berulang kali hingga akhirnya Buih Nasi diperintahkan melakukan penjagaan guna mengetahui apa yang terjadi. Ternyata pada malam harinya terdengar suara mengerikan dan satu-persatu pohon yang tumbang tadi berdiri lagi. Buih Nasi tidak takut sedikitpun dan mencari sumber suara itu. Ia lalu berhadapan dengan sesosok makhluk berwana hitam dan bertubuh tinggi besar. Terjadilah perang tanding di antara mereka tanpa ada yang kalah ataupun menang. Setelah beberapa lama berkelahi dan mengadu kesaktian, masing-masing pihak merasa lelah. Orang yang berbadan tinggi dan hitam itu mengakui bahwa dirinya adalah Puyung Gana. Ia merasa marah dengan perlakuan kasar Buih Nasi yang melemparkan segumpal tanah padanya. Mendengar hal itu Buih Nasi merasa menyesal dan meminta maaf kepada saudaranya. Ia bersedia mengakui Puyung Gana sebagai kakak kandungnya. Semenjak saat itu, usaha pembukaan ladang berjalan lancar, bahkan Puyung Gana mengajari mereka tentang cara-cara bercocok tanam yang benar dan juga upacara adat saat memulai membuka ladang agar roh-roh halus tidak marah.

Sudah menjadi adat dan kebiasaan suku ini untuk sembur-menyembur air saat mandi di sungai. Suatu ketika karena terlalu gembira, mereka lupa menyemburkan air pada Putung Kempat yang dianggap menyalahi adat. Oleh karenanya, Putung Kempat dijangkiti penyakit kusta akibat pelanggaran adat tersebut. Karena takut tertular penyakit, saudara-saudaranya mencari akal menyingkirkan Putung Kempat. Mereka mempunyai piring pusaka yang sangat besar dan setelah memuatinya dengan berbagai barang keperluan hidup, Putung Kempat diletakkan di atasnya dan dihanyutkan ke sungai. Saat hanyut itu, kakinya terjuntai ke dalam air dan dijilati ikan-ikan. Ajaibnya, berkat jilatan ikan itu luka-lukanya sembuh.

Piring raksasa terus hanyut hingga ke hilir Sungai Sepauk. Di sana Aji Melayu memasang bubu untuk menangkap ikan dan piring rakasa yang dikendarai Putung Kempat tersangkut padanya. Ketika Aji Melayu datang memeriksa bubunya, didapatinya Putung Kempat. Ia merasa heran bagaimana mungkin seorang wanita cantik terperangkap oleh bubunya. Putung Kempat menceritakan kisah

sedih yang dialaminya dan setelah dibujuk, ia bersedia mengikuti Aji Melayu ke tempat kediamannya. Bekas-bekas kusta masih tampak pada tubuhnya, tetapi oleh pengetahuan ilmu pengobatan yang dimiliki Aji Melayu penyakit itu dapat disembuhkan sehingga memulihkan kecantikan Putung Kempat. Terpesona oleh keelokannya, Aji Melayu berniat menikahi Putung Kempat. Namun, sebelum bersedia dinikahi, Putung Kempat berniat menguji kesaktian Aji Melayu. Ternyata Aji Melayu lulus dari semua ujian itu. Mereka berdua akhirnya menikah dan mempunyai anak bernama Dayang Lengkong yang menurunkan para raja Sintang. Silsilahnya hingga Dara Juanti adalah sebagai berikut:
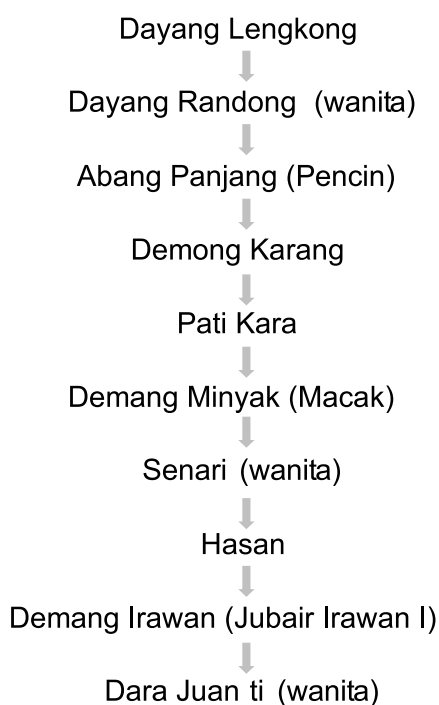
Terdapat sumber yang menyebutkan bahwa Aji Melayu datang ke Kunjau atau Kujau pada abad 4.[188] Patung Siwa berlengan empat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya disebut oleh penduduk sebagai patung Putung Kempat.

Demang Irawan merupakan seorang tokoh yang gemar berpetualang dan kerap mengunjungi daerah-daerah baru bersama para pengikutnya. Suatu kali, mereka menyusuri Sungai Kapuas dan tiba di daerah Tempunak. Keadaan daerah itu masih

188. Lihat *Sintang Dalam Lintasan Sejarah*, halaman 15.

kurang aman karena kerap terjadi pertikaian masalah perbatasan antara suku Dayak Desa' dan Dayak Linoh. Konflik ini akhirnya berhasil didamaikan oleh Demang Irawan sehingga suku-suku tersebut menggangkatnya sebagai pemimpin mereka. Dengan demikian, wilayah Sintang meluas hingga Tempunak. Pada kurang lebih abad 13, Demang Irawan memindahkan pusat kekuasaan kerajaannya ke Senatang yang terletak di persimpangan antara Sungai Kapuas dan Melawi. Nama inilah yang kelak berubah menjadi Sintang. Semasa kekuasaannya, wilayah kekuasaan Sintang melebar pula hingga Sepauk.

Setelah Demang Irawan wafat, takhta beralih kepada Dara Juanti yang menikah dengan Patih Logender dari Jawa. Konon semasa pemerintahan mereka, Sintang mengalami kemajuan dan kemakmuran. Kedatangan Patih Logender sendiri adalah dalam rangka ekspedisi Pamalayu. Ia melanjutkan perjalananannya hingga pedalaman Kalimantan dan tiba di Sintang. Patih asal Jawa ini disambut baik oleh Demang Irawan. Pernikahan antara Patih Logender dan Dara Juanti dibuktikan dengan adanya seperangkat gamelan dan sebongkah tanah yang telah membatu, yang dipercaya berasal dari Jawa (Majapahit). Benda-benda tersebut masih dapat dijumpai di Museum Dara Juanti, Sintang. Bersama dengan Patih Logender turut serta pula 12 keluarga asal Majapahit. Mereka merupakan cikal bakal suku Lebang Nado. Anggota suku ini masih menggunakan bahasa yang mirip sekali dengan bahasa Jawa serta membuat hasil kerajinan yang serupa dengan kerajinan Jawa.[189]

Alkisah, Dara Juanti memiliki adik bernama Demong Nutup yang pergi merantau ke Jawa dan lama tak ada kabar beritanya. Ternyata, Demong Nutup ditipu dan ditawan oleh raja di Jawa. Merasa khawatir dengan nasib adiknya, Dara Juanti menyamar sebagai seorang pria dan berlayar ke Jawa disertai para pengawalnya yang seluruhnya wanita. Raja di Jawa mengetahui perihal kedatangan Dara Juanti dan mengatur siasat. Mereka diam-diam menaruh sebuah benda berharga berupa kura-kura emas di kapal Dara Juanti. Sepasukan tentara Jawa akan ditugaskan menggeledah kapal Dara Juanti dan menuduhnya sebagai pencuri. Tetapi, Dara Juanti mengetahui niat mereka dan dengan kesaktiannya mengubah kura-kura emas itu menjadi benda lainnya. Benarlah keesokan harinya datang pasukan kerajaan di Jawa hendak memeriksa isi kapal. Dara Juanti mengajukan persyaratan bila mereka tak menemukannya, Demong Nutup harus dibebaskan. Pemimpin pasukan menyanggupinya dan ketika kura-kura emas

189. Lihat *Sintang Dalam Lintasan Sejarah*, halaman 21.

yang mereka cari tak kunjung ditemukan, Demong Nutup diserahkan kepada Dara Juanti. Setibanya kembali di Sintang, Demong Nutup mengasingkan diri ke dekat Sungai Suhaid, Kapuas Hulu.

Dara Juanti tidak memiliki anak karena itu ia mengangkat seseorang bernama Abang Samad sebagai putra dan penggantinya. Raja-raja Sintang berikutnya setelah Abang Samad secara berturut-turut adalah Jubair Irawan II, Abang Suruh, dan Abang Tembilang (Abang Pencin) yang bergelar Pangeran Agung.

Abang Tembilang merupakan penguasa Sintang pertama yang menganut agama Islam. Ia digantikan oleh putranya, Abang Tunggal, yang bergelar Pangeran Tunggal (1715–1725). Saudara perempuan Pangeran Tunggal yang bernama Nyai Cili menikah dengan Mangkunegaran Malik, Raja Embaluh (Ambalau) di Kapuas Hulu. Semasa pemerintahan Pangeran Tunggal, Sintang diserang oleh suku Kayan dan Tebidah dari Melawi. Begitu dashyatnya serangan itu sehingga Pangeran Tunggal terpaksa mengungsi ke Tempunak dan Sepauk guna mengumpulkan bala bantuan. Sementara itu, Nyai Cili mengungsi ke Embaluh. Putra Pangeran Tunggal bernama (Pangeran Purba), Raden Paruba, dibantu oleh panglima perang kerajaan, Singa Pati Leket, melakukan perlawanan sebisanya terhadap suku Kayan dan Tebidah. Dalam makalah *Aji Melayu: Pendiri Kerajaan Sintang dan Perkembangan Sejarah Kerajaan Melayu di Kabupaten Sintang*, halaman 7, tokoh bernama Mangkunegaran Malik di atas disebut Mangku Melik. Pada sumber tersebut dikatakan bahwa Mangku Melik telah bertapa di sebuah teluk sebelah timur Sintang dan mendengar suara gaib bahwa ia diperintahkan mengabdi kepada Raja Sintang, karena perilakunya yang sopan santun, Raja Sintang menerimanya dengan senang hati. Mangku Melik kemudian diterima sebagai pegawai kerajaan dan karena kemampuan kerja serta kesetiannya ia dinikahkan dengan Nyai Cili.

Tak lama kemudian, tibalah Pangeran Tunggal beserta bala bantuan yang terdiri dari suku Mualang, Kantuk, Linoh, Desa, dan Seberuang. Raja Mangkunegaran Malik tak ketinggalan pula menerjunkan pasukan suku Iban dan Punan. Kedua suku ini cukup ditakuti karena mahir memenggal kepala musuh-musuhnya (mengayau). Besarnya jumlah bala bantuan yang datang menciutkan nyali pasukan Kayan dan Tebidah sehingga mereka terpaksa melarikan diri. Pasukan gabungan terus mengejar mereka dan sanggup menguasai kubu pertahanan terakhir Kayan di Nanga Mau. Panglima Singa Pati Leket melanjutkan pengejarannya ke Nanga Tebidah dan mematahkan sisa-sisa kekuatan penyerang. Sejak itu, suku Kayan dan Tebidah tunduk

di bawah kekuasaan Sintang. Dengan demikian, Kerajaan Sintang berhasil dipulihkan lagi dan bahkan bertambah luas wilayah kekuasaannya.

Sebelum meninggal, Pangeran Tunggal pernah berpesan agar yang menggantikannya adalah Abang Nata,[190] putra Nyai Cili dengan Mangkunegaran Malik (Raja Embaluh di Kapuas Hulu). Pangeran Tunggal sendiri sebenarnya mempunyai dua orang putra, yakni Pangeran Purba dan Abang Itut, tetapi Pangeran Purba telah menikah dengan putri Sultan Nanga Mengkiang dan selanjutnya pindah ke kerajaan tersebut. Meskipun demikian, tatkala tiba saatnya menjadi penguasa, Abang Nata masih terlampau kecil sehingga akhirnya diangkat dua orang menteri yang masing-masing bernama Pangeran Dipati dan Singa Pati Laket sebagai wali. Setelah dirasa cukup umur mengemban tanggung jawab sebagai seorang raja, barulah takhta diserahkan kepadanya. Abang Nata naik takhta dengan gelar Sultan Nata Muhammad Syamsuddin Sa'adul Khari Waddin. Ia merupakan penguasa Sintang pertama yang bergelar sultan.

Perkembangan penting pada kurun waktu ini adalah masuknya agama Islam ke Sintang yang dibawa oleh kaum pedagang Arab. Penyebar agama Islam lainnya adalah Penghulu Saman dari Banjar, Encik Samad dari Serawak, dan Rajo Dangki dari Minangkabau. Ulama asal Sintang yang terkemuka adalah Haji Ismail, ia dengan gigih berdakwah hingga akhir hayatnya.

Pada zaman Sultan Nata, terdapat berbagai perombakan dan kemajuan di Sintang, salah satunya adalah pembangunan masjid pertama di ibu kota kesultanan walaupun ukurannya tidak besar dan hanya dapat menampung lima puluh orang. Wilayah kekuasaan Sintang juga makin meluas hingga ke Ketunggau Hilir, Ketunggau Hulu–perbatasan dengan Serawak, dan Melawi. Pasukan Sintang berhasil dipukul mundur saat melancarkan serangan untuk menaklukkan Kerajaan Madong.

Sultan menetapkan beberapa keputusan penting seperti menjadikan Sintang sebagai kesultanan Muslim, penguasanya bergelar sultan, penyusunan undang-undang kerajaan yang terdiri dari 32 pasal, pendirian masjid sebagai sarana beribadah, dan pembangunan istana kesultanan. Sultan Nata menikah dengan Dayang Mas Kuma dan memperoleh seorang anak bernama Adi Abdurrahman. Setelah Sultan Nata meninggal pada 1736, putranya itu menggantikannya dengan gelar Sultan Abdurrahman

190. Menurut buku *Sintang Dalam Lintasan Sejarah*, halaman 29, yang menggantikan Pangeran Tunggal adalah Raden Paruba.

Muhammad Jalaluddin yang dikenal juga dengan sebutan Sultan Pikai atau Sultan Aman. Ia menikah dengan Utin Purwa, putri Raja Sanggau dan memiliki dua orang anak, yakni Raden Machmud dan Adi Abdurrosyid.

Sultan Aman memajukan pertanian di Sintang sehingga rakyat tak pernah kekurangan makanan. Pada zamannya diadakan perlombaan perahu di Sungai Kapuas, adapun perahu yang kerap dipergunakan masa itu sanggup memuat 60 orang beserta seorang pengemudi di belakang dan satu orang penabuh gong di bagian depan. Para peserta perlombaaan mengenakan pakaian seragam berwarna-warni sehingga menambah semaraknya suasana. Rakyat yang begitu meminati perlombaan ini selalu berbondong-bondong menyaksikannya bersama raja mereka. Kesempatan ini dipergunakan pula sebagai ajang mencari jodoh bagi para bujangan.

Putra sultan, Adi Abdurrosyid, menikah dengan Utin Ibud, putri Kerajaan Sanggau, menjadi sultan Sintang berikutnya (juga dikenal sebagai Sultan Cecep), sementara itu saudaranya diserahi jabatan sebagai mangkubumi. Sultan membangun masjid baru menggantikan yang lama, tetapi ia tak lama memerintah dan meninggal kurang lebih pada 1796 setelah menderita sakit. Penggantinya adalah putranya, Adi Muhammad Nuh, yang bergelar Sultan Ratu Ahmad Komaruddin. Semasa kekuasaan sultannya, datanglah rombongan Belanda untuk pertama kalinya pada Juli 1822 di bawah pimpinan J.H. Tobias, komisaris perusahaan Kust van Borneo. Tujuan kedatangannya adalah merundingkan masalah perdagangan dan perjanjian perlindungan bagi Sintang. Sultan jatuh sakit dan wafat pada November tahun itu.

Sultan Ratu Ahmad Komaruddin memiliki empat orang putra, yakni Gusti Djemadin (Pangeran Suma), Gusti Muhammad Djamaluddin atau Gusti Muhammad Yasin (Pangeran Adipati), Abang Abu (Pangeran Laksamana), dan Abang Abdullah (Pangeran Prabu). Sebagai pengganti almarhum sultan adalah Pangeran Suma. Kendati demikian, ia kurang menyukai kehadiran Belanda. Dengan licik Belanda mengadu domba antara Pangeran Suma dan Pangeran Adipati. Karena tak menghendaki pertikaian berlanjut, Pangeran Suma menyerahkan kekuasaan kepada adiknya.

Dengan demikian, Gusti Muhammad Yasin naik takhta dengan gelar Pangeran Adipati Muhammad Djamaluddin. Pada bulan yang sama datanglah misi Belanda kedua di bawah pimpinan D.J. van Dungen dan C.F. Goldman dengan juru bicaranya salah seorang kerabat Kesultanan Pontianak bernama Syarif Ahmad Alkadrie. Kunjungan itu menghasilkan kesepakatan dagang yang dituangkan dalam

Kontrak Sementara (*Voorlooping Contract*), penandatangananannya berlangsung pada 2 Desember 1822. Setelah itu, menyusul pula perjanjian berikutnya yang masing-masing ditandatangani pada 1823, 1832, 1847, dan 1855. Perjanjian-perjanjian tersebut membuka peluang bagi Belanda ikut mencampuri urusan pemerintahan Sintang yang berdampak negatif terhadap kekuasaan raja. Belanda kerap mengadu domba para pegawai kerajaan sehingga memperlemah wibawa Kesultanan Sintang.

Pada 24 November 1823, ditandatangani kontrak dengan pemerintah kolonial Belanda yang terdiri dari 14 pasal. Adapun ringkasan perjanjian tersebut adalah sebagai berikut.[191]

- Pasal 1: Kerajaan Sintang mengakui pemerintah kolonial Belanda sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
- Pasal 2: Pemerintah Belanda memberikan wilayah Sintang sebagai kerajaan merdeka dan akan memberikan perlindungannya.
- Pasal 3: Izin mendirikan kubu pertahanan bagi pasukan pemerintah kolonial.
- Pasal 4: Penguasa Sintang bersedia mengadakan perundingan dengan residen, selaku wakil pemerintah Belanda.
- Pasal 5: Orang-orang Cina, Melayu, Bugis, dan orang asing lainnya tunduk pada kekuasaan pemerintah kolonial.
- Pasal 6: Emas dan barang tambang lainnya berada di bawah pengawasan pemerintah kolonial Belanda.
- Pasal 7: Penguasa Sintang wajib menegakkan hukum di kerajaannya.
- Pasal 8: Orang asing tak boleh menetap di Sintang tanpa seizin pemerintah kolonial.
- Pasal 9: Orang Cina hanya boleh menetap di Sintang atas seizin Residen Pontianak.
- Pasal 10: Orang Cina tak boleh mengadakan perjalanan ke pedalaman tanpa izin pemerintah kolonial.
- Pasal 11: Mata uang yang berlaku di Pontianak juga diterima di Sintang.
- Pasal 12 : Sintang mengizinkan orang Dayak menanam kopi, padi, lada, dan hasil bumi lainnya, serta menjamin kesejahteraan mereka.
- Pasal 13: Sintang harus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lainnya yang sama-sama tunduk di bawah kekuasaan pemerintah kolonial.
- Pasal 14: Sultan Sintang menjalin hubungan yang baik dengan warga Dayak.

191. Lihat *Sintang Dalam Lintasan Sejarah*, halaman 90–97.

Pasal-pasal di atas mencerminkan berakhirnya kedaulatan Sintang. Belanda segera membuka kantor di Sintang dan menempatkan H. van Cafferon sebagai asisten residennya.

Pangeran Adipati mangkat pada 1855 dan digantikan oleh putranya, Adi Abdurrasyid Kesuma Negara, yang bergelar Panembahan Abdurrasyid. Pada zamannya kerap terjadi pemberontakan melawan Belanda, seperti Perang Tebidah I dan II, Perang Pangeran Mas, Perang Abang Kadhi, serta Perang Padung, yang kesemuanya dapat ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah ia meninggal, takhta Kesultanan Sintang diduduki oleh Panembahan Ismail (1899–1905). Menjelang akhir pemerintahannya, pemberontakan sudah agak mereda sehingga panembahan diundang ke Bogor oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 1905. Ia diterima dengan sambutan meriah, namun di balik semua itu, ia harus menandatangani suatu kontrak politik baru. Inti kontrak tersebut sesungguhnya memperkecil kekuasaan Kerajaan Sintang. Setelah penandatanganan dilakukan, panembahan dikelabui dengan penganugerahan gelar baru dan sebuah medali emas. Seolah-olah pangkatnya dinaikkan, namun sebenarnya ruang geraknya dipersempit. Tidak lama setelah kembali ke Sintang, panembahan jatuh sakit dan wafat pada itu. Ia digantikan oleh putranya, Panembahan Abdul Majid Pangeran Ratu Kesuma.

Pada 1907, keluarlah surat keputusan Residen Kalimantan Barat no. 6973 tertanggal 12 Maret 1907, yang isinya berupa perintah pendirian sebuah sekolah pemerintah kelas dua di Sintang.

Panembahan Abdul Majid sudah pernah menandatangani kontrak pada 1887, tetapi diperbaharui lagi pada 1913 dengan isi sebagai berikut:

- Semua orang tanpa kecuali harus membayar pajak (*belasting*).
- Hak atas tanah yang dimiliki oleh anak-anak raja dihapuskan.

Kendati demikian, panembahan dianggap tak becus melaksanakan isi kontrak tersebut sehingga dituduh tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Itulah sebabnya, ia ditangkap dan diasingkan ke Jawa. Selama dalam pengasingannya, pemerintahan Sintang dipegang oleh Abdul Muhammad Jum selaku wakil sultan. Sejak itu, Sintang berada sepenuhnya dalam pengendalian pemerintah Belanda. Ketiga anaknya juga ikut diasingkan ke Jawa, namun mereka disekolahkan oleh pemerintah kolonial.

Panembahan Abdul Muhammad Jum sendiri sangat memperhatikan pendidikan. Pada 1917, ia mengusulkan pendirian sebuah sekolah yang disebut HIS (*Hollands Inlands School*) dan terdiri atas tujuh kelas. Pemerintah Belanda menerima usul yang baik ini dan setahun kemudian sekolah tersebut direalisasikan dengan W.B. Pabst sebagai kepala sekolahnya yang pertama. Demi mencerdaskan rakyatnya, panembahan mengeluarkan aturan yang ketat. Ia memaksa seluruh rakyat untuk bersekolah. Barangsiapa yang tidak mengindahkan ketentuan ini akan dihukum. Rakyat yang tinggalnya jauh di pedalaman diajak bersekolah dan berdiam di rumah raja. Bagi mereka yang pandai, namun tak sanggup membayar uang sekolah atau membeli pakaian, raja akan berusaha membantunya. Panembahan juga berupaya keras memajukan pertanian dan peternakan di daerahnya. Usaha perkebunan karet ikut pula digalakkan sehingga menambah kemakmuran rakyat.

b. Kerajaan Sintang Pada Zaman Jepang dan Kemerdekaan

Penguasa Sintang selama zaman Jepang adalah Raden Abdulbahri Danu Perdana. Ia ikut menjadi korban keganasan bala tentara Jepang yang curiga adanya gerakan menentang kekuasaan mereka. Untuk mengisi mengisi kekosongan takhta Sintang, diangkatlah keponakan Panembahan Abdulbahri Danu Perdana yang bernama Raden Syamsuddin, tetapi ia diberhentikan oleh Belanda pada 1945 dan digantikan oleh Adi Muhammad Johan selaku raja terakhir Sintang. Raden Syamsuddin sendiri ikut berjuang demi kemerdekaan Indonesia dan gugur pada 1947. Penghapusan daerah swapraja pada era 1960-an mengakhiri Kerajaan Sintang yang telah berdiri selama beberapa ratus tahun.

Pada zaman Belanda, wilayah Sintang dianggap sebagai suatu daerah *landschap* yang dibagi menjadi empat distrik (*onderafdeeling*), yakni Sintang beribu kota Sintang, Melawi beribu kota Nanga Pinoh, Semitau beribu kota Semitau, dan Boeven Kapuas beribu kota Putussibau. Pada zaman Jepang, secara umum tatanan pemerintahan tidak mengalami perubahan, hanya namanya saja yang diganti. Kepala negara diberi gelar *kenkarikan* dan wakilnya *bunkenkarikan*. Sedangkan di setiap distrik atau kecamatan diangkat seorang *gunco* (demang) yang kini setingkat dengan camat. Sesudah zaman kemerdekaan, Sintang menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat.

c. Peperangan Melawan Pemerintah Kolonial Belanda

Setelah masuknya Belanda ke Sintang, beberapa kali terjadi perlawanan melawan Belanda. Pergolakan pertama melawan pemerintah kolonial Belanda dipimpin oleh

kaum bangsawan seperti Pangeran Ratu Kesuma Idris di Nanga Kayan, Pangeran Kuning, Pangeran Anum, serta Pangeran Muda. Pemicunya adalah masalah penyerahan tanah kepada Belanda untuk membangun benteng pertahanan yang kokoh. Kaum bangsawan yang tidak setuju menyarankan agar perjanjian penyerahan tanah itu dibatalkan. Oleh karena usulan mereka tidak disetujui, diputuskanlah untuk menyerang Belanda secara mendadak pada malam hari. Kaum pemberontak membumihanguskan kubu pertahanan Belanda, yang melakukan serangan balasan pada sore harinya. Pasukan para pangeran Sintang terpaksa melarikan diri dan dikejar-kejar oleh Belanda. Pengejaran dilakukan dengan menyusuri Sungai Melawi hingga ke hulu Sungai Serawai. Namun, upaya itu sia-sia karena para pejuang telah menyimpang ke Sungai Kayan dan Belabau. Setelah gagal menangkap para pangeran tersebut, Belanda berpura-pura mengajak berunding dan berjanji menjamin keselamatan mereka. Pangeran Kesuma Idris menerima undangan ini, tetapi langsung ditangkap dan diasingkan ke Karawang hingga wafat pada 1857.

Penangkapan Pangeran Kesuma Idris tidak menyurutkan perlawanan. Perjuangan kini diteruskan oleh Pangeran Muda, putra Pangeran Kuning dan kemenakan Pangeran Kesuma Idris. Kelicikan Belanda dalam menangkap pamannya itu mengobarkan amarah Pangeran Muda. Perlawanan ini berlangsung terus hingga Pangeran Kuning meninggal pada 1857 dan Pangeran Muda pada 1860. Selama hidupnya, Pangeran Muda pernah bersumpah bahwa jangankan jenazahnya, ulatnya pun tidak sudi berjumpa dengan Belanda. Perjuangan para pangeran ini dikenal sebagai Perang Tebidah I.

Pada 1867, datanglah seseorang dari Banjar yang bernama Pangeran Mas. Ia terdorong untuk pergi ke Sintang karena mendengar bangkitnya perjuangan-perjuangan melawan kekejaman Belanda. Setibanya di sana, ia langsung bergabung dengan para pejuang Sintang yang menyambutnya dengan hangat. Mereka sepakat menyerang benteng pertahanan Belanda di Batu Baning, hulu kampung Ladang sekarang. Asisten residen yang bernama Kefron saat itu sedang menumpang kapal *Sri Borneo*. Kapal yang ditumpanginya kandas karena air sedang surut. Mereka diserang oleh para pejuang Sintang dan pecahlah baku tembak yang sengit. Di antara mereka hanya empat orang yang selamat. Beberapa hari setelah berlangsungnya pertempuran ini, Pangeran Mas jatuh sakit dan meninggal dunia sehingga para pengikutnya menjadi tercerai-berai.

Tokoh perlawanan berikutnya adalah Abang Kadri yang berasal dari Sekadau. Ia datang ke Sintang dan menikah dengan putri suku Kebahan yang bernama di Nanga Pinoh dan dikaruniai tiga orang putra, yaitu Abang Abdulrais, Abang Noh, dan Abang Jafar Sidik. Pada 1869, ia memutuskan untuk bangkit melawan Belanda. Namun, karena kurangnya persenjataan dengan mudah pemberontakan itu dipatahkan. Abang Kadri ditangkap dan dipenjara di Sintang, namun dapat meloloskan diri. Ia lari ke Kampung Durian dengan disertai oleh Abang Noh dan Abang Jafar Sidik. Belanda berhasil menangkap mereka lagi dan selanjutnya para pejuang itu ditahan di Teluk Melano, Ketapang.

Perang Tebidah II yang terjadi pada 1890 dipimpin oleh empat orang suku Dayak Kayan, yakni Nata, Apang Labung, Abang Laung, dan Apang Rabat. Untuk memadamkannya Belanda mengirimkan pasukan berkekuatan 120 orang yang dipimpin oleh Residen Trom dan seorang *overste* (setingkat letnan kolonel). Bahkan Panembahan Ismail, Raja Sintang, juga diikut-sertakan dalam ekspedisi militer itu demi melemahkan moral para pejuang. Kendati demikian, hal ini tidak menciutkan semangat para pejuang dalam melawan Belanda.

Semasa pemerintahan Panembahan Abdul Majid berkobar lagi perlawanan rakyat. Kali ini dipimpin oleh Panggi, Ruguk, dan Ranggas. Mereka hendak melancarkan serangan dari Batang Tuk dan Belitang (Jangkit). Namun, rencana ini bocor sehingga Belanda mengadakan langkah-langkah antisipasi. Belanda mendaratkan prajuritnya di Jangkit dan memerangi pasukan Panggi. Tetapi kali ini pasukan pejuang Panggi lebih unggul dan salah seorang kapten Belanda bernama Peiner berhasil dibunuh dengan tebasan mandau di kepalanya. Kekalahan ini mendorong Belanda menurunkan lebih banyak pasukan lagi dan melakukan pengejaran terhadap Panggi. Pasukan Belanda yang dipimpin van Hassel ini berhasil menangkap Panggi dan mengasingkannya ke Jawa. Peristiwa ini dikenal sebagai Perang Panggi

Pemberontakan berikutnya dipimpin oleh seorang suku Dayak bernama Apang Semangai (Dunda) yang berasal dari Nanga Payak. Anak buah Apang Semangai berhasil menewaskan seorang kontrolir Belanda bernama Jansen ketika sedang menyusuri Sungai Payak guna menangkap Apang Semangai. Dari tempat persembunyiaannya, Apang Semangai menembak Jansen hingga tewas. Tiga orang pengawal kontrolir Belanda lari meninggalkan tempat itu. Kemudian Apang Semangai naik ke atas sampan dan memenggal kepala Jansen. Selanjutnya, mayat Jansen yang sudah tak berkepala

itu dihanyutkannya di Sungai Payak. Belanda memperketat pengejarannya dan baru sanggup menangkap Apang Semangai empat tahun kemudian. Konon, saat ditangkap Apang Semangai masih membawa-bawa tengkorak Jansen. Ia dijatuhi hukuman dua puluh tahun penjara dan diasingkan ke Batavia. Namun, dua belas tahun kemudian ia dibebaskan karena kelakuannya yang baik selama dalam penjara.

d. Perlawanan Abdul Kadir Raden Tumenggung Setia Pahlawan, Tokoh Dari Melawi

Melawi merupakan kerajaan bawahan Sintang, yang kini terletak di Kabupaten Melawi. Para penguasanya merupakan pejabat Kerajaan Melawi yang diberi gelar raden tumenggung. Abdur Kadir Raden Tumenggung Setia Pahlawan (1771–1875)[192] merupakan kepala pemerintahan Melawi yang terkenal gigih dalam menghadapi kolonialisme Belanda. Ia berhasil menyatukan suku Melayu dengan Dayak sehingga dapat memajukan potensi daerahnya. Namun, ia kurang menyukai ambisi Belanda yang ingin menanamkan lebih banyak pengaruhnya di kawasan tersebut. Di sini Abdul Kadir menghadapi dilema karena sebagai bawahan Raja Sintang ia harus setia kepada rajanya, yang juga berarti setia kepada pemerintah Belanda. Oleh karenanya, ia lalu melakukan peran ganda. Pada satu pihak ia tampak setia kepada Belanda, tetapi secara diam-diam menghimpun kekuatan untuk melawan penjajah. Atas prakarsanya dibentuk laskar-laskar perlawanan rakyat untuk menghadapi Belanda.

Demi memenangkan simpati kepala daerah Melawi ini, Belanda memberikan hadiah uang dan gelar Setia Pahlawan agar sikapnya melunak pada 1866. Kendati demikian, upaya ini tetap gagal membuat Abdul Kadir mengubah pendiriannya. Belanda kehilangan kesabaran dan melancarkan operasi militer ke Melawi pada 1868. Pertempuran tak dapat dihindarkan lagi. Meskipun tak memimpin pertempuran secara langsung, Abdul Kadir dapat memperoleh berbagai informasi rahasia dan berharga mengenai penyerbuan Belanda itu. Dengan demikian, operasi militer Belanda dapat dikacaukan.

Antara 1868–1875, Abdul Kadir dapat menerapkan strategi peran gandanya tersebut, tetapi Belanda akhirnya dapat mencium siasat itu dan menangkap Abdul Kadir pada 1875 serta memenjarakannya di Benteng Nanga Pinoh. Tokoh yang kelak

192. Telah diangkat sebagai pahlawan nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/ TK/ Tahun 1999, tanggal 13 Oktober 1999.

menjadi salah seorang pahlawan nasional ini wafat tiga minggu kemudian dalam usia 104 tahun. Dia dimakamkan di Natali Mungguk Liang, Melawi.

e. Sosial Kemasyarakatan

Sintang pada kurang lebih awal abad 20
Sumber: *Winkler Prins' Geïllustreerde Encyclopaedie*. 4th ed.

Ada dua suku utama di Sintang, yakni Melayu dan Dayak. Warga Melayu lebih banyak mendiami kawasan pesisir Sungai Kapuas dan Melawi serta menganut agama Islam, mata pencaharian warga Melayu juga lebih banyak mengandalkan kedua sungai tersebut. Suku Dayak mendiami kawasan pedalaman, seperti di hutan Sintang, mata pencaharian mereka lebih banyak mengandalkan hasil hutan. Lebih jauh lagi, dari segi kepercayaan, banyak warga Dayak yang masih memegang teguh tradisi nenek moyang mereka. Kendati adanya perbedaan ini, masing-masing suku sanggup bekerja sama dengan baik dan terkadang terjadi juga percampuran atau akulturasi antara budaya Dayak dan Melayu.

XVII. SUHAID

Konon Kerajaan Suhaid merupakan perkampungan suku Dayak yang dipimpin oleh seorang tokoh bernama Ripong pada masa kurang lebih bersamaan dengan pemerintahan Abang Tajak di Selimbau. Rangkaian penguasa Suhaid berikutnya

adalah Saman Agung, Payang Anom, Loyan Kyai Dipati Agung, dan Kyai Dipati Mangku.

Pada perkembangan selanjutnya, di Nanga Tawang terjadi perselisihan antara etnis Dayak dan Melayu yang mengakibatkan kekalahan di pihak Melayu. Itulah sebabnya, mereka melarikan diri ke kawasan yang kini dikenal sebagai Nanga Suhaid.[193] Sementara itu, Kiai Pati Udah, Raja Jongkong, mempunyai empat orang putra, yakni Abang Usman, Abang Alam, Abang Abdullah, dan Abang Nuh. Orang-orang Melayu yang melarikan diri itu bermusyawarah dan sepakat mengangkat Abang Usman sebagai pemimpin pemukiman baru mereka. Abang Usman kemudian digantikan oleh putranya, Pangeran Suma di Laga Mangku Negara (memerintah selama 75 tahun–± 1804–1879).

Dia merupakan raja pertama Suhaid yang menandatangani kontrak politik dengan Belanda. Penandatanganan kontrak itu berlangsung pada 1823. Selanjutnya, ia digantikan oleh putranya yang bernama Gusti Ismail dengan gelar Kesuma Anom Suriya Negara. Semasa pemerintahannya dibangun istana kerajaan tanpa memperoleh bantuan sedikitpun dari pemerintah kolonial. Konon, pembangunan istana ini dikerjakan oleh 72 orang. Karena lama tak didiami, istana tersebut kini mengalami kerusakan yang parah dan hanya tersisa tiang-tiangnya saja. Pada 1910, Suhaid dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda. Menurut penuturan Veth, Kerajaan Suhaid terdiri dari 12 *huizen* (rumah) dengan sekitar 150 penduduk Melayu. Sementara itu, orang-orang Dayak yang ditaklukkan Suhaid berjumlah kurang lebih 650 jiwa.[194]

XVIII. SUKADANA

Penguasa pertama Kerajaan Sukadana merupakan keturunan Sultan Siak yang bernama Raja Akil. Ia menjadi Raja Sukadana berawal pada 1827 ketika sebuah kapal Belanda mengalami musibah di Pulau Karimata. Raja Matan menuntut agar segenap muatan yang ada di kapal itu menjadi miliknya, padahal saat itu Karimata telah diserahkan kepada Belanda. Karenanya, Belanda memerintahkan Raja Akil menyerang Tanjungpura (Matan) dan berhasil mengalahkan rajanya yang melarikan diri ke daerah Ulu. Raja Akil diizinkan Belanda menguasa daerah Sukadana yang

---

193. Lihat *Buku Panduan KKL IV: Kota Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Sejarah Kerajaan di Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat*, halaman 101.
194. Lihat *Borneo's Wester-Afdeeling*, jilid 1, halaman 52.

sebelumnya pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Tanjungpura yang sudah ditinggalkan. Selanjutnya, Kota Sukadana dibangun kembali dan diberi nama Nieuwe Brussel (Brussel Baru). Raja Akil tidak disukai rakyat karena dianggap orang asing. Itulah sebabnya, ia ingin kembali saja ke Siak yang telah dikuasai oleh Belanda, tetapi tidak diizinkan. Raja Akil wafat pada 1849 dan dimakamkan di Sukadana.

Ia digantikan oleh Tengku Besar Anom (1849–1878) yang menyandang gelar panembahan. Setelah Tengku Besar Anom wafat, takhta Sukadana beralih kepada Tengku Putera (1878–1910). Tengku Andut (1910–1933), penggantinya, menandatangani *Korte Verklaring* pada 1 Juli 1911. Kontrak politik ini merupakan awal berlakunya pajak kepala di Sukadana.[195] Selanjutnya, yang berhak menggantikannya adalah Tengku Idris, tetapi saat itu yang bersangkutan sedang bekerja sebagai pegawai Belanda dengan jabatan kontrolir menteri di Simpang Dua. Karenanya, yang menggantikan Tengku Andut adalah Tengku Abdulhamid (1933–1940). Ketika Tengku Hamid meninggal dunia, barulah yang menggantikannya adalah Tengku Idris. Namun, belum lama memerintah ia telah menjadi korban kebengisan Jepang yang mencurigai adanya gerakan perlawanan di Kalimantan Barat.

Karena kekosongan pemerintahan di Sukadana, Jepang berupaya mencari penggantinya. Rakyat Sukadana sepakat mencalonkan Tengku Muhammad, tetapi ia sedang bersembunyi di Pulau Karimata. Karena itu, Jepang dengan susah payah mencari dan membujuknya agar bersedia pulang ke Sukadana dan diangkat sebagai panembahan baru. Tengku Muhammad kemudian memerintah Sukadana antara 1943–1945, namun saat Belanda datang kembali untuk memulihkan kekuasaannya dengan membonceng pasukan Sekutu, ia digugat oleh rakyat dan dituntut mengundurkan diri karena dianggap bukan pewaris yang sah. Panembahan dengan segera digantikan oleh saudaranya yang bernama Tengku Adam. Namun, ia hanya sempat memerintah beberapa bulan saja. Rakyat menyadari bahwa Tengku Muhammad tidak bersalah dan meminta agar ia bersedia memangku kembali jabatan sebagai panembahan Sukadana. Tengku Muhammad memerintah lagi dari 1946 hingga 1956, saat penghapusan berbagai swapraja yang mengakhiri eksistensi Kerajaan Sukadana.

195. Lihat *Peta Tematik Kebudayaan dan Sejarah Pemerintahan Kalimantan Barat*, halaman 70.

XIX. TANJUNG PURA (MATAN)

a. Cikal Bakal Kerajaan Tanjung Pura

Legenda menyatakan bahwa kurang lebih enam ratus tahun yang lalu, hiduplah pasangan suami istri yang bernama Teruna Munang (sumber lain: Bintan Putin) dan Teruna Moning (sumber lain: Ratu Bintan Cuka). Mereka dikarunai seorang putra dan seorang putri yang masing-masing bernama Bujang Bengkung dan Dara Dondang. Kedua orang anak itu akhirnya menikah dan melahirkan tujuh orang anak perempuan, yakni Dayang Punta, Dayang Bakala, Dayang Bercandi, Dayang Bekeris, Dayang Berimbung, Dayang Bercalung, dan Dayang Putung.

Di antara mereka, Dayang Putung yang akan menjadi leluhur raja-raja Matan. Ia juga disebut Junjung Buih, yang juga dianggap sebagai nenek moyang beberapa kerajaan di Kalimantan Barat lainnya. Legendanya juga terdiri dari berbagai versi. Junjung Buih versi Sintang mempunyai nama lain Putung Kempat, sedangkan di Tanjungpura nama lainnya adalah Dayang Putung. Alkisah, Junjung Buih menaiki rakit yang terbuat dari pohon pisang dan hanyut tak tentu tujuannya hingga ia terdampar di sungai yang banyak tumbuhan kumpainya. Rakit itu kemudian hanyut lagi dan terdampar di Sungai Sentap. Di sana ia berjumpa dengan seorang bernama Rangga Sentap yang mengangkatnya sebagai anak.

Kini kisah beralih kepada seorang putra keturunan Raja Majapahit dari Jawa yang bernama Prabu Jaya. Ia merupakan anak bungsu di antara tujuh bersaudara. Saat itu, ayahnya yang telah lanjut usianya mencari tukang ramal dan menanyakan siapa di antara ketujuh putranya itu yang pantas menggantikannya. Ahli nujum menyatakan bahwa putra bungsunya merupakan orang yang paling tepat menjadi raja berikutnya. Saudara-saudaranya menjadi iri dan merancang rencana jahat. Mereka mencampurkan racun dalam makanan Prabu Jaya. Racun itu sungguh dashyat pengaruhnya sehingga tubuh Prabu Jaya menjadi gatal-gatal dan dipenuhi koreng mengerikan. Berbagai tabib gagal mengobatinya.

Raja merasa sedih menyaksikan hal itu, tetapi ia memerintahkan rakyatnya membuat sebuah perahu besar dan memuatinya dengan berbagai makanan serta barang keperluan hidup. Ia menitahkan agar putra bungsunya menaiki perahu itu dengan disertai pengikut-pengikutnya dan meninggalkan kampung halamannya. Perahu itu kemudian berlayar tanpa tujuan yang pasti. Prabu Jaya berdoa kepada dewata agar dianugerahi keselamatan. Ia terapung-apung di laut dan akhirnya tiba di sebuah muara

sungai yang kini disebut Kuala Kandang Kerbau. Di sana ia berhenti dan membuang jalanya untuk mencari ikan, tetapi setiap kali mengangkat jala, yang didapatnya hanya buah kedondong. Prabu Jaya menjadi kesal dan membuang buah kedondong itu ke darat. Karena memang kesenangannya adalah menjala ikan, Prabu Jaya terus menerus menebarkan jalanya. Anehnya, setelah itu ia memperoleh makin banyak ikan.

Sambil menjala ikan, Prabu Jaya memanggil buaya-buaya yang merupakan sahabatnya. Mereka muncul dari air karena mendengarkan panggilannya. Prabu Jaya lalu meniti di atas punggung buaya dan pada saat bersamaan muncul ikan patin dan belang ulin menjilat-jilat luka di sekujur tubuhnya. Secara ajaib lukanya itu sembuh dan Prabu Jaya terbebas dari penyakit akibat racun yang membuatnya jadi buruk rupa tersebut. Karenanya, hingga sekarang keturunan Prabu Jaya tidak berani memakan ikan patin serta belang ulin. Prabu Jaya terus menerus menjala hingga ke hulu sungai dan tiba di kawasan Sungai Sentap. Di sana, jalanya tersangkut dan tidak dapat ditarik kembali. Karena itu, demi menyelamatkan jalanya, Prabu Jaya menyelam ke dasar sungai. Ia berhasil memperoleh kembali jalanya yang tersangkut pada sebuah benda bulat. Ternyata itu adalah buah mundam dari emas, ketika diperhatikan dengan seksama di dalamnya terdapat rambut yang sangat panjang.

Prabu Jaya berpikir bahwa pemilik rambut ini pastilah putri yang cantik. Prabu Jaya dan pengikutnya mengayuh perahunya lebih ke hulu lagi dan tiba di dekat kediaman Rangga Sentap. Konon, untuk mencapai tempat kediaman Junjung Buih bukanlah perkara mudah karena perahu mereka kerap terhalang oleh tanaman kumpai (bakung) yang tumbuh lebat di sana. Karena tak sanggup menembusnya, Prabu Jaya mengutus anak buahnya kembali ke Jawa guna membuat sampan berhaluan besi dengan dayungnya yang terbuat dari besi pula. Akhirnya, setelah perahu yang dimaksud selesai dibuat dan dibawa ke sana, mereka sanggup menembus tumbuhan bakung itu serta tiba di tempat kediaman Dayang Putung dengan selamat.

Ternyata Dayang Putung juga menderita penyakit yang sama seperti Prabu Jaya. Kulitnya dipenuhi oleh luka-luka dan koreng yang mengerikan. Karena menderita penyakit semacam itu, Dayang Putung dibungkus dengan buih yang besar dan diletakkan di atas air. Karena pernah mengalami penyakit semacam itu, Pangeran Prabu Jaya segera memanggil segenap ikan patin dan belang ulin untuk menjilati segenap luka di sekujur tubuh Dayang Putung. Dayang Putung pun dibebaskan dari penyakitnya. Prabu Jaya melamar Dayang Putung yang bersedia menerima pinangan

tersebut dengan mengajukan empat syarat: kalung emas, perahu sepanjang tujuh depa, empat puluh orang pria dengan pasangannya, serta gamelan dan beberapa gong. Seluruh syarat itu dipenuhi oleh Prabu Jaya dan upacara pernikahan mereka lalu dilangsungkan di Pulau Jawa.

Mereka dikaruniai tiga orang putra yang bernama Pangeran Prabu, yang bergelar Raja Baparung dan dianggap sebagai pendiri Kerajaan Tanjungpura; Gusti Likar yang merupakan pendiri Kerajaan Meliau; dan Pangeran atau Gusti Mancar yang merupakan pendiri Kerajaan Tayan. Sesuai dengan pesan ayahnya, Raja Baparung memindahkan pusat pemerintahan Tanjungpura ke Sukadana. Terdapat sumber yang merunut silsilah Kerajaan Tanjung Pura dari Prabu Brawijaya yang kemudian menurunkan Raja Baparung atau Pangeran Prabu (1472–1487) dan Karang Tunjung.

Menurut sumber lainnya, cikal bakal Kerajaan Tanjungpura adalah Kerajaan Batu Bengaras yang diperintah Ratu Mangkub.[196] Dia membangun suatu kerajaan dengan menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang ada di sekelilingnya. Meskipun demikian, terdapat sekelompok masyarakat yang tak bersedia bergabung dengan Ratu Mangkub, yakni kaum Siak Bahulun. Mereka memilih berdiam di Pupuktagua Tanah serta kelak menurunkan Kerajaan Hulu Aik (Ulu Aik atau Hulu Air). Para ratu selanjutnya yang memerintah Batu Bengaras secara berturut-turut adalah Ratu Bintan Putih Bitara Putih, Ratu Bintan Jaga Bitara Jaga, Ratu Tari Batu, Ratu Saka Bitara Saka, Ratu Manguntang Pukat Mengawat, dan Ratu Nurnaningsih. Semasa pemerintahan Ratu Manguntang Pukat Mengawat berlangsung perjanjian kerjasama denga masyarakat Siak Bahulun. Pada perkembangan selanjutnya putri Junjung Buih menikah dengan Prabu Jaya sebagaimana yang telah diriwayatkan di atas.

Prabu Jaya dikenal pula sebagai Maharaja Karang Burjaya. Semasa pemerintahannya telah terjalin persahabatan dengan negeri-negeri lain, baik di dalam maupun luar Nusantara, seperti Sriwijaya, Cina, dan India. Sebagai seorang penguasa, Prabu Jaya sangat memperhatikan bidang keagamaan, yang terbukti dengan dikirimkannya utusan ke Sriwijaya guna mempelajari bahasa Sansekerta yang dipergunakan untuk menulis naskah-naskah suci Buddhis.

196. Lihat *Peta Tematik Kebudayaan dan Sejarah Pemerintahan Kalimantan Barat*, halaman 56.

b. Perkembangan Kerajaan Matan

Pada masa pemerintahan Raja Baparung, persahabatan yang baik terjalin dengan Mataram, Bali, dan Kutai.[197] Setelah Raja Baparung mangkat, putra mahkota Karang Tunjung (1431–1501 atau 1487–1504) naik takhta menggantikannya. Menurut legenda, berkat kesaktiannya, daun tunjung yang kecil itu sanggup menahan berat tubuhnya. Ia sangat gemar tidur-tiduran di atas daun bunga tunjung. Itulah sebabnya, ia dinamakan pula Raja Karang Tunjung. Sebutan inilah yang kelak menjadi asal mula nama Kerajaan Tunjung yang kelak diubah lagi menjadi Tanjung Pura. Raja Karang Tunjung juga dinamakan Panembahan Pudong Prasap atau Tuntong Asap, karena kerap memerintahkan rakyat membakar hutan guna dijadikan lahan pertanian. Dengan demikian, boleh disimpulkan bahwa raja ini mementingkan kegiatan agraris. Sebagai catatan, terdapat sumber yang menyebutkan bahwa Karang Tunjung telah memindahkan ibu kota kerajaan yang sebelumnya berpusat di Negeri Baru ke Sukadana sehingga selanjutnya kerajaan itu disebut Sukadana.

Setelah Raja Karang Tunjung wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Panembahan Kalahirang (1501–1502). Ia berhasil memperluas wilayah Kerajaan Tanjungpura. Saat itu perbatasan utaranya mencapai Tanjung Datuk, perbatasan selatan mencapai Tanjung Puting, dan perbatasan timur berbatasan dengan Sintang. Raja menggalakkan hubungan dagang dengan Malaka dan Majapahit. Ada pula yang menyebutkan bahwa pengganti Karang Tunjung adalah Gusti Syamsuddin (disebut juga Pundong Asap atau Panembahan Sang Ratu Agung, memerintah 1504–1518). Selanjutnya, yang berkuasa di Tanjungpura adalah Panembahan Bandala (1502–1538 atau 1518–1533). Semasa kekuasaannya, Tanjungpura menjadi kerajaan maritim. Konon, Panembahan Bandala mempunyai armada dengan persenjataan yang kuat. Ia melayari perairan antara Banjarmasin dan Brunai, bahkan ia berani menyerang Pulau Karimata dan menundukkan rajanya. Demi menghindari konflik lebih lanjut dengan kerajaan tersebut, Panembahan Bandala lantas menikahi putri Raja Sambar dari Karimata.

Ketika Panembahan Bandala wafat, roda pemerintahan Tanjungpura dipegang oleh Panembahan Pangeran Anom (1526–1533). Ia digantikan oleh Sibiring Mambal yang bergelar Panembahan Dibarokh (1538–1550 atau 1533–1590) dikarenakan putra mahkota Giri Kusuma masih kanak-kanak. Semenjak saat itu, bila seorang putra mahkota masih belum cukup umur, keturunan Panembahan Dibarokh akan

197. Lihat *Peta Tematik Kebudayaan dan Sejarah Pemerintahan Kalimantan Barat*, halaman 57.

menjadi walinya. Setelah Giri Kusuma dewasa ia dinobatkan sebagai raja dengan gelar Panembahan Sorgi (1590–1604) dan dinikahkan dengan Ratu Mas Jaintan, Putri Kerajaan Landak. Semasa pemerintahannya datanglah Syech Husin yang bermaksud menyebarkan agama Islam di sana. Raja Giri Kusuma menyambutnya dengan baik, bahkan ia dinikahkan dengan putri saudara sepupu raja.

Saat istrinya sedang mengandung, Syech Husin memutuskan pulang sejenak ke Mekah. Sebelumnya, ia berpesan agar bila anaknya terlahir laki-laki hendaknya dinamai Syarif Hassan. Ternyata memang benar apa yang dikatakan Syech Husin itu. Istrinya melahirkan seorang anak lelaki dan diberi nama sesuai pesan ayahnya. Ketika Giri Kusuma sudah lanjut usia, ia ingin menjadikan Syarif Hassan sebagai penggantinya, tetapi ketika ia wafat Syarif Hassan belum dewasa sehingga untuk sementara pemerintahan dipegang oleh Ratu Mas Jaintan (1604–1622) dengan gelar Ratu Sukadana. Pada 1604, Belanda pertama kali mengunjungi Tanjungpura dengan alasan hendak membeli intan dan melihat pusaka kerajaan yang bernama Intan Kobi.

Pada 1622, Sultan Agung dari Mataram sedang berada di puncak kejayaannya dan hendak melebarkan sayap kekuasaannya. Oleh karena itu, ia mengutus Adipati Kendal bernama Baureksa menyerang Tanjungpura. Ratu Sukadana ditawan oleh mereka dan dibawa ke Jawa. Kurang lebih bersamaan dengan itu, Syarif Hassan yang sudah menginjak usia dewasa memegang kendali atas Kerajaan Sukadana dengan gelar Sultan Aliuddin atau Muhammad Syafiuddin (1622–1665). Ketika ia mangkat, putra mahkota yang bernama Gusti Jakar Kencana naik takhta dengan gelar Sultan Muhammad Zainuddin (1659–1717 atau 1665–1724).

Pada masanya, pusat pemerintahan dipindahkan ke Matan karena ibu kota yang lama kerap mengalami gangguan perompak. Oleh sebab itu, nama kerajaan berganti menjadi Matan. Ia mempunyai empat orang permaisuri, yakni Ratu Mas Indrawati, yang merupakan putri Panembahan Senggauk dari Mempawah; Utin Kerupa; Utin Kerupis; dan Nyaik Kendi yang merupakan putri suku Dayak Batu Lapis. Ratu Mas Indrawati kelak menikah dengan Opu Daeng Manambun, cucu Raja Luwu. Sementara itu, permaisurinya yang bernama Nyai Kendi mempunyai putra dua orang, yakni Pangeran Mangkurat dan Pangeran Ratu Agung.

Di bawah kekuasaan Sultan Muhammad Zainuddin, Kerajaan Matan menjadi menjadi aman dan makmur. Penyebaran agama Islam juga makin meluas karena ia turut pula mendukungnya. Hubungan internasional juga dikembangkannya,

umpamanya dengan sultan Brunai dan Johor. Dalam memerintah negerinya, Sultan Muhammad Zainuddin dibantu oleh saudaranya yang bernama Pangeran Agung. Kendati demikian, Pangeran Agung merasa kurang puas hanya menjadi pembantu saudaranya dan berkeinginan menjadi raja. Demi mewujudkan ambisinya, ia merancang kudeta guna mendongkel saudaranya dari tampuk kekuasaan. Perundingan rahasia diadakan dengan kedua menantunya yang piawai mengatur strategi perang. Setelah seluruh rencana disusun matang, kemudian mereka mengepung istana. Malam harinya, ketika sultan baru saja menunaikan sembahyang Isya, ia menerima kabar dari para pengawalnya yang masih setia bahwa istana telah dikuasai kaum pemberontak, bahkan seluruh anggota keluarganya telah ditawan Pangeran Agung. Kedua menantu Pangeran Agung itu lantas diangkat sebagai panglima perang dan mereka ditugaskan menantikan sultan di tangga masjid. Begitu keluar dari masjid, ia langsung diancam dan diperintahkan meninggalkan istana.

Sultan Muhammad Zainuddin melarikan diri ke Kerajaan Banjar dan mengisahkan kemalangan yang baru saja dialaminya kepada Sultan Banjar. Bersamaan dengan itu, ia mendengar bahwa sahabatnya, Raja Johor, Riau Lingga, diserang oleh Raja Kecil, tetapi ditolong oleh lima bersaudara dari Kerajaan Luwu di bawah pimpinan Opu Daeng Manambun. Karena itu, sultan berniat pula meminta pertolongan mereka guna memulihkan kekuasaannya. Sebelumnya, sultan pernah beberapa kali menyerang Pangeran Agung yang telah merebut kekuasaannya, namun selalu berujung dengan kegagalan. Bahkan pada serangan terakhir, sultan tertawan dan dipenjarakan oleh musuhnya. Kendati demikian, melalui perantaraan rakyat yang masih setia kepadanya, sultan sempat berkirim surat kepada Opu Daeng Manambun.

Kelima bersaudara keturunan Bugis itu sepakat menolong sultan. Setelah mohon diri kepada sultan Johor, mereka bertolak menuju ke Tanjungpura dan menyelidiki keadaan sultan saat itu. Ternyata sultan masih dalam keadaan sehat walafiat. Akhirnya, mereka berhasil mendudukkan kembali Sultan Muhammad Zainuddin ke singgasananya. Pangeran Agung dijatuhkan dari kekuasaannya tanpa perlu melalui banyak pertumpahan darah. Ia kemudian dijadikan tahanan kota di sebuah tempat yang terletak di Kuala Kandang Kerbau, lengkap dengan pengiring dan segenap keperluan hidupnya.

Opu Daeng Manambun terkesan akan kecantikan putri sultan yang bernama Puteri Kesumba. Ternyata sultan tidak keberatan menikahkan putrinya dengan Opu

Daeng Manambun. Sebagai tanda terima kasih karena telah membantu merebut kembali singgasananya, Sultan Muhammad Zainuddin menyatakan bahwa Opu Daeng Manambun beserta saudara-saudaranya bebas berdiam di mana saja dalam wilayah Kerajaan Matan. Mereka lalu mohon diri sejenak guna membantu Raja Johor menghadapi serangan raja-raja Riau. Pada 1722, barulah Opu Daeng Manambun pulang ke Matan.

Sultan Muhammad Zainuddin mangkat pada 1724 dan pemerintahan diteruskan oleh Gusti Kesuma Bandan yang bergelar Sultan Muhammad Muazzuddin (1724–1738). Ia memiliki tiga orang putra yang masing-masing bernama Gusti Bendung, Gusti Irawan, dan Gusti Muhammad Ali. Ketika Sultan Muhammad Muazzuddin mangkat, Gusti Bendung atau Pangeran Ratu Agung diangkat sebagai penerus singgasana Kerajaan Matan dengan gelar Sultan Muhammad Tajuddin (1738–1749). Sementara itu, putra kedua Sultan Muhammad Muazzuddin, yakni Gusti Irawan, menjadi raja di Kayong (Muliakerta) dengan gelar Sultan Mangkurat (Sultan Dirilaga) yang membawahi Kerajaan Kayong-Matan (sering pula disebut sebagai Kerajaan Tanjungpura II). Dengan demikian, terpecahlah Kerajaan Matan menjadi dua, yaitu Matan sendiri dan Kayong-Matan (Tanjungpura II). Sebelumnya, kurang lebih pada 1724, datanglah seorang ulama dari Arab yang bernama Habib Husein Alkadrie. Ia lalu dinikahkan dengan putri Sultan Kamaluddin yang bernama Nyai Tua. Dari pernikahan itu lahirlah dua orang putra, yakni Syarif Abdurahman Alkadrie dan Syarif Usman Alkadrie. Karena terjadinya perselisihan paham mengenai pelaksanaan hukuman terhadap nakhoda kapal yang berzinah, Habib Husein beserta putranya meninggalkan tempat itu dan menuju ke Kerajaan Mempawah.

Sementara itu, dalam literatur lain dicatat bahwa pada 1735 terjadi perebutan takhta antara putra-putra sultan. Opu Daeng Manambun menjadi penengah dan menetapkan bahwa Pangerah Mangkurat diangkat sebagai Raja Indralaya, Pangeran Agung Martadipura diangkat sebagai sultan di Kartapura (Tanah Merah), dan Pangeran Ratu Agung menjadi Panembahan di Simpang. Dengan demikian, Kerajaan Matan terpecah menjadi tiga. Tidak berapa lama kemudian, pada 1740 terdengar berita bahwa Panembahan Senggauk dari Mempawah wafat dan Opu Daeng Manambun diminta menggantikannya. Oleh karenanya, Opu Daeng Manambun kemudian bertolak ke Mempawah dan menjadi raja di sana. Perpisahan antara sultan dan Opu Daeng Manambun dipenuhi oleh rasa haru. Sultan mengantarnya dengan menumpang

sebuah perahu sampai ke daerah Juanta, sedangkan Opu Daeng Manambun beserta keluarga dan pengikutnya melanjutkan perjalanannya dengan tujuh buah perahu.

c. Kerajaan Matan dan Kayong Matan

Sepeninggal Sultan Muhammad Tajuddin, yang menggantikannya secara berturut-turut adalah Gusti Kencuran atau Sultan Ahmad Kamaluddin (1749–1762) dan Gusti Asma atau Sultan Muhammad Jamaluddin (1762/1792–1829/1830). Pusat pemerintahan Matan lantas dipindahkan ke Simpang dan kerajaan berganti nama menjadi Simpang Matan. Oleh karenanya, Sultan Muhammad Jamaluddin dianggap sebagai raja terakhir Matan. Lontaan dalam karyanya menyebutkan mengenai seorang raja bernama Sultan Muhammad Zainuddin II. Ia dikabarkan memindahkan pusat kerajaan yang semula berada di Sijenguk (Tanah Merah), hulu Sungai Pawan, ke Batu Pura. Konon menurut ceritera rakyat, perpindahan ini diilhami oleh mimpi sultan. Dalam mimpinya ia diperintahkan memindahkan ibu kota ke tempat lain. Untuk menentukan letak yang paling tepat, ia diharuskan membuat rakit dan menumpanginya. Ke mana rakit itu berhenti, di situlah ibu kota yang baru harus didirikan. Setelah beberapa jam menghiliri sungai, rakit terdampar pada sebuah batu di tempi Sungai Pawan. Penduduk di daerah sana menyebutnya Batu Pura. Ia lalu mengubah namanya menjadi Tanjungpura agar sesuai dengan nama kerajaannya. Dahulu nama kerajaan itu hanya didasari pada gelar nenek moyang keluarga kerajaan yang bernama Raja Karang Tunjung, namun kini namanya sesuai dengan nama ibu kotanya.

Pada zaman itu, Kerajaan Matan merupakan salah satu pusat perkembangan agama Islam di Kalimantan Barat, terutama berkat kedatangan Syekh Makhribi (wafat pada 1822) dari Arab. Ia kemudian dimakamkan di samping makam Sultan Muhammad Zainuddin II. Di sebelah kanan makamnya terdapat pula makam Imam Gedong yang pernah menjabat sebagai Imam Masjid Tanjungpura.

Pada 1822, pasukan pemerintah kolonial Belanda yang dipimpin G. Muller beserta Raja (Tengku) Akil dari Siak berniat menguasai Sukadana. Guna mengantisipasi hal itu, Sultan Muhammad Jamaluddin mundur ke daerah Sejenguk. Selanjutnya, pada 1827 Belanda menyerang Sukadana sebagai tanggapan atas tuntutan Sultan Muhammad Jamaluddin terhadap muatan kapal Belanda yang karam di Pulau Karimata. Serangan ini memaksa sultan mengundurkan diri dari Sukadana. Sebagai pengisi kekosongan kekuasaan di Sukadana, Belanda mengangkat Raja Akil sebagai penguasa Sukadana.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, di Kayong Matan berkuasa Gusti Irawan (Sultan Mangkurat). Pewarisnya secara berturut-turut adalah Pangeran Agung dan Panembahan Anom Kesuma Negara (Pangeran Jaya Anom) atau Muhammad Zainuddin Mursal (1829–1833). Pada 1833, Panembahan Anom diberhentikan sebagai raja karena dianggap tidak loyal terhadap Sultan Abdul Jalil Yang Dipertuan Syah Raja Negeri Sukadana. Kedudukannya sebagai raja dialihkan kepada kakak Pangeran Anom bernama Pangeran Cakra Negara (1833–1835). Belanda turut campur tangan dalam konflik ini dan mendudukkan kembali Pangeran Anom sebagai Raja Kayong-Matan terhitung semenjak 1835 hingga 1847.

Singgasana Kayong Matan beralih kepada putra Pangeran Jaya Anom, Panembahan Muhammad Sabran (1856–1908). Tatkala mewarisi kedudukan ayahnya yang berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda no.3 tertanggal 11 Maret 1847, usianya masih sangat muda sehingga roda pemerintahan kerajaan sementara waktu dipegang oleh suatu dewan yang diketuai Pangeran Mangkurat. Muhammad Sabran baru diangkat sebagai panembahan Kayong-Matan pada 1856. Ia memindahkan pusat pemerintahan kerajaan ke Mulia Kerta. Panembahan Muhammad Sabran memiliki tiga orang putra, yakni Uti Solihin yang bergelar Pangeran Bendahara, Uti Mukhsin bergelar Pangeran Laksamana, dan Gusti Busrah yang bergelar Pangeran Ratu. Panembahan telah menunjuk Gusti Busrah sebagai putra mahkota, namun ia meninggal secara mistrius, sedangkan putranya yang bernama Mas Saunan masih kecil. Oleh karenanya, takhta kerajaan diserahkan pada Uti Mukhsin atau Pangeran Laksamana (1909–1924) hingga Pangeran Mas Saunan dewasa.

Pangeran Mas Saunan kemudian merantau ke luar daerah dan sepulangnya ke kampung halamannya dinobatkan sebagai raja dengan gelar Panembahan Mas Saunan (1924–1943). Karena pernah mengamati kemajuan di luar daerahnya, ia kemudian merombak istananya agar tampak lebih modern. Ketika Jepang menguasai Kalimantan Barat, Panembahan Mas Saunan menjadi salah satu korban kekejian Jepang seperti beberapa raja dan panembahan di Kalimantan Barat lainnya. Meskipun demikian, menurut saksi mata, sebelum dipenggal oleh Jepang Panembahan Mas Saunan sempat melarikan diri dan menghilang. Hingga sekarang, dia tak diketahui lagi rimbanya.

d. Kerajaan Matan Semasa Penjajahan Jepang dan Kemerdekaan

Sepeninggal Panembahan Mas Saunan, antara 1945–1946 roda pemerintahan Kerajaan Matan dipegang oleh tiga orang pangeran, yakni Uti Halil yang digelari

Pangeran Mangkunegara, Uti Aplah yang digelari Pangeran Adipati, dan Uti Kencana yang digelari Anom Laksana. Ketiganya membentuk Majelis Pemerintahan Kerajaan Matan. Kemudian seiring dengan terbentuknya Federasi Kalimantan Barat, Matan juga ikut bergabung ke dalamnya sebagai bagian Republik Indonesia Serikat (RIS). Ketika federasi ini dibubarkan pada 7 Mei 1950 dengan surat keputusan no. 234/ R dan 235/ R, seluruh kepala swapraja yang ada di Kalimantan Barat harus melimpahkan wewenangnya kepada Republik Indonesia yang diwakili oleh Residen Kalimantan Barat.

Setelah itu, wilayah Kerajaan Matan, Sukadana, dan Simpang digabungkan dalam Kabupaten Ketapang. Pemerintahan swapraja berakhir dengan dikeluarkannya undang-undang no.27 tahun 1959. Kerajaan Matan selaku salah satu daerah swapraja juga ikut dihapuskan. Semua undang-undang ini menimbulkan keraguan pada Majelis Pemerintahan Kerajaan Matan, tetapi dengan ketetapan tanggal 29 Februari 1960, no.376/ Pem-A/ 1-6, beberapa anggota keluarga kerajaan-kerajaan di sana diikutsertakan dalam pemerintahan Kabupatan Ketapang. Bekas wakil panembahan Sukadana diperbantukan ke kantor Kawedanan Sukadana. Sementara itu, anggota-anggota Majelis Pemerintahan Kerajaan Matan diperbantukan ke kantor Kabupatan Ketapang. Dengan demikian, Kerajaan Matan boleh dikatakan telah berakhir.

e. Sosial Kemasyarakatan

Kerajaan Matan telah mengenal takaran pengukur volume yang disebut *gantang* dan terbuat dari kayu. Isinya dapat disetarakan dengan 4 ½ kg. Sebelum disahkan oleh kerajaan, rakyat tak boleh menggunakan penakarnya. Di sini yang dipentingkan adalah isi atau kapasitasnya harus sama dan seragam. Alat penakar itu kemudian ditulisi "Gantang Pangeran Jaya Anom." Kebijakan ini untuk mengajarkan nilai kejujuran kepada rakyat.

XX. TAYAN

Pendiri Kerajaan Tayan menurut Lontaan adalah putra Raja Brawijaya dari Majapahit, Gusti Likar. Ia merupakan saudara Raden Mancar, cikal bakal raja-raja Meliau. Bersama dengan Raden Mancar, ia meninggalkan Tanjungpura yang sering dilanda peperangan guna mencari daerah baru dan kemudian menetap di Tayan serta dianggap sebagai Raja Tayan yang pertama. Gusti Likar digantikan oleh kemenakannya, Gusti Ramal, yang merupakan putra Raden Mancar dengan gelar

Pangeran Marta Jaya Yuda Kesuma. Setelah Gusti Ramal wafat, ia digantikan oleh putranya, Suma Yuda, yang naik takhta dengan gelar Panembahan Tua.[198]

Berbeda dengan keterangan yang diperoleh dari buku karya Lontaan di atas, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Gusti Era Setiawan, silsilah Gusti Likar adalah sebagai berikut:
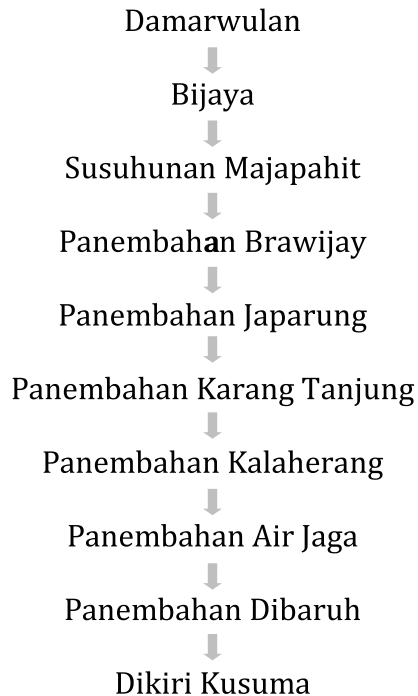
Dikiri Kusuma berputra Gusti Likar (Lekar) yang menjadi Raja Tayan pertama. Dikiri Kusuma sendiri adalah Raja Matan pertama yang memeluk agama Islam. Gusti Likar ditugaskan oleh ayahnya mengamankan upeti rakyat sepanjang Sungai Kapuas yang hendak diangkut ke Matan. Sebelumnya, pengangkutan upeti ini sering diganggu oleh orang yang menamakan dirinya Raja Kuala Labai. Dalam menjalankan tugasnya, Gusti Likar dibantu oleh seorang suku Dayak bernama Kai Jaga Raga. Ia menikah dengan putri Kai Jaga Raga bernama Enci' Periuk.

Gusti Likar digantikan oleh putranya bernama Gusti Gagok yang bergelar Pangeran Mancaningrat (1718–1751). Pada masa pemerintahannya, ibu kota Tayan dipindahkan ke Rayang, sekitar 20 mil (32 km) dari tempat semula. Gusti Gagok memiliki putra bernama Gusti Ramal yang menggantikannya dengan gelar Pangeran

198. Lihat *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, halaman 163–164.

Martajaya (1751–1780). Ia menikah dengan Utin Indut dan dianugerahi empat orang anak, yakni Gusti Kamarudin, Utin Blondo, Pangeran Mangku Negara, dan Pangeran Tanjung. Sepeninggal Gusti Rama, yang menjadi Raja Tayan adalah Gusti Kamarudin bergelar Panembahan Suma Yuda atau Panembahan Tua (1780–1812). Karena berselisih dengan kakaknya, Pangeran Tanjung lantas menyingkir ke daerah Landak.

Pada masa pemerintahan Panembahan Tua, terjadi peperangan antara Tayan dan Pontianak yang dipicu oleh penolakan atas lamaran Pangeran Syarif Kasim Alkadrie dari Pontianak yang berkeinginan menikahi Utin Demi atau Ratu Syarif, putri Gusti Kamarudin. Rakyat keturunan Cina yang tinggal di sana membantu Sultan Pontianak dengan menyerbu Kerajaan Tayan. Berikutnya terjadi lagi peperangan dengan Sanggau yang disebabkan oleh permasalahan serupa. Lamaran Pangeran Adhi dari Sanggau yang berniat memperistri Ratu Syarif ditolak oleh Panembahan Tua. Namun, tak lama kemudian, ia dinikahkan dengan Syarif Hamzah atau Pangeran Syarif. Begitu mendengar bahwa negerinya diserang, Pangeran Tanjung kembali lagi ke Tayan dan membantu mempertahankannya.

Gusti Kamarudin telah berusia lanjut dan ingin mengundurkan dirinya, tetapi ia kurang yakin terhadap putra sulungnya yang bernama Gusti Mekah dan juga putra-putranya yang lain. Karena itu, urusan pemerintahan sementara diwakilkan kepada Gusti Arif. Pada 1818, datanglah pasukan kolonial Belanda yang dipimpin oleh Muntinghe atas sepersetujuan Sultan Syarif Kasim Alkadrie. Mereka mengadakan pembicaraan dengan pihak kerajaan. Rupanya tujuan kedatangan mereka adalah meminta izin pendirian benteng di Tayan. Gusti Arif kurang menyukai kehadiran Belanda dan merancang pemberontakan sehingga akhirnya pembangunan benteng berhasil digagalkan.

Pewaris singgasana Tayan berikutnya adalah Gusti Mekah (1812–1825) yang bergelar Panembahan Nata Kesuma dan juga dikenal sebagai Panembahan Muda. Pada 1822, pemerintah kolonial mengirimkan wakilnya yang bernama Tobias untuk menjumpai Gusti Mekah. Hasil pertemuan itu adalah penandatanganan kontrak politik (*Korte Verklaring*) dengan Belanda pada 12 November 1822. Dengan demikian, Gusti Mekah merupakan penguasa Tayan pertama yang mengadakan perjanjian dengan Belanda.

Istana Kerajaan Tayan
Sumber: Yang Mulia Bapak Gusti Era Setiawan

Dari kiri ke kanan
Makam Gusti Tamjid
Makam Kerajaan Tayan
Sumber: Yang Mulia Bapak Gusti Era Setiawan

Panembahan Nata Kesuma wafat pada 1825 tanpa meninggalkan seorang keturunan. Oleh karena itu, takhta kerajaan diserahkan kepada saudaranya, Gusti Repa yang bergelar Panembahan Ratu Kesuma (1825–1828). Ia wafat tidak lama kemudian dan digantikan oleh saudari Panembahan Tua bernama Utin Belondo yang bergelar Ratu Utin Belondo (Ratu Kusuma Negara). Sementara itu, pemerintahan kerajaan dijalankan oleh suaminya, Gusti Hasan Pangeran Ratu Kesuma (Marta Jaya Kusuma)

dengan gelar Panembahan Mangku Negara Kusuma (1828–1855). Panembahan tercatat menandatangani kontrak politik dengan Belanda pada 8 November 1828.

Gusti Jafar
(Panembahan Anum Adi Negara)
Sumber: Bapak Gusti Era Setiawan

Ketika Panembahan wafat, putranya, Gusti Inding, diangkat sebagai penguasa baru, gelar yang disandangnya sama dengan ayahnya, tetapi pada 1858, Belanda mengganti kata "Mangku" pada gelarnya dengan "Anum Paku" sehingga gelarnya menjadi Anum Paku Negara Surya Kesuma (1855–1873). Karena kesehatannya yang kurang baik, ia memercayakan urusan negara kepada saudaranya yang bernama Gusti Karma Pangeran Ratu Paku Negara (bergelar Panembahan Adiningrat Kesuma Negara). Hal ini berlangsung hingga wafatnya Panembahan Anum Paku Negara Surya Kesuma pada 23 November 1873 di Batang Tarang.

Konon, Gusti Karma mempunyai ilmu yang disebut Bala Seribu. Apabila ilmu ini dipergunakannya, musuh seolah-olah akan melihat pasukan yang jumlahnya banyak sekali. Panembahan Adiningrat Kesuma Negara memerintah hingga 1880 dan digantikan oleh putranya, Gusti Muhammad Ali (bergelar Paku Negara Surya Kesuma, juga disebut Gusti Inding, memerintah 1880–1905). Semasa pemerintahannya, ibu kota kerajaan dipindahkan dari Rayang ke Tayan. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda menggabungkan Kerajaan Meliau yang tidak ada lagi pewarisnya dengan Tayan. Ipar Gusti Muhammad Ali bernama Pangeran Daeng merupakan tokoh yang

cukup disegani oleh pemerintah kolonial sehingga besar pengaruhnya dalam roda pemerintahan kerajaan.

Penguasa Tayan selanjutnya adalah Gusti Tamzid Pangeran Ratu (1905–1929) yang bergelar Panembahan Anum Paku Negara. Kerajaan Meliau yang sebelumnya digabungkan dengan Tayan kini diminta kembali oleh Belanda dan ditempatkan langsung di bawah pemerintahan kolonial. Panembahan Anum Paku Negara digantikan oleh putra mahkota Gusti Jafar yang dinobatkan dengan gelar Panembahan Anum Adi Negara (1929–1944). Ia merupakan salah satu korban kekejaman Jepang yang mencurigai adanya komplotan yang menentang mereka. Bersama dengan pewaris takhta, Gusti Makhmud, ia dibantai oleh Jepang pada 1944. Saat Gusti Jafar sedang salat Subuh, datanglah beberapa orang serdadu Jepang yang menunggu di ruang tamu. Mereka berbicara dengan panembahan dan menangkapnya. Bersamaan dengan itu, dilakukan penggeledahan di Istana Tayan. Panembahan Gusti Jafar dibawa ke Pontianak dengan motor air dan hanya diizinkan membawa kopor pakaian beserta perlengkapan sembahyang, dia tidak diketahui lagi rimbanya.

Nama Panembahan Gusti Jafar (urutan ke-44) pada monumen peringatan korban-korban kebiadaban Jepang di Mandor
Sumber: Yang Mulia Bapak Gusti Era Setiawan

Beberapa kerabat Panembahan Gusti Jafar turut pula ditangkap oleh Jepang, seperti Gusti Intan (adik), Gusti Hasnan, Gusti Abdurrahman (adik), Gusti Chaidir (ipar), Gusti Abdul Hamid (sepupu), Gusti Abdul Rani (sepupu), Gusti Umar (sepupu), dan Muhammad Saleh bin Enci A. Kadir (sepupu). Setelah Jepang menyerah kalah, Gusti Ismail dinobatkan sebagai penguasa Tayan yang baru dengan gelar Panembahan Paku Negara (1945–1952). Pada 1960 berlangsung penghapusan berbagai daerah swapraja. Gusti Ismail menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah

Republik Indonesia sehingga berakhirlah Kerajaan Tayan. Ia selanjutnya diserahi jabatan sebagai Wedana Tayan.

Kerajaan-kerajaan di Tanah Pinoh

Di Tanah Pinoh (Pinoh Landen) terdapat beberapa kerajaan, yakni Nanga Pak, Karangan Purun, Kapala Gading, Nanga Sayan, Kota Baru, Madung, Nanga Sokan atau Sokan, dan Laman Tawa. Batas antar kerajaan-kerajaan ini tidak begitu jelas. Wilayah kekuasaan masing-masing kepalanya yang bergelar rajanya tidaklah mencakup suatu daerah atau kelompok masyarakat yang pasti, baik itu orang Melayu atau Dayak.[199] Mereka hanya mengenal apa yang disebut Watas Tanaman, yakni sampai sejauh mana jangkauan tanaman masing-masing penduduk kawasan tersebut.

I. MADUNG

Menurut legenda, Kerajaan Madung merupakan kerajaan tertua di Tanah Pinoh. Konon cikal bakalnya adalah sosok supernatural bernama Abang Gandai yang berdiam di mata air Pinoh. Ia menikah dengan Putri Naga Berjun yang berasal dari Ulu Matan. Putra mereka adalah Nibung Telelai yang merupakan separuh makhluk supernatural dan separuh manusia.[200] Nibung Telelai kemudian membangun tempat kediamannya di Bukit Siau. Suatu kali, ia menangkap seekor kera dan bergurau di hadapan para pengikutnya akan menjadikannya sebagai cawat dan penutup kepala. Namun, hal ini menimbulkan kemarahan para dewa sehingga perkampungan di Bukit Siau tersebut dilanda badai dan hancur. Nibung Telelai lalu melarikan diri ke Batu Kebonga dengan disertai istrinya, Dayang Mawar. Mereka lantas membangun pemukiman baru di sana. Pernikahan Nibung Telelai dan Dayang Mawar membuahkan seorang putra bernama Abang Imbung. Putranya ini lantas menikah dengan Dayang Dampan yang merupakan keturunan penguasa Sekadau.

Setelah pernikahan itu, Abang Imbung tinggal secara bergantian di Batu Kebonga dan Sekadau. Mereka dikaruniai dua orang putra, Abang Jaka dan Abang Asai. Selama Abang Imbung masih hidup, Abang Jaka berdiam di Madung dan menerima gelar Pangeran Sunia Anom. Ketika itu pemerintahan Sekadau mengalami permasalahan sehingga mereka meminta agar salah seorang putra Abang Imbung didudukkan sebagai

199. Lihat *Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde*, XXXIX, 1897, halaman 612.
200. Lihat *Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde*, XXXIX, 1897, halaman 614.

Istana Kerajaan Tayan

Dari kiri ke kanan:
Pintu menuju ruang depan Istana Tayan
Ruang depan Istana Kerajaan Tayan
Bagian depan samping istana Tayan

Dari kiri ke kanan:
Tampak belakang kanan Istana Kerajaan Tayan
Tampak belakang kiri Istana Kerajaan Tayan
Gerbang Istana Tayan

Dari kiri ke kanan:
Tampak depan Istana Tayan
Tampak samping kanan Istana Tayan
Tampak samping kiri Istana Tayan
Sumber: Yang Mulia Bapak Gusti Era Setiawan

Peninggalan Kerajaan Tayan

Dari kiri ke kanan:
Meriam dalam Keraton Kerajaan Tayan
Tempat pemandian Kerajaan Tayan
Alat musik Kerajaan Tayan

Dari kiri ke kanan:
Senapan Kerajaan Tayan
Pusaka Kerajaan Tayan
Uang Kerajaan Tayan

Dari kiri ke kanan:
Tempat penyimpanan senapan Kerajaan Tayan
Baju Raja Tayan
Makam Raja Gusti Muhammad Ali
Sumber: Yang Mulia Bapak Gusti Era Setiawan

penguasa Sekadau. Abang Imbung lantas mengutus putranya, Abang Asai, ke Sekadau. Abang Imbung mangkat di Batu Kebonga.

Abang Jaka memiliki dua orang putra, yakni Abang Kijang dan Abang Sudar. Abang Sudar mendirikan Kerajaan Nanga Sokan dan cikal bakal para penguasa negeri tersebut.[201] Abang Kijang tetap tinggal di Madung dan mempunyai putra-putra yang menjadi para penguasa Madung, yakni Raden Inuh dan Raden Ira Kerta.

II. NANGA SOKAN

Kerajaan Nanga Sokan ini didirikan oleh Abang Sudar, salah seorang putra Abang Jaka.

III. KOTA BARU

Hikayat leluhur penguasa Kota Baru menyebutkan terdapat seorang dewi dari kayangan bernama Dayang Guna Raja. Ia ingin menikah dengan siapa saja yang sanggup memainkan seruling. Ternyata jodohnya adalah Raden Telembai, sesosok makhluk halus penjaga air yang bersemayam di Telok Rangkaya (dekat Kapala Gading). Mereka kemudian menikah dan memiliki anak bernama Dayang Agih. Setelah itu, Dayang Guna Raja kembali ke kayangan, sedangkan Raden Telembai masuk kembali ke sungai.

Dayang Agih menikah dengan Tedung Pandak, salah seorang bangsawan Sambas yang ketika itu sedang berlayar melalui Sungai Kapuas ke Pinoh. Pernikahan itu dikaruniai keturunan bernama Sengkar dan Semekuk. Semekuk menikah dengan Sri Mawar dari Sintang dan dikaruniai seorang putra bernama Karangga Uyun. Sintang menikah dengan Dayang Suri, salah seorang putri Abang Imbung, namun karena pernikahan ini tak dikaruniai keturunan, ia lantas menikah lagi dengan Dayang Uma, putri Jebair dari Sintang. Pernikahan ini membuahkan putra bernama Bira Pati, yang pada gilirannya menikah dengan putri Abang Kijang dari Kerajaan Madung.

Dia memiliki tujuh orang anak yang masing-masing bernama Abang Lukis, Abang Manga, Abang Ramat, Abang Dawai, Kyai Seni (perempuan), Abang Barat, dan Inci Baung (perempuan). Abang Lukis dan Abang Mangga merupakan pendiri Kota Baru. Salah seorang keturunan dua bersaudara itu yang bernama Abang Mahmud memperoleh gelar Panembahan Pulau Kembang. Ketika itu, pusat pemerintahan

201. Lihat *Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde*, XXXIX, 1897, halaman 615.

negeri ini berada di Pulau Kembang yang belakangan dipindahkan ke Kota Baru. Ia tak memiliki keturunan sehingga kerajaan dialihkan kepada Abang Caya, putra tertua Abang Sudar dari Nanga Sokan. Ia menikah dengan Dayang Sri Intan, putri Abang Mahmud. Pada perkembangan selanjutnya, Abang Caya memperoleh gelar Panembahan Tajur Alam dari Panembahan Batu, Raja Banjar.

Sementara itu, terdapat pula versi lain yang menghubungkan riwayat Kota Baru dengan Sintang. Konon leluhur mereka adalah Limbang yang menikah dengan Limaya.[202] Putra mereka, Panjang, menikah dengan Widari dan dikaruniai tujuh orang anak, yakni

1. Demong Nutub (Salunbau)
2. Demong Janjan (Lebang)
3. Demong Rigui (Suhaid)
4. Demong Rigat (Silat)
5. Demong Surah (Sekadau)
6. Demong Asa (Sepauk)
7. Dara Juanti (Sintang)

Keenam saudara itu mengadakan perjalanan ke Majapahit dan dijadikan budak oleh Raja Majapahit. Dara Juanti lantas menyamar sebagai pria guna membebaskan saudara-saudaranya tersebut. Hikayat selanjutnya mirip dengan yang terdapat pada bagian tentang Kerajaan Sintang. Raja Majapahit kemudian menikahi Dara Juanti dan keturunan mereka adalah Abang Samad, Abang Mail, Abang Tulang, Abang Layang, Abang Tambang, Abang Pikai, Abang Nata, Abang Pincing, Abang Putan, dan Abang Tunggal. Abang Purba berputra Abang Usup. Abang Usup menikah dengan Dayang Sri Banun, putri bungsu Abang Caya. Putra sulung mereka bernama Abang Abu Bakar kemudian diangkat sebagai Raja Kota Baru dengan gelar Pangeran Prabu. Putra sulung Pangeran Prabu, Pangeran Anom, menjadi Raja Kota Baru berikutnya. Urutan raja-raja Kota Baru selanjutnya adalah Pangeran Paku (Abang Ismail), Pangerang Jaya (Abang Ahmad), Pangeran Cikra Kesuma Negara (Abang Aris), Pangerang Agung Kertasari, dan Abang Bakri yang memerintah hingga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.[203]

---

202. Lihat *Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde*, XXXIX, 1897, halaman 640.
203. *http://khuzmayudi.blogspot.co.id/2013/03/sejarah-awal-mula-nama-kotabaru-tanah.html*, diunduh pada 28 Juli 2017.

IV. NANGA SAYAN

Konon pendiri Kerajaan Nanga Sayan adalah Abang Ramat, putra Bira Pati, sebagaimana yang telah disinggung pada hikayat pendirian Kota Baru. Sumber lain menyebutkan bahwa pendiri Nanga Sayan adalah kepala suku Dayak Kayan bernama Pati Agung Tamba[204] yang menikah dengan saudara Panembahan Pulau Kembang. Sementara itu, masih ada sumber lain menuturkan bahwa Abang Sumbu yang berasal dari Madung menikah dengan seorang wanita asal Nanga Sayan bernama Rabai. Pernikahan ini membuahkan seorang putra bernama Incu. Pada masa itu, Ama Pangil yang merupakan pemuka Nanga Sayan mengutus Incu menghadap Raja Kotawaringin. Ia lantas menerima gelar Raden Paru dari Raja Kotawaringin dan diserahi tugas memimpin Nanga Sayan. Pada perkembangan selanjutnya, ia juga menerima gelar Pangeran Penghulu Tiang Agama.[205] Ia kemudian digantikan oleh putra satu-satunya, Pangeran Aria dari Nanga Sayan.

V. NANGA PAK

Kerajaaan Nanga Pak didirikan oleh Abang Gandak yang menikah dengan Dara Jingga, putra Abang Kijang dari Mandung, mantan istri Abang Ramat.[206] Dia kemudian digelari Pangeran Tata Beraja, dan menurunkan Abang Bundan yang bergelar Pangeran Tumenggung.

VI. KARANGAN PURUN

Pendiri Kerajaan Karangan Purun adalah seorang asal Serawak bernama Inci' Terang, yang menikah dengan Dayang Antun, kemenakan Pangeran Tata (Abang Matah) dari Nanga Pak. Setelah kematian Inci' Terang, Dayang Antun menikah lagi dengan seorang asal Kotawaringin bernama Adam, yang kemudian digelari Pangeran Suria Adam. Kedua pernikahan ini tidak membuahkan putra sehingga ia mengangkat kemenakannya, Dayang Sui, sebagai anak.[207] Dayang Sui menikah dengan seorang Banjar bernama Haji Mohammed Salih, putra Kyai Abu (Suma Nata) dari Nanga Pinoh, dan berputra Abang Leman (Soleiman) dari Karangan Purun, yang mewakili

204. Lihat *Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde*, XXXIX, 1897, halaman 642.
205. Lihat *Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde*, XXXIX, 1897, halaman 643.
206. Lihat *Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde*, XXXIX, 1897, halaman 643.
207. Lihat *Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde*, XXXIX, 1897, halaman 644.

Pangeran Muda ke Pontianak pada 1893. Abang Leman ini lalu menjadi Raja Karangan Purun berikutnya. Setelah meninggalnya Haji Mohammed Salih, Dayang Sui menikah dengan saudara almarhum suaminya yang bernama Haji Abdul Raup. Pernikahan ini membuahkan seorang putra bernama Abut.[208]

VII. LAMAN TAWA

Kerajaan Laman Tawa didirikan oleh Pangeran Suma atau Abang Anjan agar dapat mengawasi pemungutan pajak dari orang Dayak secara lebih baik. Dia lalu mendirikan sebuah perkampungan di Pinoh Hulu (Boven Pinoh), hulu Sungai Libas, yang dinamai Laman Tawa. Putranya bernama Abang Awal lantas menjadi Raja Laman Tawa berikutnya.[209]

VIII. KAPALA GADING

Pendiri Kerajaan Kapala Gading adalah seseorang yang berasal dari Nanga Sasak, yang menikah dengan bibi Pangeran Tata dari Gandis (Melawi). Raden Depati yang pernah menjadi penguasa Kapala Gading tidak memiliki keturunan sehingga setelah kematiannya, pemerintahan Kapala Gading dipegang oleh seorang Banjar bernama Kalibun Sura Pati, suami kedua kakak perempuan Raden Depati, Dayang Mengadam. Pernikahan ini membuahkan seorang putra bernama Raden Kerta Sari yang menjadi penguasa Kapala Gading berikutnya.[210]

B. KERAJAAN-KERAJAAN DI KALIMANTAN SELATAN

I. BANJAR

a. Cikal Bakal Kerajaan Banjar

Menurut legenda, di wilayah Banjar pernah berdiri sebuah negara bernama Kerajaan Dipa (Negara Dipa) yang dipengaruhi kebudayaan Jawa. Kerajaan ini diperintah oleh Mpu Jatmika yang bergelar Maharaja di Candi.[211] Konon, pusat kerajaannya berada di Pulau Hujung Tanah. Angkatan perang kerajaan ini yang dipimpin Megatsari kemudian menaklukkan daerah-daerah sekitarnya, seperti Batang

208. Lihat *Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde*, XXXIX, 1897, halaman 645.
209. Lihat *Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde*, XXXIX, 1897, halaman 645.
210. Lihat *Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde*, XXXIX, 1897, halaman 646.
211. Lihat *Sejarah Kebudayaan Kalimantan*, halaman 17.

Tabalong, Batang Balangan, dan Batang Patap. Sementara itu, pasukan lainnya yang dipimpin Tumenggung Tatahjiwa melakukan penaklukan ke Batang Aloi, Batang Hamadit, dan Labuhan Amas. Mpu Jatmika kemudian digantikan oleh Puteri Tunjung Buih yang bersuamikan Surianata, seorang pertapa dari Majapahit. Maharaja Surianata memperluas wilayah Kerajaan Dipa dengan menaklukkan Sukadana, Sanggau, Sambas, Batang Lawai, Kota Waringin, Pasir, Kutai Karesikan, dan Berau. Semua wilayah yang baru saja disebutkan itu tunduk kepada Negara Dipa.

Selanjutnya yang memerintah Negara Dipa secara berturut-turut adalah Suryaganggawangsa, Raden Carang Calen, dan Raden Sari Kaburangan. Setelah memerintah selama setahun, Raden Sari Kaburangan memindahkan pusat pemerintahan ke Muara Hulah dan nama kerajaan berganti menjadi Kerajaan Daha (Negara Daha). Sementara itu, sumber lain menyatakan bahwa sebuah serangan dari Jawa mengakhiri kKerajaan Dipa dan digantikan oleh Kerajaan Daha dengan Raden Sari Kaburangan sebagai rajanya. Kesultanan Banjar atau Banjarmasin diperkirakan berdiri pada 1526 dan merupakan penerus Kerajaan Daha[212] yang beragama Hindu. Menjelang berakhirnya Kerajaan Daha, negeri itu diperintah oleh Maharaja Sukarama, yang digantikan oleh Pangeran Tumenggung. Meskipun demikian, yang lebih berhak atas singgasana kerajaan sesungguhnya adalah Pangeran Samudera, cucu Maharaja Sukarama dan kemenakan Pangeran Tumenggung. Karenanya, Pangeran Samudera memunculkan pemberontakan demi menuntut haknya.

Semenjak masa mudanya Pangeran Samudera telah pergi mengasingkan diri. Ia kemudian dinobatkan sebagai raja di Banjar oleh Patih Masih Balit, Muhur, Kuwin, dan Balitung. Pangeran Samudera dengan dukungan Demak melancarkan serangannya ke Negara Daha yang diperintah pamannya. Akhirnya, Pangeran Tumenggung berhasil dikalahkan dan menyerah kepada Pangeran Samudera. Setelah menderita kekalahan, Pangeran Tumenggung melarikan diri ke pedalaman dengan diiringi para pengikutnya. Sementara itu, Pangeran Samudera naik takhta sebagai raja pertama kerajaan Banjar. Ia merupakan Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam dan selanjutnya bergelar Sultan Suriansyah. Penguasa Banjar yang juga dikenal sebagai Sunan Batu Habang ini memerintah hingga 1550. Dikarenakan pengaruh Demak, struktur pemerintahan Banjar menjadi mirip dengan Jawa. Pada abad 16, Banjar telah

212. Ibu kotanya terletak di Negara, yang sekarang merupakan ibu kota Kecamatan Daha Selatan, Kalimantan Selatan.

meluaskan pengaruhnya hingga Sukadana, Kotawaringin, dan Lawai. Ketiga kawasan tersebut mengirimkan upetinya secara teratur ke Banjar. Banjarmasin tumbuh pula menjadi pusat perdagangan yang ramai sehingga menarik perhatian suku-suku bangsa lain di Kepulauan Nusantara untuk bermigrasi ke sana.

b. Perkembangan Kerajaan Banjar

Kerajaan Banjar mengalami masa kejayaan di abad 17 sebagai hasil perdagangan lada. Sebelumnya, Banjarmasin merupakan negara bawahan Demak, yang telah membantunya mengalahkan Daha. Namun, ketika kekuasaan Demak runtuh dan beralih ke Pajang, mereka tak lagi bersedia membayar upeti kepada kerajaan di Jawa tersebut. Semasa pemerintahan sultan keempat, Mustain Billah (1595–1620), Tuban berupaya menegakkan supremasi kekuasaannya di Banjar. Namun, ekspedisi militer ini berhasil digagalkan. Sultan Mustain Billah juga dicatat telah memindahkan ibu kota kerajaannya dari Kuin ke Martapura.

Ketika Sultan Agung (1613–1645) dari Mataram naik takhta, ia berniat melebarkan payung kekuasaannya hingga ke Kalimantan. Pada 1622, Sultan Agung menaklukkan Kerajaan Sukadana yang terletak di Kalimantan tenggara. Tentu saja, Mataram kini dirasa menjadi ancaman bagi Banjar yang kemudian mengembangkan kekuatan militernya sebagai langkah antisipasi. Seiring dengan berjalannya waktu, Mataram makin melemah dan tidak lagi menjadi ancaman bagi Banjar. Oleh karena merasa kuat dari segi militer dan ekonomi, Banjar melebarkan kekuasaannya pada 1636 hingga ke Sambas, Lawai, Sukadana, Kotawaringin, Pembuang, Sampit, Mendawai, Kahayan Hilir dan Kahayan Hulu, Kutai, Pasir, Pulau Laut, Satui, Asam, Kintap dan Swarangan.

c. Intrik-intrik di Kerajaan Banjar dan Masuknya Campur Tangan Kolonialisme Belanda

Saat sultan Banjar ke-6, Saidullah (1637–1642) wafat, putranya yang bernama Amirullah Bagus Kusuma belum dewasa sehingga pamannya diangkat sebagai walinya dengan gelar Panembahan Ratu. Pamannya juga memakai gelar Sultan Ri'ayatullah (1642–1660). Ia menyerahkan kekuasaan kepada kemenakannya pada 1660. Sultan Amirullah Bagus Kusuma hanya sempat memerintah tiga tahun karena dikudeta oleh Pangeran Surya Nata II, pamannya yang lain. Penguasa baru ini menyandang gelar Sultan Agung (1663–1679) dan memindahkan ibu kotanya ke Sungai Pangeran (Banjarmasin). Kendati demikian, ia berbagi kekuasaan dengan Sultan Ri'ayatullah

yang memerintah dari Martapura. Pembagian kekuasaan ini berlangsung hingga 1666 saat Ri'ayatullah wafat. Amirullah berhasil merebut kembali takhtanya pada 1679 dan menjadi sultan untuk kedua kalinya.

Intrik yang melanda Kerajaan Banjar tidak berhenti sampai di sini saja. Sultan Hamidullah (Sultan Kuning) wafat pada 1734 saat putra mahkota yang bernama Muhammad Aliuddin Aminullah masih belum dewasa. Oleh karena itu, Sultan Tamjidullah I (1734–1759), pamannya, diangkat sebagai wali. Meskipun demikian, Aminullah merebut kekuasaan dari pamannya itu pada 1759, tetapi saat Sultan Aminallah wafat dua tahun kemudian, putra-putranya juga belum dewasa sehingga kekuasaan Banjar beralih kembali kepada Tamjidullah I dengan putranya, Pangeran Natadilaga, sebagai wali bagi Pangeran Amir (putra Sultan Aminullah yang belum dewasa). Waktu itu, seluruh putra Sultan Aminullah mati dibunuh oleh Pangeran Natadilaga, dan hanya tersisa Pangeran Amir yang kemudian melarikan diri ke Pasir.

Pangeran Natadilaga yang bertindak sebagai wali ternyata tidak bersedia menyerahkan takhta kepada Pangeran Amir dan melakukan pembantaian terhadap keturunan Sultan Kuning. Ia lalu mengangkat dirinya sebagai penguasa Banjar dengan gelar Tahmidullah II (1761–1801). Pangeran Amir yang berhasil melarikan diri ke Pasir tidak tinggal diam dan berupaya merebut kembali takhta yang menjadi haknya. Dengan didukung oleh pamannya, Arung Torawe, seorang keturunan Bugis, Pangeran Amir melancarkan serangan ke Kayutangi, pusat pemerintahan Banjar saat itu. Untuk mengalahkan Pangeran Amir beserta sekutu-sekutunya, Tahmidullah II mengadakan perjanjian dengan Belanda pada 1787. Berkat bantuan Belanda, Pangeran Amir berhasil ditangkap pada 14 Mei 1787 dan diasingkan ke Sri Lanka.

Kaum keturunan Sultan Kuning dirasakan sebagai ancaman oleh Sultan Tahmidullah II. Oleh karenanya, ia tetap mengharapkan dukungan Belanda, tetapi bukan sebagai atasan melainkan tameng terhadap orang-orang yang mengincar takhtanya. Kontrak politik yang ditandatanganinya pada 1787 berisi,

- Kerajaan Banjar menyerahkan daerah Pasir, Pulau Laut, Tabaniau, Mendawai, Sampit, Pembuang, dan Kotawaringin kepada VOC.
- Sultan selaku bawahan Belanda memiliki daerah sendiri yang berada langsung di bawah pemerintahannya.
- Calon pewaris kesultanan (putra mahkota) dan perdana menteri (mangkubumi) harus diangkat dengan persetujuan VOC.

- Kesultanan Banjar untuk seterusnya akan diperintah oleh keturunan Pangeran Natadilaga (Sultan Tahmidullah II).

Seolah-olah pasal-pasal pernjanjian di atas menguntungkan Belanda, tetapi sesungguhnya yang paling banyak menuai manfaat adalah Sultan Tahmidullah II sendiri. Belanda berdasarkan kesepakatan di atas wajib mengamankan posisi sultan, tentunya ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, penempatan pasukan penjaga keamanan di Pulau Laut demi mengamankan kawasan tersebut dari para bajak laut Sulu memakan biaya yang tak sedikit. Karena itu, Belanda mengadakan pembaharuan kontrak pada 1797, namun isinya tetap membawa kerugian dan merendahkan VOC. Sultan diam-diam berupaya mematahkan belenggu ekonomi VOC di kerajaannya dengan menyabot hasil lada yang sangat diminati oleh Belanda. Ia secara bertahap dengan sengaja menurunkan hasil lada kerajaannya. Tumbuhan lada dimusnahkannya tanpa sepengetahuan VOC. Oleh karena tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, Belanda tidak begitu mempedulikan Banjar lagi semenjak 1809. Kendati demikian, perjanjian-perjanjian ini membuka pintu bagi Belanda untuk ikut campur dalam pemerintahan Banjar, termasuk dalam suksesi para sultan yang akan terbukti pada masa-masa selanjutnya.

Pada 1811, kekuasaan atas Kepulauan Nusantara beralih ke tangan Inggris, yang juga mengadakan kontrak politik dengan Banjar. Sebagai wakil pemerintah Inggris ditempatkan seorang residen di Banjar bernama Alexander Hare. Ketika Kepulauan Nusantara dikembalikan oleh Inggris kepada pemerintah Belanda pada 1816, Belanda mengirimkan ekspedisi di bawah pimpinan J. Van Boeckholdz untuk menegakkan kembali kekuasannya di Banjar dan mengadakan lagi perjanjian dengan Banjar pada 1 Januari 1817[213]. Perjanjian itu terdiri dari 32 pasal dan salah satu diantaranya berisikan penyerahan daerah Dayak, Sintang, Bakumpai, Tanah Laut, Mendawai, Kotawaringin, Lawai, Jelai, Pegatan, Pulau Laut, Pasir, Kutai, dan Berau–vasal-vasal Banjar–kepada Belanda. Perjanjian ini diperbaharui lagi pada 4 Mei1826. Saat itu, yang bertakhta di Banjar adalah Sultan Adam Al-Watsiq Billah (1825–1857). Berdasarkan perjanjian tersebut, Banjar tidak boleh mengadakan hubungan dengan bangsa asing lain tanpa seizin Belanda. Beberapa wilayah Kesultanan Banjar diserahkan kepada Belanda, seperti sebelah kiri hulu Sungai Barito dan sebelah kiri Sungai Martapura (daerah Antasan Kuin). Sementara daerah Banjar asli masih tetap berada di tangan sultan. Meskipun

213. Lihat *Sejarah Nasional Indonesia IV*, halaman 219.

demikian, Belanda ternyata kerap mencampuri roda pemerintahan Banjar, terutama dalam hal penunjukkan putra mahkota dan mangkubumi dengan menempatkan tokoh-tokoh yang pro kepada mereka pada jabatan-jabatan tersebut. Perjanjian 1826 ini kelak diperbaharui lagi pada 1845 yang mengubah batas-batas Kesultanan Banjar dan pemberian hak penambangan batu bara di Riam.

Untuk menanamkan pengaruhnya di Banjar, Belanda menempatkan seorang residen yang tempat kediamannya berhadap-hadapan dengan istana sultan. Selain itu, dibangun pula beberapa benteng seperti di Taboniau (Fort Tabaniau), Marabahan, dan Pulau Tatas (Fort Tatas). Tujuan pendirian benteng-benteng itu adalah memperketat pengawasan terhadap Banjar yang makin berarti nilainya di mata Belanda setelah ditemukannya tambang batu bara di Pengaron dan Banyu Hirang. Belanda memaksa Sultan Adam memberikan izin bagi penambangan batu bara (konsesi). Kekuatan militer Banjar juga dilemahkan oleh Belanda karena berdasarkan perjanjian 1826, kesultanan tidak boleh mempunyai angkatan perang sendiri. Apabila pecah pemberontakan, hanya Belanda yang berhak menumpasnya. Dengan kata lain, segenap keamanan sultan dijamin oleh Belanda. Itulah sebabnya, hal ini membuka peluang sultan dapat berbuat sewenang-wenang kepada bawahannya. Sementara itu, perjanjian pada 1826 juga melarang kerajaan menyiksa para tahanan, serta rakyat diharuskan mendapatkan vaksinasi cacar.

Sehubungan dengan penambangan batu bara di atas, Gubernur Jenderal Rochussan pada 28 September 1849 hadir di Banjarmasin dan langsung bertolak ke Pengaron guna meresmikan pembukaan tambang batu bara pertama yang diberi nama Oranje Nassau. Dalam misi khusus ini, gubernur jenderal membawa instruksi rahasia kepada Residen Banjarmasin, van Hengst, yang menyatakan bahwa selama Kerajaan Banjar mematuhi pasal-pasal dalam kontrak politik dan tidak menghalang-halangi usaha penambangan batu bara, Belanda akan tetap menjalankan politik bersahabat dengan Banjar dan melindunginya dari segenap ancaman.

Berbagai kemunduran terjadi di Banjar menjelang pertengahan abad 19. Pertama-tama, wilayah Banjar menjadi makin sempit akibat perjanjian yang telah diuraikan di atas. Kedua. membengkaknya jumlah golongan bangsawan mengakibatkan luas tanah lungguh (tanah kas desa) mereka bertambah sempit. Akibatnya, pendapatan kaum bangsawan makin mengecil pula. Rakyat yang saat itu belum sepenuhnya terbiasa

dengan sistem uang dibebani dengan berbagai jenis pajak. Dengan demikian, timbul berbagai kerawanan sosial.

d. Kekacauan Menjelang Berakhirnya Kesultanan Banjar

Sultan Adam menggantikan Sultan Sulaiman yang wafat pada 1825. Putra sulung Sultan Adam bernama Pangeran Abdurrakhman diangkat sebagai putra mahkota dengan gelar Sultan Muda Abdurrakhman. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan jatuh ke tangan istrinya, Nyai Ratu Komala Sari, seorang keturunan rakyat biasa dari Amuntai. Ia menguasai pemerintahan dan cap kerajaan hingga mangkatnya Sultan Adam. Putra Mahkota Abdurrakhman wafat pada 5 Maret 1852 sehingga tidak sempat diangkat sebagai sultan. Ada sebagian pihak yang mencurigai bahwa ia diracun oleh adiknya, Pangeran Prabu Anom, yang amat dicintai oleh ibunya, Nyai Ratu Komala Sari. Ada pula yang mencurigai bahwa biang keladi kematian ini adalah Kiai Adipati Danuraja.

Berdasarkan kontrak politik pada 1826, Belanda berhak menunjuk putra mahkota dan perdana menteri (mangkubumi) sehingga pada akhirnya pengaruh pemerintah kolonial tertanam makin dalam. Dengan kematian Pangeran Abdurrakhman, putra mahkota baru harus segera ditunjuk. Saat itu ada tiga calon putra mahkota, yakni Pangeran Prabu Anom, Pangeran Hidayatullah (Pangeran Hidayat), dan Pangeran Tamjidillah (Pangeran Tamjid). Kedudukan Pangeran Prabu Anom sebagai putra mahkota tidaklah kuat karena ia terlalu dimanjakan semenjak kecil, sehinga gemar memeras dan menindas rakyat. Pangeran Hidayat, putra Pangeran Abdurrakhman, merupakan calon paling kuat karena ibunya, Ratu Siti, adalah juga keturunan bangsawan (putri Pangeran Mangkubumi Nata). Sementara itu, Pangeran Tamjid merupakan putra Pangeran Abdurrakhman dengan seorang istri keturunan Tionghoa bernama Nyai Besar Aminah. Pangernag Tamjid merupakan tokoh yang kurang populer di kalangan ulama dan bangsawan karena gemar bermabuk-mabukan dan bergaul terlalu akrab dengan Belanda.

Pangeran Tamjid pernah menulis surat tertanggal 6 Maret 1852 kepada Residen van Hengst, yang menjanjikan bahwa apabila diangkat sebagai putra mahkota, ia bersedia menyerahkan wilayah-wilayah penghasil batu bara kepada Belanda dan menyanggupi hal apapun yang diinginkan pemerintah kolonial. Sebagai pengganti almarhum Pangeran Abdurrakhman, Sultan Adam menyampaikan keinginannya kepada Residen van Hengst pada 12 Maret 1852, agar Pangeran Hidayat diangkat

sebagai putra mahkota yang baru. Kehendak sultan ini ditolak oleh residen karena tawaran Pangeran Tamjid dirasa lebih menguntungkan Belanda. Agar semua pihak tidak ada yang merasa kecewa, sultan kembali mengutus Haji Syamsuddin agar mengusulkan solusi kepada Residen Belanda agar Pangeran Hidayat diangkat sebagai sultan, Pangeran Tamjid sebagai putra mahkota, dan Pangeran Prabu Anom sebagai mangkubumi. Meskipun demikian, Belanda tetap tidak menyetujui usul ini. Karena kedekatannya dengan Belanda, Pangeran Tamjid lantas ditunjuk sebagai putra mahkota, padahal ia sebelumnya telah menjabat sebagai mangkubumi. Dengan demikian, Pangeran Tamjid merangkap dua jabatan sekaligus, yakni sebagai putra mahkota dan mangkubumi. Hal ini tak pernah terjadi sebelumnya dalam tradisi Kesultanan Banjar. Pangeran Hidayat, pengganti raja yang sah menjadi tersisih. Hal ini menimbulkan kekurangpuasan di kalangan bangsawan, rakyat, dan ulama.

Agar krisis yang tengah berlangsung ini dapat diselesaikan hingga tuntas, van Hengst meminta pemerintah pusat di Batavia mengirimkan tambahan pasukan ke Banjar, Pangeran Hidayat ditangkap serta diasingkan ke luar Kalimantan, dan Sultan Adam dipaksa menyerahkan kekuasaan kepada Pangeran Tamjid. Kendati demikian, Belanda tidak setuju dengan usulan ini dan van Hengst selaku residen digantikan kedudukannya. Upaya memperjuangkan hak Pangeran Hidayat selaku pewaris takhta yang sah dilakukan oleh kaum kerabat Kerajaan Banjar. Mereka mengutus Pangeran Aminullah, Haji Isya yang bergelar Jaya Laksamana, dan tiga orang menteri menemui gubernur jenderal di Batavia. Meskipun demikian, upaya ini tidak membuahkan hasil apa-apa dan mereka harus pulang dengan tangan hampa. Dukungan terhadap Pangeran Hidayat makin menguat. Sementara itu, Pangeran Tamjid sendiri tidak berani tinggal di Martapura–pusat pemerintahan Banjar–karena khawatir terancam jiwanya dan lebih memilih berdiam di Banjarmasin karena merasa terlindungi oleh Belanda. Roda pemerintahan kerajaan Banjar menjadi kacau karena Pangeran Tamjid jarang hadir di ibu kota. Di tengah-tengah kondisi kacau ini, Sultan Adam di bawah pengaruh istrinya mengangkat Pangeran Prabu Anom sebagai putra mahkota pada Juni 1855. Belanda tentu saja memprotes kejadian ini karena pengangkatan putra mahkota hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Belanda. Akibatnya, Sultan Adam mencabut kembali keputusannya.

Di tengah-tengah kebingungan dan keputusasaannya, Sultan Adam menulis surat wasiat yang menunjuk Pangeran Hidayatullah sebagai penggantinya. Dalam

surat wasiatnya itu, Sultan Adam bahkan mengancam Pangeran Prabu Anom dan Pangeran Tamjid dengan hukuman mati apabila berani menentang pengangkatan tersebut. Belanda mengabaikan isi surat wasiat ini dan melantik Pangeran Tamjid sebagai putra mahkota pada 10 Mei 1856. Demi meredakan ketegangan, Belanda mengangkat Pangeran Hidayat sebagai mangkubumi yang diambil sumpahnya pada 9 Oktober 1856 di tempat kediaman residen. Pangeran Prabu Anom yang dikhawatirkan bakal memancing keributan diasingkan oleh Belanda ke Banjarmasin. Sultan Adam mengkhawatirkan putra bungsunya tersebut dan memaksa pindah pula ke Banjarmasin. Kendati demikian karena berbagai persoalan dan tekanan batin yang dialaminya, Sultan Adam jatuh sakit selama berada di Banjarmasin. Padahal ketika masih berada di Martapura, sultan yang telah berusia 90 tahun itu sanggup menunggang kuda dan berburu rusa kegemarannya. Pada Oktober 1857, penyakit Sultan Adam makin parah dan tampaknya ia akan segera meninggal. Oleh karena itu, sultan hendak dipulangkan ke Martapura. Istri sultan, Nyai Ratu Komala Sari, berulang kali melayangkan permohonan kepada residen agar Prabu Anom diizinkan menyertai ayahnya kembali ke Martapura karena ia merupakan satu-satunya anak kandung sultan yang masih hidup sehingga perlu berada di sisi ayahnya yang tak lama lagi berpulang. Meskipun demikian, Belanda tidak kunjung memberikan izin.

Kondisi kesehatan Sultan Adam makin kritis pada 31 Oktober 1857 dan baru saat itu ia dibawa kembali dengan perahu ke Martapura. Sultan tiba di Martapura pada 1 November dan tutup usia beberapa jam kemudian. Pangeran Prabu Anom diam-diam menyertai ayahnya ke Martapura tanpa seizin residen. Tindakan ini dianggap sebagai pembangkangan. Oleh karenanya, residen meminjam tangan Pangeran Hidayat selaku mangkubumi untuk menangkap Pangeran Prabu Anom yang dicurigai hendak mengangkat dirinya sebagai raja bila ayahnya meninggal, termasuk dengan jalan kekerasan sekalipun. Pangeran Hidayat berangkat ke Martapura tetapi tidak segera menjalankan tugas menangkap Prabu Anom yang diperintahkan kepadanya karena saat itu Istana Banjar sedang dilanda kedukaan.

Sebagai pengganti almarhum Sultan Adam, Belanda mengangkat Pangeran Tamjid sebagai sultan baru dengan gelar Tamjidullah II (1857–1859) pada 3 November 1857 di Martapura. Pengangkatan ini ditentang oleh kaum bangsawan dan rakyat Banjar karena berdasarkan surat wasiat almarhum sultan telah menunjuk Pangeran Hidayat sebagai penguasa baru. Mereka merasa bahwa hal ini merupakan pelanggaran

dan pelecehan terhadap adat istiadat Banjar karena pangeran yang lebih berhak berdasarkan tradisi justru disisihkan.

Berkenaan dengan masalah Prabu Anom, Pangeran Hidayat kemudian membujuk pamannya agar menyerahkan diri dan ikut bersamanya ke Banjarmasin dengan menjanjikan jaminan keselamatan. Ternyata janji ini tidak ditepati oleh Belanda karena begitu tiba di Banjarmasin, Prabu Anom langsung ditangkap, ditawan di Benteng Tatas, dan setelah itu diasingkan ke Jawa Barat. Pangeran Hidayat merasa kecewa dengan tindakan-tindakan Belanda yang makin banyak mencampuri roda pemerintahan kesultanan Banjar. Permusuhan antara Pangeran Hidayat yang lebih dihormati oleh rakyat dengan Sultan Tamjidullah II beserta Belanda makin meruncing. Untuk mendamaikan kedua belah pihak, Residen Belanda mendorong pernikahan anak-anak Pangeran Hidayat dan Pangeran Tamjid pada Oktober 1858. Pangeran Hidayat berhasil memperoleh tuntutan politiknya sebagai seorang mangkubumi yang memegang kekuasaan eksekutif di tangannya. Seluruh surat ketetapan yang dikeluarkan oleh sultan harus disahkan dengan meterai kerajaan oleh Pangeran Hidayat selaku mangkubumi. Dengan demikian, Pangeran Hidayat merupakan satu-satunya pihak yang berhak mengeluarkan perintah-perintah atau ketetapan sultan.

Berbagai upaya meningkatkan keamanan serta ketentraman di Negeri Banjar telah ditempuh, tetapi pertikaian antara mangkubumi dan sultan meruncing kembali. Mangkubumi berupaya merongrong kekuasaan sultan untuk menunjukkan kepada Belanda bahwa Sultan Tamjidullah II tidak pandai memerintah dengan harapan agar residen memecat sultan dan menyerahkan singgasana Banjar kepadanya. Sebaliknya, sultan berusaha menekan kekuasaan Pangeran Hidayat selaku mangkubumi, tetapi tak berani menjatuhkannya karena dukungan kaum bangsawan dan rakyat terhadapnya masih cukup kuat. Akibatnya, kondisi Kesultanan Banjar bukannya bertambah baik, justru makin buruk.

e. Pemberontakan Benua Lima

Benua Lima merupakan salah satu distrik di Kerajaan Banjar yang diperintah oleh Kiai Adipati Danuraja. Wilayahnya meliputi daerah Hulu Sungai, Benua Ampat, dan Margasari. Ayah Danuraja berasal dari Amuntai dan karena jasa-jasanya kepada Kerajaan Banjar ia diangkat sebagai kepala daerah bergelar Pembakal Karim. Ia kemudian menikah dengan saudara perempuan Nyai Ratu Komala, istri Sultan Adam. Pembakal Karim mempunyai dua orang anak, yakni Jenal dan Galuh Arijah. Sebagai

saudara ipar sultan, Pembakal Karim dianugerahi gelar Kiai Ngabehi Jaya Negara, sedangkan anaknya yang juga kemenakan sultan digelari Kiai Adipati Danuraja. Karena merasa dirinya masih kerabat Kesultanan Banjar, Kiai Adipati Danuraja cenderung bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaannya. Ia melakukan perampokan lada dan mengorganisasi penjualan budak. Hukuman mati juga dijatuhkannya, padahal itu merupakan wewenang sultan. Kendati demikian, tak seorangpun berani mengadukannya kecuali salah seorang sepupunya yang bernama Jalil. Pengaduan Jalil kepada residen pada Agustus 1854 tidak membuahkan hasil apa-apa.

Jalil membenci Adipati Danuraja karena ayahnya pernah dihukum mati oleh adipati ini. Adipati Danuraja sendiri awalnya memihak Nyai Ratu Komala Sari, namun setelah berselisih dengan Pangeran Prabu Anom, putra kesayangan ratu, ia beralih kepada Pangeran Tamjid. Selain itu, Adipati Danuraja juga berselisih dengan Pangeran Hidayat karena yang bersangkutan pernah menuduhnya sebagai penyebab kematian ayahnya. Jalil mula-mula memihak Sultan Tamjidullah II (Pangeran Tamjid) yang memberinya gelar Tumenggung Macan Negara. Belakangan, Jalil beralih kepada Mangkubumi Pangeran Hidayat dan menjadi kepanjangan tangannya dalam merongrong kekuasaan Danuraja di Benua Lima yang pro-sultan. Suatu rekayasa dirancang oleh mangkubumi demi melemahkan kekuasaan sultan di kawasan tersebut. Pada September 1858, Danuraja melakukan penarikan pajak kepala di Batang Balangan, tetapi Jalil menolak membayarnya. Pembangkangan Jalil ini diadukan pada sultan di Banjarmasin oleh Danuraja. Sultan dua kali mengundang Jalil menghadap ke Banjarmasin, tetapi undangan ini tidak pernah dipenuhi. Bahkan Jalil beserta pengikutnya bersiap membentengi rumah mereka dan tampaknya hendak melakukan pemberontakan. Danuraja menyiapkan 2.000 orang prajurit untuk memadamkan pemberontakan ini, tetapi dicegah oleh Residen Belanda karena sesuai isi kontrak dengan Kerajaan Banjar, hal tesebut merupakan tanggung jawab Belanda. Danuraja tidak jadi menyerang Jalil dan kembali ke Banjarmasin.

Pada saat yang bersamaan, di Masjid Batang Balangan ditempelkan selebaran yang bercap Pangeran Singosari, saudara almarhum Sultan Adam. Sebelumnya, selebaran itu dibacakan oleh penghulu masjid bernama Abdul Gani. Isinya menyebut Sultan Tamjidullah II adalah penindas rakyat dan dinyatakan pula bahwa Benua Lima adalah satu-satunya daerah yang masih menerapkan hukum Islam secara murni

di Banjar. Menurut selebaran tersebut, Pangeran Hidayat dianggap sebagai pelindung hukum serta agama dan rakyat diharapkan mendukungnya. Hal ini membangkitkan ketegangan di Benua Lima sehingga mendorong pihak pemerintah Kerajaan Banjar melakukan investigasi. Sultan menitahkan mangkubumi mengadakan penyelidikan di sana, tetapi karena sultan dan residen tidak begitu saja mempercayai mangkubumi, Belanda juga mengutus orang lain menyertai Pangeran Hidayat dan membuat laporan pembanding. Begitu tiba di Amuntai, mangkubumi bermalam di rumah Jalil dan mendengarkan pengaduan rakyat mengenai tindakan-tindakan Adipati Danuraja.

Kesempatan ini dipergunakan Pangeran Hidayat memperkuat pengaruhnya di Benua Lima sebagai langkah awal menggeser Danuraja. Ia mengangkat Jalil sebagai Kiai Adipati Anom Dinding Raja dan diberi jabatan setingkat menteri dengan penganugerahan pedang beserta tombak sebagai lambang kekuasaannya. Kedudukan Jalil diperkokoh pula dengan penyerahan cap mangkubumi dengan harapan agar ia bertindak atas nama mangkubumi. Setelah itu, ia kembali ke Banjarmasin guna menyampaikan hal-hal yang menurutnya perlu dilaporkan. Guna menandingi pengaruh mangkubumi, sultan mengangkat saudaranya yang bernama Pangeran Aria Kesuma pada 28 Oktober 1858 sebagai pemuka Negeri Benua Lima yang baru atau pemangku kekuasaan eksekutif tertinggi di kawasan tersebut dengan harapan dapat mengawasi sepak terjang Pangeran Hidayat. Pengangkatan ini ternyata juga disetujui oleh mangkubumi.

Demi melemahkan kekuasaan Jalil, sultan melakukan manuver pada 26 Januari 1859 dengan mengangkat Adipati Danuraja sebagai Kepala Sungai Banar dan putra Danuraja, Tumenggung Jaya Negara, diangkat sebagai Kepala Sungai Tabalong Kanan serta Kiri. Pengangkatan ini dilakukan tanpa sepengetahuan mangkubumi sehingga bertentangan dengan aturan yang telah disepakati. Akibatnya, ketetapan ini terpaksa dibatalkan dan Danuraja kembali ke Banjarmasin. Dengan demikian, kini di seluruh kawasan Benua Lima tidak ada lagi pemimpin yang diangkat atau berpihak kepada sultan. Dengan kata lain, kekuasaan sultan di Benua Lima tamat riwayatnya. Menjelang permulaan Maret 1859, kawasan Para, Belimbing, Balangan, dan Tabalong juga telah mengakui kekuasaan Jalil yang merupakan wakil mangkubumi. Pangeran Hidayat dengan cerdik telah mengalihkan sentimen anti-Danuraja kepada sultan.

Peta Banjarmasin Pada Zaman Kolonial
Sumber: *Winkler Prins' Geïllustreerde Encyclopaedie.* 4th ed.

f. Perang Banjar dan Akhir Kesultanan Banjar

Pada 3 Februari 1859, Belanda mengirimkan kapal perang *Arjuno* dari Batavia karena ditemukannya surat rahasia di Sintang yang memanggil pulang orang-orang Banjar di sana agar ikut serta dalam pemberontakan melawan Belanda, tetapi residen Belanda yang berada di Banjarmasin memulangkan kembali kapal perang tersebut karena merasa bahwa hasutan dalam surat rahasia itu tidak perlu dikhawatirkan. Residen gagal membaca eskalasi politik di Banjar sehingga mengeluarkan instruksi semacam itu. Perkembangan penting lain yang terjadi hampir bersamaan dengan peristiwa ini adalah penyerahan hak waris kerajaan oleh Nyai Ratu Komala Sari kepada Pangeran Hidayat. Namun, peristiwa ini sampai juga ke telinga sultan melalui kaki

tangannya, Kiai Gangga Suta. Menurut informasi yang disampaikan kepada sultan, Nyai Ratu Komala Sari beserta tiga orang anaknya telah menyerahkan seluruh Kerajaan Banjar kepada Pangeran Hidayat yang saat itu menjabat sebagai mangkubumi.

Setelah menerima surat pelimpahan itu, Pangeran Hidayat mengadakan sidang dengan mengundang para pangeran beserta pembesar kerajaan, seperti Pangeran Suria Mataram dan Pangeran Wiria Kusuma. Dibicarakan pula masalah Benua Lima. Mangkubumi menitahkan Pangeran Suria Mataram membantu dan melindungi Jalil bila yang bersangkutan hendak ditangkap oleh Belanda. Mangkubumi mempersenjatai Jalil dengan mengirimkan beberapa pucuk senapan dan meriam ke Amuntai. Sultan dan Residen Belanda menganggap hal ini sebagai provokasi atau persiapan pemberontakan. Oleh karenanya, mereka bertolak ke Martapura guna memeriksa kebenaran berita tersebut. Dukungan masyarakat Banjar kepada sultan telah pudar karena begitu tiba di ibu kota sambutan rakyat dingin-dingin saja. Pangeran Hidayat kini diakui oleh rakyat sebagai Raja Banjar. Kendati demikian, saat berbicara dengan mangkubumi, residen tidak menanyakan hal ini dan hanya membahas seputar siapakah yang mengirimkan surat rahasia kepada warga Banjar di Sintang.

Selanjutnya timbul suatu gerakan rakyat di Sungai Muning, Benua Ampat, yang dipimpin oleh seorang tokoh bernama Pangeran Antasari yang sebelumnya kurang dikenal dalam kancah perpolitikan Banjar. Pangeran Antasari sendiri adalah keturunan Sultan Kuning, yang memperoleh sedikit tanah lungguh di Muara Mangkauk hingga Wilah. Sebelum pecahnya gerakan yang kelak meluas menjadi Perang Banjar ini, tidak ada yang menonjol dalam diri Pangeran Antasari sehinga riwayat hidupnya semasa muda tidak banyak diketahui. Apalagi saat itu, ia telah berusia kurang lebih 50 tahun.

Peristiwa menarik yang mendahului pecahnya pergolakan di Muning berawal dari seorang wanita bernama Saranti, putri Aling, petani buta dari Kumbanjau. Suatu kali, Saranti mengaku kerasukan roh halus seraya menyatakan bahwa dirinya adalah penitisan Puteri Junjung Buih–salah seorang leluhur raja-raja Banjar–dan minta dinikahkan dengan seseorang bernama Dulasya, yang menurutnya merupakan penitisan Pangeran Surianata, raja pertama Kerajaan Banjar. Ayahnya menuruti kemauan anaknya ini dan menikahkan keduanya. Saranti lalu memberikan gelar pada kaum kerabatnya. Ayahnya, Aling, diberi gelar Panembahan; Nuriman, kakak perempuannya, diberi gelar Ratu Keramat; suami Nuriman digelari Khalifah Rasul;

kakak laki-lakinya, Sambang, diberi gelar Sultan Kuning; dan kerabatnya yang lain bernama Usang diberi gelar Kindu Mui.

Meskipun demikian, Dulasya merasa tidak sepakat dengan pendirian istrinya ini sehingga mereka akhirnya bercerai. Sultan mendengar juga mengenai perihal ini, tetapi merasa tak perlu mengkhawatirkannya. Pada 20 Maret 1859, berita tentang makar ini sampai ke telinga residen yang memerintahkan mangkubumi memeriksa kebenarannya. Pangeran Hidayat mengutus dua orang, yakni Pangeran Jantera Kusuma dan Pangeran Syarif Umar untuk mencari keterangan di daerah Muning. Berdasarkan informasi yang mereka terima, antara Panembahan Aling dan Pangeran Antasari telah terjadi pertemuan rahasia, bahkan Saranti dinikahkan dengan putra Pangeran Antasari, Pangeran Mohammad Said. Dengan demikian, Aling dan keluarganya kini masuk dalam keluarga Kesultanan Banjar. Pangeran Antasari selanjutnya pulang ke Mangkauk guna menantikan kedatangan 1.000 orang laskar Muning dan berniat menyerang tambang batu bara Belanda di Pengaron. Perkembangan selanjutnya menjadi simpang siur. Menurut laporan kepala tambang batu bara Pengaron kepada residen tertanggal 26 Maret 1859, di Muning dan Gunung Pematon telah berkumpul kurang lebih 4.000 orang. Mereka bersiap mengangkat Raja Banjarmasin yang baru pada 17 April 1859. Menurut kepala tambang ini, Pangeran Antasari sendiri belum bergerak dari Muning. Residen kemudian menyarankan kepada sultan agar berpindah ke Martapura agar mengetahui segenap kondisi yang terjadi di tengah-tengah rakyatnya.

Sementara itu, adik sultan bernama Pangeran Adipati Aria Kesuma mengajukan surat permohonan bantuan kepada Residen Belanda tertanggal 4 April 1859 karena mendapat kabar dari Kiai Gangga Suta bahwa tambang batu bara di Pengaron akan diserbu oleh Pangeran Antasari beserta 3.000 orang pengikutnya. Apabila tambang tersebut jatuh, serangan akan dilanjutkan ke Martapura. Residen belum mengabulkan permohonan ini dan hanya mengusulkan agar sultan kembali ke Banjarmasin bila keselamatan jiwanya di Martapura terancam.

Keadaan bertambah genting ketika Jalil yang telah dianugerahi gelar Kiai Adipati Anom Dinding Raja oleh mangkubumi melakukan blokade terhadap Benua Lima agar bahan pangan tidak masuk ke Banjarmasin, tempat kedudukan sultan dan Belanda. Pangeran Antasari juga mengusir pemungut-pemungut pajak sultan dan menarik cukai atas nama mangkubumi. Hingga saat itu, hubungan rahasia antara Pangeran Hidayat dan tokoh lain seperti Pangeran Aminullah dengan kaum pemberontak

belum terungkap. Mereka berdua masih dianggap setia kepada Belanda. Akhirnya, pergolakan benar-benar pecah pada 28 April 1859 dengan diserangnya tambang batu bara di Pengaron dan pusat misi *zending* (penyebaran agama Kristen) di Pulau Petak. Selain itu, kaum pemberontak menyerang tambang batu bara di Gunung Jabok dan Kalangan serta menduduki benteng Tabaniau dan Martapura.

Belanda mendatangkan pasukan ke Banjar guna menduduki kembali Martapura dan Pengaron. Ekspedisi militer pertama Belanda gagal merebut Martapura, tetapi upaya keduanya pada 11 Juni 1859 berhasil. Belanda dapat menduduki ibu kota Banjar tersebut dengan mudah dan tanpa perlawanan apa-apa. Pangeran Hidayat menyambut pasukan ekspedisi Belanda dan menyatakan bahwa Kerajaan Banjar tetap setia dengan kontrak politik pada 1826. Setelah seminggu menduduki Martapura, Belanda mendapatkan bukti keterlibatan Pangeran Aminullah dalam pemberontakan ini dan kerjasamanya dengan Pangeran Antasari. Namun, hingga sejauh ini bukti keterkaitan Pangeran Hidayat dengan kaum pemberontak belum terbongkar. Belanda sebenarnya hendak mengangkat Pangeran Hidayat sebagai sultan demi menenteramkan rakyat. Kolonel Andresen selaku wakil pemerintah Belanda yang berkuasa penuh mengirim utusan, menawarkan jabatan sultan kepada Pangeran Hidayat. Namun, upaya ini gagal karena saat utusan itu menunjukkan surat-surat rahasia Pangeran Aminullah, Pangeran Hidayat menjadi ketakutan terlebih dahulu dan menyangka bahwa dirinya akan dituduh terlibat dalam pemberontakan. Akibatnya, ia melarikan diri dari Martapura menuju Martagiri dan setelah itu ke Amuntai.

Pangeran Hidayat diangkat sebagai sultan oleh rakyat Amuntai dengan gelar Sultan Hidayatullah Halilillah. Selanjutnya, Amuntai diganti namanya menjadi Martapura Baru dan menjadi pusat Kerajaan Banjar. Guna meredam pergolakan, Belanda menurunkan Sultan Tamjidullah II dari takhtanya dan mengasingkannya ke Bogor. Sultan sendiri tidak keberatan dengan hal ini karena hidupnya dijamin oleh Belanda. Pemerintahan untuk sementara dipegang oleh Pangeran Suria Mataram dan Pangeran Tambak Hanyar. Dengan turun takhtanya Sultan Tamjidullah II, terbuka peluang bagi Pangeran Hidayat menaiki singgasana Banjar. Namun, ia menolak bujukan Belanda tersebut. Politik damai yang dicanangkan Kolonel Andresen gagal sehingga ditempuh strategi kekerasan, ia dipecat dari jabatannya sebagai mangkubumi dan rakyat diperintahkan tidak lagi menaati perintahnya. Oleh karena kekosongan jabatan sultan dan mangkubumi, Belanda menghapuskan Kesultanan Banjar pada 11

Juni 1860 sehingga mengakhiri riwayat kerajaan yang telah berlangsung kurang lebih 300 tahun tersebut. Wilayah Banjar selanjutnya diperintah langsung oleh pemerintah kolonial Belanda.

Penghapusan Kerajaan Banjar ini tidak menghentikan perlawanan rakyat. Pangeran Antasari pindah ke Muara Teweh pada Oktober 1860, tempat tinggal pengikutnya yang paling berpengaruh yakni Tumenggung Surapati. Mereka melakukan serangan terhadap kapal *Onrust* milik Belanda dan menewaskan seluruh awak kapalnya. Oleh karena kewalahan menghadapi sepak terjang Pangeran Antasari, Belanda menawarkan hadiah fl5.000–yang dinaikkan menjadi fl10.000–bagi siapa saja yang dapat menangkapnya hidup atau mati. Namun, tawaran ini tidak sanggup menggoyahkan para pengikut Pangeran Antasari. Meskipun demikian, kondisi Pangeran Antasari dan pengikutnya juga makin terdesak. Satu persatu benteng pertahanan Pangeran Antasari jatuh ke tangan Belanda, mulai dari Lalay, Ringkan Kattan, dan akhirnya Gunung Tongka. Namun, karena terancam kekurangan makanan, benteng ini ditinggalkan lagi dan Pangeran Antasari kembali ke Teweh sambil meluaskan pengaruhnya. Seorang tokoh di Tumbang Moroi bernama Tumenggung Tundan menjadi pengikut Pangeran Antasari. Dengan bantuan seorang pengikut Pangeran Antasari keturunan Tionghoa bernama Liem A Sing, dibangunlah sebuah benteng di Teluk Timpa. Pendirian benteng ini bertujuan memudahkan penguasaan jalan ke Tumbang Muroi. Selain itu, Pangeran Antasari juga mendirikan benteng-benteng lainnya di Teweh. Perlawanan baru mereda setelah satu persatu pemimpinnya tertangkap, menyerah, atau meninggal. Pada 28 Februari 1862, Pangeran Hidayat yang juga terus terdesak, ditawan dan dibuang ke Cianjur. Pangeran Antasari meninggal dunia karena wabah cacar pada 11 Oktober 1862 di Bayan Begak. Demang Leman, salah seorang tokoh perlawanan lainnya, ditangkap dan dihukum gantung oleh Belanda.

g. Sistem Pemerintahan

Kekuasaan tertinggi di Kerajaan Banjar berada di tangan sultan yang dibantu oleh seorang mangkubumi atau patih selaku kepala pelaksana pemerintahan. Biasanya, mangkubumi berasal dari kaum bangsawan yang masih kerabat dekat sultan. Di bawah mangkubumi terdapat *mantri panganan*, *mantri pengiwa*, *mantri bumi*, dan 40 orang *mantri sikap*.[214] Masing-masing mantri sikap ini masih mempunyai bawahan sejumlah 100 orang. Bila dicermati gelar-gelar di atas ada kemiripannya dengan di

214. *Sejarah Nasional Indonesia IV*, halaman 59.

Jawa. Hal ini tidak mengherankan mengingat pengaruh Jawa cukup besar di Banjar pada abad 16 dan 17.

Mantri panganan dan mantri pengiwa tugasnya mengurusi masalah kemiliteran. Mantri bumi beserta mantri sikap bertugas menangani perbendaharaan kerajaan dan pemasukan pajak. Mereka kemungkinan berasal dari kalangan rakyat dan tidak harus bangsawan. Oleh karena kecakapannya, sultan mengangkat mereka sebagai pejabat. Gelar mereka adalah *kyai* atau *tumenggung*. Kedua gelar ini kembali mengingatkan pada pengaruh Jawa. Mangkubumi didampingi pula oleh *panggapit mangkubumi*, yang terdiri dari penghulu (bertugas sebagai pemuka agama) beserta *patih balit*, *patih kuwin*, dan *patih muhur* (semuanya berfungsi sebagai hakim di istana).

Ada pula kelompok pejabat yang tugasnya hanya berkaitan dengan istana saja. Kelompok petugas bernama *sarawisa* bertanggung jawab atas keamanan istana. Mereka beranggotakan 50 orang dan dikepalai oleh seorang *surabraja*. Kemungkinan mereka berada di bawah wewenang mantri panganan dan mantri pangiwa. Markas sarawisa berada di pagungan, yakni sebuah bangunan tinggi di istana, yang darinya alun-alun dapat disaksikan dengan jelas. Kelompok petugas *mandung* bertugas membersihkan istana. Anggotanya ada 50 orang dan diketuai oleh seorang pejabat bergelar *raksayuda*. Saat mengadakan audiensi dengan para pembesar raja, raja dikawal oleh pasukan pengawal yang disebut *mamagarsari* sejumlah 40 orang. Kepala mereka adalah seorang pejabat bergelar *sarayuda*. Sebagai pemelihara persenjataan di keraton terdapat kelompok *saragani*. Mereka dikepalai oleh seorang pejabat bergelar *saradipa* atau *wangsanala*.

Upacara-upacara kerajaan dipercayakan pada sekelompok petugas yang dipimpin oleh seorang *mengumbara*. Kelompok-kelompok petugas lainnya di Kesultanan Banjar adalah[215]

- *mawarga*, yakni rohaniawan yang mendampingi raja ketika upacara kerajaan berlangsung.
- *rasajiwa*, yakni petugas yang membawa benda-benda kebesaran raja, seperti payung, tombak, tikar, dan lain sebagainya.
- *pamarakan*, kelompok beranggotakan 50 orang yang bertugas menyampaikan perintah raja atau melayani raja saat bersantap.

215. Lihat *Sejarah Nasional Indonesia IV*, halaman 60–61.

- *pergamelan*, tugasnya berkaitan dengan pertunjukan dan seni (tari beserta gamelan). Kepalanya adalah seorang pejabat *astraprana*.
- *tuhaburu*, yang dikepalai oleh seorang puspawana. Tugasnya mengiringi raja saat berburu.
- *pariwala* dan *singabana*, dikepalai oleh *singantaka* atau *singapati* yang bertugas menjaga keamanan pasar.
- *juru gaduh gedong* dan *jurung*, dikepalai oleh seorang *wargasari*, tugasnya berkenaan dengan persediaan bahan makanan.
- *juru bandar*, dikepalai oleh seorang *anggamarta*, tugasnya menangani perahu-perahu yang singgah di pelabuhan Kesultanan Banjar.
- *wiramarta*, yang mengurusi masalah perdagangan.

Lebih jauh lagi, semasa pemerintahan Sultan Adam (1825–1857) diadakan jabatan *mufti* yang bertugas sebagai hakim tertinggi di Kesultanan Banjar. Ia merupakan kepala bagi hakim-hakim bawahannya.

Rakyat Banjar terdiri dari berbagai kelompok kesukuan yang hidupnya terikat oleh adat. Masyarakat hidup di desa-desa yang terdiri dari satu atau lebih *bubuhan* (keluarga besar). Biasanya perkawinan berlangsung di kalangan kerabat mereka sendiri, terutama di kalangan bangsawan, demi menjaga agar ikatan kekeluargaan beserta segenap warisan dan kekayaan tetap jatuh dalam kelompok atau keluarga besar mereka sendiri. Pemimpin berbagai *bubuhan* itu dipilih berdasarkan senioritas atau kelebihan yang dimiliki. Mereka mempunyai tanggung jawab yang besar bagi kaumnya karena harus mengurusi masalah internal dan eksternal. Tidak selamanya kepala *bubuhan* dijabat oleh pria karena ada kalanya kaum wanita dipilih menduduki jabatan tersebut. Di atas para kepala *bubuhan* ini barulah terdapat sultan, yang secara teoretis merupakan pemegang otoritas tertinggi di Kesultanan Banjar.

Selanjutnya, wilayah inti Kerajaan Banjar dibagi lagi menjadi berbagai *apanage* (tanah lungguh) yang diserahkan pengelolaannya kepada kaum bangsawan sebagai sumber penghasilan mereka. Seorang bangsawan yang menguasai tanah tersebut berhak memungut hasil yang diperoleh dari para petani penggarap di sana, memerintah warganya bekerja rodi, menetapkan berbagai aturan, dan lain sebagainya. Sedangkan daerah-daerah vasal atau taklukan Banjar cukup membayar upeti tahunan saja.

h. Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan

Seperti di daerah-daerah lainnya, masyarakat terbagi antara golongan bangsawan dan rakyat biasa. Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, kaum bangsawan berhak memperoleh daerah kekuasaan (*apanage*). Tanah itu dikuasakan kepadanya dan bangsawan yang menjadi tuannya berhak memungut hasil dari tanah tersebut. Kerajaan Banjar telah menjadi pelabuhan dagang yang ramai semenjak dahulu serta banyak pedagang asing berdiam di sana. Ketika pedagang asing bertambah banyak, Kerajaan Banjar akhirnya mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai syahbandar yang bertanggung jawab sebagai pegawai sultan untuk mengendalikan mereka. Sebagai contoh, pada abad 17 pernah ada seorang Gujarat bernama Goja Babouw yang ditunjuk sebagai syahbandar dan bahkan ditugaskan menjadi wakil Banjar menandatangani kontrak dengan Belanda di Batavia.

Rakyat Banjar banyak yang bermatapencaharian sebagai petani dan peladang. Ada pula yang mengusahakan perkebunan buah-buahan. Nelayan yang tinggal di tepi sungai juga melakukan kegiatan penangkapan ikan di sungai. Rakyat Banjar telah mengenai pula teknik penempaan logam, yang meliputi besi, emas, dan kuningan. Pandai-pandai emas banyak dijumpai di daerah Martapura dan Banjarmasin. Dalam bidang peternakan, hewan yang diternakkan adalah kuda dan kerbau. Kuda sendiri umumnya dipergunakan sebagai hewan tunggangan oleh kalangan istana. Kerbau terutama dipelihara di daerah dataran tinggi dan rawa-rawa. *Idangan kalang* adalah sebutan orang Banjar bagi kerbau yang hidup di rawa-rawa.

Kapas dihasilkan di daerah Benua Lima, yang dipergunakan membuat benang dan kain. Industri tenun rakyat ini mulai pudar menjelang Perang Dunia I dan II. Sisa kapas yang tidak ditenun diperdagangkan ke Jawa. Monopoli perdaganagn oleh Belanda membuat Kesultanan Banjar mulai kehilangan peranannya, bahkan bahan pokok seperti garam harus didatangkan dari Jawa dan dimonopoli oleh pemerintah kolonial.

Masjid di Martapura
Sumber: Gonggryp, G.F.E. *Geillustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*, N.V. Leidsche Uitgeversmaatschappij, Leiden, 1934, halaman 889-890.

i. Kesusastraan dan Kebudayaan

Karya sastra yang sekaligus menjadi sumber sejarah Banjar adalah *Hikayat Banjar* atau *Hikayat Raja-raja Banjar dan Kotawaringin*. Di dalamnya dapat diperoleh informasi mengenai silsilah, masa awal, serta perkembangan Kerajaan Banjar. Setelah masuknya agama Islam, tidak sedikit pula dihasilkan karya sastra yang bernuansa keagamaan. Pada abad 17 muncul karya berjudul *Asal Kejadian Nur Muhammad*, yang banyak dipengaruhi oleh pandangan ulama asal Andalusia, Ibn Arabi. Selanjutnya, pada abad 18, hiduplah seorang tokoh bernama Syekh Arsyad al-Banjari yang pernah dikirim oleh Sultan Kuning ke Mekkah dan tiba kembali ke Banjar semasa pemerintahan Pangeran Natadilaga (Sultan Tahmidullah II). Ia banyak pula menulis buku-buku agama, di samping mengembangkan pembaharuan dalam Islam. Karya-karyanya banyak tersebar hingga Filipina Selatan, Semenanjung Melayu, Siam, dan Indonesia sendiri.

j. Kerajaan Banjar Menurut Berita Cina

Berita mengenai Kerajaan Banjar (ditransliterasi sebagai 文郎馬神 atau *wénlángmǎshén*) didapat dari *Catatan Sejarah Dinasti Ming*, buku ke-323. Disebutkan bahwa ibu kota kerajaan ini dikelilingi tembok dari kayu dan salah satu sisinya berbatasan dengan pengunungan. Raja memiliki berapa ratus gadis yang berpakaian

indah. Bila mengadakan perjalanan ke luar istana, ia mengendarai gajah. Sementara itu, para gadis tersebut akan mengikutinya dengan membawa pakaian, alas kaki, pisau, tempat sirih, dan pedang. Tatkala bepergian dengan perahu, raja akan duduk bersila di atas dipan. Penduduk membuat rakit kayu dan membangun rumah di atasnya. Hal ini mengacu pada rumah terapung yang umum di sana. Kaum pria dan wanitanya gemar mengenakan kain warna warni untuk menutupi kepalanya. Dalam hal berpakaian, tubuh bagian atas biasanya dibiarkan terbuka. Terkadang dikenakan pula semacam jaket lengan pendek yang dimasukkan lewat kepala sehingga bentuknya mirip rompi. Sementara itu, bagian bawah tubuhnya ditutupi kain. Penduduk Banjar dahulunya menggunakan daun sebagai pengganti piring, tetapi setelah berlangsung perniagaan dengan Cina, tembikar mulai digunakan. Kuali tembikar bergambar naga sangat disukai penduduk Banjar dan orang yang meninggal akan dimasukkan ke dalam kuali seperti itu sebelum dimakamkan.

Catatan Sejarah ini menyebutkan pula adanya suku yang dalam dialek Hokkian disebut Be-oa-jiu (買哇柔, Mandarin *mǎiwāróu*), yang mengacu kepada suku Dayak Biaju atau Ngaju. Suku ini dikatakan sangat kejam dan gemar berkeliaran di malam hari untuk memenggal kepala manusia. Kaum pedagang sangat takut terhadap mereka sehingga menempatkan penjaga saat malam hari. Kebiasaan semacam ini jelas sekali mengacu pada tradisi pengayauan. Raja Banjar saat itu mempunyai permaisuri yang merupakan putri kepala suku Dayak Biaju. Dalam sejarah Banjar, raja yang menikah dengan putri Biaju adalah Sultan Mustain Billah. Istrinya bernama Nyai Biang Lawai. Putra mereka kelak menggantikan ayahnya sebagai raja. Putra tersebut adalah Sultan Inayatullah, yang merupakan putra Sultan Mustain Billah dengan Nyai Biang Lawai. Dengan demikian, berita Cina sehubungan dengan hal ini boleh dikatakan akurat. Raja Banjar yang baru dikatakan tidak sebaik ayahnya. Ia meminjam banyak uang dari para pedagang, tetapi tidak membayarnya. Semenjak saat itu jumlah pedagang yang berkunjung ke sana menjadi makin sedikit.

Sumber sejarah lain mengenai Banjar adalah *Dong Xi Yang Kao* (berasal dari tahun 1618) yang mencatat bahwa kaum wanita Banjar menggunakan sampan kecil untuk mendekati kapal besar guna menjual makanan. Meskipun demikian, perdagangan secara umum dijalankan oleh kaum pria. Disebutkan pula bahwa mata uang yang dipergunakan adalah koin terbuat dari timah hitam. Sumber berita Cina ini meneguhkan bahwa kerajaan Banjar merupakan pusat perdagangan yang ramai.

II. KAWASAN TANAH BUMBU

Tanah Bumbu adalah suatu kawasan di Kalimantan Selatan yang pada zaman Belanda termasuk dalam *afdeeling* (distrik) Paser en de Tanah Boemboe, yang menjadi bagian Karesiden Borneo Selatan. Menurut *Staatblaad* tahun 1898 no. 178, di sana terdapat beberapa daerah swapraja yang kepalanya bergelar pangeran, yakni Bangkalaan, Batu Licin (Batoe Litjin), Cantung (Tjantoeng), Cingal (Tjingal), Manunggul (Manoenggoel), Sabamban, Sampanahan, serta Polaoe Laoet (Pulau Laut) dan Sebuku (Seboekoe). Para penguasanya masih berkerabat dengan Kesultanan Banjarmasin dan Pasir. Wilayah ini dahulunya milik Kesultanan Banjar, namun diserahkan kepada Belanda berdasarkan perjanjian pada 1817. Namun, Belanda menyerahkannya kembali kepada para penguasanya yang asli untuk memerintah daerah tersebut. Sebelum terbagi menjadi beberapa kerajaan, Tanah Bumbu diperintah oleh Pangeran Dipati Tuha (1660–1700), putra Sultan Saidullah. Ia digantikan oleh putranya, Pangeran Mangu (1700–1740). Penguasa berikutnya adalah seorang wanita bernama Ratu Mas (1740–1780), putri Pangeran Mangu. Dia menikah dengan Daeng Malewa (Pangeran Dipati) dan memiliki putra bernama Pangeran Prabu dan Pangeran Layah serta seorang putri bernama Ratu Intan I. Wilayah kekuasaannya kemudian dibagi di antara anak-anaknya. Pangeran Prabu memperoleh bagian utara yang dikenal sebagai Kerajaan Bangkalaan. Sementara itu, sebelah selatan diberikan kepada Ratu Intan I yang selanjutnya menjadi Kerajaan Cantung dan Batulicin. Kawasan Buntar Laut diserahkan kepada Pangeran Layah.

Sebagai mana yang telah disebutkan sebelumnya, Tanah Bumbu merupakan suatu kerajaan. Ketika itu, Pangeran Dipati Tuha putra Sultan Saidullah dari Banjar diminta mengamankan kawasan tersebut Pangeran Dipati Tuha kemudian mendiami kawasan itu yang diberi nama Tanah Bumbu berdasarkan nama sungai Bumbu.

a. BANGKALAAN

Kerajaan Bangkalaan wilayahnya kini meliputi Kecamatan Kelumpang Utara, Kelumpang Selatan, dan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru. Dahulu merupakan tanah kediaman suku Dayak Bangkalaan. Penguasanya yang pertama adalah Pangeran Prabu (1780–1800), putra Ratu Mas. Dia digantikan oleh putranya, Pangeran Nata (1800–1820). Raja-raja yang berkuasa di Bangkalaan berikutnya adalah Pangeran Seria (putra Pangeran Prabu, merangkap sebagai raja Cingal pertama), Ratu Agung Gusti Besar (putri Pangeran Prabu, merangkap sebagai Ratu Sampanahan ke-1 dan

Manunggul ke-1, 1820–1830), Gusti Kamir (putri Pangeran Prabu, 1830–1838), Pangeran Haji Musa (1838–1840), Aji Jawi (merangkap sebagai Raja Manunggul ke-2 dan Sampanahan ke-2), dan Aji Tukul (Ratu Intan II, putri Aji Jawi, merangkap sebagai Ratu Cingal ke-2 dan Manunggul ke-3, 1845). Ratu Intan II menikah dengan Aji Pati (Pangeran Agung, putra Sultan Sulaiman dari Pasir) yang mendampinginya dalam pemerintahan. Oleh karena itu, Aji Pati dianggap sebagai Raja Bangkalaan ke-9. Ia secara berturut-turut digantikan oleh Pangeran Muda Muhammad Arifbillah Aji Samarang (merangkap sebagai Raja Bangkalaan, Cingal ke-3 dan Manunggul ke-4, 1846–1883) dan Arya Kasuma (putra Pangeran Muda Muhammad Arifbillah Aji Samarang (1884–1905).

b. BATULICIN, BUNTAR LAUT, dan CANTUNG

BATULICIN dan CANTUNG

Batulicin dan Cantung diserahkan kepada Ratu Intan I (1780–1800), putri Ratu Mas. Ia menikah dengan Sultan Anom dari Kerajaan Pasir. Penggantinya selaku Raja Batulicin dan Cantung kedua adalah Pangeran Seria, putra Pangeran Prabu. Menurut sumber lainnya, Raja Cantung dan Batulicin kedua adalah Raja Gusti Besar, yang merupakan kemenakan Ratu Intan I.[216] Sepeninggal Raja Gusti Besar, kawasan Cantung diperintah oleh Gusti Muso, sedangkan Batulicin diperintah oleh Pangeran Muhammad.

BATULICIN

Pangeran Muhammad yang berkuasa di Batulicin digantikan oleh Pangeran Haji Musa (1838–1840) yang juga menjadi Raja Bangkalaan. Ia menikahi putri Sultan Sulaiman dari Banjar bernama Ratu Salamah. Putranya bernama Pangeran Panji menduduki takhta Batulicin. Pangeran Panji tidak mempunyai keturunan. Oleh karenanya, singgasana Batulicin lalu beralih kepada Aji Landasan, putri Aji Jawi, Raja Cantung. Aji Landasan menikah dengan Daing Magading yang menggantikannya sebagai penguasa Batulicin berikutnya. Daing Magading digantikan oleh Pangeran Muhammad Nafis (1840–1845) yang merupakan putra Pangeran Haji Musa, ia juga

216. *https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Cantung* (diakses pada 20 Januari 2016).

merangkap sebagai Raja Kusan. Raja selanjutnya adalah Pangeran Abdul Kadir yang digantikan oleh Syarif Muhammad Toha.

Syarif Muhammad Toha merupakan putra Pangeran Syarif Ali al-Idrus dari Sabamban dan Petta Walu'e, putri penguasa setempat. Pangeran Syarif Ali al-Idrus sendiri merupakan kerabat Kerajaan Kubu dari Kalimantan Barat, yang memutuskan pindah ke Kalimantan Selatan. Selanjutnya, Pangeran Syarif Ali Al-Idrus diangkat sebagai Raja Sabamban. Pada perkembangan selanjutnya, Pangeran Syarif Muhammad Toha menikah dengan Indo Muttajeng (Daeng Sangiang), putri Raja Pagatan dan Kusan. Raja-raja Batulicin berikutnya adalah Pangeran Syarif Hamid, Pangeran Syarif Taha, Syarif Achmad, dan Syarif Abbas.

CANTUNG

Syarif Abbas selanjutnya digantikan oleh Gusti Muso selaku Raja Cantung ketiga. Ia digantikan oleh menantunya, Pangeran Aji Jawi (Adji Djawa), yang merangkap pula sebagai Raja Bangkalaan, Cingal, Manunggul, dan Sampanahan. Pangeran Aji Jawi menjadi penguasa Cantung karena menikahi Gusti Katapi, putri Gusti Muso. Dia menjadi Raja Bangkalaan karena menikahi Gusti Kamil, putri Pangeran Muda Muhammad Arifillah Aji Semarang (1846–1883), seorang Raja Bangkalaan, Cingal, dan Menunggul.

Putra Aji Jawi dengan Gusti Katapi, yakni Aji Madura (Aji Daha, 1842–1862), menjadi Raja Cantung berikutnya. Semasa kekuasaannya, daerah Buntar Laut disatukan dengan Cantung. Aji Madura digantikan oleh putranya, Aji Darma atau Pangeran Kusumanegara (1863–1929). Karena membantu Banjar dalam Perang Banjar, Aji Darma diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1890. Ia kemudian ditempatkan di Bondowoso. Turut serta dalam pengasingan adalah ibunya, Ratu Jumantan.

BUNTAR LAUT

Pangeran Layah, putra Ratu Mas, menerima kawasan Buntar Laut. Ia secara berturut-turut digantikan oleh Gusti Cita dan Gusti Dandai. Setelah itu, Buntar Laut disatukan di bawah pemerintahan Aji Madura, Raja Cantung, karena Gusti Dandai tidak mempunyai ahli waris.[217]

---

217. Lihat *https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Cantung* (diakses pada 20 Januari 2016).

c. CINGAL

Kerajaan Cingal terletak di Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Barat. Pendirinya adalah Ratu Intan, putri Sultan Banjar. Kedatangannya untuk memenuhi permintaan suku Dayak agar dikirimkan seorang penguasa ke daerah itu untuk melindungi mereka dari para perompak. Raja Cingal pertama adalah Pangeran Seria, putra Pangeran Prabu, yang sekaligus merangkap sebagai Raja Cantung dan Batulicin kedua, serta Raja Bangkalaan ketiga. Penguasa Cingal berikutnya adalah Aji Tukul atau Ratu Intan II (1845) yang merangkap sebagai Raja Bangkalaan kedelapan. Setelah suaminya, Aji Pati dari Pasir meninggal pada 1846, ia menikah dengan Pangeran Abdul Kadir yang kelak menjadi Raja Pulau Laut. Penggantinya adalah Pangeran Muda Muhammad Arifillah Aji Semarang (1846–1883). Ia merangkap pula sebagai Raja Bangkalaan kesepuluh dan Raja Menunggul keempat.

d. KUSAN

Sultan Tahmidillah I dari Banjar memiliki tiga orang putra yang masing-masing bernama Pangeran Rahmad, Pangeran Abdullah, dan Pangeran Amir. Ketika sultan mangkat, tampuk pemerintahan Kesultanan Banjar diserahkan kepada saudara sultan, Pangeran Natadilaga, karena Pangeran Abdullah selaku putra mahkota masih kanak-kanak. Namun, Pangeran Natadilaga tidak bersedia menyerahkan takhta kepada Pangeran Abdullah sehingga ia lantas membunuh seluruh pewaris takhta yang sah. Ia kemudian menobatkan dirinya sebagai sultan dengan gelar Tahmidullah II. Pangeran Abdullah dan Pangeran Rahmad tewas sebagai korban ambisi pamannya itu. Beruntunglah Pangeran Amir dapat melarikan diri dengan dalih hendak menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Namun, sesungguhnya ia menyingkir ke Pagatan, Pasir, dan akhirnya Kusan Hulu.

Dengan dibantu pasukan Bugis, Pangeran Amir melancarkan serangan terhadap pamannya pada 1787. Pangeran Natadilaga atau Sultan Tahmidullah II yang merasa terancam meminta bantuan Belanda. VOC bersedia membantu asalkan Sultan Tahmidullah II menyerahkan kerajaannya pkeada Belanda. Setelah sultan menyepakati, diturunkanlah pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Christoffel Hofman melawan Pangeran Amir beserta laskar Bugisnya. Pangeran Amir kalah dan diasingkan ke Sri Lanka. Putra Pangeran Amir, Pangeran Nasohot (Pangeran Masud), menggantikan ayahnya sebagai Raja Kusan berikutnya. Ia menikah dengan Gusti

Hadijah, putri Sultan Sulaiman, Raja Banjar berikutnya. Raja-raja Kusan berikutnya adalah Pangeran Haji Musa (saudara seayah Gusti Hadijah dan Sultan Adam dari Banjar), Pangeran Muhammad Nafis (1840–1845, merangkap pula sebagai Raja Kusan), dan Pangeran Abdul Kadir (Pangeran Abdullah Kadir Kasuma 1845–1861, juga merangkap Raja Batulicin dan Pulau Laut).

e. MANUNGGUL

Penguasa pertama Manunggul adalah Ratu Agung Gusti Besar (1820–1830) yang merupakan putri Pangeran Prabu. Ia merangkap pula sebagai Ratu Bangkalaan keempat dan Ratu Sampanahan pertama. Ia menikah dengan Aji Raden dari Pasir. Penggantinya adalah Aji Jawi yang merupakan putra Ratu Agung Gusti Besar. Aji Jawi menjabat pula sebagai Raja Cantung keempat, Bangkalaan ketujuh, dan Sampanahan kedua. Ia digantikan oleh Pangeran Muda Muhammad Arifillah Aji Samarang, yang juga merupakan Raja Cingal ketiga dan Bangkalaan kesepuluh.

f. PAGATAN

Kerajaan Pagatan didirikan oleh seorang pedagang Bugis asal Wajo bernama Puanna Dekke. Dalam pelayarannya, Puanna Dekke tiba di kawasan Tanah Bumbu dan menjumpai sebuah muara sungai. Dia menyusuri sungai itu dan berjumpa dengan beberapa orang yang sedang memotong rotan. Bertanyalah ia mengenai nama tempat tersebut dan dijawab oleh mereka *pamagatan*, yang berarti "tempat memotong rotan." Setelah diberitahu bahwa kawasan itu masuk Kerajaan Banjar, Puanna Dekke menjumpai Sultan Banjar, yang saat itu dijabat oleh Sultan Kuning (Panembahan Kaharuddin Halilullah), dan meminta izin menempatinya. Sultan menjawab bahwa Puanna Dekke diperkenankan mendiami daerah yang dimintanya asalkan sanggup membukanya sendiri menjadi suatu perkampungan mengingat tempat itu masih berupa hutan belantara dan kerap menjadi tempat persembunyian penjahat ataupun bajak laut. Puanna Dekke bertanya lagi bagaimana bila ia telah mengupayakannya menjadi sebuah perkampungan. Sultan menyatakan tempat itu akan menjadi haknya turun-temurun.

Puanna Dekke lantas memerintahkan pengikutnya menebang pepohonan dan membuka hutan. Perkampungan barunya diberi nama Pegattang yang belakangan berubah menjadi Pagatan. Saudaranya bernama Pua Janggo dan kakeknya bernama Pua Ado La Pagala turut bergabung dengan Puanna Dekke. Kedua bersaudara tersebut lantas sepakat menjemput La Pangewa (Hasan), cucunya, yang masih

keturunan bangsawan Bugis. La Pangewa lantas dinobatkan sebagai Raja Pagatan pertama. Ketika itu, Pangeran Anom kerap mengganggu kapal-kapal yang berlalu lalang di perairan Banjarmasin. Karenanya, La Pangewa minta izin pada raja Banjar agar diperbolehkan menghadapi Pangeran Anom. Raja Banjar merestuinya dan La Pangewa berhasil mengalahkan Pangeran Anom sehingga yang bersangkutan terpaksa menyingkir ke Kuala Kapuas. Setelah menunaikan tugasnya dengan gemilang, La Pangewa menemui raja dan melaporkan keberhasilannya. Sebagai penghargaan atas jasanya, La Pangewa dianugerahi gelar Kapitan Laut Pulo (Pulau Laut). Sultan Banjar menegaskan lagi daerah itu merupakan haknya turun-temurun dan tak seorangpun dapat mengganggunya.

Raja-raja berikutnya yang berkuasa di Pagatan adalah La Palebi (Abdurrahman, 1830–1838), Arung Palewan Abdul Rahim (1838–1855), La Mattunru (Abdul Karim, 1855–1863), La Makkarau (1863–1871), Abdul Jabar (1871–1875), Ratu Senggeng (Daeng Mangkau, 1875–1883), Syarif Thaha (1883–1885, juga merangkap sebagai Raja Cantung dan Batulicin kesembilan), Daeng Mahmud (1885–1893), dan Andi Sallo (Arung Abdul Rahim, 1893–1908). Kerajaan Pagatan dan Kusan baru dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1 Juli 1912 yang dikokohkan dengan *Staatblads* (Lembaran Negara) No. 312.01.

g. PULAU LAUT

Kerajaan Pulau Laut didirikan oleh Pangeran Jaya Sumitra (1850–1861), putra Pangeran Muhammad Nafis dari Kusan. Ia digantikan oleh Pangeran Abdul Kadir (putra Pangeran Muhammad Nafis, 1861–1873, merangkap sebagai Raja Batulicin dan Kusan), yang menikah dengan Ratu Intan II. Raja-raja Pulau Laut berikutnya adalah Pangeran Brangta Kasuma (putra Pangeran Abdul Kadir, 1873–1881), Pangeran Amir Husin Kasuma (putra Pangeran Brangta Kusuma, 1881–1900), Pangeran Abdurrahman Kasuma (pejabat raja Pulau Laut, putra Pangeran Brangta Kasuma, 1900–1902), dan Pangeran M. Aminullah Kasuma (pejabat sementara, putra Pangeran Amir Husin Kasuma, 1902–1905). Kerajaan Pulau Laut kemudian dihapuskan dan wilayahnya diperintah secara langsung oleh Belanda.

h. SABAMBAN

Pendiri Kerajaan Sabamban adalah Pangeran Syarif Ali Al-Idrus pada kurang lebih abad 18. Ayahnya adalah Syarif Abdurrahman Al-Idrus, seorang ulama keturunan Arab yang datang menyebarkan agama Islam di Kepulauan Nusantara. Ia disambut

hangat oleh Raja Banjar dan dinikahkan dengan saudari Sultan Adam bernama Putri Saribanon. Putra mereka adalah Syarif Ali Al-Idrus yang menikah dengan saudari Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie dari Pontianak. Sekembalinya dari Pontianak, ia meneruskan usaha penyebaran Islam yang dirintis ayahnya. Dalam pengembaraannya, ia tiba Lok Besar dan karena tertarik dengan kesuburan tanahnya, dibangunlah tempat kediaman di kawasan tersebut. Lambat laun, perkampungan yang didirikannya berubah menjadi Kerajaan Sabamban dengan Syarif Ali Al-Idrus sebagai kepala daerahnya. Pangeran Syarif Ali Al Idrus menikah dengan putri penguasa setempat bernama Putri Petta Walu'e dan dikaruniai enam orang anak bernama Syarif Hamid, Qomariah, Syarif M. Thoha, Syarif Mustafa, Syarif Ahmad, dan Petta Bau. Raja-raja Sabamban berikutnya adalah Syarif Hasan Al-Idrus dan Pangeran Syarif Kasim Al Idrus.

i. SAMPANAHAN

Para penguasa yang pernah memerintah Sampanahan adalah Ratu Agung Gusti Besar yang merangkap sebagai Ratu Manunggul pertama dan Bangkalaan keempat, Aji Jawi yang merangkap sebagai Raja Cantung keempat, Manunggul kedua, dan Bangkalaan ketujuh, dan Pangeran Mangkubumi (Gusti Ali).

III. KOTAWARINGIN

Menurut buku *Sejarah Daerah Kalimantan Tengah*, konon sebelum berdirinya Kesultanan Kotawaringin telah ada suatu kerajaan suku Dayak bernama Sarang Paruya yang berlokasi di hulu Sungai Lamandau. Bukti peninggalannya adalah puing-puing bekas tiang rumah (*betang*) yang terbuat dari kayu ulin besar dan berukir.[218] Orang-orang Melayu yang berniaga ke sana menyebut penduduk asli kawasan tersebut sebagai *mama* (paman). Sebutan ini kemudian menjadi nama suku Dayak tersebut. Belakangan, nama ini diubah lagi menjadi Tumon sehingga orang menyebut mereka suku Dayak Tumon. Pendirian Kerajaan Kotawaringin berawal dari kesepakatan antara Pangeran Adipati Antakusuma dari Kerajaan Banjar dengan salah seorang tokoh Dayak Tumon di Sungai Arut bernama Kyai Gede. Masih berdasarkan buku *Sejarah Daerah Kalimantan Tengah*, halaman 129, Kyai Gede merupakan salah seorang pelarian tentara Kerajaan Majapahit. Hal ini tampaknya tidak masuk akal karena Kerajaan Kotawaringin berdiri pada sekitar abad 17, sedangkan Majapahit telah runtuh kurang

218. lihat *Sejarah Daerah Kalimantan Tengah*, halaman 128.

lebih dari seratus tahun sebelumnya. Sumber lain menyatakan bahwa tokoh Dayak tersebut bernama Patih Patinggi Diumpang. Sedangkan Kyai Gede adalah nama tokoh alim ulama dari Jawa yang membantu sultan menjalankan pemerintahannya.

Sebagai bukti kesungguhan perjanjian tersebut, tokoh suku Dayak ini mengusulkan kepada Pangeran Adipati Antakusuma agar mengorbankan seorang anggota rombongannya masing-masing, saran ini disepakati oleh pangeran. Sebelum dilakukan upacara pengorbanan tersebut, terlebih dahulu dilakukan penancapan batu ke dalam tanah sebagai bukti turun-temurun–yang kini disebut Batu Petahan dan terletak di Pandai, Kecamatan Pangkut, Kabupaten Kotawaringin Barat. Orang-orang yang hendak dikorbankan berdiri di samping batu tersebut dengan menghadap daerah asalnya masing-masing. Setelah itu barulah keduanya dikorbankan. Peristiwa ini terjadi pada 1679 dan menandai berdirinya Kerajaan Kotawaringin. Pangeran Adipati Antakusuma menjadi rajanya yang pertama.

Raja kesembilan, Pangeran Ratu Imanudin (1811–1841),[219] memindahkan ibu kota Kotawaringin ke Pangkalanbun dan mendirikan istana yang masih dapat disaksikan hingga kini. Selanjutnya, Kotawaringin diperintah oleh Pangeran Ratu Ahmad Hermansyah (1841–1865)[220] selaku rajanya yang kesepuluh. Pada 1904, raja kesebelas, Pangeran Ratu Anom Kusuma Yudha (1865–1904),[221] mangkat dan terjadi perselisihan mengenai siapa yang akan menggantikannya. Salah seorang yang menuntut takhta itu adalah seorang syahbandar bernama Tuan Andela. Ia mengumpulkan tanda tangan para menteri sebagai tanda persetujuan terhadap pencalonannya sebagai Raja Kotawaringin berikutnya. Untuk menyelesaikan masalah ini, kontrolir Belanda bernama van Duve datang ke Pangkalanbun. Ternyata kontrolir mengangkat keturunan Pangeran Ratu Imanudin bernama Pangeran Paku Negara sebagai raja Kotawaringin keduabelas dengan gelar Pangeran Ratu Sukma Negara (1905–1913).[222] Ia mempunyai tiga orang anak, yang masing-masing bernama Pangeran Kusuma Alamsyah alias Pangeran Bagawan, Pangeran Kalana, dan Pangeran Penghulu. Di antara ketiganya, yang menjadi pengganti Pangeran Ratu Sukma Negara adalah Pangeran Kusuma Alamsyah atau Pangeran Ratu Sokma Alamsyah (1913–1939). Pengangkatannya diikuti oleh penandatanganan kontrak politik berupa

219. Menurut *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, halaman 153, memerintah 1830–1852.
220. Menurut *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, halaman 153, memerintah 1852–1867.
221. Menurut *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, halaman 153, memerintah 1867–1904.
222. Menurut *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, halaman 153, memerintah 1904–1913.

Korte Verklaring pada 1913 yang berisikan pernjanjian hidup berdampingan secara damai dengan Belanda.

Menjelang masa kedatangan Jepang, sikap anti-Belanda berkembang di Kotawaringin. Beberapa tokoh terbuai oleh propaganda Jepang yang senantiasa menghembuskan pesan bahwa mereka adalah "pembebas" dari cengkeraman kolonialisme bangsa Barat, bahkan dua orang tokoh bernama Gusti Gumad dan Gusti Ali[223] yang dikehendaki para pengikutnya menjadi Sultan Kotawaringin telah memiliki bendera Jepang guna dikibarkan bila saatnya dirasa tepat. Keduanya yakin bahwa Jepang dapat membantu mewujudkan cita-cita mereka. Meskipun demikian, Belanda yang masih bercokol di Kotawaringin mencium rencana tersebut. Oleh karenanya, para pengikut mereka ditangkap oleh Belanda.

Pangeran Ratu Kusuma Anum Alamsyah (1939–1947) merupakan raja keempatbelas dan sekaligus terakhir. Penjajahan Jepang berlangsung pada masa pemerintahannya. Ketika itu terjadi kegemparan di kalangan Kesultanan Kotawaringin karena pertanyaan serdadu Jepang mengenai siapakah keturunan Pangeran Natawijaya yang pernah ke Jepang. Apabila salah menjawabnya, mereka khawatir dibunuh oleh Jepang. Untunglah tokoh yang dimaksud mereka ternyata satu pendidikan dengan salah seorang opsir Jepang.[224] Setelah berlangsungnya Proklamasi Kemerdekaan RI, Pangeran Ratu Kusuma Anum Alamsyah diberhentikan oleh Belanda pada 1947 karena memihak Republik Indonesia.

C. KERAJAAN-KERAJAAN DI KALIMANTAN TIMUR

I. BERAU

a. Cikal Bakal Kerajaan Berau

Kerajaan Berua kini terletak di Kabupaten Berau, Kecamatan Gunung Tabur. Konon dahulu kawasan ini didiami oleh berbagai *banua* (suku) dengan kepala suku dan adatnya masing-masing. Pada kurang lebih abad 14, masing-masing banua ini sepakat bersatu membentuk sebuah kerajaan. Dengan demikian, berdirilah Kerajaan Berau yang namanya diambil dari nama kawasan itu.

Sebagai Raja Berau pertama, diangkatlah Addit Dipattung yang bergelar Aji Raden Suryanata Kesuma. Permaisurinya bernama Baddit Kurindan dengan gelar

223. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Tengah*, halaman 65–66.
224. Lihat *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Kalimantan Tengah*, halaman 7.

Aji Permaisuri. Wilayah kekuasaannya merupakan penyatuan berbagai banua, yakni Banua Merancang, Pantai, Kuran, Rantau Buyut dan Rantau Sewakung. Legenda juga menyatakan bahwa ia merupakan raja yang bijaksana dan berhasil menyejahterakan rakyatnya. Konon, Aji Raden Suryana Kesuma merupakan kepala wilayah yang diangkat oleh Majapahit pada 1365[225] untuk memimpin wilayah itu. Dahulu wilayah kekuasaannya juga mencapai Brunai. Aji Raden Suryanata Kesuma dianggap sebagai leluhur raja-raja Berau, Gunung Tabur, Sambaliung, dan Bulungan.

Guna mengatur wilayah kekuasaannya yang luas, Aji Raden Suryanata menempatkan wakilnya di beberapa wilayah yang penting, seperti Rangga Batara, yang berkedudukan di Pantai, Rantau Berawan; Tumenggung Macan Nagara berkedudukan di Benua Kuran; Angka Yuda berkedudukan di Bulalung; Patungung di Sungai Kelai; Jaya Pati di Negeri Bunyut; dan Nini Barituk di Sungai Ulak. Mereka masing-masing bertanggung jawab penuh atas daerah kekuasaannya masing-masing. Demi menjaga ketertiban kerajaannya, dikeluarkanlah undang-undang bernama Pematang Ammas yang dibuat berdasarkan musyawarah dan mufakat antara raja dan kepala-kepala pemerintahan tersebut. Peraturan tersebut mengatur mengenai perkara pidana dan perdata yang diperlukan demi menyelesaikan berbagai perselisihan di kalangan rakyat.

Saat Majapahit masih berada dalam puncak kejayaannya, rakyat Berau harus membayar upeti kepada kerajaan tersebut, tetapi menjelang abad 15 dan 16, Majapahit mulai surut pamornya sehingga masing-masing wilayah taklukan bebas menjalankan kedaulatannya sendiri-sendiri. Selanjutnya, Berau diperintah oleh Aji Nikullan, Aji Nikutak, Aji Nigindang, Aji Panjang Ruma, Aji Tumanggung Barani, Aji Sura Raja, Aji Surya Balindung, dan Aji Dilaya.

b. Perkembangan dan Perpecahan Kerajaan Berau

Aji Dilaya mempunyai dua orang putra, yakni Pangeran Tua dan Pangeran Dipati. Demi menghindarkan perselisihan di antara mereka, diadakan kesepakatan bahwa kedua orang pangeran itu beserta keturunannya masing-masing akan menjadi raja secara bergantian. Apabila seseorang menjadi raja maka yang lain menjadi wakilnya. Pertama-tama yang naik takhta menggantikan Aji Dilaya adalah Pangeran Tua, yang kemudian digantikan oleh Pangeran Dipati. Agar lebih jelas silsilah Kerajaan Berau dan urutan suksesinya akan ditampilkan dalam diagram sebagai berikut.

225. Lihat buku *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Timur*, halaman 80.
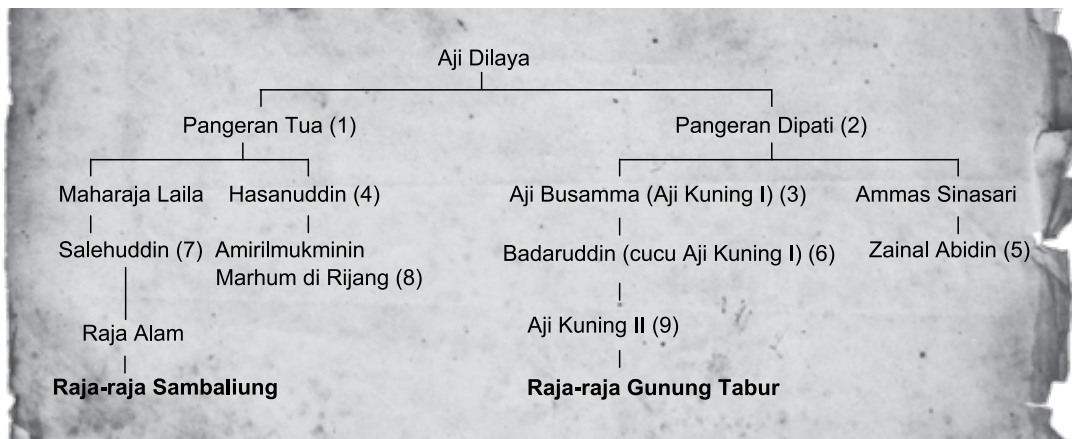
Silsilah Raja-raja Berau
Catatan: Angka di dalam kurung menunjukkan urutan dalam pergantian takhta

Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, datanglah Petta Torawe, putra La Maddukelleng (Raja Wajo) berkunjung ke Berau. Sebagai tanda persahabatan, Petta Torawe menuliskan piagam di pintu gerbang istana. Isinya menyatakan bahwa orang yang telah berlindung di halaman istana raja, tidak boleh lagi diganggu keamanannya. Demi menjalin relasi antara Wajo dan Berau, Petta Torawe menempatkan panglimanya bernama La Madu Daeng Pallawa di sana. Keturunannya mendirikan kampung Bugis di Tanjung Redeb. Pada perkembangan selanjutnya, cucu Petta Torawe dinikahkan dengan Raja Alam. Sultan Hasanuddin sendiri menikah dengan Dayang Lana, anak Raja Sulu. Dengan demikian, Kesultanan Berau juga menjalin hubungan kekeluargaan dengan Sulu di Filipina Selatan. Sultan Zainal Abin menikah dengan Aji Galuh Besar, putri Pangeran Mangkubumi, cucu Sultan Kutai. Oleh karena adanya hubungan persahabatan dan kekeluargaan ini, Kerajaan Berau, Kutai, Sulu, dan Wajo saling bahu membahu apabila menghadapi serangan dari pihak lain, termasuk Belanda.

Belanda memasuki wilayah Berau pada abad 17 dan berupaya menanamkan pengaruhnya di sana, tetapi belum membuahkan hasil nyata. Baru pada abad 19, setelah dikembalikannya Kepulauan Nusantara oleh Inggris ke tangan Belanda, dilakukan upaya lebih intensif untuk menguasai Berau. Agar Berau makin lemah, diterapkanlah politik *divide et impera* (adu domba) sehingga memecah kerajaan ini menjadi dua, yakni Gunung Tabur yang dipimpin oleh Aji Kuning II (Gazi Mahyudin) dan Sambaliung yang diperintah oleh Raja Alam, cucu Sultan Hasanuddin. Sebelumnya, keturunan Pangeran Tua dan Pangeran Dipati memerintah Berau secara bergantian.

Belanda menyadari bahwa Raja Alam membahayakan kedudukan mereka karena ia menjalin hubungan dengan para pejuang Bugis yang dipimpin oleh Pangeran Petta, cucu La Maddukkeleng dari Wajo, demikian pula dengan pejuang Sulu yang dipimpin oleh Syarif Dakula, menantunya. Mereka merupakan musuh-musuh bebuyutan VOC. Sebagai langkah awal melemahkan kedudukan Raja Alam, Belanda mendekati Aji Kuning II (1833–1850), yang berasal dari keturunan Pangeran Dipati. Belanda telah menyadari bahwa jalinan hubungan antara kedua garis keturunan penguasa Berau ini senantiasa dihiasi oleh persaingan. Raja Alam sanggup mencium gelagat buruk Belanda tersebut. Karenanya, ia lalu memperkuat persekutuannya dengan orang Bugis dan Sulu. Riwayat Raja Alam selanjutnya akan diulas pada bagian mengenai Sambaliung.

Pada 1960, pemerintah mulai menghapuskan daerah swapraja dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, wilayah kedua kesultanan pecahan Berau itu digabungkan kembali menjadi Kabupaten Berau dengan Sultan Sambaliung terakhir, Muhammad Aminuddin, sebagai bupati pertamanya. Sementara itu, gelar Raja Berau pertama diabadikan sebagai nama komando resort militer (korem), yakni Korem 081 Aji Suryanata Kesuma (ASN) yang berkedudukan di Samarinda.

II. BULUNGAN

a. Cikal Bakal Kesultanan Bulungan

Menurut legenda, sebelum munculnya Kesultanan Bulungan, kawasan ini diperintah oleh para kepala suku. Cikal bakal Kesultanan Bulungan adalah seorang kepala suku Dayak Hupan (Kayan) bernama Kuwanyi. Mula-mula warganya hanya sekitar 80 orang saja dan mendiami tepi Sungai Payang yang merupakan cabang Sungai Punjungan. Karena lokasi tempat kediaman mereka itu dirasa kurang baik, warga lalu berpindah ke tepi Sungai Kayan. Suatu saat ketika Kuwanyi berburu di hutan, ia tak berhasil mendapatkan seekor hewan buruan pun, tetapi dia menemukan sebatang bambu betung beserta sebutir telur yang tergeletak di atas kayu. Ternyata dari dalam bambu tersebut keluarlah seorang anak laki-laki yang kemudian diberinya nama Jauwiru dan ketika telur itu dipecah muncul seorang anak perempuan yang diberinya nama Lemlai Suri. Mereka berdua lalu dinikahkan oleh Kuwanyi. Kisah Jauwiru dan Lemlai Suri ini kini diabadikan dalam sebuah monumen bernama Telor Pecah, yang terletak antara Jalan Sengkawit dan Jelarai sebagai peringatan terhadap cikal bakal Kesultanan Bulungan. Nama Bulungan sendiri berasal dari kata *bulu tengon* yang artinya 'bambu

betung.' Sementara itu, buku *Sekilas Sejarah Kesultanan Bulungan dari Masa ke Masa* (*SSKBMM*) halaman 20 menyebutkan bahwa *bulu tengon* berarti 'bambu sungguhan,' namun karena perubahan dialek bahasa Melayu, kata tersebut berubah menjadi Bulungan. Ketika Kuwanyi mangkat, Jauwiru diangkat sebagai penggantinya dalam memimpin suku Dayak Hupan. Dari pernikahannya itu, ia memperoleh seorang putra bernama Paran Anyi. Menurut buku *SSKBMM* halaman 20–21 menyebutkan bahwa Jauwiru (dalam buku itu dieja Djau Iru) mempunyai anak bernama Djau Anji' yang meneruskan kedudukannya sebagai kepala suku. Selanjutnya, Djau Anji' memperoleh seorang putra bernama Paren Djau, ia menjadi kepala suku berikutnya. Paren Djau digantikan oleh putranya, Paren Anji' (kemungkinan sama dengan Paran Anyi di atas).

Paran Anyi mempunyai seorang putri bernama Lahai Bara yang menikah dengan seorang tokoh bernama Wan Paren. Menurut *SSKBMM* halaman 21, Wan Paren ini adalah seorang kesatria. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra dan seorang putri yang masing-masing bernama Si Barau dan Simun Luwan. Menjelang wafatnya, Lahai Bara berpesan kepada anak-anaknya agar menempatkan peti jenazahnya di hilir Sungai Kipah. Ia mewariskan pula tiga buah benda pusaka berupa ani-ani, sejenis tutup kepala, dan sebuah dayung. Hal ini menimbulkan perselisihan antara dua bersaudara ini. Dengan kesaktiannya, Simun Luwan menggoreskan ujung dayungnya pada sebuah tanjung Sungai Payang serta memutuskan tanjung tersebut hingga hanyut ke hilir dan tiba di tepi Sungai Kayan, tepatnya di sebuah desa bernama Long Pelban. Bersama dengan itu, ia membawa pula peti jenazah ibunya dan memakamkannya di sana. Hingga sekarang, keturunan Lahai Bara, termasuk keluarga Kesultanan Bulungan, tidak ada yang berani melintasi makam ini karena takut terhadap kutukan perselisihan antara Si Barau dan Simun Luwan. Tanjung yang hanyut bersama Simun Luwan itu sampai saat ini dinamai Busang Manyun, yang berarti 'pulau hanyut.' Peristiwa kepergian Simun Luwan dengan "menumpang" sebuah tanjung ini sebenarnya merupakan awal perpindahan beberapa anggota suku dari kampung halamannya di Sungai Payang menuju Sungai Kayan, yang tidak jauh dari Tanjung Selor atau ibu kota Kesultanan Bulungan kelak. Kini suku bangsa Dayak Kayan masih dapat dijumpai di beberapa perkampungan sepanjang sungai Kayan, hulu Tanjung Selor, Kampung Long Mara, Antutan dan Pimping.[226]

226. Buku *SSKBMM*, halaman 21, memberikan kisah berbeda. Konon saat Paren Anji' wafat semua perahu disembunyikan orang di daratan. Oleh karenanya, Lahai Bara harus berjalan dari tepi sebelah barat hingga timur dengan menyeret dayungnya (seolah-olah menggores tanah). Begitu tiba di tepian sebelah timur, daratan

Simun Luwan menikah dengan Sadang[227] (menurut *SSKBMM* halaman 23, ia memerintah dari 1458–1555) dan melahirkan seorang putri bernama Asung Luwan[228] yang dinikahi dengan seorang bangsawan Brunai bernama Datuk Mencang (menurut *SSKBMM* halaman 23, juga disebut Datu Lancang). Waktu itu, Datuk Mencang sedang berlabuh di muara Sungai Kayan karena kehabisan air minum. Dengan menggunakan sampan kecil, Datuk Mencang beserta Datuk Tantalani turun menyusuri Sungai Kayan demi mendapatkan air tawar, tetapi warga suku Dayak yang berada di sana telah siap menghadang mereka. Berkat kemampuan keduanya dalam berdiplomasi, tidak ada insiden yang terjadi. Bahkan Datuk Mencang berhasil menikahi Asung Luwan. Konon, Asung Luwan bersedia menerima pinangan Datuk Mencang asalkan ia dapat mengalahkan Sumbang Lawing dalam pertandingan ketangkasan membelah jeruk yang sedang bergerak. Ternyata Datuk Mencang dapat memenangkan pertandingan tersebut. Versi lain dari *SSKBMM* halaman 23 menyebutkan bahwa Sadang dibunuh oleh gerombolan pengacau suku Kenyah yang datang dari Serawak di bawah pimpinan Sumbang Lawing. Dalam serangan tersebut Asung Luwan berhasil menyelamatkan dirinya beserta pengikutnya ke pesisir pantai di daerah Baratan. Di sanalah ia bertemu dengan Datuk Mencang yang ingin melamarnya. Asung Luwan hanya bersedia dinikahi oleh Datuk Mencang asalkan ia dapat mempersembahkan mas kawin berupa kepala Sumbang Lawing yang telah membunuh kakaknya. Ketika terjadi perang tanding antara Datuk Mencang dan Sumbang Lawing, kedua-duanya sama-sama unggul. Akhirnya, diadakan uji ketangkasan membelah jeruk sebagaimana yang telah diungkapkan di atas. Karena kalah, Sumbang Lawing harus meninggalkan daerah Baratan.

Setelah pernikahan itu, berakhirlah kepemimpinan para kepala suku dan berganti dengan sistem kerajaan, raja-rajanya bergelar *kesatria* atau *wira*. Semenjak saat itu, Bulungan diperintah oleh Datuk Mencang (1555–1594) beserta segenap keturunan dan penggantinya. Datuk Mencang digantikan oleh menantunya yang bernama Singa

---

yang telah digores dengan dayungnya itu putus dan hanyut hingga ke hulu desa Long Pleban sekarang. Daratan yang hanyut ini disebut penduduk sebagai Busang Mayun (Pulau Hanyut dalam bahasa Kayan).

227. Lihat *website http://sugeng-arianto.blogspot.com/2007/10/sejarah-kerajaan-bulungan.html* (diakses pada 21 September 2009).

228. Buku *SSKBMM*, halaman 22, menyebutkan bahwa Sadang adalah anak laki-laki Simun Luwan. Dengan demikian, Simun Luwan dikatakan mempunyai dua orang anak; yang putra adalah Sadang itu sendiri, sedangkan yang putri bernama Asung Luwan. Dengan demikian, terdapat perbedaan dengan *http://sugeng-arianto.blogspot.com/2007/10/sejarah-kerajaan-bulungan.html.*

Laut (1594–1618).[229] Seiring dengan itu, Islam mulai tersebar ke kawasan Bulungan. Singa Laut digantikan oleh putranya bernama Wira Kelana (1618–1640). Takhta Bulungan kemudian diwariskan secara berturut-turut kepada Wira Keranda (1640–1695) dan Wira Digendung (1695–1731). Semasa pemerintahan Wira Digendung, pusat pemerintahan dipindahkan dari Busang Arau ke Limbu Long Baju, desa Baratan, kecamatan Tanjung Palas.

b. Perkembangan Kesultanan Bulungan

Keturunan Datuk Mencang dan Raja Bulungan berikutnya, Wira Amir (bergelar Sultan Amiril Mukminin, memerintah pada 1731–1777), tampaknya merupakan raja pertama yang menganut agama Islam karena semenjak pemerintahannya, para penguasa Bulungan berikutnya mulai menyandang gelar sultan. Pusat pemerintahan dipindahkannya dari Baratan ke Salimbatu–kecamatan Tanjung Palas Tengah sekarang. Dalam hal keagamaan, Wira Amir berguru kepada seorang perantauan Arab bernama Tuan Kali Abdurrahman. Ia digantikan oleh putranya, Aji Ali, yang bergelar Sultan Alimuddin (1777–1817). Sultan ini memindahkan kembali ibu kotanya dari Salimbatu ke Tanjung Palas. Alasannya, ia ingin agar Salimbatu dipertahankan sebagai areal persawahan demi menunjang kebutuhan pangan kerajaan. Sultan Muhammad Kaharuddin (Kaharuddin I) menggantikan ayahnya, Sultan Alimuddin, dan memerintah hingga 1861. Semasa pemerintahannya, mulai berdatanganlah orang-orang Banjar, Bugis, Arab, dan Cina untuk berniaga. Sementara itu, Belanda yang telah membangun perkubuan di Tanjung Selor mulai memaksakan kehendaknya dalam perdagangan karena mereka memiliki pasukan yang kuat. Sultan Muhammad Kaharuddin lalu menyerahkan singgasana Bulungan kepada putranya yang bergelar Sultan Jalaluddin I (1861–1866, dalam *SSKBMM* halaman 29 disebut Sultan Muhammad Djalaluddin atau Si Kidding), tetapi karena putranya itu sakit-sakitan, ia memangku kembali jabatannya sebagai sultan pada 1866 hingga 1873. Alasan lain sultan menduduki singgasananya kembali karena ia keberatan ahli waris Kesultanan Bulungan jatuh ke tangan Datu Alam, putra Pangeran Maulana, saudara tiri Sultan Muhammad Kaharuddin dari perkawinan ayahnya dengan putri Singa Laut dari Tanah Tidung.

229. Singa Laut menikah dengan Kenawai Lumu, putri Datuk Mancang. Ia adalah bangsawan Kesultanan Sulu di Filipina Selatan.

Meskipun demikian, Datu Alam berhasil menaiki singgasana Bulungan dan menjadi sultan dengan gelar Kalifatul Alam Muhammad Adil (1873–1875). Ia sekaligus merupakan seorang ulama yang disegani. Disamping itu, dia merupakan penentang yang gigih terhadap kerjasama dengan Belanda. Sultan wafat saat mengikuti jamuan makan yang diselenggarakan Belanda. Konon, ia diracun oleh Belanda dalam perjamuan tersebut. Di tengah-tengah suasana berkabung akibat kematian Sultan Kalifatul Alam Muhammad Adil, para pemuka Kesultanan Bulungan mengangkat cucu almarhum sultan bernama Ali Kahar sebagai penguasa berikutnya. Pada masa sultan baru yang bergelar Kaharuddin II (1875–1889) ini, terjalin kerja sama dengan Belanda yang mengharuskan sultan menandatangani suatu kontrak politik. Isinya menyatakan bahwa Belanda berhak menentukan kebijaksanaan yang diambil sultan termasuk dalam hal perpajakan, namun sultan tetap dijamin kedudukannya oleh Belanda. Pada masa-masa selanjutnya, Belanda kerap ikut campur dalam suksesi Kesultanan Bulungan. Sebagai contoh, penguasa Bulungan berikutnya, Sultan Azimuddin (1889–1899), bukan merupakan putra kandung Kaharuddin, ia dapat menjadi sultan berkat dukungan Belanda. Bahkan pengangkatannya itu mendapatkan surat pengesahan dari Gubernur Jenderal Belanda tertanggal 4 Desember 1889. Sultan Azimuddin sendiri adalah menantu Sultan Kaharuddin II, yang menikahi putri keempatnya, Putri Sibut. Sultan Bulungan ini merupakan seorang politikus yang piawai dan berkat misi sosial kemasyarakatannya, berbagai pergolakan dapat diredam.

Sultan Azimuddin mempunyai tiga orang putra, yakni Datu Belembung, Datu Tiras, dan Datu Muhammad. Saat ayahnya meninggal pada 1899, Datu Belembung belum dewasa sehingga pemerintahan sementara waktu dijalankan oleh ibunya, Pengiran Kesuma (Putri Sibut) dengan didampingi oleh Datu Mansur selama kurang lebih dua tahun (1899–1901). Baru pada 1901 ia dilantik sebagai Sultan Bulungan dengan gelar Kasimanuddin (1901–1925). Sultan banyak memusatkan perhatiannya demi memperkaya negerinya dengan memanfaatkan hasil hutan dan perikanan yang melimpah ruah. Pada 1902, NV. BPM menemukan sumber minyak bumi di Tarakan. Berkat pertambangan minyak bumi tersebut, kekayaan kesultanan bertambah secara luar biasa sehingga Bulungan dapat dikatakan mencapai puncak keemasannya. Sultan juga merupakan pribadi yang tidak mau didikte oleh Belanda sehingga sikapnya ini menimbulkan kebanggaan dalam hati rakyat. Sultan Kasimanuddin meninggal karena tertembak. Menurut *SSKBMM* halaman 35, dia wafat saat berburu. Saat itu, putranya

masih menuntut ilmu di H.I.S Samarinda dan Medan. Oleh karenanya, sebagai wali diangkat Datu Mansur (1925–1930). Setelah selesai menempuh pendidikannya, putra Sultan Kasimanddin kembali ke Bulungan dan memangku jabatan sebagai sultan dengan gelar Ahmad Sulaiman. Namun, ia hanya sempat berkuasa selama 9 bulan saja dan digantikan oleh Datu Tiras (adik Sultan Kasimanuddin) dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin II (1931–1958) yang merupakan Sultan Bulungan terakhir hingga ia mangkat pada 21 Desember 1958. Bersamaan dengan pemerintahan Sultan Bulungan terakhir ini, dibangunlah istana kesultanan yang disebut istana III.

c. Kesultanan Bulungan Pada Masa Pendudukan Jepang dan Era Kemerdekaan

Ketika Jepang masuk ke Bulungan, mereka membumihanguskan Tarakan. Setelah Jepang menyerah kalah, pasukan Belanda membonceng Sekutu demi mengambil alih kembali kekuasaan atas Bulungan. Belanda berniat menarik simpati Sultan Muhammad Jalaluddin II. Oleh karena itu, Ratu Wilhemina dari Belanda menganugerahkan gelar kehormatan Letnan Kolonel Tituler serta menyelenggarakan pesta birau (pesta besar) pertama selama 40 hari 40 malam. Kendati demikian, niat Belanda ini tidak terlaksana karena sultan tak menghendaki bercokolnya lagi penjajah di negerinya. Saat diundang menghadiri pertemuan oleh Belanda, sultan selalu menolak hadir dan hanya mengutus menteri pertama Datu Bendahara Paduka Raja sebagai wakilnya guna membela kepentingan Republik Indonesia.

Berdasarkan sikap yang diperlihatkannya itu, tampak nyata bahwa sultan merupakan pendukung republik. Pada 17 Agustus 1949 pukul 07.00, untuk pertama kalinya bendera merah putih berkibar di depan Istana Bulungan. Upacara penaikan bendera tersebut dipimpin langsung oleh Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin II dengan P.J. Pelupessi, asisten wedana Tanjung Palas, sebagai pengerek benderanya. Atas dukungan sultan terhadap NKRI ini, Wakil Presiden RI Muhammad Hatta, berkunjung ke Tarakan guna menyampaikan penghargaannya. Berdasarkan UU no.22 tahun 1948 mengenai pemerintahan daerah, Kesultanan Bulungan ditetapkan sebagai daerah istimewa yang setingkat dengan DATI II atau Kabupaten dan kotamadya. Status Bulungan lalu menjadi daerah swapraja yang diteguhkan dengan SK Gubernur Kalimantan no. 186/ORB/92/14 pada 14 Agutus 1950. Dengan demikian, sultan menjadi Kepala Daerah Istimewa Bulungan yang pertama. Setelah sultan mangkat pada 1958, Daerah Istimewa Bulungan dihapuskan dan statusnya menjadi kabupaten

biasa. Sebagai bupati Bulungan pertama, diangkatlah Andi Tjatjo gelar Datu Wihardja, adik ipar Sultan Muhammad Jalaluddin II.

d. Peristiwa Bultiken

Pada era 1960-an dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia, RI menempatkan pasukannya di kawasan Bulungan. Sebagian pimpinan tentara yang ditempatkan di sana tergiur oleh harta kekayaan Kesultanan Bulungan. Tentara-tentara yang tidak bertanggung jawab ini merupakan antek-antek PKI yang menyusup dalam Kodam IX Mulawarman di bawah pimpinan Brigjen Soehario Padmodiwirio.[230] Oleh karena itu, mereka menghembuskan isu mengenai adanya rencana memisahkan diri dari NKRI dan bergabung dengan Malaysia yang dimotori oleh Kesultanan Bulungan. Gerakan ini mereka sebut Bultiken (Bulungan Tidung Kenya). Sebagai langkah awal menjalankan aksi fitnahan ini, pasukan yang berada dibawah pimpinan Letnan B. Simatupang menyelundupkan beberapa senjata organik ABRI di kolong istana Kesultanan Bulungan, tempat kediaman Raja Muda beserta keluarganya.[231] Kemudian, mereka menuduh keluarga kesultanan telah merencanakan kegiatan subversif guna memisahkan diri dari NKRI. Akibatnya, dilakukan pembakaran, penangkapan, penyiksaan, pembunuhan, dan perampasan harta benda bangsawan maupun rakyat Bulungan. Bahkan tiga bangunan Istana Bulungan turut menjadi dihancurkan.

Peristiwa ini diawali pada 2 Juli 1964. Saat itu, Letnan B. Simatupang beserta Kapten Buntaran (Kasdim 0903 Bulungan) bertandang ke tempat kediaman Raja Muda Datu Azimuddin di istana. Mereka bercakap-cakap dengan penuh keakraban, walaupun sebenarnya petinggi-petinggi militer tersebut menyimpan niat tersembunyi. Waktu itu, dua orang anak Raja Muda, yakni Masnun dan Khaharudin, tidak berhenti menangis. Tampaknya tangisan kedua anak itu merupakan firasat buruk. Kedua orang tamu baru berpamitan meninggalkan istana setelah tengah malam. Meskipun demikian, Letnan B. Simatupang beserta satuan tempur Brawijaya 517 datang mengepung istana pada dini hari. Rakyat yang saat itu hendak pergi mengambil air wudu di sungai dikejutkan oleh kedatangan begitu banyak tentara di sekitar istana.

Kurang lebih pukul 06.00 WITA, seluruh masyarakat Tanjung Palas dikumpulkan di depan istana. Mayor Sumina Husain (Komandan Kodim 0903 Bulungan) berpidato di hadapan orang banyak tersebut, yang pada intinya menuduh para bangsawan

---

230. Lihat *http://www.gatra.com/artikel.php?id=23352* (diunduh pada 20 September 2009). Ia juga terkenal sebagai Hario Kecik.
231. Lihat *Sekilas Sejarah Kesultanan Bulungan dari Masa ke Masa*, halaman 48.

Bultiken hendak melakukan makar terhadap NKRI dengan nama gerakan subversif Bultiken. Sebagai buktinya, dinyatakan pula bahwa Raja Muda telah melarikan diri. Mereka lantas menahan beberapa bangsawan Bulungan. Tuduhan ini dulangi lagi di ruang tahanan KODIM 0903. Kendati demikian, Datu Taruna yang ikut ditahan menyanggahnya dengan menyatakan bahwa tadi malam ia menyaksikan sendiri Raja Muda berbincang-bincang dengan Kapten Buntaran. Letnan B. Simatupang menjadi marah dan memerintahkan M. Ramli, seorang anggota polisi, menembak mati Datu Taruna. Jenazahnya lantas dikembalikan kepada keluarganya guna dikebumikan di Tanjung Palas.

Mayor Suminta Husain bergerak untuk menyegel istana pada pukul 08.00. Harta kekayaan Kesultanan Bulungan dijarah oleh sepasukan tentara yang melakukan penyegelan. Selanjutnya, ditangkap pula sejumlah bangsawan lainnya, seperti Datu Laksamana Setia Diraja, Datu Renik, Datu Mansyur, dan lain sebaganya. Beberapa di antara mereka hilang tak tentu rimbanya, termasuk Raja Muda. Letnan B. Simatupang memerintahkan rakyat turut serta membakar Istana Bulungan. Bagi yang tidak mau ikut akan dianggap pengikut Raja Muda dan ditangkap. Selama beberapa waktu kondisi Tanjung Palas menjadi sangat mencekam. Belakangan, penangkapan juga terjadi di kalangan rakyat sehingga menebarkan nuansa kengerian di Tanjung Palas dan sekitarnya. Banyak korban jiwa yang jatuh dibunuh oleh oknum-oknum militer selama insiden ini. Akhirnya, terbukti bahwa tuduhan makar itu tidak benar dan pasukan Brigjend Soehario meminta maaf atas hal tersebut. Harta istana yang dijarah dikembalikan, walau sebagian di antaranya hilang. Brigjen Soehario sendiri belakangan dipenjarakan karena kedekatannya dengan PKI.

e. Kesultanan Bulungan Dewasa Ini

Kesultanan Bulungan kini ikut berpartisipasi dalam melestarikan warisan sejarah dan budaya bangsanya. Hal ini dibuktikan dari turut sertanya kerabat kesultanan tersebut dalam berbagai festival budaya, seperti Peringatan Seabad Puputan Badung di Bali pada 2006. Saat berlangsungnya peringatan tersebut diperagakan busana prajurit Bulungan. Selain itu, Bulungan aktif pula dalam berbagai kegiatan FKN (Festival Keraton Nusantara). Salah seorang ahli waris kesultanan adalah Datu Dissan Maulana, yang merupakan putra Sultan Muhammad Jalaluddin II. Sementara itu, keturunan Datu Mansur, yang pernah menjadi wali kerajaan antara 1899–1901 mendampingi

Pengiran Kesuma (Putri Sibut) adalah Datu Abdul Aziz.[232] Mereka pernah menyesalkan lepasnya Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia.

III. GUNUNG TABUR

a. Berdirinya Kerajaan Gunung Tabur

Kerajaan Gunung Tabur sekarang terletak di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pendiriannya sekitar 1830 melalui pemecahan Kerajaan Berau menjadi dua, yakni Gunung Tabur dan Sambaliung. Sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian khusus mengenai Berau, terjadi persaingan antara keturunan dua putra Aji Dilayas, yakni Pangeran Tua dan Pangeran Dipati. Meskipun telah diambil kesepakatan bahwa keturunan keduanya akan memerintah secara bergantian, perselisihan tak terhindarkan yang berujung pada pecahnya Berau menjadi dua kerajaan. Raja Gunung Tabur pertama adalah Sultan Aji Kuning II (1833–1850). Belanda makin mengipasi bara api perselisihan yang sudah ada. Demi menyingkirkan Raja Alam dari Sambaliung, Sultan Aji Kuning II pernah mengadukan saingannya dari Kerajaan Sambaliung tersebut kepada Belanda. Ia melaporkan bahwa para pengikut Raja Alam terlibat dalam perompakan kapal-kapal Belanda.

Akibatnya, Belanda mengerahkan pasukannya untuk mengalahkan Raja Alam. Setelah Raja Alam berhasil dikalahkan dan diasingkan ke Makassar, tampuk pemerintahan Sambaliung diserahkan kepada Gunung Tabur. Namun, tentu saja hal itu tidaklah gratis karena sebagai imbalannya Belanda mengharuskan Gunung Tabur menandatangani perjanjian pada 27 September 1834 yang berbunyi sebagai berikut.

- Sambaliung, selaku negeri yang dikalahkan masuk dalam payung kekuasaan Hindia Belanda.
- Sultan Gunung Tabur, Aji Kuning II, berjanji akan melindungi keamanan dari ancaman kaum perompak.
- Kerajaan Sambaliung untuk sementara pengelolaannya diserahkan kepada Gunung Tabur sebagai tanah pinjaman. Gunung Tabur menjadi vasal Negeri Belanda.
- Sultan Gunung Tabur harus menghadap wakil pemerintah Belanda di Makassar.

Karena kondisi Sambaliung yang terus menerus kacau akibat perlawanan pengikut-pengikut Raja Alam, Sultan Aji Kuning II meminta agar Raja Alam

232. lihat *http://www.gatra.com/artikel.php?id=23352,* diakses pada 20 September 2009.

dikembalikan dari pembuangannya di Makassar. Permohonan ini dipenuhi oleh Belanda pada 24 Juni 1837.

b. Perkembangan Kerajaan Gunung Tabur

Setelah Sultan Aji Kuning II meninggal pada 1850, ia digantikan oleh kemenakannya, Amirilmukminin (1850–1876), putra Raja Muda Si Bandang. Ia mempunyai dua orang saudara bernama Raja Alam (berbeda dengan Raja Alam dari Sambaliung yang melawan Belanda) dan Raja Muda Si Kinarang. Salah satu informasi mengenai sultan ini beserta saudara-saudaranya dan kondisi pemerintahan masa itu diperoleh dari tulisan Z. Swager dalam *Tijschrift voor Nederlandsch-Indie*, Serie 4 (1866) II halaman 231-266, artikel tersebut dimuat dalam buku *Sejarah Lokal di Indonesia*. Menurut artikel tersebut, sultan beserta keluarganya banyak terlibat dalam berbagai aktivitas kejahatan, umpamanya perompakan dan perampokan. Aktivitas perbudakan juga merajalela dan kaum budak mengalami kehidupan yang sangat buruk.

Karya itu antara lain mengutip laporan perjalanan nakhoda kapal bernama P. van Harstrop yang banyak mengadakan hubungan dagang dengan para raja di Kalimantan. Laporan itu itu antara lain berbunyi sebagai berikut.

> Dalam pelarian itulah mereka ditangkap oleh Sultan Gunung Tabur dan sekali lagi mereka dijadikan budak belian. Mereka dijual karena menolak ikut serta dalam perjalanan perompakan yang diperintahkan Sultan, mereka dirantai dan akan dijual kepada saudagar Bugis yang pertama dijumpai. Biasanya cara yang serupa dipakai pula oleh Sultan terhadap perahu-perahu Solok, yang tiap tahunnya datang membeli teripang.[233]
>
> Dewasa ini Gunung Tabur terdiri dari 6 atau 7 buah rumah, setiap orang berusaha meloloskan diri dari pemerasan-pemerasan Sultan, yang selain dari itu pula, merampok dan merampas perahu-perahu sepanjang sungai dan di pulau-pulau.[234]

Laporan itu mengungkapkan pula bahwa sultan beserta saudaranya, Raja Muda Si Kinarang dan Raja Alam, juga dengan licik menunda-nunda pembayaran utang-utang mereka dengan alasan tidak mempunyai uang, padahal menurut Harstrop mereka sanggup melakukannya. Para bangsawan juga mempunyai kebiasaan yang tidak baik, yakni madat dan berjudi, termasuk kedua orang saudara raja itu. Berikut ini adalah kutipan laporan lainnya.

---

233. *Sejarah Lokal di Indonesia*, halaman 115.
234. *Ibid,* halaman 116.

Raja Alam terus terang mengatakan tidak dapat membayar karena ketiadaan persediaan. Hal ini, saya nyatakan, tidak akan terjadi seandainya Tuan, sesuai dengan perjanjian yang dibuat sewaktu memberikan piutang itu, ada berusaha untuk memungutnya kembali dalam tempo empat bulan dari pendapatan-pendapatan daerah itu. Tetapi dengan maksud-maksud yang tidak baik, ia sendiri yang memungut hasil-hasil itu atas nama Tuan dan dengan segala akal menyembunyikannya terhadap kuasa Tuan, G. Margan, ketika ia ini pada saat yang tepat datang menagih. Raja Alam sendiri baru kembali ke rumahnya sesudah semua hasil itu habis dihamburkannya untuk madat dan judi. Sekarang pun ia masih menyalahgunakan madat secara yang menakjubkan sehingga berkali-kali rakyat menyatakan keheranannya mengenai hal ini.[235]

Keterangan bekas budak berikut ini juga perlu kita cermati guna mengetahui betapa buruknya kondisi para budak pada masa itu.

Di Pulau Sapinang, seorang yang bernama Sarta asal Gunung Tabur mengambil saya sebagai budak dan menyerahkan kawan-kawan senasib yang lain kepada Sultan. Tiga tahun lamanya saya mengerjakan ladangnya, yang terletak jauh dari kampung orang itu. Berbagai-bagai kerja berat harus saya lakukan seperti memotong dan meraut kayu, mengerjakan ladang, memetik sarang burung, dan lain sebagainya. Saya hanya diberi sepotong kain untuk dipakai, sedikit beras untuk makan, lain tidak......

Sesudah itu saya pindah tuan pada Raja Muda Kenarang, kakak dari Sultan karena direbutnya dengan semena-mena dari tangan Sarta. Dengan Pangeran ini saya tidak perlu melakukan sesuatu pekerjaan, akan tetapi sebaliknya saya diharuskan mengusahakan pakaian sendiri dan selalu bersiap untuk pergi merampok. Sepanjang ingatan saya empat kali saya diperintahkan melakukan perampokan, yaitu:....[236]

Berdasarkan laporan di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di Gunung Tabur sangat kacau. Masing-masing bangsawan beserta saudara sultan bertindak semena-mena, tetapi sultan sendiri tidak mau peduli dengan tingkah laku para kerabatnya itu karena ia sendiri juga melakukan keburukan yang sama, bahkan sultan beserta kerabatnya merampas baranga apa saja yang disenanginya. Tidak jarang pula para penguasa itu menggunakan kekerasan dan membunuh para pedagang yang menolak menyerahkan barang-barang dagangannya.

Demikianlah laporan negatif mengenai sultan Gunung Tabur beserta dua orang saudaranya. Meskipun demikian, penolakan membayar utang tersebut

235. *Ibid*, halaman 114.
236. *Ibid*, halaman 117.

kemungkinan berkaitan dengan penentangan mereka terhadap Belanda. Perjanjian yang dilangsungkan pada 27 September 1834 ternyata tidak berdampak besar terhadap Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung oleh karena kedua kerajaan tersebut masih berkesempatan menegakkan kedaulatannya masing-masing. Pada 1876, Sultan Amiril meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang bergelar Hasanuddin (1876–1882). Semasa pemerintahannya, kerap terjadi pertempuran kecil antara Gunung Tabur dan Sambaliung, tetapi dapat diselesaikan dengan bantuan Asisten Residen Belanda di Samarinda.

Sultan Hasanuddin mangkat pada 1882 dan digantikan oleh sepupunya selaku wali sultan bernama Aji Kuning, putra Raja Alam dari Gunung Tabur. Hubungan antara pemerintah kolonial Belanda dengan Gunung Tabur tidak lagi mesra. Ia merupakan penguasa yang tidak mau diatur dan tunduk pada kemauan Belanda. Bagi Aji Kuning, hubungan antara kerajaan dengan pemerintah Belanda adalah dua mitra yang setara sehingga Belanda tidak berhak mencampuri urusan pemerintahan Gunung Tabur. Oleh karena itu, ia kurang disenangi oleh pemerintah kolonial. Apalagi dukungan rakyat terhadapnya boleh dikatakan cukup besar. Kecurigaan Belanda makin bertambah besar sepulangnya Aji Kuning dari menunaikan ibadah haji. Itulah sebabnya, Aji Kuning lalu pindah ke Sambaliung dan mendirikan perkampungan baru di sana.

Selanjutnya, tersiar kabar bahwa Aji Kuning hendak merencanakan pemberontakan dan sedang menyusun kekuatan di perkampungannya di Sambaliung. Menanggapi laporan ini, Belanda memperkuat penjagaannya dan menempatkan seorang kontrolir berkebangsaan Belanda terhitung 1 Mei 1897 dengan tujuan mengawasi tindak tanduk Aji Kuning. Pada saat yang bersamaan, diangkatlah seorang sultan baru bergelar Siranuddin (1897–1921). Demi mencegah terjadinya pemberontakan, Belanda memerintahkan penguasa Sambaliung agar mengusir Aji Kuning beserta pengikutnya dari wilayah mereka. Bila tidak, Belanda akan mengerahkan pasukannya. Oleh karena itu, penguasa Sambaliung memerintahkan Aji Kuning agar meninggalkan negeri mereka. Dengan diiringi oleh anggota keluarga dan kerabatnya yang setia, Aji Kuning pindah ke Tanah Kuning di perbatasan antara Kerajaan Bulungan dan Sambaliung.

Kerajaan Gunung Tabur selanjutnya diperintah oleh Sultan Muhammad Khalifatullah Jalaluddin (1921–1951) dan Aji Raden Muhammad Ayub (1951–

1960). Pada zaman Jepang, ditetapkan bahwa sultan Gunung Tabur dibantu oleh dua orang asisten wedana, yaitu asisten wedana Gunung Tabut dan asisten wedana Pulau Derawan. Penindasan yang terjadi semasa penjajahan Jepang mengakibatkan penderitaan di kalangan rakyat sehingga membangkitkan berbagai perlawanan di kalangan rakyat. Oleh karena itu, Jepang menangkapi tokoh-tokoh nasionalis dan pemuka masyarakat yang anti-Jepang. Sekitar 500–600 orang menjadi korban, baik di daerah Gunung Tabur maupun Sambaliung. Daftar beberapa tokoh masyarakat yang turut kehilangan nyawanya akibat kebengisan Jepang dapat dilihat di bagian mengenai Kerajaan Sambaliung.

Setelah Jepang menyerah, Gunung Tabur menjadi daerah swapraja. Ini berlangsung hingga 1960 saat diberlakukannya penghapusan daerah-daerah swapraja sehingga berakhirlah kekuasaan Kerajaan Gunung Tabur. Kedua wilayah bekas kesultanan pecahan Berau itu digabungkan menjadi Kabupaten Berau dengan sultan Sambaliung terakhir, Muhammad Aminuddin, sebagai bupati pertamanya.

IV. KUTAI KARTANEGARA

a. Legenda Cikal Bakal Kesultanan Kutai Kartanegara

Kesultanan ini kini terletak di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Jauh sebelum berdirinya Kesultanan Kutai Kartanegara, sejarah mencatat telah ada suatu kerajaan bercorak Hindu pada abad 5 yang berpusat di Muarakaman, Kalimantan Timur. Bukti keberadaan kerajaan kuno ini adalah tujuh buah batu bertulis yang disebut *yupa*. Batu bertulis itu memuat silsilah kerajaan Kutai kuno yang diawali oleh Kudungga, diteruskan oleh putranya yang bernama Aswawarman, dan digantikan oleh Mulawarman. Raja Mulawarman disebutkan pernah mengadakan upacara persembahan bagi para brahmana. Setelah masa pemerintahan Mulawarman, tidak jelas apa yang terjadi dengan kerajaan yang belakangan dalam penuturan rakyat kerap disebut Kutai Martapura ini. Kendati demikian, terdapat legenda yang menyebutkan urut-urutan raja setelah Mulawarman sebagai berikut.[237]

- Mulawarman Nala Dewa
- Seri Warman
- Nara Wijaya Warman
- Gajayana Warman

237. Lihat *Sejarah Kebudayaan Kalimantan*, halaman 9.

- Wijaya Tungga Warman
- Jaya Noga Warman
- Nala Singa Warman
- Nala Perana Tunggu Dewa
- Gadongga Warman Dewa
- Indera Warman Dewa
- Sangga Wirama Dewa
- Singa Wargala Warman Dewa
- Gendera Warman
- Perabu Mula Tungga Dewa
- Nalu Indera Dewa
- Indera Mulawarman Tungga
- Seri Langka dewa
- Guna Perana Tungga
- Wijaya Warman
- Indera Mulia
- Maharaja Seri Aji Dewa
- Mulia Putera
- Mala Dandeta
- Indera Paruta
- Darma Setia

Belakangan, terjadi peperangan antara Kerajaan Kutai Martapura dengan Kutai Kartanegara.

Kini pembahasan beralih terlebih dahulu pada riwayat cikal bakal Kerajaan Kutai Kartanegara yang didapat dari legenda dan cerita rakyat. Tersebutlah seorang pemuka masyarakat bernama Petinggi Jaitan Layar. Ia bersama istrinya tinggal di sebuah gunung dan hidup dari bercocok tanam. Meski telah lama membina kehidupan rumah tangga, belum juga mereka mempunyai anak. Bertahun-tahun ia memohon kepada dewata agar dikaruniai keturunan, namun doanya itu tak kunjung terjawab. Suatu malam, mereka terbangun dari tidurnya karena mendengar suara ingar-bangar. Merasa ingin tahu apa gerangan yang terjadi, mereka membuka pintu rumahnya dan menyaksikan sebuah batu besar melayang turun dari langit dan menghempas tanah dengan dahsyatnya. Malam yang semula gelap pekat berubah menjadi terang benderang. Dengan penuh

ketakutan, Petinggi Jaitan Layar menutup dan mengunci kembali pintu rumahnya. Dari luar terdengarlah suara yang seperti pantun hingga beberapa kali. Petinggi Jaitan Layar dengan cemas membalas pantun tersebut. Ternyata kemudian terdengar suara gelak tawa penuh kegembiraan dari luar rumahnya sehingga Petinggi Jaitan Layar dan istrinya tidak takut lagi. Mereka keluar dan mendapati adanya sebuah benda dari emas yang di dalamnya terdapat seorang bayi berselimutkan kain kuning. Kedua belah tangannya masing-masing memegang telur dan keris emas. Tujuh orang dewa yang menghantarkan benda itu menampakkan dirinya dan mengatakan bahwa anak itu merupakan jawaban atas doa Petinggi Jaitan Layar selama ini. Mereka berpesan agar anak itu dirawat sebaik-baiknya dan jangan dianggap manusia biasa. Perlu diadakan upacara-upacara ritual tertentu bagi bayi ini, misalnya upacara "menginjak tanah", dan lain sebagainya. Sesuai dengan pesan para dewa, anak ini diberi nama Aji Agung Batara Sakti. Ia adalah Raja Kutai Kartanegara yang pertama.

Masih terdapat legenda lainnya mengenai Puteri Junjung Buih yang menjadi permaisuri Raja Kutai Kartanegara pertama. Kisahnya terjadi di sebuah desa bernama Hulu Dusun. Pemuka desa itu dan istrinya juga telah lanjut usia dan belum dikaruniai anak. Suatu ketika terjadilah hujan dan badai yang mengamuk dengan dahsyatnya selama berhari-hari sehingga tak seorang warga desa itu berani ke luar rumah. Akhirnya, persediaan kayu bakar untuk memasak di rumah pemuka desa beserta istrinya habis. Mereka lalu berniat mengambil salah satu kayu rumah mereka sebagai kayu bakar. Ajaibnya, setelah kayu itu dibelah ternyata di dalamnya terdapat seekor ulat kecil dengan tatapan memelas dan seolah-olah ingin dipelihara oleh mereka. Begitu pemuka desa Hulu Dusun mengambil ulat tersebut, keajaiban berikutnya terjadi. Badai yang semula mengamuk tiba-tiba saja berhenti dan sang surya kembali bersinar dengan cerahnya. Ulat itu mereka pelihara dan diberi makan dedaunan. Ternyata, ulat itu kemudian bertumbuh menjadi seekor naga. Suatu ketika, sang naga mengajak pasangan suami istri pemuka Desa Hulu Dusun tersebut ke Sungai Mahakam. Sang naga masuk ke sungai, berenang dari hulu ke hilir masing-masing sebanyak tujuh kali, dan timbul serta menyelam sebanyak tiga kali. Terjadilah angin topan yang dashyat, petir bergemuruh di angkasa, dan air sungai bergolak dengan hebatnya. Sekonyong-konyong keadaan menjadi tenang kembali setelah pemuka desa beserta istrinya mendayung perahu mereka ke tepian. Sang naga juga menghilang. Tiba-tiba buih memenuhi permukaan sungai dan di antaranya ada buih yang makin

meninggi. Tampak cahaya pelangi aneka warna yang menyoroti buih tersebut. Mereka mendekati gelembung buih yang bertambah tinggi dan terkejut saat menyaksikan adanya benda bercahaya di tengah-tengahnya. Ternyata itu adalah sebuah gong dengan bayi perempuan terbaring di atasnya. Mereka menyaksikan pula naga yang tadi menghilang sedang menjunjung gong tadi. Sementara itu, di bawahnya ada lagi hewan mirip lembu bernama Lembuswana yang mengangkat naga. Akhirnya, lembu beserta naga menghilang kembali ke dasar sungai dengan meninggalkan bayi perempuan dan gongnya itu. Bayi perempuan asal kayangan itu dibawa pulang oleh pasangan suami istri ke rumahnya dan diberi nama Puteri Junjung Buih, yang terkadang juga dikenal sebagai Puteri Karang Melenu. Ia kelak menikah dengan Aji Agung Batara Sakti, Raja Kutai pertama. Demikianlah legenda di atas tampaknya merupakan salah satu sumber legitimasi bagi para penguasa Kutai untuk menyatakan bahwa leluhur mereka berasal dari kayangan.

Pada masa Kerajaan Majapahit, Gajah Mada memimpin ekspedisi penaklukkan terhadap negeri-negeri di Kalimantan termasuk Kutai. Sewaktu menjalankan roda pemerintahan di sana, Majapahit melakukan pemungutan pajak dan memajukan perdagangan. Konon Raja Aji Agung Batara Sakti pernah diundang ke Majapahit dan datang dengan menunggang kendaraannya bernama Lembuswana guna meningkatkan hubungan antara dua kerajaan. Relasi antara kedua kerajaan ini masih berlangsung hingga Raja Kutai yang ke-3, Aji Maharaja Sultan. Konon, ia pernah mengunjungi Majapahit semasa pemerintahan Brawijaya pada 1468 dan 1478. Menurut hikayat, Raja Aji Agung Batara Sakti pernah terlibat peperangan dengan Kerajaan Kutai Martadipura. Peperangan ini dimenangkan oleh Kutai Kartanegara dan rajanya yang bernama Sri Langka Dewa gugur beserta putranya, Guna Perana Tungga. Meskipun demikian, Kutai Martadipura masih diizinkan berdiri dengan mengakui kekuasaan Kutai Kartanegara. Berikutnya, semasa pemerintahan Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa ing Martapura, Raja Kutai ke-8, terjadi lagi peperangan dengan Kutai Martadipura yang dipimpin oleh Raja Indera Mulia. Kembali Kutai Kartanegara keluar sebagai pemenangnya. Semenjak saat itu, Kutai Martadipura benar-benar takluk di bawah Kutai Kartanegara dan nama kerajaan diubah menjadi Kutai Kartanegara ing Martadipura.[238]

---

238. Lihat *Sejarah Kebudayaan Kalimantan*, halaman 12.

b. Perkembangan Kerajaan Kutai

Semasa kunjungan Aji Maharaja Sultan ke Majapahit, agama Islam telah banyak dianut di pesisir utara Pulau Jawa, seperti Demak, Tuban, Gresik, dan lain sebagainya. Pengaruh agama Islam masuk ke Kutai pada kurang lebih abad 16 semasa Raja Kutai ke-4, Aji Mandarsyah (1500–1530)[239]. Saat itu, agama Islam disebarkan oleh seorang tokoh asal Arab bernama Tuan Tunggang Parang. Agama Islam tersiar makin luas hingga ke Loa Bakung, Pulau Manubar, Sangkulirang, dan Balikpapan sewaktu berkuasanya Raja Kutai ke-6, Raja Makuta (1565–1605).[240] Kerajaan Kutai menjalin pula hubungan diplomatik dengan Gowa yang mengirimkan seorang ulama asal Minangkabau bernama Dato ri Bandang. Setelah beberapa waktu menyiarkan agama Islam di Kalimantan, Dato ri Bandang kembali ke Makassar. Kerajaan Kutai makin bersinar di bawah pemerintahan Raja Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa ing Martapura (1635–1650),[241] Raja Kutai ke-8. Ia berhasil menduduki Muara Kaman dan mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan kecil di hulu Sungai Mahakam.

Kerajaan Kutai sudah memiliki tatanan pemerintahan dan perundangan yang baik. Ini terbukti dengan adanya kitab undang-undang yang disebut *Panji Selaten* dan *Maharaja Nanti* atau *Beraja Niti*. Kitab ini dibuat setelah Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa ing Martapura guna mempersatukan negeri-negeri kecil di sekitarnya. *Panji Selaten* mengulas tata cara pemerintahan, misalnya yang berkaitan dengan para menteri, petinggi, penggawa, dan lain sebagainya. Sedangkan *Beraja Niti* membahas hubungan antar rakyat di kerajaan itu dan mengupas mengenai perkara perdata beserta pidana.

Dari segi hubungan internasional, Kerajaan Kutai menjalin relasi dengan negara-negara lain, seperti Gowa, India, Cina, dan lain sebagainya. Hubungan antar negara ini dilandasi oleh sikap saling menghormati kedaulatan masing-masing. Kendati demikian, pada saat yang bersamaan datanglah bangsa-bangsa Eropa, seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda yang ingin memaksakan monopoli perdagangannya. Pada 1634, Belanda mengirimkan tiga buah kapal perangnya dan mengharapkan bantuan dari penguasa Kutai untuk mengusir para pedagang Makassar dan Jawa karena menganggap mereka sebagai saingan-saingannya. Raja Kutai Kartanegara menentang

239. Tahun pemerintahan diambil dari buku *Sejarah Perlawanan Terhadan Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Timur*, halaman 42.
240. Tahun pemerintahan diambil dari *Ibid.*, halaman 42.
241. *http://www.kutaikartanegara.com/*

hal ini karena melanggar prinsip persahabatannya dengan Gowa maupun Jawa. Apa yang dilakukan Belanda ini jelas merupakan upaya adu domba antara Kutai dengan Kerajaan Gowa sehingga ditentang keras oleh penguasa Kutai dan menjadi awal mula perselisihan dengan Belanda.

Belanda datang lagi untuk mengadu domba antara Kutai dan Banjarmasin pada 1635. Kali ini, Belanda mengingatkan kewajiban Kutai untuk membayar upeti ke Banjar. Pesan yang disampaikan oleh wakil Belanda bernama Gerrit Thomassen Pool ini diabaikan oleh Kutai karena mengetahui bahwa niat sesungguhnya dibalik hal ini adalah mengadu domba antara Banjar dan Kutai. Tindakan Belanda ini mengesalkan Kutai karena sudah dua kali Belanda menerapkan politik adu dombanya, yang pertama dengan Gowa dan yang kedua dengan Banjar. Setelah itu, Belanda masih berupaya lagi mengadakan hubungan dagang dengan Kutai Kartanegara pada 1671. Utusan Belanda, Paulus de Beck, menemui Sultan Kutai, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan apapun dengan sultan. Kegagalan ini sedikit banyak disebabkan oleh kehendak Belanda yang senantiasa memaksakan monopoli perdagangan.

Penguasa Kutai pertama yang menggunakan gelar sultan adalah Aji Muhammad Idris (1735–1739). Ia menikah dengan putri Raja La Maddukelleng dari Wajo.[242] Pernikahan ini makin mempererat hubungan antara Kutai dengan Wajo. Raja La Maddukelleng sendiri merupakan tokoh yang anti terhadap Belanda. Semenjak berusia 14 tahun, La Maddukelleng telah menetap di Kerajaan Pasir, Kalimantan Timur. Selama 22 tahun, ia berkelana di Selat Makassar, Brunai, dan bahkan sampai ke Semenanjung Malaya. Ia dijuluki bajak laut oleh Belanda karena gemar mengganggu kapal-kapal VOC. Setelah tiba kembali di kampung halamannya, La Maddukelleng diangkat sebagai *Arung Matoa* (Raja) Wajo pada 1736. Kaum keturunan La Maddukelleng banyak menikah dengan raja-raja Kutai, Pasir, dan Berau. Ketika pecah perang antara VOC dengan Wajo, sultan ikut membantu mertuanya, La Maddukelleng, dan gugur di medan laga. Saat sultan sedang berperang itu, pemerintahan kerajaan dipegang oleh suatu dewan perwalian.

Kala itu, putra mahkota yang bernama Aji Imbut masih kecil. Kesempatan ini dipergunakan oleh salah seorang anggota keluarga kerajaan bernama Aji Kado untuk

---

242. Menurut buku *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Timur*, halaman 67–68, disebutkan bahwa Petta To Siberangeng, putra La Maddukelleng menikah dengan putri Raja Pasir bernama Anden Ajang. Perkawinan ini melahirkan seorang putri bernama I Sengong Daeng Sirompa atau Aji Doja. Ia kemudian bersuamikan Sultan Muhammad Idris.

merebut takhta. Ia menobatkan dirinya sebagai Sultan Aji Muhammad Aliyeddin (1739–1780). Aji Imbut dilarikan ke Wajo dan mendapat dukungan kerajaan tersebut beserta pengikut yang setia kepada mendiang ayahnya. Semenjak itu, berlangsunglah peperangan antara Aji Kado dengan Aji Imbut selaku putra mahkota yang sah dan didukung oleh Wajo beserta pengikut-pengikut setianya. Pasukan Bugis dari Wajo dengan dibantu bajak laut Sulu mengadakan pengepungan terhadap Pemarangan, ibu kota Kutai Kartanegara saat itu. Peperangan menjadi berlarut-larut sehingga pada 1778 Aji Kado meminta bantuan VOC yang tidak bersedia memenuhinya. Akhirnya, pada 1780, Aji Imbut berhasil mengalahkan Aji Kado dan menaklukkan Pemarangan. Aji Kado kemudian dihukum mati dan Aji Imbut dinobatkan sebagai Sultan Aji Muhammad Muslihuddin (1780–1838). Ibu kota Pemarangan dianggap telah tercemar sehingga sultan memindahkannya ke Tepian Pandan pada 28 September 1782. Nama Tepian Pandan diubah menjadi Tangga Arung yang artinya 'Rumah Raja.' Belakangan, nama ini disingkat menjadi Tenggarong hingga saat ini.

Pemerintah kolonial di Batavia ingin melakukan penyelidikan terhadap Kutai sebagai persiapan menaklukkan kerajaan tersebut. Oleh karenanya, Belanda mengirimkan ekspedisi di bawah pimpinan George Muller pada 1825. Ia menjelajahi Sungai Mahakam guna menyelidiki keadaan geografis Kutai dan bila mungkin meneruskan perjalanannya hingga ke Pontianak. Tindakan ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Kutai. Selain itu, penjelajahan Miller ini juga dianggap sebagai kegiatan spionase. Oleh karenanya, George Miller beserta sebagian besar anak buahnya dibunuh di Muara Kaman. Pemerintah kolonial Belanda sendiri tidak dapat berbuat apa-apa karena saat itu sedang disibukkan oleh Perang Diponegoro dan Perang Paderi.

Sultan Kutai berikutnya adalah Aji Muhammad Salehuddin (1838–1850).[243] Semasa pemerintahannya terjadi insiden dengan Inggris dan Belanda. Peristiwanya diawali pada 1844 dengan tibanya dua kapal dagang Inggris yang dikomandoi oleh Scot Erskine Murray. Sebenarnya Murray sendiri adalah seorang petualang dan dapat disepadankan dengan bajak laut, yang ingin menggapai kesuksesan seperti James Brooke. Murray menyampaikan niatnya untuk berdagang, membuka pos perdagangan di kawasan tersebut, dan memperoleh izin pengoperasian kapal uap di sepanjang Sungai

243. Tahun diambil dari *kutaikartanegara.com*, sedangkan menurut buku *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialiasme dan Kolonialisme di Kalimantan Timur* halaman 50, sultan ini memerintah dari 1816–1845.

Mahakam. Tetapi sultan hanya membuka daerah Samarinda saja bagi Inggris. Murray merasa kurang puas dengan kebijakan sultan ini dan menembakkan meriamnya ke arah Istana Kutai. Pasukan Kutai melawan sehingga pecahlah pertempuran dengan armada Murray. Ternyata Kutai berhasil memukul mundur dan menewaskan Murray dalam insiden tersebut. Peristiwa ini sampai ke telinga pemerintah Inggris dan mereka hendak melancarkan serangan balasan. Namun, Belanda mengatakan bahwa Kutai terletak dalam daerah pengaruhnya berdasarkan Traktat London dan sepakat menyelesaikan hal itu dengan cara mereka sendiri. Belanda mengirimkan armada lautnya di bawah pimpinan t'Hooft guna menyerang Tenggarong. Sebelumnya, Belanda menyampaikan ultimatum agar sultan menyerah dan mengakui kekuasaan Hindia Belanda. Namun, Raja Kutai yang masih keturunan La Maddukelleng itu menolak menyerah begitu saja tanpa bertempur. Pasukan pemerintah kolonial Belanda tanpa ampun membumihanguskan Tenggarong termasuk istana kerajaan. Karena itu, sultan terpaksa mengungsi ke Kota Bangun, sementara panglima perang kerajaan yang bernama Awang Long menghadapi serangan Belanda. Awang Long gugur dan Kutai berhasil ditaklukkan oleh Belanda. Saat itu, Belanda juga menyandera dua orang putra sultan, yakni Pangeran Surya Manggala dan Pangeran Dipati. Panglima perang Belanda mengancam bila sultan tidak bersedia menyerah, kedua orang anaknya itu akan diasingkan ke Batavia. Mendengar hal itu, Mangkubumi Kutai Kartanegara, Nyi Raden Bangsa, merasa khawatir kalau-kalau putra sultan itu akan dibunuh di Batavia. Karena itu, ia pergi ke Kota Bangun dan bermusyawarah dengan sultan mengenai kondisi mereka saat itu serta mengajukan berbagai pertimbangan. Pertama-tama, dinyatakannya bahwa ibu kota Kutai telah habis terbakar dan banyak korban berjatuhan di pihak mereka. Kedua, persediaan mesiu mereka habis sedangkan Lembay dan Daeng Pasereg yang ditugaskan membeli mesiu dari Singapura belum kembali. Ketiga, dikhawatirkan kedua orang putra sultan yang ditawan Belanda akan dibunuh di Batavia. Dengan mempertimbangkan ketiga hal di atas, Kesultanan Kutai Kartanegara terpaksa bertekuk lutut kepada Belanda. Sultan dipaksa menandatangani perjanjian atau kontrak politik pada 11 Oktober 1844 yang intinya adalah pengakuan terhadap kekuasaan Belanda. Kerajaan Kutai sepakat mengakui Residen Banjarmasin yang merupakan wakil pemerintah Belanda.

Setelah berlangsungnya perang itu, van de Wall menulis laporannya mengenai Tenggarong yang diberi judul *Overzicht van het Rijk van Koetei*. Ia melukiskan

mengenai tiang-tiang bekas keraton yang hangus terbakar. Dicatatnya pula mengenai komposisi penduduk Tenggarong saat itu, yakni 700 orang suku Kutai, 100 orang Bugis, dan 3 orang Cina. Ketika sultan mangkat di Kota Bangun, rakyat dan bangsawan berbondong-bondong menyaksikan upacara pemakamannya di tempat pemakaman raja-raja Kutai di Tenggarong. Belakangan, van de Wall diangkat sebagai Asisten Residen Kalimatan Timur yang pertama.

Perjanjian dengan Kutai diperbarui pada 17 Juli 1863[244] semasa pemerintahan Sultan Aji Muhammad Sulaiman (1850–1899), saat Kesultanan Kutai sudah sepenuhnya wilayah Hindia Belanda. Bersamaan dengan itu, semenjak 1888 berlangsung upaya penambangan batu bara dan minyak bumi di Kutai dengan J.H. Menten sebagai pengelolanya. Bahkan sultan sendiri menjadi sahabat karib Menten. Usaha pertambangan ini menjadikan Kesultanan Kutai Kartanegara bertambah kaya karena royalti pengelolaannya masuk ke kas sultan. Elsbeth Locher-Scholten dalam karyanya[245] menggambarkan bahwa politik kerjasama antara sultan dengan Belanda ini ternyata banyak mendatangkan keuntungan bagi kesultanan sendiri. Saat peperangan yang terjadi antara Kerajaan Banjar melawan Belanda, sultan bersikap netral dan bahkan ia membersihkan istananya dari anasir-anasir yang anti-Belanda. Sultan tidak takut terhadap perubahan dan bersedia menyerahkan hak-hak penambangan, yang sama sekali tidak membuatnya rugi dan sebaliknya mendatangkan keuntungan finansial yang besar. Sultan Sulaiman mengizinkan pula orang Eropa membuka perkebunan-perkebunan besar yang uji coba budi daya kopi dan hasil perkebunan lainnya dilakukan semenjak era 1890-an. Dalam bidang pendidikan, sultan mendirikan sekolah-sekolah dengan biayanya sendiri. Pada 1898, sultan mengirimkan dua putranya ke Negeri Belanda guna menghadiri acara penobatan Ratu Wilhelmina. Sultan Sulaiman dengan piawai memainkan politik dengan Belanda. Meskipun seolah-olah mematuhi setiap keinginan Belanda, pada hakikatnya kebebasan dan otoritas Kesultanan Kutai tetap terjaga. Sultan bahkan berhasil memanfaatkan Belanda untuk melayani kepentingannya sendiri, yakni sebagai pengimbang terhadap supremasi para

244. Pemerintah Belanda diwakili oleh Kolonel E.C.F. Happe. Selain itu, sultan masih menandatangani perjanjian lainnya, seperti pada 12 Juli 1896, yang menyatakan bahwa Kerajaan Kutai Kartanegara hanya boleh mengimpor mesiu dengan izin Belanda. Pada 16 Maret 1898 disepakati bahwa Belanda berhak mengusir orang-orang yang dianggap mengganggu kepentingan Belanda. Berikutnya, pada 27 Agustus 1898, ditandatangani penyerahan kekuasaan atas polisi pelabuhan pada pemerintah kolonial Belanda.

245. Lihat *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial*, hal 287-288 (terjemahan Indonesia).

elite Bugis dan Banjar di kawasannya. Dengan memainkan strategi seperti itu, sultan justru memperoleh kekuasaan dan dominasi yang jauh lebih besar di negerinya.

Lebih jauh lagi, semasa pemerintahan Sultan Aji Muhammad Alimuddin (1899–1910), pengganti Sultan Aji Muhammad Sulaiman yang wafat pada 2 Desember 1899, wilayah hulu Mahakam disewakan kepada Belanda dan sultan menerima kompensasi sebesar 12.990 Gulden setiap tahunnya. Setahun sebelum penyerahan itu, tepatnya pada 1907, dibukalah misi Katolik pertama di Laham sehingga tersebarlah agama Katolik di kawasan Kutai. Sultan sepakat menyerahkan hak pemungutan cukai barang ke luar dan masuk kerajaan Kutai kepada Belanda dan juga berbagai hak lainnya. Sebagai gantinya, sultan memperoleh kompensasi sebesar fl622.900 setahun.

Ketika sultan wafat pada 1910, putra mahkota yang bernama Aji Kaget belum cukup dewasa sehingga pemerintahan dipegang oleh Aji Pangeran Mangkunegoro selaku walinya. Ini berlangsung hingga 14 November 1920 saat Aji Kaget dinobatkan sebagai Sultan Aji Muhammad Parikesit (1920–1960). Pada masanya, perekonomian Kutai terus berkembang, apalagi setelah didirikannya perusahaan dagang Borneo-Sumatra Trade Co. Penghasilan yang diperoleh Kutai terus bertumbuh sehingga kesultanan dapat meraup kekayaan sebesar 3.280.000 Gulden pada 1924. Jumlah itu sangat besar pada masa itu. Pada 1936, sultan mendirikan istana baru yang kokoh dan megah serta berbahan baku beton, pembangunannya dapat dirampungkan dalam waktu setahun.

c. Kutai Kartanegara Semasa Kemerdekaan

Semasa penjajahan Jepang, kekuasaan sultan tetap diakui oleh pemerintah pendudukan Jepang. Dua tahun setelah Indonesia merdeka, Kesultanan Kutai yang saat itu berstatus sebagai daerah swapraja bergabung dengan kesultanan-kesultanan lainnya (Gunung Tabur, Bulungan, Sambaliung, dan Pasir) membentuk Federasi Kalimantan Timur. Selanjutnya, pada 27 Desember 1949 federasi itu menjadi bagian Republik Indonesia Serikat (RIS).

Setelah RIS dibubarkan pada 1950, Kutai Kartanegara diberi status daerah istimewa dengan nama Daerah Istimewa Kutai, berdasarkan UU Darurat No.3 tahun 1953. Sultan tetap diakui sebagai pemimpin daerah istimewa tersebut. Pada 1959 berlaku penghapusan berbagai daerah istimewa termasuk Kutai sehingga kawasan tersebut dipecah menjadi tiga bagian, yakni Kabupaten Kutai dengan Tenggarong sebagai ibu kotanya, Kotamadya Balikpapan, dan Kotamadya Samarinda. Sebagai

langkah lanjut bagi kebijakan tersebut, diangkatlah bupati dan walikota bagi ketiga daerah tingkat II yang baru dibentuk itu[246] pada 20 Januari 1960. Sehari kemudian di balairung Istana Kesultanan Kutai, Sultan Aji Muhammad Parikesit menyerahkan jabatannya pada para pejabat yang baru diangkat. Peristiwa ini mengakhiri Kesultanan Kutai Kartanegara dan untuk selanjutnya sultan hidup sebagai rakyat biasa. Setelah sultan wafat tidak ada yang ditunjuk sebagai penggantinya.

Tiga puluh sembilan tahun kemudian, guna melestarikan warisan sejarah dan budaya serta menghidupkan pariwisata di kawasan itu, bupati Kutai Kartanegara, Drs. H. Syaukani, berniat menghidupkan kembali kesultanan. Pada 7 November 2000, bupati beserta pewaris kerajaan Kutai, H. Aji Pangeran Praboe Anoem Soerja Adiningrat, menghadap Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Bina Graha, Jakarta, guna menyampaikan aspirasinya. Presiden merestui dan menyetujui usulan itu sehingga Pangeran Praboe Anoem dinobatkan pada 22 September 2001 dengan gelar Sultan Aji Muhammad Salehuddin II. Demikianlah, Kesultanan Kutai Kartanegara dihidupkan kembali sebagai penjaga cagar budaya di kawasan tersebut.

Patung Kecil Keemasan Dari Majapahit, Pusaka Kerajaan Kutai
Sumber: Het *Hinduisme in de Archipel*, halaman 110.

246. A. R. Padmo sebagai Bupati Kutai, Soejono sebagai Walikota Samarinda, dan A.R. Sayid Mohammad sebagai Walikota Balikpapan.

d. Kerajaan-kerajaan Suku Bahau dan Tunjung

Leluhur suku Bahau berasal dari Sungai Bram di Berunai, yang kemudian berpindah ke Sungai Kayan dan Hulu Mahakam akibat serangan suku Iban.[247] Sementara itu, suku Bahau yang kini mendiami Desa Mamahak sebelumnya berdiam di kampung Ujak Batah Masau (hulu Sungai Boh, Long Mahak) yang kemudian berpindah lagi ke Long Medang. Selama berada di Long Medang terjadi perselisihan antar saudara sehingga memecah belah komunitas mereka. Salah satu kelompok pindah ke Mamahak Tebo (hilir Desa Mamahak Besar) di bawah pimpinan Ipui, seorang wanita keturunan raja. Kelompok satunya lagi berpindah ke sungai Nyurak yang dipimpin oleh seorang putra raja bernama Anyi Lirang. Ia digantikan oleh adiknya, Liah Lirung (Raja Besar). Penggantinya adalah Boyo Liah, yang merupakan kemenakannya. Pada 1901, Boyo Liah pindah dan mendirikan Desa Mamahak.[248] Kerajaan-kerajaan ini kemudian menjadi bagian Kesultanan Kutai Kartanegara, dan sebagai wujud kesetiannya, setiap tahun menghadap sultan Kutai serta menyerahkan upeti dari daerahnya. Sebagai penghargaan atas kesetiaan raja-raja kecil ini, sultan menganugerahkan gelar Singa Macan Wono yang pernah pula diterima oleh para raja Bahau.[249] Meskipun demikian, pada zaman penjajahan Jepang, kesetiaan mereka tidak lagi ditujukan terhadap sultan Kutai, melainkan dialihkan kepada pemerintah pendudukan Jepang.

Tunjung merupakan kerajaan suku Dayak Tunjung yang juga menjadi bagian Kesultanan Kutai Kartanegara. Menurut hikayatnya, pada zaman dahulu terdapat dua orang bersaudara, yang masing-masing bernama Suma (selanjutnya disebut Soma) dan Gah Bogan.[250] Mereka kemudian berpisah dan Gah Bogan kemudian bermukim di kampung Linggang, Sungai Bengkalang. Mata pencaharian Gah Bogan adalah berladang dan juga mencari ikan. Setiap malam, Gah Bogan memasang jalanya di Sungai Manaraf. Suatu ketika, terjadi peristiwa aneh karena sewaktu jala diangkat, Gah Bogan hanya menjumpai tulang-tulang ikan saja. Tentu saja, Gah Bogan ingin mengetahui siapa yang telah mencuri ikan-ikannya. Sepanjang malam, Gah Bogan mengintai di balik semak-semak. Ternyata, muncul seorang wanita sangat cantik yang melahap ikan dalam jala Gah Bogan. Gah Bogan segera bangkit dan berupaya

247. Lihat *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Kalimantan Timur*, halaman 42.
248. Lihat *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Kalimantan Timur*, halaman 43.
249. Lihat *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Kalimantan Timur*, halaman 52.
250. Lihat *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Kalimantan Timur*, halaman 113.

menangkap wanita tersebut. Karena kalah kuat, wanita itu menderita kekalahan dan dibawanya pulang. Pada mulanya, ia tak bersedia mengucapkan sepatah katapun, namun akhirnya ia mengakui bahwa namanya adalah Gah Bongek.

Mereka berdua menikah. Gah Bongek hamil dan melahirkan anak kembar delapan. Kendati demikian, anak-anak ini dibuangnya ke Sungai Mahakam hingga menjadi hantu-hantu. Tidak berapa lama, Gah Bongek kembali mengandung serta melahirkan anak kembar delapan. Anak-anak itu dibuangnya ke hutan dan menjadi hantu penunggu Kerajaan Pinang Sendawar. Ketiga kalinya Gah Bongek hamil serta melahirkan bayi kembar delapan kembali. Kali ini, mereka tidak dibuang dan dipelihara baik-baik. Adapun nama mereka masing-masing adalah Sangkariak Igas, Sangkariak Laca, Sangkariak Lani, Sangkariak Inggih, Sangkariak Injung, Sangkariak Kebon, Sangkariak Laman, dan Sangkariak Duka.[251]

Suatu hari, mereka mendengar suara dari langit dan merasa ketakutan. Hanya Sangkariak Kebon saja yang berani keluar menengoknya. Ia melihat kelengkang[252] terulur dari langit, yang setelah dibuka di dalamnya terdapat bayi sangat tampan dengan memegang sebutir telur di tangan kanannya. Bayi yang turun dari langit itu dibawa masuk ke rumah dan diberi nama Aji Tulur Dijangkat. Sedangkan telurnya dieramkan dan setelah menetas keluarlah seekor ayam jantan.

Suma, saudara Gah Bogan yang berdiam di kampung Londong juga memiliki delapan orang anak, yakni Kemuduk Bengkong, Kemuduk Kandangan, Kemuduk Murung, Kemuduk Jemai, Jemuduk Jangah, Kemuduk Mandar (perempuan), Kemuduk Bulan (perempuan), dan Kemuduk Beran.[253] Saat Kemuduk Beran sedang berburu, anjingnya menggonggongi sebatang bambu betung di tengah-tengah semak. Bambu itu lalu dibawanya pulang. Ajaibnya, bambu itu meletus dan mengeluarkan seorang bayi perempuan yang dinamai Muk Bandar Bulan. Tangan kiri bayi tersebut memegang sebutir telur yang kemudian dieramkan dan menetaskan seekor ayam betina.

---

251. Menurut *Etnoekologi Perlandangan Orang Dayak Tunjung Linggang*, halaman 135, nama-nama itu dieja sebagai berikut: Senkreaq Kebotn, Sengkreaq Laneq, Sengkreaq Egas, Sengkreaq Lacaaq, Senkreaq Inyutn, Senkreaq Ingkih, Sengkreaq Rempaq, dan Sengkreaq Dakaq. Senkreaq Dakaq dipercaya sebagai leluhur orang Rentenunkng. Pada halaman 139 dipaparkan silsilah Senkreaq Dakaq sebagai berikut: Senkreaq Dakaq ➔ Anyeq ➔ Gasikng ➔ Sikiiq ➔Oatn ➔ Nengkukng ➔ Dapuukng ➔ Laai ➔ Siut➔ Lanyaakng ➔ Rancukng (Empon Deu) ➔ Kadeq (Empon Menang) ➔ Jeraakng (Empon Daiiq) ➔ Suang (Empon Lalukng).
252. Menurut *Kamus Dewan* edisi keempat terbitan Malaysia, kelengkang = sejenis gelang tempat digantungkan (dicucukkan) kunci dll.
253. Lihat *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Kalimantan Timur*, halaman 114–115.

Setelah agak besar, Muk Bandar Bulan mengatakan bahwa dirinya adalah putri Nayuk Sanghyang Juata Tonoi yang berasal dari kayangan. Ia turun ke dunia guna memimpin rakyat Tunjung. Pada perkembangan selanjutnya, Muk Bandar Bulan minta disiapkan armada perahu untuk pergi ke kampung Lenggang guna membeli ayam jantan milik Aji Tulur Dijangkat. Bersamaan dengan itu, Aji Tulur Dijangkat minta agar disiapkan perahu-perahu guna mengantarnya ke Kampung Londong. Tujuannya adalah membeli ayam betina milik Muk Bandar Bulan. Kedua armada perahu bertemu di rantau (pantai sepanjang teluk) Sungai Gonali. Kedua ayam mengeluarkan suara-suara bersahut-sahutan sehingga menarik perhatian masing-masing pihak. Demikianlah pertemuan antara Aji Tulur Dijangkat dan Muk Bandar Bulan.

Mereka berdua menikah dan mendirikan Kerajaan Pinang Sendawar (Tunjung). Pernikahan mereka dikaruniai empat orang putra, yang masing-masing bernama Sualas Guna, Nara Guna, Jolihan Bona, dan Puncan Karna. Aji Tulur Dijangkat mengadakan sayembara memilih penggantinya. Yang memenangkannya adalah Puncan Karna. Berdasarkan petunjuk melalui mimpi, Puncan Karna diperintahkan pergi ke Kutai yang ketika itu berada di bawah kekuasaan Maharaja Sultan. Pada perkembangan selanjutnya, kerajaan ini bergabung dengan Kesultanan Kutai Kartanegara dan Raja Tunjung setiap tahun mengutus wakilnya menghadap Sultan Kutai di Tenggarong serta menyerahkan upeti.

Sehubungan dengan urutan raja-raja Tunjung terdapat dua versi. Adapun versi pertama adalah[254] (1) Aji Tulur Jejangkat (1310–1360); (2) Sualas Gunaaq (1360–1400); (3) Selutatn Gantukng Langit (1400–1430); (4) Selutatn Inaar Giri (1430–1450); (5) Selutatn Pejapm (1450–1470); (6) Selutatn Hareq Lebih (1470–1480); (7) Timang Maharajan Tonyooi (1480–1510); (8) Hajiq Mahing (1510–1520); (9) Ratu Angin (1520–1580); (10) Uyaang (1580–1600); (11) Tiukng Radetn Gelumakng (1600–1620); (12) Ririh Radetn Baroh (1620–1640); (13) Idiiq Radetn Tusuk (1640–1650); (14) Terutn Raden Gelumakng (1650–1660); (15) Riaaq Adaaq (1660–1670); (16) Riaaq Gadaakng (1670–1680); (17) Riaq Ginang Radetn; (18) Badas Tabungah; (19) Bungai Empon Bonoh Hajin; (20) Ngapaan Baromoong Ayakng; dan (21)

254. Lihat *Sejarah Sentawar: Dari Mitologi Hingga Histori Suatu Kajian Sejarah Lokal*, halaman 55. Disebutkan bahwa sumbernya adalah *Sejarah Sentawar* (naskah yang belum diterbitkan) karya Korrie Layun Rampan (2001).

Lagitn Empon Useen Riaag Lagitn. Sementara itu, menurut versi kedua adalah[255] (1) Tulur Aji Jangkat; (2) Sualas Guna; (3) Gantung Langit; (4) Inaar Giri; (5) Pejaamp; (6) Hareeq Lebih; (7) Timaang/ Entoot; (8) Hajiiq Mahing; (9) Tingang; (10) Angin (perempuan); (11) Uyaang (perempuan); (12) Terutn Radent Gelumakng; (13) Ginang Radent Teba; (14) Adaaq; (15) Gadaang; (16) Jangkat Empon Tang; (17) Gemak Taman Uaan; (18) Kolaaq Empon Maas; (19) Badas Tebungah; (20) Rahaden Empon Dehang; (21) Bungai Empon Bonoh; (22) Bungai Empon Bonoh; (23) Ajaang Empon Balui; (24) Timaang Empon Baraau; (25) Sentawaaq/ Ongkooq; (26) Medetn Empon Dodoq; (27) Ngapaan/ Beromonong; (28) Lagitn Empon Useen; (29) Tegai/ Uraang Empon Loyaan; (30) Lomos Taman Agong; (31) Pemuhuq Empon Runuung; (32) Luih Empon Tengkan; dan (33) Karongoq Mas Singo Mudo.

e. Kerajaan-kerajaan di Ulu Mahakam

Kawasan Ulu Mahakam sebelumnya merupakan bagian Kesultanan Kutai Kartanegara, namun pada 1908 dipisahkan dari kekuasaan kerajaan tersebut dan diperintah langsung oleh pemerintah kolonial Belanda. Seorang kontrolir bernama Y.P. Barth ditempatkan di sana selaku wakil pemerintah kolonial. Di kawasan Ulu Mahakam terdapat kerajaan-kerajaan kesukuan sederhana dan beberapa raja terkemuka, yakni

1. Kweng Irang, berasal dari suku Kayan dan memerintah di Long Paka
2. Bok Juk Belare, berasal dari suku Pnihing dan memerintah di Tiong Ohang
3. Bang Juk, berasal dari suku Long Glat (bergelar Karta Mas) dan berdiam di Long Deho dan memerintah di Ujoh Bilang.
4. Raden Mas, memerintah di Long Iram.
5. Tumenggung Silam, memerintah di Ratah
6. Hang Lasah, memerintah di Naha Aru
7. Ibau Lie, memerintah di Long Pahangei

Raja-raja di atas menjalankan tugasnya dengan dibantu pada penggawa adat. Adapun tugas raja beserta perangkatnya adalah mengurusi masalah-masalah adat, seperti upacara penanaman padi, pernikahan, perceraian, kematian, dan lain sebagainya. Mereka juga berhak memungut pajak atau cukai dari rakyatnya.[256]

255. Lihat *Sejarah Sentawar: Dari Mitologi Hingga Histori Suatu Kajian Sejarah Lokal*, halaman 56-57; disebutkan bahwa sumbernya adalah Adrius Amaan A, Kampung Juaq Asa (2002).
256. Lihat *UluMahakam: dari Long Iram sampai Long Apari: Riwayatmu Doeloe, Kini dan Esok*, halaman 3-5.

V. PASIR

a. Cikal Bakal Kerajaan Pasir

Kerajaan Pasir kini terletak Kabupaten Pasir, bagian selatan Provinsi Kalimantan Timur. Kerajaan ini pernah menjadi vasal Kesultanan Banjar. Konon menurut penuturan, raja pertama Pasir adalah seorang wanita bernama Putri Petung (Aji Putri Betung). Pusat pemerintahannya berada di Sadurangas, hulu Sungai Kandilo.

Konon sebelum hadirnya Aji Putri Betung, di kawasan Pasir belum ada raja. Ketika itu di kawasan yang sekarang bernama Kampung Batu Botuk hidup seorang kakek beserta istrinya. Ia memelihara seekor kerbau putih yang diberi nama Ukop. Oleh karena itu, oleh tetangganya ia dikenal sebagai Kakah Ukop sedangkan istrinya disebut Itak Ukop. Karena mendengar mengenai sebuah negeri makmur yang diperintah oleh seorang raja, warga setempat juga menginginkan seorang raja. Kendati demikian, mereka tidak mengetahui siapakah yang hendaknya diangkat sebagai raja. Oleh karenanya, mereka lantas menghadap pada Kakah Ukop guna membicarakan mengenai hal tersebut.[257]

Kakah Ukop sangat setuju dan menyarankan agar mereka mencari raja di luar daerah Pasir. Setelah dicapai kata sepakat, warga setempat mengutus Kakah Ukop berlayar ke negeri di tepi langit guna mencari salah seorang rakyatnya yang layak dijadikan raja Pasir. Pelayaran pertama Kakah Ukop memakan waktu tiga tahun, namun tidak membuahkan hasil apa pun. Penduduk Pasir mendesak Kakah Ukop agar mengadakan perjalanan lagi. Ia pun mengadakan pelayaran selama tujuh kali. Pada pelayaran yang ketujuh tersebut, Kakah Ukop tiba di negeri tepi langit dan mendapat penjelasan dari penduduk di sana bahwa sosok yang kelak akan menjadi raja Pasir telah dikirimkan. Oleh karenanya, lebih baik Kakah Ukop segera berlayar kembali ke Pasir.

Oleh penduduk negeri tepi langit, Kakah Ukop dibekali dengan ceret, tempat air, pinggan, gong, sumpitan, kipas emas, dan lain sebagainya. Benda-benda ini kelak akan menjadi pusaka kerajaan. Sewaktu berlayar kembali ke Pasir, Kakah Ukop mendapatkan pesan melalui mimpi bahwa barang apa pun yang diperolehnya di tengah perjalanan jangan dibuang. Keesokan harinya saat terbangun, Kakah Ukop mendapati bahwa di haluan perahunya telah ada seruas bambu betung yang besar. Karena teringat oleh pesan dalam mimpinya semalam, Kakah Ukop tidak membuangnya dan

---

257. Lihat *Republik Indonesia: Kalimantan*, halaman 405.

membawanya pulang. Setibanya di kampung halamannya, bambu betung itu ditaruh di tempat menaruh kayu bakar, yakni di dapurnya. Ia kemudian menjelaskan hasil pembicaraan dengan penduduk negeri di tepi langit.

Ternyata setelah ditunggu beberapa lama tidak ada seorang pun yang datang hendak menjadi raja di Pasir. Oleh karenanya, Kakah Ukop lantas berlayar kembali untuk kedelapan kalinya. Sepeninggal Kakah Ukop, istrinya kehabisan persediaan kayu bakar sehingga ia mengambil dan membelah seruas bambu tersebut. Ternyata dari dalam ruas bambu keluarlah sebutir telur yang agak besar. Telur itu lantas ditaruh di atas pinggan dan diletakkan di dekat tempat tidur Itak Ukop. Tepat tengah malam, telur tersebut menetas dan dari dalamnya muncul seorang anak perempuan yang amat cantik. Ia kemudian diberi nama Putri Petung (Putri Betung) karena berasal dari belahan bambu betung.[258] Putri yang muncul dari dalam bambu betung ini kemudian menjadi Raja Pasir pertama.

Sementara itu, sumber lain menuturkan bahwa asal mula berdirinya Kerajaan Pasir berkaitan dengan rombongan berasal dari Kerajaan Kuripan dan Daha yang terletak di Amuntai. Mereka mengungsi dari desanya guna melarikan diri dari kelaliman seorang raja bernama Sukarama.[259] Ketika itu Raja Sukarama hendak menculik putri Ariya Manau (bekas panglima perang kerajaan semasa pemerintahan ayah Raja Sukarama) yang sedang mandi di sungai. Teriakan gadis itu mengundang kedatangan Ariya Manau beserta adiknya, Geruntung Manau. Raja Sukarama pada kesempatan tersebut sedang disertai oleh Pangeran Mangkubumi yang merupakan saudara sepupunya sendiri. Tindakan tersebut mengakibatkan perang tanding di antara mereka dan Pangeran Mangkubumi tewas. Menyaksikan saudara sepupunya tewas, Raja Sukarama lalu melarikan diri.

Khawatir terhadap pembalasan dendam Raja Sukarama, mereka lalu sepakat meninggalkan kampung itu dengan diikuti oleh seluruh warganya dan mencari tempat pemukiman baru. Rombongan tersebut dipimpin oleh Ariya Manau beserta Geruntung Manau. Dalam perjalanannya, mereka terhalang oleh Sungai Kendilo dan Sungai Samu. Setelah mempertimbangkan bahwa tanahnya sangat sesuai bagi pertanian, mereka lalu memilih berdiam di sana. Karena telah berambut putih dan selalu menunggang kerbau maka Ariya Manau digelari *Kaka Ukop* oleh penduduk

258. Lihat *Republik Indonesia: Kalimantan*, halaman 406.
259. Lihat *Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir*, halaman 27-29.

setempat atau 'Kakek yang Menunggangi Kerbau.' Sementara itu, Geruntung Manau digelari *Temenggung Tau Keu* atau 'Orang Bijak Yang Ada Secara Tiba-tiba.'[260]

Setelah pemukiman menjadi makin maju, Ariya Manau dan Geruntung Manau sepakat hendak mendirikan kerajaan sendiri. Sebagai penguasa pertama, diangkatlah putri tunggal Ariya Manau dan kerajaan mereka diberi nama Kerajaan Sadurangas yang berarti 'Kerajaan Pusat Kekuatan.' Dalam upacara penobatan tersebut diundang pula suku-suku Dayak yang berdiam di sekitar tempat itu. Dengan demikian berdirilah Kerajaan Sadurangas yang kelak menjadi Kesultanan Pasir. Penguasa pertama Kerajaan Sadurangas ini dikenal sebagai Puteri di Dalam Petung. Oleh karenanya, versi ini agak berbeda dengan sebelumnya, namun keduanya mencantumkan nama yang sama bagi penguasa pertamanya.

Ia menikah dengan seorang bangsawan dari Giri di Jawa, Pangeran Indera Jaya (menurut sumber lain: Abu Mansyur Indra Jaya),[261] yang datang ke Pasir dengan kapal. Pernikahan ini membuahkan dua orang anak, seorang putra bernama Aji Patih (Aji Mas Pati Indra), dan seorang putri bernama Aji Meter yang menikah dengan seorang keturunan Arab bernama Ba'alwi asal Mempawah. Ba'alwi kemudian menyebarkan agama Islam di Pasir. Pernikahan ini membuahkan dua orang anak, yakni Imam Mustafa dan Puteri Ratna Berana. Sementara itu, Aji Patih memiliki seorang putra bernama Aji Anum (Anom Singa Maulana). Puteri Ratna Berana kemudian dinikahkan dengan Aji Anum dan selanjutnya menjadi nenek moyang raja-raja Pasir.[262]

Puteri Di Dalam Petung digantikan oleh putranya, Aji Mas Pati Indra (1567–1607 atau 1600–1624),[263] dan selanjutnya Aji Mas Anom Indra (1607–1644)[264] serta Anom Singa Maulana (1607–1644 atau 1624–1707).[265] Bersama dengan itu, agama Islam mulai tersebar di Kerajaan Pasir pada abad 16–17. Semasa pemerintahan Aji Mas Anom Indra, datanglah seorang ulama asal Mempawah bernama Sayid Ahmad

---

260. Lihat *Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir*, halaman 29.
261. Lihat *Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir*, halaman 33. Kedatangan ia disebutkan pada 1521.
262. Lihat *Republik Indonesia: Kalimantan*, halaman 407.
263. *http://kesultanan_pasir.tripod.com/sadurangas/id10.html* (diunduh pada 22 Juli 2009) mencantumkan 1600–1624, sedangkan sumber tertulis berupa buku *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Timur* tidak menyajikan tahunnya. Apabila buku tersebut mencantumkan tahunnya akan diberi catatan khusus. Sumber lain *Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir*, halaman 37, menyebutkan bahwa ia memerintah dari 1567 hingga 1607
264. *http://kesultanan_pasir.tripod.com/sadurangas/id10.html* (diunduh pada 22 Juli 2009) tidak menyebutkan nama raja ini dan langsung pada penguasa berikutnya, Anom Singa Maulana.
265. *http://kesultanan_pasir.tripod.com/sadurangas/id10.html* (diunduh pada 22 Juli 2009) mencantumkan 1624–1707. Sumber lain *Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir*, halaman 37, menyebutkan bahwa ia memerintah dari 1644 hingga 1667.

Khairuddin atau lebih dikenal sebagai Imam Mempawah guna mengembangkan agama Islam.[266]

Berbeda dengan para pendahulunya, Raja Anom Singa Maulana sering bertindak kejam kepada rakyat. Ia memaksa rakyatnya membangun istana megah yang berhiaskan emas. Sebelumnya, tempat kediaman raja tidak begitu berbeda dengan rumah rakyat. Akibatnya, mereka kekurangan waktu bercocok tanam. Siapa pun yang membantah atau melontarkan kritik kepada dirinya akan dijatuhi hukuman. Karena penderitaan tersebut rakyat berbondong-bondong meninggalkan Kerajaan Sadurangas. Pada 1667, Kerajaan Sadurangas diserang oleh gerombolan yang berasal dari Tanah Dusun. Karena membenci rajanya, rakyat tidak bersedia mengulurkan bantuan sehingga raja mengalami kekalahan dan terbunuh. Istana megah yang dibangun atas perintah raja tersebut dibakar habis. Ketika itu, tiga orang putra raja, yakni Aji Perdana, Aji Duwo, dan Aji Geger sedang belajar agama di tempat kediaman Al-Imam Sayid Abdurrahman, putra Sayid Ahmad Khairuddin sehingga mereka terluput dari bencana tersebut.[267] Setelah berlangsungnya peristiwa ini, rakyat berpindah ke hilir Sungai Kandilo dan membangun tempat pemukiman baru bernama Lempesu.

Aji Perdana dengan disertai Al-Imam Sayid Abdurrahman memohon bala bantuan Kesultanan Banjar yang ketika itu dipimpin oleh Sultan Mustain Billah.[268] Sultan Banjar bersedia memberikan bantuannya guna membasmi gerombolan asalkan setiap tahun Kerajaan Sadurangas menyerahkan upeti berupa 10 kati emas. Aji Perdana menyetujui persyaratan ini. Berkat bantuan dari Kesultanan Banjar, gerombolan perampok dapat dibasmi. Sebagai ucapan terima kasih, Kerajaan Sadurangas menyerahkan emas yang berhasil direbut kembali pkeada sultan Banjar. Semenjak saat itu, Sadurangas menjadi sekutu Banjar, dan mereka wajib menyerahkan upeti setiap tahunnya.

Guna mengisi kekosongan singgasana kerajaan, Aji Perdana diangkat sebagai raja berikutnya dengan gelar Penambahan Sulaiman (1667–1680). Pelantikannya berlangsung di Kayu Tangi, ibu kota Kesultanan Banjar. Al-Imam Sayid Abdurrahman diangkat sebagai penasihatnya dengan gelar Syarif Indra Bangsawan. Penambahan Sulaiman merupakan seorang raja yang taat beragama dan berusaha mendekatkan

266. Lihat *Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir*, halaman 39.
267. Lihat *Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir*, halaman 45.
268. Sultain Mustain Billah menurut sumber lain disebutkan memerintah 1595–1620. Jadi seharusnya apabila peristiwa serangan itu terjadi pada 1667 maka ia tidak lagi memerintah. Dengan demikian, terjadi ketidak-sesuaian dalam hal angka tahun. Hal ini barangkali memerlukan penelitian lebih jauh oleh para ahli sejarah.

diri kepada rakyatnya.[269] Hingga tiga tahun memerintah, ia masih mengalami kesulitan dalam memenuhi janji menyerahkan 10 kati emas setiap tahunnya. Atas saran penasihat Syarif Indra Bangsawan, Penambahan Sulaiman mengunjungi Sultan Mustain Billah di Banjar guna menyampaikan segenap kesulitannya. Sultan Mustain Billah memberikan kelonggaran waktu bagi penyerahan emas tersebut dan memperbolehkan Kerajaan Sadurangas memulai kewajiban itu setelah Penambahan Sulaiman sepuluh tahun memerintah. Jadi, baru pada kesebelas pemerintahan Penambahan Sulaiman penyerahan itu dilaksanakan. Penambahan Sulaiman mangkat pada 1680 setelah muntah darah akibat keracunan.[270]

Penggantinya adalah adiknya, Aji Duwo, yang memerintah dengan gelar Penambahan Adam (1680–1705). Penyerahan emas setiap tahunnya kepada Kesultanan Banjar masih dilanjutkan. Semasa pemerintahannya, pusat pemerintahan kerajaan dipindahkan dari Lampesu ke Gunung Sahari. Dia memajukan kegiatan pertanian di negerinya dengan membangun kawasan persawahan di Atang Gendang dan Jaya yang dilengkapi dengan sistem irigasi yang baik. Dia juga mendatangkan ahli-ahli pertanian dari Banten dan Demak. Aji Geger, adiknya, dikirim guna mempelajari agama Islam dan ilmu pemerintahan di Banten.

Kerajaan Sadurangas pada masa tersebut banyak mengalami serangan para bajak laut dari Sulawesi. Raja lalu meminta bala bantuan angkatan laut Kesultanan Banjar. Awalnya bantuan ini dapat diberikan. Namun, karena Kesultanan Banjar sedang sibuk dalam peperangan melawan VOC, bantuan yang diminta tidak dapat lagi diberikan. Akhirnya, Kerajaan Sadurangas diperkenankan membangun angkatan laut sendiri. Kendati demikian, Banjar tidak dapat membantu dalam hal perlengkapan perang.

Selama bertahun-tahun, cadangan emas di Kerajaan Sadurangas mulai menipis dan mereka merasa kesulitan dalam mendapatkannya. Itulah sebabnya, Penambahan Adam mengadakan perundingan dengan Sultan Banjar. Dalam pertemuan tersebut, Sultan Banjar menyatakan ketidaksanggupannya membantu Sadurangas dalam hal persenjataan, bahkan Sultan Banjar meminta agar Penambahan Adam menyerahkan 100 kati emas dan setelah itu Sadurangas tidak diwajibkan lagi membayar upeti tersebut untuk selamanya. Penambahan Adam mengajukan keringanan dan disepakati bahwa jumlahnya diturunkan menjadi 50 kati yang akan diserahkan dalam waktu

---

269. Lihat *Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir*, halaman 49.
270. Lihat *Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir*, halaman 51.

tiga tahun. Berkat kerja keras raja dan rakyatnya, hanya dalam kurun waktu dua tahun 50 kati emas sudah terkumpul yang segera dibayarkan ke Banjar pada 1698.[271] Semenjak saat itu, Sadurangas terbebas dari kewajibannya membayar upeti ke Banjar. Peristiwa penting lain pada masa ini adalah lamaran terhadap putri raja bernama Aji Rainah oleh Andi Mappanyukki, putra Raja Bugis Paneki yang berlangsung pada 1700. Lamaran ini ditolak dan mengakibatkan peperangan antara Sadurangas dengan Paneki. Menurut hikayat, karena kesalahpahaman menyangka pasukan Sadurangas kalah, Penambahan Adam bunuh diri dengan membakar istananya. Peperangan ini dapat diakhiri dengan perdamaian dan bahkan Andi Mappanyukki turut berduka atas peristiwa tersebut.

Aji Geger (1703–1738)[272] diangkat sebagai raja menggantikan kakaknya. Semenjak pemerintahannya, Raja Sadurangas mulai menyandang gelar sultan. Ia lalu digelari Sultan Aji Muhammad Alamsyah. Nama kerajaan juga diubah menjadi Pasir. Ia melakukan pembenahan terhadap negerinya yang hancur akibat peperangan dengan Paneki. Sektor pertanian pun mengalami kemajuan pesat. Peristiwa penting pada masa ini adalah ditetapkannya undang-undang kesultanan yang diberi nama *Boyan Bungo Nyaro* atau *Jalan Bunga Keberuntungan*.[273] Isinya menyangkut susunan pemerintahan, aturan pemberian gelar bangsawan, syarat menjadi sultan, dan lain sebagainya. Semasa pemerintahannya, sultan bekerja keras memajukan negerinya. Jalur-jalur transportasi baik melalui darat dan laut makin dikembangkan sehingga tingkat kemakmuran rakyat mengalami kemajuan pesat.

Ia mengubah pula bendera Kesultanan Pasir dengan menambahkan warna hijau di sekelilingnya.

---

271. Lihat *Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir*, halaman 56. Disebutkan bahwa Sultan Banjar saat itu adalah Saidullah (1637–1642). Menurut sumber lainnya, Sultan Saidullah memerintah hingga 1642. Dengan demikian, terjadi ketidaksesuaian dalam tahun pemerintahan. Hal ini barangkali memerlukan penelitian lebih jauh oleh para ahli sejarah.
272. Sumber lain: 1703–1726.
273. Lihat *Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir*, halaman 82.

Bendera Kesultanan Pasir

Makna warna dasar kuning dalam bendera tersebut melambangkan keagungan. Gambar macan tutul yang sedang menerkam melambangkan kewaspadaan dalam menghadapi ancaman, baik dari dalam maupun luar. Sedangkan warna hijau di sekeliling bendera melambangkan suburnya tanah pertanian di Pasir.[274]

Sebagai catatan, sumber lain menempatkan serangan suku Dusun pada masa pemerintahan Aji Geger. Diriwayatkan bahwa kerajaan kerap mendapatkan gangguan yang berasal dari suku Dusun di hulu sungai. Oleh karena itu, raja mengeluarkan perintah untuk membangun perkubuan yang kuat. Malangnya, sebelum pekerjaan itu selesai, suku Dusun telah menyerang mereka dan membumihanguskan rumah rakyat beserta Istana Raja Pasir. Akibatnya, sultan beserta rakyatnya terpaksa mengungsi ke hilir Sungai Kandilo dan memutuskan untuk menetap di Pasir Benua dekat Pasir Belengkong. Mereka membangun perkampungan baru secara bergotong royong. Sesuai dengan nama tempat mereka menetap, untuk selanjutnya kerajaan diubah namanya menjadi Pasir. Karenanya, kembali terdapat perbedaan versi di sini.

Terdapat sumber lain yang menyebutkan mengenai pernikahan antara La Maddukelleng dengan putri Sultan Aji Muhammad Alamsyah. La Maddukelleng adalah tokoh Kerajaan Wajo yang merantau ke Kalimantan setelah membunuh seorang bangsawan Bone dan menikah dengan putri Sultan Aji Muhammad Alamsyah bernama Andeng Ajang. Ketika ayahnya wafat, istri La Maddukelleng ini dicalonkan sebagai Sultan Pasir. Meskipun demikian, sebagian orang-orang Pasir menolaknya sehingga menggusarkan La Maddukelleng. Akibatnya, La Maddukelleng menyerang dan menaklukkan Pasir pada 1726. Ia kemudian diangkat sebagai Sultan Pasir

274. Lihat *Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir*, halaman 80.

(1726–1735), hingga dipanggil pulang guna membebaskan negerinya dari dominasi Bone beserta VOC.[275]

b. Perkembangan Kerajaan Pasir

Sepeninggal Sultan Aji Muhammad Alamsyah, dewan adat kerajaan berniat mengangkat Aji Depati yang bergelar Pangeran Sukma Ningrat, putra Penambahan Adam, sebagai penggantinya. Ia menolak jabatan tersebut karena ibunya merasa keberatan pindah ke Gunung Sahari[276] sehingga yang diangkat sebagai sultan baru adalah Aji Ngara, putra Sultan Aji Muhammad Alamsyah. Ia bergelar Sultan Sepuh Alamsyah (1738–1768). Semasa pemerintahannya, diterapkan teknologi baru dalam pertanian sehingga sanggup meningkatkan produksi pangan. Selain itu, demi mengamankan wilayahnya, sultan membentuk satuan pasukan berkuda. Lima puluh ekor kuda didatangkan dari Sumbawa demi keperluan tersebut.[277] Masih pada masa pemerintahannya, berlangsunglah pernikahan antara Andi Sibengngareng,[278] putra mahkota Kerajaan Wajo, dengan Puteri Aji Doyah dari Pasir. Pernikahan ini membuahkan seorang putri bernama Andi Riajeng yang kelak menikah dengan Sultan Aji Muhammad Idris (1735–1739) dari Kutai Kartanegara. Terdapat perbedaan versi di sini. Menurut versi pertama, Sultan Aji Muhammad Idris menikah dengan putri La Maddukelleng (lihat uraian mengenai Kerajaan Kutai Kertanegara). Sedangkan menurut buku *Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir,* Andi Riajeng yang menikah dengan Sultan Aji Muhammad Idris itu adalah cucu La Maddukelleng.

Sumber lain menyatakan bahwa setelah La Maddukelleng meninggalkan Pasir, yang menggantikannya adalah Sultan Sepuh I Alamsyah (menurut sumber tersebut, ia memerintah pada 1735–1766). Jadi menurut sumber ini, Sultan Sepuh Alamsyah tidak memerintah setelah Sultan Aji Muhammad Alamsyah, melainkan menggantikan La Maddukelleng. Selanjutnya, masih menurut sumber yang sama, semasa pemerintahannya, Kerajaan Pasir mengalami kemajuan dalam bidang pertanian dan perkebunan sehingga rakyat hidup berkecukupan. Kendati demikian, Sultan Sepuh masih merasa terganggu dengan kondisi Pasir sebagai vasal Kerajaan

---

275. Peristiwa ini tidak disebutkan dalam buku *Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir.*
276. Perpindahan ke ibu kota Kerajaan Pasir itu akan mengingatkannya pada almarhum suaminya, yakni Penambahan Adam. Lihat *Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir*, halaman 88.
277. Lihat *Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir*, halaman 91.
278. Menurut *Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir*, halaman 91, disebutkan bahwa Andi Sibengngareng merupakan putra Andi Maddukaleng (mungkin sama dengan La Maddukelleng). Lihat juga *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Kalimatan Timur*, halaman 67–69, yang mencantumkan hal senada.

Banjar yang setiap tahun rakyat Pasir harus membayar upeti kepada sultan Banjar berupa 10 kati emas beserta hasil pertanian. Untuk memperoleh keringanan, Sultan Sepuh menghadap Raja Banjar di Martapura. Ia memohon agar upeti 10 kati emas itu dikurangi karena terlampau berat bagi rakyat Pasir diakibatkan sering meluapnya Sungai Kandilo sehingga menghambat kegiatan pendulangan emas. Sultan Sepuh meminta agar upeti itu dibayarkan saja sekaligus dan setelah itu Pasir bebas dari ikatan dengan Banjar. Sultan Banjar menyepakatinya dan menetapkan emas sebanyak 50 kati sebagai tebusan bagi kemerdekaan Pasir yang harus dibayarkan dalam waktu setahun. Sultan Pasir menyampaikan keputusan ini kepada rakyatnya dan memerintahkan mereka bergotong-royong mendulang emas di Sungai Kandilo. Rakyat berbondong-bondong memenuhi seruan sultan ini hingga dalam kurun waktu satu tahun telah didapatkan 100 kati emas. Begitu tiba tenggang waktunya, upeti diserahkan kepada Sultan Banjar dan Kerajaan Pasir memperoleh kemerdekaannya. Dengan bebasnya Pasir dari kewajiban menyerahkan upeti, rakyat dapat memusatkan lebih banyak perhatian terhadap kegiatan pertanian sehingga kehidupan mereka makin makmur. Berbeda dengan versi sebelumnya, menurut versi ini pelunasan upeti secara keseluruhan terhadap Kesultanan Banjar baru terjadi semasa pemerintahan Sultan Sepuh Alamsyah.

Aji Depati yang sebelumnya pernah menolak kedudukan sebagai sultan kini setuju menggantikan Sultan Sepuh Alamsyah karena ibunya sudah wafat. Ia menaiki singgasana Kesultanan Pasir dengan gelar Sultan Dipati Anom Alamsyah (1768–1779). Menurut sumber lain, Sultan Sepuh Alamsyah secara berturut-turut digantikan oleh Sultan Ibrahim Alamsyah (1766–1786), Ratu Agung (1786–1788), dan baru setelah itu Sultan Dipati Anom Alamsyah (1788–1799). Bersamaan dengan masa pemerintahan Sultan Dipati Anom Alamsyah ini terjadi perang perebutan takhta di Kesultanan Banjar. Ketika itu, Pangeran Natadilaga menobatkan dirinya menjadi Sultan Tahmidullah II sehingga terjadi peperangan dengan Pangeran Amir (lihat uraian mengenai Kesultanan Banjar). Kesultanan Pasir pada masa itu turut membantu pihak Pangeran Amir. Karena terdesak, Sultan Tahmidullah II meminta bantuan VOC. Tentu saja bantuan itu tidaklah cuma-cuma. Sultan Banjar diminta menyerakan sebagian wilayahnya, termasuk Pasir, pada 1787. Meskipun sebelumnya Pasir telah melepaskan diri dari kekuasaan Banjar, Sultan Tahmidullah II masih merasa Kerajaan Pasir adalah daerah kekuasaannya.

Sehubungan dengan penyerahan tersebut, utusan VOC mengunjungi Pasir pada 1789 dan diterima oleh perdana menteri Pasir, Pangeran Kesuma Ningrat[279]. Namun, Kesultanan Pasir dengan tegas menolak hal tersebut dan menyatakan bahwa Pasir bukan lagi wilayah Kesultanan Banjar. Dengan demikian, Sultan Banjar tidak berhak menyerahkan negeri mereka pada VOC. Para utusan VOC kemudian meninggalkan Pasir tanpa sanggup melakukan apa-apa.

Sultan Dipati Anom Alamsyah mangkat dan digantikan oleh Aji Panji atau Pangeran Kesuma Ningrat, yang sebelumnya menjabat sebagai perdana menteri. Ia bergelar Sultan Sulaiman II Alamsyah (1799–1811). Kesultanan Banjar ternyata menagih lagi upeti berupa emas pada masa pemerintahannya, tetapi hal ini tidak dipedulikannya karena Pasir telah lama memerdekakan diri dari pengaruh Banjar. Sultan Sulaiman II Alamsyah berjasa membangun kembali armada Pasir yang hancur saat turut serta dalam perang perebutan takhta di Banjar. Dalam bidang keuangan, sultan menciptakan mata uang baru bagi negerinya yang disebut Real.[280]

Setelah Sultan Sulaiman II Alamsyah mangkat, dia digantikan oleh kemenakannya, Aji Sembilan, yang bergelar Sultan Ibrahim Alamsyah (1811–1815). Peristiwa penting yang terjadi semasa pemerintahan sultan ini adalah perubahan perbatasan antara Pasir dan Kutai Kartanegara. Pada mulanya perbatasan antara kedua kerajaan adalah Sungai Aji Raden sehingga kawasan Balikpapan dan Panajam masuk wilayah Pasir. Sultan menikahkan putrinya bernama Aji Siti Jawiah dengan putra sultan Kutai. Ketika, putrinya pindah ke Kutai, sultan menyerahkan daerah Panajam dan Balikpapan itu kepada putrinya sehingga tidak lagi menjadi wilayah Pasir. Sementara itu, di Banjar terjadi perkembangan politik penting. Berdasarkan perjanjian antara Sultan Banjar dengan pemerintah kolonial Belanda yang diwakili oleh J. van Boeckholdz setelah kembalinya kekuasaan atas Kepulauan Nusantara dari tangan Inggris pada 1816, Pasir diserahkan oleh Kerajaan Banjar kepada Belanda. Karenanya, kini Belanda merasa berkuasa atas kawasan tersebut, padahal Pasir sebelumnya telah memerdekakan diri dari kekusaan Banjar. Belanda belum mengambil tindakan apa-apa untuk menduduki Pasir sehingga para sultan Pasir tetap memerintah seperti sediakala.

Sultan Ibrahim Alamsyah mangkat dan digantikan oleh saudara sepupunya bernama Aji Karang yang bergelar Sultan Mahmud Han Alamsyah atau Mahmud

279. Lihat *Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir*, halaman 134.
280. Lihat *Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir*, halaman 149.

Khan Alamsyah (1815–1843),[281] yang merupakan putra sulung Sultan Sulaiman. Tiga tahun kemudian datanglah kapal dagang Belanda untuk pertama kalinya ke Pasir. Mereka membawa barang-barang dagangan berupa kain, roti, gula-gula, cermin, manik-manik, piring, guci, dan lain sebagainya. Perdagangan dilakukan secara barter dengan hasil hutan seperti rotan, damar, dan emas hasil pendulangan tradisional rakyat. Semenjak saat itu, banyak pula kapal dagang dari Jawa dan Makassar yang mengunjungi Pasir. Candu diperkenalkan ke Pasir oleh seorang pedagang Belanda bernama Alexander van Soow.[282] Akibatnya, banyak orang mulai menjadi pemadat sehingga meresahkan sultan. Guna menyembuhkan para pemadat tersebut, sultan mengundang seorang tabib Cina bernama Ma Yun Fu. Saat perbincangan dengan tabib tersebut, sultan membuktikan kemampuannya dalam berbahasa Mandarin. Ternyata saat muda, sultan pernah belajar ilmu bela diri kepada seorang keturunan Cina bernama Han Tek Siong sehingga berkesempatan belajar bahasa Cina.[283]

Sultan Mahmud Khan Alamsyah digantikan oleh Aji Adil, saudaranya yang bergelar Sultan Adam II Aji Alamsyah (1843–1853).[284] ia dinobatkan dengan diserahi benda-benda pusaka kerajaan, seperti gong, ceret, pinggan, baki, meriam, dan lain sebagainya berdasarkan tradisi yang berlaku di Pasir semenjak pemerintahan Putri Betung. Menurut tradisi Pasir, setelah seorang raja menerima benda-benda ini barulah ia dianggap sah sebagai pewaris takhta. Peristiwa ini merupakan penobatan Raja Pasir pertama yang dihadiri oleh Residen Banjarmasin selaku wakil pemerintah kolonial. Sebelum berlangsungnya upacara, A.L. Weddik selaku residen menyerahkan hadiah persahabatan berupa peti indah berisikan selembar baju dan celana dari kain yang mahal harganya, sebilah pedang bergagang gading, dan benda-benda lainnya. Pakaian hadiah residen ini yang dikenakan sultan saat acara penobatannya.

---

281. Buku *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Timur*, halaman 12, mencantumkan bahwa tahun pemerintahannya adalah 1838–1843. Website ***http://kesultanan_pasir.tripod.com/sadurangas/id10.html*** (diunduh 22 Juli 2009) mencantumkan tahun 1815–1843 dan mengeja nama sultan sebagai Mahmud Han Alamsyah. Sumber ***http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Pasir*** (diunduh tanggal 22 Juli 2009) juga mencantumkan tahun yang sama.
282. Lihat *Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir*, halaman 160.
283. Lihat *Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir*, halaman 166–167
284. Tahun pemerintahan ini diambil dari *Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir*, halaman 169. Buku *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Timur*, halaman 12, mencantumkan tahun pemerintahan ia adalah 1844–1861. Website ***http://kesultanan_pasir.tripod.com/sadurangas/id10.html*** (diunduh 22 Juli 2009) mencantumkan 1843–1853 dan begitu pula halnya dengan ***http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Pasir*** (diunduh tanggal 22 Juli 2009).

Setelah berlangsungnya upacara penobatan, sultan disodori kontrak politik oleh Belanda yang harus ditandatanganinya. Isinya menyatakan bahwa Kesultanan Pasir mengakui kekuasaan Hindia Belanda. Selain itu, Pasir tidak diizinkan mengadakan hubungan secara langsung dengan bangsa selain Belanda. Pihak-pihak yang menjadi musuh Belanda juga akan menjadi musuh Pasir.

Bersamaan dengan masa pemerintahan Sultan Adam II, datanglah seorang pedagang Arab bernama Syekh Syarif Hamid Assegaf dari Semarang yang menjadi sahabat karib sultan. Bahkan, ia kemudian dinikahkan dengan Aji Musnah, salah seorang kemenakan sultan. Syarif Hamid kemudian diangkat sebagai menteri kerajaan dan dianugerahi gelar pangeran.

Pemerintah Belanda belakangan membenci Sultan Adam karena bantuannya terhadap perjuangan Pangeran Antasari beserta para pengikutnya. Ketika raja-raja di Kalimantan Timur diminta mengikrarkan kesetiannya kepada Belanda di hadapan Residen Banjarmasin, Sultan Pasir menolak datang.

Sultan Adam mangkat dan digantikan oleh Aji Tenggara, kemenakannya, yang bergelar Sultan Sepuh II Alamsyah (1853–1875). Ia merupakan raja yang gemar memajukan pertanian dan mengembangkan perkebunan karet di daerahnya, bahkan sultan sendiri beserta keluarganya turut berladang dan berkebun sebagai teladan bagi rakyat agar mereka meningkatkan hasil pertaniannya. Pada zaman Sultan Sepuh II ini terdapat seorang pedagang ternak kaya dari Sulawesi Selatan bernama La Basso yang melamar dan menikah dengan Puteri Aji Reinah, salah seorang keluarga raja. Dengan demikian, ia kemudian masuk dalam keluarga kaum bangsawan dan memperoleh gelar Pangeran Dipati. Pernikahan ini ditujukan pula untuk menggalang dukungan kaum pedagang Bugis dalam rangka perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Aji Timur Balam, putra Sultan Adam, menjadi sultan Pasir berikutnya dengan gelar Sultan Abdurrahman Alamsyah (1875–1890). Berbeda dengan tradisi sebelumnya saat pemilihan sultan oleh dewan adat, kali ini pengangkatan penguasa baru Pasir ditentukan berdasarkan keputusan sultan sebelumnya. Dengan kata lain, sultan menunjuk seorang putra mahkota selaku calon penggantinya. Bersamaan dengan itu, datanglah utusan pemerintah kolonial Belanda yang meyetujui tata cara baru tersebut. Kebiasaan baru ini membangkitkan ketidaksetujuan sebagian bangsawan sehingga mereka tidak mengakui pengangkatan tersebut. Akibatnya, jalannya pemerintahan

menjadi terganggu. Kendati demikian, pelantikan sultan tetap berjalan dan ia disodori serta diminta menanda tangani *Korte Verklaring* oleh Belanda.

Perpecahan yang sedang berlangsung itu dimanfaatkan baik-baik oleh pemerintah kolonial. Mereka melancarkan politik *divide et impera* dengan mendekati kalangan bangsawan yang tidak setuju terhadap pengangkatan Sultan Abdurrahman. Kalangan bangsawan tersebut dipersilakan mengajukan dan mengangkat calon lain sebagai Sultan Pasir. Pilihan jatuh kepada Aji Tiga, putra Sultan Sultan Mahmud Khan Alamsyah. Pada mulanya, Aji Tiga menolak kedudukan tersebut, tetapi akhirnya setuju diangkat sebagai Sultan Pasir. Penobatannya berlangsung pada 1885 dan selanjutnya menyandang gelar sebagai Sultan Muhammad Ali Alamsyah. Dia juga disodori *Korte Verklaring* yang isinya sama dengan yang ditandatangani oleh Sultan Abdurrahman. Akibatnya, kini terdapat dua orang sultan di Kesultanan Pasir.

Adanya dua orang sultan itu hampir memantik timbulnya perang saudara. Untunglah salah seorang bangsawan Pasir bernama Pangeran Ratu (adik lain ibu Sultan Abdurrahman) turun sebagai penengah. Disepakati bahwa kedua orang sultan harus saling mengakui satu sama lain. Wilayah kekuasaan mereka juga dibagi. Wilayah Pasir sebelah utara Sungai Kandilo menjadi wilayah kekuasaan Sultan Muhammad Ali Alamsyah sedangkan bagian selatan menjadi daerah kekuasaan Sultan Abdurrahman Alamsyah. Ditetapkan pula apabila salah seorang sultan mangkat maka Pasir akan bersatu kembali.

Sebagai pelengkap dan bahan perbandingan akan disajikan pula uraian mengenai peristiwa ini berdasarkan sumber-sumber lain. Menurut *http://kesultanan_pasir.tripod.com/sadurangas/id10.html*, sepeninggal Sultan Sepuh II, rakyat di Benua mengangkat Pangeran Aji Timur Balam sebagai raja dengan gelar Abdurrahman Alam Syah (1876–1896). Sementara itu, rakyat di Muara Pasir menobatkan Pangeran Aji Tiga sebagai raja yang bergelar Muhammad Ali (1876–1898). Sumber yang berasal dari *http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Pasir* memberikan tahun yang berbeda. Sultan Abdurrahman Alam Syah dicantumkan memerintah dari 1875–1890 sedangkan Sultan Muhammad Ali dari 1880–1897. Tampaknya sumber wikipedia juga memberikan nama dua orang penguasa Pasir yang memerintah hampir bersamaan, dan juga menyebutkan mengenai adanya dua orang sultan di Pasir yang menandai pecahnya kerajaan tersebut. Buku *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Timur* halaman 16–17 memberikan keterangan berbeda dan tidak

menyebutkan perpecahan kerajaan ini. Sultan Adil Khalifatulmukminin, yang tampaknya mengacu kepada Sultan Sepuh II[285] dalam *http://kesultanan_pasir.tripod.com/sadurangas/id10.html,* digantikan oleh putra Sultan Makhmud Khan yang bergelar Sultan Muhammad Ali Khalifatulmukminin. Ia dikenal sebagai seorang raja yang taat beragama, ia pun memberikan keringanan kepada para pegawainya saat bulan puasa. Karena itu, perintah residen sering terbengkalai saat bulan puasa. Tentu saja residen tidak menyukai hal ini, apalagi sultan memberikan perlindungan bagi pengikut Pangeran Antasari yang memberontak terhadap Belanda. Asisten Residen Belanda mengetahui hal ini dan meminta sultan berangkat bersama-sama ke Banjarmasin untuk mempertanggung jawabkan hal ini. Dikarenakan saat itu masih bulan puasa, sultan menolak permintaan tersebut. Residen menjadi marah mendengar pembangkangan ini dan sebulan kemudian dengan disertai sepasukan tentara ia mendatangi tempat kediaman sultan. Setibanya di istana, residen menegur sultan dan menuduhnya tidak layak memerintah serta terlalu banyak membangkang terhadap Belanda. Mendengar teguran itu, sultan menjadi marah dan menyatakan bahwa sebagai penguasa ia berhak menentukan sendiri nasib kerajaannya. Karena penentangannya terhadap pemerintah Belanda, sultan ditangkap dan diasingkan ke Banjarmasin. Sumber yang sama juga menyebutkan bahwa penggantinya adalah Sultan Abdurrahman yang merupakan putra almarhum Sultan Adam. Di masa kekuasaan sultan ini, Belanda mewajibkan pembayaran pajak bagi rakyat Pasir yang sudah dewasa.

Pada 1890, Sultan Abdurrahman Alamsyah mangkat sehingga Sultan Muhammad Ali Alamsyah menjadi satu-satunya penguasa seluruh Pasir. Sebelum menjadi sultan, ia mempunyai tanah lungguh di Samuntai, Modang, dan Buru yang kaya akan hasil bumi bernilai tinggi, seperti madu, rotan, damar, dan lain sebagainya. Hasil bumi tersebut diperdagangkan oleh putranya, Pangeran Perabu, hingga ke Singapura serta Hongkong. Ia tidak bersedia menjualnya kepada para pedagang di dalam negeri karena di pasaran luar negeri berbagai hasil bumi tersebut jauh berlipat-lipat harganya.

Keberhasilan dalam perniagaan ini menjadikan beberapa pedagang di kawasan tersebut merasa iri hati. Salah seorang di antara mereka, La Maraja, seorang saudagar kaya yang banyak menjalin hubungan dagang dengan Banjarmasin, Surabaya, Gresik, Batavia, dan Singapura, mengadukan sultan kepada Residen Julius Broers selaku kepala

285. Di halaman 17 buku *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme* disebutkan nama Sultan Sepuh Adil Khalifatulmukminin. Dengan demikian sultan ini tentunya sama dengan Sultan Sepuh II.

Afdeeling Kalimantan Selatan dan Timur. Residen melayangkan teguran kepada sultan, yang antara lain mempertanyakan bagaimana sultan dapat memerintah dengan baik apabila sibuk dengan usahanya berdagang. Selain itu, perjanjian dagang dengan Inggris di Singapura dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap *Korte Verklaring*. Sultan menjawab bahwa ia tidak pernah mengabaikan tugasnya dan usaha dagang itu ditangani oleh putranya. Ia menyatakan bahwa tidak pernah ia mengadakan perjanjian dagang dengan Inggris di Singapura. Setelah menerima jawaban dari sultan, residen bermaksud mengadakan pemeriksaan sendiri dan mengirim utusannya, tetapi karena saat itu bulan puasa, sultan menolak menemui utusan tersebut. Hal ini disalahpahami sebagai upaya sultan mengulur-ulur waktu guna menyembunyikan kebenaran. Selain itu, para bangsawan pemadat yang membenci sultan juga memberikan laporan palsu sehingga menambah kesan buruk Belanda terhadapnya. Utusan residen Belanda kemudian menulis laporan bahwa sultan membenci pemerintah kolonial sehingga layak dilengserkan. Itulah sebabnya, pada 1897 ia diberhentikan sebagai sultan dan diasingkan ke Banjarmasin.

Karena Sultan Muhammad Ali Alamsyah telah diasingkan ke Banjarmasin sehingga terjadi kekosongan pemerintahan, dewan adat lalu memilih kemenakan Sultan Abdurrahman yang bernama Pangeran Nata sebagai sultan berikutnya dengan gelar Sultan Sulaiman II Alamsyah, tetapi baru dua bulan memerintah, dia mengundurkan diri dan menyatakan kepada residen bahwa ia lebih senang bertani. Para bangsawan dan rakyat Pasir menjatuhkan pilihannya kepada Pangeran Ratu Raja Besar, putra Sultan Adam, sebagai penerus takhta Kesultanan Pasir dengan gelar Sultan Ratu Raja Besar Alamsyah (1898–1900) [286]. Setelah menyerahterimakan kekuasaan kepada sultan baru, Pangeran Nata Panembahan Sulaiman pulang kembali ke kampung halamannya di Selinau.

Sultan Ratu Raja Besar memercayakan urusan pemerintahan kepada para menterinya, terutama Pangeran Mangku Jaya Kesuma. Ia menyerahkan urusan pemerintah dengan Residen Banjarmasin kepada menteri utama ini. Pangeran Mangku Jaya Kesuma adalah menantu La Maraja, saudagar yang pernah mengadukan Sultan Muhammad Ali Alamsyah kepada Residen J Broers. Karena kerap dipercaya mengurusi

---

286. Tahun pemerintahan ini diambil dari *Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir*, halaman 191 dan *http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Pasir* (diunduh pada 22 Juli 2009) **k**arena *website http://kesultanan_pasir.tripod.com/sadurangas/id10.html* (diunduh pada 22 Juli 2009) tidak mencantumkan nama sultan ini sama sekali. Buku *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme* mencantumkan riwayat sultan ini, tetapi tidak menyebutkan tahun pemerintahannya.

masalah pemerintahan dengan residen, timbul ambisi dalam diri Pangeran Mangku Jaya Kesuma untuk menjadi sultan. Relasi antara Pangeran Mangku Jaya Kesuma dengan Residen J. Broers sudah sedemikian eratnya. Baik pangeran maupun mertuanya kerap membawakan oleh-oleh bagi istri residen. Mengingat kedekatan hubungan ini, tanpa malu-malu Pangeran Mangku menyatakan niatnya untuk menjadi sultan di hadapan residen. Ternyata, residen juga mendukung rencana ini.

Residen, Pangeran Mangku, beserta mertuanya merancang siasat untuk mendongkel Sultan Pangeran Ratu Raja Besar dari kekuasaannya. Suatu ketika, sultan dan menteri kepercayaannya itu menghadap residen di Banjarmasin. Residen menyarankan agar sultan membuat surat kuasa kepada Pangeran Mangku Jaya Kesuma untuk mengurusi masalah-masalah yang berkaitan dengan pemerintah kolonial sehingga sultan tidak perlu sering pulang balik dari Pasir ke Banjarmasin. Sultan menyetujui anjuran residen mengenai pembuatan surat kuasa. Sebagai tindak lanjut, residen membacakan sebuah konsep surat yang disetujui oleh sultan. Keesokan harinya baru dilakukan penandatanganannya dengan disaksikan oleh residen. Sultan menandatangani dan membubuhkan cap kerajaan tanpa membacanya lagi. Setelah itu, ia beserta menteri kepercayaannya pulang kembali ke istananya.

Tak berapa lama kemudian, tersiar kabar bahwa sultan telah mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaannya kepada menterinya, Pangeran Mangku Jaya Kesuma. Berita ini meresahkan para bangsawan Pasir yang lebih berhak menaiki takhta apabila sultan mangkat atau mengundurkan diri. Mereka menghadap sultan guna menanyakan kebenaran berita tersebut. Sultan menyangkalnya dan mengatakan bahwa ia hanya menandatangani surat kuasa pelimpahan wewenang kepada Pangeran Mangku untuk mengurusi relasi dengan pemerintah kolonial. Mendengar hal itu, para bangsawan menjadi lega. Beberapa hari setelah itu, sultan menerima salinan surat yang ditandatanganinya. Betapa terkejutnya sultan karena isinya tidak sama dengan konsep yang telah dibacakan sebelumnya. Ia baru menyadari telah ditipu oleh residen dan menteri kepercayaannya serta menyesali kelalaiannya tersebut. Sultan segera memanggil kaum kerabatnya yang lebih berhak mewarisi takhta dan menjelaskan hal ihwal penipuan tersebut. Mereka menjadi marah kepada residen dan Pangeran Mangku Jaya Kesuma yang telah mengkhianati rajanya.

Demi melancarkan serah terima kekuasaan, Belanda mengirim tiga kapal perang dengan asisten residen sebagai wakil pemerintah Belanda. Pangeran Nata Panembahan

Sulaiman yang sebelumnya pernah ditunjuk sebagai penguasa Pasir menjelaskan bahwa serah terima ini tidak sah. Ia memperlihatkan silsilah raja-raja Pasir dan menerangkan siapa saja yang lebih berhak menjadi sultan berdasarkan adat negeri itu. Pangeran Nata mendesak agar acara itu diundur saja. Residen menyatakan bahwa serah terima itu tidak dapat dibatalkan karena didasari oleh surat yang ditandatangani sultan sendiri dan telah disetujui oleh gubernur jenderal di Batavia. Bahkan, residen datang sendiri ke Pasir dengan disertai sepasukan tentara. Akibatnya, sultan terpaksa turun takhta dan menyerahkan kekuasaan kepada Pangeran Mangku Jaya Kesuma.

Setelah menaiki tampuk kekuasaan di Kesultanan Pasir, Pangeran Mangku Jaya Kesuma menyandang gelar Sultan Ibrahim Khaliluddin (1900–1906)[287]. Pemerintahan sultan baru ini tidak berjalan lancar karena kaum bangsawan yang lebih berhak atas takhta Pasir tidak menyetujui pengangkatannya. Banyak di antara rakyat yang tidak menyukai sultan karena kekuasaannya diperoleh melalui cara licik. Akibatnya, rakyat mogok membayar *belasting* (pajak). Di antara kaum bangsawan penentang sultan yang paling berpengaruh adalah Pangeran Panji Nata Kesuma, putra almarhum Sultan Abdurrahman yang pernah menjabat sebagai menteri pada masa Sultan Pangeran Ratu Raja Besar; Aji Nyesei yang bergelar Pangeran Jaya Kesuma Ningrat, putra Pangeran Nata Panembahan Sulaiman; dan Panglima Sentik. Untuk mengatasi pembangkangan rakyat, sultan mengangkat saudaranya menjadi menteri kerajaan, tetapi rakyat lebih mematuhi Pangeran Panji Nata Kesuma.

Sultan menyarankan kepada pemerintah kolonial Belanda agar mengangkat Aji Nyesei sebagai putra mahkota atau sultan muda demi melemahkan pengaruh Pangeran Panji. Siasat ini berhasil karena sebagian pengikut Aji Nyesei menghentikan perlawanannya. Kendati demikian, sultan kembali khawatir karena membesarnya pengaruh Aji Nyesei. Sultan meminta kembali surat pengangkatan Aji Nyesei sebagai raja muda dengan alasan hendak dibuatkan salinannya oleh residen. Namun, setelah beberapa kali menanyakannya kepada sultan, selalu dijawab bahwa residen belum mengembalikan surat itu.

c. Berakhirnya Kesultanan Pasir

Aji Nyesei merasa dipermainkan oleh sultan. Oleh karenanya, ia memutuskan bergabung dengan perlawanan Pangeran Panji. Pertentangan antara kedua pihak makin

---

287. *http://kesultanan_pasir.tripod.com/sadurangas/id10.html* mencantumkan tahun 1899–1908, *http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Pasir* mencantumkan 1900–1906.

merunciing sehingga sultan merasa tidak sanggup lagi menguasai keadaan. Ketidak-sudian rakyat membayar *belasting* (pajak) mengakibatkan macetnya pendapatan kerajaan. Kenyataan ini menimbulkan citra negatif di mata pemerintah kolonial Belanda selaku atasan sultan, yang menganggapnya tidak becus memerintah. Sultan mengumpulkan kaum kerabat dan tokoh-tokoh yang memihak kepadanya untuk membicarakan mengenai kondisi saat itu. Sultan berpendapat bahwa ia tidak mungkin terus menerus mempertahankan kedudukannya sebagai Sultan Pasir. Karena itu, ia menyarankan untuk menyerahkan kerajaan kepada pemerintah Hindia Belanda dan sesudah itu menerima ganti kerugian. Dengan kata lain, sultan hendak menjual kerajaannya kepada Belanda. Meskipun demikian, sebelum usulan ini diajukan kepada pemerintah Belanda, perlu dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan para bangsawan yang berhak atas takhta.

Sultan kemudian mengumpulkan para pembesar dan bangsawan Pasir. Pada pertemuan itu dia menjelaskan berbagai persoalan yang mungkin timbul karena dikeluarkannya aturan kerja rodi yang mewajibkan rakyat bekerja paksa selama 20 hari setiap tahun dan membayar pajak. Apabila peraturan ini diterapkan, rakyat akan menentang sehingga berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari. Oleh karenanya, sultan mengusulkan untuk menyerahkan Kerajaan Pasir kepada pemerintahan Hindia Belanda dan menerima ganti rugi berupa uang. Aji Nyesei, Pangeran Panji, dan bangsawan lainnya tidak setuju dengan hal itu karena Kerajaan Pasir merupakan pusaka milik leluhur yang harus dipertahankan. Sebaliknya, para pejabat dan bangsawan yang memihak sultan, seperti Pangeran Mas dan Pangeran Dipati, setuju dengan hal itu. Selanjutnya, secara sepihak sultan melayangkan surat kepada residen di Banjarmasin mengenai penyerahan Kerajaan Pasir. Beberapa waktu kemudian tibalah surat balasan dari gubernur jenderal yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial setuju menerima penyerahan Pasir dan memberikan *schadeloosstelling* (ganti rugi) kepada sultan dan kaum bangsawan asalkan sultan, pangeran, dan para menteri bersedia melepaskan jabatan serta tuntutannya atas Kerajaan Pasir.

Mendengar bahwa sultan telah menjual Kerajaan Pasir, Pangeran Panji, Panglima Sentik, dan bangsawan lainnya menentang penyerahan tersebut. Mereka lalu merencanakan gerakan perlawanan. Meskipun demikian, rencana penyerahan kerajaan ini berjalan terus. Setelah surat tanggapan dari gubernur jenderal di Batavia

diterima sultan, saudaranya yang bernama Pangeran Menteri, dan La Maraja, mertuanya, berlayar ke Banjarmasin guna mengadakan pembicaraan dengan residen. Isi pembicaraan itu tidak seorangpun yang tahu kecuali mereka sendiri. Pada Oktober 1908, residen memberitahukan bahwa uang ganti rugi dengan jumlah keseluruhan fl377.267 telah siap dan akan dikirim ke Tanah Grogot untuk diserahkan kepada sultan, menteri, beserta para bangsawan yang berhak atas takhta Pasir. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut.[288]

	Nama penerima ganti rugi	**Besarnya ganti rugi dalam Gulden (fl.)**
1	Sultan Ibrahim Khaliluddin	101.945
2	Pangeran Nata Panembahan Sulaiman	85.000
3	Aji Nyesei (Raja Muda)	66.267
4	Pangeran Panji bin Sultan Abdurrahman	28.855
5	Pangeran Prabu dari kampung Semuntai	25.200
6	Pangeran Menteri dari kampung Pasir	10.000
7	Pangeran Dipati dari kampung Pasir	10.000
8	Pangeran Mangku Tg. Aru dari kampung Landing	10.000
9	Pangeran Mas	10.000
10	Pangeran Singa Jaya dari kampung Muara Adang	10.000
11	Pangeran Ratu Raja Besar	10.000
12	Pangaran Suria Nata dari kampung Lempesu	10.000
total		377.267

Wakil pemerintah Belanda menjelaskan terlebih dahulu bahwa setelah diterimanya uang itu, mereka semua akan melepaskan haknya atas Kesultanan Pasir. Para menteri secara otomatis meletakkan jabatannya dan kaum bangsawan tidak dapat lagi menuntut haknya. Setelah itu, dikeluarkan akte penyerahan dan selembar dokumen yang harus ditandatangani masing-masing pihak sesudah menerima uang ganti ruginya. Ketika tiba giliran Pangeran Panji, ia sangat marah dan mengatakan bahwa dirinya tidak sudi menyerahkan atau menjual Kerajaan Pasir kepada pemerintah Hindia Belanda. Mendengar pernyataannya itu, wakil pemerintah Belanda menjadi marah dan menyatakan bahwa keluarganya yang lain telah bersedia menandatangani

288. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Timur*, halaman 24–25.

penerimaan ganti rugi. Bila Pangeran Panji tidak bersedia menandatanganinya maka uang itu akan diserahkan kepada orang lain. Sultan Ibrahim turut berbicara dan menerangkan bahwa dalam perundingan dengan para menteri beserta kaum bangsawan, Pangeran Panji telah menyetujui penyerahan tersebut. Pangeran Panji menyangkalnya sehingga terjadi pertengkaran dengan Sultan Ibrahim. Wakil pemerintah Belanda menengahinya dan Pangeran Panji yang merasa kesal lalu meninggalkan pertemuan dengan tidak menerima uang ganti rugi sepeserpun dari Belanda. Sebagai gantinya uang itu lalu diserahkan kepada Pangeran Ratu Agung Luasi. Ketika tiba giliran Aji Nyesei untuk menandatanganinya, sejenak ia tampak ragu dan meminta pertimbangan ayahnya, Pangeran Nata Panembahan Sulaiman. Dengan menerima uang ganti rugi, berarti ia meletakkan jabatannya selaku raja muda, tetapi karena banyak pihak telah menerimanya dan khawatir uang itu akan jatuh ke tangan orang lain bila ia menolak, dengan terpaksa Aji Nyesei membubuhkan tandatangannya. Begitu semua pihak yang berhak telah selesai menerima bagiannya masing-masing, berakhirlah Kerajaan Pasir untuk selama-lamanya.

d. Perlawanan-perlawanan Terhadap Belanda

Penyerahan kerajaan ini masih memendam ketidakpuasan, terutama dari kalangan Pangeran Panji dan pengikutnya sehingga ia tidak mau menerima uang ganti rugi dan meninggalkan pertemuan. Pangeran Panji kemudian mengumpulkan pengikutnya, seperti Panglima Sentik, Singa Negara dari Pasir Tengah, kepala suku Dayak Kaka Degu Aji Mujub, dan lain sebagainya. Ia juga menjalin hubungan dengan perkumpulan Sarikat Islam (SI) yang saat itu sedang melebarkan sayapnya di berbagai penjuru Kepulauan Nusantara. Bersama-sama dengan warga suku Dayak, Pangeran Panji berniat mengadakan perlawanan terhadap Belanda.

Pada 1912, berita ini tersiar juga ke telinga Belanda. Karenanya, pemerintah kolonial mengirimkan pasukannya untuk menangkap Pangeran Panji beserta para pengikutnya. Niat Belanda ini diketahui oleh Pangeran Panji sehingga ia beserta saudaranya, Aji Moko dan Aji Bensono, beserta Panglima Sentik menyiapkan perlawanan. Pagi-pagi sekali, mereka telah bersiap siaga di tepi Sungai Kandilo guna menghadang kedatangan pasukan Belanda. Begitu perahu-perahu Belanda mendarat tidak jauh dari tempat persembunyian mereka, dengan sekonyong-konyong keluarlah pasukan Pangeran Panji yang bersenjatakan tombak, mandau, sumpitan, dan lain

sebagainya. Karena persenjataan yang tidak seimbang, Pangeran Panji berhasil ditangkap dan diasingkan ke Banjarmasin.

Dengan diasingkannya Pangeran Panji, perlawanan dilanjutkan oleh pengikutnya yang bernama Matjanang, perlawanan berakhir saat ia tertangkap. Perlawanan lainnya dilakukan oleh saudara Pangeran Panji pada 1914. Perlawanan ini bernasib sama dengan perlawanan-perlawanan sebelumnya. Pada Juni 1915, kembali pecah perlawanan bersenjata di Pasir yang makin meluas di bawah pimpinan beberapa pemuka suku Dayak. Mereka bersumpah menjalankan amanat Pangeran Panji untuk mengusir Belanda dari Pasir. Sementara itu, gerakan Sarikat Islam mulai tersiar ke Pasir dan mendapatkan pengikut pula dari kalangan bangsawan. Organisasi itu menanamkan semangat kebangsaan dan kesadaran politik. Banyak kaum bangsawan yang memasuki organisasi tersebut dan bahkan mantan sultan, Sultan Ibrahim, bersedia menjadi Presiden Sarikat Islam di Tanah Grogot. Dengan bergabungnya Aji Nyesei dan Pangeran Ratu Raja Besar, organisasi itu makin berkembang. Tumbuhnya kesadaran politik menyadarkan kaum bangsawan mengenai pandangan Pangeran Panji yang dahulu tidak bersedia menyerahkan Kerajaan Pasir. Kaum bangsawan mulai memahami bahwa mereka selama ini hanya diperalat oleh Belanda. Karena itu, sultan yang dulu menjual kerajaannya, kini berbalik menentang Belanda. Dengan adanya gerakan perlawanan pengikut Pangeran Panji serta perjuangan melalui organisasi Sarekat Islam pimpinan Sultan Ibrahim, roda pemerintahan Belanda di Pasir tidak berjalan sama sekali.

Belanda segera mengetatkan patrolinya dan berhasil menangkap Wana beserta Panglima Singa yang merupakan tokoh-tokoh perlawanan. Pada November 1915, didatangkan pasukan dari Banjarmasin untuk memadamkan pemberontakan di bawah pimpinan Andon Ngoko dan Andin Gedang. Selanjutnya, pada Desember 1915 pasukan tambahan didatangkan dari Jawa. Di tahun berikutnya, Belanda menangkapi tokoh-tokoh SI dan dengan keputusan no.43 gubernur jenderal tertanggal 19 November 1917, partai SI dinyatakan terlarang serta dibubarkan. Seluruh pengurusnya dinyatakan bersalah. Selanjutnya, berdasarkan keputusan no.25 tanggal 31 Juli 1918, dijatuhkan hukuman sebagai berikut kepada bekas sultan dan para bangsawan yang terlibat dalam SI:

- Sultan Ibrahim Khaliluddin diasingkan seumur hidup ke Teluk Betung.
- Pangeran Menteri, saudara sultan, diasingkan seumur hidup ke Padang.

- Pangeran Perwira diasingkan 10 tahun ke Banyumas.
- Aji Muyub dijatuhi hukuman pengasingan ke Bengkulu.
- Aji Nyesei diasingkan 10 tahun ke Banjarmasin.
- Pangeran Singa diasingkan selama 10 tahun ke Garut.
- Andin Dek dan Andin Ngoko dihukum masing-masing 10 tahun serta diasingkan ke Aceh dan Sawahlunto
- Andi Gedang, Sebaya, dan Wana dijatuhi hukuman masing-masing 10 tahun serta diasingkan ke Semarang, Cilacap, dan Blitar.

Semasa berada di pengasingannya di Teluk Betung, sultan menderita sakit sehingga dipindahkan ke Cimahi. Penyakit sultan bertambah parah dan ia meninggal di sana. Pangeran Menteri juga wafat di pembuangannya di Padang. Seluruh pejuang-pejuang lain juga wafat di tempat pengasingannya, kecuali Aji Nyesei yang dapat kembali ke Pasir dengan selamat setelah masa hukumannya habis.

e. Sistem Pemerintahan

Kesultanan Pasir telah memiliki undang-undang yang disebut *Boyan Bungo Nyaro* atau *Jalan Bunga Keberuntungan.* Pada undang-undang tersebut disebutkan bahwa penguasa tertinggi di Pasir adalah seorang sultan, yang dibantu oleh empat orang menteri. Sultan Pasir dipilih oleh dewan agama beserta adat. Kesultanan dibagi menjadi beberapa wilayah yang dikepalai oleh seorang Pangeran. Ia dibantu oleh yang empat orang yang disebut kapitan. Selanjutnya, masing-masing wilayah dibagi lagi menjadi beberapa negeri yang dikepalai oleh seorang penggawa. Ia dibantu oleh empat orang polisi. Masing-masing negeri masih dibagi lagi menjadi beberapa desa dan dikepalai oleh seorang *pembakal* (kepala kampung).

Boyan Bungo Nyaro juga menyebutkan syarat-syarat seseorang dapat dipilih menjadi sultan, yakni bergelar bangsawan aji, sehat jasmani beserta rohani, mahir silat atau ilmu bela diri, dan taat menjalankan ajaran agama.

Berdasarkan undang-undang tersebut, dapat dikenal pula gelar-gelar kebangsawanan di Kesultanan Pasir, seperti *aji*, *anden*, *awang*, dan lain sebagainya. Undang-undang itu juga mengatur mengenai hukuman berbagai pelanggaran serta pembagian warisan.

VI. SAMBALIUNG

a. Berdiri dan Berkembangnya Kerajaan Sambaliung

Kini terletak di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Kerajaan ini merupakan pecahan Kerajaan Berau yang diakibatkan oleh politik *divide et impera* (pecah belah) Belanda. Sebelumnya, kesultanan ini pernah bernama Tanjung yang selanjutnya diganti menjadi Batu Putih, dan akhirnya Sambaliung pada 1849. Penguasa pertama kerajaan ini adalah Raja Alam yang bergelar Sultan Alimuddin (1830–1834, 1837–1844). Menurut catatan sejarah, penguasa Berau ke-9 (lihat bagian tentang Kerajaan Berau), Aji Dilayas, mempunyai dua orang putra, yakni Pangeran Tua dan Pangeran Dipati. Agar mereka tidak memperebutkan takhta, disepakati bahwa keturunan kedua orang pangeran itu akan memerintah secara bergantian. Ternyata belakangan kesepakatan ini justru menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Berdasarkan silsilah Berau, Raja Alam berasal dari garis keturunan Pangeran Tua.

Raja Alam, yang merupakan penguasa pertama Sambaliung merupakan salah seorang penentang Belanda yang gigih. Sebelumnya, ia telah menyadari niat Belanda yang hendak menanamkan pengaruh di kerajaannya dengan melakukan politik pecah belah sehingga berujung pada terpecahnya Kerajaan Berau menjadi dua. Demi menggagalkan rencana Belanda ini, Raja Alam mengadakan persekutuan dengan pejuang Bugis, Sulu, dan Makassar. Sebagai persiapan dibangunlah sebuah perbentengan yang kuat di Batu Putih, Tanjung Mangkalihat. Demi menghadapi Raja Alam, Belanda menyiagakan angkatan lautnya semenjak April 1834. Belanda mulai melancarkan serangannya dengan dalih pengaduan Aji Kuning II, Raja Gunung Tabur, yang melaporkan bahwa Raja Alam beserta pejuang Bugis dan Sulu–yang disebutnya bajak laut–kerap mengganggu keamanan di perairan Kalimantan Timur dengan membajak kapal Belanda. Menurut salah satu sumber, sebelumnya Belanda mengabarkan bahwa kapal-kapalnya telah dibajak. Sultan Aji Kuning II yang menganggap Sambaliung sebagai saingannya melaporkan kepada Belanda bahwa yang melakukan pembajakan adalah para pengikut dan sekutu Raja Alam, tentunya dengan disertai berbagai bukti palsu. Belanda bukannya tidak mengetahui kebohongan Sultan Aji Kuning II ini karena sebenarnya tidak ada kapal dagang Belanda yang dibajak. Belanda memang sengaja memancing di air keruh dengan melontarkan tuduhan palsu ini.[289]

---

289. Lihat *http://www.bongkar.co.id/khas-kaltim/cerita-khas-johansya-balham/850-sambaliung-berontak.html* (diakses pada 25 Juli 2009).

Terlepas dari benar dan tidaknya tuduhan ini, pada September 1834 Belanda mengirimkan ekspedisi penghukuman terhadap Raja Alam yang terdiri dari empat buah kapal perang dan sejumlah pasukan di bawah pimpinan Kapten Laut Anemaelt, yang didaratkan di Batu Putih guna menyerang pusat pertahanan Raja Alam. Dengan dibantu para pejuang Bugis dan Sulu, Raja Alam beserta menantunya, Syarif Dakula yang berasal dari Sulu melakukan perlawanan dengan gigih. Karena persiapan Belanda yang lebih matang, pasukan Raja Alam terdesak ke Tanjung dan bertahan di Muara Lasan. Di tempat inilah Raja Alam dikalahkan dan ditawan oleh Belanda.

Agar Syarif Dakula beserta para pengikutnya bersedia meletakkan senjatanya, Belanda menjadikan Raja Alam sebagai sandera. Belanda kemudian memerintahkan Syarif Dakula agar datang ke kapal perang Belanda dengan keselamatan Raja Alam sebagai jaminannya. Ketika Syarif Dakula beserta keluarganya hadir di kapal perang Belanda untuk berunding, ia tetap menolak bekerja sama sehingga akhirnya ditangkap dan hendak diasingkan ke Makassar bersama Raja Alam. Kendati demikian, Syarif Dakula melakukan perlawanan hingga tewas.[290] Jenazahnya kemudian dibuang ke laut. Istri Syarif Dakula bernama Pangeran Ratu Ammas Mira yang setia kepada suaminya lalu melompat ke laut bersama anaknya yang masih kecil, tetapi mereka berdua dapat diselamatkan. Sumber lain menyebutkan bahwa Syarif Dakula dijatuhi hukuman gantung oleh Belanda.[291] Masih ada sumber yang menyebutkan bahwa menurut cerita Raja Alam kepada keturunannya, Syarif Dakula mengamuk di kapal dan setelah melukai beberapa serdadu Belanda ia melompat ke laut, namun hanya anak beserta istrinya yang berhasil diselamatkan. Menurut laporan J. Hagerman Joz yang merupakan versi penjajah, Syarif Dakula mengonsumsi candu dan dalam keadaan mabuk melompat ke laut bersama anak serta istrinya.[292] Karena dianggap berbahaya, antara 1834–1837 Raja Alam ditawan dan diasingkan ke Makassar.

Setelah Raja Alam diasingkan, Belanda mengadakan perjanjian dengan Kesultanan Gunung Tabur pada 27 September 1834 yang isinya berupa penyerahan pengelolaan Sambaliung kepada Kesultanan Gunung Tabur dengan Pangeran Muda (Pangeran Mangkubumi) dari Kutai, keluarga istri Raja Alam, sebagai pelaksananya. Alasan dipilihnya pangeran ini disebabkan oleh kacaunya kawasan tersebut sepeninggal Raja

290. Lihat *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Timur*, halaman 93–94
291. Lihat *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX,* halaman 187–188.
292. Lihat *Calon Pahlawan Nasional Dari Kabupaten Berau Kalimantan Timur, Sejarah Perjuangan Raja Alam (Sultan Alimuddin)*, halaman 30.

Alam. Para pengikut Syarif Dakula dan Pangeran Petta terus menerus mengacaukan keamanan, bahkan Muara Bangun, tempat kedudukan sultan Gunung Tabur diserang oleh para pejuang-pejuang Sulu dan Bugis. Itulah sebabnya, urusan pemerintahan Sambaliung diserahkan kepada pangeran asal Kutai yang masih kerabat Raja Alam tersebut. Dengan demikian, diharapkan kemarahan rakyat dan pengikut Raja Alam dapat diredakan.

Karena kerusuhan tidak kunjung mereda, Sultan Aji Kuning II dari Gunung Tabur mengajukan permohonan agar Raja Alam dapat dikembalikan ke Sambaliung. Belanda ternyata menyetujui pemulangan Raja Alam ke negerinya pada 15 September 1836. Setahun kemudian, tepatnya 24 Juni 1837, Raja Alam beserta keluarganya diizinkan kembali ke Batu Putih dengan syarat bahwa ia mengakui kekuasaan pemerintah Hindia Belanda dan bersedia menjadi bawahan Kesultanan Gunung Tabur. Kendati demikian, Raja Alam masih tetap tidak sudi tunduk kepada Belanda yang selama tujuh tahun terus menerus membujuknya agar tak lagi memusuhi mereka. Sultan Gunung Tabur sendiri tidak dapat melakukan apa-apa meski Raja Alam menolak menjadi bawahan kerajaannya karena ia telah sadar bahwa semua ini merupakan taktik adu domba Belanda.[293] Alasan lain adalah Sultan Aji Kuning meyadari bahwa Raja Alam adalah keturunan ke-13 dari Aji Raden Suryanata Kesuma, pendiri Kerajana Berau, sedangkan dirinya adalah keturunan ke-14. Jadi secara garis keturunan, Raja Alam lebih tua dibandingkan dirinya. Menurut adat istiadat, jika berani menyakiti kerabat yang lebih tua akan terkena tulah. Selain itu, Raja Alam telah menjadi mertuanya karena sepeninggal Syarif Dakula, jandanya yang bernama Pangeran Ratu Ammas Mira, putri Raja Alam, menikah dengan Sultan Aji Kuning II.

Ia lalu memindahkan pusat pemerintahannya dari Batu Putih ke Tanjung Redeb dan akhirnya kembali lagi ke Batu Putih. Karena terus menerus gagal menarik Raja Alam, akhirnya pada 1844 Belanda mengalah dan mengakui keberadaan Kesultanan Sambaliung, tetapi sultan tetap tidak bersedia menerima pengakuan ini karena sama saja dengan menempatkan dirinya di bawah kendali pemerintah kolonial Belanda. Berkat perjuangan pantang mundurnya menentang penjajah, namanya diabadikan sebagai nama Batalion 613 Raja Alam yang berkedudukan di Tarakan. Penguasa

---

293. Lihat *Calon Pahlawan Nasional Dari Kabupaten Berau Kalimantan Timur, Sejarah Perjuangan Raja Alam (Sultan Alimuddin)*, halaman 31.

Sambaliung yang selama hidupnya gigih melawan Belanda ini wafat pada 7 Juli 1848 dan dimakamkan di Sungai Rindang, dekat Batu Putih.

Selama hidupnya, Raja Alam merupakan seorang tokoh yang dekat dan dicintai rakyatnya. Sebagai contoh, sewaktu orang Dayak Punan dari Sungai Kelay menemukan tambang emas, belum ada seorangpun yang diizinkan mengunjunginya kecuali Raja Alam. Ini memperlihatkan betapa besarnya kepercayaan mereka kepadanya.[294] Sumber daya alam yang dihasilkan negerinya dibagi secara merata dan adil kepada rakyatnya. Dia membangun armada lautnya sehingga sanggup bertempur dengan gagah berani melawan penjajah.

Raja Alam digantikan oleh putranya, Sultan Hadi Jalaluddin, yang memerintah semenjak 1844 hingga 1852. Menjelang masa akhir pemerintahannya, yang paling banyak berpengaruh adalah saudaranya, Asyik Syarafuddin, putra Raja Alam dengan seorang putri Bugis. Ketika Sultan Hadi Jalauddin meninggal, ia diangkat sebagai Raja Sambaliung yang baru. Pada saat bersamaan, putra Raja Alam lainnya, Sultan Bongkoch tidak bersedia bekerja sama dengan Belanda dan masih terus melakukan gangguan terhadap kapal-kapal Belanda di perairan Berau dengan dibantu oleh para pejuang Bugis dan Sulu. Sumber-sumber Belanda menjuluki mereka sebagai bajak laut atau perompak. Sultan Asyik Syarafuddin memerintah hingga 1869, dan selanjutnya yang menjadi raja-raja Sambaliung adalah Sultan Adil Jalaluddin (1869–1881), Sultan Bayanuddin (1881–1902) dan penguasa Sambaliung terakhir, Sultan Muhammad Aminuddin (1902–1960).

b. Kesultanan Sambaliung Semasa Penjajahan Jepang dan Setelah Proklamasi Kemerdekaan

Setelah menghancurkan lapangan terbang Belanda di Tarakan dan Samarinda, bala tentara Jepang menduduki tambang minyak Tarakan pada Januari 1942. Selanjutnya, Tanjung Redeb dan Tanjung Selor jatuh ke tangan Jepang. Satu demi satu bekas wilayah Hindia Belanda dapat dicaplok oleh Jepang. Akhirnya, pemerintah kolonial bertekuk lutut di hadapan kedigdayaan bala tentara Jepang pada 8 Maret 1942. Pada mulanya, Jepang dianggap pembebas oleh rakyat, tetapi kenyataan berbicara lain. Kehidupan rakyat malah tambah menderita dan terjadi kelangkaan barang di mana-mana, bahkan Jepang memaksa rakyat menyerahkan bahan-bahan

294. Lihat *Calon Pahlawan Nasional Dari Kabupaten Berau Kalimantan Timur, Sejarah Perjuangan Raja Alam (Sultan Alimuddin)*, halaman 32.

makanan, seperti padi, ayam, telur, dan minyak. Mereka membayarnya dengan mata uang kertas Jepang yang tak bernilai di mata rakyat.

Jepang yang telah menduduki Sambaliung dan Gunung Tabur kini menciptakan suatu sistem pemerintahan yang tidak jauh berbeda dengan Belanda. Sebagai pengganti kontrolir, mereka mengangkat seorang *bunkenkarikan* yang bertugas mengurusi pemerintahan sipil di daerah jajahannya. Sultan Sambaliung masih dipertahankan kedudukannya oleh Jepang dan demikian pula dengan pegawai-pegawai pemerintahan lainnya. Meskipun demikian, sultan sendiri tidak dapat melakukan apa-apa terhadap kesewenangan-wenangan Jepang terhadap rakyat. Dalam menjalankan roda pemerintahannya pada zaman Jepang, Sultan Sambaliung dibantu oleh dua orang asisten wedana, yakni Asisten Wedana Sambaliung dan Asisten Wedana Talisayan.

Rakyat dipaksa Jepang menyerahkan bahan pangan dan pakaian serta mengerahkan tenaga demi kepentingan Jepang. Para pemuda diwajibkan memasuki organisasi semi-militer bernama *seinendan* guna membela Jepang dalam perang. Penyerahan paksa bahan pangan itu menyebabkan kelaparan dan kekurangan yang parah bagi rakyat Sambaliung. Meskipun demikian, tidak ada yang berani melawan karena Jepang akan menindasnya dengan kejam dan tanpa pandang bulu. Apabila satu orang saja warga kampung melakukan perlawanan maka seluruh kampung akan dibumihanguskan sehingga semuanya menjadi korban. Para anggota *kenpetai* (dinas rahasia Jepang) dengan didukung anggota *junpo* (polisi rahasia)-nya selalu siap mengawasi rakyat dan mencari orang-orang yang hendak membangkang dan melawan perintah mereka. Tidak jarang pula anggota polisi rahasia itu juga merekrut kalangan rakyat yang bersedia menjadi antek Jepang.

Beberapa kelompok nasionalis terpelajar menganggap bahwa Jepang merupakan penindas dan bukannya pembebas. Akibatnya, Jepang menangkapi kaum nasionalis dan pemuka masyarakat, hinga jumlahnya mencapai 500-600 orang, di antara kaum nasionalis yang menjadi korban adalah (termasuk yang berasal dari Gunung Tabur)

- Datu Said Agil, putra Sultan Sambaliung
- Dr. Lukardi beserta keluarganya.
- Abidinsyah, Asisten Wedana Sambaliung.
- Ajin Berni Massuarno, Asisten Wedana Talisayan.
- Haris, Asisten Wedana Gunung Tabur.
- Raden Katamsi, Kepala Perawat Rumah Sakit Berau.

- Haji Aji Umar Gunung Tabur.
- Ibrahim Effendi, Menteri Kehutanan Tanjung Redeb.
- Haji Debab dari Tanjung Redeb.
- Tan Kim Long dari Tanjung Redeb.
- M. Yunan dari Tanjung Redeb.
- Matseh, *klerk* (pengawai kantor) dari Tanjung Redeb.
- Po Beh Wat dari Tanjung Redeb.
- Aji Mamai bin Aji Kuning.
- Anak Kocot.
- Abdul Manap dari Tanjung Redeb.[295]

Saat Jepang bertekuk lutut, para antek Jepang mengalami pembalasan. Anggota *junpo* yang berasal dari warga setempat bernama Garuda, ditangkap dan dibunuh oleh rakyat. Sementara itu, *junpo* lainnya, Raden Sukarna, terpaksa melarikan diri dan tidak diketahui lagi rimbanya. Kesultanan Sambaliung selaku daerah swapraja berakhir pada 1960 dan wilayahnya digabungkan dengan Gunung Tabur menjadi Kabupaten Berau. Sultan Sambaliung terakhir, Muhammad Aminuddin dilantik sebagai bupati yang pertama. Semenjak saat itu, Sambaliung menjadi nama kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur.

c. Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan

Kawasan Sambaliung memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah berupa hasil hutan, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Oleh karena itu, semenjak zaman dahulu sebagian besar warga bermatapencaharian dari bidang-bidang tersebut. Sambaliung juga menarik para pendatang sehingga semenjak zaman Raja Alam, rakyatnya telah terdiri dari banyak suku, seperti Berau, Dayak, Bugis, Basap, dan Bajau. Meskipun demikian, Raja Alam berhasil menyatukan berbagai suku tersebut, bahkan saat terjadi perlawanan terhadap Belanda, suku-suku Dayak seperti Kenyah, Modang, dan Punan turut serta mendukung sultan.

d. Peninggalan Sejarah

Istana Sambaliung merupakan salah satu obyek wisata di kawasan ini yang terletak di tepi Sungai Kelay. Kini bangunan tersebut telah dijadikan museum yang menyimpan berbagai peninggalan sejarah Kesultanan Sambaliung. Salah satu koleksinya yang

295. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Timur*, halaman110–111.

menarik berupa tiang dari kayu ulin berukirkan aksara Bugis dan terletak di depan museum. Barangkali ini merupakan peninggalan para pengikut sultan yang berasal dari kalangan Bugis. Tulisan Bugis itu berisi peraturan bagi rakyat saat hendak melewati istana.

VII. TIDUNG–TARAKAN[296]

Kerajaan Tidung-Tarakan kini terletak di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu legenda Tidung mengisahkan mengenai seorang raja bernama Manterie Gumbang yang bermata empat dan saat tidur matanya selalu terbuka. Daerah kekuasaannya meliputi Tidung, Solok, Bulungan, dan Kutai. Raja ini terkenal kekejamannya sehingga rakyat ingin membunuhnya. Mereka menipu Manterie Gumbang dengan membujuknya membuat sebuah peti mati yang akan dipergunakan tatkala keluarga kerajaan meninggal. Kemudian dibuatlah sebuah peti mati yang indah dan raja diminta masuk ke dalam untuk mencobanya. Begitu raja yang kejam itu berada di dalam peti, rakyat bergegas memakunya kuat. Sia-sia saja raja berteriak dari dalam peti dan mangkatlah ia tiga hari kemudian. Peti tersebut akhirnya terjatuh ke laut dan berubah menjadi Pulau di Lunung.[297]

Konon pada 1076–1156 sudah ada kerajaan kuno di pesisir timur Pulau Tarakan, yakni di daerah Binalatung. Antara 1156–1216 pusat pemerintahannya bergeser ke sebelah Barat Pulau Tarakan, yakni di Tanjung Batu, lalu berpindah ke Sungai Bidang pada 1216–1394. Dari Tarakan, pusat kerajaan ini pindah ke daratan Kalimantan atau tepatnya kawasan Tanah Kuning antara 1394–1557. Bersamaan dengan ini, agama Islam mulai tersebar ke kawasan tersebut dan berdirilah Kesultanan Tidung Islam dengan raja pertamanya Datu Raja Laut atau Sultan Abdul Rasyid (1557–1571). Pusat kerajaannya terletak di Pamusian, Tarakan Timur.

Menurut legenda, kerajaan yang tertua adalah Kerajaan Menjelutung di Sungai Sesayap dengan raja terakhirnya bernama Benayuk. Konon Kerajaan ini hancur karena ditimpa angin topan dan badai yang dahsyat. Seluruh perkampungan beserta penghuninya tenggelam ke dalam sungai. Sebelum terjadinya bencana alam ini, Benayuk telah memerintah selama 35 tahun.[298] Sebagian keturunan Menjelutung

296. Nama Tarakan konon berasal dari rajanya yang pertama, yakni I Tarak atau I Tara. Lihat *Ethnic Background of the Tidung: Investigation of the Extinct Rulers of Coastal Northeast Borneo*, halaman 243.
297. Lihat *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, halaman 149.
298. Perhitungan tahun yang didasari oleh penanggalan rembulan.

yang selamat lantas membuka perkampungan baru. Salah seorang di antara mereka bernama Kayam yang membangun pemukiman Linuang Kayam serta menjadi cikal bakal raja-raja di Pulau Mandul, Sembakung, dan Lumbis.[299]

Lima belas tahun setelah kehancuran Menjelutung, salah seorang keturunan kerajaan tersebut bernama Yamus (Si Amus) yang berdiam di Liyu Maye mengangkat dirinya sebagai raja dan membangun pusat pemerintahan di Binalatung. Setelah memerintah selama 44 tahun, ia digantikan cucunya, Ibugang (Aki Bugang) yang menikah dengan Ilawang (Adu Lawang). Ibugang mangkat setelah memerintah selama 22 musim. Putranya, Itara, tampil menggantikannya dan memerintah selama 29 tahun. Raja-raja Tidung berikutnya adalah Ikurung (25 tahun) dan Ikarang (35 tahun). Pada masa pemerintahan Ikarang, pusat pemerintahan dipindahkan ke Tanjung Batu (Tarakan). Raja selanjutnya bernama Karangan menikah dengan Puteri Kayam (anak perempuan Linuang Kayam) dan dikaruniai putra bernama Ibidang.

Kemudian berkuasalah Raja Bengawan yang dikenal tegas dan bijaksana. Dia memerintah selama 44 tahun dan sepeninggalnya, putranya, Itambu, menaiki singgasana kerajaan. Selama 20 tahun ia memerintah dan setelah itu secara berturut-turut digantikan oleh Aji Beruwing Sakti (30 tahun), Aji Surya Sakti (30 tahun), Aji Pengiran Kungun (25 tahun), dan Pengiran Tempuad (34 tahun). Raja ini menikah dengan Ilahai, putri kepala suku Kayan di Sungai Pimping. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh Aji Iram Sakti (25 tahun), Aji Baran Sakti (20 tahun), Datu Mancang (49 tahun), Abang Lemanak (20 tahun–memerintah dari Baratan), dan Ikenawai (Ratu Ulam Sari). Ia merupakan seorang ratu yang menikah dengan Datu Raja Laut dari Kerajaan Suluk. Setelah memerintah selama 15 tahun ia menyerahkan urusan pemerintahan kepada suaminya.

Datu Raja Laut atau Sultan Abdul Rasyid merupakan raja pertama yang menganut agama Islam. Ia digantikan oleh putranya bernama Dipati Anum yang bergelar Amiril Pengiran Dipati. Ia menikah dengan Mayang Sari, putri Pengiran Sukmana dari Sebawang. Mereka dianugerahi putra dan putri yang masing-masing bernama Pengiran Singa Laut, Mayang Sari, Kumala Sari, dan Sukma Sari. Setelah memerintah selama 42 tahun, Amiril Pengiran Dipati digantikan oleh putranya, Amiril Pengiran Singa Laut yang berkuasa selama 37 tahun. Singgasana beralih lagi kepada putra Pengiran Singa Laut bernama Amiril Pengiran Maharajalila I. Setelah

299. Lihat *http://takapana.blogspot.com/2009/07/kerajaan-tidung-bag–1.html* (diunduh pada 16 Juni 2010).

memegang tampuk pemerintahan selama 45, ia mangkat. Putranya, Pengiran Mustafa, naik takhta dengan gelar Amiril Pengiran Maharajalila II.

Saudari Amiril Pengiran Maharajalila I, Sinaran Bulan, menikah dengan Wira Amir yang bertugas sebagai panglima perang kerajaan. Setelah 29 tahun menduduki singgasana, Amiril Pengiran Maharajalila II dibunuh dengan licik oleh Wira Amir yang berdalih bahwa itu adalah kecelakaan. Wira Amir mengambil alih kekuasaan, tetapi tidak disetujui oleh para pemuka kerajaan. Mereka lantas menobatkan Amiril Pengiran Dipati II sebagai Raja Tarakan sehingga Wira Amir terpaksa melarikan diri ke Berau. Atas dukungan Sultan Berau, ia mendirikan kerajaan sendiri di Baratan. Wira Amir digantikan oleh putranya, Aji Ali yang bergelar Sultan Alimuddin (1777–1817), dan keturunan selanjutnya memerintah sebagai raja-raja Kesultanan Bulungan.

Berdasarkan riwayat di atas, Kerajaan Tidung memiliki keterkaitan erat dengan Kesultanan Bulungan karena jalinan ikatan pernikahan antar keduanya. Meskipun demikian, terjadi persaingan dan keinginan untuk saling mendominasi satu sama lain. Perselisihan inilah yang dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengokohkan kedudukannya di Kalimantan Timur. Pada akhirnya, Kerajaan Tidung kalah pamor dibanding Bulungan. Sultan Bulungan sendiri menganggap dirinya sebagai penguasa Tanah Tidung (muara sungai Sesayap, Sembakung, Sebuku, hingga Muara Tawao) dan memungut upeti dari orang Tidung yang mendiami daerah pesisir.[300] Belanda sendiri menempatkan para penguasa Tidung di bawah kekuasaan Kesultanan Bulungan.

Pada masa pemerintahan Amiril Pengiran Dipati II (34 tahun), dilancarkan serangan terhadap Wira Amir yang telah membentuk kerajaan sendiri di Baratan[301] sebagai pembalasan terhadap pembunuhan Amiril Pengiran Maharajalila II. Serangan ini mengalami kegagalan karena kurang didukung kerabat kerajaan sendiri dan bahkan Amiril Pengiran Dipati II terluka. Karena malu, Pengiran Maharajalila II menolak pulang ke Tarakan. Dalam keadaan luka parah, Pengiran Maharajalila II diantar oleh para pengikutnya ke suatu daerah terpencil di Sungai Simasulem, Serudung. Ia wafat tak lama kemudian. Amiril Pengiran Maharajalila III melanjutkan kepemimpinan ayahnya. Ia menikah dengan Aji Intan Pengiran Kesuma dan memperoleh keturunan Aji Intan (Selma), Datu Syabuddin, Datu Mancang (Semudang), dan Datu Maharajalila. Kelak Datu Maharajalila dinobatkan sebagai Sultan Muhammad

300. Lihat *Kawasan Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Laut Sulawesi Abad XIX*, halaman 188.
301. Lihat *http://takapana.blogspot.com/2009/07/kerajaan-tidung-bag-2.html* (diunduh pada 16 Juni 2010).

Kaharuddin II dari Bulungan. Sesudah memerintah selama 35 tahun, Amiril Pengiran Maharajalila III mangkat dan digantikan oleh adiknya yang bergelar Amiril Pengiran Amir Tajuddin (1817–1844).

Putra Amiril Pengiran Amir Tajuddin menjadi Raja Tarakan berikutnya dengan gelar Pengiran Jamalul Kiram (1844–1867). Ia menikah dengan Tuan Dayang, putri Raja Tungku dari Sabah. Putra-putri mereka adalah Pengiran Jamalul, Dayang Tima, dan Ratu Intan Dura yang menikah dengan Datu Jaring (Datu Maulana), putra Sultan Bulungan, Muhammad Kaharuddin II. Menantu Pengiran Jamalul Kiram ini menggantikan mertuanya dengan gelar Datu Maulana Amir Bahar (1867–1896). Penggantinya adalah putranya, Datu Adil (1896–1916) yang berdasarkan silsilahnya memiliki kedekatan erat dengan keluarga Kesultanan Bulungan. Dalam laporan perjalanannya pada 1878, Carl Alfred Bock (1849–1932–seorang ahli ilmu alam dan penjelajah Norwegia–menyebutkan bahwa Rajah Dadu dari Tidoen merupakan salah seorang anggota rombongan yang berlayar bersamanya dengan kapal *Tiger*. Ia menyebutkan bahwa Rajah Dadu tinggal di Sanga Sanga, tidak jauh dari Pelaroeng.[302] Kemungkinan Rajah Dadu adalah Datu Maulana Amir Bahar. Meskipun demikian, perlu penelaahan lebih lanjut guna memastikannya.

Pada zaman Datu Adil, ditemukan tambang minyak bumi di Tarakan. Berkat usaha penambangan minyak yang dilakukan pemerintah Belanda, raja-raja Tarakan turut mendapatkan pembagian keuntungan. Akibatnya, pendapatan mereka makin besar sehingga meresahkan Kesultanan Bulungan. Oleh karenanya, mereka melakukan upaya menjatuhkan Datu Adil di hadapan pemerintah Belanda. Ternyata, raja-raja Tarakan sendiri kerap melanggar berbagai peraturan yang ditetapkan pemerintah kolonial. Itulah sebabnya, Belanda kurang menyukai Datu Adil. Dengan dalih tidak membayarkan setoran pajak, Datu Adil dan Aji Maulana diasingkan ke Manado. Sedangkan Datu Jamalul diasingkan ke Makassar. Peristiwa ini terjadi pada 1916 dan menutup lembaran sejarah Kerajaan Tidung-Tarakan.

Kerajaan-kerajaan Lain di Tanah Tidung

Berdasarkan artikel yang diterima dari Mika Okushima, di kawasan Tanah Tidung masih terdapat beberapa kerajaan seperti Mandul, Sebuku, Sembawang, dan Sesayap.

---

302. Lihat *The Head-Hunters of Borneo*, halaman 90. Anggota rombongan lainnya adalah asisten residen, Pangeran Bendahara beserta juru tulisnya, dan lain sebagainya.

Kerajaan-kerajaan di Tanah Tidung
Digambar ulang dari *Forest, Resources and People in Bulungan: Elements for a History of Settlement, Trade, and Social Dynamics in Borneo, 1880-200,* halaman 20

Sekelumit riwayat mengenai Kerajaan Sebuku diperoleh dari naskah yang disebut *Dokumen Sebuku* (*Sebuku Document*). Naskah berhuruf Jawi itu didiktekan pada 1916 oleh Pangeran Anum, putra Aji Raden (Menteri Amas), keturunan Kerajaan Tarakan, kepada Suma atau Aji Kesuma, keturunan Pangeran Mansyah "Kaputan" bin Daking, pemuka Dayak Sebuku. Semula masyarakat mereka mendiami daerah Sumbol, namun tercerai-berai karena serangan suku Dayak Kayan. Serbuan tersebut sebenarnya digerakkan oleh Sultan Muhammad Kaharuddin (Kaharuddin I, 1817–1861) atau Raja Muda, seorang Sultan Bulungan yang ingin menguasai daerah tersebut selaku salah satu pusat perdagangan penting di timur laut Kalimantan.[303] Padahal sebelumnya, kaum mereka menikmati kebebasan dari Bulungan karena tidak perlu membayar pajak atas sarang burung yang dihasilkan di gua-gua warisan leluhur mereka.

Akibat serangan itu, rakyat Sebuku tercerai-berai hingga ke Labuk, Tarakan, dan Sembakung.[304] Kurang lebih lima puluh tahun kemudian, karena berat dan sulitnya kehidupan di tempat pelarian mereka,[305] Pangeran Anum beserta pengikutnya berniat kembali ke kampung halaman mereka sebelumnya. Pangeran Anum beserta Pangeran Jemalul, kerabat Kerajaan Tarakan, lantas meminta izin menetap kembali di

303. Lihat *Commentary on the Sebuku Document: Local History from the Perspective of a Minor Polity of Coastal Northeast Borneo*, halaman 151.
304. Lihat *Ethnic Background of the Tidung: Investigation of the Extinct Rulers of Coastal Northeast Borneo*, halaman 247.
305. Kehidupan yang sulit tersebut dipicu oleh berbagai faktor, seperti hilangnya kesuburan tanah, penindasan oleh penguasa Bulungan dan Belanda, dan persaingan dengan pedagang Melayu.

Sebuku kepada Sultan Bulungan saat itu, Alimudin atau Alim al-Din,[306] putra Sultan Muhammad Kaharuddin. Meskipun demikian, Alimudin mengatakan bahwa mereka hendaknya menghadap dan mengajukan permohonan tersebut kepada ayahnya sendiri. Raja Muda mengabulkan keinginan mereka. Setelah memperoleh izin, mereka berdua kembali menghadap Alimudin serta meminta agar diizinkan memungut hasil sarang burung dari gua warisan mereka sebagai penutup pengeluaran mereka di Sebuku. Sultan mengabulkan keinginan tersebut dan hanya meminta mereka menyerahkan pajak sebesar 10 persen dari hasil sarang burung beserta getah perca di daerah mereka.

Pangeran Anum dan Pangeran Jemalul mulanya berdiam di Alah, Kuala Sembakung. Mereka mulai berjuang membangun kembali Sebuku. Sewaktu memasuki kawasan hulu Sembakung, mereka berjumpa dengan Sabina, Raja Tenggalan, dan mengajaknya bersama-sama membangun perkampungan di Sebuku. Kendati demikian, Sabina merasa takut karena kondisi kawasan tersebut masih kacau dan pembunuhan beserta pertikaian antar suku masih kerap terjadi. "Aku takut dibunuh orang karena Negeri Sebuku itu banyak orang mengambil kepala"[307] demikian kata Sabina. Setelah dibujuk melalui sumpah persaudaraan dan janji perlindungan dari keduanya, barulah Sabina bersedia. Di Wasan, Pangeran Anum berhasil mengajak tiga kepala suku bernama Si Kabit, Sepada, dan Semawat agar bergabung dengannya. Ketiga kepala suku ini bersedia turut bergabung setelah dilakukan sumpah darah (disebut sumpah *berisap darah*) menurut adat setempat. Lebih jauh lagi, ia meminta mereka menjual hasil pemungutan sarang burung di Wasan dan Tambalunan. Ketiga kepala suku menyepakatinya dan meminta pembayaran yang dianggap layak.

Pangeran Anum meneruskan perjalanannya ke Sumbol hulu, tempat asal leluhurnya dengan disertai Kabit. Di kawasan Sungai Baruas, rombongan berjumpa dengan kepala suku setempat bernama Innil. Mulanya rombongan Pangeran Anum disambut dengan todongan sumpit. Namun, setelah dijelaskan bahwa Pangeran Anum berniat baik, Innil beserta pengikutnya tak lagi memperlihatkan sikap permusuhan. Ia bahkan bersedia bergabung dengan Pangeran Anum. Segera Pangeran Anum

306. Nama sultan ini tidak dicatat dalam *SSKBMM,* tetapi disebutkan dalam *Commentary on the Sebuku Document: Local History from the Perspective of a Minor Polity of Coastal Northeast Borneo*, halaman 154. Ditambahkan pula keterangan bahwa Sultan Kaharuddin I telah turun takhta di tahun yang sama dan mengangkat putra tertuanya, Jalaluddin, sebagai sultan. Namun, sultan muda ini sakit-sakitan dan meninggal beberapa tahun kemudian.

307. *Dokumen Sebuku*, p4-baris 6-7, dalam *Commentary on the Sebuku Document: Local History from the Perspective of a Minor Polity of Coastal Northeast Borneo*, halaman 163.

membagi-bagikan hadiah berupa tembakau dan garam. Berdasarkan petunjuk Innil, mereka bergerak menuju Negeri Kalid, yang diperintah oleh kepala suku bernama Umbus, gelarnya adalah Raja Tua. Sama seperti sebelumnya, mereka disambut oleh suasana permusuhan. Sesudah disampaikan maksud kedatangan mereka yang tak memendam niat buruk, barulah Umbus bersedia bergabung dengan mereka. Kepala suku berikutnya yang bergabung dengan mereka adalah Baug, penguasa negeri bernama Kelumpis. Dengan demikian, terbentuklah Negeri Sebuku yang terdiri dari aliansi enam kepala suku. Pangeran Jemalul dari Tarakan yang pernah memberikan perlindungan kepada warga Sumbol memperoleh kedudukan tinggi di negeri tersebut, seperti hak memutuskan sesuatu, mengatur pembagian hasil sarang burung, melakukan upacara-upacara keagamaan, dan lain sebagainya.

Negeri Sebuku makin makmur dan menarik perhatian Pangeran Besar, pemimpin kelompok masyarakat Kulamis Tidung, yang saat itu bermukim di Sembakung. Ia beserta pengikutnya memutuskan kembali ke Sebuku dan meminta Pangeran Jemalul agar diizinkan turut serta memanen hasil sarang burung. Pangeran Jemalul menyetujuinya dan menjelaskan aturan mainnya, yakni tiap-tiap pihak akan memanen sarang burung tersebut secara bergantian sehingga masing-masing mendapatkan bagian yang sama. Meskipun demikian, Pangeran Besar berniat memperbesar bagiannya sendiri sehingga timbul perselisihan. Ia mengadukan hal itu kepada Sultan Bulungan dan berargumen bahwa dirinya yang lebih berhak atas kawasan Sebuku karena baik Pangeran Jemalul maupun Pangeran Anum merupakan keturunan Tarakan.

Sultan Bulungan berjanji akan menyelesaikan permasalahan itu dan mengunjungi desa tempat kediaman Pangeran Jemalul. Sidang segera digelar dan masing-masing pihak yang bertikai mengemukakan argumennya. Pangeran Anum menyampaikan bahwa masyarakat Sumbol Tidung yang memperbaiki kampung halaman mereka setelah terbengkalai selama lima puluh tahun, sedangkan Pangeran Besar hanya mengabaikannya saja. Disamping itu, masyarakat Tenggalan juga tidak puas dengan Pangeran Besar yang pernah membunuh ayah Innil beserta warga Tenggalan lainnya. Innil bahkan berikrar akan memenggal kepala Pangeran Besar jika ia berani tinggal di sana. Sultan menitahkan agar mereka berhenti berbantah. Sultan memenangkan Pangeran Anum karena selain keturunan sah Sebuku Tidung, ia memiliki surat keterangan dari Kesultanan Bulungan serta telah membayar pajak jauh sebelum Pangeran Besar. Demikianlah kasus tersebut diselesaikan. Pangeran Anum sendiri tutup usia pada 1918.

Kerajaan Sesayap barangkali merupakan cabang penguasa Tarakan yang berkembang dari tiga pemukiman di Sungai Menjelutung. Sumber dari pihak kesultanan di kawasan itu menyatakan bahwa Sesayap, sebagaimana halnya Bulungan dan Sekatak, merupakan salah satu di antara tujuh daerah kekuasaan (*benua rantau*) Kerajaan Berau.[308] Sesayap kemudian menjalin aliansi dengan Brunei namun bermusuhan dengan Sulu. Sementara itu, menurut sumber lisan, rakyat Sesayap sesungguhnya adalah suku Kepatal yang telah lama terlupakan dan kini dikenal sebagai Tidung Sesayap. Cikal bakal para penguasa Sesayap adalah seorang tokoh bernama Awai. Pernikahan putri penguasa Sesayap dengan seorang bangsawan Kayan dari Bulungan menjadikan kerajaan tersebut di bawah dominasi Bulungan. Putra mereka, Baginda, merupakan penguasa Sesayap pertama yang menganut agama Islam. Meskipun demikian, pada masa itu agama Islam baru sebatas dianut kaum bangsawan. Rakyat Sesayap sendiri sebagian besar masih menganut kepercayaan leluhurnya.

Kurang lebih pada 1750, terjadi persaingan antar berbagai kekuatan di kawasan tersebut antara Sulu di sebelah utara dan Bulungan di selatan. Para pendatang Bugis juga cukup besar peranannya di sana. Hal ini masih ditambah oleh seringnya berlangsung perompakan. Demi alasan keamanan, Kerajaan Sesayap memindahkan pusat pemerintahannya ke pedalaman. Kendati demikian, pemindahan tersebut juga dimaksudkan agar lebih mudah mengawasi gua-gua penghasil sarang burung. Pada abad 19, Tidung menghasilkan 50 kati sarang burung putih dan 100-200 pikul sarang burung hitam setiap tahunnya. Hasil berupa sarang burung ini terutama diekspor ke Sulu. Hasil lainnya adalah lilin, kamfer, dan rotan. Masyarakat Tidung masa itu (tidak hanya Sesayap) juga terlibat dalam perdagangan budak.

Sekitar 1900-an, pemerintahan kerajaan ini berpindah ke Malinau Seberang. Sultan-sultan Bulungan setelah menandatangani kontrak politik berupa *Korte Verklaring* diperkenankan turut campur dalam pemerintahan Tanah Tidung demi memadamkan pemberontakan pada 1909 dan 1915. Kerajaan ini mengalami kemundurannya dan para rajanya hanya diangkat menjadi dewan lokal oleh pemerintah kolonial Belanda. Raja Sesayap dewasa ini adalah Pangeran Bakti yang hidup dalam kemiskinan. Ia tinggal dalam rumah yang memprihatinkan di Malinau Seberang.

---

308. Lihat *Forest, Resources and People in Bulungan: Elements for a History of Settlement, Trade, and Social Dynamics in Borneo, 1880-2000*, halaman 21.

Kerajaan Sembawang (Sebawang) juga dikenal sebagai Kerajaan Tanjung Belimbing atau Kabiran[309] yang bermula dari pemukiman di Pulau Bunyu. Kerajaan ini berperanan membuka jalur perdagangan di kawasan Malinau dan Sungai Tubu. Penghuni pemukiman di Pulau Bunyu tersebut diperkirakan orang-orang yang berasal dari Berayu (Berau). Pada paruh pertama abad 18, mereka memindahkan kediamannya ke Pulau Moyo. Ketika itu, masyarakat Sembawang dipimpin oleh Raja Rambat atau Lambat, yang konon berasal dari Banjarmasin. Para pendatang itu kemudian menjalin hubungan pernikahan dengan penduduk asli suku Dayak di kawasan tersebut. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Sembawang masih mengalami berbagai perpindahan pemukimam lagi, yakni ke Bebatu' dan Penagar semasa pemerintahan putra Raja Rambat bernama Amas Mangku (Mas Mangku).

Kurang lebih akhir pada abad 18, penduduk berpindah lagi ke pedalaman, yakni ke Sembawang yang terletak di mulut Sungai Sembawang. Ketika itu yang memimpin mereka adalah Raja Sembawang, yang kemudian menganut agama Islam serta digelari Raja Alamsyah atau Panembahan Tua Sebawang. Akibat serangan Sulu, Panembahan Tua Sebawang memindahkan pusat pemerintahannya ke Tidung Pala'a yang lebih kuat pertahanannya. Raja-raja selanjutnya yang memerintah Sembawang secara turun-temurun adalah Panembahan Mangku Bumi, putra Panembahan Tua Sebawang; Panembahan Kaharuddin; dan Panembahan Alimudin Hasan. Ia mempunyai seorang putri bernama Aji Ratu yang menikah dengan Panembahan Raja Tua, Raja Sembawang berikutnya.[310]

Panembahan Raja Tua yang juga dikenal sebagai Ali Hanafiah pada 1860 memindahkan pusat pemerintahannya ke Bengalun dan kemudian ke Pulau Sapi karena kerap diserang oleh suku Tinggalan dari Sembakung dan Kayan yang merampok gua sarang burung mereka. Raja-raja Sembawang sendiri berdagang sarang burung yang melibatkan pula suku Merap. Pernikahan Panembahan Raja Tua dengan Aji Ratu membuahkan seorang putra bernama Sapu, yang menjadi Raja Sembawang berikutnya bergelar Panembahan Raja Aji Pendeta. Pada awal abad 20, ia memunculkan pemberontakan terhadap Kesultanan Bulungan dan pemerintah

309. Lihat *Forest, Resources and People in Bulungan: Elements for a History of Settlement, Trade, and Social Dynamics in Borneo, 1880-2000*, halaman 24.
310. Lihat silsilah pada *Etnohistory of the Kayanic Peoples in Northeast Borneo (part 2): Expansion, Regional, Alliance Group, dan Segai Disturbance in the Colonial Era*, halaman 230.

kolonial Belanda sehingga ditangkap pada 1909 serta diasingkan ke Nusakambangan. Sebagai akibat perlawanan tersebut, Kerajaan Sembawang dihapuskan oleh Belanda.

Kendati demikian, kemenakannya, Panembahan Aji Kuning Bilung, pindah ke Sebambon yang kelak menjadi Malinau Kota. Pada perkembangan selanjutnya, Aji Kuning Bilung diangkat sebagai kepala kampung Malinau dan anggota Majelis Kerapatan Besar Tanah-tanah Tidung bersama para pemuka Tidung lainnya pada 1935. Setahun kemudian, saudara sepupunya, Aji Kapitan, diangkat sebagai kepala adat suku Tidung.[311] Sesudah berakhirnya Perang Dunia II, Aji Soleman memindahkan kembali warganya ke Tanjung Belimbing karena merasa bahwa Malinau sudah terlalu sempit. Pemuka Sembawang sekarang adalah Aji Saharman yang tinggal dalam sebuah rumah besar serta mewah di Tanjung Belimbing.

Kerajaan-kerajaan Lain di Kalimantan Timur

Berikut ini terdapat kerajaan-kerajaan lain yang berada di Kalimantan Timur, namun masih belum jelas apakah kerajaan-kerajaan ini sungguh ada atau merupakan semata-mata bagian ranah sastra. Kendati demikian, demi kelengkapan buku ini, data-data mengenai kerajaan-kerajaan tersebut akan dicantumkan pula.

BENUAQ

Kerajaan Benuaq pernah diperintah oleh Raja Ningkah Olo[312] yang merupakan putra Lukut Daatn Duyaatn. Ketika itu, pusat kerajaan berada di Tengkulutn Ayapm. Suatu malam Raja Ningkah Olo bermimpi didatangi seorang tua yang menyarankannya agar berpindah ke hulu Sungai Mahakam. Orang tua itu memberikan petunjuk bahwa jika tiba di sebuah belokan sungai dan mencium bau kemenyan, mereka harus belok ke sana. Demikianlah, Raja Ningkah Olo memenuhi petunjuk dalam mimpi tersebut dan berpindah ke bagian hulu. Mereka membuka perkampungan baru yang berpusat di Senteaau. Beberapa waktu kemudian datang pula serombongan orang yang juga berasal dari daerah hilir, dipimpin oleh Geruhaaq beserta adik perempuannya, Dayang Beliatn. Ningkah Olo lantas menikahi Dayang Beliatn, sedangkan Geruhaaq menikahi adik perempuan Ningkah Olo bernama Serumaaq. Demikianlah, mereka membangun ikatan kekeluargaan.

---

311. Lihat *Forest, Resources and People in Bulungan: Elements for a History of Settlement, Trade, and Social Dynamics in Borneo, 1880-2000*, halaman 27.
312. Lihat *Sejarah dan Mitologi Suku Asli Kalimantan Timur*, halaman 68.

Geruhaaq meneruskan perjalannya dan kemudian bermukim di Kapoq, sedangkan Ningkah Olo tetap berdiam di Senteaau. Kerajaan ini akhirnya berhasil menguasai hampir keseluruhan wilayah suku Benuaq. Ningkah Olo memiliki dua orang putra, yang masing-masing bernama Ganas dan Telekat. Pertama-tama yang menggantikannya ayahnya adalah Ganas dengan gelar Merajaaq Ganas. Meskipun demikian, ia menghilang begitu saja dan konon menjelma menjadi roh halus. Oleh karenanya, ia lantas digantikan oleh adiknya, Telekat, dengan gelar Merajaaq Telekat. Dia memindahkan pusat pemerintahan ke Telekat. Raja-raja berikutnya yang memerintah secara berturut-turut adalah Merajaaq Setikng, Merajaaq Naing, Merajaaq Sopaakng, Merajaaq Jaratn, Merajaaq Bincikng, Merajaaq Siwukng, dan Merajaaq Sentaruuq.[313]

Selanjutnya, Merajaaq Sentaruuq memiliki dua orang anak, yakni Untuuq dan Palepa. Untuuq lalu menggantikan ayahnya dengan gelar Merajaaq Untuuq. Semasa pemerintahannya, pusat pemerintahan dipindahkan ke Jengan Danum. Sedangkan Palepa tetap tinggal di Telekat. Dari dua orang istrinya, yang masing-masing bernama Jemutn dan Pantas, Merajaaq Untuuq memiliki dua orang putra, yakni Lanaaq Mencenaaq serta Ragup Pejentui. Pada mulanya, mereka sama-sama menjadi raja, tetapi rakyat kemudian lebih memihak kepada Ragup Pejentui sehingga Lanaaq Mencenaaq meletakkan kedudukannya. Dengan demikian, Ragup Pejentui diakui sebagai satu-satunya raja dengan gelar Timaang Tungar Buaah Nungur Pahu Botuk Bataakng Malaakng Maraaq Idaatn Joa Ngompakng Pahu Dayaq.

Semasa pemerintahannya, terjadi pertempuran dengan Kerajaan Tunjung (Pinang Sendawar atau Sentawar) yang ketika itu diperintah oleh Angin Meen Uyaang. Meskipun demikian, tiada yang menang ataupun kalah. Kerajaan Benuaq mencapai kejayaannya semasa pemerintahan Ragup Pejentui, tetapi belakangan Benuaq ditaklukkan oleh Kutai Kartanegara.

DANO RIOOKNG OLO

Kerajaan Dano Riookng Olo diperintah oleh Datu Tuo dan Dara. Meskipun mereka berdua memiliki banyak budak, belum pernah mereka menyakiti budak-budaknya.[314] Dengan bantuan para budaknya, mereka membangun Kerajaan Dano

313. Lihat *Sejarah dan Mitologi Suku Asli Kalimantan Timur*, halaman 73
314. Lihat *Sejarah dan Mitologi Suku Asli Kalimantan Timur*, halaman 23.

Riookng Olo. Kendati demikian, Datu Tuo dan Dara belum juga dikaruniai keturunan sehingga mereka terus menerus memanjatkan doa kepada Yang Kuasa. Akhirnya, doa ini dikabulkan dan mereka dikaruniai seorang anak gadis amat cantik bernama Ayaakng Serakeetn. Setelah putrinya menginjak dewasa, banyak pria yang hendak melamar Ayaakng Serakeetn, namun belum ada satu pun yang berkenan di hatinya.

Hingga akhirnya, muncul seorang pemuda bernama Serempulukng Pusook Langit yang mengaku bahwa dirinya berasal dari kerajaan di langit. Ia melamar Ayaakng dan lamarannya pun diterima. Pernikahan ini dikaruniai seorang putra bernama Kilip. Sewaktu Kilip berusia tujuh tahun, ayahnya kembali ke langit. Setahun kemudian karena merasa sedih ditinggal suaminya, Ayaakng Serakeetn juga memutuskan meninggalkan tempat tersebut dan berdiam di dalam tanah. Itulah sebabnya, ia juga digelari Ayaakng Serakeetn Tana. Semenjak saat itu, Kilip hidup bersama dengan kakek dan neneknya. Kilip diajarkan adat istiadat Kerajaan Dano Riookng Olo yang dikenal sebagai Adat Sukat, tetapi karena usianya yang masih muda Kilip lebih suka bermain-main.

Sebelum Kilip menginjak dewasa, Datu Tuo mangkat. Ketika itu, Kilip belum memiliki cukup pengetahuan mengenai adat memakamkan kakeknya. Mereka hanya menaruh jenazah Datu Tuo di antara pokok-pokok bambu, serta menaruh persembahan berupa tujuh kepal nasi dan tujuh potong ikan. Akibatnya, Kerajaan Dano Riookng Olo dilanda bencana kelaparan dan panenan mengalami kegagalan. Para budak meninggalkan kerajaan tersebut sehingga akhirnya Kilip beserta neneknya harus menggantungkan hidup dari menjual harta kekayaan kerajaan. Setelah harta kekayaan mereka habis, Kilip merasa bahwa ia harus pergi mencari solusi masalah tersebut.

Kilip lalu mengembara tak tentu arah ke dalam hutan, hingga akhirnya tiba di sebuah rumah panjang yang megah. Ia mendengar suara banyak orang berada di dalam rumah tersebut. Namun, sewaktu ia memanggil, tiada jawaban yang diberikan. Kilip memasuki rumah, dan anehnya memang di dalamnya kosong tanpa keberadaan seorang pun. Setelah memeriksa setiap biliknya, Kilip keluar lagi dari rumah dan begitu berada di halamannya, terdengar lagi suara riuh rendah dari dalam. Kilip masuk kembali dan tetap mendapatinya dalam keadaan kosong. Karena marah, Kilip lantas mengayunkan parangnya ke tiang dan dinding rumah. Tiba-tiba terdengar suara yang

mencegah Kilip melakukan hal semacam itu karena khawatir rumah mereka akan roboh. Suara tersebut memerintahkan Kilip melayangkan pandangan ke luar jendela.

Ternyata, ia menyaksikan kakeknya, Dato Tuo sedang memasak. Kakeknya itu menjelaskan bahwa ia menderita di alam kematian karena tidak mendapatkan upacara pemakaman yang layak. Jenazahnya dulu hanya diletakkan di antara pokok-pokok bambu serta dibekali tujuh genggam nasi beserta tujuh potong ikan. Itulah sebabnya, arwahnya tak dapat memberikan berkah bagi keturunannya. Arwah Dato Tuo lantas menjelaskan mengenai tata cara upacara pemakaman yang benar. Setelah pesan Dato Tuo itu dijalankan, kerajaan menjadi makmur kembali.

DATAAI BERENTIWAAK

Silsilah penguasa kerajaan Dataai Berentiwaak adalah sebagai berikut.
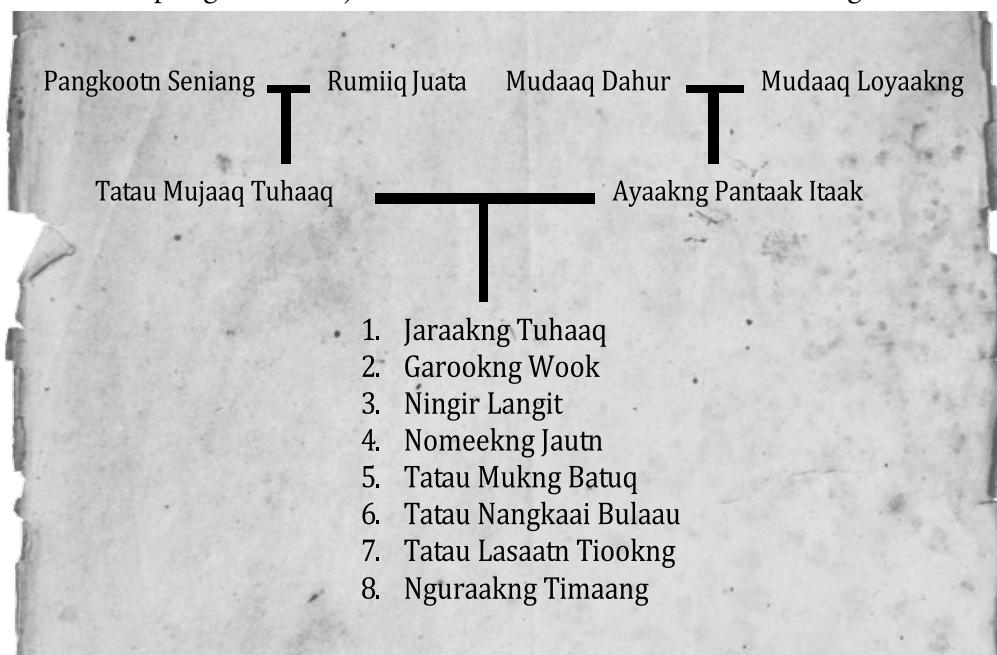
Pada masa Tatau Mukng Batuq, tempat kediaman mereka menjadi kurang subur sehingga mereka berpindah ke Juaaq Lawe Bulaau. Di tengah perpindahan tersebut, Pangkootn Seniang beserta Rumiiq Juata dibunuh oleh Beriu Nempur dan Belikaar Tana yang berasal dari Aput Pereraweetn. Harta benda mereka juga dirampas. Akibatnya, timbul peperangan antara Tatau Mukng Batuq dengan dibantu anggota keluarganya melawan Beriu Nempur dan Belikaar Tana. Kendati demikian, mereka belum berhasil mengalahkan Kerajaan Aput Pereraweetn.

Mereka lantas menggunakan siasat. Tatau Nangkaai Bulaau menyamar sebagai pedagang guna memata-matai Kerajaan Aput Pereraweetn. Dalam penyamaran tersebut, Tatau Nangkaai Bulaau berhasil menikahi seorang gadis setempat bernama Tiookng Reweh. Ia kemudian berhasil membujuk istrinya agar memberitahukan rahasia kerajaan. Berbekal rahasia tersebut, Tatau Mukng Batuq menyerbu kembali Aput Pereraweetn dan berhasil meraih kemenangan. Dengan tewasnya Beriu Nempur dan Belikaar Tana, dendam mereka terbalaskan. Hanya saja, Tatau Nangkaai Bulaau gugur dalam pertempuran tersebut.

TANYUKNG LAHUKNG

Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Merajaaq Aji dengan didampingi istrinya, Ayaakng Delooi. Dia memiliki putra dan putri yang masing-masing bernama:

1. Nalaau (putra)
2. Nalukng (putra)
3. Ave (putri)
4. Rempiaaq (putri)
5. Noso (putri)
6. Nongaah (putri)
7. Nengah (putri)
8. Nabai (putri)
9. Buncuuq (putri)[315]

Sewaktu pergi mengumpulkan ikan dan udang, Ave menemukan tiga butir telur. Salah satu di antara tiga butir telur itu lantas menetas menjadi seekor burung raksasa. Pada mulanya, burung raksasa itu membawakan mereka hewan buruan sehingga keluarga tersebut tidak perlu lagi berburu. Namun, belakangan burung raksasa itu ingin memakan hati Ave. Tiada seorangpun yang berani membunuh hewan raksasa tersebut, sebelum akhirnya dibunuh oleh Kilip.

315. Lihat *Sejarah dan Mitologi Suku Asli Kalimantan Timur*, halaman 23.

KERAJAAN-KERAJAAN DI KALIMANTAN SEKITAR ABAD KE–19
KALIMANTAN UTARA
BRUNEI
Tidung
Bulungan
Gunung Tabur
Sambaliung
SARAWAK
Kuching
Sambas
Mampawah
Pontianak
Landak
Sanggau
Tayan
Sintang
Kayan
Melawi
Mahakam Hulu
Kutai Kartanegara
Murung
Siang
Tewe
Tanah Pinoh
Simpang
Kubu
Sukadana
KETAPANG
Matan
Kota Waringin
Jelai
TANAH DAYAK HULU
Seruyan
Katingan
KAPUAS BARITO
Mentaya
SAMPIT
Kahayan
DATARAN RENDAH DAYAK
Mendawai
Sembulo
Pembuang
Dusun
Tabalung
Pasir
Cingal
HULU SUNGAI
Buntok
Amuntai
Tapin
Riam Kiwa
Riam Kanan
Kusan
Tanah Laut
Pagatan
Sembamban
Pulau Laut
Tanah Bumbu
BANJARMASIN
Tanah Bumbu
PASIR
SAMPANAHAN
CINGAL
MENUNGGUL
BANG-
KALAAN
CANTUNG
BATU
LICIN
KUSAN
PAGATAN
PULAU
LAUT
SAMBAMBAN

Peta Kalimantan Semasa Kolonial
Sumber: *Winkler Prins' Geïllustreerde Encyclopaedie*. 4th ed.

Bab 6
KERAJAAN-KERAJAAN DI SULAWESI

A. KERAJAAN-KERAJAAN DI SULAWESI UTARA

Semenjak abad 15, di Kepulauan Sangihe Talaud telah berkembang berbagai kerajaan sebagaimana yang dicatat oleh Antonio Pigafette, juru tulis Magellan. Berdasarkan catatan tersebut di Sangihe terdapat empat raja, dua raja di Siau, serta satu raja di Tagulandang. Meskipun demikian, menurut catatan F. Valentijn–sekitar tiga abad setelah itu–menyebutkan bahwa mulanya di kawasan tersebut hanya ada dua kerajaan saja, yakni Tabukan dan Kalongan. Namun, pada 1670 muncul sembilan kerajaan di Sangihe, yakni Kendahe, Tahuna (Taruna), Kolongan, Manganitu, Kauhis, Limau, Tabukan, Sawang (Saban), dan Tamako. Pada perkembangan selanjutnya, Tamako bergabung dengan Siau. Limau lebih malang lagi nasibnya karena diluluhlantakkan oleh pasukan Padtbrugge. Sawang digabungkan dengan Tahuna dan Kolongan. Sementara itu, Kauhis bergabung dengan Manganitu. Pada 1898, Kendahe dan Tahuna digabungkan menjadi satu dan disebut Kerajaan Kendahe-Tahuna. Dengan adanya penggabungan ini, pada awal abad 20 tinggal tersisa empat kerajaan saja, yakni Tabukan, Manganitu, Siau, dan Kendahe-Tahuna.

Kerajaan Tabukan dan Kendahe banyak terpengaruh oleh Sulu dan Mindanao. Bila ditelaah silsilahnya, semua raja-raja di Kepulauan Sangihe-Talaud, Siau, dan Bawontehu (Manado) mempunyai hubungan kekerabatan dengan penguasa Mindanao melalui perkawinan. Sebelum munculnya kerajaan di kawasan ini, telah ada berbagai

daerah kesukuan dengan pemimpinnya yang disebut datu. Meski Kerajaan Tabukan dianggap sebagai yang tertua di Sangihe Talaud, tetapi hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebelumnya telah eksis berbagai satuan pemerintahan dengan para pemimpinnya yang bergelar datu ataupun kulano.

I. BINTAUNA

Ibu kota Kerajaan Bintauna berpindah-pindah mulai dari Fontayo, Minanga, hingga akhirnya Pimpi,[316] yang kesemuanya terletak di pesisir utara. Menurut legenda, di Negeri Suhawuto terdapat pasangan suami istri bernama Pai Damo dan Vai Damo. Saat sedang mencari ikan di sungai, mereka menemukan sebutir telur burung hitam pada sebuah tumpukan kayu.[317] Mereka kemudian membawa pulang telur tersebut dan menaruhnya di loteng rumah. Pada hari kedelapan setelah mereka menemukan dan mengambil telur itu, turun hujan yang deras beserta kilat menyambar-nyambar. Setelah itu, keluarlah seorang bayi laki-laki dari telur yang mereka temukan tersebut. Bayi itu lalu diberi nama Vululangito.[318] ia kelak menikah dengan seorang putri yang muncul dari pohon bernama Uherayo. Pernikahan ini membuahkan seorang putra bernama Tamangku dan putri bernama Tendeno.

Tamangku kemudian diangkat sebagai kepala suku dan raja. Meskipun demikian, ia dibunuh oleh Sakurango Moovihe. Karena ketakutan, Tendeno, saudari Tamangku, melarikan diri ke Tonto. Di sana ia tinggal di pondok seorang kakek. Suatu ketika datanglah putra mahkota Kerajaan Suwawa bernama Makasumba. Ia terpesona akan kecantikan Tendeno dan berniat menikahinya. Setelah menikah, Makasumba memboyong Tendeno ke Suwawa. Mereka memiliki seorang putri bernama Loini. Ia menikah dengan putra Raja Limboto bernama Bareng Dua Wulu (Bilotohe) dan mempunyai lima orang anak-anak, yakni Roku, Eyato, Paudi, Gei, dan Lepeo (Mooreteo).[319]

Setelah terbunuhnya Tamangku, terjadi kekosongan kepemimpinan di Bintauna hingga akhirnya Lepeo diangkat sebagai penguasa Bintauna atas kehendak rakyat. Ia kemudian digantikan oleh putranya, Datu. Semasa pemerintahannya, masyarakat Bintauna berpindah ke Lasako. Ia menikah dengan Vua Rantoiya dan mempunyai

316. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Utara*, halaman 25.
317. Lihat *Boolang Mongondow: Etnik, Budaya, dan Perubahan*, halaman 127.
318. Lihat *Boolang Mongondow: Etnik, Budaya, dan Perubahan*, halaman 128.
319. Lihat *Boolang Mongondow: Etnik, Budaya, dan Perubahan*, halaman 130.

dua orang anak, yakni Volakia dan Pattilima.[320] Raja selanjutnya adalah Lahai karena Volakia menolak kedudukan itu. Kendati demikian, karena melakukan kesalahan saat berlangsungnya upacara adat–menabrak para putri yang sedang menari dengan kudanya sehingga baju salah seorang di antara mereka terinjak–Lahai diasingkan ke Maluku.

Sebagai penggantinya, diangkatlah Pattilima yang dinobatkan di Ternate pada 1783. Semenjak saat itu, ia memperoleh marga Datunsolang yang disandang oleh para raja Bintauna berikutnya.[321] Raja Pattilima Datunsolang yang memerintah pada awal abad 18 pernah memperoleh anugerah alat musik kulintango, *paungo* (payung kebesaran), *safuwa* (tambur), dan *bandingo* (gong) dari Sultan Ternate. Ia digantikan oleh Raja Salmon Datunsolang. Semasa pemerintahan Raja Salmon Datunsolang, pusat pemerintahan dipindahkan ke Voaa. Raja Bintauna berikutnya adalah Elijas Datunsolang yang dinobatkan pada 24 September 1857. Pada 1857, ia tercatat menandatangai *Korte Verklaring* yang isinya menyebutkan mengenai kewajiban raja dalam memajukan pertanian di wilayahnya.

Pengganti Raja Elijas Datunsolang adalah Raja Toraju Datunsolang, putra Raja Salmon Datunsolang, yang memindahkan pusat pemerintahan ke Vantayo. Pemerintahan pertamanya berlangsung dari 1857 hingga 1884. Selanjutnya, pemerintahan dilanjutkan oleh Raja Serail (Israel) Datunsolang (1884–1893) yang memerintah dari Pangkusa. Ketika itu, yang harus menggantikannya adalah putra Toraju Datunsolang, namun karena putra mahkota bernama Muhamad Turadju (Toraju) Datunsloang masih belum cukup umur maka singgasana diduduki kembali oleh Raja Toraju Datunsolang. Pemerintahannya yang kedua kalinya ini berlangsung antara 1893–1895. Pusat kerajaan ketika itu berada di Vantayo.

Kepemimpinan Bintauna kemudian beralih kepada Muhamad Turadju Datunsolang (1895–1948). Beberapa kali berlangsung perpindahan pusat pemerintahan, yakni Minanga, Bunia, dan Pimpi (1914). Pada masa pemerintahan Muhamad Turadju Datunsolang, masuklah bala tentara pendudukan Jepang. Saat itu, raja dibantu oleh presiden raja atau raja muda yang diganti gelarnya menjadi *fukusuco* oleh Jepang. *Fukusuco* masa itu adalah J.A.M. Datunsolang. Pejabat kerajaan lainnya adalah juru tulis kepala yang dijabat oleh C.D. Mokodenseho, beserta dua orang

320. Lihat *Boolang Mongondow: Etnik, Budaya, dan Perubahan*, halaman 131.
321. Lihat *Boolang Mongondow: Etnik, Budaya, dan Perubahan*, halaman 131

stafnya, yaitu A.M. Datunsolang dan M.A. Tinumbia. Tugas juru tulis kepala berkaitan dengan masalah keuangan dan administrasi pemerintahan. Mantri pertanian dijabat oleh R.M. Datunsolang yang tugasnya tentu saja berkaitan dengan masalah pertanian. Mantri kesehatan dijabat oleh H. Kolintamo. Pejabat yang menangani masalah jalan disebut mandor, yang saat itu dijabat oleh Daeng Toleba. Para pejabat kerajaan ini diangkat oleh raja. Karena wilayahnya yang terlalu kecil, Kerajaan Bintauna tidak dibagi lagi menjadi distrik beserta onderdistrik, dan hanya meliputi desa-desa Pimpi, Bintauna, Padang, Talaga, Bunia, Batulinti, Bintauna Pante, Kuhanga, Mome, dan Huntuk saja.[322]

II. BOOLANG ITANG (KAIDIPANG BESAR)

Leluhur para penguasa Boolang Itang adalah pasangan suami istri Nogoha dan Lomuka. Keturunan mereka bernama Salmon Muda (1793–1823) yang menjadi Raja Boolang Itang. Para penggantinya adalah Daud (1823–1863), Israel (1863–1880), Togupat (1880), Pade (1881–1882), Suit (1882–1883), Bonji Pontoh (1883–1907), dan Ram Suit Pontoh (1907–1950). Ibu kota kerajaan ini terletak di Boolang Itang, yakni di pesisir utara Sulawesi Utara. Pada 1911, Kerajaan Kaidipang digabungkan dengan Kerajaan Boolang Itang membentuk Kerajaan Kaidipang Besar. Raja Ram Suit Pontoh menjadi raja pertama bagi kerajaan gabungan baru yang ibu kotanya berada di Boroko atau bekas ibu kota Kerajaan Kaidipang tersebut. Selanjutnya, terjadi kesepakatan bahwa bila Raja Ram Suit Pontoh mangkat, penggantinya akan dipilih dari keluarga penguasa Kaidipang yang bermarga Karompot, tetapi hal ini tidak sempat terlaksana karena Raja Ram Suit Pontoh baru mangkat pada 1950, saat berlakunya penghapusan kerajaan dan swapraja di seantero wilayah Republik Indonesia.

Semasa pemerintahan Raja Ram Suit Pontoh, berlangsunglah pendudukan Jepang di seantero Kepulauan Nusantara. Raja saat itu dibantu oleh H.R. Pontoh selaku *jogugu* atau presiden raja, diganti gelarnya dengan istilah *renrakuin* atau *fukusuco*. Tugas *fukusuco* adalah penanggung jawab bagi roda pemerintahan sehari-hari. Karena dituduh sebagai mata-mata musuh, H.R. Pontoh diberhentikan dari kedudukannya dan digantikan oleh J.R. Pontoh pada 1944. Pejabat penting kerajaan lainnya adalah juru tulis kerajaan, pembantu juru tulis, dan magang. Pada zaman Jepang, yang menduduki jabatan sebagai juru tulis kerajaan adalah N.J. Rauma. Tugasnya berkaitan

322. Lihat *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Utara*, halaman 21.

dengan masalah administrasi dan keuangan. Pembantu juru tulis masing-masing adalah Djailolo Pomolango dan Male Buhang, sedangkan tiga orang magang adalah L.D. Karompot, H. Buhang, dan Lati Detu Kramat.

Kerajaan Boolang Itang terbagi atas dua distrik, yakni Kaidipang dan Boolang Itaang. Distrik Kaidipang dipimpin oleh H. Buhang dengan jabatannya sebagai *fukugunco*. H. Buhang mengundurkan diri pada 1944 dengan alasan telah lanjut usia dan digantikan oleh L.D. Karompot. Distrik Boolang Itang dipimpin oleh seorang *marsaoleh* (sebutan bagi kepala masyarakat hukum adat di Gorontalo) yang disebut *fukugunco* pada zaman Jepang. Saat itu, yang menjabat sebagai Fukugunco Boolang Itang adalah S.M. Pontoh. Masing-masing distrik ini membawahi lagi berbagai desa. Berikut ini adalah tabel pembagian wilayah di Kerajaan Boolang Itang.

Pembagian Wilayah Kerajaan Boolang Itang[323]		
No	**Distrik**	**Desa**
1	Kaidipang (ibu kota: Boroko)	Boroko, Kuala, Bigo, Pontak, Inomunga, Sokoputa, Kumu I, Kumu II, Tuntung, Batutajam, Dolapuli, Buho, Tuntulon, dan Kayuogu.
2	Boolang Itang (ibu kota: Boolang Itang)	Boolang Itang, Talaga, Tomuagu, Jambusarang, Sonuo, Olot, Pahu, Langi, Iyok, Tote, Nunuka, Mokoditek, Saleo, Bohabahak, Binjeita, dan Biontong.

III. BOLAANG MONGONDOW

a. Cikal Bakal Kerajaan Bolaang

Laporan historis mengenai keberadaan kerajaan ini telah ada semenjak 1674 melalui berita yang ditulis oleh seorang pendeta bernama Montanus[324] saat ia berkunjung ke Manado. Dalam tulisannya disebut mengenai "Kerajaan Manado" yang wilayahnya membentang hingga ke daerah Bolaang dan meluas terus ke arah barat Koeranga. Sebelah utaranya terbentang hingga ujung utara Poelisan. Selain itu, pulau-pulau di sekitar Selat Lembe dan sebelah timur laut serta pantai barat semuanya

323. Lihat *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Utara*, halaman 22.
324. Lihat *Minahasa: Dari Amanat Watu Pinawetengan Sampai Gelora Minawanua*, halaman 70-71.

tercakup dalam wilayah kerajaan ini. Sebenarnya, yang dimaksud dengan "Kerajaan Manado" oleh Montanus di atas adalah Kerajaan Bolaang.

Nenek moyang Raja Loloda Mokoagow yang memerintah pada zaman Montanus pernah menaklukkan Kerajaan Mouton dan semenjak itu menerima upeti dari negeri yang ditundukkannya tersebut. Ayah Raja Loloda Mokoagow dengan bantuan penguasa Negeri Siau tercatat pernah mengalahkan Kerajaan Kaudipan yang terdiri dari dua kampung, yakni Dauw dan Bolaang Itang. Selanjutnya, setelah Kaudipan dapat ditaklukkan oleh Boolang dan Siau, wilayahnya lalu dibagi menjadi dua. Dauw digabungkan dengan Bolaang, sedangkan Bolaang Itang masuk Kerajaan Siau. Menurut manuskrip karya Hans Hägerdal,[325] cikal bakal para penguasa Boolang Mongondow adalah Mokoduludut, yang kemudian digantikan oleh Yayubangkai (± 1460).

Lebih jauh lagi, disebutkan bahwa raja-raja Bolaang tidak berkuasa di pedalaman Sulawesi utara melainkan hanya di daerah pantainya saja. Nenek moyang mereka suatu kali pernah bertakhta di sebelah barat, yakni di balik Pegunungan Kime. Menurut Montanus, nama pegunungan ini dalam bahasa Alifuru disebut *nyare*, tetapi oleh orang Spanyol disebut *kema*, yang berarti kebakaran, karena banyaknya kebakaran yang mereka timbulkan di sana.

Cerita rakyat sendiri menyebutkan bahwa di kawasan itu pernah berkuasa Kerajaan Babontehu yang berpusat di Pulau Manado Tua. Kerajaan itu pernah mencapai kegemilangannya di bawah Raja Lumentut dan Mokodampis, bahkan pada masa pemerintahan cucu Raja Lumentut, wilayah kekuasaannya pernah mencapai daerah Bolaang. Kerajaan Babontehu mulai mengalami kemunduran pada zaman Raja Pasibori karena negeri ini ditaklukkan oleh Bolaang yang waktu itu dipimpin oleh Raja Damopoli (±1475–1550), pengganti Yayubangkai. Dengan demikian, semenjak saat itu di Sulawesi Utara, hegemoni berada di tangan Bolaang. Damopoli yang juga disebut Kinalang kini dianggap sebagai pahlawan oleh rakyat Bolaang-Mongondow.

Bolaang berhasil mengalahkan pula kerajaan lain yang berpusat di Maadon. Menurut Riedel dan Grafland, lokasinya terletak di sekitar Lilang atau Lilang itu sendiri. Jasper menyebutnya Miagong dan kemungkinan inilah yang dimaksud dengan Kema oleh Montanus. Leluhur Maadon tampaknya berasal dari Maluku

325. Lihat *Kerajaan2 Indonesia*, halaman 52.

utara. Valentijn menuturkan bahwa pada 1380, Raja Ternate menduduki beberapa wilayah di Jailolo (Halmahera). Saat itu memang Ternate sedang bertumbuh menjadi kekuatan yang disegani di Maluku. Bertambah kuatnya Ternate ini dirasakan sebagai ancaman oleh beberapa kerajaan di Halmahera, termasuk negeri yang bernama Loloda. Oleh karenanya, putra Raja Loloda pergi meninggalkan kampung halamannya dan akhirnya terdampar di Maadon. Ia lalu mendirikan kerajaan baru di Maadon yang disegani oleh negeri-negeri kecil di Sulawesi Utara lainnya. Mereka tidak segan-segan meminta petunjuk darinya saat menghadapi kesulitan.

Montanus menulis bahwa putra Raja Loloda ini bukan raja biasa dan dikenal sebagai seorang bajak laut. Meskipun demikian, ia merupakan tokoh yang disegani sehingga seorang raja terkemuka pada masa sesudahnya yang bernama Datuk Binangkang mengganti namanya menjadi Loloda Mokoagow. Seperti yang telah diungkapkan oleh Montanus, Padtbrugge yang singgah di Manado pada 1677 menyatakan bahwa kerajaan ini hanya berkuasa di pantai. Penduduk pedalaman tidak mengenal eksistensi kerajaan ini dan begitu pula sebaliknya. Bahkan penduduk kerajaan yang berada di pesisir pantai ini tak mengira bahwa di pegunungan atau pedalaman ada penghuninya, sebelum menyaksikan sisa-sisa dedak padi yang hanyut di sungai. Karenanya, mereka lantas berpikir bahwa di daerah pegunungan pasti ada penduduknya yang bercocok tanam padi. Lebih jauh lagi, kegiatan perburuan yang dilakukan oleh penduduk pantai membawa mereka makin jauh ke pedalaman sehingga akhirnya terjadilah kontak antara dua kelompok masyarakat tersebut. Kendati demikian, hubungan yang erat antar keduanya baru terjalin jauh setelah perjumpaan itu.

Ketika keturunan Loloda dari Maadon telah wafat, Maadon mengalami kemunduran dan akhirnya ditaklukkan oleh Bolaang. Semenjak saat itu, Maadon ditempati oleh para prajurit yang berasal dari Bolaang. Mereka mengadakan penyusupan ke daerah pedalaman sehingga terjadilah peperangan dengan orang-orang Tonsea, Tondano, dan Tombuku dari pedalaman. Pasukan Boolang berhasil dipukul mundur oleh pasukan gabungan yang berasal dari pedalaman ini sehingga mereka terpaksa angkat kaki meninggalkan Maadon dan mengungsi ke Pulau Babontehu, bekas pusat kerajaan yang dahulu pernah mereka kalahkan tersebut. Tempat itu lalu diubah namanya menjadi Maadon, yang akhirnya berubah kembali menjadi Manado.

b. Perkembangan Kerajaan Boolang Mongondow

Singgasana Damopoli diwarisi secara berturut-turut oleh Butiti (± 1510), Makalolo (± 1540), Mokodampit, Mokoagow, dan Tadohe (± 1600). Saat itu, rakyat Boolang Mongondow masih menganut animisme. Pengganti Raja Tadohe adalah Loloda Mokoagow (1653–1689). Ia merupakan raja pertama yang menganut agama Islam sehingga agama tersebut disebut agama raja.[326] Kurang lebih bersamaan dengan pemerintahan raja ini, datanglah orang-orang Spanyol dengan tujuan berdagang. Mereka membawa piring, kain, katun, perkakas dari besi, dan lain sebagainya. Selain itu, kedatangan bangsa Spanyol juga didasari misi penyebaran agama Katolik. Manoppo, putra Raja Loloda Mokoagow dengan istri keduanya, orang Minahasa asal Amurang, dibaptis memasuki agama Katolik oleh orang-orang Spanyol sehingga namanya menjadi Jacobus Manoppo (Jacobus I). Ia kemudian menggantikan ayahnya sebagai Raja Boolang Mongondow (1689–1731).

Para pengganti Raja Jacobus Manoppo hingga Jacobus Manuel Manoppo (Jacobus II) juga beragama Katolik. Secara berturut-turut raja-raja Boolang Mongondow berikutnya adalah Fransiscus Manoppo (1731–1734), Salomon Manoppo (1734–1764), dan Eugenius Manoppo (1764–1770). Pada zaman Raja Eugenius Manoppo datanglah para pelaut Bugis yang dipimpin oleh Andi Latai. Armada Bugis yang disebut Pandekawang ini terlibat pertempuran di laut dan mendarat di Sungai Sumoit serta meminta perlindungan Raja Boolang Mongondow. Di istana, Andi Lantai melihat putri raja bernama Hontinimbang dan jatuh hati kepadanya. Andi Latai meminang putri raja tersebut guna dinikahi secara Islam. Raja Eugenius Manoppo menerima lamaran itu, asalkan Andi Latai bersedia membayar denda karena putri itu berpindah agama dari Katolik ke Islam. Setelah denda dibayarkan berlangsunglah pernikahan secara Islam. Dengan demikian, masuklah agama Islam dalam lingkungan Istana Boolang Mongondow. Saat itu, agama Katolik juga masih terbatas di kalangan istana karena menurut pengamatan Andi Latai tidak ada gereja yang didirikan di kampung-kampung. Setelah Raja Eugenius Manoppo, penguasa di Boolang Mongondow adalah Christoffel Manoppo (1770–1779), Manuel Manoppo (1779–1811), Cornelis Manoppo (1811–1829), Ismail Manoppo (1829–1833), dan Jacobus Manuel Manoppo (1833–1858).

326. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Utara*, halaman 98.

Semasa pemerintahan Raja Jacobus Manuel Manoppo yang juga dikenal sebagai Jacobus II, didirikan sebuah sekolah di Ibu kota Bokota Boolang, tetapi sekolah ini kemudian ditutup karena gurunya, Jacobus Bastian, meninggal dunia dan penggantinya tidak kunjung dikirimkan. Bersamaan dengan kurun waktu ini telah ada kelompok penganut Islam di Motoboi Kecil (dataran tinggi Mongondow). Mereka dipimpin oleh seorang tokoh bernama Damapolli dan hakim agama bernama Tuoko. Suatu ketika, kelompok masyarakat ini mengadakan pesta pernikahan secara Islam dan raja juga diundang menghadirinya. Pada kesempatan itu, dinyanyikan lagu-lagu *qasidah* dan pengajian oleh Kiling, putri Tuoko. Suaranya yang merdu memikat hati Raja Jacobus Manuel Manoppo. Oleh karenanya, raja bermaksud melamar Kiling. Tuoko tidak keberatan asalkan raja mau menganut agama Islam. Raja menjawab bahwa ia bersedia memenuhi persyaratan ini. Keputusan raja ini menghebohkan kalangan istana dan tidak sedikit kaum bangsawan yang menentang niat tersebut. Namun, raja dapat mengatasi semuanya dengan baik. Seusai pernikahan, raja memberitahukan hal itu pada Residen Belanda di Manado. Ternyata, residen tidak keberatan raja berpindah menganut agama Islam, bahkan ia menyarankan agar raja kini memakai gelar sultan sebagaimana halnya raja-raja Muslim lainnya di seantero Kepulauan Nusantara. Karena itu, raja kemudian juga dikenal sebagai Sultan Jacobus.

Setelah masuknya raja ke agama Islam, kaum bangsawan dan rakyat Boolang Mongondow berbondong-bondong mengikutinya. Hingga kurang lebih pada 1845, seluruh keluarga raja telah menganut agama Islam, terkecuali seorang wanita bernama Bua Oki Manoppo yang tetap mempertahankan agama Katolik dan bahkan meninggal dengan memegang Injil di tangannya. Di kalangan rakyat, biasanya anak-anak terlebih dahulu memeluk agama Islam dan baru mengikuti agama orang tuanya. Kendati demikian, ada pula di antara mereka yang hingga meninggal tidak menganut agama apapun. Ada pula yang orang tua dan anaknya menganut agama Islam secara bersamaan. Pada 1860, datanglah seorang ulama bernama Syekh Abdul Latief Rezik Makki yang menjabat ustad dari Mekah. Ia merupakan ulama yang dijanjikan oleh Residen Manado ketika Raja Jacobus Manuel Manoppo menghadap wakil pemerintah kolonial Belanda tersebut. Waktu itu, kurang lebih 50% penduduk Boolang Mongondow telah menganut agama Islam, sedangkan sisanya masih animisme. Saat ulama ini tiba, Raja Jacobus Manuel Manoppo (Sultan Jacobus) telah digantikan oleh Adrianus Cornelis Manoppo (1858–1862). Raja menikahkan Boki Besar Bua

Mulawan Manoppo dengan Syekh Abdul Latief Rezik Makki, tetapi tidak dikaruniai keturunan. Belakangan Syekh Abdul Latief Rezik Makki menikah lagi dengan Bai Edong Mokoagow dan memperoleh tiga orang putra bernama Mohammad Rezik Makki, Mahadi Rezik Makki, dan Madani Rezik Makki, serta seorang putri bernama Hania.

Pernikahan Andi Latai dengan Puteri Hontinimbang membuahkan enam orang anak. Putra ketiga mereka, Andi Panungkelan, lahir bertepatan dengan malam Nuzulul Qur'an sehingga dianggap membawa keberuntungan di masa mendatang. Pada usia empat tahun, Andi Panungkelan dibawa orang tuanya ke Tanah Bugis guna mempelajari ilmu agama dan ketika berusia 14 tahun kembalilah ia ke Boolang Mongondow. Karena keahliannya dalam ilmu agama ini, ia diangkat sebagai khatib besar. Selain itu, Andi Panungkelan juga aktif menyebarkan agama Islam. Ketika Raja Johanis Manuel Manoppo (1862–1880) yang menggantikan Adrianus Cornelis Manoppo mangkat, tak seorangpun dari keluarga Manoppo yang memenuhi syarat sebagai penggantinya. Oleh sebab itu, Andi Panungkelan dipilih sebagai Raja Boolang Mongondow yang baru dengan gelar Abraham Sugeha (1880–1893).

Raja Riedel Manuel Manoppo (1893–1902) merupakan Raja Boolang Mongondow berikutnya. Ia merupakan penguasa yang memerhatikan pendidikan. Dua orang putranya, masing-masing bernama Jacobus Riedel Manoppo dan Johannis Manuel Manoppo dikirimkan menempuh pendidikan di *Hoofdenschool* Tondano, Minahasa, pada 1897–1902. Raja Riedel Manuel Manoppo menyadari pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsanya. Pada zaman itu, sekolah-sekolah yang dibuka oleh pemerintah kolonial Belanda hanya menerima anak-anak raja, bangsawan, dan para pemuka rakyat. Karenanya, sekolah semacam ini disebut Sekolah Raja. Dalam kurun waktu 1897–1902, hanya ada empat siswa saja yang berasal dari Boolang Mongondow. Sementara itu, dua orang siswa lainnya masing-masing adalah kemenakan Raja Riedel Manoppo yang bernama Herman Manoppo dan Filip Ponto, putra Raja Ram Suit Ponto dari Boolang Itaang.

Belanda berupaya menanamkan pengaruhnya di Boolang Mongondow. Oleh karena itu, dilakukan pembentukan *Onderafdeeling* Boolang Mongondow dan menempatkan seorang kontrolir bernama Anthon Cornelis Veenhuyzen selaku kepanjangan tangan pemerintah kolonial Belanda pada 1901. Raja Riedel Manoppo yang anti-Belanda tidak sudi menerima penempatan ini di ibu kota kerajaannya

mengingat pengalaman pahit leluhurnya, Raja Salomon Manoppo, yang dibuang oleh pemerintah Belanda ke Tanjung Harapan antara 1748–1754. Ia beserta rakyatnya memperlihatkan sikap permusuhannya sehingga kontrolir ini terpaksa kembali ke Manado. Dengan licik Belanda mengangkat Datu Cornelis Manoppo, saudara raja, menjadi Raja Boolang Mongondow yang baru. Karena itu, kini terdapat dua orang raja di Boolang Mongondow.

Raja Datu Cornelis Manoppo lalu kembali ke Boolang Mongondow dengan dikawal sepasukan polisi Belanda. Guna menghindari bentrokan dengan pengikut Raja Riedel Manuel Manoppo yang masih bertakhta, mereka mendarat di tempat lain. Datu Cornelis Manoppo membangun pemerintahannya di Kotobangon dan mengambil alih sebagian besar wilayah Raja Riedel Manuel Manoppo. Namun, pertumpahan darah tidak terjadi karena Raja Riedel Manuel Manoppo meninggal setahun kemudian (1902).

Raja Datu Cornelis Manoppo (1901–1927) menjadi satu-satunya raja di Boolang Mongondow. Ia memindahkan ibu kota Boolang Mongondow ke Kotobangon di daerah pedalaman.[327] Hingga masa pemerintahan Riedel Manuel Manoppo, raja dibantu oleh seorang perdana menteri yang bergelar *sahada tompunuon*. Orang terakhir yang memegang kedudukan ini sebelum dihapus oleh Belanda adalah Angki Lasabuda. Setelah penghapusan jabatan *sahada tompunuon*, kedudukan tertinggi sesudah raja adalah *jogugu*. Tugas pengamanan di laut diserahkan pada *kapitan laut*, sedangkan di darat pada *mayor kadato*. Dengan dipindahkannya ibu kota Boolang Mongondow ke Kotobangon yang terletak di pedalaman, jabatan *kapitan laut* dihapuskan sehingga kedudukan *mayor kadato* menjadi makin penting. Berikutnya, pada 1904 seluruh pejabat kerajaan, termasuk raja, diberi gaji oleh pemerintah kolonial Belanda.

Seiring dengan diberlakukannya politik etis, pemerintah kolonial Belanda berniat menyelanggarakan pendidikan di Indonesia, tetapi karena keterbatasan mereka, Belanda lalu meminta bantuan *zending* (misi penyebaran agama Kristen) untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Hal ini beriringan dengan penyiaran agama Kristen di Boolang Mongondow saat Pendeta W. Dunnebier mulai ditugaskan di kawasan itu pada 1905. Tiga puluh orang guru dari Minahasa didatangkan dari Minahasa oleh *zending* pada 1906 dan selanjutnya didirikan berbagai sekolah di empat belas tempat sekaligus, yakni di Nanasi, Poopo, Nonapan, Mariri Lama, Kotobangon, Moyag, Patondon, Pasi,

327. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Utara*, halaman 25.

Poopo Mongondow, Otam, Motoboi Besar, Pobundayan, Kopandakan, Poyowa Kecil, dan Mongkonai. Sekolah HIS didirikan pada 1911 di Kotamobagu dengan gedung sekolah sumbangan Raja Datu Cornelis Manoppo. Hal ini memperlihatkan bahwa Raja Datu Cornelis Manoppo sangat gembira dengan pengembangan pendidikan yang dilakukan oleh *zending*. Raja bahkan memperlihatkan toleransinya yang tinggi terhadap agama Kristen dengan memerintahkan agar hari pasar di Kotamobagu yang biasanya jatuh pada hari Minggu ke hari Sabtu. Peraturan ini ditetapkan mulai 1 Juli 1911 dan dipatuhi oleh segenap rakyat Boolang Mongondow yang sebagian besar beragama Islam.

Sehubungan dengan pergerakan nasional, Raja Datu Cornelis Manoppo pernah menghibahkan sebidang tanah seluas 10 hektare kepada organisasi Sarekat Islam (SI) pada 1924. Sebelumnya, organisasi pergerakan tersebut pernah meminta izin kepada kontrolir Belanda bagi pendirian sekolah-sekolah di Boolang Mongondow, tetapi tidak dikabulkan. Oleh karenanya, mereka lalu beralih pada bidang ekonomi dan meminta sebidang tanah kepada raja selaku pemilik tanah di seantero kerajaannya berdasarkan hukum adat *totabuan*. Tanah seluas 10 hektare yang dihibahkan raja tersebut kemudian ditanami kopi dan mulai membuahkan hasil pada 1929/1930. Belakangan, upaya pendirian sekolah itu diperjuangkan kembali. Atas saran seorang guru dari Minahasa bernama Nendu, para pemimpin SI mengajukan permohonan izin ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, bahkan kalau perlu hingga ke pemerintah pusat di Batavia. Ternyata, Residen Manado juga menolak permohonan mereka. Karenanya, Adampe Dolot, ketua cabang SI Boolang Mongondow, lantas menghadap pemerintah pusat Hindia Belanda. Ternyata permohonan ini dikabulkan dan *Departement van Onderwijs en Eeredienst* yang menyatakan agar Adampe Dolot segera kembali ke Boolang Mongondow sambil menunggu diserahkannya surat izin oleh kontrolir. Dengan demikian, pada 1926 berdirilah sekolah pertama milik SI di Boolang Mongondow.

Putra raja, Laurens Cornelis Manoppo (1927–1938), yang sebelumnya telah menjabat sebagai wakil raja karena Raja Datu Cornelis Manoppo telah lanjut usia, diangkat sebagai Raja Boolang Mongondow berikutnya ketika ayahnya mangkat pada 12 Februari 1927, tetapi ia baru resmi dilantik pada 28 Juni 1928. Kala itu, jabatan kontrolir sementara waktu dirangkap oleh Asisten Residen Gorontalo bernama Mr. M. Allart hingga 1930. Baru pada 23 April 1930, diangkatlah seorang kontrolir khusus bagi *Onderafdeeling* Boolang Mongondow bernama Ochtman.

Pada 1938, Raja Laurens Cornelis Manoppo diturunkan dari takhtanya karena dituduh menyalahgunakan keuangan daerahnya. Selanjutnya, dibentuk suatu komisi yang disebut *Zelfbestuur Commissie* guna menjalankan pemerintahan di kerajaan itu. Komisi ini diketuai oleh kontrolir sendiri dengan dua orang anggotanya, yakni H.D. Manoppo (Kepala Distrik Boolang) dan Max Makodampit (Kepala Distrik Mongondow). Sedangkan yang menjadi kontrolir secara berturut-turut adalah A. van Wieren (1937–1941), Mr. Quick (1941), Mr. Smidt (1941), dan terakhir oleh Mr. de Wit.[328] Setelah Mr. de Wit dua bulan menduduki jabatannya, masuklah bala tentara Jepang ke Boolang Mongondow.

Pendudukan Jepang di Boolang Mongondow diawali pada 9 Maret 1942 dengan kedatangan Matsuda, pembesar Jepang yang dikirim oleh Komandan Tentara Pendudukan Jepang di Minahasa. Tugasnya adalah mengambil alih bekas pemerintahan *Onderafdeeling* Boolang Mongondow yang telah ditinggalkan oleh Belanda. Seperti di bagian lain Kepulauan Nusantara, daerah *onderafdeeling* ini diganti sebutannya menjadi *bunken* sehingga dengan demikian pada zaman Jepang namanya adalah Boolang Mongondow Bunken. Matsuda ditugaskan menjadi kepala bagi *bunken* ini, yang dalam bahasa Jepang disebut *bunkenkarikan*. Jabatan ini setingkat dengan kontrolir pada zaman Belanda. Pejabat yang ditempatkan oleh bala tentara pendudukan Jepang ini mengawali tugasnya dengan memperbaiki kantor *onderafdeeling* di Kotamobagu.

Jepang membubarkan *Zelfbestuur Commisie* pada 1943 dan mengangkat Henry Jusuf Cornelis (H.J.C.) Manoppo (1943–1948), putra Raja Laurens Cornelis Manoppo, sebagai Raja Boolang Mongondow. Selain itu, Jepang juga mengganti beberapa kepala distrik (digelari *gunco* oleh Jepang) dan kepala onderdistrik (digelari *fukugunco* oleh Jepang) di Boolang Mongondow, seperti Gunco Boolang H.D. Manoppo digantikan oleh J.W. Manoppo, Fukugunco Pasi J.W. Manoppo digantikan oleh K.C. Mokoginta, dan Fukugunco Lolayan Arsjad B. Damopolii digantikan oleh F.J.K. Damopolii. Arsjad B. Damopolii kemudian diangkat sebagai Gunco Mongondow, sedangkan Max Mokodampit diangkat sebagai *fukusuco* (wakil raja) Boolang Mongondow.[329]

328. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Utara*, halaman 155.
329. Lihat *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Utara*, halaman 20.

Pada era kemerdekaan, Raja H.J.C. Manoppo yang merupakan Raja Boolang Mongodow terakhir diangkat sebagai Bupati Boolang Mongondow dengan masa bakti 1955–1959.

c. Sistem Pemerintahan

Raja merupakan penguasa tertinggi di Boolang Mongondow dan dibantu oleh *jogugu* (wakil raja). Selanjutnya, kerajaan dibagi menjadi berbagai distrik yang dikepalai oleh seorang penghulu atau kepala distrik. Distrik-distrik ini masih dibagi lagi menjadi onderdistrik yang dikepalai *mayor kadato*. Selanjutnya, di bawah onderdistrik terdapatlah desa-desa yang masing-masing dipimpin seorang *sangadi* (kepala desa). Berikut ini adalah tabel pembagian wilayah di Boolang Mongondow.

Pembagian wilayah Kerajaan Boolang Mongondow[2]			
No	**Distrik**	**Onderdistrik**	**Desa**
1	Mongondow (Ibu kota: Kotobangon)	Pasi (Pusat pemerintahan di Pasi)	Kotamobagu, Pasi, Biga, Pontodon, Mogolaing, Kotobangon, Bilalang, Pangian, Popo Mondondow, Modayag, Moyag, Komangaan, Muntoi, Bintau, Bulud, Otam, Wulud, Lobong, Manembo, dan Gogagoman.
		Lolayan (pusat pemerintahan di Motobi Besar	Molinow, Mongkonai, Mongondow, Poyowa Kecil, Poyowa Besar, Kobo Kecil, Kobo Besar, Matali, Sinindian, Pobundayan, Kopundakan, Bungko, Mopait, tumobui, dan Tungoi.
2	Hulu Distrik Boolang (ibu kota: Inobonto)	Lolak	Lolak, Solok, Tandu, Mongoinit, Motabang, Buntalo, Ayong, Maelang, Domisik, Sangkub, dan Sauk
			Bolaang, Ambang, Pantik, Lolan, Mariri, dan Solimandungan.

3	Langsung di bawah Kerajaan Boolang Mongondow	Dumoga (Pusat pemerintahan: Kinolontagan)	Kinolontagan, Dumoga, Tapao, Doloduo, Tobayogan, Torosit, Dumagin, dan Unggunoi.
		Kotabunan (Pusat pemerintahan: Kotabunan)	Kotabunan, Buyat, Tutuyan, Nuangan, Molobok, dan Matabulu

Berdasarkan tabel di atas, terdapat dua onderdistrik yang langsung berada di bawah pemerintahan Kerajaan Boolang Mongondow, yakni Dumoga dan Kotabunan. Pada zaman Jepang berlaku penggunaan istilah Jepang bagi kepala-kepala pemerintahan di Boolang Mongondow, gelar raja diganti dengan *suco*, *jogugu* atau wakil raja diganti dengan *fukusuco* atau *renrakuin*, penghulu diganti dengan *gunco*, *mayor kadato* diganti dengan *fukugunco*, dan *sangadi* diganti dengan *sonco*.

d. Sosial Kemasyarakatan

Awalnya masyarakat di Boolang Mongondow terbagi menjadi dua golongan saja, yakni *kinalang* dan *paroko*.[330] Namun, pada perkembangan selanjutnya tumbuh tiga golongan dalam masyarakat, yakni *mododatu* (raja dan keluarganya), *kohongian* (bangsawan), dan *simpal* (rakyat jelata). Belakangan timbul pula golongan *tahig* (*yobuat*), yakni para budak dan hamba sahaya. Seseorang bisa masuk dalam strata lapisan terbawah ini terutama karena tiga hal, yaitu berhutang dan tak sanggup membayarnya; melanggar kehormatan raja, seperti mengintip raja yang sedang mandi dan menyentuh peralatan milik raja; serta tertawan dalam peperangan. Adanya golongan budak ini berlangsung hingga 1903 ketika Raja Datu Cornelis Manoppo melarang perbudakan.[331] Pada waktu itu, semua budak dibebaskan dengan mendapat tanda pembebasan dari raja.

Tradisi lama masyarakat Boolang Mongondow adalah *Momalinga*, yaitu praktik mencari petunjuk atau mengajukan pertanyaan pada alam gaib, misalnya dengan sarana mendengarkan bunyi burung hantu. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan antara lain berkenaan dengan peperangan (akan meraih kemenangan atau kekalahan), perjalanan (patut dilaksanakan atau dibatalkan), pendirian rumah (diizinkan atau tidak diizinkan),

330. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Utara*, halaman 48.
331. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Utara*, halaman 48.

dan lain sebagainya. *Medeangoungou* atau praktik menentukan obat yang mujarab bagi suatu penyakit. Penyembuhan suatu penyakit juga dilakukan melalui tarian adat atau tari *tayok*. Karena itu, praktik semacam ini disebut *motayok*. Saat hendak memulai suatu aktifitas, umpamanya membuka hutan, masyarakat memberikan pula berbagai sesajian pada makhluk-makhluk halus. Upacara persembahan semacam ini disebut *tengkiuna menilen*.

IV. BOOLANG UKI

Ibu kota Kerajaan Boolang Uki mula-mula berada di Walugu dan setelah itu dipindahkan ke Sauk.[332] Raja pertama kerajaan ini bernama Wintu-Wintu yang memerintah dari Pulau Lembe.[333] Ia digantikan oleh putranya bernama Datulango. Raja berikutnya adalah putra Wintu-Wintu, Datulango, yang digantikan oleh putranya yang bernama Mosolaingo. Ia lalu digantikan oleh saudaranya, Daopayago. Ia bersama rakyatnya mengadakan migrasi ke arah barat. Daopayago digantikan oleh Pasuma, yang memerintahkan rakyat berpindah ke Tapa.

Rakyat merasa kurang puas dengan pemerintahan Pasuma sehingga ia akhirnya menyerahkan kekuasaaan kepada Immingo. Penguasa Kerajaan Boolang Uki selanjutnya secara berturut-turut adalah Mogolaigu, Sangian Datu, dan Gobel. Raja Gobel dinobatkan di Ternate dan merupakan raja pertama yang bekerja sama dengan Belanda. Ia digantikan oleh menantunya, Mokosisi. Raja selanjutnya di Boolang Uki secara berturut-turut adalah Polingala, Pulubulawa, Matoka, Bagule, Napu, dan Katili. Semasa pemerintahan Katili, pada 1825 berlangsung perpindahan penduduk ke Manggupu. Rangkaian raja selanjutnya adalah Matoka dan Tuako. Pada masa Tuako, rakyat berpindah lagi ke Lombangin. Raja berikutnya adalah Unonongo yang digantikan kembali oleh Iskandar Budiman van Gobel (1856–1886).[334] Terjalin ikatan kekeluargaan dengan Kerajaan Boolang Mongondow melalui pernikahannya dengan putri Raja Boolang Mongondow, Bua Mutiara. Semasa pemerintahannya, diberlakukan pajak bagi yang sudah berusia di atas 20 tahun atau sudah menikah.[335] Singgasana kerajaan kemudian diduduki oleh Raja Ali Akbar (1865–1895) dan

332. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Utara*, halaman 25
333. Lihat *Boolang Mongondow: Etnik, Budaya, dan Perubahan*, halaman 117.
334. Lihat *Boolang Mongondow: Etnik, Budaya, dan Perubahan*, halaman 120.
335. Lihat *Boolang Mongondow: Etnik, Budaya, dan Perubahan*, halaman 120.

setelah itu beralih kepada Raja Wellem van Gobel, putra Raja Iskandar van Gobel. Ia digantikan oleh putranya, Hasan Gobel.

Sementara itu menurut sumber lainnya, pada abad 19 yang berkuasa di Boolang Uki adalah Raja Willem van Gobel (1872–1901). Ia digantikan oleh Raja Hasan Iskandar van Gobel (1901–1941) yang pada 1906 memindahkan Ibu kota Boolang Uki ke Molibagu di pesisir selatan. Raja Boolang Uki berikutnya adalah Arie Hasan Gobol yang berkuasa hingga masuknya bala tentara pendudukan Jepang. Ia memiliki radio yang dapat dipergunakan memantau segenap perkembangan yang ada, termasuk makin terdesaknya kekuatan militer Belanda. Ketika Jepang menduduki Boolang Uki, raja tetap dipertahankan, hanya saja gelarnya diganti dengan *suco*. Dalam menjalankan pemerintahannya, raja dibantu oleh seorang *jogugu* (wakil raja), yang pada zaman jepang diganti sebutannya menjadi *fukusuco*. Saat itu, yang menduduki jabatan *fukusuco* adalah W. A. Zulhadji.[336] Dari segi struktur pemerintahan, Kerajaan Boolang Uki tidak dibagi lagi menjadi distrik-distrik karena luasnya yang terlalu kecil.

V. KAIDIPANG

Ibu kota kerajaan Kaidipang terletak di Boroko, yakni di pesisir utara dekat perbatasan dengan bekas Kerajaan Atinggola di Gorontalo.[337] Leluhur para penguasa Kaidipang adalah Anggaduoyo yang menikah dengan Manggubi. Cucu Anggaduoyo, Pugu-Pugu Datu Binangkol Korompot (Mauritz, ± 1677), menjadi Raja Kaidipang pertama. Raja-raja selanjutnya yang pernah memerintah Kaidipang adalah Tiaha I, Dadoali, Philips (± 1729), Piantai (Albertus Karompot, 1729–± 1750), Antogia (David Karompot, 1750–1763), Gonggala I (Yakobus Karompot, 1763–1782), Tatu (Waladdin Karompot atau Willem David Cornput, 1787–1817), Toruru (1817–1835), Tiaha II (1835–1863), Pandis (van Dienst, Muhammad Nurdin, 1863–1866), Gonggala II (Makensi, 1866–1898), dan Louis (1898–1903).

Singgasana Kaidipang kemudian diduduki oleh Raja Antugio Karompot (1903–1910). Ketika raja mangkat pada 1910, tak ada seorang pun anggota keluarga kerajaan yang sanggup menggantikannya. Putra-putranya masih terlampau muda usianya, sedangkan anggota keluarga kerajaan yang telah lanjut usia merasa tidak sanggup memangku jabatan tersebut. Karena keluarga Kerajaan Boolang Itang yang

336. Lihat *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Utara*, halaman 21.
337. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Utara*, halaman 26.

bermarga Ponto masih sekerabat dengan keluarga Karompot dari Kaidipang maka permasalahan ini meluas juga hingga ke Boolang Itang. Terjadi perbedaan pendapat antara kedua keluarga mengenai siapa yang layak menjadi pengganti almarhum Raja Antugio Karompot.

Residen Manado turun tangan menengahi perbedaan pendapat tersebut dan menggelar sidang gabungan di Boroko pada 1911. Akhirnya, disepakati bahwa kedua kerajaan itu akan digabungkan menjadi Kerajaan Kaidipang Besar dengan Raja Ram Suit Ponto dari Boolang Itang sebagai rajanya yang pertama. Selanjutnya, dicapai pula kesepakatan bahwa apabila Raja Ram Suit Ponto mangkat atau mengundurkan diri maka Raja Kaidipang Besar berikutnya akan diangkat dari keluarga Karompot dan demikian seterusnya dijabat secara bergantian oleh kedua keluarga tersebut. Kendati demikian, kesepakatan ini tak pernah terlaksana karena Raja Ram Suit Ponto baru mangkat pada 1950 saat terjadi penghapusan kerajaan-kerajaan dan swapraja dalam wilayah Republik Indonesia.

VI. KENDAHE

Raja pertama Kerajaan Kendahe adalah Wagama yang bergelar *kulano*. Ia digantikan oleh Sarib Mansyur, seorang bangsawan dari Mangindano di Mindanao, Filipina bagian selatan. Sarib Mansyur juga sekaligus merupakan seorang tokoh yang menyebarkan agama Islam di Kendahe. Putri Sarib Mansyur bernama Fatimah menikah dengan Mehegalangi, putra Sultan Ahmad dari Mangindano. Pernikahan ini membuahkan seorang putra bernama Boeisang yang kelak menjadi Raja Kendahe. Ia merupakan penguasa Kendahe pertama yang menjalin persahabatan dengan VOC. Sebagai tanda persahabatan tersebut, Gubernur Maluku J.H. Thim menghadiahkan sebuah piring perak kepada Raja Boeisang pada 26 Agustus 1688. Piring tersebut terdapat tulisan *"Den Edele Heer Joan Henric Thim, Gouverneur en Directeur oven de Moluccos, heeft dit Silvere Schenk-bort van eert aan Syn Hoogh Datu Boeisang, Koning tot Candahar, in Jaar 1668 den 26 Augustus."*[338] Terjemahan bahasa Indonesianya kurang lebih berbunyi 'Yang Mulia Tuan Joan Henric Thim, gubernur dan direktur atas Kepulauan Maluku, telah menghadiahkan piring perak ini sebagai tanda penghormatan kepada Yang Mulia Datu Boeisang, Raja Candahar, pada 1688, tanggal 26 Agustus.'

338. Lihat *Sejarah Daerah Sulawesi Utara* halaman 48.

Setelah Sultan Ahmad–kakeknya–meninggal, Raja Boeisang kembali ke Mangindano karena kawasan itu masih berada di bawah kekuasaan Kendahe. Putrinya, Loholawo, menikah dengan Markus Yacobus Dalero (1718–1724), Raja Tabukan, yang menyerahkan daerah Makiwulaeng sebagai mas kawinnya. Oleh karenanya, melalui perkawinan ini Kerajaan Kendahe menyebarkan pengaruhnya hingga ke Tabukan. Hal ini berlangsung hingga 31 Agustus 1898. Raja Boeisang digantikan oleh putranya yang bernama Syam Syah Alam Samausialang (± 1688–1711). Semasa pemerintahannya, Gunung Awu meletus pada 10 Desember 1711 yang menurut cerita disebabkan oleh perbuatan sumbang putra raja sendiri bernama Sangiang Nanding. Konon, anak raja tersebut juga ikut menjadi korban. Para pengganti Syam Syah Alam Samausialang secara berturut-turut adalah Johannes Karambut I (1711–1729) dan Andries Manabung (Tasensulung, 1729–1769). Pada perkembangan selanjutnya, Raja Kendahe Makaado (Manuel Manabung, 1773–1792) pernah dipilih langsung secara demokratis oleh rakyat. Para penguasa Kendahe berikutnya yang menggantikan Makaado adalah Johannes Karambut II (Ansaawuwo, 1793–1827) dan Frederik Karambut II (Umboliwutang, 1827–1845).

Raja Kendahe terakhir adalah Daniel Peturs (D.P.) Simbat Yanis (1845–1893).[339] Masa pemerintahannya kerap terjadi perselisihan dengan Tahuna mengenai tapal batas antar kerajaan. Sebagai penyelesaiannya, Belanda memindahkan pusat kerajaan dari Watuwukala ke Tanjung Barak. Selanjutnya, daerah Egalipaeng ditukar dengan Tarianglama milik Kerajaan Tabukan pada 1881. Setelah Raja D.P. Simbat Yanis mangkat pada 1898, tidak diangkat lagi penggantinya serta Kerajaan Kendahe digabungkan dengan Tahuna menjadi Kerajaan Kendahe-Tahuna. Ibu kotanya berada di Tahuna dengan Soleman Ponto sebagai rajanya.[340] Meskipun demikian, buku *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Utara* halaman 20 menyebutkan bahwa penggabungan ini terjadi pada 1893 dengan rajanya bernama Salmon Tuwa Badai Dumalang. Penyatuan kedua kerajaan ini dipicu oleh letusan Gunung Awu pada 1892 sehingga mengakibatkan korban jiwa sebanyak 1.500 orang. Sebagai catatan, saat masih dalam masa pemerintahan Raja D.P. Simbat Yanis, Gunung Awu sudah pernah meletus pada 1856 dengan menelan korban sejumlah 2.830 jiwa. Selain itu,

339. Lihat *Sejarah Daerah Sulawesi Utara* halaman 85.

340. Lihat *Kawasan Sangihe – Talaud–Sitaro: Daerah Perbatasan Keterbatasan Pembatasan*, halaman 19. Dicantumkan bahwa penggabungan terjadi pada 1898, tetapi ini tampaknya salah cetak. Tahun yang benar adalah 1893.

wilayah kekuasaannya di Davao (Filipina Selatan) mulai memisahkan diri dari Kerajaan Kendahe. Awalnya, rakyat Kendahe tidak setuju dengan penyatuan ini, namun setelah nama kerajaan mereka ditempatkan dimuka menjadi Kendahe-Tahuna barulah mereka menyetujuinya. Wilayah Kerajaan Kendahe-Tahuna pada masa itu meliputi Batuwukara hingga Tukadebatu di Pulau Sangir Besar, dengan pulau-pulaunya yaitu Dipang, Kawalusa, dan Kawio. Sementara itu, raja secara bergantian dipilih dari keturunan Kerajaan Kendahe dan Tahuna.

VII. KOLONGAN

Pada abad 16, di Kolongan memerintah Raja Pontorolage yang menjalin hubungan persahabatan dengan Raja Siau, Wuisang (1587–1591). Ia pernah mengundang seorang rohaniwan Katolik bernama Diago Magelhaes. Undangan itu diterima dan rohaniwan tersebut datang dengan disertai Raja Wuisang pada 1568. Pada kesempatan tersebut raja dibaptis dan diadakan pula permandian masal bagi para *bebato* (kepala suku) dan penduduk di Sungai Akembawi. Peristiwa ini terjadi pada 10 Oktober 1568 dan menandai masuknya agama Katolik di Kolongan. Setelah berdiam beberapa lama di sana, Diago Magelhaes dan Wuisang kembali ke Siau pada 1 November 1568. Kerajaan Kolongan mengalami kehancuran karena berbagai faktor, antara lain pertempuran dengan Portugis, perselisihan antar bangsawan, dan letusan Gunung Awu pada 1677. Penduduk Kolongan kemudian menyingkir ke Tahuna, termasuk salah seorang tokoh bernama Tatehwoba yang mendirikan Kerajaan Tahuna pada sekitar 1600.

VIII. LIMAU

Kekejaman Belanda yang memusnahkan tanaman rempah-rempah guna mengendalikan harganya sungguh memukul perekonomian di kawasan Sangihe Talaud. Oleh karenanya, timbul perlawanan di Limau dan Sawang pada 1679. Padtbrugge berupaya memadamkan Pemberontakan di Kerajaan Limau yang merupakan bawahan Ternate ini, tetapi tidak berhasil. Baru setelah pasukan Belanda dengan jumlah yang lebih besar dikerahkan, pergolakan dapat diakhiri. Selanjutnya, dengan kejam Padtbrugge menumpas kerajaan ini. Berdasarkan catatan sejarah yang dibuat Coolhas, rakyat Limau, baik pria maupun wanita, dihabisi seluruhnya. Dengan demikian, lenyaplah Kerajaan Limau dari muka bumi.

IX. MANGANITU (TAMAKO)

Pendiri atau raja pertama Manganitu adalah Tolosang (1600–1645) dan wilayah kekuasaanya meliputi Pandarehokang hingga Tanjung Lembawus. Kemudian oleh Datuk Kulano Makalupa ia dihadiahi anugerah kawasan Panderehokang hingga Lelapide. Saat itu, ibu kota Manganitu terletak di Kauhis. Semasa pemerintahannya, timbul perselisihan dan peperangan dengan Kerajaan Tahuna. Dalam pertempuran tersebut raja gugur dan digantikan oleh putranya, Tompoliu (1645–1670). Menurut legenda, pada zamannya tidak ada kapal VOC yang berani mendekat karena konon saat ada kapal Belanda ia keluar dari istananya serta duduk di tepi pantai, lalu mulai merokok. Asap rokoknya itu akan membuat suasana di sekitar Teluk Manganitu menjadi gelap pekat sehingga kapal tidak dapat berlabuh dan terpaksa berbalik.

Tompoliu digantikan oleh Bataha Santiago (Don Siut Jugou, memerintah 1670–1675) dengan ibu kotanya berada di Bawohung Tiwo. Ia merupakan raja yang gigih melawan Belanda karena dipaksa menandatangani kontrak yang isinya memberatkan rakyat Manganitu serta merendahkan martabat kerajaan, yaitu (1)Semua tanaman cengkih harus ditebang, (2) Hanya agama Kristen Protestan yang diperkenankan, dan (3) Semua benda-benda warisan budaya kerajaan harus dibakar.[341] Akibat perlawanannya itu, VOC menyerang Manganitu. Bataha Santiago yang gagah berani ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung di Tanjung Tahuna (Tanjung Santiago). Ia adalah satu-satunya raja di kawasannya yang dengan berani menentang Belanda. Karena keberaniannya itu, namanya diabadikan sebagai nama Korem 131 Kodam XIII Merdeka. Raja berikutnya, Don Charles Diamanti (Carlos Piantai, 1675–1694), pernah mengadakan perjanjian dengan Belanda, yang diwakili oleh G.G. Rebertus Padtbruge pada November 1677. Don Charles Diamanti digantikan oleh Martin Takaengetang (1675–1725), dan Martin Don Lasaru (Jacob Lazarus, 1725–1740). Keluarga Raja Martin Don Lasaru diasingkan ke Tanjung Harapan karena peristiwa pembunuhan yang diperintahkan permaisuri raja. Akibat peristiwa pembunuhan itu, raja berikutnya, Katiangdagho (Daniel Katiandago, 1740–1770) memindahkan ibu kota kerajaan ke Manganitu.

Raja-raja selanjutnya yang memerintah Manganitu adalah Salomon Katiandago (Lombangsuwu, 1771–1794), Manuel Mokodampis (Lokongbanua, 1794–1806), Darunu (1806–1816), Bagunda (1816–1817), Bastian Jacob Tamarol (Tampungang,

341. Lihat *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Utara*, halaman 23.

1817–1845), C.J.L. Tamarol (Nonde, 1845–1855), Jacob Laurens Tamarol (1859–1860), dan Manuel Mokodampis (Soaha, 1864–1880).

Kerajaan Manganitu kemudian dipimpin oleh Raja Lambert Ponto (1880–1892) dengan gelar Presiden Pengganti Raja. Daerah Tarun dan Niampak dimasukkan sebagai wilayah Kerajaan Manganitu, sebagaimana yang tertuang dalam kontrak politik dengan Raja W.K.P. Mokodampis (Johannis Mokodampis atau Tampilang, 1892–1905) tertanggal 22 November 1899. Ia digantikan oleh Willem Manuel Pandensolang Mokodampis (1905–1944). Pada zaman pendudukan Jepang, Raja Mokodampis ikut menjadi korban kekejaman bala tentara Negeri Matahari Terbit tersebut. Bersama dengan Raja Christian Pontoh dari Kendahe Tahuna, ia dijatuhi hukuman pancung pada 1944. Selanjutnya, yang menggantikan Raja W.M.P. Mokodampis adalah W. Kansil (1944–1945). Raja Manganitu berikutnya, Ambon Darondo[342] (1946–1949) menjadi salah seorang anggota Dewan Raja-raja Sangihe-Talaud yang diketuai oleh W. A. Sarapil dari Tabukan.

X. SAWANG

Kerajaan Sawang semula merupakan kerajaan yang berdiri sendiri di kawasan Sangihe-Talaud. Meskipun demikian, ketika Belanda dengan semena-mena memusnahkan tanaman rempah-rempah di wilayah ini demi mengendalikan harganya, perekonomian rakyat menjadi hancur. Akibatnya, bangkitlah perlawanan rakyat Sawang pada 1679. Pergolakan ini dapat ditindas dengan kejam oleh Belanda. Menurut catatan Coolhas, rumah-rumah penduduk diratakan dengan tanah. Pemimpinnya yang bernama Datunseke ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka. Setelah itu, kerajaan ini digabungkan dengan Tahuna.

XI. SIAU

Raja Siau yang pertama adalah Lokongbanua II (1510–1549), cucu Lokongbanua I, *Datu* (Raja) Kerajaan Boromtehu. Pusat pemerintahannya berada di Katutungan (Paseng sekarang). Pada masa pemerintahannya, terjalin kontak pertama kalinya dengan bangsa Portugis dan Spanyol. Bahkan bangsa Portugis sempat merayakan Paskah di kerajaan tersebut yang dipimpin oleh Pastur Pedro Maxarenhas. Menurut cerita rakyat, nama Paseng itu berasal dari kata *Paschen* yang artinya 'Paskah.'

---

342. Lihat *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Utara*, halaman 167.

Di kota ini pula terletak makam Raja Lokongbanua, yakni di Kecamatan Siau Barat. Lokongbanua II digantikan putranya, Posumah (Pesuma atau Pansumang, memerintah pada 1549–1587), selaku Raja Siau kedua. Ia merupakan Raja Siau yang menganut agama Katolik dan dibaptis di sebuah sungai besar di Manado dengan nama permandian Don Jeronimo atau Hieronimus.[343] Posumah kemudian digantikan oleh Wuisang (Ponto Wuisan atau Himbawe atau Wetewiwihe, memerintah 1587–1591)

Karena kedekatannya yang erat dengan Spanyol, Belanda menyerang Siau pada 1614. Saat serangan dilancarkan, Raja Winsulangi (1591–1639, Raja Siau keempat dan pengganti Wuisang)[344] sedang memadamkan pemberontakan di Tagulandang. Begitu mendengar Siau telah diduduki musuh, raja beserta Batahi, putranya, mengungsi ke Manila. Kedudukan raja baru berhasil dipulihkan pada 1624 ketika ia merebut kembali negerinya dengan bantuan Spanyol. Kendati demikian, sumber-sumber Belanda menyebutkan bahwa kala itu sesungguhnya Raja Siau hanya mengambil kembali wilayahnya karena Belanda telah meninggalkan kawasan tersebut. Belanda saat itu masih belum menemukan arti penting Siau dari sisi ekonomis.

Hubungan Siau dengan Spanyol tetap terjalin baik setelah itu. Spanyol menempatkan tentaranya di sebuah benteng yang dibangun di Ulu (Siau Timur) dan Ondong (Siau Barat). Karena kedekatan ini, Spanyol memberikan kesempatan kepada pangeran Siau untuk menempuh pendidikan di Universitas Katolik Santo Tomas, Filipina, dan pendidikan tinggi Yesuit Intramuros yang berada di dalam benteng. Tatkala Raja Winsulangi masih mengungsi di Manila, ia berkesempatan menyekolahkan Batahi di Intramuros tersebut. Raja Winsulangi pernah mengangkat sumpah setia kepada Raja Spanyol dalam bentuk 5 butir kesepakatan, yaitu

- Raja Siau akan memberikan sebuah parang beserta perisai sebagai hadiah kepada vasal-vasalnya.
- Kerajaan Siau akan melindungi dan mendukung para imam Katolik dalam mewartakan Injil.
- Raja Siau tidak akan membangun benteng tanpa izin Spanyol. Sementara itu, Gubernur Spanyol boleh mendirikan lebih dari satu benteng atas seizin raja.
- Apabila berkecamuk perang di Maluku, Raja Siau akan memberikan bantuannya.

343. Lihat *http://mdopost.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=4426&Itemid=9* (diunduh pada 22 September 2009).

344. *Sejarah Daerah Sulawesi Utara*, halaman 45, menyebutkan bahwa raja ini memerintah dari 1591–1631.

- Sebaliknya, bila terjadi serangan dari pihak Ternate yang dilancarkan terhadap Siau maka Spanyol akan memberikan bantuannya.

Karena kedekatannya dengan Spanyol tersebut, tidak heran apabila Belanda menganggap Siau sebagai ancaman. Apalagi letaknya yang dekat dengan Maluku, sumber penghasil rempah-rempah yang berada dalam pengaruh VOC. Jika dibiarkan, rempah-rempah yang dihasilkan Siau berpotensi mengganggu kebijakan monopoli rempah-rempah Belanda. Oleh karenanya, timbul niat Belanda menundukkan Siau dengan bantuan Ternate, yang saat itu diperintah oleh Sultan Sibori.

Belanda tidak mau gegabah dalam menyerang Siau. Itulah sebabnya Padtbrugge dengan cerdik meminjam tangan Sultan Sibori dengan memanas-manasi sultan terkait perebutan istrinya yang bernama Maimuna oleh Raja Batahi (Don Harcius Fransiscus Batahi)[345] dari Siau. Maimuna adalah putri Kerajaan Tabukan yang mulanya dinikahkan dengan Sultan Sibori. Namun, ketika tiba di Ternate, putri yang cantik jelita tersebut malah pulang kembali ke kampung halamannya dengan dijemput kakaknya, Dalero. Kepulangan ini mungkin karena takut dan tidak tahan melihat sepak terjang Sultan Ternate yang tersohor kebobrokannya itu. Sultan terkenal berperangai buruk, terutama yang berkaitan dengan kegilaannya akan wanita. Di tengah perjalanan pulangnya ke Tabukan, rombongan Putri Maimuna singgah di Siau. Waktu itu, istri Raja Siau, Ratu Dona Anastasia Tatunguan baru saja meninggal. Batahi jatuh cinta kepada Maimuna. Ternyata cinta itu tidak bertepuk sebelah tangan karena Maimuna juga jatuh cinta kepada Batahi yang dipandangnya sebagai raja terpelajar. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat Batahi adalah lulusan Kolese St. Joseph Intramorus di Manila, Filipina. Akhirnya, mereka berdua menikah.

Perkawinan ini membangkitkan amarah Sultan Sibori dan Belanda yang memang gemar memancing di air keruh memanfaatkannya agar sultan mengirimkan pasukannya ke Siau guna membalas penghinaan tersebut. Ternate benar-benar menyerang Siau, sementara itu Belanda membonceng di belakangnya. Vasal-vasal atau negara bawahan Ternate ikut serta dalam agresi militer tersebut, seperti Bolaang, Tagulandang, Tahuna, Bolaang Itang, dan lain sebagainya. Mengalahkan Siau sebenarnya bukan pekerjaan yang sulit, apalagi dengan cara keroyokan seperti itu. Terlebih lagi, Siau hanya dipertahankan oleh 17 tentara Spanyol saja. Dalam waktu

345. Buku *Sejarah Daerah Sulawesi Utara*, halaman 45, menyebutkan bahwa raja ini memerintah dari 1631–1678.

dua hari, Batahi menyatakan menyerah dan dengan cerdik mengumumkan bahwa tujuan peperangan itu adalah mengusir pasukan Spanyol.

Setelah peperangan berakhir, VOC menandatangani perjanjian dengan Siau pada 9 November 1677. Sementara itu, sehari sebelumnya telah diadakan kesepakatan antara Raja Siau dengan Ternate mengenai pampasan (ganti rugi) perang. Belanda kemudian memainkan kemampuan berdiplomasinya dalam menguasai Siau. Padtbrugge memaksa Siau memandatangani suatu perjanjian yang terdiri dari 16 pasal. Adapun intinya mengharuskan Raja Siau mengakui pertuanan Belanda atas negerinya, beralih dari agama Katolik ke Protestan, serta menjadikan musuh VOC sebagai musuh Siau dan sahabat VOC adalah sahabat Siau juga.

Kendati Siau telah ditaklukan, Padtbrugge tetap memperlakukan Batahi dengan rasa hormat. Bahkan Padtbrugge sempat tinggal di Siau selama seminggu dan kerap bercakap-cakap dengan Batahi. Sebagai wujud kemenangan Belanda, nama Benteng Sana Rosa milik Portugis diganti menjadi Maetsuyker, sesuai nama Gubernur Jenderal VOC yang berkuasa saat itu. Setelah mangkatnya Batahi, Siau diperintah oleh Raja Monasehiwu (1678–1680), Pareme (Rarame) Nusa atau Hendric Daniel Yacobus (1680–1716), Daniel Jacobus Lohintadali (1716–1752), Ismail Yacobus Mohengkelangi (1752–1788), Ericus Jacobus Bagandelu (1788–1790), Eugenius Jacobus Umboliwutang (1790–1821), Fransisco Tapianus Paparang Batahi (1822–1839), Nikolaus Ponto Tawere (1839–1842), dan Markus Dulage (presiden raja, memerintah 1842–1850).

Penguasa Siau yang terkenal berani menentang Belanda adalah Raja Jacob Ponto (1851–1889). Sebelumnya, ia adalah pangeran di Kerajaan Kaidipang yang dipilih sebagai Raja Siau ke-15 oleh dewan adat Komolang Bobatong Datu. Residen Belanda yang berkedudukan di Manado pernah mengajukan tiga tuntutan kepadanya, yakni

- Menurunkan dan mengganti bendera Kerajaan Siau yang berwarna merah putih dengan bendera Belanda.
- Menaikkan besarnya pajak kepala bagi setiap laki-laki dewasa menjadi 1 Gulden.
- Mengganti agama Islam yang dianutnya dengan agama Kristen Protestan serta mendukung penyebaran Injil oleh para pendeta *zending*.

Raja tidak bersedia mematuhi satu pun perintah di atas. Ia bersedia mengibarkan bendera Belanda, asalkan bendera kerajaan Siau dikibarkan lebih tinggi. Dengan berani

raja menyampaikan jawabannya kepada residen Belanda bahwa ia adalah penguasa di negeri tersebut yang berkuasa atas tanah beserta rakyatnya dan lebih baik residen menyimpan saja perintahnya bagi rakyat di negerinya sendiri. Tentu saja Belanda merasa gerah menyaksikan tingkah raja pemberani ini dan mencari upaya untuk menyingkirkannya.

Raja Jacob Ponto diajak berunding dengan Belanda di atas sebuah kapal yang berlabuh di Ulu Siau. Ternyata ini hanya jebakan belaka karena begitu tiba di atas kapal, raja langsung ditawan dan diasingkan ke Cirebon. Itulah sebabnya, di kalangan rakyat Siau, ia dikenal sebagai I Tuang su Seribong (Tuan Raja di Cirebon). Raja Jacob Ponto digantikan oleh Lemuel (Semuel) David (1890–1895). Ia memindahkan Ibu kota Siau dari Ondong (kini di Kecamatan Siau Barat) ke Ulu (kini Kecamatan Siau Timur). Pada perkembangan selanjutnya, Raja Manalong Dulang (M.D.) Kansil (1900–1908) menandatangani kontrak pada 25 November 1899 yang isinya menyatakan bahwa daerah Kabaruan dan Taduwale masuk ke dalam wilayah Siau. Wilayah Singkil di Manado Utara yang dahulunya merupakan wilayah Siau diserahkan kepada Asisten Residen Manado semasa pemerintahan Raja A.J. Mohede (1908–1913).

Belanda pernah berjanji akan mengangkat Raja Antoni Jafet Kansil (A.J.K.) Bogar (1913–1918) sebagai sultan apabila pemerintah kolonial berhasil menyatukan seluruh Kepulauan Sangihe-Talaud dalam satu pemerintahan yang berwibawa. Upaya Belanda ini berhasil, terlebih lagi ketiga saudari raja telah menjadi istri tiga raja lainnya di Pulau Sangir Besar. Dengan demikian, Raja Siau ini merupakan tokoh yang berpengaruh di daerahnya. Karena menerima janji semacam itu, raja bersedia menandatangani *Korte Verklaring* pada 1915. Berkat penandatanganan perjanjian tersebut, kerajaan menerima subsidi dari pemerintah kolonial Belanda guna membangun Kota Ulu Siau. Berbagai sekolah didirikan dan Raja A.J.K. Bogar diperkenankan menghidupkan kembali angkatan darat Kerajaan Siau yang saat itu tak terpelihara lagi. Tujuan Belanda mengizinkan pembangunan kembali pasukan Siau ini dilatarbelakangi oleh meletusnya Perang Dunia I (1914–1918) di Eropa. Dengan demikian, bila perang meluas hingga Hindia Belanda, pasukan Siau itu dapat dipergunakan sebagai sarana pertahanan. Armada laut Siau yang terdiri dari beberapa perahu *kora-kora* (perahu tradisional Kepulauan Maluku) diperbolehkan pula mengibarkan bendera kerajaan.

Raja A.J.K. Bogar sendiri memandang bahwa kedudukannya–menurut *Korte Verklaring* yang telah ditandatanganinya–sederajat dan merupakan sahabat Raja

Belanda. Karenanya, ia merasa bahwa atribut dan kebesaran-kebesaran kerajaan terdahulu perlu dikembangkan lagi. Selain itu, raja mengembangkan sikap yang membangkitkan kecanggungan di kalangan pejabat pemerintah kolonial sendiri. Perihal raja ini terdengar pula Gubernur Jenderal van Limburg Stirum di Batavia. Karena itu, dalam perjalanannya ke Indonesia Timur pada 1918, ia merasa perlu berjumpa dengan Raja A.J.K. Bogar. Sayangnya, ketika gubernur jenderal masih dalam perjalanan, Raja A.J.K Bogar terserang influenza dan mangkat pada Oktober 1918. Karenanya, gubernur tak sempat bertatap muka dengannya dan tentu saja pengangkatannya sebagai sultan tidak dapat pula diselenggarakan. Raja A.J.K Bogar kemudian digantikan oleh Antoni Dulage (A.D.) Laihad (1918–1920)

Ketika pergerakan nasional bergaung hingga ke Siau, rajanya saat itu, Lodewyk Nicolaus (L.N.) Kansil (1920–1929) sebenarnya ingin memberikan dukungannya bagi PNI. Kendati demikian, ia menyadari bahwa momennya kurang tepat karena raja sedang disorot Belanda terkait tuduhan pemborosan kas kerajaan. Karenanya, raja bersikap netral dengan tidak melarang pembentukan PNI cabang Siau. Akhirnya, Raja L.N. Kansil disingkirkan oleh Belanda dan untuk mengisi kekosongan pemerintahan, Raja Tagulandang, Hendrik Philips (H. Ph.) Jacobs, ditetapkan sebagai wakil raja Siau antara 1929 hingga 1930. Perwakilan ini berakhir pada 1930 ketika Jogugu Ulu bernama Aling Janis (1930–1935) ditetapkan sebagai Raja Siau yang baru.

Siau pernah melahirkan tokoh pergerakan nasional bernama J.B. Dauhan yang terkenal dekat dengan Bung Karno. Pada 1933, Dauhan berkesempatan kembali ke kampung halamannya dan suatu penyambutan hendak diadakan. Niat untuk mengadakan acara penyambutan ini dilaporkan kepada Raja Aling Janis yang menyatakan bahwa Kontrolir Belanda di Tahuna tentu tak akan mengizinkannya. Tetapi raja sendiri tidak berkeberatan asalkan ketertiban dan keamanan dapat dijamin. F. Hermanses yang merupakan ketua KGI (Komite Gerakan Indonesia) menyampaikan kesanggupan untuk menjaminnya. Dengan demikian rapat dapat diselenggarakan di tiga tempat berbeda antara 9–11 Maret 1933. Pada kesempatan tersebut, J.B. Dauhan membakar semangat rakyat Siau dan meyakinkan mereka bahwa Indonesia suatu saat pasti meredeka. Pertemuan itu membuahkan penangkapan bagi para aktivis. Lima belas orang ditangkap dan hendak diasingkan ke Digul. Untunglah Raja Aling Janis turun tangan dan memberikan jaminan bahwa orang-orang itu tak akan mengulangi

perbuatannya lagi. Malangnya, J.B. Dauhan justru mati dibunuh oleh Belanda di Penjara Tahuna.[346]

Ketika Raja Aling Janis meninggal tanpa putra mahkota, kedudukan sebagai raja diambil alih oleh Kontrolir de Jong. Sebenarnya, bekas raja L.N. Kansil dan almarhum Raja Aling Janis masih memiliki putra-putra, hanya saja usia mereka belum dewasa. Namun, tak lama kemudian, pemerintah kolonial mengangkat seorang Minahasa bernama Paul Frederik Parengkuan (1936–1946) sebagai Raja Siau. Ia merupakan seorang penguasa yang giat membangun daerahnya. Raja P.F. Parengkuan memajukan pertanian dengan menganjurkan rakyat menanam tumbuhan-tumbuhan penghasil bahan pangan, seperti ubi kayu dan lain sebagainya. Ia membeli pula 6.000 karung padi sebagai cadangan makanan pada masa itu. Kerajaan Siau diapat dikatakan berakhir ketika Presiden Pengganti Raja Siau Ch. David (1946–1956, penguasa Siau ke-25) mangkat pada 1956. Ia merupakan salah seorang anggota Dewan Raja-raja Sangihe-Talaud yang diketuai oleh Raja Tabukan, W.A. Sarapil.

XII. TABUKAN

a. Cikal Bakal dan Perkembangan Kerajaan Tabukan

Kerajaan Tabukan kerap dianggap sebagai kerajaan tertua di kawasan Sangihe-Talaud. Menurut legenda, cikal bakal kerajaan ini adalah tokoh legendaris bernama Gumansalangi dan Makaampo Wawengehe. Konon, Gumansalangi adalah seorang pangeran yang dihukum buang ke dalam hutan oleh ayahnya. Namun, di sana ia malah berjumpa dengan seorang putri kayangan bernama Sangiangasa (Kondawulaeng) yang kelak menjadi istrinya. Mereka lantas menunaikan bersama-sama hukuman buang yang dijatuhkan oleh ayah Gumansalangi dengan mengendarai seekor ular besar. Ayahnya berpesan agar mereka baru boleh berhenti di suatu tempat yang ditandai oleh deru guntur dan kilatan petir. Ketika tiba di Gunung Sahendaruman, keduanya mendengar pertanda alam yang dimaksud. Oleh karenanya, mereka berdua turun dan menetap di sana. Itulah sebabnya, Gumansalangi kemudian dijuluki Medellu (guntur) dan Sangiangasa sebagai Sangiangkila (Putri Kilat).

Gumansalangi yang menjadi Datu Tabukan pertama dikaruniai dua orang anak, yakni Melintangnusa dan Melikunusa. Putranya yang bernama Melikunusa berlayar ke selatan. Ia pindah ke Mongondow dan menikah dengan Monongsangiang, seorang

346. Walaupun Belanda memberikan alasan tidak masuk akal bahwa ia bunuh diri dalam penjara.

putri Mongondow. Sementara itu, Melintangnusa menggantikan ayahnya sebagai Datu Tabukan yang kedua (1350–1400). Semasa pemerintahan Gumansalangi dan keturunannya ini, Tabukan belum berbentuk kerajaan dan masih berupa satuan pemerintahan yang dikepalai seorang *datu*. Pada perkembangan selanjutnya, kedatuan ini malah terpecah menjadi dua, yakni Kedatuan Sahabe di utara dan Salurang di Selatan.

Tokoh penting berikutnya adalah Makaampo Wawenggehe atau D. Makaampo, yang menjadi Raja Tabukan pertama (1530–1575). Semenjak kecil ia telah ditinggal mati orang tuanya dan diasuh oleh pamannya. Ia berhasil menyatukan kembali kedua kedatuan pecahan Tabukan di atas, dan semenjak saat itu Tabukan menjadi kerajaan. Wilayah kerajaannya meliputi bekas daerah Kedatuan Sahabe dan Salurang, yaitu mulai dari Tanjung Salimahe hingga Pandarehokang serta pulau-pulau Marore hingga Mahengetan dan Kepulauan Talaud. Pusat pemerintahannya terletak di Limu (Sahabe Bahu). Raja ini terkenal kekejamannya sehingga seorang pahlawan dari Tamako bernama Ambala menjalin persekutuan dengan Hengkengunang dari Siau untuk membunuh Makaampo. Akibatnya, setelah pembunuhan ini terlaksana, timbul permusuhan antara Tabukan dan Siau. Sebagai pengganti Makaampo, diangkatlah putranya yang bernama Wuatangsemba (1575–1610). Pada zamannya, datanglah para pedagang Portugis dan Spanyol.

Semasa pemerintahan raja berikutnya yang bernama Gamambanua (1610–1650), bangsa Portugis diizinkan tinggal di sana dan menyebarkan agama Katolik. Mereka lalu mendirikan sekolah dan tempat ibadah yang dalam bahasa setempat disebut *ghahedang padihe* (arti harfiahnya 'tempat paderi'). Gamambanua digantikan oleh putranya yang bernama Don Fransische Makaampo Juda I (1650–1700). Menilik dari namanya, tampak bahwa penguasa ini telah menganut agama Katolik. Semasa pemerintahannya, Belanda mulai masuk ke kawasan ini yang terbukti dengan penandatanganan kontrak politik berupa *Lange Verklaring* (Plakat Panjang) pada November 1677. Berdasarkan kontrak itu, disebutkan bahwa "Raja Belanda adalah sahabat Raja Tabukan, musuh Belanda adalah juga musuh Raja Tabukan, dan demikian pula sebaliknya."

Raja David Papukule Sarapil (1892–1898) yang bergelar Presiden Pengganti Raja memindahkan ibu kota kerajaan dari Tabukan Lama ke Enemawira (kini Kecamatan Tabukan Utara). Pada 1 April 1902, diadakan penandatanganan kontrak antara Residen Manado, E.J. Jelesma dengan Raja David Sarapil dari Tabukan yang

isinya menguatkan bahwa kawasan-kawasan Lirung, Moronge, Salibabu, Kiama, Beo, Essang, Banada, Amat, dan Rainis merupakan wilayah Tabukan. Pada masa pendudukan Jepang, yang berkuasa di Tabukan adalah K.J.L. Macpal. Karena dicurigai hendak melawan Jepang, Raja K.J.L. Macpal ditangkap oleh *kenpetai* dan dijatuhi hukuman pancung. Ia kemudian digantikan oleh Umar Muhammad. Selanjutnya, yang memerintah Tabukan adalah Raja W. A. Sarapil. Ia adalah ketua Dewan Raja-raja Sangihe-Talaud dan menjadi kepala daerah Sangihe-Talaud yang pertama. Ketika terpilih sebagai anggota senat Negara Indonesia Timur (NIT), kedudukannya selaku kepala daerah digantikan oleh B.J. Medellu.

b. Sistem Pemerintahan

Pemegang kekuasaan tertinggi di kerajaan ini adalah seorang raja. Sementara itu, setingkat di bawah raja terdapat perdana menteri yang disebut *jogugu*. Gelar ini tentu saja mengingatkan pada pengaruh Ternate. Selanjutnya, di tiap kampung terdapat pemimpin yang disebut *kapitalaung*. Tugasnya adalah memelihara persatuan dan adat di tengah masyarakat. Jabatan lainnya adalah *hukum mayor* atau *hukum*, yang tugasnya menangani urusan pengadilan. Di dalam Istana Tabukan sendiri masih dikenal adanya *kapitaratu* (kepala rumah tangga istana) dan *keneke* (juru rasa makanan). Ada juga barisan dayang-dayang yang disebut *gunde* dengan dikepalai seorang *pangataseng*. Dari segi kemiliteran, pasukan di Tabukan dikepalai seorang pangeran bergelar *mayore labo* atau mayor besar. Ia membawahi *mayore* (mayor), *kapita* (kapten), *lutunani* (letnan), *ondore adidang* (ajudan), *aliparese* (pembawa bendera), *sariang mayore* (sersan mayor), *sariang* (sersan), dan *kaparal*e (kopral). Dengan demikian, ini membuktikan bahwa di Tabukan telah mengenal jenjang kepangkatan, yang tampaknya berasal dari pengaruh Barat.

XIII. TAGULANDANG

Sebelum berkuasanya seorang raja, kawasan ini dipimpin oleh para kepala suku yang bergelar *kulano* (*wahani* atau *bahani*). Para *kulano* ini merupakan orang gagah berani, di antara mereka yang terkemuka adalah Lohowuateng, Wansiani, Kudendeng, dan Walandugno. Tokoh yang dianggap sebagai raja pertama Tagulandang adalah Raja Lohowaung (1570–1609)[347] atas anjuran Sultan Ternate karena saat itu daerah

347. Dalam manuskrip karya Hans Hägerdal, *Kerajaan2 Indonesia*, halaman 249, Lohowaung adalah seorang ratu.

tersebut mendapat pengaruh Portugis yang telah ditanamkan di Ternate. Pada masa itu, sudah ada tiga negeri di Tagulandang, yakni Lumbu yang kemudian pindah ke Minanga; Bailangtukari, yang kemudian pindah ke Haasi; dan Tuang, yang kemudian dipindahkan oleh Lohowaung ke Tulusan. Daerah kekuasaan raja ini terdiri dari tiga kampung, yakni Tagulandang, Balehumara, dan Babule. Dalam menggulirkan roda pemerintahannya, raja dibantu oleh seorang *jogugu*. Karena adanya jabatan *jogugu* ini, bisa disimpulkan bahwa sistem pemerintahan di Tagulandang mendapat pengaruh Ternate.

Bangsa Portugis kemudian menduduki Tagulandang dan mendirikan benteng di Tanjung Batusaiki. Setelah Lohowaung mangkat, ia digantikan oleh Balango (1609–1649), cucu Raja Lohowaung dan putra Raja Tabukan kedua, Wuatangsemba, dengan permaisurinya bernama Taskoa (putri Raja Tagulandang pertama). Dengan demikian, boleh disimpulkan bahwa telah terjalin ikatan keluarga antara Tabukan dan Tagulandang. Setelah menjadi raja, ia dianugerahi daerah Kalamu dan Pulutang di Talaud oleh ayahnya. Semasa pemerintahan Balango, terjadi perselisihan dengan Mindanao karena Kerajaan Tagulandang membantu Siau dalam persengketaan di Pehe pada 1586. Tagulandang kemudian diperintah oleh pula oleh Raja Bawias[348] atau Patu Wawiosi Bawias (1649–1683). Raja Philips Anthoni Aralungnusa (1683–1720), pengganti Bawias, merupakan raja pertama yang memeluk agama Katolik. Ia dibaptis oleh Pastur Parerey pada 1592 dan diberi nama baptis Philips Anthoni. Ia merasa kecewa kepada Spanyol dan beralih mendukung Belanda.

Raja-raja berikutnya yang memerintah Tagulandang secara berturut-turut adalah Johannis Batahi Jacobus Manihise (Philip Jacobsz, 1720–1753), Andries Tamarol (1754–1782), Cornelis (Christiaan) Tamarol (1782–1798), Philip Jacobszoon (1798–1820), Johannes Philip Jacobszoon (1820–1842), Frederik Philip Jacobszoon (1843–1851), Lukas Philip Jacobszoon (1851–1871), Christian Matheoszoon (1871–1885), Salmon Bawoleh (1885–1901), Laurentius Manuel Tamara (1901–1912), Cornelis Tamaleroh (1912–1917), A.J.K. Bogar (1917–1918, merangkap raja Siau), A.D. Laihad (1918–1920, merangkap Raja Siau), L.N. Kansil (1920–1922, merangkap raja Siau), Hendrik Philip Jacobs (Malempe, 1922–1935, merangkap Raja Siau), Frans Pieter Parengkuan (1935–1937), dan Willem Philip Jacobs (1937–1944). Karena dicurigai melawan Jepang, Raja Willem Philip Jacobs yang pernah merobek

348. *Kawasan Sangihe–Talaud–Sitaro: Daerah Perbatasan Keterbatasan Pembatasan*, halaman 59.

bendera Jepang ditangkap oleh *kenpetai* dan menjadi korban kebiadaban mereka dengan dipancung kepalanya. Selanjutnya, ia digantikan oleh Paul Adrian Tindas (1944–1946), yang merupakan salah seorang di antara lima anggota Dewan Raja-raja Sangihe-Talaud. Para raja terakhir Tagulandang adalah Hermanus Obed Hamel (1946–1949) dan Philip Willem Jacobs (1949–1951).

XIV. TAHUNA

Pendiri Kerajaan Tahuna adalah Tetehawoba (Ansaawuaso), putra Raja Pontorolage dari Kolongan dengan permaisurinya yang bernama Dolongsego, putri Raja I Lokongbanua dari Siau. Raja yang memerintah antara 1580 hingga 1625 ini menikah dengan Doloweli, putri Raja Tabukan pertama, Makaampo Wasenggehe (1530–1575). Pusat pemerintahan kerajaan ini pada mulanya berada di Akembawi. Setelah kemunculan kapal VOC yang tenggelam secara tiba-tiba di Kolongan pada 1602, raja memindahkan ibu kota kerajaannya ke Tahuna untuk mengantisipasi kedatangan kapal Belanda lainnya hingga ia wafat dan dimakamkan di sebuah tempat bernama Bukide milik Nanarang Bukide. Wilayah kerajaan Tahuna mencakup Tanjung Lembawua dan berbatasan dengan Kerajaan Manganitu, hingga Watu Wukala, yang berbatasan dengan Kerajaan Kendahe. Selain itu, Pulau Miangan dan Nanusa juga termasuk dalam wilayah kerajaan ini, yang merupakan pemberian Kulano Ansiga Kepar, cucu saudaranya yang sekaligus merupakan permaisuri raja.

Tetehawoba digantikan oleh Wuntuang (± 1625–1665). Penggantinya, Tatandang (Don Martin Tatandangnusa, 1665–1691) merupakan salah seorang raja yang berbalik memihak Belanda karena kecewa terhadap sikap Spanyol yang ragu-ragu dalam membantu mereka. Raja Tatandang juga merupakan seorang terpelajar yang pernah menuntut ilmu di Universitas Santo Tomas, Manila, Filipina. Rangkaian raja-raja Tahuna berikutnya adalah Takaulimang (± 1691–1705), Zacharias Papahangsulung Paparang (± 1705–± 1736), Dirk Rasubala (1747–1756), Zacharias Paparang (1757–1779), Zacharias Dirk Rasubala (1779–1800), Tabaleta Rasubala (1800–1820), Jacob Rasubala Saraweta, 1820–1841), Eugenos Laurens Tamarol (1841–1858), Walanda Jacob Rasubala (1858–1870), A.T. Rasubala Limampulo (1870–1875), Eugenis Laurens Tanaru Rasubala (1878–1887), dan seorang raja yang tak diketahui namanya (1887–1896).

Pada 1898, wilayah Kerajaan Kendahe digabungkan dengan Tahuna menjadi Kerajaan Kendahe-Tahuna. Pulau-pulau Nanusa, termasuk Miangas, dimasukkan pula sebagai wilayah Kerajaan Tahuna yang diperteguh dalam sebuah kontrak politik dengan Raja Salmon Dumalang (1896–1902) pada 22 November 1899. Selanjutnya, Raja Marcus Mohonis Dumalang (1902–1904) dan Solomon Ponto (1904–1914) tercatat pernah berkuasa di kerajaan ini. Ia kemudian digantikan oleh Raja Christian Ponto (1914–1928). Raja Kendahe Tahuna ini pernah menjadi anggota *volksraad* antara 1919–1928. Pada 1928, ia diasingkan ke Luwuk (Sulawesi Tengah) dan digantikan oleh Raja W.M.P. Mocodampis (1928–1930), tetapi dikembalikan lagi ke kampung halamannya pada 1933. Pada perkembangan selanjutnya, yang memerintah Tahuna berturut-turut adalah Albert Bastian (1930–1939) dan Engelhard Bastian (1939–1944).

Ketika Jepang mulai menjajah Indonesia, Raja Engelhard Bastian masih menjadi raja di Kendahe-Tahuna. Bala tentara pendudukan Jepang menunjuknya sebagai wakil pemerintahan mereka di Sangihe-Talaud. Dengan membawa surat penunjukan dari Jepang ini, Raja Engelhard Bastian kembali dari Manado ke Tahuna pada Mei 1942. Pemerintahan darurat di bawah pimpinan Raja Engelhard Bastian ini hanya bertahan selama setahun saja karena kurang lebih pada Juli 1943 bala tentara Jepang mendarat di pelabuhan Tahuna dan mengambil alih pemerintahan di sana. Semenjak saat itu, ditempatkanlah seorang perwira Jepang bernama Hirano dengan jabatan *kenkarikan* selaku kepala pemerintahan bagi kawasan Sangihe-Talaud.

Semenjak 1944, Christian Ponto–mantan Raja Kendahe Tahuna–ditahan oleh Jepang dan dipancung pada 19 Januari 1945 karena kerap melakukan pembangkangan, antara lain dengan menolak membayar pajak. Ia merasa aneh karena Jepang selaku pendatang malah meminta pajak darinya. Jenazahnya dimakamkan di Bungalawang (Tahuna), tempat dikebumikannya raja-raja dan pemuka masyarakat lain yang juga menjadi korban keganasan Jepang. Raja Engelhard Bastian tidak luput pula dari kebiadaban Jepang ini. Sepeninggal Raja Engelhard Bastian, Frederik Imanuel Adriaan (1945–1949) dinobatkan sebagai Raja Tahuna. Ia adalah salah seorang di antara lima anggota Dewan Raja-raja Sangihe-Talaud. Pemerintahan Tahuna kemudian dipegang oleh Afdeeling Karambut, yang bertindak selaku wakil raja (1949–1955).

XV. TALAUD

Kepulauan Talaud baru diubah statusnya menjadi kerajaan atau swapraja berdasarkan keputusan gubernur jenderal tertanggal 18 Februari 1915 nomor 18. Pada mulanya, belum ada raja yang diangkat bagi kerajaan ini dan pimpinan diserahkan kepada suatu dewan yang terdiri dari para *jogugu* (*raad van jogugus* atau Dewan Jogugu). Kepemimpinan para *jogugu* ini berakhir pada 1921 dengan diangkatnya J.S. Tamawiwij sebagai Raja Talaud yang pertama. Sebelumnya, ia menjabat sebagai *jogugu* Karakelang Utara di Beo. Pelantikannya sebagai raja berlangsung pada 31 Agustus 1921.

Ketika berlangsung penjajahan Jepang, yang menjadi raja di Talaud adalah P.G. Koagouw. Jepang memerintahkan para raja mengumpulkan pemuda-pemuda untuk diberi latihan kemiliteran. Tentu saja Jepang mengharapkan agar para pemuda ini dapat membantu mereka dalam peperangan, tetapi Raja P.G. Koagouw justru menggunakan kesempatan ini sebagai sarana mempersiapkan para pemuda dalam melawan Jepang. Kurang lebih 60 orang pemuda mendaftar mengikuti latihan kemiliteran tersebut. Guna menyembunyikan maksudnya, para pemuda itu didaftarkan di bawah kode rahasia MX. Malangnya, Jepang berhasil membongkar kode ini dan Raja P. G. Koagouw ditangkap, disiksa, diinjak-injak, dan ditahan oleh Jepang. Beberapa hari kemudian, Jepang menyatakan bahwa raja telah melarikan diri dan hilang tak tentu rimbanya.[349] Kemungkinan besar ia telah dihabisi nyawanya oleh Jepang. Raja P.G. Koagouw digantikan oleh Th. Binilang, yang memerintah hingga era kemerdekaan. Ia juga merupakan salah seorang anggota Dewan Raja-raja Sangihe-Talaud. Kedudukannya sebagai Raja Talaud masih diakui beberapa waktu setelah kemerdekaan. Ketika Gubernur Sulawesi Lanto Daeng Pasewang berkunjung ke Lirung, ia diterima oleh Raja Th. Binilang.

B. REORGANISASI PEMERINTAHAN WILAYAH KERAJAAN-KERAJAAN DI SULAWESI UTARA DAN GORONTALO PADA AWAL ABAD 20.

Pada subbab ini akan disinggung mengenai perombakan sistem pemerintahan serta wilayah masing-masing kerajaan tersebut yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sebelum abad 20, berbagai kerajaan yang berada di Sulawesi Utara dan

349. Lihat *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Utara*, halaman 51.

Gorontalo memiliki wilayah yang berada dalam lingkungan kerajaan lainnya (*enclave*). Adanya wilayah-wilayah semacam ini tentu saja berpotensi memicu perselisihan antar kerajaan tersebut. Selain itu, tapal batas wilayah antar kerajaan menjadi kurang jelas dan rapi. Sebagai contoh, Kerajaan Bintauna memiliki wilayah di dataran tinggi Doloduo, yang terletak dalam Kerajaan Boolang Mongondow. Sebaliknya, Boolang Mongondow juga mempunyai wilayah di di pesisir utara Bintauna. Kerajaan Kaidipang memiliki wilayah di daerah Gorontalo, yakni Imana dan Gentuma. Belanda melakukan penertiban dan perombakan sehubungan dengan tapal batas antar kerajaan tersebut, antara lain dengan pertukaran dan penyerahan wilayah. Kerajaan Kaidipang menyerahkan Imana dan Gentuma kepada Gorontalo. Dengan demikian, semenjak 1913 batas antar kerajaan menjadi rapi dan jelas.

Guna melancarkan jalannya roda pemerintahan di daerah, Belanda memberikan empat hak kepada para raja, yakni hak membuat peraturan sendiri di lingkungan kerajaannya (*zelfwetgeving*), hak menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkannya (*zelfuitvoering*), hak menyelenggarakan peradilan sendiri (*zelfrechtspraak*), dan hak membentukan lembaga kepolisian (*zelfpolitie*). Selain, para raja diizinkan memiliki kasnya sendiri yang terpisah dengan kas *onderafdeeling* di bawah tanggung jawab kontrolir. Kedudukan para raja yang telah menandatangani *korte verklaring* ini diperkuat dengan berbagai perundang-undangan mengenai swapraja (*zelfbestuursregelen*), yakni

- *Zelfbestuursregelen* 1919 (*Staatsblad* 1919 no. 822).
- *Zelfbestuursregelen* 1927 (*Staatsblad* 1927 no. 190).
- *Zelfbestuursregelen* 1938 (*Staatsblad* 1938 no. 529).

Selanjutnya, sebagai upaya memperkokoh dan memantapkan hukum adat, Kerajaan Boolang Mongondow menyelenggarakan suatu rapat adat di Kotobangon pada November–Desember 1925.

C. KERAJAAN-KERAJAAN DI GORONTALO

I. ATINGGOLA

Raja-raja yang pernah memerintah Atinggola adalah Linugu (1500–1530), Kalumata (1530–1550), Pasila (1550–1570), Dugia (1550–1570), Mollaunt (1570–1580), Gulomkon (1580–1620), Timbangon (1620–1650), Mokodite (1650–1670), Langi (1670–1700), Barend Dua'ulu (1700–1720), Ansaliueta (1720–1747), Adrian

Patalima (1747–1768), Dirk Kolongkodu (1768–1774), Biato, Nako (1800–1810), Gubul (1810–1820), Kakatua (1820–1830), Bolongkodu Humagi (1830–1840), Iskandar Pamalo (1840–1841), Bolongkodu Iskandar Mao Pangka atau Mapangka (1841–1856), dan Ba Ito (1856–1866).[350]

Penduduk Atinggola terbagi dalam tiga *linula*, yakni Tihango yang bergelar Bolangodaa, Moa yang bergelar Bumaga, dan Otajin yang bergelar Atinggola. *Linula* pertama setelah melalui musyawarah akan menetapkan Raja Atinggola. *Linula* kedua merupakan asal *jogugu* (jabatan setingkat perdana menteri), dan *linula* ketiga merupakan asal muasal raja yang dibantu oleh tiga *wuloa lolipu* dari ketiga *linula*.[351]

II. BOALEMO

Raja pertama Boalemo adalah Hurudji yang memerintah pada kurang lebih abad 17. Boalemo kemudian di bawah hegemoni Limbotto. Meskipun demikian, pada 1828 mereka berupaya memerdekaan dirinya lagi. Oleh karenanya, Raja Majono dan Paileat mengajukan permohonan tersebut kepada pemerintah kolonial. Tuntutan kedua raja Boalemo itu dikabulkan oleh Residen Manado pada 5 Juni 1828. Tentu saja pengakuan pemerintah kolonial ini tidaklah gratis. Pemerintah kolonial menaikkan jumlah emas yang harus disetorkan oleh Boalemo sejumlah 100 real setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun.[352] Apabila Boalemo tak bersedia memenuhinya, pemerintah kolonial tidak akan melindungi Boalemo dari ancaman Limbotto. Pemerintah kolonial sendiri memerlukan emas ini guna membangun Pelabuhan Kwandang.

Demi memenuhi jumlah emas yang harus diserahkan, para penguasa Limbotto menekan rakyatnya bekerja lebih keras. Sementara itu, jumlah yang masuk ke perbendaharaan kerajaan makin berkurang karena harus disetorkan kepada Belanda. Sewaktu kesepakatan pembayaran emas ini berakhir pada 1836, Boalemo yang merasa berat memenuhi kewajiban di atas berniat menggabungkan dirinya kembali dengan Limbotto. Bila mereka tak berdiri lagi sebagai suatu kerajaan terpisah, berhenti pula kewajiban menyerahkan emas. Mereka hanya perlu menanggung sebagian emas yang wajib disetorkan Limbotto.

350. Lihat *http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Celebesu#W.C5.82adcy_Attinggoli*, diunduh tanggal 2 Agustus 2011.
351. Lihat *Lima Pahalaa: Susunan Masyarakat, Hukum Adat, dan Kebijaksanaan Pemerintahan di Gorontalo*, halaman 14.
352. Lihat *Limo Lo Pohalaa*, halaman 265.

Hal ini ternyata menimbulkan persoalan lebih lanjut, rakyat Boalemo berbondong-bondong meninggalkan negerinya dan berpindah ke Limbotto demi menghindari kerja wajib menambang emas. Permasalahan sosial mulai muncul karena orang-orang Boalemo itu kebanyakan tidak memiliki pekerjaan dan terpaksa bekerja sebagai penggarap tanah liar. Sisi negatif lain adalah meningkatnya kejahatan. Pemerintah Belanda sendiri enggan menggabungkan lagi Boalemo dengan Limbotto karena mengurangi pendapatan emas mereka. Ketika tuntutan penggabungan kembali ini diajukan kepada pemerintah kolonial yang diwakili Residen Manado dan Asisten Residen Gorontalo, mereka menolaknya.

Pada 1838, Gubernur Maluku bernama de Harvey berkunjung ke Gorontalo. Kesempatan ini dipergunakan para penguasa Limbotto dan Boalemo menyampaikan kembali aspirasi mereka. Kendati demikian karena pemerintah kolonial masih haus akan emas Boalemo, permohonan ini lagi-lagi ditolak mentah-mentah. Sebagai solusinya, Belanda hanya memerintahkan Limbotto agar memulangkan seluruh warga Boalemo, dengan disertai sanksi hukuman berat berupa kerja paksa di proyek-proyek pemerintah kolonial. Karenanya, rakyat Boalemo yang telanjur pindah ke Limbotto menghadapi pilihan sulit; bila tak mau pulang hukuman kerja paksa telah menantikan mereka, sebaliknya bila pulang ke kampung halamannya kewajiban menambang emas siap menyambut mereka. Akhirnya, mereka meninggalkan Limbotto dan memilih menjadi perompak dengan diikuti sebagian warga Limbotto sendiri yang ingin melarikan diri dari kebijakan baru pembayaran pajak. Sebagian dari mereka ada yang memilih menjadi gerombolan perampok yang bermarkas di Pegunungan Kayu Bulang.

Pemerintah kolonial lama kelamaan terusik dengan rawannya kondisi keamanan di Limbotto. Di samping itu, penyerahan emas tak lagi selancar sebelumnya. Oleh sebab itu, pemerintah kolonial mulai mempertimbangkan penyatuan kembali Boalemo dengan Limbotto. Saat permohonan penyatuan diajukan lagi Februari 1843 melalui Residen Manado, persetujuannya dikeluarkan tak lama kemudian (November 1844). Kendati demikian, peresmian baru berlangsung Februari 1845. Kini Boalemo kembali berada di bawah Limbotto.

Penggabungan ini ternyata masih menyisakan permasalahan di kalangan rakyat. Warga Boalemo enggan bergabung dengan Limbotto karena pernah menerima perlakuan kurang baik. Sebaliknya, warga Limbotto enggan menerima warga Boalemo karena khawatir terdesaknya lahan pertanian mereka. Sebagai pemecahannya, asisten

Residen Gorontalo memerintahkan agar disediakan kawasan pemukiman khusus bagi rakyat Boalemo yang akan dikerahkan menambang emas. Berdasarkan kesepakatan bersama, kawasan Dolupa, dekat muara Sungai Paguyama ditetapkan bagi kepentingan tersebut. Sebagai kompensasinya, Raja Limbotto akan menerima pajak sebesar 1 Gulden dari masing-masing keluarga yang bermukim di sana.

Kedudukan raja-raja Boalemo tidak berubah setelah penggabungan ini. Mereka hanya diwajibkan membantu Limbotto memenuhi kewajibannya kepada pemerintah kolonial. Sebagaimana halnya Gorontalo dan Limboto, di Boalemo terdapat dua orang raja yang digelari pemerintah kolonial sebagai *raja gouvernement* dan *raja negori*. Ketika itu, jabatan sebagai *raja negori* diduduki oleh Arsalie, yang mangkat pada 19 September 1846.[353] Karena tiada kesepakatan mengenai penggantinya, selama beberapa tahun jabatan *raja negori* dikosongkan. Pada 1849, baru para bangsawan sepakat mencalonkan Mohe (1849–1850) yang disetujui pemerintah kolonial. Pada 12 September 1849, kedua raja Boalemo, yakni Majono (*raja gouvernement*) dan Mohe (*raja negori*), menandatangani kontrak politik.

Setahun kemudian, mangkatlah Mohe dan pada 1851 Boalemo dilanda gagal panen sehingga warganya terpaksa mencari makan ke dalam hutan demi menyambung hidupnya. Kegiatan penambangan emas yang menjadi tumpuan harapan penjajah terdampak karenanya. Itulah sebabnya, Belanda lantas memerintahkan Majono mengumpulkan kembali rakyatnya. Meskipun demikian, Majono menyatakan ketidaksanggupannya karena faktor usia. Ia mengajukan izin kepada Asisten Residen Gorontalo agar diperkenankan meletakkan jabatannya dan digantikan oleh Pangeran Mustaffa, putra Paloa, raja sebelum Majono. Sedangkan sebagai pengganti Mohe selaku *raja negori*, ia mencalonkan putranya sendiri, Pangeran Ideweti.

Pemerintah menyetujui pencalonan di atas. Meskipun demikian, semasa pemerintahan para penguasa baru ini, perekonomian Boalemo justru mengalami kemerosotan. Setelah melalui proses penyelidikan, Belanda mendapati bahwa Mustaffa kerap melakukan pemborosan dan kurang piawai mengatur negerinya. Belanda lantas memberhentikan Mustaffa selaku *raja gouvernement* pada 1855 dan jabatannya dibiarkan kosong serta dirangkap oleh *raja negori*.

Penduduk Boalemo berasal dari Luwuk. Setelah kedatangan banyak perantau (Bone, Batudaa, Kota, dan Paguyaman), mereka menetap di Onderdistrik Boalemo.

353. Lihat *Limo Lo Pohalaa*.

VOC dalam sejarahnya kemudian mengakui Boalemo sebagai suatu kerajaan yang berdiri sendiri. Boalemo diperintah oleh dua orang raja, yakni Raja biluhu dan Raja poliyanga. Selain raja, perlengkapan pemerintahan Boalemo terdiri pula dari seorang *jogugu*, dua *wulea lo lipu*, dan seorang *kapitan laut*. Raja Boalemo terakhir mangkat pada 1879 dan sesudah itu pemerintahan Boalemo dijalankan oleh empat marsaoleh. Setelah wafatnya keempat marsaoleh tersebut, tidak lagi diangkat penggantinya.[354]

III. GORONTALO & LIMBOTTO

a. Perkembangan Kerajaan-kerajaan di Gorontalo

Leluhur raja-raja Gorontalo adalah Wadipalapa (1385–1427) yang menurunkan Uloli (1427–1450). Putra Uloli bernama Wolanga (Wolango, 1450–1481) menggantikan ayahnya sebagai raja di Gorontalo. Sementara itu garis silsilah raja-raja Limbotto diawali dari Ratu Tolangohula yang menikah dengan Lepehulawa. Pernikahan ini membuahkan putra bernama Yilonggowa yang menjadi raja Limbotto berikutnya. Raja-raja Limbotto berikutnya adalah Hulado, Nggealo, Tobuto, Datautapu, Mitu, Moito, Pulubulawa, dan Ratu Moliye (abad 15). Raja Wolanga menikah dengan Ratu Moliye dan dikaruniai seorang putra bernama Polamolo.[355] Ketika putra mereka telah bertumbuh dewasa Wolanga dan Moliye sepakat berperang bersama-sama guna meluaskan wilayah kerajaan masing-masing. Polamolo diserahi pemerintahan atas kedua kerajaan. Dengan demikian, Gorontalo dan Limbotto untuk pertama kalinya diperintah oleh seorang penguasa. Gelarnya adalah Olongia Mobalanga atau "Raja yang berpindah-pindah ke sana ke mari", dalam artian selama seminggu ia berada di Gorontalo dan minggu berikutnya di Limbotto.

Angkatan perang Raja Wolanga bertolak dari Teluk Gorontalo ke arah Barat. Sementara itu, pasukan Limbotto berangkat dari pantai selatan Limbotto, menyeberang ke Kepulauan Togian kembali ke daratan Sulawesi, dan setelah itu berlayar ke arah barat serta bergabung dengan angkatan perang Gorontalo. Pasukan Gorontalo ketika itu dipimpin oleh Hilibala, sedangkan pasukan Limbotto berada di bawah komando Hemuto. Dalam perjalanan pulang kedua pemimpin ini sepakat bertukar kedudukan. Ternyata Ratu Moliye kemudian berselingkuh dengan Hilibala. Peristiwa itu mengakibatkan keretakan antara Gorontalo dan Limboto sehingga pecah

354. Lihat *Lima Pahalaa: Susunan Masyarakat, Hukum Adat, dan Kebijaksanaan Pemerintahan di Gorontalo*, halaman 15.
355. *Lihat Sejarah Lokal di Indonesia*, halaman 220.

peperangan antar keduanya. Kendati Polamolo berupaya mempertahankan keutuhan negerinya, ribuan orang Gorontalo dibantai oleh Limbotto. Karena dilanda kesedihan teramat dalam, Polamolo pergi berkelana.

Di tengah pengembaraannya, Polamolo berjumpa dengan Hiyahulawa, putri Raja Buhu Ponelo. Mereka kemudian menikah dan dikaruniai seorang anak bernama Limonu dan Jilimonu yang kelak terkenal keperkasaannya. Ketika Limonu masih berada dalam kandungan, Polamolo dipanggil pulang ke Gorontalo. Limonu bertubuh besar, ia terkenal karena bisa menangkap burung maleo. Dalam setiap permainan, ia pasti melebihi kawan-kawannya. Suatu kali Limonu bertanya kepada ibunya mengenai siapakah ayahnya. Ibunya memberitahu bahwa Limonu merupakan putra raja negeri besar di sebelah timur.

Mendengar penuturan ibunya, Limonu berangkat mencari ayahnya dan tiba di Istana Gorontalo. Berkat kepandaiannya bermain bola, Limonu dipertemukan dengan ayahnya. Ia kemudian tinggal di istana dan mendengar mengenai kekejaman Hemuto terhadap orang Gorontalo. Dalam suatu perang tanding, Hemuto berhasil dikalahkan dan melarikan diri ke dalam hutan. Semenjak itu nasibnya tak diketahui lagi.

Raja Polamolo dibunuh oleh rakyat Limbotto karena suatu kesalahpahaman. Ia memerintahkan rakyat Limbotto mendirikan pondok baginya di Dehuwalolo, perbatasan antara Limbotto dan Gorontalo. Setelah tujuh hari menjalankan pemerintahan di Gorontalo, raja bertolak ke Limbotto. Di tengah jalan ia melihat asap dan api yang berasal dari sekelompok orang Limbotto. Mereka tengah membangun pondok sebagaimana yang diperintahkan oleh Polamolo. Manyaksikan asap beserta api tersebut, Polamolo bertanya apakah yang tampak gelap dan hitam tersebut. Para pengiring menjawab bahwa itu adalah orang-orang Limbotto yang sedang menyiapkan pemondokan bagi dirinya. Polamolo kemudian berdiam diri, tetapi pertanyaan raja ini ditafsirkan sebagai penghinaan oleh orang-orang Limbotto. Mereka menganggap bahwa ia mengejek Limbotto sebagai “gelap dan hitam." Oleh karenanya, Polamolo lantas dihabisi nyawanya oleh pembesar-pembesar Limbotto. Kepalanya dimakamkan di Gorontalo sedangkan tubuhnya di Limbotto. Polamolo digantikan oleh Ntihedu (1490–1503) dan Detu (1503–1523). Selanjutnya, pemerintahan Gorontalo dan Limbotto masing-masing dipegang oleh *olongia to tilayo* (raja hulu) serta *olongia to huliyaliyo* (raja hilir). Raja Limbotto To Huliyaliyo pertama adalah Datau, yang digantikan secara berturutan oleh Bia (1539–1551) dan Molie (Lambidu, 1551–1562).

Raja Limboto To Tilayo pertama adalah Pilohibuta (± 1525). Penggantinya secara berturut-turut adalah Puloyoto dan Apolo.

Kerajaan Gorontalo dan Limbotto terlibat peperangan yang akut selama dua abad dan baru berakhir pada abad 17 dengan diselenggarakannya perjanjian antar dua kerajaan. Kedua belah pihak sepakat tak akan melakukan tindak kekerasan satu sama lain. Apabila salah satu kerajaan dilanda permasalahan, pihak yang lain akan membantunya.

Meski telah mengikat perjanjian, peperangan antara Gorontalo dan Limbotto pecah lagi pada masa pemerintahan Dulapo (pengganti Apolo, sekitar abad 16–17), Raja Limbotto dari garis keturunan To Huliyaliyo (raja hilir). Ia mengutus putranya, Tilahunga, ke Ternate guna memohon bala bantuan menghadapi Gorontalo. Raja Limbotto dari garis keturunan To Tilayo (raja hulu) saat itu adalah Humonggilu (Raja Hunggiludaa, pengganti Molie, 1562–1564). Ia membantu Raja Ternate dalam perang saudara yang berkecamuk di kawasan tersebut. Humonggilu dinikahkan dengan saudari Raja Ternate bernama Ju Mu'min dan menganut agama Islam. Sepulangnya dari Ternate, Humonggilu menyebarkan agama Islam di Limbotto yang menurut catatan kronik (susunan waktu) terjadi pada sekitar 1562.[356]

Pada saat yang kurang lebih bersamaan, Gorontalo diperintah oleh Amai (1523–1550) selaku raja hulu, dan Padungge (1530–1560) yang digantikan oleh Tuliyabu (1560 –1578) selaku raja hilir. Amai menikahi putri Raja Kumojolo yang dari garis keturunan ibunya masih berkerabat dengan raja-raja Ternate. Salah satu sumber sejarah menyatakan bahwa Raja Matolodulahu[357] (1550–1585), yang menggantikan Amai, telah menjadikan agama Islam sebagai agama kerajaan. Dengan demikian, agama Islam dapat dikatakan tersebar di Gorontalo pada kurang lebih kurun waktu tersebut (abad 16). Pongoliwu (1585–1615) naik takhta menggantikan ayahnya. Raja Pongoliwu lalu digantikan kembali oleh Molie (1615–1646). Agama Islam baru berkembang pesat semasa pemerintahan Raja Eyato (Tato Selongi, 1646–1674) pada abad 17. Waktu itu, di kawasan Gorontalo dikenal adanya enam kerajaan, yakni Gorontalo, Limboto, Bone-Suwawa, Bolango, Atinggola, dan Boalemo. Belakangan tinggal tersisa lima kerajaan saja dan disebut *Lima Pahalaa*, yang terdiri dari Gorontalo, Limbotto, Boalemo, Atinggola, dan Bone-Suwawa.

---

356. Lihat *Sejarah Lokal di Indonesia*, halaman 225.
357. Raja Matolodula diberitakan memiliki ubu yang sama dengan Sultan Ternate cucu Baabullah. Lihat *Sejarah Lokal di Indonesia*, halaman 225.

Permohonan bantuan Tilahunga ke Ternate tampaknya bertepuk sebelah tangan. Tilahunga (1600–1630) kemudian menggantikan ayahnya sebagai Raja Hilir Limbotto. Di Gorontalo, Wulatileni (1578–1611), putri Tuliyabu, yang menikah dengan Motolodula mengantikan ayahnya sebagai Ratu Hilir Gorontalo. Limbotto yang kali ini diperintah oleh Detubiya–pengganti Humonggilu selaku raja hulu–memohon bantuan lagi kepada Ternate. Aliansi Limbotto dan Ternate berhasil meluluhlantakkan Gorontalo, namunPoheleo atau Mboheleo, putri Matolodulahu dan Wulatileni, ditawan oleh Ternate. Ia dinikahkan dengan Raja Ternate. Ketika ibunya meninggal, Poheleo (1611–1632) diizinkan pulang ke negerinya dan menggantikan ibunya selaku Ratu Hilir Gorontalo. Karena mendendam terhadap Limbotto yang pernah menghancurkan negerinya, ia mengutus Perdana Menteri Bumulo ke Gowa, musuh besar Ternate, dan memohon bantuan mereka.

Sebenarnya, Bumulo enggan memenuhi tugas ini karena telah sepakat dengan penghulu kerajaan bernama Eyato untuk mengupayakan persekutuan dengan Limbotto. Meskipun demikian, Ratu Poheleo mengancam tak akan mengizinkan pernikahannya dengan Ti Duhula, cucu perempuan Matolodulahu. Bersamaan dengan itu, Momiyo (1630–1650) telah menggantikan Tilahunga sebagai Ratu Hilir Limbotto. Berkat bantuan Gowa, Limbotto dapat dikalahkan. Dua putri dan seorang putra Ratu Momiyo ditawan oleh Gowa. Putra ratu hilir yang bernama Pomontolo kemudian dibawa ke Mandar. Kedua orang putri Limbotto mendapatkan perlakuan yang buruk dan tak lama setelah itu Gowa dilanda musim kemarau panjang. Konon setelah kedua orang putri Limbotto itu memperlihatkan kesanggupannya menurunkan hujan, Raja Gowa memutuskan memulangkan mereka ke Limbotto.

Raja Gowa kini berbalik pikiran dan memutuskan menyerang Gorontalo serta menundukkannya di bawah kekuasaan Limbotto. Kedatangan angkatan perang Gowa ini terdengar oleh Bumulo yang dengan cerdik mengutus Eyato membawa persembahan berupa emas kepada mereka. Setelah berjanji bahwa Gorontalo akan menyerah kepada Limbotto dan membagi-bagikan emasnya, angkatan perang Gowa ditarik mundur. Sementara itu di Gorontalo dan Limbotto telah terjadi pergantian kekuasaan sebagai berikut. Di Limbotto hulu, Raja Detubiya (1564–1566) digantikan secara berturut-turut oleh Mitu (1566–1636), Delilauwo (1636–1660), Ntihedu (1660–1671), dan Ilato (1671–1707). Di Limbotto hilir, Pomontolo yang pernah dibawa ke Mandar, menggantikan Ratu Momiyo, ibunya. Ratu Poheleo dari Gorontalo

hilir digantikan oleh Bumulo (1632–1647). Sementara itu, di Gorontalo hulu memerintah Eyato (1646–1674).

Persekutuan baru antara Gorontalo dan Limbotto dibangun kembali karena mulai menyadari bahwa mereka telah menjadi korban pusaran politik dua kerajaan besar, yakni Ternate beserta Gowa. Guna mengukuhkan perdamaian antara Gorontalo dan Limbotto, diadakanlah upacara adat di tepi Danau Limbotto. Pada kesempatan tersebut, seutas rantai yang digantungi lambang kedua kerajaan beserta dua bilah pedang yang dibasuh dengan air danau. Mereka kini bersatu padu melawan Ternate. Meskipun demikian, niat ini tercium oleh Sultan Sibori dari Ternate yang mengirimkan pasukannya ke Gorontalo dengan dukungan persenjataan VOC. Merasa tak sanggup menghadapi bala tentara Ternate, Gorontalo dan Limbotto mengurungkan niatnya membebaskan diri dari dominasi Ternate. Pengaruh Ternate makin kuat di Gorontalo setelah kekalahan Gowa dalam Perang Makassar. Berdasarkan Perjanjian Bungaya yang harus ditandatangani Gowa, mereka tak boleh lagi berupaya meluaskan pengaruhnya ke Sulawesi Utara, termasuk Gorontalo dan Limbotto. Besarnya pengaruh Ternate tampak pada hak Sultan Ternate mengangkat dan memberhentikan raja-raja Gorontalo beserta Limbotto. Selain itu, suatu tatanan pemerintahan dibangun berdasarkan model Ternate.

Ternate sendiri lantas mengeksploitasi Gorontalo serta memungut upeti guna dibayarkan kepada VOC. Pada kurun waktu ini, Gorontalo merasa terancam oleh Kerajaan Boolang Mongondow sehingga membentuk aliansi dengan Buol dan Palu. Lambat laun, Ternate tidak sanggup mempertahankan pengaruhnya atas Gorontalo dan Limbotto. Sementara itu, VOC telah lama menanti-nantikan kesempatan menancapkan kekuasaannya di kawasan tersebut. Menyaksikan ketidakmampuan Ternate, VOC menyarankan kepada Ternate agar menyerahkan pengendalian Gorontalo dan Limbotto ke tangan mereka. Setelah melalui beberapa kali perundingan, Ternate setuju menyerahkan kedua kerajaan itu ke tangan VOC terhitung mulai 1 Januari 1677.

Menindaklanjuti penyerahan tersebut, VOC mengutus wakilnya, Padtbrugge, ke Sulawesi Utara pada 16 Agustus hingga 23 Desember 1677.[358] Bersamaan dengan kunjungan tersebut, diadakan perjanjian sementara antara VOC di satu pihak dengan Kerajaan Gorontalo beserta Limbotto di pihak lainnya. Butir-butir perjanjian itu

---

358. Lihat *Limo Lo Pohalaa: Sejarah Kerajaan Gorontalo*, halaman 74.

antara lain menyebutkan bahwa Sungai Gorontalo terbuka bagi pelayaran kapal VOC; penduduk harus menyerahkan hasil-hasil pertanian tertentu kepada Belanda, seperti kentang, kelapa, gandum, ubi, dan lain sebagainya; kewajiban bagi warga Gorontalo dan Limbotto menjaga keamanan serta pedamaian di daerahnya masing-masing; serta larangan berhubungan dengan bangsa asing lain, terkecuali Belanda.[359] Peristiwa ini merupakan awal masuknya pengaruh Belanda ke kedua kerajaan tersebut.

Perjanjian sementara di atas digantikan oleh suatu kontrak yang ditandatangani oleh Raja Bia (1677–1680) dari Gorontalo hilir beserta pihak Limbotto pada 25 Maret 1678. Butir-butir kontrak ini makin mengurangi kekuasaan raja-raja Gorontalo dan Limbotto karena menurut pasal keempatnya, setiap raja baru harus menandatangani perjanjian yang disahkan oleh VOC.

Gorontalo dan Limbotto mengobarkan pemberontakan terhadap Ternate dan VOC pada 1679 di bawah pimpinan Raja Bia karena isi kontrak yang dirasa merendahkan martabat kedua kerajaan. Perlawanan berhasil dipadamkan dan rakyat kedua kerajaan diwajibkan setiap tahunnya menyerahkan 150 batang balok dengan ukuran panjang 26 kaki, lebar 2,5 kaki, serta tebal 2 dim sebagai hukumannya. Dua pertiga penyediaan kayu tersebut dibebankan kepada Gorontalo, sedangkan sisanya kepada Limbotto. Raja Bia sendiri kemudian ditangkap dan diasingkan ke Afrika Selatan.[360] Raja Gorontalo hulu, Lepehulawa (1686–1735), meminta maaf kepada VOC atas pemberontakan itu. Kurang lebih pada 1704–1705, VOC menyerahkan Gorontalo dan Limbotto kepada Ternate. Meskipun demikian, rakyat kedua kerajaan tetap menentangnya.

Sebelum dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad 19, raja-raja yang berkuasa di Gorontalo hulu adalah Tanito atau Polamolo II (1674–1686), Lepehulawa (1686–1735), Nuha atau Nuwa (1735–1767), Nasarudin Tajul Alam Muhammad Walangaji atau Walango II atau Walangaji II (1767–1790), Iskandar Bia (Muhammad Hasanuddin Iskandar Panglima Syah atau Muhamad Mirsadien Iskandar Bya, 1790–1809), Saradjudin Iskandar Haydar atau Hajdari (1809–1828), Walangadi atau Walangaji III (1828–1835), Mohibudin Muhamad Salatar Iskandar Wajipalapa atau Wajipalapa atau Wadipalapa (1835–1847), dan Mohamad Thahir Iskandar Haydar Panju atau Pandjarois (Panjuroro, 1849–1851). Raja-raja di Gorontalo hilir selanjutnya

359. Lihat *Limo Lo Pohalaa: Sejarah Kerajaan Gorontalo*, halaman 75.
360. Lihat *Limo Lo Pohalaa: Sejarah Kerajaan Gorontalo*, halaman 103.

adalah Tiduhula (1647–1677), Bia (1677–1680), Walangaji atau Walangadi (1680–1718), Piola (1718–1737), Botutihe atau Botutige (1737–1757), Iskandar Monoarfa (1757–1777), Kaicil Unu atau Ubomongo (1777–1781), Muhamad Hasanudin Kaicili Ambohinga atau Ambohinga atau Pongoliwu Mbuingadaa atau Napu (1782–1795), Mbuingakiki Monoarfa atau Alimoedin Iskandar Djajenazain (Jayenaran) Bohinga (1795–1818), Mohajidin Mohamad Zain Iskandar Monoarfa atau Muhammad Iskandar Pui Monoarfa (1818–1829), Alimudin Mohamad Zain Adonara Lihawa atau Lihawa Monoarfa (1829–1830), Abdul Wajib Babionka atau Abd al-Bab Jonggo (1830–1831), Iskandar Bumulo atau Bumulo (1831–1836), Hasan Pui Monoarfa (1836–1851), Abdullah Pui Monoarfa (1851–1859), dan Zaenal Abidin Alhabsy Monoarfa atau Zainal Abidin Monoarfa (1859–1878).

Sebagai ganti Raja Bia dari Gorontalo hilir, atas persetujuan Raja Lepehulawa dari Gorontalo hulu, diangkatlah Walangadi (1680–1718) meski ia bukan keturunan Raja Bia. VOC mencoba melakukan lebih banyak intervensi dalam roda pemerintahan Gorontalo. Akibat kekalahannya dalam pemberontakannya melawan VOC, Gorontalo dibebani pembayaran kompensasi. Selain itu, VOC juga memaksakan beberapa pasal tambahan dalam perjanjian yang dulu telah disepakati oleh Raja Bia, antara lain kewajiban menyerahkan emas seberat 2 kati setiap tahunnya. Selain itu, rakyat Gorontalo dilarang membuat garam sendiri, yang kemudian dimonopoli penjajah. Selain itu, VOC menuntut penyerahan berbagai sumber daya alam Gorontalo.

Raja Lepehulawa dari Gorontalo hulu meninggal dan digantikan oleh Nuha atau Nuwa (1735–1767). Kurang lebih bersamaan dengan itu, Raja Walangadi mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh Botutihe atau Botutige (1737–1757) atas persetujuan para bangsawan Gorontalo. Ia merupakan sosok yang pandai serta memiliki ketegasan. Belum lama memerintah, Botutihe harus menghadapi pergolakan dengan kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya, seperti Atinggola, Boalemo, dan Suwawa-Bone. Alasannya, berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan VOC pada 1730, mereka merasa kedudukannya sederajat dengan Gorontalo-Limbotto sehingga menghendaki tata cara penghormatan yang sama, sedangkan Gorontalo dan Limbotto menganggap dirinya lebih tinggi dibanding raja-raja lainnya. Melalui perantaraan VOC, perseteruan ini dapat diselesaikan secara damai dengan tetap mengakui Gorontalo-Limbotto selaku kerajaan tertinggi di kawasan tersebut. Akibat

kegagalannya mengatasi penyelundupan dan perdagangan gelap oleh para pelompak, Botutihe diturunkan dari kedudukannya.

Calon pengganti Botutihe yang tak mempunyai keturunan adalah Jogugu Gorontalo yang bernama Iskandar Monoarfa. Ia diundang ke Ternate oleh Gubernur Abraham Abeleven pada 16 November 1657 guna menandatangani kontrak politik sebanyak 19 pasal. Namun, sebelum Iskandar Monoarfa sempat dilantik secara resmi sebagai Raja Gorontalo hilir, tersebar berita bahwa Botutihe memiliki putra bernama Kaicil Unu. Oleh karena itu, gubernur menuduh Iskandar Monoarfa hendak menyingkirkan saingannya dengan memberikan keterangan palsu. Ia kemudian dipenjara di Ternate. Para bangsawan Gorontalo mengajukan keluhan kepada Gubernur Schondervoort yang menggantikan Abeleven mengenai penahanan Iskandar Monoarfa. Hal ini menyebabkan kosongnya pemerintahan di Gorontalo karena Raja Nuha telah lanjut usia dan disamping itu, Kaicil Unu belumlah cukup umur memangku pemerintahan. Mereka meminta agar Iskandar Monoarfa dibebaskan serta diangkat sebagai Raja Gorontalo hilir. Permohonan ini disetujui oleh VOC dan Iskandar Monoarfa (1757–1777) dikembalikan serta diangkat sebagai Raja Gorontalo hilir. Tetapi sebelum dibebaskan, Monoarfa diwajibkan memasok getah karet kepada VOC dengan harga 70-80 Ringgit per pikulnya.

Raja Gorontalo hilir yang baru ini mengusulkan pembangunan benteng di sekitar Sungai Paguyama kepada Residen VOC di Manado. Raja mengajukan permohonan bantuan dana, sementara itu pihak Gorontalo yang akan menyediakan tenaga kerjanya. Kendati demikian, VOC sedang mengalami kesulitan keuangan akibat kekalahannya terhadap Inggris. Karenanya, VOC menyetujui penyediaan dana sebesar 20.000 Ringgit dengan catatan uang itu dianggap sebagai pinjaman atau utang jangka panjang. Iskandar Monoarfa menyambut tawaran VOC itu dan memulai pembangunan benteng pada 1767. Sebenarnya, tujuan pembangunan benteng ini adalah memperkuat pertahanan Gorontalo dalam menghadapi tekanan VOC. Dalam waktu tiga tahun saja pembangunannya dapat diselesaikan dan selanjutnya dinamai Benteng Monoarfa. Utang ini di kemudian hari dimanfaatkan oleh VOC untuk memeras Gorontalo dalam wujud kewajiban menyerahkan emas.

Iskandar Monoarfa tercatat menandatangani kontrak politik pada 3 Agustus 1776. Isinya mengingatkan Gorontalo agar memenuhi perjanjian-perjanjian sebelumnya. Isi perjanjian ini sangat merugikan Gorontalo, kerajaan tersebut

diwajibkan menyerahkan 1.200 real emas setiap tahunnya kepada VOC dan sebagai gantinya Belanda akan menyediakan kain keperluan rakyat Gorontalo. Namun, pada pasal 3, Belanda menegaskan bahwa kain tersebut harus dibeli dengan harga yang ditetapkan secara sepihak oleh penjajah. Belanda menerapkan politik pecah belah dengan memaksa para raja Gorontalo menekan raja-raja bawahan beserta rakyatnya sehubungan pengumpulan emas guna diserahkan kepada VOC setiap tahunnya, yang pada praktiknya kerap terjadi penyelundupan emas. Namun, Belanda tidak memperkenankan raja-raja Gorontalo mengadili pelakunya. Mereka diharuskan menyerahkan para penyelundup emas kepada penjajah dan akan mengadilinya di Ternate sesuai hukum VOC. Dengan demikian, ini menandai awal intervensi Belanda terhadap proses peradilan di Gorontalo. Raja Iskandar Monoarfa dipecat dari jabatannya pada 1777 dan diasingkan ke Ternate. Sebagai penggantinya diangkatlah Kaicil Unu (1777–1781).

Kaicil Unu mangkat pada 1781 dan digantikan oleh Muhamad Hasanudin Kaicil Ambohinga (1782–1795) selaku Raja Gorontalo hilir ke-12. Semasa pemerintahannya, penjajah bertambah kuat pengaruhnya serta berupaya memeras Gorontalo habis-habisan, terutama melalui keharusan menyetorkan emas. Belanda melarang kapal asing mendarat di pelabuhan-pelabuhan Gorontalo sehingga mengucilkan kerajaan tersebut dari arus perdagangan internasional. Seiring dengan itu, ancaman para perompak makin meningkat, apalagi VOC sendiri berada di ambang kebangkrutannya. Akibat dibebani keharusan menyetorkan emas, berbagai daerah bawahan Gorontalo berontak dan berupaya melepaskan diri. Penguasa-penguasa daerah itu bersekutu dengan para bajak laut dan melancarkan perlawanan, tetapi dapat digagalkan oleh Belanda. Kewajiban menyerahkan emas ini makin memberatkan Gorontalo sehingga mereka meminta keringanan kepada VOC. Sehubungan dengan hal ini, Ambohinga berencana mengadakan pembicaraan dengan Residen Bayer di Manado seputar masalah penyerahan emas.

Meskipun demikian, menjelang perundingan itu Ambohinga jatuh sakit dan hanya mengutus putranya, Kaicili Panjaro, sambil membawa emas sebanyak 121 real. Tetapi Bayer mengatakan bahwa emas tersebut masih belum cukup melunasi utang Iskandar Monoarfa serta menuntut agar masalah utang ini segera diselesaikan. Ambohinga lantas memberikan wewenang kepada putranya untuk menjual kekayaan miliknya demi melunasi utang tersebut. Masalah yang mendera Kerajaan Gorontalo

tidak selesai sampai di situ saja. Pecah pertikaian dengan Maypuro, Raja Parigi yang menuduh Gorontalo telah merampas kekayaan emasnya. VOC segera turun tangan mencegah pecahnya peperangan antara Parigi dan Gorontalo.

Sementara itu, di Gorontalo hulu, Raja Nasarudin Tajul Alam Muhammad Walangaji atau Walangaji II (1767–1790) mangkat dan digantikan oleh Iskandar Bia (1790–1809) selaku Raja Gorontalo hulu ke-11. Saat dikukuhkan kedudukannya di Ternate, Ambohinga dari Gorontalo hilir yang sedang sakit menyertainya. Raja Iskandar Bia pernah mengirim surat kepada Gubernur Jenderal Arnold Alting tertanggal 31 Maret 1791.[361] Isinya meminta kepada Belanda agar harga kain yang dibelinya bisa ditukar dengan emas yang dihasilkan di Gorontalo. Raja melaporkan pula mengenai pedagang Bugis yang melanggar adat kebiasaan setempat.

> …..kami paduka raja-raja dengan menteri-menteri berani memohonkan kasih sayang kepada paduka maha mulia lagi tertinggi bangsawan Gurnadur Jenderal….. pada mengurangkan daripada harga kain-kain tukar-menukar dengan emas hapir cari tersisa pada segala bala rakyat……. Istimewa pula zaman sekarang ini Kapiten Bugis itu sudah kerja rumah dan tempat putus dan bermain ayam…. Jikalau sebegitu kelakuan orang Bugis itu bertinggal akhirnya akan jadi sesal kepada Negeri Gorontalo karena yang demikian itu tiada kebiasaan kepada orang-orang Gorontalo…[362]

Berdasarkan kutipan di atas, tampaknya adat yang dilanggar oleh orang-orang Bugis adalah menyabung ayam. Karenanya, boleh disimpulkan bahwa menyabung ayam merupakan kegiatan terlarang di masa itu.

Sekembalinya ke Gorontalo dari mendampingi Iskandar Bia ke Ternate, Ambohinga wafat setelah menderita sakit dan digantikan oleh Alimoedin Iskandar Djajenazain Bohinga (1790–1818) sebagai Raja Gorontalo hilir ke-13, ia merupakan putra Iskandar Monoarfa. VOC memaksa Bohinga menandatangani kontrak politik baru pada 14 Desember 1790 yang isinya menyatakan kesediaannya dipecat jikalau tak sanggup menyerahkan emas sesuai keinginan penjajah. Pada 1799, Bohinga mengadakan perundingan dengan utusan Inggris bernama Jacobson.[363] Oleh pihak Inggris, raja yang menandatangani perjanjian dianggap sebagai penguasa tertinggi dan sekaligus kepala pemerintahan. Dengan kata lain, Inggris mengabaikan kedudukan raja di hulu.

---

361. Lihat *Iluminasi dalam Surat-surat Melayu Abad ke-18 dan ke-19*, halaman 143–144.
362. *Iluminasi dalam Surat-surat Melayu Abad ke-18 dan ke-19,* halaman 144.
363. Lihat *Limo Lo Pohalaa: Sejarah Kerajaan Gorontalo*, halaman 218.

Raja Muhamad Mirsadien Iskandar Bya selaku Raja Gorontalo hulu seharusnya digantikan oleh Tapoe, cucu Lepehulawa. Namun, karena hubungan yang kurang baik saat itu, Belanda belum juga mengukuhkannya di Ternate hingga ia mangkat pada 1809. Belanda segera mencari penggantinya guna mencegah kekosongan pemerintahan di Gorontalo. Pilihan jatuh kepada Saradjudin Iskandar Haydar (1809–1828), putra Raja Iskandar Bya.

Semenjak 1818, Belanda mengganti sebutan raja hilir dengan *raja gouvernement*, sedangkan raja hulu dengan *raja negori*. Ditetapkan pula bahwa raja hilir adalah pelaksana pemerintahan di daerahnya serta merupakan wakil Gorontalo dalam perundingan dengan Belanda. Selanjutnya, Belanda menetapkan pula tugas serta wewenang masing-masing raja. Kaum bangsawan Gorontalo menyadari bahwa kebijakan Belanda ini sebenarnya bertujuan memecah belah mereka sehingga akhirnya timbul dualisme kekuasaan. Akibatnya, mereka hanya menggunakan gelar-gelar baru ciptaan penjajah tersebut saat berhubungan dengan pemerintah kolonial Belanda.

Raja Gouvernement Mohajidin Mohamad Zain Iskandar Monoarfa (1818–1829) mangkat pada 17 Maret 1829 setelah sebelumnya menderita sakit. Sebagai penggantinya diangkatlah Pangeran Lihawa dengan gelar Raja Alimudin Mohamad Zain Adonara Lihawa (1829–1830). Pemerintahan Lihawa tidak berlangsung lama karena mangkat pada 11 Agustus 1830. Pilihan selanjutnya jatuh kepada Hasan, putra Mohamad Zain Iskandar Monoarfa, tetapi ia masih bertugas sebagai pegawai pemerintah kolonial di Jawa. Di samping itu, para bangsawan Gorontalo kurang menyetujuinya karena menganggap Hasan berperangai buruk. Akhirnya, sebelum terjadi kesepakatan, *raja gouvernement* sementara dirangkap oleh *raja negori*, yakni Walangaji III. Kaum bangsawan juga kurang menyukai Walangaji III sehingga mereka mengusulkan Jogugu Abdul Wajib Babionka atau Abd al-Bab Jonggo (1830–1831) sebagai *raja gouvernement* ke-17. Usulan ini disetujui oleh pemerintah kolonial dan ia dilantik pada 11 Desember 1830. Walangaji III menjadi kecewa terhadap kaum bangsawan yang kurang menyukai dirinya sehingga kurang semangat bekerja. Banyak urusan sengaja ditelantarkannya hingga mendapat peringatan keras dari pemerintah kolonial. Ia lalu berjanji memangku jabatannya dengan baik.

Pangeran Wajipalapa tampil sebagai *raja negori* ke-16 dengan gelar Mohibudin Muhamad Salatar Iskandar Wajipalapa (1836–1847). Salah satu sumber mengenai silsilah raja-raja yang memerintah di Gorontalo menyebutkan bahwa Tilahunga,

putra Raja Wajipalapa, yang kemudian diangkat sebagai raja di kerajaan kecil bernama Bolango, terkenal akan daya ingatnya yang luar biasa.[364] Sekali saja seseorang menyebutkan silsilahnya, Tilahunga akan mengingatnya di luar kepala. Tilahunga pernah meriwayatkan kepada Asisten Residen Riedel mengenai nama raja-raja yang berkuasa di Gorontalo–mulai dari zaman VOC hingga pemerintahan Hindia Belanda.

Iskandar Bomulo (1831–1836), *raja gouvernement* yang menggantikan Abdul Wajib Babionka, merupakan seorang tokoh yang keras kepala sehingga ia dipanggil oleh Residen Belanda di Manado. Selama kepergiannya itu, Hasan Monoarfa diserahi tugas sebagai *raja gouvernement* sementara. Ia memanfaatkan kesempatan ini guna memperluas kekuasaannya di kalangan bangsawan Gorontoalo. Akibatnya, begitu tiba di kampung halamannya, Iskandar Bomulo menghadapi perlawanan kaum bangsawan lainnya. Itulah sebabnya, Iskandar Bomulo mengajukan pengunduran dirinya tetapi tak disetujui pemerintah kolonial.

Raja Negori Wajipalapa mangkat pada 18 Desember 1847. Kaum bangsawan tidak kunjung menyepakati siapakah yang layak menggantikannya. Karena lowongnya jabatan itu, Raja Gouvernement Iskandar Bomulo dipercaya merangkapnya sementara waktu. Kesepakatan baru dicapai pada 1849 ketika kaum bangsawan mencalonkan Pangeran Mohamad Thahir Iskandar Haydar Panju sebagai *raja negori*. Pemerintah kolonial menerima pencalonannya sehingga resmilah Haydar Panju (1849–1851) menjadi *raja negori* ke-17. Ia merupakan *raja negori* terakhir karena setelah itu Belanda menerapkan kebijakan bahwa di Gorontalo hanya ada seorang raja saja.

Setelah diterapkannya kebijaksanaan di atas, hanya ada satu raja saja di Gorontalo, yakni *raja gouvernement*. Semasa pemerintahan *raja gouvernement* terakhir, Zaenal Abidin Alhabsy Monoarfa, terjadi penggelapan pajak oleh para bangsawan Gorontalo. Akibatnya, Belanda memerintahkan raja agar memecat mereka. Musibah menerpa Gorontalo dengan terjadinya gagal panen pada 1877–1878. Pada saat itu pula mangkatlah Zaenal Abidin Alhabsy Monoarfa. Pemerintah kolonial tidak mencari penggantinya dan menerapkan pemerintahan langsung di Gorontalo. Peristiwa ini menandai berakhirnya Kerajaan Gorontalo.

Sementara itu, raja-raja yang memerintah Limbotto hulu adalah Humonggilu (1707–± 1710), Pulu (± 1710–1750), Biauddin (1750–1777), Laya (1777–1782), Tilahunga (1782–1790), Tapu (1790–1800), Humonggilu (1800–1809), Moesafirudin

364. Lihat *Sejarah Lokal di Indonesia*, halaman 226, catatan kaki no.24.

Iskandar Tamau atau Iskandar Abdul Rauf (1809–1812), Jafar Naki (1812–1818), Pakaya (1818–1820), Abdurrahman (1820–1826, pemerintahan pertama), Muhammad Iskandar Pui Monoarfa (1826–1828), Abdurrahman (1828–1831, pemerintahan kedua), Kuka (Muhammad Arsad, 1831–1835), Katili (1835–1836), Moopangga (Haji Abdul Jalil, 1836), dan Abdul Rachman (1836–1855). Di Limbotto hilir memerintah Pongaito, Bumulo (–1742), Hulupango (1742–1765), Naki (1765–± 1776), Lahai (–1783), Humungo (1783–1784), Bilatula (1784–1793), Modanggu (1793–1800), Zainuddin Abdul Rauf (1800–1810), Baruwadi (1810–1812), Mohamad Mansarudin Sirajul Belad Iskandar Jaffar atau Jafar (1812–1826), Mahmud Naki (1826–1835), Kuka (Muh. Arsad, 1835–1838), Hasan Pui Monoarfa (1838–1841), dan Muhammad Iskandar Hasanuddin Olii (1841–1862).

Limbotto ikut terseret pertikaian antara Gorontalo dan VOC. Ketika itu Raja Limbotto hulu disebut juga sebagai Raja Matahari Naik, sedangkan Limbotto hilir juga disebut Raja Matahari Masuk. Ketika itu, yang memerintah di Limbotto adalah Pilohibuto yang menjabat sebagai Raja Matahari Masuk (Limbotto hilir) dan Iyato (1671–1707) selaku Raja Matahari Naik (Limbotto hulu). Pada 1681 diperkenalkan istilah baru, yakni Raja Pertama (raja hilir) dan Raja Kedua (raja hulu). Belakangan, raja pertama ini disebut pula *raja gouvernement* karena kerap berhubungan dengan pemerintah kolonial, sedangkan raja kedua disebut *raja negori* karena lebih mengurusi masalah dalam negeri. VOC mengadakan pula kontrak politik dengan mereka yang pada intinya mengakui kekuasaan mereka, tetapi kedua raja itu harus menyerahkan upeti serta bersikap setia terhadap wakil VOC di Ternate. Dipicu oleh 160 budak yang melarikan diri ke Buol, pecah pertempuran pada 19 Desember 1683 antara Limbotto dan Buol. Kondisi kerajaan-kerajaan pada saat itu rentan perselisihan. Pada pertempuran tersebut Buol menderita kekalahan karena Limbotto dibantu oleh Kaidipang.

Kegiatan perompakan merajalela di Teluk Tomini, yang menurut Belanda merupakan tanggung jawab Limbotto untuk memberantasnya. Pemerintah kolonial lalu menekan Limbotto agar lebih aktif memerangi perompakan. Kesempatan tersebut tiba saat naik takhtanya Moesafirudin Iskandar Tamau atau Iskandar Abdul Rauf (1809–1812) sebagai raja kedua. Kontrak baru disodorkan dan ditandatangani pada 24 Februari 1809 yang mengharuskan Raja Limbotto memenuhi kewajibannya kepada Belanda sesuai kontrak-kontrak terdahulu. Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris di Kepulauan Nusantara, yang memerintah sebagai raja pertama adalah Mohamad

Mansarudin Sirajul Belad Iskandar Jaffar (1812–1826), sedangkan raja keduanya dijabat oleh Abdurrahman. Keduanya juga memperoleh pengakuan dari pemerintah Inggris serta dikukuhkan kedudukannya di Manado oleh Residen Neijs.

Pada 1822, kedua raja Limbotto diundang ke Ternate dan pada kesempatan itulah penggunaan gelar raja pertama dan raja kedua bermula. Undangan itu dimaksudkan pula mencegah Limbotto bersatu dengan Gorontalo dalam menentang Belanda. Meskipun demikian, kegiatan perompakan masih belum juga berhasil diatasi. Pemerintah kolonial mengganti Neijs dengan P. Merkus pada 1824. Kepanjangan tangan pemerintah kolonial yang baru ini menerapkan strategi kekerasan. Ia memutuskan membangun benteng di Kwandang yang biayanya dibebankan kepada Limbotto. P. Merkus mengadakan kunjungan ke Limbotto pada 4 Juni dan berhasil mengadakan perjanjian dengan para penguasa Limbotto. Isi perjanjian itu memberi kesempatan penjajah mengeksploitasi Limbotto, seperti pemberian izin memungut pajak tol oleh pemerintah kolonial serta perintah membangun jalan. Meskipun demikian, terdapat pasal yang melarang perdagangan budak.

Pangeran Djoeka, salah seorang bangsawan Gorontalo yang sebelumnya pernah bermasalah dengan pemerintah kolonial dan dibuang ke Malaka, diizinkan tinggal di Limbotto. Ia berselisih dengan Raja Muhammad Iskandar Hasanuddin Olii (1841–1862) dan mencoba membunuhnya. Pembunuhan berhasil digagalkan dan Pangeran Djoeka dihadapkan pada pengadilan yang dihadiri oleh raja-raja Gorontalo, yakni Iskandar Bomulo beserta Iskandar Wajipalapa. Pengadilan menjatuhkan hukuman pengasingan lima tahun ke Ambon kepada Pangeran Djoeka. Raja Muhammad Iskandar Hasanuddin Olii sendiri merupakan raja terakhir karena setelah ia wafat tidak diangkat penggantinya.

Sebelumnya, Belanda menerapkan kebijakan dalam satu kerajaan hendaknya hanya ada satu raja. Peraturan ini kemudian disampaikan kepada para raja Gorontalo dan Limbotto lewat perantaraan Asisten Residen Gorontalo, namun diprotes oleh Raja Negori Abdul Rachman (1836–1855) dari Limbotto hulu. Ia mengatakan bahwa alasan Belanda yang mengaitkan kemunduran kawasan tersebut dengan adanya dua orang raja adalah tak masuk akal. Asisten residen tak dapat mengambil keputusan apapun dan melimpahkan kasusnya kepada Residen Manado yang mengundang Abdul Rachman. Di hadapan residen, Raja Abdul Rachman menyampaikan bahwa pemerintahan dua orang raja itu sangat baik bagi perimbangan kekuasaan.

Residen Manado, Scherius, tidak surut dari pendiriannya dan mengancam Abdul Rachman. Ia memberikan Raja Negori Limbotto itu dua pilihan; menerima keputusan tersebut dan menerima tunjangan per tahunnya; atau diasingkan dari negerinya. Dengan terpaksa Abdul Rachman menyetujui pilihan pertama sehingga ia menjadi *raja negori* terakhir di Limbotto.

b. Berakhirnya Pemerintahan Para Raja di Gorontalo

Para pemuka setempat semenjak 1861 menghendaki agar *Lima Pahalaa* ditempatkan langsung di bawah pemerintah kolonial. Belanda menyambut baik keinginan ini dan Menteri Jajahan Kerajaan Belanda mengeluarkan persetujuannya pada 1864. Tetapi setelah diperhitungkan masak-masak, ternyata dengan diberlakukan pemerintahan langsung Belanda harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar fl25.000.[365] Oleh karena itu, kebijakan tersebut ditunda selama 25 tahun. Selama kurun waktu itu, raja-raja yang meninggal tidak diganti dan roda pemerintahan dijalankan oleh para marsaoleh (kepala distrik). Di antara *Lima Pahalaa*, yang terakhir meninggal adalah Raja Gorontalo hilir pada 12 April 1878. Kekuasaan Belanda sendiri makin mantap setelah berakhirnya Perang Panitip pada 1873.[366]

Pemerintahan para raja di Gorontalo baru diakhiri sepenuhnya oleh pemerintah Belanda berdasarkan beslit (surat keputusan [penetapan pengangkatan]) Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 17 April 1889 (*Staatsblad* no. 96 dan 250 tahun 250). Adapun raja-raja terakhir bagi masing-masing kerajaan yang berada di Gorontalo adalah

- Limbotto Barat (hilir) dengan raja terakhirnya Muhammad Iskandar Hasanuddin Olii (1841–1863).
- Limbotto Timur (hulu) dengan raja terakhirnya Abdul Rachman (1836–1855).
- Gorontalo Barat (hilir) dengan raja terakhirnya Zainal Abidin Monoarfa (1859–1878).
- Gorontalo Timur (hulu) dengan raja terakhirnya Pandjarois (Panjuroro, 1849–1851).
- Bone-Suwawa dengan raja terakhirnya Sapjatidien Iskandar Muhammad Wartabone Illahu (1839–1858).

365. Lihat *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*, halaman 184.
366. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Utara*, halaman 22.

Sejak penghapusan kerajaan-kerajaan tersebut, dibentuklah *Afdeeling* Gorontalo yang dipimpin oleh seorang asisten residen.
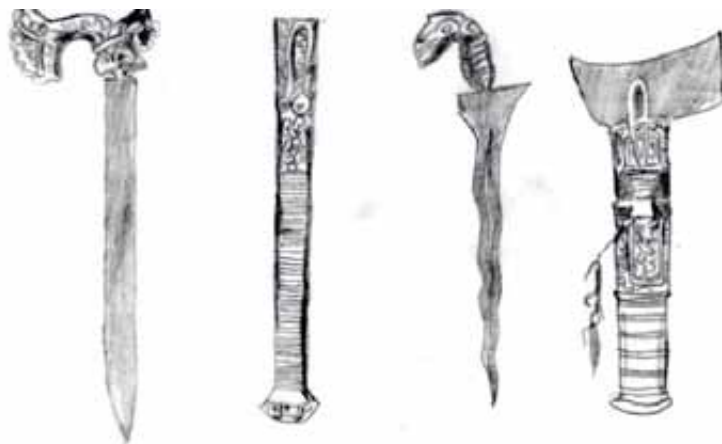
Pusaka Kerajaan Gorontalo, Yakni Pedang Gagang Bengkok Bersarung Emas Tempaan Buatan Bugis dan Keris Berlekuk, Bergagang Gading, Dengan Sarung Emas Tempaan Buatan Bugis.
Sumber: Digambar ulang dari *Lima Pahalaa: Susunan Masyarakat, Hukum Adat, dan Kebijaksanaan Pemerintahan di Gorontalo*, halaman 30

c. Sosial Kemasyarakatan

Rakyat Gorontalo pada masa silam meyakini kekuatan gaib dan juga *motoluhuta* (makhluk halus) yang berpotensi mengganggu kehidupan manusia. Guna mencegah atau menangkal pengaruh-pengaruh buruk yang berasal dari para makhluk tersebut diselenggarakanlah upacara-upacara adat yang disebut *mopo alati* atau *mohilihu*. Pimpinan bagi upacara tersebut adalah seorang dukun yang disebut *talenga* atau *panggoba*. Mereka membacakan mantra-mantra tertentu dan mempersembahkan berbagai sesajian.

Selain itu, masyarakat Gorontalo di zaman lampau meyakini adanya empat unsur di alam semesta ini yang memiliki kekuatan, yakni *huta* (tanah), *taluhu* (air), *dupoto* (angin), dan *tulu* (api). Keempat unsur ini dianggap sebagai penjamin kelangsungan hidup manusia, namun dapat pula mendatangkan malapetaka. Apabila dicermati, keempat unsur di atas mirip dengan yang terdapat dalam filsafat India. Tetapi hubungannya dengan India dan pengaruhnya di kawasan ini perlu menjadi obyek penelitian lebih lanjut. Orang Gorontalo percaya pula bahwa benda-benda tertentu seperti keris, akar bahar, dan batu-batuan tertentu memiliki kekuatan gaib yang sanggup menolak mara bahaya.

Meskipun Belanda telah menghapuskan kerajaan-kerajaan yang ada di Gorontalo, adat istiadat setempat tetap berjalan di tengah-tengah masyarakat. Nilai-nilai tradisional seperti *motutulungia* (gotong royong) dan *dembulo* (pemberian sumbangan bagi mereka yang dilanda kematian anggota keluarga) dipertahankan oleh rakyat. Ini berlaku pula dengan kesenian-kesenian rakyat, seperti *mobarajanji*, *momalebohu*, *pakadanga*, *mojongge*, *tonggobi*, dan *molinggolo.*[367]

IV. SUWAWA dan BONE (BONE SUWAWA)

Raja pertama Suwawa adalah Kayudugia yang sakti dan disegani. Saat itu, pengangkatan raja belum berdasarkan garis keturunan karena masyarakat masih dalam berbagai kelompok. Pusat Kerajaan Suwawa berada di kawasan Bawangio atau Wadah, yakni di Leda atau Desa Pinogu sekarang. Ia digantikan oleh putrinya yang bernama Ige yang juga dikenal sakti dan menjadi tempat bertanya serta memohon berkat bagi rakyatnya. Ige digantikan oleh putranya, Mokotambibulawa, yang mulai menyusun tatanan pemerintahan Suwawa.[368]

Raja-raja yang pernah memerintah Suwawa adalah Ige (1350–1380), Dulanoali (1380–1390), Luadu (1390–1400), Buruali (1400–1410), Aidugia (1410–1420), Purubulawan (1420–1430), Ohito (1430–1450), Maindoa (1450–1470), Mooduto I (1470–1500), Biini I (1500–1510), Bomboluawo (1510–1530), Tilagunde (1530–1550), Gulimbala (1550), Dagutanga (1550–1570), Mooduto II (1570–1590), Mooluado (1590–1600), Aibugia (1600–1610), Dulandimo (1610–1620), Pongoliu (1620–1640), Gulanguma (1640–1650), Bouwa (1650–1660), Gintaelangi (1660–1680), Biini II (1680–1700), Bobigi (1700–1706), Tilombe (1706–1720), Pulubulawan (1720–1730), Bumbulo (1730–1746), Walango (1746–1798), Mogolaingo (1798–1800), Pulumodoiong (1800–1830), Humungo (1830–1839), dan Sapjatidien Iskandar Muhammad Wartabone Illahu (1839–1858).[369]

Kerajaan Bone didirikan oleh para pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan semasa pemerintahan Raja Mooduto dari Suwawa. Raja Bugis, Tabone, mempunyai seorang putri bernama Rawe yang dinikahi oleh Mooduto. Dengan demikian, terbentuklah Kerajaan Bone dengan Rawe selaku raja pertamanya yang berpusat di

---

367. Lihat *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Utara*, halaman 41.
368. Lihat *Sejarah Daerah Sulawesi Utara*, halaman 24.
369. Lihat *http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Celebesu#Kr.C3.B3lowie_Suwawy*, diunduh pada 2 Agustus 2011.

Tinongkibia (Boneda'a sekarang).[370] Menurut sumber lainnya, pendiri Kerajaan Bone adalah Wadipalapa yang berasal dari Bone (Sulawesi Selatan).[371] Ia tiba di pelabuhan Gorontalo dan menyusuri sebuah sungai–diperkirakan jauh sebelum abad 15–yang kemudian dinamai Bone, sesuai daerah asalnya. Ia digelari oleh rakyatnya sebagai Matolodula (Matolodulahu), yang berarti Matahari. Pemberian gelar ini berkenaan dengan daerah asalnya, yakni dari sebelah timur, tempat terbitnya matahari. Karena kebijaksanaanya, ia banyak dikunjungi rakyat yang meminta nasihatnya. Setelah menyusuri Sungai Bone, tibalah ia di sebuah daerah bernama Pinohu (Pinogu).[372] Matolodula lantas mendirikan kerajaan di kawasan tersebut, yang juga diberinya nama Pinohu (Pinogu). Nama kerajaan ini pada perkembangan selanjutnya diganti menjadi Tuwawa (Suwawa). Belakangan, pada 1481 namanya kembali diganti menjadi Bone. Sementara itu, pada 1585 lahir keturunan Wadipalapa yang bergelar Wadipalapa II. Rakyat menggelarinya Matolodula Kiki, sedangkan Wadipalapa I digelari Matolodula DaA. Namun, tampaknya ini merupakan kesalahan karena Wadipalapa merupakan Raja Gorontalo, bukan Bone. Perlu ada kajian lebih lanjut mengenai sumber di atas.

Semula daerah Bone didiami oleh masyarakat yang terbagi dalam tujuh *linula* dengan Suwawa selalu *linula* terpenting. Pertama-tama berdirilah Kerajaan Suwawa, kemudian bermunculan kaum pedagang yang berasal dari Bone dan Bintauna sehingga berdiri Kerajaan Bone beserta Bintauna. Ketiga kerajaan ini mengadakan perjanjian dengan VOC. Masing-masing dipimpin seorang raja dan dua marsaoleh. Setelah Raja Suwawa mangkat, kerajaannya diletakkan di bawah pemerintahan Raja Bone. Dengan demikian, terbentuklah Kerajaan Bone Suwawa. Berdasarkan tempat kediamannya, lima kampung didiami oleh orang Suwawa, lima kampung didiami orang Bone, dan tiga kampung didiami oleh orang Bintauna.[373]

370. Lihat *Sejarah Daerah Sulawesi Utara*, halaman 25.
371. Lihat *Riwayat Benteng Otanaha, Otahiya, dan Ulupah,* halaman 36.
372. Lihat *Riwayat Benteng Otanaha, Otahiya, dan Ulupah,* halaman 37.
373. Lihat *Lima Pahalaa: Susunan Masyarakat, Hukum Adat, dan Kebijaksanaan Pemerintahan di Gorontalo*, halaman 14

D. KERAJAAN-KERAJAAN DI SULAWESI TENGAH

I. BANAWA atau DONGGALA

a. Sejarah Awal dan Perkembangan Kerajaan

Kerajaan Banawa kini terletak di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Menurut legenda, Raja Banawa pertama adalah seorang wanita bernama I Badantasa (memerintah pada 1485–1552).[374] ia merupakan putri bungsu Petta Manurung (kakak tertua La Umasse dari Bone) dan Putri Peambuni. I Badantasa menikah dengan Lamapanganro, putra La Galigo, cucu Sawerigading–tokoh epos terkenal dari Sulawesi. Pernikahan mereka membuahkan dua orang putri, yakni I Tasa Banawa, yang kelak menjadi Raja Banawa kedua, dan Gonenggati. I Tasa Banawa (memerintah pada 1552–1557[375]) merupakan Raja Banawa ke-2. Pada masanya, Kerajaan Banawa mengembangkan kekuasaannya sehingga terbentuklah federasi beberapa daerah atau kampung yang disebut *Pitunggota*. Federasi ini juga berfungsi sebagai dewan adat yang mengambil keputusan penting bagi Kerajaan Banawa. Legenda menyatakan bahwa I Tasa Banawa menikah dengan Magau Lando Dolo dan dikaruniai dua orang putri, yakni Putri Kotambulawa, yang lahir dengan disertai seorang ular bernama Siri Banawa, dan Putri Taranggita. Kotambulawa (memerintah pada 1557–1650) menjadi Raja Banawa ke-3 menikah dengan Sawalambara dan berputrikan Intoraya, yang menjadi Raja Banawa ke-4. Intoraya (memerintah pada 1650–1698)[376] merupakan penguasa Banawa pertama yang memeluk agama Islam pada 1652. Semasa pemerintahannya, terjalin hubungan dengan Kesultanan Ternate, Gowa, Bone, dan Tanah Mandar sehingga dapat diperkirakan bahwa perdagangan lewat laut tentunya sangat ramai. Ratu Intoraya menikah dengan La Masanreseng dari Kerajaan Cenrana. Ia mempunyai empat orang anak, yakni dua orang putra dan dua orang putri. Putra sulungnya bernama La Boge atau La Bugia,[377] Raja Banawa ke-4.[378] Berdasarkan legenda di atas, kita mengetahui bahwa seperti beberapa kerajaan di Sulawesi lainnya, mereka menarik leluhurnya kepada Sawerigading.

---

374. Lihat *Sawerigading*, halaman 438.
375. *Ibid.*, halaman 439.
376. *Ibid.*, halaman 439. Menurut buku *Sawerigading*, Intoraya disebut sebagai Raja Banawa ke-3, namun menyebutkan bahwa Kotambulawa merupakan Madika Banawa, tampaknya lebih tepat Intoraya Raja Banawa ke-4, karena bila tidak maka antara Raja Banawa ke-2 dan 3 ada selang waktu kurang lebih 100 tahun.
377. Buku *Sawerigading* menyebutnya La Bugia (halaman 440), sedangkan buku *Raja Banawa dari Belanda* menamakannya La Boge.
378. Sehubungan dengan tokoh bernama La Boge atau La Bugia ini kita perlu memberikan berbagai catatan. Dalam buku *Raja Banawa dari Belanda* halaman 36, terdapat catatan mengenai perselisihan pergantian takhta

Asal usul historis kerajaan ini yang sebenarnya tidak diketahui dengan pasti, namun mulai dikenal eksistensinya pada pertengahan abad 17 setelah diadakannya perjanjian antara Banawa beserta kerajaan-kerajaan kecil lainnya di pantai Barat Sulawesi dengan VOC. Perjanjian ini ditandatangani pada 1667 itu berisikan monopoli perdagangan emas oleh VOC. Setelah penandatanganan traktat tersebut, pada 1707 VOC mengajukan usul terhadap Kesultanan Ternate agar menyerahkan tanggung jawab pengamanan kawasan Banawa beserta kerajaan-kerajaan kecil lainnya kepada VOC, yang dalam hal ini diwakili gubernur Makassar. Alasannya, Makassar lebih dekat dengan daerah tersebut ketimbang Ternate. Ternyata dalam perkembangan selanjutnya, VOC tidak memiliki cukup pasukan untuk mengamankannya dari para bajak laut serta peperangan yang kerap terjadi antar penguasa setempat. Sebagai solusinya, pada 1735 Gubernur Makassar meminta bantuan Kerajaan Bone untuk turut mengendalikan keamanan beserta ketertiban di Banawa dan daerah sekitarnya. Itulah sebabnya, hingga berakhirnya kekuasaan VOC, Banawa berada di bawah Kerajaan Bone.

Atas seizin VOC, Raja Bone mengirimkan orang-orang Mandar, Bugis, dan Makassar untuk pindah dan berdiam di Banawa. Mereka menduduki posisi-posisi strategis dan bahkan dapat mendesak pengaruh VOC sendiri. Akibatnya, saat hendak menyelesaikan permasalahan dengan raja dan penduduk setempat, VOC kerap harus meminta bantuan orang Bugis sebagai perantara. Salah seorang tokoh Bugis terkemuka saat itu adalah Daeng Matona. Belanda berhasil mengadakan pendekatan dan kontrak dengan Raja Banawa dan Palu berkat jasanya. Adapun kontrak itu berisikan dua hal, yakni kewajiban Raja Banawa memberikan laporan mengenai peristiwa penting (pergantian penguasa, pengangkatan pejabat kerajaan, pernikahan, dan lain sebagainya) yang terjadi di daerahnya serta pembangunan sebuah benteng di Teluk Palu bagi pasukan Belanda. Atas jasanya tersebut, Daeng Matona dianugerahi medali emas pada 17 Agustus 1824, bahkan pangkatnya dinaikkan menjadi mayor pada 1835.

---

di akhir abad 18 antara keturunan Bale dan Ganti. Konflik ini berkaitan dengan tradisi bahwa kedudukan Raja Banawa biasanya diwariskan kepada Kepala Kampung Ganti. Isompa merupakan putra sulung La Boge dengan ibu yang berasal dari kampung Bale. Ia mengajak Raja Dampelas dan Balaesan, selaku anggota Pitunggota, untuk memberontak terhadap Raja Banawa saat itu, Lasa Banawa. Pemberontakan ini gagal dan Isompa terbunuh. Tetapi buku *Sawerigading* tidak menyebutkan putra La Boge yang bernama Isompa. Selanjutnya, La Makagili disebutkan merupakan putra La Boge dalam buku *Raja Banawa dari Belanda* dan merupakan adik Isompa. Namun, dalam buku *Sawerigading*, La Makagili adalah putra La Bugia dan cucu I Sabida (Raja Banawa ke-5 menurut buku *Sawerigading*). Hanya saja, La Bugia tidak disebutkan sebagai Raja Banawa. Dengan demikian dalam buku *Sawerigading* disebutkan ada dua tokoh bernama La Bugia, yakni Raja Banawa ke-4, dan satu lagi merupakan putra I Sabida, yang tidak pernah disebutkan sebagai Raja Banawa.

Saat Daeng Matona meninggal pada 1844, Belanda mengangkat putranya yang bernama Lapatigo sebagai pengganti ayahnya. Penyalahgunaan kekuasaan olehnya tidak jarang terjadi. Salah satunya adalah manuver politik yang dilakukan Lapatigo dengan melaporkan sikap Makagili, putra Raja Banawa yang bernama Lalaboge, berpotensi membahayakan kepentingan Belanda. Sebagai hasilnya, Belanda memberikan perlindungan dan pengamanan khusus terhadap pemukiman Bugis dari serangan warga setempat.

Hubungan Belanda dan Banawa makin terbuka dengan kunjungan Gubernur van den Hart pada 1854. Pada kesempatan itu, Belanda menyodorkan suatu kontrak politik kepada Raja Banawa yang bernama Sanga Lea Daeng Paluna (1854–1888). Pasal-pasal dalam kontrak itu pada intinya mengikat Raja Banawa secara politik dengan pemerintah kolonial Belanda beserta sanksi-sanksi bagi pelanggarannya. Kendati demikian, selama setengah abad kemudian, pemerintah Belanda sesungguhnya tidak banyak ikut campur dalam kancah perpolitikan Banawa. Belanda umumnya lebih memusatkan perhatian pada pengamanan armada dagangnya yang berlayar dan berlabuh di pantai barat Sulawesi. Selain itu, Belanda sudah cukup puas dengan laporan yang diberikan utusan kerajaan mengenai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi setiap tahunnya di negeri itu kepada Gubernur Belanda di Makassar.

b. Campur Tangan Belanda di Banawa

Campur tangan Belanda baru berlangsung saat terjadinya pergantian takhta dari Sanga Lea Daeng Paluna kepada kemenakannya yang bernama La Makagili Tomadoida (1888–1902). Saat itu, pewaris takhta Daeng Paluna–La Marauna Aru Ganti, putranya–masih kecil. Karena itu, Tomadoida merasa perlu mengokohkan kekuasaannya dengan meminta dukungan pemerintah Belanda, yang dalam hal ini diwakili Gubernur Makassar.

Pada mulanya, Gubernur Makassar tidak serta-merta meluluskan permintaan Tomadoida. Bersamaan dengan itu, terjadi sengketa perbatasan antara Banawa dengan Toli-Toli. Gubernur van Braam Morris memanfaatkan insiden ini dan mengirimkan tiga kapal perangnya ke sana guna memperkuat kekuasaaanya di kawasan itu. Tomadoida selaku penguasa baru diundang ke atas kapal perang dan dikukuhkan kedudukannya. Upacara yang berlangsung pada 2 Mei 1888 itu disaksikan pula oleh Dewan Adat Banawa.

Tentu saja, dukungan dan pengukuhan Belanda itu tidak cuma-cuma. Raja baru Banawa harus menanda kontrak politik baru dengan Belanda yang tidak berbeda isinya dengan kontrak politik sebelumnya, hanya saja kali ini ditambahkan ketentuan bahwa hukum kolonial Belanda harus diberlakukan secara penuh di sana, termasuk dalam hal bea dan cukai. Belakangan Belanda lebih memperketat pengawasannya terhadap Kerajaan Banawa dan kerajaan tetangganya di sekitar Teluk Palu. Tujuan utama Belanda melakukan tindakan tersebut adalah memberikan jaminan keamanan terhadap penanam modal swasta yang membuka usaha di Banawa dan kawasan lain di Sulawesi Tengah. Selain itu, pemerintah kolonial Belanda juga merasa perlu menjaga kepentingan secara politis terhadap kekuatan asing (Inggris) dan raja-raja pribumi lainnya.

Pada perkembangan selanjutnya, pemerintah kolonial Belanda ternyata tidak hanya memusatkan perhatian terhadap masalah keamanan dan kepentingan politiknya saja, melainkan mulai mengeksploitasi kawasan tersebut secara ekonomi. Belanda kembali menyodorkan kontrak politik tambahan kepada Raja La Makagili Tomadoida tertanggal 18 Mei 1897. Isinya mengatur pemberian izin bagi kegiatan pertambangan Belanda di Banawa. Dengan demikian, pada akhir abad 19 Belanda makin menanamkan kekuasaannya di Banawa.

Raja La Makagili diturunkan dan diasingkan ke Makassar oleh Belanda pada 1901 karena dituduh melindungi tokoh penentang bernama Tombolotutu (Poidarawati), Raja Moutong (lihat bagian mengenai Moutong). Akibatnya, pada tersebut terjadi kekosongan takhta Banawa. Akhirnya, sebagai pengganti diangkat saudara sepupunya yang bernama La Marauna Aru Ganti, putra Sanga Lea Daeng Paluna. Raja baru ini bersama seluruh ketua adat setempat menandatangani kontrak politik dengan Belanda pada 13 Desember 1902, yang baru disahkan oleh gubernur jenderal pada 7 Mei 1903. Selanjutnya, Raja Banawa beserta seluruh raja di kawasan Teluk Palu menandatangani Perjanjian Plakat Pendek (*Korte Verklaring*) dengan Belanda pada 13 Desember 1904.

c. Banawa di Abad 20

Belanda yang diwakili oleh Asisten Residen Sulawesi Tengah mengadakan pertemuan dengan para raja di kawasan Teluk Palu, termasuk Banawa. Pertemuan yang diselenggarakan pada akhir Oktober dan awal November 1906 itu bertujuan membahas perombakan tata cara pemerintahan di wilayah tersebut dan menetapkan tanggung jawab yang harus diemban para raja. Agar ketertiban dan keteraturan terjaga, pemerintah Belanda menghendaki adanya penyatuan di bidang keuangan antara

berbagai kerajaan yang ada di sana. Untuk itulah dibentuk kas keuangan bersama yang disebut kas daerah (*landschapkas*) pada 1907. Berdasarkan ketentuan baru tersebut, raja-raja yang tergabung dalam federasi harus menutupi seluruh pengeluaran di dalam negeri mereka dengan memungut pajak yang disetorkan kepada pemerintah kolonial. Sementara itu, Belanda yang akan menanggung sebagai biaya pengeluaran untuk aparat pemerintahan, keamanan, dan komunikasi. Pemerintah mengambil alih pula bea ekspor dan impor dan memegang monopoli atas penjualan candu serta garam. Kontrolir Donggala bertugas mengatur keluar masuknya uang dan bertanggung atas kas *onderafdeeling* kepada asisten residen di Menado. Para raja diwajibkan menyampaikan anggaran keuangan tahunan berupa penerimaan dan pengeluaran mereka serta meminta persetujuan beserta pengesahannya kepada Residen Manado, yang dapat melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap berbagai pos anggaran jika dirasa perlu. Peraturan keuangan yang baru itu menetapkan gaji bagi Raja Banawa beserta kaum bangsawan lainnya sebagai ganti rugi pengambilalihan seluruh sarana keuangan mereka oleh pemerintah Belanda.

Penerapan kebijakan baru dengan sistem pajak itu pernah menimbulkan bentrokan karena rakyat belum terbiasa dengan sistem semacam itu. Warga Dusun Tanengga di pegunungan dekat perbatasan dengan Palu menolak membayar pajak dan mengikuti kerja wajib (*rodi*). Karena itu, raja beserta Asisten Residen Donggala dan sepasukan polisi mendatangi kawasan tersebut. Diumumkan bahwa mereka yang berani melawan akan ditangkap polisi. Ternyata hal itu tidak menciutkan nyali warga desa, karenanya mereka lantas maju menyerang raja beserta rombongannya. Belanda mengambil tindakan tegas sehingga menyebabkan tewasnya lima orang. Setelah terjadinya peristiwa itu, warga Tanengga mulai bersedia menyetorkan pajaknya kepada raja. Sebagai hasil pembayaran pajak itu adalah dibangunnya jalan raya Palu-Donggala. Belanda menggunakan alasan keamanan untuk merebut wilayah Raja Banawa. Memang pada saat itu gangguan dari bajak laut kerap terjadi di kawasan Teluk Palu. Untuk mengamankannya dalam kontak politik tertanggal 23 Juni 1904, Raja Banawa diminta menyerahkan Pulau Tuguwan (Tingowa) untuk dijadikan pangkalan oleh Belanda serta tempat mendirikan mercusuar. Dengan demikian, Belanda dapat memantau keamanan di laut dari pulau tersebut.

Krisis juga terjadi di antara kaum bangsawan sendiri. La Malonda Aru Bale (kepala daerah Gunung Bale) dan La Husin Aru Towale merupakan dua orang pemuka

masyarakat yang tidak sepaham dengan raja. Mereka menentang kontrak politik yang dibuat pada 1904 antara raja dengan Belanda. Kedua orang itu kemudian sepakat tidak mengakui kekuasaan raja dan bersekutu dengan seorang kapten Bugis bernama La Raga Hadji Muhamad Sulaeh, yang menghasut mereka agar membangkang terhadap Raja Banawa. Tempat pemukiman Bugis dijadikan markas mereka. Setelah berkali-kali memberikan peringatan yang dianggap angin lalu oleh para pembangkang, pasukan Banawa beserta Belanda diturunkan menangkap mereka. Aru Towale terbunuh, sedangkan Aru Bale terpaksa melarikan diri. Dengan demikian, raja berhasil memulihkan kewibawaannya dengan bantuan Belanda. Namun, sekali lagi apa yang diberikan Belanda itu tidaklah cuma-cuma dan harus dibayar dengan makin dalamnya campur tangan Belanda di Banawa. Belakangan, La Malonda dapat ditangkap tetapi dilepaskan lagi oleh Raja Banawa dan berlangsunglah perdamaian di antara mereka. Kendati demikian, La Malonda sepakat tidak lagi meneruskan kedudukannya sebagai kepala daerah Gunung Bale hingga ia wafat pada 1938. Oleh karena itu, La Malonda dianggap sebagai kepala daerah Gunung Bale terakhir. Demi memperbaiki dan memulihkan hubungan antara keluarga kerajaan dengan La Malonda, dilangsungkan pernikahan antara putra Raja La Marauna bernama Rohana dengan Andi Raje (Busa Bulava), putri La Malonda.[379]

Perselisihan masalah perbatasan antara Banawa dan kerajaan-kerajaan di sekitarnya terjadi karena garis perbatasan alami yang sering berubah-ubah, umpamanya aliran sungai. Selain itu, warga daerah atau suku-suku tertentu juga kerap menimbulkan masalah perbatasan yang pelik. Persoalan yang timbul antara dua kerajaan itu tidak jarang pula diselesaikan dengan bantuan pemerintah kolonial Belanda, yang tidak segan-segan turun tangan demi melindungi kepentingan ekonominya. Bila terjadi kericuhan di daerah maka sedikit banyak perekonomian pemerintah kolonial Belanda tentunya akan terdampak juga. Selain itu, ikut campurnya pemerintah kolonial ini memperbesar ketergantungan berbagai kerajaan terhadap Belanda–sesuatu yang memang dikehendaki penjajah. Semasa pemerintahan Raja Daeng Paluna dari Banawa dan Raja Yojo Kodi Tomai Sima dari Palu, kedua kerajaan telah sepakat menetapkan tapal batasnya, yakni pantai barat sampai dengan Dapuro (Doda) dengan Koro Uwe di tepi Sungai Karonge sebagai batasnya.

---

379. Lihat *Sekelumit Sejarah Kebudayaan Kaili* karya Prof. Dr. H.A. Mattulada dalam jurnal Antropologi Indonesia, no.48/ Th. XV/ Januari–April 1991, halaman 147.

Ternyata belakangan timbul masalah yang berawal dari suku primitif Topada. Suku tersebut mendiami kawasan aliran Sungai Surumana dan mengakui kepemimpinan Raja Banawa dan Raja Palu, tetapi mereka lebih condong kepada Raja Banawa. Sebaliknya, kepala daerah kawasan aliran Sungai Surumana yang bernama I Sapindu lebih condong kepada Raja Palu. Oleh karenanya, I Sapindu menolak membayar pajak padi yang berkenaan dengan suku Topada kepada La Marauna, Raja Banawa. Pemerintah Belanda merasakan bahwa hal ini berpotensi menimbulkan gejolak. Dengan demikian, N. van Vuuren, kontrolir pantai barat Sulawesi Tengah, dan Deryant, pemegang kuasa sipil Palu, berniat mengundang Raja Banawa beserta Raja Palu ke meja perundingan yang sedianya diadakan pada 23 hingga 29 Oktober 1907.

Dalam perundingan di atas, pihak Banawa diwakili oleh La Marauna, sedangkan Palu diwakili oleh rajanya yang bernama Parampasi. Keputusan yang dihasilkan pertemuan itu menetapkan bahwa daerah pantai di sebelah utara Sungai Samarana dan di pedalaman tepi kanan sungai, tempat orang Bugis dan Kaili tinggal, menjadi wilayah Banawa, sedangkan tepian lainnya dikuasai oleh Raja Palu. Khusus mengenai suku Topada, mereka akan dibagi berdasarkan pembagian geografis yang telah disepakati bersama. Belakangan perbatasan ini diubah lagi atas usulan Residen Manado dengan batas antara daerah Palu dan Banawa adalah Sungai Walaa, yang ditarik dari muaranya di Teluk Palu, lalu ke mata air Ongunju Ntopemaya, disambung lagi hingga ke mata air Sungai Sumurana, dan berakhir di muara Sungai Sumurana, yang kemudian menjadi tapal batas antara Banawa, Palu, dan Mamuju. Semenjak ditentukannya batas yang pasti ini, tidak ada lagi sengketa perbatasan yang penting antara Banawa dan Palu.

Permasalahan perbatasan juga pernah terjadi dengan Kerajaan Toli-Toli mengenai masalah daerah Sojol yang merupakan salah satu anggota *Pitunggota* karena kawasan tersebut merasakan kedekatan ikatan budaya dengan Toli-Toli daripada Banawa. Karenanya, Sojol berpotensi melepaskan diri dari Banawa. Permasalahan ini baru dapat diselesaikan pada 1896 saat terjadi kesepakatan bahwa Sungai Ogoamas merupakan perbatasan antara Banawa dan Toli-Toli, sehingga Sojol tetap termasuk dalam wilayah Banawa.

Raja La Marauna mengajukan permohonan untuk berhenti dari jabatannya sebagai raja dengan alasan sudah tua dan sakit-sakitan melalui surat tertanggal 5 Februari 1916 kepada gubernur jenderal, dan menunjuk menantunya yang bernama

La Gaga sebagai penggantinya. Keinginan raja ini disetujui oleh pemerintah Belanda sehingga semenjak 1916, La Gaga menjadi Raja Banawa. Pengangkatan ini ditentang oleh kaum bangsawan Banawa yang tergabung dalam *Pitunggota*. Mereka mempertanyakan mengapa sebelum menunjuk La Gaga, La Marauna tidak meminta saran *Pitunggota* terlebih dahulu. Selain itu, La Gaga hanyalah menantu dan bukan keturunan langsung raja. Karenanya mereka lebih mendukung Rohana yang merupakan putra raja. Dengan demikian, menurut Dewan Adat *Pitunggota*, keabsahan La Marauna sebagai raja dipertanyakan. Hal ini pula yang menimbulkan konflik antara La Gaga dan Rohana.

Pertentangan antara dua kubu ini, yakni La Gaga yang didukung La Marauna dan pemerintah kolonial Belanda di satu pihak dan *Pitunggota* yang menjagokan Rohana, justru menimbulkan kesulitan dalam diri Rohana sendiri. Agar terbebas dari kesulitan ini, Rohana menyampaikan penolakan umtuk menggantikan ayahnya secara pribadi dengan alasan bahwa ia sibuk mengurusi daerah kekuasaannya yang berada di Banawa Selatan serta usaha ekspor hasil hutan, seperti rotan, yang ditekuninya. Dengan penolakan tersebut, kini terbuka peluang bagi La Gaga menduduki takhta, meskipun perselisihannya dengan *pitunggota* belum berakhir, mereka akhirnya menerima La Gaga karena tekanan pemerintah Belanda. Raja Banawa yang baru itu juga harus menandatangani kontrak politik berupa Perjanjian Plakat Pendek (*Korte Verklaring*), sebagaimana halnya raja-raja sebelumnya.

Tidak berbeda dengan La Marauna, La Gaga sendiri sangat tergantung kepada Belanda. Semasa pemerintahannya, tidak ada hal penting yang dilakukannya, bahkan pemerintah Belanda makin kuat campur tangannya dalam roda pemerintahan Banawa dengan menempatkan seorang asisten pemerintahan selaku pendamping raja. Meskipun pejabat yang diangkat itu dari kalangan pribumi, tetap saja dianggap sebagai kepanjangan tangan Belanda. Karena mewarisi kerajaan atau negara yang rapuh, La Gaga harus menghadapi pula permasalahan-permasalahan yang terjadi di berbagai daerah, seperti Dampelas dan Balaesang. La Gaga juga melakukan banyak pemborosan semasa pemerintahannya sehingga kas daerah (*landschapkas*) mengalami defisit. Itulah sebabnya, pemerintah kolonial Belanda terdorong turun tangan sendiri untuk menyelesaikannya dengan mencopot La Gaga dari kedudukannya pada 1933. Setelah kasusnya diselidiki, ternyata La Gaga telah menggelapkan uang negara hasil penarikan pajak daerah demi kepentingannya sendiri.

Rohana, putra La Marauna ikut aktif pula dalam pergerakan nasional. Ia turut serta dalam organisasi Sarekat Islam (SI), bahkan pernah mendampingi ketua umum SI, H.O.S Cokroaminoto, ke Toli-Toli pada April 1917. Awal Mei 1917, ia turut merintis pembentukan SI cabang Toli-Toli melalui suatu rapat yang diadakan di kampung Ngalu. Pemerintah Belanda sempat memberikan peringatan dan denda kepada Rohana dan bangsawan lain yang mengikuti rapat tersebut. Namun, rapat tetap berlanjut juga. Berkat upayanya itu, pengaruh Rohana di Donggala makin kuat dan anggota SI di Donggala berkembang menjadi 800 orang pada 1917. Kemajuan pesat organisasi ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran bagi Belanda saja, melainkan juga Raja Banawa La Marauna, ayah Rohana. Karena itu, untuk melemahkan kemajuan SI beserta pengaruhnya di organisasi tersebut, Rohana diangkat sebagai *Madika* (kepala distrik) Matoa pada Mei 1918, sehingga sebagai konsekuensinya ia harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua SI. Memang saat itu ada peraturan Belanda yang melarang keras para kepala daerah mengurusi partai politik terutama yang dianggap tidak mau bekerja sama dengan Belanda.

Meskipun demikian, Rohana tetap bertikai dengan La Gaga, dan pada 1922 ia pernah dituduh hendak memeras Raja Banawa serta dianggap kurang mampu mengemban tugas-tugas pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Itulah sebabnya, Rohana lantas mengundurkan diri sebagai Madika Matoa pada 1926. Semenjak saat itu, ia hidup sebagai petani beserta istri keduanya di Ganti dan tidak lagi terlibat dalam politik hingga La Gaga diturunkan dari kedudukannya sebagai Raja Banawa pada 1933.

Rohana, yang sempat tersingkir dari roda pemerintahan Banawa, diangkat sebagai penggantinya. Sebelumnya, ia dan Laparandenge (menurut buku *Sawerigading* merupakan putra bungsu La Marauna dan disebut La Parenrengi) diminta oleh Belanda untuk memasuki sekolah modern. Mereka menuntut ilmu di sekolah kelas 2 pribumi milik pemerintah di Banawa dan setelah itu melanjutkan pendidikannya di HIS Manado. Hasil pendidikan ini cukup memuaskan Belanda. Rohana banyak membantu pemerintah Belanda dalam menyelesaikan berbagai pemasalahan. Kepandaian dan kerja kerasnya berhasil meningkatkan pendapatan pajak pada 1934 dan 1935. Rohana mempunyai wawasan yang luas demi memajukan daerahnya. Ia kerap mengadakan perjalanan ke daerah yang belum digarap potensinya guna mengampanyekan perluasan tanah pertanian. Dalam sidang-sidang dan pertemuan

dengan anggota *Pitunggota*, ia sanggup memengaruhi pada anggotanya berkat kemampuan intelektualnya.

Laparandenge juga memiliki prestasi kerja yang baik sehingga Belanda memutuskan mengangkatnya sebagai pegawai pemerintah yang tergabung dalam Korps Birokrasi Pribumi. Belanda juga memerhatikan para elite politik Banawa lainnya yang sebagian besar merupakan kaum bangsawan. Namun, kebanyakan dari mereka kerap terlibat dalam kebiasaan yang kurang baik, seperti mengisap candu dan lain sebagainya. Terlebih lagi, banyak di antara mereka yang buta huruf. Sebagai langkah perbaikan pemerintahan di Banawa, Belanda memecat para pejabat semacam itu dan digantikan dengan bangsawan lain yang berpendidikan modern. Pemerintah juga membangun sekolah-sekolah di Donggala, seperti *volkschool* (sekolah rakyat) yang didirikan di Sabang, Mapane, Sibayu, Malei, Sirenja, Alindau, Towaya, Lero, Wani, Tawaili, Mamboro, Loli, Limboro, Ganti, dan Kola-Kola. Tenaga pengajarnya berjumlah 26 orang dengan biaya operasional yang ditanggung oleh kas daerah dan berasal dari potongan 10% setiap pemungutan pajak penghasilan. Bertambah majunya bidang pendidikan juga memerlukan makin banyak tenaga pengajar. Oleh karena itu, pemerintah juga membuka sekolah guru yang disebut *standaard school.* Lulusan dari sana memang dikhususkan untuk mengajar di sekolah-sekolah rakyat tersebut. Namun, sekolah guru itu dihapuskan setelah pemerintah melakukan pembaharuan atau reorganisasi pendidikan di sana. Tenaga pengajar lalu diambil dari lulusan sekolah serupa atau *kweekschool* (sekolah guru) dari Minahasa, Sangir, dan Gorontalo. Pihak swasta dan partai-partai politik juga mempunyai perhatian yang besar terhadap pendidikan.Organisasi-organisasi keagamaan baik Islam maupun Kristen juga banyak mendirikan sekolah di kawasan tersebut.

Kendala berikutnya adalah ketimpangan antara jumlah sekolah rakyat dan sekolah lanjutan (*vervolgschool*) yang hanya ada satu sekolah saja di Ibu kota Donggala. Oleh karena itu, tidak semua lulusan sekolah rakyat dapat ditampung di sekolah lanjutan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kaum bangsawan lebih suka menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah Belanda seperti HIS agar dapat memperoleh bekal kemampuan yang lebih memadai.

Laparandenge, menurut buku *Sawerigading,* merupakan Raja Banawa berikutnya yang menggantikan Rohana pada 1947 dan memerintah hingga 1959. Ia merupakan ketua PNI pertama di Sulawesi Tengah dan dilantik oleh M. Husni Thamrin. Menurut sumber tersebut, kemajuan pendidikan di Banawa juga berkat hasil karyanya.

d. Struktur Pemerintahan

Kerajaan ini terbentuk dari federasi beberapa wilayah yang disebut Kampung. Masing-masing kampung ini dipimpin oleh seorang bangsawan yang disebut *madika*. Mereka membentuk federasi dewan adat yang bernama *Pitunggota*. Adapun kampung-kampung yang membentuk perserikatan itu adalah Bale (Gunung Bale), Kola-Kola, Ganti, Tawaili, Kabonga, Lero, Pantolan, Balesang, dan Dampelas.[380] Kampung yang terbesar adalah Ganti sehingga diakui sebagai kampung induk. Sedangkan Balaesang dan Dampelas merupakan daerah otonom, namun ikut memiliki peran penting dalam penetapan keputusan Kerajaan Banawa.

Raja Banawa bergelar *madika* dan dipilih berdasarkan kesepakatan *Pitunggota.* Umumnya raja berasal dari keturunan Kepala Kampung Ganti. Kekuasaaan dan pengaruh raja secara teoretis meliputi seluruh Banawa sehingga ia disebut sebagai Raja Banawa. Sementara itu, kepala kampung lainnya beserta anggota keluarga raja dianggap sebagai kaum bangsawan. Mereka masing-masing menduduki jabatan di pusat kekuasaan dan juga di daerahnya.

Hukum yang berlaku di daerah Banawa adalah hukum adat *Pitunggota* yang mengatur masalah pewaris takhta, hak tanah, perkawinan, dan lain sebagainya. Menurut hukum tersebut, calon pewaris takhta adalah anak-anak hasil perkawinan antara pria dan wanita keturunan bangsawan murni. Selain itu, di dalamnya diatur pula tata cara perkawinan dan besarnya mahar yang harus dibayar. Kerajaan Banawa konon sudah mempunyai bendera sendiri, yakni terdiri dari warna hitam, merah, dan putih.[381] Warna hitam berarti setia dalam menjalankan tugas dan mematuhi adat istiadat, merah berarti berani memegang teguh kebenaran, dan putih berarti dengan hati yang suci menjalankan pemerintahan kerajaan.

e. Sosial Kemasyarakatan

Masyarakat Banawa juga mengenal strata sosial yang terdiri dari raja, bangsawan, rakyat, dan *batua* (budak). Pelapisan masyarakat itu menggambarkan dominasi golongan bangsawan, tetapi prinsip dalam hukum adat *Pitunggota* bukanlah untuk menentukan kalah dan menangnya pihak tertentu, melainkan untuk mencapai mufakat secara damai. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah dan

---

380. Daftar dalam artikel *Sekelumit Sejarah Kebudayaan Kaili* dalam jurnal *Antropologi Indonesia* no. 48 halaman 135, disebutkan bahwa anggota *Pitunggota* Banawa adalah Ganti, Lero, Kabonga, Toaya, Kola-Kola, Towala, dan Gunung Bale.
381. Lihat *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah* halaman 50.

bukan didasari oleh suara terbanyak, kerelaan masing-masing pihak yang bersengketa untuk mengorbankan sebagian prinsipnya demi terjadinya kesepakatan. Raja atau kepala kampung yang biasanya menjadi penengah.

II. BANGGA

Bangga dahulunya merupakan salah satu kerajaan di Sulawesi Tengah. Menurut cerita rakyat, Bangga pernah diperintah oleh seorang Ratu Wumbulangi yang berasal dari kayangan. Ratu ini terkenal kecantikannya sehingga banyak kepala suku atau *madika* (raja) negeri lain yang ingin melamarnya. Di antara sekian banyak *madika* itu, yang diterima lamarannya adalah Mbawalemba, Madika Pakawa. Pernikahan mereka diselenggarakan secara meriah selama 40 hari 40 malam. Dengan adanya pernikahan ini, kedua kerajaan mereka disatukan. Wumbulangi kemudian dikaruniai dua orang anak. Anaknya yang laki-laki diberi nama Irawalemba atau Mpu Selangi, sedangkan yang perempuan dinamai Pue Galuku.

Pue Galuku menikah dengan Madika Lindu dan dikaruniai seorang anak bernama Timpalaja, yang merupakan cikal bakal raja-raja Lindu. Sementara itu, Irawalemba yang menggantikan ibunya sebagai *madika*, menikah dengan Gili Rame, *madika* wanita berasal dari Palu. Konon, saat itu Palu sedang diserang oleh suku Tomeme dari Mandar. Raja Palu meminta bantuan Irawalemba berserta 20 orang prajuritnya yang saat itu sedang mengadakan perjalanan mengelilingi wilayah kekuasaannya. Irawalemba sanggup mengalahkan orang-orang Mandar yang menyerbu Palu. Itulah sebabnya ia kemudian dinikahkan dengan Gili Rame. Namun, karena Gili Rame sebelumnya telah bertunangan dengan Raja Sigi, pernikahan tersebut menyinggung perasaannya.

Suatu kali, diadakan sebuah pesta di Pakuli untuk menghormati Raja Sigi dan Irawalemba. Raja Sigi telah datang terlebih dahulu ke perayaan tersebut. Menurut tradisi, saat seorang raja tiba, seorang pelayan akan menyuguhkan sirih, tetapi pada saat itu Raja Sigi sendiri yang menyuguhkan sirih kepada Irawalemba, yang dapat dianggap sebagai suatu tantangan. Irawalemba menerima sirih yang disuguhkan, memakannya, dan setelah itu meludahkannya ke wajah Raja Sigi. Akibatnya, peperangan di antara mereka tak terelakkan lagi. Pada pertempuran di Patua, Irawalemba berhasil mengalahkan Raja Sigi.

Setelah Irawalemba mangkat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Pue Bongo. Saat mengadakan perjalanan mengelilingi negerinya, Pue Bongo tiba di

Serudu, suatu kawasan di pegunungan sebelah barat negerinya. Di sana ia berjumpa dengan seorang *madika* wanita penguasa Serudu bernama Dae Ndoe. Mereka berdua menikah dan dikaruniai seorang anak bernama Imba Genyo atau Tiro Lemba. Imba Genyo menikahi *madika* negeri Dolo Bae bernama Bulawa dan mempunyai anak laki-laki bernama Yaruntasi, yang merupakan cikap bakal raja-raja Dolo dan Kaleke. Pue Bongo kemudian bertolak ke Palu dan menikah dengan seorang putri yang keluar dari perut ikan bernama Daelani. Putra mereka yang bernama Bulu Palo atau Kasi Palo merupakan leluhur raja-raja Palu. Masih menurut penuturan cerita rakyat, Pue Bongo meneruskan pengembaraannya hingga ke Buol dan menikah dengan putri raja di sana.

III. BANGGAI

a. Cikal Bakal Kerajaan Banggai

Wilayah Kerajaan Banggai kini terletak di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Menurut legenda, dahulu di Kepulauan Banggai pernah ada empat kerajaan yang masing-masing diperintah oleh seorang dewa, yakni Kerajaan Babulau (berpusat di Dodung), Kokini (berpusat di Tanobonunungan), Katapean (berpusat di Mongosongan), dan Singgolok (berpusat di Gonggong). Suatu kali, di Babulau ada orang menangkap seekor ikan besar dan gemuk. Saat perut ikan itu dibelah, keluarlah seorang anak laki-laki kecil. Karena keluar dari perut ikan, yang dalam bahasa Banggai disebut *ambar*, anak itu lalu diberi nama Adi Lambal (*adi* sendiri berarti jagoan). Adi Lambal tumbuh menjadi seorang pemuda pemberani dan kuat yang melebihi teman-teman sebayanya. Oleh karena itu, ia dinikahkan dengan putri Raja Babulau dan akhirnya diangkat sebagai raja di negeri tersebut. Ia lalu menaklukkan ketiga negeri lainnya.

Bersamaan dengan berkuasanya Adi Lambal di Kepulauan Banggai, di sebelah timur Sulawesi terdapat suatu negeri bernama Tompotika yang dipimpin oleh keturunan *to manurung* (orang yang turun dari langit). Karena *to manurung* mempunyai dua orang anak, yakni seorang putra, Lolo Gani, dan seorang putri, Mopaang (Mapaang), wilayah kerajaannya dibagi menjadi dua. Lolo Gani memperoleh kawasan Bua Lemo hingga Tanjung Api (Teluk Tomini), sedangkan saudarinya menguasai Bua Lemo hingga Selat Peleng.

Kemudian timbul perseteruan antara dua bersaudara itu. Penyebab perselisihan mereka diawali ketika Mopaang menerima warisan seekor burung bangau pusaka

bernama Kuwayang yang sanggup menangkap ikan. Suatu kali Lolo Gani hendak mengadakan acara selamatan dan memerlukan ikan-ikan segar. Karena itu, Lolo Gani terpaksa meminjam Kuwayang dari kakak perempuannya. Mopaang yang kurang senang kepada saudaranya lantas membisikkan pada burung bangau pusakanya agar menangkap ikan kecil-kecil dan tak layak dimakan, barulah setelah itu ia meminjamkan Kuwayang kepada Lolo Gani. Kuwayang menuruti apa yang diperintahkan majikannya. Sewaktu Kuwayang menyerahkan ikan hasil tangkapannya, Lolo Gani bangkit amarahnya. Ia membanting Kuwayang dan mematahkan sayapnya, hingga burung tersebut menjadi cacat serta tak dapat terbang lagi. Kemudian dikembalikannya Kuwayang kepada majikannya. Menyaksikan burungnya sudah cacat, Mopaang merasa marah, namun ia tak dapat berbuat apa-apa karena dalam hati merasa bersalah. Semenjak saat itu, pemusuhan di antara keduanya makin menjadi-jadi. Kerajaan menjadi kacau, apalagi Kerajaan Gowa menyerang dari sebelah selatannya. Itulah sebabnya, Mopaang lantas meminta bantuan Banggai.[382] Adi Lambal mengirimkan pasukannya yang dipimpin oleh Mansanda. Lolo Gani berhasil dikalahkan dan bahkan gugur dalam pertempuran. Semenjak saat itu, Negeri Tompotika menjadi taklukan Adi Lambal.

Suatu ketika, datanglah seorang bangsawan keturunan raja-raja Jawa yang sebelumnya pernah singgah di Ternate. Saat berada di Ternate, bangsawan itu menikah dengan seorang putri Ternate, namun di Banggai ia menikah lagi dengan ipar Adi Lambal. Karena bangsawan keturunan Jawa tersebut pandai mengatur pemerintahan, Adi Lambal menyerahkan singgasana Banggai kepadanya. Bangsawan yang berasal dari Jawa itu kemudian digelari Tomumdoi Doi Jawa (Raja yang Berasal dari Jawa). Kisah ini tampaknya sesuai dengan sejarah yang sebenarnya, mengingat bahwa Banggai pernah diperintah oleh Kerajaan Singosari dan Majapahit. Kitab *Negarakertagama* di syair ke-15 bait ke-5 menyebutkan bahwa Banggawi (Banggai) merupakan daerah taklukan Majapahit. Semua petunjuk-petunjuk di atas membuktikan telah adanya hubungan antara Banggai dengan Jawa.

b. Perkembangan Kerajaan Banggai selanjutnya

Menurut buku *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah* halaman 53, disebutkan bahwa Tomumdoi Doi Jawa datang kurang lebih pada 1580. Semenjak saat itu, Banggai mulai melebarkan kekuasaannya hingga ke Banggai Daratan di Pulau Sulawesi, yakni sampai

382. Lihat *Babad Banggai Sepintas Kilas*, halaman 40.

ke Tanjung Api, Balingura, Pulau Togong Sagu, hingga Sungai Bongka di sebelah barat. Tomumdoi Doi Jawa yang juga dikenal sebagai Adi Cokro dianggap sebagai pendiri Kerajaan Banggai. Ia mempunyai tiga orang istri, yang pertama bernama Nurusupa, putri Sultan Ternate, yang kedua putri Raja Singgolok, dan yang ketiga putri Raja Babulao. Istri kedua dan ketiga berasal dari Banggai, tetapi tidak diketahui namanya. Hal ini disebabkan adanya tradisi atau kebiasaan tidak menyebutkan nama-nama para pemuka masyarakat dengan sembarangan.

Tomumdoi Doi Jawa mempunyai seorang putra bernama Abu Kasim dari istri pertamanya dan dari istri ketiga beroleh seorang putri bernama Saleha. Tomumdoi Doi Jawa memilih meninggalkan Banggai dan pulang ke Jawa karena terjadi perselisihan antara istri pertama dan keduanya. Akibatnya, kondisi Negeri Banggai menjadi kacau. Tidak seorangpun yang berani menaiki singgasana Banggai. Akhirnya, Abu Kasim bersedia dinobatkan menjadi raja, asalkan ia diizinkan meminta restu ayahnya yang kini berada di Jawa. Abu Kasim berlayar ke Jawa dan menjumpai ayahnya. Ia lalu menyampaikan aspirasi rakyat Banggai. Namun, Tomumdoi Doi Jawa menyatakan bahwa bila Abu Kasim tidak bersedia menjadi raja, ia masih mempunyai seorang putra sulung bernama Mandapar yang kini berada di Ternate. Mandapar bila dikehendaki dapat diangkat sebagai raja. Mendengar hal ini, empat penguasa kerajaan kecil yang ada di Banggai, yakni Kokini, Babulao, Singgolok, dan Katapean, bertolak ke Ternate guna menjemput Mandapar dan menobatkannya sebagai raja.

Dengan diangkatnya Mandapar (1600–1630) sebagai *tomundo* (raja), Banggai masuk ke dalam daerah pengaruh Ternate. Dengan demikian, meski di Banggai terdapat seorang raja, tetapi pemimpin tertinggi Kerajaan Banggai adalah Sultan Ternate. Tatanan pemerintahan di sana disusun mirip Ternate, dengan Raja Banggai yang dilantik Sultan Ternate. Raja-raja Banggai selanjutnya adalah Mumbu (Mbumbu) Doi Kintom (Molen, memerintah pada 1630–1648), Mumbu Doi Banteng (Paudagar, memerintah pada 1648–1689), Mumbu Doi Balantak (Mulang, memerintah pada 1689–1705), Mumbu Doi Kota (Abdul Gani, memerintah pada 1705–1728), Mumbu Doi Bacan (Abu Kasim, memerintah pada 1728–1753), Mumbu Doi Mondono (memerintah pada 1753–1768), Mumbu Doi Padongko (1768–1773), dan Mumbu Mandaria (Nasiruddin, memerintah pada 1773–1809).

Pada abad 19, Raja Banggai yang bernama Atondeng (Mumbu Doi Galila, memerintah pada 1808–1821) ingin melepaskan diri dari pengaruh Ternate, namun

gagal karena adanya serangan suku Tobelo dari Ternate. Atondeng secara berturut-turut digantikan oleh Mumbu Doi Sau (Tadja, memerintah pada 1821–1827), Mumbu Doi Tenebak (Laota, memerintah pada 1827–1837), Mumbu Doi Bugis (Agama, memerintah pada 1837–1846), Mumbu Doi Jere (Tatu Tonga, memerintah pada 1846–1858), Tomundo Soak (memerintah pada 1858–1870), Tomundo Nurdin (memerintah pada 1870–1892), dan Tomundo Abdul Azis (memerintah pada 1892–1906).

Menurut sumber lainnya, urutan raja-rajanya beserta tahun pemerintahan masing-masing agak berbeda, diawali oleh Maulana Prins Mandapar (Mumbu doi Godong, 1571–1601), Mumbu doi Kintom (1602–1630), Mumbu doi Benteng (1630–1650), Mumbu doi Balantak Mulang (1650–1689), Mumbu doi Kota (1690–1705), Mumbu doi Bacan (Abu Kasim, 1705–1749), Mumbu doi Mendono (1749–1753), Mumbu doi Padangko (1754–1763), Mumbu Doi Dinadat (Raja Mandaria, 1763–1808), Mumbu doi Galela (Raja Atondeng, 1808–1815), Mumbu Tenebak (Raja Laota, 1815–1831), Mumbu doi Pawu (Raja Taja, 1831–1847), Mumbu doi Bugis (Raja Agama, 1847–1852), Mumbu doi Jere (Raja Tatu Tonga, 1852–1858), Raja Soak (1858–1870), Raja Nurdin (1872–1880), dan Raja H. Abdulazis (1880–1900).[383] Raja Laota pada 1832 dan Raja Taja pada 1847 juga berupaya memisahkan diri dari Ternate sebagaimana halnya Raja Atondeng, namun gagal sehingga keduanya masing-masing diasingkan ke Halmahera dan Bacan. Berikutnya, Raja Mumbu Doi Bugis kembali berusaha membebaskan negerinya dari payung kekuasaan Ternate pada 1852. Upaya tersebut juga belum membuahkan hasil sehingga ia terpaksa pindah ke Bone dan mangkat di tempat tersebut.[384]

Semasa pemerintahan Raja Abdul Azis, Kesultanan Ternate menyerahkan Banggai kepada Belanda. Setelah itu, utusan pemerintah kolonial datang ke Banggai dengan membawa surat penyerahan dari Sultan Ternate dan menemui Raja Abdul Azis. Mereka berharap agar Banggai kini bersedia tunduk kepada Belanda. Karena sikap utusan pemerintah kolonial yang tidak sopan, ia menjadi marah dan mengatakan bahwa Banggai tak akan sudi tunduk kepada Belanda, kecuali mereka berhasil melangkahi mayatnya,[385] ia lalu memerintahkan anak buahnya agar bersiap-siap melawan Belanda. Akibatnya, misi pemerintah kolonial itu menuai kegagalan. Sultan Ternate turun

---

383. Lihat *Babad Banggai Sepintas Kilas*, halaman 31–32.
384. Lihat *Babad Banggai Sepintas Kilas*, halaman 43.
385. Lihat *Babad Banggai Sepintas Kilas*, halaman 43.

tangan dan mengupayakan agar Raja Abdul Azis pergi menunaikan ibadah haji. Raja Abdul Azis akhirnya mangkat di Mekah. Penggantinya adalah Raja Abdul Rahman (Abdul Rachman).

Pada 1906, kekuasaan Ternate atas Banggai beralih ke tangan Belanda, dan rajanya yang bernama Tomundo Abdul Rahman (1906–1925 atau 1901–1922) menandatangani *Korte Verklaring* pada 1908. Semenjak saat itu, status Banggai berubah menjadi *zelfbestuurende landschap* (swapraja). Abdul Rahman kemudian digantikan oleh *Tomundo* (Raja) Haji Awaluddin (1925–1939/ 1940). Raja Banggai berikutnya, Sukuran Aminuddin (S.A.) Amir (1939/ 1941–1952/ 1957), pernah mengambil alih kekuasaan dari Belanda pada Februari 1942 menjelang hancurnya Hindia Belanda dan masuknya bala tentara Jepang.[386] Saat itu, disepakati pembentukan suatu badan pemerintahan yang beranggotakan 12 orang dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: S.A. Amir
Wakil	: T.S. Bulah
Sekretaris dan penghubung	: Ys. Monoarfah
Bagian keuangan/ bendahara	: S. Amir
Bagian keamanan/ kesehatan	: Dr. Sutaryo
Urusan umum	: A. Lagona
Urusan umum	: A.G. Manggu
Penerangan	: S. Kardiat
Bagian pengajaran/ pendidikan	: N. Peju
Bagian pengajaran/ pendidikan	: R.G. Makadada
Bagian perekonomian	: I Pung Mang
Bagian perekonomian	: S.H. Bunai

Karena anggotanya yang terdiri dari 12 orang, badan di atas disebut Komite 12 Daerah Banggai. Tugasnya adalah menjalankan roda pemerintahan Banggai serta menjaga keamanan, mengingat masih bercokolnya pasukan Belanda di Kolonodale dan Paso. Komite 12 ini terus berfungsi hingga masuknya Jepang di Banggai pada 15 Mei 1942. Bala tentara pendudukan Jepang kemudian mengambil alih pemerintahan pada 17 Mei 1942. Kerajaan Banggai dianggap berakhir pada 12 Agustus 1952 dengan dikeluarkannya peraturan mengenai penghapusan Swapraja Banggai berdasarkan PP no.33/ 1952.

---

386. Lihat *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah*, halaman 133.

Raja Abdul Rahman (196–1925)
Sumber: Bapak Fadly La Pene

Raja Haji Awaluddin (1925–1940)
Sumber: Bapak Fadly La Pene

c. Sistem Pemerintahan Kerajaan Banggai

Seperti yang telah diungkapkan di atas, Banggai merupakan penyatuan empat kerajaan yang sebelumnya ada di Kepulauan Banggai, yakni Kerajaan Babulau, Kokini, Katapean, dan Singgolok. Semasa pemerintahan Tomundoi Doi Jawa, keempat raja tersebut disatukan menjadi suatu dewan adat yang bernama *Basalo Sangkap*. Secara harfiah, *basalo* berarti 'kepala' dan *sangkap* berarti 'empat', jadi secara keseluruhan maknanya adalah Kepala Empat Negeri. Pada perkembangan selanjutnya, *Basalo*

Sangkap menjadi suatu dewan yang bertugas mengangkat dan memberhentikan raja. Meskipun demikian, *Basalo Sangkap* tidak terlibat dalam urusan pemerintahan. Keanggotaan dewan ini diperoleh secara turun-temurun.

Dalam memerintah, raja dibantu oleh empat orang pejabat tinggi, yakni *mayor ngope, kapitan laut, jogugu,* dan *hukum tua* (*panabela langkai*). Saat mengambil keputusan-keputusan penting, raja harus berunding dengan empat pejabat tinggi ini. Ketetapan-ketetapan yang diambil tanpa persetujuan mereka dianggap tidak sah. Lebih jauh lagi, *mayor ngope* dan *kapitan laut* menduduki posisi istimewa karena berasal dari kerabat raja sehingga berhak menggantikan raja bila ia mangkat. Tugas lain mereka adalah mengawasi para *sangaji* (kepala kampung) di wilayah Banggai. Banggai pernah berada di bawah pengaruh Ternate sehingga sistem pemerintahan di sana meniru Ternate. Banggai juga diwajibkan mengirim upeti berupa lilin ke Ternate.

d. Kepercayaan Rakyat

Rakyat meyakini adanya suatu kekuatan yang disebut *pilogot*.[387] Menurut kepercayaan mereka, *pilogot* ini dapat mendatangkan kebaikan dan keburukan. Agar *pilogot* bersedia mendatangkan kebaikan bagi mereka perlu diadakan upacara ritual dengan pembacaan mantra yang dilakukan oleh seorang *tarapuh*. Upacara itu juga ditujukan agar *pilogot* tidak marah yang dapat mendatangkan bencana bagi mereka. Selain itu, terdapat pula keyakinan pada benda-benda bertuah yang sanggup mendatangkan keselamatan bagi mereka, seperti air hasil rendaman gelang tembaga yang diyakini dapat menyembuhkan penyakit. Setelah kedatangan agama Islam seiring masuknya pengaruh Ternate, beberapa kepercayaan lama tetap dipertahankan dan terjadi sinkretisasi.

IV. BUNGKU

a. Cikal Bakal Kerajaan Bungku

Kerajaan Bungku terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Tengah. Tidak ditemukan sumber-sumber sejarah tertulis mengenai awal pendirian kerajaan ini sehingga tidak diketahui kapan berdirinya secara pasti. Informasi yang diperoleh mengenai awal kerajaan ini hanya berasal dari keterangan lisan yang menyatakan bahwa Kerajaan Bungku mulanya hanya kawasan yang dihuni sekelompok masyarakat

387. Lihat *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah*, halaman 56.

bernama To Bungku. Kelompok suku masih belum memiliki pemerintahan sendiri dan dipimpin kepala-kepala suku.

Pada perkembangan selanjutnya, Luwu selaku salah satu kerajaan besar di Sulawesi, disamping Goa dan Bone yang senantiasa berniat melebarkan payung kekuasaannya, mulai menancapkan hegemoninya di kawasan Bungku, Banggai, dan Mori. Bungku ditunjuk sebagai koordinator bagi pemungutan upeti dari kerajaan lainnya. Pengaruh Luwu ini hanya berlangsung hingga abad 15 ketika kekuasaan atas kerajaan tersebut beralih kepada Ternate. Namun, kekuasaan Ternate juga tidak kekal karena pada 1682, VOC merebut Bungku sebagai hukuman kepada Sultan Ternate atas pemberontakannya melawan Belanda.

Menurut salah satu sumber, Raja Bungku pertama bernama Pea pua Sangia Kinambuka. Ayahnya bernama Sangia Ohea dan ibunya bernama Fengguluri. Permaisurinya bernama Wendoria yang bergelar Apu Boki, keturunan Mokole Lere dari Roita. Sangia Kinambuka memiliki dua orang saudara, yakni Fengkoila (bergelar Sangia I Nato) yang menjadi raja di Kendari, dan Weluo Sangia Welungku yang menjadi penguasa di Kerajaan Luwu. Sementara itu, menurut sumber lainnya, Raja Bungku pertama adalah Mokole Lamboja yang memerintah pada 1672.[388] ia adalah tokoh asal Danau Matano. Raja pada zaman tersebut tidak tinggal di istana, melainkan di rumahnya sendiri. Rumah itulah yang kemudian dianggap sebagai istana kerajaan. Pusat pemerintahan Kerajaan Bungku semasa Mokole Lamboja berada di Lanona. Masih berdasarkan sumber yang sama, Sangiang (Sangia) Kinambuka adalah paman Mokole Lamboja yang sementara mendampingi kemenakannya memerintah di Lanona. Sangiang Kinambuka kemudian kembali ke Routa. Sebenarnya, menurut catatan terdapat raja-raja lain sebelum Mokole Lamboja, yakni Kaicil Marannu dan raja-raja perempuan lain, yang tak disebutkan namanya. Kendati demikian, sedikit sekali data mengenai mereka.

Selanjutnya terdapat raja bernama Sarabi (Surabi). Raja Sarabi ini pernah mengadakan perjanjian dengan Banggai atas inisiatif Kesultanan Ternate. Isi perjanjian tersebut adalah perdamaian antara kedua kerajaan dan penyelesaian jika terjadi peristiwa pembunuhan terhadap warga masing-masing. Raja Bungku berikutnya adalah Bukungku (1840–1841).[389] Meskipun dilantik oleh Sultan Ternate, ia

388. Lihat *Sejarah Kerajaan Bungku*, halaman 155.
389. Lihat *Sejarah Kerajaan Bungku*, halaman 161.

merupakan Raja Bungku yang menghendaki pembebasan negerinya dari pengaruh Ternate. Akibatnya, pecah pemberontakan Bungku terhadap Ternate yang dipicu pula oleh seorang bangsawan Bugis bernama Daeng Makaka. Pemberontakan ini menuai kegagalan sehingga Bukungku disingkirkan dari singgasananya dan digantikan oleh Dongke Kombe (1841–1847). Raja selanjutnya, Peapua Papa (1847–) pada 1848 menaklukkan kawasan Tofi. Penggantinya adalah Kaicil Sadek (–1851). Ia tercatat mengadakan kontrak dengan pemerintah kolonial Belanda pada 3 Juni 1850. Utusan Belanda ketika itu bernama A.F.I.I.G. Ruvius.[390]

Raja Bungku berikutnya adalah Peapua Baba yang juga disebut Lainava atau Peapua Polo Nuha (1851–1869, Peapua Sumapuo Nuha, Peapua Sumopio Nuha, atau Arung Janggo). Semasa pemerintahannya, dibangun masjid yang mirip dengan masjid di Kerajaan Ternate. Pemerintah kolonial membagi wilayah Bungku menjadi empat distrik, yakni Tombuku, Toepe, Bahu Solo, dan Tofi pada 1852. Peristiwa penting lainnya adalah pemindahan ibu kota dari Lanona ke Sakita. Peapua Baba tercatat menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial pada 5 Februari 1853.

Pengganti Peapua Baba adalah Kaicil Moloku Tondu Le Obi (1873). Meskipun demikian, ia menghilang di sekitar Pulau Obi. Menurut dugaan, ia telah diculik oleh para bajak laut. Raja-raja Bungku berikutnya secara berturut-turut adalah Kaicil Latojo (1879–1881) dan Laopeke (Kurusi Ismail atau Ismail Kasili Lau Peke, 1884–1907).

b. Perkembangan Kerajaan Bungku Selanjutnya

Kerajaan Bungku merupakan musuh bebuyutan Mori. Oleh karenanya, Belanda memanfaatkan perseteruan ini guna menebarkan pengaruhnya di Mori. Dengan berbekal politik adu dombanya, Belanda beberapa kali meminta bantuan pasukan Bungku dan bersama-sama melancarkan ekspedisi militer ke Mori, seperti Perang Mori I. Meskipun demikian, raja-raja Bungku sendiri sebenarnya tidak menyukai kehadiran Belanda yang kerap campur tangan dalam urusan dalam negeri mereka. Sebagai contoh, pada 1907 Belanda memecat Raja Kurusi Ismail dan mengambil alih kekuasaannya. Belanda lalu menunjuk Abdul Wahab (1907–1920) sebagai penggantinya. Setelah memerintah selama 13 tahun, ia diasingkan oleh Belanda karena menentang ketetapan pemerintah kolonial mengenai kerja rodi dan pembayaran pajak. Setelah itu, Abdul Wahab menunaikan ibadah haji dan wafat di Mekah.

390. Lihat *Sejarah Kerajaan Bungku*, halaman 162.

Sebagai pengisi kekosongan kekuasaan di Bungku, Belanda menempatkan Haji Abdullah, kakak Abdul Wahab, sebagai raja yang baru. Meskipun demikian, menurut sumber lainnya, Haji Abdullah tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Abdul Wahab.[391] ia membentuk Badan Hadat atau Badan Musyawarah dan Mufakat kerajaan (SEBA), pembentukan ini bertujuan memperkecil pengaruh Belanda di Bungku. Pada 1925, Haji Abdullah mengundurkan diri dari jabatannya dan meminta agar SEBA melakukan pemilihan raja baru. Ternyata di antara calon yang ada, berdasarkan suara terbanyak terpilihlah Ahmad Hadi (Abdul Hadie),[392] yang dinobatkan sebagai raja Bungku pada 1926. Belanda menaruh harapan pada raja baru ini karena sebelumnya ia pernah bekerja sebagai aparat pemerintahan Belanda dengan jabatan *assisten bestuur* di Banggai. Namun, Raja Ahmad Hadi juga kerap menentang kebijakan Belanda, terutama dalam hal kerja rodi dan pembayaran pajak. Perselisihan paham dengan Belanda ini memuncak ketika raja mengusir seorang pejabat Belanda yang datang dari Kolonodale. Oleh karena itu, Belanda menurunkannya dari takhta dan mengasingkannya ke Tahuna (Sangir Talaud) pada 1931. Takhta kerajaan Bungku kosong hingga akhir tahun 1931 dan baru pada 1932 Belanda menobatkan Abdul Razak sebagai raja. Tetapi Abdul Razak juga kerap membangkang perintah Belanda sehingga dibuang ke Digul pada 1937. Meskipun demikian, berdasarkan sumber lainnya, Abdul Razak diasingkan ke Jawa.[393]

Belanda lalu menunjuk Abdul Rabbie (Abdulrabbie) sebagai Raja Bungku. Bersamaan dengan itu, raja-raja Bungku yang sebelumnya diasingkan oleh Belanda, yakni Ahmad Hadi dan Abdul Razak telah kembali ke kampung halamannya. Mereka lalu bergabung dengan gerakan perlawanan terhadap penjajah yang telah dirintis semenjak 1925 dan dipelopori oleh anggota-anggota PSII. Gerakan ini kemudian dikenal sebagai Gerakan Merah Putih. Raja Abdulrabbie pernah menerima hadiah cermin dari para pedagang Tionghoa di Kolonodale yang bertuliskan "Tanda Kegirangan Kami Menjamboet Keangkatan Radja Boengkoe Tuan Abdurrabie." Nama-nama para pedagang Tionghoa yang menghadiahkan cermin tersebut adalah Tan A Tjoen, Tjian A Pang, Tan A Tjoe, Wong Hoe Kie, Tjiang A Koei, Tjiang A Tjong, Phoa Po Song, Phoa Liok Tjong, Djieng Heng Jut, Ho Shie Poe, Thoeng Kiem

391. Lihat *Sejarah Kerajaan Bungku*, halaman 169.
392. Menurut *Sejarah Kerajaan Bungku*, halaman 169, yang benar adalah Abdul Hadie.
393. Lihat *Sejarah Kerajaan Bungku*, halaman 169.

Seng, Tiong Eng Kiat, Djie Lien Pan, Thio Tjoe Lioe, Ho Jang Kiem, Chan Man Pan, Haw Ka Soei, Tjiang A Tae, dan Mah Song Moe.[394]

Pada 24 Januari 1942, Kendari jatuh ke tangan bala tentara Jepang yang selanjutnya bergerak menguasai daerah-daerah lainnya di Sulawesi Tengah. Raja Bungku saat itu, Abdulrabbie beserta tokoh-tokoh bangsawan bernama Abdul Razak dan Ahmad Hadi sepakat bersama-sama mengadakan perlawanan politik terhadap Jepang. Perlawanan ini menjadi bagian Gerakan Merah Putih yang dipimpin oleh Haji Abdul Rahim. Meskipun pernah diangkat sebagai Kepala Distrik Sementara oleh Jepang, Haji Abdul Rahim tetap bersikap anti-Jepang.

Gerakan bawah tanah yang bertujuan menentang penjajah ini tetap eksis hingga berakhirnya pendudukan Jepang. Banyak tokoh-tokohnya yang tertangkap dan dijatuhi hukuman pancung oleh Jepang, seperti Haji Abdul Rahim sendiri, Ince Abu Buraerah, Abdullah Macan, Baba Weli, Tio Tiampo (seorang Tionghoa), Haji Hasan, Ali B., Ali Darise, Haji Lakanani, Midi, Raju, Kanjara, Palontjo, dan Maku.

Raja Abdul Razak
Sumber: Bapak Fadly La Pene
Lihat juga *Sejarah Kerajaan Bungku*, halaman 38 dan 122.

c. Sistem Pemerintahan

Tatanan pemerintahan awal Kerajaan Bungku tidak diketahui secara pasti. Baru ketika Ternate menguasainya, organisasi pemerintahan mulai ditata dengan mengacu pada struktur pemerintahan Ternate. Penguasa di sana tidak berkuasa absolut dan

394. Lihat *Sejarah Kerajaan Bungku*, halaman 171.

dipilih oleh suatu dewan bernama Soa Sio Sangaji yang beranggotakan utusan-utusan dari Wosu, Lonona, Marsaoleh, Tofuti, Mendui, dan Gi Malaha bajo.

Raja selaku pemimpin tertinggi di Bungku disebut *pua*. Ia dibantu oleh seorang perdana menteri yang disebut *jogugu*. Perdana menteri bertugas pula mewakili raja dalam berbagai kepentingan. Raja masih memiliki dewan menteri yang dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan tugasnya, yakni dewan menteri yang menangani masalah pemerintahan dan dewan menteri urusan keagamaan. Menteri-menteri yang mengurus masalah pemerintahan juga disebut *bobatu juniah* (pemerintah duniawi) dan terdiri dari perdana menteri (*jogugu*) sendiri, *kapita lau* (menteri pertahanan dan pelabuhan), *ukum sangaji* (mengurusi daerah taklukan di utara), *ukum sao-sio* (menteri dalam negeri dan penasihat raja), *kapitan kota* (penasihat raja), dan *sargenti* (bertugas sebagai penghubung dengan wilayah Tokala). Sementara itu, dewan menteri yang bertugas menangani urusan keagamaan dinamakan *bobatu akherati* dan terdiri dari *kale* atau *kadhi* (menjalankan urusan dan pengadilan keagamaan di seantero wilayah kerajaan; kadi) dan *imamu* atau imam.

V. BUOL

a. Cikal Bakal Kerajaan Buol

Wilayah Kerajaan Buol kini terletak di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Menurut penuturan cerita rakyat, pada zaman dahulu di Gunung Pogugul terdapat sebuah batu hitam besar yang pecah menjadi dua. Dari pecahan yang satu muncul seorang pria bernama Tamatau, sedangkan dari pecahan yang lain keluar seorang wanita bernama Kinomilato. Keduanya menikah dan mempunyai seorang putra bernama Donolangit. Suatu kali, Tamatau menemukan seorang anak perempuan yang berasal dari perut seekor jentik besar di danau. Mereka menamainya Kotigini dan menikahkannya dengan Donolangit. Setelah beranak pinak, keturunan mereka menjadi suku Ombokilan.

Tidak jauh dari tempat tinggal suku Ombokilan, tumbuh bambu dan buluh kuning. Suatu kali terjadilah hujan badai yang disertai kilat yang sambung menyambung sehingga seluruh alam menjadi gelap. Setelah badai reda, dari bambu kuning menjelma seorang pria bernama Lilimbuto dan dari buluh kuning keluar seorang wanita bernama Lilimbuta. Keduanya menikah dan keturunan mereka disebut suku Manurung.

Dengan demikian, di Gunung Pogugul hiduplah dua suku, yakni suku Ombokilan dan Manurung, yang pada mulanya hidup rukun dan damai. Namun, setelah warga mereka bertambah banyak, timbul perselisihan di antara keduanya. Untuk menghindari perselisihan lebih lanjut, suku Ombokilan berpindah menuruni gunung. Donolangit membagi sukunya menjadi empat yang masing-masing dikepalai oleh *taa modika* atau raja muda. Selanjutnya, para *taa modika* tadi dipimpin oleh *tii kalangan* atau raja, yang tak lain dan tak bukan adalah Donolangit sendiri. Setelah Donolangit wafat, keempat raja muda tadi mendirikan perkampungan atau kerajaannya masing-masing, yakni Kerajaan Biau, Tongon, Talaki, dan Bunobogu. Berdasarkan kesepakatan ketiga kerajaan lainnya, Raja Biau menjadi pemuka di antara mereka dengan gelar Raja Buol. Dengan demikian, Madika Biau otomatis menjadi Raja Buol.

Kurang lebih pada abad 13, Kerajaan Sigi menyerang Buol dan mengalahkan serta menawan rajanya. Rakyatnya yang berada di kawasan Guamonial lalu pergi ke Gunung Pogugul dan melakukan upacara penyembahan pada sebatang pohon bindonu. Setelah upacara berlangsung, tiba-tiba alam menjadi gelap dan turunlah hujan badai dengan diiringi kilat dan guntur yang saling sambar menyambar. Ketika badai mereda, kayu bindonu telah terbelah menjadi dua dan masing-masing bagian menjelmakan seorang pria bernama Mogamu dan seorang wanita bernama Sakilato. Keduanya menikah dan Mogamu diangkat sebagai raja.

Di bawah pemerintahan Mogamu, kerajaannya menjadi makmur dan damai, hingga tersohor sampai ke tiga kerajaan lainnya, yakni Tongon, Talaki, dan Bunobogu. Penguasa ketiga negeri itu lalu menghadap Mogamu dan mereka sepakat menyatukan kembali kerajaannya. Mogamu memperoleh tiga orang anak, yakni Angganti Bone, anak wanita yang lahir dengan membawa telur dalam genggamannya; Anoglipu, seorang anak laki-laki yang lahir dengan membawa *samada* (mahkota raja); dan Dai Bole, yang lahir dengan membawa *sudang* (semacam keris).

Ketika Mogamu wafat yang menggantikannya adalah Anoglipu. Angganti Bone menjadi *madika* wanita di Biau. Selanjutnya, ditetapkan lagi tiga jabatan penting lainnya (*jogugu, kapitan laut,* dan *ukum*) dalam Kerajaan Buol, yakni keturunan Batara Langit, Raja Tongon, menjadi *jogugu*; keturunan Rajawali, Raja Bunobogu, menjadi *kapitan laut*; dan keturunan Batambungo, Raja Talaki, menjadi *ukum*. Selanjutnya, empat jabatan penting di atas, Madika Biau, *jogugu*, *kapitan laut*, dan

ukum, membentuk dewan adat yang disebut *Bokidu*. Masing-masing anggota dewan adat itu mempunyai hak yang sama. Bersamaan dengan terbentuknya dewan itu muncul pula empat *balak* atau negeri yang dipimpin oleh para anggota lembaga adat di atas. Setiap anggota *Bokidu* berkuasa di *balak*-nya masing-masing. Ditetapkan pula peraturan bahwa masing-masing jabatan boleh dipangku oleh anggota *Bokidu* secara bergantian. Mereka juga boleh secara bergantian memimpin *balak* lainnya bila dirasa perlu. Demikianlah asal muasal terbentuknya *Bokidu* atau dewan adat di Buol.

Raja Anoglipu memindahkan pusat pemerintahannya ke Lamolan. Sebelumnya, saudara-saudara Anoglipu, yakni Angganti Bone dan Dai Bole, telah meninggalkan Buol dan tinggal di Gowa. Ketika Anoglipu mangkat, anak-anaknya yang bernama Bambalotu, Todaee, Tutibulan, dan Deimakio belum dewasa, tetapi ia masih mempunyai seorang anak angkat bernama Ndubu. Konon, anak angkatnya tersebut berasal dari jelmaan bambu kuning yang didapat Anoglipu saat berburu di hutan. Dengan kesepakatan para anggota *Bokidu*, Ndubu diangkat sebagai Raja Buol yang baru.

Menurut sumber lainnya, Raja Ndubu (Ndubu I) memiliki tiga orang anak, yakni Anggatibone (seorang putri), Anogu Rlipu (kemungkinan adalah Anoglipu), dan Dai Bole. Bokidu kemudian memilih Anogu Rlipu sebagai pengganti ayahnya. Meskipun demikian, kedua orang saudaranya kurang cocok dengan Anog Rlipu dan meninggalkan kampung halaman mereka meunju ke Toli-Toli. Pada perkembangan selanjutnya, Dai Bole menikah dengan seorang putri Toli-Toli bernama Mandalulingo.[395] Perkawinan ini membuahkan seorang putra bernama Pombangrlipu. Hal ini menandakan adanya ikatan kekerabatan antara Kerajaan Buol dan Toli-Toli.

b. Perkembangan Kerajaan Buol

Setelah wafatnya Raja Anoglipu pada kurang lebih abad 15, Buol terpecah kembali menjadi empat kerajaan. Saat itu rajanya masing-masing adalah Dai Parundu dari Tongon, Pulili Dwuta dari Talaki, Umayah dari Bunobogu, dan Ndubu dari Biau. Atas kesepakatan Bokidu, Jogugu Bataralangit menjadi wakil raja dan memerintah keempat negeri yang membentuk federasi Buol tersebut. Ketika Bataralangit meninggal pada 1540, ia digantikan oleh putranya yang bernama Eato Mohammad Tahir (1540–1595). Empat kerajaan di atas bersatu kembali yang dikukuhkan dengan musyawarah *Bokidu*. Semasa pemerintahan Raja Eato sudah ada hubungan dengan

395. Lihat *Mengenal Buol Tolitoli*, halaman 28.

Ternate karena ia pernah menerima tongkat kerajaan dengan nama Sultan Ternate di bagian pangkalnya.

Bokidu kembali merundingkan apakah pengganti Eato kelak dari keturunan Anoglipu atau Dai Bole. Oleh karena Anoglipu sudah menjadi raja, sedangkan saudaranya yang bernama Dai Bole belum maka diputuskan bahwa raja berikutnya akan berasal dari keturunan Dai Bole. Terdengar kabar bahwa Dai Bole mempunyai seorang putra bernama Pombang Lipu yang kini berada di Nalu (Toli-Toli). Mereka lalu sepakat memanggil pulang Pombang Lipu. Sambil menunggu pergantian raja, Pombang Lipu mengadakan perjalanan untuk menjalin persahabatan dengan penguasa-penguasa lainnya. Menurut buku *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah* halaman 61, ia berjumpa dengan wakil bangsa Portugis yang bernama Pieters Burg. Nama ini tampaknya bukan nama Portugis melainkan nama Belanda. Jadi, kemungkinan yang benar adalah wakil Belanda dan bukannya Portugis. Pombang Lipu menyerahkan emas sebesar anak kambing kepada wakil Belanda tersebut sehingga ia diangkat sebagai Raja Buol dengan gelar Pombang Lipu Yakut Kuntu Amas Paduka Raja Besar kurang lebih pada 1590. Dalam pelayarannya, ia juga singgah di Gorontalo dan menikah dengan Jamalia, putri Raja Gorontalo. Ketika istrinya dalam keadaan hamil, ia membawanya kembali ke Buol. Istrinya kemudian melahirkan di Tudung, Pombang Lipu menamai anaknya Tudung, yang selanjutnya diganti lagi namanya dengan Dokliwan. Ia kelak kembali ke Gorontalo dan menikah dengan putri Raja Gorontalo. Ketika Eato telah berusia lanjut, takhta kerajaan diserahkan pada Pombang Lipu (1595–1633). Pada masa pemerintahannya terjalin hubungan persahabatan dengan bangsa Barat.

Berdasarkan sumber lainnya, *Bokidu* memutuskan mengangkat Dai Bole sebagai pengganti Anogu Rlipu. Meskipun demikian, hingga meninggalnya Anogu Rlipu belum diketahui keberadaan Dai Bole. Oleh karena itu, *Bokidu* memutuskan agar Bataralangit yang sebelumnya menjadi *jogugu* semasa pemerintahan Anogu Rlipu diangkat sebagai penguasa Buol sambil menantikan ditemukannya Dai Bole. Bataralangit bergelar Madika Moputi atau Sultan Eato. Diperkirakan ia merupakan Raja Buol pertama yang beragama Islam karena ia bergelar pula Muhammad Tahir Waziruladhim Abdurrahman (meninggal pada 1594). Belakangan, terdengar kabar bahwa Dai Bole sudah meninggal, tetapi ia memiliki putra bernama Pombang Rlipu. Atas keputusan *Bokidu*, Pombang Rlipu diundang ke Buol dan diangkat sebagai raja

mereka. Ia membangun istananya di Mulat. Pada 1625, ia bersama Raja Kaidipang berhasil mengalahkan Raja Boolang Mongondow.[396]

Pada zaman Raja Pondu (1745–1770), terjadi perselisihan dengan Belanda yang memang ingin mencari gara-gara demi menguasai Buol. Dengan sengaja Belanda memesan babi dari Raja Pondu padahal ia beragama Islam. Tindakan yang dimaksudkan sebagai provokasi ini membangkitkan amarah Pondu. Dengan demikian, pecahlah perlawanan terhadap Belanda. Namun, Buol berhasil dikalahkan dan rajanya ditawan dan dibawa ke Manado. Dengan kejam, Belanda membunuh Pondu dengan mengikatkan tubuhnya pada dua ekor kuda yang berlari berlawanan sehingga tubuhnya terbelah menjadi dua.

Semasa pemerintahan Raja Punu Bwulan (1770–1778), datanglah suku Mongondow yang dipimpin oleh Raja Mokodampit untuk mempererat persahabatan antar kedua kerajaan. Punu Bwulan digantikan oleh Boia Mangilalo dengan gelar Taa Marahum (1778–1786). Raja Boia Mangilalo memindahkan pusat pemerintahannya ke Potangoan. Ia digantikan kembali secara berturut-turut oleh Kalui (1786–1785) dan Ndain (Undaing, memerintah pada 1795–1802). Sumber lain menyebutkan bahwa Raja Undain (kemungkinan adalah Undaing) menikah dengan Putri Manimolango dari Toli-Toli sehingga kembali memperkuat kekerabatan antara Buol dan Toli-Toli. Ia mendirikan istananya di Potangoan.[397]

Ada kisah menarik mengenai Raja Timumun (1802–1804), pengganti Ndain. Saat itu, bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar dalam administrasi dan hubungan dengan kerajaan lain serta Belanda, tetapi karena banyaknya raja yang belum fasih berbahasa Melayu, mereka memakai jasa seorang juru bahasa atau penerjemah. Akibatnya, tidak jarang mereka ditipu atau dibodohi juru bahasanya. Sebagai contoh adalah peristiwa yang menimpa Raja Timumun ini. Timumun pernah menjabat sebagai *jogugu* (perdana menteri) semasa pemerintahan Raja Ndain. Atas kesepakatan *Bokidu*, Jogugu Timumun diangkat sebagai pengganti Raja Ndain. Oleh karena itu, ia perlu berlayar ke Manado untuk menerima pengesahan Belanda atas pengangkatan dirinya sebagai raja. Di atas kapal, para pejabat menyatakan bahwa raja akan dibawa ke Manado untuk menerima pengesahan, tetapi penerjemahnya, yang entah karena tidak paham atau sengaja, mengatakan bahwa raja akan dibawa ke Manado untuk dihukum.

396. Lihat *Mengenal Buol Tolitoli*, halaman 29.
397. Lihat *Mengenal Buol Tolitoli*, halaman 29.

Karena ketakutan, Timumun melompat ke laut dan meninggal karenanya. Karena itu, *Bokidu* lalu memilih Datu Mimo (1804–1813) sebagai raja baru. Setelah menerima pengesahan dari Belanda, ia resmi menjadi raja dan memerintah dari Lamolan.

Meskipun demikian, sumber lain menyebutkan bahwa Raja Undain meninggal pada 1802 di Manado. Setelah ia mangkat, pemerintahan Buol dikendalikan oleh permaisurinya, yakni Putri Manimolango dari Toli-Toli hingga Datumimo diangkat sebagai Raja Buol (1804–1810).[398]

Datu Mimo digantikan oleh Mokoapat (1813–1818) yang sebenarnya bukan keturunan raja, tetapi karena saudaranya pernah berjasa memukul mundur serangan Raja Bualemo yang hendak menguasai Buol, *Bokidu* memutuskan mengangkat Mokoapat sebagai penguasa Buol yang baru. Setelah Mokoapat meninggal, ia digantikan oleh anaknya yang bernama Ndubu (Ndubu III, memerintah pada 1818–1820). Ia pernah memberikan izin bagi bangsa Portugis mendirikan loji di muara Sungai Buol.[399] Ndubu digantikan oleh Takuloe (1820). Saat raja ini mulai memerintah, Belanda menyerang loji (kantor atau benteng) Portugis yang berada di Buol dan mengalahkan serta menghalau orang-orang Portugis yang berada di sana. Belanda lebih menyukai saudara Takuloe yang bernama Datu Tingi dan mengangkatnya sebagai raja. Namun, ia meninggal tak lama kemudian. Sebagai penggantinya, diangkatlah Datu Mula (1820–1830), putra Ndubu, yang memerintah dari Biabat. Pada 1830, setelah 10 tahun memerintah, Belanda mengasingkan Datu Mula ke Jawa tanpa alasan yang jelas, ikut pula putranya yang bernama Lahadun. Meskipun telah diasingkan ke Jawa, rakyat masih menganggapnya sebagai raja mereka dan wakilnya memerintah Buol antara 1830–1834. Pada 1838, pecah peperangan dengan Gorontalo memperebutkan wilayah Sumalata.[400]

Raja Buol berikutnya adalah Elamo yang bergelar Elam Sirajudin (1834–1857). Ketika Raja Elamo mangkat, Lahadun dipanggil kembali ke Buol dari Bandung pada 1858. Sebelum kedatangan Lahadun, pemerintahan Buol diwakili oleh Modeiyo (1857–1858). Lahadun menjadi raja dengan gelar Muhammad Nur Aladin (1858–1861) dan menandatangani kontrak politik pada 15 Agutus 1858 yang disahkan pada 8 Januari 1859. Belanda menghadiahkan payung kebesaran berwarna kuning kepadanya. Dengan penandatanganan kontrak politik ini, kekuasaan Belanda makin kokoh di

398. Lihat *Mengenal Buol Tolitoli*, halaman 30.
399. Lihat *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah*, halaman 89.
400. Lihat *Mengenal Buol Tolitoli*, halaman 30.

Buol. Ketika Lahadun mangkat, ia digantikan oleh Trubku yang menandatangani kontrak politik pada 31 Agustus 1864. Raja Trubku juga dikenal sebagai Turunku atau Taa Meraji (juga disebut Turumbu, memerintah pada 1861–1890). Kondisi masa ini boleh dibilang kacau dan di Katanan (antara Buol dan Paleleh) muncul raja tandingan. Dengan dukungan pemerintah kolonial Belanda, raja tandingan ini dapat disingkirkan dan Paleleh dibumihanguskan.[401]

Ia digantikan oleh putranya, Patra (Haji Patra Turunuku, memerintah pada 1890–1899), yang membangun istana di Roji pada 1896. Bersamaan dengan pemerintahannya, di kerajaan tersebut untuk pertama kalinya ditempatkan seorang kontrolir bernama Dr. H. Sieber yang berdiam di Buol. Namun, karena rumahnya kerap dilempari batu, ia pindah ke tempat lain. Pada 1899, Patra menyampaikan izin menunaikan ibadah haji ke Mekah dan berhenti sebagai Raja Buol. Para penggantinya hingga era kemerdekaan adalah Datu Alam (1899–1914), Haji Akhmad (1914–1947), dan Mohammad Aminullah Turungku. Ketika itu, Buol masih merupakan salah satu daerah swapraja. Pada 7 Desember 1951, Dewan Pemerintahan Daerah Buol membubarkan dirinya.

VI. DOLO

Wilayah Kerajaan Dolo kini terletak di Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala. Riwayat awal kerajaan ini banyak diliputi legenda. Salah satu cerita rakyat mengisahkan mengenai seorang tokoh bernama Sidolemba yang menyanyi sambil menatap sebatang pohon enau. Nyanyiannya dijawab oleh suatu suara yang berasal dari daun pohon tersebut. Sidolemba lalu membawa pulang daun ajaib itu dan tiga hari kemudian keluarlah seorang putri yang giginya telah digosok rata bernama Tavatea. Ia lalu menikahi gadis itu dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Pada zaman itu, warga di kawasan tersebut masih menjadikan keladi sebagai makanan pokok mereka dan belum mengenal beras. Konon, bila tubuh anak laki-laki itu digosok oleh ibunya maka keluarlah bulir-bulir beras. Semenjak saat itu, warga mulai mengenal beras dan bercocok tanam padi. Karena pertengkaran dengan suaminya, Tavatea kembali ke kayangan. Secara keseluruhan, Sidolemba mendapatkan tiga orang dari perkawinannya dengan Tavatea, yakni dua orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Anaknya yang laki-laki menikah dengan Kabonena, sedangkan anak perempuannya yang

401. Lihat *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*, halaman 185.

bernama Bandasinong menikah dengan Gilibulawa, Raja Tawaili. Ada lagi legenda lain yang menyatakan bahwa cikal bakal Raja Dolo adalah Yaruntasi yang ada kaitannya dengan Kerajaan Bangga (lihat bagian tentang kerajaan tersebut).

Raja Dolo pada 14 Agustus 1891 beserta Dewan Adat dipaksa mengakui kekuasaan pemerintahan Belanda. Menjelang akhir abad 19 dan awal abad 20, yang berkuasa di Dolo adalah Raja Gantulimba Tomekadundu. Menurut catatan *Regeerings-Almanak*, ia memperoleh pengesahan dari pemerintah Belanda pada 3 Juli 1892 dan 4 Agustus 1905. Pada zaman pergerakan nasional, Raja Datu Pamusu memberikan dukungan yang besar kepada SI sehingga ia diasingkan ke Ternate oleh Belanda.

VII. KULAWI

Wilayah Kerajaan Kulawi kini termasuk dalam Kecamatan Kulawi, Kabupaten Dongala, Provinsi Sulawesi Tengah. Raja pertama Kulawi adalah Tempere. Raja-raja selanjutnya adalah Balo, Paloigi, Potempa (Tomai Pau), dan Mesagala (Tomai Mampeli). Raja Mesagala digantikan oleh Intowaa Tomarengke (Intivoalangi atau Tomatoirengke, 1906–1910). Intowaa Tomarengke pernah mengadakan perlawanan terhadap penjajah yang tersohor dengan Perang Kulawi. Penguasa Kulawi ini merupakan duri dalam daging di mata Belanda, tetapi karena medannya yang berat, pemerintah kolonial harus memperhitungkan dengan cermat agresi militer ke sana. Jalan dari Palu ke Kulawi harus melewati medan yang berliku-liku dan juga perlawanan rakyat yang gigih. Sebelum melancarkan serangannya, Belanda telah mengutus La Marauna (Raja Banawa) dan Yojo Kodi, Raja Palu, agar membujuk Tomarengke menyerah. Raja Tomarengke marah mendengar bujukan ini dan mengatakan bahwa bila Belanda berani menginjakkan kakinya di Kulawi, ia siap menghadapinya dengan kekerasan.

Tomarengke menyadari bahwa Belanda tak lama lagi akan menyerangnya sehingga ia segera menyiagakan pasukan dan benteng pertahanannya di Gunung Momi. Berdasarkan penuturan cerita rakyat, benteng itu telah dilengkapi dengan 500 pucuk senapan serta meriam berbagai ukuran, disamping senjata-senjata tradisional, seperti tombak, keris, parang, sumpit, dan lain sebagainya. Belanda mulai melancarkan serangannya pada 1904. Pasukan pemerintah kolonial beristirahat sejenak di daerah Tuwa guna menyusun strategi dan barulah setelah itu dilancarkan serbuan besar-besaran. Meskipun demikian, rakyat Kulawi melakukan perlawanan dengan gigih

sehingga Belanda terpaksa mundur kembali ke Tuwa. Pertempuran berlangsung sampai tiga bulan. Belanda saat itu memanfaatkan jasa seseorang bernama Ince Mohamad sebagai penunjuk jalannya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Madika Tuwa Jaraba (Jababa),[402] terdapat jalan lain menuju Kulawi. Awalnya ia tak bersedia membocorkan jalan itu pada Belanda, tetapi setelah disiksa dengan dipanggang di atas api, *madika* akhirnya menunjukkan jalan rahasia tersebut dengan mengikuti aliran Sungai Miu. Belanda menyerang Kulawi dari belakang dan berhasil menangkap Tomarengke.

Raja Kulawi dipaksa memerintahkan rakyatnya menyerah, bila menolak ia beserta anggota keluarganya akan dihabisi oleh Belanda dan seluruh Kulawi akan diratakan dengan tanah. Akhirnya, dengan berat hati raja menitahkan rakyat Kulawi meletakkan senjatanya, bahkan pada 30 November 1908 ia menandatangani kontrak *Korte Verklaring* dengan Belanda. Dengan demikian, jatuhlah Kulawi ke dalam cengkeraman pemerintah kolonial Belanda. Tomarengke kemudian mengundurkan dirinya dan menyerahkan takhta Kulawi kepada kemenakannya, Tomape (1910–1918). Raja Kulawi yang tak sudi tunduk pada penjajah ini mangkat pada 21 Desember 1948 di Kulawi tanpa pernah merasa ditaklukkan oleh Belanda. Tomape digantikan oleh Lakuntu (Tomai Mampo, 1919–1920), dan setelah itu Jiloi (W. Djiloi, 1920–1950-an), yang menandatangani kontrak politik pada 17 September 1921. Menjelang kedatangan bala tentara Jepang, ia masih memerintah di Kulawi.

Raja Kulawi memerintah dengan didampingi suatu dewan adat bernama *Patanggota*. Adapun anggota dewan ini merupakan pemimpin empat negeri, yakni Bolapapu, Mataue, Sungku (Hungku), dan Boladangko,[403] yang membentuk Kerajaan Kulawi.

VIII. MORI

a. Cikal Bakal Kerajaan Mori

Kerajaan Mori terletak di pesisir timur Sulawesi, yang kini menjadi bagian Provinsi Sulawesi Tengah. Menurut legenda, cikal bakal Kerajaan Mori adalah seorang tokoh bernama Numunuo. Tokoh ini merupakan pemimpin sekelompok suku yang mendiami daerah Melai. Ia kemudian menikah dengan seorang putri bernama Welena

402. Dalam *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah*, halaman 106, disebutkan bahwa madika itu bernama Jaraba, sedangkan dalam artikel *Sekelumit Sejarah Kebudayaan Kaili* dalam jurnal *Antropologi Indonesia*, no, 48, halaman 153, disebutkan bahwa namanya adalah Jababa.

403. Lihat *Sekelumit Sejarah Kebudayaan Kaili* dalam jurnal *Antropologi Indonesia*, no. 48, halaman 136.

yang berasal dari suku yang sama dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Wamenti. Numunuo merupakan seorang pemimpin bijaksana yang memerhatikan nasib rakyatnya sehingga keadaan saat itu aman dan damai. Suatu kali, kepala suku tersebut memerintahkan rakyatnya mengembara mencari hutan sagu yang akan menjadi sumber makanan bagi mereka. Dengan membawa istri beserta anak-anaknya, warga suku meninggalkan desa mereka dan tiba di hutan sagu yang lebat dekat Matandau. Mereka lalu mengolah sagu yang ada menjadi makanan. Namun, belakangan disadari bahwa mereka tidak membawa *bolusa* (tempat) bagi makanan yang telah siap itu. Salah seorang warga mengusulkan agar mereka membuat tempat makanan dari daun *boku*. Inilah yang menjadi asal muasal nama Tambunga i Boku bagi hutan sagu itu. Mereka kemudian menangkap ikan di sungai dekat hutan sagu dengan tombak kayu guna mendapatkan lauk. Oleh karenanya, warga lalu menamai sungai itu Tangka Tombak.

Warga menjadikan daerah perbukitan di sekitar hutan sagu sebagai tempat pemukiman baru mereka. Kawasan itu mereka namakan Ligisa. Penamaan hutan sagu, sungai, dan kawasan kediaman baru itu merupakan wujud klaim kepemilikan bagi daerah tersebut. Kehidupan di daerah baru tersebut juga aman dan tenteram.

Suatu hari di pekarangan rumah Numunuo tumbuh sejenis tunas bambu yang aneh. Tunas itu begitu besar hingga tidak dapat dipeluk oleh orang dewasa. Keanehan itu memancing keingintahuan warga. Mereka menggali tanah di sekitar tunas besar itu guna mengetahui akarnya. Ternyata, tunas itu tidak memiliki akar. Oleh karena keanehen-keanehan tersebut, kepala suku melarang warga memotongnya. Akhirnya, tunas itu tumbuh menjadi sebatang pohon bambu yang sangat besar. Beberapa waktu kemudian terjadi keanehan lainnya. Di tengah terik matahari, turun hujan lebat yang disertai dengan lontaran anak panah tanpa diketahui dari mana asal-usulnya. Warga ketakutan dan berlari mencari perlindungan di tempat kediaman pemimpin mereka. Meskipun panah berhamburan dengan hebatnya, tak seorang wargapun terluka. Saat masih dilanda kebingungan atas peristiwa ganjil yang baru mereka alami, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Warga mendapati bahwa pohon bambu itu telah terbelah menjadi dua dan seorang pemuda tampan berdiri di sampingnya. Pemuda itu mengenakan pakaian berwarna kuning keemasan. Ia berdiri di atas bentangan tenunan kain *mawa* dan di belakangnya terdapat dua gulung kain sutera.

Warga ingin agar pemuda itu bergabung dengan suku mereka. Ia lalu dinikahkan dengan Wamenti dan menetap bersama mereka di Ligisa. Mereka lalu menobatkannya sebagai *mokole* (raja). Sementara itu Numunuo diangkat sebagai *karua*. Hal ini menjadi dasar bagi sistem administrasi pemerintahan Kerajaan Mori. Seorang *karua* selaku mertua *mokole* mempunyai kekuasaan untuk memilih *mokole* baru, tetapi ia sendiri tak berhak menjadi *mokole*. Dengan demikian, kedudukan *karua* setara dengan pangeran mangkubumi atau pangeran wali.

Tidak lama kemudian, kaum tersebut berpindah kembali ke Moiki sehingga tempat pemukiman di Ligisa menjadi tak berpenghuni. Penduduk yang kini berdiam di wilayah itu mengatakan bahwa di sana masih dapat ditemukan penemuan arkeologis berupa benda-benda tembaga, tembikar, dan emas, yang dipercaya sebagai peninggalan penghuni terdahulu. Pemicu perpindahan itu adalah serangan *mokole* Negeri Lembo yang tertarik dengan kemakmuran daerah tersebut. Serangan armada Lembo yang menyerbu lewat sungai berhasil dipatahkan. Warga mengadakan pesta kemenangan selama berhari-hari sehingga lupa menguburkan mayat para prajurit yang gugur di medan laga. Bau busuk yang berasal dari jenazah-jenazah itu tersebar ke mana-mana. Numunuo mengatakan bahwa mereka tidak dapat tinggal di sana lagi karena telah tercemar oleh bau busuk yang menyengat.

Demi menghindari bau dan berjangkitnya penyakit akibat membusuknya mayat, warga menyusuri Sungai Laa dan tiba di sebuah tempat bernama Morokopa. Mereka berpindah lagi ke Moiki dan mengalami kehidupan yang jauh lebih makmur. Suatu hari, terjadi peristiwa aneh seperti dahulu, yakni turunnya hujan di tengah hari musim kemarau yang panas terik. Warga menyakini bahwa ini merupakan pertanda akan terjadinya peristiwa-peristiwa luar biasa. Ternyata di samping rumah Numunuo ditemukan seorang anak yang terbungkus kain tenunan *mawa*. Ia duduk di atas sebuah dulang tembaga berkaki dengan kepala bertutupkan sebuah gong. Anak itu masih mempunyai tali pusar dari emas yang terlilit hingga ke bahunya. Legenda ini tidak mengisahkan mengenai anak yang dilahirkan dari pasangan Mokole Ligisa dengan Wawenti. Oleh karenanya, anak itu dapat ditafsirkan sebagai keturunan mereka. Sementara itu, legenda di atas merupakan wujud legitimasi kekuasaan bagi putra mereka yang hendak dinobatkan sebagai raja baru berikutnya. Ketika Mokole Ligisa berupaya mengangkat bayi itu, ia menangis dengan kerasnya sehingga *mokole* mengurungkan niatnya. Akhirnya, Numunuo selaku *karua* yang berhasil mengangkat

bayi tersebut. Kisah ini sekaligus menjadi sumber legitimasi bagi kekuasaan *karua* dalam memilih dan mengangkat *mokole* berikutnya. Bayi yang baru ditemukan itu juga diangkat sebagai *mokole* dengan gelar Mokole Moiki.

Setelah dewasa Mokole Moiki hanya ingin menikah dengan orang yang sederajat dengannya, yakni yang sama-sama turun dari kayangan. Numunuo pernah mendengar bahwa Negeri Mohainga di sekitar Danau Matano diperintah oleh *mokole* wanita yang juga berasal dari kayangan. Ia lalu mengutus pengikutnya melamar *mokole* itu. Ternyata Mokole Mohainga tidak keberatan. Warga Mohainga pada mulanya marah, tetapi setelah dijelaskan dengan cara bijaksana amarah mereka mereda.

Pesta pernikahan yang meriah segera diselenggarakan dengan mengundang kepala-kepala suku tetangga. Perayaan itu juga dijadikan ajang menyebarkan kabar bahwa di Moiki telah ada seorang *mokole* yang turun dari kayangan dan memiliki kebijaksanaan nan tinggi. Itulah sebabnya, tak berapa lama setelah upacara pernikahan berlangsung, datanglah dua orang kepala suku dari daerah pegunungan yang bernama Ruruhako dan Tandu Rumbarumba ke Moiki. Mereka memohon agar Mokole Moiki bersedia berdiam bersama mereka di Wawontuko dan menjadi raja bagi mereka semua. Permintaan ini dikabulkan. Kendati demikian, *karua* tetap berdiam di Moiki. Saat hendak menentukan calon penggantinya (putra mahkota), seorang *mokole* tetap harus datang kepada *karua*. Apabila seorang *mokole* meninggal maka hal itu juga harus diberitahukan kepada *karua* yang akan mempersiapkan upacara pemakamannya.

Mokole Moiki kemudian disebut Mokole Wawontuko. Legenda di atas kemungkinan mengisahkan mengenai perpindahan pusat kekuasaan dari Moiki ke Wawontuko. Selain itu, kisah di atas juga menginformasikan mengenai bergabungnya beberapa suku menjadi Kerajaan Mori. Hal ini memperlihatkan besarnya kekuasaan mereka saat itu.

Mokole Moiki menurut beberapa sumber dianggap sebagai Raja Mori pertama dan disebut juga sebagai Marunduh I (kurang lebih pada 1580–1620). Sejarah awal berdirinya kerajaan Mori ini hanya didasari oleh legenda sehingga sulit menentukan waktunya secara pasti. Kerajaan Mori tidak meninggalkan catatan tertulis sehingga hanya dapat disusun berdasarkan legenda, cerita rakyat, atau catatan sejarah kerajaan lain. Tahun pemerintahan Raja Mori pertama itu ditetapkan berdasarkan sumber sejarah Kerajaan Luwu. Dengan memperhitungkan bahwa serangan Luwu terhadap

Mori terjadi pada 1670 atau semasa kekuasaan Raja Mori ketiga, dapat ditetapkan bahwa Marunduh I memerintah sekitar 1580–1620.

Ketika Raja Marunduh I telah lanjut usia, ia membagi-bagi wilayah kekuasaannya dengan harapan agar para putranya tidak berselisih. Putra tertua diangkat sebagai pengganti ayahnya, dan ia tetap berkedudukan di Wawontuko. Lima putra lainnya memerintah wilayah-wilayah yang tidak disebutkan dengan jelas. Sementara itu, putrinya menikah dengan Mokole Banggai. Nama putra yang menggantikannya tidak diketahui. Oleh karena itu, dalam buku karya Edward L. Poelinggomang, ia hanya disebut sebagai Marunduh II (1620–1650).[404]

b. Perkembangan Kerajaan Mori

Menurut legenda, Marunduh II diwarisi anjing sakti bernama Totopalo yang konon giginya terbuat dari tembaga. Dikisahkan bahwa semasa pemerintahan Marunduh II, kehidupan rakyat dapat dikatakan makmur. Hingga suatu kali diterima berita dari Banggai bahwa saudara perempuannya ingin meminjam Totopalo untuk mengatasi serangan seekor babi hutan sakti yang ganas di sana. Konon, babi hutan itu telah banyak menyeruduk orang sampai meninggal. Marunduh II setuju meminjamkan anjing saktinya itu dengan pesan bahwa bila anjingnya sampai terbunuh, giginya harus dikembalikan kepadanya.

Mokole Banggai sangat senang menyaksikan hewan sakti itu dan ketika babi hutan kembali mengganas, Totopalo dilepaskan ke arahnya. Dengan secepat kilat, Totopalo berlari ke arah babi hutan dan pertarungan antara keduanya tak dapat dihindari lagi. Setelah bertarung selama tiga hari, baik Totopalo maupun babi hutannya sama-sama mati. Anehnya, tidak ada tanda-tanda luka pada kedua hewan tersebut, meskipun saat bertarung keduanya tampak saling menggigit dan menerkam. Berdasarkan kesepakatan sebelumnya, bila Totopalo mati, giginya harus dikembalikan kepada Raja Mori. Ternyata Raja Banggai ingkar janji dan menolak menyerahkan gigi Totopalo. Semenjak saat itu putuslah hubungan antara Mori dan Banggai.

Semasa pemerintahan Raja Mori ke-3, Ratu Wedange (1650 –1670), datanglah utusan *Datu* (Raja) Luwu yang beristanakan di Palopo. Utusan itu menyampaikan undangan Datu Luwu bagi Raja Mori untuk mengadakan pertemuan di Matano. Ratu berupaya menyelidiki terlebih dahulu apa yang melatarbelakangi undangan tersebut. Ternyata diperoleh kabar bahwa Matano telah direbut oleh Luwu. Dengan demikian,

404. lihat *Kerajaan Mori: Sejarah dari Sulawesi Tengah* hal 55.

undangan Datu Luwu harus ditolak karena bila ratu memenuhinya sama saja dengan mengakui bahwa Mori telah menjadi *palili* (jajahan) Luwu. Memang pada saat itu Luwu sedang berambisi meluaskan daerah kekuasaannya. Meskipun demikian, ratu mengirim Karua Kelo untuk menjumpai Datu Luwu.

Begitu berjumpa dengan Datu Luwu, ia memperkenalkan dirinya sebagai *karua* Kerajaan Mori. Karena Raja Mori tidak mau datang sendiri, Raja Luwu menjadi marah dan menanyakan mengapa kerajaan itu tidak mau takluk. Dengan diplomatis *karua* menjawab, "Jika hal itu bergantung kepada keputusan saya maka saya akan menyatakan takluk, tetapi *mokole* mungkin tidak bersedia takluk kepada Luwu."[405] Mendengar hal itu, Raja Luwu memberikan ultimatum agar mempertimbangkan keputusan tersebut selama empat hari. Setelah lewat masa yang ditentukan, Raja Mori agar menemui utusan Luwu yang berada di Uluanso. Ratu Wedange tidak bersedia tunduk kepada Luwu sehingga pecahlah peperangan antara Mori dan Luwu. Bala tentara Luwu segera mengepung ibu kota Mori di Wawontuko. Akhirnya, Luwu mencapai kemenangan atas Mori serta ratu, putra mahkota, Karua Kelo, beserta saudara laki-lakinya dijadikan tawanan. Sedangkan anggota keluarga bangsawan Mori lainnya dibiarkan tetap tinggal. Ditawannya ratu beserta *karua* ini merupakan penegasan bahwa kini Mori merupakan jajahan Luwu.

Setelah beberapa waktu menjadi tawanan di Luwu, *karua* berniat mengurus biaya tebusan agar diizinkan pulang ke negerinya. Keinginan ini disetujui oleh Datu Luwu, namun ratu tetap menolak kembali ke negerinya. Keputusan ratu ini mengandung makna politis karena bila ia pulang ke kampung halamannya dan menjadi raja lagi maka itu sama saja dengan menjadi penguasa bawahan Datu Luwu–sesuatu yang sangat dibencinya. Selain itu, hal ini dapat memaksa Raja Luwu terus menerus mengurus keperluannya selaku tahanan politik. Agar tidak perlu secara langsung mengurusi kebutuhan mereka, Datu Luwu menyediakan satu lahan pertanian serta beberapa ekor ayam dan babi sebagai tumpangan hidup para tawanan tersebut, tetapi pemberian ini malah dianggap sebagai penghinaan. Para tawanan tidak bersedia mengolah lahan dan membiarkannya terbengkalai. Ayam dan babinya sengaja diracun hingga mati seluruhnya.

Menyaksikan hal ini, Raja Luwu menawarkan pembebasan mereka tanpa tebusan apapun. Tawaran ini juga ditampik oleh ratu karena tak bersedia menjadi bawahan atau

---

405. *Kerajaan Mori*, halaman 58.

jajahan Luwu. Ia tetap menghendaki agar Mori diakui sebagai kerajaan yang berdaulat. Apabila Luwu menerima persyaratan ini, ia bersedia pulang ke kampung halamannya. Meskipun demikian, terjadi perbedaan pendapat di kalangan bangsawan Mori yang ditawan di Luwu. Putra mahkota, Sungkawawo, bersedia menerima kedudukan sebagai *palili* (raja jajahan). Oleh karenanya, Datu Luwu lalu mengakuinya sebagai Mokole Mori yang baru dan berpesan agar ia jangan lupa menyerahkan dua orang budak perempuan sebagai upeti setiap tahunnya.

Pada kenyataannya, Sungkawawo tidak diterima sebagai raja oleh rakyat Mori. Kekacauan terjadi di mana-mana dan rakyat terpecah-belah. Oleh karenanya, Sungkawawo lalu menyingkir ke Matano. Karua Kelo yang telah pulang terlebih dahulu ke negerinya mengangkat Anamba (1670–1680) sebagai Raja Mori ke-4. Meskipun Sungkawawo selaku putra mahkota memiliki kewenangan berdasarkan tradisi untuk menjadi Raja Mori berikutnya, ia tidak diangkat oleh *karua* melainkan oleh Raja Luwu. Karenanya, hal ini bertentangan dengan adat dan kebiasaan Mori. Rakyat dan kaum bangsawan banyak yang menentang serta tak mengakuinya sebagai raja. Dengan menyingkirnya Sungkawawo ke Matano–daerah yang berada di bawah kekuasaan Luwu, tentu saja ia tak dapat lagi memenuhi kewajibannya menyerahkan upeti kepada Luwu. Pengangkatan Anamba sebagai penguasa baru tanpa campur tangan Luwu merupakan penegasan bahwa Mori ingin memperlihatkan kedaulatannya.

Dengan strategi yang jitu ini, penaklukan Luwu atas Mori dapat dikatakan gagal total. Berdasarkan hukum adat, Mori tidak pernah menjadi *palili* Luwu karena Sungkawawo tidak dianggap sebagai penguasa yang sah oleh rakyat Mori. Kepulangan *karua* yang lebih dahulu ke Mori dapat dianggap sebagai langkah yang tepat karena dengan demikian ia berkesempatan menobatkan raja baru demi mengisi kekosongan kekuasaan. Sungkawawo memahami niat kaum bangsawan dan rakyat Mori yang tak bersedia menjadi taklukan negeri lain. Oleh karena itu, ia tidak berupaya merebut takhta dan tidak pula memberi tahu pihak Luwu mengenai penolakan rakyat terhadapnya. Sementara itu, terdapat dua faksi di Mori. Satu faksi mendukung Sungkawawo, sedangkan yang lain merupakan pendukung Anamba. Pertikaian di antara dua faksi itu kerap terjadi. Sungkawawo sendiri memberikan dukungan kepada Anamba melalui penyingkirannya ke Matano.

Beberapa kalangan mulai memandang bahwa keputusan Sungkawawo menyingkir ke Matano berpotensi mendatangkan masalah bagi Mori sendiri. Pertama-tama karena

Matano merupakan daerah *palili* Luwu sehingga bila Luwu mengetahui penolakan rakyat tersebut, mereka akan mengirimkan ekspedisi militer ke Mori. Itulah sebabnya, dikirim beberapa utusan guna memanggil kembali Sungkawawo ke Mori. Namun, di sini terjadi dilema, apabila Sungkawawo berkuasa lagi di Mori berarti negeri tersebut menjadi taklukan Luwu. Sebagai solusinya, disepakati membangun suatu pusat pemerintahan (ke-*mokole*-an) baru di Pa'antoule yang letaknya di luar daerah yang telah dikuasai Luwu. Sementara itu, ibu kota lama yang berada di Wawontuko akan dijadikan suatu distrik baru di Mori. Sungkawawo dijadikan raja di pusat pemerintahan yang baru itu, sedangkan Anamba menjadi raja daerah di Wawontuko. Dengan demikian, Sungkawawo dianggap sebagai Raja Mori ke-5.

Setelah menjadi raja, Sungkawawo melakukan berbagai perombakan demi memperkuat negerinya dan memperkokoh kekuasaannya. Salah satu langkah yang dilakukannya adalah melakukan pernikahan politik dengan putri kepala suku daerah Lembo yang berbatasan dengan Matano. Kaum keturunannya tidak dapat menjadi *mokole* karena bukan keturunan bangsawan. Oleh karena itu, sebagai gantinya keturunan mereka ditetapkan sebagai *karua* dan untuk selanjutnya kerap disebut sebagai Karua Lembo. Ikatan politik ini dilakukan karena berkaitan dengan masalah pertahanan. Apabila Luwu hendak menyerang Mori melalui Matano maka mereka harus terlebih dahulu melewati Lembo sehingga dengan menempatkan daerah itu di bawah pengaruhnya, Kerajaan Mori dapat membangun pertahanan di sana.

Cara lain yang dilakukan Sungkawawo untuk memperbesar pengaruhnya adalah mengadakan pesta *woke*, yang mengundang para *mokole* dan kepala suku. Salah satu acaranya adalah minum-minum sampai mabuk. Pesta ini juga merupakan kesempatan bagi raja mencari serta merekrut tokoh-tokoh berpotensi dan dapat diandalkan guna memperkuat serta memajukan negara. Pada suatu kesempatan, raja mengenali seorang tokoh pemberani, gagah perkasa, dan berkemampuan menjadi diplomat ulung bernama Kalambi, kepala suku Maruruno dari daerah Lembo. Karena kagum pada tokoh tersebut, raja berupaya agar Kalambi bersedia diangkat sebagai pejabat tinggi. Raja kemudian mengatur siasat ketika Kalambi yang sudah mabuk bangkit berdiri dan keluar sebentar dari tempat minum-minum, raja dengan cepat menukar cawan minum Kalambi dengan cawannya. Saat kembali ke tempat duduknya untuk meneruskan minumnya, raja pura-pura memarahi dan menuduh Kalambi telah menghinanya karena minum dari cawan raja. Kalambi tidak dapat mengelak dari

tuduhan tersebut karena yang berada di hadapannya memang cawan milik raja. Oleh karenanya, dengan rendah hati Kalambi mengakui kesalahannya dan bersedia menebusnya dengan mempersembahkan kerbau atau emas, tetapi raja menyatakan bahwa ia tak menghendaki semua itu dan hanya menginginkan Kalambi menjadi abdi kerajaan yang setia. Tuntutan raja ini tentu saja harus dipenuhi oleh Kalambi, yang selanjutnya diangkat sebagai *bonto* (panglima perang), suatu jabatan baru di Kerajaan Mori. Pada masa damai, *bonto* berfungsi sebagai perantara raja dengan kepala-kepala daerah *palili* Mori. Belakangan fungsinya makin penting sehingga ia juga dilibatkan dalam dewan adat kerajaan. Ia kelak memiliki peran penting pula dalam penggantian raja maupun kepala daerah. Pengangkatan kepala suku yang berasal dari Lembo ini dimaksudkan pula memperkuat peran Lembo sebagai kubu pertahanan terhadap serangan yang berasal dari penjuru timur kerajaan (misalnya Luwu). Perombakan terhadap tata pemerintahan kerajaan ini rupanya berangkat dari kekalahan yang baru saja dialami Luwu. Para penguasa Mori tampaknya mulai menyadari arti penting pertahanan kerajaannya.

Strategi politik yang diterapkan di Mori ini menyadarkan Luwu dan mereka merubah kebijakannya terhadap Mori. Datu Luwu ke-22, Batari Tungke Sultanat Fatimah (1706–1715), menghapuskan kewajiban Mori membayar upeti. Dengan demikian, hal ini menandakan bahwa Luwu tidak lagi menganggap Mori sebagai daerah *palili* sekaligus mengakui bahwa Sungkawawo adalah raja yang merdeka dan berdaulat penuh.

Silsilah raja-raja Mori berikutnya dari raja ke-5 (Sungkawawo) hingga Marunduh Datu ri Tana (Marunduh III) agak kurang jelas. Berbagai sumber memberikan keterangan yang berbeda-beda. Daftar raja-raja yang dibuat oleh J. Kruyt dan Makita Marunduh hanya menyebutkan dua orang raja saja di antara kedua penguasa di atas, yakni Lawolio dan Tosaleko. Sedangkan silsilah yang dibuat oleh Paulus Hertilinus Lambautoh, mencantumkan tambahan dua orang raja lagi sehingga keseluruhannya menjadi empat, yaitu Landika, Alala Owulu Lamale, Tosaleko, dan Lambautoh. Dengan mempertimbangkan jeda waktu antara Sungkawawo (1720) dan Marunduh III (1870) yang meliputi 150 tahun, diperkirakan bahwa ada lebih dari 4 raja di antara mereka dengan pertimbangan bahwa masing-masing raja memerintah rata-rata 20–30 tahun. Berdasarkan perbedaan di atas, dapat diketahui bahwa Lawolio yang menggantikan Sungkawawo tidak tercantum pada silsilah yang dibuat oleh

Lambautoh. Selain itu, Tosaleko dikatakan sebagai raja yang mendahului Marunduh. Karenanya, bila kedua silsilah di atas digabungkan, hasilnya adalah sebagai berikut.

Tidak banyak pula informasi mengenai raja ke-6 hingga ke-10, kecuali beberapa riwayat singkat mengenai perpindahan kedudukan *bonto* dan perseteruan dengan Kerajaan Bungku.

Jabatan sebagai *bonto* diwariskan turun-temurun. Setelah Kalambi meninggal, kedudukannya diwariskan kepada putranya yang bernama Tabota. Ia memiliki dua orang anak yang bernama Kaeori dan Poliwo. Kaeori selaku putra sulung merupakan calon *bonto* berikutnya, tetapi ia jatuh cinta pada putri raja yang bernama Welena. Meskipun demikian, percintaan mereka tidak direstui oleh raja karena menurut adat seorang wanita pantang menikah dengan pria yang status sosialnya lebih rendah. Apabila seorang putri bangsawan tinggi menikah dengan orang yang kedudukannya lebih rendah, pasangan itu harus menanggung hukuman pembuangan melewati air atau laut. Dalam hal ini, mereka yang melanggar hukum adat itu harus diasingkan dan tinggal di seberang Danau Matano atau pulau-pulau di Teluk Tomori. Hukuman pembuangan di seberang air atau lautan tersebut mengandung pengertian simbolis bahwa mereka telah mati dan tak boleh kembali lagi ke kampung halamannya. Penolakan raja dan ketatnya aturan adat menjadikan Kaeori patah hati dan bunuh diri. Peristiwa ini mendukakan Tabota dan membuatnya berniat meletakkan jabatan serta kembali ke kampung halamannya. Niat Tabota ini terdengar oleh raja daerah Wawontuko yang berupaya mencegahnya, mengingat arti penting seorang *bonto* dalam

mempertahankan kerajaan. Raja daerah Wawontuko akhirnya berhasil mencegah *bonto* mengundurkan diri dari jabatannya dengan menawarkan daerah kedudukan baru di Wawontuko. Dengan demikian, kedudukan *bonto* kini tidak lagi di ibu kota kerajaan.

Kerajaan Mori pernah terlibat perseteruan dengan Bungku. Waktu itu, di daerah pesisir Bungku tinggal suku Panda. Suatu kali mereka mengalami serangan yang berasal dari suku Salampe. Karena tak sanggup membendungnya, mereka minta bantuan Alala Owulu Lamale (1780–1810), Raja Mori ke-8. Permohonan bala bantuan ini dikabulkan dan raja mengutus Pu'ukelu (*bonto* ke-4). Dengan bantuan kerajaan Mori, suku Salampe berhasil dikalahkan. Sebagai tanda terima kasih, suku Panda menghadiahi Pu'ukelu dengan kain sarung yang tak sedikit jumlahnya serta perkakas dari tembaga. Pemberian itu ditampik dengan halus oleh Pu'ukelu dan meminta menggantinya dengan kepemilikan atas hutan sagu di Panda (*Tambunga I Panda*). Ternyata keterlibatan Mori dalam menyelesaikan permasalahan suku Panda itu tidak menyenangkan Bungku karena menganggapnya sebagai campur tangan Mori terhadap peristiwa yang terjadi di wilayah kekuasaannya. Mereka memandang bahwa Mori berniat meluaskan daerah kekuasaannya. Apalagi dengan penyerahan hutan sagu itu, Mori telah menjadi penguasa atas penyambung hidup warga di sana–yang makanan pokoknya adalah sagu. Dengan penguasaan atas hutan sagu tersebut, penduduk di sana menjadi terikat dengan Mori. Mereka wajib menyerahkan sebagian hasil sagunya kepada pemilik hutan tersebut. Meskipun kondisinya memanas, hal itu tidak memicu peperangan besar antara kedua negeri, warga masing-masing masih kerajaan menjalankan hubungan perniagaan seperti biasa, bahkan pada kurun waktu tersebut, kedua kerajaan sama-sama mendapat gangguan bajak laut Tobelo yang berasal dari Ternate.

c. Perang Mori I

Latar belakang Perang Mori I sebenarnya adalah persaingan dagang antara Inggris dan Belanda. Semenjak 1816 setelah pengembalian Kepulauan Nusantara dari tangan Inggris, pemerintah kolonial Belanda berupaya memantapkan kedudukannya dengan mengadakan perjanjian yang disebut Traktat London pada 1824. Isinya berupa pengakuan Inggris terhadap kekuasaan Belanda di sebelah timur Semenanjung Malaka (Kepulauan Nusantara). Sebaliknya, Belanda mengakui kekuasaan Inggris di Singapura dan Semenanjung Malaka. Kesepakatan ini merupakan suatu langkah strategis untuk mengamankan kedudukan Belanda. Kedua belah pihak sepakat menerapkan

perdagangan bebas di wilayah pengaruhnya masing-masing. Namun, hal ini pada gilirannya justru mengancam kedudukan Belanda karena masih banyak kerajaan yang merdeka dan berdaulat, seperti Bone, Wajo, dan lain sebagainya sehingga para pedagang berkesempatan memasarkan barang-barang produksi Inggris ke sana dan bukannya ke pusat-pusat perniagaan yang telah dikuasai pemerintah kolonial. Yang makin mencemaskan Belanda adalah pedagang-pedagang tersebut juga menjual senjata dan mengajarkan cara menggunakan maupun memeliharanya. Belanda juga khawatir kalau-kalau Inggris akan menduduki wilayah-wilayah di Kepulauan Nusantara yang masih merdeka itu dan menyatakannya sebagai koloninya. Ketakutan ini terbukti pada 1840 ketika seorang petualang Inggris bernama James Brooke menyewa bandar perniagaan di Kalimantan dari Sultan Brunai.

Pembukaan Singapura sebagai pelabuhan bebas oleh Inggris sanggup menarik para pedagang dari berbagai kerajaan-kerajaan Nusantara yang masih merdeka guna memusatkan kegiatan perniagaan mereka di sana. Akibatnya, bandar-bandar yang dikuasai Belanda menjadi sepi. Selain itu, perniagaan bebas dengan Singapura memungkinkan berbagai kerajaan memperkuat dirinya secara militer dengan membeli senjata secara langsung di Singapura ataupun melalui pedagang perantara. Senjata dan candu memang diperjualbelikan dengan bebas di Singapura. Sebagai pemecahan masalah ini, Belanda mencoba menerapkan kebijakan yang sama dengan Inggris. Pada 9 Septembar 1846, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan pengumuman bahwa terhitung 1 Januari 1847, Makassar akan menjadi pelabuhan bebas demi menarik kedatangan pedagang pribumi dari berbagai penjuru Nusantara sehingga mereka tidak lagi mengarahkan kegiatan perniagaannya ke Singapura. Menteri koloni tak merasa keberatan dengan kebijaksanaan ini, tetapi memikirkan bagaimana caranya agar wilayah-wilayah yang masih merdeka itu tidak dicaplok oleh para petualang seperti James Brooke. Untuk mengatasi permasalahan semacam itu, Belanda bermaksud mengklaim seluruh Sulawesi sebagai daerah kekuasaannya. Ratu Belanda lalu mengubah jabatan Gubernur Makassar menjadi Gubernur Sulawesi dan Daerah Taklukannya (*Gouverneur van Celebes en onderhoorigheden*) pada November 1846. Dengan demikian, seolah-olah kekuasaan Belanda kini menjangkau seluruh Sulawesi termasuk daerah-daerah yang masih bebas.

Pada 1853, Belanda mendeklarasikan Ternate sebagai pelabuhan bebas. Lebih jauh lagi, Belanda mengklaim bahwa pesisir timur Sulawesi (termasuk Mori) termasuk

dalam daerah kekuasaannya. Alasan Belanda adalah pesisir timur Sulawesi dulu pernah berada di bawah kekuasaan Kesultanan Ternate. Karena kini Ternate sudah berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda maka secara otomatis pesisir timur Sulawesi juga dikuasai oleh Belanda. Pada kenyataannya, kerajaan-kerajaan di pesisir timur yang telah ditaklukkan hanyalah Banggai dan Bungku sedangkan negeri-negeri lainnya masih merdeka. Klaim pemerintahan Belanda melalui Residen Ternate ini tentu saja ditolak oleh Mori dengan alasan bahwa mereka tidak pernah berada di bawah kekuasaan negeri manapun termasuk Ternate. Dengan demikian, mereka merasa tidak perlu tunduk kepada pemerintah kolonial Belanda.

Sikap tegas Kerajaan Mori ini mendorong Belanda melakukan ekspedisi militer ke sana. Demi mendukung agresinya itu, Belanda menyulut perseteruan lama antara Bungku dan Mori. Mereka mengungkapkan laporan mengenai penjarahan penduduk Mori di kawasan Bungku pada 1849. Ini sesungguhnya merupakan taktik Belanda dalam membangkitkan permusuhan terpendam antara dua kerajaan tersebut. Bungku terpancing memihak Belanda dan menyokong ekspedisi militer terhadap Mori yang sedianya akan dilangsungkan pada 1856. Dukungan Bungku ini juga diperlukan karena Belanda tidak mengetahui bagaimana kondisi dalam negeri Mori, baik secara geografis maupun politis.

Raja Mori ke-10, Tosaleko (1840–1870), menyadari bahwa sikapnya itu berpotensi memancing serangan Belanda. Dugaan raja itu diperkuat dengan hadirnya kapal uap Belanda di Teluk Todo yang ditugaskan memata-matai kawasan tersebut. Selain itu, raja juga menerima laporan dari rakyatnya yang kerap menjalin hubungan dengan Bungku bahwa negara tetangganya telah memobilasi pasukannya guna membantu pemerintah Belanda melakukan agresi militer ke Mori. Sebagai langkah persiapan, pihak Mori memperkuat kubu pertahanannya, terutama di Tompira, karena kawasan itu merupakan pintu gerbang memasuki pedalaman Mori. Oleh karena itu, mereka memasang ranjau di kawasan tersebut guna melemahkan dan melambat gerak maju musuh. Selanjutnya, bila seandainya Tompira jatuh, musuh pasti akan bergerak ke ibu kota Mori dan menawan raja. Untuk mengantisipasi hal ini, dibangunlah suatu benteng yang kuat di puncak gunung batu, yakni Benteng Ensaondau. Benteng ini dibangun seolah-olah sebagai pusat kerajaan dengan menempatkan para prajurit beserta keluarganya di sana guna mengecoh musuh. Pasukan Mori yang berada di sana dilengkapi dengan senjata tradisional dan senjata api buatan Inggris yang

diperoleh dari para pedagang asing. Selain itu, batu-batu gunung dipersiapkan pula yang siap digelindingkan guna menahan musuh menaiki benteng tersebut. Dengan strategi tersebut diperkirakan musuh tidak akan menyerang ibu kota kerajaan yang sesungguhnya. Agar lebih meyakinkan musuh, diinstruksikan agar para prajurit yang mempertahankan Tompiro segera mundur ke Ensaondau bila terdesak. Strategi ini dimaksudkan untuk menimbulkan kesan bahwa Ensaondau merupakan benteng penting yang sekaligus merupakan pusat pemerintahan kerajaan.

Setelah melalui berbagai persiapan, armada ekspedisi Belanda, yang terdiri dari 12 orang perwira, 225 bintara dan bawahan, 371 suku Alifuru, 20 pesuruh, serta seorang pangeran Ternate, dengan diperkuat pasukan tambahan dari Bungku, Banggai, dan Peling dengan kekuatan total 2690 orang, tiba di Pulau Bunga Timbul pada 30 Mei 1856. Belanda membangun kubu pertahanan di sana dan memberikan nama baru Vesuvius bagi pulau kecil itu, sesuai dengan nama kapal perang yang dipergunakan mereka. Pasukan Belanda beserta sekutu-sekutunya mulai melayari Sungai Tompira pada 5 Juni 1856. Mereka mendapatkan tembakan-tembakan dari pihak Mori yang melakukan serangan secara gerilya. Meskipun demikian, pasukan perintis ekspedisi militer dapat mencapai lokasi pasar Tompira. Begitu mereka tiba di sana, pasukan Alifuru segera didaratkan. Wakil komandan Belanda, Letda Jhr. L. H. W. M. De Stuers memerintahkan Lettu Soleiman, pemimpin pasukan Alifuru, agar menduduki pasar tersebut. Pasukan yang memasuki Tompira ini tidak mengalami serangan berarti dari pihak Mori karena *bonto* telah merubah siasatnya. Ia memerintahkan penarikan mundur pasukan dari Tompira untuk memperkuat Ensaondau. Sementara itu, hanya sejumlah kecil pasukan saja yang disiagakan di Morokopa, mereka ditugaskan untuk begerak mundur ke Ensaondau guna memancing musuh ke sana. Diharapkan dengan strategi ini, Petasia, ibu kota Mori, akan luput dari perhatian musuh. Itulah sebabnya, pasukan Mori tidak melakukan perlawanan berarti ketika musuh memasuki Tompira sehingga kawasan tersebut dapat diduduki dengan mudah oleh Belanda beserta sekutunya.

Setelah Tompira berhasil dikuasai, didirikanlah perkubuan pasukan di sana. Pada 15 Juni, sisa pasukan yang masih berada di Pulau Bunga Timbul diberangkatkan dengan perahu melalui Sungai Tompira. Iring-iringan mereka konon seperti semut yang berjalan ke sarangnya. Hal ini juga dimaksudkan sebagai unjuk kekuatan demi menciutkan nyali pasukan Mori. Komandan ekspedisi Belanda, C.F. Goldman baru

tiba di Tompira pada 20 Juni 1856. Sesudah kedatangannya itu, dilangsungkan upacara pengibaran bendera Belanda sebagai lambang bahwa kawasan itu telah masuk dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Serangan kemudian dilanjutkan ke benteng Ensaondau. Kali ini tugas diserahkan kepada pasukan yang dipimpin oleh Kapten van Oijen dan Lettu van Dentsch. Pasukan ini baru tiba keesokan harinya karena terhambat oleh ranjau dan hujan yang deras. Ranjau yang dipasang pihak Mori tidak sedikit memakan korban pasukan Alifuru.

Begitu sampai di sana, seorang juru bicara diperintahkan naik ke benteng pertahanan guna memerintahkan segenap pasukan yang berada di dalamnya untuk segera menyerah, tetapi pemimpin pasukan yang bernama Sangaji menolaknya seraya berkata bahwa ia dan anak buahnya telah diperintahkan oleh *mokole* untuk mempertahankan daerah mereka hingga titik darah terakhir. Ketika utusan Belanda telah meninggalkan benteng pertahanan mereka, Sangaji memerintahkan penabuhan tambur dan gong yang bertalu-talu sebagai pernyataan perang dan menyiagakan pasukan Mori lainnya yang berada di Wawontuko. Tetabuhan genderang yang meriah itu ternyata menciutkan nyali pasukan Alifuru sehingga mereka tidak berani bertempur walau diancam dengan pistol sekalipun. Pimpinan detasemen pasukan mengirim utusan ke Tompira guna meminta dukungan pasukan artileri untuk mengebom benteng pertahanan Mori. Sekonyong-konyong pada 22 Juni, pasukan Mori menyerang dari belakang dengan bersenjatakan panah dan sumpitan beracun, tetapi mereka dapat dipukul mundur kembali ke arah hutan. Dalam insiden ini, dua orang pasukan Mori tewas terkena tembakan. Semenjak saat itu, pasukan Belanda meningkatkan kewaspadaannya.

Pasukan artileri baru tiba pada pukul 22.00 dan langsung dicari lokasi yang sesuai untuk menempatkannya, yakni di sebuah bukit di depan benteng Ensaondau. Pengeboman tidak dapat dilakukan saat itu akibat turun hujan dan cuaca yang tak bersahabat. Keesokan paginya sekitar pukul 06.30, cuaca menjadi cerah dan bombardemen dapat dilakukan. Karena tidak tampak adanya reaksi, pengeboman dihentikan. Menurut dugaan Belanda, penduduk telah mengungsi ke gua-gua yang terletak dekat tempat tersebut. Sebagai langkah berikutnya, dilakukan serangan frontal ke Benteng Ensaondau dari dua sisi dengan kekuatan penuh. Besarnya jumlah penyerang ini menjadikan pasukan yang bertahan di benteng sebelah bawah tidak dapat menahan serangan lawan. Setiap pasukan yang hendak menggulingkan batu

atau melontarkan panah langsung ditembak sehingga pertahanan mereka tidak lagi efektif. Karena itu, mereka memutuskan untuk meninggalkan posisinya itu dan bergabung dengan pasukan yang berada di sebelah atas.

Benteng pertahanan bagian bawah diduduki oleh Belanda. Mayor Happe memerintahkan agar seluruh bangunan yang ada di sana dibumihanguskan. Mengingat kondisi pasukan yang sudah kelelahan, mereka semua diizinkan pulang ke baraknya masing-masing. Sebagai langkah selanjutnya, pengepungan diperketat agar tak seorangpun dapat masuk atau meninggalkan benteng serta diteruskannya bombardemen guna memaksa pasukan Mori menyerah. Ketika pasukan artileri hendak memulai kembali serangannya, bendera putih sebagai tanda menyerah tampak berkibar di puncak perbentengan Mori. Goldman mengirim utusan ke sana dengan pesan bahwa apabila mereka memang benar hendak menyerah, *bonto* atau *karua* agar menghadap sendiri kepadanya dengan membawa tanda-tanda takluk. Enam orang prajurit Mori diutus untuk membawa seekor ayam putih, sebutir telur, dan sehelai daun siri sebagai wujud pernyataan takluk pada malam harinya. Bersamaan dengan itu, berkibarlah Bendera Belanda di Ensaondau. Karena panglima perang mereka yang bernama Sangaji tidak hadir, keenam orang itu diperintahkan kembali lagi. Sekitar pukul tujuh malam, Sangaji datang bersamaa keenam orang prajurit Mori sehingga Benteng Ensaoundau secara resmi jatuh ke tangan Belanda.

Sangaji menyatakan bahwa penyerahan tersebut disebabkan ketakutan penduduk terhadap serangan mortir Belanda. Selain itu, upaya mereka dalam menggelindingkan batu tidak berhasil menahan laju pasukan Belanda. Pasukan bala bantuan yang dikirim raja pun tidak dapat menolong mereka. Ensaondau saat itu hanya dipertahankan oleh 60 prajurit Mori sehingga peperangan menjadi tidak seimbang. Sangaji mengajukan permohonan pula agar dirinya beserta penduduk diizinkan lari meninggalkan Mori karena takut pembalasan rajanya. Penyerahan Ensaondau itu tentu saja berlawanan dengan perintah Raja Mori yang mengharuskan mereka mempertahankan tempat tersebut sampai titik darah penghabisan. Jika kembali ke Mori maka dirinya beserta penduduk kota kemungkinan akan dihukum berat dan bahkan dijatuhi hukuman mati. Permohonan ini dikabulkan oleh Belanda.

Kendati berhasil menduduki Tompira dan Ensaondau, peperangan ini boleh dikatakan tak membuahkan manfaat apa-apa. Raja Mori tidak berhasil dipaksa menyerah. Bila diserang, ia akan mundur makin jauh ke pedalaman dan medan

pertempuran menjadi sangat sulit. Pihak Belanda berusaha mengadakan pertemuan dengan Mokole Wawontuko, tetapi gagal. Mereka tidak menjumpai siapa pun selain tempat pemukiman yang telah ditinggalkan penduduknya. Seluruh pasukan Belanda beserta sekutunya ditarik mundur ke Pulau Bunga Timbul pada 29 Juni.

Wilayah Tompira yang telah berhasil direbut diserahkan penguasaannya kepada penguasa Bungku. Namun, penyerahan ini sebenarnya tidak mendatangkan manfaat apa-apa karena kawasan itu hanya merupakan pasar dan tidak berpenghuni. Akibatnya, daerah itu jatuh kembali ke tangan Mori. Karena Bungku telah membantu Belanda, hubungan antar dua kerajaan yang sudah buruk itu makin rusak. Kendati demikian, tidak sampai menimbulkan perang frontal antara keduanya. Setelah peperangan ini, Mori tetap menjadi kerajaan yang merdeka.

d. Perkembangan Mori hingga Perang Mori II

Raja Mori ke-11, Marunduh Datu ri Tana Mokole Wawasa Inia Tawe I Wulanderi (1870–1907) yang juga dikenal sebagai Marunduh III, menerapkan politik pintu terbuka sehingga makin memajukan perdagangan di negeri tersebut. Ia dapat menarik *buangtana* (pajak hasil hutan) sebesar fl1.000 setiap tahunnya menurut perkiraan Alb. C. Kruyt. Para *mokole* (raja) bawahannya dapat meraup hasil sebesar fl300 per tahunnya. Kebijaksanaan itu juga memungkinkan raja memperoleh pasokan persenjataan dari Singapura. Masih menurut laporan Kruyt, Kerajaan Mori memiliki sekitar 100 pucuk senapa, 30 di antaranya milik raja, sedangkan sisanya terbagi antara para raja bawahannya. Upaya kerajaan-kerajaan yang masih merdeka untuk memperkuat pertahanannya ini dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah kolonial. Karena itu, mereka berencana menanamkan pengaruhnya sedikit demi sedikit ke Mori.

Dalam rangka menguasai Mori, Belanda mula-mula menetapkan bahwa orang-orang yang bermigrasi ke Mori dari daerah-daerah kekuasaan Belanda merupakan warga negara Belanda. Oleh karenanya, untuk mengawasi dan melindungi kegiatan mereka perlu diangkat seorang pemuka bergelar *kapitan*. Seorang pedagang asal Sulawesi Selatan yang memiliki kedekatan dengan Raja Mori bernama Haji La Mohammad Jafar dipercaya menduduki jabatan tersebut. Selain itu, seorang pedagang Bugis yang menetap di Bungintimbe, pulau kecil di muara Sungai Laa, juga diangkat sebagai *kapitan* bagi orang Bugis. Raja Mori tidak menentang penunjukkan ini karena ia telah mengenal Haji La Mohammad Jafar dengan baik, bahkan yang bersangkutan kerap membantu raja memungut pajak *buangtana*. Pada mulanya, para pendatang itu

membayar pajak kepada raja, tetapi setelah dikeluarkannya pernyataan pemerintahan kolonial bahwa mereka adalah warga negara Belanda, pajak harus diserahkan kepada Belanda dan bukannya kepada raja Mori lagi. Belanda mengeluarkan klaimnya lagi bahwa Mori merupakan daerah taklukannya karena pernah berada di bawah Kesultanan Ternate. Raja Marunduh III dengan tegas menolaknya dengan alasan bahwa Mori tidak pernah takluk pada kerajaan manapun. Belanda akhirnya hanya mewajibkan pedagang Bugis yang berada di Mori membayar pajak kepada pemerintah kolonial semenjak 1898. Raja Mori kali ini tidak memprotes kebijakan tersebut karena dianggap tak merugikan dirinya. Jika Kerajaan Mori menentangnya maka kemerosotan dalam perekonomian akan terjadi karena para pedagang Bugis akan meninggalkan negeri tersebut.

Sebagai manuver politik berikutnya, pemerintah kolonial Belanda menerapkan siasat pecah belah antara Kerajaan Mori dan Bungku yang hubungan antara kedua kerajaan memang tidak mesra. Langkah selanjutnya adalah melakukan pendekatan kepada penguasa Mori dan bertindak sebagai juru damai antara dua kerajaan yang bermusuhan di atas. Untuk itulah diutus dua orang misionaris yang bernama Albert Christian Kruyt dan Nicolas Adriani guna menjalin hubungan dengan Raja Mori. Kedua orang itu dipilih karena mereka dianggap memahami adat istiadat Mori. Dua penginjil itu diterima dengan baik oleh Raja Marunduh III pada 1898. Mereka segera menyampaikan pesan pemerintah kolonial kepada raja agar Mori bersedia berdamai dan menjalin hubungan yang baik dengan Belanda serta Bungku. Belanda menyulut perselisihan yang sudah ada antara Mori dan Bungku, tetapi setelah itu bertindak sebagai "juru damai" demi menanamkan pengaruhnya. Ajakan membina perdamaian ini disambut baik oleh Raja Mori dengan pesan agar Belanda jangan mengulangi serangan yang pernah dilancarkannya pada 1856 (Perang Mori I). Kesediaan raja menjalin relasi yang baik tersebut diwujudkan dalam jamuan makan bersama dengan dihadiri pula oleh *karua*, *bonto*, dan pejabat tinggi kerajaan lainnya. Setelah berakhirnya perjamuan tersebut, Kruyt dan Andriani pergi meninggalkan Mori dan melaporkan hasilnya kepada Residen Ternate.

Menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Raja Mori itu, diadakan negosiasi mengenai lokasi perundingan yang bakal diadakan antara berbagai pihak. Akhirnya, Tompira disepakati sebagai tempatnya. Pertemuan diselenggarakan pada 1900 dengan dihadiri oleh wakil-wakil pemerintah Belanda, penguasa Mori, dan penguasa

Bungku. Dr. Horst (Residen Ternate) dan Kneffer (wakil atau *posthouder* Belanda di Bungku) merupakan wakil pemerintah kolonial Belanda. Dari pihak Mori hadir Raja Marunduh III, Mokole Ede Kamesi (Mokole Ngusumbatu), beserta pejabat-pejabat tinggi Mori, seperti Bonto Pandelu Tumakaka, Karua Kalapa, Pangeran Lowolio, Tadulako Todondo, Tadulako Mangoli, dan lain sebagainya. Karena orang Belanda tidak memahami bahasa Mori ataupun Bungku, dipergunakanlah jasa penerjemah. Pada pertemuan ini, pihak Belanda mempergunakan Liem Tian Ang, seorang pedagang Cina yang telah lama berdiam di Mori sebagai penerjemah dari bahasa Belanda ke Mori. Sementara itu, pihak Mori menurunkan Anakoda Laida menerjemahkan pembicaraan dari bahasa Mori ke Belanda. Hasil kesepakatan yang disebut Perjanjian Tompira itu adalah sebagai berikut.

- Belanda, Mori, dan Bungku sepakat untuk menghentikan permusuhan dan menjalin hubungan yang damai.
- Jika dua kerajaan tetangga, baik Mori maupun Bungku, menyerang tetangganya maka kerajaan itu akan dianggap musuh pemerintah Hindia Belanda.
- Penetapan batas wilayah Kerajaan Mori dan Bungku, yakni pada daerah Bahombelu dan Tanjung Poso (Tondo Poso).
- Pedagang-pedagang dari luar yang melakukan perniagaan di Mori harus membayar pajak perdagangan kepada Belanda.[406]

Naskah kesepakatan di atas disalin menjadi tiga sehingga semua pihak dapat memperoleh salinannya. Sebagai simbol perdamaian, dilakukan tukar menukar cenderamata. Raja Mori menyerahkan sebuah tempat rokok dan batu pematik api (*potingku*) kepada Raja Bungku. Sebaliknya, Raja Bungku menyerahkan sebilah pedang kepada Raja Mori. Disepakatinya perjanjian di atas merupakan wujud keberhasilan Belanda dalam menampilkan dirinya sebagai "juru damai", padahal hal ini merupakan langkah awal dalam mencampuri urusan pemerintahan Kerajaan Mori. Belanda menempatkan dirinya sebagai pelindung bagi kerajaan-kerajaan yang masih merdeka itu sehingga mencegah mereka menjalin hubungan dengan negeri-negeri asing lainnya. Penempatan kapitan sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, selain

406. Buku *Kerajaan Mori: Sejarah dari Sulawesi Tengah* dalam catatan kakinya no 28, halaman 115 menyebutkan bahwa naskah perjanjian ini tidak berhasil ditemukan. Karenanya, butir-butir perjanjian yang lebih rinci tidak dapat dicantumkan di sini.

dimaksudkan sebagai pemungut pajak demi kepentingan kolonial, juga ditujukan mematai-matai penguasa Mori dan melakukan adu domba di kalangan rakyat.

Sebagai pelaksanaan poin ke-4 Perjanjian Tompira di atas mengenai pungutan pajak perdagangan, semenjak 1901 para pedagang asing khususnya yang berasal dari Bugis mulai membayar pajak kepada Belanda. Ini merupakan siasat Belanda untuk mengklaim wilayah pesisir Mori, mulai dari Tanjung Poso hingga Bahombelu. Klaim ini ditolak mentah-mentah oleh Raja Mori dengan alasan bahwa menurut Perjanjian Tompira batas kerajaan Mori adalah kedua kawasan tersebut. Artinya, dua wilayah itu masih termasuk Kerajaan Mori sehingga klaim Belanda itu tidak beralasan. Penolakan raja ini merupakan sumber konflik antara Mori dan Belanda. Dengan demikian, usaha pemerintah kolonial menebarkan pengaruhnya di Mori melalui Perjanjian Tompira boleh dikatakan gagal. Raja Mori dengan gigih berupaya mempertahankan setiap jengkal wilayahnya. Belanda terpaksa memikirkan alternatif lain berupa penaklukkan. Namun, gagasan ini susah direalisasi karena Raja Mori sangat keras kepala dan pantang menyerah. Selain itu, rakyat Mori merupakan pejuang yang gigih, mahir menggunakan sumpitan beracun, dan sanggup memenggal kepala musuh dengan sekali ayunan pedang saja. Karenanya, Belanda lalu menerapkan siasat adu domba demi memecah belah rakyat Mori.

Sebagai buah politik *divide et impera* itu pecahlah beberapa konflik internal di Mori, seperti pemberontakan Lagonda, Kepala Kampung Wawondumuku yang menentang kekuasaan Raja Marunduh III dan ingin menggantikannya dengan pemerintahan Hindia Belanda. Oleh karena itu, Lagonda bersama pengikutnya dan para kepala suku menemui Kapitan Lagangka guna menyampaikan permohonan bala bantuan dari pemerintah Belanda. Akan tetapi, setelah 30 hari bantuan yang diharapkan tidak kunjung tiba sehingga mereka memutuskan kembali ke kampung halamannya. Perlawanan terhadap Raja Mori itu sebenarnya disebabkan oleh hasutan seseorang bernama Ambe Maa yang berasal dari Luwu dan berperan sebagai agen pemerintah kolonial Belanda. Akibat hasutan itu, rakyat di kawasan Mori Atas, termasuk Lagonda, melakukan penentangan terhadap raja. Perselisihan ini makin diperkeruh oleh pembunuhan dua orang utusan raja yang diperintahkan menarik upeti, yakni Tapo dan Tandi. Menurut tulisan A.K. Tumakaka,[407] kedua orang itu telah berlaku tidak hormat dengan merampas harta benda rakyat. Oleh karenanya,

407. Lihat *Kerajaan Mori: Sejarah dari Sulawesi Tengah*, halaman 118.

rakyat di sana membunuh mereka. Tentu saja, sikap mereka yang semena-mena itu bertentangan dengan perintah Raja Mori karena raja sendiri tidak pernah memerintahkan untuk berlaku tidak hormat, seharusnya seorang utusan tidak berani menentang perintah rajanya karena ia berisiko dijatuhi hukuman mati. Di lain pihak, menurut hukum adat Mori, seorang utusan raja tidak boleh dibunuh dengan senjata. Utusan yang bersalah hanya boleh dihukum mati dengan pencekikan leher. Itulah sebabnya tindakan rakyat itu dianggap meremehkan kekuasaan raja. Setelah raja mengirimkan pasukannya, pemberontakan itu dapat dipadamkan dan Lagonda sendiri terbunuh. Namun, rakyat atas hasutan Ambe Maa masih belum bersedia mengadakan *masopi tandu* (upacara perdamaian). Belanda juga mendekati Mokole Ngusumbatu yang bernama Kamesi. Ia mempunyai hubungan yang kurang baik dengan Raja Mori karena masalah keluarga. Mokole Ngusumbatu itu secara diam-diam menjalin hubungan dengan Belanda, bahkan Residen Ternate, Dr. Horst, pernah memberikan bendera Belanda kepadanya.

e. Perang Mori II

Sejak tahun 1905 Belanda ingin meluaskan wilayahnya ke Sulawesi, yakni dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan yang masih merdeka di sana. Untuk mewujudkan ambisinya itu, Belanda membentuk ekpedisi militer yang disebut *Zuid Celebes Expeditie* pada Juli 1905. Tujuannya tak lain untuk memaksa para raja mengakui kekuasaan pemerintah Belanda melalui penandatanganan kontrak politik yang disebut Plakat Pendek (*Korte Verklaring*). Penggunaan kekerasan yang dicanangkan oleh Gubernur Jenderal van Heutz ini juga disetujui oleh pejabat tinggi kolonial lainnya, seperti van Deventer dan Cramer yang berpendapat bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah Belanda menjaga ketertiban dan keamanan di Kepulauan Nusantara. Dengan kata lain, mereka menganggap bahwa ekspedisi militer tersebut merupakan upaya untuk menegakkan keamanan. Pada 19 September 1905, Datu Luwu, We Kambo Daeng Risompa (1901–1935), telah dipaksa menandatangani *Korte Verklaring* sehingga Belanda beranggapan bahwa semua daerah pengaruh Luwu kini beralih ke tangan mereka. Untuk itulah Belanda mengirimkan pasukannya untuk daerah-daerah lain di Sulawesi Tengah yang sebelumnya merupakan kerajaan bawahan Luwu. Seluruh kerajaan di Sulawesi Tengah pada akhirnya jatuh ke tangan Belanda, terkecuali Kerajaan Mori. Kini pihak penjajah lebih berhati-hati dalam melakukan agresi ke sana, mengingat pengalaman mereka pada 1856 yang tidak menghasilkan apa-apa.

Agar serangan yang mereka lancarkan lebih banyak menuai keberhasilan dibandingkan sebelumnya, pemerintah kolonial mengutus Asisten Residen Engelenberg dan Maengkom menggali lebih banyak informasi mengenai Kerajaan Mori. Oleh karenanya, mereka mengirim surat ajakan kepada Raja Mori mengadakan pertemuan pada 15 April 1906. Papa I Nggowo dan Tunu diutus oleh raja menemui Engelenberg dan Maengkom yang telah hadir di Tambayoli dua hari sebelum tanggal yang direncanakan, tetapi utusan Belanda itu ingin berbicara langsung dengan raja. Meskipun demikian, raja menolak datang ke sana. Karena itu, Engelenberg hanya dapat menugaskan Maengkom mencari keterangan dari raja mengenai berapa jumlah pasukan yang dimilikinya. Namun, tugas utama Maengkom adalah mencari tahu kondisi geografis Mori, umpamanya mengenai letak kampung-kampung di Mori dan lain sebagainya. Ia mendata pula tokoh-tokoh mana yang berpihak kepada Belanda, seperti Mokole Ede Kamesi serta Kepala Kampung Sarombu dan Puumbana. Maengkom sempat mengunjungi Matandau, ibu kota Mori saat itu pada 19 April 1906 dan mengadakan pembicaraan serius dengan raja keesokan harinya. Pada kesempatan itu, raja mengungkapkan permasalahan internal yang terjadi di kerajaannya dan ia telah mengupayakan rekonsiliasi, namun belum membuahkan hasil. Kegagalan ini dikarenakan hasutan Ambe Maa yang melarang para kepala kampung (*mia mota'u*) berdamai dengannya. Maengkom menawarkan jasa untuk menjadi perantara antara raja dengan pemerintahan sipil Hindia Belanda (*civielen Gezaghebber*) yang berkedudukan di Poso, tetapi raja menolaknya dengan alasan ingin menyelesaikan permasalahan intern di kerajaannya dulu.

Ketika ditanya mengenai jumlah orang yang siap berperang di kerajaannya, raja memberikan keterangan dengan jujur. Fakta ini memperlihatkan bahwa raja memperhatikan pertahanan dan keamanan di negerinya karena mengetahui secara pasti data banyaknya prajurit di Mori. Ia menyadari bahwa informasi ini dibutuhkan pemerintah kolonial sebagai bahan pertimbangan menyerang negerinya, mengingat bahwa hingga saat itu hanya Mori saja yang belum tunduk di bawah payung kekuasaan Hindia Belanda. Kendati demikian, Raja Mori tidak gentar menghadapinya.

Meskipun telah memperoleh data-data yang dibutuhkan, ternyata Belanda tidak memilih jalan konfrontasi. Mereka memanfaatkan perpecahan internal di Mori sebagai akibat politik pecah belah yang telah dilakukan sebelumnya. Belanda akan tampil sebagai "juru damai" yang menyelesaikan permasalahan raja dengan rakyatnya itu. Bila

Belanda dapat membereskannya, diharapkan Mori akan bergantung dan mengakui kekuasaan Belanda. Pemerintah kolonial lantas mendekati kaum yang memusuhi Raja Mori di kawasan Mori Atas. Raja Mori diundang ke Wawombau guna membicarakan penyelesaian konflik di antara mereka. Pertemuan yang dilangsungkan pada November 1906 membuahkan kesepakatan sebagai berikut.

- Kerajaan Mori sepakat mengikat perdamaian abadi dengan daerah taklukannya di Mori Atas.
- Para pemuka masyarakat di Mori Atas bersedia membayar upetinya kepada raja Mori seperti sedia kala.
- Raja Mori memberikan izin bagi pemerintah kolonial mendirikan kantor perwakilannya di Kolonodale.
- Pemukiman warga akan ditata lebih baik demi meningkatkan kesehatan mereka.
- Kerajaan Mori bersedia mendukung pembangunan jalan antar kampung demi memudahkan transportasi.

Strategi pemerintah kolonial dengan bertindak sebagai mediator memang terbukti jitu. Berdasarkan butir-butir perjanjian diatas Belanda memang mendapatkan apa yang diinginkannya, yakni mendirikan kantor perwakilan di Mori. Dengan demikian, upaya memperluas kekuasaannya tinggal selangkah lagi dilakukan.

Raja Mori mematuhi butir kesepakatan di atas. Ia mengerahkan rakyatnya membangun fasilitas perkantoran dan perumahan bagi pegawai Belanda yang sedianya akan ditempatkan di Mori. Jalan sepanjang 100 km yang menghubungkan pusat pemerintahan Mori di Matandau dengan daerah sekitarnya selesai pula dibangun kurang lebih pada 1907. Pemerintah kolonial Belanda mulai menempatkan pasukannya pada Mei 1907 di bawah pimpinan Lettu Infanteri H.M. Matthes. Pasukan yang ditugaskan di Kolonodale ini diberi wewenang mengawasi penguasa setempat dan rakyat yang bekerja rodi demi kepentingan penjajahan.

Kendati demikian, rakyat kerap menolak kerja rodi membangun jalan yang dipaksakan kepada mereka karena perlakuan tidak manusiawi Belanda beserta kaki tangannya. Pasukan yang dipimpin Letda Infanteri B.E. Kies melakukan tindak kekerasan terhadap rakyat pada Juni 1907 karena hasil pekerjaan membangun jalan dirasa kurang memuaskan. Sebenarnya, keterlambatan ini disebabkan sederhananya peralatan yang mereka miliki. Namun, Belanda mencerca rakyat Mori sebagai pemalas

dan susah diatur. Kies berniat mengunjungi Raja Mori dan mendesak ia agar memaksa rakyatnya bekerja lebih keras, tetapi raja tidak berada di istananya karena sedang melakukan kunjungan kerja ke Mori Atas. Demi melampiaskan amarahnya, Kies mengobrak-abrik Istana Mori.

Penghuni istana hanya diam saja menyaksikan tindakan anarkis Kies beserta pengikutnya. Sesungguhnya, tidak mustahil bagi mereka mengadakan perlawanan. Hanya saja menurut adat Mori perlawanan baru boleh diberikan bila ada perintah raja. Yang dapat mereka lakukan adalah melaporkannya secepat mungkin kepada raja. Marunduh Datu ri Tana sangat marah sekali menyaksikan istananya telah dirusak oleh Belanda. Ia ingin membalas penghinaan tersebut, tetapi pasukan Belanda tidak ada lagi di sana.

Raja Marunduh III mengundang para pemuka kerajaannya guna membicarakan insiden di atas. Orang yang telah menghina harkat dan martabat raja memang seharusnya dijatuhi hukuman mati. Mereka kemudian sepakat membunuh pasukan Belanda yang telah menodai istana dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Pertama-tama, mereka akan menghentikan seluruh kegiatan kerja paksa guna memancing kehadiran Belanda. Apabila pasukan kolonial sudah datang menanyakan musabab dihentikannya pekerjaan, rakyat diperintahkan menyambut dengan penuh sopan santun agar tak menimbulkan kecurigaan, bahkan sebuah pesta akan dipersiapkan demi mengalihkan perhatian pasukan kolonial serta menimbulkan kesan bahwa mereka disambut dengan baik. Di saat mereka lengah barulah akan diberikan aba-aba dan kaum pria yang telah bersiap dengan senjatanya bergerak menghabisi nyawa pasukan penjajah tersebut.

Tak berapa lama berselang, Lie Tiang Ang, juru bahasa pemerintah kolonial, menyampaikan kabar bahwa seorang pejabat Belanda beserta pasukannya akan datang ke ibu kota Mori. Raja dengan senang hati bersedia menerimanya. Pada 8 Juli 1907, Matthes beserta 17 orang pasukannya tiba di ibu kota. Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh raja, rakyat menyambut mereka dengan santun. Mereka tidak merasa curiga sedikitpun karena raja telah menyetujui keinginan pasukan Belanda tersebut mendata tambahan pekerja rodi. Matthes kemudian meneruskan perjalanannya ke kampung Ranoitole dengan hanya ditemani 4 orang pengikutnya dan disambut oleh Kies. Rakyat Ranoitole juga menyambutnya dengan ramah-tamah. Sementara itu, anggota pasukan Matthes lainnya tetap tinggal di Matandau.

Ketika saatnya dirasa tepat, raja mengadakan jamuan makan bagi pasukan Belanda yang menginap di ibu kota kerajaannya pada 19 Juli 1907. Kaum pria yang telah menyembunyikan senjatanya bersiap siaga di sekitar tempat berlangsungnya pesta. Sekonyong-konyong-konyong raja meneriakkan "hio" dan terdengarlah suara genderang perang. Para prajurit Belanda (KNIL) yang lengah menjadi sasaran empuk parang rakyat hingga tewas semuanya. Lie Tiang Ang juga hendak dibunuh, tetapi salah serang putra raja mencegahnya dengan mengatakan bahwa juru bahasa itu tidak terlibat dalam perusakan Istana Mori. Agar berita ini tidak tersebar ke telinga Belanda, Lie Tiang Ang sementara ditahan di istana Mori. Selain itu, juga demi menjaga keselamatan dirinya, Matthes dan Kies yang berada di Ranoitoloe tak luput dari pembunuhan. Hanya satu orang saja anggota pasukan Belanda di sana yang berhasil meloloskan diri.

Para pemuka kerajaan menyadari bahwa lolosnya pasukan tersebut akan memicu serangan terhadap Mori. Oleh karena itu, mereka segera menyiagakan pasukan Mori. Pertahanan terakhir Mori dipindahkan ke Wulanderi dan Ibu kota Matandau dikosongkan karena telah diketahui oleh musuh. Belanda memandang bahwa pembunuhan terhadap kaki tangannya ini merupakan pernyataan perang. Tiga brigade pasukan elite pemerintah kolonial yang dikenal sebagai *marschaussee* (marsose) diberangkatkan ke Mori dan tiba di Bungintimbe pada 3 Agustus 1907. Peristiwa ini merupakan awal Perang Mori II.

Belanda mendekati Mokole Kamesi di Ngusumbatu yang pro-Belanda dan hendak memanfaatkannya sebagai penunjuk jalan. Hal ini membangkitkan dilema dalam dirinya karena menyadari bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan dirinya dianggap sebagai pengkhianat. Akibat tekanan mental ini, Mokole Kamesi menderita diare berat dalam perjalanan sehingga diizinkan pulang ke Ngusumbatu. Tugasnya digantikan oleh pengawal pribadinya bernama Abu. Pasukan marsose Belanda menghadapi serangan sengit pada 16 Agustus 1907 dari angkatan perang Mori yang bertahan di Benteng Duake, pelindung bagi pertahanan terakhir di Wulanderi. Benteng ini kemudian jatuh ke tangan Belanda dan dibumihanguskan.

Sasaran berikutnya tentu saja adalah benteng Wulanderi. Berdasarkan pengintaian tidak tampak adanya aktivitas apapun di kubu pertahanan tersebut sehingga Belanda menduga bahwa Wulanderi telah dikosongkan. Pada 17 Agustus 1907 pasukan marsose Belanda bergerak ke Wulanderi. Ternyata Raja Marunduh III sebelumnya

memerintahkan kepada para penduduk agar mengungsi lewat pintu belakang. Sementara itu, raja yang gagah berani ini beserta para pengikutnya menantikan kedatangan Belanda. Begitu pasukan marsose mendekat mereka disambut oleh dentuman meriam dari Benteng Wulanderi. Tentu saja tembakan ini mengejutkan mereka karena menyangka benteng tersebut telah kosong. Pasukan marsose segera membalas serangan tersebut dan melangkah maju setapak demi setapak. Garis depan pertahanan Mori berhasil dilumpuhkan. Kali ini, Raja beserta putranya turun sendiri ke medan menyongsong kehadiran musuh.

Menjelang tengah hari tak terdengar lagi suara tembakan. Raja Marunduh III gugur sebagai kusuma bangsa dalam serangan Belanda ini. Mangkatnya raja menimbulkan kedukaan mendalam bagi rakyat Mori sehingga mereka mengalami patah semangat dan menyerah kepada Belanda. Dengan demikian, pupus sudah kemerdekaan dan kedaulatan Mori. Segenap biaya bagi ekspedisi militer ini dibebankan pada rakyat sebesar 1 Ringgit (2,5 Gulden) per orang. Bagi yang tak mampu membayar diwajibkan ikut kerja rodi.

f. Kerajaan Mori Hingga Era Kemerdekaan

Sepeninggal Raja Marunduh III, yang diangkat sebagai Raja Mori adalah Mokole Ede Kamesi (1907–1928). Pusat pemerintahan dipindahkan ke Sampalowo dan Kerajaan Mori kini menjadi bagian Hindia Belanda. Berdasarkan administrasi pemerintahannya, Mori dimasukkan dalam *Afdeeling* Luwu dan bersama dengan Bungku disatukan menjadi *Onderafdeeling Oost-Kust van Celebes* (Pantai Timur Sulawesi). Status swapraja kemudian diberikan kepada Mori. Belanda melakukan penataan lebih jauh dengan membagi Swapraja Mori menjadi empat distrik, yakni Ngusumbatu, Sampalowo, Kangua, dan Soyo–yang masing-masing dikepalai seorang *regent* (kepala distrik). Pada 1924, *Onderafdeeling Oost-Kust van Celebes* dipisahkan dari *Afdeeling* Luwu dan dijadikan bagian Karesidenan Manado. Belanda menciptakan dua *afdeeling* di Sulawesi Tengah, yakni Poso dan Donggala. Bekas *Onderafdeeling Oos-Kust van Celebes* lantas digabungkan dengan *Afdeeling* Poso.

Pada masa pemerintahan Raja Ede Kamesi, terjadi peristiwa berdarah berupa pembunuhan terhadap pasukan pemerintah kolonial Belanda pada 1921. Pemicunya adalah tindakan amoral terhadap wanita-wanita Mori yang dilakukan oleh mereka. Karena menyadari bahwa anggota pasukannya yang bersalah, Belanda tidak menurunkan ekspedisi militer apapun guna menghukum pelakunya. Rakyat

yang diperintahkan bekerja membangun jalan dan jembatan tidak lagi melakukan pembangkangan karena menyadari arti penting proyek yang mereka kerjakan itu. Sebelumnya, mereka telah menerima penjelasan bahwa pembangunan jalan beserta jambatan itu bukan hanya demi kepentingan pemerintah, tetapi akhirnya rakyat juga yang akan menuai manfaatnya. Pada 1923, pusat pemerintahan Mori dipindahkan ke Kolonodale guna memperlancar roda pemerintahan. Raja memperoleh tempat kediaman baru yang kemudian menjadi Istana Kerajaan Mori.

Karena usianya yang telah lanjut, Raja Ede Kamesi dipensiunkan oleh pemerintah Belanda dan digantikan oleh Owulu Marunduh (1928–1950). Wilayah Swapraja Mori ditata kembali pada 1942 dan dibagi menjadi tiga distrik, yakni Tomata yang beribu kota di Tomata dengan Pirau Marunduh sebagai kepala distriknya; Ngusumbatu yang beribu kota di Tinompo dengan Makita Marunduh sebagai kepala distriknya; dan Petasia yang beribu kota di Kolonodale dengan Mainda Rumampuo sebagai kepala distriknya.

Ketika berlangsung serbuan bala tentara pendudukan Jepang, komandan detasemen pasukan Belanda di Kolonodale bernama Letnan Satu J.A. de Jong menyatakan menyerah tanpa syarat pada 10 Maret 1942. Meskipun demikian, ia masih melakukan perang gerilya melawan Jepang hingga tertangkap pada Agustus 1942. Mori kemudian jatuh ke tangan bala tentara Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat. Meskipun demikian, baru pada 23 Agustus 1945 pesawat terbang Sekutu menjatuhkan pamflet di Mori yang isinya mengabarkan kekalahan Jepang. Berita tentang proklamasi kemerdekaan RI juga terlambat sampai di Mori sehingga sebagian besar rakyat belum mengetahuinya. Besau Marunduh, salah seorang putra Raja Mori, menjadi anggota Pemuda Merah Putih yang bertujuan mempertahankan kemerdekaan RI.

Belanda dengan NICA-nya membonceng kedatangan pasukan Sekutu dan berupaya menegakkan lagi kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk berbagai negara boneka, salah satu di antaranya adalah Negara Indonesia Timur (NIT). Sebagai persiapan membentuk negara boneka ini, Belanda mengadakan Konferensi Denpasar dengan mengundang para raja dan tokoh-tokoh terkemuka di kawasan tersebut. Raja Owulu Marunduh telah lanjut usia sehingga tugas-tugas pemerintahan diserahkan kepada Pirau Marunduh. Ia diminta pula mewakili Raja Mori menghadiri Konferensi Denpasar. Besau Marunduh yang mendukung Republik ditahan pada 16 Desember

1946 dan dijatuhi hukuman pengasingan ke Makassar. NIT sendiri terbentuk setelah berakhirnya Konferensi Denpasar dengan Cokorda Gede Raka Sukawati sebagai presidennya. NIT pada gilirannya menjadi bagian bagian Republik Indonesia Serikat (RIS).

Menjelang akhir RIS, terjadi persaingan antara kelompok yang tetap menghendaki bentuk federal dengan berbagai negara bagiannya melawan pendukung negara kesatuan. Belanda tentu saja berada di balik kaum federalis. Pertikaian ini berpengaruh juga terhadap Mori. NICA berkeinginan menyingkirkan para pendukung negara kesatuan di Mori dan melalui Kontrolir M.D. Thijs melakukan campur tangan terhadap suksesi kerajaan tersebut. Secara hukum adat, Pirau Marunduh, putra mahkota Mori, adalah tokoh yang paling berhak menggantikan Raja Owulu Marunduh apabila ia mangkat, tetapi M.D. Thijs berupaya mengubah ketetapan adat ini dengan menyelenggarakan acara pemilihan calon raja.

Raja Owulu Marunduh yang saat itu sakit keras beserta Pirau Marunduh menentang keras gagasan M.D. Thijs itu. Namun, Thijs bersikeras bahwa ada kerabat Kerajaan Mori lainnya yang juga merasa berhak menduduki singgasana Mori. Salah seorang di antara mereka adalah Maranua Lawolio yang menikah dengan kakak perempuan Pirau Marunduh yang bernama Wehadima Marunduh. Menimbang kondisi kesehatan ayahnya dan juga tak menghendaki perpecahan dalam keluarga Kerajaan Mori, Pirau Marunduh akhirnya menerima usulan M.D. Thijs.

Pemilihan calon pengganti raja diadakan pada 20 Februari 1950 dengan menghandirkan empat calon, yakni Pirau Marunduh, Maranua Lawolio, Sungka Marunduh, dan Mainda Rumampuo. Sebenarnya, Thijs dengan licik telah merekayasa agar Mainda Rumampuo yang pro-federalis keluar sebagai pemenangnya demi mendongkel Pirau Marunduh, pendukung Republik. Mainda Rumampuo berhasil meraup suara terbanyak dalam pemilihan tersebut. Sementara itu, kaum pendukung negara kesatuan yang menghendaki penyatuan dengan RI makin merapatkan barisannya sehingga tak jarang menimbulkan bentrokan. Di tengah-tengah situasi semacam itu, Raja Owulu Marunduh mangkat pada 18 Mei 1950.

Raja Owulu Marunduh dimakamkan sehari kemudian, yakni pada 19 Mei. Meskipun demikian, tidak dilakukan upacara serah terima secara adat kepada Mainda Rumampuo yang sebelumnya telah terpilih sebagai calon pengganti Raja Mori. Tidak pula ia hadir dalam upacara perkabungan bagi almarhum. Hal ini mengisyaratkan

bahwa Mainda Rumampuo tidak diakui sebagai Raja Mori. Pirau Marunduh juga tak hadir pada kesempatan tersebut. Tampaknya kaum kerabat kerajaan menghendaki agar Raja Owulu Marunduh menjadi raja terakhir Kerajaan Mori karena sepeninggalnya tidak ada calon yang dinobatkan sesuai adat. Kendati tidak diangkat sebagai raja, Mainda Rumampuo dilantik sebagai Kepala Pemerintahan Swapraja (KPS) Mori terhitung mulai Oktober 1950.

Dengan diangkatnya Mainda Rumampuo sebagai KPS Mori, jabatan Kepala Distrik Tomata menjadi lowong sehingga harus dicari penggantinya. Sehubungan dengan pengisian jabatan kepala distrik ini, Mainda Rumampuo bertindak tidak demokratis dan memancing aksi protes berbagai pihak. Besau Marunduh mengajukan surat gugatan kepadanya tertanggal 7 November 1950, yang diikuti oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) cabang Tomata pada 15 November 1950. Berdasarkan surat-surat gugatan tersebut tampak nyata bahwa para penggugat tidak mengakui Mainda Rumampuo sebagai raja dan menyebutnya wakil Raja Mori saja. Gugatan ini tidak membuahkan hasil dan bahkan Pirau Marunduh dipindahtugaskan ke Palu. Pemerintah RI menghapuskan sistem pemerintahan swapraja dan bersamaan dengan itu berakhir pulalah status Mori selaku swapraja pada 1961. Dengan demikian, turut pula berakhir masa jabatan Mainda Rumampuo sebagai Kepala Pemerintahan Swapraja Mori.

IX. MOUTONG

a. Cikal Bakal Kerajaan Moutong

Wilayah Kerajaan Moutong kini terletak di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Leluhur raja-raja Moutong berasal dari suku Mandar yang tinggal di Sulawesi Barat. Menurut tradisi lisan, dahulu di Moutong terdapat sebuah kerajaan bernama Lambunu. Karena bahasa yang dipergunakan di Lambunu mirip dengan Buol atau Toli-Toli maka diperkirakan bahwa Raja Lambunu masih berkerabat dengan Raja Toli-Toli. Konon, di Lambunu terdapat seorang bangsawan Mandar bernama Nae. Karena istrinya telah wafat, ia menitipkan anaknya, Manggalatung, kepada Raja Lambunu hingga ia dewasa. Ketika Manggalatung sudah dewasa, ia dijemput oleh ayahnya guna diangkat sebagai Raja Moutong. Sebelumnya, pernah ada perjanjian antara Nae dan Raja Lambunu bahwa Negeri Moutong dan Lambunu akan hidup tolong menolong. Bila yang satu dilanda kesusahan, yang lain akan menolongnya.

Sebelum zaman Manggalatung, telah ada hubungan antara Lambunu dengan Bone. Hal ini dibuktikan dengan adanya sepucuk surat Raja Bone bertuliskan aksara Bugis tertanggal 16 Syaban 1255 H serta hadiah berupa dua batang tombak. Isi surat itu adalah pesan agar Lambunu senantiasa menjalankan adat istiadat Bone dan menghormati kekuasaan kerajaan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kawasan Buol saat itu berada di bawah pengaruh Bone.

b. Perkembangan Kerajaan Moutong

Manggalatung menikah dengan Minarang, putri Raja Moutong, dan mempunyai tiga orang anak, yakni Pondatu, Pawubu, dan Massu. Pondatu mempunyai anak bernama Borman; Pawubu mempunyai anak bernama Lamakannu; dan Massu menikah dengan Lara memperoleh seorang anak bernama Tombolotutu (Poidarawati).
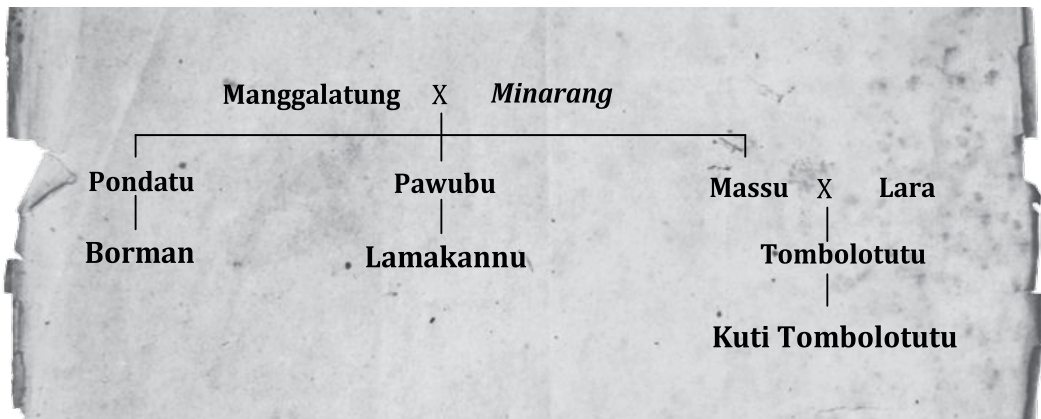
Setelah Manggalatung mangkat, yang menjadi Raja Moutong adalah Pondatu. Pada masa pemerintahannya, Belanda memintanya untuk menandatangani kontrak politik, namun ditolaknya. Oleh karena itu, Belanda kembali menyodorkan kontrak politik kepada Pondatu, tetapi tetap gagal karena ia jatuh sakit dan meninggal.

Sebagai penggantinya, diangkatlah Tombolotutu, yang juga anti-Belanda. Dae (Daeng) Malino, yang ibunya masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan Tombolotutu, diangkat sebagai penggawa. Namun, Dae Malino memendam ambisi menjadi Raja Moutong. Ia lalu pindah ke Tinombo dan menjalin hubungan dengan Belanda. Karena bersedia menandatangani suatu kontrak politik pada 1 Mei 1896, Belanda mengakui Dae Malino sebagai Raja Moutong. Ia kemudian melakukan pembangkangan terhadap Tombolotutu dengan menolak membayar upeti. Itulah sebabnya, Tombolotutu marah sekali kepada Dae Malino yang kemudian melarikan diri

ke Gorontalo. *Jogugu* (Perdana Menteri) Gorontalo berniat menyelesaikan pertikaian antara keduanya. Suatu pertemuan diadakan di Moutong untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Saat kedua orang itu bersedia berdamai dengan berjabatan tangan, tangan kiri Tombolotutu tetap berpegang pada hulu kerisnya, sebagai tanda bahwa ia tetap menganggap Dae Malino sebagai bawahannya.

Daeng Malino beserta Jogugu Gorontalo berjanji bahwa mereka akan datang tiga hari kemudian guna menindaklanjuti perdamaian tersebut. Ternyata, tiga hari setelah itu yang datang justru pasukan Belanda dari Gorontalo menyerbu Moutong. Dalam pertempuran tersebut, gugurlah Laringgi dan Moloagu, dua orang pasukan Tombolotutu. Karena kalah dari segi persenjataan, Tombolotutu terpaksa melarikan diri ke Pulau Walea di Kepulauan Togean, tempat kedudukan saudara seibu tidak sebapak. Belanda terus mengejarnya dan terjadi pertempuran di pulau tersebut. Tombolotutu tidak lama berada di sana dan lari kembali ke kampung halamannya di Moutong. Serangan gencar Belanda memaksanya mundur ke Gunung Lobu serta Gunung Taopa dan akhirnya ia menyusun pertahanan di Bolonosauh. Sesuai dengan ikrar sebelumnya antara Nae dan Raja Lambunu, sebagaimana yang telah dituturkan di atas bahwa Lambunu dan Moutong akan saling tolong menolong, penguasa beserta rakyat di sana memberikan bantuan kepada Tombolotutu. Pertempuran sengit terjadi di tempat ini sehingga Belanda mengalami kerugian besar.

Kendati demikian karena serangan bertubi-tubi pasukan Belanda, pertahanan di sana makin lemah sehingga Tombolotutu beserta laskar Bolanosauh menyingkir ke puncak gunung. Belanda membumihanguskan perkampungan Bolanosauh karena telah memberikan bantuan kepada Tombolotutu. Raja beserta pengikutnya mengundurkan diri ke Toli-Toli dan seterusnya ke Pegunungan Tinombo. Saat ia berada di pegunungan tersebut, Belanda mengirim seorang utusan untuk membujuk Tombolotutu agar menyerah, tetapi ditolak dengan tegas oleh Raja Moutong tersebut. Karena terus menerus dikejar oleh Belanda, mereka melarikan diri ke kampung Bou di daerah Sojol. Karena membantu Tombolotutu, kepala kampung Bou kemudian ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Saat dalam pengasingannya inilah, lahir putra raja yang bernama Datu Pamusu (Raja yang Sedang Berperang) atau Kuti Tombolotutu.

Raja kemudian menuju ke Toribulu untuk meminta bantuan mertuanya, tetapi ditolak dengan alasan keselamatan rakyat. Saat itu, raja telah menderita sakit di kakinya

sehingga harus ditandu. Karena tidak memperoleh bantuan yang diharapkan, raja menyingkir kembali ke Pegunungan Donggala. Belanda mengeluarkan pengumuman bahwa barangsiapa yang dapat menangkap atau membunuh Tombolotutu akan dibebaskan dari pungutan pajak dan kerja paksa (rodi). Raja Banawa, La Makagili Tomadoida juga pernah melindungi Tombolotutu sehingga ia diasingkan ke Makassar pada 1901. La Makagili tidak bersedia menyerahkan Tombolotutu karena menganggap bahwa sasaran peperangan yang dilancarkan oleh Raja Moutong tersebut adalah Dae Malino, yang berambisi merebut kedudukan, bukannya Belanda.

Karena terus menerus terdesak oleh gempuran Belanda dan demi keselamatan rakyatnya, Tombolotutu memutuskan mengakhiri hidupnya. Ia lebih memilih mati ketimbang ditawan oleh Belanda. Tombolotutu meyakini bahwa tidak ada senjata lain yang dapat melukainya, terkecuali keris pusakanya bernama Lacori. Oleh sebab itu, raja memberikan senjata tersebut kepada pengawalnya yang diperintahkan menikamnya hingga tewas. Saat itu, raja sedang duduk bersandar pada batu sehingga ujung kerisnya tertumbuk pada batu dan patah. Dengan tewasnya Raja Tombolotutu, Moutong jatuh ke tangan Belanda. Dae Malino lalu diangkat sebagai Raja Moutong. Selanjutnya, yang bertakhta di Moutong adalah Borman (1917–1924), S. Lahia (1925–1928), dan terakhir Kuti Tombolotutu (I Kuti Puwa Dae Malisa, 1929–1950). Raja Borman pernah diasingkan oleh Belanda ke Donggala karena mengizinkan perkembangan Sarekat Islam (SI) di daerahnya.

c. Sistem Pemerintahan

Meskipun leluhur raja-raja Moutong berasal dari suku Mandar, dalam sistem pemerintahannya tercermin pengaruh Ternate dan Gorontalo. Hal ini tampak pada gelar pejabat-pejabat penting kerajaan, yakni *olongian*, *jogugu* (perdana menteri), *kapitan laut*, *walaapulu* (bendahara kerajaan), *ukum*, dan *madinu* (juru bicara kerajaan). *Jogugu*, *kapitan laut*, dan *ukum* adalah gelar pejabat tinggi yang terdapat di Ternate. *Kapitan laut* mengurusi masalah pelabuhan dan keamanan. Sementara itu, *ukum* mengurusi masalah perhubungan. Semua jabatan tadi, diwariskan secara turun-temurun menurut garis ibu.

X. PALU

a. Cikal Bakal Kerajaan Palu

Sejarah awal Kerajaan Palu dapat diperoleh dari berbagai sumber. Salah satunya adalah buku karya A.C. Kruyt, seorang misionaris Kristen yang berkarya di daerah Sulawesi Tengah, berjudul *De west Toradja's op Midden Celebes*, jilid 1,[408] yang menyebutkan bahwa Palu merupakan kawasan yang didiami belum begitu lama. Orang Palu dahulu tinggal di pegunungan sebelah timur dan barat Palu. Sumber cerita rakyat mengisahkan bahwa pendiri Palu adalah seorang tokoh bernama Pue Nggori (Siralangi) yang berasal dari Desa Wonggi.

Pue Nggori menikah dengan Pue Putih, salah seorang keturunan yang berasal dari penjelmaan ikan *tingaru*. Konon, Pue Putih lahir saat ibunya sedang melarikan diri akibat serangan suku Mandar. Pernikahan di antara mereka berdua terjadi karena Pue Putih pernah diculik oleh pengikut Pue Nggori. Akibatnya, dikirimkanlah para pasukan bersenjata untuk merebut kembali Pue Putih. Namun, ketika pasukan itu tiba di Desa Siranindi, tempat Pue Nggori dan pengikutnya berada, mereka malah disambut oleh serombongan gadis yang membawa sirih sebagai tanda penyambutan dan perdamaian. Karena itu, prajurit-prajurit yang ditugaskan membawa pulang Pue Putih tidak jadi berperang. Kedua pihak melakukan perundingan dan akhirnya Pue Nggori dinikahkan dengan Pue Putih. Keturunan mereka merupakan *Magau* (Raja) Palu dengan Pue Nggori (1796–1805) sebagai rajanya yang pertama.

b. Perkembangan Kerajaan Palu

Pue Putih dan Pue Nggori dikaruniai anak wanita bernama Daeng Lani dan seorang anak laki-laki bernama Jalalembah. Daeng Lani menikah dengan Madika Tatanga dan mempunyai seorang anak lak-laki bernama Kadi Palo (Bulu Palo atau Malasigi Bulupalo). Jalalembah mempunyai putra bernama Mangge Risa. Raja-raja Palu berikutnya setelah Pue Nggori secara berturut-turut adalah I Dato Labungulili (1805–1815), Kadi Palo (1815–1826), Daelangi (1826–1835), Jalalembah (1835–1850), Lamakaraka (1850–1868), dan Mangge Risa (1868–1888). Raja Mangge Risa pernah menyembunyikan seorang pelarian dari Manado yang dicari-cari oleh Belanda pada 1854. Oleh karena itu, Gubernur Makassar datang ke Sulawesi Tengah untuk menyodorkan kontrak pengakuan atas kekuasaan Belanda kepada Raja Banawa, Palu,

---

408. Lihat *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah*, halaman 75.

Tawaili, dan lain sebagainya. Kendati demikian, dengan dipelopori oleh Magau Palu, kontrak yang telah ditandatangani itu dibatalkan.

Raja berikutnya setelah Mangge Risa adalah Yojo Kodi Tomai Sima (ipar Mangge Risa, memerintah pada 1888–1906), putra Lamakaraka atau Tondate Dayo. Ia adalah Raja Palu yang menandatangani kontrak politik berupa Plakat Panjang (*Lange Verklaring*) pada 1 Mei 1888 dan Plakat Pendek (*Korte Verklaring*) pada 12 Desember 1904. Ketika itu, pada 1888, Gubernur Makassar datang dengan tiga kapal perang untuk menekan para raja menandatangani pembaharuan terhadap kontrak 1854. Dengan demikian, para raja di Sulawesi Tengah terpaksa menandatanganinya. Setelah itu, secara berturut-turut Palu diperintah oleh Parampasi (1906–1921), Janggola (1921–1949), dan terakhir Caco Ijazah (1949–1960).

Organisasi Sarekat Islam (SI) mendapatkan sambutan yang cukup hangat di kalangan rakyat Palu. Namun, raja kurang menyukainya karena dianggap dapat mengurangi kekuasaannya. Oleh karenanya, Raja Palu saat itu, Parampasi, mendirikan organisasi tandingan bernama Persatuan Raja Palu (PRP), yang beranggotakan aparat-aparatnya beserta para kepala kampung. Kendati demikian, SI tetap meluas, baik di Palu maupun kerajaan tetangganya.

Raja Caco Ijazah terkenal akan dukungannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menuntut pembubaran Negara Indonesia Timur (NIT). Tuntutan ini diwujudkan dengan pembentukan panitia yang dikenal sebagai Panita Pernyataan 6 Mei 1959 di Palu. Di hadapan massa yang berasal dari Palu, Biromaru, Dolo, dan sekitarnya, Caco Ijazah membacakan suatu maklumat yang berbunyi.

MAKLUMAT[409]

Pucuk Pimpinan Badan Keamanan Rakyat (BKR).

1. Mulai 6 Mei 1950 jam 7 pagi, tiga kerajaan Palu, Sigi Dolo, dan Kulawi beserta seluruh rakyatnya, memproklamirkan dengan ini "telah melepaskan diri dari Negara Indonesia Timur dan menggabungkan diri dengan Republik Indonesia."
2. Segala urusan pemerintahan harus dilalui pucuk pimpinan BKR.
3. Segala urusan umum tetap berjalan seperti biasa, umpamanya urusan pemerintahan, sekolah-sekolah, toko-toko, harus dibuka, penjualan keperluan sehari-hari di pasar harus berlaku seperti biasa.
4. Kalau masuk keluar onderafdeeling Palu harus dengan izin dari BKR permintaan ini boleh disampaikan dengan surat fonogram.
5. Jam malam mulai jam 6 petang sampai jam 5 pagi.
6. Keamanan dijaga oleh Polisi Republik Indonesia dan badan PKR (Penjaga Keamanan Rakyat).
7. Pemeriksaan rumah-rumah dan bangunan-bangunannya hanya boleh dilakukan oleh mereka yang memegang surat izin dari ketua BPR.
8. Segala senjata api termasuk juga senapan angin berkaliber 5 ½ harus diserahkan dalam tempo 3 hari sampai 9 Mei 1950 pukul 12 tengah hari dan yang bersangkutan akan diberi surat tanda terima. Yang boleh memegang senjata api hanya Polisi Republik Indonesia dan APRIS.
9. Diserukan kepada umum untuk membantu menjaga keamanan.
10. Jam malam tidak berlaku bagi mereka yang memegang surat izin istimewa dari pucuk pimpinan BKR.
11. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ini akan dilakukan tindakan keras.
12. Selesai.

Penjaga Keamanan

Bahagian Polisi : ttd : Lumowa

Bagian BKR ttd : R. Soengkono

Palu, 6 Mei 1950

Pucuk Pimpinan BKR

ttd. Caco Ijazah

409. *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah*, halaman 165–166.

Maklumat di atas mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap NIT bentukan Belanda. Oleh karena itu, masyarakat Palu dan sekitarnya menghendaki penyatuan kembali dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai buah perjuangan kemerdekaan.

c. Sistem Pemerintahan

Kerajaan Palu merupakan gabungan empat negeri, yakni Kampung Baru, Siranindi (sekarang bernama Kamonji), Lere, dan Besusu. Keempatnya membentuk dewan adat Palu yang disebut *Patanggota*. Raja Palu memerintah dengan didampingi dewan adat ini.

XI. PARIGI

Wilayah Kerajaan Parigi terletak di Kabupatan Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Raja-raja yang pernah memerintah Parigi adalah Makagero atau Magau Lomba (1515–1533), Boga (1535–1557), Ntavu (1557–1579), Langimoili (1579–1602), Ibrahim atau Tonikota (1602–1627), Ma'ruf atau Janggo (1627–1661), Ntadu (1661–1690), Palopo atau Kodi Palo (1690–1724), Mansyur atau Bombo Onge (1724–1760), Abduh atau Pangabobo (1760–1792), Puselembah (1792–1821), Sawali atau Baka Palo (1821–1855), Raja Lolo atau Paledo (1855–1880), Njengi atau Djengintonambaru (1880–1898), Hanusu (1898–1927), Tagunu (1927–1960), Andi Ada Tagunu, Andi Palawa Tagunu, dan Andi Tjimbu Tagunu (semenjak 2007).[410]

Menurut sumber lain, rajanya yang bernama Ijale tercatat menandatangani *Lange Verklaring* (Plakat Panjang) pada 24 Maret 1863. Selanjutnya, Raja Parigi yang bernama Njengi atau Idjenggi kembali dipaksa menandatangani Plakat Panjang pada 29 Mei 1897. Vilolo atau Vinono yang seharusnya menggantikan Raja Lolo tak bersedia dinobatkan sebagai raja karena tidak puas terhadap pemerintah kolonial Belanda. Dia beserta putranya yang bernama Hanusu merupakan penentang Belanda yang gigih. Vilolo pernah bersumpah tak akan berhenti melawan Belanda yang pernah berkata, "*Mabula boga rivana, pade meta'a mabaeva Balanda.*"[411] yang artinya "Sebelum seluruh monyet di hutan berubah menjadi putih warna bulunya, tidak akan berhenti melawan Belanda." Perlawanan ini akhirnya dapat dipatahkan oleh

---

410. Informasi diperoleh dari facebook Bapak Muhammad Oza Tagunu (*http://www.facebook.com/profile.php?id=1351971987&ref=ts#!/note.php?note_id=205102786202293*), diunduh pada 26 Juli 2011.
411. *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah*, halaman 108.

Belanda dengan dibuangnya Hanusu ke Tondano. Akhirnya, pada 1917, Hanusu dikembalikan ke Parigi dan diangkat sebagai raja. Namun, ia harus menandatangani *Korte Verklaring* pada 5 Februari 1917. Raja Parigi berikutnya, Tagunu (1927–1960), disahkan kedudukannya oleh pemerintah kolonial pada 21 Februari 1930. Dari segi pemerintahan, kerajaan Parigi dibagi menjadi empat wilayah, yakni Parigi Mpuu, Masigi, Toboli, dan Dologo.[412] Keempatnya membentuk dewan adat Parigi yang disebut *Patangggota*.

Foto bersama Yang Mulia Raja Andi Tjiembu, Cucu Raja Tagunu dari Kerajaan Parigi Saat Berlangsungnya Silatnas Raja/ Sultan Nusantara II Pada 25-26 Juni 2011
(foto koleksi pribadi)

XII. POSO

a. Cikal Bakal Kerajaan Poso

Wilayah Kerajaan Poso kini terletak di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Menurut penuturan rakyat di sana, pada zaman dahulu terdapat dua orang dewa pria dan wanita yang masing-masing bernama Lai dan Ndara. Karena berbuat suatu kesalahan, Ndara dibuang dari kayangan dan diturunkan ke bumi dengan seutas tali tembaga. Ketika tubuhnya menyentuh permukaan samudera raya, Ndara berubah menjadi daratan yang makin meluas hingga ke tepian langit. Setelah itu, para dewa menurunkan sepasang manusia untuk mengolah bumi beserta segenap isinya. Dalam

412. Lihat artikel *Sekelumit Sejarah Kebudayaan Kaili*, karya Prof. Dr. H.A. Mattulada, dalam jurnal *Antropologi Indonesia*, no. 48, halaman 136.

perjalanan turun ke bumi, manusia-manusia itu harus melewati delapan lapisan langit. Pada masing-masing lapisan mereka melihat, mengamati, dan mempelajari tahapan-tahapan dalam menanam padi sehingga saat tiba di bumi mereka telah memahami caranya dengan jelas. Bersamaan dengan itu, mereka juga membawa berbagai perkakas untuk bercocok tanam dan sebutir telur.

Dari sebutir telur dari kayangan itu menetaslah seekor ayam jantan bernama Manu Tadia, yang menjadi besar dalam waktu singkat. Apabila dikehendaki ayam tersebut dapat memuntahkan benih-benih padi yang diperlukan pasangan manusia dari langit tersebut. Manusia makin banyak jumlahnya sehingga mereka lalu membentuk kelompoknya sendiri-sendiri yang dipimpin oleh *kabose* atau kepala kampungnya masing-masing. Berbagai kelompok yang tersebar itu dinamai menurut tempat kediaman mereka. Sebagai contoh, orang-orang yang menetap di daerah Lage disebut To Lage, orang-orang yang tinggal di Pebato disebut To Pebato, dan demikian seterusnya. Berbagai kampung lalu bergabung dan membentuk kerajaan kecil. Dalam perkembangan selanjutnya, beberapa kerajaan kecil lalu bersatu membentuk kerajaan yang lebih besar. Menurut catatan, pada zaman dahulu di wilayah Poso pernah berdiri berbagai kerajaan, seperti Pamona, Napu, Bada, dan Besoa.[413] Kawasan ini kemudian jatuh ke dalam kekuasaan Kerajaan Luwu sehingga kerajaan-kerajaan di wilayah Poso ini harus mengirimkan upeti ke Luwu. Selain itu, pengaruh Luwu juga tampak dari gelar raja-raja yang dipakai, seperti Raja Pamona yang bergelar *datu*, sama seperti di Luwu.

b. Perkembangan Kerajaan Poso Selanjutnya

Wilayah Poso dihuni oleh berbagai suku dan terbagi atas beberapa kampung atau desa sebagai satuan kemasyarakatan di kawasan tersebut. Pemuka masyarakat yang mengepalai kampung-kampung itu disebut *kabose*. Salah satu *kabose* yang terkemuka pada abad 19 bernama Taroa. Ia menyerahkan pelaksanaan pemerintahan sehari-sehari kepada kaum keluarganya yang berpengaruh. Garoeda, salah seorang kerabat Taroa, mengepalai Kampung Tabongan dan Saiwoese. Kerabat Taroa lainnya, Karebo, menjadi penguasa atas tiga kampung, yakni Tomasa, Makoepa, dan Toragi I. Selain itu, masih-masih ada lagi kampung-kampung lain yang dikuasai para petinggi atau *kabose* masing-masing. Oleh karenanya, Poso bukan kerajaan terpusat, melainkan kumpulan atau federasi berbagai kampung.

413. Lihat *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah*, halaman 37.

Belanda mulai berkuasa di Poso semenjak 1905 ketika mereka berhasil memaksa *Datu* (Raja) Luwu, Daeng Risompa (1901–1935), mengakui kekuasaan Belanda melalui penandatanganan Plakat Pendek (*Korte Verklaring*). Sebagai raja atas seluruh Poso, Belanda mengangkat La Tasa, salah seorang *kabose* yang berpengaruh saat itu. Pengangkatan ini ditujukan bagi kepentingan administratif pemerintahan Belanda atas wilayah tersebut. La Tasa menandatangani suatu kontrak politik dengan Belanda pada 1907 sehingga secara resmi masuklah Poso ke bawah payung kekuasaan Hindia Belanda. Sebelumnya, semenjak 1894 Poso telah dinyatakan sebagai bagian Karesidenan Manado dengan status sebagai *Onderafdeeling* Poso, tetapi para penguasanya masih tunduk di bawah kekuasaan Luwu. Sebagai wakil pemerintah Belanda di sana, ditempatkan seorang kontrolir yang bernama Van Duyvenbode Varkenvisser (1894–1895). Karena rakyat Poso masih takluk kepada Luwu, aparat pemerintah kolonial di sana tidak dapat berjalan dengan baik. Inilah yang menjadi alasan mengapa Belanda menaklukkan Luwu terlebih dahulu dalam suatu ekpedisi militer yang disebut *Zuid-Celebes Expeditie*. Setelah Luwu ditaklukkan, pasukan Belanda bergerak ke Poso dan mengumpulkan para kepala suku atau kampung di sana. Beberapa di antara mereka bersedia mengakui kekuasaan Belanda, tetapi masih ada juga beberapa penguasa lokal yang membangkang perintah Belanda dan menolak hadir sehingga Belanda mengirimkan pasukannya di bawah pimpinan Letnan Voskuil guna menundukkan mereka. Berkat bala bantuan dari pasukan yang dipimpin Kapten Hoedt, pembangkangan itu berhasil dipadamkan. Akhirnya, pada Januari 1906, Belanda mengklaim bahwa daerah Poso dan sekitarnya telah sepenuhnya berada di bawah kendali mereka.

Daerah yang baru dikuasai Belanda tersebut dijadikan satu dengan nama *Afdeeling* Midden Celebes (Sulawesi Tengah) dengan pusat pemerintahan berada di Donggala. Sebagai kepalanya yang bergelar asisten residen diangkat A.J.N. Engelenberg, bekas kontrolir *Onderafdeeling* Poso. La Tasa memiliki sumbangsih besar dalam penyebaran Agama Kristen di Poso, kendati ia masih menganut tradisi leluhurnya. Ia digantikan oleh putranya yang bernama Wongko Lemba Ta Lasa, yang diberi gelar *suco* oleh Jepang pada 1943. Penggantian ini diajukan oleh keluarga Ta Lasa sendiri karena khawatir raja membahayakan dirinya dengan seringnya ia menentang perintah Jepang. Alasan yang disampaikan pada Jepang adalah raja sudah tua dan pikun; sehingga sudah saatnya ia digantikan oleh putranya. Wongko Lemba Ta Lasa menempuh pendidikannya di

Menado pada sekolah Frater Katolik. Selanjutnya, ia magang di pemerintahan Luwu dan digaji oleh ayahnya sendiri.

Setelah Jepang mengalami kekalahan, Wongko Lemba La Tasa bergabung dengan kelompok Merah Putih yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia membentuk pemerintahan lokal di daerahnya dan mengambil alih kekuasaan dari tangan balatatentara Jepang. Selanjutnya, untuk mempertahankan kemerdekaan dibentuk suatu barisan yang dipimpin oleh Yakob Lamayuda, mantan perwira Heiho pada zaman Jepang. Wongko Lemba La Tasa membentuk pula Panitia Persiapan Kemerdekaan yang terdiri dari tujuh orang anggota partai politik di Poso. Tetapi, tidak lama kemudian masuklah tentara Belanda yang membonceng pasukan Sekutu guna menegakkan kembali kekuasaan pemeritah kolonial di sana. Pasukan Belanda yang disebut NICA itu mendarat di Parigi pada September 1945 dan tiba di Poso pada 1 November. Kaum pendukung Republik sudah siap menyerang mereka, tetapi raja mencegahnya. Bahkan kaum Republikan bersedia menyerahkan sebagian senjata rampasan dari Jepang kepada Sekutu, walaupun sebagian senjata lainnya dibuang ke sungai.

Poso bersama dengan 14 kerajaan atau swapraja lainnya di Sulawesi Tengah lalu menjadi bagian Negara Indonesia Timur (NIT) dan dijadikan satu wilayah, yakni *afdeeling* Poso dan Donggala. Negara bentukan Belanda itu ternyata tidak bertahan lama dan bubar pada 17 Agustus 1950 sehingga Poso kembali menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Sosial Kemasyarakatan

Legenda masyarakat mengenai turunnya manusia melalui delapan tingkatan langit hendak menjelaskan mengenai asal muasal kegiatan bercocok tanam di sawah, karenanya boleh disimpulkan bahwa mata pencaharian utama penduduk adalah pertanian. Berdasarkan adanya delapan tingkatan langit menurut legenda, masyarakat saat itu tentunya membagi tahapan mengolah sawah menjadi delapan tahap pula, tetapi hingga selesai disusunnya buku ini, belum diperoleh rincian bagi masing-masing tahapan tersebut.

XIII. SIGI

a. Cikal Bakal Kerajaan Sigi

Wilayah Kerajaan Sigi kini termasuk Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala. Menurut cerita rakyat, cikal bakal kerajaan Sigi berasal dari suatu tempat bernama Koroue yang terletak di Pegunungan Nokilalaki. Alkisah, pada zaman itu belum ada raja dan masyarakat masih hidup dalam kelompok-kelompok kesukuan yang dipimpin oleh seorang *madika* (raja atau kepala suku). Keadaan sangat kacau karena masing-masing suku saling bermusuhan satu sama lain. Salah seorang kepala suku bernama Tondari ingin mengakhiri kondisi kacau ini dan berdoa memohon kepada dewa agar diturunkan seorang raja demi mendamaikan serta mengatur mereka semua.

Suatu kali, Tondari menemukan daun *tavavako* yang dapat mengeluarkan suara dan berkata “Aku ada di sini." Daun ajaib itu dibawanya pulang. Ternyata, dari daun ajaib itu keluarlah seorang wanita cantik bernama Tavatea. Tondari kemudian menikah dengannya dan mempunyai seorang anak perempuan bernama Banjambu, yang menikah dengan Madika Wonggo bernama Towojagu. Mereka menurunkan tujuh anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Di antara anak mereka yang laki-laki, ada yang menjadi raja-raja di Sausu, Kaleburu (Banawa), Dolo, dan Ganti. Sementara itu, meski telah menikah, anak perempuannya tidak mempunyai keturunan dan konon berdiam di Tuwa.

Cerita rakyat kembali menuturkan bahwa rakyat Sigi kemudian berangsur-angsur berpindah ke dataran rendah. Mereka awalnya menetap di Koroue dan selanjutnya pindah lagi ke Tanah Wobo dan Wongo. Di Biromaru, didapati pula kisah rakyat mengenai seorang tokoh bernama Toadawiro. Saat menebang sebatang bambu kuning, dari dalamnya keluar seorang putri bernama Resimbulawa. Toadawiro melamarnya, namun ditolak oleh putri itu dengan alasan bahwa calon suaminya akan turun sebentar lagi dari langit. Tidak lama kemudian, terjadilah hujan badai disertai kilat beserta guruh, dan turunlah calon suami Resimbulawa. Mereka kemudian menikah dan dikaruniai seorang putri bernama Siti Manuru. Anak perempuan mereka itu menikah dengan Dukarama dari Tawiala, yang terletak di selatan dataran tinggi Palu. Mereka dikaruniai seorang putra dan putri. Maibuka, putri mereka, menikah dengan Bakulu, Madika Sigi. Menurut legenda, terdapat suatu kerajaan di Desa Tuwa yang kemudian bergabung dengan Sigi. Penyatuan antara Sigi dan Tuwa terjadi melalui

perkawinan politis antara Bakulu dan Naibula dari Tuwa. Menurut tradisi, sebelum seorang *madika* melamar *madika* lainnya, diadakan pertandingan antara pengikut mereka. Kalau pengikut pihak pelamar menang, pinangan akan diterima. Sebaliknya bila kalah, lamaran akan ditolak. Karena pengikut Bakulu memang, lamaran itu diterima dan dilangsungkan pernikahan antara kedua *madika* tersebut.

Dengan demikian, bersatulah Sigi dan Tuwa sehingga Bakulu dianggap sebagai Madika Sigi pertama setelah penyatuan kedua kerajaan tersebut. Ia menikah pula dengan Tangijamaya, seorang putri dari Siranindi, Palu. Bakulu adalah Madika Sigi yang melakukan konsolidasi kerajaannya dan setelah itu memperluasnya melalui ikatan perkawinan. Berkat penyatuan Sigi dan Tuwa, wilayah Sigi menjadi makin luas. Pada perkembangan selanjutnya, tradisi lisan menyebutkan bahwa Sigi pernah terlibat peperangan dengan Palu dan penyerbuan ke Buol. Karena Buol berhasil ditaklukkan, wilayah Sigi pada sekitar abad 15 meliputi Buol pula. Pengaruh Belanda mulai masuk ke Sigi saat raja beserta dewan adatnya dipaksa menandatangani pengakuan terhadap kekuasaan Belanda pada 9 Agustus 1891.

Pewaris singgasana Bakulu adalah putrinya yang bernama Siralie (Sairali Intobongo), selaku Madika Sigi ke-2. Ia menikah dengan Intoviva (Intowiwa) dari Besoa. Siralie meninggal dan digantikan oleh saudara laki-lakinya yang bernama Tanjalabu selaku Madika Sigi ke-3. Tondalabua menikah dengan Danilingi (Danitinggi) dari Dolo. Ia digantikan oleh putra Siralie bernama Newanalemba, yang menikah dengan Sairalangi (Sariolagi), putri Tanjalabu. Dari perkawinan ini lahirlah seorang putri bernama Pue Bawa (Pue Bua), yang mengantikan orang tuanya sebagai Madika Sigi ke-4. Puwe Bawa menikah dengan putra Madika Dolo bernama Mogara. Pernikahan ini dikaruniai tiga orang anak, yakni Garuda yang menikah dengan Pue Dae dari Biromaru; Bakakeku (seorang putri), yang menikah dengan Tondalabua; dan Beka Bingge (Bakabinggi, seorang putri), yang konon menjadi leluhur para Madika Dolo. Madika Sigi ke-5 adalah Bakakeku beserta suaminya Tondalabua yang memerintah bersama-sama. Putra mereka, Lolontomene beserta istrinya, Intobonga, menjadi Madika Sigi ke-6. Singgasana Sigi lalu diwarisi oleh Daeng Masiri, putra Lolontomene.

b. Perkembangan Kerajaan Sigi

Daeng Masiri memerintah pada awal abad 20. Tetapi di samping ia masih terdapat tokoh berpengaruh di Sigi bernama Karanjalembah (Toi Dompo atau Toma Dompo). Ia adalah kemenakan Daeng Masiri yang bersikap anti anti Belanda. Sebagai tokoh

yang disegani di Sigi, raja kerap meminta pertimbangan Karanjalembah mengenai urusan pemerintahan, termasuk dalam hal menghadapi Belanda. Karanjalembah dengan tegas menolak hadirnya kekuasaan Belanda di Sigi. Kendati Kerajaan Sigi sudah pernah menandatangani perjanjian dengan Belanda, tetapi Karanjalembah tidak bersedia lagi tunduk pada perjanjian dengan penguasa asing tersebut. Menurutnya, sebagai pewaris tanah pusaka leluhurnya sendiri tak selayaknya hidup di bawah kekuasaan Belanda. Keharusan membayar pajak kepada Belanda juga menambah kebenciannya.

Karanjalembah menyadari bahwa cepat atau lambat Belanda akan menginvasi negerinya. Oleh karena itu, ia mulai membangun pertahanan Sigi. Selain senjata tradisional, Sigi membeli beberapa pucuk senapan dan meriam kecil dari Singapura. Sebelum Belanda berhasil menduduki lembah Palu, Karanjalembah menggalang kaum kerabatnya, *Madika* (Raja) Palu, Tawaili, Parigi, Kulawi, serta Tojo, dan mengajak mereka bersama-sama melawan penjajah, tetapi rencana ini bocor sebelum terlaksana sehingga ketika pasukan Belanda menduduki Pantai Talise, hanya Sigi yang menyongsong kedatangan penjajah tersebut. Meskipun demikian, pasukan Sigi berhasil memukul mundur angkatan perang Belanda sehingga mereka terpaksa kembali ke Donggala.

Karanjalembah merasa dikhianati oleh sekutu-sekutunya sehingga ia mulai bertindak tegas terhadap orang-orang yang memihak Belanda. Beberapa orang yang dianggap kaki tangan Belanda dihabisi nyawanya, seperti seorang juru tulis di Tanaboa (Parigi) yang bekerja kepada pemerintah kolonial. Ia merampas milik Belanda di Tanaboa dan membunuh seorang mandor jalan. Akibatnya, pemerintah kolonial mengambil tindakan tegas guna meredam benih-penih permusuhan ini. Mereka memutuskan menyerang Sigi dari tiga penjuru, yakni melalui Palu, Parigi, dan Poso. Oleh karenanya, demi kelancaran strategi tersebut, Belanda harus menguasai terlebih dahulu ketiga negeri itu. Pada kenyataannya, tak lama kemudian Palu, Parigi, dan Poso, jatuh ke tangan Belanda. Jatuhnya ketiga negeri di atas tak menciutkan nyali Karanjalembah, bahkan ia mengirimkan mata-matanya yang bernama Palukota beserta Mojo meneliti kekuatan angkatan perang Belanda yang dipusatkan di Palu, Parigi, dan Poso.

Sebagai wujud provokasi, Karanjalembah memerintahkan berbagai sabotase, seperti pencurian seekor kuda putih kesayangan komandan pasukan Belanda serta

perampasan bintang jasa *Vierde Kruis* milik *Posthouder* Belanda di Parigi bernama Ince Dahlan. Tindakan ini dimaksudkan sebagai seruan bagi rakyat agar bangkit kembali melawan penjajah. Tentu saja akibat sabotase yang dilakukan di depan hidung Belanda ini, kegemparan timbul di mana-mana. Belanda yang mulai merasa terusik merencanakan serangan terhadap Sigi. Raja Jaelangkara dari Tawaili yang masih kerabat Karanjalembah bersedia dijadikan sandera agar serangan terhadap Sigi ditangguhkan.

Sebagai langkah persiapan menyerang Sigi, Belanda mengutus seorang mata-mata bernama Ince Dahlan ke tempat kediaman Karanjalembah. Ia datang dengan membawa biji candu guna ditukarkan dengan kuda putih milik komandan pasukan Belanda yang telah dicuri oleh para pengikut Karanjalembah. Namun, maksud kedatangan Ince Dahlan yang sebenarnya tercium oleh Karanjalembah sehingga ia dilucuti dan dirampas kudanya, serta dipersilakan pulang ke Palu dengan berjalan kaki. Belanda menyerang Sigi dari arah Sausu dan Palu. Sementara itu, sebagai juru bahasa dan penunjuk jalan, Belanda menggunakan jasa Ince Dahlan. Karena serangan mendadak itu, Karanjalembah tidak siap mempertahankan dirinya, tetapi tetap melancarkan perlawanan sebisa mungkin di Watunonju. Dalam pertempuran itu, korban berjatuhan di kedua belah pihak, tetapi karena kalah dalam persiapan dan persenjataan, Karanjalembah dapat dikalahkan serta ditawan oleh Belanda. Ia kemudian diasingkan ke Sukabumi pada 1905. Peristiwa ini untuk selanjutnya dikenal sebagai Perang Sigi.

Menyadari bahwa ayahnya telah ditangkap Belanda, putra Karanjalembah yang bernama Malasingi menjadi marah. Ia mengamuk sejadi-jadinya dan berhasil menewaskan beberapa pasukan Belanda, tetapi akhirnya gugur. Dua orang kemenakan Karanjalembah, Lamakarate dan Lamasatu, mengadakan pengejaran guna melepaskan rajanya dari tawanan musuh. Pertempuran pecah di Kalukubula, tetapi karena memiliki pasukan cadangan dari Palu, perlawanan rakyat Sigi itu dapat dipatahkan. Demi membebaskan Karanjalembah, Pue Langa, saudara perempuan raja, dan Toma Intolipe, mengadakan perundingan dengan Belanda, tetapi mereka berdua malah ditangkap dan baru dibebaskan setelah ditebus dengan 100 ekor kambing. Akibat penawanan Karanjalembah ini, rakyat Sigi seolah-olah kehilangan pemimpinnya karena semasa perang, Daeng Masiri telah menyerahkan urusan pemerintahan sepenuhnya kepada Karanjalembah.

Sekalipun Karanjalembah telah ditawan oleh Belanda, tetapi perlawanan rakyat Sigi tidak kunjung surut, seperti pergolakan kecil-kecilan yang dipimpin oleh Lasoso, Tuvaya, Kanasoki, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Belanda mendekati Pue Langa (juga dikenal sebagai Intodei atau Pue Toi, 1908–1915) dan mengangkatnya sebagai raja wanita Sigi, yang menandatangani kontrak politik *Korte Verklaring* pada 3 Desember 1908. Ia diminta pemerintah kolonial membujuk rakyatnya agar berhenti memusuhi Belanda. Karena kepatuhan rakyat yang besar terhadap rajanya, mereka pun menghentikan perlawanan. Dalam menjalankan roda pemerintahan Sigi, Intodei dibantu oleh dewan adat Pitunggota dan *tadulako* (pemimpin pasukan) bernama Ponulele. Kendati menghentikan perlawanan, dendam rakyat kepada kaum penjajah yang pernah mengasingkan raja mereka masih membara. Oleh karenanya, kerap diadakan pertemuan rahasia antara Mahasuri, Palarante, serta Lamariapa guna merancang strategi dalam menghadapi Belanda. Ponulele sebenarnya mengetahui hal ini, tetapi tak melaporkannya karena secara diam-diam ia mendukung mereka.

Karena kondisi Sigi yang tak kunjung tenteram, Belanda menyadari betapa besarnya pengaruh Karanjalembah di kalangan rakyat Sigi dan memulangkannya kembali dari pengasingannya di Sukabumi pada 1914 serta mendudukannya lagi sebagai raja. Saat tiba kembali di negerinya, ia disambut secara hangat dan meriah oleh rakyatnya. Belanda yang tidak mempercayai Karajalembah, menempatkan wakilnya yang bernama Haji Sanusi dengan jabatan *bestuur asistent* sebagai pengawas terhadap gerak-gerik Karajalembah. Ternyata Karajalembah masih tetap pada sikapnya semula yang anti penjajahan, secara diam-diam ia mengorganisasi perlawanan. Saat berlangsungnya keramaian di Maenusi, daerah Palolo, Karajalembah berpesan kepada pengikut-pengikutnya agar memulai gerakan. Mereka membangun kubu-kubu pertahanan di hutan lebat Pegunungan Manggalai. Karanjalembah menyampaikan bahwa ia akan menyusul mereka apabila saatnya dirasa tepat. Sayangnya, rencana ini bocor ke telinga penjajah sehingga ia diasingkan kembali ke Sukabumi pada 1915 dan wafat di sana dua tahun kemudian.

Pue Langa atau Intodei diangkat kembali sebagai raja. Sebenarnya, yang lebih berhak menurut adat adalah Simba Sigi. Namun, Intodei mengusulkan kepada Belanda agar ia saja yang tetap menjadi raja, sedangkan Simba Sigi menjadi *madika* Malolo. Usulan ini diterima oleh Belanda dan Pue Langa tetap menjadi raja. Meskipun demikian, karena Pue Langa tidak mengambil tindakan yang tegas terhadap perkumpulan-

perkumpulan rahasia yang menentang Belanda, ia dicopot dari kedudukannya dan digantikan oleh Lamakarate (1915–1936), kemenakan Karanjalembah serta putra Jaelangkara (Raja Tawaili). Semasa pemerintahannya, kondisi Sigi sudah agak tenang, dan para tokoh yang menentang Belanda kebanyakan telah diasingkan. Tokoh yang masih menentang Belanda adalah para Tadulako Lando, seperti Lahulemba, Tirolemba, dan Toma Ipede. Perlawanan mereka dikenal sebagai Perang Lando yang merupakan kelanjutan Perang Sigi. Sama seperti perlawanan lainnya, pemberontakan mereka juga berhasil dipatahkan oleh Belanda. Raja Lamakarate tercatat menandatangani kontrak politik pada 15 November 1916. Ia digantikan lagi oleh Lamasaera (1938–1951) yang disahkan kedudukannya oleh pemerintah Belanda pada 9 Desember 1938. Raja Lamakarate masih berkuasa menjelang berawalnya zaman pendudukan Jepang.

c. Sistem Pemerintahan

Raja Sigi bergelar *madika* dan kerajaan ini sebenarnya merupakan penggabungan tujuh wilayah, yakni Dolo, Bangga, Biromaru, Kulawi, Sibalaya, Sidondo, dan Pakuli.[414] Para pemuka tujuh negeri ini membentuk dewan adat Sigi yang disebut *Pitunggota*.

XIV. TAWAILI

a. Cikal Bakal Kerajaan Tawaili

Kerajaan Tawaili terletak di sebelah timur laut Kerajaan Banawa. Legenda mengenai kerajaan ini menyebutkan bahwa cikal bakal raja-raja Tawaili berasal dari sebuah desa bernama Ranomalei di puncak gunung. Konon, ada seorang laki-laki bernama Nggamba menemukan sebuah daun ajaib yang dapat bergerak ke sana kemari. Ia memetik daun tadi dan menyelipkan ke rambutnya. Beberapa hari kemudian, dari daun tersebut muncul seorang putri yang sedang mengandung. Namun, tidak lama setelah itu, putri tersebut meninggal. Ketika jenazahnya telah dimasukkan ke dalam peti, dari dalamnya terdengar suara ribut-ribut. Orang-orang yang berada di sekitarnya lalu membuka kembali peti tersebut dan menemukan seorang bayi perempuan telah lahir dari jenazah sang putri. Anak perempuan itu diberi nama Yayangpoiri yang artinya Anak Dewa Angin. Setelah anak itu dewasa, ia dinikahkan dengan Nggamba.

Yayangpoiri melahirkan seorang anak perempuan bernama Royang-gamagi, yang dinikahkan dengan seorang *madika* (kepala suku) di Galumpa. Tidak lama kemudian,

414. Lihat artikel *Sekelumit Sejarah Kebudayaan Kaili* karya Prof. Dr. H.A. Mattulada, dalam jurnal *Antropologi Indonesia*, no. 48, halaman 135.

suaminya meninggal dan ia menikah lagi dengan Madika Matenju. Keturunan mereka ada empat orang, yakni tiga wanita dan seorang pria yang masing-masing bernama Ronjala, Jenala, Deporanto, serta Lantunigo. Putri sulung mereka menikah dengan Dae Mabela dari Banawa, sedangkan yang ketiga menikah dengan Madika Sigi. Anak Ronjala dengan Dae Mabela menjadi raja pertama di Toporai. Anaknya yang lain bernama Menukalui menikah dengan Tondinugo, Raja Sigi. Anak perempuan Menukalui bernama Randanuama mempunyai tiga orang anak. Salah seorang di antara mereka, Diesalemba, kelak diangkat sebagai Madika Malolo.

Hingga saat itu, Kerajaan Sigi dan Tawaili hidup damai dan tak pernah bermusuhan satu sama lain. Bahkan keduanya pernah bersama-sama menghadapi Banawa dan Palu. Peristiwa ini terjadi tatkala suku Palu masih tinggal di daerah pegunungan. *Mogau* (Raja) Tawaili saat itu yang bernama Langgo masih berkedudukan di Ranomalei. Peperangan ini dipicu karena anak Raja Labulemba dari Palu mempunyai istri lagi yang berasal dari Tawaili, disamping istrinya yang telah ada di Palu. Akibat api cemburu yang meluap-luap, istri raja yang berada di Palu memerintahkan Datu Ela membunuh istri muda raja dari Tawaili tersebut. Saat sedang mandi, putri Tawaili itu dipenggal kepalanya atau dikayau oleh Datu Ela. Rakyat Tawaili menjadi marah menyaksikan kekejaman tersebut dan merebut kembali kepalanya serta membunuh Datu Ela. Insiden ini memantik permusuhan yang panjang antara Tawaili dan Palu.

Putra Raja Labulemba dari Palu, Kodiwono, pernah menangkap 20 orang Tawaili saat Langgo mengadakan perayaan besar di Kumbili. Tawanan tersebut dibawa ke Gunung Ulayo dan dijadikan budak pengolah tanah. Hasil pertanian yang diperoleh lalu dipergunakan membeli persenjataan. Penguasa Palu lalu menyampaikan pernyataan perang kepada Langgo. Atas saran Raja Sigi, Langgo meminta bantuan kepada raja-raja lainnya, seperti Madika (Raja) Tua Lelingkosa di Gunung Toaya, Dae Laruma dari Tukala, dan Raja Banawa. Pasukan gabungan beberapa kerajaan lalu menyerang dan mengalahkan Palu. Beberapa desa yang berpihak kepada Palu habis dibakar. Karena kekalahan itu, Kodiwono mengirimkan saudara perempuannya bersama Pue Sese Mase dan rombongan kaum wanita lainnya membawa persembahan yang mahal-mahal dengan permohonan agar wilayah Palu di Pegunungan Ulayo jangan diserbu oleh Tawaili beserta Sigi. Akibat kekalahan ini, Palu harus menyerahkan beberapa daerahnya kepada Tawaili dan Sigi.

b. Perkembangan Kerajaan Tawaili

Menurut manuskrip Hans Hägerdal, raja-raja pertama Tawaili adalah Daemasia Pue Kurukire, Nurudin (±1850–± 1870), dan Sopelemba (± 1873). Raja Tawaili pernah mengirimkan menantunya yang bernama La Garuda yang juga seorang perompak buronan pemerintah, ke Makassar guna memperbaharui kontrak politik pada 1854 dengan Belanda. Kesempatan ini dimanfaatkan pemerintah Belanda menangkapnya. Akibatnya, Tawaili tidak memberikan laporan mengenai pergantian penguasanya yang berlangsung pada 1875. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda tidak mengakui Jangge Bodu Tome Tanggu (1873–1900) sebagai Raja Tawaili yang baru.

Belanda berupaya memperkuat genggamannya atas Sulawesi Tengah dengan mengirimkan tiga kapal pada 1888 untuk menekan para raja menandatangani kontrak politik. Setelah terjadi baku tembak di pesisir Pantai Kayumalue yang memakan banyak korban, Raja Jangge Bodu Tome Tanggu dengan berat hati menandatangani Plakat Panjang pada 26 Juni 1888. Ketika terjadi peperangan melawan pemerintah kolonial di Banawa, Raja Tawaili yang bernama Jaelangkara (1900–1905), pengganti Jangge Bodu Tome Tanggu, pernah memberikan perlindungannya kepada Lamalonda, salah seorang tokoh perlawanan Banawa. Selain itu, Raja Jaelangkara pernah pula mendukung perjuangan Karanjalembah, Raja Sigi. Itulah sebabnya, ia dibunuh secara licik oleh kaki tangan Belanda saat melakukan peninjauan ke perbatasan Tawaili dan Toli-Toli.

Sepeninggal Jaelangkara, pemerintahan Tawaili diserahkan kepada La Marauna (1905–1910), Raja Banawa. Penggantinya adalah Lambulemba Papa I Jolo (1910–1912), yang merupakan saudara Jaelangkara. Selanjutnya, takhta Tawaili beralih ke tangan I Joto (Joto Lembah atau Tome Ince Saleh, memerintah 1912–1926) yang menurut *Regeerings-Almanak* memperoleh pengesahan dari pemerintah kolonial pada 4 Mei 1912. Penggantinya adalah Muhammad Yusuf (1927–1931) yang bergelar Raja Tiangso. Ia digantikan oleh Lamakampale (Lamakapala, memerintah pada 1931–1940), putra Jaelangkara yang menandatangani kontrak politik dengan pemerintah Belanda pada 5 September 1936. Raja Lamakampale masih berkuasa menjelang kedatangan bala tentara Jepang ke bumi Nusantara.

c. Sistem Pemerintahan

Kerajaan Tawaili terbagi menjadi empat wilayah, yakni Nupabomba, Lambara, Mpanau, dan Baiya.[415] Pemimpin keempat wilayah ini membentuk dewan adat Tawaili yang disebut Patanggota. Dalam menjalankan tugas pemerintahan sehari-harinya, raja dibantu oleh dewan adat tersebut.

XV. TOJO

Wilyah Kerajaan Tojo kini terletak di Kabupaten Tojo Una-una. Pusat kerajaan ini terletak di Ampana. Berita tertua mengenai Tojo diperoleh dari catatan Valentijn, Residen Jansen, dan Asisten Residen Gorontalo yang bernama Riedel. Ketiganya memberitakan bahwa kawasan Tojo meliputi Tomini, Ampibabo, dan Sausu. Wilayah-wilayah itu berada di bawah pengaruh Kerajaan Limboto. Pada masa itu, belum ada pemerintahan yang terpusat di Tojo. Warga masih hidup di bawah kelompok-kelompok kesukuan yang terpisah.

Tojo baru menjadi kerajaan terpisah dan terpusat setelah kedatangan orang Bone. Inilah yang menjadi alasan mengapa Tojo juga disebut Bone Ca'di (Bone Kecil). Menurut cerita rakyat, Kerajaan Tojo didirikan oleh Pilewiti yang berasal dari Bone, Sulawesi Selatan. Setelah menjadi raja, Pilewiti menyandang gelar Raja Andi Ahmad Lacuku. Pilewiti pada mulanya adalah salah seorang putra Raja Bone yang selalu merantau guna mencari ikan. Suatu ketika, Talamoa atau "orang yang turun dari langit" berniat mencari raja bagi daerah Tojo. Saat itu, di Tojo belum mempunyai raja, dan kawasan tersebut diperintah oleh empat orang kepala suku, yakni Talamoa yang menguasai Kuala Malei hingga Kuala Tojo; Tajongga yang menguasai Tumora hingga Kuala Malei; "Mpapo" yang memimpin kawasan Kuala Tojo hingga Kuala Bongka; dan "Ballo" yang menguasai Kuala Bongka hingga Kuala Balinggara.[416] Niat Talamoa mencari raja bagi Tojo dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat yang saling membunuh satu sama lain. Ia lalu mendatangi Raja Bone guna meminta salah seorang kerabatnya agar bersedia menjadi Raja Tojo. Raja mengusulkan Pilewiti, anaknya yang sedang mencari ikan di pesisir Teluk Tomini. Talamoa mencari dan menemukan Pilewiti serta mengajaknya ke Tojo. Pilewiti lalu menetap di daerah Ampana dan menjadi Raja Tojo

415. Lihat artikel *Sekelumit Sejarah Kebudayaan Kaili* karya Prof. Dr. H.A. Mattulada, dalam jurnal *Antropologi Indonesia*, no. 48, halaman 135–136.
416. Lihat *Sejarah Tojo Una-Una*, halaman 137.

yang pertama. Nama Pilewiti sendiri berarti 'Yang Telapak Kakinya Menghadap Ke Atas'.[417] ia dilahirkan 1677 di Bone dan memerintah 1770–1778.

Pengganti Pilewiti berbeda-beda menurut berbagai sumber yang ada. Berdasarkan salah satu sumber, pengganti Pilewiti adalah putranya dengan Romelino yang bernama La Saerah. Semasa pemerintahannya diangkat para pembantu raja, hakim, pengawal, dan penguasa-penguasa setempat. Sementara itu, sumber berikutnya menyebutkan pengganti Pilewiti adalah Andi Latondrong. Sumber lain mencatat bahwa setelah Pilewiti mangkat, para kepala suku–dengan seizin Talamoa–menghadap seorang tokoh bernama Lapangandro (Lapangandong) yang berkedudukan di Vinangalimba guna dijadikan Raja Tojo. Oleh karena itu, menurut sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah Pilewiti mangkat, pusat pemerintahan dipindahkan ke Vinangalimba. Sementara itu, masih ada sumber lain yang menyebutkan bahwa Pilewiti digantikan oleh Payulembah.[418]

La Saerah berkuasa hingga 1860. Penggantinya adalah cucu perempuannya yang bernama Paletey. Ratu Paletey digantikan oleh Taroe Mbulawa yang merupakan putri Hamida (salah seorang putri La Saerah) dengan Mohammad Nur Daeng Sitaba. Semasa pemerintahannya berlaku penataan birokrasi kerajaan. Pemimpin tertinggi kerajaan Tojo adalah seorang raja yang bergelar *tua mokole*. Raja dibantu oleh seorang raja laki-laki yang bernama Rantelero dengan gelar *mokole maeta*. Diangkat pula dua orang perdana menteri yang masing-masing mewakili raja di dua wilayah kerajaannya. Perdana menteri pertama, Mokole Mabuya, adalah adik kandung Rantelero yang membawahi daerah antara Sungai Bongka hingga Ujung Pati-Pati di timur Luwuk. Sementara itu, sebagai patih kedua diangkat Bisalemba yang bergelar Papa Bora. Ia adalah saudara sepupu Paletey. Kerajaan Tojo juga dibagi menjadi beberapa wilayah kesukuan, yang jumlahnya kurang lebih ada delapan, yaitu

- Suku Lalaeo yang dipimpin Tauligi
- Suku To Raoe yang dipimpin Tamoimba
- Suku Morompa yang dipimpin Medopa
- Suku Kamudo yang dipimpin Mawomba
- Suku Lage yang dipimpin Nggoe
- Suku Matako yang dipimpin Pedengke

417. Lihat *Sejarah Tojo Una-Una*, halaman 141, catatan kaki no 141.
418. Lihat *Sejarah Tojo Una-Una*, halaman 145–146.

- Suku Poso yang dipimpin Taurungi (gelar Ngkai Besi)
- Suku To Raoe yang menempati kawasan Ncinili, dipimpin Kumora (gelar Papa Jamita)

Raja mengangkat seorang hakim bernama Malulua dengan gelar Papa Misu yang dibantu oleh Nggowe. Taurungi, Raja suku Poso diangkat pula sebagai pengawal raja. Sebagai panglima perang diangkat Kolomboy, yang merupakan putra Rantelero.

Kini akan ditelusuri silsilah raja-raja Tojo berdasarkan berbagai sumber lainnya. Andi Latondrong yang menurut salah satu sumber disebutkan sebagai pengganti Pilewiti memiliki putri bernama Remelino. Putrinya lantas menikah dengan Abu Saleh dan dikaruniai beberapa orang anak yang masing-masing bernama Lariwu, Sombalore, dan Payasoe. Sumber lainnya menyebutkan bahwa Andi Latondrong memiliki anak bernama Remelino dan Laraja. Remelino (1816–1836)[419] kemudian menjadi penguasa Tojo berikutnya. Laraja memiliki putri bernama Tuduntaka. Sombalore menikah dengan Rontoboroe yang masih keturunan Raja Bugis dan berputra Kolomboy (Kolomboi). Kolomboy menikah dengan Tuduntaka, tetapi pernikahan ini tak dikaruniai keturunan.

Kolomboi menikah lagi dengan Daemanota yang masih kerabat Kerajaan Sigi Dolo. Putranya adalah Tanjumbulu yang kelak terkenal sebagai pejuang gigih menentang kekuasaan penjajah. Oleh karenanya, Raja Tanjumbulu masih mempunyai ikatan persaudaraan dengan Lamakarate, Raja Sigi Dolo saat itu. Daftar raja-raja penguasa Tojo antara Remelino dan Kolomboy di buku *Sejarah Tojo Una-Una*, halaman 150, adalah Andi Lamatanay (1837–1856), Andi Laradja (1857–1872), Andi Baso (1873–1882), dan Lariwu atau La Ro'e (1883–1898). Selanjutnya, baru berkuasa Kolomboy (1899–1906).

Belanda mulai menanamkan kekuasaannya melalui penandatanganan *Lange Verklaring* pada 11 Desember 1887, semasa pemerintahan Raja La Riu (Lariwu). Lebih jauh lagi, pada 1905 Belanda mengharuskan Raja Tojo menandatangani kontrak politik (*Korte Verklaring*) sehingga makin kokohlah kedudukan pemerintah kolonial. Raja Tojo saat awal bercokolnya Belanda di sana adalah Kolomboi. Ia sangat gigih bergerilya melawan Belanda yang diawali pada 1905.[420] Tujuan perlawanannya adalah

419. Tahun pemerintahan diambil dari daftar raja-raja Tojo yang terdapat dalam *Sejarah Tojo Una-Una*, halaman 150.
420. Lihat *Sejarah Tojo Una-Una*, halaman 336, menurut catatan kaki pada buku tersebut nomor 120, sumbernya adalah *Monografi Daerah Sulawesi Tengah*, Jilid 1, Jakarta, Depdikbud, 1991, halaman 49.

menentang *Korte Verklaring* yang telah ditandatangani La Riu serta beban pajak dan kerja paksa. Kolomboi tertangkap oleh Belanda pada 1905 dan diasingkan ke Makassar. Selanjutnya, Kolomboi dipindahkan ke Tasikmalaya bersama Raja Datupamusu dari Dolo. Setelah itu, ia dipindahkan kembali ke Bantaeng hingga wafatnya.[421] Sebelum penangkapan terjadi, Raja Kolomboi sempat melakukan perlawanan di Gunung Buyumboyo. Selain itu, ada sumber yang meriwayatkan bahwa ia tertangkap di Buyumboyo saat sedang mengadakan pesta panen padi. Masih ada versi lain yang menyebutkan bahwa setelah lima bulan bergerilya, Kolomboi tertangkap oleh Belanda pada 1927 di Buyumboyo, tempat ia menemui istrinya yang bernama Jami, saudari kandung Ta Lasa dari Poso. Selanjutnya, raja diasingkan ke Manado dan setelah itu dipindahkan ke Sukabumi. Sebagai penggantinya diangkat Tanjumbulu, putra Kolomboy, yang juga sangat anti-Belanda. Ia terus melakukan perlawanan terhadap penjajah hingga dipancung oleh Jepang di Poso.

Meskipun demikian, menurut buku *Sejarah Tojo Una-Una*, halaman 149, Kolomboi diasingkan pada 1906 ke Manado. Setelah itu, pemerintahan Tojo dipegang oleh istrinya, Tuduntaka, antara 1907 hingga 1915. Tuduntaka menikah lagi dengan Muslaini dan kemudian menyerahkan roda pemerintahan kepada suaminya karena masyarakat Tojo kurang suka dipimpin oleh wanita. Belanda memiliki pengaruh kuat dalam roda pemerintahan Tojo saat itu, terbukti dengan pengukuhan Tuduntaka selaku penguasa wanita Tojo oleh Asisten Residen Manado berdasarkan *besluit* (surat ketetapan) pemerintah kolonial. Muslaini kemudian menjadi pemangku pemerintahan Tojo antara 1915–1927 dengan menerima gaji sebesar 7 Gulden. Pada 1927, muncul aspirasi masyarakat yang menghendaki agar Tojo diperintah lagi oleh keturunan raja. Oleh karena itu, didatangkanlah Tanjumbulu yang merupakan putra Kolomboi ke Tojo. Selanjutnya, diadakan pemilihan Raja Tojo yang diikuti oleh tiga orang calon, yakni Muslaini, Tanjumbulu, dan Ince Muhammad. Hasilnya, Tanjumbulu (1928–1942) terpilih sebagai Raja Tojo berikutnya.

Raja Tanjumbulu aktif terlibat dalam Gerakan Merah Putih yang sangat anti terhadap kaum penjajah, baik Belanda maupun Jepang. Pada 1942, Raja Tanjumbulu mengadakan perundingan di rumah Masewa Daeng Palewang, guru silat sekaligus penasihat Raja Tojo. Pembicaraan itu melibatkan tiga orang tokoh Gerakan Merah

421. Lihat *Sejarah Tojo Una-Una*, halaman 337, menurut catatan kaki pada buku tersebut nomor 122, sumbernya adalah wawancara dengan Taher Radja Fatah di Desa Labuan, Ampana Tete, tanggal 6 Juli 2006.

Putih, yakni Masewa Daeng Palewang, Lasongkeng Daeng Palewang (guru bela diri dari Palopo, Luwu), dan Abdul Latif Mangintung (tokoh Parindra yang melarikan diri dari Sulawesi Selatan karena dikejar oleh Belanda). Pertemuan di atas menghasilkan keputusan untuk mempersiapkan rakyat melawan penjajah.

Karena terdesak oleh serbuan Jepang, Belanda menyingkir dari Manado ke Poso dan setelah itu ke Kolonodale di Mori. Raja Tanjumbulu mengadakan pembicaraan di Bongka dengan seorang tokoh bernama Malei. Di sana ia sempat diperiksa oleh Belanda karena peran sertanya dalam gerakan perlawanan itu. Pucuk pimpinan Kerajaan Tojo untuk sementara diserahkan kepada Raja Gunu Datupamusu. Berita mengenai perlawanan Tanjumbulu itu telah tersebar ke mana-mana sehingga banyak yang ingin bergabung dengannya, seperti Pemuda Merah Putih dari Bunta yang dipimpin Haji Sunusi yang tiba di Ampana pada 18 Februari 1942. Keesokan harinya utusan Gerakan Merah Putih dari Gorontalo yang dipimpin oleh Nani Wartabone dan Ismail Kemba mendatanginya.

Karena banyaknya dukungan tersebut, Raja Gunu Datupamusu mengumpulkan rakyat pada 21 Februari 1942 di sebuah sekolah Muhammadiyah di Ampana. Mereka mengikrarkan kebulatan tekad berjuang sepenuh hati membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Saat berlangsungnya pertemuan tersebut, mereka mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada kesempatan yang sama, sebuah komite dibentuk dengan anggota sebagai berikut:

Ketua I : Raja Gunu Datupamusu.
Ketua II : L. Laeso
Penulis I : S. Pangemanan
Penulis II : A.K. Lamuru[422]

Selain itu, dipersiapkan pula anggota pasukan yang dipimpin oleh Abdul Karim Lamuru sebagai kepala pasukan I,Mohammad Muslaeni selaku kepala pasukan II, dan Sepala sebagai kepala pasukan penyerbu ke Poso Togoa. Mereka masih didukung pula oleh Hasim A. Ribai, Hasan A. Ribai, Mohammad Badulu, dan Ong Sung Kiong.

Gerakan ini berhasil menangkap kurir-kurir Belanda yang hendak pergi ke Banggai, terdiri dari seorang mandor bernama Sampelan dan tiga orang Tionghoa. Mereka juga menjalin kerja sama dengan gerakan yang dipimpin Abdul Latif Mangitung

422. Lihat *Sejarah Poso*, halaman 211.

dan sepakat membentuk Pasukan Garis Depan Kerajaan Tanjumbulu. Serdadu Belanda yang dipimpin seorang sersan dari Manado tiba di Tojo pada 22 Februari 1942. Raja Gunu Datupamusu memerintahkan rakyat menghancurkan jembatan di wilayahnya demi menghambat majunya pasukan Belanda. Raja keesokan harinya tiba di Bongka dari Ulubongka dan merestui seluruh perjuangan mempertahankan Ampana, tetapi Alkaf Muslaeni yang pro-Belanda menghasut kelompok yang dipimpin A.C. Kussoy agar mengkhianati rekan seperjuangannya. Oleh karena itu, Belanda berhasil memasuki Ampana dan menangkap anggota Gerakan Merah Putih.

Pasukan Belanda menyerang markas Gerakan Merah Putih di kompleks kantor Kerajaan Tojo malam hari pada 29 Februari 1942. Belanda berusaha menurunkan bendera merah putih tetapi dihalangi oleh dua orang pejuang bernama Nggai (Papa Judaedah) dan Salimbu (Papa Dero), keduanya akhirnya gugur. Karena situasi yang kurang menguntungkan itu, Raja Tojo menyingkir ke desa Petingko dan terakhir ke Gorontalo. Sekretaris Kerajaan Tojo, S. Pangemanan, melaporkan pada 1 Maret bahwa keadaan di Ampana sudah gawat karena sebagian besar anggota pasukan telah ditangkap Belanda, diantara mereka ada yang dibunuh ataupun ditahan di Poso. Lima orang yang dibunuh adalah Togoa, Madi Muhammad, Abdul Samad, Hasyim Rivai, dan Angki Maloto, mayat mereka kemudian dibuang ke laut. Pada 2 Maret 1942, Raja Tojo mengangkat Gunu Datupamusu sebagai Pejabat Raja Tojo. Mohammad Amin Dahlan ditunjuk sebagai komandan pasukan angkatan laut dan merangkap sebagai pengawal tempur yang mendampingi Raja Tanjumbulu. Haji Saini ditunjuk sebagai komandan angkatan laut dan juga pengawal permaisuri serta warga istana. Selanjutnya, Abdul Latif Mangitung diangkat sebagai wakil pimpinan angkatan perang Kerajaan Tojo Una-Una. Pada Juni 1942, Raja Tanjumbulu sudah bisa kembali ke Ampana untuk memerintah kembali kerajaannya.

Gerakan rakyat yang menentang penjajahan juga menjalar sampai ke Salabangka. Abdul Latif Mangitung menjalin hubungan dengan Hamide Pasise guna membangun gerakan perlawanan di sana, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua satu	: Abdullah
Wakil ketua	: Hamide Pasise (merangkap kepala pasukan)
Sekretaris	: Aburaerah
Pemegang keuangan	: Haji Abdul Rahim
Wakil pemegang keuangan	: Thio Ciang Pho

Penghubung : Hing
Kepala pasukan wil. Bungku : Rahim
Penyelidik : Ali Bafaddal
Kepala perlengkapan : Haji Lakanene
Pembantu : Kanjar, Wely, dan Raju[423]

Raja Tanjumbulu sendiri masih meneruskan perjuangannya hingga tewas dibunuh oleh Jepang. Bersama dengan raja, dibunuh pula Abdul Karim (pernah menjadi murid H.O.S Cokroaminoto), Kamaruddin Haji Zaineng, dan Jamaludin Datu Tumenggung. Secara keseluruhan ada 10 orang yang dipancung Jepang saat bulan Ramadan. Pembunuhan ini diakibatkan oleh fitnahan Warow, seorang mantan *bestuur asisten* Belanda di Poso, yang mengatakan bahwa mereka adalah mata-mata Belanda, padahal justru tokoh-tokoh itu adalah para pejuang yang ingin memerdekakan negerinya dari kaum penjajah. Jepang akhirnya menyadari bahwa tuduhan Warow tersebut tidak mempunyai bukti yang kuat sehingga menangkap dan menjatuhinya hukuman seumur hidup.

Hans Hägerdal dalam manuskripnya memberikan alternatif lain daftar raja-raja yang memerintah Tojo.[424] Raja pertama Tojo adalah seorang yang tidak disebutkan namanya dari Bone. Penggantinya secara berturut-turut oleh Jupandan, Lasaera, Latondo (Makole Wungku), I Raja, Lariu (–1902), Pagare (Papaiketa, 1902–1905), I Roe (1905–1914), Pariusi (1914–1915), Muslaeni (Muslaini, 1916–1926), Tanjumbulu (1926–1942).

XVI. TOLI-TOLI

Wilayah Kerajaan Toli-Toli kini terletak di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Sumber tradisional mencatat bahwa raja-raja awal yang memerintah Toli-Toli adalah Dattu Amas, Dattu Mayo, Mahappa, Pollibutan, Sianjingan, Tantalius, Dattu Alam, Balingalan, Tamadika Niyuwasikan, Dammu Gugiyah, I Nai, Pagambalan, Daeng Bone (1737–1752), Nuruddin (1752–?), Dako Liuwan, Timmun, dan Daeng Mabela.[425] Menurut sumber lainnya, Kesultanan Ternate menyiarkan agama Islam ke Toli-Toli pada kurang lebih abad 17. Semenjak saat itu, Toli-Toli masuk ke

423. *Ibid.*, halaman 213.
424. Lihat *Kerajaan2 Indonesia*, halaman 270.
425. Lihat *Kerajaan2 Indonesia*, halaman 271.

dalam payung kekuasaan Ternate. Para penguasa Toli-Toli kemudian dinobatkan di Ternate. Salah seorang penguasa Toli-Toli yang dinobatkan di Ternate adalah Raja Imbaisug. Ia berangkat ke Ternate dengan menggunakan kapal bernama *Bangga Kaasan*. Ia mangkat dalam perjalanan pulang ke Toli-Toli. Sebelumnya, di Ternate telah diambil kesepakatan bahwa bila ia mangkat maka yang menggantikannya adalah saudaranya, Djamalul Alam. Masuknya agama Islam menjadikan Toli-Toli sebuah kesultanan sehingga para penguasanya digelari sultan.[426] Sultan Djamalul Alam mangkat dan digantikan oleh putra sulungnya, Sultan Mirfaka, yang memerintah di daerah Dondo. Sedangkan putra keduanya bernama Muhiddin memerintah di daerah Toli-Toli, namun gelarnya bukan sultan melainkan raja, ia dijuluki Tau Dei Beanna. Raja Muhiddin digantikan oleh Mohammad Yusuf Syaiful Muluk Muidjuddin yang digelari Malatuang, artinya adalah 'Yang Patut Disembah'. Ia digelari Tau Dei Buntuna. Masa pemerintahannya berlangsung dari 1781 hingga 1812.[427] Raja Mohammad Yusuf Syaiful Muluk Muidjuddin atau Malatuang sangat dicintai rakyatnya, bahkan terdapat sajak yang berbunyi sebagai berikut.

Daun pohon Bona
Raja di Buntuna
Walaupun tinggal tulangnya
Tetap diingat oleh isi negerinya.[428]

Begitu hormatnya rakyat kepada rajanya hingga mereka tidak berani menyebut nama raja secara langsung. Raja Mohammad Yusuf Syaiful Muluk Muidjuddin waktu itu berkedudukan di Kalangkangan. Pada 1812, Raja Mohammad Yusuf Syaiful Muluk Muidjuddin mendirikan istana di Kampung Nalu, yang selanjutnya disebut Bale Dako (Istana Besar) atau Bale Masigi (Istana Yang Puncaknya Seperti Kubah Masjid).[429]

Menurut sumber lainnya, kerajaan ini pernah diperintah oleh Raja Baisungputra Datuamas (barangkali ia adalah Raja Imbaisug pada sumber di atas), yang digantikan oleh Marahum (dalam *Kerajaan2 Indonesia* karya Hans Hägerdal, halaman 271, disebut S. Jamalul Alam atau Timumun). Ia menikah dengan Siti Intan Matia Matapis dan mempunyai tiga orang anak, yakni Bantuan, Baharudin, dan Mirfaka. Setelah

426. Lihat *Mengenal Buol Tolitoli*, halaman 64.
427. Lihat *Mengenal Buol Tolitoli*, halaman 65.
428. Lihat *Mengenal Buol Tolitoli*, halaman 65.
429. Lihat *Mengenal Buol Tolitoli*, halaman 67.

itu, yang menjadi raja di Toli-Toli adalah putranya, Bantuan, yang bergelar Yusuf Malatuang Syaiful Muluk (1810–1858).

Pengganti Raja Mohammad Yusuf Syaiful Muluk Muidjuddin atau Malatuang adalah Bantilan Syafiuddin (1858–1868, sumber lain 1859–1867). Pada kurun waktu yang sama, datanglah Piet Broogh, orang Belanda yang pertama kali mengunjungi Toli-Toli. Menyadari niat Belanda menjajah negerinya, ia kerap menunjukkan sikap yang kurang bersahabat. Meskipun demikian, berkat bujuk rayu Belanda, ia akhirnya bersedia menandatangani kontrak politik dengan Belanda pada 5 Juli 1858. Ketika itu, Belanda diwakili oleh Dirk Francois.

Selanjutnya, yang menjadi raja di Toli-Toli adalah Abdul Hamid (1868–1905, sumber lain 1869–1901), putra Raja Bantilan Syafiuddin. Penandatanganan kontrak politiknya (*Korte Verklaring*) berlangsung pada 19 April 1868. Selanjutnya, secara keseluruhan tercatat ia pernah menandatangani kontrak politik sebanyak enam kali. Banawa dan Toli-Toli pernah terlibat sengketa perbatasan, Belanda pun ikut campur dalam perselisihan ini. Kedua raja akhirnya mengikuti perundingan perdamaian yang diadakan pada 26–29 Agustus 1890 guna menetapkan tapal batas antara kedua kerajaan. Hasilnya, Sojol dan Dampelas menjadi wilayah Banawa dan sekaligus dianggap sebagai tapal batas antara Toli-Toli dan Banawa. Menjelang akhir masa pemerintahan Raja Abdul Hamid, Belanda makin banyak terlibat dalam urusan pemerintahan Toli-Toli dan seorang kontrolir ditempatkan untuk mengawasi tindak tanduk raja dalam melaksanakan segenap instruksi pemerintahan kolonial Belanda. Selain itu, rakyat sudah mulai dibebani pajak (*belasting*) dan kerja wajib (rodi). Semasa pemerintahan Raja Abdul Hamid, pelayaran berlangsung lancar. Telah ada jalur pelayaran khusus yang menghubungkan Makassar-Donggala-Tolitoli. Para pedagang Tionghoa memulai kegiatannya di Toli-Toli. Orang Tionghoa pertama yang masuk ke Toli-Toli adalah Hong Bie.

Pengganti Abdul Hamid adalah Haji Ismail Bantilan (1905–1918, sumber lain 1908–1918). Pada zaman pergerakan nasional, organisasi yang cukup kuat di daerah Toli-Toli adalah Sarekat Islam (SI) yang didirikan oleh H.O.S. Cokroaminoto. Bahkan beberapa di antara kalangan bangsawan juga ada yang menjadi anggotanya, seperti Moggi. H. Ali (putra Raja Toli-Toli), Muhammad Sirajuddin (syahbandar Toli-Toli), dan Busuna (Jogugu Toli-Toli). Raja Haji Ismail Bantilan menandatangani *Korte Verklaring* pada 12 Februari 1908. Isinya antara lain berbunyi sebagai berikut.

- Kerajaan Toli-Toli merupakan bagian Hindia Belanda.
- Tidak akan menjalin hubungan langsung dengan negeri asing.
- Sahabat Negeri Belanda akan menjadi sahabat Kerajaan Toli-Toli, sedangkan musuh Negeri Belanda akan menjadi musuh Kerajaan Toli-Toli.
- Mengikuti segenap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial.

Meskipun telah menandatangani *Korte Verklaring*, raja merupakan tokoh yang membenci Belanda. Ia menentang kewajiban kerja paksa yang dibebankan kepada rakyatnya. Akibatnya, ia pernah ditawan selama enam bulan oleh Belanda walaupun akhirnya dibebaskan kembali.[430]

Singgasana Toli-Toli beralih kepada Haji Muhammad Ali Bantilan atau Moggi H. Ali (1918–1919), putra Raja Haji Ismail Bantilan. Ia kemudian diangkat sebagai Presiden Sarekat Islam setempat. Oleh karena itu, SI makin berkembang di Toli-Toli. Semasa pemerintahannya, Belanda membagi Toli-Toli menjadi dua distrik yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala distrik, yakni

- Distrik utara yang beribu kota di Santigi.
- Distrik selatan yang beribu kota di Tinabogan.

Kepala distrik utara adalah adik Raja Haji Muhammad Ali, Haji Mohammad Saleh Bantilan.

Peristiwa penting lainnya adalah perlawanan rakyat di Salumpaga yang dipimpin oleh H. Hayun. Saat itu, empat puluh orang Salumpaga dikerahkan untuk bekerja rodi membangun jalan menuju Pelabuhan Tanjung Batu di Toli-Toli. Saat itu, kerja wajib mereka belum selesai dan masih tersisa 14 hari, padahal sudah mendekati bulan puasa. Tentunya bekerja saat bulan puasa sangatlah berat bagi mereka. Oleh karena itu, melalui pemimpin rombongan mereka, H. Hayun, disampaikan keinginan para pekerja agar diizinkan meneruskan pekerjaan setelah bulan puasa. H. Hayun menghadap Raja Moggi H. Ali, tetapi raja menolak permohonan mereka dan menghendaki agar pekerjaan tetap diteruskan kendati telah memasuki bulan puasa. Akhirnya, raja mengatakan agar ia menemui kontrolir untuk membicarakan hal itu. Namun, kontrolir malah melimpahkan kembali masalahnya kepada raja, dengan mengatakan bahwa raja mereka sendiri yang menghendaki dilakukannya pekerjaan saat bulan puasa.

430. Lihat *Mengenal Buol Tolitoli*, halaman 77.

Saat berlangsungnya ketegangan itu, saudara raja yang bernama H. Saleh Bantilan menyaksikan para pekerja telah meninggalkan pekerjaan dan pulang ke kampung halamannya masing-masing. Ia melapor kepada raja bahwa pekerja telah memberontak dengan melarikan diri dari kerja rodi. Bersama dengan kontrolir, raja beserta rombongan bertolak ke Salumpaga. Raja memerintahkan kepala kampung mengumpulkan rakyat, terutama yang dikenai kerja wajib. Setelah orang-orang yang dikenai giliran kerja rodi berkumpul, raja menuduh mereka semua telah melakukan pembangkangan dan pemberontakan. H. Hayun selaku juru bicara para pekerja rodi menolak tuduhan tersebut dan berjanji bahwa setelah bulan puasa mereka akan bekerja lebih keras lagi sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Namun, baik raja maupun kontrolir tidak mengizinkan hal itu dan memaksa rakyat tetap bekerja selama bulan puasa. Setelah itu, raja beserta rombongannya pergi meninggalkan Salumpaga.

Karena menganggap bahwa raja dan Belanda tidak menghormati hak orang Islam dalam menunaikan kewajiban agamanya, H. Hayun beserta pengikutnya merundingkan langkah selanjutnya. Saat malam harinya, ketika sedang menjalankan salat tarawih, polisi yang mencurigai adanya persekongkolan membubarkan mereka. Rakyat lalu meninggalkan masjid dan membubarkan diri. Dua hari kemudian, kontrolir beserta rombongannya datang lagi. H. Hayun dengan disertai oleh Otto, Kombong, Hasan, dan Kampaeng kembali mengajukan permohonan agar rakyat dibebaskan dari kerja rodi selama bulan puasa. Kembali raja dan kontrolir menolak permintaan tersebut. Situasi memanas dan Otto mencabut parangnya serta membunuh kontrolir Belanda bernama De Cat Angelino. Pada insiden 5 Juni 1919 ini yang turut menjadi korban adalah Raja Toli-Toli, Moggi H. Ali; Jaksa Toli-Toli, Zakaria; lima orang polisi; dan lain sebagainya. Secara keseluruhan ada 10 orang yang tewas. Berita mengenai insiden ini menyebar bahkan sampai ke luar negeri.

Belanda menurunkan pasukannya guna memadamkan pemberontakan tersebut dan menangkap pelakunya. Pengadilan bagi mereka digelar pada 1920–1921 di Makassar. Otto, Kombong, Hasan, dan Kampaeng dijatuhi hukuman gantung. H. Hayun dijatuhi hukuman seumur hidup. Dua puluh orang dibuang ke Nusakambangan dengan masa hukuman 5–20 tahun. Tiga orang dibuang ke Digul dan empat orang sisanya dikembalikan ke Salumpaga. Otto, Kombong, dan Hasan menjalani hukumannya pada 27 September 1922. Sementara itu, Kampaeng sudah menggantung diri terlebih dahulu di dalam selnya. Akibat pemberontakan ini, Belanda

menempatkan penguasa militer di Salumpaga hingga masuknya Jepang pada 1942. Nama Haji Hayun kini diabadikan sebagai nama lapangan yang terletak di depan kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli.[431]

Raja Moggi H. Ali yang tewas terbunuh digantikan oleh saudaranya, Haji Mohammad Saleh Bantilan (1919–1926, sumber lain 1920–1922). Ia menandatangani *Korte Verklaring* pada 10 Juli 1920. Perdagangan di Toli-Toli makin ramai dan mengundang kedatangan kaum pedagang dari berbagai kawasan Kepulauan Nusantara. Pada 1925, Raja Haji Mohammad Saleh Bantilan jatuh sakit sehingga harus mengundurkan diri dari tugas sehari-harinya. Oleh karenanya, pemerintahan kini diwakili oleh Muhammad (1925–1929), cucu Raja Haji Abdul Hamid Bantilan. Setelah Muhammad–selaku wakil raja–meletakkan jabatannya, ia digantikan oleh Matata Daeng Masese (1929–1942), bekas *bestuur asisten* di Kolonedale. Sementara itu, kesehatan Raja Haji Mohammad Saleh Bantilan masih tetap menurun. Pada saat itu, datanglah bala tentara pendudukan Jepang. Matata Daeng Masese ditangkap karena dituduh merobek bendera Jepang. Ia kemudian meninggal dalam tawanan Jepang. Raja Haji Mohammad Saleh Bantilan juga ditawan oleh Jepang hingga 1944. Pada masa itu, pecah perlawanan terhadap Jepang di Malomba pada 18 Juli 1945.

Setelah berlangsungnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintahan Toli-Toli dijalankan oleh Komisi Pemerintahan Swapraja karena Raja Haji Mohammad Saleh Bantilan masih beristirahat. Komisi Pemerintahan Swapraja pertama kali dijabat oleh Rajawali Muhammad Pusadan. Ia kemudian digantikan oleh Abdul Rahman Nento. Para kepala pemerintahan Negeri Toli-Toli berikutnya secara berturut-turut adalah Daeng Maraja Lamakarate, Jafar Lapasere, Mohammad Kasim Razak, Andi Mohammad Tahir, Andi Musa, Andi Moh. Ali, A.M. Jotolembah, dan Malaga B.A. Sementara itu, Raja Haji Mohammad Saleh Bantilan mangkat pada 1956. Sebagai penggantinya, diangkatlah Raja Haji Mohammad Jahja Bantilan. Pengangkatan tersebut diumumkan pada 12 Desember 1957 dan upacara adatnya berlangsung pada 21 Desember 1957. Pada 1959, berlangsunglah penghapusan Swapraja Toli-Toli. Raja Haji Mohammad Jahja Bantilan merupakan kepala Swapraja Toli-Toli terakhir.

Dalam menjalankan pemerintahannya, raja dibantu oleh berbagai pejabat, seperti *jogugu*, *ukum*, *kapitalau*, *kepala adat*, *kapitaraja*, *pahalaan*, *babato*, *mayor*, dan

---

431. Lihat *Mengenal Buol Tolitoli*, halaman 83.

malinu[432]. *Jogugu* merupakan penghubung antara raja dengan pihak luar dan juga mewakili raja pada saat-saat tertentu. *Ukum* memberikan penerangan masalah hukum serta memberikan nasihat pada raja. *Kapitalau* bertugas menangani hal-hal yang terkait dengan wilayah kerajaan di laut. *Kepala adat* bertanggung jawab atas upacara-upacara yang diadakan raja. *Kapitaraja* bertugas menyertai raja. *Pahalaan* bertanggung jawab atas keamanan istana beserta mengurus rumah tangga istana. *Babato* bertugas menangani masalah syara (penghulu). *Mayor* bertugas memimpin sekelompok kecil masyarakat dalam lingkungan kerajaan. *Malinu* bertugas memberitahukan hal-hal yang penting kepada masyarakat.

XVII. UNA-UNA

Kerajaan Una-Una sekarang terletak di Kabupaten Tojo Una-una, dahulu menjadi satu dengan Kerajaan Tojo. Raja Tojo menempatkan wakilnya di Una-Una sebagai kepanjangan tangannya. Leluhur para raja Una-Una adalah seorang tokoh bernama Puramba. Ia mempunyai lima orang putra yang bernama La Simpale, La Towale, La Toko, La Palege, dan La Salewo. La Toko merupakan leluhur raja-raja Tojo. Sementara itu, La Palege mempunyai dua orang putra bernama Laraman dan Lapaola serta tiga orang putri bernama Indeyi, Idara, dan Sariano. Indeyi menikah dengan Daeng Materru dan berputra Haji Muhammad Laudjeng Daeng Materru. Belanda menjalankan politik *divide et impera* dengan memisahkan Una-una dari Tojo dan menjadi suatu kerajaan tersendiri menjelang awal abad 20 dengan Haji Muhammad Laudjeng Daeng Materru (± 1916–1925) sebagai rajanya yang pertama. Raja Una-Una setelah Muhammad Laudjeng adalah Lapalege (1925–1946) dan Bestari A. Laberahima (Lasahido, 1946–1950). Raja Una-Una terakhir ini pernah menjabat sebagai ketua Rewan Raja-raja Sulawesi Tengah antara 1948 hingga 1952.

432. Lihat *Mengenal Buol Tolitoli*, halaman 65.
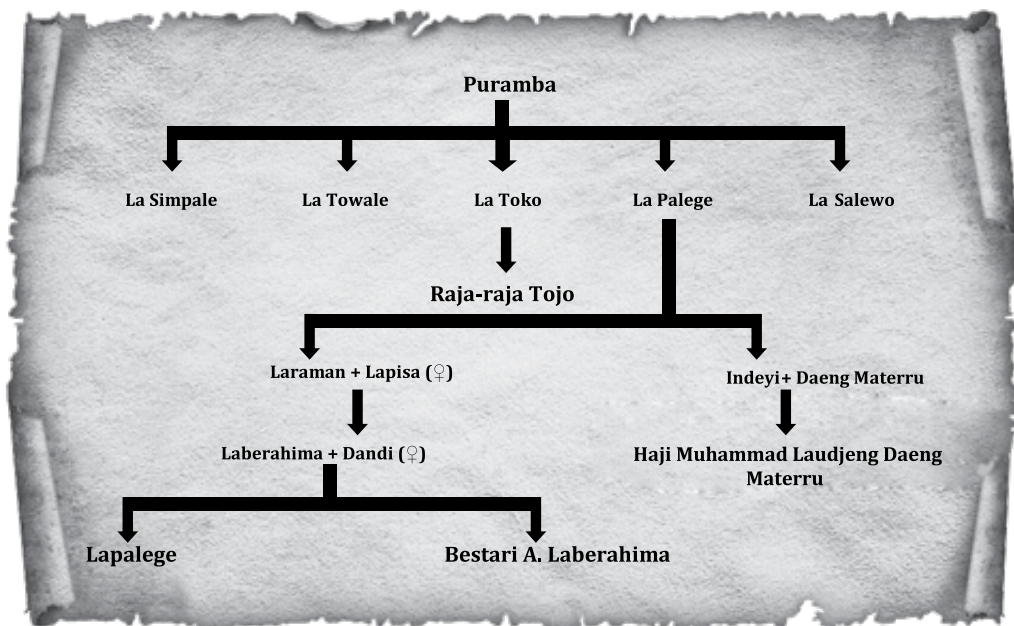
Sisilah Raja Una-Una yang Disederhanakan
Sumber: *Kerajaan2 Indonesia*, halaman 275

Menurut sumber lain, cikal bakal Kerajaan Una-Una adalah Kerajaan Togean yang disebut juga Kerajaan Lebokin NJtanah Ntogo Iyan.[433] Sebelum terbentuknya lembaga kerajaan, di sana telah ada susunan kemasyarakatan tradisional yang terdiri dari tiga *panangkulu* (pemuka) adat, yakni *panangkulu adat Tana* (pemuka adat di daratan atau tanah), *panangkulu tundengi* (pemuka adat di lautan), dan *panangkulu adat mosalia* (pemuka adat dalam pesta). Pada 1762, ketiga pemangku adat ini sepakat membentuk kerajaan yang disebut Lebokin Ntanah Ntogo Iyan, dalam bahasa Togean maknanya adalah 'Kerajaan Tiga Orang Besar'.[434] Sebagainya rajanya[435] yang pertama diangkatlah Sari Buah (1762–1791). Penobatannya dilangsungkan di benteng sebuah gunung bernama Puantanan Ntogo Iya. Di kawasan tersebut juga terdapat sebuah gua lokasi penyimpanan senjata pusaka zaman itu, juga tempat para pendekar berlatih ilmu bela diri.

Semasa pemerintahan Sari Buah, Daeng Kamboja, yang kelak menjadi Yang Dipertuan Muda Riau III (1745–1777), datang menyebarkan agama Islam di Togean. Kelengkapan pemerintahan Kerajaan Togean ketika itu terdiri dari raja (*kolongian*),

433. Lihat *Sejarah Tojo Una-Una*, halaman 160.
434. Lihat *Sejarah Tojo Una-Una*, halaman 163.
435. Raja-raja kerajaan ini bergelar *kolongian*.

jogugu (wakil raja), kapitan, *panangku lipu* (kepala kampung), *panabela* (penyampai perintah atau pengumuman), *sabandara* (penjaga pantai), *anakoda binanga* (penjaga teluk beserta selat), *kapitan laut* (penjaga lautan di keempat penjuru negeri), dan *raja laut* (pemimpin para kapitan laut).[436] Raja Togean pertama ini memerintahkan rakyatnya membuka lahan pertanian seluas-luasnya demi meningkatkan kemakmuran mereka. Orang-orang Bugis berdatangan ke Togean pada 1790 guna mencari penghidupan yang lebih baik. Mereka berjanji membantu Kerajaan Togean serta menaati segenap peraturan yang berlaku sehingga Raja Sari Buah menerima mereka dengan baik, serta hubungan yang terjalin lebih erat melalui pernikahan dengan masyarakat Togean.

Kolongian Sari Buah digantikan oleh Kasa Bunga (1791–1816). Peristiwa yang terjadi semasa pemerintahannya adalah kedatangan bangsa Portugis. Mereka bermaksud mengambil damar di kawasan Ulubongka. Meskipun demikian, sikap orang-orang Portugis yang mengumpulkan damar seenaknya sendiri tanpa seizin raja menimbulkan ketidaksenangan Kasa Bunga. Oleh karena itu, ia lantas melarang mereka mengambil damar di negerinya yang menimbulkan serangkaian peperangan. Namun, perlawanan sengit Kasa Bunga beserta rakyatnya memaksa Portugis mundur dan berdamai. Akhirnya, disepakati bahwa damar akan ditukar dengan senjata api; orang-orang Portugis tak boleh mengambil sendiri damarnya melainkan melalui perantaraan rakyat Togean; dan mereka hanya diperkenankan berada di daerah pantai saat melangsungkan kegiatan tukar-menukar tersebut.

Karena usianya telah lanjut, Kasa Bunga digantikan kemenakannya, Amintasaria (1816–1836). Kerajaan Togean yang mulanya aman tenteram terusik oleh kedatangan bangsa Mangindano (Mindanao) pada 1826, dengan maksud merampas kekayaan hasil laut Togean. Kendati demikian, angkatan perang Togean berhasil menghalau mereka. Bangsa Bajo mulai berdatangan dan menetap di Togean semasa pemerintahan Amintasaria. Ia menyambut baik mereka asalkan bangsa Bajo bersedia membantu kepentingan kerajaan serta menaati hukum yang berlaku.

Selanjutnya, singgasana Togean beralih kepada Daramantasia (1836–1861), adik Amintasaria. Setelah memerintah selama kurang lebih setahun (1837), Togean mengalami serangan bajak laut Pulau Timur (Bajo Gobang)[437] yang berhasil dipukul

436. Lihat *Sejarah Tojo Una-Una*, halaman 163.
437. Lihat *Sejarah Tojo Una-Una*, halaman 171.

mundur oleh angkatan perang kerajaan. Pada zaman Daramantasia, hasil pertanian sebagian diserahkan kepada kerajaan, sedangkan separuhnya lagi boleh dimiliki oleh petani penggarap sawah. Karena itu, boleh disimpulkan bahwa tanah pertanian masa itu merupakan milik kerajaan yang kemudian dibagi-bagikan agar diolah oleh rakyat.

Pengganti Daramantasia adalah putrinya yang bernama Ruiah Buasariah (1861–1883). Kendati seorang wanita, ia memiliki kemampuan bela diri serta kesaktian yang tak kalah dengan laki-laki. Dalam kurun waktu pemerintahannya, Togean diserang oleh bajak laut Tobelo. Konon berkat ilmu kesaktiannya, Ruiah Buasariah berhasil menumbangkan pimpinan bajak lalut Tobelo. Ruiah Buasariah kemudian digantikan oleh Halidjah (1883–1893). Ketika itu, sebuah kapal Belanda kandas di batu karang dekat Togean. Seluruh awak kapal dikawal oleh *kapitan laut* untuk menghadap Halidjah. Mereka meminta bantuan rakyat Togean menarik kapal yang kandas itu agar dapat berlayar kembali. Berkat kewibawaan Halidjah, rakyat Togean bersedia memberikan pertolongannya.

Raja Togean berikutnya adalah Zakariah (1896–1899). Pada saat itu, Pemerintah kolonial Belanda hendak menanamkan pengaruhnya di Togean dengan berkedok perjanjian persahabatan. Isi perjanjian yang disodorkan kepada Zakariah mulanya berisikan (1)Kesepakatan antara pemerintah kolonial dan Kerajaan Togean mengikat persahabatan, (2)Pemerintah kolonial dan Kerajaan Togean akan saling membantu, (3)Urusan pemerintahan kerajaan tak akan dicampuri oleh Belanda, (4)Belanda akan membeli seluruh hasil hutan yang berasal dari Togean, dan (5)Pemerintah kolonial akan menyediakan senjata bagi Kerajaan Togean.[438] Tidak mengherankan apabila Raja Zakariah bersedia menandatanganinya. Meskipun demikian, ketika penandatanganan hendak dilangsungkan di Donggala, pemerintah kolonial secara sepihak mengubah isinya berupa pernyataan takluk Togean kepada Belanda. Pemerintahan kolonial memberikan ultimatum agar segera menerima pernyataan takluk tersebut dalam waktu 1x24 jam, bila tidak maka Togean akan diserang. Demi menghindari pertumpahan darah, Zakariah bersedia membubuhkan tandatangannya. Peristiwa ini merupakan awal jatuhnya Togean ke dalam cengkeraman penjajah.

Masih belum cukup dengan itu semua, Belanda bermaksud memindahkan pusat pemerintahan Togean dari Desa Benteng ke Una-Una dengan tujuan memudahkan pengawasan. Sebagai langkah protes terhadap kebijakan pemerintah kolonial tersebut,

438. Lihat *Sejarah Tojo Una-Una*, halaman 177.

Raja Zakariah mengundurkan diri sebagai Raja Togean. Berakhirlah sudah Kerajaan Togean dan kini giliran Kerajaan Una-Una tampil ke panggung sejarah. Sebagai Raja Una-Una pertama, Belanda mengangkat seorang tokoh bernama Muhammad Marudjeng Daeng Materru (1899–1926). Ia merupakan keturunan penguasa Kutai di Kalimantan Timur serta memiliki darah Bugis. Saat pemerintahan Raja Zakariah, jabatannya adalah kapitan di Una-Una. Pada 19 April 1905, Muhammad Marudjeng Daeng Materru menandatangani *Korte Verklaring*, peristiwa ini dianggap sebagai awal kejatuhan Una-Una ke dalam cengkeraman pemerintah kolonial. Semenjak saat itu, masyarakat Togean diwajibkan membayar pajak (*belasting*) kepada Belanda. Kerajaan Una-Una kemudian menjadi swapraja (*zelfbestuur*) dalam lingkungan Hindia Belanda. Pada 1919, Una-Una dibagi menjadi dua distrik, yakni Togean (beribu kota di Benteng) dan Walea (beribu kota di Pasokan).

Raja Una-Una berikutnya adalah Lapalege Laborahima (1927–1946). Pada masa pemerintahannya, administrasi kerajaan sepenuhnya dipusatkan di Una-Una. Penguasa terakhir Una-Una adalah Sainuddin Lasahido (1946–1950). Bersamaan dengan kurun waktu pemerintahannya, dihapuskanlah berbagai swapraja di Kepulauan Nusantara. Benda pusaka Kerajaan Una-Una disebut *bangko ntandalo* yang terdiri dari pedang bersarung emas, berbagai piring antik, tempat minum, dan meja makan raja yang terbuat dari marmer.[439]

E. AGAMA DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT SULAWESI TENGAH

Sebelum masuknya agama Islam dan Kristen, masyarakat Sulawesi Tengah, baik di Poso, Mori, Napu, Besoa, Lore, maupun Bada, meyakini adanya kekuatan gaib yang dipercayai menguasai hidup manusia yang disebut *halaik*. Kekuatan ini diyakini sanggup menentukan kehidupan manusia. Selain itu, mereka juga menghormati arwah nenek moyangnya beserta dewa-dewa dan roh, seperti Pue mPalaburu (roh pencipta yang bersemayam di tempat terbit serta terbenamnya matahari), Lasaeo (roh yang memperkenalkan tanaman padi kepada manusia), Rongga (roh yang mendatangkan keberuntungan), Waringin (roh penguasa hutan), dan lain sebagainya. Di samping itu, mereka mengenal pula apa yang dinamakan Lai (roh penguasa langit) dan Ndara (roh penguasa bumi). Fenomena-fenomena alam seperti guntur, hujan lebat, banjir, gempa, dan lain sebagainya, dianggap sebagai manifestasi amarah kedua jenis kekuatan

439. Lihat *Sejarah Tojo Una-Una*, halaman 181.

ini. Oleh karena itu, untuk menenangkan kedua kekuatan di atas perlu dilakukan berbagai upacara ritual yang dipimpin para *sando*.

Belum ada data sejarah yang pasti mengenai masuknya agama Islam ke daerah Sulawesi Tengah, tetapi berdasarkan arsip-arsip Belanda dan sumber-sumber lisan, dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Poso melalui tiga sumber, yakni melalui para pedagang Bugis, penagruh Kesultanan Ternate, dan orang-orang Arab. Meskipun demikian, para pedagang Bugis lebih banyak mengajarkan huruf-huruf Alquran dengan ejaan Bugis. Arsip Belanda yang berjudul *Mededeelingen van Het Bureau Voor de Bestuurzaken de Buitenbezettingen* menyebutkan bahwa masuknya agama Islam yang dibawa oleh para pedagang Bugis ke daerah Bungku, Mori, Tojo Una-Una, dan pesisir Poso berlangsung pada akhir abad 16.[440] Para pedagang Bugis tersebut merupakan peletak dasar bagi tersebarnya agama Islam di Sulawesi Tengah, walaupun perkembangannya setelah itu masih dapat dikatakan lambat. Sumber berikutnya adalah Kesultanan Ternate yang melebarkan pengaruhnya hingga ke kawasan itu, terutama semasa pemerintahan Sultan Hairun. Tokoh penyebar agama Islam pertama di Bungku adalah Datu Maulana Bajo Johar atau Syekh Maulana. Selanjutnya, penyiaran agama Islam diteruskan oleh Kasili, seorang pedagang rotan dari Ternate, dibantu oleh Merodong, mubalig setempat yang mahir berbahasa Arab serta sanggup meyakinkan masyarakat. Kasili pernah mengenalkan agama Islam kepada raja-raja Bungku, seperti Abdul Wahab (meninggal di Mekah), Ahmad Haji, dan Abdul Razak. Di Bungku dapat pula disaksikan masjid tua yang telah berusia sekitar 300 tahun dan diperkirakan seusia dengan kerajaan tersebut. Penyebar agama Islam dari Arab adalah Sayid Idrus bin Salim Aldjufrie, yang lahir pada 1880 di Hadramaut, Yaman. Ia merupakan putra Salim bin Alawy yang merupakan seorang ulama besar. Pada 1929, Sayid Idrus tiba di Wani dan hendak membuka sebuah madrasah di sana, tetapi upaya ini ditentang oleh pemerintah Belanda sehingga akhirnya ia beralih ke Palu. Penyebar agama Islam yang terkenal di Buol adalah Sayid Zen Al-Idrus dan Syarif Ali yang menikah putri bangsawan Buol bernama Saeran. Putranya yang terkenal adalah Syarif Mansur. Ia juga giat menyiarkan agama Islam dan pernah berangkat ke Manado untuk menentang pembayaran pajak kepada pemerintahan kolonial Belanda.

Tokoh utama penyebar agama Kristen di Sulawesi Tengah adalah Albert Christian (A.C.) Kruyt. Ia dilahirkan pada 10 Oktober 1869 di Desa Mojowarno, Jawa Timur.

---

440. Lihat *Sejarah Poso*, halaman 97.

Semenjak kecil, keluarganya telah mempersiapkannya menjadi seorang penginjil dan pada usia delapan tahun, ia dikirim ke Belanda untuk mempelajari teologi Kristen. Kruyt berhasil menamatkan pendidikannya dengan baik dan tepat waktu. Ia lalu memasuki sekolah *zending* atau misionaris. Bakatnya sebagai penyebar agama Kristen telah tampak pada saat itu. Setelah lulus dari sekolah misionaris, ia meneruskan lagi pelajarannya di rumah sakit Rotterdam guna menambah ilmu kedokteran. Pada 16 Juli 1890, Kruyt resmi ditahbiskan sebagai seorang penginjil. Ia mengawali kegiatan misionarisnya di Manado dan setelah itu pindah ke Poso. Salah satu keberhasilan Kruyt adalah menarik seorang *kabose* (kepala suku) bernama Papa I Woente di Pebato menerima pembaptisan setelah ia berhasil menyembuhkan anak kepala suku tersebut yang menderita luka bakar. Ketika Kruyt menyampaikan rencananya mendirikan sekolah, Papa I Woente menyambutnya dengan baik. Sejak saat itu, agama Kristen makin berkembang di kawasan Poso dan sekitarnya.

F. KERAJAAN-KERAJAAN DI SULAWESI SELATAN

Di Sulawesi Selatan terdapat tiga kerajaan utama, yaitu Gowa, Luwu, dan Bone. Masing-masing kerajaan ini mempunyai sebutan sendiri bagi rajanya, yakni *sombaya*, yang berarti 'Yang disembah' di Gowa, *mappajunge,* yang berarti 'Yang berpayung' di Luwu, dan *mangkau'e,* yang berarti 'Yang bertakhta' di Bone. Karenanya, sehubungan dengen ketiga penguasa kerajaan besar di atas dikenal istilah Sombaya Ri Gowa (Yang Disembah di Gowa), Pajunge Ri Luwu (Yang Berpayung Di Luwu), dan Mangkau'e Ri Bone (Yang Bertakhta atau Memerintah di Bone). Selain ketiga kerajaan besar itu, masih banyak lagi kerajaan-kerajaan kecil yang berdiri sendiri atau menjadi vasal atau daerah taklukan bagi negara-negara besar di atas. Kerajaan-kerajaan lain yang lebih kecil itu antara lain Soppeng, Wajo, Tanete, Barru, dan lain sebagainya. Kita mengenal pula kerajaan-kerajaan yang berupa federasi atau gabungan berbagai negeri kecil, seperti Ajataparreng atau federasi kerajaan di sebelah barat danau yang beranggotakan Sawitto, Sidenreng, Suppa, Mallusetasi, dan Rappang. Masih ada lagi federasi Massenrempulu', yang artinya 'Kerajaan-kerajaan di sekitar gunung'. Adapun anggotanya antara lain adalah Enrekang, Maiwa, Malua (Malluwa), Allak (Alla'), dan Buntubatu.

Kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan dapat dibedakan pula berdasarkan sukunya, seperti Kerajaan Gowa dan Tallo yang didirikan suku Makassar. Kerajaan suku Bugis

antara lain Kerajaan Luwu, Bone, Soppeng, Wajo, Tanete, dan Sawitto. Gelar bagi raja di kerajaan-kerajaan yang berbeda suku itu juga berlainan. Raja-raja di negeri suku Makassar biasanya bergelar *karaeng*. Sementara itu, suku Bugis menggelari penguasannya dengan *aru* atau *arung*.

Setelah seorang raja meninggal, umumnya ia memperoleh tambahan gelar anumerta yang berkaitan dengan kondisi atau keadaan saat raja itu wafat. Hal ini berlaku bagi hampir seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan, seperti Gowa, Luwu, Bone, Soppeng, Wajo, dan lain sebagainya. Contohnya adalah Sultan Alauddin, Raja Gowa ke-14, yang bergelar Tumenanga ri Gaukanna, artinya adalah 'Yang wafat dalam perbuatan baiknya'. Sultan Malikussaid, Raja Gowa ke-15, memperoleh gelar Tumenanga ri Papambatunna atau 'Yang wafat pada (papan) batu tulisnya'. Gelar ini diberikan karena Sultan Malikussaid mempunyai tulisan tangan yang bagus.

Pada 1906, ketika kerajaan-kerajaan terkuat di Sulawesi Selatan–Bone dan Gowa–telah takluk kepada Belanda, hampir seluruh kerajaan di kawasan tersebut mengakui pertuanan Belanda melalui penandatanganan *Korte Verklaring*. Pemerintah kolonial Belanda kemudian melakukan reorganisasi pemerintahan dengan membentuk berbagai *afdeeling* serta *onderafdeeling*,[441] yaitu

- *Afdeeling* Bone dengan Pompanua sebagai ibu kotanya dan setelah itu dipindahkan lagi ke Watampone, yang terbagi menjadi:
  - *(i)* *Onderafdeeling* Bone Tengah, yang meliputi bagian tengah bekas Kerajaan Bone.
  - *(ii)* *Onderafdeeling* Bone Utara, yang meliputi bagian utara bekas Kerajaan Bone.
  - (iii) *Onderafdeeling* Bone Selatan, yang meliputi bagian selatan bekas Kerajaan Bone.
  - (iv) *Onderafdeeling* Wajo yang meliputi Kerajaan Wajo.
  - (v) *Onderafdeeling* Soppeng, yang meliputi Kerajaan Soppeng.
- *Afdeeling* Pare-Pare dengan Pare-Pare sebagai ibu kotanya, yang terbagi menjadi
  - *(vi)* *Onderafdeeling* Barru, yang meliputi Kerajaan Tanete, Barru, dan Soppeng Riaja.
  - *(vii)* *Onderafdeeling* Pare-Pare, yang meliputi Kerajaan Mallusetasi dan Suppa.
  - *(viii)* *Onderafdeeling* Sidenreng, yang meliputi Kerajaan Sidenreng dan Rappang.

441. Lihat *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*, halaman 74–75.

(ix) *Onderafdeeling* Massenrempulu, yang meliputi Kerajaan Enrekang, Maiwa, Allak, Malua, dan Buntubatu.

(x) *Onderafdeeling* Pinrang, yang meliputi Kerajaan Sawitto, Batulappa, dan Kassa.

- *Afdeeling* Mandar dengan Majene sebagai ibu kotanya, yang terbagi menjadi

  (xi) *Onderafdeeling* Polewali, yang meliputi Kerajaan Balanipa dan Binuang.

  (xii) *Onderafdeeling* Majene, yang meliputi Kerajaan Majene, Pambauang, dan Cenrana.

  (xiii) *Onderafdeeling* Mamuju, yang meliputi Kerajaan Tappalang dan Mamuju.

  (xiv) *Onderafdeeling* Mamasa, yang meliputi distrik-distrik beragama Kristen di Kerajaan Mamuju, Binuang, dan Balanipa.

- *Afdeeling* Luwu dengan Palopo sebagai ibu kotanya, yang terbagi menjadi

  (xv) *Onderafdeeling* Palopo, yang meliputi sebagian Kerajaan Luwu.

  (xvi) *Onderafdeeling* Masamba, yang meliputi sebagian lain Kerajaan Luwu.

  (xvii) *Onderafdeeling* Malili, yang meliputi sebagian lain Kerajaan Luwu.

  (xviii) *Onderafdeeling* Kolaka, yang meliputi sebagian lain Kerajaan Luwu.

  (xix) *Onderafdeeling* Makae, yang meliputi sebagian lain Kerajaan Luwu.

- *Afdeeling* Sungguminasa dengan Sungguminasa sebagai ibu kotanya, yang terbagi menjadi

  (xx) *Onderafdeeling* Gowa, yang meliputi daerah Kerajaan Gowa.

  (xxi) *Onderafdeeling* Takalar, yang meliputi daerah-daerah diperintah langsung oleh pemerintah Hindia Belanda.

  (xxii) *Onderafdeeling* Janeponto, yang meliputi daerah-daerah diperintah langsung oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pengangkatan raja-raja yang berada di masing-masing kerajaan dilakukan oleh Gubernur Jenderal Belanda. Setelah diangkat, mereka wajib menandatangani *Korte Veklaring* sebagai wujud kepatuhan mereka terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pada praktiknya, para raja ini sedikit sekali peranannya karena urusan sehari-hari ditangani oleh kontrolir berkebangsaan Belanda atau *gezaghebber* beserta anak buahnya.

Semangat nasionalisme bangsa Indonesia mulai bangkit pada 1908. Belanda menyadari hal ini sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Oleh karenanya, Belanda berniat melakukan pembaharuan sistem pemerintahan kerajaan yang berada di

bawah kekuasaannya dengan memberikan lebih banyak peranan terhadap para raja guna membendung arus kesadaran nasional ini. Semenjak 1926, Belanda mulai mendekati lagi para raja dan kepala swapraja. Istilah *landschap* untuk daerah kerajaan diganti dengan swapraja (*zelfbestuur*). Sedangkan daerah-daerah kesatuan adat diganti dengan istilah *adatgemeenschap* (persekutuan adat). Fungsi kepala-kepala adat itu makin ditonjolkan dan upacara pengangkatan mereka yang hampir dilupakan kini dihidupkan kembali. Dengan kata lain, Belanda ingin membangkitkan lagi semangat kedaerahan. Sebagian tindak lanjut reorganisasi politik ini, pada 24 Februari 1940 pemerintah kolonial melakukan perombakan terhadap tatanan pemerintahan di Karesiden Sulawesi Selatan, yaitu[442]

- *Afdeeling* Makassar dengan Makassar sebagai ibu kotanya, yang terbagi menjadi
    - *(i)* *Onderafdeeling* Makassar dengan ibu kota Makassar, yang meliputi distrik Makassar, Wajo, Ujung Tanah, dan Mariso.
    - *(ii)* *Onderafdeeling* Maros dengan ibu kota Maros, yang meliputi persekutuan adat Bontoa, Bira, Biringkanaya, Moncong, Loe, Sudiang, Camba, Mallawa, Cenrana, Laiya, Gantarang, Matinggi, Simbong, Wanua Waru, Marusu, Tanralili, Turikale Lau.
    - *(iii)* *Onderafdeeling* Pangkajene dengan Pangkajene sebagai ibu kotanya, yang meliputi persekutuan adat Pangkajene, Bungoro, Lakbakkang, Sigeri, Madalle, Makrang, dan Balocci.
    - *(iv)* *Onderafdeeling* Gowa dengan Sungguminasa sebagai ibu kotanya yang meliputi Swapraja Gowa.
    - *(v)* *Onderafdeeling* Jeneponto Takalar dengan Jeneponto sebagai ibu kotanya, yang meliputi persekutuan adat Binamu (mencakup Tino, Rumbia, dan Pacinongan), Taroang, Arungkeke, Bangkala, Laikang, Topejawa, Lengkese, Pappa, Laktong, Sanrobone, Polongbangkeng, Tompotana, Kalukuang, Bauluang, Satanga, dan Galesong.
- *Afdeeling* Bantaeng dengan Bantaeng sebagai ibu kotanya, yang terbagi menjadi
    - *(vi)* *Onderafdeeling* Bantaeng dengan Bantaeng sebagai ibu kotanya, yang meliputi persekutuan adat Bantaeng.
    - *(vii)* *Onderafdeeling* Selayar dengan Benteng sebagai ibu kotanya, yang meliputi persekutuan adat Tanete, Batangmata, Onta, Buki, Bonea, Bontobangung,

442. Lihat *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*, halaman 79–81.

Benteng, Balakbulo, Laiolo, Barang-Barang, Tambolongang, Kayuadi, Bonerate, Rajuni, Kalao, Kalaotoa, dan Jampea.

(viii) *Onderafdeeling* Bulukumba dengan Bulukumba sebagai ibu kotanya, yang meliputi persekutuan adat Bulukumba Tua, Gantarang, Unjung Loe, Kindang, Bira, Ara, Tiro, Batang, Bonto Tanga, Tanaberu, Lemo-Lemo, Wero, dan Kajang. Selain itu, masih ada kampung-kampung yang berdiri sendiri, seperti: Terang-Terang, Nipa, Kasuarang, Kasumpurang, Tanakongkong, dan Kalumeme.

(ix) *Onderafdeeling* Sinjai dengan Sinjai sebagai ibu kotanya, yang meliputi persekutuan adat Bulo-Bulo Timur, Lamatti, Tondong, Bulo-Bulo Barat, Manipi, Turungang, dan Manimpahoi.

- *Afdeeling* Bone dengan Watampone sebagai ibu kotanya, yang terbagi menjadi

(x) *Onderafdeeling* Bone dengan Watampone sebagai ibu kotanya, yang meliputi Swapraja Bone.

(xi) *Onderafdeeling* Wajo dengan Sengkang sebagi ibu kotanya, yang meliputi Swapraja Wajo.

(xii) *Onderafdeeling* Soppeng dengan Watang Soppeng sebagai ibu kotanya, yang meliputi Swapraja Soppeng.

- *Afdeeling* Pare-Pare dengan Pare-Pare sebagai ibu kotanya, yang terbagi menjadi

(xiii) *Onderafdeeling* Pare-Pare dengan Pare-Pare sebagai ibu kotanya, yang meliputi Swapraja Suppa dan Mallusetasi.

(xiv) *Onderafdeeling* Barru dengan Barru sebagai ibu kotanya, yang meliputi Swapraja Barru, Tanete, dan Soppeng Riaja.

(xv) *Onderafdeeling* Pinrang dengan Pinrang sebagai ibu kotanya, yang meliputi Swapraja Sawitto, Batulappa, dan Kassa.

(xvi) *Onderafdeeling* Sidenreng Rappang dengan Rappang sebagai ibu kotanya, yang meliputi Swapraja Rappang dan Sidenreng.

(xvii) *Onderafdeeling* Enrekang (Massenrempulu) dengan Enrekang sebagai ibu kotanya, yang meliputi Swapraja Enrekang, Maiwa, Allak, Malua, dan Buntubatu.

- *Afdeeling* Mandar dengan Majene sebagai ibu kotanya, yang terbagi menjadi

(xviii) *Onderafdeeling* Majene dengan Majene sebagai ibu kotanya, yang meliputi Swapraja Majene, Pembauang, dan Cenrana.

(xix) *Onderafdeeling* Mamuju dengan Mamuju sebagai ibu kotanya, yang meliputi Swapraja Mamuju dan Tappalang.

(xx) *Onderafdeeling* Polewali dengan Polewali sebagai ibu kotanya, yang meliputi Swapraja Binuang dan Balanipa.

(xxi) *Onderafdeeling* Mamasa dengan Mamasa sebagai ibu kotanya, yang meliputi distrik Tabulahan, Aralo, Mambi, Rantebulahan, Matanga, Bambang, Mamasa, Tabone, Tawalian, Rantetanga, Melabo, Orobua, Ulusalu, Pana, Manipi, dan Massawa.

- *Afdeeling* Luwu dengan Palopo sebagai ibu kotanya, yang terbagi menjadi

(xxii) *Onderafdeeling* Palopo dengan Palopo sebagai ibu kotanya, yang meliputi sebagian Swapraja Luwu.

(xxiii) *Onderafdeeling* Masamba dengan Masamba sebagai ibu kotanya, yang meliputi Swapraja Luwu.

(xxiv) *Onderafdeeling* Malili dengan Malili sebagai ibu kotanya, yang meliputi Swapraja Luwu.

(xxv) *Onderafdeeling* Makale Rante Pao dengan Makale sebagai ibu kotanya, yang meliputi sebagian lain Swapraja Luwu.

(xxvi) *Onderafdeeling* Kolaka dengan Kolaka sebagai ibu kotanya, yang meliputi sebagian Swapraja Luwu.

- *Afdeeling* Buton dan Laiwui, yang meliputi Swapraja Buton dan Laiwui.

Senjata Bugis Makassar
Foto koleksi pribadi, diambil dari Museum Nasional Indonesia, Jakarta

I. ALLAK (ALLA)

Kerajaan Allak (Alla) berasal dari pemecahan Kerajaan Duri menjadi tiga, yakni Allak (Alla), Malua, dan Buntubatu. Leluhur raja-raja Allak adalah Manang yang memiliki anak bernama Mappa. Pernikahan Mappa dengan Esso dikaruniai putra-putra yang bernama Patta Mattaelo, Mangke, Patta Janggo, dan Patta Lengkong. La Taha menikah dengan Kabe dan menurunkan putra-putra bernama Daeng Passanda, Patta Calapa, Patta Pende, dan Paraaba, serta seorang putri bernama Kaapung. Patta Janggo menikah dengan Patta Balu dan menurunkan putra-putra bernama Mangesa dan Patta Balu, sedangkan nama-nama putri mereka adalah Kabe, Walle, Ossing, Mamang, Sangga, serta Maniro. Mangesa menikah dengan Adinge dan berputra I Lorong (–1913), yang menjadi Raja Allak. Ia digantikan secara berturut-turut oleh La Wello Ijena Banti (1913–1936) dan Pasanrangi (1936–1950).

Menurut sumber lainnya, raja pertama Alla adalah Mariang (±1640–1665). Wilayahnya meliputi Alla, Baroko, dan Curio.[443] Setelah masa pemerintahan Mariang, tidak diketahui lagi raja-raja yang memerintah Alla hingga munculnya seorang raja bernama I Lorong (1890–1911). Pada masa pemerintahannya, Belanda berupaya menaklukkan Sulawesi Selatan dan menyerang Kerajaan Alla pada September dan Oktober 1905[444] yang diikuti dengan penempatan pasukan pemerintahan pada 1906 di Kalosi. Tindakan Belanda tersebut memancing kebencian rakyat Alla hingga akhirnya pada 1906 terjadi pertempuran di benteng Alla dan Lintik. Meskipun demikian, benteng pertahanan ini baru jatuh ke tangan pemerintah kolonial pada 1907. Akibatnya, I Lorong harus menand-tangani *Korte Verklaring* pada 11 Januari 1909. I Lorong meletakkan jabatannya pada 1911 karena usia yang telah lanjut. Ia digantikan oleh La Wello (1911–1937).

Berbeda dengan adat sebelumnya, dikarenakan Kerajaan Alla telah dikuasai oleh pemerintah kolonial, pengangkatan raja harus atas persetujuan Belanda. La Weelo kemudian digantikan oleh Pasandangi (1937–1957).

II. ALLITA

Kerajaan Allita di Sulawesi Selatan kelak dilebur ke dalam Kerajaan Sawitto. Raja-rajanya bergelar *arung*. Leluhur raja-raja Alitta adalah La Cella Mata, Raja Sawitto.

443. Lihat *Sejarah Massenrempulu 1*, halaman 124–125.
444. Lihat *Sejarah Massenrempulu 1*, halaman 127.

Ia memiliki seorang putri bernama We Cella yang dianggap sebagai Ratu Allita pertama.[445] Ibunya adalah We Lampe' Weluwa', *Datu* (Raja) Suppa kelima.[446] Putranya La Masora (La Massora) menjadi penguasa Alitta kedua. La Masora menikah dengan We Passule dan dikaruniai putri bernama We Tenrilekke. Ia kemudian dinobatkan sebagai Ratu Alitta ketiga. We Tenrilekke menikah dengan La Tonee dari Rappang dan dikaruniai putri-putri yang masing-masing bernama We Tassi dan We Cella. Putri yang disebutkan belakangan ini (We Cella) dinobatkan sebagai Ratu Allita keempat. Ia menikah dengan Datu Bulubangi. Putra mereka La Pamessangi (1700–1740) menjadi Raja Alitta ke-5 dan sekaligus Datu Suppa ke-18. Ia digantikan oleh La Patasi, putranya, yang dengan demikian merupakan Raja Alitta ke-6.

Menurut sumber lainnya, leluhur para penguasa Alitta adalah seorang wanita bernama We Bungkokungu, yang muncul di tempat bernama Bujung Pitue, yang secara harfiah berarti 'Tujuh Sumur'. Ia menikah dengan seorang bangsawan dari Alitta, namun kemudian kembali lagi ke Dunia Atas. We Bungkokungu hanya turun kembali ke dunia sekali dalam seminggu dan pada saat itulah sepasang suami istri itu dapat berjumpa.[447] Ada pula sumber yang menyebutkan nama-nama penguasa Alitta adalah La Gojéq, Wé Celloq, dan La Massora.[448]

Sumber lain lagi menyebutkan bahwa Raja Alitta kedua yang menggantikan We Cella adalah La Gojeng, yang merupakan putra La Patiroi, Raja Sidenreng, dan We Tosappai, Datu Suppa. Masa pemerintahan La Gojeng tidak lama karena mangkat saat masih kanak-kanak. Dia dimakamkan bersama dengan mainannya yang terbuat dari emas.[449] ia digantikan oleh La Massora, yang merupakan putra We Cella, Ratu Alitta pertama sebagaimana telah disebutkan di atas. Dengan demikian, menurut sumber ini La Massora ditempatkan sebagai penguasa ketiga di Alitta. Pengganti La Massora adalah putrinya bernama We Tenrilekka yang menikah dengan La Tonang, *Arung* (Raja) Rappang. Dia digantikan kembali oleh putranya bernama Moppangnge yang tidak lama memerintah. Anak pertamanya bernama We Tasi' Petta Maubbengnge,

445. Urutan raja-raja Alitta sebagian besar diambil dari manuskrip Hans Hägerdal berjudul Kerajaan2 Indonesia: *An Alphabetic Enumeration of the Former Princely States of Indonesia, from the earliest time to the modern period, with simplified genealogies and order of succession*, halaman 5.

446. Lihat *Para Penguasa Ajatappareng: Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis*, halaman 250.

447. Lihat *The Lands West of The Lakes: A History of The Ajattappareng Kingdoms of South Sulawesi 1200–1600 CE*, halaman 198.

448. Lihat *The Lands West of The Lakes: A History of The Ajattappareng Kingdoms of South Sulawesi 1200–1600 CE*, halaman 316

449. Lihat *Para Penguasa Ajatappareng: Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis*, halaman 251.

yang kelak menggantikan ayahnya menjadi Arung Rappang. Moppangnge digantikan oleh saudarinya atau anak ketiga We Tenrilekka yang bernama We Cella. Penguasa Alitta berikutnya menurut sumber ini adalah La Toware, yang digantikan oleh La Pamessangi. Pengganti La Pamessangi adalah La Pattasi.

Putra La Pamessangi bernama La Raga Arung Belawa menikah dengan We Tasi Arung Ganrang yang menjadi Ratu Alitta ke-7 (sumber lain menyebutkan bahwa pengganti La Pattasi adalah We Pasa').[450] ia digantikan oleh La Posi, putra La Pamessangi lainnya. Raja Alitta ke-9 adalah To Sibengare (Tosibengareng), putra La Patasi. Putri To Sibengare bernama We Mapalewa (We Mappalewa) menjadi Ratu Alitta ke-10. Semasa pemerintahannya, berlangsung peperangan antara Suppa dan Belanda, tepatnya pada 1825.[451] Dalam peperangan tersebut, Belanda mendapat dukungan Sidenreng. Pada mulanya, We Mapalewa berniat memberikan dukungannya kepada Sidenreng karena ia merasa lebih dekat kekerabatannya dengan Sidenreng. Kendati demikian, dewan adat menyatakan bahwa Alitta, Suppa, dan Sawitto hendaknya tidak dipisahkan satu sama lain. Karena pendiriannya itulah, dewan adat lantas memberhentikan We Mapalewa sebagai Arung Alitta.

Selanjutnya, Alitta diperintah oleh Muhamed Tahir Daeng Mamaro, yang digantikan oleh saudarinya, Aru Patta Lacabalai (memerintah hingga 1859).[452] Seorang wanita kembali menjadi penguasa negeri ini selaku Ratu Alitta ke-13, yakni saudari Aru Patta Lacabalai, Aru Anipong (Nipo, 1859–1861). Penguasa Alitta berikutnya juga seorang wanita, yakni cucu perempuan Aru Patta Lacabalai, We Tenripadarang Bau Jella (1861–1902).

We Tenripadarang atau Ratu Alitta ke-14 merupakan putri Raja Bone yang bernama La Panrenrengi Sultan Ahmad Saleh dengan I Basse Tanriwaru Kajuwarahadi Abel Hadi Pelaiengi Pasimpa (Basse Kajuwara)[453], Ratu Suppa dan Bone (memerintah pada 1860–1881). Ia bersuamikan Sultan Muhammad Idris (1895–1906) dari Gowa. Menurut catatan *Regeerings-Almanak*, Ratu We Tenripadarang menerima pengukuhan dari pemerintah kolonial Belanda pada 20 Juli 1890. Ratu Alitta ini kemudian turun takhta dan digantikan oleh putranya, La Pangorisang (La Pangurisang, 1902–

450. Lihat *Para Penguasa Ajatappareng: Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis*, halaman 291.
451. Lihat *Para Penguasa Ajatappareng: Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis*, halaman 259.
452. Lihat http://www.guide2womenleaders.com/womeninpower/Womeninpower1840.htm (diunduh tanggal 24 September 2009).
453. Ada sumber lain yang mencantumkan gelarnya sebagai I Basse Tenri Awaru (Tenriwaru) Besse Kajuara Pancaitana Mpelai Engi Passempe.

1906), yang mendapatkan pengesahan dari pemerintah kolonial pada 2 Juli 1903. Selanjutnya, ia digantikan oleh La Bonde (Bode) Karaeng Ri JampuE (1906–1908), yang dikukuhkan kedudukannya pada 13 April 1906. Alitta kemudian disatukan dengan Sawitto pada 1908 dan turun statusnya menjadi salah satu negara bawahan atau distrik di Kerajaan Sawitto.

Sumber lain menyebutkan nama-nama Raja Alitta yang agak berbeda setelah masa pemerintahan We Mapalewa, yakni Muhammad Saleh Arung Sijelling, We Cella, La Pangoriseng, dan La Bode.[454] Masih menurut sumber yang sama, Muhammad Saleh Arung Sijelling adalah saudara La Tenrilekka, Datu Suppa, dan La Cibu, *Addatuang* (Raja) Sawitto. Ia diangkat menjadi penguasa Alitta karena We Mapalewa diberhentikan oleh dewan adat, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Menurut data yang diberikan oleh Yang Mulia Bapak Andi Hasan Parigi Petta Nassa, para penguasa Alitta berikutnya adalah Andi Sitta, Ake Puang Haji (Andi Ake), Labiding (Andi Abiding), Ambo Patta (Puang Ambo Patta), La Moddu (Puang Moddu), La Selle Daeng Mattola (Andi Selle Mattola), La Makkasau Daeng Perumpa (Andi Makkasau), La Binang (dibunuh oleh Westerling), La Bakkaredding (Labading), La Naga, dan Andi Muhammad Nur.

III. BANGKALA

Leluhur raja-raja Bangkala adalah *to manurung* (manusia yang berasal dari langit) wanita yang menikah dengan putra penguasa Tanatoa. Konon, salah seorang pemuka masyarakat asal Panaikang menemukan *to manurung* wanita bernama Banrimanurung dalam suatu ruas bambu.[455] ia lantas membawanya pulang dan membesarkannya. Suatu kali, seorang pangeran Tanatoa bernama Karaeng Karurang pergi berburu bersama anjingnya dan tiba di Panaikang. Ia singgah di rumah pemuka masyarakat tersebut dan jatuh cinta dengan Banrimanurung. Keduanya menikah dan kembali ke Tanatoa. Ayah sang pangeran juga terpesona oleh kecantikan Banrimanurung dan ingin menikahi menantunya itu. Oleh karenanya, pangeran beserta istrinya melarikan diri ke Panaikang dan menantikan serangan ayahnya. Pertempuran pecah di Kalimporo. Banrimanurung menggunakan kekuatan gaibnya untuk mengubah potongan-potongan bambu menjadi prajurit dan mengalahkan serangan Tanatoa.

454. Lihat *Para Penguasa Ajatappareng: Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis*, halaman 291.
455. Lihat *The Early History of Binamu and Bangkala, South Sulawesi*, halaman 481–482.

Pangeran beserta istrinya lantas menetap di Bangkala. Setelah melahirkan seorang putra bernama Karaeng Ujung Moncong, Banrimanurung lenyap entah ke mana. Putranya itu kemudian diangkat sebagai Raja Bangkala pertama. Kisah ini yang dapat dijumpai di Bangkala.

Bangkala makin berkembang dan dapat menguasai Tanatoa, Garassikang, Pallenguq, Mallasoro, Nasaraq, Rukuruku, dan Laikang. Sedangkan daerah yang langsung diperintah oleh Bangkala adalah Pattopakang, Panyalangkang, Punaga, Canraigo,Cikoang, Pangkajeqne, Baraqn, dan Beroanging.[456] Terdapat tiga versi urutan raja-raja Bangkala, yaitu (1) *Silsilah Bangkala*: putra penguasa Kalimporo–Saupalige – Batara Langi – Latena Bangkala – Tumalompoa Battana – Karaeng Banyowanyara, (2) *Naskah Daeng Mino*: Karaeng Paurang – Sau Palengnge – Batara Guru – I Golla Taua – Atinna Bangkala – Laqbua Talibannanna – Karaeng ri Bungaya – Karaeng ri Lure – Muhammad Daeng Manyauru Karaeng Tobalia, dan (3) *Lontarak Makassar Apannassi Karaeng Ujung Moncong*: Karaeng Pauranga – Liampayabang–Batara Langi–I Golla Taua–Latena Bangkala–Laqbua Talibannanna–Karaenta ri Bungaya, Karaenta ri Lure, Tumamena ri Pakaru – Karaenga ri Layu.

IV. BANTAENG

Diperkirakan Bantaeng telah berdiri semenjak abad 14, dibuktikan dengan penyebutannya sebagai Bantayan dalam *Negarakertagama*. Cikal bakal Kerajaan Bantaeng adalah seorang *to manurung* bernama To Manurunga ri Onto. Konon, kedatangannya didahului dengan munculnya petir dan guntur. To Manurunga ri Onto hanya hadir sewaktu-waktu saja sehingga urusan pemerintahan tetap dijalankan oleh suatu dewan adat bernama Tau Tujua (Tujuh Orang Kepala Kaum) di bawah pimpinan Rampang Onto. Pada perkembangan selanjutnya, mereka sepakat mengangkat Karaeng LoE sebagai Raja Bantaeng pertama yang berkedudukan di Onto.

Pada masa pemerintahan raja Bantaeng yang ke-3, Puntadolongeng, diadakan musyawarah membicarakan nama kerajaan mereka. Akhirnya, diputuskan bahwa kerajaan akan dinamakan *Kakaraengnga ri Bantaeng* (Kerajaan Bantaeng). Ibu kota kerajaan dipindahkan dari Onto ke Karatuang dan ditetapkan pula struktur pemerintahan sebagai berikut[457]

456. Lihat *The Early History of Binamu and Bangkala, South Sulawesi*, halaman 485.
457. Lihat *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 151.

- Pemimpin tertinggi di Kerajaan Bantaeng adalah seorang raja yang bergelar *karaeng*.
- Gallarang Bantaeng bertindak selalu Perdana Menteri atau Mangkubumi Kerajaan Bantaeng.
- Apabila raja berhalangan, yang menggantikannya adalah Karaeng Sulewatang.
- Kepala pemerintahan di daerah pengunungan dipegang oleh Karaeng Tompokbulu'.
- Terdapat dewan adat bernama Adak Sampulongruwa yang bertugas menjaga adat istiadat beserta tradisi Bantaeng dan menyusun tata tertib hukum kerajaan.

Semenjak awal berdirinya hingga masa awal kemerdekaan, terdapat 30 raja yang berkuasa di Bantaeng. Rajanya yang terakhir adalah Karaeng Mallapiang (1942–1945). Menurut sejarah, Bantaeng pernah ditaklukkan dan berada di bawah hegemoni Gowa. Ketika VOC mengalahkan Gowa, Bantaeng diambil alih oleh Belanda. Peninggalan-peninggalah sejarah Kerajaan Bantaeng antara lain adalah Balla Lampoa (Rumah Besar), Pappunniangnga atau tempat penobatan raja-raja Bantaeng, dan naskah-naskah seperti *Lontarak Bantaeng* beserta *Patturiolonga ri Tugowaya*.

V. BARRU

Sebelum berawalnya era kerajaan, Barru dirintis oleh seorang tokoh bernama Puang ri Bulu Puang ri Campa. Kemudian datanglah seorang keturunan Manurunge ri Janga-Janga yang menjadi Raja Barru pertama. Ia bergelar Karaeng Palluwa Daeng Patanrawanna. Konon, ia berasal dari Bone.[458] Sementara itu, menurut sumber lainnya raja pertama Barru adalah To Pawalaie, yang digantikan oleh Matinroe ri Kasuwarang, Matinroe ri Daung Lesang, Matinroe ri Data, Matinroe ri Bulu, Matinroe ri Lamuru, Matinroe ri Ajuarae, dan Matinroe ri Tengana Barru. Matinroe ri Tengana Barru mempunyai dua orang putra, yakni Matinroe ri Duwa-jenna dan Toriwetae ri Bampung. Masing-masing menjadi raja Barru ke-9 dan 10. Rangkaian raja-raja Barru selanjutnya adalah Matinroe ri Gamecana (ratu), I Limpo Daeng Manakko (ratu), La Mallewai Matinroe ri Tana Maridie (± 1702), Werakkia Karaeng Agangjene Matinroe ri Siddenreng (ratu), Toappo (To Appok, merangkap Addatuang Sidenreng ke-8), Toapasawe Matinroe ri Amalana, dan To Patarai Matinroe ri Masigina (± 1815–1836).

458. Lihat *Profil Raja & Pejuang Sulawesi Selatan*, jilid 1, halaman 68.

To Patarai digantikan putrinya, I Tenripada Sultana Aisyah (1836–1887), yang menikah dengan Raja Gowa ke-33, Sultan Muhammad Idris (1893–1895). Pernikahan itu dianugerahi putra-putri yang bernama I Makkulau Karaeng Lembang Parang, I Maggulanga Karaeng Popo, I Buntak Irang Karaeng Mandalle, I Topaterai Karaeng Pabbundukang, I Mangimangi Daeng Mattutu Karaeng Lengkese, I Batari Arung Barru, dan I Balonlong Karaeng Tanete. Selanjutnya, Barru diperintah oleh Ratu I Batari Toja (1887–1908), yang menurut *Regeerings-Almanak* menerima pengukuhan dari pemerintah kolonial pada 24 Maret 1888 dan 19 Juli 1906. Semasa pemerintahannya, tepatnya pada 1905, berkecamuk peperangan antara Barru dan Tanete. Pemenangnya adalah Tanete yang ketika itu dipimpin oleh La Tenriolle atau Siti Aisyah La Tenriolle (1856–1910). Wilayah Lipukasi kemudian direbut oleh Tanete.[459]

Batari Toja digantikan oleh I Jonjo Karaeng Lembangparang (1908–1945) yang berdasarkan catatan *Regeerings-Almanak* dikukuhkan kedudukannya pada 27 Desember 1911. Ia digantikan putranya, Andi Sadapoto (1945–1947 / 1949).[460] Para penguasa terakhir Barru adalah Bau Saheribanong Karaengta Tanite (1949–1951, ratu) dan Sumange Ruka (1951–1960).

VI. BATULAPPA

Wilayah Kerajaan Batulappa kini terletak di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang. Kerajaan Batulappa merupakan salah satu di antara kerajaan-kerajaan Massenrempulu. Batulappa pernah diperintah oleh Puang Baso (1750–1780). Ia digantikan putrinya, Aru We Langrungi Puang Buttukanan[461] yang bergelar anumerta Matinroe ri Sikkirana, memerintah ± 1780–1800). Ratu Aru We Langrungi Puang Buttukanan kemudian digantikan oleh putranya, Puang Mali Conra (± 1800–1840). Rangkaian penguasa Batulappa selanjutnya adalah Semagga (± 1840–1862), Puang Pondi Luwu (± 1862–1880), Puang Mosang Andi Baso (± 1880–1886), Andi I Coma (1886–1941)[462], Andi Tanri (1941–1950), dan Puang Tarokko Padiring (1950–).

459. Lihat *Profil Raja & Pejuang Sulawesi Selatan*, jilid 1, halaman 68.
460. Lihat *Profil Raja & Pejuang Sulawesi Selatan, jilid 1*, halaman 68. Sumber lain menyebutkan ia memerintah hingga1949.
461. Lihat *http://www.guide2womenleaders.com/womeninpower/Womeninpower1800.htm* (diunduh pada 24 September 2009).
462. Dalam *http://www.guide2womenleaders.com/womeninpower/Womeninpower1870.htm* (diunduh pada 24 September 2009) disebut Aru I Coma (1890–1933).

Menurut sumber lainnya, penguasa pertama Batulappa adalah seorang *to manurung*, hanya saja terdapat dua versi mengenai *to manurung* tersebut. Versi pertama menyebutkan mengenai To Manurung Palipada, leluhur Kerajaan Enrekang. Keturunan kesembilan To Manurung Palipada adalah seseorang bergelar Matinro Pakalabinna Puang Cemba, yang tak diketahui nama aslinya. Ia menikah dengan Makke dan memiliki dua orang anak, yakni Matindo Membura (kelak menjadi Puang Cemba) dan Daeng Manrapi Puang Madeakaju Enrekang, yang menikah dengan putri Raja Sawitto, Subahana. Pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Baso Puang Buttu Kanan dan Bosu Matindo Tallonganna.

Baso Puang Buttu Kanan (1665–1700) lantas menjadi Raja Batulappa, sedangkan saudaranya, Bosu Matindo Tallonganna, menjadi Raja Kassa. Sebagai catatan, Baso Puang Buttu Kanan sendiri dihitung sebagai Raja Batulappa ke-9. Raja-raja sebelumnya tidak diketahui namanya. Versi kedua menyebutkan bahwa *to manurung* di Batulappa pertama turun di Palli Kalupipini dan Maiwa. Ia merupakan pendiri Kerajaan Batulappa. Asal muasal nama Batulappa berasal dari *batu malappa* (batu datar) karena *to manurung* tersebut dilantik oleh rakyat di atas sebuah batu datar.[463] Pusat pemerintahan Batulappa kemudian berpindah dari Kampung Rada, Bamba, dan selanjutnya Bungi.

Raja Batulappa berikutnya adalah Wellangrungi (1700–1740) yang merupakan anak Baso Puang Buttu Kanan dengan Besse Pinrang. Setelah tidak mampu lagi memangku jalannya pemerintahan, ia digantikan oleh anaknya, Conra Puang Maling (1745–1775). Ia merupakan putra Wellanrungi dengan Puang Besse Enrekang (Palisuri).[464] Pengganti Conra Puang Maling adalah Sompa (1775–1815), saudaranya. Selain menjadi Raja Batulappa, Sompa juga menjadi Arung Buttu ke-7. Raja selanjutnya adalah Semagga (1815–1840), yang merupakan putra Sompa dengan istri keduanya, Buba. Raja Batulappa berikutnya adalah Baso Puang Moseng Arung Temmate (1840–1875), cucu Sompa. Semasa pemerintahannya, pusat Kerajaan Batulappa dipindahkan ke Bungi.

Pengganti Baso Puang Moseng Arung Temmate adalah I Coma (1875–1941), kemenakannya dan putri Tanri Arung Buttu Batu, saudara Baso Puang Moseng Arung Temmate. Karena tak memiliki anak maka I Coma diangkat sebagai anak oleh

---

463. Lihat *Sejarah Massenrempulu 1*, halaman 34.
464. Lihat *Sejarah Massenrempulu 1*, halaman 37.

pamannya itu. Ia menikah dengan La Naki, Raja Maiwa. Semasa pemerintahannya, ekonomi Batulappa mencapai kemajuan, terutama dalam bidang peternakan, kerajinan, dan perkebunan kopi. I Coma menandatangani perjanjian dengan pemerintahan kolonial pada 2 Oktober 1891 dan menerima penghargaan pada 31 Agustus 1910 karena dianggap sebagai pemimpin yang berhasil. I Coma mangkat pada 7 Januari 1941 dengan dihadiri oleh Kontrolir Pare-Pare, Kontrolir Pinrang, Dewan Adat Sawitto, Dewan Adat Binuang, Dewan Adat Mallusetasi, beserta Datu Suppa.

Raja Batulappa selanjutnya adalah Andi Tanri (1941–1945). Ia merupakan cucu I Coma. Ketika itu, Batulappa, Kassa, dan Letta yang sebelumnya tergabung dalam Massenrempulu, oleh pemerintah kolonial digabungkan dengan Ajatappareng bersama dengan Allita, Sawitto, Sidenreng, Suppa, dan Rappang.

VII. BINAMU

Leluahur Kerajaan Binamu berasal dari Turatea yang berkelana hingga ke Bali guna mencari bibit padi. Mereka kemudian kembali ke Turatea dan membudidayakan padi tersebut di kampung halamannya. Orang-orang Bugis mendengar mengenai keberhasilan pembudidayaan padi ini dan berniat berkunjung ke sana untuk mempelajarinya. Begitu tiba di sana, bertanyalah mereka dalam bahasa Bugis "*Kegi binemu*?" yang berarti 'mana bibit padimu?.'[465] Orang-orang Turatea salah sangka dan mengira bahwa orang-orang Bugis itu menanyakan mengenai nama kampung mereka. Kendati demikian, pertanyaan ini kemudian menjadi asal muasal nama negeri mereka, yang oleh kebiasaan pengucapan setempat berubah menjadi Binamu. Binamu berkembang menjadi suatu persekutuan adat yang terdiri dari empat kampung (*to'dok*), yakni Lentu, Layu, Batulaja, dan Bangkala LoE.

Raja pertama Binamu adalah seorang *to manurung* wanita bernama Uru-Urua (sekitar abad 14). Ia disebut pula To Manurunga ri Layu.[466] Keempat kepala kampung atau pemuka adat yang mewakili Bangkala Loe, Layu, Batujala dan Lentu sepakat membangun suatu kerajaan. Mereka menjumpai *to manurung* itu dan mengangkatnya sebagai ratu pertama Binamu. Dengan demikian, terbentuklah Kerajaan Binamu. Empat pemuka adat di atas kemudian dikenal sebagai *To'dok Appak* (*Toqdoq Appaka*). Versi lain menyebutkan bahwa yang turun ada tujuh *to manurung* yang saling

465. *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 49.
466. Lihat *The Early History of Binamu and Bangkala*, South Sulawesi, halaman 463.

bersaudara satu sama lain; enam orang pria dan adik bungsunya seorang wanita. Empat kepala kampung meminta *to manurung* wanita menjadi penguasa pertama Binamu.

Legenda tidak memberikan keterangan mengenai nama suami *to manurung* tersebut. Hanya saja disebutkan bahwa putra-putranya bernama Punta ri Ulu, Punta ri Tangnga, dan Punta ri Bangkeng. Tiga bersaudara ini tersohor atas keberaniannya dan masing-masing memimpin kampungnya sendiri. Punta ri Ulu memerintah Kampung Manjang LoE, Punta ri Tangnga memerintah Kampung Lembang LoE, dan Punta ri Bangkeng memimpin Kampung Balang Loe.

Kerajaan Binamu makin berkembang dan sanggup menundukkan Sidenre, Balang, Jeneponto, Sapanang, Ciqnong, dan Tonrokassiq. Sementara itu, wilayah yang langsung berada di bawah Binamu adalah Ujung Loe, Kalumpang, Palajau, Bulobulo, Pattalassang, Jombe, Paiatana, Arungkeke, Togotogo, Bontorapo, Pao, Taroang, Tino, Toma, Rumbia and Toloq. Sumber lisan menyebutkan bahwa urutan para penguasa Binamu adalah[467] I Gaukang Daeng Riolo, Bakiri Deng Ngilagang (putra I Gaukang Daeng Riolo), Pamongga Daeng Gassing (putra Bakiri Daeng Ngilagang), Datu Muttara Karaeng Ciniyo (seorang asal Gowa yang menikah dengan putri Ponggo Daeng Gassing), Lapalang Daeng Masso (kemenakan istri Datu Muttara Karaeng Ciniyo), Pattapoi Daeng Ngunjung (kemenakan Lapalang Daeng Masso), I Jakkolo Daeng Rangka (saudara Pattapoi Daeng Masso), Paqdewakkang Daeng Rangka, Sanre Daeng Nyikki, Ranggong Daeng Bani, I Badolloh Daeng Tinggi (cucu Patappoi Daeng Ngunjung), Palanrang Daeng Liu (kemenakan istri I Badolloh Daeng Tinggi), Pattina Daeng Saking (kemenakan istri Palanrang Daeng Liu), Tia Daeng Nini (saudara Maqdi Daeng Rimakka), Mattew Akang Daeng Junggo (menikah dengan putri Tia Daeng Nini), Sanro Daeng Nyikko (anak Mattew Akang Daeng Junggo), Palangkai Daeng Lagu (saudara Sanro Daeng Nyikko), Lompo Daeng Gassing (anak Palangkai Daeng Lagu), Maqgau Daeng Sanggu (saudara Palangkai Daeng Lagu), dan Mattewakang Daeng Raja (anak Lompo Daeng Gassing, memerintah pada 1929–1954).

Selain raja, lembaga penting di Binamu adalah dewan adat bernama To'dok Appak yang beranggotakan kepala keempat kampung (*to'dok*) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, ditambah lima *gallarang*.[468]

---

467. Lihat *The Early History of Binamu and Bangkala*, South Sulawesi, halaman 469.
468. *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 50.

1. Gallarang Ballang
2. Gallarang Balumbungan
3. Gallarang Bontoramba
4. Gallarang Bontotangnga
5. Gallarang Paitana
6. To'dok Layu
7. To'dok Lentu
8. To'dok Batulaja
9. To'dok Bangkala LoE

Ketika *to manurung* meninggal, dewan adat ini sepakat mengangkat salah seorang di antara ketiga putranya menjadi raja yang baru. Punta ri Lau tidak terpilih karena lehernya yang pendek. Punta ri Tangngga juta tak terpilih karena bibirnya tebal dan lehernya panjang. Karena itu, pilihan lantas dijatuhkan pada putra yang bungsu, Punta ri Bangkeng. Ia menduduki takhta kerajaan dengan gelar Karaeng Binamu.

Pada perkembangan selanjutnya, dewan adat Binamu ini bertugas mengangkat seorang raja yang baru tatkala penguasa sebelumnya mangkat. Gallarang Balang berfungsi sebagai penasihat raja, To'dok Batulaja beserta Gallarang Bontoramba mengurusi bidang pemerintahan, To'dok Layu bersama Gallarang Bontotanga mengurusi masalah pertahanan serta keamanan, To'dok Lentu bersama Gallarang Balumbungan menangani ekonomi serta keuangan, dan To'dok Bangkala LoE beserta Gallarang Paitana menangani urusan sosial politik.

VIII. BONE

a. Cikal Bakal dan Pendirian Kerajaan Bone

Wilayah Kerajaan Bone kini terletak di Kabupatan Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan salah satu kerajaan suku Bugis. Menurut catatan yang terdapat dalam *Lontarak TellumpocoE*, raja pertamanya adalah To Manurunge ri Matajang yang juga disebut Matasi LompoE. *Lontarak* itu mengisahkan bahwa setelah raja-raja yang namanya tercatat dalam *Epos La Galigo* mangkat, negeri itu dilanda kekacauan.

Aga tenna sisseng tau e si e wa ada / Si-anrebale i tau e / Si-akbelli-belliang / Dek na adek / Apagi sia riaseng nge bicara.[469]

469. *Lontarak TellumpoccoE*, halaman 7, bait ke-4.

> Maka orang tidak mengenal lagi mufakat. Orang saling memangsa seperti ikan. Saling memusuhi. Tiada lagi *adek* (adat). Aturan yang mengandung sanksi adat. Apa pula yang dinamakan bicara (*peradilan*). Peradilan dalam menegakkan keadilan.[470]

Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang berlaku saat itu adalah hukum rimba–siapa yang kuat, dia yang menang. Keadaan itu berlangsung selama tujuh periode, disaat tiada lagi raja yang memerintah. Masyarakat Bone pada zaman itu terbagi menjadi tujuh *wanua* (negeri) yang masing-masing dikuasai oleh seorang *arung*, yakni Arung Macege, Arung Ponceng, Arung Tibojong, Arung Tanete ri Attang, Arung Tanete ri Awang, Arung Ta', dan Arung Ujung. Setelah berdirinya Kerajaan Bone, ketujuh kepala *wanua* ini kelak menjelma menjadi suatu dewan adat yang disebut *Ade' Pitu* atau *Arung Pitu*.

Hingga suatu hari, muncul kilat dan petir saling susul menyusul yang berlangsung selama seminggu. Setelah fenomena alam yang luar biasa itu berhenti, mereka menyaksikan seseorang berpakaian putih berada di tengah padang. Rakyat berkumpul menyaksikannya dan sepakat menyebutnya *To Manurung* (Yang Turun dari Langit) serta menganggapnya sebagai titisan dewa. Mereka memohon agar *To Manurung* jangan kembali lagi ke langit dan menetap di sana sebagai raja mereka. Ternyata orang yang berpakaian serba putih itu mengatakan bahwa ia bukanlah penguasa yang sebenarnya. Masih ada *to manurung* lain yang lebih layak menjadi raja bagi mereka. Sekumpulan orang itu kemudian minta dibimbing untuk menjumpai calon raja mereka yang sebenarnya. Kilat dan petir muncul kembali, sambung menyambung tanpa henti. Orang berbaju putih itu membawa mereka ke Matajang di Watampone. Setibanya di Matajang, mereka melihat seseorang berbaju kuning sedang duduk di atas batu datar dengan diiringi tiga orang hambanya. Masing-masing hamba itu ada yang memayungi, mengipasi, dan membawakan tempat sirihnya. Orang yang baru mereka jumpai itulah calon raja mereka yang sebenarnya. Rakyat kembali memohon agar orang itu bersedia menjadi raja mereka. Orang yang berbaju kuning itu setuju asalkan rakyat patuh dan berjanji tidak akan mengkhianatinya. Setelah semua orang menyepakati hal itu, barulah ia bersedia menjadi raja mereka. Karena ia turun di Matajang maka orang menyebutnya sebagai *To Manurunge ri Matajang* atau 'Yang Turun dari Langit di Matajang.' Rakyat menggelarinya pula dengan *Matasi LompoE* atau 'Yang Tajam dan Luas Penglihatannya'.

---

470. *Ibid.*, halaman 55.

Ia kemudian menikah dengan seorang *to manurung* wanita bernama To Manurunge ri Tonro atau 'Yang Turun dari Langit di Tonro'. Dari pernikahan kedua orang yang turun dari langit ini, lahirlah La Ummase, yang kelak menjadi Raja Bone ke-2. To Manurunge Ri Matajang melakukan berbagai perombakan dan menegakkan hukum sehingga kehidupan rakyat secara bertahap makin bertambah baik. Ia pula yang menciptakan panji bagi Bone yang bergambar tujuh bintang dan disebut *woromporongnge*. Setelah memerintah selama delapan tahun, raja memanggil segenap rakyatnya dan menyerahkan pemerintahan kepada La Ummase, putranya. Selanjutnya, terdengarlah petir yang saling sambar menyambar dan ia pun lenyap dari pandangan mereka.

Dengan demikian, La Ummase menjadi Raja Bone yang ke-2. Ia juga digelari Tommulaiye Panreng. *Lontarak* bait ke-40 dan 41 menyebutkan bahwa La Ummase merupakan orang yang kuat ingatannya dan penguasa yang memperhatikan nasib rakyatnya. Naskah tersebut juga mencatat bahwa raja memiliki seorang adik perempuan bernama Pattanrawanua yang menikah dengan La Pattikke, Raja Palakka. La Ummase tercatat mempunyai dua orang putra bernama Tosualle dan Tosalawakka, namun ibu mereka bukanlah keturunan bangsawan. Oleh karena itu, mereka tidak bisa mewarisi takhta ayahnya. Peristiwa penting yang terjadi selama pemerintahan La Ummase adalah penaklukkan Cellu, Mallou, dan Majang (bait ke- 43) dan pertempuran dengan iparnya, La Pattikke. Kedua raja itu lalu bertempur selama tiga bulan tanpa ada yang kalah ataupun memang, sesudah itu berdamailah keduanya. Berdasarkan apa yang dicatat dalam *Lontarak*, boleh disimpulkan bahwa semasa pemerintahan raja yang ke-2, Bone mulai berupaya memperluas kekuasaannya.

Ketika mendengar bahwa saudarinya hamil dan hendak melahirkan, raja memerintahkan kedua orang putranya pergi ke Palakka dan membawa bayi itu ke Bone guna dipotong ari-arinya. Dikisahkan bahwa begitu putranya sampai di Istana Palakka, bayi itu langsung lahir. *Lontarak* mencatat bahwa bayi laki-laki itu berdiri semua rambutnya ketika dilahirkan. Sesuai dengan pesan ayahnya, mereka membawa bayi itu ke Bone. Raja memanggil semua rakyatnya dan mengumumkan bahwa kemenakannya yang bernama La Saliwu atau Karampeluwak itu merupakan penggantinya dan mengadakan upacara penobatan selama 7 hari 7 malam. Inang pengasuh Raja Bone yang masih balita itu adalah saudari raja, We Samateppa. 17 tahun setelah menyerahkan takhta pada kemenakannya, La Umasse mangkat karena sakit.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari *Lontarak*, Karampeluwak telah mulai memerintah tidak lama setelah ia dilahirkan. Saat itu yang menjadi wali dan penasihatnya adalah dua putra La Umasse. Saat berlangsungnya rapat mengenai masalah-masalah berat atau berkaitan dengan peradilan, Tosualle memangku raja, sedangkan Tosalawakka menjadi penengah bagi kedua belah pihak yang bertikai. Pada masa pemerintahannya, Karampeluwak tercatat sebagai raja yang pertama kali memberikan pernyataan sebelum melancarkan perang dengan kerajaan lain. Konon, ini merupakan penerapan kembali kebiasaan yang telah dianut semenjak zaman raja-raja dahulu sebelum kedatangan *to manurung*. Ia membuat pula panji berwarna merah yang menyertai bendera kerajaan, *woromporongnge*. Raja memperluas wilayah Kerajaan Bone dengan menaklukkan Pallengoreng, Anrobibiring, Melle, Cirowali, Apala, Bakkek, Yonete, Attassalo, Soga, Lampoko, Lemo Apek, Bulukriattangsalo, Palimpu, dan Lompu. Rakyat Bone dan Palakka dipersatukannya dan raja juga memberikan perlindungan terhadap kerajaan-kerajaan bawahannya. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, raja membangun benteng di sekeliling ibu kotanya. Peristiwa lain adalah pembebasan budak-budak belian yang dimilikinya dan raja mengizinkan mereka berdiam di daerah Panyula dan Lapenno. Selanjutnya, mereka ditugaskan menyediakan lauk pauk bagi raja dan keluarganya. Apabila raja hendak bepergian dengan perahu, mereka yang menjadi pendayungnya. Sebaliknya, bila raja ingin bepergian lewat darat, mereka yang menjadi pengusung tandunya. Pembebasan budak itu memperlihatkan bahwa perlakuan di Bone terhadap mereka masih relatif lebih baik dibandingkan kerajaan-kerajaan lainnya dan jasa yang mereka sediakan bagi raja di atas diwarisi secara turun menurun serta merupakan wujud balas budi atas kebaikan raja terhadap mereka. Kendati raja bukanlah orang yang dianggap pintar, tetapi peristiwa pembebasan budak di atas merupakan sesuatu yang spektakuler pada zamannya, walaupun kita tidak tahu apa sebenarnya yang mendorong raja melakukan hal itu karena *Lontarak* tidak menyebutkan alasannya secara pasti. Keunikan lain raja ini adalah sejak dilahirkan hingga wafat, tidak pernah sekalipun ia merasa terkejut.

Raja Karampeluwak digantikan oleh putrinya yang bernama We Benrigau Daeng Marowa Makkaleppie Arung Majang sebagai Ratu Bone ke-4. Ia merupakan ratu wanita pertama dalam sejarah Bone. Bila kita cermati perkembangan selanjutnya, Bone masih akan memiliki beberapa raja wanita lagi, seperti We Tenrituppu Matinrowe ri Sidenreng (*Arumpone* [Raja] Bone ke-10); Batari Toja Arung Timurung; I Maning

Aru Data Matinrowe ri Kassi (Arumpone Bone ke-25); dan Basse Kajuaraa Palangngi Passempe.

We Benrigau Daeng Marowa Makkaleppie Arung Majang menikah dengan Arung Kaju bernama La Tenribali dan dikaruniai dua orang anak, La Tenrisukki dan La Tenrigora. We Benrigau merupakan seorang yang pandai dan berpandangan luas karena semasa ayahnya masih hidup ia kerap dimintai pertimbangan mengenai masalah pemerintahan. Ratu Bone tercatat sebagai penguasa yang bijaksana dan pemurah. Ia pernah membeli suatu derah pengunungan milik Kerajaan Cina (bukan Tiongkok, hanya nama saja yang mirip) seharga 90 ekor kerbau muda dan perbukitan yang terletak di sebelah barat Ladiddong dengan harga 30 kerbau. Kedua wilayah itu lantas diserahkan kepada abdinya untuk dijadikan areal perkebunan. Dua tahun kemudian, datang orang-orang dari Kerajaan Katumpi menyerang petani yang sedang menggarap perkebunan itu. Ratu mengirimkan nota protes kepada raja Katumpi, tetapi utusan Bone malah dibunuhnya. Oleh karenanya, ratu mengirimkan pasukan untuk menyerang Katumpi. Negeri itu berhasil dikalahkan dan dipaksa menyerahkan tanah persawahan yang terletak di sebelah timur Ladiddong.

La Tenrisukki menjadi Raja Bone ke-5. Ia menikah dengan saudara sepupunya yang bernama We Tenrisuke dan mempunyai anak bernama La Wulio Boteke. Raja La Tenrisukki berupaya memperluas wilayah Bone, dan pada masanya beberapa utusan dari Sebulue datang untuk bergabung dengan Bone. Peristiwa penting lain adalah peperangan dengan Kerajaan Luwu yang dipimpin oleh Dewaraja. Pasukan Luwu memasuki daerah di sebelah selatan Cellu dan membangun perkubuan di sana. Sedangkan pasukan Bone memusatkan pertahanannya di Beru (Watampone sekarang). Keesokan harinya, terjadi pertempuran antara kedua belah pihak yang diakhiri dengan kekalahan Luwu. Pasukan Bone berhasil merampas panji-panji kerajaan Luwu, bahkan Dewaraja, pimpinan pasukannya, hampir saja terbunuh bila tidak dicegah oleh Raja Bone. Raja kembali memperlihatkan sikap pemaafnya dengan membebaskan sisa-sisa pasukan Luwu dan mengawal mereka hingga ke pelabuhan. Semenjak saat itu, raja Bone bergelar Mappajunge, yang berarti harfiah 'Yang Berpayung'. Pertikaian lain terjadi dengan Kerajaan Mampu yang berhasil dikalahkan oleh Bone sehingga menjadi salah satu negeri taklukannya.

Raja Bone ke-6, La Wulio Boteke, dapat dianggap sebagai salah seorang raja Bone yang terkemuka, kendati saat mulai memerintah usianya masih muda. Ia

menikah dengan We Tenriwewa, putri Raja Pattiro yang bernama Maggadingnge, dan berputra La Tenrirawe Bongkange Matinrowe ri Gucinna, Tenripakkuwa, La Iccak, dan I Leppe. Demi memperkuat jalinan ikatan dengan Kerajaan Mampu yang pernah ditundukkannya, dilangsungkan perkawinan politis dengan Daeng Palimpu, putri Raja Mampu. Semasa pemerintahannya, Kajao Laliddong[471] diangkat sebagai penasihat raja dan sekaligus juru bicara dengan kerajaan lainnya. Pada zamannya, diadakan perjanjian persahabatan dengan Gowa yang diwakili oleh Daeng Matanre. Perjanjian persahabatan ini tidak hanya sekali saja diadakan dengan Gowa. Dalam perjanjian berikutnya disebut bahwa "Bila ada orang Gowa yang dibunuh oleh orang Bone maka Raja Gowa yang akan mengafaninya," dan begitu pula sebaliknya. Makna perjanjian itu adalah Gowa dan Bone tidak akan saling mendendam atau bermusuhan.

Permusuhan antara Bone dan Luwu kembali berkobar pada masa itu, tetapi pasukan Bone berhasil melumpuhkan pertahanan Luwu di Cenrana dengan bantuan Gowa yang dipimpin oleh Daeng Bonto, putra Daeng Matanre. Setelah Luwu dikalahkan, Bone dan Gowa saling berbagi rampasan perang.

b. Perkembangan Kerajaan Bone Selanjutnya Hingga Masa Arung Palakka

Meskipun pernah mengadakan perjanjian perdamaian, Kerajaan Bone di masa-masa selanjutnya kerap bermusuhan dengan Gowa, tidak mengherankan apabila keduanya sering terlibat dalam peperangan. Setelah memerintah selama 25 tahun, Raja La Wulio Boteke menyerahkan singgasana kepada putranya selaku Raja Bone ke-7 dengan gelar lengkap La Tenrirawe Bongkange Matinrowe ri Gucinna (memerintah pada 1542–1584). Semasa pemerintahannya, Raja Gowa ke-11 bernama Karaeng Tunibatta menyerang Bone. Berkobarlah pertempuran dashyat antara kedua kerajan itu di daerah Papplong antara Gowa dan Bone. Pada kesempatan tersebut, Gowa berhasil menghalau pasukan Bone memasuki bentengnya. Meskipun demikian, pada sore harinya, pasukan Bone kembali maju menyerang Gowa dengan kekuatan penuh dan mengalahkan mereka, bahkan Raja Gowa menjumpai ajalnya dalam pertempuran tersebut.

Raja Bone beserta penasihatnya yang bernama Kajao Laliddong sepakat mengembalikan jenazah Raja Gowa yang gugur itu ke negerinya. Selanjutnya, dilangsungkan perundingan perdamaian antara kedua kerajaan di Caleppa. Pihak Gowa diwakili oleh Karaeng Tunijallo, Raja Gowa yang baru, beserta Tumenanga ri

471. Menurut buku *Sultan Hasanuddin Menentang V.O.C* disebut Kajao Ladiddo.

Makkoayang. Sementara itu, pihak Bone diwakili oleh Raja La Tenrirawe Bongkange sendiri beserta Kajao Laliddong. Dalam perundingan itu disepakati bahwa,

- Penyerahan daerah-daerah sampai sebatas Sungai WalanaE di sebelah barat dan sampai ke Ulaweng di utara kepada Bone.
- Daerah di sebelah utara Sungai Tangka' menjadi wilayah Bone, sedangkan wilayah selatan menjadi milik Gowa.
- Negeri Cenrana dimasukkan ke dalam kekuasaan Bone.

Perjanjian yang dalam bahasa Makassar disebut *Ulukanaya ri Caleppa* tersebut sementara waktu mengakhiri permusuhan antara Gowa dan Bone. Setelah itu, Raja Karaeng Tunijallo kembali ke negerinya dan dinobatkan secara resmi sebagai Raja Gowa, bahkan pada kesempatan tersebut, Raja Bone ikut hadir. Pusaka Kerajaan Gowa beserta Bone yang masing-masing bernama *sudanga* dan *lateariduni* diletakkan di tempat keramat dalam Istana Gowa sehingga menambah keagungan upacara. Mereka juga berjanji mengikat persahabatan dengan pernyataan sebagai berikut.

> Musuh-musuh raja atau Kerajaan Gowa adalah pula musuh-musuh raja atau Kerajaan Bone. Demikian pula sebaliknya, musuh-musuh raja atau Kerajaan Bone adalah musuh-musuh raja atau Kerajaan Gowa. Rakyat Gowa yang masuk ke wilayah Kerajaan Bone adalah seperti mereka itu masuk ke negerinya sendiri. Sebaliknya pula rakyat Bone yang masuk ke wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa adalah mereka seperti berada di negerinya sendiri.[472]

Ternyata, permusuhan antara Gowa dan Bone belum juga berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian di atas.

Meskipun telah mengikat perjanjian perdamaian dengan Gowa, Bone tetap khawatir terhadap Gowa yang selalu berambisi meluaskan wilayahnya. Sebagai pengimbang, tiga kerajaan sesama suku Bugis, yakni Bone, Wajo, dan Soppeng, membentuk aliansi bersama. Perserikatan tiga kerajaan itu dikenal sebagai *TellumpoccoE* dalam bahasa Bugis dan *Tallumbonccoa* dalam bahasa Makassar, yang diwujudkan pada 1582 antara Raja La Tenrirawe Bongkange Matinrowe ri Gucinna dari Bone, La Mungkace To Udamang Matinrowe ri batana dari Wajo, dan La Mappaleppe PatolaE dari Soppeng. Ikrar ini secara simbolis diperteguh dengan penanaman sebuah batu di daerah Timurung, itulah sebabnya pemufakatan ini juga disebut *MallamumpatuE ri Timurung* (Penanaman Batu di Timurung). Tujuan utama aliansi ini tentu saja adalah

472. *Sultan Hasanudin Menentang V.O.C.* halaman 62.

menyatukan kekuatan demi mengimbangi ambisi ekspansif Gowa di kawasan Sulawesi Selatan. Raja Gowa, Karaeng Tunijallo, merasa kesal dengan adanya aliansi ini.

Sebagai catatan, ada hal-hal penting yang masih perlu dipaparkan sehubungan dengan Perjanjian TellumpoccoE ini. Mulanya terdapat berbagai hambatan dalam merealiasikan aliansi antara Bone, Wajo, dan Soppeng ini. Pertama-tama adalah posisi Wajo sebagai negara taklukan Gowa. Selain itu, di lain pihak Bone sendiri masih terikat perjanjian persahabatan dengan Gowa. Kendati demikian, Bone berhasil meyakinkan Wajo dengan menyatakan bahwa jika Gowa masih memperbudak Wajo, pasukan gabungan ketiga kerajaan itu akan menghadapinya bersama-sama. Pihak Soppeng sendiri menyatakan bahwa aliansi ketiga kerajaan tersebut sulit terlaksana karena wilayah Soppeng jauh lebih kecil dibanding Bone dan Wajo. Oleh karena itu, Bone dan Wajo lalu menyerahkan sebagian wilayah mereka kepada Soppeng sehingga kini luas wilayah ketiganya menjadi setara. Dalam Perjanjian TellumpoccoE, ketiga negara sepakat mengangkat saudara sama lain sehingga mereka bagaikan "seorang anak sulung (*seuwa uluwang*), seorang anak tengah (*seuwa anak tengnga*), dan seorang anak bungsu (*seuwa pakcucung*), yang berpilin menjadi satu bagaikan *parajo* (sejenis tali yang berbuat dari kulit sapi)."

Kekuatan aliansi ini tampak sewaktu Wajo berperang dengan Gowa. Saat itu, Bone menjadi penengah dan menyarankan agar kedua kerajaan itu berdamai, tetapi Gowa menolaknya. Karena itu, Kajao Laliddong menyarankan agar Wajo dengan dukungan Bone berbalik menyerang Gowa. Serangan ini berhasil memukul mundur Gowa. Meskipun demikian, aliansi *TellumpoccoE* tidak bertahan selamanya. Aliansi mulai hancur ketika Gowa menyerang Soppeng dan mengalahkannya sehingga Soppeng tunduk kepada Gowa dan menerima agama Islam. Pasukan Gowa dengan dibantu Soppeng dan Sidenreng bergabung menyerang Wajo. Kerajaan itu dapat dikalahkan dan menerima ajaran agama Islam. Selanjutnya, pasukan gabungan Gowa, Wajo, dan Soppeng giliran menyerang Bone. Dengan demikian, tamat sudah riwayat Perjanjian TellumpoccoE.

Lontarak mencatat pula berbagai perkembangan semasa pemerintahan Raja La Tenrirawe Bongkange Matinrowe ri Gucinna, seperti pengangkatan para pejabat yang bernama *to makkajennangeng* dengan tugas sebagai koordinator di berbagai kegiatan tertentu yang berkenaan dengan urusan rumah tangga istana, umpamanya yang berkaitan dengan penyediaan kayu bakar, konsumsi, penari istana, dan lain sebagainya.

Rakyat pada zaman Raja La Tenrirawe juga telah mengenal senapan sebagai senjata, yang menandakan adanya pembaharuan dalam teknologi pertahanan negara. Dari segi hubungan luar negeri, *Lontarak* melaporkan bahwa semasa Raja Bone ke-7 ini, terjadi pertempuran antara Kerajaan Soppeng Riaja dan Soppeng Rilau. Salah seorang raja di antara pihak-pihak yang berselisih itu lalu meminta suaka ke Bone.

Dua tahun setelah disepakatinya aliansi *TellumpoccoE*, Raja La Tenrirawe menyerahkan takhta kepada saudaranya, La Icca, sebagai Raja Bone ke-8. Tidak lama setelah itu, wafatlah La Tenrirawe. Ia kemudian diberi gelar anumerta Matinrowe ri Guccinna yang mempunyai arti harfiah 'Yang Bersemayam dalam Gucinya.' La Icca kemudian menikah dengan Tenripakiu. Semasa pemerintahannya, Bone mengalami kemerosotan karena ia tidak lagi menerapkan aturan yang telah ditetapkan oleh raja-raja sebelumnya. Ia tidak memedulikan lagi prinsip-prinsip keadilan. Raja Bone ke-8 ini pernah berselisih dengan Raja Walenna yang bernama La Panaungi dan mengasingkannya ke Sidenreng. Setelah beberapa lama hidup di pengasingan, La Panaungi merasa bosan dan ingin kembali ke tanah airnya. Untuk itulah ia pergi ke Bone dan memohon pengampunan La Icca. Namun, ia memerintahkan La Panaungi pergi ke suatu daerah di pegunungan dan setelah itu membunuhnya. La Icca juga membantai raja-raja Paccing dan Awampone yang bernama Tosaliu dan Makdanrennge ri Palakka. Ia juga menghina para bangsawan dengan memaksa mereka melakukan pekerjaan yang tidak pantas, seperti menenteng barang bawaannya. Raja pernah pula memperkosa istri orang lain. Tindakan ini diketahui oleh suaminya sehingga raja berniat membunuh keduanya. Namun, suami wanita itu berhasil melarikan diri sehingga hanya istrinya saja yang menjadi korban. Karena perilaku sewenang-wenang La Icca ini, kakeknya yang bernama Arung Matajang berniat menyadarkannya. Untuk itulah ia mengirim utusan guna menasihati La Icca, tetapi utusan tersebut malah dibunuh oleh raja. Karena gagal memperbaiki perilaku cucunya, Arung Majang kemudian menghabisi nyawa La Icca.

Atas usul Arung Majang, rakyat Bone mengangkat La Pattawe sebagai Raja Bone ke-9. Ia adalah saudara sepupu La Icca. Raja menikah dengan We Tenriruwa, Ratu Mampu, yang melahirkan seorang putri bernama We Tenrituppu. Tidak banyak hal yang dicatat mengenai pemerintahan Raja La Pattawe. Setelah memerintah selama 7 tahun, La Pattawe mangkat dan digantikan oleh putrinya. Dengan demikian, raja Bone ke-10 ini sekaligus merupakan penguasa wanita Bone yang kedua. Semasa

pemerintahannya, terbentuklah *Ade' Pitu* (*Arung Pitu*) atau Dewan Adat Bone. Anggotanya merupakan raja-raja negara bagian Bone, yakni Tibojong, Ujung, Ponceng, Tanete ri Awang, Macege, Tanete Ri Attang, dan Ta' (Taa). Tugas mereka antara lain

- Membantu raja dalam mengawasi masalah pertanian.
- Membantu raja dalam melayani tamu negara.
- Membantu menjaga keamanan harta kekayaan dan perbendaharaan kerajaan.

Anggota dewan adat itu tidak diizinkan mewariskan jabatan kepada keturunannya tanpa persetujuan raja.

Peristiwa penting yang terjadi semasa pemerintahan We Tenrituppu adalah pecahnya persekutuan *TellumpoccoE*. Hal ini disebabkan oleh kekalahan Wajo dan Soppeng, dua sekutu Bone, dalam peperangan melawan Gowa. Kedua kerajaan sepakat menerima agama Islam sebagai agama negara. Setelah peristiwa itu, Raja Bone pindah ke Sidrap sampai di hari kematiannya.

Raja Bone berikutnya, La Tenriruwa Sultan Adam MatinroE ri Bantaeng (1607–1608), merupakan penguasa Bone pertama yang memeluk agama Islam sehingga semenjak saat itu penguasa Bone bergelar sultan. Ia hanya memerintah dalam kurun waktu tiga bulan dan setelah itu meninggalkan negerinya ke Bantaeng. Penyebabnya adalah perselisihan dirinya dengan dewan adat dan rakyat Bone. Raja Gowa saat itu mengajak Raja Bone untuk menganut agama Islam. Raja Bone sepakat untuk menerima agama tersebut, tetapi keinginan ini ditolak oleh anggota dewan adat beserta rakyat Bone. Raja kemudian meninggalkan istananya dan pergi ke daerah Pattiro. Meskipun demikian, rakyat Pattiro juga menolak memeluk agama Islam. Rakyat Bone mengirim utusan untuk membujuk raja agar bersedia kembali menduduki singgasananya, tetapi Raja La Tenriruwa tetap berpegang pada pendiriannya dan bahkan bersedia turun takhta.

Demi mengisi kekosongan pemerintahan di Bone, diangkatlah La Tenripale Toakkeppeang, putra La Icca, sebagai Raja Bone ke-12. Menurut *Lontarak TellumpoccoE*, ia memimpin kembali rakyat Bone melawan penyebaran agama Islam oleh Gowa, tetapi ia berhasil dikalahkan dan semenjak saat itu rakyat Bone juga menerima agama Islam. Raja Bone juga kerap bepergian ke Makassar. Setelah menjalankan roda pemerintahan selama dua puluh tahun, ia jatuh sakit dan mangkat

di Makassar. Jenazahnya dimakamkan di Tallo sehingga ia menerima gelar anumerta MatinroE ri Tallo ('Yang Dikebumikan di Tallo'). Peperangan-peperangan yang dilancarkan oleh kerajaan Gowa itu disebut *musuk selleng* (peperangan dalam rangka penyebaran Islam). Meskipun berhasil mengalahkan lawannya, Kerajaan Gowa tidak menuntut upeti dan membiarkan negeri yang ditaklukkannya tetap berpemerintahan sendiri. Tujuan Gowa adalah murni penyebaran agama Islam.

Raja Bone ke-13 adalah kemenakan La Tenripale Toakkepeang yang bergelar lengkap La Madarémméng Sultan Muhammad Shaleh MatinroE ri Bukaka (1626–1644). Ia mengeluarkan aturan baru mengenai perbudakan yang menetapkan bahwa orang yang bukan keturunan budak tidak boleh dijadikan budak. Mereka harus dibebaskan dari perhambaannya dan digaji seperti orang merdeka bila ada yang ingin mempekerjakan mereka. Kaum pembesar dan bangsawan yang memiliki banyak budak tentu merasa dirugikan dengan peraturan ini sehingga banyak yang menentang kebijaksanaan raja tersebut, termasuk ibu raja sendiri yang bernama We Tenrisoloreng Datu Pattiro (Makkalarue). Ibu raja memprotes kebijaksanaan itu dengan mengatakan bahwa ia tidak sanggup memenuhi segenap kebutuhannya tanpa bantuan budak beliannya. Raja Bone tetap berpegang teguh pada pandangannya, ia marah mendengar hal itu lalu menyerang dan menaklukkan Pattiro. Itulah sebabnya, ibunya lantas melarikan diri ke Gowa pada 1640 dan meminta suaka kepada Sultan Muhammad Said. Hal ini merupakan pemicu pecahnya peperangan antara Gowa dan Bone pada 1644. Pasukan gabungan Gowa, Wajo, Sidenreng, dan Soppeng berhasil mengalahkan Bone. Raja La Madarémméng beserta saudaranya, La Tenriaji Tosenrima, terpaksa melarikan diri ke Larompong dan Cimpu di Luwu. Raja Bone akhirnya dapat ditangkap serta diasingkan ke Sanrangang dan wafat di sana. Semenjak saat itu, Bone diduduki oleh Gowa selama 17 tahun. Kurun waktu ini dalam kitab sejarah Bugis disebut *naripoatana Bone seppulo pitu taung ittana* yang berarti 'didudukilah Bone selama tujuh belas tahun lamanya'.

Setelah Bone ditaklukkan, Sultan Muhammad Said mengutus *pabbicara butta* (perdana menteri) Gowa, Karaeng Patinggaloang, mengadakan perundingan dengan *Adè' Pitu* (*Arung Pitu*) atau Dewan Adat Bone mengenai pengganti La Madarémméng. Anggota Arung Pitu ingin menyerahkan takhta kerajaan Bone kepada Sultan Muhammad Said, namun sultan menampiknya karena memahami adat Bone yang tidak mengizinkan orang luar menjadi penguasa di negeri itu. Dengan kata lain, mereka

yang bukan keturunan langsung Tumanarunge ri Matajang (raja pertama Bone) tidak diperkenankan menjadi penguasa Bone. Tradisi semacam ini juga berlaku di Gowa. Orang yang bukan keturunan langsung Tumanurunga ri Tammalate hendaknya tidak diangkat sebagai penguasa Gowa dan Tallo. Sultan Muhammad Said kemudian menunjuk Karaeng Pattingaloang sebagai penguasa Bone yang baru, tetapi karena ia juga memahami adat Bone, ia pun menolaknya. Karena tidak ada calon raja Bone yang dianggap tepat, sultan akhirnya menerima tawaran itu, tetapi mengangkat pamannya, Karaeng Sumanna sebagai wakilnya dalam menjalankan roda pemerintahan di Bone. Namun, paman sultan itu menampiknya karena merasa tidak sanggup mengemban tanggung jawab tersebut. Sultan kemudian menunjuk Tobala Arung Tanete, salah seorang anggota Dewan Adat Bone, menjadi wakilnya di Bone. Demikianlah, Tobala Arung Tanete (1644–1660) memerintah di Bone dengan gelar *jannang* (kurang lebih setingkat bupati).

Saudara Raja La Madarémméng yang bernama La Tenriaji Tosenrima yang ikut melarikan diri bersama raja, ternyata dapat meloloskan diri dari kejaran pasukan Gowa. Ia kembali lagi ke kampung halamannya dan memimpin rakyat Bone melakukan perlawanan terhadap Gowa. Karenanya, Sultan Muhammad Said kembali melancarkan serangan terhadap rakyat Bone yang memberontak itu. Pertempuran antara kedua kerajaan berkobar lagi, namun laskar Bone menderita kekalahan telak. Banyak bangsawan pengikut La Tenriaji Tosenrima yang ditawan Bone, termasuk Arung Tana Tengnga Towa (nenek Arung Palakka), La Pottobune (ayah Arung Palakka), dan lain sebagainya. Mereka semua merupakan kerabat dekat La Tenriaji sehingga ikut terlibat dalam pertempuran tersebut. Tobala Arung Tanete tidak terlibat insiden tersebut sehingga tetap dipertahankan sebagai Bupati Bone. Meskipun demikian, Tobala Arung Tanete sesungguhnya memendam dendam terhadap Gowa. 17 tahun setelah pemberotakan itu, ia memimpin pasukan Bone melawan Gowa. Pemberontakan pimpinan Tobala Arung Tanete didukung oleh Raja Soppeng beserta rakyatnya. Kendati demikian, Gowa yang dibantu oleh Wajo berhasil menumpas pergolakan ini dan menewaskan Tobala Arung Tanete. Oleh karenanya, peristiwa ini lalu disebut *Beta ri Tobala* (kekalahan Tobala).

Kini pembahasan beralih kepada Arung Palakka, yang kelak akan menjadi salah satu tokoh sentral dalam sejarah Sulawesi Selatan. Arung Palakka adalah cucu Raja Bone ke-11, La Tenriruwa Sultan Adam MatinroE ri Bantaeng (1607–1608), dari

pihak ibunya. Ayahnya, La Pottobune', adalah penguasa Tana Tengnga, sebuah negeri di tepi Sungai WalaneE yang termasuk dalam wilayah Soppeng. Oleh karenanya, dalam diri Arung Palakka mengalir dua darah kebangsawanan, yaitu Bone dan Soppeng. Selama bertahun-tahun Arung Palakka hidup menderita sebagai tawanan di Gowa.

Pada 1660, keadaan Gowa sedang kacau karena permusuhannya yang berkepanjangan dengan VOC. Arung Palakka yang ditawan di Gowa menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Ia memanfaatkan saat berlangsungnya pesta panen yang meriah di Tallo. Arung Palakka beserta pengikutnya kembali ke Bone dan memimpin pemberontakan dengan didukung Kerajaan Soppeng. Oleh rekan sebangsanya, ia dianggap sebagai pahlawan yang membebaskan diri dari pendudukan Gowa. Sultan Hasanuddin segera bergerak menumpas pemberontakan itu. Pasukan gabungan Gowa dan Wajo menyerang dan mengalahkan Bone. Karena menderita kekalahan, Arung Palakka terpaksa melarikan diri dan meminta suaka kepada sultan Buton. Selama tiga tahun, Sultan Buton menyembunyikannya beserta para pengikutnya. Arung Palakka kemudian berniat meminta bantuan VOC karena keduanya memiliki musuh bebuyutan yang sama. Pada 1663, ia meninggalkan Buton dan berlayar ke Batavia. Kedatangan Arung Palakka disambut gembira oleh Belanda karena kini mereka mempunyai sekutu yang tangguh dalam menghadapi Gowa. Oleh Belanda, Arung Palakka beserta sekitar 400 pengikutnya diizinkan bermukim di suatu kawasan yang bernama Tanah Angke. Inilah yang menjadi asal muasal nama salah satu pasukan Bone yang disebut To-angke atau Tu-angke (*to* / *tu* berarti 'tanah' dalam bahasa Bugis). Tidak jarang pula Arung Palakka beserta pengikutnya membantu Belanda menumpas berbagai pemberontakan.

Kesempatan membalas dendam atas kekalahan Bone tiba ketika VOC pada 5 Oktober 1666 memutuskan mengadakan ekspedisi militer terhadap Gowa karena makin memburuknya hubungan antara kedua belah pihak. Ekspedisi militer itu dipimpin oleh Cornelis Janszoon Speelman, tentu saja Arung Palakka ikut serta. Pada 19 Desember 1666, mereka tiba di perairan Sombaopu. Belanda berserta sekutunya berencana menduduki tempat-tempat yang lemah pertahanannya. Enam hari kemudian, VOC berhasil menghancurkan Bantaeng, yang merupakan salah satu lumbung beras Gowa.

Kemudian, armada gabungan VOC dan sekutu-sekutunya bertolak ke Buton. Memang pada saat itu, Gowa sedang menyerbu dan mengepung Buton. Kelemahan

utama pasukan Gowa adalah keanekaragaman suku yang tergabung di dalamnya. Orang-orang Bugis yang ditaklukkan oleh Gowa dipaksa bergabung dengan pasukan Gowa dan demikian pula dengan orang-orang Mandar. Oleh karenanya, angkatan perang Gowa terdiri dari beragam suku. Orang-orang Bone (Bugis) sangat mengharapkan kembalinya Arung Palakka guna membebaskan tanah air mereka dari pendudukan Gowa. Sebelumnya, pernah terdengar desas-desus bahwa Arung Palakka telah gugur dalam perang membantu VOC di Sumatera. Oleh karenanya, Arung Palakka menyebarkan berita mengenai kepulangan dirinya kepada pasukan Bugis yang bergabung dengan angkatan perang Gowa tersebut. Tentu saja, orang-orang Bugis merasa sangat bergembira mendengar kembalinya pemimpin mereka itu. Akibatnya, pasukan Bugis yang berjumlah sekitar sepertiga angkatan perang Gowa berbalik melawan orang-orang Makassar. Prajurit-prajurit yang berasal dari suku Mandar sebenarnya tidak berminat bertempur karena merasa bahwa tidak ada gunanya membela kepentingan kerajaan lain sehingga mereka pun melakukan desersi. Kekacauan dengan segera menyebar di tengah-tengah angkatan perang Gowa sehingga mereka mengalami kekalahan telak di Buton pada 3 Januari 1667. Agar Bone tidak jatuh ke tangan Arung Palakka, Sultan Hasanuddin mengangkat kembali La Madarémméng, bekas Raja Bone yang ditawan Gowa, sebagai wakilnya di Bone pada Februari 1667. Namun, hal ini tidak berarti sama sekali karena rakyat Bone telanjur bergolak akibat kedatangan kembali Arung Palakka.

Serangan kini secara bertahap diarahkan pada Sombaopu, ibu kota Gowa. Peranan Arung Palakka sangat besar terhadap penaklukan Gowa, bahkan armada VOC tidak berani melakukan tindakan apa pun tanpa dukungan Arung Palakka. Akhirnya, Gowa dapat dikalahkan dan Sultan Hasanuddin menandatangani Perjanjian Bungaya pada 18 November 1667. Negeri-negeri yang pernah diduduki Gowa dimerdekakan berdasarkan perjanjian tersebut, termasuk Bone. Aru Palakka dinobatkan sebagai Raja Bone ke-14 dengan gelar lengkap La Tenritatta MatinroE ri Bontoala' Arung Palakka Sultan Sa'aduddin petta malampeE Gemme'na Daeng Serang. Ia memerintah dari 1667 hingga 1696.

Meskipun Perjanjian Bungaya sudah ditandatangani, Belanda masih khawatir terhadap ancaman serangan Gowa sehingga meminta Arung Palakka tidak tinggal terlampau jauh dari Fort Rotterdam (Benteng Ujung Pandang). Itulah alasannya mengapa setelah dinobatkan sebagai Raja Bone, Aru Palakka tidak berkediaman

di Watampone, ibu kota Kerajaan Bone. Ia sendiri juga masih merasa terancam selama Gowa belum ditundukkan sepenuhnya. Pada kenyataannya, memang benar bahwa setelah itu pertempuran berkecamuk lagi, bahkan pada salah satu peperangan dengan Gowa, Arung Palakka hampir kehilangan nyawanya. Kerajaan Gowa baru dikalahkan secara total pada 24 Juni 1669, dengan kejatuhan Sombaopu, benteng utama mereka.

Kendati banyak membantu Belanda, Arung Palakka tidak mau menjadi budak Belanda. Beberapa kali terjadi perselisihan antara dirinya dan VOC, seperti yang terjadi di Dompu, Sumbawa. Petugas VOC bernama Junius ditugaskan meneliti peristiwa tersebut dan menulis laporan yang menyinggung serta merugikan nama Arung Palakka. Oleh karenanya, Arung Palakka menjadi marah kepada Junius dan demikian pula wakil VOC bernama Prins. Saat Belanda hendak mengumpulkan sekutu-sekutunya di Benteng Fort Rotterdam, Arung Palakka menolak hadir bila Junius masih ditempatkan di sana, bahkan pada 1694 Arung Palakka menuju ke Cenrana dan memperkuat daerah itu dengan pasukan berkekuatan 60.000 orang. Bila perlu ia akan menyerang Fort Rotterdam.

Perseteruan kembali terulang dengan Hartzing, pengganti Prins. Waktu itu, Hartzing melarang Arung Palakka masuk ke Fort Rotterdam disertai pengawal-pengawalnya. Hal ini membangkitkan kekesalan Arung Palakka karena merasa dirinya dicurigai atau tak dipercaya. Karenanya, ia lalu meninggalkan markasnya menuju ke Bone. Karena khawatir atas situasi yang makin memburuk ini, Belanda memindahtugaskan Hartzing dan menggantinya dengan van Theye. Kebijakan ini ditempuh demi menyenangkan hati Arung Palakka. Berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Belanda sebenarnya sangat segan terhadap Arung Palakka.

c. Perkembangan Bone Setelah Arung Palakka

Tujuan Arung Palakka bekerja sama dengan VOC adalah membebaskan tanah airnya dari cengkeraman Gowa. Setelah menjadi Raja Bone, ia berupaya menegakkan hegemoni dan persatuan di Sulawesi Selatan. Salah satunya melalui perkawinan politik. Arung Palakka sendiri tidak mempunyai anak. Oleh sebab itu, ia digantikan oleh kemenakannnya yang bernama La Patau sebagai Raja Bone ke-15 dengan gelar lengkap La Patau Matanna Tikka petta MatinroE ri Nagauléng (1696–1714). La Patau merangkap pula sebagai Raja Soppeng ke-18 (1696–1714). Arung Palakka menikahkan kemenakannya tersebut dengan putri Sultan Muyidudin MatinroE ri

Tompotikka dari Luwu, I Yummu Opu Larompong (We Ummung), dengan perjanjian bahwa putra mereka yang pertama akan diangkat sebagai Datu Luwu berikutnya. Arung Palakka berharap agar keturunannya di masa mendatang dapat menjadi penguasa negeri Bone dan Luwu. Dari pernikahan ini lahirlah seorang putri bernama Batari Toja Daeng Talaga Arung Timurung Datu-ri Chitta MatinroE-ri Tipuluna. Gelarnya adalah Sultana Zainab Zakiat uddin (dalam silsilah raja-raja Soppeng, gelarnya adalah MatinroE ri Luwu).[473] Ia menjadi penguasa Bone ke-16 dan menjabat selama dua kali masa jabatan, yakni antara 1714–1715 dan 1724–1748. Selain itu, ia juga kelak merangkap menjadi *Datu* (Raja) Luwu ke-19 dan Raja Soppeng ke-22 dari 1727 hingga 1737.

Selanjutnya, Arung Palakka menikahkan La Patau dengan putri Raja Gowa ke-19, Sultan Abdul Jalil Tumenganga ri Lakiung, yang bernama Siti Maryam Karaeng Patukangan. Sebagaimana halnya pernikahan dengan putri Datu Luwu, diadakan pula kesepakatan bahwa putra pertama mereka akan menjadi Sultan Gowa berikutnya. Putra mereka, La Padangsajati (Padasejati) Toappaware Arung Palakka MatinroE ri Beula, menjadi Raja Bone ke-17 (1715–1720). Ia merangkap pula sebagai Raja Soppeng ke-19 (1714–1721). Putra berikutnya, La Pareppa TosappewaliE menjadi raja Gowa ke-20 dengan gelar Sultan Ismail (1709–1711). Kemudian, ia menggantikan saudaranya, La Padangsajati, sebagai Raja Bone ke-18 (1720–1724). Sebagai tambahan, pada saat yang sama ia merangkap pula sebagai Raja Soppeng ke-20 (1721–1722). Setelah wafat, ia mendapatkan gelar anumerta MatinroE ri Sombaopu (bahasa Bugis) atau Tumenanga ri Sombaopu (bahasa Makassar). Kedua istilah itu sama artinya, yakni 'Yang wafat di Sombaopu'. Putra lainnya, La Panuangi Toappawawoi Arung Mampu Karaeng Bisei, menjadi Raja Bone ke-19 pada 1724, tetapi meninggal tak lama kemudian.

Dikarenakan perkawinan politik seperti di atas, hubungan antara Bone, Luwu, dan Gowa bertambah erat. Meskipun demikian, ikatan kekerabatan melalui pernikahan ini pernah dinodai oleh perang saudara yang berkecamuk pada 1710 yang dalam bahasa Bugis disebut *musuh seajing*. Perang saudara ini berlangsung antara Bone dengan Gowa. Waktu itu, La Pareppa TosappewaliE, Sultan Gowa, tidak bersedia menyerahkan adiknya, La Padangsajati (Padasejati) Toappaware, kepada ayahnya di Bone. Konon, La Padangsajati melakukan kesalahan di Bone sehingga dituntut agar

473. Lihat *Orang Soppeng Orang Beradab*, halaman 43 dan *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 197.

diserahkan kepada pihak Bone. Pada akhirnya perselisihan ini dimenangkan oleh Bone dengan bantuan Soppeng.

d. Bone Melawan Kolonialisme

Secara ringkas, putra-putri La Patau yang menjadi raja-raja Bone berikutnya adalah

- Batari Toja Daeng Talaga Arung Timurung Datu-ri Chitta MatinroE-ri Tipuluna[474] (gelar Sultana Zainab Zakiat ud-din)–memerintah pertama kali sebagai Raja Bone ke-16 antara 1714–1715.
- La Padang Sajati To' Apawara[475] Paduka Sri Sultan Sulaiman ibni al-Marhum Sultan Idris Azim ud-din Matinrowe-ri Beula atau La Padangsajati Toappaware Aru Palakka MatinroE ri Beula (1715–1720) selaku Raja Bone ke-17.
- La Pareppa TosappewaliE[476] (1720–1724) selaku Raja Bone ke-18.
- La Panuangi Toappawawoi Arung Mampu Karaeng Bisei (1724) selaku Raja Bone ke-19.
- Batari Toja Daeng Talaga Arung Timurung Datu-ri Chitta MatinroE-ri Tipuluna memerintah kedua kalinya antara tahun 1724–1749 sebagai raja Bone ke-20. Ia merangkap pula sebagai Datu Soppeng.
- La Temmasonge (Temmassengek) Datu Baringeng (1749–1775) selaku raja Bone ke-21.

Batari Toja Daeng Talaga yang pernah memerintah dua kali, yakni sebagai Raja Bone ke-16 dan 20. Setelah masa pemerintahannya yang pertama, pada 10 Agustus 1715 ia menyerahkan pemerintahan secara sukarela kepada saudaranya, La Padang Sajati To' Apawara Paduka Sri Sultan Sulaiman ibni al-Marhum Sultan Idris Azim ud-din (MatinroE-ri Beula, memerintah pada 1715–1720). Ratu Bone ini pernah menikah dua kali. Pernikahan pertamanya dengan Sultan Ammas (Mas) Madina atau Jalaluddin Muhammad Syah I (1702–1723) dari Sumbawa berlangsung pada 19 September 1714,[477] tetapi mereka bercerai tanpa memperoleh anak. Batari Toja Daeng Talaga menikah lagi dengan Arung Kaju Daeng Mammuntuli pada Maret 1716.

---

474. Menurut buku *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*, halaman 45, namanya dieja We Batari Toja Daeng Talaga.
475. Menurut *ibid*. halaman 45, namanya dieja La Padassajati To Appawarek.
476. Menurut *ibid.* halaman 45, namanya dieja La Pareppak To Sappewali.
477. Menurut buku *Sumbawa pada Masa Lalu*, Sultan Sumbawa ini juga menikah dengan Ratu Sidenreng. Silakan lihat bagian mengenai Kerajaan Sumbawa. Buku *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 104, menyebutkan bahwa nama putri Sidenreng itu adalah I Rakkia Karaeng Kejenne.

Pada 1737, Raja La Tenriodang dari Tanete menurunkan Batari Toja Daeng Talaga dari singgasana Bone dan Soppeng. Ratu Bone ini lantas melarikan diri ke Makassar dan meminta perlindungan Belanda. La Tenriodang menduduki takhta Bone selama beberapa bulan. Kendati demikian, La Maddukelleng, *Arung Matoa* (Raja Tua) Wajo yang ketika itu besar pengaruhnya di kawasan Sulawesi Selatan, tidak setuju dengan tindakan La Tenriodang ini dan mengancam agar Raja Tanete tersebut melepaskan tuntutannya atas takhta Bone beserta Soppeng. Karenanya, La Tenriodang segera mengundurkan diri dari Bone dan sebagai gantinya, Dewan Adat Bone atas tekanan La Maddukelleng, memilih Sitti Napsiah Denrawalie (dalam buku *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 40 disebut dengan I Denradatu Sitti Nafisah Karaeng Langello), saudara Sultan Abdul Khair dari Gowa, sebagai Ratu Bone. Namun, ia tidak betah memerintah di Bone karena kurang disukai rakyat. Oleh sebab itu, Sitti Napsiah lantas menyingkir ke Tosora (Wajo) dan baru kembali ke Bone sembilan bulan kemudian. Berkat bantuan Belanda, Batari Toja Daeng Talaga berhasil menduduki kembali takhtanya di Bone dan merangkap pula sebagai penguasa di Soppeng beserta Luwu. Batari Toja Daeng Talaga merupakan seorang penguasa wanita berkemauan keras dan memerintah hingga wafat pada 1749. Gelar anumertanya adalah MatinroE ri Tipuluna.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa penguasa Bone keturunan La Patau pernah pula merangkap sebagai raja di kerajaan-kerajaan lainnya. La Temmasonge (Temmasengek) Datu Baringeng Sultan Abdul Razak Jalaluddin (1749–1774) menggantikan Batari Toja Daeng Talaga yang mangkat pada 4 Juli 1775 setelah 26 tahun memerintah. Ia merupakan putra terakhir La Patau yang menjadi Raja Bone. Sebelum menduduki jabatan sebagai *Arumpone* (Raja) Bone ke-21, ia menjadi penggawa Kerajaan Bone. Banyak bangsawan Bone yang tak menghendakinya sebagai raja sehingga ia baru dinobatkan pada 1752. La Temmasonge yang juga merangkap sebagai *Datu* (Raja) Soppeng ke-25 mempunyai banyak istri sehingga jumlah anaknya mencapai kurang lebih 80 orang, tetapi yang diakui sebagai permaisurinya adalah Sitti Habibah dan Sitti Aisyah, cucu Syekh Yusuf Tuwatta SalamaE ri Gowa–seorang ulama besar di Sulawesi.

Belanda merasa menyesal karena telah memberikan Bone banyak persenjataan dan fasilitas pada saat pemerintahan La Temmasonge. Sebelumnya, Raja Bone semenjak Arung Palakka merupakan perantara antara Belanda dan raja-raja di Sulawesi Selatan

lainnya dengan jabatan Kanselir Persekutuan Raja-raja Sulawesi. Para raja di Sulawesi harus menghadap Raja Bone terlebih dahulu apabila ingin menjumpai wakil Belanda di Makassar. Belanda mulai khawatir Bone akan menjadi saingan mereka. Oleh sebab itu, kekuasaan Bone mulai dilucuti perlahan-lahan. Jabatan sebagai Kanselir Persekutuan Raja-raja Sulawesi dirampas dari La Patau. Daerah Bulo-Bulo ke selatan dan Maros direbut oleh Belanda dari Bone. Selain itu, Belanda mulai mengadakan kontak dengan Gowa dan Luwu. La Temmasonge mangkat pada 1774 di Mallimongang (Makassar) sehingga memperoleh gelar anumerta MatinroE ri Mallimongang (Yang Wafat di Mallimongang).

La Temmasonge Datu Baringeng digantikan oleh cucunya, La Tenritappu. Gelar lengkapnya adalah La Tenritappu (La Tan-ri Tappu) To' Appaliweng Arung Timurang Sultan Ahmad Saleh Syamsuddin (Ahmad as-Saleh Shams ud-din) MatinroE-ri-Rompegading, Raja Bone ke-22 (1775–1812). Kala itu, ia baru berumur 12 tahun. Kendati demikian, semasa mudanya ia memperoleh pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya. Ayahnya adalah La Mappapenning, panglima besar Kerajaan Bone dan sekeligus cucu Raja La Pareppa TosappewaliE, sedangkan ibunya adalah We Hamidah, putri Raja La Temmasonge. Pada 5 Oktober 1772, tatkala La Tenritappu masih berusia 9 tahun, atas persetujuan kakeknya, La Temmasonge, Dewan Adat Bone menetapkannya sebagai calon Arumpone Bone berikutnya demi mencegah kekacauan yang timbul setelah mangkatnya raja kelak.

Karena saat dinobatkan sebagai raja ia masih belum cukup umur, mertua dan sekaligus pamannya, La Balloso Muhammad Ramalang (La Ballosok Ramelan) Arung Ponre, diangkat sebagai wali. La Tenritappu kelak dapat membuktikan dirinya sebagai pribadi yang berpandangan luas, berani, dan cakap dalam memerintah sehingga cocok memangku jabatan sebagai Raja Bone. Ia berupaya menjadi teladan bagi rakyatnya serta merupakan penganut agama yang taat. Semasa pemerintahannya, tersiar ajaran tarekat Khalwatiyah, salah satu cabang tarekat Naqsyabandiyah di Sulawesi Selatan. Tokoh pertama yang menyebarkan tarekat ini adalah Abdullahilmunir dan mencapai kemajuan pesat semasa pemerintahan Raja Ahmad Singkerruk Rukka (1860–1871). Karena ajarannya yang cenderung panteisme (ajaran yang menyamakan Tuhan dengan kekuatan-kekuatan dan hukum-hukum alam semesta) serta sesuai dengan keyakinan masyarakat saat itu, tidak heran tarekat tersebut dapat memperoleh banyak pengikut. Ketika terjadi perang saudara (1776–1785) antara Sultan Zainuddin yang sedang

berkuasa di Gowa dengan Batara Gowa Amas Madina (Batara Gowa I Sangkilang) yang konon dapat meloloskan diri dari pembuangannya di Sailan, Bone membantu tokoh yang mengaku sebagai Batara Gowa tersebut. Bantuan diberikan karena La Tenritappu yang kenal dekat dengan Amas Madina (Batara Gowa) yakin bahwa I Sangkilang memang seorang mantan Sultan Gowa, sedangkan Sultan Zainuddin dibantu oleh Belanda beserta Sidenreng dan Soppeng. Kendati demikian, peperangan akhirnya dimenangkan oleh Belanda dan sekutu-kutunya. Peristiwa ini tentu saja memperburuk hubungan antara Bone dengan Belanda.

Sebelum Sultan Amas Madina diasingkan ke Sailan, La Tenritappu selaku kerabat dekatnya memprotes tindakan Belanda itu. Ia pernah mengajukan permohonan kepada pemerintah Belanda agar Amas Madina dikembalikan ke Gowa sehingga perkaranya dapat disidangkan dengan adil sesuai derajatnya sebagai bangsawan. Raja Bone La Tenritappu tidak menyukai pengangkatan Sultan Zainuddin karena merasa bahwa yang berhak adalah I Sangkilang atau tokoh yang mengaku sebagai Batara Gowa tersebut. Sebelum I Sangkilang wafat pada 1785 di daerah pegunungan Gowa, ia berpesan agar benda-benda pusaka Kerajaan Gowa (*kalompoang*) yang berhasil diambil alih olehnya diserahkan kepada mantan Raja Gowa, I Mallisujawa Sultan Maduddin, karena menganggap bahwa Raja Gowa sebelum berkuasanya Sultan Zainuddin itu lebih layak menduduki singgasana Gowa. Meskipun demikian, I Mallisujawa tidak bersedia menerimanya dan mengirimkan benda-benda pusaka tersebut kepada Raja Bone, La Tenritappu, yang juga menolaknya. Karena itu, I Mallisujawa lantas berniat menyerahkannya kepada Gubernur Belanda di Makassar.

Gubernur Reyke tak mau menerimanya secara langsung. Ia mengatakan bahwa penyerahan itu harus menghormati perjanjian yang dahulu dibuat dengan Arung Palakka, yakni setiap raja yang hendak menghadap Belanda demi keperluan apapun harus melalui perantaraan Raja Bone terlebih dahulu. I Mallisujawa menghadap kembali kepada La Tenritappu dan kali ini Raja Bone tersebut bersedia menerima benda-benda pusaka Kerajaan Gowa yang dipersengketakan tersebut, tetapi La Tenritappu tak sudi menyerahkannya lagi kepada Belanda dan tetap menyimpannya bagi I Mallisujawa karena beranggapan bahwa mantan raja tersebut lebih berhak atas takhta Gowa ketimbang Sultan Zainuddin. Berkali-kali gubernur Belanda di Makassar melayangkan nota protes kepada La Tenritappu terkait benda-benda pusaka tersebut, namun tak membuahkan hasil apapun.

Pemerintah Belanda di Batavia mengirimkan kapal perangnya ke perairan Gowa guna menekan La Tenritappu agar menyerahkan *kalompoang* yang dikuasainya. La Tenritappu menyadari bahwa Perjanjian Bungaya adalah semata-mata alat Belanda dalam menanamkan pengaruhnya di Sulawesi Selatan serta sebagai wahana memecah-belah para raja di sana. Karena itulah, La Tenritappu yang sangat membenci Belanda tidak sudi memenuhi tuntutan mereka. Ia merasa tak gentar sedikitpun terhadap kehadiran kapal-kapal perang Belanda di perairan kerajaannya. Ternyata armada perang Belanda itu hanya mondar-mandir saja di perairan Bone selama tujuh bulan tanpa berani melakukan tindakan apapun. Memang saat itu kekuatan militer Belanda sedang merosot, apalagi mereka harus menghadapi serangan Inggris yang makin menanjak pamornya.

Pada 1809, Daendels menarik kapal-kapal perang Belanda dari Makassar ke Surabaya demi mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. La Tenritappu menggunakan kesempatan ini untuk bangkit melawan Belanda. Guna melemahkan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, ia mengirim para penyusup ke daerah-daerah yang diduduki Belanda dan menghasut rakyat agar tak membayar pajak kepada penjajah. Atas hasutannya ini, Belanda mengirimkan nota protes kepada La Tenritappu beserta Raja Tanete, sekutunya. Hal itu hanya ditanggapi sebagai angin lalu oleh kedua raja tersebut. Dengan jatuhnya Maluku ke tangan Inggris pada 1810, kedudukan Belanda makin goyah. Akibatnya, rakyat Bone banyak yang menduduki kembali Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, dan Maros, sementara rakyat Tanete mulai menguasai Sigeri, Lakbakeng, dan Siang. Karena kedudukannya sedang lemah, Belanda tak mampu melakukan apa-apa untuk mencegahnya.

Berkali-kali pasukan Belanda menelan kekalahan terhadap Inggris. Akhirnya, pada 18 September 1811, Gubernur Jenderal Hindia Belanda bertekuk lutut kepada Inggris dan menyerahkan seluruh wilayahnya di Kepulauan Nusantara melalui Perjanjian Tuntang. Tentu saja hal diprotes oleh Raja La Tenritappu.

> Kami bukan budak Pemerintah Belanda, kami hanyalah sekutunya! Tak ada satu fasalpun dalam Perjanjian Bungaya yang menyatakan bahwa Belanda boleh memperjualbelikan, menghadiahkan atau menjadikan kami alat pembayar utang pampasan perang kepada pihak ke tiga! Sebagai sekutu Belanda yang tahu diri, kami ingin membantu sekutu kami, Belanda melanjutkan peperangan dengan lawannya, Inggris. Kerajaan Bone, Tanete, dan Suppa bersedia berperang melawan Inggris di

barisan terdepan. Kami lebih suka gugur di medan pertempuran daripada menjadi pembayaran utang perang![478]

Nota protes ini disampaikan kepada wakil pemerintah kolonial Belanda di Sulawesi, tetapi ia menyatakan kewajibannya mematuhi segenap keputusan gubernur jenderal selaku pemegang kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda. Mendengar jawaban tersebut, Raja Bone, Tanete, dan Suppa menyatakan kemerdekaan mereka dan semenjak saat itu tidak terikat lagi pada Perjanjian Bungaya. Wilayah-wilayah yang pernah direbut Belanda diduduki kembali. Raja Tanete, La Patau, menduduki kembali wilayah Sigeri, Lakbakeng, dan Pangkejene, sedangkan Raja Suppa, La Kuneng Sultan Adam, mengambil alih Pare-Pare dari syahbandar Belanda. Sekali lagi Belanda memprotes tindakan ketiga raja di atas, tetapi tidak dapat melakukan apa-apa.

Philips, Residen Inggris yang diutus melakukan serah terima Pulau Sulawesi dari tangan pemerintah kolonial Belanda, tiba di Makassar pada Februari 1812. Raja-raja di Sulawesi juga diundang menyaksikan acara serah terima tersebut. Di antara mereka yang hadir adalah Raja Gowa, Sidenreng, dan Soppeng. Namun, Raja Bone, Tanete, dan Suppa menolak hadir. Mereka menolak penyerahan wilayah kekuasaan mereka kepada Inggris. Setelah itu, berkali-kali Philips menuntut ketiga raja tersebut menyerahkan daerah-daerah di sebelah utara Makassar yang pernah dikuasai pemerintah kolonial Belanda, tetapi tuntutan ini ditolak dengan tegas oleh mereka. Dengan demikian, timbul ketegangan antara Bone, Tanete, dan Suppa dengan pemerintah Inggris. Di tengah-tengah situasi seperti ini, La Tenritappu mangkat pada 1812 di Rompegading, dekat Makassar sehingga dianugerahi gelar anumerta MatinroE ri Rompegading (Yang Mangkat di Rompegading).

Residen Philips habis kesabarannya dan meminta bala bantuan pasukan Inggris dari Batavia. Pada 2 Juni 1814, tibalah armada Inggris di bawah pimpinan Mayor Jenderal Nightingale. Angkatan perang yang terdiri dari 900 orang ini mendarat di Makassar dengan didukung pula oleh pasukan-pasukan Madura dari Sumenep. Menyadari bahwa pertempuran tak terelakkan lagi, ketiga kerajaan yang saling bersekutu itu mempersiapkan dirinya dengan membangun benteng serta mengumpulkan persediaan bahan makanan. Raja Suppa bahkan berhasil menarik tiga kerajaan tetangganya, Sawitto, Alitta, dan Rappang, untuk memihak dirinya melawan Inggris dan sekutunya yang berniat merampas kedaulatan tanah air mereka.

478. *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*, halaman 48.

Pertempuran-pertempuran melawan Inggris dan sekutu-sekutunya pecah pada pertengahan 1815. Pada pertempuran ini pasukan Inggris beserta sekutunya terpukul mundur. Pasukan Bone berhasil merebut sebagian Bulukumba dan Bantaeng. Serangan dan pengepungan dilancarkan terhadap Soppeng karena mereka memihak Inggris. Sekutu-sekutu Bone, seperti Suppa dan Tanete, berhasil pula meraih kemenangan.

Masih dalam tahun yang sama, berlangsung pertempuran antara Bone dan Tanete melawan Inggris yang dibantu Gowa di Kali Bone, dekat Binangka Sangka di perbatasan antara Maros dengan Pangkajene. Kendati pasukan Inggris menggunakan persenjataan yang maju, Bone dan Tanete tetap unggul di lapangan sehingga serdadu-serdadu Inggris terpaksa mundur ke perkubuannya dengan tangan hampa. Meskipun demikian, pada Oktober 1815 ketika terjadi pertempuran sengit dengan Gowa dan Inggris di Maros, pasukan Bone berhasil didesak ke daerah pegunungan, tetapi pada November 1815, Bone berhasil menguasai Maros kembali selama beberapa bulan lamanya. Pada 1816, Mayor Dalton, wakil pemerintah Inggris di Sulawesi, mengerahkan seluruh kekuatannya dan mendesak orang Bone ke daerah pegunungan lagi.

Di tengah-tengah berkecamuknya pertempuran itu, pemerintah Inggris berdamai dengan Belanda pada 1816. Oleh karenanya, Inggris bersedia menyerahkan kembali wilayah-wilayah di Kepulauan Nusantara yang dikuasainya kepada Belanda. Komisaris Kerajaan Belanda, Chasse, tiba di Makassar pada 2 September 1816 untuk menerima kembali kekuasaan dari tangan Inggris. Serah terima dilangsungkan pada Oktober 1816 dengan dihadiri berbagai raja dari Sulawesi Selatan dan dipelopori oleh Raja Gowa. Pada kesempatan tersebut, diberitakan bahwa Karaeng Lembangparang I Mappatunruk dari Gowa hadir dengan disertai rombongannya. Namun, Raja Bone, Tanete, dan Suppa tetap menolak hadir. Raja Bone saat itu, La Mappatunru To Appatunru' Sultan Muhammad Ismail Muhtajuddin (1812–1823)[479] yang menggantikan La Tenritappu hanya mengirimkan surat berisi ucapan selamat saja. Di samping itu, ia menyatakan kesediaannya hidup berdampingan dengan Belanda asalkan syarat-syarat berikut dipenuhi.

- Raja Bone dipulihkan kedudukannya sebagai Kanselir Persekutuan Raja-raja Sulawesi dengan fasilitas seperti pada masa Arung Palakka.

479. Dieja To Appatunruk dalam buku *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*, halaman 51.

- Kawasan di sebelah utara Makassar hingga ke tapal batas Kerajaan Tanete serta wilayah dari Bulo-Bulo hingga Turatea menjadi daerah kekuasaan Bone.
- Bontoalak beserta pelabuhannya dikembalikan pada Bone.

Jika tuntutan-tuntutan ini dipenuhi, Raja Bone bersedia datang sendiri ke Makassar dan mengadakan pembicaraan lebih lanjut. Chasse menolak seluruh tuntutan di atas dan berbalik menuntut Bone menyerahkan Maros, Bantaeng, dan Bulo-Bulo. Selanjutnya, Tanete diminta pula menyerahkan Sigeri, Lakbakeng, dan Pangkajene. Raja Bone dan Tanete menjawab bahwa kawasan-kawasan tersebut merupakan warisan dari Arung Palakka yang direbutnya dengan susah payah dari Gowa. Namun, Belanda merampas wilayah-wilayah itu dari tangan La Patau, Raja Bone. Dengan demikian, sudah sepantasnya apabila negeri-negeri tersebut kembali kepada Bone dan Tanete. Sikap pemerintah Belanda ini makin memperuncing hubungannya dengan Bone, Tanete, dan Suppa.

Gubernur Jenderal van der Capellen berniat mengadakan perundingan dengan para raja di Sulawesi Selatan guna mengukuhkan kembali Perjanjian Bungaya yang Diperbaharui dan tiba di Makassar pada 5 Juli 1824. Kali ini, Raja Bone, Suppa, dan Tanete tetap menolak menghadirinya. Bone hanya mengirimkan wakilnya yang bernama La Mappaewa Arung Lempu. Sedangkan Raja Suppa dan Tanete berlaku seolah-olah tidak menerima undangan itu karena isinya yang sungguh merendahkan, layaknya perintah majikan kepada bawahannya saja. Dalam pertemuan yang diselenggarakan dengan gubernur jenderal pada 6 Juli 1824, La Mappaewa Arung Lempu menegaskan lagi tuntutannya. Ia menyatakan Bone bersedia menerima kembali Perjanjian Bungaya, asalkan

- Diadakan lagi perserikatan antara kerajaan-kerajaan Sulawesi dengan Belanda. Sebagai pelindungnya adalah Raja Belanda dan kanselirnya, Raja Bone.
- Urusan luar negeri diserahkan kepada Belanda.
- Mata uang Belanda berlaku di Sulawesi dengan nilai yang sama dengan di Negeri Belanda sendiri.
- Barang-barang Belanda bebas masuk ke kerajaan-kerajaan anggota persekutuan dan demikian pula sebaliknya.
- Daerah-daerah mulai dari Bulo-Bulo hingga Turatea dan Maros sampai Kali Bone masuk dalam wilayah Kerajaan Bone. Daerah-daerah Kerajaan Siang (Pangkajene) dan Cilelellang diserahkan kepada Tanete.

Gubernur Jenderal van der Capellen menampik semua tuntutan di atas, bahkan ia memberi kesempatan selama 15 hari kepada Raja Bone untuk memikirkan apakah ia akan bersikeras pada pendiriannya sendiri atau mengikuti raja-raja lainnya menerima Perjanjian Bungaya yang Diperbaharui.

Bersamaan dengan itu, Belanda mencari siasat guna melemahkan Bone. Pertama-tama, mereka berniat menundukkan sekutu-sekutu Bone terlebih dahulu, seperti Tanete dan Suppa. Pada 15 Juli 1824, pasukan Belanda mendarat di Tanete yang dipimpin oleh Kolonel H. de Steurs, ajudan Gubernur Jenderal van der Capellen. Belanda yang didukung oleh Gowa dan Sidenreng mengepung ibu kota Tanete. Karena kekuatan yang tidak seimbang, kota itu jatuh ke tangan musuh. Raja La Patau dari Tanete tidak bersedia menyerah kepada pemerintah kolonial Belanda dan melarikan diri ke pedalaman. Sebagai penggantinya, Daeng Tanisanga, saudara perempuan La Patau, diangkat sebagai penguasa Tanete yang baru. Ia menandatangani perjanjian perdamaian dengan Belanda pada 19 Juli 1824. Tanpa diduga sebelumnya, pasukan Bone berhasil mendudukkan kembali La Patau di singgasananya, bahkan pasukan Belanda di Pangkajene beserta Lakbakeng dihancurkan sepenuhnya. Menyadari hal ini, pasukan Belanda yang masih bertahan di Maros menyerah kepada Bone.

Hal tersebut membuktikan bahwa Bone telah menjadi musuh Belanda yang tangguh sehingga kelak beberapa kali Belanda harus mengirimkan ekspedisi militer ke sana. Karena kekalahan telak ini, Gubernur Jenderal van der Capellen mengirimkan ekspedisi militer pertama yang dipimpin oleh Mayor Jenderal van Green dan terjadi semasa pemerintahan raja wanita Bone ke-24, I-Maneng Arung Data Sri Ratu Sultana Salima Rajiat ud-din (1823–1835). Ekspedisi ini didukung pula oleh pasukan Madura yang berasal dari Sumenep. Pertempuran yang dahsyat pecah antara Belanda dengan Bone pada 27 Maret 1825. Kali ini, pasukan Bone terdesak hingga ke ibu kotanya di Watampone. Pasukan Belanda yang saat itu jumlahnya mencapai 11.000 orang melancarkan kepungan terhadap Watampone.

Kesulitan ini memecah Bone menjadi dua, yakni kelompok yang menentang Belanda dengan Ratu I Maneng Arung Data dan To Malompoe Arung Lompu sebagai pelopornya, san kelompok yang bersedia bekerja sama dengan musuh dan menerima pertuanan Belanda atas negeri mereka. Golongan ini dipimpin oleh Tumarilaleng La Mappangara Arung Sinri, Arung Berru Sumangek Rukka, dan La Mappaseling.

Karena kesediaannya memihak Belanda, La Mappaseling diangkat sebagai Raja Bone berikutnya dengan gelar lengkap La Mappaseling Paduka Sri Sultan Adam Nazimuddin (1835–1845). Setelah sepuluh tahun memerintah, ia wafat dan digantikan oleh kemenakannya, La Parenrengi Arumpugi Sultan Ahmad Saleh Muhiuddin (1845–1857). Setelah naik takhta, La Parenrengi bersedia menandatangani Perjanjian Bungaya yang Diperbaharui, tetapi empat tahun kemudian (1849), ia membatalkan kembali perjanjian tersebut karena isinya dirasa merendahkan martabat Bone. Ia memecat Tomarilalang La Mappangara Arung Sinre karena dianggap terlalu memihak Belanda. Diserukannya pula kepada kerajaan-kerajaan yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Bone, seperti Wajo, Soppeng, Sawitto, Alitta, Suppa, Rappang, Sidenreng, Berru, dan Tanete untuk bangkit melawan Belanda. Namun, Belanda saat itu sedang disibukkan dengan pergolakan di Sumatera dan Kalimantan sehingga mendiamkan saja segenap peristiwa yang berlaku di Bone. Akibatnya, semangat tempur rakyat Bone berkobar kembali.

Raja La Parenrengi mangkat pada 16 Februari 1857. Ia digantikan oleh istrinya, Ratu I Tenri Awaru (Tenriwaru) Besse Kajuara Pancaitana Mpelai Engi Passempe (1857–1860, juga dieja Basse Kajuara atau Bessek Kajuara–gelar Sultana Ummulhadi).[480] Dalam menjalankan roda pemerintahan di Bone, ratu didampingi saudara sepupunya bernama To Ancale Arung Amali. Selain menjadi ratu di Bone, ia juga pernah memangku jabatan sebagai Datu Suppa. Belanda menyangka bahwa Ratu Bone yang baru tersebut akan bersikap lebih lunak dibandingkan almarhum suaminya. Ternyata dugaan Belanda meleset. Ia sangat membenci sikap Belanda yang dengan sewenang-wenang menganggap Bone sebagai kerajaan bawahannya. Ketika Gubernur Belanda di Makassar meminta ratu agar mengirimkan utusan guna merundingkan permasalahan yang sering terjadi antara pihaknya dan Bone, dengan tegas Ratu Basse Kajuara menolaknya seraya menyatakan bahwa Bone bukanlah taklukan Belanda sehingga bila memerlukan sesuatu dengan Bone, utusan Belandalah yang seharusnya menghadap *arumpone* (Raja atau penguasa Bone) dan bukan sebaliknya. Ratu pernah menolak kehadiran seorang sarjana Belanda, Dr. B.F. Matthes, yang telah mendapatkan surat izin melakukan penelitian di daerah Bone dari pemerintah kolonial. Alasannya, surat izin semacam itu tidak berlaku di Bone. Masih belum cukup dengan tindakan-tindakan

480. Ada sumber yang menyebutkan dan mengeja namanya sebagai I Basse Tanriwaru Kajuwarahadi Abel Hadi Pelaiengi Pasimpa.

perlawanan di atas, ratu yang anti-Belanda ini memerintahkan agar setiap kapal yang keluar masuk pelabuhan Bajoe agar mengibarkan bendera Belanda pada buritannya secara terbalik, yakni dengan tiang di atas dan kainnya di bawah. Ratu memang berupaya memperlihatkan kebenciannya terhadap Belanda secara terang-terangan. Kapal-kapal yang menolak mengikuti ketentuan ratu tersebut akan ditembaki.

Sikap ratu yang sangat anti-Belanda ini tentu saja mendorong pemerintah kolonial mengambil tindakan tegas. Belanda merongrong kekuasaan ratu dari dalam dengan mendekati kemenakannya, La Singkara Rukka, dan mengumbar janji manis bahwa ia akan diangkat sebagai *arumpone* (Raja Bone). Pada Januari 1859, dikirimlah ekspedisi militer Belanda kedua yang dipimpin oleh Mayor Jenderal E.C.C. Steinmetz. Dengan sombong pasukan Belanda menyampaikan ultimatum sebagai berikut.

- Raja, kaum bangsawan, beserta sekalian rakyat Bone harus meminta maaf terhadap Belanda atas sikap mereka yang anti-Belanda. Selanjutnya, Ratu Bone wajib mengakui Raja Belanda sebagai tuan atas negeri mereka.
- Pemerintah dan rakyat Bone agar mengibarkan bendera Belanda dan menghormatinya dengan 21 kali tembakan meriam, saat Mayor Jenderal E.C.C. Steinmetz mendarat di Bajoe.
- Ratu beserta dewan pemerintahan dan adat Bone (*arung pitu*) bersedia menandatangani Perjanjian Bungaya yang Diperbaharui.
- Belanda memberikan kesempatan 3 x 24 jam bagi Bone menjawab tuntutan di atas. Apabila tidak ada jawaban, Bone akan diserang oleh Belanda.

Ternyata Bone tidak memberikan jawaban apapun. Oleh karenanya, pasukan Belanda segera didaratkan di Bajoe pada 11 Februari 1859. Bone dapat dikalahkan dan benda-benda pusaka serta kebesaran Bone dirampas oleh Belanda.

Pemerintah Hindia Belanda yang berhasil mengalahkan Bone kemudian memaklumkan bahwa berdasarkan hukum perang, selaku pemenang mereka dapat melakukan apapun juga sekehendak mereka, termasuk menghapuskan Kerajaan Bone. Kendati demikian, pemerintah Belanda masih membiarkan Bone tetap berdiri sebagai suatu kerajaan. Mereka bersedia meminjamkan kerajaan tersebut kepada seorang penguasa yang dipilih oleh *arung pitu* sesuai adat yang berlaku. Dengan demikian, status Bone turun sebagai kerajaan pinjaman belaka. Pada 28 Januari, *arung pitu* memilih La Singkara Rukka sebagai Raja Bone yang baru dengan gelar La Singkara Rukka Paduka Sri Sultan Ahmad Idris (1860–1871). *Arumpone* baru yang pernah

membantu Belanda ini dilantik secara resmi pada 31 Januari 1860 sesuai dengan tradisi Bone. Sebagai wujud pengakuan pertuanan pemerintah Hindia Belanda atas kerajaan mereka, Raja Bone beserta anggota *arung pitu* menandatangani *Korte Verklaring*. Wilayah-wilayah Kajang, Sinjai, dan Bulukumba diserahkan kepada Belanda. Berbeda dengan para pendahulunya, La Singkara Rukka kini hanya berstatus raja pinjaman (*leenvorst*) dengan kekuasaan yang sangat terbatas. Sementara itu, Ratu Basse Kajuara mendapatkan ampunan dari pemerintah Belanda. Pada 7 Maret 1860, ia pergi ke Suppa, tempat kelahirannya, dan pada 1862 diangkat oleh rakyat Suppa sebagai Ratu mereka. Ia tetap berdiam di Suppa hingga wafat dan memperoleh gelar MattinroE ri Majennang (Yang Wafat di Majjennang).[481] Ketika Raja La Singkara Rukka mangkat pada 1871, ia digantikan oleh Ratu I-Banri Gau Paduka Sri Sultana Fatima Arung Timurung (1871–1895).

Setelah memerintah selama 24 tahun, Ratu I Banri Gau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 1895. Sebagai penguasa berikutnya oleh *Adè' Pitu* (Dewan Adat Bone) adalah I Bungasutera Arung Apala, putra Ratu I Banri Gau. Saat itu, usianya baru 12 tahun sehingga Belanda kurang menyetujui pengangkatan tersebut karena khawatir membesarnya pengaruh Gowa di Bone. Gubernur Belanda, Braam Morries, mengadakan pertemuan dengan *arung pitu* guna memilih penggantinya. Pilihan jatuh kepada La Pawawoi Karaeng Sigeri (1895–1905), adik Ratu I Banri Gau, yang kala itu telah berusia kurang lebih 70 tahun.

I Bungasutera Arung Apala hanya sempat menduduki takhta selama enam hari. Ia diturunkan dari singgasananya dan La Pawawoi dinobatkan sebagai Raja Bone. Menurut sangkaan Belanda, raja yang telah lanjut usia ini akan bersikap bersahabat karena sebelumnya ia sering membantu Belanda sehingga dianugerahi bintang penghargaan, tetapi kembali Belanda salah menduga. Meskipun usianya telah lanjut dan banyak memberikan bantuannya kepada Belanda, api kebencian terhadap penjajah berkobar dalam hati Raja La Pawawoi sehingga hubungan kedua belah pihak kembali memanas. Pada 1897, La Pawawoi mengirim putranya, Abdul Hamid Baso Pagilingi, melakukan perdagangan budak besar-besaran dan menarik seluruh hasil kopi ke pelabuhan Pare-Pare melalui Sidenreng serta Rappang. Akibatnya, perniagaan budak di Tana Toraja menjadi sepi dan semua hasil kopi di sana diekspor ke negeri-negeri lainnya melalui Palopo. Tindakan ini dimaksudkan raja sebagai perang ekonomi melawan Belanda.

481. Karena mangkat di Kampung Majennang.

Raja La Pawawoi melakukan serangan ke Wajo dan kerap pula campur tangan dalam pengangkatan raja-raja di Sulawesi Timur, yakni di Laiwui, Bungku, dan Banggai. Selain itu, ia menebarkan pengaruhnya hingga Pulau Sumbawa. Tindakan yang bertujuan meningkatkan martabat Bone ini ditentang keras oleh Belanda. Akibatnya, Belanda mengirimkan ekspedisi militernya pada 20 Juli 1905 yang dipimpin oleh Kolonel P.H. van der Wedden dan kemudian diganti oleh Kolonel C.A. van Loenen. Raja La Pawawoi mengangkat putranya, Abdul Hamid, sebagai panglima perang (*ponggawa*), dan melakukan perlawanan demi mempertahankan kedaulatan negerinya, tetapi terus menerus terdesak. Karena sebagian besar wilayah telah diduduki musuh, mereka terpaksa melakukan perang gerilya di pegunungan sebelah timur laut Kerajaan Sidenreng. Abdul Hamid beserta dua orang pengawalnya gugur pada 18 November 1905 di Awo, Pitumpanua, yang masih termasuk wilayah Wajo. Akhirnya, Raja La Pawawoi yang kala itu telah menginjak usia 80 tahun, ditawan oleh Belanda. Ia mula-mula dibawa ke Pare-Pare dan selanjutnya diangkut dengan kapal H.M. Asahan ke Makassar. Ia kemudian diasingkan ke Bandung dan mangkat di Jakarta pada 1911.

Menyusul peristiwa kekalahan dan pengasingan Raja Bone ini, Belanda mengumpulkan sisa-sisa persenjataan dari laskar dan rakyat Bone sebagai upaya melucuti kekuatan mereka. Belanda memungut denda dari kalangan rakyat (*sebbu kati*) sejumlah tiga Ringgit seorang. Denda itu dimaksudkan sebagai pengganti kerugian peperangan melawan raja mereka. Setelah pungutan selesai diberlakukan, Belanda membangun jalan raya di Bone, dan rakyat diperintahkan bekerja paksa. Setiap laki-laki dewasa hingga yang berusia 60 tahun wajib menyumbangkan tenaganya. Namun, bagi yang tak mampu bekerja dapat menyerahkan uang sebesar 3 Ringgit sebagai pengganti tenaganya.

e. Kerajaan Bone Dalam Era Swapraja dan Kemerdekaan

Setelah Kerajaan Bone dikalahkan, tidak ada lagi raja yang berkuasa di Bone selama 26 tahun (1905–1931). Urusan pemerintahan kini dijalankan oleh *arung pitu* atau Dewan Adat Bone (yang diketuai seorang *tomarileleng*) di bawah kendali pemerintah kolonial. Belanda melakukan berbagai reorganisasi pemerintahan di sana. Wilayah Kerajaan Bone dibagi menjadi tiga *onderafdeeling,* yakni Bone Tengah, Bone Utara, dan Bone Selatan. Meskipun demikian, belakangan ketiganya disatukan kembali menjadi *onderafdeeling* Bone, dan menjadi bagian

afdeeling Bone.[482] Ibu kota *afdeeling* maupun *onderafdeeling* sama-sama berada di Watampone. Karenanya, baik asisten residen (kepala *afdeeling*) dan kontrolir (kepala *onderafdeeling*) keduanya berkedudukan di Watampone. Sebagai catatan, sebelumnya ibu kota *afdeeling* Bone berada di Pompanuwa. Setelah keadaan aman baru dipindahkan ke Watampone. Peristiwa yang terjadi pada kurun waktu ini adalah pembangunan sebuah madrasah bernama Madrasah Amiriah pada 1926.[483] Selain itu, dewan pemerintahan Bone memberikan bantuan pula pada Al Madrasah Masriah. Para pengasuh institusi pendidikan Islam ini tidak hanya berasal dari Bone, melainkan juga ulama-ulama asal Arab serta Mesir, seperti Abdul Aziz al Hasyimi al Murabbi dan Abdul Hamid.

Belanda mengangkat seorang *tomarileleng* sebagai ketua dewan adat atau *hadat* Bone, yang kelak menjadi orang kedua setelah *arumpone* dalam hierarki kekuasaan kerajaan tersebut. Selanjutnya, Bone menjadi salah satu swapraja di bawah naungan pemerintah Hindia Belanda. Tomarileleng Swapraja Bone yang pertama adalah La Makdussila Daeng Paraga. Ia adalah seorang keturunan bangsawan tinggi Bone yang menikah dengan putri Raja La Pawawoi. Setelah ketertiban dan keamanan berhasil dipulihkan, Belanda berniat mengangkat seorang raja lagi bagi Bone. Sebagai Raja atau Kepala Swapraja Bone pada 2 April 1931 diangkatlah La Mappanyuki datu Lolo ri Suppa (1931–1946, bergelar Sultan Ibrahim) berdasarkan pilihan Dewan Adat Bone. Tentu saja pengangkatan ini diikuti pula dengan penandatanganan kontrak politik berupa *Korte Verklaring*.

La Mappanyuki sendiri adalah putra Raja Gowa, Sultan Husain I Makkulau, yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda karena terjatuh dalam sebuah jurang di lereng Gunung Latimojong pada Desember 1905. Dipilihnya La Mappanyuki sebagai Raja Bone dikarenakan Abdul Hamid, putra mahkota La Pawawoi, gugur dalam peperangan. Raja Swapraja Bone ini masih merupakan kemenakan La Pawawoi karena ayahnya merupakan sepupu almarhum Raja Bone yang melawan Belanda tersebut. Secara genealogis, ia adalah cucu La Tan-ri Tappu. Oleh karena itu, La Mappanyuki mempunyai hak menjadi Raja Bone. Sebelum diangkat sebagai Raja Bone, Dewan Adat Bone telah meminta kesediaannya, La Mappanyuki menjawab “Pesan nenek saya,

482. *Afdeeling* Bone dibentuk pada 2 Desember 1905 berdasarkan ketetapan gubernur jenderal Hindia Belanda. *Afdeeling* ini secara keseluruhan terdiri dari lima *onderafdeeling*. Dua yang lainnya adalah *Onderafdeeling* Wajo dan Soppeng. Dengan demikian, ketiga kerajaan yang pernah tergabung dalam TellumpoccoE digabungkan menjadi satu *afdeeling*.

483. Lihat *Sejarah Kebudayaan Sulawesi*, halaman 124.

janganlah anak cucuku meminta menjadi raja. Akan tetapi, apabila rakyat memintamu untuk menjadi raja mereka maka pantanglah engkau menolaknya."[484]

Semasa pemerintahannya, La Mappanyuki meminta pemerintah Hindia Belanda mengembalikan istana (*salassa*) milik La Pawawoi yang disita oleh Belanda ketika ia diasingkan ke Bandung, demikian pula dengan benda-benda pusaka milik Bone (*arajang*).[485] Permintaan ini dikabulkan oleh pemerintah kolonial dan semenjak saat itu, La Mappanyuki berdiam di sana beserta anggota *arung pitu* guna menjalankan pemerintahannya. Peristiwa penting lain yang terjadi pada zaman La Mappanyuki adalah dibunuhnya Daeng Patobo, saudara La Sambaloge Daeng Manabba Sulewatang Palakka, oleh La Pabbenteng Petta Lawa Arung Macege, putra Abdul Hamid Baso Pagilingi (putra La Pawawoi yang gugur dalam peperangan).[486] Oleh karena tindakannya itu, La Pabbenteng diberhentikan dari jabatannya sebagai *Arung* (Raja) Macege dan kedudukannya diganti oleh La Pangerang Daeng Rani, putra La Mappanyuki. Sebagai upaya memajukan bidang keagamaan, La Mappanyuki mendirikan Masjid Raya Watampone pada 1941 dan mengundang Residen Boslaar saat peresmiannya.

Perang Dunia II pecah pada 1939 dan pemerintah Hindia Belanda dipaksa bertekuk lutut kepada Jepang. Pemerintahan militer Jepang mengganti gelar raja dengan *suco* dan dewan adat diganti sebutannya menjadi *suco dairi*. Jabatan kontrolir diubah namanya menjadi *bunken karikan* dan asisten residen menjadi *ken karikan*. Meskipun demikian, Jepang tidak banyak mengubah susunan pemerintahan di masing-masing kerajaan. Ketika kedudukan Jepang mulai terdesak, mereka menarik diri dari pemerintahan dan jabatan *ken karikan* diserahkan kepada La Pangerang. Sebelumnya, La Pangerang bertindak selaku wakil raja apabila La Mappanyuki berhalangan.

---

484. Biografi *Pahlawan Haji Andi Mappanyuki Sultan Ibrahim*, halaman 105.
485. Daftar *arajang* yang dikembalikan antara lain adalah "Tombak La Toleang, Tombak La Tellaga, Seppung (terompet) Saddae, La Teariduni, La Makkawe, Keris Laulla Menrellik yang dipakai oleh Petta To Risompae, Badik Maappaduae, Onrong Saddae ri Lasamaada, Bendera Samparajae, Bendera Lima Silannge, Bendera Garudae, Bendera Ulu Balue, Bendera La Mangottong, Pisau Pemotong Rambut Petta To Risompae, payung emas, gelang bermacam-macam bentuknya, payung perak bercaya putih, payung tua bercaya kuning bersih, salembang emas, tabung perak yang dua surat di dalamnya (surat perjanjian antara Petta To Risompae dengan Admiral Speelman), Ikat Pinggang Daeng ri Warae, Badik Toappaewang, Badik Toamessi, Badik La Passeri, Badik Lamenggala, Badik La Paoppoki, rantai berpilin, Besi Kaliawo, Keris Karisimpannge yang panjang Arajannge ri Palakka (Kajao, Tuppu Batuae, Ampu Babae, Ampu Pumate), Palumessa Padae, Gendang Lamanroro, Tali satu kembarnya, Daeng baine Gendang dua kembarnya, dan lain-lain." Begitu kapal pengangkut arajang itu tiba di Makasssar langsung dibawa oleh iring-iringan ke Watampone. Lihat *Biografi Pahlawan Haji Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim*, halaman 106.
486. Lihat *http://www.myheritage.com/site-50124411/kerajaan-bone-web-site* (dunduh pada 21 September 2009).

Setelah Jepang menyerah tanpa syarat, Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno dan Bung Hatta. La Mappanyuki selaku Arumpone Bone dengan tegas menyatakan dukungannya bagi RI. Bahkan menjelang dikumandangkannya proklamasi, ia mengutus La Pangerang bersama Dr. Sam Ratulangi berangkat ke Jawa sebagai wakil Indonesia Timur dalam mendukung kemerdekaan. Sepulangnya dari Jawa, La Pangerang beserta ayahnya ditangkap oleh NICA dan diasingkan ke Tana Toraja.

La (Andi) Pangerang Daeng (Petta) Rani kemudian diangkat sebagai Bupati Kabupaten Bone yang meliputi kerajaan-kerajaan TellumpoccoE. Selanjutnya, ia pernah menduduki jabatan sebagai residen bersama *karaeng* (bangsawan) Pangkajenne yang bernama Burhanuddin. Jabatan selanjutnya yang diemban La Pangerang adalah Gubernur Sulawesi. Sementara itu, pada 1957 Swapraja Bone dibubarkan, dan La Mappanyuki diangkat sebagai Bupati Kabupaten Bone, yang merupakan salah satu di antara tiga pecahan wilayah Kabupaten Bone lama,[487] hingga ia pensiun. La Mappanyuki meninggal pada 18 Februari 1967 dan dikebumikan di taman makam pahlawan Panaikang.

Karena tidak bersedia bekerja sama dengan NICA, La Mappanyuki diberhentikan sebagai Raja Bone pada 1946. Belanda lalu mengangkat La (And) Pabbenteng sebagai *Arumpone* (Raja) Bone yang baru. Sebelumnya, La Pabbenteng sendiri pernah menentang pengangkatan La Mappanyuki karena merasa bahwa dirinya lebih berhak. Secara garis keturunan, ia adalah putra Abdul Hamid Baso Pagilingi atau cucu La Pawawoi sehingga lebih dekat hubungan kekerabatanya dengan Raja Bone sebelumnya. La Pabbenteng pernah berbuat kesalahan dengan membunuh sepupunya, Daeng Patobo. Akibatnya, ia dijatuhi hukuman pengasingan. Setelah Jepang masuk ke Bone, barulah ia kembali ke negerinya. La Pabbenteng merupakan tokoh yang dekat dengan NICA dan kerap menyertai mereka saat bepergian. Itulah sebabnya NICA menganugerahkan pangkat kolonel tituler (pangkat yang diberikan kepada seseorang di luar kalangan militer) kepadanya.

NICA menugaskan La Pabbenteng mempersatukan para raja Sulawesi Selatan serta membentuk organisasi persatuan raja-raja tersebut yang bernama Hadat Tinggi. Organisasi atau dewan ini diketuai sendiri oleh La Pabbenteng dan Andi (La) Ijo Daeng

487. Kabupaten Bone lama dipecah menjadi Kabupaten Bone (beribu kota Watampone), Wajo (beribu kota Sengkang), dan Soppeng (beribu kota Watassoppeng).

Mattawang Karaeng Lalolang,[488] serta menjadi alat pemerintah Belanda menjalankan roda pemerintahannya di Sulawesi Selatan. Sebagai langkah memecah belah bangsa Indonesia, Belanda membentuk berbagai negara bagian, termasuk Negara Indonesia Timur (NIT). Hadat Tinggi menggabungkan wilayah mereka dengan negara bagian bentukan Belanda tersebut. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan dan NIT kembali ke pangkuan NKRI. Bersamaan dengan itu, bubar pula Hadat Tinggi. Pada 1950, La Pabbenteng mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Raja Bone dan pindah ke Jawa. Anggota Dewan Adat Bone lainnya juga meletakkan jabatannya. La Mappanyuki menduduki kembali singgasana Bone pada 1957 hingga 1960. Ia merupakan Raja Bone ke-23 dan terakhir.

Sekalipun merupakan keturunan raja, La Mappanyuki mengajarkan kerendahan hati kepada para kerabatnya. Ketika sedang makan bersama anggota keluarganya, telepon berdering dan salah seorang anaknya mengangkatnya.[489] Orang yang menelepon ternyata hendak berbicara dengan La Mappanyuki. Putranya, Bau Parengrengi, mengatakan bahwa La Mappanyuki sedang makan. Penelpon menanyakan dengan siapa ia berbicara. Putra La Mappanyuki itu menyebutkan nama beserta gelar kebangsawanannya. Setelah telepon ditutup, La Mappanyuki menasihatinya agar jangan menyebutkan gelar kebangsawanan dan cukup nama saja. Gelar kebangsawanan itu diberikan oleh rakyat. Ia meneruskan nasihatnya bahwa manusia tidak ditentukan oleh derajat atau gelar kebangsawanan, melainkan oleh budinya di tengah masyarakat.

La Pangerang yang merupakan putra La Mappanyuki membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang merakyat. Semenjak kecil telah tampak jiwa kepemimpinan dalam dirinya. Haji Mallarangan Daeng Matutu,[490] teman masa kecil La Pangerang, menuturkan kemampuan La Pangerang mengorganisasi perkumpulan sepak bola kendati usianya masih tergolong kanak-kanak. Ia merupakan pencetus klub sepak bola tersebut dan tidak segan pula menjadi donaturnya. Andi Pangerang gemar menolong dan membantu kawannya. Bila menyaksikan pakaian sepak bola temannya belum lengkap, ia membelikannya yang baru. Tatkala latihan sudah selesai, ia akan mentraktir teman-temannya. Kalau ada pertengkaran di antara sesama anggota perkumpulan, ia akan menjadi penengahnya. Menurut Haji Mallarangan Daeng Matutu, Andi Pangerang disukai oleh seluruh kawannya. Saat bermain sepak bola, La Pangerang

488. Sultan Gowa ke-36 dan terakhir.
489. Lihat Lihat *Andi Pangerang Petta Rani: Profil Pemimpin yang Manunggal dengan Rakyat*, halaman 33.
490. Lihat *Andi Pangerang Petta Rani: Profil Pemimpin yang Manunggal dengan Rakyat*, halaman 20.

mengatakan kepada kawan-kawan sepermainannya agar jangan segan kepadanya meskipun ia anak raja.

Sebagai seorang pemimpin yang rendah hati, saat mengendarai mobil bersama sopir maupun anaknya, ia tidak segan melambaikan tangan kepada siapa saja yang dikenalnya, sekalipun mereka berjalan kaki. Tanpa memandang status sosial, ia pasti menyapa mereka.[491] Andi Pangerang sering mengunjungi para petani miskin dalam perjalanan dinasnya. Selain menanyakan kondisi padi atau hewan ternak mereka, Andi Pangerang meminta para petani tersebut mengutarakan kesulitan hidup mereka. ia akan langsung membantu mereka. Sebagai contoh, ketika ada yang memerlukan uang guna menyekolahkan anak mereka, tanpa pikir panjang Andi Pangerang akan membantu pembiayaannya, bahkan tidak jarang para petani miskin itu menitipkan anak-anaknya di rumahnya.

Andi atau La Pangerang Petta Rani merupakan pribadi yang sederhana. Ia tidak pernah menonjolkan kedudukan atau kekayaannya. Kendati mampu membeli mobil mewah, tetapi ia tetap menggunakan Fiat tua buatan 1950 hingga memasuki masa pensiun. Suatu ketika, La Pangerang hendak pergi ke tukang cukur dan mengajak salah seorang putranya. Dia memilih tidak menggunakan mobil Fiatnya melainkan memanggil becak yang lewat depan rumahnya. Ia menjelaskan alasan tindakan tersebut kepada putranya guna menanamkan rasa rendah hati dan kesederhanaan. Tak selamanya orang itu mempunyai mobil atau menjadi anak gubernur. Jika sebelumnya biasa naik becak maka sewaktu tidak memiliki mobil lagi, orang akan berkata bahwa ia memang sedari dulu gemar naik becak. Sebaliknya, bila terbiasa naik mobil, orang akan berkata bahwa karena kini tak punya mobil lagi ia terpaksa naik becak. Dengan demikian, ia akan merasa malu bepergian.

Selama menjabat sebagai Gubernur Sulawesi, ia mendorong kemajuan kesenian Sulawesi Selatan. Bidang olahraga tak luput dari perhatiannya. Selaku pembina PSM (Persatuan Sepak Bola Makassar), Andi Pangerang sangat memperhatikan kondisi pemainnya. Ia secara pribadi memikirkan kesejahteraan mereka. Jikalau ada di antara mereka yang kehabisan uang, tak segan-segan ia merogoh sakunya sendiri. Kecintaannya kepada Republik Indonesia kembali terbukti saat meletusnya pemberontakan DI/ TII. Dengan tegas ia menindak pergolakan tersebut kendati yang terlibat adalah kerabat dekatnya sendiri. Demi memajukan bidang pendidikan, La

491. Lihat Lihat *Andi Pangerang Petta Rani: Profil Pemimpin yang Manunggal dengan Rakyat*, halaman 24.

Pangerang mendirikan Yayasan Latimojong yang kerap memberikan beasiswa bagi siswa kurang mampu.

La Pangerang merupakan profil pemimpin yang menentang rasialisme.[492] Dalam pergaulan ia tidak membeda-bedakan status sosial, suku, ataupun etnis. Di antara rekan dekat Andi Pangerang yang berasal dari etnis Tionghoa adalah Haji Faisal Thung dan Liem Seng Heng. Mereka sangat menghormatinya dan memanggil Andi Pangerang lengkap dengan gelar kebangsawanannya. Menurut kesaksian Mustamim Daeng Matutu, apabila ada orang yang mengundang, ia pasti datang jika ada kesempatan, entah itu rakyat biasa, pejabat, bupati, orang Ambon, Tionghoa, ataupun Toraja.[493] Dalam menerima tamu, Andi Pangerang tidak menyukai protokoler yang terlalu rumit. Semuanya dilakukan dengan suasana santai, tetapi tidak meninggalkan adat istiadat ketimuran.

f. Sistem Pemerintahan

Kerajaan Bone diperintah oleh seorang raja yang bergelar *Mangkau'e ri Tana Bone* (Yang Berdaulat di Tana Bone). Dalam menjalankan pemerintahannya, raja didampingi oleh pembesar-pembesar, seperti To-makkadannge Tana, Tomarilaleng, Tomarilaleng Lolo, dan Ponggawa. To-makkadannge Tana dapat disetarakan dengan perdana menteri atau mangkubumi. Tugas Perdana Menteri Kerajaan Bone sangat beragam, mulai dari menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, membagi kekuasaan pejabat-pejabat di bawahnya, hingga menjadi wakil raja. Tomarilaleng adalah pemimpin dewan adat kerajaan yang disebut *Ade' Pitu*.

Sebagaimana yang telah disinggung di atas, sebelum terbentuknya kerajaan, terdapat tujuh *wanua* atau negeri dengan masing-masing dipimpin oleh seorang *arung*. Ketujuh pemimpin *wanua* ini akhirnya menjelma menjadi Dewan Adat Bone, yakni *Ade' Pitu* atau *Arung Pitu*. Tugas anggota *Ade' Pitu* dapat dirinci sebagai berikut.[494]

- Arung Macege menangani urusan pemerintahan/ administrasi umum kerajaan.
- Arung Ponceng menangani masalah keamanan atau pertahanan kerajaan.
- Arung Tibojong menangani urusan kehakiman.

492. Lihat *Andi Pangerang Petta Rani: Profil Pemimpin yang Manunggal dengan Rakyat*, halaman 121.
493. Lihat *Andi Pangerang Petta Rani: Profil Pemimpin yang Manunggal dengan Rakyat*, halaman 37.
494. Lihat artikel *Manusia dan Kebudayaan Bugis–Makassar dan Kaili di Sulawesi*, karya Prof. Dr. H. A. Mattulada, yang dimuat dalam jurnal *Antropologi Indonesia* no. 48/ tahun XV/ Januari–April 1991, halaman 38.

- Arung Tanete ri Attang menangani urusan pembangunan atau pekerjaan umum.
- Arung Tanete ri Awang mengurusi masalah perekonomian dan keuangan.
- Arung Ta' mengurusi masalah pendidikan dan pengajaran.
- Arung Ujung menangani masalah keagamaan dan penerangan.

Dewan Adat Bone berhak pula mengangkat dan memberhentikan raja. Selanjutnya, pejabat *tomarilaleng lolo* bertanggung jawab mengawasi daerah-daerah taklukan Bone yang dipimpin oleh para *arung palili*. Seorang penggawa bertugas sebagai panglima perang kerajaan dan membawa tiga orang panglima lagi yang digelari *dulung*, yakni Dulung Awang Tangka', Dulung Ajang Ale', dan Dulung Lamuru.

Wilayah Bone dibagi ke adalam beberapa negeri bawahan (*wanua*). Pemimpinnya disebut *arung palili*. *Wanua-wanua* tersebut terbagi menjadi satuan-satuan setingkat desa, yang pada umumnya disebut *kampong*. Pemimpin kampong disebut kepala kampong dan gelar mereka adalah *jennang*, *macoa*, *kepala*, *to' do'*, dan lain sebagainya.

g. Sosial Kemasyarakatan dan Ekonomi

Masyarakat Bone yang bersuku Bugis dibagi menjadi tiga golongan besar, yakni bangsawan, orang merdeka, dan budak. Terdapat perbedaan yang tajam bagi golongan-golongan masyarakat ini, umpamanya dalam hal tempat kediaman, pakaian, hukum waris, hak-hak, dan lain sebagainya. Pembagian masyarakat yang tajam seperti ini terbukti kurang baik bagi perkembangan Bone karena menjadikan kondisi sosial kemasyarakatan menjadi statis. Kenyataan ini terutama berlaku bagi kalangan budak (*ata*), yang merasakan kurang gairah untuk mengembangkan kemampuannya. Sementara itu, kalangan bangsawan yang telah terbiasa hidup dalam kemewahan, tidak lagi memikirkan sesuatu yang berguna bagi masyarakatnya. Hal-hal seperti ini tentu saja lambat laun melemahkan kondisi Kerajaan Bone. Selain golongan-golongan masyarakat di atas, terdapat pula anggota masyarakat yang dianugerahi penghargaan tinggi karena kelebihannya, hal ini berlaku pula di kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan lainnya.[495] Sebagai contoh adalah golongan *to-panrita*, yang dihormati karena keahliannya dalam bidang agama, *to-sugi* yang dihargai kedudukannya karena kekayaannya, *to warani* yang dihargai karena keberaniannya dalam membela raja, negara, ataupun kebenaran, serta *to sulesana* dengan keahliannya dalam bidang tertentu.

495. Lihat *Dinamika Bugis Makassar*, halaman 100.

Jumlah penduduk Kerajaan Bone diperkirakan mencapai 60.000 jiwa pada pertengahan abad 19. Makanan pokok mereka adalah beras dan jagung sehingga bercocok tanam merupakan mata pencaharian utama penduduk Bone. Kawasan persawahan yang subur banyak dijumpai di sepanjang pantai Bone sehingga sanggup menopang kebutuhan pangan rakyat. Guna memenuhi kebutuhannya akan lauk pauk, rakyat menangkap ikan di Sungai Walanae, Cenrana, dan lain sebagainya. Hasil tangkapan yang tidak habis dimakan akan diasinkan dan dijual ke daerah-daerah pegunungan. Selain itu, Bone masih mempunyai hasil-hasil pertanian dan perkebunan penting lainnya, seperti kacang tanah, kacang putih, kacang hijau, ubi kayu, keladi, ubi jalar, kelapa, pisang, dan lain sebagainya.

Bone merupakan kerajaan yang maju dalam hal perniagaan. Perahu-perahu dagang Bone yang sanggup mengangkut muatan hingga seberat 50–80 ton membawa berbagai barang dagangan ke pelabuhan-pelabuhan di dalam maupun luar negeri. Sebaliknya, perahu-perahu yang membawa barang dagangan dari luar Bone singgah di pelabuhan-pelabuhan Bajoe, Sinjai, Balangnipa, Kajuara, Marek, Pattiro Salampe, Pallete, Pallimek, dan lain sebagainya. Oleh para pedagang, barang-barang impor itu diangkut dengan kuda beban bersama ikan kering, garam, dan lain sebagainya ke daerah pedalaman. Selain melalui jalan darat, barang-barang juga diangkut lewat air sehingga Sungai Cenrana dan Walanae merupakan jalur perekonomian yang penting pula.

Agama Islam memiliki peranan yang kuat di Bone. Kebanyakan orang Bone menganut Islam Sunni dan mengikuti mazhab Syafi'i.[496] Karenanya, tidak mengherankan apabila pendidikan dasar di Bone mengandung nuansa-nuansa keagamaan. Pendidikan semacam itu di Bone diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, yang meliputi membaca dan menulis, agama, pencak silat, ilmu-ilmu kebatinan, dan lain sebagainya. Pendidikan mengaji Alquran boleh diikuti baik oleh anak laki-laki maupun perempuan. Selain memberikan pelajaran secara perorangan, ada pula guru mengaji yang mengajar di hadapan puluhan anak sekaligus. Para siswa biasanya tidak dipungut bayaran, tetapi membantu gurunya dalam mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Setelah mengikuti pendidikan dasar dalam bidang keagamaan, seorang pemuda dapat menimba ilmu lebih dalam lagi kepada seorang tokoh agama yang biasa dipanggil kiai atau syekh. Mereka juga

496. Lihat *Manusia Bugis*, halaman 213.

tidak menuntut bayaran atas pengajarannya tersebut dan hanya mengabdi atas dasar kesetiaan terhadap Tuhan beserta agamanya. Seorang syekh yang tinggi reputasinya akan menarik banyak pengikut. Pemuda-pemuda Bone yang ingin memperdalam agamanya banyak berganti-ganti guru dengan tujuan mengumpulkan sebanyak mungkin pengetahuan.

Tradisi lama masih dipegang teguh selama tidak bertentangan dengan agama Islam. Suku Bugis memegang teguh adat istiadatnya sehingga melahirkan apa yang dinamakan *siri*, yakni membunuh atau membalas dendam terhadap pelanggar hukum adat. Para pelanggar adat ini dianggap telah melakukan aib oleh masyarakat sehingga patut dilenyapkan dari muka bumi. *Siri* juga dilakukan terhadap mereka yang mempermalukan atau menghina martabat dan harga diri orang lain. Kendati telah beberapa ratus tahun menganut agama Islam, sisa-sisa kepercayaan lama tetap bertahan di tengah masyarakat, seperti dalam bentuk takhayul, keyakinan lama, mencari hari-hari baik, dan lain sebagainya. Kepercayaan-kepercayaan pra-Islam seperti ini masih banyak diyakini oleh rakyat Bone hingga sekarang. Rakyat Bone sangat bangga akan warisan budaya dan tradisinya sehingga pengaruh asing sulit masuk atau diterima masyarakat. Itulah sebabnya, budaya asing sangat kecil sekali pengaruhnya di Bone. Masuknya agama Islam ini turut memperkaya *pangaderreng* (adat istiadat) yang dianut oleh masyarakat Bone dan suku Bugis pada umumnya. Dengan demikian, terdapat berbagai norma di kalangan masyarakat Bugis, seperti *bicara* (norma hukum), *rapang* (norma keteladanan dalam hidup bermasyarakat), *wari'* (norma yang mengatur stratifikasi dalam masyarakat), dan *sara'* (syariat Islam).[497]

497. Lihat *Manusia Bugis*, halaman 212.

Rumah adat raja Bone di Bata Soba, Watampone, Sulawesi Selatan
(digambar ulang dari *Album Arsitektur Tradisional*, halaman 92)

Dengan diterimanya syariat Islam sebagai bagian tak terpisahkan dalam adat istiadat Bugis, timbul pula serangkaian jabatan yang berkaitan dengannya, seperti *parewa sara'* atau perangkat pemerintahan yang menangani tugas-tugas keagamaan secara resmi. Pejabat tertingginya adalah seorang *kali* (*kadhi* dalam bahasa Arab). Tugasnya adalah memberi masukan dan nasihat kepada penguasa serta memimpin pelaksanaan *sara'* (syariat) di lingkungan suatu kerajaan, terutama yang berkenaan dengan perkawinan, perceraian, serta warisan. Selain itu masih ada pejabat lainnya yang disebut *âmélé* (*'amil'*) dengan tugasnya mengumpulkan zakat fitrah serta mewakili penguasa dalam memelihara masjid kerajaan.

h. Kesusastraan

Kerajaan Bone menghasilkan pula banyak kesusastraan yang disebut *lontarak*. Sebutan ini berasal dari media penulisannya yang berupa daun lontar. Isinya bermacam-macam dan sungguh luas cakupannya, seperti masalah adat istiadat, sejarah, politik, ketatanegaraan, pemerintahan, hukum adat, pendidikan, pertanian, jenis-jenis penyakit, obat-obatan, perbintangan, petuah, dan lain sebagainya. Huruf yang dipergunakannya disebut aksara *lontarak* dan berasal dari huruf Pallawa dari India. Belakangan dipergunakan pula aksara Arab untuk menulisnya. Kita akan sedikit mengulas dua di antara *lontarak-lontarak* tersebut.

Lontarak TellumpoccoE meriwayatkan mengenai sejarah raja-raja Bone awal hingga Arung Palakka. Karya sastra yang terdiri dari 435 bait itu tidak menyebutkan siapa pengarangnya dan ditulis dalam bahasa Bugis. Perinciannya adalah sebagai berikut:

- Bait 1–36 berisikan pembukaan serta perihal Raja Bone pertama.
- Bait 37–68 berisikan perihal Raja Bone kedua.
- Bait 69–103 berisikan perihal Raja Bone ketiga.
- Bait 104–113 berisikan perihal Raja Bone keempat.
- Bait 114–134 berisikan perihal Raja Bone kelima.
- Bait 135–151 berisikan perihal Raja Bone keenam.
- Bait 152–188 berisikan perihal Raja Bone ketujuh.
- Bait 189–206 berisikan perihal Raja Bone kedelapan.
- Bait 207–210 berisikan perihal Raja Bone kesembilan.
- Bait 211–241 berisikan perihal Raja Bone kesepuluh dan kesebelas.
- Bait 242–244 berisikan perihal Raja Bone keduabelas.
- Bait 245–258 berisikan perihal Raja Bone ketiga belas dan para wakil Gowa (*jannang*).
- Bait 259–310 mengulas mengenai Perjanjian TellumpoccoE.
- Bait 311–353 meriwayatkan pemberontakan dan tewasnya Tobala.
- Bait 353–435 meriwayatkan mengenai Arung Palakka.

Isi *lontarak* ini secara garis besar telah diulas di atas, yakni di bagian pembahasan mengenai sejarah raja-raja Bone.

Ada lagi *lontarak* lainnya yang berisikan nasihat-nasihat kebijaksanaan Kajao Laliddong, diplomat andal Kerajaan Bone. Menurut naskah tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang raja agar dapat memimpin negaranya dengan baik, seperti

> *matellunna, rielorenggi Arungge, mappakaraja ri anregurunna, nasappai pangissennngenge, enrennge gau mattuienngi tanana, silao tao tabbekna.*
>
> ketiga, seorang raja hendaknya menghormat gurunya, mengejar ilmu pengetahuan, serta tindakan yang dapat melindungi negeri beserta rakyatnya.[498]
>
> *mapitunna, rielorenngi Arunnge, sappa tau engkau akkalenna, namacca makkeda-ada*

498. *Wasiat-wasiat dalam Lontarak Bugis*, halaman 28.

ketujuh, raja hendaknya mencari orang-orang yang pandai (cendekia) serta terampil berbicara.[499]

maseppulona, rielorenngi Arunnge ajak napatek i taumatunae, ajak to napanok i tau malebbik e.

kesepuluh, hendaklah raja jangan mengangkat atau menaikkan orang yang hina dan jangan pula menjatuhkan orang yang (berjiwa) mulia.[500]

Lontarak Bugis ada yang mengajarkan mengenai tata cara berumah tangga yang baik dan lain sebagainya. Berikut ini adalah gambar aksara Bugis yang dipergunakan untuk menulis *lontarak*.

ka	ga	nga	ngka
pa	ba	ma	mba
ta	da	na	nra
ca	ja	nya	nca
ya	ra	la	wa
sa	a	ha	

Anak Surat (Pemberi Bunyi)

o	a	e	i	u

Aksara *lontarak* Bugis
(Diadaptasi dari *Wasiat-wasiat Dalam Lontarak Bugis*, halaman 96)

Lontarak lain yang berjudul *Lontarak Latoa* mengajarkan mengenai tatanan pemerintahan yang baik. Ajaran yang menurut *lontarak* tersebut berasal dari raja Bone bergelar Matinroe ri Tanana itu antara lain menyebutkan "Adapun raja yang jujur, subur tumbuh padi di negerinya, berkembang baik rakyatnya, tak terkena

499. *Ibid*. halaman 28.
500. *Ibid*. halaman 29.

bencana negaranya....."[501] Sebaliknya, raja yang tidak memerintah dengan benar hanya mendatangkan bencana saja bagi negerinya. *Lontarak Latoa* menyebutkan pula syarat orang-orang yang layak dijadikan penguasa (*parewa ri tanae*),[502] yakni memiliki inisiatif, jujur, berani, dan kaya. Adapun orang-orang yang memiliki inisiatif tanda-tandanya adalah takut kepada dewata, takut mengatakan sesuatu yang buruk atau tidak baik, takut berbuat aniaya, dan takut bertindak tidak jujur. Tanda-tanda kejujuran juga empat jumlahnya, yaitu bertindak dengan cermat, melakukan perbuatan yang benar, menjalankan tindakan yang baik, dan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, empat tanda keberanian adalah tak takut dikedepankan, tak takut dikebelakangkan, tak takut mendengar berita, dan tak takut menjumpai lawan. Sementara itu, yang disebut kaya di sini bukanlah kaya dalam artian berkelimpahan harta, melainkan tidak pernah habis inisiatifnya, tak berkekurangan dalam menjawab sesuatu serta tepat atau jitu dalam memberikan jawaban, mahir dalam melakukan berbagai pekerjaan, dan tak berkekurangan dalam segenap karya.

IX. BUNTUBATU

Wilayah Kerajaan Buntubatu kini terletak di Kecamatan Buntubatu, Kabupaten Enrekang. Kerajaan Buntubatu merupakan salah satu anggota federasi Kerajaan Duri serta kerajaan-kerajaan Massenrempulu. Belakangan, Kerajaan Duri dibagi menjadi tiga, salah satunya adalah Kerajaan Buntubatu. Raja pertama Buntubatu adalah Kapataha, putra Kamariang. Masa pemerintahannya berlangsung sekitar 1687–1701. Raja-raja lain yang pernah berkuasa di Buntubatu adalah Puang Batahan (1815–1840), Puang Kalimbuang atau Anggoro (1840–1870), Puang Madata (1870–1895).[503] Menurut manuskrip Hans Hägerdal, disebutkan bahwa raja-raja Buntubatu adalah Buttu (± 1920), Bangon (1924–1940-an) dan Jalante (1940-an).[504]

Menurut sumber lainnya, Raja Buntubatu pertama adalah Adi Mariang (±1640–1665), putra ketiga Pasalin, Raja Duri ketiga. Ia lantas digantikan oleh Kapatahana (±1665–1689) yang merupakan putra Kamariang. Salah satu peristiwa penting terjadi pada masa pemerintahannya adalah masuknya agama Islam, yang menurut Lontarak

501. *Dinamika Bugis Makassar*, halaman 53.
502. Lihat *Dinamika Bugis Makassar*, halaman 57.
503. *Lihat Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 166.
504. Lihat *Kerajaan2 Indonesia*, halaman 60.

Makassar, berlangsung pada 17 Juni atau 2 Syaban hari Selasa tahun 1678.[505] Setelah masa pemerintahan Kapatahana, selama kurang lebih 126 tahun berlangsung masa kekosongan sejarah Buntubatu. Baru pada sekitar 1815, muncul seorang raja lagi bernama Puang Batahan (±1815–1840). Ketika itu, pemerintah kolonial Belanda sedang memantapkan kekuasaannya di Sulawesi Selatan. Pada 1824, Duri mengirim utusan menghadiri penandatanganan Perjanjian Bungaya Yang Diperbaharui dan meminta agar Federasi Massenrempulu dimasukkan pula ke dalam perjanjian tersebut. Namun, hal ini tidak terlaksana karena tidak dihadiri oleh rajanya sendiri.[506]

Semasa pemerintahan raja berikutnya, yaitu Puang Kalimbuang atau Puang Anggoro (1840–1870), pada 1866 timbul peperangan dengan Sidenreng yang ketika itu diperintah oleh La Panguriseng. Raja Sidenreng ke-10 tersebut meminta kepada pemerintah kolonial agar memasukkan kerajaan-kerajaan di Duri ke dalam payung kekuasaannya. Usul itu diajukan melalui surat resmi no.621, tahun 1866, tetapi ditolak secara resmi berdasarkan surat no.108, tahun 1867.[507] Raja berikutnya adalah Puang Madata (1870–1895). Ia digantikan oleh La Buttu (1895–1911).

Bersamaan dengan masa pemerintahan La Buttu, berlangsung penaklukan pemerintah kolonial terhadap kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, termasuk Massenrempulu, yang dikenal sebagai pasifikasi. Tindakan pemerintah kolonial itu dihadapi dengan perlawanan oleh Kerajaan Buntubatu pada 1907. Raja La Buttu memerintahkan Ambe Kada memimpin perlawanan terhadap pasukan kolonial yang berlangsung dari 7 Desember 1907 sampai dengan 3 Januari 1908. Pertempuran pecah di Kande Api dan Buntu Lambak. Kendati demikian, pasukan Buntubatu mengalami kekalahan sehingga La Buttu diharuskan menandatangani *Korte Verklaring* pada 11 Januari 1908, yang kemudian disahkan pada 9 Juni 1909.[508]

Pada masa pemerintahan Puang Bangun (1911–1925), raja yang menggantikan La Buttu, pemerintah kolonial melakukan penataan administrasi pemerintahan Kerajaan Buntubatu. Wilayah kerajaan dibagi menjadi berbagai distrik yang dikepalai oleh seorang kepala distrik. Raja La Buttu digantikan oleh Puang Jalante (1925–1942), yang membawahi *aru* (distrik) Aru Pelappok, Aru Tampang, Aru Napo,

505. Lihat *Sejarah Massenrempulu 1*, halaman 108.
506. Lihat *Sejarah Massenrempulu 1*, halaman 110.
507. Lihat *Sejarah Massenrempulu 1*, halaman 111.
508. Lihat *Sejarah Massenrempulu 1*, halaman 112.

dan Aru Buntubatu.[509] Penggantinya adalah Puang Samaila (1942–1946). Semasa pemerintahan Puang Samaila, berlangsunglah pendudukan Jepang.

X. DURI

Kerajaan Duri ini kelak terbagi menjadi tiga, yakni Alla, Buntubatu, dan Malua. Konon, Puang Matua menciptakan dewa-dewa dan raja yang berkuasa di langit berjumlah delapan.[510] Selain itu, diciptakan pula tumbuh-tumbuhan, hewan, air, dan lain sebagainya, yang akan diturunkan ke bumi. Kemudian Puang Matua menciptakan Datu Laukkuk. Puang Matua lantas menetapkan berbagai perintah beserta larangan yang harus dipatuhi Datu Laukkuk. Selanjutnya, salah seorang keturunan Datu Laukkuk bernama Pong Mula Tau beserta Simbolon Maniq, istrinya, diturunkan ke kawasan Rura melalui *Eran di Langik* (Jembatan Langit) dengan tujuan menertibkan kawasan tersebut.

Kawasan Rura ketika itu telah dihuni oleh dewa-dewa jahat yang dihukum oleh Puang Matua. Dengan dibantu oleh burung rajawali bernama Langan Mega, dewa-dewa jahat itu bersatu padu memerangi Pong Mula Tau. Berkat bantuan seorang dewa utusan Puang Matua bernama Batara Lamma, para dewa jahat berhasil dikalahkan dan mereka ditangkap serta dibawa kembali ke langit guna diadili. Para dewa jahat tadi memohon pengampunan dan berjanji tak akan berbuat jahat lagi, sebaliknya mereka akan menjaga tumbuh-tumbuhan, hewan, air, dan lain sebagainya yang diturunkan oleh Puang Matua. Namun, sebagai imbalannya, mereka meminta agar pada saat-saat tertentu manusia menghantarkan sesaji kepada mereka. Puang Matua lantas mengabulkan permohonan itu.

Salah seorang keturunan Pong Mula Tau bernama Londong di Rura dengan gelar Sappang Di Galete menjadi raja di Rura. Ia ingin mengadakan perkawinan antar saudara, seperti yang dilakukan nenek moyangnya dahulu. Perkawinan ini diizinkan karena waktu itu belum ada manusia lainnya, tetapi terlarang setelah lewat delapan generasi sehingga tidak diperkenankan lagi pada masa Londong di Rura. Saudara Londong di Rura bernama Londong di Langik juga tak menyetujuinya karena dianggap melanggar adat. Meskipun demikian, ia lantas mengutus Pong Mariatinting dan Pong Sattia Bonga guna memohon izin Puang Matua di langit dengan melalui

509. Lihat *Sejarah Massenrempulu 1*, halaman 114.
510. Lihat *Sejarah Massenrempulu 1*, halaman 21.

Eran di Langik, tetapi kedua orang utusan itu tidak menunaikan tugasnya dan kembali sebelum tiba di langit. Mereka berbohong bahwa Puang Matua mengizinkannya.

Londong di Langik tidak mempercayai perkataan kedua utusan tersebut dan tetap tidak menyetujui kehendak saudaranya. Itulah sebabnya ia lantas berdiam di *Eran di Langik*. Sewaktu perkawinan antar saudara anak-anak Londong di Rura sedang dilangsungkan, sebagian rakyat tak ikut menghadirinya karena takut terhadap kemurkaan Puang Matua. Benar saja, akibat pelanggaran tersebut, Londong di Rura lantas dimusnahkan dan *Eran di Langik* pun dihancurkan.

Sementara itu, Londong di Langik tetap hidup. Menurut catatan Prof. Zainal Abidin, ia lantas menurunkan raja-raja Duri, Enrekang, Maiwa, Batulappa, Kassa, Letta, dan Buntubatu. Masih menurut Prof. Zainal Abidin, Londong di Langik ini disamakan dengan To Manurung Bamba Puang.[511] Menurut sumber lainnya, yakni C. Salombe dan H.A.M. Mappasanda, Raja Duri pertama adalah Puang Tomalangke, cucu Puang Tamboro Langik. Puang Tomalangke sendiri adalah anak To Manurung Bamba Puang. Adapun anak To Manurung Bamba Puang masing-masing-masing adalah

1. Puang Tomalangke (More Buntu atau Nene Matindo Dama To manurung di Duri). Ia menikah dengan Karrang Ulu, raja pertama Baroko. Karrang Ulu kelak digantikan saudaranya bernama To Kairi, selaku raja kedua Baroko.
2. Danrakati.
3. Seorang lagi tak diketahui namanya.

Pernikahan antara Puang Tomalangke dengan Karrang Ulu menurunkan

1. To Massesong, yang kelak menjadi raja Baroko ketiga menggantikan To Kairi. Ia berputra Parukka, yakni raja Baroko keempat.
2. Camaniqna, menikah dengan cucu Tomalangke bernama Pasalin.

Pasalin merupakan anak Lambeh, putra Nene Matindo Dama, dengan Lindo Bulan Lai Rani, asal Tana Toraja.

Sementara itu, Danrakati, anak To manurung Bamba Puang lainnya, menikah dengan Tenriangka (La Tanro) dan menurunkan Takkebuku, Raja Enrekang pertama. Sumber silsilah Kerajaan Enrekang menyebutkan bahwa To manurung Palipada menikah dengan Embong Bulan dari Toraja. Mereka dikaruniai tiga orang anak, yakni

511. Lihat *Sejarah Massenrempulu 1*, halaman 24.

1. Puang Taulan (Puang Leoran)
2. Puang Ranga
3. Puang Cemba

Puang Taulan menurunkan La Tenriangka (La Tanro). Ia lantas menikah dengan Danrakati.

Sumber Lontarak Duri menyebutkan mengenai *to manurung* bernama Nene Matindo Dama. Konon dia turun ke bumi saat terjadinya hujan batu yang tiba-tiba saja terjadi. Nene Matindo Dama menikah dengan Cirinna Sambo Langi.[512] Pernikahan itu membuahkan seorang putra bernama Lambeh, yang semenjak kecil tidak pernah menangis serta memiliki akhlak berbudi, dan adiknya bernama Canning Wani. Nene Matindo Dama lantas diminta masyarakat menjadi rajanya.

Nene Matindo Dama digantikan oleh Lambeh (±1555–1595), putranya. Nene Matindo Dama sendiri pernah berpesan kepada Lambeh agar ia jangan bertindak sekehendaknya sendiri. Raja Duri ketiga adalah Pasalin (1595–1640), putra Lambeh dengan Lindo Bulan Lai Rani asal Toraja. Pasalin menikah dengan Camaniqna, putri To Massesong, Raja Baroko kedua. Pernikahan mereka membuahkan empat orang anak, yang masing-masing bernama Kamariang (Kaka Mariang), Mariang, Adi Mariang, dan Riang.[513] Semasa pemerintahannya, Kerajaan Duri mulai mengalami penataan dan peran pemangku adat mulai ditetapkan sebagai tempat berlindung bagi yang lemah. Susunan pemerintahan mulai ditetapkan secara berjenjang. Rakyat tidak boleh langsung menyampaikan permasalahannya kepada raja, melainkan harus melalui *ambe kampong* terlebih dahulu. Jika masih gagal menemukan penyelesaian, perkarannya harus dibawa pada *tangke*. Apabila tetap menemui jalan buntu barulah dibawa kepada raja. Hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain juga telah terjalin baik.

Karena ketiga orang anaknya sama-sama mampu, Pasalin lantas membagi Kerajaan Duri sebagai berikut.

1. Kamariang memperoleh kawasan pusat kerajaan, yakni Buntu Duri. Inilah yang kelak dikenal sebagai Kerajaan Malua.
2. Mariang memperoleh kawasan utara Kerajaan Duri, dan kemudian dikenal sebagai Kerajaan Alla.

512. Lihat *Sejarah Massenrempulu 1,* halaman 92.
513. Lihat *Sejarah Massenrempulu 1,* halaman 99.

3. Adi Mariang memperoleh kawasan selatan Kerajaan Duri, dan kemudian dikenal sebagai Kerajaan Buntubatu.

Ketiga kerajaan ini sederajat satu sama lain dan semenjak saat itu dikenal istilah Federasi Duri atau *Tallu Batupapan*.

XI. ENREKANG

Para penguasa Kerajaan Engrekang yang kini terletak di Kabupaten Enrekang bergelar *arung*. Kerajaan Enrekang merupakan salah satu anggota Federasi Massenrempulu (beranggotakan Maiwa, Enrekang, Duri, Kassa, dan Batulappa). Raja Enrekang pertama bernama Takkebuku. Ia digantikan oleh putrinya, Kota (1540–1565), selaku Raja Enrekang kedua. Sejarah mencatat bahwa pada masa pemerintahannya, terjadi serangan yang dilancarkan oleh Bone. Raja Enrekang ketiga adalah juga seorang wanita bernama Bissu Tonang (1565–1590). Ia menikah dengan La Patau Addatuang Sawitto Timoreng Saddang dan memiliki anak bernama La Mappatunru. Pada zaman Bissu Tonang, Enrekang diperluas wilayahnya dan adiknya yang bernama Tomaraju diangkat sebagai *Arung* (Raja) Buttu pertama. Tomaraju mempunyai tiga orang anak bernama Tokalu (kelak diangkat sebagai Arung Buttu kedua), Todireng (kelak menjadi Arung Makale), dan Tolayuk (kelak menjadi Arung Baroko). Peristiwa penting lain yang terjadi semasa pemerintahan Bissu Tonang adalah pembentukan Federasi Massenrempulu yang terdiri dari Enrekang, Buttu Batu (Buntubatu), Letta, Duri, Kassa, dan Batu Lappa. Oleh karena Kerajaan Duri sendiri merupakan federasi tiga kerajaan, secara keseluruhan terdapat tujuh anggota federasi tersebut maka namanya juga dikenal sebagai Pitu Massenrempulu (Tujuh Massenrempulu).

La Mappatunru (1590–1615), putra Bissu Tonang, menjadi Raja Enrekang ke-4. Semasa pemerintahannya, Enrekang mengalami kemajuan di berbagai bidang, termasuk hubungan persahabatan dengan kerajaan lainnya, pertanian, dan lain sebagainya. Areal persawahan makin meluas pada zamannya. La Mappatunru kemudian digantikan oleh putranya, Baso Panca, selaku Raja Enrekang ke-5.

Massaguni (1645–1680) memerintah selaku Raja Enrekang ke-6. Semasa pemerintahannya, Arung Buttu La Tanrang membantu La Raga Arung Belawa Wajo melawan *Addatuang* (Raja) Sidenreng bernama Toappo pada 1696. Pada 27 April 1671, Kerajaan Enrekang diterima masuk ke dalam Perserikatan Celebes. Enrekang

terlibat peperangan dengan Letta. Raja Enrekang meminta bantuan Arung Palakka sebagai penengah. Arung Palakka lebih memihak Enrekang dalam perselisihannya dengan Letta.[514]

Massaguni digantikan oleh Muhammad Yusuf Puang Daeng (1680–1709) yang merupakan Raja Enrekang ke-7. Ia menjadi Raja Enrekang setelah ayahnya meletakkan jabatannya. Semasa pemerintahannya tidak banyak kebijakan diambil karena raja mengalami kondisi kesehatan yang tidak stabil berupa gangguan ingatan. Oleh karenanya, hubungan ke luar lebih banyak ditangani oleh Arung Buttu, yang pernah pergi ke Tana Toraja guna menyelesaikan perang saudara di sana.

Andi Toalala (1709–1825) adalah Raja Enrekang ke-8[515] yang naik takhta tak lama setelah Muhammad Yusuf jatuh sakit. Silsilah raja-raja Enrekang tidak mencatat asal usul leluhur Andi Toalala sehingga tak dapat dipastikan apakah ia keturunan bangsawan atau bukan. Menurut salah satu sumber, ibunya adalah orang Enrekang, sedangkan ayahnya yang bernama Baso Kalempang berasal dari Wajo-Sidenreng. Andi Toalala memiliki putra bernama Puang Baso yang kelak menjadi Arung Enrekang berikutnya, dan Andi Baso Mallangngang yang kemudian diangkat sebagai Arung Tungka.

Puang Baso (1825–1860) menjadi Raja Enrekeng ke-9 menggantikan Andi Toalala. Semasa pemerintahannya, Enrekang merupakan kerajaan yang merdeka, namun tetap diwajibkan mengakui kedaulatan pemerintah Hindia Belanda. Puang Baso memiliki seorang putri bernama Andi Tonang yang kelak menggantikan kedudukannya.

Penguasa Enrekang ke-10 adalah seorang wanita bernama Andi Tonang (1860–1890).[516] ia menikah dengan Toaccalo Arung Maiwa, putra Addatuang Sidenreng. Ia memiliki seorang putri bernama Pancaitana BungawaliE (1890–1918), yang kemudian dinobatkan sebagai Ratu Enrekang ke-11. Ratu Andi Tonang pernah berniat membantu Raja La Panguriseng dari Sidenreng dalam melawan Belanda dan Soppeng.

Setelah Andi Tonang mangkat, Pancaitana BungawaliE menggantikan ibunya sebagai Ratu Enrekang. Ia menikah dengan Andi Pattiroi Arung Soreang Sidenreng dan tidak dikaruniai keturunan. Konon berdasarkan cerita rakyat, Ratu Sidenreng ini melahirkan seekor buaya yang dilepas di Sungai Mata Allo. Menurut catatan

514. Lihat *Warisan Arung Palakka*, halaman 288.
515. Lihat *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 9.
516. Lihat *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 9.

Barbara Sillars Harvey, Ratu Enrekang ini digambarkan sebagai “Muda, sangat cantik, dan berani.”[517] Masa pemerintahannya bersamaan dengan bangkitnya ambisi militer Belanda menguasai kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pada 1905. Dengan demikian, Enrekang sedikit banyak terlibat pula dalam perjuangan menentang kolonialisme tersebut. Raja-raja Enrekang terakhir adalah Patta Ahmad (1918–1935) dan Muhammad Tahir (1935–1950).

XII. GOWA & TALLO (MAKASSAR)

Kerajaan Gowa dan Tallo mempunyai keterkaitan erat sehingga dijadikan satu pembahasan. Biasanya raja-raja Tallo juga merangkap menjadi perdana menteri (*pabbicara buta*) bagi para penguasa Gowa.

a. GOWA

i. Cikal Bakal dan Pendirian Kerajaan Gowa

Menurut legenda dan sejarah Gowa yang tercatat dalam kitab *Patturioloang*, Raja Gowa yang pertama adalah seorang wanita bernama To Manurung yang secara harfiah berarti 'Yang Turun dari Langit atau Kayangan.' Konon, ia turun ke bumi untuk pertama kalinya di Tamalate. Oleh sebab itu, ia juga disebut atau 'Yang Turun di Tamalate.' Kendati raja pertama Gowa merupakan seorang wanita, untuk selanjutnya tidak ada lagi penguasa wanita di negeri tersebut. Tampaknya tradisi Gowa tidak memberikan kesempatan bagi kaum wanita untuk menduduki singgasana kerajaan. Ada lagi mitos yang mengatakan bahwa sebelum kedatangan To Manurung di Gowa sudah ada kerajaan yang terbentuk dari perkumpulan sembilan negeri dan disebut *Bate Salapan*g atau *Bate Salapanga* (Dewan Adat atau Kementerian Kerajaan Gowa) yang beranggotakan Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agang Jekne, Saumata, Bissei, Kalling dan Serro. Awalnya mereka dapat hidup berdampingan dengan damai. Namun, karena masing-masing kerajaan ingin menonjolkan diri dan memperluas wilayahnya, timbul perselisihan di antara mereka. Demi mengatasi perseteruan tersebut, diangkatlah seorang pemimpin tertinggi yang diberi gelar *paccalaya*. Solusi itu juga tidak dapat mengakhiri permusuhan karena masing-masing negeri ingin menjadi pemimpin Bate Salapang. Selain itu, mereka juga sering menghadapi ancaman serangan kerajaan lain. Mereka memohon seorang raja kepada dewata guna memimpin serta

517. *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 325.

membebaskan mereka semua dari kondisi kacau itu. Kemudian mereka mendengar bahwa ada seorang putri dari langit yang memancarkan cahaya dan mengenakan kalung sangat indah telah turun di Tamalate.

Paccalaya beserta pemuka Bate Salapang lainnya pergi ke sana guna menemui putri itu dan memohon agar ia bersedia menjadi raja mereka. Setelah permohonan itu disetujui, Paccalaya berseru pada yang lainnya, "*Sombai Karaeng nu tu Gowa*!" atau "Sembahlah rajamu, wahai orang Gowa!" Sejak itu, Gowa menjelma menjadi sebuah kerajaan yang berkuasa atas sembilan negeri bekas federasi Bate Salapang secara penuh. Kewenangan sembilan raja anggota Bate Salapang juga berubah dan mereka kini disebut sebagai *Kasuwiyang Salapang* atau 'Sembilan Pengabdi' yang berfungsi sebagai dewan adat bagi Kerajaan Gowa. Sebagai wujud berdirinya Kerajaan Gowa, dibangunlah sebuah istana besar dan indah bagi To Manurung di Tamalate, tempat ia turun dari kayangan. Istana yang terdiri dari sembilan petak itu dinamakan Istana Tamalate, yang artinya 'Tidak akan layu', karena kayu yang dipergunakan tidak mengalami perubahan sedikitpun hingga istana tersebut selesai dibangun. Kini istana itu terletak 10 km dari kota Makassar atau Ujung Pandang. Daerah itu juga disebut Tamalate dan hingga sekarang dianggap sebagai daerah Gowa asli.

Setelah mendengar bahwa ada seorang putri dari kayangan yang turun di Gowa, banyak negeri lain berdatang sembah kepadanya. Paccalaya dan anggota Kasuwiyang Salapang menjadi prihatin dan khawatir karena saat itu To Manurung belum bersuami. Mereka khawatir tidak menemukan penggantinya jika ia kelak meninggal. Tak lama kemudian, datang dua orang pemuda, yakni Karaeng Bayo dan saudaranya, Lakipadada. Tidak dijelaskan dari mana mereka datang. Hanya disebutkan bahwa Karaeng Bayo mempunyai sebuah senjata pusaka sejenis pedang yang disebut *tanru ballanga*, sedangkan saudaranya memiliki pusaka yang bernama *sudanga*. Kedua pusaka ini kemudian menjadi pusaka Gowa yang sangat dihormati oleh orang-orang Makassar.

Salah satu versi mengenai asal muasal *sudanga* adalah sebagai berikut. Alkisah, sewaktu berlangsung pelantikan Raja Bantaeng, muncul seorang pemuda yang dadanya memancarkan sinar berkedip-kedip sehingga menimbulkan kekaguman semua orang di tempat itu. Raja kemudian menitahkan untuk mencari pemuda tersebut dan membawanya ke istana. Ternyata ia bernama Lakipadada, putra Sandaboro dan cucu To Manurung Tamborolangi di Tana Toraja[518] yang sedang mengembara dengan

518. Lihat *Menyingkap Tabir Sejarah Budaya di Sulawesi Selatan*, halaman 24.

mengendarai burung garuda. Ia meminta kepada Raja Bantaeng agar diizinkan menetap sementara sambil menunggu kedatangan kembali burung garudanya. Raja Bantaeng menyetujuinya dan memberikan tempat kediaman beserta kebun kepada Lakipadada. Demikianlah, Lakipadada kemudian bercocok tanam jagung. Sewaktu jagung hampir siap dipanen, Lakipadada mendapati bahwa jagungnya banyak yang hilang. Saat malam hari, Lakipadada menyaksikan seekor babi memangsa jagung-jagungnya, ketika ia mengejarnya, babi itu lari memasuki sebuah lubang. Keesokan harinya, Lakipadada menghadap Raja Bantaeng dan memohon dipinjami tombak guna mengenyahkan hewan perusak itu. Raja Bantaeng meminjaminya tombak bermata dua bernama *Poke Pangkaya*. Malam harinya, Lakipadada mengintai kembali ladang jagungnya dan menjumpai babi yang sama sedang memangsa jagung-jagungnya.

Segera dilontarkannya tombak pemberian Raja Bantaeng pada babi itu dan mengenai punggung kanannya. Mata tombak yang menancap di punggung babi terlepas dari gagangnya dan terbawa lari ke dalam lubang. Lakipadada merasa kesal dan dengan bantuan beberapa orang pengikutnya ia memasuki lubang menggunakan sebuah keranjang. Setelah beberapa lama menuruni lubang, rupanya keranjang Lakipadada tersangkut di sebuah pohon. Di bawah pohon dilihatnya beberapa orang gadis sedang menumbuk padi. Mereka menjelaskan bahwa diri mereka merupakan penduduk negeri bawah tanah (Peretiwi). Didapatnya pula keterangan bahwa mereka sedang berduka karena rajanya sakit parah. Sudah banyak dukun dan tabib yang diundang mengobati raja, tetapi tiada hasilnya. Lakipadada menyampaikan bahwa ia sanggup mengobati raja mereka dan ia pun dibawa ke peraduan raja. Ternyata penyakit raja disebabkan mata tombak yang menancap di punggung kanannya. Setelah diamati, mata tombak itu berasal dari tombak pemberian Raja Bantaeng. Lakipadada mencabut mata tombaknya dan dengan kesaktiannya menyembuhkan luka raja negeri bawah tanah. Sebagai tanda terima kasih, raja negeri bawah tanah menyerahkan senjata pusaka yang disebut *Sudanga* itu.[519]

Paccalaya mengutarakan niatnya menikahkan Karaeng Bayo dengan To Manurung. Keinginan itu diterima oleh To Manurung dan dari pernikahan itu lahirlah Tumassalangga Barayang yang menjadi pewaris Kerajaan Gowa. Legenda menyebutkan bahwa ia dikandung ibunya selama tiga tahun dan setelah dilahirkan sudah dapat berjalan, berlari, serta berbicara. Namun, ia memiliki kondisi fisik yang

---

519. Lihat *Menyingkap Tabir Sejarah Budaya Sulawesi Selatan*, halaman 25.

cacat dan tidak seperti seseorang pada umumnya. Bahunya tidak rata; yang satu ke atas, sedangkan yang lainnya ke bawah; daun telinganya yang satu berbonggol, sedangkan yang satunya lagi sangat besar; dan pusarnya sangat besar seperti bakul kecil. Kendati cacat, anak itu memiliki kelebihan seperti yang dikatakan ibunya, To Manurung:

> Mengapa anakku cacat karena bahunya miring, telinganya seperti bukit melambai-lambai atau bukit yang tampak tinggi (*bulu' mangape* [bahasa Makasar]). Rambut yang putus di Jawa didengarnya, kerbau putih mati di Salayar dapat diciumnya, merpati yang ada di Bantaeng dapat dilihatnya. Kakinya seperti kaki timbangan, pusarnya seperti mata air besar dan tangannya pandai menikam (*imana pakassing nobo'*). Siapa yang menyembah kepadanya bertahil-tahil emasnya (maksudnya akan jadi kaya-raya), siapa yang menyembah dia akan dipohonkan keselamatan dan akan menjadi rakyatnya.[520]

Demikianlah, berdasar kutipan di atas, anak istimewa itu meski terlahir cacat, namun ia memiliki penglihatan, penciuman, dan kemampuan yang luar biasa. Selanjutnya, dikisahkan bahwa To Manurung membagikan kedua kalung yang dimilikinya kepada anaknya satu buah, sedangkan satu buah disimpannya sendiri. To Manurung masuk kedalam biliknya dan setelah itu menghilang entah kemana. Karaeng Boyo dan Lakipadada juga tidak dikisahkan lagi dan hanya disebutkan bahwa mereka berdua menyerahkan senjata pusakanya kepada Tumassalangga Barayang.

Tumassalangga Barayang menggantikan ibunya sebagai Raja Gowa kedua, tetapi kehidupannya tidak disinggung oleh legenda Gowa yang terangkum dalam *Patturioloang*. Tak disebutkan pula siapa istri-istrinya. Ia juga menghilang secara gaib seperti ibunya. Rakyat diperintahkannya duduk bersama-sama dan setelah itu ia pergi ke bukit-bukit di sebelah utara Jonggoa.[521] Tak lama kemudian turun hujan lebat disertai halilintar[522] dan Tumasalangga Barayang telah raib dari pandangan mereka.

Raja Gowa ke-3 adalah putra Tumassalangga Barayang bernama I Puang LoE Lembang. Berikutnya, Gowa diperintah oleh Tuniatabanri, putra Raja I Puang LoE Lembang, selaku Raja Gowa ke-4. Ia digantikan oleh Karampang ri Gowa selaku Raja Gowa ke-5. Penggantinya adalah putranya yang bernama Tunatangka' Lopi sebagai Raja Gowa ke-6. Raja Gowa ke-3 hingga ke-5 juga tidak banyak diperoleh keterangan

520. *Sultan Hasanudin Menentang V.O.C*, halaman 45-46.
521. Bukit Jonggoa terletak tidak jauh dari perbatasan Gowa-Maros, yakni di dekat Gunung Pangalengtoppa–lihat *ibid*., halaman 47.
522. Hujan dan halilintar di tengah-tengah cuaca yang panas diyakini sebagai pertanda akan terjadinya peristiwa luar biasa oleh suku Makassar.

mengenai pemerintahan mereka. Tidak jelas berapa lama mereka memerintah dan semuanya tidak meninggal seperti manusia biasa, melainkan menghilang secara gaib seperti To Manurung, leluhurnya.

ii. Perkembangan Kerajaan Gowa Hingga Masa Pemerintahan Sultan Hasanuddin

Semenjak Raja Gowa ke-6, Tunatangka' Lopi, penguasa Gowa tidak lagi menghilang ke alam gaib. Dikisahkan bahwa Tunatangka' Lopi mempunyai dua orang anak yang bernama Batara Gowa dan Karaeng LoE ri Sero. Karena khawatir terjadi perselisihan antar keduanya, raja membagi Kerajaan Gowa menjadi dua. Putranya yang sulung, Batara Gowa, berkuasa atas *gallarang* (daerah-daerah) Paccellekang, Pattalassang, Bontomanai Timur (Bontomana'i-iraya), Bontomanai Barat (Bontomanai-lau'), Tombolo', dan Mangngasa. Sementara itu, adiknya diserahi daerah Saumata, Pannampu', ManconglоE, dan ParangloE. Tunatangka' Lopi meninggal karena mengalami kecelakaan saat berperahu, ia meninggal tertelingkup perahu yang ditumpanginya karena terkena pusaran air yang dashyat. Itulah sebabnya diberi gelar Tunatangka' Lopi (*tunatangka* [seharusnya *tunarangka*] berarti 'orang yang ditelungkupi', *lopi* artinya 'perahu'). Tidak disebutkan di mana kecelakaan ini terjadi. Diduga peristiwa itu terjadi di perairan antara Ujung Lassowa atau Ujung Bira dan Pulau Selayar. Orang Bugis dan Makassar yakin bahwa perairan ini angker, pelaut-pelaut gagah berani pun tidak berani berlaku serampangan saat melewatinya. Konon, lautan di daerah ini dapat secara tiba-tiba bergelora dengan dahsyatnya dan telah menelan banyak korban.

Setelah Tunatangka' Lopi meninggal, peperangan antara dua saudara itu meletus sehingga Karaeng LoE ri Sero terpaksa melarikan diri dari kerajaannya ke Pulau Jawa. Kakaknya lalu merebut bagian adiknya tersebut. Begitu kembali dari Jawa, Karaeng LoE ri Sero tinggal di suatu kawasan yang bernama Passi'nang. Di sana ia merenungkan nasibnya yang malang karena kerajaannya direbut kakaknya. Namun, akhirnya ia dapat mendirikan Kerajaan Tallo berkat bantuan dua orang bernama Karaeng LoE ri Bentang dan Karaeng LoE ri Bira. Riwayat pendirian Kerajaan Tallo ini akan diulas di bagian tersendiri mengenai Tallo.

Batara Gowa menikah dengan putri Raja Garassi' yang tak disebutkan namanya. Keturunannya dengan putri tersebut adalah dua orang putra dan seorang putri yang bernama I Pakere'tau (bergelar Tunijallo'ri Passukki), Baratana (bergelar Karaeng

Garassi), dan Karaenga ri Bone. Setelah istri pertamanya meninggal, Batara Gowa menikah lagi dengan I Resasi, yang melahirkan seorang putra dan putri; Daeng Matanre Tumapa'risi' Kalonna dan Karaenga Makeboka. Ketika Batara Gowa mangkat, ia diberi gelar anumerta Tumananga ri Parallakkena atau 'Orang yang Beristirahat / Dimakamkan di Halamannya.' Takhta kerajaan diwariskan kepada I Pakere'tau selaku Raja Gowa ke-8. Suatu ketika, ia mempermalukan salah seorang hambanya sedemikian rupa sehingga hamba itu menjadi marah dan menikam raja dengan sebilah *passuki* (bambu runcing). Itulah sebabnya raja juga digelari Karaeng Tunijjallo' ri Passuki'.

Karena tidak berputra, raja digantikan oleh saudaranya sebapak yang bernama Tumapa'risi' Kallona (Raja yang Sakit Lehernya). Raja Gowa ke-9 ini menikah dengan putri Raja Tallo ke-2, Karaeng Tunilabu ri Suriwa. Tetapi nama putri itu tidak tercatat dalam sejarah. Ia melahirkan keturunan bernama I Mariogau Daeng Bonto Karaeng Tunipalangga yang sering disebut sebagai Karaeng Tunipalangga saja, I Tjibarani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibatta (sering disebut sebagai Karaeng Tunibatta), I Tapicinna Karaeng ri Bone, dan I Sapi Karaeng ri Sombaopu.

Selama pemerintahan Raja Tumapa'risi' Kallona, Kerajaan Gowa mengalami kemajuan yang pesat. Ia melakukan perombakan terhadap administrasi kerajaan, seperti menetapkan undang-undang serta peraturan perang, dan mengangkat Daeng Pamatte' sebagai syahbandar. Daeng Pamatte' juga menciptakan huruf-huruf Makassar dan menulis sejarah Kerajaan Gowa. Semenjak saat itu, orang Makassar mulai mencatat berbagai peristiwa penting yang dialami. Karya yang terkenal antara lain *Catatan Harian Raja-raja Gowa dan Tallo*. Karaeng Tumnapa'risi' Kalonna juga berhasil memperluas wilayah kerajaannya dengan menaklukkan berbagai negeri, seperti Garassi', Katingang, Parigi, Siang (Kepulauan Pangkajene), Sidenreng, dan Limbangang. Raja juga memaksa Kerajaan Bulukumba dan Salayar membayar *sabbukati* (denda perang) sebesar 888 Real dan 88 Duit. Ia juga mengalahkan Panikang, Mandallo, Cempaga, Marosda, dan Polombangkeng. Raja mengadakan perjanjian dengan Raja Marusu', Karaeng LoE ri Pakare, dan Raja Bone, La Ulio BoteE Petta Matinrowe ri Terrung. Daerah taklukan atau jajahan (*palili*) Kerajaan Gowa adalah Sanrobone, Jipang Galesong, Agang-Nionjo' atau Agganionjong (belakangan berganti nama menjadi Tanete), Kahu, dan Pakombong. Selama pemerintahan Raja Tumapa'risi' Kallona, datang pula orang Portugis (dalam bahasa Makasar disebut *Paranggi*) untuk pertama kalinya. Naskah *Patturioloang* mencatat

bahwa jatuhnya Kerajaan Garassi' ke tangan Gowa terjadi bersamaan dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis (1511).

Tumapa'risi' Kallona menyerang Kerajaan Tallo yang sesungguhnya masih merupakan kerabatnya. Saat itu, Tallo diperintah oleh Karaeng Tunipasu'rung (Tunipasulu). Peperangan berlangsung dengan dahsyatnya. Tallo dibantu oleh sekutunya, orang-orang Marusu' di bawah pimpinan I Mappasomba Daeng Uraga Tumenanga ri Bulu'duaya, dan Polombangeng di bawah pimpinan putra Karaeng LoE ri Bajeng. Dalam peperangan ini, Tallo berhasil dikalahkan, tetapi pada akhirnya perdamaian di antara kedua kerajaan dapat diwujudkan. Sejak saat itu, kedua kerajaan bersatu kembali dan ikatan di antara mereka bahkan makin bertambah erat. Perjanjian perdamaian antara kedua kerajaan dikokohkan dalam bentuk sumpah yang diucapkan oleh penguasa Gowa, Tallo, beserta semua *gallarang* (kepala wilayah) pengikut kedua belah pihak. Sumpah itu diucapkan di *baruga* (balai) kerajaan dan isinya singkat saja namun padat, yakni "*Ia-iannamo tau ampassi-Ewai Gowa-Tallo iamo nacalla rewata.*" Artinya "Barangsiapa yang mengadu domba antara Kerajaan Gowa dan Tallo akan dikutuk oleh dewata." Kerajaan Gowa dan Tallo menjadi satu dan disebut Kerajaan Kembar. Dalam bahasa Makassar kerap pula disebut *Ruwa Karaeng Se're Ata* atau 'Dua Raja Satu Hamba." Hampir setiap Saja Tallo merangkap menjadi *pabbicara butta* (perdana menteri) Kerajaan Gowa.

Semasa pemerintahannya, Tumapa'risi' Kallona mengadakan perjanjian dengan Raja Luwu yang bergelar Tosengereng Raja Dewa Datu Matinrowe ri Bajo dan Raja Salo'mekko bernama Magajaya. Ia pernah pula berperang melawan I Galasi yang berasal dari Kampung Pammolingkang. Selama Tumapa'risi' Kallona memegang kekuasaan, rakyat Gowa boleh dikatakan hidup makmur dan wilayah Gowa makin luas. Ia kerap berperang dan mengadakan perjanjian-perjanjian politik yang menguntungkan Gowa. Raja Tumapa'risi' Kallona wafat karena menderita penyakit leher. Sebagai catatan tambahan, Tumapa'risi' Kallona merupakan pendiri benteng di sekeliling Sombaopu dan memindahkan pusat pemerintahannya ke sana.

Bila dicermati, perkembangan-perkembangan semasa Tumapa'risi Kallona mencerminkan perubahan orientasi Gowa dari agraris ke perniagaan.[523] Sebelumnya, ibu kota Gowa terletak di daerah pedalaman. Pemindahan pusat pemerintahan ke Sombaopu yang terletak dekat muara Sungai Jeneberang meneguhkannya. Di samping itu, jabatan

523. Lihat *Makasar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagagan Maritim*, halaman 23.

syahbandar juga pertama kalinya ditetapkan oleh Tumapa'risi Kallona. Hingga sekarang masih belum jelas apa yang mendorong Tumapa'risi Kallona mengalihkan perhatiannya ke sektor perdagangan. Motif utamanya kemungkinan adalah keuntungan ekonomis. Terlepas dari semua itu, menjelang akhir abad 15, Sulawesi Selatan telah ramai dikunjungi kaum pedagang dari Jawa dan Malaka.

Kerajaan Gowa kini diwarisi oleh putra sulung Tumapa'risi Kallona yang bernama I Mariogau (Manriwagau) Daeng Bonto Kareng Laklung Tunipalangga Ulaweng atau kerap disebut Karaeng Tunipalangga. Menurut *Patturioloang*, ia memerintah selama 18 tahun. Ia melanjutkan usaha ayahnya memperluas wilayah Gowa dengan menaklukkan Bajeng, Lengkese, dan Polombangkeng. Raja Gowa ke-10 ini mengalahkan pula orang-orang Bugis dan Lamuru hingga ke kawasan di dekat Sungai Walannae. Ia kemudian memaksa mereka membayar pampasan perang. Bahkan, pedang pusaka Lamuru yang dinamakan Lapasasri serta pusaka Raja Soppeng bernama Sonri dirampas pula olehnya. Wilayah-wilayah lain yang jatuh ke tangan Gowa adalah Cenrana, Salo'mekko, Kacci, Bulo-Bulo, Kajang, Lamatti, Bengo, Samauta, Camba, Suppa, Sawitto, Bulukumba, Ujung LoE, Pannyikkikang, Gantarang, Wero, Salayar, Bira, Bunga, Mapili, Poda-poda, Campalagiang, Toli-toli, dan Kaili. Masih belum cukup dengan semua itu, Alitta, Duri, dan Enrekang dijadikan *palili* (daerah jajahan) Gowa.

Karaeng Tunipalangga merupakan penguasa Gowa pertama yang memindahkan rakyat negeri yang ditaklukannya beserta harta mereka. Ia memaksakan pula perjanjian yang ringkasnya berbunyi "*Makkanama numammid*", yang berarti "Aku berkata dan kalian mematuhinya." Dengan kata lain, mereka harus tunduk terhadap segenap perintah Raja Gowa. Selain memperluas wilayah kerajaannya, Karaeng Tunipalangga melakukan aneka perbaikan dalam administrasi Kerajaan Gowa. Jabatan *tumailalang* dan syahbandar yang pada zaman ayahnya dijadikan satu, dipisah menjadi dua. Ia mengangkat seorang pejabat yang disebut *tumakkajannangangana* yang bertugas mendidik para pemuda bangsawan menjadi prajurit-prajurit Kerajaan Gowa nan tangguh. Ia merekrut para tukang yang ahli di bidangnya, seperti tukang bangunan, senjata, kapal, dan lain sebagainya. Masing-masing tukang ini mempunyai kepala yang disebut *anrong guru*. Di atas *anrong guru* ini masih ada lagi pejabat yang disebut *anrong guru lompona* (*lompo* artinya 'besar'). Raja Karaeng Tunipalangga memelopori pula penggunaan *kompaka* atau sejenis alat musik dan bunyi-bunyian.

Sulawesi Selatan Kurang Lebih Pada 1500
Digambar ulang dari *Historical Atlas of Indonesia*, halaman 101

Raja menetapkan pula satuan ukuran dan timbangan. Ia memerintahkan pembuatan timbangan, anak timbangan, dan alat penakar. Pada masanya, orang Gowa mahir membuat mesiu dan senjata. Mereka sanggup pula mengolah berbagai jenis logam. Karaeng Tunipalangga mendirikan berbagai benteng besar demi mengamankan negerinya. Pada 1545, Karaeng Tunipalangga memerintahkan pembangunan Benteng Ujung Pandang, yang masih dapat disaksikan hingga sekarang. Kelak Belanda mengambil alih benteng ini setelah kekalahan Gowa dalam Perang Makassar dan merubah namanya menjadi Benteng (*Fort*) Rotterdam.

Semasa pemerintahan Karaeng Tunipalangga hanya, Bone saja yang belum dikalahkan oleh Gowa. Selama enam tahun tujuh bulan Raja Gowa itu berupaya menundukkan Bone. Kendati sedang sakit, raja tetap memimpin peperangan. Saat itu, penyakit raja adalah "Makanan yang ditelan baginda tidak turun"[524] yang

---

524. *Sultan Hasanudin Menentang V.O.C.*, halaman 59.

barangkali mengacu pada gangguan pencernaan. Ketika hal ini diketahui oleh Karaeng Tumenanga ri Makkoayang (Raja Tallo ke-4), raja diminta kembali ke Gowa guna beristirahat. Setelah sebulan lebih pulang ke Gowa, Raja Karaeng Tunipalangga menghembuskan nafasnya yang terakhir.

Sebelum meninggal, Karaeng Tunipalangga pernah mengamanatkan agar adiknya yang bernama I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data' Karaeng Tunibatta mewarisi takhta kerajaan menggantikannya sebagai Raja Gowa. Demikianlah, Karaeng Tunibatta lalu naik takhta sebagai Raja Gowa ke-11. Ia menikah dengan I Daeng Mangkassara yang melahirkan 4 orang anak: I Manggorai Daeng Mammeta, I Tamakebo Daeng Mate'ne Karaenga ri Botongang (Karaeng Mape'daka), I Daeng Tonji Karaeng ri Bisei, dan I Daeng Biasa. Belum sampai sebulan (23 hari) menduduki singgasananya, Karaeng Tunibatta memimpin pertempuran ke Bone. Peperangan yang dahsyat terjadi di Papplong, daerah antara Gowa dan Bone. Pada kesempatan tersebut, Gowa berhasil menghalau pasukan Bone kembali memasuki bentengnya. Gowa sempat pula membakar Kerajaan Bukaka. Sore harinya, pasukan Bone kembali menyerang Gowa dengan kekuatan penuh sehingga pasukan Gowa porak poranda. Raja Gowa tewas dalam pertempuran tersebut. Itulah sebabnya ia disebut Karaeng Tunibatta yang artinya 'Raja yang Dipenggal Kepalanya.' Raja Gowa ke-11 ini hanya sempat berkuasa selama 40 hari. Saat itu usianya baru 48 tahun.

Raja Bone yang berkuasa saat itu, La Tenrirawe Bongkange Matinrowe ri Gucinna (Raja Bone ke-7, memerintah pada 1542 –1584) beserta penasihatnya, Kajao Laliddo, sepakat mengembalikan jenazah Raja Gowa yang gugur itu ke negerinya. Raja digantikan oleh putranya yang bernama I Manggorai Daeng Mammeta Karaeng Bontolangkasa Tunijallo atau kerap disebut Karaeng Tunijallo sebagai Raja Gowa ke-12. Semasa pemerintahannya, berlangsung perdamaian antara Gowa dan Bone di Caleppa. Pihak Gowa diwakili oleh Karaeng Tunijallo beserta Tumenanga ri Makkoayang. Sementara itu, pihak Bone diwakili oleh Raja La Tenrirawe Bongkange beserta Kajao Laliddo. Hasil perundingan itu adalah

- Penyerahan daerah-daerah sampai sebatas Sungai WalanaE di sebelah barat dan sampai ke Ulaweng di utara pada Bone.
- Daerah di sebelah utara Sungai Tangka' menjadi wilayah Bone, sedangkan selatannya menjadi milik Gowa.
- Negeri Cenrana dimasukkan ke dalam kekuasaan Bone.

Perjanjian yang dalam bahasa Makassar disebut *Ulukanaya ri Caleppa* itu mengakhiri permusuhan antara Gowa dan Bone untuk sementara waktu. Setelah itu, Raja Karaeng Tunijallo kembali ke negerinya dan dinobatkan secara resmi sebagai Raja Gowa, bahkan pada kesempatan tersebut Raja Bone ikut hadir. Pusaka Kerajaan Gowa yang disebut Sudanga dan pusaka Bone yang disebut Lateariduni diletakkan di tempat keramat dalam Istana Gowa sehingga menambah keagungan upacara. Mereka juga mengadakan perjanjian persahabatan yang berbunyi

> "Musuh-musuh raja atau Kerajaan Gowa adalah pula musuh-musuh raja atau Kerajaan Bone. Demikian pula sebaliknya, musuh-musuh raja atau Kerajaan Bone adalah musuh-musuh raja atau Kerajaan Gowa. Rakyat Gowa yang masuk ke wilayah Kerajaan Bone adalah seperti mereka itu masuk ke negerinya sendiri. Sebaliknya pula rakyat Bone yang masuk ke wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa adalah mereka seperti berada di negerinya sendiri."[525]

Raja Karaeng Tunijallo berupaya memajukan Gowa dalam berbagai bidang, termasuk hubungan internasional. Ia menjalin relasi dengan Raja Mataram (di Jawa), Johor, Malaka, Pahang, Blambangan, dan Maluku. Seni dan budaya mengalami kemajuan pada kurun waktu ini, terutama seni ukir. Raja memerintahkan pengawasan terhadap senjata berupa sumpit karena ketika berada di Bone ia dua kali terluka gara-gara serangan sumpit beracun. Karaeng Tunijallo mengizinkan para pendatang yang beragama Islam membangun masjid di Mangalle Kana (Sombaopu), dengan tujuan agar mereka leluasa beribadah.

Semasa kekuasaannya, Raja Gowa ini sempat menaklukkan beberapa negeri seperti Luwu, Batulappa, Segeri, dan Marusu'. Peristiwa penting lain yang terjadi pada zamannya adalah kunjungan Sultan Baabulah dari Ternate ke Sombaopu pada 1580. Perjanjian perdamaian antara Gowa dan Bone tidak bertahan lama karena terjadi keretakan kembali antara kedua negeri tersebut. Bone tetap mengkhawatirkan ambisi ekspansif Gowa yang kerap berusaha meluaskan wilayah kekuasaannya tersebut. Oleh karenanya, tiga kerajaan suku Bugis, yakni Bone, Wajo, dan Soppeng, membentuk aliansi bersama. Persekutuan tiga kerajaan tersebut dinamakan TellumpaccoE dalam bahasa Bugis dan Tallumbonccoa dalam bahasa Makassar, yang mulai diwujudkan pada 1582 antara Raja La Tenrirawe Bongkange Matinrowe ri Gucinna dari Bone, La Mungkace To Udamang Matinrowe ri Batana dari Wajo, dan La Mappaleppe PatolaE

525. *Ibid*. halaman 62.

dari Soppeng. Sebagai wujud ikrar atas persekutuan mereka, ditanamlah sebuah batu di daerah Timurung, itulah sebabnya permufakatan ini kerap pula dinamakan *MallamumpatuE ri Timurung* (Penanaman Batu di Timurung). Tujuan utama aliansi ini tentu saja adalah mengimbangi ambisi ekspansif Gowa di kawasan Sulawesi Selatan. Hal ini menimbulkan amarah Gowa. Perjanjian perdamaian antara Gowa dan Bone menjadi batal dengan dilancarkannya serangan Gowa ke Bone beserta Wajo, tetapi gagal. Karaeng Tunijallo mangkat karena dibunuh oleh saudara sepupunya, I Lolo Tammakkana.

Karaeng Tunijallo digantikan oleh putranya yang bernama Karaeng Tunipasulu'. Saat menaiki singgasana, Raja Gowa ke-13 ini baru berusia 15 tahun. Ia memerintah dengan sewenang-wenang sehingga menimbulkan banyak pergolakan di Gowa. Para pejabat dan pembesar yang tidak disukainya dipecat dengan semena-mena. Raja tidak segan-segan pula menghabisi nyawa orang-orang yang tak sepaham dengannya. Oleh karena itu, banyak perantau yang sebelumnya tinggal di Gowa lari dari kerajaan tersebut. Mereka takut terhadap sepak terjang raja, bahkan anak-anak pembesar Gowa tidak sedikit pula yang mengungsi dari negerinya. Karena perilakunya yang semena-mena ini, Karaeng Tunipasulu' tidak lama memerintah dan dipaksa turun takhta oleh rakyat dan Dewan Adat Gowa. Ia lalu meninggalkan Gowa dan pergi ke Luwu. Itulah sebabnya raja diberi gelar Karaeng Tunipasulu' yang artinya 'Raja Yang Diusir Dari Negerinya.' Ketika berada di Luwu, raja memeluk Agama Islam. Ia pindah lagi ke Buton dan wafat di sana pada 5 Juli 1617.

Sebagai penguasa Gowa berikutnya diangkatlah adik Raja Karaeng Tunipasulu' yang bernama I Mangngarangngi Daeng Manra'bia. Raja Gowa ke-14 ini telah memeluk agama Islam dan bergelar Sultan Alauddin (1593–1639). Gelar anumertanya adalah Tumenanga ri Gaukanna atau 'Raja Yang Wafat Dalam Pemerintahannya.' Saat menggantikan kakaknya, I Mangngarangngi Daeng Manra'bia baru berusia tujuh tahun. Oleh karena itu, *pabbicara butta* yang sekaligus merupakan Raja Tallo ke-8, Karaeng Matoaya, merangkap sebagai walinya. Raja Tallo ini masih bersaudara kandung dengan Karaeng Biinea atau ibu Karaeng Tunipasulu' dengan Sultan Alauddin. Karaeng Matoaya merupakan raja di kawasan Sulawesi Selatan pertama yang menganut agama Islam (selanjutnya bergelar Sultan Abdullah Awalul Islam). Masuk Islamnya kedua raja ini berkat kedatangan ulama terkenal bernama Abdul Makmur Khatib Tunggal (Dato'ri Bandang), yang makamnya kini berada di timur

laut Makassar. Semenjak Gowa dan Tallo menjadi kerajaan Islam, para rajanya bergelar sultan. Kerajaan-kerajaan itu selanjutnya menjadi pusat penyiaran agama Islam di Sulawesi Selatan. Dua kawan Dato'ri Bandang, yakni Khatib Sulaiman (Dato'ri Patimang) dan Khatib Bungsu (Dato'ri Tiro) adalah penyebar-penyebar agama Islam yang terkemuka di kawasan tersebut.

Semasa pemerintahan Sultan Alauddin, Gowa menaklukkan Bulukumba, Bilusu, Sidenreng, Lamuru, Soppeng, Wajo, Bone, Bulu, Cenrana, Wawonio, Bilokka, Lemo, Pekkalabbu, Campaga, Bima, Dompu, Sumbawa, Kekelu, Sanggar, Buton, Pancana, Bungku (Tunbungku), Banggai, Buol, Gorontalo, Larompong, Selaparang (Lombok), Pasere (Pasir, di Kalimantan Selatan), Kutai, dan lain sebagainya. Karenanya, bisa disimpulkan bahwa wilayah atau daerah pengaruh Gowa tidak hanya meliputi Sulawesi saja, melainkan telah menjangkau Kalimatan, Lombok, dan Sumbawa. Sultan Alauddin wafat pada 15 Juni 1639 setelah memerintah selama 46 tahun. Ia dikenal sebagai raja yang dicintai rakyatnya.
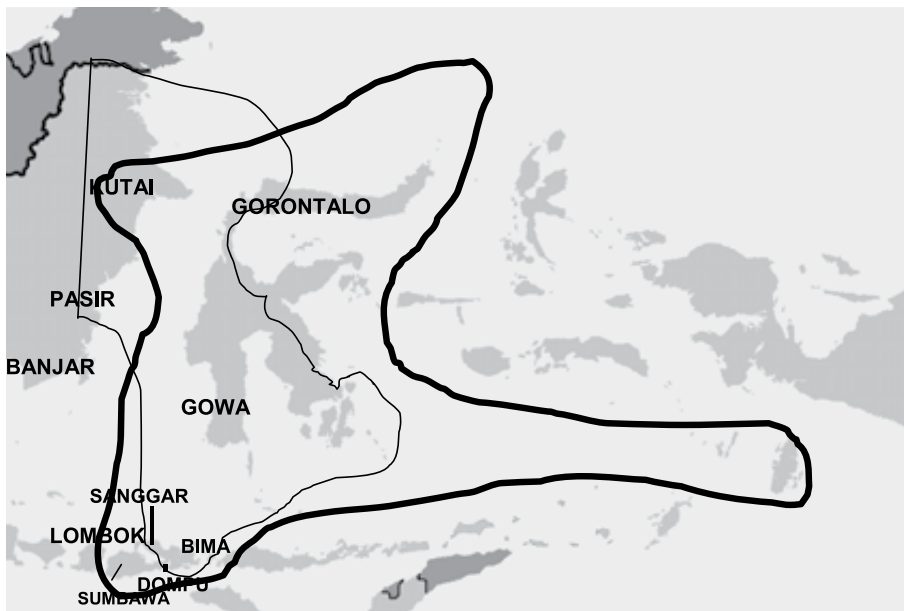
Kerajaan Gowa Pada Masa Kejayaannya

——— Daerah pengaruh terbesar yang dicapai Kerajaan Gowa (menurut *Historical Atlas of Indonesia*, halaman 102)

——— Wilayah Gowa sampai 1667 (menurut *Atlas Sedjarah*, halaman 17)

Pada abad 17, Sombaopu, ibu kota Kerajaan Gowa, merupakan kota pelabuhan internasional yang ramai karena letaknya yang strategis sebagai penghubung antara kawasan barat dan timur Kepulauan Nusantara. Itulah sebabnya, para pedagang asing, seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda, tertarik singgah di sana. Belanda segera menyadari arti penting Kerajaan Gowa dalam dunia perdagangan di Indonesia. Sombaopu merupakan bandar rempah-rempah yang penting. Hal ini terutama didukung oleh kenyataan bahwa suku bangsa Makassar merupakan pelaut-pelaut yang ulung. Selain itu, Belanda mendengar bahwa di Sombaopu harga rempah-rempah kerap lebih murah harganya daripada di Maluku. Kontak dengan bangsa Belanda telah terjadi semasa pemerintahan Sultan Alaudin. VOC mengirim surat kepada sultan, yang isinya memohon agar mereka diperkenankan datang ke sana. Sultan mengizinkan VOC mengunjungi negerinya. Kantor perwakilan dagang VOC kemudian dibuka di Sombaopu dengan Claes Luersen sebagai kepalanya yang pertama. Dengan demikian, terjalinlah hubungan dagang dengan VOC. Pada 1607, Abraham Mathysz ditugaskan oleh VOC menjajaki peluang kerja sama dengan kerajaan tersebut. VOC menawarkan bantuan militernya asalkan setelah itu diperkenankan menerapkan monopoli perdagangan di kawasan itu. Namun, tawaran ini tidak mendapat tanggapan dari Raja Gowa.

Kecurangan ternyata kerap terjadi pada kantor wakil dagang VOC di Sombaopu, umpamanya berupa laporan palsu yang menyatakan bahwa kaum bangsawan Gowa banyak berutang kepada mereka padahal tidak demikian halnya. Para pegawainya banyak melakukan korupsi dan malah menjalin hubungan dengan Portugis dan Spanyol, yang merupakan saingan dagang serta musuh bebuyutan VOC. Karena kondisi yang tidak memuaskan ini, kantor perwakilan dagang VOC ditutup. Sebelumnya, kapal VOC juga kerap menyerang perahu-perahu Gowa. Ketika dua orang utusan VOC, Paulus van Soldt dan Jacques l'Hermite, datang menghadap Sultan Gowa, mereka diprotes karena serangan-serangan itu. Dalam pertemuan mereka yang kedua, l'Hermite mengajukan permohonan agar Gowa jangan menjual beras kepada orang-orang Portugis. Sultan menolaknya dengan menegaskan bahwa Kerajaan Gowa terbuka bagi siapa saja yang ingin berdagang tanpa ada pembedaan. Karena orang Belanda terus mendesak, sultan akhirnya berjanji tidak mengirim beras ke Malaka lagi yang dikuasai Portugis pada saat itu. Sultan menyesalkan penutupan kantor dagang VOC di Sambaopu. Oleh karenanya, kedua utusan VOC itu berjanji membuka kembali perwakilan dagangnya.

Francois Wittert ditugaskan membuka kembali kantor tersebut dan mengangkat Samuel Denis sebagai kepalanya. Namun, VOC segera merasa bahwa orang-orang Makassar adalah saingan-saingan mereka dalam perdagangan rempah dan merasa kurang puas atas kenyataan itu. Ketidakpuasan ini tentunya dilandasi ambisi dan keserakahan VOC agar menjadi satu-satunya pedagang di kawasan tersebut. Ketika pada 1614 Hans de Hase mengunjungi Sombaopu, ia mengusulkan agar kantor dagang VOC di sana ditutup kembali, bahkan demi mewujudkan ambisi monopoli tersebut, de Hase mengusulkan agar semua perahu orang-orang Makassar di Maluku diserang dan dihancurkan.

Keinginan VOC menegakkan monopoli perdagangan di Kepulauan Nusantara menimbulkan konflik dengan Gowa. Pada masa itu, Gowa menerapkan sistem perdagangan bebas dan tidak mengistimewakan bangsa manapun. Dengan demikian, VOC menganggap Gowa sebagai batu penghalang bagi mereka dalam menerapkan monopoli perdagangan. Penentangan terhadap praktik monopoli ini berakar dari pandangan Raja Gowa berikut.

> Tuhan Yang Mahakuasa telah menciptakan bumi dan lautan. Bumi telah dibagikan di antara manusia, begitu pula lautan telah diberikan untuk umum. Tidak pernah terdengar bahwa pelayaran di lautan dilarang bagi seseorang. Jikalau Belanda melarang hal itu maka itu berarti bahwa Belanda seolah-olah mengambil nasi dari mulut orang lain.[526]

Gagasan semacam ini tentunya berbenturan dengan kepentingan VOC sehingga berpotensi menimbulkan konflik, yang benar-benar terjadi pada 1615. Saat itu, kapal dagang Belanda bernama *Enkhuyzen* berlabuh di Sombaopu. Kepala perwakilan dagang VOC di Sombaopu, Abraham Sterck, melaporkan bahwa ia diperlakukan tidak layak oleh orang-orang Makassar.[527] Kapten kapal Belanda itu yang bernama de Vries sepakat membantunya dalam memberikan pelajaran kepada orang-orang Makassar dan mereka lantas merancang suatu siasat licik. Mereka mengundang beberapa pembesar dan bangsawan Gowa melakukan kunjungan persahabatan ke atas kapal. Tanpa menduga niat buruk orang-orang Belanda, para bangsawan dan pembesar Gowa memenuhi undangan itu. Namun, setibanya di atas kapal, sekonyong-konyong orang-orang Belanda menyerang dan melucuti senjata mereka. Para bangsawan beserta

526. *Ibid.,* halaman 71.
527. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai kebenaran laporan ini karena mungkin saja Sterck berniat menggunakan kesempatan ini untuk mencari gara-gara dengan Gowa.

pengiringnya melakukan perlawanan, namun dapat dikalahkan karena ketidaksiagaan mereka. Dua orang bangsawan lalu ditawan dan dibawa ke Jawa. Peristiwa ini tersiar di seluruh Gowa dan memancing ketegangan dengan VOC. Orang-orang Makassar bangkit kebenciannya terhadap Belanda. Demi meredakan ketegangan, Belanda akhirnya bersedia membebaskan dua orang bangsawan yang telah ditawannya. Dengan demikian, sementara waktu ketegangan boleh dikatakan reda.

Berikutnya, pada 10 Desember 1616 datang lagi kapal dagang *De Eendracht* dari Belanda. Setelah mendapatkan izin mendarat, orang-orang Belanda malah bertingkah laku sombong dan kasar. Karena masih dendam terhadap insiden di atas kapal *Enkhuyzen*, orang-orang Makassar menjadi berang dan menyerang serta membinasakan seluruh awak kapal *De Eendracht*. Ketegangan antara VOC dan Makassar berkobar kembali. Sebagai langkah antisipasi terhadap memburuknya hubungan ini, Gowa memperbaiki beberapa benteng dan kubu-kubu pertahanannya. Sultan menyaksikan pula kekejaman Belanda di Banda berupa pembantaian sebagian penduduknya atas perintah Gubernur Jenderal J.P. Coen. Sedangkan sisanya yang masih hidup diangkut ke Batavia sebagai budak belian. Orang-orang Banda yang luput dari kekejaman Belanda meminta perlindungan kepada Gowa. Bahkan, kekejaman ini masih ditambah lagi dengan apa yang disebut pelayaran *hongi* (*hongi tochten*). Penduduk Maluku kian bertambah penderitaannya. Sebelum kedatangan Belanda, Gowa telah menjalin persahabatan dengan Maluku maka sultan pun terdorong membela kepentingan mereka. Hal ini tentu saja memperparah keretakan hubungan dengan VOC.

Karena kebenciannya terhadap Belanda, Gowa menjual barang-barang dagangan mereka kepada para pedagang Portugis dan Spanyol, bahkan dengan harga yang sangat murah. Hal ini tentu saja menyakiti hati VOC karena menyaksikan saingannya meraup keuntungan yang lebih besar. Upaya VOC menjalin persahabatan dengan Gowa kerap gagal karena mereka terus memaksakan keinginannya memonopoli perdagangan. Gubernur J.P. Coen mengirimkan tiga kapal perangnya di bawah pimpinan Arent Maertsen, tetapi serangan ini dapat dipatahkan. Gagal dengan jalan kekerasan, Coen mencoba mengutus Jan Joosten pada 1621 dengan membawa sepucuk surat bagi Sultan Alaudin guna menjajaki kemungkinan adanya perjanjian yang menguntungkan VOC dan Gowa. Utusan itu diterima dengan ramah-tamah dan sultan menyatakan bahwa Gowa bersedia bersahabat dengan bangsa manapun, termasuk Belanda. Namun, karena Coen menuntut agar Gowa mengirimkan seorang utusan ke Batavia, sultan

menolaknya. Dengan demikian, perjanjian yang diharapkan Coen boleh dikatakan gagal total.

Setelah menguasai sebagian daerah Maluku, Belanda menempatkan gubernurnya di sana. Gubernur Herman van Speult sangat direpotkan oleh bantuan dan dukungan Makassar terhadap rakyat Maluku. Karena gagal mengalahkan Gowa dengan kekuatan senjata, van Speult mengusulkan agar VOC mengadakan perjanjian perdamaian dengan Gowa. Ia lalu mengundurkan diri dari jabatannya dan dalam perjalanan pulang ke Batavia ia sempat singgah di Sombaopu antara 3–10 Agustus 1625. Ia mencoba mengadakan perjanjian dengan Raja Gowa, tetapi tidak membuahkan hasil apa-apa karena isu monopoli perdagangan masih dikedepankan olehnya.

Sebagai wujud tantangannya terhadap VOC, Gowa menyerang dan merebut Limboto yang dikuasai oleh Ternate. Kerajaan Ternate saat itu memang menjalin hubungan persekutuan dengan VOC. Selanjutnya, pada Desember 1629, sebuah kapal VOC kandas di perairan Pulau Selayar. Tiga puluh orang awak kapalnya menjadi tawanan Raja Gowa. Karena ingin bertukar tawanan dengan Belanda, Portugis meminta agar para tawanan itu diserahkan kepada mereka. Sultan Alaudin menyetujuinya sehingga terjadilah pertukaran tawanan antara Portugis dan Belanda. Pada 1634, Belanda mengirimkan kapalnya memblokade perairan Gowa, tetapi tidak membuahkan hasil apa-apa.

Karena makin khawatir terhadap manuver Kerajaan Gowa yang menjalin persekutuan dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris, mereka akhirnya mengubah kebijakannya. Pada 12 Juni 1637, Gubernuer Jenderal Anthonio van Diemen berlayar ke Gowa guna mengupayakan suatu perdamaian. Ia hanya menyarankan agar Gowa jangan berdagang dengan daerah-daerah yang menjadi musuh VOC. Sultan menyetujuinya dan sebagai tindak lanjut atas kesepakatan tersebut, gubernur jenderal mengutus Anthonio Caen yang fasih berbahasa Melayu membicarakannya lebih jauh. Perjanjian perdamaian ditandatangani oleh Sultan Alaudin dan Gubernur Jenderal Belanda Anthonio van Diemen pada 26 Juni 1637. Kesepakatan ini sementara waktu memang dapat mengakhiri permusuhan di antara mereka. Orang Inggris juga senang dengan diadakannya perjanjian ini dan menyelenggarakan pesta untuk merayakannya. Meskipun sudah diadakan perdamaian, orang Belanda menyepakati persyaratan sultan untuk tidak menempatkan wakil mereka di Sombaopu. Hal ini menimbulkan

ketidakpuasan bagi mereka di masa mendatang karena iri dengan bangsa-bangsa lain yang boleh menempatkan wakilnya di sana.

Sultan Malikussaid (1639–1653) mewarisi takhta Kerajaan Gowa sebagai raja ke-15. Gelar lengkapnya adalah Mannuntungi Daeng Mattola Karaeng Ujung Karaeng Lakiung Sultan Malkussaid Tumenanga ri Pampabatunna. Sebagai *pabbicara butta*-nya adalah Raja Tallo ke-9, Karaeng Pattingaloang, yang terkenal karena kecendekiaannya. Sultan terkenal akan kepiawaiannya bergaul dan berdiplomasi dengan bangsa-bangsa lain, termasuk VOC. Sultan Malikussaid membina hubungan yang baik dengan VOC berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh ayahnya pada 1637. Kendati demikian, perjanjian damai ini tampaknya tidak berumur panjang karena VOC senantiasa bersikap serakah dan mementingkan dirinya sendiri. Mereka tidak peduli apakah isi kesepakatan itu merugikan pihak lain atau tidak. Mereka terus berupaya memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia bagian timur, khususnya Maluku. Beberapa insiden terjadi lagi dengan VOC, antara lain perampasan perahu milik Gowa yang mengangkut cendana di Pulau Timor. Ini adalah pelanggaran perjanjian damai yang telah dibuat sebelumnya dengan Kerajaan Gowa. Oleh karena itu, sultan meminta ganti rugi sebesar 6.240 Ringgit, tetapi Belanda hanya membayar 2.000 Ringgit. Sultan menolak dan tetap meminta pembayaran sesuai dengan jumlah yang telah ditentukannya. Tuntutan ini baru dipenuhi Belanda pada 1641. Selanjutnya masih ada konflik-konflik lain dengan VOC, seperti masalah Buton dan lain sebagainya. Demi memperkuat armada Gowa, Sultan Malikussaid pada 1640 memerintahkan pembuatan kapal besar yang didayung 400 orang (galle), yang masing-masing diberi nama I Galle Dondona Ralle Campaga (panjang 35 meter), I Galle I Nyannyik Sangguk (panjang 27 meter), I Galle Mangkin Naiya (panjang 27 meter), I Galle Parek Makkuling (panjang 23 meter), I Galle I Kalabiu (panjang 23 meter), I Galle Galelenga (panjang 23 meter), I Galle Barang Mamase (panjang 23 meter), I Galle Siga (panjang 23 meter), dan I Galle Uwangang (panjang 23 meter).[528]

528. Lihat *Menyingkap Tabir Sejarah Budaya di Sulawesi Selatan*, halaman 55.

Digambar ulang dari:
Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905, halaman 43.

Selain VOC, Sultan Malikussaid harus pula berhadapan dengan Bone. Raja Bone saat itu, La Madarémméng Matinrowe ri Bukaka, mengeluarkan kebijakan baru mengenai perbudakan. Ia menetapkan bahwa orang yang bukan keturunan budak tidak boleh dijadikan budak. Mereka harus dibebaskan dari perhambaannya dan

menerima upah bila ada yang ingin memperkerjakan mereka. Peraturan ini tentu saja menimbulkan gesekan dengan orang-orang yang memiliki banyak budak, terutama kaum pembesar dan bangsawan. Oleh karenanya, mereka lalu menentang kebijakan raja tersebut, termasuk ibu raja sendiri yang bernama We Tenrisoloreng Datu Pattiro. Karena Raja Bone tidak menghiraukan segenap keberatan itu, ibunya melarikan diri ke Gowa pada 1640 dan meminta perlindungan kepada Sultan Malikussaid. Inilah yang menjadi penyebab pecahnya peperangan antara Gowa dan Bone pada 1644. Saat itu, pasukan Gowa dibantu oleh Wajo, Sidenreng, dan Soppeng. Setelah melalui serangkaian pertempuran yang dahsyat, pasukan Bone berhasil dipukul mundur. Raja La Madderemmeng beserta saudaranya, La Tenriaji Tosenrima, terpaksa melarikan diri ke Larompong dan Cimpu di Luwu. Namun, akhirnya Raja Bone dapat ditangkap serta diasingkan ke Sanrangang dan wafat di sana. Semenjak saat itu, Bone berada di bawah kekuasaan Gowa selama 17 tahun. Masa ini dalam catatan sejarah Bugis disebut *naripoatana Bone seppulo pitu taung ittana* yang berarti 'Didudukilah Bone selama tujuh tahun lamanya.'

Setelah peristiwa kekalahan Bone tersebut, Sultan Gowa meminta Karaeng Patinggaloang mengadakan perundingan dengan Arung Pitu atau Dewan Adat Bone guna membicarakan siapakah yang layak diangkat sebagai Raja Bone menggantikan La Maddaremmeng. Dewan Adat Bone memutuskan menyerahkan takhta kerajaan Bone kepada Sultan Malikussaid. Tetapi sultan menolaknya karena ia paham betul adat Bone yang tidak mengizinkan orang luar menjadi penguasa di negeri itu. Mereka yang bukan keturunan langsung Tumanarunge ri Matajang (raja pertama Bone) tidak diperkenankan menjadi Raja Bone. Adat yang sama berlaku pula di negerinya; orang yang bukan keturunan langsung Tumanurunga ri Tammalate hendaknya tidak diangkat sebagai penguasa Gowa dan Tallo. Sultan Malikussaid kemudian menunjuk Karaeng Pattingaloang sebagai penguasa Bone yang baru, tetapi lantaran memahami pula adat Bone, ia juga menolaknya. Karena tidak ada calon raja Bone yang tepat, sultan akhirnya menerima tawaran itu, tetapi mengangkat pamannya, Karaeng Sumanna, sebagai wakilnya dalam menjalankan roda pemerintahan di Bone. Namun, paman sultan itu menampiknya karena merasa tidak sanggup mengemban tanggung jawab tersebut. Sultan kemudian menunjuk Tobala Arung Tanete, salah seorang anggota Dewan Adat Bone, menjadi wakilnya di Bone. Demikianlah, Tobala Arung Tanete memerintah di Bone dengan gelar *jannang* (kurang lebih setingkat dengan bupati).

Saudara La Madderemmeng bernama La Tenriaji Tosenrima yang ikut melarikan diri, ternyata lolos dari kejaran pasukan Gowa. Belakangan, ia pulang ke kampung halamannya dan memimpin rakyat Bone melakukan perlawanan terhadap Gowa. Karenanya, Sultan Malikussaid kembali melancarkan serangan terhadap rakyat Bone yang memberontak itu. Pertempuran antara kedua kerajaan berkobar dan Bone berhasil ditundukkan kembali. Banyak bangsawan pengikut La Tenriaji Tosenrima yang ditawan Gowa, termasuk Arung Tana Tengnga Towa (nenek Arung Palakka), La Pottobune (ayah Arung Palakka), dan lain sebagainya. Mereka semua merupakan kerabat dekat La Tenriaji sehingga ikut terlibat dalam pertempuran tersebut. Dalam insiden tersebut, Tobala Arung Tanete tidak terlibat di dalamnya sehingga tetap menjadi Bupati Bone.

Sultan Malikussaid mulai mengarahkan perhatiannya pada suku Mandar yang kini mendiami Provinsi Sulawesi Barat. Hingga saat itu, mereka belum mengakui kekuasaan Gowa. Oleh karenanya, pada 1646 ia melancarkan serangan ke sana dan berhasil menundukkan mereka. Meskipun demikian, armada Gowa pada 1651 mengalami kekalahan telak terhadap VOC di bawah pimpinan Laksamana de Vlamingh di dekat Pulau Buru, Kepulauan Maluku. Dua tahun kemudian, sultan wafat pada 5 November 1653 dan dimakamkan di pemakaman raja-raja Gowa. Almarhum Raja Gowa ke-15 ini tersohor pula namanya hingga berbagai negeri di Asia dan Eropa. Ia menjalin hubungan persahabatan dan diplomatik dengan Raja Inggris, Raja Kastilia (Spanyol), mufti besar Arabia, Raja Portugis,Gubernur Spanyol di Manila, raja muda Portugis di Goa (India), dan Merhante di Masulipatan (India).[529]

iii. Sultan Hasanuddin dan Perlawanannya Terhadap VOC

Sebelum mangkat, Sultan Malikussaid mengamanatkan agar putranya yang bernama I Mallombasi Muhammad Bakir Daeng Mattawang Karaeng Bontamangape naik takhta menggantikannya sebagai Raja Gowa ke-16. I Mallombasi menaiki singgasana Kerajaan Gowa dengan gelar Sultan Hasanuddin[530] (1653–1670). Raja baru Gowa ini dikenal mempunyai kecerdasan, keberanian, dan kemampuan yang tinggi. Selain itu, sebelum menjadi raja ia telah memangku banyak jabatan penting Kerajaan Gowa. Pada masanya, VOC ingin memantapkan monopolinya atas perdagangan

529. Lihat *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 135.
530. Ia diangkat sebagai pahlawan nasional dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 6 November 1973 No. 08/TK/tahun 1973.

rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Karena itu, sultan menyadari bahwa ancaman terbesar bagi Gowa adalah VOC.

Pemerintahan Sultan Hasanuddin banyak diwarnai konflik dengan Belanda. Pada masa awal pemerintahannya saja terjadi berbagai pertempuran yang dahsyat dengan VOC. Saat itu, Belanda belum berani mendaratkan pasukannya dan menyerang Gowa secara langsung. Mereka hanya menempatkan kapalnya saja di dekat Sombaopu atau perairan sekitarnya guna melakukan blokade.

Saat itu, di Maluku sedang terjadi pergolakan melawan VOC. Pada 27 Maret 1654, rakyat Maluku di bawah pimpinan Majira menyerang benteng Belanda di Luhu (Seram Kecil). Gowa sedari dulu telah mendukung Maluku. Oleh karenanya, demi menghalangi datangnya bala bantuan dari pihak Gowa, armada VOC di bawah Komandan Ros memblokade Sombaopu. Sementara itu, Simon Cos diperintahkan menyerang Teluk Assahudi yang pada akhirnya dapat direbut oleh Belanda. Pada 20 September 1654, Belanda berhasil merebut Laala yang dipertahankan oleh para pejuang Makassar dengan penuh keberanian. Di tengah-tengah kondisi yang gawat itu, *pabbicara butta* kerajaan, Karaeng Pattingaloang, wafat pada 17 September 1654,[531] padahal nasihat dan gagasannya sangat diperlukan oleh rakyat Gowa. Sebagai penggantinya, diangkat putranya yang bernama Karaeng Karunrung. Peperangan terjadi dengan kemenangan yang terjadi silih berganti.

Pada April 1655, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri armadanya menyerang Belanda yang telah menduduki Buton. Belanda menghasut Sultan Buton, La Awu (1654–1664), agar mempertahankan sendiri negerinya dan VOC akan membantu mereka semampunya. Setelah itu, ditariklah sebagian besar pasukan Belanda. Saat pasukan Gowa tiba di sana, hanya sedikit pasukan Belanda yang tertinggal, sehingga mereka dapat dikalahkan dengan mudah. Menurut laporan, seluruh pasukan Belanda berhasil ditewaskan. Setelah menghancurkan pasukan Belanda, sultan kembali ke negerinya. Ketika armada bala bantuan Belanda yang dipimpin de Vlamingh tiba di Buton, mereka hanya menjumpai puing-puing belaka.

Valentijn melaporkan bahwa de Vlamingh lantas mengirimkan hadiah kepada Karaeng Karunrung berupa peta daerah Assahudi yang sebelumnya telah direbut oleh

531. Buku *Sultan Hasanudin Menentang V.O.C* mencatat bahwa Karaeng Pattingaloang wafat pada 15 September 1654; tetapi *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 137, mencantumkan bahwa tokoh tersebut mangkat pada 17 September 1654. Walaupun sama-sama di tahun 1654, terdapat selisih dua hari di sini.

Belanda beserta sebilah keris berhulu emas bekas seorang pemimpin pasukan Makassar di Assahudi. Tentu saja hadiah ini hanya dimaksudkan sebagai penghinaan belaka sehingga Karaeng Karunrung memutuskan mengembalikannya. Permusuhan masih berlanjut dengan diledakkannya kapal VOC yang memblokade perairan Makassar pada 23 Oktober 1655 yang menewaskan kapten kapal bernama Caspar Buytendijk beserta 24 anak buahnya.

Mengingat selama ini usaha mereka dalam mengalahkan Gowa telah menelan korban jiwa beserta biaya yang tidak sedikit dan tidak kunjung membuahkan hasil apapun, Belanda berniat mengupayakan perdamaian lagi. Gubernur Jenderal Joan Meetsuycker (1653–1678) mengutus Willem van der Beeck beserta seseorang bernama Khoja Suleiman ke Gowa. Van der Beeck dan Gowa berhasil mengadakan perjanjian pada 2 Februari 1656 yang berisi

- Orang-orang Gowa yang berada di Ambon diizinkan kembali ke kampung halamannya.
- Sultan Gowa boleh menyelesaikan masalah utang piutangnya dengan Ambon.
- Akan dilakukan tukar menukar tawanan.
- Musuh-musuh VOC (Portugis, Spanyol, dan Inggris) tidak harus menjadi musuh-musuh Gowa.
- VOC tidak akan mencampuri perselisihan yang terjadi antara orang-orang Makassar.
- VOC diperkenankan menangkap orang Makassar yang berlayar di Kepulauan Maluku.
- Raja Gowa akan memperoleh ganti rugi sahamnya pada kapal St. Joan Baptista milik Portugis yang telah dirampas Belanda.

Pemerintah Belanda sangat kecewa dengan hasil perjanjian tersebut dan hendak memecat van der Beeck. Mereka merasa bahwa perjanjian di atas terlalu menguntungkan Gowa. Dengan demikian, sudah dapat diduga sebelumnya bahwa perjanjian seperti itu tidak akan bertahan lama. Belanda ternyata berniat melanggar janjinya karena pada 2 Februari 1657 mereka mengutus Dirck Schouten menyampaikan kepada pihak Gowa bahwa VOC hanya bersedia membayar separuh saja dari ganti kerugian saham sultan yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini tidak dapat diterima oleh Sultan Hasanuddin. Sebaliknya, VOC menuntut penyerahan Kalamatta, saudara Sultan

Mandarsyah dari Ternate yang menjadi buronan Belanda dan kini mencari suaka di Gowa. Karena VOC tidak menepati janjinya dalam membayar kerugian maka sultan juga tidak bersedia menyerahkannya. Belanda juga merampas perahu milik Karaeng Karunrung dan Karaeng Sumana, kendati mereka memiliki surat izin berlayar.

Guna menghadapi VOC, Gowa mengadakan hubungan dengan kerajaan lainnya, seperti Banten. Karena relasi kedua belah pihak makin tegang, Belanda mengadakan perundingan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil terhadap Gowa pada 10 Februari 1659. Mereka memutuskan untuk mengadakan pembicaraan lagi dengan Sultan Gowa, yakni menyarankan perjanjian agar Gowa tidak lagi mencampuri urusan-urusan yang terjadi di daerah-daerah kekuasaan VOC maupun sekutunya seperti Ternate. Bila keinginan VOC ini tidak dipenuhi, pembayaran kerugian tidak akan dilakukan dan lebih baik dilangsungkan peperangan antara kedua pihak. Willem Bastingh kemudian diutus ke Gowa, pada pertemuan tersebut Sultan Hasanuddin menyampaikan tuntutan kepada Belanda sebagai berikut.

(1) Belanda tidak diperkenankan mengganggu penduduk Pulau Buru dan Seram.

(2) Warga Kerajaan Gowa yang ditawan VOC harus dikembalikan ke negerinya.

(3) Sisa pembayaran kerugian kapal St. John Baptista harus segera dilunasi, sesuai dengan jumlah yang dijanjikan oleh Willem van der Beeck.

(4) VOC harus memberikan ganti rugi bagi 400 orang Bima yang tewas atau ditawan saat penyerangan VOC terhadap Bima.

(5) VOC harus membongkar bentengnya yang berada di Manado.

(6) Perahu-perahu milik Karaeng Karunrung dan Karaeng Sumana beserta barang-barang milik Fransisco Viera dan Fransisco Mendes di kapal-kapal yang dirampas VOC harus dikembalikan.

(7) Perahu-perahu yang mengibarkan bendera Kerajaan Gowa dan membawa surat keterangan bercap kerajaan tersebut tidak boleh diganggu oleh VOC di manapun juga.

Sebaliknya, VOC juga mengajukan tuntutan sebagai berikut:

(1) Ganti kerugian atas kapal Baptista akan dibayar asalkan Fransisco berani menerangkan di bawah sumpah mengenai perincian jumlah muatan dan kerugian yang dialaminya.

(2) Kerugian terhadap kapal-kapal juga akan dibayarkan dengan ketentuan seperti di atas.

(3) Ganti rugi atas serangan terhadap Bima tidak akan dibayarkan karena serangan itu dilakukan bukan di wilayah Bima, melainkan di kawasan yang berbatasan dengan negeri tersebut sehingga berada di luar kewenangan Gowa.

(4) Kerajaan Gowa harus menjamin perdamaian dengan negeri-negeri yang menjadi sekutu VOC, seperti Ternate, Bacan, Tidore, dan lain sebagainya. Kerajaan Gowa hendaknya tidak mengganggu daerah-daerah yang telah dikuasai VOC. Dengan kata lain, Gowa tidak boleh berdagang di sana.

(5) VOC agar diberi tanah atau daerah di Sombaopu.

(6) Seluruh tawanan berupa orang-orang Belanda dan budak-budak VOC yang melarikan diri agar diserahkan oleh Gowa.

(7) Kerajaan Gowa harus membayar utang-utangnya kepada VOC.

(8) Kerajaan Gowa hendaknya melindungi orang-orang Belanda dari serangan orang Makassar dan juga Portugis.

Apabila semua ketentuan di atas dipenuhi, VOC bersedia membongkar bentengnya yang berada di Manado. Perundingan diadakan pada 27 April 1659. Sultan Hasanuddin menolak mengadakan perdamaian melalui perantaraan VOC dengan kerajaan-kerajaan yang menjadi sekutu VOC. Perdamaian boleh dirundingkan asalkan negeri-negeri tersebut berhubungan langsung dengan Gowa. Larangan berdagang di daerah-daerah yang telah dikuasai VOC juga ditolak oleh sultan dengan alasan bahwa Tuhan telah menciptakan lautan yang bebas dilayari siapa saja.

Karena tidak tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak, VOC memutuskan menyerang Gowa. Pada 6 Juni 1660, armada Belanda yang dipimpin Johan van Dam dan Johan Truytman tiba di Sombaopu. Di antara pasukan Belanda itu ada juga prajurit yang berasal dari kerajaan-kerajaan lain di Kepulauan Nusantara. Dengan demikian, VOC jelas sekali memberlakukan siasat adu domba atau *divide et impera* antar sesama bangsa Indonesia. Terjadi bentrokan dengan armada Portugis yang dapat dikalahkan oleh Belanda. Pasukan Makassar tidak merasa gentar dengan kekalahan Portugis tersebut. Mereka telah siap menghadapi peperangan dan berbagai benteng sudah diperbaiki serta diperkuat. Panji-panji perang prajurit Gowa tampak berkibar di mana-mana.

Pada 12 Juni 1660, Belanda menerapkan strategi jitu dalam merebut Benteng Pannakukang milik Gowa. Mereka menurunkan sampan-sampan berisi prajurit yang seolah-olah hendak bergerak ke utara guna menyerang Sambaopu. Pasukan yang berada di benteng Pannakukang segera bergerak ke utara demi membantu rekan-rekan mereka di Sambaopu. Dengan demikian, benteng Pannakukang dalam keadaan tidak terjaga. Belanda mendarat dan merebut benteng itu dengan mudah. Sisa pasukan Makassar di benteng Pannakukang yang jumlahnya sedikit tewas dibantai Belanda. Setelah menduduki benteng tersebut, Belanda bersiap menantikan serangan pihak Gowa. Begitu mengetahui bahwa mereka telah tertipu, pasukan Gowa bergerak kembali ke selatan menuju benteng Pannakukang dan menyerang pasukan Belanda yang bertahan di dalamnya. Meskipun demikian, pasukan Makassar gagal merebut benteng itu dari tangan Belanda.

Agar tidak jatuh lebih banyak korban, VOC mengadakan gencatan senjata dengan Gowa. Oleh karenanya, pada 10 Agustus 1660 diadakanlah perjanjian gencatan senjata di Garassi dengan kesepakatan sebagai berikut.

(1) Karaeng Popo selaku wakil Gowa akan diutus ke Batavia untuk merundingkan lebih lanjut masalah perdamaian. Selama perundingan masih dilangsungkan akan dilakukan penghentian permusuhan.

(2) Gowa dan VOC masih memiliki haknya masing-masing seperti sebelum benteng Pannakukang jatuh ke tangan Belanda.

(3) Permusuhan terhadap VOC akan dihentikan.

(4) Orang-orang Makassar dilarang mendekati benteng Pannakukang yang diduduki VOC, kecuali untuk menjual atau menyerahkan bahan-bahan makanan.

(5) Orang-orang Portugis yang berada di Sambaopu tidak diperkenankan berlayar atau meninggalkan pelabuhan.

(6) Pedagang-pedagang dari bangsa lain yang sebelumnya telah menjalin persahabatan dengan Makassar harus meninggalkan pelabuhan Sombaopu.

Butir ke-4 di atas adalah wujud ketakutan Belanda terhadap serangan mendadak orang Makassar yang bermusuhan dengan mereka. Perjanjian Garassi ini merupakan perjanjian sementara sambil menunggu hasil perundingan antara Karaeng Popo dengan Belanda. Selama gencatan senjata berlangsung, VOC menggunakan kesempatan ini untuk menghubungi musuh-musuh Gowa, seperti Arung Palakka dari Bone yang

terusir dari kerajaannya dan mendendam kepada Gowa karena telah menaklukkan negerinya.

Karaeng Popo, utusan Gowa, tiba di Batavia pada 17 Juli 1660. Sebagai wakil VOC ditunjuk de Vlamingh dan Johan van Dam. Perundingan perdamaian selanjutnya diadakan pada 29 Juli 1660 yang menghasilkan perjanjian sebagai berikut.

(1) Gowa tidak akan mencampuri lagi masalah Buton, Manado, dan Ambon.

(2) Orang-orang Makassar tidak diperkenankan lagi berlayar ke Banda dan Ambon.

(3) Orang-orang Portugis harus meninggalkan Sombaopu, sedangkan VOC bebas berdagang di sana.

(4) Gowa harus membayar segenap biaya yang dikeluarkan VOC saat peperangan tersebut dan menyerahkan Kalamatta.

(5) Selama Sultan Gowa belum menandatangani dan menjalankan segala sesuatu yang ditetapkan dalam perjanjian ini maka benteng Pannakukang akan tetap diduduki Belanda.

Menilik isinya, perjanjian di atas tampak merugikan Gowa. Menimbang bahwa saat itu Gowa masih memiliki angkatan perang yang kuat, perjanjian di atas seharusnya mustahil disepakati. Ada yang menyimpulkan bahwa tujuan utama pihak Gowa adalah demi mendapatkan lagi benteng Pannakukang. Kemungkinan Karaeng Popo bersikap kurang teliti dalam hal ini. Baginya sudah cukup bila benteng tersebut dikembalikan kepada Gowa, tanpa perlu memperhatikan pasal-pasal lainnya. Ada pula sebagian ahli sejarah yang berpendapat bahwa perjanjian itu hanya alat diplomasi semata demi mendapatkan kembali benteng mereka yang direbut Belanda. Terlepas dari semua itu, pasal-pasal perjanjian di atas sangat merugikan Gowa. Larangan berlayar ke Banda dan Ambon bagi orang Makassar jelas sekali mematikan mata pencaharian mereka. Sampai sejauh ini, dapat dikatakan bahwa VOC dengan licik akan mengajak berunding dan mengadakan perjanjian apabila mereka mulai terdesak.

Sultan Hasanuddin baru menandatanganinya pada 1 Desember 1660, tetapi ia dapat memaksa VOC untuk meniadakan penggantian kerugian yang harus dibayarkan Gowa sebesar 21.034 Ringgit. Selain itu, Gowa juga tidak harus menyerahkan Kalamatta. Sebagai wujud pelaksanaan perjanjian tersebut, sultan memberitahu Fransisco Viera dan Fransisco Mendes bahwa kini ia telah mengadakan perdamaian

dengan VOC yang salah satu ketetapannya mengharuskan mereka hengkang dari Sombaopu. Sultan menyadari pula sebagaimana yang berlaku sebelumnya, perjanjian ini mustahil berumur panjang karena sangat merugikan Gowa. Oleh karenanya, ia melakukan persiapan perang dengan meningkatkan pertahanan kerajaannya.

Menyaksikan kacaunya kondisi Gowa, Arung Palakka yang ketika itu hidup sebagai tawanan berniat mencari kesempatan meloloskan diri. Ia memanfaatkan saat berlangsungnya pesta panen yang meriah di Tallo. Arung Palakka beserta pengikutnya lari ke Bone dan memimpin pemberontakan dengan dibantu Kerajaan Soppeng. Oleh orang-orang Bugis, ia dianggap sebagai pahlawan yang membebaskan tanah air mereka dari pendudukan Gowa. Sultan Hasanuddin mengambil tindakan tegas dan bergerak memadamkan pemberontakan itu. Dengan dibantu oleh Wajo, Gowa menyerang dan mengalahkan Bone. Akibatnya, Arung Palakka terpaksa melarikan diri dan meminta suaka kepada Sultan Buton. Selama tiga tahun, sultan Buton menyembunyikannya beserta para pengikutnya. Arung Palakka kemudian berencana meminta bantuan VOC karena kedua belah pihak memiliki musuh bebuyutan yang sama. Pada 1663, ia meninggalkan Buton dan berlayar ke Batavia. Kedatangan Arung Palakka disambut gembira oleh Belanda karena kini mereka mempunyai sekutu dalam menghadapi Gowa. Belanda lalu mengizinkan Arung Palakka berdiam di Batavia.

Sementara itu, ketegangan antara Gowa dan VOC tak kunjung berakhir. Pada 1662, kapal de Walvis milik Belanda memasuki kawasan perairan Kerajaan Gowa dan dikejar oleh pasukan negeri itu. Kapal Belanda berhasil dikandaskan dan Gowa menyita 16 meriam yang ada di dalamnya. Belanda menuntut pengembalian meriam-meriam itu, tetapi ditolak oleh Gowa karena kapal tersebut telah melanggar kedaulatan wilayahnya. Pada 24 Desember 1664 saat malam hari, kapal de Leeuwin milik Belanda dengan seenaknya memasuki kawasan perairan Gowa. Kapal itu berhasil dikaramkan dan 162 awaknya yang masih hidup ditawan.[532] Perselisihan juga terjadi dengan Ternate (salah satu sekutu VOC) yang menyerahkan Pulau Muna secara sepihak kepada Sultan Buton tanpa persetujuan Gowa, padahal pulau itu berada di bawah kekuasaan Gowa. Belanda mengutus Cornelis Kuyff beserta 14 anak buahnya memeriksa kapal *De Leeuwin* yang kandas. Namun, karena dilakukan tanpa seizin Gowa, mereka dikepung oleh pasukan Gowa dan dipaksa menyerah. Akibat menolak

532. Sekitar 40 orang lainnya mati tenggelam karena melompat dari kapal. Mereka tampaknya takut ditawan oleh Gowa.

menyerahkan diri, mereka semua dibinasakan. Sesudah itu, beberapa kali Belanda mengirimkan utusan mengajak berdamai, tetapi ditolak oleh sultan.

Ketegangan makin memuncak pada 1665 saat Sultan Hasanuddin membatalkan seluruh perjanjian dengan VOC. Semenjak saat itu, banyak kapal VOC yang diserang oleh orang-orang Makassar. Pada 12 Januari 1666, Gowa mengusir seluruh orang Belanda yang ada di negerinya. Guna mengatasi hubungan yang memburuk ini, Gubernur Jenderal Joan Maetsuycker mengirim wakil-wakilnya membawa surat dan uang senilai 190.433 Gulden demi melunakkan hati Sultan Hasanuddin. Ini merupakan bagian strategi Belanda yang akan menggunakan sikap lunak bila mereka belum siap berperang. Sultan Hasanuddin ternyata menolak semua hadiah itu.

Karena sikap permusuhan Buton terhadap Gowa, Sultan Hasanuddin memutuskan menyerangnya dengan kekuatan 700 kapal perang dan 20.000 prajurit di bawah pimpinan Karaeng Bontomaranu. Selain itu, Gowa juga mendapat dukungan Sultan Bima dan Luwu. Akibat hubungan yang makin buruk antara kedua belah pihak, VOC yang diwakili Dewan Hindia (*Raad van Indie*) pada 5 Oktober 1666 memutuskan pengerahan ekspedisi militer ke Gowa. Pimpinan ekspedisi ini awalnya hendak diserahkan kepada Johan van Dam, tetapi ia menolaknya karena sudah hampir memasuki masa pensiun dan mengetahui betapa kerasnya medan di sana. Akhirnya, pimpinan dilimpahkan kepada seorang perwira bernama Cornelis Janzoon Speelman. Ia adalah mantan gubernur Belanda di Koromandel (India). Waktu itu, ia dipecat dari jabatannya karena menjual secara ilegal sebuah berlian yang mahal harganya. Dengan demikian, pelimpahan tanggung jawab misi tersebut tentu saja merupakan kehormatan yang besar bagi Speelman, sehingga ia bertekad melaksanakan tugasnya sebaik mungkin. Pada 23 November 1666, gubernur jenderal menganugerahkan kepadanya wewenang sebagai laksamana kapal-kapal perang VOC yang siap bertolak ke Gowa.

Belanda mengerahkan kapal perangnya sebanyak 21 buah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pucuk pimpinan bagi ekspedisi ini adalah C. J. Speelman, wakilnya adalah Dankert van der Straaten. Di dalam armada itu ikut serta pula Kapten Christiaen Poleman dan Maximilliaen de Jong. Arung Palakka beserta anak buahnya tentu saja dilibatkan dalam ekspedisi itu. Mula-mula, mereka akan melakukan provokasi di Sombaopu dengan tujuan menakut-nakuti orang Makassar. Bila gagal, VOC akan turun ke darat dan menyerang kawasan-kawasan yang pertahanannya

lemah. Setelah itu, mereka akan berlayar ke Buton dan mengadakan perjanjian dengan penguasa Buton. Keputusan ini memang dirasa tepat karena pada saat itu Kerajaan Buton sedang bermusuhan dan mengalami tekanan berat dari Gowa.

iv. Perang Makassar

Pada 19 Desember 1666, armada Belanda tersebut sampai juga ke Sombaopu. Mereka hendak menggertak Kerajaan Gowa dengan mengajukan berbagai tuntutan, antara lain menuntut ganti rugi atas orang-orang Belanda yang dibunuh oleh orang-orang Makassar. Selain itu, para pembunuhnya harus diserahkan kepada Belanda. Sultan Hasanuddin menolak tuntutan tersebut. Oleh karena itu, Belanda menembakkan meriam-meriamnya ke Sombaopu yang dibalas oleh pasukan Gowa pada 21 Desember 1666. Speelman menaikkan bendera merah sebagai tanda pernyataan perang kepada Gowa. Berkobarlah apa yang disebut Perang Makassar.

Sesuai dengan strategi yang telah disusun sebelumnya, Speelman menggerakkan armadanya ke selatan menyusuri pantai Gowa guna mencari daerah yang lemah pertahanannya. Pasukan Belanda tiba di Bantaeng pada 25 Desember 1666 dan mendarat di sana. Pihak Gowa dengan gagah berani mempertahankan daerah yang terkenal sebagai lumbung makanan bagi Gowa tersebut. Pertempuran yang dahsyat di Bantaeng menelan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, bahkan Arung Palakka sendiri terluka. VOC akhirnya berhasil merebut Bantaeng dan membakar kota tersebut sampai habis. Karena kebenciannya yang meluap-luap terhadap orang Makassar, Belanda memusnahkan pula beberapa puluh desa yang ada di sekitar Bantaeng dan membakar berton-ton beras. Sesudah melampiaskan amarahnya, VOC beserta sekutunya bergerak ke Buton dan tiba di sana pada 31 Desember 1666.

Kedatangan mereka sungguh tepat karena Buton saat itu sedang dikepung oleh pasukan Gowa di bawah pimpinan Karaeng Bontomaranu. Apabila Belanda datang terlambat, kemungkinan Buton sudah jatuh ke tangan Gowa. Kala itu, pasukan Buton bertahan dalam benteng yang kuat dan baik letaknya. Secara diam-diam Arung Palakka turun ke darat dan masuk ke benteng Buton melalui jalan rahasia. Ia menemui Sultan Buton dan menyusun strategi mengalahkan Gowa. Disepakati bahwa meriam-meriam Buton akan secara serentak menembaki pasukan Gowa bersamaan dengan meriam-meriam VOC yang telah mengepung pasukan Gowa dari selatan.

Salah satu kelemahan pasukan Gowa terletak pada keanekaragaman suku bangsanya, antara lain ribuan pasukan Bugis yang kampung halamannya pernah

ditaklukkan oleh Gowa. Mereka sebenarnya sangat menanti-nantikan kedatangan Arung Palakka yang diharapkan memimpin pembebasan tanah airnya dari pendudukan Gowa. Oleh karenanya, Arung Palakka menyebarkan berita mengenai kepulangan dirinya kepada pasukan Bugis yang bergabung dengan angkatan perang Gowa. Mendengar berita itu, mereka sangat gembira dan membelot dari pasukan Gowa guna bergabung dengan Arung Palakka. Pasukan Bugis (Bone) yang jumlahnya kurang lebih sepertiga angkatan perang Gowa berbalik melawan orang-orang Makassar begitu mendengar kembalinya pemimpin mereka tersebut. Hal ini masih ditambah pula dengan membelotnya pasukan Gowa yang berasal dari suku Mandar yang tidak merasa wajib membela panji-panji Kerajaan Gowa. Tidak mengherankan apabila kekacauan timbul di tengah-tengah pasukan Gowa, sehingga mereka mengalami kekalahan telak. Tembakan meriam bertubi-tubi ditambah membelotnya pasukan Bugis dan Mandar menghancurkan pasukan Gowa yang dipimpin Karaeng Bontomaranu[533] tersebut. Para pemimpinnya juga banyak yang ditawan musuh, seperti Karaeng Bontomaranu sendiri, Sultan Bima, Datu Luwu, dua orang raja dan bangsawan Mandar, serta beberapa kerabat Karaeng Bontomaranu. Empat ratus orang prajurit Makassar yang berbadan kuat ditawan dan dijadikan budak, sementara 5.000 orang lainnya dibawa ke suatu pulau di Selat Buton dan dibiarkan mati kelaparan di sana. Kekalahan pasukan Gowa di Buton ini terjadi pada 3 Januari 1667.

Belanda mempergunakan kesempatan ini untuk meminta imbalan dari Sultan Buton dengan memaksanya menandatangani perjanjian yang sesungguhnya merugikan Buton sendiri. VOC juga memberikan imbalan bagi sekutu-sekutunya yang telah membantu mengalahkan Gowa. Sementara itu, setelah mengalami kekalahan, Sultan Hasanuddin memperkuat pertahanan di negerinya. Bantaeng yang pernah dihancurkan oleh Belanda diperkuat lagi. Untuk mencegah agar Arung Palakka tidak menguasai Bone, Sultan Hasanuddin pada Februari 1667 mengangkat mantan Raja Bone, La Maddaremmeng, yang sebelumnya pernah dikalahkan dan ditawan oleh Gowa, sebagai wakil Kerajaan Gowa di Bone. Namun, karena rakyat Bone sudah telanjur bergolak sedemikian hebatnya setelah kedatangan Aru Palakka, upaya ini tidak sanggup menyelamatkan kekuasaan Gowa atas Bone.

533. Karaeng Bontomaranu ini kelak bergabung dengan Karaeng Galesong membantu Trunajaya dari Madura (lihat bagian tentang Madura) dalam pemberontakannya. Ada pula pendapat bahwa Karaeng Bontomranu dan Karaeng Galesong adalah orang yang sama.–Lihat *Sultan Hasanuddin Menentang V.O.C*, halaman 166.

Setelah mengalahkan Gowa di Buton, VOC beserta sekutu-sekutunya mulai mengarahkan serangannya ke Sombaopu, ibu kota Kerajaan Gowa. Speelman menyerang Bantaeng yang sebelumnya sudah pernah dihancurkannya pada 7 Juli 1667. Pasukan Gowa yang berada di sana dipimpin oleh adik Sultan Hasanuddin, I Atatojeng Kare Tulolo Karaeng Bonto Majannang, beserta bangsawan Gowa lainnya. VOC berhasil merebut kota ini dan menghancurkannya untuk kedua kalinya. Selanjutnya, armada VOC melanjutkan perjalanannya ke Sombaopu dengan membumihanguskan Jeneponto terlebih dahulu. Speelman tiba di perairan Sambaopu pada 13 Juli 1667. Sekali lagi, Speelman menuntut agar orang-orang Makassar yang membunuh orang-orang Belanda di kapal Leeuwin diserahkan kepadanya. Tuntutan ini kembali ditolak oleh Sultan Hasanuddin.

Sebagai persiapan menggempur Gowa, Arung Palakka mengirimkan beberapa utusan guna membujuk Raja Soppeng, Barru, Nepo, serta Tanete agar bersatu padu melawan Gowa dan bergabung dengan pasukannya. Raja-raja bersuku Bugis itu akan diajak bersama-sama menghalau orang-orang Makassar dari daerah Bugis, seperti Mandalle, Segeri, Labbakkang, Pangkajene, hingga Maros. Mereka akan menyerang Sombaopu dari arah utara dan timur. Sementara itu, pasukan Arung Palakka yang dibantu Belanda di bawah pimpinan Kapten Poleman akan menyerbu Sombaopu dari arah selatan. Selanjutnya, pasukan gabungan Buton dan Ternate dengan perahu kora-koranya bersama armada induk VOC yang dipimpin Speelman akan menyerang dari arah laut atau barat Gowa.

Meskipun demikian, selama beberapa hari pasukan VOC berdiam diri di perairan Gowa dan tidak berani bergerak sebelum kedatangan pasukan Bugis yang dipimpin Arung Palakka. Pada saat bersamaan, datang pula sekutu Belanda dari Ternate dengan kekuatan 19 kapal kora-kora yang membawa 15.000 pon mesiu dan Buton mengerahkan 24 perahu yang mengangkut 1.000 prajurit. Menilik kondisi di atas, tampak jelas bahwa tanpa bantuan pasukan yang berasal dari sesama kerajaan di Kepulauan Nusantara itu, VOC tidak akan sanggup memenangkan perang melawan Gowa. Ini merupakan bukti keampuhan siasat *divide et impera* Belanda.

Gowa sendiri sebelumnya telah memperkuat benteng-benteng mereka, seperti Sombaopu (benteng utama), Ujung Tanah, Ujung Pandang, Pannakukang, Garassi, Galesong, Barombong, Gowa, dan lain sebagainya. Pada 19 Juli 1667, terjadi baku tembak meriam yang dahsyat sehingga Belanda menghabiskan kurang lebih sepertiga

persediaan amunisinya. Oleh karena itu, keesokan harinya Speelman memerintahkan agar tidak menembakkan meriam seperti sehari sebelumnya karena dikhawatirkan persediaan mesiu Belanda tidak cukup. Pada hari-hari selanjutnya, armada Belanda hanya bergerak ke utara dan selatan untuk membingungkan pasukan Gowa sambil membakar beberapa kawasan pemukiman di tepi pantai.

Pertempuran yang sebenarnya baru dimulai sejak kedatangan Arung Palakka beserta pasukannya. Pada 18 Agustus 1667, Arung Palakka mulai melancarkan serangan terhadap pertahanan Gowa yang berpusat di sebelah utara Benteng Galesong. Speelman pada pertempuran ini nyaris terbunuh oleh tembakan peluru meriam Gowa. Arung Palakka dapat merebut medan pertahanan tersebut, tetapi dengan segera harus meminta bala bantuan karena tiba-tiba saja muncul pasukan Gowa yang sangat besar jumlahnya. Belanda segera mengirimkan bala bantuannya, tetapi pasukan gabungan Bugis dan VOC ini terus terdesak karena datangnya gelombang pasukan Gowa yang bertubi-tubi.

VOC beserta sekutu-sekutunya menghimpun kekuatan dan berupaya merebut Benteng Barombong. Pada 22 hingga 23 Oktober 1667 malam hari, Arung Palakka berhasil menduduki benteng tersebut. Kerajaan Gowa mulai terdesak dan wilayahnya makin banyak yang diduduki musuh. Di tengah-tengah kondisi semacam itu, VOC menawarkan gencatan senjata selama tiga hari agar masing-masing pihak berkesempatan menghimpun kekuatannya kembali. Belanda memanfaatkan situasi Gowa yang terjepit itu untuk menyelidiki kondisi Kerajaan Gowa. Mereka berniat memikat bangsawan-bangsawan Gowa yang sudah tidak berniat meneruskan peperangan. Akhirnya, beberapa bangsawan Gowa, seperti Karaeng Laiya dan Karaeng Bangkala, dapat ditarik agar memihak Belanda dan mengkhianati negerinya sendiri.

v. Perjanjian Bungaya

Karena terus menerus mengalami kondisi yang kurang menguntungkan, Gowa berhasil dipaksa menandatangani perjanjian di sebuah desa bernama Bungaya pada 18 November 1667. Itulah sebabnya, perjanjian ini dinamakan Perjanjian Bungaya. Perjanjian tersebut memuat 30 pasal yang pokok isinya adalah sebagai berikut.

(1) Menyetujui isi perjanjian yang diadakan di Batavia antara wakil Gowa (Karaeng Popo) dan VOC.

(2) Semua pegawai bangsa Eropa dan VOC yang ada di Sambaopu dan sekitarnya–baik yang sudah lama atau baru berdiam di sana–harus diserahkan kepada VOC.

(3) Seluruh peralatan, uang, meriam, dan barang-barang lain yang dirampas oleh Gowa dari kapal de Walvis dan de Leuwin harus diserahkan kepada Belanda.

(4) Orang-orang Makassar yang melakukan pembunuhan terhadap orang Belanda harus dihukum di hadapan Residen Belanda.

(5) Utang-utang kepada VOC harus dilunasi.

(6) Orang-orang Portugis dan Inggris harus meninggalkan Gowa sebelum akhir tahun tersebut. Selanjutnya, orang-orang asing selain VOC tidak diperkenankan berdagang di Gowa. Kerajaan Gowa juga tidak boleh menerima surat atau utusan asing apapun.

(7) Hanya Belanda saja yang diperbolehkan memasukkan atau menjual barang ke Gowa.

(8) Belanda dibebaskan dari seluruh bea masuk dan pengangkutan barang yang hendak dijualnya di Gowa.

(9) Orang-orang Makassar hanya boleh berlayar ke daerah-daerah seperti Bali, Jawa, Batavia, Banten, Jambi, Palembang, Johor, dan Kalimantan dengan meminta surat izin berlayar dari VOC terlebih dahulu. Semua kapal yang tidak membawa surat semacam itu akan disita barang bawaannya. Sementara itu, orang-orang Makassar dilarang berlayar ke Bima, Solor, Timor, dan kawasan di sebelah timur Selat Salayar, ke sebelah utara dan timur Kalimantan, serta ke Mindanao dan pulau-pulau sekitarnya.

(10) Benteng-benteng Gowa seperti Barombong, Pannakukang, Garassi, Mariso, dan lain sebagainya harus dirubuhkan.

(11) Benteng Ujung Pandang di sebelah utara harus dikosongkan dan diserahkan pada Belanda.

(12) Mata uang VOC diterima sebagai alat pembayaran yang sah di Gowa.

(13) Raja beserta para pembesar Gowa harus menyerahkan 1.000 budak pria dan wanita yang muda serta sehat. Budak-budak itu boleh ditukar dengan meriam, emas, atau uang yang jumlahnya setara. Separuhnya sudah harus dilunasi pada Juni 1668, sementara sisanya paling lambar dibayarkan pada berikutnya.

(14) Gowa tidak boleh lagi campur tangan dengan urusan Kerajaan Bima.

(15) Kerajaan Gowa harus menyerahkan Raja Bima, Dompu, Tambora, dan Sanggar beserta para pengikutnya, yakni orang-orang Bima yang telah membunuh orang-orang VOC guna mendapatkan hukuman yang setimpal. Karaeng Bontomarannu juga harus diserahkan kepada Belanda.

(16) Gowa melepaskan haknya atas Buton dan melepaskan seluruh orang Buton yang telah mereka tawan.

(17) Gowa melepaskan haknya atas Kepulauan Sula dan juga wilayah Kesultanan Ternate lainnya.

(18) Gowa memerdekakan kerajaan-kerajaan Bugis yang dahulu dikuasainya, seperti Bone, Soppeng, dan lain sebagainya. Raja Soppeng, La Tenribali, beserta keluarganya dan orang-orang Bugis yang pernah ditawan harus dibebaskan seluruhnya.

(19) Kerajaan Gowa mengakui Raja Laiya, Bangkala, Turatea, dan Bajeng sebagai daerah yang merdeka.

(20) Daerah-daerah yang telah direbut oleh VOC beserta sekutu-sekutunya akan tetap menjadi milik Belanda.

(21) Gowa melepaskan haknya atas negeri Wajo, Bulobulo, dan Mandar, yang dianggap turut bersalah karena melawan VOC. Selanjutnya, negeri-negeri tersebut akan diperlakukan sesuai kehendak VOC.

(22) Orang-orang Makassar yang hendak berkunjung ke negeri-negeri Bugis atau Turatea dan demikian pula sebaliknya harus membawa surat jalan dari rajanya. Tanpa surat semacam itu, mereka harus ditolak masuk dan diperintahkan untuk kembali ke negerinya.

(23) Sesuai dengan pasal 6 perjanjian ini, pemerintahan Gowa wajib menutup kerajaannya bagi orang asing selain Belanda. Apabila Gowa tidak sanggup menghalaunya maka ia boleh meminta bantuan Belanda, yang selanjutnya diakui sebagai pelindung Gowa. Lebih jauh lagi, Gowa akan membantu VOC dalam memerangi musuh-musuhnya.

(24) Gowa akan membuat suatu perjanjian perdamaian, persahabatan, dan persekutuan yang berlaku sepanjang masa serta raja-raja Ternate, Tidore, Bacan, Buton, Bugis, Bone, Soppeng, Luwu, Turatea, Laiya, Bajeng, dan lain sebagainya termasuk pula ke dalamnya.

(25) Apabila terjadi perselisihan di antara raja-raja itu, mereka tidak boleh saling berperang, melainkan harus meminta bantuan VOC untuk menengahi dan menyelesaikannya. Apabila ada pihak yang tidak bersedia mematuhi keputusan yang telah ditetapkan maka seluruh anggota persekutuan akan bersatu padu melawannya.

(26) Dua orang tokoh terkemuka dari Dewan Adat Gowa (Bate Salapang), seperti Karaeng Tallo, Karaeng Langkese, Karaeng Popo, Karaeng Garassi, atau Karaeng Karunrung, harus datang ke Batavia untuk meminta pengesahan perjanjian ini pada gubernur jenderal. Bila perlu gubernur jenderal dapat meminta dua orang anak raja sebagai sandera yang dapat diganti dengan orang lain setelah setahun.

(27) Orang-orang Inggris beserta barang-barangnya akan dipulangkan oleh Belanda.

(28) Apabila dalam waktu sepuluh hari Raja Bima dan Karaeng Bontomaranu tidak diserahkan kepada Belanda maka putra kedua orang itu akan dijadikan sandera.

(29) Gowa harus membayar pampasan perang pada VOC sebesar 250.000 Ringgit, yang akan dibayar lunas dalam waktu lima tahun. Pembayaran itu boleh diganti dengan barang, emas, atau perak yang jumlahnya setara.

(30) Perjanjian ini disahkan oleh raja beserta pembesar Gowa, Laksamana Speelman yang mewakili VOC, dan semua raja-raja yang termasuk dalam persekutuan tersebut.

Perjanjian di atas sungguh merugikan Gowa. Pasal-pasal 6 dan 7 dimaksudkan untuk menciptakan ketergantungan Gowa secara ekonomi kepada kompeni. Sedangkan pasal 9 ditujukan untuk mengurung Gowa dalam hal mata pencaharian mereka. Sementara itu, pasal 25 tampaknya bermaksud untuk menciptakan ketergantungan politis bagi berbagai kerajaan utama di Indonesia timur. Setelah ditandatanganinya perjanjian ini, posisi Gowa sebagai salah satu kekuatan yang menentukan di belahan timur Kepulauan Nusantara menjadi pudar. VOC kemudian menduduki Benteng Ujung Pandang dan namanya diubah menjadi Fort Rotterdam.

Ternyata Perjanjian Bungaya ini belum mengakhiri pertempuran antara VOC dan Gowa. Setelah itu masih terjadi lagi berbagai pertempuran antara kedua belah pihak hingga jatuhnya Benteng Sombaopu pada 24 Juni 1669. Karena tidak sudi menyerah pada penjajah, Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari takhtanya pada 29 Juni

1669 dan digantikan oleh putranya sebagai Raja Gowa ke-17, I Mappasomba Daeng Nguraga, yang dikenal pula sebagai Sultan Amir Hamzah. Semenjak saat itu, Gowa benar-benar bertekuk lutut. Sultan Hasanuddin sendiri mangkat kurang lebih setahun kemudian, atau tepatnya pada 12 Juni 1670, dalam usia 39 tahun. Oleh rakyat Gowa ia diberi gelar anumerta Tuammenang ri balla'-pangkana.

Sebagai penyeimbang, akan dicantumkan pula bagaimana kesan Speelman terhadap Sultan Hasanuddin.[534] Menurut sumber Belanda tersebut, sultan digambarkan penggemar minuman keras dan berjudi (*in sijne jonckheijt is hij genegen geweest tot drincken en speelen*).[535] Speelman menggambarkan pula sultan "tidak berbuat banyak dalam urusan-urusan penting, hanya mengecap sedikit pendidikan semasa kecilnya, akibatnya ia tidak terlalu pintar, kurang bisa memimpin atau mengambil keputusan, tidak banyak menggembeleng diri sehingga menjadi lembek dan tidak tabah menghadapi penderitaan, sangat kikir..."[536] Dengan demikian, kesan Speelman secara umum terhadap Sultan Hasanuddin bernuansa negatif. Tetapi sesungguhnya, Sultan Hasanuddin dan juga penguasa Gowa lainnya hanyalah penguasa di atas kertas. Hal ini beda dengan citra yang hendak ditimbulkan oleh penulis biografi pahlawan nasional yang menggambarkan sultan memimpin sendiri angkatan perangnya. Padahal urusan kenegaraan dan masalah-masalah penting lainnya lebih banyak ditangani serta diputuskan oleh Karaeng Sumanna beserta Karaeng Karunrung. Oleh karenanya, terjadi perbedaan pencitraan sehingga perlu penelitian lebih lanjut dari para sejarawan untuk menemukan suatu gambaran yang lebih objektif.

vi. Kerajaan Gowa Setelah Sultan Hasanuddin

Raja-raja Gowa setelah Sultan Hasanuddin merupakan raja-raja lemah. Pemerintah kolonial Belanda makin banyak ikut campur dalam roda pemerintahan Gowa. Sultan-sultan Gowa diwajibkan menandatangani kontrak politik saat mereka dinobatkan. Arung Palakka pada saat itu sedang menanjak pamornya. Para pembesar Gowa merancang insiden guna mempermalukan Arung Palakka dengan menculik tiga orang dayangnya dan melarikannya ke Mandar. Menanggapi hal itu, Arung Palakka melaporkannya kepada Belanda di Benteng Fort Rotterdam pada 2 Juli 1672. Namun, Belanda menyarankannya untuk bersabar dan menghindari pertumpahan darah yang tak perlu. Sultan Amir Hamzah mengirim utusan ke Mandar guna memulangkan

534. lihat buku *Syair Perang Mengkasar*, halaman 145–146.
535. catatan kaki no 7, buku *Syair Perang Mengkasar*, halaman 146.
536. *Syair Perang Mengkasar*, halaman 146.

dayang-dayang itu, tetapi gagal. Akibatnya, Arung Palakka merasa kecewa dan kembali ke Bone. Namun, sekembalinya di Bone ia menghadapi perlawanan Arung Timurung yang menjalin persekutuan dengan beberapa pembesar Gowa. Pemberontakan Arung Timurung berhasil digagalkan dan Arung Palakka menekan Sultan Amir Hamzah agar memberhentikan para pejabat yang bersekongkol melawannya.

Sultan Amir Hamzah mangkat pada 7 Mei 1674 dan memperoleh gelar anumerta Tumenanga ri Alluk. Ia digantikan oleh saudaranya, Mappaosong Daeng Mangerai Karaeng Bisei, dengan gelar Sultan Muhammad Ali (1674–1677). Sultan Gowa ke-18 itu dikatakan menodai kehormatan Arung Palakka, tetapi tidak ada sumber yang menjelaskannya secara rinci. Peristiwa itu memancing serangan Arung Palakka ke Gowa. Sultan Muhammad Ali terpaksa melarikan diri dan meminta perlindungan Belanda.

Guna mengisi kekosongan kekuasaan di Gowa, Sultan Abdul Jalil Tumenganga ri Lakiung (1677- 1709) dinobatkan sebagai Sultan Gowa ke-19. Meskipun demikian, Sultan Muhammad Ali masih merasa sebagai Sultan Gowa yang sah. Selama berada di bawah perlindungan VOC, Sultan Muhammad Ali menggunakan kesempatan tersebut untuk menjalin hubungan dengan sisa-sisa laskar Gowa di bawah pimpinan Karaeng Galesong dan Daeng Tulolo. Ia hendak mengundang mereka kembali ke Gowa dan mengorganisasi perlawanan terhadap Arung Palakka, bukannya VOC. Arung Palakka sangat marah mendengar hal ini dan menemui Gubernur Cops di Benteng Fort Rotterdam. Ia menyatakan tidak sudi tinggal senegeri dengan Sultan Muhammad Ali jikalau Belanda tetap melindunginya, lebih baik ia hengkang meninggalkan Sulawesi Selatan dan menetap di Batavia. Belanda yang masih mengharapkan dukungan Arung Palakka lantas mengasingkan Sultan Muhammad Ali ke Batavia pada 15 September 1678.

Arung Palakka kemudian menikahkan kerabatnya dengan keluarga Kerajaan Gowa. Kemenakannya yang bernama La Patau dinikahkan dengan Siti Maryam Karaeng Patukangan, putri Sultan Abdul Jalil. Putra mereka, La Pareppa TosappewaliE, kelak menjadi Raja Gowa ke-20. Ia lalu menggantikan saudaranya, La Padangsajati, menjadi Raja Bone ke-18 dari 1720–1724. Bersamaan dengan itu, ia merangkap pula sebagai Raja Soppeng ke-17. Demikianlah, melalui perkawinan itu justru kerajaan Gowa, Bone, dan Soppeng menjadi makin erat.

Sultan Abdul Jalil sendiri sebenarnya kurang disukai kalangan rakyat dan bangsawan Gowa karena mereka menganggap pengangkatannya semata-mata

dilakukan atas kehendak VOC dan Arung Palakka tanpa persetujuan *Bate Salapanga* (Dewan Adat Kerajaan Gowa). Sebagai wujud protes, mereka berbondong-bondong meninggalkan Gowa menuju Makassar dan bermukim di sebelah barat Fort Rotterdam. Tempat kediaman baru inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Beru. Pada Mei 1683, mereka bersedia mengakui Sultan Abdul Jalil atas upaya Arung Palakka. Sebelum diasingkan ke Batavia, Sultan Muhammad Ali sebenarnya berupaya merebut kembali kedudukannya dan membujuk Sultan Abdul Jalil agar menyerahkan benda pusaka Kerajaan Gowa. Sebagai gantinya, ia diperkenankan menduduki jabatan sebagai *Karaeng* (Raja) Sanrabone. Tawaran ini sebenarnya cukup menggiurkan mengingat lemahnya dukungan rakyat. Pengungsian besar-besaran rakyat Gowa yang merupakan kehinaan bagi Sultan Abdul Jalil menjadi sumber ejekan di antara sesama penguasa kerajaan Sulawesi Selatan lainnya.[537]

Meskipun demikian, Sultan Abdul Jalil menolak mentah-mentah tawaran itu. Ia menyatakan bahwa yang meletakkan benda pusaka Gowa ke tangannya adalah Arung Palakka dan VOC, mereka tidak memintanya diserahkan kepada Sultan Muhammad Ali. Bekas Sultan Gowa yang tersingkir itu belum berputus asa dan kembali mengirim surat dengan nada lebih tegas kepada Sultan Abdul Jalil. Ia menyangkal bahwa Arung Palakka yang memberikan pusaka itu kepada Abdul Jalil dan menuntut agar benda-benda itu segera diserahkan kepadanya. Sultan Abdul Jalil tetap bergeming dan benda pusaka Gowa pun dipertahankannya.

Menjelang masa akhir pemerintahannya, terjadi perselisihan dengan Raja Bone bernama La Patau, yang menggantikan Arung Palakka. Ketika itu, La Padangsajati, cucu Abdul Jalil dan putra La Patau, meninggalkan Bone karena masalah wanita dan meminta suaka kepada Abdul Jalil. La Patau ingin agar La Padangsajati dikembalikan dan diadili sesuai adat Bone, tetapi Abdul Jalil tak mengizinkannya. Karenanya, La Patau merasa dilecehkan dan hampir saja pecah perang antara Gowa dan Bone. Perang tidak terjadi karena Sultan Abdul Jalil mangkat di Lakiung pada 18 September 1709.

Sebagai pengganti Sultan Abdul Jalil, terpilih La Pareppa TosappewaliE sebagai Raja Gowa ke-20 dengan gelar Sultan Ismail (1709 –1711). Ia tercatat menandatangani kontrak dengan VOC pada 1710 yang isinya mengharuskan Gowa merobohkan segenap benteng pertahanannya. Sultan Ismail tetap menolak menyerahkan La Padangsajati yang telah mendapat suaka di Gowa semenjak pemerintahan Sultan

537. Lihat *Warisan Arung Palakka*, halaman 247.

Abdul Jalil. Penolakan tersebut kali ini berbuntut serangan Bone terhadap Gowa sehingga pecahlah perang antara ayah dan anak. Oleh karena itu, orang-orang Bugis menyebutnya sebagai *perang seajing*, sedangkan orang Makassar menyebutnya *bundu pammanakang*, yang terjadi pada 19 Agustus 1710. Perang ini sebenarnya tak perlu terjadi apabila Gowa dan Bone menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah satu saudara. Belanda memancing di air keruh dalam pertikaian keluarga ini; mereka membantu Bone mengalahkan Gowa. Sultan Ismail dipaksa menandatangani perjanjian yang merugikan Gowa; Gowa dibebani pembayaran ongkos peperangan, menyerahkan meriam-meriam besar, merobohkan tembok-tembok pertahanan, mengembalikan daerah-daerah Sudiang, Kajang, beserta Selayar pada VOC, memohon ampunan kepada Gubernur Jenderal VOC di Batavia, dan lain sebagainya.

Sultan Ismail mundur karena dipecat oleh *Bate Salapanga* dan digantikan oleh I Mappaurangi Sultan Sirajuddin Tumenanga ri Pasi (pemerintahan pertamanya pada 1711–1724) selaku raja Gowa ke-21. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Raja Tallo. Penobatannya sebagai sultan ternyata memancing berbagai intrik politik di kalangan bangsawan Gowa, antara lain Karaeng Bontolangkasa yang merasa berhak atas takhta Gowa. Itulah sebabnya, Sultan Sirajuddin mengundurkan dirinya dan kembali ke Tallo. Guna mengisi kekosongan kekuasaan, I Manrabbia Karaeng Kanjilo Sultan Najamuddin (1724–1729), putra Sultan Sirajuddin, dinobatkan sebagai Raja Gowa ke-22. Meskipun demikian, I Mappaurangi diangkat kembali sebagai Raja Gowa ke-23 pada 1729. Namun, ia mengundurkan diri kembali pada 1735. I Mappaurangi mangkat pada 20 Juni 1739 dan dianugerahi gelar Tumammalinga ri Gaukanna (Yang Kembali ke Singgasananya).

Setelah Sultan Sirajuddin mengundurkan dirinya, ia digantikan oleh I Mallawagau yang bergelar Sultan Abdul Khair Almansyur (1735–1742). Raja Gowa ke-24 ini naik takhta saat usianya masih 8 tahun sehingga Karaeng Bontomajannang diangkat Mangkubumi (pendamping raja dalam menjalankan pemerintahan) Kerajaan Gowa sebagai walinya. Pada masa pemerintahannya, April 1739, Karaeng Bontolangkasa beserta La Maddukelleng, *Arung Matoa* (Raja) Wajo, menyerang kedudukan VOC di Ujung Pandang dan mengepungnya. Tetapi Sultan Abdul Khair Almansyur malah meninggalkan istananya dan meminta perlindungan VOC di Benteng Ujung Pandang. Sementara itu, benda-benda pusaka kerajaan diamankan oleh mangkubumi yang turut mengungsi dari ibu kota Gowa. Karaeng Bontolangkasa lantas menduduki ibu

kota Gowa, mendongkel I Mallawagau dari kedudukannya, dan mengangkat dirinya sendiri sebagai sultan pada April 1739.

La Maddukelleng meminta agar para penjabat Gowa yang tidak turut menyingkir mengakui Karaeng Bontolangkasa sebagai sultan. Alasannya, sultan yang meninggalkan rakyatnya harus dianggap telah meletakkan jabatannya. Kendati demikian, sebagian petinggi Gowa menolaknya karena pengangkatan sultan harus disetujui oleh mangkubumi. Tetapi La Maddukelleng menyanggahnya seraya mengatakan bahwa mangkubumi turut melarikan diri sehingga ia selayaknya dipecat pula dari kedudukannya. Keberatan lainnya adalah dibawanya pusaka kerajaan (*kalompoang*) oleh Mangkubumi Gowa, padahal tanpa adanya benda-benda tersebut seseorang tidak diakui sebagai raja yang sah. Meskipun demikian, penobatan Karaeng Bontolangkasa tetap dilaksanakan dengan dukungan La Maddukelleng pada 10 April 1739 (sumber lain menyebutkan 18 April 1839).[538] Ketiadaan *kalompoang* saat penobatan Karaeng Bontolangkasa yang kemudian bergelar Sombaya membuatnya kurang mendapat dukungan rakyat. Itulah sebabnya, namanya tidak dicantumkan dalam urutan raja-raja Gowa. Terdapatnya dua sultan Gowa tentu saja memecah rakyat Gowa.

Mengingat arti penting benda pusaka sebagai sumber legitimasi bagi sultan-sultan Gowa, La Maddukelleng menuntut kepada Gubernur Adrian Hendrik Smout agar mengembalikannya ke Gowa. Tetapi gubernur mengelak dan berdalih bahwa yang berwenang melakukannya adalah pemerintah pusat di Batavia. Akibatnya, La Maddukelleng bersama Karaeng Bontolangkasa menyerang Benteng Fort Rotterdam dan kubu pertahanan pasukan Bone yang berada di Bontoala. Mereka membagi pasukannya menjadi dua. Pasukan yang dipimpin Karaeng Bontolangkasa terpukul mundur. Sebaliknya, La Maddukelleng sanggup mendesak musuh-musuhnya hingga ke Kampung Baraya. Karaeng Bontolangkasa hanya didukung oleh sedikit orang Gowa saja sehingga menghadapi kekalahan.

Pada 20 Juli 1739, VOC mengerahkan seluruh kekuatannya dari Fort Rotterdam dan berhasil merebut kembali Jongaya, Mallengkeri, dan Mangasa. Karaeng Bontolangkasa terkena peluru yang ditembakkan pengikutnya sendiri sehingga ia terluka parah. Karaeng Bontolangkasa lantas menyingkir ke Bontoparang dan mengundang La Maddukelleng. Diusulkannya agar La Maddukelleng kembali ke

538. Lihat *Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar Tentang Kerajaan Gowa Pascaperjanjian Bungaya*, halaman 56, juga catatan kaki di buku tersebut nomor 41.

Wajo. Sementara itu, ia sendiri menolak diobati dan memilih mati agar tak ditawan oleh Belanda. Ibu kota Gowa yang sebelumnya diduduki oleh para pengikut Karaeng Bontolangkasa dan La Maddukelleng direbut oleh pasukan gabungan VOC, Bone, Soppeng, Tanete, dan Gowa pada 21 Juli 1739. Di bawah hujan tembakan meriam, pasukan gabungan Gowa (yang pro-La Maddukelleng) dan Wajo berhasil meloloskan diri seluruhnya.

Akibat peperangan ini, ibu kota Gowa luluh lantak dimakan api. Gubernur Adrian Hendrik Smout baru dapat meninggalkan kota tersebut pada 3 September 1739. Sebagian pasukan VOC diperintahkan menjaga sisa-sisa ibu kota Gowa. Dengan tersingkirnya Karaeng Bontolangkasa dan La Maddukelleng, Sultan Abdul Khair Almansyur dikembalikan ke singgasananya, tetapi ia harus menandatangani perjanjian pada 6 Oktober 1740 sebagai berikut.[539]

- Gowa akan menyerahkan sisa-sisa pengikut Karaeng Bontolangkasa beserta sekutunya.
- Gowa diwajibkan membayar biaya perang kepada VOC sebesar 96.000 Ringgit dalam waktu enam bulan dalam bentuk emas, perak, dan budak.
- Daerah Sudiang akan dikembalikan kepada Belanda.
- Ibu kota kerajaan akan dikembalikan kepada Gowa dan Sultan Abdul Khair Almansyur akan dikukuhkan kembali kedudukannya sebagai Sultan Gowa.

Setahun setelah perjanjian di atas (1741), Belanda meminjamkan daerah Kampung Jawa kepada Kesultanan Gowa guna ditanami padi. Sultan Abdul Khair Almansyur mangkat pada 1742 dengan membawa kesedihan karena gagal membawa negerinya mencapai kejayaan seperti sebelum Perang Makassar.

Ia digantikan oleh saudaranya, I Mappababbasa, yang bergelar Sultan Abdul Quddus (1742–1753). Sultan Gowa ke-25 ini menikah dengan Karaeng Ballasari, putri Sultan Bima ke-6, Alauddin Muhammad (1731–1748) dengan Karaeng Tanasanga, putri Sultan Gowa ke-21, Sirajuddin. Putra sulung buah pernikahan dengan putri Bima ini bernama Amas Madina. Sultan Abdul Quddus mangkat secara mendadak pada 1753, konon karena diracun.

Dewan Adat Kerajaan Gowa (*Bate Salapanga*) memilih Amas Madina sebagai penguasa baru dengan gelar Sultan Fakhruddin Abdul Khair (1753–1767)

539. Lihat *Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar Tentang Kerajaan Gowa Pascaperjanjian Bungaya*, halaman 59.

menggantikan ayahnya pada 21 Desember 1753. Tetapi karena baru berusia tujuh tahun, roda pemerintahan kerajaan dijalankan oleh kakek dan sesaligus walinya, Mangkasu mang Karaeng Lempangan. Pada Juni 1758, *Bate Salapanga*–sesuai dengan adat dan tradisi Gowa–menganugerahkan gelar Batara Gowa kepada Amas Madina dengan harapan agar penguasa yang masih muda ini dapat memulihkan kedaulatan kerajaan seperti pada zaman nenek moyangnya tersebut. Seperti yang telah diulas di bagian sebelumnya, semasa Batara Gowa, raja ke-7, Kerajaan Gowa merupakan negeri yang merdeka penuh dan berdaulat.

Karaeng Lempangan wafat pada 1760 dan digantikan oleh Temasongeng Karaeng Katangka, saudaranya. Perwalian terhadap Amas Madina berakhir pada 29 Oktober 1765 karena ia telah dianggap dewasa, yakni mencapai usia kurang lebih 18 tahun. *Bate Salapanga* mengangkatnya secara resmi sebagai Sultan Gowa ke-26 dengan gelar lengkap Sultan Fakhruddin Abdul Khair al-Mansur Baginda Usman Batara Tangkana Gowa. Selama Sultan Fakhruddin memerintah, ia banyak mengalami kekecewaan yang berasal dari keluarganya sendiri maupun Belanda. Saat itu, Belanda banyak melakukan tekanan-tekanan politis terhadap Gowa. Karena kekecewaannya itu, sultan pada 12 Agustus 1766 bertolak meninggalkan Gowa dan pergi ke Bima, kampung halaman ibunya. Para petinggi Gowa gagal membujuknya agar mengurungkan niat meninggalkan Gowa.

Kepergian itu justru memancing kecurigaan VOC karena mengira bahwa sultan hendak menjalin perserikatan rahasia dengan EIC (East India Company), Serikat Dagang Inggris. Memang pada saat itu sedang terjadi persaingan antara VOC dan EIC dalam memperebutkan dominasi perdagangan rempah-rempah. Di samping itu, sultan pernah turut berlayar dengan kapal Cella Bangkahulu ke Lombok, kapal yang berasal dari Bengkulu–salah satu pusat perniagaan Inggris di Kepulauan Nusantara. Belanda mencurigai bahwa sultan hendak membujuk Bima yang telah menjalin hubungan baik dengan VOC agar mengalihkan persahabatannya kepada Inggris. Manuver politik ini dianggap berbahaya oleh Belanda karena bila Bima memutuskan hubungannya dengan VOC, kepentingan-kepentingan Belanda, baik dari segi politik maupun perdagangan, akan terganggu. Akibatnya, pada April 1767 Sultan Fakhruddin yang hendak melarikan diri dari Bima dengan membawa ibunya ditangkap oleh Residen Belanda. Sultan kemudian dibawa ke Batavia dan setelah itu diasingkan ke Kolombo. Sebagai pengisi kekosongan takhta Kerajaan Gowa, Belanda mengangkat

saudara sultan, I Mallisujawa Daeng Ribboko, sebagai penguasa baru dengan gelar Sultan Makduddin (1767–1769). Sultan Gowa ke-27 ini berulang kali meminta kepada Belanda agar saudaranya itu dipulangkan dari Kolombo, tetapi permohonan ini selalu ditolak oleh Belanda sehingga mengecewakan sultan. Sebagai perwujudan rasa kecewanya itu, Sultan Makduddin turun takhta pada 3 Januari 1769 dan selanjutnya berdiam di Barombong.

Bagaimana kehidupan Sultan Fakhruddin selama berada di pengasingannya dapat diketahui dari surat istri sultan bernama Siti Hapipa kepada Gubernur Jenderal VOC di Batavia, tertanggal 3 Januari 1807 dan tiba di Batavia 29 Mei 1807. Surat itu kini menjadi koleksi Universitas Leiden, Belanda, bernomor Cod.Or.2241- I 25 (Klt 21/ no. 526). Surat itu ditulis dalam bahasa Melayu berhuruf Jawi dan menceritakan mengenai kondisi sultan selama berada di Kolombo. Disebutkan bahwa sultan terpaksa berutang karena tunjangannya selama berada di Kolombo sebesar 50 Riyal tidak mencukupi, apalagi menurut surat itu, ia telah memiliki 12 orang anak (6 putra dan 6 putri). Selain tunjangan, sultan menerima jatah beras 30 *parah*, yang juga makin lama dirasa tidak memadai. Oleh karenanya, sultan meminta kepada van de Graaf (Gubernur VOC untuk Sri Lanka, memerintah pada 1785–1794) agar tunjangan itu ditambah. Pemerintah VOC sepakat untuk menambah tunjangannya menjadi 100 Riyal. Surat itu mengabarkan pula mengenai wafatnya sultan saat menghadiri jamuan di kediaman Johan Gerard van Angelbeek, mertua van de Graaf, yang kelak menggantikannya sebagai Gubernur VOC antara 1794–1796. Tetapi di sini tidak ada kecurigaan bahwa sultan diracun sehingga kematiannya boleh dianggap wajar. Sultan setelah menyantap sepotong roti dan minum secangkir teh lalu bangkit berdiri karena merasa badannya kurang sehat. Ia lalu mohon diri kepada tuan rumah dan berbaring pada salah satu kamar di sana. Tidak lama kemudian sultan menghembuskan nafasnya yang terakhir.

Sultan meninggalkan banyak utang sehingga menyulitkan kehidupan keluarganya. Sulitnya kehidupan mereka tampak nyata pada kutipan transliterasi surat Siti Hapipa berikut ini.

> Ya Tuanku, jikalau dihimpuni utang Bagindah kepada Kompeni dan di luar ada kiranya lima ribu riyal tatkala Bagindah meninggal, dan lagi adah antaranya setahun Bagindah meninggal maka Inggiris pun datang mengambil Tanah Selong.[540] Ya

540. Yang dimaksud adalah Sailan atau Sri Lanka.

Tuanku, sudahnya Inggiris memerintah Negeri Selong ini, hamba dan anak cucu hamba terlalu menanggung mudarat dan berutang di dalam negeri sebab tiada mempunyai daya upa[ya]. Tambahan pula anak hamba empat yang laki-laki diambil masuk di dalam pekerjaan Kompeni oleh Tuan orang Inggiris.[541] Maka hamba hendak tiada beri, hamba adah terlalu sangat takut karena hamba di bawah perintahnya. Maka anak hamba keempat itu pun sudah meninggal di dalam pekerjaan juah. Maka anak bininya sekalian diberi tinggal pada hamba ini. Ya Tuanku, hamba serta anak cucu hamba sekalian ini bermohonkan ampun beribu-ribu serta kurnia Tuanku, hamba sekalian ini tiada tertanggung mudarat dan kesukarang di dalam Negeri Selong. Ya Tuanku, jikalau tiada diampuni pada hamba yang piatu sekalian ini niscaya mendapat malu hamba sekalian karena adat di negeri Selong pada sekarang ini jikalau adah orang yang adah utang kepada orang lain maka tiada dinanti lagi melainkan dijual rumah tangganya serta dibubuh dalam kenjarah[542], bukan kepada orang kecil, kepada tuan2 dan raja2 orang te[r]buang pun sudah terlaku yang sedemikian rupa. Maka itu hamba sekalian persembahkan ke bawah Duli Tuan Yang Maha Bangsawan daripada hal utang Paduka Bagindah Batarah Gowah itu. Jangankan hamba sekalian bayar, [untuk] makanpun tiada cukup...[543]

Meskipun gaji atau tunjangannya selama di pengasingan telah dinaikkan, hal itu masih belum mencukupi hingga sultan terpaksa berutang, baik kepada kompeni ataupun orang lain. Guna membayar utangnya, kompeni memotong gajinya sebesar 25 Riyal setiap bulannya. Setelah sultan meninggal, utangnya juga masih bertumpuk-tumpuk. Bila tidak mampu membayarnya, keluarga yang ditinggalkan akan dimasukkan penjara. Apalagi setelah Sri Lanka diambil alih oleh Inggris pada 1796, mereka tidak menerima gaji bulanan lagi. Oleh karenanya, Siti Hapipa mengajukan permohonan agar gubernur jenderal membayar utang mereka serta memindahkan mereka ke Batavia. Surat di atas ditulis dalam bahasa Melayu beraksara Jawi. Pengaruh bahasa Bugis tampak nyata dengan adanya tambahan *g* seperti pada *kesukarang* yang berarti 'kesukaran.'

I Temmassongeng Karaeng Katangka (juga dikenal sebagai I Makkaraeng) diangkat sebagai Raja Gowa ke-28 menggantikan Sultan Makduddin. Raja Gowa yang bergelar Sultan Zainuddin (1769–1778) ini lahir pada 26 Desember 1722.[544] Sebelum

541. Yang dimaksud adalah Inggris.
542. Mungkin yang dimaksud adalah "penjara."
543. Wacana vol. 10 no.2, Oktober 2008, halaman 225–226, dalam artikel berjudul *Sepucuk Surat dari Seorang Bangsawan Gowa*.
544. Lihat *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 102.

menduduki singgasana Kerajaan Gowa, ia pernah menjabat sebagai mangkubumi. Sultan Zainuddin tercatat menandatangani berbagai perjanjian yang diperbaharui antara Kesultanan Gowa dengan VOC pada 30 Agustus 1770. Kedamaian semasa pemerintahan Sultan Zainuddin terusik oleh timbulnya gerakan I Sangkilang yang dipimpin oleh orang yang mengaku dirinya sebagai Batara Gowa (Amas Madina atau Sultan Fakhruddin Abdul Khair–Raja Gowa ke-26) yang diasingkan Belanda ke Sri Lanka. Tokoh bernama I Sangkilang ini berhasil meyakinkan rakyat bahwa dirinya yang berhak atas takhta Gowa. Akibatnya, Sultan Zainuddin diturunkan dari takhtanya oleh para pengikut "Batara Gowa" yang saat itu berhasil menduduki ibu kota Gowa. Sultan Zainuddin menyingkir ke Makassar dan meminta bantuan Belanda. Setibanya di sana, Belanda memberikan sebuah kampung bernama Mattoanging sebagai tempat kediaman sultan beserta keluarganya. Ia kemudian tinggal di sana hingga wafat pada 15 September 1778 dan diberi gelar anumerta Tumenanga ri Mattoanging (Yang Wafat di Mattoanging).

Tokoh yang mengaku sebagai "Batara Gowa" ini masih misterius. Riwayatnya berawal pada 1776 ketika di muara Sungai Sanrobone muncul sebuah perahu layar. Seorang pria tampak duduk di atas balok melintang pada kapal tersebut yang biasa disebut *sangkilang*. Warga setempat menanyakan nama pria tersebut, tetapi ia diam saja. Karenanya, mereka menjulukinya I Sangkilang. Perahu misterius itu terus berlayar hingga kampung Sompu, yang saat itu sedang mengadakan suatu perayaan. Pria yang mengenakan pakaian bangsawan Bugis itu lantas turun dan mengikuti keramaian tersebut. Ia mengambil tempat duduk yang biasa ditempati golongan ningrat. Ditanyakanlah kepada khalayak ramai apakah ada yang mengetahui siapa dirinya. Ketika tak seorangpun kenal padanya, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Batara Gowa yang diasingkan Belanda ke Sri Lanka. Kegemparan segera terjadi dan di antara warga kampung Sompu ada yang langsung percaya sedangkan yang lainnya masih ragu-ragu.

Batara Gowa I Sangkilang berhasil meyakinkan pendengarnya berkat kemampuannya menguraikan nama-nama kerabat dekat Amas Madina. Selain itu, pakaian yang dikenakannya menambah kepercayaan mereka. I Sangkilang mengisahkan bahwa kapal yang membawanya ke Sri Lanka dihantam badai. Ia berhasil berenang menyelamatkan dirinya dan ditolong sebuah perahu. Setelah itu, barulah ia berlayar kembali ke Sanrobone. Bila dicermati antara pengasingan Batara Gowa

Amas Madina dan kemunculan I Sangkilang terdapat selisih waktu sepuluh tahun. Kendati demikian, rakyat Gowa beserta penguasa negeri-negeri kecil di pedalaman mulai mempercayainya dan mengalihkan ketaatan mereka dari Sultan Zainuddin kepada Batara Gowa I Sangkilang. Kenyataan ini mengakibatkan merosotnya wibawa Sultan Zainuddin.

VOC sendiri merasa terancam dengan gerakan Batara Gowa I Sangkilang yang makin bertumbuh itu. Mereka melakukan antisipasi seperlunya. I Sangkilang melancarkan serangan mendadak terhadap VOC, yang menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. VOC sendiri kekurangan tenaga menghadapi I Sangkilang karena pasukannya hanya berjumlah 50 orang. Karena itu, mereka berupaya menggalang dukungan dari orang-orang Bugis dan Makassar. Tetapi upaya VOC ini gagal karena timbul perpecahan di kalangan orang Bugis dan Makassar. Sebagian dari mereka bersedia bertempur melawan I Sangkilang, sedangkan yang lainnya justru menentang. Akhirnya, VOC tak dapat berbuat apa-apa selain menantikan datangnya bala bantuan dari Batavia.

I Sangkilang melancarkan serangannya ke Maros pada Mei 1777 dan berhasil merebutnya. Mereka hanya sanggup beberapa hari saja mempertahankan tempat ini karena diserang oleh laskar Bone di bawah pimpinan panglima perang Kerajaan Bone. Itulah sebabnya, I Sangkilang terpaksa mundur ke Tallo yang saat itu dipimpin oleh seorang ratu bernama Sultana Sitti Saleha. Ternyata Ratu Tallo ini mendukung I Sangkilang. Tak berapa lama kemudian, pasukan gabungan Tanete dan Luwu yang dipimpin oleh Arung Pancana La Tenrissesu (putra Raja Tanete) beserta I Tenrileleang (*Datu* atau Raja Luwu). Akibatnya, I Sangkilang terpaksa meninggalkan Tallo melalui Maros dan bergerak menuju Gowa. Di sana sejumlah besar pengikut I Sangkilang telah menantikan dirinya. Di tengah jalan terjadi pertempuran dan hampir saja I Sangkilang tertangkap.

Pasukan I Sangkilang menyerang ibu kota Gowa pada 7 Juni 1777. VOC tidak sanggup membendung serbuan ini dan laskar Gowa yang masih setia kepada Sultan Zainuddin tak banyak melakukan perlawanan. Akhirnya, ibu kota Gowa didukuki oleh I Sangkilang beserta pengikutnya. Sebelumnya, para pengikut "Batara Gowa" ini telah memecat Sultan Zainunddin sehingga yang bersangkutan terpaksa melarikan diri ke Makassar dan meminta perlindungan Belanda. "Batara Gowa" I Sangkilang dinobatkan dirinya sebagai Raja Gowa. Dukungan rakyat bertambah kuat karena

I Sangkilang berhasil merebut segenap benda pusaka Gowa. Dengan demikian, kedudukannya sebagai raja dianggap sah oleh rakyat.

Walaupun Sultan Zainuddin dengan bantuan VOC beberapa kali berupaya merebut kembali kedudukannya, mereka selalu menemui jalan buntu. Para pendukung I Sangkilang terus bertambah, termasuk yang berasal dari Bone, Soppeng, dan Sidenreng. Bala bantuan dari Batavia tiba pada Juni 1778. Serangan terhadap I Sangkilang dilancarkan pada 26 Juni 1778. Keesokan harinya, I Sangkilang beserta pengikutnya terpaksa melarikan diri dari ibu kota sambil membawa *kalompoang* Kesultanan Gowa. Kendati VOC berhasil menguasai ibu kota, rakyat tetap mengakui "Batara Gowa" I Sangkilang sebagai raja mereka. VOC senantiasa menuai kegagalan ketika mencoba berbagai cara agar rakyat tak lagi mengakui I Sangkilang sebagai raja mereka.

Setelah terhalau dari ibu kota Gowa, I Sangkilang memindahkan pusat pemerintahannya ke Polombangkeng sambil menyusun kembali kekuatannya. Gubernur Belanda van der Voort menawarkan hadiah sebesar 2.000 Ringgit bagi siapa saja yang sanggup menyerahkan I Sangkilang hidup atau mati, tetapi tak seorangpun bersedia menyambut tawaran ini dan mendapatkan hadiahnya. Tak lama berselang, van der Voort meninggal sebelum berhasil menangkap I Sangkilang. Sultan Zainuddin sendiri juga menyusul mangkat pada 1778.

Sultan Gowa ke-29, I Mannawari Karaeng Bontolangkasa Karaeng Mangasa Sultan Abdulhadi (1778–1810), menggantikan ayahnya, Sultan Zainuddin. Sultan Abdulhadi diangkat sebagai raja oleh *Bate Salapanga* atas persetujuan Belanda. Sebagai balas budi atas pengangkatan ini, ia menandatangani perjanjian dengan VOC pada 16 Oktober 1781, yang isinya merugikan dan merendahkan martabat Gowa. Oleh karena kecewa, ia meninggalkan ibu kota kerajaan Gowa dan berdiam di Mangasa. Itulah sebabnya, ia juga disebut Karaeng Mangasa. Sebagai tambahan, dalam kontrak politik tertanggal 16 Oktober 1781 di atas, disebutkan mengenai nama tempat bernama Sapiria atau Sombaopu. Karenanya, dapat diperkirakan bahwa Sombaopu yang dihancurkan oleh VOC dan sekutunya itu kini terletak di desa bernama Sapiria.[545]

Perjanjian di atas menimbulkan ketidakpuasan sebagian bangsawan Gowa sehingga mereka menggabungkan diri dengan I Sangkilang, yang telah menyingkir ke daerah pedalaman. Aktivitas "Batara Gowa" semasa berada di pedalaman tersebut tak banyak diketahui. Hanya saja ia tercatat melakukan serangan terhadap pasukan VOC

545. Lihat *Sultan Hasanudin Menentang V.O.C*, halaman 260.

di Malewang (Polombangkeng) pada Maret 1779. Dukungan rakyat kepadanya masih tetap kuat. Mereka menyelubungi “Batara Gowa” dengan kisah-kisah supernatural dan menyakininya sebagai penyelamat yang akan mengembalikan kejayaan Gowa. “Batara Gowa” I Sangkilang tutup usia pada 1785. Sebagian pengikutnya percaya bahwa ia tidak meninggal, tetapi hanya tidur panjang saja. Ada pula kisah yang menyatakan bahwa ketika hendak dimakamkan di kampung Parang, jenazahnya tiba-tiba raib dan hanya menyisakan kain kafannya saja. Upacara pemakaman tetap dijalankan meski yang dikubur hanya kain tersebut.

Kematian “Batara Gowa” I Sangkilang mengakhiri perlawanannya. Meskipun demikian, benda pusaka Gowa tidak dikembalikan oleh para pengikutnya dan diserahkan kepada Arung Mampu yang ketika itu sedang berada di Bone. Pertimbangannya, Arung Mampu dianggap berhak karena ia merupakan saudara Amas Madina, Batara Gowa asli yang diasingkan ke Sri Lanka. Namun, Arung Mampu (I Mallisujawa) merasa tak sanggup memegang kendali Kerajaan Gowa dan menyerahkan benda pusaka Gowa kepada Raja Bone, La Tenritappu. Itulah sebabnya rakyat menganggap bahwa La Tenritappu adalah juga Raja Gowa karena ia yang memegang *kalompoang*.

Permasalahan *kalompoang* masih belum usai karena La Tenritappu tak sudi menyerahkannya kepada Belanda. Oleh karena itu, rakyat Gowa tidak mengakui Sultan Abdul Hadi sebagai raja mereka. Semasa pemerintahan pengganti Sultan Abdul Hadi, I Mappatunru (I Manginyarang) Karaeng Lembang Parang Sultan Abdul Rauf (1811–1825), kekuasaan atas Kepulauan Nusantara sementara waktu diambil alih oleh Inggris (1811–1816). Raja Gowa ke-30 ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Raja Tallo dan Perdana Menteri Gowa. Ia adalah putra I Makassumang Sultan Zainuddin, Raja Tallo.

Inggris membujuk Raja Bone agar mengembalikan benda pusaka Gowa yang dikuasainya. Tetapi La Mappatunru To Appatunru’ Sultan Muhammad Ismail Muhtajuddin (1812–1823), Raja Bone yang menggantikan La Tenritappu, juga enggan menyerahkannya kepada Inggris. Ia lebih menghendaki Arung Mampu diangkat sebagai Raja Gowa. Itulah sebabnya, timbul ketegangan dengan pihak Inggris yang melancarkan serangannya pada 1814 dengan dibantu laskar Gowa dan Soppeng. Bone mengalami kekalahannya dan rajanya mengungsi ke daerah pedalaman. Arung Mampu merasa terancam dan menyerahkan *kalompoang* Gowa kepada Datu Soppeng.

Melalui perantaraan Inggris, *kalompoang* ini dikembalikan pada Gowa.[546] Kekuasaan Inggris berakhir pada 1816 dan Kepulauan Nusantara beralih lagi kepada Belanda.

Masih pada era Sultan Abdul Rauf, pecah pemberontakan yang dipimpin oleh Abu Bakar Karaeng Data, putra I Sangkilang. Selain merasa berhak atas takhta Gowa, Karaeng Data membenci pemerintah kolonial Belanda yang kerap campur tangan terhadap urusan internal negerinya, termasuk dalam suksesi raja-raja Gowa. Dengan dibantu oleh Belanda dan laskar Sidenreng, Sultan Abdul Rauf berhasil memadamkan pergolakan ini. Pada 19 Agustus 1825, Sultan Abdul Rauf sebelum wafatnya turut menandatangani Perjanjian Bungaya yang Diperbaharui. Sultan wafat pada tahun yang sama di Katangka. Karenanya, ia dianugerahi gelar anumerta Tumenanga ri Katangka (Yang Wafat di Katangka). Takhta Gowa kini beralih kepada La Oddang Riu Karaeng Katangka Sultan Muhammad Zaenal Abidin Abdul Rahman Amiril Mukminin, yang hanya berkuasa setahun saja (1825–1826). Selanjutnya, Raja Gowa ke-31 ini pergi ke Tallo dan pada 1826 atas persetujuan Belanda menjadi Raja Tallo.

I Kumala diangkat oleh *Bate Salapanga* sebagai Raja Gowa ke-32. Gelarnya adalah Sultan Abdul Kadir Muhammad Aidid (1826–1893). Ia adalah cucu Raja I Mappatunru Karaeng Lembangparang Tumenanga ri Katangka. Karena saat itu usia I Kumala masih muda, ayahnya, Mahmud Karaeng Beroanging, menjabat sebagai walinya. Pada 1 September 1825, Mahmud Karaeng Beroanging terpaksa menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial Belanda atas nama putranya. Pada 1835, meletus pemberontakan akibat tindakan-tindakan Mahmud Karaeng Beroanging yang tidak disukai rakyat. Perlawanan yang dipimpin oleh Karaeng Pangkajene, Karaeng Bontomangape, Karaeng Ujung, dan Karaeng Mandalle ini tak lama kemudian dapat ditumpas. Sultan Abdul Kadir Muhammad Aidid resmi memerintah pada 22 Oktober 1844. Ia menikah dengan I Seno Karaeng Lakiung dan dikaruniai enam putra berserta enam putri, yaitu I Malingkaang Daeng Nyonri Karaeng Katangka, I Mappatunru Karaeng ri Burakne, I Mallombasi, I Mattonrokang, I Makkarumpa Karaeng ri Pagan, I La Oddangriu, I Galangga Karaeng Lempangan, I Manneng Karaeng Rappocini, I Ralle Karaeng Pasi, dan I Mangati Karaeng Mangngarabombang. Setelah memerintah selama 23 tahun, Sultan Abdul Kadir

546. Sumber lain menyebutkan bahwa Arung Mampu melarikan diri dan meninggalkan *kalompoang*-nya. Benda-benda pusaka tersebut diambil oleh Datu Soppeng, tetapi ia tak langsung menyerahkannya kepada Inggris. Raja Soppeng mengembalikannya kepada Arung Mampu dan memerintahkan agar menyerahkan sendiri *kalompoang*-nya kepada Inggris. Lihat *Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar Tentang Kerajaan Gowa Pascaperjanjian Bungaya*, halaman 64–catatan kaki no. 17.

Muhammad Aidid mangkat pada 30 Januari 1893 dan memperoleh gelar anumerta Tumenanga ri Kakoasaanna (Yang Meninggal Dalam Kekuasaannya). Ia terkenal pula sebagai Sultan Gowa yang terkaya.

Yang patut pula dicatat, pada masa Sultan Abdul Kadir Muhammad Aidid pecah gerakan pemberontakan di bawah pimpinan Umar Bapa Pamai, seorang tokoh asal Sumbawa yang mengaku dirinya sakti. Ia menjual jimat-jimat bertuliskan huruf Arab. Selama melakukan kegiatannya, Umar Bapa Pamai menumpang di rumah seorang bernama I Sariana. Oleh I Sariana, ia diperkenalkan sebagai "Batara Gowa." Lama kelamaan pengikut Umar Bapa Pamai makin banyak sehingga meresahkan pemerintah kolonial. Umar Bapa Pamai ditangkap pada 1853. Sedianya ia dijatuhi hukuman pengasingan 10 tahun di Papua. Namun, sebelum hukuman tersebut dijalankan, ia keburu wafat di penjara Makassar pada Agustus 1853.[547] Selain itu, putra Karaeng Data bernama I Pelo Karaeng Panrita mengobarkan pula perlawanan terhadap Belanda.

Sultan Abdul Kadir Muhammad Aidid digantikan oleh I Mallingkaang Daeng Mannyori Sultan Muhammad Idris (1893–1895). Raja Gowa ke-33 ini menikah dengan I Tenripada Sultana Aisyah, Ratu Barru. Ia dianugerahi keturunan bernama I Makkulau Daeng Serang Karaeng Lembang Parang, I Maggulanga Karaeng Popo, I Buntak Intang Karaeng Mandalle, I Topaterai Karaeng Pabbundukang, I Mangimangi Daeng Mattutu Karaeng Lengkese, I Batari Arung Barru, dan I Balontong Karaeng Tanete. Sultan Muhammad Idris terkenal akan pribadinya yang pengasih dan penyayang. Karenanya, setelah mangkat pada 13 Mei 1895, ia dianugerahi gelar anumerta Tumenanga ri Kalabbiranna. Putranya, I Makkulau Daeng Serang Karaeng Lembang Parang, menggantikannya sebagai Raja Gowa ke-34 dengan gelar Sultan Muhammad Husain (1895–1905).

Belanda mengadakan ekspedisi militer ke Sulawesi Selatan pada 1905. Setelah menundukkan Bone, pasukan Belanda bergerak menyerang Gowa pada Oktober 1905. Raja Gowa saat itu, Sultan Muhammad Husain, menyingkir ke Barru, Sawito, dan Bonggakaradeng di sebelah selatan Tana Toraja. Di Buakayu, ia berjumpa dengan Maqdika Bombing dan sebelum kembali ke kawasan Sawitto, Sultan Muhammad Husain mengikat janji dengannya bersama-sama melawan penjajah hingga titik darah penghabisan. Pasukan Gowa melakukan perlawanan dengan gigih, namun tak sanggup

547. Lihat *Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar Tentang Kerajaan Gowa Pascaperjanjian Bungaya*, halaman 98.

menandingi kedigdayaan Belanda. Letnan Ontstoffel yang memimpin pasukan pemerintah kolonial Belanda mengepung Raja Gowa beserta pengikutnya di daerah Sawitto pada 21 Desember 1905. Pertempuran sengit terjadi antara Gowa dengan bantuan Sawitto. Namun, Raja Gowa berhasil meloloskan diri lagi ke Sidenreng. Belanda kembali mengejar Sultan Muhammad Husain ke tempat pelariannya dan berhasil mengepungnya pada 24–25 Desember 1905. Raja Gowa ternyata lolos dari serbuan ini, namun ia akhirnya gugur karena terjatuh ke dalam jurang di lereng Gunung Latimojong,

Setelah kematian ayahnya, La (Andi) Mappanyukki masuk ke hutan dan melanjutkan perang gerilya. Belanda membujuk La Parenrengi Karaeng Tinggimae agar La Mappanyuki bersedia menghentikan perlawanannya. Tetapi bujukan penjajah ini ditolak tegas oleh La Mappanyuki. Belanda yang kehabisan akal lantas mengancam hendak menghabisi nyawa keluarganya. Dengan berat hati, La Mappanyuki terpaksa memenuhi ajakan tersebut dan menghadap Residen Belanda di Pare-Pare. Ternyata ini cuma siasat Belanda saja karena La Mappanyuki langsung ditangkap oleh Belanda. Ia dibebaskan oleh Gubernur A. J. Baron de Quarles pada 1909.[548] Kondisi Gowa berangsur aman walaupun berbagai perlawanan tetap berlangsung, salah satunya adalah pemberontakan yang dipimpin oleh I Tollo Daeng Mangassing (1914).

vii. Era Swapraja dan Kemerdekaan di Gowa

Setelah Gowa dikalahkan dan rajanya gugur pada 1905, Belanda masih belum sanggup memutuskan yang sebaiknya dilakukan terhadap Gowa. Terdapat dua pilihan, yakni tetap menjadikan Gowa sebagai kerajaan atau memasukan wilayahnya secara langsung di bawah pemerintahan Belanda, seperti daerah-daerah yang dulu pernah dikuasai Gowa–Sanrobone, Galesong, Lengkese, Topejawa, Tallo, Sudiang, dan lain sebagainya. Gowa dibagi menjadi berbagai distrik bawahan, seperti Karuwisi, Mangasa, Tombolo, Borongloe, dan lain sebagainya.[549] Roda pemerintahan Belanda di Gowa kurang lancar karena para bangsawan menolak bekerja sama. Gubernur Sulawesi menyarankan kepada gubernur jenderal agar La Mappanyuki diangat sebagai kepala distrik Gowa Barat dengan pangkat *regent* (bupati). Sedangkan anggota bangsawan Gowa lainnya, Karaeng Kaballokang, diangkat sebagai Bupati Gowa Selatan. Tetapi

548. Lihat *Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar Tentang Kerajaan Gowa Pascaperjanjian Bungaya*, halaman 42–bagian Gowa (1900–1942).
549. Lihat *Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar Tentang Kerajaan Gowa Pascaperjanjian Bungaya*, halaman 47–bagian Gowa (1900–1942).

La Mappanyuki menolaknya secara halus dan demikian pula halnya dengan Karaeng Kaballokang.

Akhirnya, Belanda mencoba membentuk Federasi Gowa pada 1 Juli 1926. Sebagai ketua federasi, diangkat seorang tokoh bangsawan tinggi Gowa bernama I Coneng Daeng Mattayang Karaeng Karuwisi[550] yang merangkap pula sebagai kepala adat Karuwisi. Selanjutnya, pada 1936 Federasi Gowa diubah menjadi Swapraja Gowa. Sebagai rajanya adalah I Mangimangi Daeng Matutu Karaeng Bonto Nompo Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin Tuminanga ri Sungguminasa (1936–1946). Pengangkatan ini kemudian diikuti dengan penandatanganan *Korte Verklaring* pada 30 November 1936. Berdasarkan urutannya, I Mangimangi Daeng Matutu ini terhitung sebagai Raja Gowa ke- 35. Sebagai pendamping Raja Gowa, Residen Belanda mengangkat I Coneng Daeng Mattayang Karaeng Karuwisi (bekas ketua Federasi Gowa) sebagai *tumailalang lolo* dan I Pabisei Daeng Paguling Karaeng Katapang sebagai *tumailalang toa*. Selanjutnya, yang menjadi Raja Gowa ke-36 adalah Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Kadir Aiduddin Tumenanga Ri Jongaya (1946–1957). Ia merupakan Raja Gowa terakhir dan sekaligus Bupati Gowa pertama.

viii. Laporan Kunjungan Wallace ke Gowa

Alfred Russel Wallace mengunjungi Gowa menjelang akhir 1856 guna melakukan penelitian terhadap kondisi flora dan fauna di sana dan kawasan Sulawesi lainnya. Sebelum mengadakan penjelajahan di wilayah Raja Gowa, Wallace meminta surat pengantar terlebih dahulu kepada gubernur di Makassar. Surat tersebut isinya permohonan izin dan perlindungan kepada Raja Gowa selama Wallace menjelajahi wilayah kekuasaannya. Setelah itu, barulah dilakukan kunjungan kepada Raja Gowa. Tentunya penguasa Gowa yang dijumpai Wallace adalah Sultan Gowa ke-22, I Kumala Daeng Parani Karaeng Lembang Paraeng Sultan Abdul Qadir (Kadir) Aididdin (Aidid) Tumenanga ri Kakusanna atau Sultan Abdul Kadir Muhammad Aidid (1826–1893).

Saat ditemui oleh Wallace, raja sedang duduk di luar mengawasi pembangunan rumah barunya.[551] ia bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana panjang selutut

550. Calonnya ada tiga yakni: I Coneng Daeng Mattayang Karaeng Karuwisi, Andi Baso Daeng Rani Karaeng Bontolangkasa (adik I Coneng), dan Andi Pangerang Pettarani, putra sulung La Mappanyuki. Lihat Lihat *Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar Tentang Kerajaan Gowa Pascaperjanjian Bungaya*, halaman 51–bagian Gowa (1900–1942).
551. Lihat *Kepulauan Nusantara* (terjemahan Indonesia), halaman 159.

beserta sarung. Kurir yang ditugaskan membawa surat berlutut di kaki raja. Surat pengantar yang dibungkus kain sutra kuning itu diterima oleh seorang pejabat, yang membuka dan membacakannya. Setelah maksud kunjungan Wallace dijelaskan secara terperinci, izin dikeluarkan oleh raja dan penjelajah asal Inggris itu diperbolehkan pergi ke mana saja di Gowa. Raja berpesan agar memberitahukannya terlebih dahulu ke mana Wallace hendak pergi dengan maksud agar ia dapat mengutus pengikutnya guna memastikan agar orang Inggris tersebut tidak cedera.

Sesudah melakukan penelitiannya, Wallace kembali menghadap raja guna meminta sebuah rumah dekat hutan guna menunjang pekerjaannya. Sultan saat itu sedang berada di tempat adu ayam, di bangsal sebelah utara istananya. Ia segera meninggalkan tempat tersebut guna menjumpai Wallace. Kemudian mereka berjalan menyusuri tangga dan memasuki rumahnya. Tempat kediaman raja ini digambarkan Wallace sebagai "Rumah besar, lapang, berkonstruksi bagus, berlantai bambu, dan berjendela kaca."[552] Rumah tersebut merupakan bangunan yang sebagian besar merupakan ruang terbuka serta terbagi oleh tiang-tiang penyangga. Ratu saat itu sedang duduk di kursi kasar dekat jendela sambil mengunyah sirih dan pinang. Tempolong pinang tergeletak di sampingnya dan kotak sirih berada di hadapannya. Raja kemudian duduk di kursi yang ada di seberangnya dan seorang anak segera berlutut di sampingnya dengan memegang tempolong beserta kotak sirih.

Wallace memaparkan pula mengenai para wanita yang berada di istana raja; beberapa di antara mereka adalah putri-putri raja, sedangkan sisanya adalah budak. Kaum wanita itu mengenakan busana yang indah dengan hiasan emas beserta perak. Pakaian mereka terbuat dari kain kasa ungu. Putri-putri raja, menurut Wallace, memang cukup cantik, tetapi pakaian dan tubuh mereka tidak memperlihatkan kesan segar maupun bersih. Masih menurut Wallace, mereka semua "Tampak tidak berkilau serta kusam, sesuatu yang tak sesuai dengan ciri-ciri kebangsawanan menurut orang Eropa."[553] Demikianlah, laporan Wallace ini merupakan salah satu informasi yang cukup berarti mengenai sekelumit kehidupan dalam Istana Gowa.

ix. Sistem Pemerintahan

Kekuasan Raja Gowa dapat ditelusuri dari ungkapan *Makkanama' numammo*, yang artinya 'Aku berkata dan engkau menyetujuinya.' Dengan kata lain, segenap

---

552. Lihat *Kepulauan Nusantara* (terjemahan Indonesia), halaman 162.
553. *Kepulauan Nusantara* (terjemahan Indonesia), halaman 162.

perintah raja harus ditaati dan dipatuhi serta tak boleh dibantah. Kendati demikian, tidak benar bahwa kekuasaan seorang raja di Gowa khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya bersifat tak terbatas. Hal ini tampak nyata pada ikrar perjanjian yang dibacakan saat seorang raja dinobatkan.

> Bahwasanya kami telah menjadikan engkau raja kami dan kami menjadi abdimu.
>
> Bahwa engkau menjadi sampiran tempat kami bergantung dan kami menjadi tempat air yang bergantung padamu.
>
> Bahwa apabila sampiran itu patah, lalu tak pecah berantakan tempat air itu maka khianatlah kami.
>
> Bahwa kami tak tertikam oleh senjatamu, sebaliknya engkaupun tak terbunuh oleh senjata kami.
>
> Bahwa hanya dewatalah yang membunuh kami dan dewata jugalah yang membunuhmu.
>
> Bertitahlah engkau dan kami menaatinya, akan tetapi apabila kami telah menjinjing, tidaklah kami akan memikul lagi dan apabila kami telah memikul tidaklah kami akan menjinjing.
>
> ....
>
> Bahwa engkau kami jadikan raja atas diri kami, tetapi harta benda kami bukanlah engkau merajainya.
>
> Bahwa engkau pantang mengambil ayam kami dari tenggeramannya, pantang engkau mencopet telur kami dari keranjang kami.
>
> Bahwa apabila engkau menghendaki barang sesuatu dari kami, engkau membelinya yang patut engkau membeli, engkau pertukarkan yang sepatutnya engkau tukarkan, engkau minta barang yang sepatutnya engkau minta maka kami memberimu, pantanglah engkau meniadakan milik kami.
>
> Bahwa raja tak menetapkan sesuatu keputusan tentang masalah dalam negeri tanpa *Gallarang*, dan *Gallarang* tak menetapkan sesuatu tentang peperangan tanpa raja.[554]

Berdasarkan ikrar perjanjian di atas, tampak jelas hak dan kewajiban masing-masing. Rakyat berjanji setia para raja, namun di lain pihak raja juga tak dapat bertindak semena-mena terhadap rakyat. Sebagai contoh, raja tidak diperkenankan

554. *Dinamika Bugis-Makassar*, halaman 14 –15.

mengambil begitu saja milik rakyat. Baik raja maupun rakyat sama-sama mengakui kekuasaan dewata (Tuhan) sehingga masing-masing tidak saling merugikan.

Calon Raja Gowa hendaknya merupakan seorang *karaeng-ti'no* (*karaeng* = raja, *ti'no* = masak atau matang), artinya ibu atau ayahnya merupakan bangsawan tertinggi atau keturunan langsung Tumanurungga ri Tammalate (Raja Gowa yang pertama). Demikianlah kriteria seorang pengganti raja yang paling disukai dan dikehendaki oleh kerabat kerajaan dan rakyat Gowa. Calon pengganti atau putra mahkota yang telah disahkan disebut *anak rattola* atau 'anak pengganti raja.' Tentu saja yang dianggap *anak rattola* sejati adalah seorang *karaeng-ti'no*. Meskipun demikian, pada kenyataannya seorang yang bukan *karaeng-ti'no* dapat pula menjadi Raja Gowa, hanya saja jenis upacara pelantikannya berbeda.

Tata cara pelantikan raja yang baru dibedakan menjadi dua, yakni *nilanti* (dilantik) dan *nitogasa* (ditugaskan). Upacara *nilanti* dilakukan bila calon raja merupakan *karaeng-ti'no* dan berlangsung di Tamalate. Upacara ini dilangsungkan di atas sebuah batu yang, menurut legenda, merupakan tempat Tumanurunga turun dari langit. Apabila calon raja bukan *karaeng-ti'no* maka ia hanya "ditugaskan" saja sehingga upacaranya disebut *nitogasa* dan hanya dilangsungkan di depan istana. Karena perbedaan ini, dapat dipahami bahwa upacara *nilanti* sifatnya lebih megah dan meriah dibandingkan *nitogasa*.

Dalam menjalankan pemerintahannya, Raja Gowa dibantu oleh beberapa orang pejabat tinggi kerajaan, seperti

- *Pabbicara butta* (arti harfiahnya 'juru bicara tanah' atau 'juru bicara negeri') yang dapat disamakan dengan perdana menteri.
- *Tumailalang-towa* (arti harfiahnya 'orang tua yang berada di dalam')
- *Tumailalang-lolo* (arti harfiahnya 'orang muda yang berada di dalam')

Pabbicara butta adalah tokoh terpenting kedua di Kerajaan Gowa. Fungsinya dapat disamakan dengan perdana menteri. Biasanya jabatan ini dirangkap oleh Raja Tallo. Kebiasaan ini berlaku semenjak Raja Gowa ke-9, Karaeng Tumapa'risi' Kallona (1510–1545), saat kedua kerajaan itu disatukan kembali. Penyatuan kedua kerajaan itu dikokohkan oleh sumpah para raja dan pembesar kedua kerajaan yang berbunyi *"Ia iannamo Tau Ampassi-Ewai Gowa-Tallo iamo Nacalla Rewata."* Terjemahan bahasa Indonesianya kurang lebih berbunyi 'Barangsiapa yang mengadu domba Kerajaan Gowa dan Tallo akan dikutuk dewata.' Semenjak saat itu, kedua kerajaan dalam

hubungan dengan kerajaan lain merupakan satu negara, bahkan ada istilah *"Rua Karaeng Se're Ata"* yang berarti 'Dua raja satu hamba.'

Tumailalang-towa bertugas menyampaikan atau meneruskan segenap perintah raja kepada *Bate Salapanga*, kepala distrik, dan kaum bangsawan lainnya. Pejabat ini bertugas pula menjaga agar perintah raja dipatuhi dengan baik. *Tumailalang-towa* kerap pula memimpin sidang-sidang yang diadakan untuk membicarakan hal-hal penting. Saat berlangsungnya sidang, ia membacakan titah, keputusan, saran-saran, dan pesan Raja Gowa.

Tumailalang-lolo tugasnya menerima usul-usul dan permohonan yang hendak disampaikan kepada Raja Gowa. Ia menyampaikan pula perintah-perintah Raja Gowa yang berkaitan dengan rumah tangga istana. Saat terjadinya peperangan, ia bersama dengan para panglima pasukan Gowa merundingkan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah kemiliteran.

Sebelumnya, tugas dan tanggung jawab *tumailalang-towa* dan *tumailalang lolo* itu diemban oleh *paccallaya*, yang selanjutnya dialihkan kepada seorang *tumailalang*. Belakangan, barulah jabatan *tumailalang itu* dipisahkan menjadi dua. Secara ringkas dapat pula dikatakan bahwa tugas *tumailalang towa* adalah mengurus hubungan dari raja ke *Bate Salapang*, sebaliknya *tumailalang-lolo* mengurus hubungan dari *Bate Salapang* ke Raja Gowa.

Pejabat tinggi penting yang patut pula disebutkan adalah *anrong guru lompona tukkajannangngang*. Tatkala berkecamuk peperangan, ia menjadi panglima perang tertinggi kerajaan. Sedangkan pada masa damai, pejabat ini bertanggung jawab atas keselamatan raja dan keamanan dalam negeri Gowa.

Selain pejabat-pejabat tinggi kerajaan, Raja Gowa masih dibantu oleh suatu dewan adat atau menteri yang disebut *Kasuwiyang Salapang* atau *Bate Salapang*. Dewan ini berasal dari sembilan raja yang ada sebelum terbentuknya Kesultanan Gowa sebagaimana yang telah diulas di atas. Segenap keputusan-keputusan penting kerajaan harus dirundingkan terlebih dahulu dengan dewan adat ini, dengan ketuanya yang bergelar *paccallaya*.

Masih ada lagi pejabat bidang keagamaan dan upacara kenegaraan yang disebut *alakaya*. Namun, setelah agama Islam menjadi agama resmi kerajaan, tugas ini diembankan kepada seorang pejabat baru yang bergelar *daengta kaliya* (*kadhi*). Pejabat yang menangani urusan pajak disebut *anrong guru sussung*. Kendati demikian, ia tidak

memungut pajak yang berkaitan dengan perdagangan. Pajak perdagangan ditangani oleh seorang pejabat yang dinamakan *sahbanara* (syahbandar). Pada mulanya, jabatan ini dirangkap oleh *tumailalang lolo*.

Daerah taklukan Kerajaan Gowa dibagi menjadi dua jenis, yakni *palili ata rikale* dan *palili ata matene.*[555] Daerah *palili ata rikale* juga disebut *mapatudang ata*, yakni daerah yang penaklukannya memakan korban dan biaya tidak sedikit. Dengan kata lain, daerah semacam ini melakukan perlawanan yang dahsyat ketika ditaklukkan oleh Gowa. Biasanya raja atau penguasa daerah ini akan ditawan dan dibawa ke Gowa dan selanjutnya sebagai pengganti diangkatlah seorang pejabat yang ditunjuk Gowa untuk memimpin kawasan itu. Biasanya pejabat semacam ini disebut *jannang*. Negeri-negeri *palili ata rikale* tidak diwajibkan membayar upeti, namun seluruh kekayaannya menjadi milik Gowa. Negeri-negeri taklukan yang tergolong *palili ata matene* masih menikmati suatu derajat kebebasan atau otonomi. Para raja atau penguasa yang dulu memerintah negeri itu masih dibiarkan berkuasa di negerinya. Mereka diwajibkan membayar upeti setahun sekali kepada Raja Gowa, yang besarnya tergantung pada biaya penaklukkan negeri mereka dahulu. Selain itu, daerah taklukan jenis ini wajib menyediakan pasukan atau tenaga manusia bila Gowa terlibat peperangan dengan kerajaan lain. Kendati demikian, mereka juga ikut menikmati hasil yang diperoleh dari peperangan tersebut.

Status sebagai *palili ata rikale* atau *palili ata matene* itu dapat berubah. Sebagai contoh, Mandar pada 1560–1593 dahulunya adalah *palili ata rikale* Gowa, tetapi karena sewaktu perang penaklukkan Bone kerajaan ini memberikan sumbangsih dan pengorbanan yang besar, statusnya diubah menjadi *palili ata matene*. Contoh lain adalah Kerajaan Binuang yang ketika Gowa menaklukkan Langga pada 1642 tidak memberikan kontribusi atau bantuannya. Akibatnya, Binuang diubah statusnya dari *palili ata matene* menjadi *palili ata rikale*.

Dari segi administrasi pemerintahan, Kerajaan Gowa dibagi menjadi wilayah-wilayah yang dahulu pernah disebut *bate*. Pemimpinnya bergelar *gallarang* atau *karaeng*. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, semasa awal terbentuknya Kerajaan Gowa terdapat sembilan negeri (*bate*), yang para pemimpinnya disatukan membentuk dewan adat atau kerajaan bernama *Bate Salapang* atau *Bate Salapanga*. Dewan ini pada perkembangan selanjutnya menjadi semacam dewan perwakilan

555. Lihat *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*, halaman 33–34.

rakyat yang menetapkan aturan-aturan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Daerah-daerah dibagi lagi menjadi berbagai satuan pemerintahan setingkat desa, yang namanya beragam, yakni *kampong*, *lembang*, *bori*, dan lain sebagainya.[556] Gelar bagi kepala satuan pemerintahan semacam itu pun bermacam-macam, seperti *matoa*, *jannang*, *anrong guru*, *kapala*, dan lain sebagainya.

Hal berikutnya yang juga menarik disinggung adalah benda pusaka atau atribut kerajaan yang disebut *kalompoang*. Pusaka semacam ini diyakini merupakan peninggalan To Manurung dan menjadi alat legitimasi bagi kerajaan. Pemegangnya dianggap memiliki keabsahan dalam memerintah dan menggunakan kekuasaannya demi kesejahteraan serta ketertiban masyarakat. Karenanya, ketaatan rakyat kepada rajanya tergantung pada *kalompoang* yang dipegang oleh penguasa bersangkutan. Kepercayaan terhadap *kalompoang* ini tetap bertahan hingga abad 20.[557] Saat Kerajaan Gowa hendak dipulihkan kedudukannya menjadi Swapraja Gowa pada 1936, seperti yang telah diulas sebelumnya, pemerintah kolonial Belanda mengembalikan *kalompoang* ini. Pengembalian ini memang diperlukan demi menjamin ketaatan rakyat kepada raja selaku pemegang pusaka yang diwarisi dari leluhurnya.

b. TALLO

i. Berdirinya Kerajaan Tallo

Berdirinya Kerajaan Tallo diawali oleh pertikaian antara dua orang putra Tunatangka' Lopi, Raja Gowa ke-6, yakni antara Batara Gowa dan Karaeng LoE ri Sero. Pada pertempuran itu, Karaeng LoE ri Sero dapat dikalahkan dan terusir dari kerajaannya sehingga harus melarikan diri ke Jawa. Sekembalinya dari Jawa, Karaeng Loe ri Sero menetap di suatu tempat yang kelak bernama Passi'nang sambil merenungkan nasibnya yang malang. Itulah asal muasal nama tempat itu karena *passi'nang* dalam bahasa Makassar artinya 'bersedih.' Kendati demikian, tak lama kemudian, datang dua orang bernama Karaeng LoE ri Bentang dan Karaeng LoE ri Bira membantu Karaeng LoE ri Sero. Kedua orang bangsawan ini sepakat mengangkat Karaeng LoE ri Sero sebagai raja mereka.

Karaeng LoE ri Bentang dan Karaeng LoE ri Bira memerintahkan para pengikut mereka untuk membuka hutan di dekat Sungai Bira. Hutan itu dikenal sebagai Hutan

556. Lihat artikel *Manusia dan Kebudayaan Bugis–Makassar dan Kaili di Sulawesi*, karya Prof. Dr. H. A. Mattulada, yang dimuat dalam jurnal *Antropologi Indonesia* no. 48/ tahun XV/ Januari–April 1991, halaman 37.
557. Lihat *Dinamika Bugis Makassar*, halaman 16.

Talloang, yang menjadi asal muasal nama Tallo. Mereka membangun pula istana bagi Karaeng LoE ri Sero dan mengangkatnya sebagai raja kerajaan baru tersebut. Dengan demikian, Karaeng LoE ri Sero menjadi Raja Tallo pertama. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa Raja Gowa ke-7 bersaudara dengan Raja Tallo pertama.

ii. Perkembangan Kerajaan Tallo

Ikatan antara kedua kerajaan itu juga dikukuhkan berdasarkan pernikahan karena Raja Gowa ke-9, Tumapa'risi' kallona, menikah dengan putri Raja Tallo ke-2, Karaeng Tunilabu ri Suriwa. Raja Tallo ke-2 ini diberitakan melakukan pelayaran niaga ke Jawa, Malaka, dan Banda. Pernah pula ia berupaya menduduki Flores, tetapi gagal karena diserang oleh Raja Polombangkeng di sekitar perairan Selayar. Karena itu, ia digelari Tunilabu ri Suriwa (Orang yang Ditenggelamkan di Suriwa).[558] Menurut *Lontarak Patturio Patturioloangari Tutalloka,* yang membunuhnya adalah anak Raja Polombangkeng. Masih menurut sumber yang sama, Karaeng Tunilabu ri Suriwa tercatat sebagai pembuka persawahan di Talakandang.[559]

Raja Tallo ke-3 adalah Mangoyang Berang Karaeng Pasi (Tunipasuru'), yang juga menjabat sebagai perdana menteri bagi Raja Gowa ke-9. Konon, ia pernah menaklukkan Endeh, Solor, Sandao, dan Garrasiq (diperkirakan sama dengan Gresik di Jawa Timur). Kegemaran Raja Tallo ini adalah membuat senapan, perahu, dan berlayar. Tallo dan Gowa pernah bersama-sama berperang menaklukan Bone semasa Raja Tallo ke-4, Karaeng Tumenanga ri Makkoayang (I Daeng Padulu, nama aslinya adalah I Mappatangkakattanna),[560] yang menjadi *pabbicara butta* bagi Raja Gowa ke-10, Karaeng Tunipalangga. Waktu itu Raja Gowa sedang sakit sehingga Karaeng Tumenanga ri Makkoayang memintanya untuk kembali ke Gowa untuk beristirahat. Raja Tallo yang merangkap sebagai *pabbicara butta* atau perdana menteri bagi tiga raja Gowa ini wafat semasa pemerintahan Raja Gowa ke-12, Karaeng Tunijallo. Raja Tallo ke-4 ini sangat dipuji karena keahliannya dalam banyak bidang. Ia terkenal pemberani, menjunjung tinggi perikemanusiaan, serta berbaik hati kepada seluruh rakyatnya.[561] Karaeng Tumenanga ri Makkoayang wafat karena terluka parah dalam peperangan melawan Selayar. Selanjutnya, yang bertakhta sebagai Raja Tallo ke-5 adalah putrinya, I Sambo Daeng Niasseng, yang menikah dengan Tunijalo dari Gowa.

558. Lihat *Makasar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagagan Maritim,* halaman 24.
559. Lihat *Lontarak Patturio Patturioloangari Tutalloka*, halaman 9.
560. Lihat *Lontarak Patturio Patturioloangari Tutalloka,* halaman 11.
561. Lihat *Lontarak Patturio Patturioloangari Tutalloka*, halaman 12

Karaeng Matoaya (I Mallingkaang Daeng Nyonri) merupakan Raja Tallo ke-6. Ia merupakan penguasa pertama di Sulawesi Selatan yang memeluk agama Islam pada 22 September 1605 berkat kedatangan seorang ulama terkenal bernama Abdul Makmur Khatib Tunggal atau Dato'ri Bandang. Semenjak saat itu, Karaeng Matoaya bergelar Sultan Abdullah Awalul Islam. Setelah wafat, ia diberi gelar anumerta Tumenanga ri Agamana atau 'Raja yang wafat dalam agamanya.' Gelar ini diberikan karena ia merupakan seseorang yang taat beragama.

Raja Tallo ke-7 adalah I Manginyarang Daeng Makkioq Karaeng Kanjiloq yang bergelar Sultan Muzhaffar. Ia dilahirkan pada 3 Februari 1599. Permaisurinya adalah I Sabbe Daeng Tamagga Karaeng Lempangang, putri Sultan Alauddin dari Gowa. Pernikahan ini dianugerahi seorang putra bernama I Mappaijo Daeng Manyurung. Sultan Muzhaffar mangkat pada 3 Oktober 1641, sepulangnya dari penyerbuan ke Pulau Timor. Oleh karenanya, ia dianugerahi gelar anumerta Tumammalianga ri Timoroq (Yang Kembali dari Timor). Saat itu, putranya masih belum dewasa sehingga perwalian untuk sementara waktu dipegang oleh Karaeng Pattingaloang.

Raja Tallo yang paling terkemuka adalah Karaeng Pattingaloang yang merangkap menjadi perdana menteri bagi Sultan Malikussaid dari Gowa (Raja Gowa ke-15). Gelarnya yang lain adalah Sultan Mahmud. Sebenarnya, Karaeng Pattingaloang ini adalah wali bagi kemenakannya, I Mappaijo Daeng Manyurung yang baru berusia tujuh bulan. Tetapi ia tetap dianggap sebagai raja Tallo ke-8, sedangkan kemenakan yang diwakilinya itu terhitung sebagai Raja Tallo ke-9. Pemuka Kerajaan Tallo yang tersohor ini lahir pada 1600. Nama lengkap Karaeng Pattingaloang adalah I Mangadacinna Daeng Sitaba dan merupakan putra Karaeng Matoaya. Pelantikannya sebagai Perdana Menteri Gowa berlangsung pada 18 Juni 1638. Jabatan ini diemban olehnya hingga ia wafat pada 17 September 1654.

Karaeng Pattingaloang dikenal sebagai pribadi yang cendekia dan melebihi orang sezamannya. Tatkala berusia 18 tahun, ia telah menguasai berbagai bahasa, seperti Latin, Yunani, Italia, Perancis, Belanda, Arab, dan lain sebagainya. Bidang keilmuan yang menarik perhatiannya adalah ilmu falak (astronomi). Karena Karaeng Pattingaloang merupakan seseorang yang senantiasa haus akan ilmu pengetahuan, pemerintah Belanda melalui wakil-wakilnya di Batavia pernah menghadiahkan sebuah tiruan bola dunia (*globe*) buatan Belanda. Harganya diperkirakan mencapai fl12.000.

Dengan demikian, Karaeng Pattingaloang merupakan raja pertama di Kepulauan Nusantara yang memiliki tiruan bola dunia.

Selain itu, ia memesan pula buku-buku dan instrumen hasil kemajuan ilmu pengetahuan zaman itu, seperti peta dunia yang besar dengan keterangan dalam bahasa Spanyol, Portugis, atau Latin; atlas yang berisikan peta-peta seluruh dunia; teropong berkualitas terbaik; suryakanta atau kaca pembesar; prisma segitiga yang sanggup menguraikan cahaya; tongkat baja kecil; dan bola tembaga atau baja.[562] Seluruh benda-benda yang baru disebutkan itu memperlihatkan minat Karaeng Pattingaloang terhadap ilmu pengetahuan. Selain ilmu pengetahuan, ia juga tertarik dengan hal-hal keagamaan. Pastur Alexander de Rhodes SJ yang dengan sia-sia berupaya mengkristenkan Pattingaloang memuji tokoh tersebut sebagai seorang yang bijaksana dan rasional.

Karaeng Pattingaloang pernah memimpin ekspedisi militer Kerajaan Gowa ke Larantuka pada 1641. Begitu tiba di sana pada 20 Januari 1641, ia meminta Pater Antonio da S. Jacinto dan Kapitan Mor Fransisco Fernandez dari Portugis menaiki kapalnya. Tetapi mereka berdua menolaknya dengan dalih tidak mengakui kekuasaan Karaeng Pattingaloang sehingga tak ada alasan bagi mereka untuk berunding. Pasukan Gowa-Tallo turun ke darat dan menghanguskan serta menyerang pemukiman penduduk. Oleh karenanya, penduduk setempat beserta orang-orang Portugis melarikan diri ke gunung dan hutan-hutan. Pater Antonio da S. Jacinto menyemangati para penduduk dan sisa-sisa pasukan Portugis agar berjuang mengusir penyerang mereka serta menjanjikan bantuan surgawi. Pasukan Portugis dan penduduk setempat yang kembali bersemangat berbalik bertempur melawan penyerang dari Gowa-Tallo tersebut dan berhasil meraih kemenangan. Pasukan Gowa-Tallo yang gugur sebanyak 300 orang, sedangkan sisanya yang selamat melarikan diri ke kapal-kapalnya.

Selain pemimpin politik dan militer yang andal, Karaeng Pattingaloang juga merupakan seorang pengusaha internasional. Bersama-sama dengan Sultan Malikussaid, ia berkongsi dengan Pedero la Mata, pengusaha besar dan sekaligus konsultan dagang Spanyol di Sombaopu, dan Fransisco Viera de Figheiro. Berkat kerja sama ini, Karaeng Pattingaloang berhasil memajukan perniagaan Gowa. Komoditas yang diperdagangkan meliputi kain sutera beserta keramik dari Cina, kain katun India, kayu cendana dari Timor, rempah-rempah dari Maluku, dan intan dari Kalimantan.

562. Lihat *Nusa Jawa: Silang Budaya*, halaman 130.

Biasanya para pedagang Eropa yang datang ke Gowa pada masa itu membawa buah tangan guna dipersembahkan kepada kaum bangsawan setempat. Tidak jarang pula, sebelum kembali ke negerinya mereka akan menanyakan barang apa yang diinginkan oleh para penguasa Gowa tersebut. Ketika ditanya, barang atau buah tangan apa yang dikehendakinya, Karaeng Pattingaloang menjawab bahwa yang diminatinya adalah buku. Dengan demikian, tidak mengherankan apabila tokoh cendekia dari Tallo ini memiliki koleksi banyak buku dalam berbagai bahasa. Bahkan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan dipuji oleh seorang penyair Belanda bernama Joost van den Vondel "*Wiens aldoor snuffelende brein. Een gansche werelt valt te klein*" (Orang yang pikirannya selalu dan terus-menerus mencari sehingga seluruh dunia rasanya terlalu sempit baginya).[563]

Sebelum meninggal, Karaeng Pattingaloang mewariskan amanat-amanat berharga mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Ia menyebutkan ada lima hal yang menjadi penyebab keruntuhan suatu negara.

- Apabila raja tidak bersedia lagi diperingatkan atau mendengarkan nasihat.
- Apabila tidak ada lagi kaum cerdik pandai dalam suatu negeri.
- Apabila penyelewengan yang terjadi sudah demikian banyaknya.
- Apabila hakim dan pejabat kerajaan bersedia menerima suap.
- Apabila raja tidak lagi mencintai rakyatnya.[564]

Karaeng Pattingaloang mangkat saat kondisi Kerajaan Gowa sedang genting akibat terlibat peperangan dengan Belanda. Setelah wafat, ia menerima gelar anumerta Tumenanga ri Bonto Biraeng.

Putra Karaeng Pattingaloang juga mengesankan kecendekiaannya di hadapan orang-orang Spanyol. Pastor Spanyol bernama D.F. de Navarette yang singgah di Makassar pada 1658 meriwayatkan pembicaraannya dengan Karaeng Karunrung, putra Pattingaloang. Pertemuan itu berlangsung di perpustakaan besar almarhum ayahnya yang dilengkapi lonceng sangat indah. Mereka berdiskusi masalah keagamaan

---

563. *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 137.

564. Lihat *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 137–138. Bahasa Makassarnya adalah sebagai berikut.

1. *Punna taenamo naero nipakainga' Karaeng Mangguka.*
2. *Punna taenamo tumanggngasseng ri lalang Pa'rasanganga.*
3. *Punna majai gau lompo ri lalang Pa'rasanganga.*
4. *Punna angngallengasemmi soso' Pabbicaraya.*
5. *Punna taenamo nakamaseyangi atanna Mangguka.*

dan pada kesempatan itu salah seorang rekan de Navarette dengan seenaknya menghina Nabi Muhammad. Kendati demikian, Karaeng Karunrung dengan berani menjawab, "Jangan berkata begitu! Kapten."[565]

Sultan Harun al Rasyid (I Mappaijo Daeng Manyurung) adalah Raja Tallo ke-9 (lahir 3 November 1640). Saat naik takhta usianya baru tujuh bulan. Karena itu, pamannya, Karaeng Pattingalloang, diangkat sebagai walinya. Pada 25 Agustus 1664, ia memerintahkan armada laut berkekuatan 70 orang mengadakan pengacauan di lautan, yang mungkin ditujukan sebagai perlawanan terhadap Belanda. Raja Tallo ini pernah pula mengunjungi Mandar dan kembali ke Tallo pada 10 Juni 1657. Sultan Harun al Rasyid wafat di Sumbawa pada 16 Juni 1673. Gelar anumertanya adalah Tumenanga ri Lampanna atau Yang Mangkat Dalam Perjalanannya. Ia digantikan oleh I Mallawakkang Daeng Mattiring Karaeng Kanjilo (1673–1710), sebagai Raja Tallo ke-10. Ia menikah dengan Karaeng Parang-Parang, putri Sultan Muhammad Ali, Raja Gowa ke-18 (1674–1677) dan dikaruniai seorang putra bernama I Mappaurangi dan putri bernama Karaeng Pabbineang. Putrinya ini kemudian dinikahi oleh Sultan Ismail (1709–1711), Raja Gowa ke-20. I Mallawakkang memerintah hingga wafat pada 1710.

Raja Tallo berikutnya adalah I Mappaurangi Sultan Sirajuddin (pemerintahan pertama sebagai Raja Tallo pada 1710–1714, pemerintahan kedua pada 1729–1735), yang diangkat sebagai Raja Gowa ke-21 dan 23 pada 1711. Karena berbagai intrik politik, I Mappaurangi meninggalkan Gowa dan kembali ke Tallo. Sultan Sirajuddin mangkat di Tallo pada 20 Juni 1739 dan dianugerahi gelar anumerta Tumammalinga ri Gaukanna (Yang Kembali ke Singgasananya). Sultan Sirajuddin digantikan oleh putranya, I Manrabia Sultan Najamuddin (1714–1735), yang juga menjadi Raja Gowa ke-22.

I Mappanga Makkasuma Karaeng Lempangang yang bergelar Sultan Saifuddin menggantikan Sultan Najamuddin–saudaranya sebapak–sebagai Raja Tallo (1735–1760). Penguasa Tallo yang juga merangkap sebagai Mangkubumi Gowa ini mangkat pada 1760 dan dianugerahi gelar anumerta Tumenanga ri Tallo. Singgasana Tallo selanjutnya diduduki oleh Tu Timoka Karaeng Sapanang selama setahun (1760–1761) dan digantikan oleh Sultan Abdul Kadir II (1761–1767).

565. *Nusa Jawa: Silang Budaya*, jilid 1, halaman 131.

Ketika berlangsung gerakan I Sangkilang yang mengaku sebagai Batara Gowa, Raja Gowa yang diasingkan Belanda ke Srilangka, Sultana Siti Saleha I dari Tallo (1767–1777) menyambutnya dengan baik dan menyerahkan penyelenggaraan pemerintahan kepadanya, bahkan ia menyatakan bahwa Tallo kini terlepas dari Gowa. Kendati demikian, penguasaan I Sangkilang atas Tallo tidak berlangsung lama (1778–1780) karena tak lama kemudian diambil alih oleh sekutu Belanda, Arung Pancana, Raja Tanete. Setelah itu, yang berkuasa di Tallo adalah Sultana Siti Saleha II[566] (1780–1824).

I Mappatunru (I Manginyarang) Karaeng Lembang Parang Sultan Abdul Rauf Tuminanga ri Katangka menaiki singgasana Kerajaan Tallo (1824–1825) menggantikan Sultana Siti Saleha II. Ia pernah pula menjadi Raja Gowa ke-30 (1811–1825) menggantikan ayahnya, Sultan Zainuddin dari Gowa. Pada masa pemerintahannya, meletus pemberontakan Abu Bakar Karaeng Data, putra I Sangkilang yang menuntut takhta Kerajaan Gowa. Kemudian singgasana Tallo beralih kepada I Kumala Karaeng Lembang Parang Sultan Abdul Kadir Muhammad Aidid Tuminanga ri Kakuasanna (Abdul Kadir III, memerintah pada 1825). Selanjutnya, Tallo diperintah oleh La Oddang Riu (Oddanriu) Karaeng Katangka Sultan Muhammad Zaenal Abidin Abdul Rahman Amiril Mukminin Tuminanga ri Suangga (Raja Tallo periode 1826–1845). Sebelumnya, ia pernah menduduki takhta sebagai Raja Gowa ke-31 selama setahun (1825–1826). Pada 1826, ia pindah ke Tallo dan atas persetujuan pemerintah Belanda ia menjadi raja di kawasan tersebut. Sesudah memerintah selama 20 tahun, La Oddang Riu Karaeng Katangka mangkat pada 1845 di Suangga. Karenanya, ia dianugerahi gelar anumerta Tuminanga ri Suangga (Yang Wafat di Suangga). Sepeninggal La Oddang Riu Karaeng Katangka, singgasana Tallo kembali diduduki seorang wanita, yakni Batari Toja Siti Aisya Karaeng Bontomasugi (1845–1850),[567] gelar anumertanya adalah Tumenanga-ri-Bontomanai. Singgasana Kerajaan Tallo kemudian beralih kepada La Makkarumpa (1850–1856) dan pada 1856, Tallo diperintah langsung oleh pemerintah kolonial Belanda sehingga berakhirlah kedaulatan kerajaan tersebut.

566. Lihat juga *http://www.guide2womenleaders.com/womeninpower/Womeninpower1800.htm* (diunduh pada 24 September 2009).

567. Lihat *http://www.guide2womenleaders.com/womeninpower/Womeninpower1840.htm* (diunduh pada 24 September 2009).

iii. Sosial Kemasyarakatan Gowa dan Tallo

Masyarakat di Gowa dan Tallo dibagi menjadi berbagai tingkatan, yakni *karaeng* (bangsawan), *tumaradeka* (orang merdeka atau orang biasa yang bukan budak), dan *ata* (budak). Golongan bangsawan sendiri dibagi tingkatannya. Yang tertinggi di antara mereka adalah *anak tino* yang berarti bahwa ayah dan ibunya sama-sama anak *tino* atau golongan bangsawan tertinggi. Ini masih dibedakan lagi menjadi dua, yakni anak *pattola* (arti harfiahnya 'anak pengganti') atau yang paling berhak menggantikan raja dan *anak manrapi'* (arti harfiahnya 'anak mencapai'), yaitu seseorang yang boleh menggantikan raja bila tak ada *anak pattola* atau karena *anak pattola* itu dianggap kurang pantas menjadi pengganti raja sebelumnya. Golongan bangsawan berikutnya adalah *anak sipuwe* (arti harfiahnya 'anak separuh'). Tingkatan ini masih dibedakan menjadi dua, yaitu

1) *Anak sipuwe-manrapi* (arti harfiahnya 'anak separuh-mencapai'), yaitu orang-orang yang ayahnya merupakan *anak tino* (baik *pattol*a maupun *manrapi'*), tetapi ibunya merupakan bangsawan yang tingkatannya di bawah *anak tino*. Mereka boleh menggantikan sebagai raja, asalkan tidak ada anak *pattola* dan *manrapi'*.
2) *Anak sipuwe* (arti harfiahnya 'separuh'), yakni bila ayahnya merupakan *anak tino*, tetapi ibunya adalah golongan orang biasa (*tumaradeka*).

Selanjutnya, golongan bangsawan masih mengenal pula *anak cera* (arti harfiahnya 'anak darah'), yakni bila ayahnya masuk golongan *tino*, tetapi ibunya golongan *ata*. Tingkatan bangsawan yang terakhir adalah anak *karaeng salah* (arti harfiahnya 'anak raja salah'). Ini berarti bahwa ayahnya adalah golongan *anak sipuwe* atau *cera*, sedangkan ibunya berasal dari golongan *ata*.

Yang termasuk *tumaradeka* (arti harfiahnya 'orang merdeka') adalah semua orang kebanyakan yang bukan budak. Mereka masih digolongkan lagi menjadi dua golongan, yakni *tubaji'* (arti harfiahnya 'orang bajik') dan *tusamara* (arti harfiahnya 'orang kebanyakan' atau 'orang biasa'). Orang *tubaji* dianggap merupakan orang kebanyakan yang berstatus lebih mulia. Mereka umumnya mempunyai dua nama sehingga juga disebut *tu rua arenna* atau 'orang yang dua namanya.' Nama itu masing-masing adalah nama diri dan nama yang mengandung gelar *daeng*.

Golongan *ata* (budak) juga dibagi dua, yakni *atta sossorang* atau budak turun-temurun dan *ata nibuang*, orang yang menjadi budak karena dijatuhi hukuman

atau ditawan dalam peperangan. Sebenarnya, masih ada satu golongan lagi, yakni *tumanginrang* (arti harfiahnya 'orang yang berutang'), mereka adalah orang-orang yang masih berutang kepada seseorang sehingga ia harus bekerja kepada pemberi utang hingga semua utangnya lunas.

Masyarakat Gowa Tallo dan suku Makassar pada umumnya sangat menjunjung tinggi hukum adat (*ada*). Pelanggaran terhadap *ada* diyakini dapat mengundang bencana. Sebagai contoh, ketika terjadi bencana gagal panen dan wabah penyakit hewan pada 1877–1878 di Galesong,[568] masyarakat menimpakan kesalahan itu kepada seseorang yang telah melakukan hubungan seksual terlarang dengan saudari tirinya. Kendati pelakunya telah dijatuhi hukuman menurut peraturan pemerintah kolonial Hindia Belanda, pemuka masyarakat tetap meminta Kontrolir Kooreman agar pelakunya diserahkan kepada mereka dan dijatuhi sanksi adat. Adapun hukuman menurut adat bagi pelanggaran semacam itu adalah memasukkan kedua pelakunya ke dalam karung dan setelah itu ditenggelamkan.

c. Kesusastraan Gowa dan Tallo

Bangsa Makassar juga menghasilkan beberapa karya sastra, yang terpenting di antaranya adalah *Patturioloang*. Naskah ini berisikan legenda dan riwayat raja-raja Gowa, umpamanya kisah Tumanurunga ri Tammalate seperti yang telah kita ulas di atas. Masih ada lagi catatan yang berjudul *Buku Catatan Harian Raja-raja Gowa dan Tallo*. Isinya mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kedua kerajaan tersebut. Perlu juga disebutkan suatu karya berjudul *La Towa* yang merupakan kumpulan nasihat raja-raja serta orang bijaksana di zaman dahulu. Di dalamnya antara lain disebutkan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan suatu negeri bergantung pada empat hal, yakni *ade* (adat atau tradisi), undang-undang, *bicara* (peradilan), *wari'* (pembagian tingkatan dalam masyarakat), dan *syara* (hukum agama).

Hasil kesusastraan lain yang juga menjadi sumber sejarah penting adalah *Syair Perang Mengkasar*, buah karya Enci' Amin. Penulis syair adalah juru tulis Sultan Hasanuddin yang berasal dari komunitas Melayu. Karya sastra berbahasa Melayu dengan huruf Jawi ini terdiri dari 534 bait, yang masing-masing memiliki 4 baris. Isinya mengisahkan mengenai pertentangan Sultan Hasanuddin dengan Belanda, yang dilanjutkan dengan peperangan antara keduanya, dan diakhiri dengan kekalahan Gowa. Enci' Amin dalam karyanya ini cukup akurat menggambarkan Perang

568. Lihat *Dinamika Bugis Makassar*, halaman 19.

Mengkasar dengan dilengkapi data yang dapat diandalkan. Sebagai contoh Enci' Amin menggambarkan jumlah serdadu yang ikut serta dalam ekspedisi Speelman, yang dieja dengan *Sipalman* dalam karya tersebut.

Tujuh ratus enam puluh soldadu yang muda-muda

memakai kamsol cara Welanda

Rupanya sikap seperti Garuda

bermuatlah ke kapal barang yang ada.[569]

Ternyata sumber Belanda menyebutkan "*...500 duytse en 300 inlandse soldaeten*" (500 serdadu Belanda dan 300 serdadu bumiputra), yang secara keseluruhan berjumlah 800 orang. Kedekatan jumlah ini menandakan bahwa tulisan Enci' Amin juga didasarkan pada fakta. Meskipun demikian, objektivitas itu sedikit banyak dipengaruhi oleh kenyataan bahwa komunitas Melayu asal mula Enci' Amin yang telah banyak berperan dalam perniagaan di kawasan itu akan mengalami kerugian bila Belanda meraih kemenangan. Dengan demikian, Belanda dalam syair ini digambarkan sedemikian buruknya, sebaliknya tokoh Sultan Hasanuddin sangat diagung-agungkan.

XIII. KASSA

Kerajaan Kassa meliputi distrik-distrik Belajeng, Garungga, Maroanging, Pake, Lomba, dan Salu Baku. Rajanya bergelar *arung* dan dalam pemerintahannya dibantu oleh pejabat-pejabat bergelar *sullewatang*, *pabbicara*, serta *matowa*. Berdasarkan kontrak politik yang ditandatangani Kerajaan Kassa pada 23 November 1890, ditetapkan bahwa negeri tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut.

- Utara : Enrekang
- Timur : Maiwa dan Enrekang
- Selatan : Sawitto
- Barat : Batulappa

Jumlah penduduk Kassa saat itu adalah 1.500 jiwa. Kerajaan Kassa pernah diperintah oleh Andi Samang (±1880–1897) dan Buabara (1897–1940). Baubara digantikan oleh putranya, Andi Coppo (1940–1952). Sementara itu, menurut data yang diberikan oleh Yang Mulia Andi Hasan Parigi Petta Nassa, raja-raja

569. *Syair Perang Mengkasar*, halaman 79, bait ke-37.

yang pernah memerintah Kerajaan Kassa adalah Andi Basu Matinro Tellanggana–seorang raja yang memindahkan pusat pemerintahan dari Capodeng ke Kassa, Puang Matinro Pao, Puang Rawa di Kassa, Siang Daeng Matajang di Kassa, La Kassang Daeng Silasa, Samang di Bilajeng, Andi Coppo, Puang Sulewatang Kassa, Puang Galatung, Puang Paggalengkeng, Puang Pabbicara Kassa, Pabbicara Kassa, Daeng Siangka, dan Andi Pattonang. Raja Samang di Bilajeng memindahkan pusat pemerintahan ke Bilajeng.

Berdasarkan sumber lainnya, disebutkan bahwa Kerajaan Kassa sekerabat dengan Batulappa. Keturunan kesembilan leluhur mereka, yakni To Manurung Palipada, adalah seseorang bergelar Matinro Pakalabinna Puang Cemba, yang tak diketahui nama aslinya. Ia menikah dengan Makke dan memiliki dua orang anak, yakni Matindo Membura (kelak menjadi Puang Cemba) dan Daeng Manrapi Puang Madeakaju Enrekang, yang menikah dengan Subahana, putri Raja Sawitto. Pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yang bernama Baso Puang Buttu Kanan dan Bosu Matindo Tallonganna.

Baso Puang Buttu Kanan lantas menjadi Raja Batulappa, sedangkan saudaranya, Bosu Matindo Tallonganna (1700–1735), menjadi Raja Kassa. Bosu Matindo Tallonganna digantikan oleh Matindo Pao Rawa Katakka (1735–1765). Raja Kassa berikutnya adalah Siang Daeng Matajang (1765–1810). Karena menderita sakit, ia digantikan oleh saudaranya, Tangkiling (1810–1811). Raja Kassa berikutnya adalah putra Siang Daeng Matajang, La Kasang (1811–1860) yang juga menduduki jabatan sebagai Arung Buttu ke-9. La Kasang digantikan oleh putranya, La Samang (1860–1895), yang menandatangani kontrak dengan pemerintah kolonial pada 23 November 1890. Di dalam kontrak tersebut tertera bahwa Kassa dipimpin seorang *arung*, yang dibantu seorang *sullewatang*, *pabbicara*, dan *matoa*. Selain itu, masih terdapat pemimpin keagamaan berupa kali, imam, bilal, khatib, dan *doja*.

La Samang digantikan oleh anaknya, yakni Bua Bara (1895–1908). Semasa pemerintahannya, pemerintah kolonial Belanda sedang memantapkan kekuasaannya yang dikenal sebagai pasifikasi (usaha yang bertujuan mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadi peperangan). Bua Bara kemudian digantikan oleh putranya, La Tjoppo (1908–1943). Bersamaan dengan pemerintahannya, berlangsunglah penjajahan Jepang.

XIV. LETTA

Menurut manuskrip yang diberikan oleh Yang Mulia Bapak Andi Hasan Parigi Petta Nassa, leluhur para Arung Letta adalah seorang tokoh bernama Bongga Karadeng. Ia merupakan salah seorang yang selamat dalam bencana banjir besar. Setelah terapung-apung beberapa lama, mereka terdampar di Sanganggala-Tana Toraja dan Tanah To Letta-Tanah Pattinjo. Mereka kemudian membangun pemukiman dan tanah pertanian di bawah pimpinan Bongga Karadeng. Bongga Karadeng menikah dengan seorang putri *to manurung* (orang yang turun dari langit), Datu Maringan. Putri ini keluar dari rumpun bambu bersama saudaranya. Demi menjaga Datu Maringan, saudaranya itu menjelma menjadi ular. Anak buah Bongga Karadeng yang tidak mengetahuinya lantas membunuh dan mencincang ular tersebut.

Akibat saudaranya telah dibunuh oleh pengikut Bongga Karadeng, Datu Maringan menjadi marah dan tidak mau berbicara dengan suaminya. Tentu saja Bongga Karadeng merasa kebingungan dan mencari cara agar istrinya bersedia berbicara lagi dengannya. Suatu kali, Bongga Karadeng pergi berburu bersama dengan para pengikutnya dan mendapatkan binatang buruan. Hewan itu kemudian diusung ke rumah tongkonan Bongga Karadeng. Datu Maringan melihatnya dari jauh dan merasa terkejut. Ia serta merta menanyakan apakah yang sedang diusung itu. Karena istrinya telah berbicara, Bongga Karadeng memanfaatkan kesempatan tersebut dan menanyakan mengapakah istrinya berdiam diri selama beberapa bulan. Istrinya menjawab bahwa ia merasa sakit hati sebab kakaknya yang menjelma menjadi ular telah dibunuh oleh para pengikut Bongga Karadeng.

Datu Maringan kemudian meminta agar tulang dan kulit kakaknya yang telah dicincang agar dikumpulkan menjadi satu serta dimasukkan ke dalam kayu berlubang dan baru setelah itu disemayamkan di bubungan rumah tongkonan, yang menjadi tradisi suku bangsa Toraja hingga saat ini. Diriwayatkan bahwa pernikahan Bongga Karadeng dan Datu Maringan membuahkan tujuh orang putra, yakni

- Lando Guttu, yang menjadi penguasa di Tana Toraja.
- Binggo Lana, yang menjadi penguasa di Gowa.
- Datu Kalali, yang menjadi penguasa di Luwu.
- La Mindu Rana
- Pongka Padang, yang menjadi penguasa di Mandar.
- Lando Biluwa (perempuan), yang menjadi penguasa di Bone.

- To Lambing Susu (perempuan), yang menjadi penguasa di Enrekang, Letta, Sawitto, dan sekitarnya.

Untuk memperkuat persahabatan di antara kerajaan-kerajaan tersebut, diadakanlah pertemuan adat di Simbuang dan sebagai hasilnya diadakan perjanjian yang dikenal sebagai Lamunan Batu Tallu. Gunanya sebagai peringatan akan persaudaraan atau kekerabatan mereka.

Bersamaan dengan itu, dilangsungkan pula pembagian pusaka sebagai berikut.

- Sawitto dan Letta mendapatkan bagian mustika besi dan sarung pisau terapung dari emas murni.
- Tana Toraja mendapatkan permata batu delima dan besi yang terapung (lindong).
- Mandar mendapatkan Lala Kalando dan Kurri-Kurri (Kuajang).

Selanjutnya, diikrarkanlah perjanjian yang sakral di antara mereka.

To Lambing Susu menjadi Eaja Letta pertama. Ia digantikan oleh Puang di Buttu Bajai. Selanjutnya, Puang Massaguni yang merupakan putra Puang Sangngalla serta menantu Puang di Buttu Bajai diangkat sebagai Raja Letta ke-3. Penggantinya selaku Raja Letta ke-4 adalah Puang To Sakka, yang merupakan putra Puang di Buttu Bajai. Semasa pemerintahannya, batu bersusun tiga yang disebut To Saletta menghilang dan ditemukan kembali di Tana Toraja. Ia kemudian diturunkan dari takhtanya karena dianggap melakukan pelanggaran terhadap dewata. Puang To Reu menjadi Raja Letta ke-5 menggantikan saudaranya. Karena rakyat Letta jatuh miskin semasa pemerintahannya, ia kemudian dipecat oleh rakyatnya.

Pengganti Puang To Reu adalah saudaranya yang bernama Puang Tomeraja. Pada zamannya, rakyat Letta menjadi makmur kembali. Puang Tomeraja memelihara kuda, kerbau, dan babi, namun dikandangkan di perkampungan penduduk, akibatnya hewan-hewan tersebut merusak tanaman rakyat Letta. Selain itu, Puang Tomeraja juga bertangan besi dalam memerintah. Oleh karenanya, ia kemudian diusir dari singgasananya. Raja Letta ke-6, La Galenrong, adalah putra Puang Massaguni dengan anak perempuan To Manurung Botin Langi, yakni ipar Puang Sakka, cucu Bongga Karadeng. Ia konon dianugerahi dua senjata pusaka yang berasal dari penjelmaan seekor ular besar. La Galenrong membina persahabatan dengan kerajaan-kerajaan di

sekitarnya, seperti Enrekang, Luwu, dan lain sebagainya. Sumbangsihnya yang lain adalah membuka areal persawahan.

Raja Letta berikutnya, Puang Batara Lomba, sesungguhnya adalah pelaksana harian pemerintahan Letta sewaktu La Galenrang mengunjungi kerajaan-kerajaan lainnya. Puang Batara kemudian mengangkat Puang Lampe Susu sebagai penguasa Letta berikutnya. Rangkaian para Arung Letta berikutnya adalah Puang di Buttu Raja, Tanri Lawa, Baso Sangga Rumah, Puang di Panjing Maddea Kaju, dan Puang Beteng. Baso Sangga Rumah adalah *arung* yang tinggal di rumah kerajaan bernama Sangga Rumah di Kowa. Raja Letta ke-16 adalah Petta Tellu Mappajunge La Mappesanae Puang Tellu Tambinna Bakka Mattamanua Letta. Kerajaan Letta saat itu membantu Bone dalam menghadapi musuh-musuhnya. Andi Tenri Angka, Arung Letta ke-17, merupakan putra Arung Enrekang pertama, Takkebuku. Pengganti Andi Tenri Angka adalah Puang Cemniring Mantindo Wala Walanna, selaku Arung Letta ke-18.

Selanjutnya, Letta diperintah secara berturut-turut oleh Puang Daeng Sitopa, Arung Puang Daeng Mangopo, Arung Puang Katoja, Arung Cala Puang Daeng Pasari (kemenakan Puang Katoja), Lipu Puang Daeng Pako, H. A. Kitta Puang Daeng Pawara, A. Tawakkal H. Kita, Andi Lasanrong Kitta, Barokke, H. Andi Beroh Tjangke, dan Andi Hasan Parigi Petta Nassa.

Yang Mulia Bapak Andi Hasan Parigi Petta Nassa adalah pensiunan TNI. Pengangkatannya sebagai Arung Letta berlangsung pada 11 Desember 1982. Kegiatan yang pernah ia ikuti antara lain Festival Keraton Nusantara IV di Yogyakarta (2004) dan Musyawarah Agung Forum Silaturahmi Keraton Nusantara di Bali (30 Juli–20 Agustus 2007).

Yang Mulia Bapak Andi Hasan Parigi Petta Nassa

XIV. LUWU

a. Cikal Bakal Kerajaan Luwu

Luwu merupakan kerajaan yang sangat tua usianya di Sulawesi Selatan. Menurut legenda, peletak dasar bagi kerajaan ini adalah seorang tokoh legendaris keturunan dewa bernama Batara Guru.[570] Menurut salah satu cerita rakyat, Batara Guru ini merupakan putra Tamboro' Langi yang disebut juga PatotoE yang turun di puncak Gunung Latimojong. Asal usulnya tidak diketahui dengan pasti, hanya saja disebutkan bahwa ia berada di Boting Langi (arti harfiahnya 'petala langit'). Batara Guru yang disebut juga dengan La Tonge Langi merupakan putra sulung Tamboro' Langi dan menurut legenda muncul dari sebatang bambu petung (dalam

570. Lihat *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*, halaman 20.

bahasa Bugis disebut *ma' deppaE ri lappa tellang*). Batara Guru disebutkan memiliki istri bernama We Nyilittimo TompoE ri Busa Empong, yang konon datang dari laut dan merupakan penjelmaan buih-buih air. Sepasang suami istri yang diyakini sebagai cikal bakal raja-raja di Sulawesi Selatan ini bertemu di sebuah tempat bernama Wara' (Ware').

Belum banyak diketahui secara pasti kondisi Kerajaan Luwu saat itu, baik dari segi pemerintahan maupun sosial kemasyarakatannya. Selain menikah dengan We Nyilittimo, Batara Guru menikah pula dengan We Saungriu. Pernikahan itu membuahkan seorang putri yang mati muda. Anak ini kemudian dikremasi dan di tempat perabuan jenazahnya tumbuh padi pertama di Luwu. Setelah kondisi pemerintahan dirasa kokoh, Batara Guru menyerahkan kekuasaan kepada Batara Lattu dan kembali ke langit. Batara Lattu memerintah selama kurang lebih 20 tahun. Ia dikisahkan menikah dengan We Sengngeng. Di samping Istana Finseimouni yang didirikan Batara Guru, Batara Lattu membangun sebuah istana lagi di kampung Ussu' yang dijadikan pusat kegiatan pemerintahan dan pengaturan penduduk. Dalam bidang kerohanian, Batara Lattu mendirikan tempat kediaman para *bissu* (dukun atau pemimpin upacara ritual) di Cerekang. Dengan demikian, Finseimouni, Ussu', dan Cerekang menjadi segitiga pusat kekuasaan politik kerajaan ini. Ada berbagai sumber sejarah yang menempatkan masa pemerintahan Batara Guru dan Batara Letta ini masing-masing pada abad 6 dan 10.[571] Mereka dianggap sebagai peletak dasar bagi kebudayaan Bugis dan Makassar.

Batara Lattu memiliki anak kembar, seorang putra bernama Sawerigading dan seorang putri bernama We Tenriabeng. Hingga berusia empat puluh hari mereka disusui oleh ibunya sendiri dan kemudian diserahkan kepada ibu susuannya masing-masing. Kedua saudara kandung itu dipisahkan semenjak balita dan baru bersua kembali saat menjelang remaja. Ternyata Sawerigading jatuh cinta pada saudari kandungnya itu. Ia menyampaikan niatnya menikahi We Tenriabeng kepada ayahnya. Batara Lattu melarangnya dan menjelaskan bahwa We Tenriabeng adalah saudari kandung Sawerigading, tetapi Sawerigading tetap bersikeras pada pendiriannya sehingga We Tenriabeng akhirnya menyarankan agar Sawerigading mencari wanita lain yang mirip dengan dirinya bernama We Cudai. Demi menjumpai We Cudai yang

571. Lihat *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 38.

saat itu berada di Kerajaan Cina,[572] Sawerigading harus berpetualang menyeberangi lautan serta menghadapi banyak rintangan.

Karena cintanya yang sangat mendalam, Sawerigading menyatakan bahwa ia akan pergi berkelana. Batara Lattu mengizinkannya menebang pohon kayu raksasa bernama We Lengrenge yang merupakan pusaka kerajaan. Konon, karena ukurannya yang luar biasa, pohon ini dapat dijadikan perahu berukuran besar sebanyak tujuh buah. Sementara itu, ada sumber lain yang menyatakan bahwa tinggi pohon ini mencapai 100 km. Begitu pohon ini tumbang, ujungnya menimpa sebuah bukit kecil di sebuah tanjung sebelah timur Ussu hingga terbelah menjadi dua. Karenanya, tempat itu kemudian diberi nama Bulu' Polo, bahkan air yang berada di Teluk Ussu ikut naik setinggi 20 meter akibat tertimpa pohon tersebut. Terjadilah banjir besar yang menenggelamkan kawasan tepi pantai, hanya orang-orang yang berada di atas perahu yang selamat. Mereka selanjutnya diyakini sebagai leluhur suku Bajo.

Batara Lattu mangkat dan digantikan oleh Sawerigading. Semasa pemerintahan cucu Batara Guru ini mulai dikenal sistem pemerintahan dan tatanan masyarakat yang lebih teratur, tetapi masih belum ditemukan sumber-sumber yang memberikan keterangan terperinci mengenai hal itu. Sawerigading digantikan oleh Lagaligo dan setelah itu La Tenritatta. Berikutnya berlangsung periode kegelapan yang disebut *sianre baleni tauwe* selama tujuh belas generasi. Konon pada masa ini, tidak ada kekuataan yang sanggup mempersatukan rakyat Luwu sehingga banyak timbul kerajaan-kerajaan kecil. Periode kekacauan ini baru berakhir dengan turunnya seorang *to manurung* atau orang yang turun dari langit. Tokoh yang dikenal sebagai To Manurung Simpuru Siang (Simpurusiang) Mannurunge ri Luwu (Tomanurunge ri Attangware) ini menjadi *Datu* (Raja) Luwu pertama. Naik takhtanya penguasa pertama ini diperkirakan terjadi pada abad 14. Ada puls sumber yang menyatakan bahwa Batara Lattu langsung digantikan oleh Simpurusiang. Dengan demikian, Batara Guru adalah Datu Luwu pertama, Batara Lattu yang ke-2, dan Simpurusiang yang ke-3.

Anakaji menggantikan Simpurusiang sebagai Datu Luwu ke-4. Menurut Kitab *I La Galigo*, Anakaji menikah dengan seorang putri Majapahit bernama Tampabalusu atau Tappacina. Oleh karenanya, jika keterangan dari *I La Galigo* ini benar, raja-raja Luwu selanjutnya merupakan keturunan Majapahit. Pernikahan ini mengisyaratkan

572. Ada sumber yang menyatakan bahwa kerajaan ini bukanlah Tiongkok, melainkan nama salah satu kerajaan kuno di Sulawesi Selatan.

pula bahwa Luwu merupakan kerajaan yang disegani di kawasan timur Kepulauan Nusantara. Sepeninggal Anakaji, singgasana Luwu beralih kepada putranya yang bernama Tanpa Balusu (1330–1365) selaku Datu Luwu ke-5.

Tanra Balusu (1365–1402) merupakan Datu Luwu ke-6 yang menggantikan ayahnya, Tanpa Balusu. Kondisi pemerintahan Kerajaan Luwu dapat dikatakan mantap dan stabil pada masa pemerintahannya. Armada Majapahit kerap datang mengiringi para pedagang memasuki Pelabuhan Ussu'. Raja Luwu ini menyelesaikan proyek-proyek yang telah dirintis ayahnya, yakni pembangunan di pelabulan Teluk Pae serta Teluk Mengkoka. Dengan demikian, Luwu sanggup menjadi pusat perdagangan yang ramai di Indonesia Timur. Bahkan para pedagang luar negeri juga turut singgah di sana. Waktu itu, agama yang dianut oleh kaum bangsawan dan pemuka masyarakat adalah perpaduan antara kepercayaan setempat dengan agama Hindu Buddha di Jawa. Kendati demikian, rakyat masih banyak yang menganut animisme serta dinamisme.

Singgasana Luwu kemudian beralih kepada Toappanange (Toampanage, memerintah pada 1402–1426), putra Tanrabalusu, selaku Datu Luwu ke-7. Pada masanya, Luwu tetap aman dan damai. Perniagaan bertambah ramai sehingga barang-barang yang diperdagangkan pun makin beragam, baik berupa hasil hutan, laut, pertanian, maupun pertambangan. Hubungan antara Luwu dan Majapahit tetap terjalin erat. Konon, Raja Toappanange memerintah semasa dengan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada dari Majapahit. Toappanange digantikan oleh putranya, Batara Guru II (1426–1458).

La Mariawa (1458–1465) diangkat sebagai Datu Luwu ke-9 menggantikan Batara Guru (II). Ia adalah putra ketiga Tanra Balusu. Dengan demikian, berdasarkan silsilah ia adalah paman Batara Guru (II). Saat hendak dinobatkan sebagai *datu*, usianya masih sangat muda. Oleh karena itu, Dewan Adat Luwu memutuskan mengangkatnya kelak bila ia telah dewasa. La Mariawa merupakan seorang penguasa yang sabar, berjiwa terbuka, dan merakyat. Ia memiliki kepribadian yang menyenangkan semua orang. Selain itu, dalam memutuskan sesuatu La Mariawa selalu penuh pertimbangan sehingga oleh sebagian kalangan kerap dianggap lamban bertindak. Secara umum, saat berkuasanya La Mariawa Luwu berada dalam kondisi yang damai. Ia sering memberikan wejangan mengenai perlunya ketenangan hidup dan kewaspadaan. Menurutnya, keberanian memang penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah kehati-hatian dan menghindari sikap serampangan. Itulah

sebabnya, La Mariawa digelari Datu MapataE (Yang Tenang atau Banyak Berpikir). Selanjutnya, yang bertakhta sebagai Datu Luwu ke-10 adalah Risaung Le'bi (1465 –1507), putra Batara Guru II.

Hingga akhir abad 15, Luwu merupakan kerajaan yang paling dominan di seluruh kawasan suku Bugis. Pengaruhnya terasa hingga daerah pesisir Danau Besar (Tappareng Karaja), tepi Sungai Walennae, dataran di sebelah timur dan sepanjang pantai Teluk Bone, Semenanjung Bira, Pulau Selayar, serta timur Bantaeng.[573] Benih-benih penentangan terhadap hegemoni Luwu mulai bermunculan. Perkampungan di muara Sungai Cenrana merupakan tempat kesukaan Datu Luwu. Sementara di hulu sungai tersebut terdapat kerajaan-kerajaan kecil yang mengakui kedaulatan Luwu, seperti Mampu, Pammana, Bola, dan Babauwe. Luwu berupaya meluaskan wilayahnya ke arah Barat demi memperoleh akses ke daerah pegunungan Toraja. Namun, Sidenreng bersama Sawitto, Alitta, Suppa, Rappang, dan Bacukiki bersatu padu mengganjal ambisi Luwu dengan membentuk persekutuan Ajattaparang.

Dewaraja, putra Datu Risaung Le'bi, yang juga dikenal sebagai Maninggoe ri Bajo (1507–1541) adalah Datu Luwu ke-11. Kerajaan Luwu masih berada di puncak kejayaannya sebelum digeser oleh Gowa pada abad 16–17. Para pedagang asing mulai berdatangan ke Sulawesi Selatan yang tentu saja menguntungkan Luwu. Komoditas-komoditas Luwu (di antaranya adalah besi) mulai dikenal hingga ke berbagai penjuru Kepulauan Nusantara dan mancanegara.

Gelar lain bagi *datu* atau penguasa Luwu adalah *pajung*, namun tidak seluruhnya menyandang gelar tersebut. Hanya mereka yang sanggup mengikuti upacara pelantikan sebagai *pajung* yang berhak menyandangnya. Upacara ini berawal dari masa Dewaraja dan riwayat asal mulanya dituturkan sebagai berikut.

Pada 1530, Dewaraja berperang dengan Bone, ia dikepung oleh musuh selama dua minggu. Tatkala berada dalam kepungan pasukan Bone itu, Dewaraja tidak makan nasi dan hanya menyantap umbi-umbian saja demi menahan lapar. Raja Bone ke-5, La Tenrisukki, berhasil mengalahkan pasukan Luwu yang dilanda kelaparan tersebut dan merebut *pajung* (payung) kebesarannya. Menurut tradisi yang berlaku, Bone telah memenangkan peperangan, tetapi raja La Tenrisukki hanya meminta wilayah Cenrana saja. Bone mengembalikan payung kebesaran Luwu saat berlangsung penyerahan wilayah Cenrana. Namun, Dewaraja yang menganggap payung itu telah

573. Lihat *Manusia Bugis*, halaman 133.

tercemar menyerahkannya kembali kepada Bone. Sebagai gantinya dibuatlah payung kebesaran baru.

Saat berlangsung ujian pengangkatan sebagai *pajung*, raja diharuskan hidup menderita selama tujuh hari tujuh malam. Ia mengenakan pakaian sederhana dan tidak terjahit, tidur hanya boleh beralaskan daun kelapa, hanya tinggal di tempat yang beratapkan langit sehingga terpaksa menahan hujan, dingin malam, serta terik matahari. Dengan meneladani Dewaraja dahulu, raja yang bersangkutan tidak boleh makan nasi dan hanya diperkenankan menyantap umbi-umbian beserta makanan sederhana lainnya. Selain itu, masih banyak penderitaan lahir batin yang harus dilaluinya selama masa pengujian tersebut. Ketika Raja atau Ratu Luwu sedang mengikuti ujian ini, pemerintahan dipegang oleh *opu cenning* atau *anak mattola*, calon pengganti raja. Rangkaian upacara ini diawasi secara ketat oleh dewan adat Luwu dan harus dijalani secara lengkap jumlah harinya. Apabila rangkaian upacara telah dijalankan secara sempurna, penguasa yang lulus ujian ini berhak menyandang gelar Pajung Maharaja Luwu. Segenap titahnya harus dipatuhi dan ia juga digelari To RisompaE (yang dipuja).

Sumber lainnya memberikan informasi yang berbeda dengan menyatakan bahwa setelah mangkatnya Datu Luwu bernama Rajadewa kurang lebih pada 1530,[574] dua orang keturunannya, Sanggaria to-Appaiyo dan Opu Daeng Lebba, berebut kekuasaan. Awalnya mereka berdua tak keberatan saling berbagi kekuasaan, namun setahun kemudian Daeng Lebba dijatuhkan dari kedudukannya dan terpaksa melarikan diri ke Gowa. Pada 1533, Daeng Matanre mengirimkan pasukan Gowa di bawah pimpinan putranya, Manrio Gau, dalam rangka membantu Raja Bone, La Tenrisukki, merebut Cenrana yang saat itu dikuasai Sanggaria. Saat itu, Soppeng turut pula diobrak-abrik oleh laskar-laskar Gowa. Kurang lebih pada 1535, Sanggaria digulingkan dan mencari suaka ke Wajo. Pengganti La Tenrisukki memanfaatkan kesempatan ini dan menggandeng Gowa untuk melancarkan serangan ke Luwu, yang akhirnya berhasil mereka kalahkan. Luwu mengakui kekalahannya dan mengikat perjanjian dengan Gowa.

Sebagai bukti kesetiaannya terhadap Gowa, Luwu diajak memerangi Wajo. Serangan ini dimaksudkan sebagai hukuman atas sikap Wajo yang tak bersedia membantu Gowa saat berlangsung peperangan melawan Luwu. Wajo ketika itu bersikap netral. Sebagai kerajaan bawahan atau sekutu Luwu, Wajo seharusnya turut

574. Lihat *Manusia Bugis*, halaman 140. Kemungkian Rajadewa ini sama dengan Dewaraja.

membantu Luwu atau mengumumkan peralihan pihak. Akibat sikap netralnya itu, Wajo dianggap melakukan kesalahan ganda, baik terhadap Gowa maupun Luwu. Akhirnya, pada Perjanjian Topaceddo (1539) Wajo secara resmi mengalihkan persekutuannya dari Luwu ke Gowa. Sanggaria dipulihkan kedudukannya lagi. Kendati masih dianggap sebagai raja yang paling tinggi di Sulawesi Selatan, namun kekuasaannya tidaklah sebesar dahulu lagi.

Dewaraja digantikan oleh adik bungsunya, Tosangkawana (1541–1556), selaku Datu Luwu ke-12. Pada masa kekuasaannya, daerah Cenrana telah jatuh ke tangan Bone dan batas sebelah selatan Luwu adalah negeri Akotengeng. Datu Maoge menggantikan pamannya, Tosangkawana, sebagai Datu Luwu ke-13. Ia menata kembali kerajaannya setelah berlangsung peperangan dengan Bone. Ibu kota kerajaan dipindahkan ke Pattimang (Malangke). Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan Luwu, seperti Ussu', Cerekang, Lelewau, Pao, Kolaka, dan lain sebagainya, makin ramai dikunjungi para pedagang, termasuk dari mancanegara (seperti Tumasik atau Singapura sekarang). Relasi bilateral antara Luwu dengan Gowa makin membaik pula pada masa pemerintahannya. Datu Maoge digantikan oleh saudari sepupunya, We Tenrirawe (1571).

Wanita yang menjadi Datu Luwu ke-14 ini senantiasa bersikap tegas sehingga perekonomian kerajaan mengalami kemajuan. Ia memanfaatkan jasa seorang cerdik pandai bernama To Ciung–menilik dari namanya kemungkinan ia adalah keturunan Cina. Bisa jadi ia berasal dari kalangan Cina-Melayu[575] yang datang ke Luwu bersama dengan serombongan pedagang. Hukum diterapkan dengan tegas di Luwu dan dalam pengambilan keputusan, To Ciung yang menjabat sebagai *opu patunru* selalu melibatkan para pejabat adat Luwu. Beberapa hukum dasar Luwu dirumuskannya, yang antara lain berbunyi

- *puwang temma bawangpawang* (raja tidak menganiaya) atau *tenri bawangpawang* (rakyat tidak dianiaya).
- *Puwang mapatutu* (raja memelihara/ memeriksa) atau *ata ripatutu* (rakyat dipelihara/ diperiksa).
- *Puwang maddampeng* (raja memaafkan) atau ata *riaddempengeng* (rakyat dimaafkan).
- *Puwang teppaleo-leo* (raja tidak mencela) atau *ata tenrileoleo* (rakyat tidak dicela).

575. Lihat *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 76.

- *Kalo luka bola* (parit menggeser rumah) atau *bola luka taneng-taneng* (rumah menggeser tanaman).

Butir kelima maknanya adalah mendahulukan fasilitas umum. Apabila parit harus dibangun melintasi sebuah rumah maka rumahnya yang harus digeser. Selain parit, yang dianggap fasilitas umum adalah jalan, pasar, tanah lapang, dan lain sebagainya. Adanya hukum dasar ini menandakan perubahan sistem pemerintahan monarki absolut menjadi monarki konsitusional, hukum dasar yang berlaku harus pula dipatuhi oleh raja.

b. Perkembangan Kerajaan Luwu

Agama Islam tersebar di Luwu semasa pemerintahan Datu Luwu ke-15, Patiarase (La Pattiware Daeng Parembung Sultan Muhammad), yang menggantikan ibunya, We Tenrirawe. Peristiwa masuknya agama Islam ini diperkirakan terjadi pada kurang lebih abad 17. Patiarase merupakan Raja Luwu pertama yang menganut agama Islam dan selanjutnya bergelar Sultan Muhammad. Ulama terkemuka yang menyiarkan agama Islam di Luwu adalah Datuk Sulaeman atau Datuk Pattimang dari Minangkabau. Raja Patiarase menikah dengan seorang putri dari Gowa bernama Karaeng ri Balla Bugisi dan dikaruniai tiga orang anak, yakni Patiaraja (juga dieja Pattiaraja, bergelar Somba Opu), Patipasaung (Pattipasaung), dan We Tenrisiri Somba Baine.

Patiarase digantikan oleh Patipasaung (Pati Passaung) Sultan Abdullah MatinroE ri Patimang (1615–1637) selaku Datu Luwu ke-16, yang seharusnya bukan calon utama pengganti raja. Namun, karena kakaknya dianggap kurang baik akhlaknya, yakni kerap menonton pertandingan sabung ayam, kedapatan dalam kumpulan para peminum tuak (*ballo*), dan gemar berteriak atau tertawa terbahak-bahak, haknya sebagai pewaris takhta dialihkan kepada Patipasaung. Penobatan Patipasaung sebagai Raja Luwu ini menimbulkan perpecahan di kerajaan tersebut. Patiaraja akhirnya meninggalkan Malangke yang menjadi ibu kota Luwu saat itu dan menuju ke kawasan Kamanre, pusat kekuasaan Dewaraja dahulu. Di sana, Patiaraja menobatkan dirinya sebagai Datu Luwu. Dengan demikian, Luwu terpecah menjadi dua; yang pertama berpusat di Malangke dengan Patipasaung sebagai rajanya, dan yang kedua berpusat di Kamare dengan Patiaraja sebagai rajanya.

Pada 1616, meletus perang saudara antara kedua kerajaan pecahan Luwu tersebut. Tidak ada pihak yang menang ataupun kalah. Demi mengatasi peperangan yang berlarut-larut ini, Madika Bua selaku tokoh masyarakat dengan pengaruhnya

yang besar berniat mempertemukan keduanya. Momen yang dirasa tepat adalah saat berlangsungnya perayaan panen raya di Bua. Kedua orang raja diundang, tetapi diatur seolah-olah bahwa hanya mereka saja yang menerima kehormatan tersebut. Balairung tengah tempat berlangsungnya perayaan dirancang sebagai lokasi pertemuan dua orang raja itu. Ketika bertemu satu sama lain, Patiaraja dan Patipasaung sangat terkejut. Mereka masing-masing kemudian diserahi sebilah senjata. Madika Bua mempersilakan mereka bertarung karena rakyat sudah lelah dengan adanya pertikaian antara kedua penguasa Luwu tersebut. Patiaraja segera menyerahkan badiknya kepada Patipasaung dan memeluk adiknya. Dengan demikian, berakhirlah permusuhan yang berlarut-larut dan telah menelan banyak korban jiwa. Peristiwa membahagiakan ini berlangsung pada 1619. Ibu kota Luwu lalu dipindahkan ke Palopo dan sebuah masjid yang megah didirikan di sana.

Patipasaung digantikan oleh putranya, Petta MatinroE ri Gowa (1637–1663) selaku Datu Luwu ke-17. Ia menikah dengan Opu Daeng Masalle dan memperoleh dua orang anak, yakni Settiaraja dan Opu Pawelai Luminda. Settiaraja MatinroE ri Tompotikka (1663–1704) lalu menggantikan ayahnya sebagai Datu Luwu ke-18. Ketika Settiaraja berangkat ke Gowa guna membantu Sultan Hasanuddin dalam perjuangannya melawan VOC, saudara sepupunya, Petta MatinroE ri Polka, diangkat secara diam-diam sebagai Datu Luwu ke-19 menggantikannya. Setelah itu, Settiaraja kembali menjadi Raja di Luwu dan pemerintahan keduanya ini dihitung sebagai Datu Luwu ke-20. Sepeninggal Settiaraja, putranya yang bernama To Palaguna Sultan Muhammad Muhidin MatinroE ri Langkanana (1704–1706) naik takhta sebagai Datu Luwu ke-21. Ia menikah dengan Datu Tanete dan dikaruniai seorang putri bernama Batari Tungke. Pada zamannya, Luwu kembali menjadi kerajaan yang makmur serta dihormati. Oleh karenanya, banyak bangsawan Bone yang bertandang ke Luwu. Kaum pedagang beserta petani dari Wajo dan Soppeng berbondong-bondong mengadakan perniagaan ke kerajaan tersebut. To Palaguna memerintah hanya dua tahun dan setelah itu mangkat serta dianugerahi gelar anumerta MatinroE ri Langkanana. Langkanana adalah nama istana Datu Luwu di Palopo.

Batari Tungke Sultana Fatima MatinroE ri Patturo (1706–1715) adalah penguasa wanita yang menggantikan ayahnya, To Palaguna, sebagai Datu Luwu ke-22. Ia menikah dengan Petta MatinroE ri Suppa dan melahirkan We Tenrileleang serta La Tenrioddang MatinroE ri Musu'na. Bersamaan dengan itu, pecah peperangan antara

Wajo dengan Belanda yang dibantu oleh Bone dan Luwu. La Tenrioddang gugur dalam kancah pertempuran tersebut. We Tenrileleang diangkat sebagai penguasa di Pancanna, yakni suatu daerah di dekat perbatasan Tanete dan Barru. Selanjutnya, yang berturut-turut menjadi Datu Luwu adalah Batari Toja Sultana Siti Saenab MatinroE ri Timpuluna (Datu Luwu ke-23, memerintah pada 1715–1748), We Tenrileleang (pemerintahan pertama sebagai Datu Luwu ke-24 pada 1748–1778), La Kaseng MatinroE ri KalukubodoE (Datu Luwu ke-25, memerintah pada 1760–1765), We Tenrileleang (pemerintahan kedua sebagai Datu Luwu ke-26), dan La Tenripeppang (Datu Luwu ke-27, memerintah pada 1778–1810).

Datu Luwu ke-28 adalah seorang wanita bernama We Tenriawaru (1810–1825),[576] putri La Tenripepeppang. Ia menikah dengan Datu Soppeng ke-28, La Mappapoleonro atau Sultan Nuhung Petta Mattinroe ri Amalana (1765–1820). Gelar lengkap We Tenriawaru adalah Sultana Hawa Petta Mattinroe ri Tengngana Luwu. Ia merupakan Ratu Luwu yang pernah dikunjungi oleh pejabat tinggi Inggris. Menurut laporan pemerintah kolonial Belanda, We Tenriawaru pernah menjalani upacara pengangkatan sebagai *pajung*. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, tidak seluruh Raja atau Ratu Luwu bergelar *pajung*. Hanya mereka yang sanggup mengikuti upacara pengangkatan sebagai *pajung* saja yang berhak menyandang gelar tersebut. Sepeninggal We Tenriawaru, putranya yang bernama Laoddampero (1825 –1854) diangkat sebagai Datu Luwu ke-29.

Patipau Toappanyompa Petta MatinroE ri Lipomajang (1854–1880) adalah Datu Luwu ke-30. Putra Laoddampero ini menikah dengan Andi Warudapanangngareng dan memperoleh dua orang anak, yakni Andi Kambo Opu Daeng Risompa (kelak menjadi Datu Luwu ke-33) dan Andi Gau Opu Daeng Tocoa. Datu Luwu ke- 31 adalah MatinroE ri Tamalullu (1880–1883)[577] yang merupakan putra We Tenriawaru. Ia kemudian digantikan oleh kemenakannya, Iskandar Opu Daeng Pali, Datu Luwu ke-32 yang memerintah pada 1883–1901.

---

576. Menurut *http://www.guide2womenleaders.com/womeninpower/Womeninpower1800.htm* (diunduh pada 24 September 2009), ia memerintah pada 1809–1826. Tahun pemerintahan di atas berasal dari buku *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 74. Dalam website yang sama, Raja Soppeng suaminya disebut Adatuang La Paonrowang dan memerintah dari 1782–1820.

577. Menurut *http://www.guide2womenleaders.com/womeninpower/Womeninpower1870.htm* (diunduh pada 24 September 2009), yang memerintah antara 1880–1883 adalah seorang wanita bernama Opu Anrong Guru dan ia disebut menggantikan kemenakannya, Abdul Karim To Barue. Gelar anumertanya adalah MatinroE ri Tamalulu. Sementara itu, daftar raja Luwu pada Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905, halaman 188–189, hanya mencantumkan nama anumerta datu Luwu ke-31 ini, yakni MatinroE ri Tamalullu. Kemudian membubuhkan keterangan bahwa ia adalah putra We Tenriawaru.

Semasa pemerintahan Datu Luwu ke-33, Andi Kambo Opu Daeng Risompa MatinroE ri Bintana (anak Patipatau, memerintah pada 1901–1935), pemerintah kolonial Belanda yang berambisi mengokohkan kekuasaannya di Sulawesi Selatan mengirimkan ekspedisi militernya ke kawasan tersebut pada 1905. Sebelumnya, dengan perantaraan seorang kaki tangan Belanda bernama Daeng Paroto, Belanda berhasil menjumpai Datu Luwu dan menyampaikan niatnya mengajak berdamai dan berdagang. Ajakan Belanda ini disambut dengan sinis oleh Datu Luwu karena telah mengetahui kelicikan dan kekejaman yang kerap dilakukan penjajah. Kapal perang Belanda segera merapat di pantai yang hingga kini dikenal sebagai Pantai Balandai, tetapi tidak terjadi pertempuran karena sebagian pejabat kerajaan memilih berdamai demi menghindari jatuhnya korban.

Armada militer Belanda mendarat dan memusatkan pertahanannya di Kampung PunjalaE serta berniat mengepung Palopo, ibu kota Kerajaan Luwu. Datucx Luwu kemudian menyingkir ke Kampung Barammase, yang terletak kurang lebih tujuh kilometer dari Palopo. Pertempuran sengit terjadi antara 12 hingga 15 September 1905 yang menelan banyak korban dari kedua belah pihak. Kendati demikian, Belanda semenjak 15 September mulai menghujani Palopo dengan tembakan dari kapal perang De Ruyter sehingga pasukan pertahanan Luwu yang dipimpin Andi Tadda dapat dikalahkan pada 19 September 1905.

Agar tak jatuh lebih banyak korban, tiga hari kemudian (22 September 1905) Datu Luwu menyerah kepada pimpinan pasukan Belanda dan keesokan harinya menandatangani *Korte Verklaring*, yang intinya berisikan sebagai berikut.[578]

- Kerajaan Luwu bersedia berdagang dengan Belanda.
- Kerajaan Luwu mengizinkan penempatan pasukan Belanda di Palopo dengan tujuan mengamankan barang-barang dagangan Belanda serta memberikan bantuan bila Datu Luwu memerlukan.
- Raja Luwu bersedia bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda.
- Belanda menjamin kemerdekaan Luwu serta haknya memerintah kawasan-kawasan Kolaka dan Tana Toraja.
- Hak Datu Luwu atas seluruh Kerajaan Luwu akan dijamin oleh pemerintah kolonial Belanda dan tak akan diganggu gugat oleh siapapun.

578. Lihat *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 73.

Belanda menyangka bahwa dengan penandatanganan *Korte Verklaring* maka seluruh Luwu telah berhasil ditaklukkannya. Namun, perlawanan oleh sisa-sisa pasukan Luwu masih berkecamuk di mana-mana. Sebagai contoh, Opu Topawennei Makoleq Baebunta belum bersedia tunduk kepada Belanda. Serangan segera dilancarkan terhadap kubu pertahanan Opu Topawennei Makoleq Baebunta. Tetapi serangan pertama mengalami kegagalan karena Belanda belum mengenal medan dengan baik. Terlebih lagi, benteng pertahanan laskar Luwu terletak di seberang sungai yang dalam dan sulit diseberangi. Namun, berkat informasi beberapa penduduk setempat, Makoleq Baebunta dapat dikalahkan dan gugur dengan tubuh berlumuran darah dengan tangannya menggenggam keris pusakanya.

Perlawanan juga terjadi di daerah Tana Toraja yang dipimpin oleh Siambeq Pong Tiku atau Nek Basoq, salah seorang pemimpin adat tertinggi di Tana Toraja utara, dan Maqdika Bombing beserta adiknya, Uaq Saurang, salah seorang pemimpin adat tertinggi di Tana Toraja Selatan. Maqdika Bombing ini pernah bertemu dengan Sultan Muhammad Husain dari Gowa dan berikrar melawan Belanda hingga titik darah penghabisan. Ia menghimpun para pimpinan Toraja lainnya dan mengimbau mereka agar menghentikan perang saudara serta bersatu padu menghalau penjajah dari tanah air mereka. Andi Kambo digantikan oleh putranya, Andi Djemma (1935–1965) selaku Datu Luwu ke-34. Pemerintahannya sempat diselingi oleh pamannya, Andi Jelling (Datu Luwu ke-35). Andi Djemma memerintah lagi setelah era kemerdekaan selaku Datu Luwu ke-36. Ia merupakan Datu Luwu terakhir.

Piagam pengangkatan Datu Andi Djemma sebagai pahlawan nasional yang terdapat di tempat kediaman Yang Mulia Opu Cenning Ibu Andi Sitti Huzaimah
Foto koleksi pribadi.

Pernikahan Andi Djemma dengan permaisurinya, Andi Kasirang Opu DaengNa Sittiara, dikaruniai seorang putra bernama Andi Mackulau (Makulau) Opu Daeng Parebba. Semenjak kecil Andi Mackulau telah dibacakan sumpah ke-*datu*-an yang dikenal sebagai *Naskah Samparane*. Ia merupakan tokoh yang peduli terhadap perjuangan kemerdekaan dan pernah menjadi ketua Organisasi Sukarno Muda. Karena andilnya dalam perjuangan tersebut, Andi Mackulau diasingkan oleh Belanda ke Pulau Morotai. Semenjak 1941, Andi Mackulau mewakili ayahnya sebagai *Opu Cenning* (Putra Mahkota) Luwu. Sewaktu Dr. Sam Ratulangi berkunjung ke Makassar, Andi Mackulau mewakili Datu Luwu menyambut tokoh perjuangan kemerdekaan tersebut.[579] Atas peran sertanya dalam perjuangan kemerdekaan, Andi Mackulau dianugerahi penghargaan oleh pemerintah Republik Indonesia berupa Lencana Cikal Bakal Tentara Nasional Indonesia. Jabatan dalam pemerintahan yang pernah diemban oleh Andi Mackulau adalah Bupati Daerah Tingkat II Luwu (1964–1966). Putrinya yang sempat dibacakan sumpah ke-*datu*-an adalah Yang Mulia Ibu Andi Sitti Huzaimah (kelak menjabat sebagai *cenning* Luwu). Putri lainnya adalah Andi Luwu Opu Daengna Patiware yang kelak menjadi Datu Luwu ke-39. Meski tanpa kekuasaan politik, Andi Alamsyah (Andi Bau)–putra Andi Djemma dengan istri ketiganya yang bernama Andi Tenripadang Opu Datu–dinobatkan sebagai Datu Luwu ke-37. Selanjutnya, yang

579. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Yang Mulia La Tenri Peppang.

memangku jabatan sebagai Datu Luwu ke-38 adalah Andi Tenripadang Opu Datu. Sementara itu, yang menjabat Datu Luwu saat ini atau Datu ke-39 adalah Yang Mulia Andi Luwu Opu Daengna Patiware. Ia dikukuhkan kedudukannya oleh Dewan Adat Luwu pada 28 Juni 1994. Sedangkan Opu Cenning Luwu dijabat oleh Yang Mulia Ibu Andi Sitti Huzaimah.

Yang Mulia Andi Luwu Opu Daengna Patiware, Datu Luwu ke-39
Foto: Yang Mulia La Tenri Peppang

Yang Mulia Datu Luwu Opu Daengna Patiware dan
Yang Mulia Opu Cenning Andi Sitti Huzaimah dalam upacara adat
Foto Yang Mulia La Tenri Peppang
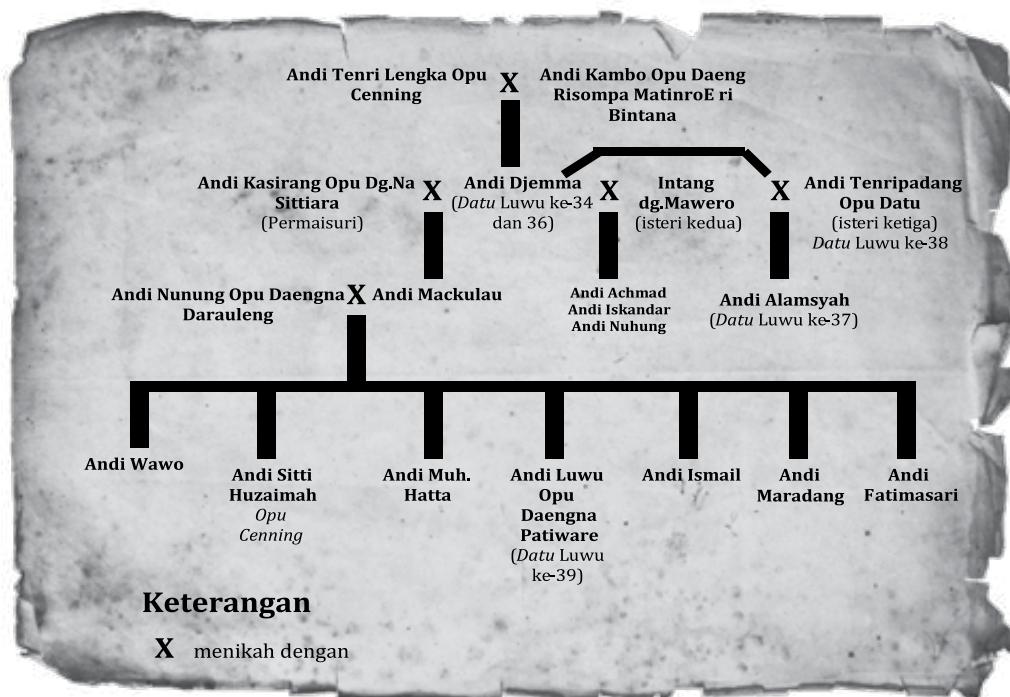
Silsilah Datu-datu Luwu terakhir
Dibuat berdasarkan silsilah yang diberikan oleh Yang Mulia Bapak La Tenri Peppang

c. Sistem pemerintahan

Sistem pemerintahan di Luwu mirip dengan di Bone dan Makassar; kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan yang berkembang kemudian. Puncak kekuasaan Luwu berada di tangan seorang raja yang bergelar *datu*. Selanjutnya, di bawah raja masih terdapat hierarki kaum bangsawan yang berlapis-lapis beserta para pejabat lainnya selaku pembantu raja. Para penguasa Luwu menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan lainnya melalui ikatan perkawinan dan hubungan persahabatan (*passiajingeng*).[580] Raja Luwu sesungguhnya memiliki kekuasaan terbatas dan hanya dianggap sebagai alat pemersatu rakyatnya.[581] Roda pemerintahan lebih banyak dijalankan oleh dewan pemangku adat. *Datu* baru turun tangan apabila terjadi perselisihan antara anggota dewan atau berlangsung peperangan.

Pejabat-pejabat penting di Luwu biasanya diangkat dari kalangan kerabat raja. Di antara jabatan-jabatan penting antara lain adalah *opu patunruk* yang bertugas sebagai mangkubumi atau perdana menteri, *opu pabbicara* yang bertugas menangani masalah

580. Lihat *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*, halaman 22.
581. Lihat *Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi Selatan*, halaman 107.

peradilan, dan *opu cenning* atau putra mahkota yang mewakili raja dalam urusan sehari-hari. Lambat laut terjadi pergeseran kekuasaan dari dewan adat pada para pejabat penting ini. Pada 1905 ketika Belanda mengalahkan Luwu, dewan pemangku adat dihapuskan oleh Belanda agar lebih memudahkan pengendalian atas kerajaan tersebut.

d. Sosial Kemasyarakatan

Masyarakat Luwu dibagi menjadi berbagai golongan, seperti *anak mattola*, *anak cera*, *todeceng*, *tosama*, dan *ata*. Gubernur Braam Morris menyederhanakan pembedaan ini menjadi bangsawan, menengah, dan hamba penggadai diri.[582] Yang termasuk golongan bangsawan adalah raja beserta anggota keluarganya dan para pembesar kerajaan. Golongan menengah adalah pemuka masyarat dan orang-orang merdeka yang bukan hamba. Hamba penggadai diri ini adalah para budak (*ata*). Masih menurut laporan Braam Morris, Luwu merupakan negeri perbudakan utama. Orang-orang yang terlibat utang atau kejahatan biasanya menggadaikan dirinya sebagai hamba. Ditambah lagi miskinnya kondisi masyarakat menjadikan perbudakan makin merajalela.

582. Lihat *Kerajaan Luwu*, halaman 45.

Pembedaan golongan di tengah-tengah masyarakat Luwu ini tampak nyata dari bahasa, adat istiadat, pakaian, dan simbol-simbol yang dikenakannya. Salah satu contoh adalah sebutan berbeda-beda bagi rumah yang mereka diami; rumah raja disebut *salassa*, rumah pangeran disebut *saoraja*, rumah bagi kaum bangsawan tinggi disebut *sao lobbi*, rumah bagi bangsawan rendah disebut *sao loci*, rumah bagi orang terkemuka disebut *sao dema*, dan rumah bagi rakyat kebanyakan disebut *sao sama*. Sebutan lain bagi tempat kediaman raja adalah *langka'na* (istana utama), *saodanna*, atau *soraya*. Hanya istana raja saja yang boleh mempunyai tangga kebesaran. Bagian depan rumah bersusun tiga (*timpa'laja*) dan bubungan atap dihiasi kepala kerbau tiruan lengkap dengan tanduknya.

Pendidikan biasanya diselenggarakan di kalangan istana. Setelah agama Islam tersiar di Luwu, dibukalah berbagai lembaga pendidikan yang mengajarkan anak-anak muda pengetahuan mengenai Alquran dan ilmu agama.

e. Kesusastraan dan Kesenian

Salah satu epos besar di Sulawesi yang patut pula diulas di sini adalah epos *Lagaligo*, yang juga disebut *I Galigo*, *La Galigo*, atau *I La Galigo*. Kesusastraan ini merupakan salah satu mahakarya pada masa itu. Meskipun naskah-naskah ini hanya dijumpai di Sulawesi Selatan, cerita-cerita lisannya telah tersebar di seluruh Sulawesi. Karena itu, bisa dikatakan bahwa wiracarita ini telah menjadi milik seluruh masyarakat Sulawesi, bukannya Luwu atau Sulawesi Selatan saja. Orang yang berjasa mendokumentasikan *Lagaligo* adalah seorang ilmuwan Belanda bernama R. A. Kern. Isi kesusastraan *Lagaligo* pada umumnya bersifat mitos, tetapi darinya dapat diketahui bagaimana tradisi dan sosial kemasyarakatan pada masa itu. Dengan demikian, karya tersebut merupakan sumber sejarah yang sangat berharga.

Tokoh lain yang juga besar sumbangsihnya dalam pelestarian karya-karya sastra *lontarak* Bugis adalah seorang misionaris bernama B.F. Matthes.[583] ia mengumpulkan naskah-naskah kuno, termasuk *I La Galigo*, yang disalin oleh Colliq Pujie, dan *Lontarak Latoa*. Sebuah yayasan yang bergerak dalam penelitian sejarah, bahasa, dan kebudayaan Sulawesi Selatan dinamai seturut namanya (sekarang bernama Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan). Yayasan yang bertempat di kompleks Benteng Ujung Pandang ini bertugas mengumpulkan sebanyak mungkin data-data mengenai aspek-

583. Lihat *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Sampai Tahun 1905*, halaman 48.

aspek sejarah, budaya, dan kesusateraan Sulawesi Selatan. Hasil penelitian B.F. Matthes turut memperkaya pula kajian sejarah Makassar.

Epos *I La Galigo* mengisahkan mengenai dewa-dewa dan kosmologi Bugis kuno. Berdasarkan teks tersebut dan naskah-naskah lain yang sezaman dengannya, orang Bugis zaman dahulu menyakini keberadaan seorang dewa bernama Dewata Sisine. Ia merupakan pencipta tujuh lapis langit (*Langi'*), Bumi (*Tana*), dan tujuh lapis Dunia Bawah (*Peretiwi* atau *Uri' Liung/ Buri' Liu*). Lalu terciptalah sepasang dewa-dewi yang dapat disepadankan dengan matahari beserta rembulan–La Tepu Langi' (Langit Segenap) dan We Sengngeng Linge (Ciptaan Sempurna).[584] Pertemuan keduanya saat gerhana matahari melahirkan sepasang dewa-dewi, yakni La Patigana dan We Lette Sompa (Petir yang Disembah). Mereka menurunkan 9 pasangan dewa-dewi yang saling menikah satu sama lain.

Keturunan tujuh pasangan di antara mereka disebutkan sebagai leluhur berbagai raja di Luwu, Cina,[585] Tompotikka, Wadeng, Senrijawa, Wewang Nriwu, Gima, dan Jawa. Tiga pasangan dewa-dewi menjadi penguasa Dunia Bawah dan yang tertinggi di antara mereka adalah La Mata Timo (Mata dari Timur) bergelar Guru ri Selle (Penguasa Selat). Meskipun demikian, yang tertinggi di antara kesembilan pasangan dewa di atas adalah Sangkuru' Wira (Sang Guru para Pemberani) bergelar Datu Patoto' (Sang Raja Penentu Nasib). Ia dianggap sebagai penguasa seluruh jagad. Sangkuru' Wira menikah dengan Mutia Unru' (Mutiara Badai) dan dikaruniai putra bernama Batara Guru. Ia dinikahkan dengan We Nyili' Timo yang berasal dari Dunia Bawah.

Anak cucu pasangan tersebut adalah kaum bangsawan "berdarah putih" yang menjadi cikal bakal raja-raja di Sulawesi. Cucu Batara Guru yang bernama Sawerigading merupakan tokoh utama *La Galigo*. Menurut wiracarita tersebut, Sawerigading memiliki saudara kembar bernama We Tenriabeng. Kedua anak ini dipisahkan sejak kecil tanpa pernah saling bertemu karena orang tua mereka khawatir ramalan seorang ahli nujum menjadi kenyataan. Ramalan itu menyatakan bahwa Sawerigading akan jatuh cinta kepada saudari kembarnya itu bila keduanya dipertemukan. Pernikahan antara saudara kembar ini dianggap sebagai perkawinan sumbang atau inses sehingga sedapat mungkin harus dihindarkan.

584. Lihat *Manusia Bugis*, halaman 101.
585. Berbeda dengan Cina–Tiongkok. Yang dimaksud Cina di sini berada di Sulawesi Selatan.

Menginjak dewasa, Sawerigading dititahkan ayahnya berlayar ke Taranati (Ternate) guna menghadiri upacara adat di sana. Tetapi ini sesungguhnya hanya siasat ayahnya saja karena saudari kembarnya akan diangkat sebagai *bissu* (pendeta keagamaan) dalam suatu upacara umum. Setelah mengunjungi Taranati dan ditunangkan dengan putri penguasa di sana, Sawerigading melanjutkan perjalanannya mengunjungi berbagai kawasan di Kepulauan Nusantara. Namun, di tengah jalan diterimanya laporan perihal saudari kembarnya itu sehingga menggugah rasa penasaran dalam hati Sawerigading. Ia segera bertolak kembali ke kampung halamannya di Luwu. Melalui sebuah lubang, Sawerigading mengintip We Tenriabeng dan langsung jatuh cinta kepadanya.

Tak seorangpun sanggup mengubah niat Sawerigading menikahi saudari kembarnya, bahkan ancaman ditimpa bencana pun tak menggentarkan hatinya. We Tenriabeng akhirnya memberitahu Sawerigading bahwa terdapat putri lain di Cina bernama We Cudai yang sangat mirip dengan dirinya bagaikan pinang dibelah dua. Sawerigading disarankan menikahi We Cudai. Apabila putri itu ternyata tidak mirip dengannya, barulah We Tenriabeng bersedia dinikahi oleh Sawerigading. Akhirnya, setelah mendengar bujukan tersebut Sawerigading bersedia mengurungkan niatnya menikahi We Tenriabeng. Ia lalu memutuskan berlayar ke Cina, namun kapal yang dahulu diberikan ayahnya telah rusak karena dipergunakan mengarungi berbagai penjuru Nusantara. Oleh sebab itu, perlu dibuat sebuah perahu baru. Sebatang pohon raksasa bernama We Lengrenge yang tumbuh di Mangkutu', dekat Ussu', pantai Luwu hendak ditebang guna dijadikan perahu. Tetapi pohon ajaib tersebut tidak berhasil ditumbangkan sekalipun telah mengerahkan para *bissu* dengan mantra-mantranya. Yang sanggup merobohkan pohon itu justru We Tenriabeng.

Sesudah kapalnya siap, Sawerigading berlayar ke Cina. Di tengah jalan ia mengalahkan para calon peminang We Cudai lainnya. Setelah melalui berbagi hambatan, Sawerigading menikahi We Cudai. Putra mereka, La Galigo, diangkat sebagai Raja Luwu berikutnya serta berganti menjadi tokoh sentral cerita. Sawerigading dan We Cudai lalu kembali ke Cina setelah upacara penobatan anak mereka. Cerita Sawerigading ini juga dikenal dalam bentuk tradisi lisannya. Sebagai contoh, mereka mengkaitkan terjadinya sebuah gunung dengan perahu Sawerigading yang terbalik. Mata air dianggap berasal dari tancapan tongkat Sawerigading.

Rakyat Luwu terkenal piawai dalam seni ukir yang diperlihatkan dengan adanya ukir-ukiran bernama *uki panji* di pintu-pintu rumah, jendela, ataupun lemari milik

kaum bangsawan dan orang-orang kaya. Seni bangunan Luwu terutama tampak pada istana atau tempat kediaman kaum bangsawan dan makam para raja. Uniknya, makam ini berbentuk seperti piramid dan masih dapat dijumpai di Patimang, Malangke, serta dekat Palopo. Seni tari berkembang pula di Luwu, yang terbukti dengan adanya berbagai jenis tari-tarian di sana, seperti *pawinru, sulsana piso laja, inan nawa,* dan *malemo* (tarian khusus kaum wanita) serta *tau lolo, eja-eja,* dan *seba* (tarian khusus kaum pria). Di samping itu, masih ada tari bernuansa mistik yang biasa dibawakan para *bissu* (dukun). Biasanya orang-orang yang bernazar dan terkabul akan mengundang para *bissu* membawakan tari-tarian di rumah mereka.

Terdapat berbagai bahasa yang dipergunakan rakyat Luwu, seperti bahasa Bissu yang dipergunakan para *bissu* saat upacara-upacara ritual bernuansa magis; bahasa Galigo yang dipergunakan dalam naskah cerita-cerita kuno Luwu; bahasa Lontara yang dipergunakan menulis kitab sejarah atau hukum adat Luwu; dan bahasa sehari-hari yang dipergunakan dalam percakapan sehari-hari. Selain sastra tertulis, Luwu juga menghasilkan karya sastra lisan berupa nyanyian yang disampaikan dari mulut ke mulut dan disebut *elong*. Sementara itu, nyanyian bernuansa epik kepahlawanan biasa dinamakan *osong*.

XVI. MAIWA

Para *arung* (raja) yang pernah berkuasa di Maiwa adalah La Calo atau Toa Calo (± 1850), La Pakanteng Muhammad Ali (1890–1905), La Sappewali (1905–1907), La Sini (1907–1918), La Naki (1919–1920), La Cori (1922–1925), La Oga (1925–1926), dan La Sassu (1926–1950-an).[586] Sumber lain menyebutkan bahwa setelah La Sappewali, yang memerintah Maiwa selanjutnya adalah La Polti Andi Duwa (1909–1910), kemudian oleh La Coke (1910–1913), dan setelah itu barulah singgasana Maiwa beralih pada La Sini.[587] Menurut tradisi, Maiwa merupakan penyedia pasukan bagi angkatan perang Sidenreng dan telah beberapa kali diminta menyertai kerajaan tersebut bila terlibat peperangan. Setelah menerima pemberitahuan permintaan penyediaan pasukan dari Sidenreng, Maiwa kembali meneruskan pesan tersebut ke

586. Lihat *Kerajaan2 Indonesia* karya Hans Hägerdal, halaman 145.
587. Lihat *http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Celebesu#W.C5.82adcy_Maiwy*, diunduh pada 12 Januari 2012.

negara-negara bawahannya.[588] Berdasarkan informasi dari Bapak Andi Pasdar, setelah peristiwa pembantaian oleh Westerling, La Sassu meninggalkan Maiwa karena merasa kondisi kurang aman. Oleh sebab itu, dewan adat Maiwa lantas memilih La Hodeng (Datu Lolo di Pakkateteang Wajo) sebagai Arung Maiwa terakhir.[589] Lebih jauh lagi, menurut Bapak Andi Sutomo, La Oga pada daftar di atas bukanlah Arung Maiwa, melainkan pejabat sementara sepeninggal La Cori.[590] Masih berdasarkan keterangan Bapak Andi Sutomo, La Cori merupakan salah satu korban keganasan Westerling. Bapak Andi Pasdar menginformasikan bahwa silsilah Toa Calo bermula dari La Wawo, Addatuang Sidenreng. Ia memiliki putra bernama Muhammad Arsyad, ayah Toa Calo. Ini menandakan bahwa para penguasa Maiwa masih merupakan kerabat Kerajaan Sidenreng.

Sumber berikutnya menyebutkan bahwa sebelum masuknya agama Islam ke Maiwa, telah ada kerajaan yang berpusat di Bantilan dengan rajanya bernama La Takkebuku. Ia merupakan saudara I Paloang yang kelak menjadi Puang Leoran/ Taulan. Oleh karenanya, La Takkebuku merupakan cicit To manurung Palipada.[591] Semasa pemerintahannya, Bantilan mencapai puncak kejayaannya sehingga mengundang kerajaan lain yang ingin menguasainya. Akibatnya, Bone, Sidenreng, Rappang, dan lain sebagainya menyerang Bantilan. Kendati demikian, serangan tersebut dapat dipatahkan. Berkat kegigihan pasukan Bantilan, para penyerbu lantas menyebut mereka *to mewa* atau 'orang-orang yang melawan.' Sebutan tersebut berubah menjadi *to maiwang* dan akhirnya menjadi *to maiwa*. Demikianlah asal muasal nama Maiwa. Ada yang mengatakan bahwa La Takkebuku juga menjabat sebagai Raja Enrekang.

La Takkebuku kemudian digantikan oleh putranya bernama I Bantilan (±1540–1570). Ia menikah dengan keturunan Raja Bone dan dikaruniai tujuh orang putra, yakni Pua'ta Cambang, Pua'ta Rowa, Pu'ata Kairi, Pua'ta Lompong, Pua'ta Tallang, Pua'ta Lando Belua, dan Pua'ta Carru.[592] Pu'ata Cambang (±1570–1590) kemudian menjadi Raja Maiwa berikutnya. Setelah Pu'ata Cambang tidak lagi dapat menjalankan pemerintahan, ia digantikan oleh saudaranya, Pu'ata Lompong (±1590–1602). Raja Maiwa selanjutnya adalah Pu'ata Lundu (1602–1625). Semasa pemerintahannya,

588. Lihat *The Lands West of The Lakes: A History of The Ajattappareng Kingdoms of South Sulawesi 1200–1600 CE*, halaman 222.
589. Informasi melalui surat elektonik (*e-mail*) tertanggal 17 Desember 2011.
590. Informasi melalui surat elektronik(*e-mail*) tertanggal 23 Desember 2011.
591. Lihat *Sejarah Massenrempulu 1*, halaman 74.
592. Lihat *Sejarah Massenrempulu 1*, halaman 76.

agama Islam masuk ke Maiwa. Pu'ata Lundu digantikan oleh putranya, Pu'ata Pakalawing (±1625–1655). Ia merupakan seorang raja yang berjuang mewujudkan kemakmuran bagi rakyatnya.

Pu'ata Pakalawing digantikan oleh putranya bernama Pua'ta Pakkawaru (1655–1683). Raja Maiwa ini bergiat memajukan pertanian negerinya. Pua'ta Surabekko (1683–1695), Raja Maiwa berikutnya merupakan penyebar agama Islam ke negara-negara tetangganya. Pada 1685, Letta diserang oleh Bone karena Raja Letta membunuh utusan Bone. Dengan dibantu oleh Wajo, Sidenreng, dan Soppeng, Letta berhasil dikalahkan. Oleh karenanya, kedudukan Maiwa yang ketika itu masih menjadi bawahan (*lili*) Sidenreng, lantas dinaikkan kedudukannya sebagai kerajaan berdaulat menggantikan Letta serta dimasukkan dalam Perserikatan Massenrempulu.

Indi Surabekko (1695–1717), putra Pu'ata Surabekko menggantikan ayahnya sebagai raja. Semasa pemerintahannya, ia berupaya menyebarkan Agama Islam hingga ke Tana Toraja. Konon ia wafat di Tana Toraja pada 1717.[593] Cucu Indi Surabekko bernama Pua'ta To Baine (1717–1744) menduduki singgasana Maiwa. Raja Maiwa selanjutnya adalah Pua'ta Tabbu (1744–1777). Ia berniat memperluas wilayah kerajaannya, namun dihalangi oleh Sidenreng sehingga timbul peperangan antara Maiwa dan Sidenreng. Peperangan ini dimenangkan oleh Maiwa sehingga akhirnya kerajaan tersebut mendapatkan tambahan wilayah mulai dari Salo Biru sampai Salo Dua. Pua'ta Pawellang (1777–1799), Raja Maiwa berikutnya, memindahkan pusat pemerintahan kerajaan dari Tapong ke Pakkodi-maroangin.[594]

Pengganti Pua'ta Pawellang adalah anaknya bernama Laulung Daeng Sutte (1799–1826). Ia digantikan kembali oleh Pua'ta Arase (1826–1860). Singgasana Maiwa kemudian beralih pada To Accalo (1860–1890). Semasa pemerintahan ia, pemerintah kolonial Belanda telah menanamkan pengaruhnya ke Maiwa. Ia menandatangani kontrak pada 8 Desember 1890,[595] yang mengatur wilayah, tata pemerintahan, dan lain. Maiwa kemudian diperintah oleh Pua'ta Pakonteng (1890–1905). Ia tidak sempat menandatangani *Korte Verklaring* dengan pemerintah kolonial. Takhta kerajaan beralih kembali kepada La Sappewali (1905–1909). Ia menandatangani kontrak politik pada 27 Januari 1905.

593. Lihat *Sejarah Massenrempulu 1*, halaman 81.
594. Lihat *Sejarah Massenrempulu 1*, halaman 82.
595. Lihat *Sejarah Massenrempulu 1*, halaman 83.

Raja Maiwa selanjutnya, Pua'ta Coke (1909–1913) melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda, namun berhasil dikalahkan dan ditawan oleh Belanda. La Naki (1918–1920) kemudian menduduki singgasana Maiwa, tetapi hanya sempat memerintah selama dua tahun, dan setelah itu digantikan kembali oleh La Cori (1920–1925). Pengaruh pemerintahan kolonial makin terasa dalam Kerajaan Maiwa. La Ogga (1925–1926) tampil memimpin Maiwa menggantikan La Cori. Ia digantikan oleh Andi Sessu (1926–1950). Pengganti Andi Sessu adalah Andi Hodeng (1950-an) yang dibunuh oleh pemberontak DI/ TII di bawah pimpinan Kahar Muzakkar.[596]

XVI. MALLUSETASI

Kerajaan Mallutessi adalah erajaan baru yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda. Suppa dan Sidenreng masing-masing dipaksa menyerahkan sebagian wilayahnya guna pembentukan kerajaan ini.[597] Kerajaan ini merupakan persekutuan yang dibentuk oleh Nepo, Soreang, Bacukiki, dan Bojo.[598] Mallusetasi pernah diperintah oleh I Simatanah atau Ratu Aru I Samatana (1906–1917), yang digantikan oleh Aru I Makung (1917–1932). Pengganti Aru I Makung adalah La Calo atau Andi Calo (1932–1950). Sebagai catatan, I Simatanah, I Makung, dan La Calo juga menjabat sebagai arung Nepo (lihat ulasan tentang Kerajaan Nepo). Ia lalu digantikan oleh H. Andi Cambolang (1950–1957).[599]

XVII. MALUA (MALUWA)

Merupakan salah satu di antara tiga kerajaan pecahan Kerajaan Duri. *Lontarak Duri* menyebutkan bahwa rajanya yang pertama adalah Kadere.[600] Raja-raja berikutnya yang memerintah Malua adalah Patta Salassa (± 1780–1800) dan Tandi (± 1800–1820). Kerajaan Maluwa lalu diperintah oleh Sira (± 1820–1840), yang menggantikan saudaranya, Tandi. Penguasa ini digantikan oleh kerabatnya yang bernama Aru Silassa[601] (± 1840–1870). Para raja Malua selanjutnya secara berturut-turut adalah:

596. Lihat *Sejarah Massenrempulu 1*, halaman 87.
597. Lihat *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*, halaman 73.
598. Lihat *Kerajaan Nepo*, halaman 37.
599. Lihat *Profil Raja dan Pejuang Sulawesi Selatan*, halaman 71.
600. Lihat *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 190.
601. Lihat *http://www.guide2womenleaders.com/womeninpower/Womeninpower1800.htm* (diunduh pada 24 September 2009). Dalam *website* tersebut Sira disebut sebagai Aru Sitra dan dicatat sebagai penguasa wanita.

Petta Siratang (± 1870), Assang (–1890), La Gali (1890–1917), La Parang Barana Lolo (1917–1934), dan Tambone (1934–1940-an).

Menurut sumber lainnya, raja Malua pertama adalah Kamariang (±1640–1665), putra pertama Pasalin, Raja Duri ketiga. Ia memiliki dua orang anak, yakni Kadere dan Kapataha. Kadere menggantikan ayahnya menjadi Raja Malua, sedangkan Kapataha menjadi Raja Buntubatu. Semasa pemerintahan Kadere (±1665–1689), Agama Islam diterima sebagai agama resmi kerajaan.[602] Setelah masa Kadere tidak diketahui lagi siapa yang memerintah Malua, hingga munculnya seorang raja bernama Talundu (±1845–1885). La Gali (1885–1917) menggantikan ayahnya yang mangkat pada 1885. Wilayah kekuasaan Malua meliputi Malua sekali pusat kerajaan, Anggeraja, Banti, dan Uluwai. Kerajaan Malua ketika itu dianggap sebagai kerajaan utama di antara Federasi Duri karena mewarisi kawasan pusat kekuasaan Kerajaan Duri.

La Gali beberapa kali menandatangani perjanjian, baik bagi Malua sendiri atau mewakili seluruh kerajaan anggota Federasi Duri. Kendati demikian, salah satu kontrak yang ia tandatangani pada 30 September 1890 di Tallu Tondok Malua, dianggap tidak sah karena Kerajaan Alla dan Buntubatu selaku anggota federasi lainnya merupakan kerajaan-kerajaan sederajat dengan Malua. Kontrak-kontrak lain yang ditandatangani oleh La Gali adalah:

1. *Korte Verklaring* tanggal 16 Oktober 1905 di Kalosi, yang disahkan oleh pemerintah kolonial pada 19 Juli 1906.
2. *Korte Verklaring* tanggal 11 Janarui 1909, yang disahkan pada 9 Juni 1909.[603]

La Gali meletakkan jabatannya dan digantikan oleh La Paran (1919–1938). Semenjak zamannya, raja tidak semata-mata diangkat oleh dewan adat, melainkan memerlukan pula persetujuan pemerintah kolonial Belanda.

Raja berikutnya, Puang Tambone (1938–1941) diangkat berdasarkan persetujuan pemerintah kolonial. Oleh karenanya, ini menandakan bahwa pemerintah kolonial makin dalam campur tangannya di Kerajaan Malua. Puang Tambone diberhentikan oleh pemerintah kolonial pada 20 Maret 1941 karena dianggap melakukan pelanggaran adat.[604] Penggantinya adalah Andi Liu (1941–1952). Semasa pemerintahannya,

602. Lihat *Sejarah Massenrempulu 1*, halaman 117.
603. Lihat *Sejarah Massenrempulu 1*, halaman 122.
604. Lihat *Sejarah Massenrempulu 1*, halaman 123.

ia memindahkan pusat pemerintahan ke Sossok pada 1952 karena meletusnya pemberontakan Darul Islam.[605]

XVIII. NEPO

Wilayah Kerajaan Nepo terletak di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Kerajaan Nepo pernah menjadi pemuka bagi tiga kerajaan kecil lainnya, yakni Bojo, Bacukiki, dan Soreang.[606] Keempat kerajaan itu memiliki kedaulatannya masing-masing, tetapi saling menjaga perdamaian dan ketertiban di antara mereka. Setiap kerajaan itu masih membawahi kerajaan-kerajaan kecil lainnya, seperti Nepo yang membawahi Manuba (Onnyi), Mareppang, serta Palanro. Penguasa keempat kerajaan tersebut masih memiliki hubungan kekerabatan (*lili passiajing*) dengan *Addatuang* (Raja) Sidenreng.

Semula Nepo diperintah oleh empat puluh pemimpin sekaligus yang bergelar *arung* dan disebut *arung patappuloe*; nama-nama mereka yang tercatat antara lain Arung Talabangi, Arung Pacsciro, Arung Taggilitta, Arung Pabbiung-ngeng, Arung Lattureng, Arung Langello, Arung Massiku, Arung Ngormyi, Arung Cimpu, Arung Maroanging, Arung Dusung, dan Arung Ngatappa.[607] Kekuasaan mereka sifatnya setara, jadi tak ada seorangpun yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Hal ini menimbulkan kesulitan sehingga mendorong mereka mencari seorang raja. Salah satu persoalan itu umpamanya saat mereka diundang oleh *datu* Suppa. Saat ditanya siapakah Raja Nepo, keempat puluh orang itu maju semuanya dan mengatakan bahwa mereka semualah *Arung* (Raja) Nepo. Permasalahan timbul karena tidak tersedia tempat duduk yang memadai bagi para raja yang diundang. Akibatnya, mereka terpaksa didudukkan di bawah kolom dan mendapatkan peralatan dari daun wuncung mengingat terbatasnya akomodasi beserta fasilitas yang disediakan.

Insiden di atas mendorong keempatpuluh *arung* mencari seorang raja bagi mereka. Guna mencari seorang raja itulah mereka menghadap Datu Suppa La Teddung Loppo atau Taddung Lompoe (1510–1530), yang mengajukan salah seorang putranya bernama La Bongo sebagai calon. Putra Datu Suppa itu merupakan orang bodoh serta belum mempunyai pekerjaan, belum menikah, dan hanya tinggal di rumah saja. Kendati syarat seorang raja, yakni pintar, berkeluarga, dan berharta, tidak terdapat dalam diri La Bongo, tetapi keputusan Raja Suppa sudah bulat. Demikianlah

605. Lihat *Sejarah Massenrempulu 1*, halaman 123.
606. Lihat *Kerajaan Nepo*, halaman 37.
607. Lihat *Kerajaan Nepo*, halaman 40.

La Bongo menjadi Arung Nepo dengan arung patappuloe sebagai penasihatnya. Pengangkatan seorang *arung* tertinggi di Nepo juga memiliki pertimbangan politis, yakni agar keempat puluh orang *arung* tidak saling berperang karena bila salah seorang dari mereka diangkat sebagai pemimpin tertinggi, yang lainnya akan merasa iri dan berupaya menjatuhkannya.

La Bongo kemudian menikah dengan putri Arung Mereppang. Pada kenyataannya, La Bongo tidaklah sebodoh yang dikira, apalagi ia dibantu oleh *arung patappuloe*. Hal ini terbukti sewaktu raja Suppa meminta rakyat Nepo menebang kayu guna membangun istana Suppa. Seribu orang warga Nepo dikirim ke Suppa oleh La Bongo. Kendati demikian, La Bongo mempunyai pemikiran panjang. Jikalau warganya terus menerus dimintai bantuan oleh Datu Suppa maka pembangunan di negerinya sendiri akan terbengkalai. Itulah sebabnya, ia lantas menyusun siasat. Diperintahkannya rakyat Nepo agar dengan sengaja melakukan pekerjaan yang salah. Kayu yang telah mereka peroleh agar diikat, namun jangan ditarik melalui jalan, sebagaimana seharusnya; melainkan melalui ladang warga Suppa sehingga merusak tanaman mereka. Datu Suppa memaklumi kebodohan tersebut karena pemimpin mereka, yakni La Bongo, memang disangkanya bodoh. Pada kesempatan lainnya, tatkala warga Nepo dikerahkan menanam padi oleh Datu Suppa, mereka sengaja menanamnya terbalik. Akhirnya, Datu Suppa memulangkan rakyat Nepo tersebut.

Pada perkembangan selanjutnya, pecah perang antara Suppa dan Nepo yang dipicu oleh kesalah-pahaman. Setelah berlangsungnya peperangan yang menelan banyak korban jiwa, dicapai perdamaian antara kedua kerajaan. Nepo pernah pula bersengketa masalah perbatasan dengan Bojo. Namun, hal ini dapat diselesaikan dengan baik berkat perantaraan Raja Sawitto. La Bonto tidak dikaruniai seorang putra sehingga masalah suksesi sepeninggal ia.

Sebagai penggantinya, diangkatlah salah seorang anggota *arung patappuloe* bernama I Timangratu, yang masih berkerabat dengan Raja Sidenreng. *Arung* wanita ini terus menerus bergiat membangun negerinya sehingga rakyat hidup rukun dan damai. Setelah turun takhta, ia digantikan oleh La Makkaraka, yang merupakan putra saudara Puang ri Maggalatung. Ia tidak saja menjadi raja di Nepo, melainkan juga di Marioriawa dan Rimatuppa. Sebagia seorang raja, ia kerap memberikan petuah-petuah berharga pada rakyatnya.

Putranya bernama La Pasampoi melanjutkan tampuk pimpinan ayahnya. La Pasampoi digantikan putranya bernama La Pabbiseang. Semasa pemerintahannya, Nepo berada dalam keadaan damai. Raja Nepo berikutnya adalah La Ippung yang masih saudara sepupu La Solong. Pada zamannya pecah peperangan dengan Mallawa yang diperintah oleh Daeng Pagoli. Peperangan dipicu oleh keinginan Nepo menyatukan Mallawa dengan negerinya. Kendati demikian, Mallawa berhasil mempertahankan diri sehingga ambisi Nepo menuai kegagalan.

La Solong menggantikan La Ippung selaku Arung Nepo. Pecah peperangan dengan Tanete. Pemicu peperangan adalah tersinggungnya raja Tanete karena La Solong mengirim kembali putri Tanete yang telah dinikahi oleh penguasa Nepo tersebut. Awalnya, Nepo berhasil meraih kemenangan. Namun, setelah Tanete meminta bantuan Soppeng, giliran Nepo yang terdesak. Oleh sebab itu, La Solong lantas meminta bantuan pada Arung Belokka bernama Lakoro.[608] Konon berkat pusaka berupa kancing sakti milik Lakoro, raja Tanete berhasil ditewaskan. Dengan demikian, kemenangan berada di pihak Nepo. Mengingat besarnya korban jiwa di kedua belah pihak, dilangsungkanlah perdamaian antara Nepo dan Tanete.

Rangkaian penguasa Nepo berikutnya adalah Laica, I Messang, I Simatanah, Singkerukka, I Makung, dan La Calo. Pada 1906, Belanda membentuk Swapraja Mallusetasi, yang terbagi dalam tiga distrik, yakni Soreang, Bacukiki, dan Nepo. Distrik Nepo sendiri dikepalai oleh seorang keturunan bangsawan Nepo bernama Muhammad Yusuf.[609] I Makung merupakan *arung* wanita yang memerintah pada 1931. Ia kemudian diangkat sebagai arung Mallusetasi. La Calo sendiri merupakan arung Nepo terakhir, yang juga menjabat sebagai *arung* Mallusetasi.

XIX. PANGKAJENE & MAROS

Di kawasan Pangkep pernah berdiri Kerajaan Siang yang lebih tua dibandingkan Kerajaan Gowa-Tallo. Kerajaan Siang ini belakangan ditaklukkan oleh Gowa-Tallo melalui strategi pernikahan.[610] Para pelaut Portugis juga menyebutkan tentang kerajaan ini dengan nama Sciom. Awalnya Kerajaan Siang mencakup wilayah dan pengaruh yang luas, namun kemudian pelabuhannya mulai tenggelam. Selanjutnya, di

608. Lihat *Kerajaan Nepo*, halaman 57.
609. Lihat *Kerajaan Nepo*, halaman 39.
610. Lihat *Sejarah Kekaraengan di Pangkep*, halaman 5.

Pangkajene berdiri beberapa kerajaan atau ke-*karaeng*-an, yakni Pangkajene, Bungoro, Balocci, Labakkang (Lombasang), Ma'rang, Segeri, dan Mandalle.

a. Ke-*karaeng*-an Pangkajene

Mulanya di Pangkajene berdiri Kerajaan Barasa yang merupakan pewaris Kerajaan Siang. Pada abad 17, Gowa menyerang Barasa dengan bantuan Lombasang sehingga mengakibatkan kekalahan Barasa. Selanjutnya, Barasa dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Gowa. Sebagai hadiah karena pernah membantu Gowa, Karaeng Lombasang diberi hadiah pusaka Barasa bernama Tabaloba, yang selanjutnya dinamai Bolong Kampung. Guna memerintah Barasa, Gowa mengirimkan salah seorang *karaeng*-nya, yang setelah wafat digelari Matinroe ri Kammisi. Ia digantikan oleh seorang bangsawan Gowa bernama Karaeng Allu. Oleh karena tinggal di Kampung Siang, ia digelari pula Karaeng Siang. Semasa pemerintahanlah dibentuklah dewan adat yang anggotanya terdiri dari Kare Kajuara, Kare SengkaE, Kare Lesang, dan Kare Baru-Baru[611].

Setelah kekalahan Gowa terhadap VOC yang dibantu oleh Bone, pada 1667 Arung Palakka bersama keempat anggota dewan adat Siang mengusir penguasa terakhir yang diangkat Gowa. Sebagai gantinya, Arung Palakka menempatkan sahabatnya bernama Joro atau Johoro (Mappasoro') menjadi Karaeng Siang dengan gelar Lo'mo. Rangkaian para penguasa Pangkajene selanjutnya adalah Pattola Daeng Malliongi, Pasempa Daeng Paraga, Mangaweng Daeng Sisurung, dan Pacandak Daeng Sirua (Karaeng Bonto-Bonto)[612]. Selanjutnya, pada 1824 Belanda mengangkat Karaeng La Pallambe Daeng Pabali sebagai Regent Pangkajene pertama (1824–1839). Ia digantikan oleh Karaeng Kaluarrang selaku Regent Pangkajene kedua (1840–1841). Kendati demikian, ia hanya sempat memerintah setahun dan setelah itu diberhentikan karena gagal menertibkan kawasan tersebut.

Pemerintah kolonial kemudian menunjuk Ince Wangkang yang berasal dari Makassar sebagai Regent Pangkajene ketiga (1841–1842), tetapi pengangkatan ini ditentang oleh rakyat Kampung Baru-Baru Tangnga. Itulah sebabnya, Belanda lantas mengembalikan kedudukan Karaeng La Pallambe Daeng Pabali (1842–1847). Namun, ia wafat akibat tenggelam di lautan saat hendak menyetorkan uang pajak ke Makassar. Ia digantikan oleh putranya bernama La Sollerang Daeng Malledja (1847–1857). Ada

611. Lihat *Sejarah Kekaraengan di Pangkep*, halaman 21.
612. Lihat *Sejarah Kekaraengan di Pangkep*, halaman 6.

yang menyatakan bahwa Karaeng La Sollerang kemudian melarikan diri ke pegunungan karena takut mengalami pembalasan akibat pemerintahannya yang lalim. Meskipun demikian, ada sumber lain yang menyebutkan bahwa La Sollerang termakan siasat La Abdul Wahab Mattotorangpage. Ketika itu, Belanda kebetulan hendak mengadakan kunjungan. Namun, La Abdul Wahab Mattotorangpage memberitahukan bahwa kunjungan tersebut dalam rangka menagih uang pajak yang tenggelam bersama ayahnya. Merasa tidak mampu membayar uang itu, ia lantas melarikan diri ke hutan bersama para pengikutnya. Akibatnya, saat kedatangan pejabat pemerintah kolonial, ia tidak ada di tempat dan benar-benar dipecat.[613]

Penggantinya adalah La Pappe Daeng Massiki (1857–1885), yakni putra La Abdul Wahab Mattotorangpage. Semasa pemerintahan Regent Pangkajene ke-6 ini, keadaan kawasan tersebut aman tenteram. Ia digantikan oleh putranya, Karaeng La Bapa Daeng Masalle (1885–1893). Selanjutnya, ia dipindahkan menjadi *regent* di Labakkang (1893–1923). Kedudukan ia di Pangkajene digantikan oleh adiknya, yakni La Djajalangkara Daeng Sitaba (1893–1918). Pada 1905, Belanda menggabungkan Bungoro dengan Pangkajene. Pada zamannya kerap terjadi peperangan dan huru hara. Penggantinya adalah putranya bernama Andi Mauraga Daeng Malliungang (1918–1942). Bungoro dipisahkan kembali dari Pangkajene dan gelar *regent* diganti dengan *karaeng adatgemeenschap*. Berkat jasanya terhadap pemerintah kolonial Belanda, ia mendapatkan bintang penghargaan pada 24 Agustus 1931.

Karaeng Adatgemeenschap Pangkajene berikutnya adalah putra Andi Mauraga Daeng Malliungang bernama Andi Burhanuddin (1942–1946). Ia pernah menimba ilmu di MULO dan AMS di Jawa. Ia meletakkan jabatannya pada 6 April 1946 karena tak bersedia bekerja sama dengan Belanda. Demi mengisi kekosongan jabatan *karaeng* Pangkejene, diangkatlah pamannya, Andi Mattotorang Daeng Mamangung selaku pejabat Karaeng Pangkajene. Ketika itu, Belanda dengan pasukan NICA-nya hendak menegakkan kembali kekuasaannya di Kepulauan Nusantara. Di Pangkajene sendiri berkecamuk kemiskinan, kekacauan, dan kelaparan. Selama setahun Andi Mauraga Daeng Malliungang memegang jabatannya dan selanjutnya diselenggarakan pemilihan Karaeng Pangkajene yang baru. Yang terpilih adalah Andi Muri Daeng Lulu dan ia dilantik pada 23 Agustus 1947. Ia merupakan Karaeng Pangkajene terakhir sebelum Pangkajene diubah menjadi kecamatan pada 1960.

---

613. Lihat *Sejarah Kekaraengan di Pangkep*, halaman 23-24.

b. Ke-*karaeng*-an Bungoro

Bungoro pernah berada di bawah kekuasaan Gowa. Meskipun demikian, setelah kekalahan Gowa, Bungoro dimasukkan ke dalam apa yang disebut *Noorder Districten* (Distrik-distrik Utara). Pada 1824, yang memerintah Bungoro adalah La Palowong Daeng Pasampo. Ketika itu, sebagian wilayah ke-*karaeng*-an ini ditempatkan di bawah pemerintahan saudara La Palowong Daeng Pasampo bernama Daeng Sidjalling dan dinamai kawasan Bungoro Riwawo atau Tala'ju.[614]

Pada 1868, *regent* Bungoro bernama Mallantingang Daeng Pabeta berhenti dari jabatannya, namun putranya bernama La Pabbicara Daeng Manimbangi masih kanak-kanak sehingga sebagai wakilnya diangkatlah Karaeng La Mannaggongang Daeng Pasawi dari Labakkang. La Pabbicara Daeng Manimbangi baru diangkat sebagai *regent* Bungoro pada 1893, namun diasingkan ke Padang, Sumatera Barat pada 1906 karena dianggap membahayakan ketenteraman. Bungoro kemudian digabungkan dengan Pangkajene. Kendati demikian, Bungoro dipisahkan kembali pada 1918. Sebagai *karaeng*nya diangkatlah Andi Tambi. Para penggantinya adalah La DolohaE Daeng Palallo dan Andi Mustari, yang merupakan pejabat camat Bungoro pertama.

Karaeng Bungoro membawahi 18 kepala kampung, yakni Barue, Bontorannu, Bowong, Bujung, Sapanang, Batiling, Bontopanno, Tondong, Talappasa, Lejang, Mattampa, Malawang, Timbusang, Landea, Salebbo, Samatea, Campagaya, dan Leppangeng. Seorang di antara bergelar *jennang* dan seorang lagi bergelar *lolo*. Berikutnya tujuh orang bergelar *lo'mo* dan delapan orang bergelar *matowa*.[615]

c. Ke-*karaeng*-an Balocci

Balocci pernah diperintah oleh enam orang *karaeng* yang belum diketahui namanya dan juga riwayatnya. Karaeng Balocci ketujuh, kedelapan, dan kesembilan masing-masing adalah Karaeng Ammoterang Daeng Pabali, Daeng Pabeta, serta Karaeng Tinggia. Ia digantikan oleh menantunya bernama Karaeng Pattoddo (1881–1911) karena tak memiliki putra. Semasa pemerintahannya, ia pernah mengadukan kontrolir Pangkajene karena menebang 40 pohon cendana di wilayah kekuasaannya. Akibatnya, kontrolir didenda sebesar satu Ringgit per pohonnya. Akibatnya, kontrolir merasa dendam dan mengupayakan agar Karaeng Pattoddo digantikan oleh orang yang bukan keturunannya. Sebagai penggantinya kemudian dipilih dari kalangan kepala

---

614. Lihat *Sejarah Kekaraengan di Pangkep*, halaman 43.
615. Lihat *Sejarah Kekaraengan di Pangkep*, halaman 41.

kampung atau gallarang yang memiliki kelebihan dibandingkan lainnya. Akhirnya, H. A. Kadir Daeng Matteppo (1911–1937) yang sebelumnya menjabat sebagai *gallarang* Tondongkura terpilih sebagai *karaeng* Balocci[616].

Kaum kerabat dan pengikut Karaeng Pattoddo kerap mengganggu jalannya pemerintahan H. A. Kadir Daeng Matteppo, namun ia dapat mengatasinya sehingga keadaan menjadi tenang. Penggantinya adalah putranya bernama H. A.. Rahim Daeng Masalle (1937–1962). Ia merupakan *karaeng* Balocci terakhir. Karaeng Balocci membawahi sembilan kampung, yakni Balocci, Padang Tangngaraja, Padang Tangngalau, Bulu-Bulu, Birao, Bantimurung, Malaka, Lanne, dan Tondongkura. Lima kepala kampung menyandang gelar *karaeng*, seorang bergelar *sullewatang*, sedangkan tiga lagi bergelar *gallarang*.[617]

d. Ke-*karaeng*-an Labakkang

Sebelumnya disebut Kerajaan Lombasang. Rajanya bergelar *somba* atau *sombaya*, sama seperti Gowa dan Bantaeng. Rajanya yang pertama sampai keenam hanya dikenal sebagai *somba* pertama hingga keenam. Pada 1653, Sultan Hasanuddin dari Gowa merintahkan agar nama Lombasang diubah menjadi Labakkang. Gelar *somba* kemudian diganti menjadi *karaeng*. Sebagai *karaeng* Labakkang pertama adalah La Upe Karaeng Ilanga Rikasombana (juga dianggap sebagai *somba* Lombasang ke-7). Karaeng Labakkang kedua hingga kesepuluh tidak diketahui namanya dan hanya dikenal wakilnya saja, yakni I Balango Daeng Pasai, Pallajarang Daeng Mamangung, dan Baja-Baja Daeng Tantang. Rangkaian karaeng Labakkang berikutnya adalah I Arif Karaengta Kaluarrang Matinroe ri Balang (1749), I Tjalla Daeng Muntu Karaengta Ujung (1801), I Mannanggongang Daeng Pasawi (1820), I Ummarang Daeng Lira (1825), I Ali Daeng Lira Matinroa ri Balla Bulona (1831), I Late Daeng Muntu Matinrowa ri Papan Batunna (1831), I Mannanggongang Daeng Pasawi Niselonganga ri Bandung (1846), I Paga Daeng Pali Karaengta Lembaya Niselonganga ri Padang (1871), I Bapa Daeng Masalle Karaengta Gusung (1904), La Pappang Daeng Siruwa (1919), Andi Calla Daeng Muntu Karaeng Towaya (1929), dan Andi Bauru Daeng Gau Karaeng Loloa (1952–1965).[618]

Menurut sumber lainnya, Raja Labakkang, Matinroe ri Balang, memiliki seorang putra bernama La Maruddani Karaeng Bontobonto yang dibesarkan di Bone.

616. Lihat *Sejarah Kekaraengan di Pangkep*, halaman 57.
617. Lihat *Sejarah Kekaraengan di Pangkep*, halaman 54.
618. Lihat *Sejarah Kekaraengan di Pangkep*, halaman 66-67.

Setelah dewasa, ia diundang kembali ke Labakkang guna diangkat sebagai penguasa menggantikan ayahnya. Sepulangnya ke kampung halamannya, ia menyaksikan penderitaan rakyat akibat penindasan penjajah sehingga membangkitkan dendam dalam hati sanubarinya. La Maruddani kemudian bersiap bangkit melawan pemerintah kolonial. Belanda mengajaknya berunding namun ditolak. Akibatnya, pada 1868 pecah perlawanan rakyat Labakkang yang dilakukan secara bergerilya. Pada 1872, La Maruddani bertolak menuju Mandar dan bergabung dengan gerakan anti Belanda di sana. Pemerintah kolonial kembali menawarkan perundingan dan La Maruddani bersedia berunding asalkan Belanda memenuhi tuntutannya, seperti penurunan pajak. Akhirnya, Belanda menyetujui segenap tuntutan La Maruddani dan rakyat Labakkang menyambut gembira kepulangan ia.[619]

e. Ke-*karaeng*-an Ma'rang

Karaeng Ma'rang pertama adalah Daeng Mattola. Pada perkembangan selanjutnya, di tahun 1920 yang menjadi Karaeng Ma'rang adalah La Tawakkal Daeng Marola. Ia digantikan oleh Andi Pintara', yang sebelumnya pernah menjabat sebagai juru tulis di Tanette. Penggantinya adalah putranya bernama Andi Makin, yang digantikan kembali oleh putranya, Andi Sadda'. Ia merupakan *karaeng* Ma'rang terakhir.[620] Karaeng Ma'rang membawahi tujuh kepala kampung. Dua kepala kampung bergelar *lokmo*, masing-masing berasal dari PituE dan Bontosunggu. Seorang kepala kampung bergelar *matowa*, yakni kepala Kampung Ma'rang. Seorang kepala kampung bergelar *gallarang*, yakni yang berasal dari Pitusunggu. Dua kepala kampung bergelar *mado'*, yakni Tala dan Bonto-Bonto. Seorang kepala kampung bergelar *jennang*, yakni kepala kampung Kassi.[621]

f. Ke-*karaeng*-an Segeri

Pendiri Ke-*karaeng*-an Segeri adalah kemenakan raja Gowa ke-10. *Karaeng* Segeri yang digelari Datu GollaE diangkat sebagai raja Agganionjong atau Tanete pertama. Pada perkembangan selanjutnya Segeri masuk ke bawah payung kekuasaan Gowa. Setelah kekalahan Gowa, Segeri digabungkan dengan *Noorder Districten* (Distrik-distrik Utara) yang langsung berada di bawah pemerintahan Belanda. Pada 1776, La Tenri Sessu Arung Pantjana Petta LaoE ri Segeri, putra We Tenrileleang, *datu*

619. Lihat *Profil Raja dan Pejuang Sulawesi Selatan*, halaman 66-67.
620. Lihat *Sejarah Kekaraengan di Pangkep*, halaman 80.
621. Lihat *Sejarah Kekaraengan di Pangkep*, halaman 78.

Tanete dan Luwu diangkat sebagai *karaeng* Segeri. Antara tahun 1776–1779, Bone berupaya merebut *Noorder Districten* dari tangan Belanda. Meskipun demikian, La Tenri Sessu dengan bantuan Sidenreng, Berru, dan Tanete melancarkan perlawanan yang gigih terhadap Bone. Tetapi selang enam tahun kemudian, *Noorder Districten* berhasil dikuasai Bone. Sewaktu Kepulauan Nusantara jatuh ke tangan Inggris, pemerintah kolonial Inggris merebut kawasan tersebut dari tangan Bone pada 1814. Saat Inggris mundur dari sana, Bone menguasai lagi Distrik-distrik Utara. Ketika itu, Bone mendapatkan bantuan Tanete. Menyadari hal itu, Inggris lantas bersekutu dengan Gowa sehingga sanggup menghalau pasukan Tanete dari Pangkajene dan Labakkang. Namun, Inggris dan Gowa tidak mampu meraih kemajuan lebih jauh. Bersamaan dengan itu, Bone menyerbu Maros, yang merupakan daerah kekuasaan Gowa. Akibatnya, Inggris terpaksa mengerahkan pasukannya ke Maros pada 1816 guna menghalau Bone dari sana.

Di tahun yang sama, pemerintah kolonial Inggris mengembalikan Kepulauan Nusantara pada Belanda. Kendati demikian, Belanda baru berhasil menguasai kembali sepenuhnya *Noorder Districten* pada 1824. Sebagai penguasa Segeri, pemerintah kolonial Belanda mengangkat La Abdul Wahab Mattotorangpage Daeng Mamangung. Pada 1918, Belanda memecah kembali Segeri menjadi dua, yakni Segeri sendiri dan Mandalle. Yang menjadi *karaeng* Segeri terakhir adalah Andi Page. Belakangan ia diangkat sebagai camat Segeri.[622]

g. Ke-*karaeng*-an Mandalle

Di kawasan Mandalle pernah berdiri tiga persekutuan adat, yakni Katena, Mallawa, dan Mandalle. Pada abad 17, ketiganya mengakui kekuasaan Gowa. Setelah kekalahan Gowa, Mandalle yang kepala adatnya bergelar *lokmo* itu, digabungkan dengan Tanete. Pemerintah kolonial Belanda pada 1824 menaklukkan Tanete dan merebut Mandalle. Selanjutnya, ketiga persekutuan adat di atas dilebur menjadi satu *regentschap* bernama Mandalle.[623] *Regent* pertama di Mandalle adalah Mallewai Daeng Manimbangi (wafat 1848), putra La Abdul Wahab Mattotorangpage Daeng Mamangung. Ia digantikan oleh puteanya, La Sumange Rukka Karaeng Kekeang (1848–1861). Setelah itu, saudaranya bernama La Pallawaruka Daeng Mallawa (1861–1909) tampil menggantikannya. Pemerintah kolonial menghapuskan *regentschap*

622. Lihat *Sejarah Kekaraengan di Pangkep*, halaman 89.
623. Lihat *Sejarah Kekaraengan di Pangkep*, halaman 92.

Mandalle dan menggabungkannya dengan Segeri pada 1909. Kendati demikian, pada 1918 Belanda memisahkan kembali Mandalle dari Segeri dan mengangkat La Dongkang Daeng Massikki sebagai *regent* Mandalle. Karenanya, Mandalle semenjak saat itu menjadi salah satu *karaeng adatgemeenschap* di kawasan Pangkajene. Ia digantikan oleh putranya, Andi Mandacingi. Penggantinya selaku *karaeng* Mandalle terakhir adalah adiknya bernama Andi Sakka.

i. Ke-*karaeng*-an Bontoa

Merupakan ke-*karaeng*-an yang terletak di kawasan Maros. Ada sumber yang menyatakan bahwa Bontoa merupakan wilayah Kerajaan Marusu, namun ada juga yang tidak menyebutkan demikian.[624] Pendiri Ke-*karaeng*-an Bontoa adalah I Mannyarang, putra Raja Bangkala ketiga. Ia sezaman dengan Sultan Alauddin (1593–1639) atau Raja Gowa ke-14. Ia mengemban titah Raja Gowa dalam rangka perluasan wilayah kekuasaannya. Dalam pengembaraannya, tibalah ia di kawasan pesisir utara Kerajaan Marusu', yang dinamainya Panaikang. Selanjutnya, ia meneruskan perjalanannya ke kawasan yang belakangan dinamainya Bontoa. Pengembaraan I Mannyarang itu dengan menggunakan perahu layar yang dilengkapi atribut kebesaran Kerajaan Gowa. Raja Gowa lantas mengangkat I Mannyarang sebagai penguasa Bontoa lengkap dengan bendera kebesaran beserta perangkat kekuasaan lainnya.

Para *karaeng* Bontoa berikutnya yang berasal dari garis keturunan I Mannyarang adalah I Mannyuwarang, I Daeng Siutte, I Daeng Mangnguntungi, I Pakandi Daeng Massuro, I Pandima Daeng Maliongi, I Daeng Tumani, I Mangngaweang Daeng Manggalle, I Reggo Daeng Mattiro, I Parewa Daeng Mamala, I Sondong Daeng Mattayang, I Bausad Daeng Sitaba Karaeng Tallasa Karaeng, dan I Bambo Daeng Matekko (Petta Tekko). *Karaeng* Marusu' ke-10, yakni La Mamma Daeng Marewa (1723–1779) menggagas pembentukan ikatan antar kerajaan-kerajaan yang berada di sekitar wilayahnya, yang terdiri dari Marusu', Simbang, Bontoa, Tanralili, dan Raya.[625] Selanjutnya, *karaeng* Bontoa terakhir dari garis keturunan I Mannyarang, yakni I Bambo Daeng Matekko, tidak bersedia mematuhi kehendak pemerintah kolonial sehingga dipecat dan digantikan oleh Raja Daeng Manai, yang memagang jabatan sebagai *Hoofd District Adatgemeenschap* Bontoa atau kepala distrik persekutuan adat

624. Lihat *Sejarah Kekaraengan Bontoa di Maros*, halaman 15.
625. Lihat *Sejarah Kekaraengan Bontoa di Maros*, halaman 15.

Bontoa. Sebelumnya, ia menjabat sebagai *gallarang* Kassijala, serta merupakan putra I Serang Daeng Mattimoe, kepala kampung Kabba.[626]

Semenjak saat itu, para *karaeng* Bontoa juga menjabat sebagai *hoofd district*. Rangkaian para karaeng Bontoa berikutnya adalah Abdul Maula Intje Djalaluddin, Andi Muhammad Daeng Sisila, Andi Djipang Daeng Mambani, Andi Muhammad Daeng Sisila (pemerintahan kedua), Andi Djipang Daeng Mambani (pemerintahan kedua), Andi Radja Daeng Manai Karaeng Loloa, dan Andi Muhammad Yusuf Daeng Mangngawing. Daerah kekuasaan Ke-*karaeng*-an Bontoa dibagi menjadi enam belas ke-*gallarang*-an, yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala kampung bergelar *gallarang*; yakni Bontoa, Salenrang, Sikapaya, Balosi, Pa'rasangan Beru, Panaikang, Tanggaparang, Lempangang, Panjallingang, Ujung Bulu, Batunapara, Belang-Belang, Suli-Suli, Panambungan, Magemba, dan Tala' Mangape.[627]

Tujuh Ke-*karaeng*-an di Pangkajene
Ivan Taniputera

626. Lihat *Sejarah Kekaraengan Bontoa di Maros*, halaman 18.
627. Lihat *Sejarah Kekaraengan Bontoa di Maros*, halaman 18.

XX. RAPPANG

Kini terletak di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Raja-raja kerajaan ini yang menyandang gelar *arung* sekerabat dengan raja-raja Sidenreng. Konon Arung Rappang pertama, We Tipu Uleng, merupakan saudari kandung La Mallibureng (Addaoang Sidenreng pertama). We Pawawoi, Arung Rappang kedua, adalah putri We Tipulinge, Addaoang Sidenreng keempat. La Makkarawi, *arung* Rappang ketiga yang juga merangkap sebagai Datu Suppa adalah putra La Pute Bulu (± 1544), Datu Suppa. Penguasa Rappang berikutnya adalah Songkopulawengnge, putra Manurungnge ri Lowa, yang menurut salah satu sumber adalah Raja Sidenreng pertama. Ia digantikan secara berturut-turut oleh We Cinang (Arung Rappang ke-5), La Pasampoi (Arung Rappang ke-6; putra La Batara, Addaoang Sidenreng ke-6), dan La Pancaitana (Arung Rappang ke-7; putra We Lampe Welua, Datu Suppa ke-6/ 7).

Semasa pemerintahan La Pakkalongi (Arung Rappang ke-8), Rappang bergabung dengan Persekutuan Lima Ajattaparang yang dipelopori oleh La Makkarawi, *datu* Suppa. La Pakkalongi juga merupakan raja pertama yang memeluk agama Islam. *Arung-arung* Rappang berikutnya adalah We Dangkau (Arung Rappang ke-9, anak Pakkalongi), Tonee (La Tonang, Arung Rappang ke-10), We Tasi (We Tasi' Petta Maubbengnge, Arung Rappang ke-11), Todani (To Dani, Arung Rappang ke-12; putra We Tasi dengan La Bila Datu Citta)-juga menjadi raja di Alitta dan Suppa, La Tenri Tatta (Arung Rappang ke-13, menantu Todani), La Toware (Arung Rappang ke-14, putra La Tenri Tatta), We Tenri Paonang (Arung Rappang ke-15), dan La Pabittei (Arung Rappang ke-16, putra We Tenri Paonang dengan La Kasi PonggawaE ri Bone).

Pada perkembangan selanjutnya, Rappang pernah diperintah seorang ratu bernama We Madditana (Arung Rappang ke-17), yang merupakan putri La Pabbittei. Ia digantikan oleh We Bangki, putrinya dengan La Makkulawi Arung Gilireng,. Suami We Bangki yang bernama La Panguriseng menjadi Arung Rappang ke-19. Selain itu, La Panguriseng juga merangkap sebagai Addatuang Sidenreng ke-11. La Panguriseng digantikan oleh La Sadapotto selaku Arung Rappang ke-20. Ia merangkap pula sebagai Addatuang Sidenreng ke-12. La Sadapotto menandatangani *Korte Verklaring* pada 1906 setelah kalah dalam peperangan menghadapi Belanda. Takhta Rappang beralih kembali pada I Tenri Fatimah, yang juga merangkap sebagai Addatuang Sawitto. Ia adalah Raja Rappang terakhir.

XXI. SANRROBONE

Sanrobone merupakan salah satu vasal Kerajaan Gowa. Pada masa Gowa masih berjaya, raja-raja kerajaan seberang lautan yang hendak menghadap raja Gowa diharuskan singgah terlebih dahulu di Sanrobone. Sebelum kerajaan ini terbentuk, di sana telah ada tujuh ke-*karaeng*-an atau satuan wilayah yang dipimpin seorang *karaeng*, yakni Bajeng, Malewang, Bangkalang, Lassang, Galesong, Jipang, dan Kantingan.[628] Para penguasa masing-masing ke-*karaeng*-an tersebut saling bersaudara dan memperluas wilayah kekuasaannya baik dengan cara damai ataupun kekerasan. Gowa bermaksud memperluas daerah kekuasaannya ke selatan semasa pemerintahan Raja Tumapa'risi' Kallona (Raja Gowa ke-9). Ketika itu Karaeng Jipang telah mengakui kekuasaan Gowa dan dengan dibantu olehnya, Raja Tumapa'risi' Kallona melancarkan peperangan melawan Karaeng Kantingan. Gowa beserta Jipang berhasil mengalahkan Kantingan dan wilayahnya dipecah menjadi beberapa satuan lebih kecil yang disebut *kare*; yakni Pancabelong, Panaikang, Paqdinding, dan Lau.

Dengan persetujuan ketiga *kare* lainnya, Gowa mengangkat penguasa (*kare*) Pancabelong sebagai *karaeng* Pancabelong dan selanjutnya persekutuan keempat *kare* tersebut dinamakan Sanrobone. Federasi Sanrobone menjalin hubungan yang baik dengan Gowa. Sultan Hasanuddin dari Gowa menikahi I Petta Daeng Nasali, putri Karaeng Banyuarang I Tunijeqneq dari Sonrobone (penguasa Sonrobone ke-8). Sumber Belanda menyebutkan pula bahwa para penguasa kerajaan kecil Sanrobone menjalin hubungan kekerabatan yang erat dengan Gowa. Oleh karenanya, ketika Perjanjian Bungaya diadakan pada 1667, Sanrobone juga dianggap turut serta menandatanganinya dan wajib melaksanakan isinya.

Menurut *lontarak*, raja pertama di Sanrobone bernama Karaeng Pancabiluka, yang digantikan oleh Karaeng Tunijalloka ri Parangna. Karaeng Sanrobone ke-3, Karaeng Massawaya, pernah berperang membantu Raja Gowa ke-11, I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data' Karaeng Tunibatta, melawan Bone. Keduanya gugur dalam peperangan tersebut. Selanjutnya, secara berturut-turut yang menjadi penguasa Sanrobone adalah Karaeng Tunibosara, Karaeng Tumenanga ri Parallakenna, Karaeng Tumenanga ri Campaganna, dan Karaeng I Pueu. Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, penguasa Sanrobone ke-8, Karaeng Banyuarang I Tunijeqneq (Karaeng Sidra) menikahkan putrinya, I Petta Daeng Nasali, dengan Sultan Hasanuddin dari

---

628. Lihat *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 437.

Gowa. Pernikahan ini membuahkan seorang putra bernama I Mappadulung Daeng Mattimaung Karaeng Campagaya. Ia kemudian menjadi karaeng Sanrobone ke-9 dan sultan Gowa bergelar Abdul Jalil.

Pada 31 Juli 1780, Sanrobone diwajibkan menandatangani perjanjian dengan Belanda yang isinya sebagai berikut.[629]

- Kerajaan Sanrobone tidak diperkenankan lagi mengakui Gowa atau pihak manapun selaku pemegang kekuasaan tertinggi di kerajaan tersebut. Hanya Belanda yang diakui sebagai tuan atas Sanrobone.
- Sanrobone diwajibkan memberi bantuan terhadap Belanda apabila terjadi peperangan.
- Tidak mengadakan hubungan surat menyurat dengan raja-raja lainnya.
- Tidak mengizinkan kapal-kapal milik musuh Belanda mendarat di pelabuhannya.
- Membongkar segenap benteng pertahanan yang lama dan tak akan mendirikan yang baru.
- Pengangkatan raja dan para pembesar hanya diperkenankan atas seizin Belanda; apabila tak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Belanda dapat memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

Dengan demikian, berdasarkan butir-butir perjanjian diatas tampak nyata bahwa kekuasaan raja-raja Sanrobone sangat dibatasi oleh Belanda.

Selanjutnya yang menjadi raja di Sanrobone adalah saudaranya bernama I Jatta Tojeng Karaeng Bontomajannang. Secara berturut-turut penguasa Sanrobone berikutnya adalah Pakkana Karaeng Pangkajenneq, yang menikah dengan Karaeng Mangalle, putri Gallarang Mangasa. Ibu ia adalah Karaeng Bontojene, permaisuri Sultan I Ambela dari Bima; Tumenanga ri Masiqigna, Tumenanga ri Sanrobone, dan Tumenanga ri Paqrasangananna. Pada 1824, Sanrobone turut menandatangani Perjanjian Bungaya yang Diperbaharui dan semenjak itu dianggap sebagai sekutu Belanda. Raja Sanrobone berikutnya, Tumenanga ri Lagurida adalah putra Tumenanga ri Pagrasangananna yang wafat pada 1838 dan tidak memiliki keturunan. Oleh karenanya, ia digantikan oleh kemenakannya yang bernama La Patau. Namun, karena masih kanak-kanak, I Memang Karaeng Bulu-Bulu diangkat oleh pemerintah Belanda sebagai walinya. Semasa pemerintahan I Memang Karaeng Bulu-Bulu yang

629. Lihat *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 273.

kelak menggantikan La Patau, Sanrobone dijadikan bagian Hindia Belanda, yakni berdasarkan ketetangan pemerintah kolonial tertanggal 28 September 1867 no. 5. Raja-raja Sanrobone berikutnya hingga menjelang kemerdekaan adalah: Bantang Daeng Ngilau, Tumenanga ri Kabarana, I Guttu Datu Lolo, Pammusurang Daeng Pabeta, Yusuf Daeng Marampu, Baso Daeng Menjoka, dan I Mallombasi Daeng Kilo.

Sementara itu, menurut silsilah Karaeng Sanrobone sebagaimana yang diberikan oleh Yang Mulia Bapak Andi Hasan Parigi Petta Nassa, urutan para penguasa Sanrobone dimulai dari karaeng ke delapan adalah sebagai berikut: Itanije'ne Karaeng Banyuanyara (Karaeng Sanrobone VIII), I Mappadulung Daeng Mattimung Karenta Capagaya (Karaeng Sanrobone IX dan Sultan Gowa XIX), Karaenta Bonto Majannang (Karaeng Sanrobone X), Pakkana Karaenta Pangkajene (Karaeng Sanrobone XI), Tumenaga Ri Masigina (Karaeng Sanrobone XII), Tumenaga Ri Sanrobone (Karaeng Sanrobone XIII), Tumenaga Ri Parasanganna (Karaeng Sanrobone XIV), Abdul Karim Tumenaga Ri Laguruda (Karaeng Sanrobone XV), Lapatau (Karaeng Sanrobone XVI-pemerintahan pertama), I Memang Karaenta Bulu-Bulu (Karaeng Sanrobone XVII), Lapatau (Karaeng Sanrobone XVIII-pemerintahan kedua), I Guttu Datu Lolo (Karaeng Sanrabone XIX), Pammusurang Daeng Pabeta (Karaeng Sanrobone XX), I Yusuf Daeng Ropu (Karaeng Sanrobone XXI), I Baso Daeng Nyengka (Karaeng Sanrobone XXII), I Mallombasi Daeng Kilo (Karaeng Sanrobone XXIII), dan H. Aji Mallombasi Daeng Nyengka (Karaeng Sanrobone XXIV).

XXII. SAWITTO

a. Cikal bakal Kerajaan Sawitto

Kerajaan ini kini terletak di Kabupatan Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada mulanya raja Sawitto biasanya menyandang gelar *addoang*, tetapi belakangan diganti dengan *addatuang*. Cikal bakal kerajaan ini adalah seorang *to manurung* (orang yang turun dari langit) wanita bergelar Puang RisompaE.[630] Ia menikah dengan seorang *to manurung* pria bernama La BangengE dari Bacukiki. Asal mula nama Sawitto berasal dari kata s*aaweto taue rini* atau 'banyak juga orang di sini,' yang merupakan pemberian La BangengE. Puang RisompaE dianggap sebagai raja Sawitto pertama. Pernikahannya dengan La BangengE dikaruniai seorang putri bernama I Tamanroli yang menjadi raja Sawitto kedua.

---

630. Lihat *La Sinrang Bakka Lolona Sawitto Petta Lolo La Sinrang*, halaman 18.

Sumber lain menyatakan bahwa *Addoang* atau Raja Sawitto pertama adalah *to manurung* bernama La Bangenge atau *to manurung* di Bacukiki. Ia menikah dengan We Teppulinge atau *to manurung* di Suppa. Putranya bernama La Tedduloppo menggantikan ayah beserta ibunya, baik sebagai raja Sawitto maupun Suppa.[631]

I Tamanroli menikah dengan seseorang yang tak diketahui namanya; hanya saja mereka dikaruniai sepuluh orang anak dan seorang anak lagi yang mirip buaya. Anak-anak mereka kemudian menyebar ke kawasan-kawasan lain di Sulawesi Selatan: (1) Karaeng ri Jallo pergi ke Soppeng, (2) Daeng Mamata pergi ke Enrekang, (3) Songko Payung pergi ke Bone, (4) Sambulawang pergi ke Duri, (5) La Salundung pergi ke Rante Bulawang, (6) Malaya pergi ke Luwu, (7) Arung Kabaena pergi ke Sambuang, (8) La Soppa pergi Mandar, (9) Samparang ri Langi pergi ke Binanga, sedangkan (10) La Katu tetap tinggal di Sawitto. Sementara itu, putranya yang bernama Datu ri Parung turun ke air dan berubah menjadi buaya.

b. Perkembangan Kerajaan Sawitto

La Katu, putra I Tamanroli yang tetap tinggal di Sawitto, menjadi raja Sawitto ketiga. Ia menikah dengan We Tapana[632] dan memiliki seorang putra bernama La Paleteang (PaleteangE) yang bergelar La Pute Bulu (La Putebulu). Ia kemudian menggantikan ayahnya sebagai Raja Sawitto ke-4. Pada zamannya, Sawitto terlibat peperangan dengan Gowa dan menderita kekalahan. Akibatnya, La Paleteang ditawan oleh Gowa dalam waktu yang cukup lama. Peristiwa penting lain semasa pemerintahan La Paleteang adalah ditandatanganinya suatu perjanjian yang dipelopori oleh La Makkarawi, *Datu* (Raja) Suppa. Perjanjian yang diikuti lima negara ini (Suppa, Sawitto, Sidenreng, Rappang, dan Alitta) dikenal juga dengan sebutan Persekutuan Lima Ajattaparang.

Sumber lain menyatakan sebagai berikut. La Tedduloppo digantikan oleh putranya bernama La Putebulu, yang juga berkuasa di Sawitto dan Suppa. Ia mempunyai dua orang anak, yang masing-masing bernama La Paleteang (kelak menggantikan ayahnya sebagai raja Sawitto) dan La Makkarawi (kelak menggantikan ayahnya sebagai raja Suppa). Disebutkan pula bahwa semasa pemerintahan La Paleteang, Gowa menaklukkan Sawitto pada 1546 dan rajanya tertawan. Dua orang panglima perang Sawitto, Tolengo dan Tokipa, mencari siasat guna membebaskan

631. Lihat *Para Penguasa Ajatappareng: Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis*, halaman 169–170.
632. Menurut *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 259, disebut We Tappatana.

rajanya. Mereka memanfaatkan ajang berburu rusa yang diadakan di Gowa. Ketika itu, rombongan yang hendak mengadakan perburuan berangkat dengan beberapa perahu. Tolengo dan Tokipa secara diam-diam membocorkan seluruh perahu yang ada, terkecuali satu. Mereka berhasil melarikan rajanya dengan menggunakan perahu yang masih baik dan karena perahu-perahu lain sudah bocor, tiada seorang pun sanggup mengejar mereka[633]. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaannya adalah sebagai berikut: menurut versi pertama La Paleteang disamakan dengan La Putebulu; sedangkan versi kedua menyatakan bahwa La Paleteang adalah putra La Putebulu.

Gowa kembali menyerang Sawitto semasa pemerintahan *adattuang* ke-5, yakni La Cella Mata. Pasukan Gowa yang dipimpin oleh raja Gowa ke-10, Karaeng Tunipalangga, berhasil menewaskan La Cella Mata dan Kerajaan Sawitto dibumi hanguskan. Alasan penyerangan di atas adalah pengakuan Luwu bahwa yang pantas menyandang gelar *sombaya* atau pemegang hegemoni adalah Sawitto dan bukannya Gowa.

Setelah gugurnya La Cella Mata, takhta kerajaan Sawitto dipegang oleh La Pancaitana selaku raja Sawitto ke-6 yang merangkap juga sebagai Datu Suppa dan Arung Rappang ke-7. Ia adalah putra La Cella Matta dengan We Lampe Welua. La Pancaitana menikah dengan We Tenri Tana dan dikaruniai keturunan bernama We Pasulle, yang menjadi raja Sawitto ke-7 dan juga Datu Suppa. Semasa pemerintahannya, gelar *addoang* diganti dengan *addatuang*. Peristiwa penting yang terjadi pada zamannya adalah tersiarnya Agama Islam di Sawitto, yakni sekitar tahun 1608.

Gowa melancarkan serangannya terhadap Sawitto. Namun, We Pasulle memerintahkan agar pasukan Sawitto tidak melakukan perlawanan karena ia lebih menginginkan perdamaian dengan Gowa.[634] Bahkan I Pasulle mengikrarkan bahwa tempat mereka bernaung adalah Gowa, dan apabila Gowa memangil mereka akan menjawabnya, dan jika Gowa memerintahkan sesuatu, mereka akan melaksanakannya. Atas ikrar kesetiannya ini, Gowa menganugerahkan gelar We Pasulle Daeng Bulaeng Datu Bissue. We Pasulle tercatat merangkap pula sebagai raja Suppa. Setelah mangkat, ia memperoleh gelar anumerta *MatinroE ri Mala* atau 'Yang Dimakamkan di Mala' (Paleteang).

Sumber lain menuturkan bahwa pengganti La Paleteang adalah We Gempo yang merupakan putri sulung La Paleteang. Ia membangun istana yang banyak kamarnya.

---

633. Lihat *Para Penguasa Ajatappareng: Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis*, halaman 170–173.
634. Lihat *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 104.

We Gempo menikah dengan Raja Sidenreng dan putranya bernama La Patiroi menggantikan ayahnya sebagai Raja Sidenreng. Ia digantikan oleh La Cella Mata, yang merupakan adik perempuannya. Jadi, versi pertama menyebutkan bahwa La Paleteang langsung digantikan oleh La Cella Mata. Ia pernah diajak oleh raja Gowa menyerang Lembanna. Raja berikutnya adalah La Pancaitana, yang merupakan putra La Cella Mata dengan We Lampe Weluwa dari Suppa. Selain menjabat sebagai Addatuang Sawitto, ia juga merangkap sebagai Datu Suppa. Selanjutnya, Sawitto diperintah oleh We Pasulle Daeng Bulaeng Datu Bissue. Ia merangkap sebagai penguasa atas tiga kerajaan sekaligus, yakni Alitta, Sawitto, dan Suppa. Setelah ia mangkat hampir saja terjadi pertikaian antara Sawitto dan Suppa. Kedua kerajaan itu sama-sama menginginkan agar We Pasulle dimakamkan di wilayahnya. Untunglah, Alitta muncul sebagai penengah. Akhirnya, mereka sepakat bahwa We Pasulle dimakamkan di Sawitto, sedangkan tanah yang dipergunakan menimbun makam ia berasal dari Suppa serta Alitta.[635]

We Pasulle digantikan oleh putranya, La Tenri Sau, yang menjadi *addatuang* Sawitto ke-8. Pada zamannya Agama Islam dijadikan agama resmi kerajaan. La Tenri Sau ini selain menjadi raja di Sawitto juga merangkap sebagai *datu* (raja) Suppa.

Sumber lain menyebutkan bahwa pengganti We Pasulle adalah putranya bernama La Tenripau atau La Sampocaca. Sementara itu, yang menggantikannya sebagai *datu* Suppa adalah La Tenrisessu.[636] Barangkali La Tenri Sau menurut versi pertama sama dengan La Tenripau pada versi kedua.

La Tenri Sau menikah dengan We Tenri Seno dan memperoleh dua orang putra, yang masing -masing bernama La Makkasau dan La Mappasompa. Sepeninggal La Tenri Sau yang menjadi Addatuang Sawitto ke-9 adalah La Makkasau,[637] sedangkan La Mappasompa menjadi *addatuang* di Lasinrang (JampuE). La Makkasau mangkat dan singgasana Sawitto diwarisi oleh La Kuneng. *Addatuang* Sawitto ke-10 ini menikah dengan dengan I Tenri Dilling dan memiliki dua orang putra, yakni La Cibu dan La Calo. La Cibu mewarisi takhta ayahnya sebagai raja Sawitto ke-11 dan pernah pula menduduki jabatan sebagai *addatuang* di Sidenreng. Sementara itu, La Calo menjadi *arung* (raja) di Mallusetasi.

635. Lihat *Para Penguasa Ajatappareng: Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis*, halaman 177.
636. Lihat *Para Penguasa Ajatappareng: Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis*, halaman 177.
637. Pernah menjabat pula sebagai *maradia* (*arajang*) di Balanipa.

La Cibu menikah dengan Sahari Bulan dan dikaruniai seorang anak bernama Pallawagau, yang diangkat sebagai *datu* di Pattojo. Pallawagau menikah dengan I Pasulle, yang merupakan Addatuang Sawitto ke-12. Keturunannya adalah La Tamma, I Subaeda, dan La Bode. La Tamma (1873–1912) kemudian diangkat sebagai raja Sawitto ke-13. Bersamaan dengan kurun waktu pemerintahannya, Belanda mulai menanamkan kekuasaannya di Sawitto. Sehingga timbul perubahan besar yang memancing ketidak-puasan berbagai kalangan, seperti penarikan pajak (*belasting*) yang berat dan kerja rodi. Oleh karenanya, timbul perlawanan yang dipimpin oleh La Sinrang, panglima perang Kerajaan Sawitto. La Tamma kemudian diganti oleh saudara perempuannya, I Subaeda, selaku Addatuang Sawitto ke-14. Sementara itu, saudaranya yang lain, La Bode, memegang jabatan sebagai *datu* Alitta. Selanjutnya, yang menjadi penguasa di Sawitto adalah seorang ratu bernama I Tenri Fatimah. Ia merangkap pula sebagai *arung* Rappang ke-21 dan sekaligus Addatuang Sawitto terakhir.

Terdapat sumber lain yang agak berbeda. La Makassau digantikan oleh saudarinya bernama We Timeng Petta Battowae dan bukan oleh La Kuneng. La Toraja kemudian menggantikan ibunya sebagai Addatuang Sawitto. Semasa pemerintahannya, Sawitto ditaklukkan oleh Bone. Penguasa Sawitto berikutnya adalah To Dani. Kendati demikian, ia memancing kemarahan Arung Palakka karena secara langsung menjalin hubungan dengan Belanda, padahal setiap kerajaan yang ingin berhubungan dengan Belanda harus melalui Arung Palakka. Bone yang saat itu diperintah Arung Palakka lantas menyerang Sawitto. Karena tidak sanggup menghadapi pasukan Bone, To Dani meminta perlindungan ke Mandar. Kendati demikian, permohonan perlindungan tidak bersedia dipenuhi oleh Mandar sehingga ia melarikan diri ke Pulau Salemo. Bone mengejarnya hingga ke sana dan ia tertangkap serta dicekik hingga tewas. La Tenritatta Daeng Tomaming diangkat sebagai Addatuang Sawitto berikutnya, dia juga merangkap sebagai Datu Suppa. Penguasa Sawitto berikutnya, La Doko, adalah putra La Tenritatta Daeng Tomaming. Ia juga merangkap sebagai Datu Suppa. Setelah ia barulah memerintah La Kuneng. Dengan demikian, versi pertama tidak menyebutkan nama-nama raja antara La Makassau hingga La Doko, sebagaimana yang tercantum pada versi kedua. Setelah itu, terdapat perbedaan lagi. Menurut versi ini, La Kuneng digantikan oleh We Time, dan bukan La Cibu. Ia digantikan oleh adiknya bernama We Cinde. Barulah setelah itu La Cibu menggantikan kakaknya sebagai *addatuang* Sawitto.

Masih menurut sumber yang sama, La Cibu digantikan oleh We Pasulle Daeng Bulaeng, yang mungkin sama dengan I Pasulle menurut versi lainnya. Hanya saja perbedaannya adalah sebagai berikut. We Pasulle disebut sebagai putri La Cibu, sedangkan La Pallawagau adalah saudara sepupu yang dinikahinya. Sementara itu, versi satunya menyebutkan bahwa La Pallawagau yang merupakan putra La Cibu. Sewaktu We Pasulle mangkat, La Pallawagau ingin menggantikan istrinya sebagai Addatuang Sawitto, namun dewan adat kerajaan tidak menyetujuinya. Karenanya, ia lantas mendatangkan pasukan dari Gilireng guna memerangi Sawitto. Demi menghindarkan pertumpahan darah, disepakati bahwa La Pallawagau boleh menjadi raja Sawitto, namun pemerintahan dijalankan oleh putranya bernama La Tamma. Semasa pemerintahan La Tamma diadakan pertemuan antara kerajaan-kerajaan di Ajattaparang pada 1901. Pertemuan tersebut menyepakati bahwa masing-masing kerajaan akan saling menghormati dan membantu satu sama lain. La Tamma digantikan oleh saudarinya bernama We Beda, yang barangkali sama dengan I Subaeda menurut sumber satunya. *Addatuang* Sawitto berikutnya adalah We Tenri, putri We Beda, yang mungkin sama dengan I Tenri Fatimah menurut versi lainnya. Sebelumnya, ia telah menjabat sebagai *arung* Rappang. We Tenri digantikan oleh We Rukiya Bau Bocco Karaeng Balla Tinggi. Ia merupakan *addatuang* Sawitto terakhir. Masa pemerintahan ia bertepatan dengan pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT).[638]

c. Perlawanan terhadap kolonialisme di Sawitto

Menjelang awal abad 20, Belanda hendak menanamkan kekuasaannya di Sulawesi Selatan. Oleh karenanya, Belanda memaksa agar para raja di kawasan tersebut menandatangani pernyataan takluk berupa *Korte Verklaring*. Bagi mereka yang tak bersedia mematuhi ketentuan tersebut, pemerintah kolonial Belanda tak segan-segan mengerahkan kekuatan militernya. Kerajaan Sawitto di bawah pemerintahan La Tamma menolak menuruti tuntutan Belanda yang merendahkan martabat negerinya tersebut. Tentunya, Belanda dengan semangat kolonialismenya tak akan tinggal diam menghadapi pembangkangan ini.

Belanda mendaratkan pasukannya di pantai Jampue pada 1903. Di pihak Sawitto, *addatuang* segera mengangkat La Sinrang sebagai panglima perang Sawitto. Laskar rakyat disiapkannya guna menyongsong kedatangan pasukan Belanda tersebut. La Sinrang membentuk pula pasukan khusus yang tak kenal mundur atau menyerah

638. Lihat *Para Penguasa Ajatappareng: Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis*, halaman 203.

dan dikenal sebagai *passiuno* atau *lappung*. Laskar seperti ini dibentuk di tiap-tiap kampung dan dipimpin oleh seorang *tolo* (pemberani) yang berasal dari daerahnya masing-masing. Para *tolo* yang terkemuka saat itu antara lain: Calabai Tungke'na dari kampung Alitta, Korokorona dari Madello, Balibina dari Kabellangeng, Bori-borona dari Palleteang, Bilulang Rakkona dari Lome, Koro Pessena dari Lalabata, Cambang Balelena dari WanuaE, Bulu Sirua'na dari Suppa, dan lain-lain.

Kekuatan militer Belanda yang mendarat di Sawitto saat itu berkekuatan kurang lebih 20 perahu dan 600 prajurit. Mereka mengirim utusan pada raja Sawitto guna menyampaikan ultimatum agar ia segera menandatangani *Korte Verklaring* dan mengikat persahabatan dengan Belanda. Tetapi kembali *addatuang* menolaknya sehingga Belanda segera melancarkan serangannya. Pagi-pagi sekali, kubu pertahanan pasukan La Sinrang dihujani oleh tembakan meriam Belanda. Pertempuran dashyat yang menelan korban jiwa tidak sedikit berkobar antara kedua belah pihak. Pada kesempatan kali ini, Belanda berhasil mengalahkan pasukan La Sinrang sehingga ia terpaksa mengundurkan dirinya guna mengatur strategi baru.

Kini Belanda bergerak maju ke ibu kota Sawitto. Kendati demikian, mereka kembali menghadapi perlawanan dari laskar rakyat pimpinan La Sinrang di Tanra Assona. Kali ini pertempuran berlangsung agak seimbang dan bahkan pasukan Belanda berhasil dipukul mundur ke daerah Labumpung (Ponnia). Strategi yang dilakukan pasukan La Sinrang adalah membentuk barisan pagar betis yang memanjang dari barat ke timur dengan melalui RubbaE. Dengan diterapkannya formasi tersebut, sistem pertahanan ini tak dapat ditembus oleh pasukan Belanda sehingga mereka terpaksa membelok memasuki Kerajaan Alitta.[639]

Salah seorang pimpinan pasukan Sawitto yang bernama La Nennung mengejar pasukan Belanda itu dan bersama-sama pasukan Alitta hendak menghadapi musuh. Kendati demikian, mereka tidak berjumpa dengan pasukan Belanda karena masing-masing menempuh jalur berbeda. Pasukan Belanda ternyata memasuki Alitta dari arah timur dan bergerak menuju ke Kerajaan Sidenreng. Setelah melakukan perlawanan yang gigih, Sidenreng berhasil ditaklukkan dan Belanda kemudian bergerak ke Rappang. Kerajaan ini berhasil ditundukkan pula oleh Belanda. Selanjutnya, secara berturut-turut Kerajaan Maiwa dan Enrekang jatuh ke tangan Belanda. Dari Enrekang Belanda berniat menyerang Sawitto kembali, yakni dengan melalui Sidenreng dan Alitta.

639. Lihat *La Sinrang Bakka Lolona Sawitto Petta Lolo La Sinrang*, halaman 105.

Kini, La Sinrang menerapkan strategi perang gerilya demi menghadapi Belanda; yang melancarkan serangan secara mendadak dan tak terduga-duga saat musuh sedang lengah. Sebagai contoh, ketika satu kompi pasukan Belanda sedang beristirahat di Libukang, sekonyong-konyong pasukan La Sinrang yang dipimpin Wa'Batjo Ali dan La Nennung Daeng Pagessa menyergap mereka. Akibatnya, pasukan tersebut menjadi kacau balau dan terpaksa melarikan diri ke arah Sidenreng. Mereka dikejar oleh pasukan La Sinrang yang berhasil merebut beberapa pucuk senjata. Pasukan Belanda yang melarikan diri itu tiba di mulut Sungai Kariango dan mengalami kesulitan dalam menyeberanginya. Pada saat bersamaan, pasukan La Sinrang makin mendekat di belakang mereka. Karena ketakutan, pasukan Belanda terpaksa menyeberangi sungai dengan rakit terbuat dari *araso* (sejenis tumbuhan yang bentuknya seperti tebu). Namun, diakibatkan rakit tersebut terlalu berat menanggung beban, banyak di antaranya tenggelam bersama anggota militer Belanda yang menumpanginya. Oleh karenanya, tidak sedikit pasukan Belanda yang menemui ajalnya; baik akibat tenggelam atau dihabisi oleh laskar La Sinrang. Setiap terdapat pasukan Belanda yang muncul ke permukaan, langsung dihujani tembakan. Akhirnya, dari pihak Belanda hanya tersisa tiga orang yang sanggup meloloskan diri ke Sidenreng.

Pada pertempuran-pertempuran selanjutnya, kemenangan datang silih berganti di antara kedua belah pihak. La Sinrang pernah hampir menemui ajalnya ketika ia bersama istrinya, I Makkanyuma, terjatuh dalam sumur mati. Sementara itu, tidak ada satu pun pasukannya yang melihat peristiwa tersebut. Salah seorang anggota pasukan Belanda menyaksikannya dan dengan penuh semangat maju menyerang La Sinrang yang terjatuh dalam sumur itu. Untungnya, pasukan Belanda tersebut hanya bersenjatakan pedang sehingga La Sinrang sanggup mengadakan perlawanan guna melindungi diri sendiri dan istrinya. Akhirnya, setelah anggota pasukan La Sinrang mengetahui kejadian yang menimpa pemimpinnya, mereka turut membantu menyerang tentara Belanda itu. Dengan demikian, nyawa La Sinrang berhasil diselamatkan.

Setelah menerapkan strategi perang gerilya, La Sinrang juga menjalin kerja sama dengan raja-raja lain di Sulawesi Selatan, seperti Sultan Husain dari Gowa. Tentu saja hal ini sangat merepotkan Belanda. Strategi perang gerilya dan kubu pertahanan pasukan La Sinrang yang berpindah-pindah menyulitkan pihak Belanda memadamkan pergolakan ini. Sebagai contoh, tatkala mendengar kabar bahwa La Sinrang beserta

pasukannya berada di Malimpung, Belanda pada 21 Januari 1906 menerjunkan pasukan di bawah pimpinan Kapten Goldman guna menangkap La Sinrang. Tetapi upaya ini sia-sia belaka karena La Sinrang telah berpindah dari tempat tersebut. Kendati demikian, medan gerilya La Sinrang makin sempit karena Belanda membangun berbagai pos pertahanan di tempat-tempat yang telah dikuasainya.

Demi menuntaskan perlawanan rakyat selekas mungkin, Belanda menawarkan hadiah bagi siapa saja yang sanggup menyerahkan La Sinrang. Sebaliknya, barangsiapa yang menyembunyikan La Sinrang akan dijatuhi hukuman berat, seperti hukuman mati, kerja paksa, pengasingan, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, ancaman Belanda ini tak sedikit pun menggentarkan hati rakyat. Belanda melakukan pula politik pecah belah di kalangan kaum bangsawan Sawitto sehingga ada di antara mereka yang mendukung atau pun menentang perjuangan La Sinrang. Kaum pendukung berpendapat bahwa mereka hendaknya membela kedaulatan negeri Sawitto hingga titik darah penghabisan. Sebaliknya, para penentang yang menyaksikan merosotnya kesejahteraan rakyat Sawitto akibat perang berkepanjangan menyarankan agar perlawanan diakhiri saja. Menurut pihak yang ingin berdamai dengan Belanda, strategi konfrontasi semacam ini tidak membuahkan banyak manfaat bagi rakyat. Bahkan berpotensi menjerumuskan mereka makin dalam ke jurang penderitaan. Dengan adanya perpecahan tersebut, perjuangan La Sinrang makin melemah. Di samping itu, beberapa pemimpin utama pasukan La Sinrang telah gugur atau ditawan oleh Belanda.

Belanda menerapkan siasat pamungkas dengan menawan La Tamma (Addatuang Sawitto dan ayah La Sinrang) beserta I Makkanyuma (istri La Sinrang) pada 25 Juli 1906. Apabila La Sinrang tidak bersedia menyerah, mereka akan disiksa dan menjalani hukuman pengasingan. Oleh karena itu, pada akhir bulan Juli 1906 La Sinrang beserta sisa-sisa pasukannya sejumlah 100 orang memasuki kota Pinrang guna membebaskan istri beserta ayahnya. Belanda menggunakan kesempatan itu untuk mengepung La Sinrang rapat-rapat. La Tamma dan I Makkanyuma dijadikan sandera oleh pasukan Belanda. Akhirnya, La Sinrang berhasil ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Banyumas. Baru pada 1937 ia dikembalikan ke Sawitto setelah berusia lanjut dan sakit-sakitan. La Sinrang wafat di kampung halamannya pada 29 Oktober 1938. Ia dimakamkan di Amasssangang yang terletak di tepi kota Pinrang. Saat upacara pemakamannya, tidak hanya para raja saja yang hadir, melainkan juga para pejabat

kolonial Belanda. Hal ini membuktikan bahwa La Sinrang merupakan tokoh yang disegani baik oleh kawan maupun lawan.

XXIII. SIDENRENG

a. Cikal Bakal dan Perkembangan Kerajaan Sidenreng

Kini termasuk dalam Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Raja-rajanya semula bergelar *addaoang*, namun selanjutnya diganti dengan *addatuang*. Kerajaan ini bersaudara dengan Rappang. Raja atau Addaoang Sidenreng yang pertama adalah La Mallibureng atau Manurungnge ri Lowa (Bululowa). Ia digantikan oleh La Pawawoi, selaku Addaoang Sidenreng kedua. Namun, versi lain menyebutkan bahwa raja kedua Sidenreng adalah Songkopulawengnge, putra Manurungnge ri Lowa. Selanjutnya, yang berkuasa di Sidenreng secara berturut-turut adalah La Makkarakka (*addaoang* ke-3), We Tipulinge (seorang ratu, *addaoang* ke-4), We Pawawoi (seorang ratu, *addaoang* ke-5), La Batara (*addaoang* ke-6), dan La Pasampoi (*addaoang* ke-7).

Sebagai catatan, ada versi lain yang menyatakan bahwa Songkopulawengnge digantikan langsung oleh La Batara.[640]

Kerajaan Sidenreng merupakan salah satu anggota Persekutuan Lima Ajattaparang, yang digagas oleh La Makkarawi, Datu Suppa. Saat itu, yang memerintah di Sidenreng adalah La Pattedungi (*addaoang* ke-8). Raja Sidenreng ini didampingi oleh seorang penasihat bernama La Pagala atau Nene Mallomo. Penasihat ini menjabat pula sebagai hakim Sidenreng yang terkenal adil dalam menjatuhkan putusannya. Bahkan ketika anaknya mencuri bajak yang dipergunakan mengolah sawah, tanpa segan-segan Nene Mallomo menjatuhkan hukuman mati.[641] Seseorang memprotes putusan tersebut dan menanyakan apakah sebatang kayu lapuk (maksudnya bajak yang dicuri) lebih berharga dibanding nyawa anaknya. Nene Mallomo dengan tegas menjawab bahwa hukum tidak mengenal anak ataupun cucu.

La Pattedungi digantikan oleh La Patiroi (*addaoang* ke-9) dan kemudian We Abeng (*addaoang* ke-10). La Makkarakka (1634–1671), pengganti We Abeng adalah Raja Sidenreng pertama yang menyandang gelar *addatuang*.

Manuel Pinto, salah seorang anggota ekspedisi Portugis yang mengunjungi Sulawesi Selatan pada pertengahan abad 16 melaporkan bahwa Raja Sidenreng ingin

640. Lihat *Para Penguasa Ajatapparemg: Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis*, halaman 127.
641. Lihat *Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi Selatan*, halaman 157–158.

dikunjungi oleh pendeta Portugis. Hal ini memperlihatkan bahwa raja tampaknya telah menerima atau condong pada Agama Katolik. Lebih jauh lagi Pinto menyebut Raja Sidenreng dengan "kaisar" yang memerintah lebih dari 300.000 jiwa. Jumlah sebesar ini tampaknya mencakup penduduk seluruh wilayah persekutuan Ajattaparang; yang pada masa itu mencakup Sidenreng, Suppa, Bacukiki, Alitta, Sawitto, dan Rappang.[642]

Penggantinya selaku Addatuang Sidenreng kedua adalah La Suni (La So'ni) Karaeng Maseppe. Ia merupakan sekutu Arung Palakka yang setia. Ketika terjadi pertempuran pada 5 Agustus 1688, Arung Palakka termakan oleh siasat Gowa disaat pasukan Gowa pura-pura mundur. Pasukan Bone yang dipimpin Arung Palakka terpancing mengejarnya dan ketika mereka telah jauh dari kubu pertahanannya, sekonyong-konyong muncul pasukan Gowa dari sisi kiri serta kanannya. Arung Palakka nyaris terbunuh bila tidak didampingi oleh Raja Sidenreng ini.

La Suni digantikan oleh Todani (To Dani) selaku Addatuang Sidenreng ke-3. Ia juga merangkap sebagai penguasa di Alitta, Rappang, Suppa, dan Sawitto. Selanjutnya, takhta Sidenreng beralih pada La Tenri Tatta,[643] Addatuang Sidenreng ke-4. Putri Raja La Mallewai (I Mallewai), Addatuang Sidenreng ke-5, yang bernama I Rakkia Karaeng Kejenne pernah menikah dengan Amas Madina (1702–1723), sultan Sumbawa. Setelah suaminya gugur dalam peperangan, I Rakkia yang terkenal kecantikannya ini menikah tiga kali lagi, yakni secara berturut-turut dengan Arung Ujung Makkedangnge Tana Bone, Tomamagetta Penggawa, dan Sultan Sirajuddin dari Gowa. Pernikahannya dengan Raja Gowa ini dianugerahi putra bernama I Makkasuma atau Karaeng Lempanagang, yang kelak menduduki jabatan sebagai Raja Tallo dan sekaligus mangkubumi Kerajaan Gowa.

Yang menggantikan La Mallewai adalah Bau Rukiyah (*addatuang* ke-6) dan Taranatie (*addatuang* ke-7). Addatuang Sidenreng ke-8[644] yang bernama Toappo (To Appok, merangkap Raja Barru ke-15) pernah terlibat peperangan dengan La Raga Arung Belawa Wajo yang dibantu oleh Arung Buttu La Tanrang pada 1696.[645]

---

642. Lihat *Manusia Bugis*, halaman 152.

643. Sumber lain, *Para Penguasa Ajatappareng: Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis*, halaman 137, mencantumkan nama La Tenritippe Towalennae.

644. Menurut *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 303, menyebutkan bahwa ia merupakan *addatuang* Sidenreng ke-11. Tetapi daftar lengkap raja-raja Sidenreng yang berasal dari sumber lain menyebutkan bahwa ia adalah *addatuang* Sidenreng ke-8.

645. Tahun ini diperoleh dari *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 303. Tetapi tampaknya tahun ini merupakan kesalahan karena *addatuang* Sidenreng ke-5 saja hidup pada abad 17. Toappo hidup sezaman dengan La Maddukelleng dari Wajo.

Penggantinya selaku *addatuang* ke-9 adalah La Wawo. Menjelang awal abad 20, La Panguriseng menduduki jabatan selaku Addatuang Sidenreng ke-10. Putranya yang bernama Ishak Manggabarani Karaeng Mangeppe diangkat sebagai Arung Matoa Wajo. Pada 28 Oktober 1886, Sidenreng menandatangani perjanjian yang mengharuskan Sidenreng mengakui kekuasaan pemerintah kolonial Belanda dan melarang perdagangan senjata.[646] Seterusnya, para *addatuang* yang memerintah hingga masa awal kemerdekaan adalah Sumange Rukka (*addatuang ke*-11, memerintah 1889–1904), La Sadapotto (*addatuang* ke-12, memerintah 1904–1906), dan La Cibu selaku *addatuang* ke-13 serta sekaligus terakhir.

b. Sosial kemasyarakatan

Sebagian masyarakat Sidenreng Rappang menganut agama leluhur yang dikenal sebagai To-riolo atau To-lotang. Departemen Agama memasukkan kepercayaan ini adalah Agama Hindu dan menyebutnya sebagai Hindu Tolotang. Tuhan tertinggi dalam agama mereka dikenal sebagai To PalanroE[647]. Selain itu, mereka mengenal pula dewa-dewa lain, seperti Dewata Langie, Dewata Mallinoe, dan Dewata Uwae[648]. Dewata Langie merupakan dewa penghuni langit. Ia diyakini sanggup mendatangkan hujan dan kemakmuran. Meskipun demikian, ia dapat pula membawa kerusakan bagi umat manusia, seperti menurunkan petir atau kemarau panjang. Sebagai wujud pemujaan terhadap dirinya, penganut keyakinan ini menyediakan persembahan berupa empat macam makanan yang diletakkan pada bagian loteng rumah.

Dewata Mallinoe merupakan dewa yang menempati tempat-tempat tertentu, seperti tikungan jalan, pohon besar, serta tempat-tempat yang dianggap keramat. Sajian baginya berupa buah-buahan yang digantungkan, lauk pauk, daging, dan lain sebagainya. Dewata Uwae merupakan penguasa air yang bersemayam di sungai, danau, atau laut. Penganut Tolotang biasanya membuat rumah-rumahan kecil berisi daun-daunan makanan, dan beras aneka warna yang kemudian dihanyutkan sebagai persembahan bagi Dewata Uwae.

Asal muasal keyakinan ini adalah seorang pria bernama La Paunangi yang mendengar suara dewa tertinggi (Dewata Seuwae). Suara itu memerintahkan La Paunangi menghentikan keyakinan yang dianutnya dan menggantinya dengan praktik

646. Lihat *Makasar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagagan Maritim,* halaman 87–88.
647. Lihat Jurnal *Antropologi Indonesia* no. 48, halaman 48.
648. Lihat *Sejarah Kebudayaan Sulawesi*, halaman 32.

lain yang lebih mulia serta suci. La Paunangi mematuhi seruan Dewata Seuwae tersebut dan menyebarkannya hingga ke anak cucunya.

XXIV. SOPPENG

a. Cikal bakal Kerajaan Soppeng

Kerajaan Soppeng kini terletak di Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Cikal bakal penduduk Soppeng menurut *lontarak* berasal dari perpindahan penduduk Sewo dan Gattareng. Orang-orang yang berasal dari Sewo disebut Soppeng Riaja, sedangkan yang berasal dari Gattareng dinamakan Soppeng Rilau. Waktu itu di Tanah Soppeng belum ada rajanya. Yang ada hanyalah kelompok-kelompok masyarakat atau kesukuan yang hanya mementingkan kaumnya sendiri demi kelangsungan hidup mereka. Pada zaman yang disebut *siyanra bale* (kurang lebih abad 14) ini terdapat 60 kelompok kesukuan sebagai cikal bakal lahirnya Kerajaan Soppeng[649]. Pemimpin bagi setiap kelompok masyarakat di atas disebut *matoa*. Mereka bertugas menjaga anggota sukunya dari serangan musuh dan juga membangun peradaban di kalangan mereka. Perlahan-lahan terjalinlah ikatan antar berbagai kelompok ini walaupun hubungan di antara mereka masih boleh dikatakan terbatas. Kendati demikian, akhirnya terbentuk pula persekutuan di antara mereka.

Kondisi ini berlangsung hingga turunnya seorang *to manurung* atau orang yang turun dari langit di Sekkannyili. Perihal turunnya *to manurung* ini terdengar oleh *matoa* Tinco, Jennag Pesse[650] dan menyampaikannya pada *matoa-matoa* lainnya; yakni *matoa* Ujung, Bila, dan Botto. Mereka bertiga lalu menyarankan pada ketua persekutan Soppeng Riaja agar hal tersebut diberitakan pula pada ketua persekutuan Soppeng Rilau, yakni *matoa* Salotungo. Saran itu disetujui dan mereka lalu bersama-sama menyampaikan sembah kepada *to manurung* serta mengajukan permohonan agar ia bersedia menjadi raja yang mengayomi mereka.

Matoa Ujung, Bila dan Botto memohon agar *to manurung* sudi menjadi raja mereka. *To manurung* bersedia memenuhi permohonan tersebut asalkan mereka berjanji tidak mengkhianati dirinya. Keenam puluh orang *matoa* menyepakati perjanjian itu. Dengan demikian, berlakulah perjanjian antara pemuka-pemuka masyarakat tersebut dengan *to manurung*. *To manurung* yang kemudian disebut

649. Lihat *Orang Soppeng Orang Beradab*, halaman 24–25.
650. Lihat *Orang Soppeng Orang Beradab*, halaman 33.

Tomanurunge ri Sekkanyili (karena ia turun di Sekkanyili) menyatakan lebih lanjut bahwa ia mempunyai seorang saudara misan di Libureng; yang juga merupakan seorang *to manurung* (selanjutnya disebut Tomanurunge ri Libureng). Ia menyarankan agar saudara misannya itu diangkat pula sebagai raja. Selanjutnya, diadakan pembagian kekuasaan antara kedua *to manurung* itu. Tomanurunge ri Sekkanyili menjadi Raja Soppeng Riaja yang pertama, sedangkan Tomanurunge ri Libureng diangkat sebagai raja pertama atas Soppeng Rilau.

b. Perkembangan Kerajaan Soppeng

Tomanurunge ri Sekkanyili sebenarnya adalah gelar yang diberikan pada La Temmamala (1300–1350), Raja Soppeng[651] pertama. Sepeninggal La Temamala takhta Soppeng beralih pada La Maracinna (1350–1358) selaku Raja Soppeng kedua. Lamba (1358–1408) adalah Raja Soppeng ketiga. Ia digantikan oleh putrinya bernama We Tekkewanua (1408–1438). Raja Soppeng kelima adalah putra We Tekkewanua bernama La Mekkanennga (1438–1468). Kerajaan Soppeng mulai berkembang saat pemerintahan La Patau (1696–1714), kemenakan Arung Palakka. Dalam urutan raja-raja Soppeng, ia termasuk urutan ke-18. Selain menduduki jabatan sebagai Datu Soppeng, ia merangkap pula sebagai Raja Bone ke-15.

Raja Soppeng ke-9, La Manussa Towakkareng (1534–1556), pernah mengadili dirinya sendiri.[652] Suatu ketika, Soppeng dilanda kemarau panjang. Bencana ini diyakini sebagai wujud kemurkaan dewata akibat adanya penguasa atau pejabat yang bertindak sewenang-wenang terhadap sesamanya serta melanggar adat istiadat. Oleh karenanya, La Manussa menitahkan para petugasnya memeriksa apakah benar ada yang berlaku seperti itu. Ternyata, tak seorangpun di antara mereka melakukan pelanggaran. Sang raja kemudian berpendapat bahwa barangkali dirinyalah yang bersalah. Ia bersamadi sambil mengingat-ingat dan merenungkan kesalahan apa gerangan yang pernah diperbuatnya. Akhirnya, ia teringat pernah memungut barang berharga tetapi lupa mengumumkannya. Karena itu, raja merasa bersalah dan membuat pengumuman bahwa keesokan harinya akan ada orang yang diadili atas kesalahannya.

Sidang dibuka dan La Manussa mengumumkan bahwa terdakwanya tak lain dan tak bukan adalah dirinya sendiri. Saksinya adalah juga dirinya sendiri dan para pengikut yang menemaninya saat memungut barang tersebut. Rakyat merasa heran

651. Lebih tepatnya adalah Soppeng Riaja.
652. Lihat *Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi Selatan*, halaman 164.

bercampur kagum karena hingga saat itu belum ada raja yang mengadili dirinya sendiri. Terdakwa mengaku bersalah serta dijatuhi hukuman membayar denda berupa kerbau yang akan dipotong-potong dan dagingnya dibagikan pada orang miskin. Selain itu, ia diwajibkan meminta maaf pada rakyatnya dan mengumumkan benda yang hilang tersebut. Apabila ada yang mengenali dan sanggup membuktikan hak kepemilikan atasnya, ia boleh membawa pulang barangnya tersebut. Namun, jika tak ada yang mengenalinya, benda berharga itu akan dijual dan hasilnya dibagi-bagikan pada orang miskin.

Sebelum meninggal Datu Soppeng yang bijaksana tersebut memberikan petuah-petuahnya, ia mengecam seorang raja yang tidak menegakkan kebenaran, penakut, serta tidak mencintai rakyatnya. Ia menyatakan pula bahwa raja tersebut akan makin mengecil kekuasaannya.[653] Selain itu, ia menasihatkan pula agar para pejabat kerajaan senantiasa bersikap jujur, adil, dan tegas. Dengan demikian, kejahatan dalam suatu negara tak akan merajalela. Keberlangsungan suatu negara akan dapat dipertahankan apabila setiap aparatur pemerintahan memegang teguh prinsip-prinsip di atas.

Dalam perkembangan sejarahnya, hubungan antara dua kerajaan Soppeng, yakni Soppeng Riaja dan Soppeng Rilau tidak selamanya mulus. Semasa pemerintahan Raja Soppeng (Soppeng Riaja) ke-11, La Mataesso (1560–1575) pernah terjadi perselisihan dengan Raja La Makkarodda To Tenri Bali dari Soppeng Rilau. Pertikaian ini diakhiri dengan kekalahan Soppeng Rilau; sehingga raja Kerajaan Soppeng Rilau tersebut terpaksa mencari perlindungan ke Bone. Akibat kekalahan ini, Soppeng disatukan menjadi satu kerajaan saja; yakni di bawah Raja La Mataesso.

Semenjak diadakannya Perjanjian Caleppa pada 1565, Soppeng masuk dalam lingkungan pengaruh Kerajaan Bone. Dalam rangka membendung ambisi ekspansif Gowa, pada 1582 diadakanlah perjanjian aliansi TellumpoccoE antara ketiga kerajaan; yakni Bone, Wajo, dan Soppeng. Namun, kekuatan militer Gowa yang sedang menanjak mengakibatkan ketiga anggota persekutuan TellompoccoE di atas takluk satu persatu, Soppeng sendiri takluk kepada Gowa pada 1609.

La Tenribali (1620 –1654), *datu* Soppeng ke-15 pernah memberikan bekal emas seberat 100 kati pada Arung Palakka yang menjadi musuh bebuyutan Kerajaan Gowa, sebelum ia berangkat ke Jawa bersama Arung Bila, Arung Appanang, dan *datu* Citta. La Tenribali ditangkap dan diasingkan oleh Gowa ke Siang karena membantu pelarian

653. Lihat *Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi Selatan*, halaman 189.

Arung Palakka tersebut. Setelah Kerajaan Gowa dikalahkan oleh VOC bersama Bone, La Tenribali dibebaskan kembali.

Saat terjadi pertempuran melawan Inggris yang dilancarkan oleh Bone, Tanete, dan Suppa pada 1815, Raja Soppeng ikut membantu Inggris. Akibatnya, Bone menyerang Soppeng dan mengepung ibu kotanya selama berbulan-bulan. Kerajaan Soppeng pernah pula diperintah oleh para penguasa wanita, seperti Sitti Zaenab (1895–1940), *datu* Soppeng ke-35. *Datu* Soppeng terakhir adalah H.Andi Wana (1940–1957), yang memerintah hingga dihapuskannya berbagai swapraja di seantero Kepulauan Nusantara.

c. Soppeng Riaja

Semasa kekalahan Kerajaan Gowa melawan VOC pada abad 17, Soppeng merebut kawasan Balusu, Ajakkang, Kiru-Kiru, dan Siddo dari Gowa. Wilayah ini lantas disebut Soppeng Riaja atau Soppeng bagian barat. Pada 1905, Soppeng Riaja masuk ke dalam payung kekuasaan pemerintah kolonial Belanda serta dijadikan suatu daerah swapraja (*zelfbestuur*) dan rajanya bernama Andi Toto Petta Coa diangkat sebagai kepala swapraja. Semasa penjajahan Jepang, Swapraja Soppeng Riaja dikepalai oleh Yusuf Andi Dagong, yang bergelar Petta Soppeng.[654]

XXV. SUPPA

Kerajaan Suppa kini terletak di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Rajanya bergelar *datu*. Rangkaian raja-raja Suppa awal adalah La Bombang (± 1370–1400), We Tekewanua (± 1400–1405), We Tipulinge (1495–1510), La Teddung Loppo atau Taddung Lompoe (1510–1530), dan La Pute Bulu (± 1544). Pengganti La Pute Bulu adalah La Makkarawi (1559–1580), yang selain menduduki jabatan sebagai *datu* Suppa ke-6 merangkap pula *arung* Rappang ke-3. Ia memelopori perjanjian perserikatan dengan empat kerajaan lainnya (Sawitto, Sidenreng, Rappang, dan Alitta), yang dikenal pula dengan sebutan Persekutuan Lima Ajattaparang.

Sumber lain menyebutkan bahwa Datu Suppa pertama adalah We Teppulinge (1441–1486). Ia adalah *to manurung* yang muncul di sebuah danau besar dan dikenal sebagai *to manurung* di Lawarampang.[655] Ia menikah dengan La BangengE dari Bacukiki, Raja Sawitto pertama. Pernikahan ini membuahkan tiga orang anak,

654. Lihat *Profil Profil Raja & Pejuang Sulawesi Selatan*, jilid 1, halaman 69-70.
655. Lihat *Para Penguasa Ajatapparreng: Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis*, halaman 204.

yang masing-masing bernama La Teddulloppo, La Botillangi, dan We Pawawoi. La Tedduloloppo kelak menggantikan orang tuanya sebagai raja Suppa dan Sawitto. Ia digantikan oleh La Putebulu, selaku Datu Suppa ketiga. Ia digantikan kembali oleh La Makkarawi selaku Datu Suppa keempat. Dengan demikian, urutan raja-raja awal yang memerintah Suppa agak berbeda di sini.

Pada 1543, Antoni de Pavya bersama dua orang rekannya mendarat di Pare-Pare. Mereka berhasil mengajak La Makkarawi masuk agama Katolik dan dibaptis dengan nama Don Yuan.[656] Meskipun demikian, upaya penyebaran agama Katolik mengalami kegagalan ketika Juan de Eredia, salah seorang perwira Portugis, melarikan putri raja Suppa bernama Dona Elena Vesiva. Peristiwa ini memancing amarah rakyat Suppa yang dengan pedang terhunus siap membantai orang-orang Portugis. Akibatnya, mereka terpaksa melarikan diri ke kapalnya dan kembali ke Malaka. Putri Suppa tadi kemudian dinikahi oleh perwira Portugis tersebut. Putra mereka adalah Manuel Godinho de Eredia.[657] Ia adalah ahli geografi terkemuka yang pertama kali menyebutkan adanya pulau di sebelah selatan Timor. Belakangan pulau ini dikenal dengan nama Australia. La Makkarawi digantikan oleh We Lampe Welua (1580–1698). Selanjutnya, singgasana Suppa beralih lagi pada Tosappae (1608–1610). Putra We Lampe Welua, La Pancaitana (1610–1620) menjadi Raja Suppa berikutnya. Ia dikenal pula sebagai Arung Rappang ke-7 serta Raja Sawitto ke-6.

We Pasulle Daeng Buleang (1620–1640) yang menggantikan La Pancaitana menjabat pula sebagai raja Sawitto ke-7. Suami ia adalah La Massora, Arung Alitta ketiga.[658] Semasa pemerintahan ia, agama Islam tersebar ke Suppa. Ia digantikan kembali oleh La Tenri Sau (La Tenrisessu, 1640–1650) yang juga merupakan Addatuang Sawitto ke-8.[659] Selanjutnya, secara silih berganti para penguasa berikut ini memerintah Suppa: Tomanipie (1650–1660), We Tasi (We Tasi' Petta Maubbengnge, 1660–1665), La Tenritatta (La Tenritatta Daeng Tomaming-juga merangkap sebagai *addatuang* Sawitto, 1665–1670), La Dongkong (La Doko-juga merangkap sebagai *addatuang* Sawitto, 1670–1675), Todani (1675–1681), La Toware (1681–1700), La Pamessangi (1700–1740), dan La Sangka (1740–1770). Sumber lain, menempatkan

656. Lihat *Sejarah Kebudayaan Sulawesi*, halaman 97.
657. Lihat *Manusia Bugis*, halaman 152.
658. Lihat *Para Penguasa Ajatappareng: Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis*, halaman 213
659. Versi lain menyebutkan bahwa yang berkuasa di Sawitto adalah La Tenripau, sedangkan Suppa diperintah oleh La Tenrisessu. Dengan demikian, La Tenripau tampaknya berbeda dengan La Tenrisessu. Jadi Suppa dan Sawitto menurut sumber tersebut diperintah oleh raja yang berbeda.

masa pemerintahan Todani di antara We Tasi dan La Tenrittata bernama To Dani, yang disebutkan juga menjadi penguasa di Sidenreng, Sawitto, Rappang, dan Alitta[660]. Dengan demikian, kembali terdapat sedikit perbedaan urutan raja-raja Suppa di antara kedua sumber.

Semasa La Kuneng Sultan Adam (1770–1820) yang menggantikan La Sangka, pemerintah Hindia Belanda menelan kekalahan terhadap Inggris dan terpaksa menyerahkan seluruh bekas jajahannya – termasuk Sulawesi–dalam Perjanjian Tuntang (1811). Meskipun demikian, raja-raja Bone, Suppa, dan Tanete menentang hal ini (lihat uraian mengenai Bone). Mereka merasa bukan daerah taklukan atau budak Belanda yang wilayahnya dapat diserahkan dengan semena-mena sebagai pembayar pampasan perang. Oleh karenanya, ketika berlangsung serah terima antara pemerintah kolonial Belanda dengan Inggris, ketiga raja yang saling bersekutu itu menolak hadir. Dengan demikian, timbul ketegangan dengan Inggris.

Pemerintah Inggris mengirimkan pasukannya dan pertempuran pecah pada 1815. Sebelumnya, Suppa telah melakukan berbagai persiapan dengan memperkuat perkubuannya. Melalui diplomasi, La Kuneng Sultan Adam, berhasil menarik tiga kerajaan tetangganya, Sawitto, Alitta, dan Rappang, bersatu padu melawan Inggris yang berniat merampas kedaulatan mereka. Di tengah-tengah pertempuran itu, Suppa dengan dibantu oleh sekutunya tiga kali memukul mundur pasukan Inggris yang didukung oleh sekutunya, Sidenreng dan Barru. Sementara itu, di lain pihak, Bone dan Tanete juga meraih berbagai kemenangan terhadap Inggris. Meskipun demikian, pada 1816, akhirnya kedaulatan atas Kepulauan Nusantara kembali lagi ke tangan penjajah lamanya, yakni Belanda.

La Kuneng Sultan Adam digantikan oleh La Tenri (La Tenrilengka,1820–1830). Belanda menyerang Suppa pada Agustus 1824 di bawah pimpinan de Stues. Pasukan Suppa tidak tinggal diam menghadapi agresi pemerintah kolonial dan melancarkan perlawanan dengan gigih. Mereka terus menerus menggempur kubu pertahanan pasukan Belanda. Meskipun demikian, Belanda sanggup memukul mundur pasukan Suppa walau harus kehilangan beberapa orang perwiranya, seperti Letnan Bauff, van Pelt, dan Banhoff[661]. Pasukan Suppa melakukan berlawanan dan melancarkan

660. Lihat *Para Penguasa Ajatappareng: Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis*, halaman 216. Pada catatan kaki di halaman tersebut, dicantumkan bahwa sumbernya adalah *Lontaraq Akkarungeng Suppa*, halaman 8.
661. Lihat *Sejarah Nasional Indonesia IV*, halaman 213.

gangguan terhadap serdadu Belanda dari parit-parit beserta lubang perlindungan mereka.

Pasukan bala bantuan berkekuatan 110 orang dan 10 pucuk meriam didaratkan di Pare-Pare pada 23 Agustus 1824. Belanda dengan dibantu pasukan Sidenreng berupaya mematahkan pertahanan Suppa. Pasukan gabungan berkekuatan 2.000 orang ini ternyata dapat dihalau oleh Suppa. Setelah berkali-kali gagal menundukkan Suppa, de Stuers mengundurkan dirinya ke Makassar pada 6 Oktober 1824. Suppa baru jatuh ke tangan Belanda setelah takluknya Bone.

Datu Suppa selanjutnya adalah I Towakka Arung Kalibong (1830–1855). Ia digantikan oleh Ratu Basse Kajuara (1860–1881)[662], yang merangkap pula sebagai ratu Bone. Tokoh wanita yang luar biasa ini sangat gigih menentang penjajahan Belanda di negerinya. *Datu-datu* Suppa selanjutnya yang memerintah pada akhir abad kesembilan belas dan setelah era kemerdekaan adalah: Madellung Aru Kajuwara (memerintah, 1881–1900; disahkan kedudukannya pada 28 Juli 1890), La Mappanyuki (memerintah 1902–1905, disahkan 2 Juli 1903–pernah menjabat pula sebagai sultan Bone), La Parenrengi Karaeng TiggimaE (Tinggi Mae, memerintah 1905–1926; disahkan 13 April 1906), La Makkasau (memerintah 1926–1938; disahkan 10 Februari 1929), Abdullah Bau Maseppe (1940–1947), Andi Cinta (1947–1950), dan I Sugi Karaeng Kajene (1950–1959).

La Parenrengi Karaeng TiggimaE (Tinggi Mae) pernah memrotes penempatan pasukan kolonial di Parepare pada sekitar tahun 1904–1905. Ia menggalang persatuan sesama kerajaan anggota Ajatapparang dalam melawan penjajah. Perlawanan ia baru berakhir pada 6 Desember 1905, yakni ketika ia menyerahkan dirinya bersama mertuanya, bekas Raja Sidenreng. Penyerahan ini kemudian diikuti penandatanganan *Korte Verklaring*.[663] Putranya, La Makkasau atau Andi Makkasau Parenrengi Lawawo yang kelak menjadi *datu* Suppa berikutnya dilahirkan pada Maret 1898. Sebenarnya, ia masih mempunyai seorang kakak laki-laki bernama Andi Mappangile. Namun, ia tak bersedia diangkat sebagai raja karena lebih senang menekuni bidang perdagangan. Di samping itu, ia kurang menyukai hubungan dengan penjajah sehingga memilih menjauhi politik dan pemerintahan. Meskipun demikian, La Makkasau juga mempunyai pandangan yang sama dengan kakaknya itu, yakni anti penjajahan.

662. Gelar lengkapnya adalah I Basse Tanriwaru Kajuwarahadi Abel Hadi Pelaiengi Pasimpa atau I Basse Tenri Awaru (Tenriwaru) Besse Kajuara Pancaitana Mpelai Engi Passempe Sultana Ummulhadi.

663. Lihat *Andi Makkasau: Menakar Harga 40.000 Jiwa*, halaman 6-7.

Tetapi keduanya menempuh strategi yang berbeda. Apabila kakaknya menolak sama sekali keterlibatan dengan pemerintah kolonial, La Makkasau memilih terjun dalam komunitas Belanda agar dapat mempelajari kelemahan-kelemahan penjajah[664].

La Makkasau merupakan seorang raja yang menjauhi sikap feodal. Ia berbaur dengan semua golongan tanpa terkecuali. Inilah kunci keberhasilan ia dalam menggerakkan masa di kemudian hari demi melawan penjajahan[665]. Sikap La Makkasau yang anti penjajahan diperlihatkan pula dalam aktifitas ia di berbagai organisasi politik jauh sebelum diangkat sebagai raja. Ia pernah memelopori berdirinya Partai Syarikat Islam (PSI) di Parepare tahun 1927[666]. Bahkan semasa pemerintahannya, ia masih melibatkan diri dalam organisasi sosial politik dan kemasyarakatan. Sebagai seorang pemimpin, ia juga berupaya meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Pada mulanya masyarakat Suppa hanya menggantungkan dirinya sebagai nelayan tradisional di laut. La Makkasau kemudian mencanangkan peternakan air tawar yang menjanjikan keuntungan lebih besar[667].

Karena gerah dengan aktifitas perjuangan La Makkasau, Belanda memberhentikan ia dari kedudukannya sebagai *datu* Suppa pada 1938. Keputusan ini, mengundang antipati para petinggi kerajaan sehingga mereka menolak mengangkat raja baru. Tak ada seorangpun yang berani menggantikannya, terlebih lagi di mata rakyat La Makkasau merupakan sosok pemimpin yang disegani. Baru pada 1940, Andi Abdullah Bau Maseppe tampil mengisi kekosongan singgasana Suppa. Karena berkedudukan sebagai raja baru, ia digelari Datu Lolo. Sedangkan La Makkasau sendiri digelari Datu Toa.

Pemberhentian sebagai *datu* itu tidak membuat La Makkasau jera. Malahan ia makin berani berjuang dalam pergerakan nasional. Beberapa tokoh pergerakan, seperti Haji Agus Salim, H.O.S. Cokroaminoto dan Mr. Soenaryo pernah mengunjungi Pare-Pare. Ia tanpa kenal lelah mengkampanyekan gagasan pentingnya semangat kebangsaan di kalangan rakyat demi menuju kemerdekaan. Belanda tidak tinggal diam dan terus memantau aktifitas La Makkasau.

Saat berakhirnya penjajahan Jepang, Belanda berupaya membangun kembali puing-puing penjajahannya yang telah hancur itu. Akibatnya, Belanda dengan

664. Lihat *Andi Makkasau: Menakar Harga 40.000 Jiwa*, halaman 10.
665. Lihat *Andi Makkasau: Menakar Harga 40.000 Jiwa*, halaman 16.
666. Lihat *Andi Makkasau: Menakar Harga 40.000 Jiwa*, halaman 13.
667. Lihat *Andi Makkasau: Menakar Harga 40.000 Jiwa*, halaman 15.

pasukan NICA-nya yang membonceng Sekutu harus menghadapi perlawanan rakyat. Menghadapi situasi yang sulit itu diadakanlah pertemuan di tempat kediaman La Mappanyukki (Andi Mappanyukki) pada 15 Oktober 1945 yang dikenal sebagai Konferensi Jongayya. Yang menghadirinya adalah: Andi Mappanyukki (raja Bone), Andi Jemma (*datu* Luwu), Andi Makkasau (*datu* Suppa *toa*), Andi Abdullah Bau Massepe (*datu* Suppa lolo), Ibu Depu (raja Balanipa), Abdi Abdullah Madjid (dari Mandar), Padjonga Daeng Ngalle (karaeng Polobangkeng), Andi Sultan Dg. Raja (raja Gantarang, Bulukumba), Arung Gilireng Andi Makkulau Cakurinie, yang berasal dari Wajo[668]. Hasil pertemuan ini adalah dukungan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Sam Ratulangi sebagai gubernur Sulawesi.

Bentrokan terus terjadi antara para pejuang melawan penjajah. Akibatnya, Belanda melakukan pembersihan dan menangkapi tokoh-tokoh perjuangan, tak terkecuali La Makkasau. Namun, mertuanya, Andi Calo, yang menjabat sebagai raja Mallusetasi berjanji akan membujuk menantunya menghentikan perjuangan. Kendati demikian, La Makkasau tetap berpegang teguh pada pendiriannya, meski keadaan makin genting. Walaupun telah diperingatkan sebelumnya, La Makkasau menolak menyembunyikan dirinya dari pembersihan keji terhadap kaum pejuang yang digalakkan Westerling. Ia tak bersedia meninggalkan rakyat yang sangat dikasihinya. Penjajah menghabisi nyawa pemimpin yang setia berjuang hingga titik darah penghabisan ini dengan menenggelamkannya ke laut.

Untuk melengkapi pembahasan mengenai Suppa, akan dicantumkan pula kronologi raja-raja Suppa setelah La Tenri (La Tenrilengka) yang agak berbeda menurut sumber lain[669]. Apabila kita bandingkan kedua sumber tersebut, mungkin saja nama-nama yang berbeda mengacu pada tokoh yang sama. Berdasarkan sumber tersebut, pengganti La Tenrilengka adalah We Tenriawaru Pancaitana Besse Kajuara. Ia adalah kemenakan La Tenrilengka. Penggantinya adalah We Bubeng, yang merupakan putrinya sendiri. *Datu* Suppa selanjutnya adalah La Mappanyuki (Le Tenrisukki Mappanyukki Sultan Ibrahim), kemenakan We Bubeng. Sewaktu La Mappanyuki diasingkan, kedudukan sebagai penguasa Suppa dijalankan oleh istrinya bernama We Madellu. La Parenrengi Karaeng Tinggimae lalu menggantikan putrinya sebagai *datu* Suppa. Ia digantikan kembali oleh La Makkasau. Setelah itu singgasana Suppa

668. Lihat *Andi Makkasau: Menakar Harga 40.000 Jiwa*, halaman 58.
669. Lihat *Para Penguasa Ajatappareng: Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis*, halaman 232-249.

diduduki oleh La Temmasonge Abdullah Bau Massepe. Pemerintahannya bertepatan dengan masuknya bala tentara Jepang. Oleh pemerintah pendudukan Jepang, ia diangkat sebagai kepala daerah Parepare, namun kedudukannya sebagai *datu* Suppa tetap dipertahankan. Raja Suppa berikutnya adalah La Patenttengi atau La Cante. Semasa pemerintahannya dibentuk Pemerintahan Gabungan Ajattaparang. Selanjutnya, ia digantikan oleh We Soji Datu Kanjenne. *Datu* Suppa terakhir adalah La Kuneng yang menggantikan ibunya We Soji Datu Kanjenne. Pada 1961, Suppa menjadi salah satu distrik di Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, berakhirlah era Kerajaan Suppa.

XXVII. TANA TORAJA

a. Sistem pemerintahan awal di Tana Toraja

Suku bangsa Toraja menyakini bahwa leluhur mereka masuk ke tempat kediaman mereka yang sekarang dari arah selatan melalui Sungai Sa'dan[670]. Tampaknya mereka berlayar menyusuri sungai tersebut dari laut dan memasuki Enrekang. Selanjutnya, menyebarlah mereka ke utara, yakni Mengkedek makale, Rantepao, dan lain sebagainya. Istilah *enrekang* dan *mangkedek* sendiri berarti "yang keluar dari air" atau "yang naik ke darat." Mereka menetap pertama kali di Kotu atau Bambapuang, sebelah utara Enrekang. Daerah ini memang dikenal sebagai pusat kebudayaan orang Toraja semenjak zaman dahulu. Belakangan, barulah suku Toraja tersebar ke berbagai penjuru.

Masyarakat Toraja awal sepakat mengorganisasi dirinya menjadi satuan kemasyarakatan yang disebut *buaq* (desa). Beberapa buaq menyatukan dirinya menjadi *lembang*, yang dipimpin oleh seorang *arung, arruan,* atau *ampu lembang*. Masing-masing *lembang* mempunyai rumah adat kaumnya yang disebut *tongkonan layuk*. Pada masa itu terdapat 40 *lembang* (*arruan patampulo*) yang bergabung menjadi suatu federasi bernama Tana Tolepangan Bulan. Rakyat Tana Toraja mengenal pula konsep *to manurung* atau "orang yang turun dari langit." Kehadiran seorang *to manurung* yang diperkirakan terjadi pada sekitar abad 13[671] ini menandai terbentuknya tatanan baru di Tana Toraja. Meskipun demikian, masyarakat Toraja yakin bahwa *to manurung* ini

670. Lihat *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Sulawesi Selatan*, halaman 134.
671. Lihat *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 201.

turun di berbagai tempat atau *lembang*. Sebagai contoh, Puang[672] Tamboro Langi' turun di Tallu Lembangna, Puang ri Ranri turun di Jonggalangi Rantepao, Arung ri Massela turun di Salu'patti, dan lain sebagainya.

Para *ampu lembang* berunding dengan *to manurung* dan mereka sepakat mengangkat Puang Tamboro Langi menjadi *datu* Mattampu yang menguasai kawasan sebelah timur Tana Toraja. Sementara itu, *to manurung-to manurung* lainnya diangkat sebagai *toparenge* atau penguasa daerah bawahan. Selanjutnya, Puang Tamboro Langi diberi gelar Tokaindo Bulawan, sedangkan yang lainnya digelari Maraddika Balimbing Kalua' Pappalean (bagi yang berkuasa di sebelah barat) dan Seambe' Ampu Lembang Balimbing Kalua' Pappallean (bagi yang berkuasa di sebelah timur). Pada mulanya Puang Tamboro Langi berkedudukan di Ullin, Kecamatan Saluputti, tetapi setelah itu berpindah ke Kendana, Kecamatan Mengkedek.[673]

Puang Tamboro Langi mewariskan kekuasaan pada putranya bernama Puang Meso Datu Matampu. Namun, penguasa baru ini tak lama kemudian diperangi oleh kemenakannya sendiri, Puang Rambu Langi'; sehingga terpaksa melarikan diri ke kawasan Mandar. Semenjak saat itu, berakhirlah masa pemerintahan para *datu* di Tana Toraja dan kekuasaan kembali pada para *ampu lembang*. Kendati demikian, di Kaero Sangalla penguasanya tetap mempertahankan gelar *puang* yang daerah kekuasaannya meliputi wilayah Tallu Lembang (Makalle, Sangalla, dan Mengkedek). Oleh karena itu, hingga abad 20 Tana Toraja bukanlah suatu kerajaan terpusat. Pada perkembangan selanjutnya, Tana Toraja merupakan daerah pengaruh Kerajaan Luwu.

Secara umum di Tana Toraja terdapat berbagai wilayah kesatuan adat yang disebut *lembang*. Adapun *lembang-lembang* tersebut adalah Kesu', Tikala, Buntao', Rantebua', Tondon, Nanggala, Balusu, Sa'dan, Pangala', Dende, Madandan, Piongan, Kurra', Ulusalu, Seseng, Bittuang, Pali, Ratte, Balepe', Malimbong, Talion, Ma'kale (Makkale), Sangalla', Mengkedek, Mappa', Buakayu, Rano, Simbuang, Bau, Banga, Palesan, dan Tapparan[674]. Lebih jauh lagi, Ma'kale, Sangalla, dan Mengkedek dikenal sebagai Tallu Lembangna.

Puang Tamboro Langi merupakan Puang Tomatasak pertama yang berkedudukan Kalindobulanan Lepongan Bulan. Ia digantikan oleh putranya bernama Puang Papai

672. Istilah Puang berarti «Yang Empunya.» Lihat *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Sulawesi Selatan*, halaman 135.
673. Lihat *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Sulawesi Selatan,* halaman 135.
674. Lihat *The Sa'dan-Toraja: A Study of Their Social Life and Religion*, jilid 1, halaman 5.

Langi', yakni selaku Puang Tomatasak kedua. Sementara itu, putra Puang Tamboro Langi lainnya bernama Puang Tumambuli Buntu diangkat sebagai Puang Tomatasak Muda yang berkedudukan di Kalindobulanan, Ulunna Lepongan Bulan. Putra Puang Tamboro Langi lainnya lagi bernama Puang Sanda Boro diserahi kedudukan sebagai Puang Tomatasak Muda, dengan tempat kedudukan di Kalindobulanan, Ingkokna Lepongan Bulan. Selanjutnya, putra keempatnya, Puang Messok, diangkat sebagai Puang Tomatasak Muda, yang berkedudukan di Kalindobulanan Tanganna Lepongan Bulan. Putra Puang Messok, Puang Payak Allo, kemudian diangkat sebagai *puang* Tomatasak ketiga. Sementara itu, putra Puang Sanda Boro bernama Puang Lakipadada, merantau mencari ilmu dan menikah dengan seorang putri Gowa. Kurang lebih bersamaan dengan kurun waktu ini pecah perang saudara pertama di Tana Toraja.

Puang Patta La Bantan, putra Puang Lakipada, pulang dari Gowa dan diangkat sebagai Puang Tomatasak keempat. Ia kemudian mendamaikan kerabat-kerabatnya yang sedang berperang. Para puang Tomatasak berikutnya secara berturut-turut adalah Puang Timban Boro, Puang Kapu' Boro, Puang Tangmarakia, Puang Paseno langi', Puang Tanggulungan, Puang Sampa Raya, Puang Galugu, Puang Pabuaran Dolo, dan Puang Raya Sampin. Pada masa ini pecah perang saudara kedua antara Puang Raya Sampin melawan Puang Bullu Matua, yakni putra Puang Lanjang Dolo atau cucu Puang Galugu. Puang Bullu Matua keluar sebagai pemenangnya dan diangkat sebagai Puang Tomatasak ke-14. Ia berputra Puang Bitti'Langi, yang tiga orang putranya kemudian menjadi *puang* di Makkale, Sangalla, dan Mengkedek.[675]

Dengan kata lain, kerajaan terbagi menjadi tiga dan para penguasanya masing-masing bergelar Puang Basse Kakanna Makkale, Puang basse Tanganna Sangalla', dan Puang Basse Adinna Mengkendek. Meskipun demikian, tetap ada Puang Tomatasak yang secara simbolis dijabat oleh Puang Sangalla karena pusat istana kerajaan yang dahulu dibangun oleh Puang Patta La Bantan berada di wilayah Sangalla. Demikianlah asal usul Tallu Lembangna.

Puang Tiang Langi', putra Puang Bitti' Langi, menjadi Puang Basse Kakanna Makkale pertama. Rangkaian puang Makkale berikutnya adalah Puang Todierong, Puang Polanga, Puang Pate'dangan, Puang Sugi', Puang Sui' Lalong, Puang Parapa', Puang Lolo Angin, Puang Payung Allo, Puang Tumba' Makongkan, Puang Tarongko,

675. Lihat http://manukallodanga.wordpress.com, diunduh tanggal 10 Maret 2012.

Puang Rante Allo atau Puang Tondon (kepada distrik Makkale, 1923–1943), Puang Adrial Duma' (A.D.) Andilolo (kepala distrik Makkale, 1943–1949), Puang Tandi Lesse Rante Allo (kepala distrik Makkale, 1950–1960), dan Puang Nataniel Taruk Allo Andilolo (kepala distrik Makkale, 1960–1962).

Para *puang* Sangalla berasal dari putra Puang Bitti' Langi yang bernama Puang Kanna. Rangkaian para *puang* yang pernah memerintah Sangalla adalah Puang Kanna', Puang Palodang, Puang Bullean Batu, Puang Palloan, Puang Pata'dungan, Puang Pasalin, Puang Lima Bayu, Puang Pala' Mundan, Puang Pasang, Puang Tandi Langi, Puang Limbu Langi, dan Puang Laso' Rinding.

Sementara itu, urutan para puang Mengkedek adalah Puang Kombo Langi', Puang Salle bitti/biti, Puang Puang Sombolangi', Puang To Ma'Datu, Puang Belo Somba, Puang Tumba Pangloli, dan Puang Mata Kulla

b. Tana Toraja di abad 19

Pada abad 19, sejarah Tana Toraja diwarnai oleh pesatnya perdagangan kopi. Menjelang akhir abad 19 muncul seorang tokoh berdarah Arab bernama Said Ali yang menikah dengan keluarga Kerajaan Luwu. Said Ali bekerja sama dengan tiga orang pemuka adat Toraja dan menguasai perdagangan kopi di kawasan tersebut. Sekutu utama Said Ali adalah Pong Maramba, yang mengendalikan pasar-pasar kopi terpenting dan Pong Tiku, yang mendominasi berbagai pusat penghasil kopi utama. Selain itu, keberhasilan Said Ali ditunjang pula persenjataan, pasukan pribadi yang dimilikinya, dan dukungan Luwu. Said Ali mengendalikan dengan ketat pengumpulan dan pengiriman kopi. Ia menghabiskan banyak waktunya di dataran tinggi Toraja dan selain itu ia mengandalkan pula bantuan para putra serta rekannya, Puang Palammai, dalam menjalankan bisnisnya.

Menggiurkannya perdagangan kopi memancing persaingan antara kerajaan-kerajaan tetangga Tana Toraja, seperti Luwu dan Sidenreng. Pada 1885, Sidenreng berambisi meluaskan pengaruhnya hingga ke dataran tinggi Sa'dan. Sidenreng mendekati para pedagang setempat dan menawarkan dukungan keuangan serta sarana transportasi berupa kuda sebagai penarik perhatian mereka. Guna mengamankan rombongan pengangkut kopi, Sidenreng menyertai mereka dengan 150 pasukan bersenjata. Tujuan semua ini adalah mengalihkan rute perdagangan kopi dari Luwu ke Pare-pare–pelabuhan yang dikuasai Sidenreng. Jumlah pasukan bersenjata yang dikirim Sidenreng sesungguhnya tidak besar karena khawatir memancing ketidak-

senangan kerajaan-kerajaan Bugis lainnya. Rombongan bersenjata tersebut biasanya dipimpin oleh anggota kaum bangsawan yang dipercayai, seperti sepupu Raja Sidenreng sendiri.[676]

Tindakan Sidenreng ini sanggup melemahkan hegemoni Luwu dalam perniagaan kopi di Tana Toraja. Para pemuka adat di selatan yang sebelumnya kerap bertikai satu sama lain kini bersatu padu mematahkan pengaruh Luwu melalui persekutuan mereka dengan Sidenreng beserta Enrekang. Komandan pasukan Sidenreng bernama Ande Guru menjalin kerja sama dengan Pong Tiku yang merupakan pemuka adat Pangala'. Pada 1895, Sidenreng telah berhasil menguasai sepenuhnya perniagaan kopi di Sa'dan. Persaingan yang terjadi di Tana Toraja ini akhirnya berbuah pada konflik bersenjata. Pemuka adat Tana Toraja yang pro Sidenreng bangkit melawan Luwu beserta Said Ali.

Sebelumnya, *datu* Luwu telah meminta bantuan persenjataan dari pemerintah kolonial di Makassar dan menerima 60 pucuk senapan Beaumont modern.[677] Senjata ini kemudian diserahkan pada Said Ali beserta pengikutnya. Kendati demikian, mereka dapat dipukul mundur oleh laskar bersenjata Sidenreng. Bala bantuan dari Luwu juga menjumpai kekalahannya. Luwu tidak tinggal diam dan berpaling pada Bone. Kerajaan tersebut sepakat membantu Luwu dan mengirimkan sejumlah pasukan ke dataran tinggi Toraja. Pasukan gabungan mendesak maju ke Pangala', tempat kedudukan Pong Tiku, dan memaksanya mundur ke pegunungan. Malam harinya, serangan balik yang dilancarkan oleh Pong Tiku dan Ande Guru berhasil mencegah gerak maju Bone serta menghalau Patta penggawa–pemimpin pasukan Bone–dari Tondon.

Laskar Bone mengalihkan serangannya ke arah selatan dan membunuhi orang-orang yang berbicara bahasa Bugis (Sidenreng adalah kerajaan Bugis dan demikian pula halnya dengan Bone). Tanpa kenal lelah pasukan Bone menginterogasi penduduk dan menanyakan apakah mereka kawan ataukah lawan Sidenreng. Tindakan ini berhasil mengusir Sidenreng dari selatan dan barat dataran tinggi. Patta penggawa melarang pengikutnya melakukan kekejaman pada rakyat. Ia mengingatkan mereka bahwa peperangan ini bukan dilancarkan terhadap rakyat Toraja (terkecuali Pong Tiku) melainkan Sidenreng. Kemenangan yang diraih ini tidak serta merta mengembalikan dominasi Luwu atas Sa'dan karena Bone mengklain kawasan tersebut sebagai vasalnya.

676. Lihat *Tana Toraja: Social History of an Indonesia People*, halaman 37.
677. Lihat *Tana Toraja: Social History of an Indonesia People*, halaman 40.

Setelah kemangkatan *datu* Luwu pada 1898, Said Ali kini menjalankan perdagangan kopi atas nama Bone. Kendati demikian, usahanya tidak semaju dahulu lagi. Hal ini diperparah pula oleh sikap permusuhan para pemuka adat Toraja. Belanda menduduki Luwu pada 1905 dan kini bersiap memasuki Tana Toraja – yang merupakan daerah pengaruh Luwu. Tentu saja, kedatangan Belanda ini disambut perlawanan sengit para pemuka Toraja, termasuk Pong Tiku.

Tahap pertama serangan Belanda berlangsung pada April hingga Oktober 1906. Masing-masing pihak kemampuan mata-matanya, tetapi tampaknya Pong Tiku sanggup membuktikan keunggulannya. Pasukan Belanda diserang secara mendadak pada malam hari dan kemampuan gerilya laskar Pangala sangat memusingkan pemerintah kolonial. Berdasarkan pengalaman dalam dunia tempur yang telah mereka miliki, Belanda menyadari bahwa granat dan senjata artileri berat diperlukan dalam mematahkan perlawanan Pong Tiku. Senjata sederhana yang dimiliki anak buah Pong Tiku tidak sanggup menandingi peralatan perang modern pasukan kolonial. Akibatnya, para pejuang mulai terdesak dan Belanda sanggup memasuki Lembah Pangala.

Meskipun demikian, Pong Tiku belum juga menyerah dan perang berkepanjangan melawan pemuka Toraja ini meresahkan Gubernur Jenderal van Heutz. Karenanya pada Oktober 1906 ia memerintahkan Gubernur Swart agar memimpin sendiri pukulan pamungkas terhadap Pong Tiku. Beberapa pemimpin Toraja menyerah pada Belanda. Ande Guru yang kini bekerja sebagai penerjemah pada pemerintah kolonial diutus membujuk Pong Tiku agar bersedia menerima gencatan senjata. Pong Tiku akhirnya menyerah pada Belanda demi menghindari penderitaan rakyatnya serta memperoleh kesempatan mengurus penguburan orang tuanya. Namun, sewaktu berlangsungnya pemakaman Belanda menghina Pong Tiku, yakni lima kali mengundangnya dan hanya mengatakan agar ia kembali ke tempat berlangsungnya upacara penguburan. Akibatnya, Pong Tiku merasa terhina dan meneruskan perlawanannya. Perjuangan yang dilancarkan Pong Tiku berakhir, ketika seorang mata-mata melaporkan tempat persembunyiannya sehingga ia ditangkap pada Juni 1907.

c. Pembentukan Swapraja Tana Toraja

Tana Toraja yang sebelumnya merupakan bagian Luwu baru dijadikan daerah swapraja terpisah pada 1946. Datu Luwu yang saat itu dijabat Andi Jelling tidak keberatan dengan pemisahan ini. Tujuh kepala distrik Toraja mewakili rekan-rekannya menandatangani deklarasi singkat yang menyatakan Tana Toraja sebagai

daerah berpemerintahan sendiri (swaparaja) pada 16 September 1946.[678] Ketujuh kepala distrik yang hadir saat itu adalah Laso' Rinding (Puang Sangalla), A.D. Andi Lolo (Puang Ma'kale), Sesa Tandirerung (Kesu'), Isak Tandirerung (Ulusalu, Se'seng, Malimbong), Herman Saba' (Madandan), Salu Rapa' (Nanggala), dan Jusuf Sarungu' (Pangala).[679] Upacara peresmiannya diadakan di samping kantor kontrolir Ma'kale dan dihadiri oleh residen Sulawesi Selatan selaku wakil van Mook. Para pemimpin Tana Toraja sepakat menyatakan negeri mereka bernaung di bawah payung kekuasaan pemerintah kolonial serta mengikrarkan kesetian terhadap ratu Belanda.

Sebagai wujud pengukuhan berdirinya swapraja, diadakan upacara adat penyembelihan kerbau, pendirian tiang batu, dan penanaman pohon. Kendati demikian, upacara ini tidak berjalan mulus. Hal pertama yang mengganggu jalannya upacara adalah A. D. Andi Lolo, *puang* Ma'kale, yang membangkitkan ketidak-senangan wakil Toraja lainnya karena mengenakan topi atau peci (*songko*) khas Bone (Bugis). Sementara itu, para wakil lainnya memakai penutup kepala Toraja. *Puang* Ma'kale dianggap hendak memperlihatkan supremasinya atas pemuka-pemuka lainnya dan memandang dirinya sebagai raja atas swapraja yang baru dibentuk itu. Di samping itu, mengenakan atribut Bugis dirasa kurang pas mengingat tujuan dibentuknya swapraja tersebut adalah justru memisahkan diri dari Luwu yang bersuku Bugis.

Kejadian lain yang menodai upacara pendirian swapraja ini adalah kegagalan penyembelihan kerbau. Orang yang ditugaskan menyembelih kerbau melakukan kesalahan sehingga hewan itu tidak mati dan dalam keadaan terluka berlari ke jalan. Kendati hewan itu berhasil ditangkap kembali, banyak orang menganggapnya sebagai pertanda buruk sehingga upacara itu tidak lagi mendatangkan keberuntungan.

Kontrolir van Lijf mengusulkan pembentukan suatu dewan adat bernama *Tongkonan Ada'*. Anggotanya adalah sembilan kepala distrik yang dipilih rekan-rekannya. Mereka kemudian memilih seorang ketua yang bersama dengan dewan memecahkan berbagai permasalahan pemerintahan. Ketua ini akan mewakili Toraja dalam Luwu Hadat dan merupakan salah seorang di antara dua wakil *Afdeeling* Luwu yang duduk dalam Hadat Tinggi di Makassar.

Persaingan antar pemuka masyarakat merebak saat pembentukan dewan ini. Para pemuka kawasan yang merupakan bagian Tallu Lembangna mengusulkan

678. Lihat *Tana Toraja: Social History of an Indonesia People*, halaman 214.
679. Lihat *Antara Daerah Dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an*, halaman 222.

pembentukan suatu dewan bernama *Tongkonan Layuk* dengan kedudukan lebih tinggi ketimbang *Tongkonan Ada'*. Pemuka adat Rantepao memandang usulan ini tidak masuk akal dan berkeras menolaknya. Oleh karena jumlah para pemuka Rantepao lebih banyak dibandingkan Tallu Lembangna (salah satunya adalah Ma'kale), gagasan pembentukan *Tongkonan Layuk* dapat digagalkan, kendati *puang* Ma'kale menjadi ketua *Tongkonan Ada'*. Kenyataan ini merupakan cermin perselisihan antara Ma'kale dan Rantepao yang telah berlangsung lama.

Rantepao berhasil memperkecil dominasi Ma'kale dengan mengusulkan perombakan *Tongkonan Ada'* ke arah yang lebih demokratis. *Tongkonan Ada'* lama dibubarkan pada 28 Juni 1949. Hal ini menandai berakhirnya pengaruh Puang Duma Andi Lolo, puang Ma'kale yang sebelumnya menjabat sebagai ketua *Tongkonan Ada'*. Anggota-anggota yang baru diperkirakan sanggup menyeimbangkan kepentingan Ma'kalae dan Rantepao. Meskipun demikian, komposisi *Tongkonan Ada'* yang baru sebenarnya makin memperkuat pengaruh Rantepao. Sistem pemerintahan seperti ini berakhir seiring dengan pengakuan kedaulatan dan Tana Toraja diintegrasikan ke dalam Republik Indonesia.

Sebagai tambahan, Puang Andi Lolo semasa mudanya gemar mengadu ayam. Meskipun demikian, suatu ketika ia mendatangi Tuan Pol dari Sangalla. Ia lantas menyerahkan beberapa pisau kecil yang bisa dipergunakannya menyabung ayam serta menyatakan bahwa ia akan meninggalkan kebiasaan tersebut dan menganut Agama Kristen. Ia kemudian menjadi penganut agama tersebut yang baik. Bahkan saat kematian ayahnya, ia tidak turut ambil bagian dalam permainan semacam itu.[680]

d. Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan

Masyarakat yang mendiami Tana Toraja sebagian besar hidup dari pertanian. Terdapat dua jenis kegiatan bercocok tanam, yakni di sawah yang disebut *mauma* dan di kebun yang disebut *mapalak*. Tata cara mereka dalam mengelola pertanian masih tradisional dan didasari oleh pengetahuan turun-temurun. Mereka masih mengandalkan bintang-bintang di langit dan apabila bintang yang dimaksud belum muncul, rakyat tidak bersedia menggarap tanahnya. Meskipun demikian, rata-rata penggarapan sawah diawali pada April.

Kopi merupakan salah satu komoditas utama Tanah Toraja. Pusat penghasil kopi terpenting Tana Toraja terletak di Dataran Tinggi Sa'dan dan terbagi menjadi dua

680. *Toradja*, halaman 11.

kawasan yang disebut "sabuk utara" (*northern belt*) dan "segitiga selatan" (*southern triangle*)[681]. Di antara dua kawasan tersebut, "sabuk utara" lebih kaya dan berpotensi dikembangkan lebih jauh. Pusatnya berada di Pangala', tetapi meluas pula ke sebelah barat dan timurnya. Hasil kopi yang berasal dari kawasan ini dijual ke Pasar Kalambe dan Pasar Rantepao. Seiring dengan berkembangnya Pangala', terjadilah perebutan penguasaan terhadap perdagangan kopi antara Pangala' dan Rantepao. Kawasan "segitiga selatan" lebih kecil dibandingkan "sabuk utara." Meskipun demikian, usianya lebih tua. Daerah penghasil kopi ini berada di bawah pengaruh Tallu Lembangna di timur dan Rano-Buakayu di barat.

Selain menganut Agama Islam dan Kristen, sebagian rakyat Toraja masih meyakini kepercayaan tradisional yang disebut Allok To Dolo atau Alukta. Pokok keyakinan mereka meliputi tujuh azas yang terbagi menjadi *Alluk Tallo Oto'na* (Tiga Azas Keyakinan) dan *Ada' A'pa Oto'na* (Empat Azas Tata Kehidupan). Adapun *Alluk Tallo Oto'na* terdiri dari:[682]

- Percaya dan menyembah Puang Matua, selaku Tuhan dan pencipta alam semesta.
- Percaya dan menyembah Deata-Deata, yakni pemelihara segenap ciptaan Puang Matua.
- Percaya dan menyembah Tomebali Puang atau Todolo, yang memberi berkat pada umat manusia beserta keturunannya.

Ada' A'pa Oto'na meliputi:

- *Ada'na Daninna Ma'loko tau* atau adat lahir manusia.
- *Ada'na Tuona Ma'bale* atau adat kehidupan manusia.
- *Ada'na Manombala Ma'lulo tau* atau adat kepercayaan dan penyembahan manusia terhadap Tuhannya.
- *Ada'na Masena Malalo tau* atau adat mengenai kematian.

Kendati telah menganut agama lain, keyakinan Alukta ini masih besar peranannya di tengah-tengah masyarakat Toraja. Sebagai contoh, saat melangsungkan kegiatan bercocok tanam dilakukan berbagai upacara adat, yakni *aluk pare mengka rokalo* (saat membuat pesemain bagi bibit padi), *aluk pare ma'pokon* (saat menabur bibit), *aluk pare makaroen-roen* (saat menanam padi), *menammu* (saat memotong padi), *aluk parena'*

681. Lihat *Tana Toraja: A Social History of an Indonesian People*, halaman 21.
682. Lihat *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Sulawesi Selatan,* halaman 140.

bangunan (saat padi telah berada di halaman rumah), dan *ma'kurru'sumanga* (setelah padi masuk ke lumbung).

Penganut Todolo meyakini bahwa manusia pertama bernama La Ukku diciptakan oleh Puang Matua. La Ukku kemudian menetapkan aturan-aturan yang disebut *Sukaran Aluk.*[683] Ia memerintahkan keturunannya bernama Poang Mula Tau turun ke bumi dan membawa ajaran tersebut agar dilaksanakan oleh umat manusia. Inti ajaran itu, Puang Matua akan memberikan kebahagian dan kesejahteraan bagi para pemujanya yang setia. Sebaliknya, barangsiapa yang melalaikannya akan ditimpa kutukan. Di antara *deata-deata* yang dipuja oleh penganut keyakinan ini terdapat tiga yang paling utama; yakni deata tangngana langi yang bertugas mengawasi angkasa; deata kapadanganna, yang bertugas menguasai sungai, daratan, dan lautan; serta deata tangngana padang, yang bertugas menguasai perut bumi. Para makhluk-makhluk suci ini perlu diminta berkahnya melalui serangkaian upacara ritual.

Tomebali Puang merupakan arwah nenek moyang yang diyakini sanggup mengawai perbuatan keturunan-keturunannya serta memberikan berkah bagi mereka. Oleh karena itu, penganut Todolo memberikan pula persembahan kepada Tomebali Puang sebagai wujud ketaatan pada leluhurnya.

Catatan Gubernur D.F. Braam Morris menyebutkan bahwa orang Toraja gemar berjudi. Bahkan demi memenuhi kegemarannya itu, diri sendiri beserta istri dan anak-anaknya turut dipertaruhkan. Orang-orang Bugis mengajarki mereka berjudi dan kebiasaan buruk lainnya.[684] Pada umumnya, orang Toraja dibujuk berjudi dan mereka dipinjami sejumlah uang. Sekonyong-konyong, hutang itu ditagih dan orang Toraja yang kehabisan uang, dipaksa membahar dengan kopi atau hasil hutan lainnya. Apabila benar-benar ludes hartanya, mereka terpaksa menjadi budak.

XXVII. TANETE

a. Cikal bakal Kerajaan Tanete

Riwayat asal muasal Kerajaan Tanete tercantum dalam naskah *lontarak* berjudul *Iyanae Poada-Adangengngi Attoriolongnge Ri Tanete*. Menurut naskah tersebut, sebelum berdirinya Kerajaan Tanete di kawasan ini pernah berdiri beberapa kerajaan atau kesatuan adat kecil, yang dipimpin oleh para kepala suku bergelar *arung* (raja).

683. Lihat *Sejarah Kebudayaan Sulawesi*, halaman 31.
684. Lihat *Kerajaan Luwu: Catatan Gubernur Celebes 1888 D.F. Van Braam Morris*, halaman 47–48.

Di antara mereka yang paling terkemuka adalah Arung Alekale dan Arung Pangi. Suatu ketika, *arung* Pangi pergi berburu rusa dengan disertai para pengikutnya. Pada kesempatan itu, mereka berjumpa dengan sepasang suami istri yang tak jelas asal usulnya. Begitu tiba saat makan, *arung* Pangi yang hendak bersantap mengajak mereka berdua turut menikmati bekal bawaannya. Namun, kedua orang itu tidak makan nasi sebagaimana layaknya orang-orang Pangi, melainkan ikan mentah yang dibawakan burung-burung pada mereka. Menyaksikan keanehan ini, Arung Pangi menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang turun dari kayangan (*to manurung*). Selanjutnya, *to manurung* pria dalam naskah di atas dipanggil dengan nama To Sangiang.

Arung Pangi mengundang mereka tinggal bersama rakyatnya, tetapi kedua orang yang dianggap *to manurung* itu menolaknya dan menyatakan bahwa mereka baru bersedia bergabung apabila dewata menghendakinya. Setelah itu, Arung Pangi beserta para pengikutnya kembali ke tempat kediaman mereka. Beberapa lama kemudian Arung Pangi beserta Arung Alekale mengunjungi To Sangiang. Setelah memperkenalkan Arung Alekale, Arung Pangi mengajukan lagi keinginan mengajak To Sangiang beserta istrinya tinggal bersama mereka. To Sangiang menyambut gembira undangan Arung Pangi dan Arung Alekale; kendati demikian dinyatakannya bahwa ia baru bersedia ikut dengan mereka apabila izin dewata telah turun. Arung Pangi dan Arung Alekale lantas meninggalkan tempat itu dengan penuh harap.

Beberapa tahun kemudian, To Sangiang dikaruniai empat orang anak, yakni tiga anak laki-laki dan seorang anak perempuan. To Sangiang merencanakan meninggalkan kawasan itu dan mencari daerah kediaman baru. Begitu mengetahui rencana tersebut, Arung Alekale segera menikahkan putranya dengan putri To Sangiang dan setelah itu barulah To Sangiang beserta keluarganya pergi mengembara guna mencari pemukiman baru. Pada mulanya mereka menetap di kawasan perbukitan yang tinggi dan menamainya RimattampawaliE. Mereka membuka areal persawahan baru dan menamakannya Lopanrang. Kedamaian di pemukiman baru mereka terusik oleh perselisihan antara putra sulung dengan adiknya. Karena itu, To Sangiang lantas meminta kedua putranya pergi meninggalkan tempat itu dan berdiam di kampung bernama Soga. Mereka berdua membuka areal pertanian baru, tetapi tidak lama kemudian terlibat perselisihan kembali. To Sangiang sangat kecewa dan memutuskan meninggalkan tempat tersebut.

To Sangiang berkelana kembali dan menemukan sebuah tempat yang berada di dekat lautan. Ia menamai kawasan itu Lopancing dan membangun pemukiman baru di sana. Rombongan kemudian membuka tanah persawahan baru yang mereka namai La Mangade. Perkampungan baru itu belakangan dikenal pula dengan nama Agganionjong dan merupakan cikal bakal Kerajaan Tanete. Anak-anak To Sangiang bertengkar kembali sehingga To Sangiang yang merasa putus asa meminta bantuan raja terdekat, yakni Arung Segeri. Penguasa negeri Segeri itu tidak berkeberatan memberikan bantuannya. Ia datang sendiri ke Agganionjong dan berhasil menyelesaikan permasalahan antara putra-putra To Sangiang dengan baik. Sebagai tanda terima kasih, To Sangiang meminta *arung* Segeri menjadi raja mereka. *Arung* Segeri menerima permohonan mereka sehingga tak lama kemudian ia beserta anggota keluarganya datang ke Agganionjong guna dilantik oleh To Sangiang sebagai raja. Arung Segeri selaku raja pertama Agganionjong digelari Datu GollaE.[685] Ia mendirikan istananya di Batu Leppanae ri Poncing. Setelah wafat, ia digantikan oleh Daeng Ngaseng yang digelari MatinroE ri Bokokajuru'na. Penguasa Agganionjong berikutnya ini berhasil memakmurkan rakyatnya.

Agganionjong pernah terlibat peperangan dengan Kerajaan Sawitto. Saat itu, raja Agganionjong melihat rombongan perahu yang berlayar di perairan negerinya. Ketika ditanyakan pada perdana menterinya (*pabbicara* Agganionjong), diperoleh jawaban bahwa mereka merupakan rombongan raja Sawitto yang hendak memerangi Gowa. Raja berniat menghindarkan pertumpahan darah dengan mengundang rombongan Sawitto singgah di Agganionjong dan mengadakan pertandingan sabung ayam; apalagi ayam aduan raja Gowa berada di sana. Undangan menyabung ayam ini diterima, tetapi raja Sawitto tetap ingin berperang dengan Gowa. Raja Agganionjong masih belum berputus asa dan berniat mengirimkan sejumlah hadiah pada raja Sawitto. Tetapi karena raja Sawitto menolaknya, timbul peperangan antara Sawitto dan Agganionjong. Pasukan Sawitto berhasil dikalahkan dan mengundurkan diri ke negerinya. Raja Gowa sangat senang mendengar hal ini dan semenjak saat itu dinyatakan bahwa Agganionjong masuk dalam wilayah Kerajaan Gowa.

Menurut sumber lain, pengganti Datu GollaE adalah Puang Lolo Ujung[686] (1565–1568). Kurang lebih satu tahun ia memerintah, Agganionjong diterpa bencana

685. Menurut *Gerakan Sosial di Tanah Bugis*, ia pada memerintah 1552–1564.
686. Lihat *Gerakan Sosial di Tanah Bugis*, halaman 42.

gagal panen dan selain itu hasil ikan penduduk mengalami penurunan. Ia menyesal menjadi raja dan selain itu menyadari bahwa dirinya bukan keturunan Datu GollaE sehingga menyerahkan singgasananya pada MantinroE ri Ribokokajurugna (1567–1573), yang masih keturunan Datu GollaE. Pada masa pemerintahannya kehidupan rakyat kembali makmur. Setelah itu barulah ia digantikan oleh Daeng Ngasseng (1573–1585).

Semasa pemerintahan Daeng Ngasseng, berdatanglah kaum pedagang dari Malaka, Melayu, dan Minangkabau. Pada zaman ia ditetapkanlah jabatan *pabbicara* yang dijabat oleh Lapammuda, keturunan To Sangian. Raja Agganionjong selanjutnya adalah Daeng Majanna (Majannang),[687] yang menurut naskah *Iyanae Poada-Adangengngi Attoriolongnge Ri Tanete* pasal 4, disukai oleh orang banyak. Ia gemar berburu dan menangkap ikan. Meskipun demikian, konon raja pernah bermimpi berjumpa dengan Naga Neneburo, yang merupakan penunggu sungai di daerah Segeri, tempat raja biasa memancing dan menangkap ikan. Naga bertanduk emas itu melarang raja menangkap ikan di sana karena kerap mengejutkannya. Apabila raja masih berani memancing di sungai tersebut, naga penunggu sungai itu akan mencekik lehernya. *Lontarak* yang sama mencatat pula bahwa banyak orang mengunjungi Tanete semasa berkuasanya Daeng Majanna. Setelah beberapa tahun memerintah, Daeng Majanna mangkat dan dimakamkan di samping Daeng Ngasseng.

Ia digantikan oleh seseorang yang hanya diketahui gelarnya saja, yakni Torijallo ri Addenenna. Asal muasal gelar ini dikarenakan ia terbunuh karena diamuk oleh orang gila. Pada zamannya, timbul peperangan dengan Wajo, yang berhasil dikalahkan dan rajanya dipaksa membayar denda. Torijallo ri Addenenna kerap menghadap raja Gowa dan memiliki kegemaran menyabung ayam. Menurut *lontarak Iyanae Poada-Adangengngi Attoriolongnge Ri Tanete* pasal 5, Raja Torijallo menyabung ayam tiap pagi dan sore dengan mengundang anak-anak raja menyaksikannya. Karena kegemarannya itulah, raja menyediakan tepi sebelah barat Akkajennge sebagai tempat penyimpanan makanan ayam. Selanjutnya, disebutkan pula bahwa raja tak suka bersawah dan tak tetap pendiriannya.

---

687. Menurut *Gerakan Sosial di Tanah Bugis*, halaman 43, Daeng Ngasseng digantikan oleh Tori Jallo ri Addenenna dan setelah itu baru digantikan oleh Daeng Sinjai. Tetapi pada daftar raja-raja Tanete di buku yang sama, halaman 171, disebutkan bahwa Daeng Ngasseng digantikan oleh Daeng Majannang (1585–1589) dan setelah itu Torijallo ri Adenenna (1589–1593). Penguasa berikutnya adalah Daeng Sanjai (1593–1597).

Raja Agganionjong berikutnya adalah Daeng Sinjai, yang senang berburu dan terkenal jujur, pintar, serta gemar bermusyawarah dengan para pembesar kerajaan. Itulah sebabnya, Agganionjong menjadi makin maju dan makmur. Setelah Daeng Sinjai mangkat, ia digantikan oleh raja bergelar Tumaburu Limanna[688] (lihat: *Iyanae Poada-Adangengngi Attoriolongnge Ri Tanete*, pasal 7). Raja ini juga dikenal dari gelarnya saja, yang secara harfiah berarti 'yang merusak tangannya.' Konon, raja pernah dipatuk tangannya oleh burung enggang sehingga menjadi cacat. Pada masa pemerintahannya, putra mahkota Kerajaan Luwu mati tenggelam saat berlayar di antara Selayar dan Bira. Jenazahnya ditemukan oleh Raja Tanete, sebuah kerajaan kecil di Selayar yang para penguasanya bergelar *opu*. Raja (*opu*) Tanete membawa jenazah itu ke Gowa dalam sebuah peti. Raja Gowa kemudian meminta raja Agganionjong menemani Opu Tanete berangkat ke Luwu guna mengantarkan jenazah putra mahkota tersebut. Sebagai peringatan atas peristiwa itu dan mengokohkan persahabatan dengan kerajaan kecil Tanete di Selayar, Kerajaan Agganionjong kemudian namanya menjadi Tanete pula. Dengan demikian, ini merupakan awal Kerajaan Tanete.

b. Perkembangan Kerajaan Tanete

Raja Tanete berikutnya bergelar *petta tosugi* (raja yang kaya). Nama aslinya tidak diketahui. Ia juga dikenal sebagai *petta palse-laseE* (*petta palase laseE*)[689] atau 'raja yang gemar mengebiri.' Gelar ini diberikan karena raja mempekerjakan banyak orang kebiri guna menjaga para istrinya yang tak sedikit jumlahnya. Pengebirian dilakukan agar mereka tidak terlibat skandal percintaan dengan istri-istrinya. Kerajaan Tanete pada zaman ini tetap makmur dan mengundang kaum pedagang berniaga ke sana. Menurut *lontarak Iyanae Poada-Adangengngi Attoriolongnge Ri Tanete* pasal 8, penggantinya adalah orang kaya lagi, yang tak disebutkan namanya. Hubungan dengan Gowa masih terjalin dengan baik pada masanya. Pertanian dan peternakan mengalami kemajuan pesat. Peristiwa penting lain adalah diterimanya agama Islam oleh penguasa Tanete melalui Gowa, yang telah menganut agama tersebut terlebih dahulu berkat kedatangan seorang ulama bernama Dato ri Bandang.

Singgasana Tanete kemudian diduduki oleh Ri MatinroE ri Buliana (Petta Matinroe ri Buliana).[690] Bersamaan dengan pemerintahannya, Arung Palakka dari Bone dikejar-kejar oleh laskar Gowa. Dengan bantuan Raja Tanete, Arung Palakka

688. Menurut *Gerakan Sosial di Tanah Bugis*, halaman 44, raja ini memerintah 1597–1603.
689. Menurut *Gerakan Sosial di Tanah Bugis*, ia memerintah 1603–1625.
690. Menurut *Gerakan Sosial di Tanah Bugis*, halaman 66, ia memerintah 1625–1666.

berhasil meloloskan dirinya. Ketika raja Gowa menanyakan perihal keberadaan Arung Palakka, raja Tanete menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya sempat singgah sebenar di negerinya. MatinroE ri Buliana mengundurkan diri karena usia lanjut dan digantikan oleh Daeng Mattalu atau Daeng Matulung[691] (± 1672–± 1677). Berbeda dengan para pendahulunya yang memihak Gowa, Daeng Mattalu berganti haluan dan menjalin persekutuan dengan Arung Palakka, musuh bebuyutan Gowa. Karena tak ingin terlibat pergolakan politik saat itu dan memusatkan perhatian terhadap kegiatan pertanian serta peternakan, Daeng Mattalu turun takhta dan digantikan oleh adiknya, La Mappajanci Daeng Matajang atau La Mappajenei Daeng Matayang[692] (± 1677–1716). Ia menikahi We Tenriabi Datu Mariao atau saudari kandung Arung Palakka. Pernikahan ini membuahkan seorang putri bernama We Pattekana Daeng Tanisanga (1716–1735), yang menjadi Raja Tanete berikutnya. Karena banyak memberikan bantuan pada Arung Palakka, hubungan antara Tanete dengan Bone menjadi erat. Ketika Bone dikalahkan oleh Wajo, Tanete menurunkan pasukannya menolong Bone sehingga giliran laskar Wajo yang dipukul mundur.[693]

We Pattekana menikah dengan *Datu* (Raja) Luwu bernama To Palaguna Sultan Muhammad Muhidin MatinroE ri Langkanana. Putri mereka yang bernama Batari Tungke kelak menjadi ratu Luwu dengan gelar Sultana Fatima. Ia menikah dengan saudara sepupunya, La Rumpang Opu Cenning, dan dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Daeng Mattiro (La Tenri Oddang, La Oddanriu atau La Tenriodang) dan We Tenrileleang. La Tenri Oddang kelak menjadi raja Tanete berikutnya dangan gelar Sultan Fakhruddin MatinroE ri Musu'na (1735–1747). Sementara itu, We Tenrileleang menikah pertama kali dengan La Mappaselli, raja Pattojo dan setelah itu dengan La Mallarangeng, Raja Mario Riawa. Ratu Daeng Tanisanga meninggal di Tanete sehingga dianugerahi gelar anumerta MatinroE ri Tanete.

Cucu Daeng Tanisanga bernama La Tenriodang Daeng Mattinri atau La Tenri Oddang Daeng Mattiro (bergelar Sultan Yusuf Fakhruddin) menggantikan neneknya sebagai penguasa Tanete. Daeng Mattiro pernah berperang dan mengalahkan Raja Laterangan dari Barru sehingga Tanete dianggap sebagai kerajaan yang kuat.[694] Tanete

691. Menurut *Gerakan Sosial di Tanah Bugis*, halaman 74, ia memerintah 1666–1667.
692. Menurut *Gerakan Sosial di Tanah Bugis*, halaman 74, ia memerintah 1668–1669.
693. Lihat *Iyanae Poada-Adangengngi Attoriolongnge Ri Tanete,* pasal 12.
694. Lihat *Iyanae Poada-Adangengngi Attoriolongnge Ri Tanete,* pasal 13.

diminta bantuannya oleh Belanda guna menumpas pemberontakan orang-orang Cina di Mataram semasa pemerintahan Sunan Pakubuwono II (1727–1749). La Tenriodang merupakan sekutu VOC yang paling setia. Ia dikenal gemar berperang dan membantu siapa saja sehingga disebut "raja gila" oleh VOC.[695] Setelah La Tenriodang mangkat, ia digantikan oleh saudarinya, Tenri Leleang (1747–1776).[696] Bersamaan dengan pemerintahannya, Batavia dikepung oleh pasukan pemberontak yang dipimpin Kiai Tapa. Kembali Belanda meminta bantuan Tanete memadamkan pergolakan tersebut. Setelah Tenri Leleang wafat, payung kekuasaan Tanete beralih pada La Maddusila (1776–1807). Ia digantikan oleh La Patau (1807–1824, 1824–1825, dan 1827–1840) yang dengan gigih mempertahankan kedaulatan negerinya terhadap Belanda.

c. Tanete Melawan Kolonialisme

Semasa pemerintahan La Patau, pada 1824 Gubernur Jenderal Hindia Belanda, van der Capellen, datang ke Makassar guna memperbaharui Perjanjian Bungaya yang pernah diadakannya dengan Gowa. Raja-raja yang berada di Sulawesi Selatan diharuskan hadir menandatanganinya. Namun, karena undangan itu isinya sangat merendahkan martabat para raja, tidak semua penguasa kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan bersedia memenuhinya. Raja-raja Bone, Tanete, dan Suppa menolak hadir. Karena itu, Belanda kemudian menyerang Tanete pada 15 Juli 1824 yang dipimpin oleh Kolonel H. de Steurs. Karena kalah dalam persenjataan dan kekuatan militer, Raja La Patau mengungsi ke daerah pedalaman. Sebelumnya, ia menyerahkan tampuk pemerintahan Tanete pada saudara perempuannya bernama Daeng Tanisanga (1824). Belanda kemudian mengakui Daeng Tanisanga sebagai raja Tanete dan memaksanya menandatangani Perjanjian Bungaya yang Diperbaharui pada 19 Juli 1824.

Kendati demikian, Belanda mengampuni La Patau dan mengangkatnya lagi sebagai Raja Tanete dengan gelar *arung matoa* (raja tua) pada 1824, sedangkan saudarinya, Daeng Tanisanga digelari *arung lolo* (raja muda). Tiga tahun kemudian, atau tepatnya pada 1827, timbul peperangan lagi dengan Belanda karena La Patau dituduh melindungi seorang penentang Belanda bernama Petta Ambarala. La Patau terpaksa menyingkir ke Citta di Soppeng. Sementara itu, Daeng Tanisanga mengungsi ke Makassar. Tetapi tak lama kemudian dikembalikan ke Tanete guna menjalankan

695. Lihat *Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar Tentang Kerajaan Gowa Pascaperjanjian Bungaya*, halaman 57.

696. Menurut *Gerakan Sosial di Tanah Bugis*, halaman 96, ia memerintah 1744–1750. Selain ratu Tanete, ia juga menjabat sebagai ratu Luwu.

roda pemerintahan di sana. Pada tahun yang sama, La Patau diangkat kembali sebagai raja di Tanete, tetapi hanya sebagai raja pinjaman saja.

Peperangan dengan Belanda pecah lagi karena putra La Patau bernama Daeng Pulagu menyerang markas pasukan Belanda di Sigeri. Ketika diminta pertanggungjawabannya oleh Belanda, La Patau tidak mengindahkannya sehingga kembali Tanete diserang oleh Belanda. La Patau menyingkir ke Soppeng dan menyerah kepada Belanda pada 1844. Ia lalu berdiam di Salomoni hingga wafatnya. Oleh karena itu, ia digelari *Matinroe ri Salomoni*. La Patau digantikan oleh La Rumpang Maegga Matinroe ri Mutiara (1840–1856).

La Tenriolle atau Siti Aisyah La Tenriolle (1856–1910) adalah Ratu Tanete yang terkenal berkemauan kuat, cerdas dan luas pengalamannya. Ia diangkat sebagai penguasa Tanete pada 1856 menggantikan kakeknya, La Rumpang Maegga Matinroe ri Mutiara. Pengangkatan penguasa wanita ini diusulkan oleh kakeknya kepada gubernur Belanda di Sulawesi, yang semenjak jatuhnya kerajaan ini ke tangan Belanda pada 1826 mempunyai hak mengangkat dan memberhentikan raja-raja Tanete. Ketika La Tenriolle menduduki singgasana Tanete, kerajaannya terdiri dari 13 *banua* (distrik) yang seolah-olah berdiri sendiri-sendiri. Ratu yang piawai berpolitik ini berhasil menyatukan kembali distrik-distrik tersebut ke dalam genggaman tangannya. Tanete kemudian dibagi menjadi empat daerah (*lili*), yakni Tanete ri Tennga, Tanete ri Lau, Tanete ri Aja, dan Gattarang. Sepeninggal Ratu La Tenriolle rangkaian para penguasa Tanete berikutnya adalah I Pancaitana Bunga Walie (1910–1926), I Pateka Tana (1926–1927), Andi Baso (1927–1950), dan Andi Iskandar (1950–1960).

d. Kesusastraan

Lontarak *Iyanae Paoda Adaengngi Attoriolongnge ri Tanete* merupakan sumber sejarah berharga mengenai sejarah dan kebudayaan Tanete. Naskah kuno ini terdiri dari 18 bab (*passaleng*) dan mengisahkan mengenai awal mula Tanete dengan Kerajaan Agganionjong sebagai cikal bakalnya beserta perkembangan selanjutnya hingga kurang lebih abad 19. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Bugis dan ditulis dengan aksara *lontarak*. Siapa penulisnya tidak diterakan dalam naskah ini sehingga tak diketahui lagi namanya. Salah satu kelemahan naskah ini adalah tidak dicantumkannya angka tahun yang pasti sehingga menyulitkan para sejarawan dalam menyusun kronologi Tanete. Sebagai tambahan, naskah ini dianggap sakral oleh pemiliknya dan tak boleh diperlakukan secara sembarangan. Meletakkan juga harus di tempat yang

dianggap layak. Begitu pula, saat seseorang membacanya wajib mematuhi berbagai aturan-aturan adat tertentu.

Ratu Tanete
Sumber: dokumen lama.

XXVIII. TELLU LIMPOE

Kerajaan ini kini terletak di Kabupatan Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, dan terdiri terdiri dari Kerajaan Bulo-Bulo, Lamatti, dan Tondong. Sebelum terbentuknya ketiga kerajaan yang membentuk federasi Tellu Limpoe tersebut telah ada kelompok masyarakat yang hidup bersama berdasarkan ikatan pernikahan dan kepemilikan tanah. Berbagai kelompok itu memiliki daerahnya masing-masing yang disebut *gallarang* dan sebagai pemukanya diangkat seorang *gella*. Belakangan, berbagai *gallarang* itu sepakat membentuk ikatan atau federasi lebih luas lagi satu sama lain yang disebut *limpo*.

Demikianlah, pada perkembangan selanjutnya terbentuklah tiga *limpo*, yakni Limpo ri Arung Bulu, Limpo TongaE, dan Limpo ri Attang Bulu. Belakangan, Limpo ri Attang Bulu berkembang menjadi Kerajaan Lamatti, sedangkan kedua *limpo* lainnya merupakan cikal bakal Kerajaan Tondong dan Bulo-Bulo. Belakangan muncul To ManurungE yang turun dari langit di kawasan ini. Ia menikah dengan seorang putri To Manurung dari Bulu Kumba. Kedua putra mereka masing-masing bernama Sappe ri Bulu, yang menjadi raja di Tondong, dan La Barumbu TanaE, yang menjadi Raja

Bulo-Bulo. Kedua orang raja ini mengikat persahabatan dengan Raja Lamatti selaku saudara tua mereka.

Raja Tumapa'risi' Kallona, penguasa Gowa ke-9, berambisi meluaskan wilayahnya sehingga mengancam keberadaan ketiga kerajaan. Karena itu, mereka membentuk federasi bernama Tellu LimpoE sebagai sarana membendung pengaruh Gowa. Pada 1562, ketiga raja yang tergabung dalam Tellu LimpoE, yakni Lamappasokka, Raja Bulo-Bulo; La Padanring, Raja Lamatti; dan Yottong Daeng Marumpa (Raja Tondong) mengadakan perjanjian persahabatan yang direstui oleh La Tenrirawe Bongkange Matinrowe ri Gucinna (1542 –1584), Raja Bone ke-7. Selanjutnya, perjanjian persahabatan ini dikenal sebagai *Lamung PatuE ri Topekkong* atau Perjanjian di Topekkong. Namun, karena pengaruh Gowa yang makin kuat, Karaeng Tunipalangga, raja Gowa ke-10 berhasil menaklukkan Tellu LimpoE pada 1564 dan semenjak saat itu ketiganya menjadi daerah bawahan (*palili*) Gowa.

Semasa pemerintahan, I Cella (Raja Bulo-Bulo ke-14, memerintah pada 1823–1835), Bulo-Bulo terlibat peperangan dengan Belanda. Saat itu, laskar Bulo-Bulo yang mendapat bantuan dari Lamatti dan Tondong dipimpin oleh seorang tokoh bernama Baso Kalaka. Peperangan ini dipicu oleh tuntutan Belanda agar raja-raja Bulo-Bulo membayar ganti rugi atas tenggelamnya kapal Groningen. Tuntutan ini ditolak mentah-mentah oleh para raja Tellu LompoE sehingga mengakibatkan pecahnya pertempuran di Passahakue. Awalnya, Belanda mengalami kekalahan, namun dalam medan-medan pertempuran berikutnya kemenangan beralih pada pasukan kolonial, yang telah mengadakan persiapan matang guna mematahkan perlawanan laskar Bulo-Bulo. Baso Kalaka mengalami kekalahan tragis pada 1859 dan karena tidak sudi bertekuk lutut pada Belanda, ia meninggalkan kampung halamannya menuju Tanete dan wafat di sana pada 1869.

XXIX. WAJO

a. Cikal bakal Kerajaan Wajo-Kerajaan Cinnotabi

Leluhur Kerajaan Wajo adalah Ke-*datu*-an Cina (bukan Tiongkok, tetapi nama salah satu kerajaan kuno di Sulawesi Selatan). Raja pertama Ke-*datu*-an Cina konon adalah La Sattumpugi' yang beristrikan We Tenriabeng (saudara We Datu Sengngeng, ibu Sawerigading).[697] La Sattumpugi' beserta pengikutnya datang ke Tana Ugi

697. Lihat *Spirit of Wajo*, halaman 21.

dengan mengendarai perahu pada abad 9. Setelah kedatangan mereka terbentuklah dua kerajaan atau ke-*datu*-an, yakni Cina ri Lau dan Cina ri Aja. Cina ri Lau kini meliputi Kabupaten Bone, sedangkan Cina ri Aja kini terletak di Kabupaten Wajo. Cina ri Aja, Cina ri Lau dan Soppeng inilah yang dikenal sebagai Tana Ugi. Nama Ugi sendiri berasal dari La Sattumpugi'. Penghuninya disebut To (orang) Ugi atau yang lebih tersohor sebagai Bugis. Dari kawasan tersebut mereka kemudian menyebar ke seantero Sulawesi Selatan. Pengganti La Sattumpugi' selaku datu Cina kedua adalah We Cudai–permaisuri Sawerigading; yang digantikan kembali oleh La Tenritatta. Semasa pemerintahan datu ke-22, La Sangaji Ajik Pammana, ia berpesan agar nama kerajaan diubah menjadi Pammana demi mengenang namanya.[698] Kini Pammana merupakan nama salah satu kecamatan di Kabupaten Wajo. Karena tak berputra, ia digantikan oleh kemenakannya bernama We Tenrilallo, yang menjabat sebagai *datu* Pammana pertama.

Kerajaan Wajo merupakan kelanjutan Kerajaan Cinnotabi, yang dibentuk oleh keturunan raja-raja Cina dan Mampu. Perintis pembentukan Kerajaan Wajo adalah La Paukke, sebelumnya Wajo hanya berupa sebuah kampung.[699] La Paukke yang diangkat sebagai raja (*arung*) Cinnotabi pertama adalah putra *datu* (raja) Cina, yakni kerajaan yang sebelumnya telah lama berdiri di kawasan tersebut. Diperkirakan peristiwa naik takhtanya La Paukke berlangsung pada abad 14. Selanjutnya, yang memerintah secara berturut di Kerajaan Cinnotabi adalah We Panangngareng, putri La Paukke (Arung Cinnotabi kedua); We Tenrisui, putri We Panangngareng (Arung Cinnotabi ketiga); dan La Patiroi, putra We Tenrisui (Arung Cinnotabi keempat).

Prinsip demokrasi yang dianut oleh Cinnotabi tampak pada kontrak politik yang diadakan antara We Tenrisui dengan rakyatnya. Ratu We Tenrisui sepakat memberikan perlindungan terhadap rakyat Cinnotabi dari bencana alam dan gangguan-gangguan lainnya. Selain itu, ia diharapkan pula melindungi mata pencaharian rakyatnya.[700] Karenanya, dapat disimpulkan bahwa penguasa Cinnotabi tidak dapat berbuat sewenang-wenang dan wajib menjalankan tugas-tugasnya demi kepentingan rakyat. La Patiroi digantikan oleh dua orang putranya yang memerintah bersama-sama;

698. Lihat *Spirit of Wajo*, halaman 22 dan *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 143.
699. Lihat *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 275.
700. Lihat Lihat *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*, halaman 150.

yakni La Tenribali dan La Tenri Tippe (La Tenritappek).[701] Pemerintahan bersama ini dalam istilah setempat disebut *napa' balisaloi ia dua* (arti harfiahnya adalah 'diseberangsungaikan mereka berdua').[702]

b. Pemerintahan Para Batara Wajo

Belakangan terjadi perselisihan antara kedua bersaudara di atas sehingga La Tenribali meninggalkan negeri Cinnotabi dan membuka areal pemukiman serta persawahan di Boli. La Tenribali membawa serta sebagian rakyat Wajo yang dipimpin oleh para pemuka setempat (*matoa*). Mereka kemudian sepakat mengangkat La Tenribali menjadi raja mereka. Penobatan ini berlangsung di bawah sebatang pohon bajok (*mappa sp*.) yang rindang daunnya. Inilah yang menjadi asal mula nama Wajo. Saat berlangsungnya pengangkatan tersebut diadakan pula kontrak politik antara La Tenribali dengan rakyatnya. Dengan demikian, La Tenribali yang sebelumnya menjabat bersama-sama dengan saudaranya selaku Arung Cinnotabi kelima, kini dianggap sebagai Batara Wajo pertama.

La Matesso menggantikan ayahnya selaku Batara Wajo kedua dan memerintah sekitar 1456–1466 dan dikenal sebagai penguasa yang bijaksana. Ia digantikan oleh La Pateddungi Tosamallangi (Batara Wajo ketiga, memerintah pada 1436–1456 atau 1466–1469). Ternyata La Pateddungi gagal mewarisi sifat-sifat ayahnya sehingga dibenci oleh rakyat. Sepak terjangnya diliputi oleh kesewenang-wenangan. Tidak jarang raja memerkosa wanita baik-baik, entah ia telah bersuami, masih gadis, ataupun wanita yang tidak bersuami. Pemuka masyarakat yang tinggi kedudukannya saat itu bernama La Tiringeng Totaba berulang kali menasihati La Pateddungi agar mengubah tabiat buruknya. Namun, nasihat-nasihat ini bagaikan angin lalu saja bagi La Pateddungi. Oleh karena itu, bertambahlah kebencian rakyat kepadanya. Akhirnya, La Tiringeng Totaba mengumpulkan segenap pemuka dan rakyat Wajo. Ia berkata bahwa dikarenakan La Pateddungi sudah tak disukai lagi oleh rakyat maka mulai saat itu kedudukannya sebagai Batara Wajo telah dicabut. La Pateddungi kemudian dibawa ke sebuah tempat di sebelah timur ibu kota Wajo dan rakyat Wajo menusukinya dengan tombak mereka hingga tewas.

---

701. Buku *Wajo' Pada Abad XV-XVI*, halaman 574, mengeja namanya dengan La Tenri Tippe', sedangkan buku *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 509, mengeja namanya sebagai La Tenritappek.
702. Lihat *Spirit of Wajo*, halaman 33.

c. Masa Pemerintahan Arung Matoa Wajo

Kini Wajo memasuki masa pemerintahan para *arung matoa*. Penguasa Wajo berikutnya, La Palewo Topalipung (Topalipu) memerintah antara 1474–1482, tetapi ada sumber lain yang menyebutkan bahwa ia berkuasa antara 1480–1488, sebagaimana yang dinyatakan dalam *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 271. Meskipun demikian, pada daftar raja-raja Wajo yang dimuat dalam buku yang sama, halaman 206–208, disebutkan bahwa raja ini memerintah 1456–1466. Menurut keterangan pada halaman 271, La Palewo merupakan raja pertama yang bergelar Arung Matoa Wajo. Kendati demikian, pada daftar Raja Wajo di halaman 206–208, disebutkan bahwa penguasa pertama yang menyandang gelar tersebut adalah La Tenri Umpu To Langi (1474–1482). Namun, tampaknya Arung Matoa Wajo pertama yang sebenarnya adalah La Palewo Topalipung karena dinyatakan demikian pula dalam buku *Wajo' Pada Abad XV-XVI*. Jabatan lain yang pernah diemban oleh La Palewo adalah Matoa Majauleng atau menurut sumber lain Matoa Sabbamparu. Perbandingan urutan raja-raja Wajo selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut.

Keterangan:
E = Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905
W = Wajo' Pada Abad XV-XVI

Urutan *arung matoa* Wajo		Nama raja	Tahun pemerintahan	
W	E		W	E
3	1	La Tenriumpu' To Langi' (W) atau La Tenri Umpu' To Langi' (E)	1486–1491	1474–1482
4	2	La Tadampare' Puang ri Ma'galatung (W) atau La Tadangpare Puang ri Maggalatung (E). Sumber W menyatakan bahwa setelah ini kosong tiga tahun	±1491–1521	1482–1487
5	3	La Tenripakado To Nampe (W) atau La Tenri Pakado To Nampe (E)	1524–1535	

	4	La Tadampare’ Puang ri Ma’galatung (W) atau La Tadangpare Puang ri Maggalatung (E).		1491–1521 Sumber W tidak menghitung pemerintahan kedua ini

La Tadangpare Puang ri Maggalatung (1482–1487)[703] adalah Raja Wajo ke-11 dan Arung Matoa Wajo ke-2 (menurut daftar penguasa Wajo di buku Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan, halaman 206).[704] Tetapi yang benar tampaknya ia adalah Arung Matoa Wajo ke-4. Ia adalah putra La Tenribali, Arung Cinnotabi ke-5 dan batara Wajo pertama. Tetapi buku *Wajo’ Pada Abad XV-XVI* menyebutkan bahwa ia adalah putra La Tompiwanua. Semasa ia memerintah diadakan perjanjian dengan Dewaraja dan Datu Luwu, yang menyepakati bahwa kedua kerajaan tersebut akan bersama-sama menyerang Sidenreng. Perjanjian ini diadakan di Toppaceddo sehingga dinamakan *Singkeruk PatolaE ri Toppaceddo* (Ikatan Panji di Toppaceddo). Sebagai hasil perjanjian ini, kawasan Belawa yang dahulunya wilayah Sidenreng kini digabungkan ke dalam Kerajaan Wajo.

Arung Matoa Wajo ini dikenal jujur dan adil dalam memutuskan sesuatu. Dalam mengadiri suatu perkara, ia akan mendengarkan kesaksian kedua belah pihak dengan seksama. Menurut hemat ia ada empat hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menjatuhkan suatu keputusan, yaitu

- Pembicaraan kedua belah pihak.
- Perbuatan kedua belah pihak.
- Duduknya perkara menurut kedua belah pihak.
- Saksi-saksi yang berasal dari kedua belah pihak.

Jikalau keempat faktor di atas telah dianalisis dengan seksama, barulah ketetapan yang adil dapat diambil. La Tadampare senantiasa memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Ia tak segan-segan meninjau sendiri kehidupan rakyatnya. Sebelum meninggal, La

703. Menurut entri di *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 280 disebutkan bahwa ia memerintah 1498–1528.

704. Meskipun demikian, entri mengenai *arung matoa* tersebut di buku yang sama halaman 279 menyebutkan bahwa ia merupakan raja Wajo ke-7 dan *arung matoa* Wajo ke-4. Buku ini akan mengambil daftar di halaman 206 sebagai patokan. Selain itu, pada entri di halaman 279 namanya dieja Tadampare dan bukannya Tadangpare.

Tadampare menyarankan agar orang yang menggantikan dirinya sebagai Arung MatoaWajo perlu memiliki empat syarat, yakni jujur, pandai, berani, dan pemurah.

Arung Matoa Wajo berikutnya adalah La Tenri Pakado To Nampe (1487–1491). Pada masa pemerintahan Arung Matoa Wajo ketiga ini diadakan Perjanjian *Passiajingeng* (Persahabatan) antara Wajo dan Bola, sebuah kerajaan kecil yang terletak di tepi Sungai Cenrana. Ia digantikan secara berturut-turut oleh La Tadangpare Puang ri Maggalatung (Arung Matoa Wajo ke-4), La Tenri Pakado To Nampe (pemerintahan kedua sebagai Arung Matoa Wajo ke-5), La Temmasonge (Arung Matoa Wajo ke-6), La Warani To Temmagiang (Arung Matoa Wajo ke-7), dan La Mallageni (Arung Matoa Wajo ke-8, memerintah selama dua bulan pada 1547).

La Mappapole (Mappapuli) Toappamadeng Massaoloccie (1547–1564) adalah Arung MatoaWajo ke-9. Sebelumnya, ia pernah menduduki jabatan sebagai *ranreng tua* dan *datu* Patila. Semasa pemerintahannya, ia berupaya merebut kembali daerah-daerah Wajo yang hilang semenjak zaman Tonampe beserta pengganti-penggantinya; baik dengan jalan kekerasan maupun diplomasi. Pada ketiga masa pemerintahannya, datanglah utusan dari Karaeng Tunipalangga, raja Gowa ke-10, yang memerintahkan agar La Mappapuli menyerang Batulappa karena raja kerajaan tersebut tak bersedia tunduk pada Gowa. Apabila berhasil mengalahkan Batulappa, Wajo akan diberi kemerdekaan. Setelah memerintah selama tujuh belas tahun, La Mappapuli mangkat dan digantikan oleh La Pakoko To Pabbele (1564–1567) selaku Arung Matoa Wajoke-10. La Pakoko sendiri merupakan putra Puang ri Maggalattung.

Pengganti La Pakoko adalah La Mungkace To Uddamang (To Uddamang, memerintah 1567–1607). Ada sumber yang menyebutkan bahwa *arung matoa* Wajo ke-11 ini adalah penguasa pertama yang menganut Agama Islam. La Mungkace pernah berpesan agar jenazah beserta perisainya kelak dibakar setelah ia mangkat. Karenanya, ia dianugerahi gelar anumerta *MatinroE ri Kananna* (Yang Wafat di Perisainya).

Arung Matoa Wajo ke-12 (1607–1610), La Sangkuru Mulajaji, adalah Raja Wajo pertama yang menganut agama Islam, dan setelah itu bergelar La Sangkuru Patau Sultan Abdurrahman. Menurut *Lontarak Wajo,* peristiwa diterimanya agama Islam oleh penguasa Wajo ini berlangsung pada 15 Safar 1020 H. atau 1610 M. Ia juga merupakan Arung Matoa Wajo pertama yang jenazahnya dimakamkan secara Islam. La Sangkuru Mulajaji digantikan oleh La Mappapulu Toappamole (1612–1616) selaku Arung Matoa Wajo ke-13. Setelah memerintah selama 4 tahun, ia wafat karena

terjatuh dari kudanya ke dalam kubangan (bahasa Bugisnya adalah *lempong*) sewaktu berburu rusa. Karenanya, ia dianugerahi gelar anumerta *MatinroE ri Lemponna* (Yang Wafat Dalam Kubangan). Sebagai penggantinya, diangkatlah La Samalewa To Appakiu (1616–1621). Arung Matoa Wajo ke-14 ini memerintah selama kurang lebih lima tahun saja dan setelah itu dipecat oleh dewan menteri Wajo karena kerap melakukan tindakan sewenang-wenang. Meski telah dinasihati, tetapi La Samalewa tak kunjung mengindahkannya sehingga terpaksa diberhentikan kedudukannya sebagai Arung Matoa Wajo.

Guna menggantikan La Samalewa To Appakiu (1621–1626) yang diberhentikan tersebut, diangkatlah La Pakalongi To Allinrugi (To Ali) sebagai Arung Matoa Wajo ke-15. Ia memerintahkan pembangunan sebuah masjid raya, yang upacara peresmiannya dihadiri oleh para raja Gowa, Tallo, Bone, dan Soppeng. Sama seperti pendahulunya, La Pakalongi dipecat oleh dewan menteri karena Wajo kekurangan padi sehingga terancam bahaya kelaparan. Sebagai penggantinya diangkat La Mappasunge (To Passaunge, memerintah 1627–1628). Arung Matoa Wajo ke-16 ini bekerja keras memajukan pertanian sehingga tak lama kemudian rakyat Wajo berkelimpahan bahan makanan. Berdasarkan ikrar kesetiannya kepada Gowa, ia pernah menawarkan bantuannya mengawal Gowa ketika Sultan Alauddin hendak berangkat memerangi Buton.[705] Pada mulanya, Sultan Alauddin menolaknya, tetapi La Mappasunge terus memaksa dan menyatakan bahwa itu hanyalah sekedar bantuan dari seseorang yang masih dianggap "saudara." Akhirnya, Sultan Alauddin menerimanya dan memberikan benteng Pa'nakkukang sebagai tempat tinggal sementara bagi La Mappasunge. Demikianlah, La Mappasunge sementara tinggal di benteng tersebut hingga Sultan Alauddin beserta pasukannya balik ke Gowa tiga bulan kemudian. La Mappasunge mengundurkan diri setelah setahun memerintah dan digantikan kembali oleh La Pakalongi To Allinrugi, yang dihitung sebagai Arung Matoa Wajo ke-17 (1628–1636).

Pada masa pemerintahannya yang kedua ini, La Pakalongi terlibat perselisihan dengan seorang tokoh yang menjabat Arung Bettempola bernama La Sekkati To Palettei. Dewan menteri Wajo menasihatinya, tetapi La Pakalongi tak mengindahkannya sehingga ia dipecat untuk kedua kalinya. Setelah dipecat, La Pakalongi menetap di Ugi, yang terletak tak jauh dari Danau Tempe. Tak berapa lama kemudian, La Pakalongi bersama-sama dengan rakyat Patampanua (gabungan empat

705. Lihat *Warisan Arung Palakka*, halaman 46–47.

kerajaan kecil di Wajo, yakni Ugi, Canra, Sampe, dan Wage) bangkit melawan Wajo. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan dan Patampanua dibakar oleh pasukan Wajo. Akibat kekalahannya, La Pakalongi terpaksa menyingkir ke Cenrana yang merupakan wilayah Bone dan tinggal di sana hingga wafatnya. Oleh sebab itu, ia dianugerahi gelar anumerta *MatinroE ri Cenrana* (Yang Wafat di Cenrana). Sebagai pengganti La Pakalongi diangkatlah Arung Matoa Wajo ke-18 bernama La Tenrilai To Udamang atau To Addumemang (1636–1639).

Yang menduduki jabatan sebagai Arung Matoa Wajo ke-19 adalah La Sigajang To Bune (1639–1643). Semasa pemerintahannya, terjadilah peperangan dengan Bone yang dipicu oleh serangan Wajo ke Baneki, suatu kawasan yang diklaim Bone sebagai wilayahnya. La Sigajang To Bune gugur dalam peperangan ini. La Makkaraka to Pattemui (1643–1648) menjadi Arung Matoa Wajo ke-20 menggantikan La Sigajang To Bune yang tewas dalam pertempuran melawan Bone. Setelah memerintah selama lima tahun, ia wafat di Pangngaranna, sehingga memperoleh gelar anumerta *MatinroE ri Pangngaranna* (Yang Mangkat di Pangngarannna). Selanjutnya, yang menjadi Arung Matoa Wajo ke-21 adalah La Temassonge Puangna Daelli (1648–1651). Raja ini mangkat karena menderita penyakit syaraf sehingga dianugerahi gelar anumerta Petta MalingngE (Raja yang Gila). Ia digantikan oleh La Paremma To Rewo (1651–1658) selaku Arung Matoa Wajo ke-22. Selama pemerintahannya, negeri Wajo berada dalam keadaan damai.

Setelah ditandatanganinya Perjanjian Bungaya, Kerajaan Bone yang dipimpin Arung Palakka melancarkan peperangan terhadap Wajo pada 1670[706] karena negeri itu tetap setia mendukung Gowa. Dengan dukungan VOC, Bone menyerang benteng Tosora milik Wajo. Arung Matoa Wajo ke-23 La Tenrilai' Tosengngeng (1658–1670) turun memimpin pasukannya menangkis serangan Bone. Pertempuran yang berlangsung selama empat hari empat malam ini banyak memakan korban jiwa di kalangan Wajo. Kerugian di pihak Wajo ini masih ditambah pula dengan gugurnya La Tenri Lait To Sengngeng akibat meriam andalan Wajo meledak dalam benteng Tosora.[707] Ia digantikan oleh La Palili To Malu Puanna Gelle (1670–1679), yang mengambil alih tampuk pimpinan pasukan Wajo di tengah-tengah kancah perlawanan terhadap Bone. Pertahanan Wajo kian lemah sehingga terpaksa menyerah pada 23 Desember

706. Lihat *La Maddukelleng: Sultan Pasir Arung Peneki Arung Siengkang Arung Matoa Wajo XXXI*, halaman 9.
707. Itulah sebabnya La Tenri Lait To Sengngeng diberi gelar anumerta Petta Matinroe Ri Salekkona, yang artinya «Raja yang meninggal dalam pertempurannya.»

1670. *Arung Matoa* Wajo beserta *petta cakkuridi* (menteri luar negeri) yang saat itu dijabat La Padapi, La Pangambong Patola Wajo, dan La Kitabaja Villa Wajo berangkat ke Makassar guna menandatangani perjanjian dengan Belanda di dalam benteng Fort Rotterdam. Pada kesempatan tersebut hadir pula Arung Palakka, raja Bone. Semenjak saat itu, Wajo menjadi bawahan Bone dan diwajibkan pula menjunjung kesetiaan terhadap VOC. Wajo tak diperbolehkan lagi mengadakan perjanjian dengan negara asing selain Belanda. Dari segi kemiliteran, Wajo diperlemah pula dengan larangan mendirikan benteng-benteng.

La Papili To Malu Puanna Gelle digantikan oleh La Paruwusi Daeng Manyampak Arung Pamali (1679–1699) sebagai *arung matoa* Wajo ke-25. Ia merupakan penguasa Wajo yang meniru kebiasaan raja Bone, seperti memakai payung kebesaran dan membunyikan *genrang tellu* (gendang tiga). Ia kemudian digantikan oleh La Tenri Sessuk (1699–1702) selaku *arung matoa* Wajo ke-26. Penguasa Wajo ini melakukan pembelian senjata dan mesiu dari Jawa serta Sumatera guna membangun kembali kekuatan negerinya. Ia mengundurkan diri pada 1702 dan digantikan oleh Arung Matoa Wajo ke-27, La Mattone To Sakke Daeng Paguling Puanna La Rumpang (1702–1703). Usaha pembelian persenjataan dan amunisi yang telah dirintis pendahulunya tetap diteruskan olehnya. Selain itu, bangunan-bangunan yang dahulu rusak akibat peperangan diperbaikinya. Setelah wafat, La Mattone dianugerahi gelar anumerta *MatinroE ri Barukana* (Yang Wafat di Balairungnya).

La Galigo To Sunia (1703–1712) menggantikan La Mattone To Sakke Daeng Paguling sebagai Arung Matoa Wajo ke-28. Pada zamannya, rakyat Wajo kerap mengalami perlakukan sewenang-wenang dari orang Bone sehingga banyak orang Bone yang dibunuh oleh orang Wajo. Oleh karenanya, Raja Bone, La Patau Matanna Tikka petta Matinroe ri Nagauléng (1696–1714), mengeluarkan peraturan agar orang Wajo dilarang membawa senjata tajam. La Galigo To Sunia mangkat pada 1712 dan diberi gelar anumerta *Raja Melengngi ri Masagina* atau 'Raja yang meninggal dalam masjidnya.'

La Tenri Werung Arung Peneki (1712–1715) diangkat sebagai Arung Matoa Wajoke-29 menggantikan La Galigo To Sunia. Seperti para pendahulunya, penguasa Wajo ini tetap giat membangun pertahanan kerajaannya. Akibatnya, raja Bone menjadi murka dan melarang orang Wajo berjalan di daerah Cenrana dengan membawa senjata tajam, baik berupa parang ataupun badik. Setelah tiga tahun memerintah, La Tenri

Werung Arung Peneki mengundurkan diri dari jabatannya dan berdiam di daerah Bila hingga wafatnya.

d. Perlawanan La Maddukelleng

Setelah La Tenri Werung mengundurkan diri, yang menggantikannya sebagai Arung Matoa Wajo ke-30 adalah La Salewangeng To Tenrirua (1715–1736). Ia merupakan raja Wajo yang pandai berdiplomasi serta mengembangkan hubungan yang baik dengan Raja Bone. Selain itu, pertanian dan perdagangan juga merupakan bidang-bidang yang dikuasainya. Ia membentuk semacam koperasi bagi kaum petani.[708] Perdagangan dengan dunia luar digalakkannya pula sehingga para pedagang dari Singapura dan Johor berdatangan ke Wajo. Kedatangan niagawan asing ini dimanfaatkan oleh raja untuk menyelundupkan persenjataan dan mesiu.

La Salewangeng mewajibkan rakyatnya belajar menembak dengan senapan agar siap sewaktu-waktu bila terjadi serangan musuh. Kaum pedagang yang melakukan transaksi jual beli atau peminjaman uang diharuskan membuat surat perjanjian dan selanjutnya dibubuhi tandatangan kedua belah pihak serta disaksikan oleh orang terpercaya. Raja memerintahkan seorang tokoh bernama La Tiringeng Daeng Mangapasa mengurusi masalah perekonomian. Ia kemudian mengumpulkan uang dari masyarakat yang selanjutnya dipinjamkan pada kaum pedagang. Keuntungan yang dihasilkan oleh uang pinjaman tersebut harus dibagi dua antara peminjam dengan pemerintah Wajo. Kerajaan Wajo lantas memanfaatkannya untuk membeli persenjataan dan memajukan kekuatan militernya. Arung matoa Wajo ini memerintahkan pula penggalian terusan di Topaceddo yang mengaliri Kampung Leceng-LecengngE di Tosora dan membersihkan sungai-sungai menuju danau Semppangnge dan Talibolong. Dengan demikian, jalur transportasi melalui sungai menjadi lancar. Berkat kebijakannya di berbagai bidang, Wajo menjadi kuat dan makmur sehingga merasa sanggup menghadapi Bone.

La Maddukelleng yang kelak menjadi Arung Matoa Wajo ke-31 adalah putra *petta cakkuridi*, anggota dewan menteri Kerajaan Wajo yang juga menjabat sebagai *arung* (raja) Paneki, yang dilahirkan para kurang lebih tahun 1700. Pada 1714[709]

708. Lihat *La Maddukelleng*, halaman 16.

709. Buku *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Timur*, halaman 62, menyebutkan bahwa pesta ini berlangsung pada 1710, sebaliknya buku *La Maddukelleng* mencantumkan tahun 1714. Pada buku *Ensiklopedi Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 263 disebutkan bahwa *La Maddukelleng* meninggalkan Wajo pada usia 14 tahun. Jika ia diperkirakan lahir pada 1700 maka tahun 1714 itu yang tampaknya lebih tepat.

dilangsungkan pesta pelubangan telinga putri raja Bone bernama Iwale di Cenranae.[710] Raja La Salewangeng To Tenrirua dari Wajo juga diundang menghadiri perhelatan besar tersebut. Dalam rombongan Wajo ini turut pula La Maddukelleng. Karena merupakan kemenakan Arung Matoa Wajo, ditugaskanlah ia membawa tempat sirih raja. Seperti biasanya, di tengah-tengah perayaan semacam itu, diadakanlah acara berburu rusa dan menyabung ayam; yakni dua jenis kegemaran utama orang-orang Bugis. Para pesertanya adalah raja-raja dan kaum bangsawan yang memasang taruhan besar. Tanpa dinyana-nyana, di tengah-tengah pesta ini terjadi keributan yang dipicu oleh pembunuhan seorang anak bangsawan Bone oleh La Maddukelleng. Peristiwa terjadi saat acara menyabung ayam di suatu arena khusus yang terletak di depan istana raja Bone.

Ayam jantan La Kassi, putra Raja Bone, dikalahkan oleh ayam aduan milik Arung Matoa Wajo. Meskipun demikian, pihak Bone tidak bersedia mengakui kekalahan mereka dan menganggap bahwa pertandingan tersebut berakhir seri atau tidak ada yang menang maupun kalah. Tentu saja pihak Wajo keberatan menerima hal ini sehingga terjadi perselisihan di antara mereka. Pertikaian makin memanas, hingga akhirnya La Maddukelleng mencabut kerisnya dan menikam orang Bone. Terjadilah perkelahian antara Wajo dan Bone, masing-masing berjumlah 19 orang Bone dan 15 orang Wajo menemui ajalnya. Karena kekuatan mereka yang tak seimbang, rombongan Wajo melarikan diri dengan menyeberangi Sungai Welanae. Sementara itu, setelah perhelatan usai, Arung Matoa Wajo kembali ke negerinya.[711]

Beberapa hari kemudian tibalah utusan Bone menghadap Raja Wajo,[712] dan menuntut agar La Maddukelleng diserahkan pada mereka untuk diadili

---

710. Kembali terjadi perbedaan informasi di sini. Menurut Buku *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Timur*, halaman 62, pesta itu adalah pernikahan antara putri Raja Bone dengan putra mahkota Kerajaan Gowa-Tallo. Kendati demikian, buku *La Maddukelleng*, halaman 16. menyebutkan pesta pelubangan telinga.
711. Buku *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Timur*, halaman 63-64 menuturkan agak berbeda. Pihak Wajo mengutus 28 orang bangsawan yang dikepalai oleh La Maddukelleng. Pada kesempatan tersebut mereka juga ikut menyabung ayam. Malangnya, ayam aduan milik Wajo kalah dan para hadirin yang lain mencemooh mereka. Hal ini membangkitkan amarah dalam diri La Maddukelleng, yang saat itu duduk berdampingan dengan Makadanngi Tana, seorang bangsawan tinggi Bone. Karena tersinggung, La Maddukelleng menghunus kerisnya dan menikam bangsawan Bone yang berada di sebelahnya itu. Akibatnya, Makadanngi Tana langsung jatuh tersungkur dan wafat seketika itu juga. Setelah terjadinya insiden itu, La Maddukelleng beserta para pengikutnya segera meninggalkan arena sabung ayam dan kembali ke Wajo. Sementara itu pada buku *La Maddukelleng*, halaman 16, disebutkan bahwa yang kalah adalah ayam aduan milik Bone.
712. Buku *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Timur*, halaman 64 meyebutkan bahwa nama raja Wajo adalah Petta Arung Ma Towa Ra Salengeng Ta Tenri Puajung, yang telah

demi mempertanggungjawabkan perbuatannya. Arung Matoa Wajo menolak menyerahkan La Maddukelleng[713] dan menjawab bahwa semenjak insiden tersebut, yang bersangkutan belum pernah kembali ke Wajo. Utusan Raja Bone terpaksa mengundurkan dirinya tanpa sanggup berbuat apa-apa,[714] walau ia yakin bahwa La Maddukelleng masih ada di Tosora (ibu kota Wajo) karena berdasarkan Perjanjian TellumpoccoE antara Bone, Soppeng, dan Wajo, ketiga kerajaan tersebut harus saling memercayai. Raja Bone mencari siasat lain dengan mengundang Raja La Salewangeng To Tenrirua ke Cenrana. Ia berharap agar La Maddukelleng ikut serta dalam rombongan raja sehingga memiliki kesempatan menangkapnya. Ternyata harapan raja Bone ini sia-sia belaka.

Sekembalinya dari Cenrana, Raja Wajo membangun gudang penyimpanan harta kerajaan di sebelah timur masjid Tosora dan tiga lumbung beras. Tujuannya adalah mempersiapkan diri apabila Bone menyerang Wajo. Beberapa waktu kemudian La Maddukelleng menghadap Arung Matoa Wajo dan meminta izin merantau dan restu darinya. Mendengar kemantapan hati La Maddukelleng, *arung matoa* beserta aparat pemerintahan lainnya, seperti Arung Bettengpola dan La Coka Daeng Situju, merestui kepergiannya dan berpesan agar ia senantiasa mengingat kampung halamannya.[715]

---

berusia 90 tahun.

713. Buku *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Kalimatan Timur*, halaman 64–65 menuturkan bahwa jika Wajo menolak menyerahkan La Maddukelleng, wilayah Tancung dan Impa Kimpa milik Wajo akan diduduki oleh Bone. Raja Wajo berupaya menyikapi hal itu dengan bijaksana, ia meminta waktu sehari semalam untuk menjawabnya. Sementara itu, utusan Bone mengundurkan diri terlebih dahulu di luar batas kerajaan. Raja kemudian mengundang dewan menterinya untuk membicarakan hal tersebut. Persidangan memutuskan bahwa adat Wajo melarang raja menyerahkan warganya untuk diadili atau dihukum oleh kerajaan lain. Masih menurut hukum adat Wajo, kerajaan tersebut juga tidak akan menjatuhkan hukuman pada La Maddukelleng karena yang bersangkutan dianggap sudah mati semenjak peristiwa tersebut. Adalah kesalahan Kerajaan Bone sendiri, yang gagal menangkap atau membunuh La Maddukelleng begitu insiden berlangsung.

714. Buku *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Kalimatan Timur*, halaman 64–65 menyebutkan adanya serangan terhadap Wajo setelah penolakan penyerahan La Maddukelleng itu. Keputusan penolakan itu disampaikan pada utusan Kerajaan Bone yang telah menantikan di luar perbatasan. Pasukan Bone yang tak puas dengan jawaban Wajo menggerakkan pasukannya memasuki wilayah Wajo. Kendati pasukan Wajo sesungguhnya telah dipersiapkan menghadapi Bone; tetapi karena jumlahnya yang jauh lebih besar dan banyaknya pengalaman tempur yang dimiliki Bone, pasukan Wajo terus terdesak sehingga makin banyak wilayah yang direbut oleh Bone. Meskipun demikian, dewan kerajaan Wajo telah bertekad melawan musuh sedapat mungkin demi mempertahankan kedaulatan negerinya.

715. Dalam buku *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Kalimatan Timur*, halaman 65–66, kepergian La Maddukelleng didasari oleh keputusan para menteri. La Maddukelleng beserta ketiga putranya yang masing-masing bernama Petta To Si Berangeng, Petta To Rawe, dan Petta To Siangka diharuskan meninggalkan kerajaan itu. Rombongan mereka diikuti oleh 8 bangsawan Wajo lainnya; yakni: La Mohang Daeng Mangkona, La Pallawa Daeng Marowa, Puanna Dekke', La Siraj' Daeng Menambong (Opu Daeng Manambun), La Mandja' Daeng Lebbi', Puanna Tereng, La Sawedi Daeng Sagala, dan La Marapi' Daeng

La Maddukelleng beserta beberapa ratus orang pengikutnya berlayar ke Johor[716] guna mencari saudaranya yang bernama Daeng Matekko. Meskipun demikian setibanya di Johor, ia mengetahui bahwa saudaranya telah meninggal dunia dan harta bendanya diambil alih oleh seseorang bernama To Pasari. La Maddukelleng membentuk armada laut, yang dalam *Lontarak Sukku'na Wajo* disebut sebagai gerakan enam bajak laut. Sumber VOC menyebutkan bahwa La Maddukelleng yang sepak terjangnya meresahkan mereka mempunyai 40 perahu layar dan dikenal sebagai bajak laut paling ditakuti di kawasan tersebut. Pertempuran demi pertempuran kerap terjadi antara armada VOC dan La Maddukelleng, yang dimenangkan oleh putra Wajo itu.

Bersamaan dengan itu, terjadi peperangan di Johor yang melibatkan Daeng Perani, Daeng Manambun, dan Daeng Marewa. La Maddukelleng turut membantu ketiga bersaudara Bugis tersebut memenangkan peperangan. Saat timbul keinginan melengkapi persenjataannya, La Maddukelleng teringat akan harta kekayaan yang dimiliki saudaranya, Daeng Matekko. Namun, sayangnya semua itu telah diambil alih oleh To Pasarai. Karenanya, La Maddukelleng segera berlayar ke Kalimantan guna menjumpai To Pasari dan tanpa kesulitan berhasil memperoleh kembali harta kekayaan saudaranya. Dengan harta tersebut, La Maddukelleng membeli berbagai persenjataan guna memajukan kekuatan militernya dan mewujudkan cita-citanya membebaskan Wajo dari hegemoni VOC beserta Bone.

Penggawa. Secara keseluruhan rombongan La Maddukelleng yang lari meninggalkan Wajo ada 200 orang yang diangkut oleh 4 buah kapal.

716. Buku *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Kalimatan Timur*, halaman 66–67, menuturkan bahwa La Maddukelleng tidak ke Johor, melainkan mendarat di Kalimantan. Mereka dikatakan mendarat di Muara Pasir, yang merupakan wilayah Kerajaan Pasir di Kalimantan Timur. Di sana dibangun sebuah perkampunan sebagai tempat kediaman mereka. Sebulan kemudian, jumlah orang yang berdatangan dari Wajo makin banyak saja. Mereka melaporkan bahwa semenjak dikalahkannya negeri mereka oleh Bone, rakyat Wajo dipaksa bekerja keras dan Raja Wajo yang telah lanjut usianya itu tetap dijadikan tawanan. Kedatangan makin banyak pengungsi itu makin menyulitkan kehidupan mereka karena lahan pertanian menjadi makin sempit sehingga La Maddukelleng mengadakan musyawarah yang disebut *aduppa rappang* guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Hasil keputusannya, mereka semua disarankan berpencar mencari daerah-daerah baru. Akhirnya, sebagian dari mereka di bawah pimpinan La Mohang Daeng Mangkota pergi ke daerah Kutai, sebagian lagi dengan dipimpin La Pallawa Daeng Marowa tetap berada di Muara Pasir, keturunan mereka menikah dengan raja-raja Pasir. Puanna Dekke beserta pengikutnya menuju ke Tanah Bumbu (Kalimatan bagian tenggara) dan mendirikan pemukiman bernama Kampung Baru yang kelak menjadi cikal bakal Kerajaan Pagatan, Opu Daeng Manambun kelak menuju ke Matan dan menikah dengan putri kerajaan tersebut. Ia kelak mendirikan Kerajaan Mempawah, La Manja' Daeng Lebbi' pindah ke Riau, Puanna Tereng dan La Sawedi Daeng Satala beserta pengikutnya tetap tinggal di Muara pasir, dan La Manrapi Daeng penggawa beserta pengikutnya melakukan perdagangan antara pulau yang meliputi Kutai, Pasir, dan Jawa.

Di Kalimantan, La Maddukelleng menikah dengan putri Sultan Pasir, Adeng Ajang.[717] Setelah Sultan Aji Muhammad Alamsyah (1703–1726),[718] ayah Andeng Ajang mangkat, istri La Maddukelleng dicalonkan sebagai sultana Pasir. Kendati demikian, sebagian orang Pasir menolak pencalonan tersebut. Akibatnya, La Maddukelleng mengerahkan pasukannya menyerang Pasir, menaklukannya, dan mengangkat dirinya menjadi menjadi sultan Pasir (1726–1735). Pasukan Pasir yang kalah melarikan diri ke Kutai. Oleh karenanya, La Maddukelleng meminta sultan Kutai menyerahkan mereka. Kendati demikian, ia menolaknya sehingga La Maddukelleng mengerahkan pasukannya menyerbu Kutai dan mengalahkannnya. Praktis kini La Maddukelleng menjadi penguasa di pesisir Kalimantan Timur dan menjadikan kawasan tersebut sebagai basis kekuatan maritimnya. Ia merampas hasil rompakan para bajak laut Sulu dan demikian pula barang-barang muatan kapal VOC. Demi memudahkan perahu-perahu berlabuh dan merapat di Pasir, La Maddukelleng memerintahkan rakyat Pasir menggali Sungai Pasir hingga sekarang tempat tersebut dinamakan Petta La Maddukelleng. Guna mengokohkan jalinan persaudaraan dengan Kutai, La Maddukelleng menikahkan putrinya, Aji Idoya, dengan Sultan Muhammad Idris dari Kutai. Dengan demikian, bertambah kokohlah kekuasaan La Maddukelleng.

Arung MatoaWajo mendengar bahwa La Maddukelleng telah berhasil membangun kekuatan yang patut diperhitungkan. Pada 1735, ia mengadakan musyawarah dengan para pembesar Wajo dan merencanakan memanggil pulang La Maddukelleng. Sepucuk surat dikirim melalui La Dalleng (Arung Ta), yang isinya meminta La Maddukelleng kembali ke Tanah Wajo. Raja Wajo akan memintakan ampun pada raja Bone. Apabila Bone menolaknya dan menyerang La Maddukelleng maka Wajo akan membantunya karena kini Wajo telah memiliki cukup persediaan senjata. Tergerak oleh panggilan ini, La Maddukelleng dengan disertai La Dallek dan

---

717. Dalam buku buku *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Kalimatan Timur*, halaman 67–69, justru disebutkan bahwa putra La Maddukelleng yang menikahi putri Sultan Pasir. Putra bernama Petta To Siberangeng itu menikah dengan putri Kerajaan Pasir, yang dalam sumber tersebut bernama Anden Andan. Pernikahan ini dikaruniai seorang putri bernama I Sengong Daeng Sirompa atau Aji Doja Putri Agung, yang kelak menikah dengan Muhammad Idris, sultan Kutai Kartanegara. Petta To Siangka melakukan perdagangan di Sulawesi Tengah. Keturunannya kelak merupakan raja-raja Donggala, Banawa, Tawaili, dan lain sebagainya. Petta To Rawe, putra La Maddukelleng lainnya, beserta dengan 250 pengikutnya, melakukan perompakan dengan armada mereka berupa 8 perahu layar. Mereka pernah menyerang daerah Tidung dan menawan rajanya bernama Panglima Muda. Selanjutnya, mereka memasuki kawasan Sambaliung dan menjalin persahabatan dengan rajanya. Tokohnya lainnya, La Moha Daeng Mangkona belakangan mendirikan suatu bentuk pemerintahan di Samarinda dan menyandang gelar Pua Ado'.

718. Buku *La Maddukelleng*, halaman 21, menyebutkan bahwa ayah Andeng Ajang adalah Sultan Sepuh Alamsyah, tetapi yang benar adalah Sultan Aji Muhammad Alamsyah.

To Assak meninggalkan Pasir dan berlayar ke Wajo. Sultan Muhammad Idris dari Kutai turut serta dalam rombongan ini demi membantu mertuanya.

Sementara itu, pihak Wajo sendiri mengadakan latihan perang-perangan. Arung Matoa Wajo, La Salewangeng To Tenri Ruak mengumandangkan kembali kemerdekaan Wajo dan menjatuhkan hukuman mati bagi siapa saja yang mengkhianati negerinya. Pihak Bone mendengar tentang diadakannya latihan perang-perangan ini dan menegur Wajo. Kendati demikian, raja Wajo dengan cerdik menjawab bahwa latihan ini ditujukan demi kepentingan bersama ketiga kerajaan anggota TellumpoccoE (Bone, Wajo, dan Soppeng). Bone tentunya akan mendapat malu pula bila mereka kalah dalam pertandingan menembak yang sedianya akan dilangsungkan di Gowa.

Dalam pelayarannya kembali ke Wajo, La Maddukelleng terlibat pertempuran dan berhasil mengalahkan armada VOC. La Maddukelleng tiba di Ujung Palette pada 18 April 1736. Saat itu, Kerajaan Bone kini diperintah oleh Ratu Batari Toja Daeng Talaga Arung Timurung Datu-ri Chitta MatinroE-ri Tipuluna. Ia mengirimkan pasukannya memerangi La Maddukelleng. Namun, armada Bone tidak dapat berbuat apa-apa karena ditembaki oleh meriam dari arah lautan. Menurut adat Bugis seorang penguasa wanita harus dihormati, oleh sebab itu La Maddukelleng mengurungkan niatnya menyusuri Sungai Walanae. Ia mengubah rute perjalanannya dan berlayar menuju pelabuhan Doping yang terletak dalam wilayah kekuasaan Wajo.

Ternyata kedatangan La Maddukelleng langsung disambut oleh pasukan gabungan ketiga kerajaan, yakni Bone, Soppeng, dan Wajo. Armada tiga kerajaan yang tergabung dalam TellumpoccoE ini mengepung La Maddukelleng sehingga ia gagal merapat ke pelabuhan Doping karena dihadang pasukan gabungan yang jumlahnya jauh lebih besar itu. Malam harinya, La Maddukelleng mengirimkan utusan pada Arung MatoaWajo yang mempertanyakan mengapa Wajo turut mengepung dirinya, padahal ia kembali ke kampung halamannya atas undangan pemerintah kerajaan tersebut. Arung Matoa Wajo menjawab dan menyarankan agar La Maddukelleng bersabar dahulu. Masih belum memungkinkan bagi Wajo menentang kehendak kedua kerajaan sesama anggota TellumpoccoE tersebut. Disampaikan pula siasat Arung Matoa Wajo yang hendak membagi dua pasukannya. Separuh pasukan Wajo akan bergabung dengan Bone dan Soppeng serta berpura-pura turut mengepung La Maddukelleng, sedangkan separuhnya lagi dipersiapkan membantu La Maddukelleng.

Bila terjadi pertempuran, pasukan yang tadi bergabung dengan Bone beserta Soppeng akan segera berbalik haluan memihak La Maddukelleng.

Ratu Bone yang juga merangkap sebagai *datu* Soppeng meminta pada *arung matoa* Wajo agar La Maddukelleng dibiarkan saja mendarat sehingga lebih mudah bila hendak diserang. Ia menolak mengampuni La Maddukelleng karena telah melakukan tujuh kejahatan; yakni: (1) Membunuh utusan raja Bone selama berada di perantauan, (2) Merampok To Pasarai di Tabaniau, Kalimantan, (3) Menyerang Mandar yang merupakan sekutu VOC dan Bone, (4) Melakukan pembakaran di pulau-pulau yang dekat dengan Makassar, (5) Mengganggu para nelayan di Batu-Batu, (6) Menyerang VOC yang merupakan sekutu Bone, dan (7) Memasukkan perahu-perahu besar ke dalam perairan Bone, padahal saat itu yang berkuasa adalah seorang penguasa wanita. Kendati demikian, Arung MatoaWajo berdalih bahwa bila dibiarkan mendarat justru La Maddukelleng berpotensi menghimpun pasukan dalam jumlah besar, mengingat ia memiliki banyak saudara dan pendukung di Wajo. Selain itu, sudah menjadi hak azasi La Maddukelleng kembali ke negerinya dan Wajo tak dapat berbuat apa-apa terhadapnya.

Meskipun demikian, Ratu Bone tetap berkeras membiarkan La Maddukelleng mendarat sehingga lebih mudah dihancurkan kekuatannya. Guna menipu La Maddukelleng seorang utusan bernama Ijakeke diperintahkan menyampaikan pesan yang pada intinya mengizinkannya mendarat tanpa diganggu. La Maddukelleng memegang teguh janji utusan Bone ini dan menyatakan bila diserang ia akan melawan dengan sepenuh hati karena Bone sendiri yang memintanya mendarat. Demikianlah, pada 24 Mei 1736 La Maddukelleng mendarat di pelabuhan Doping dengan disertai 100 orang pasukannya, sementara itu, yang lainnya tetap tinggal di kapal. La Maddukelleng terus berjalan menuju ke Singkang dan benar saja pengikutnya terus bertambah hingga 700 orang. Di antara mereka terdapat orang-orang Wajo yang dahulu diperlakukan semena-mena oleh Bone.

Arung Matoa Wajo selaku wakil TellumpoccoE menitahkan La Maddukelleng menjawab ketujuh tuduhan ratu Bone di atas. La Maddukelleng menyatakan bahwa ia tak merasa melakukan kesalahan sedikitpun. Pembunuhan utusan Bone selama ia berada di Kalimantan dipicu oleh pembunuhan seorang warga Wajo oleh Bone. Ia berdalih bahwa di Kalimantan orang boleh saling memangsa laksana ikan. Siapa lengah, dialah yang akan dimangsa. La Maddukelleng tak merasa pula merampok

To Pasarai yang merupakan sepupu ratu Bone. Ia hanya meminta harta kekayaan saudaranya yang diambil alih oleh To Pasarai. Bahkan To Pasarai sendiri yang mengundangnya mengambil harta tersebut. Sehubungan dengan masalah Mandar, La Maddukelleng menyatakan bahwa orang-orang Mandar telah terlebih dahulu menembakinya sehingga ia terpaksa membalasnya. La Maddukelleng membakar rumah di pulau-pulau dekat Makassar karena sudah ditinggalkan penghuninya. Ia juga tak merasa mengganggu kaum nelayan di Batu-Batu karena mereka sendiri yang melarikan diri begitu melihat kedatangan armadanya. Mengenai serangannya terhadap VOC, La Maddukelleng menjawab bahwa merekalah yang terlebih dahulu melepaskan tembakan. Karena menganggap bahwa itu adalah tembakan penghormatan maka ia segera membalasnya. Kendati telah memberikan jawabannya, Bone tidak menanggapi pembelaan La Maddukelleng di atas.

Akibatnya, pecah pertempuran antara Bone dan La Maddukelleng. Soppeng beserta sekutu Bone lainnya, seperti Luwu, Sidenreng, dan Ajattappareng, turun membantu Bone. Namun, pasukan kedua kerajaan itu mulai terdesak. Karenanya, Bone beserta sekutunya meminta bantuan VOC. Sementara itu, La Maddukelleng memohon bala bantuan pada Karaeng Bontolangkasa di Tallo. Menyadari bahwa Belanda kemungkinan akan datang menyerbu Wajo, La Maddukelleng menyarankan agar Karaeng Bontolangkasa membuat medan pertempuran baru melawan VOC. Di tengah-tengah situasi yang makin memanas, La Salewangeng To Tenri Rua bermaksud mengundurkan dirinya dan meminta agar La Maddukelleng menjadi pelaksana tugas Arung Matoa Wajo. Dengan demikian, pada 6 November 1736, La Maddukelleng diangkat sebagai pejabat Arung Matoa Wajo.

Menyadari bahwa pertempuran di Wajo makin menghebat, Gubernur VOC bernama Sautijn memerintahkan panglimanya yang bernama Berghopman turun membantu Bone beserta sekutu-sekutunya. Meskipun demikian, pasukan Bone beserta para pemukanya telah enggan berperang sehingga Bone mengalami kekalahan. Bersamaan dengan itu, Belanda mulai menembaki daerah Tosora dan Logosi. Para pejabat Kerajaan Wajo menyingkir ke Paria, tempat La Maddukelleng diangkat sebagai pejabat Arung MatoaWajo. Kendati demikian, Belanda tetap menembaki kawasan tersebut, hingga menteri dalam negeri Bone menyatakan bahwa tindakan tersebut hanya membuang-buang amunisi saja karena perangkat Kerajaan Wajo telah melarikan diri ke Paria. Belanda dan Bone beserta sekutu-sekutunya mengepung

Paria. La Maddukelleng membagi pasukannya dan berhasil mengalahkan mereka satu persatu.

Ratu Bone mengetahui bahwa pasukannya telah dikalahkan. Selain itu, pada 1737, *datu* Tanete, La Tenriodang Daeng Mattinri atau Sultan Yusuf Fakhruddin mengusirnya dari takhta Bone dan Soppeng. Oleh sebab itu, ia lantas meninggalkan negerinya dan meminta perlindungan pada Belanda di Makassar. Pasukan La Maddukelleng yang dipimpin Patola La Tombong meneruskan aksinya dengan menyerang Sidenreng. Raja Sidenreng, To Appok, menyerah dan menyatakan bahwa negerinya kembali bergabung dengan Wajo, seperti pada masa pemerintahan Arung Matoa Wajo bernama La Taddampare Puang ri Maggalantung (1492–1521). Mengingat jasa-jasa Sidenreng dahulu, kerajaan tersebut tidak jadi dikenai hukuman dan diterima kembali sebagai sekutu Wajo.

Selanjutnya dilancarkan serangan terhadap kerajaan-kerajaan lain yang memusuhi Wajo, seperti Soppeng dan lain sebagainya. Kini La Maddukelleng berniat menyerbu Watampone, pusat pemerintahan Kerajaan Bone. Tiba-tiba datanglah Jemma Tongeng To Abboe, utusan Bone, yang menyatakan bahwa negerinya menyerah kepada Wajo. Utusan Bone itu menambahkan bahwa telah terjadi kekosongan pemerintahan di Bone semenjak ratunya melarikan diri dan meminta perlindungan kepada VOC di Makassar. Karenanya, rakyat Bone telah mengangkat Sitti Napsiah Denrawalie (dalam buku *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai 1905*, halaman 40 disebut I Denradatu Sitti Nafisah Karaeng Langello), saudara Sultan Abdul Khair dari Gowa, sebagai penguasa Bone.

Ratu Bone yang baru ini meminta perlindungan La Maddukelleng karena La Tenriodang dari Tanete telah merampas pusaka Bone dan memaksa rakyat Bone agar mengangkatnya sebagai raja mereka. Tidak lama kemudian datanglah utusan Soppeng yang memberitakan bahwa La Tenriodang telah memaksa rakyat Soppeng agar menjadikan dirinya sebagai raja mereka. La Maddukelleng kurang setuju dengan sepak terjang Raja Tanete tersebut dan berjanji melindungi Bone serta Soppeng. Ia mengultimatum Tanete agar segera mengembalikan benda pusaka Bone. Jika menolaknya, raja Tanete akan berurusan dengan La Maddukelleng. Ternyata utusan Bone mengabarkan bahwa La Tenriodang berkeras menolak mengembalikannya. Akhirnya, atas tekanan La Maddukelleng, Tanete melepaskan tuntutannya atas Bone dan Soppeng serta mengembalikan pusaka yang dirampasnya.

Belanda memaksa Wajo mengakui kekuasaannya dengan menerima isi Perjanjian Bungaya. Kendati demikian, tuntutan Belanda ini ditolak dengan tegas oleh La Maddukelleng. Bersama dengan Karang Bontolangkasa dari Gowa, ia telah sepakat mengusir Belanda dari kawasan Sulawesi Selatan. Gowa memperkuat dirinya kembali dengan membangun berbagai perbentengan pada 1739 yang sebenarnya melanggar Perjanjian Bungaya. Karaeng Bontolangkasa menyampaikan pada La Maddukelleng bahwa Gowa telah siap melawan Belanda. Karenanya, La Maddukelleng segera bertolak ke Gowa. Bersama-sama dengan Karaeng Bontolangkasa, ia menghadap sultan Gowa, I Mallawagau (1735–1742), dan mengajaknya mengangkat senjata melawan Belanda. Kendati demikian, sultan menolaknya dan bersama dengan para pembesarnya menyingkir ke Makassar.

Kedudukan Belanda di Makassar diserang oleh La Maddukelleng beserta Karaeng Bontolangkasa pada 16 Mei 1739. Pecahlah pertempuran yang sengit. Sebagian pasukan Bone yang tadinya membela La Maddukelleng kini berbalik haluan dan menyerang Wajo karena pengaruh Ratu Batari Toja dari Bone. Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, semenjak tahun 1737 ratu ini telah melarikan diri dari kerajaannya dan berdiam dalam lindungan Belanda di Makassar. Oleh sebab itu, pasukan La Maddukelleng membakar istana ratu Bone di Bontoala. Setelah peperangan berkecamuk selama beberapa hari, La Maddukelleng beserta pasukannya berhasil juga memasuki benteng Fort Rotterdam, namun dapat dipukul mundur oleh Belanda yang dipimpin langsung oleh Gubernur Smouth pada 17 Juli 1739.

Kekuatan militer Belanda yang lebih unggul memaksa La Maddukelleng mengundurkan dirinya. Apalagi Karaeng Bontolangkasa gugur terkena tembakan Belanda. Dengan disertai pasukannya La Maddukelleng kembali ke Wajo dan bersama dewan kerajaan merundingkan mengenai kemungkinan serangan Belanda ke negeri mereka. Pada Desember 1740, tibalah armada Belanda bersenjatakan 42 meriam di Cenrana dan bersiap-siap menyerang Wajo. La Maddukelleng memerintahkan rakyatnya menimbun muara Sungai Walanae yang merupakan jalan masuk ke Tosora, pusat pemerintahan Wajo. Akibatnya, Belanda terpaksa memutar mencari jalan lain menuju ke kawasan tersebut.

Pada Januari 1741, pecah lagi pertempuran antara Belanda dengan Wajo di daerah perbatasan antara Wajo dan Bone. Angkatan perang La Maddukelleng berhasil memukul mundur Belanda beserta sekutu-sekutunya. VOC kembali menderita

kekalahan pada pertempuran di TangeE dan Parigi. Peperangan ini terus berkecamuk dan memakan korban jiwa yang tak sedikit, sementara itu tidak ada tanda-tanda Belanda berhasil mengalahkan La Maddukelleng. Karena itu, Belanda menawarkan gencatan senjata dan perjanjian perdamaian pada La Maddukelleng. Kendati demikian, La Maddukelleng menyatakan bahwa ia tak bersedia menandatangani perjanjian apapun dengan penjajah. Dengan tegas dikatakannya bahwa Wajo tak bersedia diperbudak oleh siapapun. Oleh sebab itu, pasukan gabungan Belanda dan Bone lalu meninggalkan Wajo pada 29 Maret 1741.

Sesudah mundurnya Belanda, La Maddukelleng menata negerinya dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Pertahanan Wajo tetap diperkuatnya. Meskipun demikian, terjadi perang saudara antara Sidenreng yang diperintah oleh Toappo (To Appok) dengan Wajo. Pallawagau, ipar To Appok, yang sebelumnya mendukung La Maddukelleng berbalik memusuhinya. Peperangan ini berlangsung bertahun-tahun. Menyadari bahwa rakyat sudah jenuh pada pertempuran yang tak kunjung usai, La Maddukelleng mengundurkan dirinya sebagai Arung MatoaWajo pada 1754 dan selanjutnya menjabat sebagai Arung Peneki. La Maddukelleng kemudian pindah ke Singkang hingga wafatnya di tahun 1765. Demi mengenang jasa-jasanya, rakyat Wajo menganugerahkan gelar Petta Pamareddekai Tanah Wajo atau 'Raja yang Memerdekakan Wajo' kepada La Maddukelleng.

e. Kerajaan Wajo setelah La Maddukelleng

La Maddanaca menggantikan La Maddukelleng sebagai Arung Matoa Wajo ke-32. Namun, ia hanya memerintah setahun saja (1754–1755) dan setelah itu mengundurkan dirinya. Ia dibunuh di Makassar pada 8 September 1758 karena diamuk oleh orang gila bernama La Pabbising. Oleh karenanya, ia menerima gelar anumerta Petta ri Jalloe (Raja yang Diamuk). Sepeninggal La Maddanaca, La Passaung Arung Menge Ranreng To Talotenreng Datu Lampulle (1755–1758) diangkat sebagai Arung Matoa Wajo ke-33. Semasa pemerintahannya, ia berselisih dengan *pilla* Wajo, yakni La Gau yang menduduki jabatan sebagai *datu* Pamanna. Pemicu perselisihan ini adalah niat La Gau memerdekakan Pamanna selaku salah satu daerah bawahan (*palili*) kekuasaan Wajo.

La Mappajung Puanna Salowo (Salowong) Ranreng Tua memerintah selaku Arung Matoa Wajo ke-34 (1764–1767). Pada masanya pemerintahannya, Bone menyerang La Maddukelleng yang telah mengundurkan diri dan menjadi Arung Peneki. Namun,

La Maddukelleng tetap dengan gigih mempertahankan daerah kekuasaannya. Sebagai pengganti La Mappajung diangkatlah La Malliungang Toaleoang (1767–1770) selaku Arung Matoa Wajo ke-35, yang sebelumnya pernah menduduki jabatan sebagai Arung Alitta dan Peneki. Ia mengundurkan diri pada 1770. Akibatnya, jabatan Arung Matoa Wajo sempat lowong selama kurang lebih 25 tahun (1770–1795). Selama belum ada *arung matoa* baru yang resmi diangkat, kedudukan tersebut diwakili oleh Ranreng Battempola yang bernama La Sengeng.

Setelah masa lowongnya jabatan Arung Matoadi Wajo, La Mallalengeng atau La Cella Puangna (Puanna) Toappamadeng (1795–1817) diangkat sebagai Arung Matoa Wajo ke-36. Ia merupakan seorang penguasa yang bergiat memajukan agama Islam di negerinya. La Mallalengeng memerintahkan pendirian masjid-masjid baru dan memperbaiki yang telah rusak. Guru-guru agama diperintahkan mengajarkan cara membaca Alquran di tiap-tiap masjid serta surau. Setiap malam Jum'at harus diadakan pembacaan barzanji. Dengan demikian, terjadilah kebangkitan semangat keagamaan di Wajo.

La Mammang Toappamadeng Puangna Radenggallo (1821–1825) menjabat sebagai Arung Matoa Wajo ke-37. Ia merupakan pemimpin Wajo yang memajukan bidang pertanian sehingga kerajaan tersebut mengalami surplus bahan pangan. La Mammang memerintahkan penggalian saluran air di hilir Sungai Patila, namun kerajaan-kerajaan bawahan seperti Pammana, Gilireng, Paria, Rumpia, dan lain sebagainya tidak bersedia menaatinya karena menurut mereka hal tersebut bertentangan dengan adat kebiasan negeri-negeri vasal Wajo. Raja menjadi marah kepada para raja bawahan (*arung lili*) tersebut dan memutuskan agar mereka diberi hukuman denda atau diserang. Tetapi Ranreng Bettempola mengusulkan agar mereka cukup dinasihati. Sebelas hari kemudian, La Mammang terserang penyakit lumpuh dan terpaksa mengundurkan diri. Tidak berapa lama setelah peristiwa itu, Arung Matoa Wajo, La Mammang, mangkat. Ia lalu dianugerahi gelar anumerta MatinroE ri Empagana Mpelalengi Teppena (Yang Mati Dalam Usahanya dan Meninggalkan Kepercayaannya). Sepeninggal La Mammang, jabatan Arung Matoa Wajo kembali lowong antara 1825–1839.

Demi mengisi kekosongan jabatan Arung Matoa Wajo, diangkatlah La Paddengeng Puanna La Palaguna (1839–1845). Baru saja Arung Matoa Wajo ke-38 ini memangku jabatannya, terjadi perselisihan dengan dewan menterinya. Oleh

karenanya, La Paddengeng lantas menyingkir ke Pitumpanua. Waktu itu, dewan menteri dan rakyat Wajo terpecah menjadi dua golongan. Kelompok pertama menghendaki agar Arung Matoa Wajo itu dinasihati dan dipanggil pulang kembali. Tetapi kelompok yang lain berpendapat bahwa seorang *atung matoa* yang menyingkir ke luar daerahnya tanpa alasan jelas tak layak lagi dinasihati apalagi diundang pulang kembali ke negerinya. Pa Paddengeng tidak bersedia kembali ke Wajo dan terus berdiam di Kera hingga wafatnya. Itulah sebabnya, La Paddengeng dianugerahi gelar MatinroE ri Kera (Yang Wafat di Kera). Sesudah mangkatnya La Paddengeng, tidak ada lagi *arung matoa* di Wajo hingga 1854.

La Pawellangi Pajungparoe Datu ri Akkajeng (1854–1859) terpilih menjadi Arung MatoaWajo ke-39. Pada zamannya, Wajo terlibat perang saudara di Sidenreng antara Addatuang Sidenreng bernama La Panguriseng dengan saudara seayahnya, La Patongai Datu Lompulle, yang saling berebut kekuasaan. Wajo turun tangan membantu La Patongai karena ibunya adalah putri La Tebba Renrang Talo Tenreng, yang masih keturunan raja-raja Wajo. Setelah memerintah selama lima tahun, La Pawellangi mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh La Cincing.

Arung Matoa Wajo ke-40, La Cincing atau Akil Ali Karaeng Mangeppe Datu Pammana Pilla Wajo MatinroE ri Cappagalung (1859–1885) lebih banyak tinggal di Pare-Pare sehingga perhatiannya terhadap urusan pemerintahan di Wajo boleh dikatakan kurang. Akibatnya, kerap timbul perseteruan dan peperangan antara para pemuka masyarakat di Wajo. Sebagai contoh adalah perebutan kedudukan sebagai Ranreng Bettempola antara La Gau dengan sepupunya, La Mangkota Petta Pajung PunggaE. Masalah keamanan di Wajo juga makin gawat dengan merajalelanya kaum pencuri dan perampok sehingga kaum pedagang mulai hengkang dari sana. Beberapa kali, Arung EnnengngE (Dewan Menteri Wajo) berupaya mengundang kembali La Cincing, tetapi gagal. La Cincing mangkat pada 1885 di Cappagalung, Pare-Pare sehingga dianugerahi gelar anumerta MatinroE ri Cappagalung (Yang Mangkat di Cappagalung).

La Koro Arung Padali Batara Wajo (1885–1891) diangkat sebagai Arung Matoa Wajo ke-41 pada 15 Mei 1885. Ia menggelari dirinya Batara Wajo dan memerintah seperti raja-raja di Sulawesi Selatan lainnya, yang sesungguhnya bertentangan dengan konstitusi Wajo.[719] Pada 1888, datanglah utusan Belanda bernama Brugmen yang

719. Lihat *Wajo pada Abad XV–XVI: Suatu Penggalian Sejarah Terpendan Sulawesi Selatan dari Lontara*', halaman 10.

menyampaikan permintaan Gubernur Makassar agar Wajo menandatangani perjanjian persahabatan dengan Belanda. La Koro dan anggota Arung EnnengngE mulanya keberatan karena dengan disepakatinya perjanjian tersebut berarti rakyat Wajo turut pula menjadi sahabat Belanda. Namun, akhirnya perjanjian itu terpaksa ditandatangani juga, tetapi dengan catatan bahwa sifatnya hanya mengikat antar pribadi saja. Dengan kata lain, perjanjian itu hanya ditandatangani atas nama La Koro beserta para Arung EnnengngE, bukan atas nama seluruh rakyat Wajo.

Masih pada masa pemerintahan La Koro, Karaeng Popo–suami Sultana Fatima dari Bone–datang ke Wajo dan menuntut agar jabatan Ranreng Talotereng yang sedang kosong diserahkan kepada putrinya, Bau Sutera Daeng Bau. Kendati demikian, La Koro menolak tuntutan tersebut dengan alasan bahwa jabatan itu tak seharusnya diserahkan kepada orang luar. Penolakan ini mengakibatkan peperangan antara Wajo dan Bone. Pasukan Bone telah dikirim ke perbatasan Wajo, tetapi Gubernur Belanda di Makassar segera turun tangan menengahinya dan meminta agar Karaeng Popo menarik kembali pasukannya. Gubernur Belanda berpendapat bahwa pendirian Arung Matoa Wajo itu dapat dibenarkan.

Agar Wajo kembali aman, La Koro bertindak tegas terhadap para pencuri dan perampok yang mengganas di negerinya. Akibatnya, La Koro menjadi penguasa yang disegani oleh rakyat dan raja-raja tetangganya. Dalam bidang perdagangan, La Koro menerapkan monopoli terhadap berbagai hasil bumi, seperti pinang, tembakau, gula, garam, kemiri, dan lain sebagianya. Bidang pertahanan dan ketentaraan tak luput pula dari perhatiannya. La Koro mengangkat beberapa orang jenderal, kolonel, dan mayor yang masing-masing memimpin pasukannya, bahkan putra-putranya diperintahkan menjadi jenderal bagi pasukan Wajo. Sebagai contoh, La Pabeangi menjadi jenderal di Tancung, La Pattikkeng menjadi kolonel, La Poci menjadi jenderal di Gilireng, dan La Cakunu menjadi jenderal di Impakimpa.[720] Setelah memerintah selama kurang lebih enam tahun, La Koro mangkat pada 25 Mei 1891.

Sebagai pengganti La Koro, diangkatlah La Passamula Datu Lompule (1892–1897) sebagai Arung Matoa Wajo ke 42. Beberapa kalangan tak menyetujui pengangkatannya sebagai *arung matoa* sehingga ia tak dilantik secara resmi. Oleh karenanya, La Passamula lebih banyak berdiam di Batu-Batu, ibu kota Marioriwawo, di kawasan Soppeng. Sebelum diangkat sebagai Arung Matoa Wajo, La Passamula

720. Lihat *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 261.

memang menjabat sebagai Datu Marioriwawo. La Passamula dikenal sebagai *arung matoa* yang berhati sangat baik, penyabar, penyayang, dan murah hati, walau dianggap lemah oleh sebagian pihak. Ia menghapuskan monopoli penangkapan ikan di Danau Tempe yang pernah disahkan oleh La Koro. Menurutnya, penerapan monopoli semacam itu justru akan mempersempit mata pencaharian rakyat. Oleh karena sikap pemurahnya tersebut, ia merupakan Arung Matoa Wajo yang dicintai oleh rakyat maupun negara-negara tetangganya. La Passamula mangkat di Batu-Batu pada 17 Agustus 1897 dan memperoleh gelar anumerta MatinroE ri Batu-Batu (Yang Mangkat di Batu-Batu).

Sepeninggal La Passamula, jabatan Arung Matoa Wajo sempat kosong selama tiga tahun (1897–1900). Baru pada 11 Februari 1900, Ishak Manggabarani Karaeng Mangeppe (1900–1916) diangkat sebagai Arung Matoa Wajo ke-43. Ia adalah putra La Panguriseng, Addatuang Sidenreng. Arung Matoa Wajo Ishak Manggabarani Karaeng Mangeppe diangkat sebagai jenderal kehormatan oleh La Pawawoi Karaeng Sigeri, Raja Bone. Jabatan Arung Matoa Wajo kosong lagi antara 1916–1926. Kedudukan baru terisi kembali pada 22 Desember 1926 ketika La Tenri Oddang diangkat sebagai Arung Matoa Wajo ke- 44. Ia wafat pada 14 Januari 1933 di Sengkang. Selama 4 bulan berikutnya terjadi kekosongan Arung Matoa Wajo. Haji Andi Mangkona terpilih sebagai Arung Matoa Wajo ke-45 dan sekaligus terakhir pada 23 April 1933. Haji Andi Mangkona meletakkan jabatannya pada 21 November 1949.

f. Sistem Pemerintahan

Bentuk pemerintahan Kerajaan Wajo sesungguhnya adalah republik aristokratis.[721] Raja Wajo atau Arung Matoa Wajo adalah ketua republik yang tidak memerintah berdasarkan keturunan. Oleh karenanya, sistem pemerintahan Wajo tidak seperti kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pada umumnya. Arung Matoa Wajo dipilih di antara 40 orang pemuka negeri. Ia dapat pula dipecat ataupun diberhentikan oleh para pengikutnya. Dengan demikian, dasar-dasar prinsip demokrasi telah dikenal di Wajo. Dalam menjalankan pemerintahannya, Arung Matoa Wajo dibantu oleh suatu dewan menteri yang disebut Arung EnnengngE yang terdiri dari

- *Petta ranreng betteng pala (paddanreng benteng pola)*, yakni perdana menteri yang juga menjabat sebagai menteri kehakiman dan keamanan.

721. Lihat artikel *Manusia dan Kebudayaan Bugis–Makassar dan Kaili di Sulawesi*, karya Prof. Dr. H. A. Mattulada, yang dimuat dalam jurnal *Antropologi Indonesia* no. 48/ tahun XV/ Januari–April 1991, halaman 39.

- *Petta ranreng I tua (paddanreng tua)*, yakni menteri dalam negeri.
- *Petta ranreng (paddanreng) talo tenreng*, yakni menteri keuangan dan perekonomian.
- *Petta cakkuridi* (*bate lompo tua*) atau menteri luar negeri.
- *Petta pilla* (*bate lompo betteng polla*) atau menteri pertanian.
- *Petta pattola* (*bate lompo talo' tenreng*) atau menteri pertahanan.

Ketiga pejabat pertama dalam daftar di atas disebut *paddanreng* atau *ranreng* (bahasa Bugis berarti 'kembaran'). Mulanya, mereka bertiga merupakan wakil tiga kelompok kaum yang melambangkan mata pencaharian penduduk masa itu. *Paddanreng benteng pola* mewakili pertanian; *paddanreng talo tenreng* mewakili penyadap tuak, sedangkan nelayan diwakili *paddanreng tua*.[722]

Ketiga pejabat lainnya disebut *pabbate lompo* atau *batte lompo*. Bila dicermati, *cakkuridi* berarti kuning, *pilla* berarti merah, dan *pattola* berarti aneka warna. Oleh sebab itu, nama jabatan mereka itu mengacu pada warna panji atau *bate* masing-masing. Pejabat pemegang panji tersebut berfungsi pula sebagai para panglima perang Wajo. Masing-masing merupakan pendamping bagi *paddanreng*. *Petta cakkuridi* merupakan pendamping *paddanreng tua*, *petta pilla* mendampingi *paddanreng benteng pola*, dan *petta pattola* bertugas mendampingi *paddanreng talo tenreng.*[723] Keenam pejabat tinggi di atas bersama dengan Arung Matoa Wajo disebut Petta Wajo atau 'Pertuanan atas Tanah Wajo.' Selain itu, masih ada lagi satu dewan penasihat raja yang disebut Arung Suro ri Basa. Anggotanya terdiri dari 3 orang yang berasal dari tiga *wanua* (satuan wilayah) di Wajo. Tugasnya adalah menyampaikan kepada rakyat hasil pemufakatan dan perintah dari para *paddanreng*, menyampaikan perintah-perintah para *bate lompo*, serta menyampaikan hasil kesepakatan Petta Wajo.

Di bawah Petta Wajo, terhadap dewan yang disebut Arung Mabbicara yang beranggotakan tiga puluh orang, masing-masing 10 orang merupakan pendamping bagi tiga *paddanreng*. Dewan ini dapat disejajarkan dengan parlemen Wajo dengan tugasnya sebagai berikutnya.[724]

- ♦ Menetapkan hukum atau undang-undang (*maddette' bicara*).

---

722. Lihat *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*, halaman 145.
723. Lihat *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*, halaman 146.
724. Lihat artikel *Manusia dan Kebudayaan Bugis–Makassar dan Kaili di Sulawesi*, karya Prof. Dr. H. A. Mattulada, yang dimuat dalam jurnal *Antropologi Indonesia* no. 48/ tahun XV/ Januari–April 1991, halaman 39.

- Mengawasi, mengusulkan, serta menyampaikan tentang penyelenggaraan dan pelanggaran hukum-hukum guna ditangani oleh Petta Wajo (*mattena, mappano' pate' bicara*).

Dengan demikian secara keseluruhan dalam dewan pemerintahan Wajo duduk 40 orang dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama lembaga atau jabatan	Jumlah
1	*Arung matoa*	1
2	*Arung EnnengngE*	6
3	*Arung suro ri basa*	3
4	*Arung Mabbicara*	30
	Jumlah keseluruhan	40

Keempat puluh orang ini disebut Arung PattappuloE (Pertuanan 40 Orang) dan disebut juga Puang ri Wajo (Penguasa Tanah Wajo). Berdasarkan hukum adat Wajo (Ade' Tana), dinyatakan bahwa Puang ri Wajo inilah *Paoppang Pelengenggi Tana Wajo* atau 'Yang Menelungkupkan serta Menengadahkan Tanah Wajo.' Dengan kata lain, merekalah yang memangku kedaulatan Wajo.

Kerajaan Wajo dibagi menjadi berbagai *wanua* yang dikepalai seorang *paddanreng*. Ia membawahi *penggawa* atau *matoa* yang mengepalai perkampungan-perkampungan asal, yakni Majauleng, Sa'bangparu, dan Tekkalala'. Para *penggawa* kerap disebut pula sebagai *inanna tao maegaE* atau "induk dari orang banyak." Mereka merupakan pelaksana pemerintahan langsung atas rakyat Wajo dan menjadi jembatan antara Petta Wajo dengan raja-raja bawahan Wajo (*arung lili*).

Pada perkembangan selanjutnya, pemerintah kolonial Belanda menghapuskan lembaga Arung PattappuloE dan demikian pula dengan jabatan *arung mabbicara.*[725] Belanda memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada Arung Matoa Wajo, layaknya raja-raja lain di Kepulauan Nusantara. Jabatan *ranreng* dan *bate lompo* dijadikan pembantu *arung matoa* semata. *Arung matoa* sendiri berada di bawah kontrolir atau kepanjangan tangan pemerintah Belanda di Wajo.

725. Lihat *Wajo pada Abad XV–XVI: Suatu Penggalian Sejarah Terpendan Sulawesi Selatan dari Lontara*', halaman 10.

g. Sosial Kemasyarakatan

Rakyat Wajo merupakan pelaut dan pedagang yang andal. Semenjak negeri mereka dihancurkan oleh Arung Palakka pada 1670, banyak di antara rakyat Wajo yang merantau meninggalkan negeri mereka menuju Jawa, Bima, Sumbawa, Kalimantan, Malaka, Patani, Kamboja, dan lain sebagainya. Selain terkenal sebagai seorang wirausaha, orang Wajo gemar mempelajari ilmu pengetahuan dan hukum. Sebagai contoh, seorang tokoh bernama Amanna Gappa menyusun hukum pelayaran dan perdagangan pada kurang lebih abad 17, bahkan semasa pemerintahan La Salewangeng To Tenrirua telah dikenal pula semacam "koperasi" yang meminjamkan uang bagi para pedagang Wajo yang hendak berlayar ke luar daerahnya.[726]

h. Kesusastraan

Negeri Wajo juga banyak menghasilkan karya sastra berupa *lontarak* yang berisikan petuah-petuah berharga bagi kehidupan. *Lontarak-lontarak* ini juga ditulis dalam bahasa Bugis. Salah satu di antaranya berjudul *Lontara Attariolongnge ri Wajo*. Di dalamnya dapat dijumpai nasihat Paddanreng Madjadleng La Tenritau kepada putranya agar jangan sampai ia ditinggalkan oleh kecakapan. Adapun yang dimaksud dengan *kecakapan* adalah kata-kata yang lemah lembut, mulia dalam perilaku, hanya mengatakan kebenaran, menghormati sesama manusia, dan mengembangkan sikap rendah hati.[727]

Sumber sejarah Wajo lainnya yang sangat penting adalah *Lontarak Sukku'na Wajo'*. Menurut keterangan Andi' Makkaraka, sejarah penulisannya berawal pada masa pemerintahan Arung Matoa Wajo ke-34, La Mappajung Puanna Salowo (Salowong) Ranreng Tua (1764–1767). Ia memerintahkan La Sangaji Puanna La Sengngeng mengumpulkan berbagai *lontarak* yang berkaitan dengan sejarah Wajo.[728] Isi masing-masing *lontarak* itu terkadang tidak bersesuaian satu sama lain sehingga menimbulkan kesimpangsiuran. Suatu tim *pallontara'* yang bertugas menulis kembali versi resmi sejarah Wajo dibentuk di bawah pimpinan La Sangaji. Data-data yang bersesuaian satu sama lain diterima sebagai kebenaran. Apabila dijumpai ketidaksesuaian maka diadakan musyawarah demi mencapai mufakat. Di tengah proses ini jika perbedaan pendapat masih terjadi keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

726. Lihat *Wajo' Pada Abad XV–XVI*, halaman 9.
727. Lihat *Dinamika Bugis Makassar*, halaman 58.
728. Lihat *Wajo pada Abad XV–XVI: Suatu Penggalian Sejarah Terpendan Sulawesi Selatan dari Lontara'*, halaman 32.

Selain membandingkan dengan *lontarak* yang dijumpai di Wajo, dilakukan pula perbandingan terhadap naskah-naskah asal Bone, Luwu, Soppeng, Sidenreng, Tanete, Gowa, dan lain sebagainya.

Hasil akhir inilah yang dikenal sebagai *Lontarak Sukku'na Wajo'*. Setelah La Sangaji meninggal, isinya ditambahi oleh para *ranreng* Battempola berikutnya, seperti La Sengngeng, La Tompi, La Tune', La Gau', La Jamero', dan Andi' Makkaraka sehingga isinya makin lengkap. Oleh para pewarisnya, *lontarak* ini dipandang sangat berharga, bahkan Ranreng Bettempola bernama La Kile' pernah berkata kepada cucunya bahwa lebih baik harta bendanya dimakan api ketimbang naskah warisan leluhurnya itu.

Lontarak Sukku'na Wajo' mengandung pula prinsip hak asasi manusia. Menurut naskah tersebut, orang-orang Wajo pada hakikatnya merupakan pribadi-pribadi yang merdeka.[729] Rakyat tidak boleh dikekang kehendaknya ataupun dilarang mengeluarkan pendapat. Mereka tak boleh dilarang pergi ke manapun, baik ke utara, selatan, barat, maupun ke timur. Kendati demikian, mereka tak diperkenankan melanggar adat. Jelas sekali bahwa uraian di atas memperlihatkan adanya kebebasan berpendapat yang telah berlaku di Wajo.

Kerajaan-kerajaan Lain di Sulawesi Selatan

LAIKANG

Wilayah Kerajaan Laikang berpusat di Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Desa Cikoang sendiri konon didirikan oleh seorang *karaeng* dari Binamu. Ia membuka hutan di kawasan tersebut bersama dengan 44 orang pengikutnya. Sementara itu, di sebelah selatan pemukiman baru itu telah terdapat perkampungan lain bernama Laikang. Keduanya lantas bergabung menjadi satu.[730] Kurang lebih pada abad 16 dan 17, Laikang berkembang menjadi kerajaan kecil yang berdaulat dan mengangkat Makkasaung ri Langi' sebagai rajanya yang pertama. Konon, ia adalah putra Arumpone Petta PenggawaE, Raja Bone. Raja Makkasaung ri Langi' lantas menikah dengan putri Karaeng Punaga, salah seorang pemuka di Laikang. Pernikahan ini dikaruniai seorang putra bernama Daeng Ngilau yang menggantikan ayahnya. Pada kurang lebih abad 17, terdapat seorang ulama

729. Lihat *Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi Selatan*, halaman 131.
730. Lihat *Sayid-Jawi: Studi Kasus Jaringan Sosial Di Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar-Sulawesi Selatan,* halaman 17.

keturunan Nabi Muhammad yang berasal dari Hadramaut bernama Sayid Jalaluddin bin Muhammad Wahid al-Aidid. Ia ketika itu mengadakan perjalanan ke Kepulauan Nusantara dan singgah di Aceh. Di sana ia bertemu dengan dua orang muridnya yang berasal dari Cikoang, yakni Appeleka (Yang Pandai Menghafal) dan Seaha (Syeik). Kedua orang murid inilah yang meminta Sayid Jalaluddin pergi ke Cikoang.[731]

Dalam perjalanan ke Cikoang, mereka singgah terlebih dahulu di Kutai, Kalimantan. Di sana ia berjumpa dengan seorang bangsawan Gowa bernama Abdul Kadir Daeng Malliongi' yang ketika itu sedang dalam pelariannya karena melarikan seorang putri Kerajaan Gowa. Daeng Malliongi' lantas menjadi murid Sayid Jalaluddin dan menikahkan gurunya tersebut dengan putrinya, Yaccara' Daeng Tamami.[732]

Sayid Jalaluddin ingin menemui leluhur istrinya di Gowa sehingga ia mengunjungi Kerajaan Gowa. Ketika Raja Gowa mengetahui bahwa Sayid Jalaluddin merupakan menantu Daeng Malliongi', ia tidak diterima dengan baik sehingga meneruskan perjalanannya ke Cikoang.[733] Versi lain menyebutkan bahwa alasan tidak diterimanya Sayid Jalaluddin dengan baik di Gowa adalah karena ia menolak menyebutkan kebangsawanannya. Selain itu, masih terdapat anggapan lain bahwa perginya Sayid Jalaluddin ke Cikoang dikarenakan ia hendak menghindari perpecahan di kalangan umat Islam. Ketika itu, mazhab agama Islam yang berkembang di Gowa adalah mazhab Syafi'i, sedangkan Sayid Jalaluddin sendiri adalah penganut Syi'ah.[734]

Sementara itu, kedua orang siswa Sayid Jalaluddin, Appeleka dan Seaha, telah berhasil mengislamkan dua orang berpengaruh di Cikoang, I Bunrang dan I Danda. Oleh karenanya, mereka sangat berharap agar Sayid Jalaluddin dapat segera tiba di Cikoang. Konon, dalam perjalanannya dari Gowa ke Cikoang itu, Sayid Jalaluddin menggunakan tikar sembahyang sebagai perahunya. Saat itu, I Bunrang dan I Danda yang hadir menyambut Sayid Jalaluddin sedang mencari ikan. Sayid Jalaluddin mendekati mereka dan menanyakan perihal nama negeri tersebut. Namun, I Bunrang dan I Danda salah paham dan mengira bahwa Sayid Jalaluddin menanyakan nama ikan yang sedang mereka tangkap. Mereka lantas menjawab bahwa itu adalah "ikan ciko,"

731. Lihat *Sayid-Jawi: Studi Kasus Jaringan Sosial Di Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar-Sulawesi Selatan,* halaman 18.
732. Lihat *Sayid-Jawi: Studi Kasus Jaringan Sosial Di Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar-Sulawesi Selatan,* halaman 18.
733. Lihat *Sayid-Jawi: Studi Kasus Jaringan Sosial Di Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar-Sulawesi Selatan,* halaman 19.
734. Lihat *Sayid-Jawi: Studi Kasus Jaringan Sosial Di Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar-Sulawesi Selatan,* halaman 17.

yakni sejenis ikan laut berwarna kemerah-merahan. Sayid Jalaluddin lantas menyebut tempat tersebut sebagai Cikoang.[735] Demikianlah asal muasal nama Cikoang.

Pernikahan Sayid Jalaluddin dengan Yaccara' Daeng Tamami dikaruniai dua orang putra dan seorang putri yang bernama Sayid Umar (Tuanta Toaya), Sayid Sahabuddin (Tuanta Loloa), dan Syarifah Saharibanong (meninggal dunia sebelum dewasa).[736] Sayid Jalaluddin sendiri setelah 25 tahun berada di Cikoang meneruskan kegiatan penyebaran agamanya hingga ke Sumba dan wafat di sana. Sayid Sahabuddin berputra Sayid Sirajuddin, yang kemudian menikah dengan Ranjabilla Daeng Ti'no, putri Raja Laikang. Pernikahan ini dikarunai seorang putra bernama Sayid Muhammad Ja'far Shadik, yang kemudian menjadi Raja Laikang. Rangkaian raja-raja Laikang berikutnya secara berturut-turut adalah Al-Muhajir, Muhammad Patadang, Muhammad Athiullah, Muhammad Asshaffah, Parawansyah, dan Andi Lomba.[737] Pada 1905, Kerajaan Laikang dijadikan distrik yang menjadi bagian *afdeeling* Jeneponto-Takalar, dengan rajanya diangkat sebagai kepala distrik.[738]

G. KERAJAAN-KERAJAAN DI SULAWESI BARAT

Di kawasan Sulawesi Barat terdapat tujuh kerajaan beserta kesatuan adat yang tergabung dalam persekutuan Pitu Ba'bana Binanga dan Pitu Uluna Salu. Anggota Pitu Ba'bana Binanga adalah Banggae, Balanipa, Binuang, Mamuju, Pambuang, Sendana, dan Tappalang. Sementara itu, anggota Pitu Uluna Salu adalah Tabulahang, Rantebulahang, Aralle, Mambi, Matangnga, Tabang, dan Bambang.

I. BANGGAE (MAJENE)

Wilayah Kerajaan Banggae terletak di Kabupatan Majene dengan raja-rajanya yang bergelar *maradia*. Kerajaan ini pernah diperintah oleh Raja Daetta Melanto pada abad 16. Ia juga menghadiri Konferensi Tamajarra I di Balanipa (1580). Raja-raja lain yang pernah memerintah Banggae adalah Tomatindo di Pattinna, Tomatindo di Salassana, Tomappelei Musuna, Tomattole Ganranna, Tomappelei Pattujunna,

735. Lihat *Sayid-Jawi: Studi Kasus Jaringan Sosial Di Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar-Sulawesi Selatan,* halaman 19.

736. Lihat *Sayid-Jawi: Studi Kasus Jaringan Sosial Di Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar-Sulawesi Selatan,* halaman 20.

737. Lihat *Sayid-Jawi: Studi Kasus Jaringan Sosial Di Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar-Sulawesi Selatan,* Lampiran III.

738. Lihat *Sayid-Jawi: Studi Kasus Jaringan Sosial Di Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar-Sulawesi Selatan,* halaman 21.

Tomonge Alelanna, I Sama To Buku, La Tenribali Tomate Puabang (Tanrawalie–merangkap sebagai raja Balanipa, ±1850–1867), dan Sanggaria (1867–1874). Raja-raja Majene berikutnya menurut *Regeerings-Almanak* dari akhir abad 19 hingga awal masa pendudukan Jepang adalah Sang Kilang (1874–1889, disahkan kedudukannya pada 28 Februari 1875), Juwara (I Juwara, 1892–1907, dikukuhkan pada 27 Maret 1894), dan Rammang Patta Lolo (1907–1950, menerima pengesahan pada 26 Mei 1908). Maradia Majene yang disebutkan terakhir ini masih berkuasa pada masa awal kedatangan bala tentara Jepang.

II. BALANIPA

Wilayah Kerajaan Balanipa kini terletak di Kabupaten Polewali. Nama kerajaan ini berasal dari dua kata bahasa Mandar, yakni *bala* yang berarti 'arena' atau 'kandang' dan *nipa* yang berarti 'nipah.'[739] *Bala* sendiri sebenarnya adalah sebutan bagi gedung pengadilan di Kerajaan Banngae yang di dalamnya telah disediakan berbagai senjata tajam. Apabila kedua pihak yang bertikai tidak dapat atau tak bersedia lagi didamaikan maka mereka dipersilakan memilih senjata tajam dan akan diadu layaknya ayam sabungan dalam gedung tersebut. Tradisi ini berlangsung hingga masa pemerintahan Todilaling (I Mannyambungi) yang merupakan Raja Balanipa pertama. Todilaling adalah putra Puang di Gandang serta cucu Todiurra-urra; para penguasa di kawasan tersebut sebelum bertakhtanya Todilaling. Raja kedua Balanipa adalah putra Todilaling, Tomepayung. Asal muasal gelar Tomepayung ini dikarenakan ia adalah Raja Balanipa pertama yang dipayungi.

Semasa kekuasaannya, Kerajaan Balanipa mengalami kemajuan pesat dan wilayahnya makin luas. Berbagai kerajaan ditaklukkannya, seperti Passokorang, Langgo, Karombang, Sabura', Batu, Tapango Riso, Dakka, dan Belua.[740] Raja Tomepayung merupakan pelopor persekutuan dan kerjasama antar kerajaan di kawasan Sulawesi Barat melalui Konferensi Tamajarra I dan II. Ia merupakan pencetus pembentukan Pitu Babanna Binanga dan Pitu Ulunna Salu.

Selanjutnya, setelah Todilaling berlangsung 53 kali pergantian raja. Kendati demikian, menurut perhitungan penulis (lihat *Tambahan 1: Kronologi Raja-raja*

739. Lihat *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 30–31.
740. Keempat kerajaan taklukan yang pertama disebut Palili>na Pa>buttu, sedangkan empat berikutnya disebut Palilina Pabiring.

Nusantara Pascakeruntuhan Majapahit), silsilah raja-raja Balanipa baru berlangsung sejauh 13 generasi. Dengan demikian, apabila satu generasi disetarakan dengan 25 tahun maka Kerajaan Balanipa berusia kurang lebih 325 tahun. Namun, jikalau dihitung 30 tahun, kerajaan ini telah berlangsung sekitar 390 tahun. Berdasarkan perkiraan tersebut, Todilaling dapat dianggap mulai bertakhta pada akhir abad 16 atau awal abad 17.

III. BINUANG

Wilayah Kerajaan Binuang kini terletak di Kabupaten Polewali. Kerajaan Binuang pernah diperintah antara lain oleh Raja Ammasangeng si Payung Langi yang pada abad 16 menghadiri Konferensi Tamajarra I pada 1580, dan Daeng Malliyungang. Raja-raja Binuang berikutnya adalah Motawanging Daeng Mangiri yang menerima pengesahan dari pemerintah kolonial pada 14 Oktober 1867. Motawanging Daeng Mangiri memerintah ± 1850–± 1880; La Maga Daeng Silasa yang dikukuhkan kedudukannya oleh Belanda pada 9 Oktober 1889, ia memerintah ± 1888–1903); Majalengka (Majalekka) Daeng Patompo yang disahkan kedudukannya pada 7 Juni 1906, ia memerintah pada 1905–1917; La Pa Enrongi yang menandatangani *Korte Verklaring* pada 24 Juli 1919, ia memerintah pada 1918–1929; dan La Matulada Puanna Saleng yang disahkan pada 14 Februari 1931, ia memerintah pada 1930–1940-an. Raja Binuang yang disebutkan belakangan ini masih berkuasa menjelang kedatangan bala tentara Jepang.

IV. MAMUJU

Kerajaan Mamuju yang kini terletak di Kabupaten Mamuju, memiliki raja-raja yang bergelar *maradia*. Penguasa Mamuju pertama adalah Todipali, yang merupakan putra To Manurung ri Gowa dengan To Manurung ri Warran. Ia kemudian digantikan oleh Tomojammeng selaku Maradia Mamuju kedua. Ia mewakili Mamuju saat berlangsungnya Konferensi Tamajjara pada 1580. Konferensi ini dilangsungkan di Balanipa atas prakarsa Tomepayung, Raja Balanipa. Kurang lebih pada 1575, Tomojammeng berangkat ke Gowa bersama ayah dan ibunya guna menghadiri undangan pernikahan Raja Tunijallo dari Gowa. Pada kesempatan tersebut, Tomojammeng berjumpa dengan putri Raja Badung, Bali. Selanjutnya, ia dinikahkan dengan putri tersebut dan melangsungkan pernikahannya di Badung.

Pernikahan ini membuahkan seorang anak bernama I Salarang, yang kelak menjadi raja di Pambuang. Saat anak itu menginjak usia tujuh tahun, terjadilah perselisihan antara Tomojammeng dengan istrinya sehingga putri Raja Badung tersebut kembali ke negerinya dengan membawa serta putranya. Sebelum berpisah dengan anaknya, Tomojammeng mencari tanda-tanda fisik khusus pada tubuhnya agar kelak mudah mengenalinya lagi. Selain itu, ia menyerahkan sarung keris kepada anaknya, sedangkan kerisnya ia sendiri yang menyimpannya. Dengan demikan, orang akan tanpa kesulitan mengenalnya bila kembali ke Tanah Mandar. Tomojammeng kemudian digantikan oleh Malindo di Sambajanga dan Tomatindo di Puasana.

Raja-raja Mamuju berikutnya adalah Kunjung Baram, Pura Purabue (Matindo di Buttupaja), Puatta Masaile, Ana Puatta Karema, Ammana Kombi, Tomappelei Kasu ditana (Tomappelai Asugianna), Panre, Nai Latang (± 1850–1862), dan Abdul Rahman Nae Syukur (1862–1895). Perlawanan terhadap kolonialisme di Mamuju dipimpin oleh Penggawa Malolo, salah seorang bangsawan yang anti-Belanda. Kendati demikian, Raja Mamuju saat itu, Maraddika Puaq Aji tidak menyetujui perlawanan tersebut dan membujuk Penggawa Malolo agar bersedia bekerja sama dengan Belanda. Tetapi upaya ini gagal karena Penggawa Malolo tetap bersiteguh pada pendiriannya. Raja mencari akal lain dengan cara menikahkah adiknya, Ammana Andang, dengan adik Penggawa Malolo. Tujuannya agar Ammana Andang dapat memengaruhi Penggawa Malolo. Seperti sebelumnya, cara ini juga tak berhasil mengubah ketetapan hati bangsawan Mamuju tersebut, bahkan Ammana Andang malah turut memusuhi Belanda.

Peperangan antara Penggawa Malolo dengan Belanda akhirnya berkobar. Pasukan Penggawa Malolo bertahan di Benteng Kassaq. Guna memadamkan pemberontakan ini, Belanda meminta bantuan Raja Mamuju dan kemudian bersama-sama melancarkan serangan ke Kassaq. Pada mulanya, Belanda tidak mengetahui lokasi Benteng Kassaq. Namun, setelah ada keluarga kerajaan yang membocorkan letaknya, barulah serbuan dapat dilancarkan. Di tengah-tengah pertempuran yang berkecamuk, Ammada Andang tertembak, tetapi berhasil dilarikan dan disembunyikan di bawah sebatang pohon besar. Penggawa Malolo maju dan menembaki serdadu Belanda. Salah seorang di antara mereka, G Burberman, tewas oleh peluru Penggawa Malolo. Meskipun demikian, tak lama kemudian Penggawa Malolo terkena tembakan musuh dan gugur dalam pertempuran tersebut.

Raja Abdul Rahman Nae Syukur menerima pengesahan dari pemerintah Belanda pada 3 Februari 1864. Ia juga merangkap menjadi Raja Tappalang, yang dikukuhkan kedudukannya pada 18 April 1868. Ia digantikan secara berturut-turut oleh Karanene (1895–1908, disahkan pada 4 Januari 1897). Penggantinya adalah Jalalu Amana Inda (1908–1950-an, dikukuhkan kedudukannya oleh pemerintah kolonial pada 14 Juli 1910) yang masih berkuasa menjelang kedatangan bala tentara Jepang.

V. PAMBUANG

Kerajaan Pambuang, wilayahnya kini terletak di Kabupaten Majene, dengan raja-rajanya yang begelar *maradia*. Raja pertama Pambuang adalah Tomerora Saba. Ia digantikan oleh Daeng Palewa Tomelake (Tomelaki Bulawan), yang merupakan wakil Pambuang dalam Konferensi Tamajarra I (1580) di Balanipa. Pengganti Daeng Palewa Tomelake adalah Daetta Risappu. I Salarang, putra Tomojammeng (Maradia Mamuju ke-2) dengan seorang putri Badung pernah menjadi raja di Pambuang. Pada masanya, agama Islam tersiar di kerajaan ini. Setelah mangkat, I Salarang dianugerahi gelar anumerta Tomatindo di Agamana.[741] Kerajaan Pambuang selanjutnya diperintah oleh Raja Tomassawe dikappai, Tomatindo di Wata, Tomepajung Patola, Kapuang, Puanna I Aso, Pagandang, I Jatilabalu Malotong, dan Madusila.

Maradia-maradia Pambuang berikutnya hingga menjelang masa kedatangan bala tentara Jepang adalah Saeni, Jalangkara, Madusila (pemerintahan kedua), Anranata (1866–1888), I Latta (1888–1907), Simanagi Pakarama (Simanange, 1907–1921), Andi Batara (1921–1934), dan Tonra Lipu (1935–1952). Raja La Pasau menurut *Regeerings-Almanak* tercatat menerima pengesahan dari pemerintah kolonial pada 29 Agustus 1862 dan 23 Agustus 1869. I Latta disahkan kedudukannya pada 27 Maret 1894. Simangi Pakaranga dikukuhkan kedudukannya sebagai pengganti I Latta pada 26 Mei 1908. Tonra Lipu, penerus sah I Latta, masih kanak-kanak maka sebagai wali Raja Pambuang diangkatlah Andi Batara. Ia menerima pengesahan pada 28 April 1922.

VI. SENDANA (CENRANA)

Kerajaan Sendana terletak di Kabupaten Majene kini. Raja-raja kerajaan ini bergelar *maradia*. Penguasa pertama Cenrana adalah Tonalarung Mangiwang. Ia digantikan oleh Raja Puatta I Kubur pada abad 16, yang menghadiri Konferensi

---

741. Lihat *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 484.

Tamajarra I di Balanipa; Puatta I Battayanna; Puatta I Naung Luyo; Tomatindo di Puasana; Tomeluang Cera; Puatta I Pappalang; Kunjung Barani; Tomatindo di Bembaga; Pakkatiting Puanna I Bakku; Tomaling; Paccalo-calo; dan Todiallung di Sirua. Raja Tomatindo di Balitung menggantikan ayahnya, Todiallung di Sirua, pada 1730. Setelah menjadi Raja Sendana, Tomatindo di Balitung dengan disertai para pengawalnya berlayar ke Pulau Belitung. Tujuannya adalah menjalin persahabatan dengan kerajaan di pulau tersebut. Sebelumnya, Maradia Sendana ini mendengar perihal kerajaan tersebut dari para pedagang yang kerap berniaga ke Singapura. Tomatindo di Balitung sempat membantu Kerajaan Belitung memadamkan pemberontakan yang terjadi di sana. Selain itu, ia berjasa pula menumpas kaum perompak yang kerap merajalela di perairan Selat Malaka.

Raja-raja yang berkuasa setelah Tomatindo di Balitung adalah Arajang Matua, Tomatindo di Tigas, Tomappelei Ganrananna, Jalangkara, Samani, Mangamang (I Notto (± 1850–± 1865), dan I Sabu. Raja berikutnya, La Pasau (1865–1883) tercatat memperoleh pengesahan dari pemerintah kolonial pada 14 Oktober 1865. Ia digantikan oleh Raja Tandiwali[742] (1885–1889), yang digantikan oleh salah seorang istrinya, I Merette (1889–1896). Raja wanita Cenrana ini disahkan kedudukannya pada 27 Maret 1894. Para penguasa Cenrana selanjutnya adalah La Galigu (1896–1901, disahkan kedudukannya pada 4 Januari 1897); I Rukalumu (1901–1907, disahkan pada 2 Juli 1903); Pagiling (1907–1917, disahkan kedudukannya pada 1 April 1908); dan PawelaE (1917–1949, dikukuhkan kedudukannya pada 8 Mei 1919).

VII. TAPPALANG

Wilayah Kerajaan Tappalang terletak di Kabupaten Mamuju. Kerajaan Tappalang pernah diperintah oleh Raja Puatta Karanamo, yang menghadiri Konferensi Tamajarra I di Balanipa, Gunung, Tomappelai Asugianna (merangkap pula sebagai Maradia Mamuju); Nae Latang; dan Tomanggung Gagallang Patta ri Malunda. Penguasa Tappalang berikutnya adalah Raja Abdul Rahman Nae Syukur (1867–1889) dari Mamuju yang pernah merangkap menjadi Maradia Tappalang. Ia dikukuhkan kedudukannya pada 18 April 1868. Raja Abdul Rahman Nae Syukur digantikan oleh Pabannari Daenna Tonga (1889–1892), Andi Musu Paduwa Limba (disahkan

742. Lihat *http://www.guide2womenleaders.com/womeninpower/Womeninpower1870.htm* (diunduh pada 24 September 2009).

27 Maret 1894, memerintah 1892–1908), Bustari Patana Lantang (disahkan 31 Desember 1908, memerintah 1908–1937), dan Abdul Hafid (disahkan tanggal 17 Juni 1937, memerintah 1937–1950-an). Semasa pemerintahan Abdul Hafid, kekuasaan pemerintah kolonial Belanda digantikan oleh bala tentara Jepang.

H. KERAJAAN-KERAJAAN DI SULAWESI TENGGARA

I. BUTON (WOLIO)

a. Cikal Bakal Kerajaan Buton

Sejarah Buton diawali dengan pendaratan rombongan dari Semenanjung Johor yang dipimpin oleh Sipanjonga beserta pengikut-pengikutnya[743] pada akhir abad 13 atau awal abad 14. Konon, Sipanjonga mengenakan pakaian yang serba indah layaknya seorang raja beserta rakyatnya, ia tidak tampak sebagai pedagang biasa. Para pengikut-pengikut utama Sipanjonga adalah Sitamajo, Sijawangkati, dan Simalui. Keempat orang ini kelak disebut Mia Patamiana (para pemuka adat Buton [*siolimbona*]). Pendaratan ini terjadi dalam dua kelompok. Yang pertama, Sipanjonga dan Simalui beserta pengikutnya mendarat di Kalampa (kini Desa Katobengke, Kecamatan Wolio). Sedangkan, Sitamanjo dan Sijawangkati mendarat di Walalogusi. Setelah memulai pendaratannya, Sipajonga mengibarkan bendera kebesarannya yang dikenal sebagai *sula*. Bendera tersebut kemudian menjadi lambang kebesaran sultan-sultan Buton hingga sekarang.

Kaum pendatang ini membuka tempat kediaman yang makin besar dan ramai. Gangguan utama yang mereka hadapi waktu itu adalah serangan bajak laut Tobelo. Begitu menakutkannya para perompak ini sehingga orang tua kerap menakut-nakuti anaknya dengan menyebutkan nama mereka. Demi menghindari kaum perompak, Sipanjonga memindahkan pemukiman dari Kalampa ke arah gunung yang terletak sekitar 5 km dari pantai. Kawasan tersebut masih terdiri dari hutan belukar sehingga demi membangun areal pemukiman baru mereka harus menebasnya. Kegiatan ini dalam bahasa Buton disebut *welia*, yang menjadi asal muasal nama Wolio.

Perkampungan yang mereka bangun menjadi makin luas dan berkembang pesat menjadi dua perkampungan, yakni Gundu-Gundu dan Barangkatopa. Sitamanajo diangkat sebagai kepala kampung Barangkatopa dengan gelar *bonto* atau menteri. Sementara itu, Sijawangkati diangkat sebagai pemimpin masyarakat kampung Gundu-

743. Lihat *Sejarah dan Adat FIY Darul Butuni (Buton) I*, halaman 26.

Gundu. Bersamaan dengan itu, Raja Tobe-Tobe bernama Dungkungcangia bergabung dengan mereka sehingga Wolio menjadi bertambah luas.

Sipanjonga menikahi saudari Simalui yang bernama Sibaana dan memperoleh seorang putra bernama Betoambari. Suatu ketika, dalam perjalanannya Betoambari tiba di negeri Kamaru. Kebetulan Waguntu, anak kepala suku negeri Kamaru, belum menikah. Betoambari jatuh cinta dan menikah dengannya. Mereka dikaruniai seorang putra bernama Sangariarana. Melalui pernikahan ini Kamaru dengan Wolio bersatu. Belakangan terbentuk lagi dua kampung, yakni Peropa dan Baluwu. Sebagai kepala bagi Peropa diangkatlah Betoambari. Sementara itu, Sangariarana diangkat sebagai kepala kampung Baluwu. Sama dengan kedua kepala kampung sebelumnya, Betoambari dan Sangariarana menduduki jabatan setingkat *bonto* (menteri). Kini terdapat empat *bonto*, yang disebut *patalimbona*. Kelak di antara mereka yang memegang kedudukan terpenting selaku penasihat adalah Betoambari dan Sangariarana. Semasa pemerintahan Raja Buton ke-3, jumlah para *bonto* menjadi sembilan sehingga disebut *siolimbona*. Para *bonto* di atas membentuk dewan adat atau menteri dan memegang peranan penting dalam memilih serta mengangkat Sultan Buton maupun menteri-menteri lainnya.

Hingga masa itu belum ada raja di Buton. Suatu kali seorang pemburu rusa bernama Sangia Langkuru sedang pergi berburu dengan anjingnya. Anehnya, sewaktu tiba di depan buluh bambu yang terletak di bukit Lelemangura, anjing milik Sangia Langkuru terus menerus menggonggong. Sang pemburu rusa itu mengira bahwa anjingnya sedang menyerang seekor rusa dan segera menyusulnya. Betapa kecewa dan herannya Sangia Langkuru begitu mendapati bahwa yang digonggongi anjingnya hanyalah buluh bambu. Ia lantas menjumpai seorang ahli nujum yang menyatakan bahwa di dalam buluh tersebut ada manusia. Benarlah sewaktu buluh bambu dibelah, keluar seorang gadis yang diberi nama Wa Kaa Kaa.

Putri yang keluar dari bambu ini kelak diangkat sebagai Ratu Buton pertama dan menikah dengan seorang bangsawan dari Majapahit bernama Sibatara. Dari pernikahan antara Wa Kaa Kaa dan Sibatara lahirlah seorang putri bernama Bulawambona. Ia menggantikan ibunya sebagai Ratu Buton ke-2. Bulawambona pernah berpesan kepada para menterinya agar di atas makamnya dinyalakan lampu setiap malam. Tidak diketahui mengapa ia berpesan demikian. Bulawambona menikah dengan La Baluwu dan dikaruniai seorang putra bernama Bancapatola.

Sepeninggal ibunya, Bancapatola diangkat sebagai Raja Buton ke-3. Karena merupakan cucu Sibatara yang berasal dari Majapahit, Bancapatola mengadakan perjalanan ke Jawa, ke tempat leluhurnya. Namun, kendati telah menerangkan asal muasal keturunannya, tetapi Raja Majapahit tak bersedia mengakui Bancapatola sebagai kerabatnya. Oleh karena itu, Bancapatola berkata bahwa apabila ia bukan keturunan ataupun kerabat Majapahit, tanah yang didudukinya akan turun ke bawah. Sebaliknya, jika memang benar bahwa ia keturunan kerajaan besar tersebut, tanah yang didudukinya akan terangkat ke atas. Begitu selesai mengucapkan kata-kata semacam itu, Bancapatola memukul tanah yang ada di sekitar tempat duduknya. Ternyata tanah yang didudukinya itu terangkat hingga tingginya hampir menyamai singgasana Raja Majapahit. Berkat keajaiban ini, diterimalah Bancapatola sebagai kerabat Majapahit dan dianugerahi nama Batara Guru.

Batara Guru menikah dengan putri Dungkungcangia yang bernama Waeluncugi dan dianugerahi tiga orang putra, yakni Tuamaruju, Rajamanguntu, dan Tuarade. Sementara itu, dari selirnya ia memperoleh seorang putra bernama Kiyjula. Tuamaruju dan Rajamanguntu meninggalkan Wolio dan berhasil memasukkan negeri Todanga, Batauga, dan Wawoangi ke dalam kekuasaan Wolio tanpa pertumpahan darah. Adik mereka, Tuarade, kemudian diangkat sebagai Raja Buton ke-4 menggantikan ayahnya.

Tuarade mengadakan kunjungan ke Majapahit dan disambut dengan baik di sana, bahkan sepulangnya dari Jawa, ia membawa serta benda-benda yang kelak menjadi pusaka Kerajaan Buton, yakni payung kain, permadani, *gambi i-soda*, dan *somba* atau sembah,[744] keempat benda ini dinamai *Syara Jawa*. Menurut catatan kaki nomor 4 dan 5 pada buku *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton) I*, halaman 41 disebutkan bahwa Tuarade bukanlah nama sebenarnya, tetapi berasal dari kata "tuan" dan "raden" yang menunjukkan pengaruh Jawa. Nama ini dimaksudkan sebagai gelar kehormatan baginya. Karena Tuarade yang membawa *Syara Jawa* maka ia terkenal pula dengan sebutan Sangia i-syara Jawa. Peristiwa penting lain yang berlaku semasa pemerintahan Tuarade adalah ditetapkannya sumber penghasilan bagi raja, yakni perahu yang pecah atau terdampar di pantai Buton (seperti hukum Tawan Karang di Bali), barang yang hanyut dan dipungut oleh rakyat (disebut *rampe*), hasil laut (*ambara*), serta ikan besar yang sanggup dipikul oleh dua orang. Raja Buton keempat

744. Lihat *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton) I*, halaman 41.

ini tak mempunyai keturunan sehingga ia mengangkat kemenakannya yang bernama RajamulaE sebagai anaknya.

RajamulaE naik takhta sebagai Raja Buton ke-5. Pada zamannya, rakyat Buton dikatakan hidup makmur. Karena itu, ia digelari Sangia I Gola (Keramat yang Manis). Rakyat berbondong-bondong memberikan hadiah baginya dan karena pemberian tersebut telah terlampau banyak tak diketahui lagi darimana sumbernya. Raja kemudian menetapkan seorang petugas khusus guna mengurusi pemberian-pemberian tersebut. Lama kelamaan hadiah yang diberikan secara sukarela ini menjadi kewajiban bagi rakyat dan disebut *weti* (upeti). Rakyat suatu kampung diwajibkan menyerahkan *weti* ini setiap tahun setelah berlangsungnya panen. Besarnya tidak ditentukan secara pasti dan disesusaikan dengan kondisi masing-masing kampung. Seorang pejabat bernama *tunggu weti* lalu diangkat untuk menangani masalah *weti* ini. Buton menjalin hubungan yang baik dengan Kerajaan Luwuk dan para petani Luwuk didatangkan di Buton guna mengajarkan cara-cara bercocok tanam padi.

Kerajaan Buton mengikat hubungan kekeluargaan dengan Muna. Putri RajamulaE yang bernama Wa Tampaidonga (Borokomalanga) dinikahkan dengan Lakilaponto, putra Raja Sugimanuru dari Muna. Waktu itu, kampung Bonena Tobungku diduduki oleh perampok berilmu tinggi yang konon hanya memiliki sebuah mata di keningnya. RajamulaE mengeluarkan sayembara barangsiapa yang sanggup mengalahkan penjahat tersebut akan dinikahkan dengan putrinya. Ternyata yang memenangkan sayembara ini adalah Lakilaponto.

b. Perkembangan Kerajaan Buton

Lakilaponto (1491–1537) atau menantu RajamulaE ini menjadi Raja Buton berikutnya. Bersamaan dengan era pemerintahannya, datanglah seorang ulama bernama Abdul Wahid yang membawa agama Islam ke Buton. Lakilaponto menganut agama Islam pada 1511 dan selanjutnya digelari Sultan Kaimuddin. Dengan demikian, ia adalah Sultan Buton pertama. Sesudah menganut agama Islam, Sultan Kaimuddin menyesuaikan adat di kerajaan dengan hukum Islam. Ia berpegang pada semboyan sebagai berikut yang menjadi landasannya dalam memerintah negerinya.[745]

Bolimo arataa somanamo karo
Bolimo karo somanamo lipu
Bolimo lipu somanamo agama

745. *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton) I*, halaman 54.

yang artinya

Tiada perlu harta asalkan diri selamat

Tiada perlu diri asalkan negeri aman damai

Tiada perlu negeri asalkan agama tetap hidup di tengah-tengah masyarakat.

Sultan Kaimuddin mangkat pada 1537 dan selanjutnya dianugerahi gelar Murhum. Jenazahnya dimakamkan di Bukit Lelemangura dalam lingkungan benteng istana.

La Tumparasi (1545–1552) menggantikan Sultan Kaimuddin sebagai Sultan Buton ke-2. Ia kemudian dianugerahi gelar anumerta Mosabuna I Boleka (Yang Kemudian Berdiam di Boleka). Pengganti Sultan La Tumparasi adalah saudaranya, La Sangaji (1566–1570). Semasa pemerintahannya, hujan tidak turun sehingga rakyat mengalami kegagalan panen dan terancam bahaya kelaparan. Oleh karenanya, Sultan Sangaji dianugerahi gelar anumerta Mangkekuna (Kering), yang dimaksud tentunya adalah "keringnya hasil pertanian rakyat."

Sultan Buton berikutnya adalah La Elangi (1578–1615) yang juga dikenal sebagai Sultan Dayanu Ikshanuddin. Pada masa kekuasaan Sultan Buton ke-4 ini ditetapkanlah undang-undang Kerajaan Buton yang dikenal sebagai *Martabat Tujuh* (1610). Dalam penyusunannya, ia dibantu oleh Syarif Muhammad, seorang pakar keagamaan berkebangsaan Arab. Selain itu, jabatan *tunggu weti* dihapuskan dan dimunculkan suatu jabatan baru bernama *bontogena* (menteri besar). Fungsi pejabat ini adalah sebagai pemuka bagi menteri-menteri lainnya. Ada dua orang menteri besar yang diangkat, yakni Lalaja yang menduduki jabatan Menteri Besar Matanayo dan Lumane Ogena selaku Menteri Besar Sapanayo. Tujuan pengadaan jabatan-jabatan baru dimaksudkan demi meningkatkan pengawasan keuangan kerajaan. Dalam bidang pertahanan, sultan menciptakan jabatan *kapitaraja* atau *kapitalao*. Fungsinya adalah sebagai pemimpin kemiliteran.

Peristiwa penting lain yang berlaku pada zaman Sultan Dayanu Ikshanuddin adalah ditetapkannya tiga golongan bangsawan, yakni Tanailandu, Tapi-Tapi, dan Kumbewaha. Kesepakatan ini dibuat antara sultan dengan dua orang kerabatnya, La Singga dan La Bula. Sultan Dayanu Ikshanuddin sendiri mewakili golongan Tanailandu, La Singga merupakan wakil golongan Tapi-Tapi, dan La Bula mewakili

Kumbewaha. Nama bagi golongan-golongan ini didasari oleh tempat kediaman mereka. Silsilah masing-masing golongan akan ditampilkan dalam diagram berikut ini.
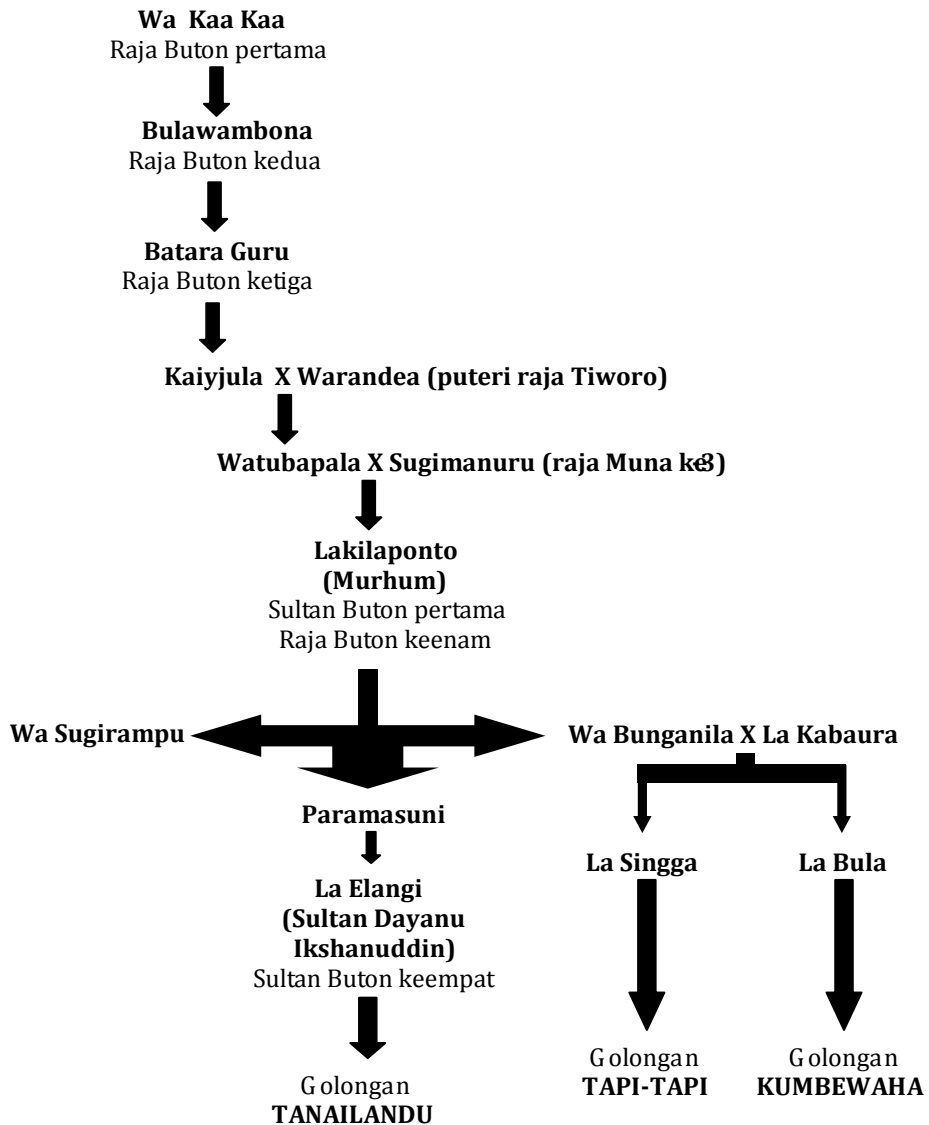
Ketiga golongan ini disebut *kamboru-mboru talupalena* dan semuanya sepakat bahwa sultan-sultan Buton berikutnya akan dijabat secara bergantian oleh mereka. Namun, pada kenyataannya pergantian ini tidaklah berjalan mulus sehingga menimbulkan intrik-intrik di antara ketiga kaum bangsawan tersebut.

Sultan Dayanu Ikshanuddin mengadakan perjanjian dengan VOC yang diwakili oleh Apollonius Scotte pada 5 Januari 1613. Berdasarkan perjanjian tersebut, VOC akan membantu Buton apabila diserang kerajaan lain atau saat mengalami pergolakan internal. VOC berjanji tak akan mengganggu atau menyulitkan raja berserta rakyat Buton, terutama dalam menjalankan agamanya. Sementara itu, Sultan Buton berjanji pula akan turut memerangi musuh-musuh VOC. Selain itu, orang-orang Belanda akan dibebaskan dari pembayaran bea masuk serta memberi kesempatan bagi mereka berdagang secara bebas di Buton. Setelah memerintah selama kurang lebih 34 tahun, Sultan Dayanu Ikshanuddin mangkat pada 1615. Ia dianugerahi gelar anumerta Mobolina Pauna (Yang Meninggalkan Payung Kebesarannya).

Singgasana Buton kemudian beralih kepada putra Sultan Dayanu Ikshanuddin, La Balawo (1617–1619), yang selanjutnya bergelar Sultan Abdul Wahab. Sultan Buton ke-5 ini dengan demikian termasuk dalam golongan bangsawan Tanailandu. Ia memiliki kegemaran menyabung ayam dan bahkan ketika para pejabat menghadap guna menyampaikan hasil keputusan mereka, sultan sedang sibuk dengan kesenangannya tersebut. Hal ini kurang disenangi para pemuka kerajaan dan dianggap sebagai kelemahan sultan. Oleh karenanya, Sultan Abdul Wahab kemudian diturunkan dari jabatannya. Setelah itu, sultan berdiam di kampung Watole Kamaru dan setelah wafat ia disebut Sangia Watole (Keramat di Watole).

La Buke diangkat sebagai Sultan Buton ke-6 menggantikan Abdul Wahab. Gelarnya adalah Sultan Gafurul Waduudu (1632–1645). Ia merupakan putra La Bula sehingga termasuk dalam golongan Kumbewaha. Sebelum dinobatkan sebagai Sultan Buton, ia menjabat sebagai *sapati*. Ketika jabatan sultan lowong cukup lama setelah Sultan Abdul Wahab diturunkan dari kedudukannya, La Buke beperan sebagai wakil sultan. Pada masa itu, keadaan Buton cukup genting karena terancam oleh para perompak dan VOC. Kekacauan masih ditambah dengan serbuan Gowa pada 1626. Di tengah-tengah kondisi kacau ini, La Buke dinobatkan sebagai sultan setelah mengalahkan para penentangnya.

Guna mengatasi masalah keamanan di Buton, sultan memerintahkan pembangunan benteng yang diawali pada 1634. Pembangunan benteng ini berlangsung selama 10 tahun dan menguras sumber daya rakyat Buton, bahkan sultan menggunakan hartanya sendiri demi kepentingan proyek tersebut. Karena tenaga mereka dikerahkan untuk membangun benteng, rakyat mengeluh tak sempat

lagi berkebun. Keluhan rakyat ini terdengar oleh para pemuka Kesultanan Buton sehingga mereka sepakat hendak menurunkan La Buke dari singgasananya. Saat ditemui para pemuka kerajaan, sultan menyampaikan agar pemecatannya ditunda hingga selesainya pembangunan benteng. Apabila benteng telah selesai dikerjakan, ia akan mengundurkan diri dengan sukarela. Demikianlah, setelah benteng sepanjang 2.400 kilometer itu selesai pada 1645, Sultan Gafurul Waduudu mengundurkan dirinya sesuai janji. Barang-barang pusaka kerajaan kemudian diserahkan kepada *sapati* kerajaan yang saat itu dijabat oleh Sapararagu. Sultan Buton ini dihormati karena memegang teguh janjinya dan ternyata benteng yang dibangunnya memang terbukti sanggup memberikan perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan rakyat.

Sultan Buton ke-7 adalah Saparagau (Kopogaana Pauna atau Sangia I Wawoangi), yang memerintah kurang lebih setahun (1645–1646). Ia merupakan putra La Galunga Kokoburuna I Wawoangi. Sebelum menduduki jabatan sebagai sultan, ia menjabat sebagai *sapati* yang dengan tugas menjaga alat-alat kelengkapan dan kebesaran seorang sultan sebelum diserahkan kepada raja yang baru. Saparagau berasal dari kaum Tanailandu, yang mendesaknya agar jangan menyerahkan pusaka kesultanan yang dipercayakan kepadanya dan mengangkat dirinya sendiri sebagai sultan Buton. Ini merupakan upaya kaum Tanailandu agar jabatan sultan kembali pada garis keturunan mereka (sultan sebelumnya–Gafurul Waduudu–berasal dari kaum Kumbewaha). Pada mulanya, Saparagau tidak bersedia menuruti kehendak kaumnya tersebut, tetapi kaum Tanailandu mengancamnya dengan menyatakan bahwa bila Saparagau menyerahkan kembali pusaka tersebut kepada orang lain maka mereka akan merebutnya kembali dengan kekerasan. Demi menghindari pertumpahan darah, Saparagau setuju menjadi sultan. Meskipun prosedur pengangkatannya yang tak sesuai kelaziman, ia tidak dinobatkan secara adat. Saparagau wafat pada 1646 dan dimakamkan di kampung Wawoangi. Selanjutnya, untuk menjaga agar seorang *sapati* tidak mengambil alih pusaka dan kelengkapan sultan bagi dirinya sendiri, benda-benda tersebut kini dipercayakan pada menteri *peropa* dan *baluru* hingga tiba saatnya diserahkan kepada sultan yang baru.

Sultan Buton ke-8, La Cila, dinobatkan dengan gelar Sultan Mardan Ali (1647–1654). Ia adalah putra Sultan Dayanu Ikhsanuddin dan masih bersaudara dengan Sultan Abdul Wahab, Sangia Lalabawa, La Sinuru, serta La Tumpanama

(kelak menjadi Sultan Buton ke-12). Konon, semasa kecil ia pernah sakit keras dan hampir meninggal. Tetapi berkat kesaktian seorang tokoh bernama Abdul Mojina, La Cila berhasil disembuhkan dari penyakit yang nyaris mendatangkan maut tersebut. Menurut salah satu versi, penyakit La Cila dapat dipindahkan pada seekor ayam. Proses penyembuhannya dengan mengikatkan seutas benang pada kaki ayam itu dan ujung satunya dimasukkan ke lubang hidung La Cila. Tidak lama setelah itu, La Cila sadar kembali, sedangkan ayamnya mati seketika. Versi lain menyatakan bahwa bukan ayam yang dipergunakan melainkan salah seorang budak sultan.

Belakangan, Sultan La Cila kerap melanggar adat dan agama sehingga beberapa orang bangsawan sering mengadakan rapat rahasia yang dipimpin oleh Sapati La Menempa (juga disebut Sapati Kapolingku atau Kapolingku saja) guna menyingkirkan sultan. Penghalang utama mereka adalah kemenakan Sultan La Cila bernama Kapitaraja yang saat itu masih kuat kedudukannya. Oleh karenanya, dirancanglah suatu muslihat guna mengadu domba antara paman dan kemenakan itu. Mereka memerintahkan orang melempari istana Sultan La Cila dan setelah itu si pelempar disuruh melarikan diri ke kolong rumah Kapitaraja. Ketika hal itu disampaikan kepada sultan, ia sangat marah dan menyatakan bahwa pelakunya pantas dijatuhi hukuman mati. Demikianlah, hukuman mati dijatuhkan kepada Kapitaraja di sebuah pulau bernama Mbela-mbela. Tatkala hukuman pencekikan sampai mati dilaksanakan, Kapitaraja mengutuk La Cila dengan mengatakan bahwa ujung tali yang satunya lagi kelak akan diperuntukkan bagi La Cila sendiri.

Pada 1650, kapal-kapal VOC tujuan Ternate yang masing-masing bernama de Tijger, Bergen op Zoon, Aagte Kerk, de Luipaard, dan de Juffer[746] karam di Sagori. Para penumpangnya yang berjumlah 581 orang dapat diselamatkan. Sementara itu barang-barang bawaannya diangkut oleh kapal Concordia yang hendak berlayar ke Ternate. Ke-581 penumpang untuk sementara waktu ditinggal di Buton. Pembesar kerajaan menghasut Sultan La Cila agar membantai mereka semua, tetapi ditolak olehnya. Gubernur Ambon, de Vlamingh, karena mengalami gangguan kesehatan singgah di Buton dalam perjalanannya ke Batavia. Ia menerima kunjungan sultan di kapalnya dan keduanya sepakat bahwa hubungan antara Buton dan VOC tidak rusak karena peristiwa di Sagori tersebut. Saat timbul pergolakan di Maluku, Buton ikut pula mengirimkan pasukannya.

746. Lihat *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton) II*, halaman 23.

Karena kerap merebut istri para menterinya, Sultan La Cila diturunkan dari jabatannya pada 1654 dan dijatuhi hukuman mati. Dengan demikian, terpenuhilah kutukan Kapitaraja. Hukuman yang dijalankan dengan cara dicekik ini dilangsungkan di sebuah pula dekat Bau-Bau. Penerapan hukuman mati ini mencerminkan bahwa hukum di Buton berlaku tidak pandang bulu, baik raja maupun rakyat akan sama-sama dijatuhi hukuman bila bersalah.

La Awu (1654–1664) naik takhta menggantikan La Cila dengan gelar Sultan Malik Sirullah. Sultan Buton ke-9 ini berasal dari golongan Tanailandu dan sudah lanjut usianya ketika naik takhta. Kondisi Buton saat itu boleh dikatakan tidak tenang, apalagi bersamaan dengan itu permusuhan antara Gowa dengan VOC makin meruncing. Karena Buton merupakan sekutu VOC, Sultan Hasanuddin dari Gowa melancarkan serangan ke Buton dan berhasil mengalahkannya. Sebagai pihak yang kalah, Buton wajib membayar pampasan perang setiap tahunnya sebesar 870 tail atau 13.920 emas dan 888 kati atau 8.880 tail yang setara dengan 142.080 emas.[747] Sebelum berlangsungnya serangan ini, Sultan La Awu sebelumnya telah memperingatkan kapten pasukan Belanda bernama de Roos tentang kemungkinan adanya serangan. Namun, Belanda tidak mengindahkannya dan bahkan meninggalkan Buton. Ketika Arung Palakka–musuh bebuyutan Gowa–melarikan diri pada 1660, Sultan Buton menerimanya dengan baik dan mengikat persahabatan dengan Bone. Perjanjian persahabatan ini dikukuhkan melalui slogan bahwa Buton adalah Bone di timur, sedangkan Bone adalah Buton di Barat (*Bone rilao Butung riyaja*). Sultan Malik Sirullah mangkat pada 1664 dalam suatu bencana kebakaran yang melanda istananya. Hingga saat ini, tidak diketahui dari mana asal muasal malapetaka tersebut.

Sultan Buton ke-10, La Simbata (1664–1669), naik takhta menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Adil Rakhiya. Setelah kematian Sultan Malik Sirullah, Buton berada dalam kondisi kacau sehingga tak ada seorang pun di antara kaum bangsawan yang bersedia dicalonkan sebagai sultan. Oleh karenanya, para pemuka kesultanan berniat mencalonkan seorang bangsawan asal Ternate yang kala itu berada di Buton. Akibat pencalonan orang luar ini, kaum bangsawan menjadi malu dan mereka mengajukan La Simbata kepada para pemuka kesultanan. Sementara itu, bangsawan Ternate yang telah dijanjikan kedudukan menjadi Sultan Buton tersebut diangkat sebagai Raja Muna dan dijelaskan bahwa posisi tersebut setara dengan sultan.

747. Lihat *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton) II*, halaman 33.

Karena Buton pernah memberikan perlindungan kepada Arung Palakka, armada Gowa di bawah pimpinan Karaeng Bontomaranu menyerang Buton dengan kekuatan 20.000 pasukan pada Oktober 1666.

Bersamaan dengan itu, datanglah armada Belanda beserta Arung Palakka. Dengan dukungan rakyat Buton, mereka bersama-sama mengepung pasukan Gowa dari segala penjuru. Dengan demikian, para prajurit Gowa yang dipimpin Karaeng Bontomaranu mulai terdesak. Terlebih lagi, pasukan Gowa yang berasal dari suku Bugis membelot dan bergabung dengan Arung Palakka. Akhirnya, Karaeng Bontomaranu menyerah kepada Speelman, pemimpin armada Belanda, dan mengadakan perjanjian di atas kapal Muijsenburgh yang berlabuh di Teluk Buton. Segenap kapal perang dan persenjataan Gowa lantas diserahkan kepada Speelman.

Sesudah peristiwa kekalahan armada Gowa ini, pada 25 Juni 1667 diadakanlah perjanjian antara Speelman dengan Sultan Buton. Poin-poin perjanjian tersebut antara lain sebagai berikut.[748]

◊ Penebangan pohon pala dan cengkeh yang berada di Pulau Tukang Besi beserta daerah-daerah lain yang dikuasai Buton. Ganti ruginya adalah sebesar 100 Ringgit yang dibayarkan oleh VOC kepada Buton setiap tahunnya, terhitung mulai akhir 1667.

◊ Pedagang-pedagang yang berasal dari daerah-daerah sahabat VOC diizinkan datang dan berniaga ke Buton. Tetapi pedagang-pedagang dari Gowa hanya diperbolehkan masuk apabila memiliki surat keterangan yang dikeluarkan wakil VOC di Makassar.

◊ Apabila VOC terlibat permusuhan dengan pihak lain maka musuh VOC tersebut juga menjadi musuh Buton. Oleh karenanya, Buton diwajibkan pula membantu VOC. Tetapi, Buton tak diperkenankan membuat suatu perjanjian tersendiri, terkecuali VOC yang melakukannya.

◊ Musuh yang menyerahkan diri harus ditangkap dan segera diserahkan kepada Belanda.

◊ Apabila sultan wafat, hal ini harus segera diberitahukan kepada Belanda dan Sultan Ternate. Keduanya akan mengirim wakilnya dan bersama-sama pemuka kerajaan memilih sultan baru.

748. Lihat *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton) II*, halaman 55–57.

◊ Sultan Buton yang baru wajib mengikrarkan kesetiaannya kepada Belanda dan Sultan Ternate.

◊ Sultan Buton tidak boleh dipecat tanpa persetujuan VOC dan Sultan Ternate dengan sebelumnya memberitahukan terlebih dahulu kesalahan sultan.

◊ Buton hanya boleh mengirim utusan ke Makassar dengan persetujuan VOC, termasuk dalam keadaan damai sekalipun.

◊ VOC diizinkan membangun benteng di tempat-tempat yang dirasanya strategis.

◊ Orang-orang Belanda dan VOC yang beragama Kristen dan datang ke Buton dengan keinginan menganut agama Islam tidak boleh diterima, melainkan harus dibawa kepada VOC.

◊ Orang-orang Buton yang berlaku tidak patut terhadap orang-orang Belanda agar ditangkap, diperiksa, dan dihukum sesuai kesalahannya.

Surat perjanjian ini ditandatangani dan disaksikan oleh Sultan Ternate. Secara keseluruhan, Sultan Adil Rakhiya telah menandatangani enam perjanjian dengan Belanda. Ia kemudian diturunkan dari jabatannya karena kondisi Buton yang tak pernah tenang. Selanjutnya, ia berdiam di kampung Lea-Lea dan dikenal dengan sebutan Mosabuna I Lea-Lea.

La Tangkaraja (1669–1680) yang bergelar Sultan Kaimuddin naik takhta sebagai Sultan Buton ke-11. Ia adalah putra Sultan Abdul Wahab dengan permaisurinya, We Walambencungi. Pada zamannya, terjadi perselisihan dengan Ternate. Pemecatan Sultan Adil Rakhiya dan pengangkatan La Tangkaraja juga tak diberitahukan kepada Sultan Ternate sebagaimana kesepatakan di atas. Peperangan dengan Ternate pecah di Muna, utusan Belanda yang berupaya menengahinya pun tidak mendapat sambutan dari Sultan Buton sehingga persengketaan ini tak dapat diselesaikan. Keadaan negeri Buton juga tak kunjung tenang sehingga sultan secara diam-diam berencana membangun benteng pertahanan di Lawela yang terletak 12 kilometer dari keraton. Niat sultan ini tak diketahui maksudnya. Karenanya, timbul kecurigaan dalam diri para pembesar kerajaan dan mereka lalu mencopot sultan dari kedudukannya.

Sultan Buton ke-12 adalah La Tumpamana (1680–1689) yang bergelar Sultan Zainuddin. Sebelum menduduki jabatan sebagai sultan, ia pernah menjadi kepala hukum, *kanepulu*, dan *sapati*. Bertepatan dengan kurun waktu pemerintahannya, hubungan antara Ternate dan VOC memburuk, yang diakhiri dengan pecahnya

pertempuran antara kedua belah pihak. Ternate berhasil dikalahkan dan sultannya, Sibori, ditangkap serta diasingkan ke Batavia. Buton menggunakan kesempatan ini untuk menguasai Tiworo yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Ternate. Daerah persengketaan lain dengan Ternate yang berupaya dikuasai kembali oleh Buton tetapi gagal adalah Tombuku. La Tumpamana juga dijuluki Cili-Cili karena tubuhnya yang kecil dan pendek. Sultan Zainuddin melepaskan kedudukannya sebagai penguasa Buton dan setelah itu digelari Musabunia I Kaesabu karena kemudian tinggal di kampung Kaesabu.

Pengganti Sultan Zainuddin adalah La Umati (1689–1697) yang bergelar Sultan Liyauddin Ismail. Pada zamannya, pejabat kerajaan bergelar *kanepulu* berniat melakukan perebutan kekuasaan, namun berhasil digagalkan. *Kanepulu* ditangkap serta dijatuhi hukuman mati. Namun, konon karena kesaktiannya, hukuman ini gagal dilaksanakan. Akhirnya, setelah diserang secara mendadak oleh dua orang bangsawan bernama La Dini dan La Rabaenga, barulah *kanepulu* dapat dibinasakan. Namun, belakangan antara keduanya timbul perselisihan karena masing-masing mengaku bahwa dirinyalah yang berhasil membunuh *kanepulu*. La Rabaenga lalu mengasingkan diri ke Bone.

Belum lama peristiwa pemberontakan *kanepulu* berselang, Kesultanan Buton kembali didera perselisihan internal. Kali ini muncul pergolakan yang dipimpin oleh Lakina Kumbewaha. Pasukan Buton disiapkan memadamkannya dan pertempuran sengit pecah di kampung Waruruma. Kaum pemberontak dapat dikalahkan dan Lakina Kumbewaha dijatuhi hukuman mati. Sultan Liyauddin Ismail mengundurkan diri pada 1697 karena usianya yang telah lanjut dan meninggal enam tahun kemudian (1703). Ia selanjutnya dikenal sebagai Sangia Kopea (Keramat di Kopea).

Dengan diangkatnya La Dini (1697–1704) sebagai Sultan Buton ke-14 bergelar Sultan Syaifuddin, takhta kesultanan diduduki kembali oleh kaum Kumbewaha. Sementara itu, La Rabaenga yang sebelumnya menyingkir ke Bone telah kembali lagi ke Buton dengan niat merebut kekuasaan dari tangan La Dini. Ia mempergunakan kesempatan selagi Sultan Syaifuddin sedang tidak berada di istananya. Bersama-sama pengawalnya yang berasal dari Bone, La Rabaenga, memaksa *menteri peropa* bernama Mang Koragi mengangkatnya sebagai Sultan Buton. Setelah kelilingi payung kebesaran di samping tempat kediaman Mang Koragi, resmilah La Rabaenga sebagai Sultan Buton. Ia memilih gelar Sultan Syaiful Rijali (1702) dan terhitung sebagai Sultan

Buton ke-15. Baru tujuh hari menduduki singgasanannya, Sultan Syaifuddin yang ternyata telah mengetahui perebutan kekuasaan tersebut kembali ke istana. Genderang perang segera ditabuh dan La Rubaenga menjadi ketakutan serta melarikan diri ke Bone. Mang Koragi sendiri dengan berpakaian serba putih menghadap Sultan Syaifuddin dan mengakui kesalahannya. Ia bersedia dijatuhi hukuman mati, tetapi Sultan Syaifuddin mengampuninya karena menyadari bahwa tindakan Mang Koragi menobatkan La Rubaenga itu didasari keterpaksaan semata.

Beberapa bulan kemudian, La Rabaenga datang lagi ke Buton dengan maksud menyatakan penyesalannya, tetapi di hatinya masih ada ganjalan. Ia mengenakan sebuah taji yang dibubuhi racun dengan maksud agar saat bersalaman, tangan sultan luka oleh benda tersebut. Kendati demikian, justru La Rubaenga yang terluka sendiri oleh senjata rahasianya dan tewas. Pemerintahan Sultan Syaifuddin berakhir karena diberhentikan pada 1704.

Sultan Buton berikutnya, La Sadaha (1704–1709), berasal dari kaum Tanailandu. Gelarnya adalah Sultan Syamsuddin. Ia menetapkan bahwa besarnya mas kawin yang diserahkan saat pernikahan antara keluarga *bontegena* dan *kabumbu* (keduanya merupakan menteri besar Kesultanan Buton) diubah dari 80 *boka* menjadi 100 *boka*. Sultan Buton ke-16 ini diturunkan dari kedudukannya pada 1709 dan digantikan oleh La Ibi, putra Sultan La Umati.

Sultan Nasruddin, demikianlah gelar La Ibi (1709–1711) setelah menduduki singgasana Kesultanan Buton. Pejabat-pejabat berpengaruh yang mendampingi sultan saat itu adalah La Tumparasi dan Lang Kariri. Keduanya sama-sama menjabat sebagai *kapitaraja*. La Tumparasi adalah ipar La Ibi hasil dari pernikahannya dengan adik perempuan sultan. Sesungguhnya, Nasruddin merasa berat menerima jabatan sebagai Sultan Buton. Namun, demi kehormatan kaumnya (Tanailandu) ia bersedia diangkat sebagai sultan. Kelak bila ada di antara mereka yang dirasa lebih layak, ia akan menyerahkan takhta kepadanya. Maksud baik sultan ini dipahami benar oleh kaumnya. Satu-satunya penghalang adalah Lang Kariri, putra mantan Sultan La Dini, yang berasal dari golongan Kumbewaha. Tokoh ini sangat besar kekuasaannya dalam percaturan politik Buton semasa pemerintahan Sultan Nasruddin dan berambisi pula menjadi sultan.

Oleh karena itu, setelah calon yang lebih tepat ditemukan, Lang Kariri ditugaskan keluar dan Sultan Nasruddin menyerahkan kedudukannya kepada La Tumparasi,

saudara iparnya tersebut. Dengan demikian, La Tumparasi menjadi Sultan Buton ke-18 yang bergelar Muluhiruddin Abdul Rasyid (1711–1712). Sepulangnya dari menunaikan tugas, Lang Kariri menjumpai La Ibi yang sedang membersihkan perkakas rumahnya. Timbul rasa heran dalam hati Lang Kariri dan menanyakan apa yang terjadi. La Ibi menjawab dengan kiasan, "Tanah telah berubah kepada tanah yang lain."[749] Mendengar penuturan tersebut, pahamlah Lang Kariri mengenai apa yang sebenarnya telah berlaku sepeninggalnya menunaikan tugas kerajaan.

Timbul permusuhan antara Lang Kariri dengan La Tumparasi yang berujung pada pecahnya perang saudara. Lang Kariri tampil sebagai pemenang sehingga lawannya terpaksa melarikan diri ke Ujung Pandang. Ia lantas dinobatkan sebagai Sultan Buton ke-19 dengan gelar Sultan Durul Alam (1712–1750). Konon, karena begitu dahsyatnya pertempuran antara Lang Kariri dan La Tumparasi, mereka tak mengetahui lagi peredaran hari. Sewaktu Syarif Muhammad, salah seorang ulama terkemuka masa itu, sedang berjalan-jalan di atas bukit, ia melihat sebuah lubang dan di dalamnya disaksikannya bayangan serta suara orang sedang bersembahyang. Karenanya, tahulah ia bahwa hari itu adalah hari Jumat dan mereka mengadakan sembahyang Jumat di tempat tersebut. Selanjutnya, di sana dibangun masjid keraton yang masih ada hingga saat ini.

Pada 1727, Bone dilanda pertikaian internal, dan La Temmasonge Datu Baringeng yang kelak menjadi Raja Bone melarikan diri ke Buton bersama dengan dua orang bangsawan Bone lainnya. Mereka bertiga tinggal di Buton hingga 1730, sebelum akhirnya dipanggil pulang oleh Ratu Batari Toja Daeng Talaga Arung Timurung Datu-ri Chitta MatinroE-ri Tipuluna dari Bone. Selanjutnya, pada 1733 dan awal 1734, VOC pernah meminta Buton agar memasok kayu jati pkeada mereka setiap tahunnya, namun hal itu hanya sanggup berjalan beberapa kali saja. Peristiwa penting lain semasa pemerintahan Sultan Durul Alam adalah penetapan hukum mengenai mas kawin.

Sultan Durul Alam mangkat pada 1750 dan digantikan oleh menantunya, La Karambau (memerintah dua kali pada 1751–1752 dan 1760–1763), yang naik takhta dengan gelar Sultan Himayatuddin. Sultan Buton ini terkenal gemar belajar, terutama yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan dan keagamaan. Berkat perangainya yang

749. Lihat *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton*) jilid II, halaman 85. Bahasa aslinya: *Otona abaliy yaka meyatanah mosagaana*." Maksudnya tentu saja saja kekuasaan telah beralih pada orang lain.

ramah dan sopan santun, La Karambau memiliki banyak teman semenjak kanak-kanaknya. Jauh sebelum iamenjadi sultan, orang-orang tua telah meramalkan bahwa La Karambau akan menduduki jabatan tertinggi dalam Kesultanan Buton dan sejarah ternyata membuktikan bahwa ramalan itu tepat adanya. Sultan Durul Alam sangat membenci Belanda dan berpandangan bahwa perjanjian yang diadakan antara Speelman dengan Buton–hampir seratus tahun sebelumnya–sangat menghinakan martabat Kerajaan Buton. Karenanya, sultan diam-diam memberikan bantuan terhadap orang-orang yang memusuhi VOC, termasuk saat penyerangan terhadap kapal Rust en Werk pada Juni 1752. Serangan ini sebenarnya dilakukan oleh orang Belanda sendiri bernama Frans yang memusuhi VOC.[750] Saat terjadinya insiden ini, seluruh awak kapal dibunuh dan barang-barangnya dirampas.

VOC lantas melimpahkan kesalahan itu kepada Sultan Buton karena tidak memberikan bantuannya saat Rust en Werk diserang dan memaksa sultan membayar denda. Demi mencegah serangan VOC terhadap Buton, para pemuka kerajaan sepakat menurunkan Sultan Himayatuddin dari takhtanya dan menggantinya dengan Hamim, putra Sultan Durul Alam. Selanjutnya, seluruh tuntutan VOC akan dipenuhi sambil menyusun siasat berikutnya. Hamim yang naik takhta sebagai Sultan Buton ke-21 menyandang gelar Sultan Sakiyuddin (1752–1759). Dengan demikian, ia adalah sultan ke-4 dari golongan Kumbewaha. Sultan Durul Alam kemudian berdiam di kampung Wasuamba. Meskipun demikian, Sultan Sakiyuddin masih kerap merundingkan masalah-masalah pemerintahan dengan saudara iparnya tersebut.

Awal 1753, datanglah utusan Belanda yang dipimpin oleh Johan Bonelius guna merundingkan penyelesaian masalah kapal Rust en Werk. Perjanjian pembayaran ganti rugi diadakan dengan Buton dan pembayaran pertamanya berupa sejumlah budak beserta emas dilangsungkan tak lama kemudian. Sementara itu, Frans yang memusuhi VOC berhasil dibinasakan dan para pengikutnya ditawan.

VOC merasa kurang puas karena budak-budak yang dikirim oleh Buton berupa para lansia (lanjut usia) beserta anak-anak sehingga tidak menguntungkan dan bahkan menimbulkan kerugian bagi mereka. VOC merasa bahwa pembayaran utang Buton ini tak akan berlangsung tepat waktu. Akibatnya, mereka berniat menyerang Buton dengan tanpa peringatan terlebih dahulu. Belanda juga mendapatkan laporan dari Petzold bahwa Buton sendiri telah mempersiapkan pertahanan dan angkatan

750. Lihat *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton)* jilid II, halaman 117–118.

perangnya. Utusan Buton yang membawa budak-budak masih datang ke Makassar pada 25 Desember 1754, tetapi budak-budak yang dibawa sebagian besar masih orang-orang yang telah lanjut usianya dan anak-anak. Karena itu, niat Belanda menyerang Buton tak dapat ditunda lagi.

Angkatan perang Belanda yang dipimpin Johan Casper Rijsweber berlabuh di Buton pada 23 Februari 1755. Pada mulanya, mereka masih melepaskan tembakan penghormatan, tetapi tidak mendapatkan balasan. Berdasarkan laporan yang diterima pihak Belanda, pasukan Buton berkekuatan 5.000 orang telah bersiap-siaga menghadapi serangan Belanda. Bersamaan dengan itu, tak lama berselang tibalah utusan sultan ke atas kapal het Huis te Manpad guna menanyakan apa maksud kedatangan armada Belanda tersebut. Demi menyembunyikan maksud mereka yang sebenarnya, ketika utusan Buton naik ke kapal segenap pasukan dan persenjataan sengaja disembunyikan. Kepada para utusan sultan Buton dijelaskan bahwa mereka hanya berniat menyampaikan hormat dan hadiah bagi sultan serta mengambil air minum.

Tengah malamnya, Rijsweber memerintahkan agar anak buahnya melakukan pendaratan dan mereka langsung bergerak menuju benteng istana Buton. Pagi harinya, ketika pintu benteng dibuka, pasukan Belanda mempergunakan kesempatan ini untuk menyerbu masuk. Para penjaga yang tak siap dapat dikalahkan dan dilucuti dengan mudah. Serangan balasan dari pihak Buton dilancarkan terhadap pasukan VOC. Kendati demikian, kemenangan akhirnya berpihak kepada VOC dan bahkan Buton kehilangan para petingginya, seperti *kapitalao*, *bontogena*, dan *sapati*. Sementara itu, dari pihak VOC hanya satu orang yang gugur, 36 luka-luka, dan 39 lainnya dinyatakan hilang. Sultan Sakiyuddin sendiri terpaksa melarikan diri ke kampung Sorawolio dan Kaesabu dengan membawa dokumen penting beserta harta pusaka kerajaan. Bekas Sultan Himayatuddin belakangan turut menyingkir pula ke Kaesabu dan selanjutnya ke Siontapina.

Setelah kemenangan diraih, Rijsweber bertolak ke Makassar dan melaporkan hal itu kepada VOC. Meskipun demikian, ada kekhawatiran bahwa akibat penyerangan ini, Buton menjadi musuh VOC dan menjalin persekutuan dengan Bone atau Gowa. Hal ini tentunya sangat tak diinginkan oleh Belanda. Oleh sebab itu, pada 16 Mei 1755 dilayangkan surat kepada Sultan Buton disertai ajakan agar kedua belah pihak berdamai kembali. Sebelumnya, Sultan Sakiyuddin sendiri pada 22 April 1755 telah melayangkan nota protesnya kepada Raja Bone yang merupakan wakil VOC atas

serangan di atas. Berdasarkan kesepakatan, seharusnya serangan itu diberitahukan terlebih dahulu melalui Raja Bone dan selanjutnya baru disampaikan kepada Buton. Serangan mendadak seperti itu menurut sultan Buton jelas merupakan pelanggaran perjanjian yang telah disepakati bersama. Disampaikan pula bahwa Buton tidak sanggup memenuhi tuntuan pembayaran utang VOC, apalagi para pemuka kerajaan banyak yang gugur. Juru bahasa Belanda bernama Bartelz melaporkan bahwa rakyat Buton telah memasang penghalang di jalan antara pantai dan istana sebagai persiapan pertahanan menghadapi serangan lebih lanjut.

Belanda berupaya mengalihkan perhatian Buton dengan memerdekakan Muna. Perjanjian baru dengan Buton diupayakan kembali pada Maret tahun berikutnya (1756). VOC menuntut pembayaran ganti rugi berupa 1.000 orang budak. Bersama dengan tuntutan tersebut, dibawa pula surat dari Raja Bone yang menyarankan agar Buton mematuhi apa yang diminta VOC. Sultan Buton tetap tak bersedia memenuhinya sehingga VOC tidak mendapatkan hasil yang diharapkannya. Pada 9 September 1756, sultan mengirimkan surat ke Batavia yang isinya mengajukan keberatan atas keharusan menyerahkan 1.000 budak itu karena kerugian akibat serangan VOC jauh melebihi pembayaran ganti rugi yang harus dipikul Buton, terlebih lagi dengan gugurnya para pembesar beserta rakyat Buton, belum termasuk tewasnya dua orang putra sultan.

Sultan Sakiyuddin mendadak mangkat pada 29 Agustus 1759. Keadaan Buton menjadi kacau dan pertentangan antara kaum bangsawan memperebutkan kedudukan sultan makin menjadi-jadi. Apabila mereka tak bersatu padu, hampir saja *kapitaraja* saat itu yang bernama Kolaki terpilih sebagai sultan. Tokoh ini dianggap sebagai orang luar, walaupun masih keturunan bangsawan *barata* Muna yang sederajat kedudukannya dengan bangsawan Buton menurut adat. Kaum bangsawan akhirnya sepakat mencalonkan La Seha (1759–1760) sebagai Sultan Buton ke-22 dengan gelar Sultan Rafiuddin. Gagal dengan pencalonannya sebagai Sultan Buton, Kolaki yang merasa kecewa bertolak ke Muna dan berhasil membujuk dewan adat di sana agar mengangkatnya sebagai raja. Setelah itu, diumumkanlah perang melawan Buton. Keadaan di Buton sendiri juga tetap genting dengan adanya permusuhan antara kaum bangsawan. Sultan Rafiuddin sendiri masih tetap merundingkan masalah ganti rugi kapal Rust en Werk dengan VOC. Di tengah-tengah krisis yang berkepanjangan ini, Sultan Rafiuddin mangkat.

Dewan adat kerajaan sepakat mengangkat kembali La Karambau sebagai Sultan Buton mengingat pengaruhnya yang besar di kalangan masyarakat. Karena pemerintahan kedua kalinya yang berlangsung antara 1760 hingga 1763 ini, La Karambau terhitung sebagai Sultan Buton ke-23. Gubernur Belanda di Makassar diberitahukan melalui surat tertanggal 14 Oktober 1760 bahwa La Karambau telah bersedia menerima segenap perjanjian dengan Belanda sehingga segenap permasalahan di masa lalu hendaknya diakhiri. Meskipun demikian, dalam diri sultan yang bergelar Himayatuddin ini masih berkecamuk sikap anti-Belanda. Sultan Himayatuddin diberhentikan kembali pada 1760 dan digantikan oleh La Jampi, yang naik takhta dengan gelar Sultan Kaimuddin (1763–1788). Semasa kecil La Jampi telah hidup bersama ibu tirinya yang kurang menyukainya. Suatu ketika atas hasutan ibu tirinya tersebut, ia dipukuli ayahnya hingga pingsan. Kendati demikian, sesungguhnya ayah La Jampi sangat mengasihinya karena orang-orang tua meramalkan bahwa La Jampi kelak akan menduduki tampuk tertinggi Kesultanan Buton.

Sultan Buton ke-24 ini bermaksud menyelesaikan permasalahannya dengan Kolaki, Raja Muna, secara damai. Sebelumnya, ia membenahi terlebih dahulu perselisihan internal dalam kerajaannya dengan menasihati para pengikutnya agar menghentikan perseteruan apabila ingin Kerajaan Buton tetap langgeng. Selanjutnya, dikirim pasukan ke Muna dan dalam pertempuran antara kedua kerajaan itu. Kolaki gugur karena tikaman Ali, putra La Jampi. Guna mengisi kekosongan kekuasaan di Muna, sementara waktu Ali didudukkan sebagai Raja Muna.

Hubungan antara VOC dan Buton berangsur membaik sehingga sultan mengirim utusan menemuiGubernur Belanda di Makassar serta menyampaikan kesediaan Buton memperbaharui perjanjian terdahulu antara Speelman dan Buton pada 25 Juni 1667. Perjanjian yang diperbaharui ini ditandatangani pada 22 Maret 1766. Isinya sebagian besar sama dengan perjanjian sebelumnya, hanya saja tidak ada lagi keharusan bagi Buton memberitahukan pengangkatan serta pemecatan raja ataupun pembesar kerajaannya kepada Sultan Ternate. Karena kondisi kesehatannya yang kurang baik, Sultan Kaimuddin mengajukan pengunduran dirinya pada 1788.

La Masalumu (1788–1791) diangkat sebagai Sultan Buton ke-25 dengan gelar Sultan Alimuddin. Ia merupakan kaum Tapi-Tapi ke-2 yang menduduki singgasana kesultanan. Semasa pemerintahannya ditetapkan besarnya uang *pasali* bagi masing-masing pejabat kerajaan. Pasali diberikan saat sultan atau para pembesar hendak

mengadakan perjamuan yang bertepatan dengan bulan Ramadan. Mengingat saat itu bulan puasa, tentunya tidak ada makanan yang disajikan dan sebagai gantinya hadirin diberikan sejumlah uang. Besarnya disesuaikan dengan harga makanan serta hierarki kedudukan seseorang.

Selanjutnya, takhta Buton beralih kepada menantu Sultan Sakiyuddin bernama La Kopuru (1791–1799), yang setelah menduduki singgasana Buton menyandang gelar Sultan Muhuyuddin Abdul Gafur. Semasa pemerintahan Sultan Buton ke-26 ini, *barata* (wilayah) Kalingsusu memberontak dan berniat melepaskan diri dari Buton. Utusan-utusan Buton yang datang ke sana tidak disambut sebagaimana biasanya. Bersamaan dengan itu, wilayah Togo Besi ikut pula membangkang terhadap Buton. Ketika terdapat kapal kompeni yang karam di perairan Kalingsusu, rakyat setempat tidak memberikan bantuannya sehingga VOC melayangkan surat protesnya kepada sultan pada 25 November 1795. Dalam surat balasannya, sultan menyampaikan bahwa Kesultanan Buton memang sedang terlibat permasalahan dengan Kalingsusu.

Sultan Muhuyuddin Abdul Gafur mangkat pada 1799 dan digantikan oleh La Badaru (1799–1822) selaku Sultan Buton ke-27 bergelar Sultan Dayanu Asraruddin. Ia tercatat menandatangani kontrak politik dengan Belanda pada 12 Januari 1804. Sebelum penetapan kontrak ini, Sultan Buton terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan keamanan di Muna. Setahun kemudian, pemerintah kolonial Belanda terlibat peperangan antara Prancis dan Inggris. Kendati peperangan berkecamuk di Eropa, tetapi dampaknya terasa hingga ke Buton; pelayaran antara Makassar dan Buton menjadi tidak lancar. Pada 1811, Belanda menderita kekalahan terhadap Inggris dan harus menyerahkan daerah jajahannya. Hubungan antara pemerintah pendudukan Inggris dengan Buton tidak berlangsung lancar dan hingga berakhirnya masa kekuasaan Inggris pada 1816, tercatat hanya sekali saja utusan Buton menjumpai wakil pemerintah Inggris di Makassar.

Kurang lebih pada 1816, pecah kerusuhan di Muna yang dipicu oleh Arung Bakung. Ia adalah seorang bangsawan Bone yang meninggalkan kampung halamannya karena kemelut yang terjadi sana. Awalnya, Arung Bakung berdiam di daerah Sampara, Laiwui. Namun, kemudian ia pindah ke Tiworo, Muna, dan menikahi putri Raja Tiworo. Atas hasutan seorang tokoh bernama Tuwana I Dondang[751] asal Labakang, Arung Bakung berniat melepaskan Tiworo dari kekuasaan Buton. Setelah menghimpun

751. Lihat *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton)*, jilid III, halaman 22–23.

pasukan, dilancarkanlah serangan-serangan terhadap bagian selatan Pulau Muna. Para pelaut Makassar dan bajak-bajak laut Mindanao turut pula membantu Arung Bakung. Meskipun demikian, pasukan Arung Bakung dikalahkan oleh Buton dan ia akhirnya terpaksa hengkang ke Laiwui kurang lebih pada 1823 atau awal 1824.

Karena kondisi kesehatannya yang kurang baik, Sultan Dayanu Asraruddin mengundurkan diri dan singgasana kesultanan beralih kepada La Dani (1822–1823) dengen gelarnya Sultan Muhammad Anharuddin. Ia adalah kaum Tapi-Tapi ke-3 yang menduduki takhta Buton. Semasa kekuasaan Sultan Buton ke-28 ini, berlangsung serangan dari bajak laut Tobelo ke pasar Wajo. Karena penduduk setempat tidak sanggup menandingi para perompak, mereka meminta bantuan pasukan kesultanan. Muhammad Idrus (menantu Sultan Anharuddin) yang ketika itu menjabat sebagai *kapitalao* diutus memimpin pasukan Buton dan berhasil menumpas kaum perompak. Tetapi di tengah-tengah usahanya membasmi para bajak laut Tobelo, Sultan Anharuddin justru mengirim pesan agar Muhammad Idrus segera kembali ke ibu kota. Tindakan yang menarik kembali *kapitalao* sebelum selesai menunaikan tugasnya ini menyalahi adat dan Muhammad Idrus memprotes tindakan mertuanya tersebut. Oleh karenanya, *syarat* (dewan adat Buton) lantas menurunkan La Dani dari singgasananya.

Sebagai penggantinya, diangkatlah Muhammad Idrus (1824–1851) yang naik takhta dengan gelar Sultan Kaimuddin I. Sultan Buton ke-29 ini termasuk dalam golongan Kumbewaha. Sebelum dinobatkan sebagai sultan, ia pernah menduduki jabatan sebagai *kapitalao* serta banyak berjasa mengamankan berbagai wilayah di Buton. Semasa kecil, Muhammad Idrus hidup di bawah asuhan neneknya yang banyak mewariskan pengetahuan keagamaan pada dirinya. Tak mengherankan apabila semasa pemerintahan Sultan Kaimuddin I, agama Islam mengalami perkembangan pesat, bahkan di istana Buton masa itu bahasa pengantar yang dipergunakan adalah bahasa Arab. Sultan tersohor pula sebagai seorang sastrawan andal yang terbukti dari berbagai karyanya, baik dalam bentuk puisi berbahasa Buton (*Bula Malino, Tazikiri Momampu Dona [Tanbiygil gaafili], Jachara Maanikamu Molabi, Kanturuna Mohelana, Fakini, Nuru Molabina*, dan *Kanturuna Mohelana II*) maupun buku-buku berbahasa Arab (*Raudlaatil-ikhwan, Takhaatul uturiyyat, Takhsiynul aulaadi, Utuural miskiy-yat, Siraajul muttaqiyna, Darratil ikh-kaami, Sabiylas salaamu, Syuunir rakhmati, Targiybul anaami, Bitakhfatur zaa-irinya, Dliyaaul anwaari, Sumuumaatil warradi,*

Tankiy-yatul kuluubi, Hadiy-yatul basiyru, Hablal wasiyki, Khaulil maurrudi, Andatul-muwah-hidiyna, Kasful Hijaabu, Uaoharal Abhariy-yat, Misbaahur-rajiyna (salawa), dan *Midaadur rakhmati*).[752]

Setelah menjadi sultan, Muhammad Idrus menandatangani kontrak politik dengan Belanda pada 19 Februari 1824. Isi perjanjian ini tidak banyak berbeda dengan kontrak-kontrak sebelumnya, hanya saja kali ini ganti rugi bagi penebangan pala dinaikkan nilainya menjadi 120 Ringgit. Masih pada zaman Sultan Kaimuddin I, Belanda mewajibkan raja-raja di Sulawesi Selatan menandatangani Perjanjian Bungaya yang Diperbaharui pada 1824, wakil Buton juga diundang sebagai saksi. Sebelum mengakhiri masa pemerintahannya, Sultan Kaimuddin I melakukan perombakan pada tatanan pemerintahan dengan menambah jumlah *bonto* dan *bobato* serta mendirikan kampung baru yang disebut Badia.

Sultan Kaimuddin I mangkat pada 28 April 1851 dan digantikan oleh Muhammad Isa (1851–1871) yang naik takhta dengan gelar Sultan Kaimuddin II, Sultan Buton ke-30. Ia merupakan tokoh yang disegani rakyatnya hingga kata *isa* yang dalam bahasa Buton berarti 'ikan' diubah menjadi *ikane*. Apabila Muhammad Isa menghadiri sembahyang di masjid Badia maka biasanya ia diminta menjadi imam. Sultan Kaimuddin II menandatangani kontrak politik dengan Belanda pada 20 Desember 1851. Peristiwa lainnya adalah penyerangan terhadap kapal Belanda yang berlayar di Teluk Bone oleh pelaut-pelaut Bone dengan dibantu oleh orang-orang Buton pada 1856. Oleh karena itu, Belanda meminta pertanggungjawaban, baik kepada Bone maupun Buton.

Setahun kemudian (1857), diadakan perundingan dengan Sultan Buton mengenai pembangunan gudang batu bara di Bau-Bau. Menurut Bakkers–wakil pemerintah kolonial Belanda–terdapat dua tempat yang cocok bagi pembangunan gudang tersebut, yakni di Makassar dan kampung Batulo. Sewaktu Gubernur Belanda berkunjung pada 1858, Buton telah selesai membangun gudang batu bara, tetapi tidak pada lokasi yang dimaksud Belanda. Meskipun demikian, pemerintah kolonial Belanda sangat senang dan memberikan imbalan sebesar Rp240. Sultan menerima dengan baik pemberian tersebut dan menganggapnya sebagai ucapan terima kasih kepada Buton. Namun, ketika pemerintah kolonial memberikan kembali imbalan berupa uang, Sultan Kaimuddin II menolaknya seraya berkata bahwa Buton bukanlah

---

752. Lihat *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton)*, jilid III, halaman 29 -30.

buruh yang harus menerima upah dari majikannya, melainkan semata-mata karena hubungan persahabatan antara Belanda dengan Buton.

Berkat jasanya memajukan hubungan antara Belanda dan Buton, pemerintah kolonial menganugerahkan bintang jasanya kepada sultan pada April 1863. Upacara penganugerahan bintang ini dilakukan oleh Gubernur Kroesen di Buton dan dalam sambutannya menyatakan bahwa sultan merasa terharu dengan penghargaan tersebut. Meski secara lahiriah bergembira, namun hatinya berduka apabila bintang itu tak dapat menyinari rakyatnya. Kunjungan gubernur ke negerinya tersebut dimanfaatkan pula oleh sultan untuk memperoleh mata uang Belanda baru yang dibutuhkan setiap tahunnya sebesar Rp1000. Selain mata uang Buton yang bernama *kampua* di kesultanan beredar pula mata uang Belanda. Permintaan Sultan Kaimuddin II atas mata uang ini kemudian dipenuhi oleh pemerintah Belanda.

Semasa pemerintahan Sultan Kaimuddin II, Muna kembali tidak tenang dengan adanya persengketaan antara La Ode BulaE, Raja Muna, dengan Kapitalao Lohia La Ode Kantade. Keduanya saling berebut kedudukan sebagai Raja Muna. Sultan mengirimkan La Ode Japera (Yarona Kaedupa) dan Sabandara Muhammad Hussein guna menyelesaikan pertikaian tersebut. Sebagai solusinya, kedua belah pihak diperintahkan meninggalkan Istana Muna untuk sementara waktu. La Oda BulaE, Raja Muna, diperintahkan tinggal di kampung Lasongko, sedangkan rivalnya, La Ode Kantada, tinggal bersama Raja Laiwui di Kendari. Ketika La Oda BulaE mangkat pada 1866 atau awal 1867, La Ode Kantada dipanggil pulang ke Muna dan diangkat sebagai raja.

Sebagai pengganti Sultan Kaimuddin II yang mangkat pada 24 Januari 1871, diangkatlah Muhammad Salihi (1871–1885) sebagai Sultan Buton ke-31 dengan gelar Sultan Kaimuddin III. Ia merupakan pencetus adat *haroa rajabu*, yang diadakan pada hari Jumat bulan Rajab. Hubungan dengan pemerintah kolonial Belanda masih baik dan bahkan pada 1876 dibangun lagi gudang batu bara di sebelah timur Bau-Bau. Pada zaman Sultan Kaimuddin III, Buton dimasukkan dalam payung kekuasaan Hindia Belanda, hanya saja belum ada wakil pemerintah kolonial yang ditempatkan di sana.

Muhammad Umar (1885–1904) naik takhta sebagai Sultan Buton ke-32 menggantikan pamannya dengan gelar Sultan Kaimuddin IV. Kegemarannya adalah catur dan ia sanggup bermain sepanjang hari. Pada 1887, pemerintah Belanda hendak menempatkan wakilnya di Buton, tetapi tidak disetujui oleh sultan. Belanda berniat

memaksakan kehendaknya dengan mengirimkan angkatan perangnya. Kendati demikian, sultan tetap bersikeras menolaknya. Demi menghadapi ancaman Belanda ini, dewan pemerintahan dan sultan mengimbau rakyat Buton agar senatiasa siap siaga menghadapi serangan. Benteng-benteng pertahanan mulai dibangun, antara lain di Kaladupa dan Wasuamba. Namun, belum sempat Belanda melancarkan serangannya, Sultan Kaimuddin IV berpulang pada 26 September 1904.

Muhammad Asyikin memegang jabatan sebagai Sultan Buton berikutnya dengan gelar Sutan Adilil Rakhim (1906–1911). Sultan Buton ke-33 ini menandatangani perjanjian dengan Belanda pada 8 April 1906 yang pada intinya menyepakati penempatan wakil pemerintah kolonial di Buton. Saat itu, penandatanganan perjanjian ini berlangsung di atas kapal de Ruyter dan sebagai wakil Belanda adalah Brugman. Yang patut dicatat, terpilihnya Sultan Adilil Rakhim ini dapat terlaksana berkat campur tangan Belanda saat sultan berhasil mengalahkan pesaingnya, La Ode Akhmad Maktubu Aruna, yang anti-Belanda. Kendati demikian, 11 hari kemudian (19 April 1906) sultan sadar bahwa perjanjian di atas merugikan negerinya dan melanggar kedaulatan Buton. Karenanya, ia segera menyatakan bahwa perjanjian itu tak berlaku lagi. Belanda tak tinggal diam menghadapi hal ini dan Brugman kembali lagi dengan kapal de Ruyter disertai sepasukan tentara. Mereka tampaknya bersiap-siap menyerang Buton. Pihak kesultanan yang tak siap melawan Belanda menyerah dan menuruti kemauan Belanda.

Beberapa pejabat dan petinggi kerajaan yang anti-Belanda diasingkan oleh pemerintah kolonial ke Makassar, seperti Muhammad Zuhri, Raja Sorawolio; Ani Abdul Latif; Abdul Hasan atau La Gune Ma Muhu; La Sahidu Ma Manggasa; La Ode Hamidi (Muhammad Hamidi); dan La Ode Falihi (Muhammad Falihi).[753] Kedua tokoh yang disebut terakhir ini merupakan putra Ani Abdul Latif, yang kelak menjadi sultan-sultan Buton. Setelah beberapa bulan berada di pengasingan, pemerintah kolonial Belanda mengizinkan mereka kembali ke kampung halamannya, tetapi sebelumnya mereka harus menyatakan terlebih dahulu sumpah kesetiaannya terhadap pemerintah kolonial Belanda di Makassar. Tokoh-tokoh ini dipulangkan ke Buton dari tempat pembuangannya pada 24 Desember 1907. Ani Abdul Latif diangkat kembali sebagai *kanepulu*. Sementara itu, Muhammad Zuhri tidak lagi dipekerjakan

753. Lihat juga *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Tenggara*, halaman 53.

dalam pemerintahan Buton, sedangkan Abdul Hasan dan La Sahidu memang telah terlebih dahulu dipecat.

Belanda membangun jalan-jalan di Buton guna melancarkan arus transportasi antara daerah pedalaman dengan Bau-Bau, ibu kota Buton. Oleh karenanya, demi kelancaran pembangunan prasarana tersebut, pemerintah kolonial memberlakukan kewajiban kerja paksa tanpa gaji bagi rakyat, yang lamanya 42 hari setiap tahunnya semenjak 22 Juli 1908. Sekolah-sekolah mulai dibuka pada Mei 1909. Institusi-institusi pendidikan serupa didirikan di Muna pada 1910. Kini, para pegawai kerajaan digaji oleh pemerintahan Belanda dan beberapa jabatan dihapuskan semenjak 1910 karena tak diperlukan lagi, seperti jabatan Raja Sorawolio, Raja Badia, *kapitalao matanayo*, *kapitalao sukanayo*, *kapita*, dan *sabandara*. Sultan Muhammad Asyikin memperoleh bintang penghargaan dari Belanda, demikian pula dengan Ani Abdul Latif (*kanepulu*) beserta Muhamamd Husein (*sapati*).

Pemerintah kolonial melakukan perombakan dalam bidang ekonomi dengan menerapkan perpajakan, yakni pajak hasil hutan (sejak 28 Juli 1911) dan pajak penghasilan (sejak 26 November 1911). Pada masa awal berlakunya ketetapan ini, timbul pemberontakan yang dilancarkan oleh La Ode Boha dan La Ode Sijaal. Ia tak bersedia membayar pajak kepada para penagih pajak yang diiringi sepasukan tentara Belanda bersenjata lengkap. Terjadilah perlawanan yang gigih terhadap pasukan pemerintah kolonial. La Ode Sijaal gugur dan La Ode Boha ditangkap serta diasingkan ke Jawa, akhirnya berakhirlah perlawanan ini. Sultan Adilil Rakhim mangkat pada Juni 1911 dan untuk sementara kekuasaan di Buton dipegang oleh *sapati*.

Muhammad Husein yang merupakan saudara kandung Muhammad Umar (Sultan Buton ke-32) terpilih sebagai Sultan Buton ke-34 dengan gelar Sultan Bayanu Ikshanu Kaimuddin (1914). Sebelum diangkat sebagai Sultan Buton, ia pernah memegang berbagai jabatan penting di kesultanan. Namun, karena usianya telah lanjut, Sultan Bayanu Ikshanu Kaimuddin hanya sempat memerintah kurang lebih tiga atau empat bulan saja dan wafat pada 17 Mei 1914.

Singgasana Kesultanan Buton beralih kepada Muhammad Ali (1918–1921) yang menyandang gelar Sultan Muhammad Ali Kaimuddin. Sebelumnya, Sultan Buton ke-35 ini menduduki jabatan sebagai kepala distrik Pasar Wolio, yang diangkat berdasarkan keputusan pemerintah kolonial tertanggal 1 Mei 1913 no. 1. Kemudian ia dipindahtugaskan sebagai kepala distrik Bolio. Pada zamannya, berjangkit wabah

penyakit disentri yang menimbulkan banyak korban jiwa di kalangan rakyat Buton. Sultan Muhammad Ali mangkat pada 14 Maret 1921 dan digantikan oleh Muhammad Syafiu (1922–1924) selaku Sultan Buton ke-36. Sebelumnya, ia pernah menjabat pula sebagai Raja Muna.

Sultan Muhammad Syafiu tidak mengangkat para pegawainya berdasarkan keturunan semata, melainkan berdasar kecakapannya dalam bekerja, bahkan ia memiliki kebijakan unik terhadap para pegawainya. Umpamanya, jika pegawainya takut berjalan di waktu malam, ia justru akan menugaskannya saat malam hari. Apabila ada di antara mereka yang tidak kuat berjalan kaki maka saat berkunjung ke pedalaman, sultan justru melarang kepala kampung meminjaminya kuda tunggangan atau diperintahkannya pegawai tersebut berjalan bersamanya. Kendati demikian, tindakan semacam ini hanya terbatas pada pegawai-pegawai kesayangan sultan ataupun orang-orang yang dianggapnya mampu saja. Terbukti berkat gemblengannya, para pegawai tersebut menjadi aparat-aparat pemerintahan yang andal. Selain itu, sultan melakukan berbagai perombakan yang drastis pada tatanan pemerintahan Buton bila dirasanya tak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sultan wafat pada 30 Agustus 1924 karena letusan pistol yang tepat mengenai wajahnya.

La Ode Hamidi atau Muhammad Hamidi adalah putra Ani Abdul Latif, yang pernah menyertai ayahnya dalam pembuangan ke Makassar semasa pemerintahan Sultan Muhammad Asyikin (Adilil Rakhim), terpilih sebagai Sultan Buton ke-37 dengan gelar Muhammad Hamidi Kaimuddin (1928–1937). Sebelumnya, ia telah memiliki pengalaman dalam pemerintahan karena dipercaya memimpin berbagai distrik. Semasa pemerintahannya, diresmikanlah jalan raya Bau-Bau–Kamaru sepanjang 89 kilometer. Saat berlangsungnya peresmian, sultan menggunakan kesempatan ini mengendarai mobil pribadinya yang baru pertama kali dilihat oleh rakyat di sepanjang jalan raya. Waktu itu, baru ada dua mobil di Buton, masing-masing milik sultan dan kontrolir Belanda. Penduduk yang baru kali ini melihat mobil menyebutnya sebagai *soronga mokalingka-lingka* yang artinya 'peti yang berjalan-jalan.' Peristiwa penting lain adalah masuknya listrik ke Bau-Bau. Sultan Muhammad Hamidi mangkat pada 23 Januari 1937 dan digantikan oleh saudaranya, La Ode Falihi atau Muhammad Falihi. Putra Sultan Muhammad Hamidi yang bernama La Ode Hadi kelak menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara pertama.

c. Kesultanan Buton Semasa Penjajahan Jepang dan Era Kemerdekaan

Muhammad Falihi menaiki singgasana Kesultanan Buton dengan gelar Sultan Muhammad Falihi Kaimuddin (1938–1960). Ia adalah sultan ke-38 dan sekaligus yang terakhir. Pada masa pemerintahannya, Belanda membuka sekolah guru di Bau-Bau. Selain itu, proyek air leding guna memenuhi kebutuhan warga istana dan sekitarnya selesai pada 1940. Pada tahun yang sama, masuklah bala tentara Jepang ke Kepulauan Nusantara. Terjadi peristiwa berdarah di Wanci yang dipicu oleh La Ode Muniru dan La Ode Abdulu. Keduanya kemudian dihukum mati oleh Jepang. Pada 1942, sultan hadir di Kendari guna menemui Nakamura, panglima bala tentara pendudukan Jepang. Sultan menerima perintah agar ia menjalankan fungsi pemerintahan di Buton, bahkan pihak Jepang memberikan 40 pucuk senjata yang diperuntukkan bagi polisi kerajaan. Penjajahan Jepang tidak berlangsung lama dan Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun, Belanda tidak bersedia mengakui kedaulatan RI dan berupaya menancapkan kembali kekuasaannya dengan membentuk berbagai negara boneka, salah satunya adalah Negera Indonesia Timur (NIT). Buton kemudian menjadi bagian NIT.

Pada 1946, pemerintah Belanda yang hadir kembali setelah berakhirnya masa pendudukan Jepang mendirikan sekolah MULO di Bau-Bau dengan seorang berkebangsaan Belanda bernama W. Brijnen sebagai kepala sekolahnya. Berbagai jabatan yang dihapuskan pada 1910 dihidupkan kembali,[754] yakni dengan pengangkatan La Ode Hibali sebagai Raja Sorawolio, La Ode Lalangi sebagai Raja Badia, La Ode Abidi sebagai *kapitaraja matanayo*, dan La Ode Muhammad Hanafi sebagai *kapitaraja sukanayo*.

Keutuhan pemerintahan Swapraja Buton terusik ketika Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Kahiruddin Syahabat, datang ke Buton pada 1950. Ia memberhentikan dan menghapuskan jabatan *sapati* yang dijabat oleh La Ode Aero, *kanepulu* yang dijabat oleh La Ode Mihi, *kapitalau matanayo* yang dijabat oleh La Ode Abidi, *lakina badia* yang dijabat La Ode Lalangi, dan *bonto ogena sukanayo* yang dijabat oleh La Adi. Sedangkan La Naihi yang menjabat *bonto ogena matanayo* telah terlebih dahulu mengundurkan diri dan memperoleh hak pensiun. Dengan dihapuskannya berbagai jabatan penting ini, yang tertinggal di dewan pemerintahan Swapraja Buton hanya sultan dan empat orang anggota biasa.[755]

754. Lihat *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton) III*, halaman 127.
755. Lihat *Kekuasaan, Sejarah, & Tindakan: Sebuah Kajian Tentang Landskap Budaya*, halaman 227–228.

Belum cukup dengan itu semua, La Ode Halim yang dilantik sebagai Bupati Buton pada 1957 oleh Presiden Sukarno menghadap Sultan Muhammad Falihi di istananya. Ia mengutarakan keinginannya agar Muhammad Falihi menyerahkan kesultanan ke tangannya. Sultan menjadi berang dan meminta Halim mengulangi perkataannya. La Ode Halim menegaskan kembali bahwa ia kini adalah bupati yang dipilih oleh presiden dan meminta agar Kesultanan Buton diserahkan kepadanya. Menurut Halim, pengangkatannya sebagai bupati itu secara otomatis berarti bahwa ia adalah pengganti sultan. Muhammad Falihi menjawab dengan keras dan mengatakan bahwa jabatan sebagai bupati atau kepala daerah itu tak ubahnya dengan asisten residen di zaman Belanda. Rumah yang ditempati Halim itupun adalah bekas tempat kediaman asisten residen. Dan Sultan Muhammad Falihi tetaplah sultan di Tanah Wolio (Buton).

Apabila ingin memecatnya, sultan menantang Halim agar membentuk kembali dewan adat Buton (*siolimbona*) yang berwenang memecat sultan, baru setelah itu *siolimbona* memberhentikan dirinya. La Ode Halim terdiam dan bergegas pulang dengan diiringi kutukan Sultan Muhammad Falilhi. Sultan kemudian mengatakan bahwa Kesultanan Buton laksana menggenggam es dipegang; meleleh dengan sendirinya.[756] Apa yang diungkapkan oleh Sultan Muhammad Falihi terbukti benar adanya karena kesultanan baru berakhir setelah sultan mangkat. Sultan Muhammad Falihi berpulang pada 23 Juli 1960 dan bersamaan dengan itu berakhir pula Kesultanan Buton. Sebagai penutup, putranya yang bernama H. Drs. La Ode Manarfa pernah terpilih sebagai anggota MPR/ DPR RI.

d. Sistem Pemerintahan

Kerajaan Buton diperintah oleh seorang sultan yang dipilih dari tiga kelompok bangsawan (*kaomu*), yakni Tanailandu, Kumbewaha, dan Tapi-Tapi. Selain sultan, masih terdapat suatu dewan adat atau menteri yang disebut *siolimbona* dan beranggotakan sembilan *bonto*. Para *bonto* ini juga merupakan kepala sembilan wilayah yang membentuk daerah inti Kesultanan Buton. Sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian sebelumnya, awalnya dewan ini hanya terdiri dari empat *bonto* saja dan disebut *patalimbona.* Kesembilan *bonto* tersebut masing-masing adalah[757]

756. Lihat *Kekuasaan, Sejarah, & Tindakan: Sebuah Kajian Tentang Landskap Budaya*, halaman 229.
757. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Tenggara*, halaman 14.

1. *Bontona* Baluwu
2. *Bontona* Peropa
3. *Bontona* Gundu-Gundu
4. *Bontona* Barangkatopa
5. *Bontona* Gama
6. *Bontona* Siompu
7. *Bontona* Wandailolo
8. *Bontona* Rakyah
9. *Bontona* Melai

Keempat *bonto* yang pertama merupakan anggota Patalimbona, yang belakangan berkembang menjadi Siolimbona. Mereka memegang peranan penting dalam memilih, mengangkat, serta memberhentikan sultan.

Berbeda dengan sultan yang berasal dari kaum *kaomu* (bangsawan), anggota Siolimbona berasal dari kaum *walaka*. Asal muasal kaum *walaka* adalah para pemimpin masyarakat sebelum berdirinya lembaga kerajaan di Buton. Mereka merupakan golongan yang mengangkat raja atau *primus inter pares*. Setelah kerap terjadi pernikahan di antara kedua kaum ini, Sultan Lang Kariri (Durul Alam) melarangnya.

Dalam menjalankan roda pemerintahan negerinya, sultan dibantu oleh para pejabat berupa *sapati, kanepulu, lakina sorawolio, lakina baadiya, kapitalau matanayo, kapitalao sukanayo, bonto ogena matanayo*, dan *bonto ogena sukanayo*. *Sapati* bertugas menjalankan pemerintahan kerajaan dan fungsinya boleh disetarakan dengan seorang perdana menteri. Wilayah kekuasaannya meliputi Pulau Kabaena. *Kanepulu* berperan membantu *sapati* dan tugasnya berkaitan dengan rakyat banyak. Ia disebut pula sebagai kepala kehakiman. *Lakina sorawolio* dan *lakina baadiya* merupakan kepala kota Sorawolio beserta Baadiya, dua kota terpenting Buton. Jabatan ini dimaksudkan sebagai pengamanan terhadap keraton dan Kerajaan Buton. Dua orang *kapitalau* bertugas pula mengamankan kerajaan. *Kapitalau matanayo* memiliki kewenangan di sebelah timur, sedangkan *kapitalau sukanayo* di barat. Para *bonto ogena* bertanggungjawab menangani masalah penghasilan kerajaan, seperti pajak dan lain sebagainya. Daerah wewenang mereka juga terbagi menjadi timur (*matanayo*) dan barat (*sukanayo*).

Selain daerah inti kerajaan, Kesultanan Buton mengenal pula daerah yang disebut *barata*. Secara harfiah, *barata* berarti 'cadik' atau penyeimbang sebuah perahu. Oleh karenanya, daerah *barata* dimaksudkan sebagai penjaga kestabilan kerajaan. Terdapat

empat *barata* di Kesultanan Buton, yakni Muna, Tiworo, Kalingsusu, dan Kaledupa. Kendati demikian, Muna menolak dianggap sebagai *barata* Buton dan memandang dirinya sebagai kerajaan merdeka. Pada masa penjajahan Belanda, Buton dibagi menjadi berbagai distrik. Nama-nama distrik yang ada pada 1913 adalah Tiworo, Gu, Mawasangka, Kalingsusu, Kaledupa, Binongko, Kabaena, Tomia, Wanci, Poleang, Kapontori, Rumbia, Pasarwajo, Lasalimu, Bolio (Wolio), Bungi, Wakarumba, Bantauga, dan Sampolawa.

e. Sosial Kemasyarakatan dan Perekonomian

Kerajaan Buton sebagian besar dihuni oleh suku Buton (Wolio). Mayoritas penduduk hidup dari hasil pertanian dan perladangan. Makanan pokok mereka adalah umbi-umbian dan jagung. Varietas umbi yang sering dikonsumsi adalah *lame butung*. Tanaman pangan jenis ini umbinya tunggal dan besar serta disebut *uwi* oleh orang Buton atau *mafu* oleh orang Muna. Selain itu, ubi kayu jenis beracun (disebut *uwi kau* dalam bahasa Buton) merupakan salah satu makanan pokok di Buton dan Muna. Ubi semacam ini diolah sedemikian rupa sehingga dapat langsung dimakan. Sementara itu, sisanya dikeringkan dan diawetkan menjadi umbi kayu kering (*kabuto*). Umbi kayu dari jenis yang tak beracun baru dikenal pada kurang lebih abad 20 dan disebut *uwi kayu Ambo* (ubi kayu Ambon) atau ubi kayu *landibau* (berasal dari bahasa Belanda *landbouw*). Beras juga merupakan makanan pokok bagi sebagian penduduk Buton, terutama para pemuka masyarakat dan pendatang. Beras putih bagi konsumsi didatangkan dari Makassar. Kegiatan pertanian yang dilangsungkan masyarakat masih bersifat tradisional dan dikerjakan menggunakan alat-alat seadanya.

Tanaman pangan lainnya adalah pisang dan kelapa. Di Pulau Siompu dan Kadatua, masyarakat menanam jeruk (*lemo*) cina yang disebut *makalona patani*. Kelapa hanya ditanam secara selingan dan tidak dibudidayakan secara khusus. Pulau Muna banyak menghasilkan kopi yang hasilnya dapat diperdagangkan ke luar daerah. Penduduk yang tinggal di daerah pantai tentunya juga bermatapencaharian sebagai nelayan dan pedagang. Mereka tak hanya menangkap ikan, tetapi juga mengumpulkan teripang, penyu, rumput laut, mutiara, dan lain sebagainya. Pejabat-pejabat Buton ada pula yang memiliki armada perahu dagang dan biasa mengangkut komoditas ke Maluku. Bahkan pelaut-pelaut Buton sanggup berlayar hingga Singapura. Kapal-kapal yang dipergunakan oleh orang Buton memiliki bobot 3 sampai 5 ton. Para pelaut yang andal ini kebanyakan berasal dari Kepulauan Tukan Besi (Wakatobi).

Meskipun mata uang Belanda menjadi alat tukar resmi di Buton, masyarakat masih memiliki alat tukar khusus berupa sepotong tenunan yang disebut *kampua* atau *bida*.[758] Mata uang jenis ini diperbaharui setiap tahunnya dan hanya berlaku dalam ruang lingkup Kerajaan Buton sendiri dan tak berlaku bagi para pedagang-pedagang dari luar kerajaan. Empat puluh *kampua* nilainya 10 sen (*een nieuwe dubbeltjes*).[759] Oleh karena sirkulasi mata uang Belanda yang tak merata, alat tukar lain yang kerap dipergunakan oleh masyarakat Buton adalah garam dan gambir. Sepuluh tempurung garam atau 20 potong gambir disetarakan nilainya dengan 10 sen.

Rakyat Buton diwajibkan membayar pajak berupa hasil bumi tertentu, selain itu kepala wilayah yang tinggal di ibu kota kehidupannya harus ditanggung oleh rakyat yang bersangkutan. Apabila kewajiban membayar pajak ini tak dapat dipenuhi, rakyat wilayah itu secara masal dijadikan budak, sebagaimana yang kerap terjadi semasa pemerintahan Sultan La Awu (1654–1664).

II. KONAWE

a. Cikal Bakal dan Perkembangan Kerajaan Konawe

Cerita rakyat Konawe mencatat bahwa pendirian Kerajaan Konawe berawal dari turunnya seorang dewa dari langit (*sangia ndudu*; *sangia* berarti 'dewa', dan *ndudu* berarti 'turun') bernama To Lahianga.[760] Kerajaan yang didirikannya terpecah menjadi tiga, yakni Padangguni, Wawolesea, dan Besilutu. *Mokole* (Raja) Padangguni bernama To Tongano Wonua berupaya menyatukan kembali ketiga kerajaan tersebut. Konon saat itu, turunlah *sangia ndudu* kedua yang bernama Wekoila. Menurut legenda, Wekoila masih bersaudara dengan pendiri Kerajaan Mekongga, Larumbalangi.[761] Wekoila menikah dengan putra To Tonggano Wonua yang bernama Ramandalangi dan selanjutnya diangkat sebagai *mokole* wanita Konawe. Peristiwa ini menandakan bergabungnya ketiga kerajaan tersebut menjadi satu. Kerajaan Konawe yang merupakan hasil penyatuan ketiga kerajaan di atas semula berpusat di Olo-Oloho, tepi Sungai Konawe'eha (Desa Uepai sekarang). Pusat pemerintahan kemudian dipindahkan ke Una'aha (*Una* berarti 'padang', *aha* berarti 'luas').[762]

758. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Tenggara*, halaman 49.
759. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Tenggara*, halaman 49.
760. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Tenggara*, halaman 29.
761. Lihat *Kebudayaan Tolaki*, halaman 52.
762. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Tenggara*, halaman 29.

Konon, wabah penyakit pernah mengganas di Konawe dan menewaskan banyak penduduknya. Peristiwa ini digambarkan dengan munculnya biawak raksasa beserta kerbau berkepala dua yang memangsa rakyat Konawe dalam cerita rakyat setempat. Musibah ini dapat diatasi oleh seorang dukun sakti bernama Latuanda yang sanggup membunuh kedua hewan buas tersebut. Sementara itu, datang pula seorang tokoh bernama Onggabo. Ia diceritakan menikahi salah seorang gadis yang selamat dari wabah tersebut yang bernama Elu (gelarnya adalah Kambuka Sioropo Korembutano). Onggabo menata kembali kehidupan rakyat Konawe yang baru saja diporakporandakan wabah penyakit. Keturunan Onggabo inilah yang selanjutnya menjadi raja-raja Konawe. Semasa pemerintahan Onggabo, kerajaan dibagi menjadi beberapa *tobu* dengan *puu tobu* (*mbutobu*) sebagai kepalanya. Di bawahnya, memerintah para *toono motua*, yang dibantu oleh *pabitara* (pemangku adat), *tadu* (pejabat yang bertanggung jawab terhadap urusan peperangan), *tamalaki* (panglima perang), *posudo* (bendahara), *tolea* (duta adat), *mbuowai* (dukun), *mbuokoi* (menangani urusan kepercayaan rakyat), dan *mbusehe* (utusan perdamaian).

Konawe kemudian diperintah oleh para keturunan Onggabo. Raja-raja berikutnya adalah Anamiandapo (± 1530–1540), Tanggolowuta (± 1540–1570), Elu Langgai (± 1570–1600), dan Melamba (Melamba I, ± 1600–1620). Melamba merupakan saudara Sultan Buton pertama. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Konawe mencapai puncak kejayaannya dengan wilayahnya yang meliputi hampir seluruh semenanjung Sulawesi Tenggara. Melamba digantikan oleh putranya yang bernama Pati (± 1620–1640) dan raja-raja Konawe berikutnya adalah Maago (± 1660–1680), Sangia Ngginoburu (± 1680–1700), Sorumba (± 1700–1720), Melamba II (± 1720–1740), Sendebunggu (± 1740–1770), Sea Tiningga (± 1770–1800), dan Tebawo (± 1800–1830). Semasa pemerintahan Tebawo, ditetapkan *siwole mbatohu* dan *pitu dula batu*, yakni pembagian empat wilayah Kerajaan Konawe dan tujuh kementerian (lihat ulasan tentang sistem pemerintahan Konawe). Setelah meninggalnya Mokole Konawe terakhir, dewan kerajaan tidak sanggup lagi memilih penggantinya dan negeri itu diperintah oleh *sulemandara*, yang tak memiliki cukup wibawa untuk mengendalikan kerajaannya. Distrik Ranomeeto menjadi makin menonjol sehingga membuka peluang berdirinya Kerajaan Laiwui.

b. Sistem Pemerintahan

Kerajaan Konawe dikenal pula dengan sebutan *siwole mbatohu, pitu dula batu, tolu mbulo anakia mbutobu, tolu etu la'usa, sio sowu ana niawo*, yang berarti 'suatu kerajaan yang wilayahnya berbentuk persegi empat, terdiri dari tujuh kementerian, tiga puluh wilayah kecamatan, tiga ratus buah kampung (desa), dan sembilan ribu kepala keluarga'.[763] Raja Konawe bergelar *mokole*, yang berkedudukan di Una'aha, ibu kota Konawe. Istilah *siwole mbatohu* mengacu pula pada empat wilayah kekuasaan Konawe, yakni[764]

- Wilayah kekuasaan sebelah timur kerajaan (*tambo i losoano oleo*), yang dikuasai seorang pemimpin bergelar *sapati* atau *kowuna nggona'ia Ranomeeto*. Kedudukannya berada di Pu'u Mbopondi, Ranomeeto.
- Wilayah kekuasaan sebelah barat kerajaan (*tambo i tepuliano oleo*), yang dikuasai seorang pemimpin bergelar *sabandara*, *ore-ore mebubu i latoma*. Kedudukannya berada di Kondara'asi, Latoma.
- Wilayah kekuasaan sebelah utara kerajaan (*barata i hana*), yang dikuasai seorang pemimpin bergelar *ponggawa i una*. Kedudukannya berada di Lalonggowuna, Tonga'una.
- Wilayah kekuasaan sebelah selatan kerajaan (*barata i moeri*), yang dikuasai seorang pemimpin bergelar ana *inowa-owa wuta i asaki*. Kedudukannya berada di Puri'ala, Asaki.

Selanjutnya, yang disebut tujuh menteri atau aparat kerajaan (*pitu dula batu*, arti harfiahnya adalah 'tujuh piring batu') adalah[765]

- Menteri pertahanan yang disebut *tutuwi notaha, rambaha monggasono o Una, polapi wunggu'arono wuta Konawe* (arti harfiahnya adalah 'bendera merah, batu asahan negeri Una yang tajam, benteng pertahanan kerajaan Konawe'). Gelarnya adalah *anakia ndamalaki* dan berkedudukan di Anggaberi.
- Menteri pertanian yang disebut *tusa wuta, rome romeno wuta Konawe* (arti harfiahnya adalah 'tiang pusat tanah, sumber kemakmuran rakyat Konawe'). Gelarnya adalah *anakia ndusawuta* dan berkedudukan di Kasupute.

763. Lihat *Kebudayaan Tolaki*, halaman 184.
764. Lihat *Kebudayaan Tolaki*, halaman 185.
765. Lihat *Kebudayaan Tolaki*, halaman 185–186.

- Menteri peradilan adat yang disebut *bite kinalumbi* (arti harfiahnya adalah 'pohon sirih yang kokoh dan membelit'). Gelarnya adalah *anakia kinalumbi* dan berkedudukan di Kasupute.
- Hakim adat yang disebut *kotubitara* (pemutus perkara). Gelarnya adalah *anakia mbabitara* dan berkedudukan di Wonggeduku.
- Aparat penegak hukum yang disebut *petumbu lara dati* (arti harfiahnya adalah 'tiang agung rumah dari teras kayu jati'). Gelarnya adalah *anakia mbetumbu* dan berkedudukan di Tuda'one.
- Aparat kerukunan hidup yang disebut *bite metado* (arti harfiahnya adalah 'daun sirih yang bertulang buku sejajar'). Gelarnya adalah *anakia metado* dan berkedudukan di Una'aha.
- Aparat mata-mata yang disebut *tusa lara dati* (arti harfiahnya adalah 'tiang rumah dari teras kayu jati'). Gelarnya adalah *anakia ndusa lara* dan berkedudukan di Lasosabila.

Untuk menangkis serangan musuh yang datang dari darat dan laut, terdapat dua orang panglima perang yang bergelar *kapita ana molepo* (arti harfiahnya adalah 'kapten anak muda') dan *kapita lau* (kapten laut). *Kapita ana molepo* berkedudukan di Uepai dan bertanggung jawab memimpin angkatan perang kerajaan melawan musuh di darat. Sementara itu, dari gelarnya mudah diketahui bahwa *kapita lau* yang berkedudukan di Pu'usambalu Sambara bertugas mengamankan kawasan lautan kerajaan.

Di samping jabatan-jabatan di atas, yang tak kalah pentingnya adalah *sulemendara*. Tugasnya berkenaan dengan penyelenggaraan urusan dalam negeri. Kedudukannya berada di Pu'osu. Raja masih memiliki lagi pejabat pengawal istana yang bergelar *tu'oi* (arti harfiahnya adalah 'bambu runcing'). Pejabat ini berkedudukan di Una'asi. Sebagai kepala rumah tangga istana, diangkatlah pejabat bergelar *anakia mombonahu'ako* (arti harfiahnya adalah 'pengurus dapur istana raja') yang berkedudukan di Toriki. Calon pengganti raja yang disebut *inea sinumo, towu tinorai, wuta mbinotiso* (arti harfiahnya adalah 'pinang terbungkus yang tersimpan, tebu terpelihara, negeri cadangan Kerajaan Konawe') berkedudukan di Abuki.

Tolu mbulo anakia mbutohu berarti 'tiga puluh wilayah kekuasaan' yang mengacu pada pembagian daerah Kerajaan Konawe. Masing-masing daerah itu dipimpin oleh seorang *putobu* (kepala wilayah). Di bawahnya masih terdapat *tolu etu la'usa* yang berarti 'tiga ratus kampung.' Setiap kampung di Konawe dikepalai oleh kepala

kampung bergelar *tonomotuo*. Selanjutnya, *sio sowu ana niawo* (arti harfiahnya adalah 'sembilan ribu penduduk') mengacu kepada rakyat Konawe.

III. LAIWUI

a. Cikal Bakal dan Perkembangan Kerajaan Laiwui

Kerajaan Laiwui muncul pada awal abad 19 dan berasal dari Kerajaan Konawe. Laiwui dahulunya adalah salah satu distrik Ranomeeto dari Kerajaan Konawe yang kepalanya diberi gelar *sapati*. *Mokole* (Raja) Konawe yang terakhir meninggal pada akhir abad 18 dan dewan adat kerajaan tidak berhasil memilih penguasa baru sehingga akhirnya masing-masing distrik atau daerah diperbolehkan mengurus dirinya sendiri-sendiri. Meskipun demikian, mereka masih menjaga kesatuan di bawah seorang perdana menteri (*sulemandara*). Pada masa itu, wilayah Ranomeeto diperintah oleh seorang kepala daerah (*sapati*) yang bernama Tebau (Tebawo). Akhirnya, atas persetujuan *sulemandara*, ia diangkat sebagai raja (*mokole*) pertama Ranomeeto dengan pusat pemerintahan di Lepo-Lepo. Dengan demikian, Ranomeeto naik statusnya menjadi kerajaan dan belakangan juga disebut Laiwui. Pengganti Tebau adalah putrinya, Maho, yang disebut *Verstim vet Laiwui* (Bangsawan Wanita dari Laiwui) oleh Ligvoet.

Maho digantikan oleh La Mangu, putra buah pernikahannya dengan putra Aru Bakung. Ia merupakan raja yang pertama kali menandatangani kontrak politik berupa Plakat Panjang pada 13 April 1858. Aru Bakung merupakan pemimpin pertama orang Bugis yang berdiam di kawasan Laiwui. Ia adalah seorang bangsawan Bone yang memilih pindah ke muara Sampara di Kerajaan Laiwui karena terjadi kemelut di kampung halamannya. Selanjutnya, Aru Bakung berpindah ke Tiworo, salah satu kerajaan bawahan Buton dan menikah dengan putri penguasanya. Aru Bakung berniat membebaskan Tiworo dari kekuasaan Buton, tetapi gagal. Raja Laiwui yang bernama Tebau lantas mengundangnya bermukim di negerinya pada 1823 atau 1824. Berbekalkan mandat yang diterima dari Tebau, Aru Bakung berhasil mengamankan kawasan Teluk Kendari dan menegakkan kewibawaannya di sana sehingga ia diangkat sebagai pemuka bagi suku Bugis yang berdiam di Laiwui. Aru Bakung terpaksa meninggalkan Teluk Kendari setelah orang-orang Bugis melakukan pemilihan pemuka mereka sebagai pengganti Aru Bakung. Pemuka kaum keturunan Bugis tidak diangkat berdasarkan keturunan, melainkan melalui pemilihan. Tetapi asal usul dan keturunan yang bersangkutan menjadi bahan pertimbangan.

La Mangu digantikan oleh Sao Sao dengan dukungan resmi Belanda dan para penggantinya–yang selanjutnya disebut raja-raja Laiwui. Pada masa pemerintahannya, kedudukan orang Bugis dan Bajo telah sedemikian pentingnya sehingga dalam kontrak politik pada 21 Desember 1885, pemuka orang Bugis (*het hooft der Boegineezen*) serta Bajo (*het hooft der Badjoreezen*) turut pula menandatanganinya–selain raja, *kapita* dan *sapati*. Raja Sao Sao juga telah memindahkan ibu kota Laiwui dari Lepo-Lepo ke Kendari pada 1927. Pengganti Sao Sao adalah putranya yang bernama Tekaka (1928–1955). Tekaka merupakan raja terakhir Laiwui. Bala tentara Jepang masuk bertepatan dengan masa pemerintahannya. Sebelumnya, aparat-aparat Belanda telah ditangkap sehingga praktis administrasi pemerintahan menjadi lumpuh. Sisa-sisa pasukan KNIL yang pernah menjadi tulang punggung pemerintah kolonial Belanda melakukan perlawanan 3 kilometer dari Kendari, tetapi rontok oleh gerak maju bala tentara Jepang. Hampir seluruh anggota pasukan KNIL tewas, walaupun korban di pihak Jepang juga tidak boleh dikatakan sedikit. Pejabat kehutanan bernama van der Staar dan pendeta Gouweloos ditembak mati oleh Jepang saat melarikan diri. Kendari, ibu kota Kerajaan Laiwui jatuh ke tangan Jepang. Tekaka selaku Raja Laiwui segera mengakui kekuasaan Jepang dan tetap menjalankan pemerintahan negerinya.

b. Sistem Pemerintahan

Kerajaan Laiwui dibagi menjadi beberapa kawasan yang terbagi menjadi dua golongan, yakni *tobu*, yang dikepalai seorang *puu tobu*; dan daerah yang dipimpin *toono motua*. Biasanya *tobu* lebih luas dari segi wilayah dan pemimpinnya merupakan keturunan bangsawan. Sedangkan satu daerah yang lain dikepalai oleh orang yang bukan bangsawan. Kedua jenis daerah ini sama-sama bersifat otonom dan mempunyai hak mengatur dirinya sendiri berdasarkan hukum adat. Selain raja, masih terdapat jabatan-jabatan penting lain seperti *sapati*, *kapita*, dan *penggawa*. Masing-masing jabatan itu diwariskan turun-temurun dan mereka masing-masing tidak jarang merangkap pula sebagai kepala wilayah.

Setelah masuknya pengaruh Belanda pada 1906, Laiwui dibagi atas 16 distrik, yakni Sampara, Abeli, Kolono, Konda, Kampung Bugis, Palanga, Andoolo, Lambuya, Wawotobi, Pondidaha, Abuki, Latoma, Lasolo, Asera dan Wiwirano, Wawonii, serta Tongauna. Selanjutnya, berbagai distrik tersebut masih dibagi lagi menjadi kampung-kampung. Kepala distrik diangkat oleh Raja Laiwui atas persetujuan Belanda. Sementara itu, para kepala kampung tetap dipilih rakyat. Pada perkembangan

selanjutnya, dibentuklah Distrik Uwepayu yang berasal dari pemecahan distrik Lambuya pada 1917. Dengan demikian, saat itu terdapat 17 distrik. Pada 1921, dibentuklah Distrik Kendari yang merupakan pecahan Distrik Sampara yang dikepalai oleh seorang *sapati*. Pada zaman Jepang, ditetapkan dua orang raja yang memerintah Laiwui, yakni Raja Laiwui selaku raja pertama dan *kapita* sebagai raja kedua.

c. Sosial Kemasyarakatan

Penduduk asli Laiwui adalah suku Tolaki, mereka membagi masyarakatnya menjadi *anakia*, *toono dadio* atau *maradika*, dan *ata* atau *andalo*. Golongan yang paling tinggi adalah *anakia* atau kaum bangsawan. Golongan ini merupakan asal muasal raja (*mokole*), dewan kerajaan, dan kepala *tobu*. Cikal bakal kaum ini adalah para bangsawan Kerajaan Konawe yang telah ada sebelumnya. Belakangan, kaum bangsawan ini bercampur pula dengan para pedagang Bugis dan Tiworo. Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa dalam diri raja-raja Laiwui berikutnya mengalir darah Bugis dan Tiworo. Dalam golongan *anakia* inipun masih dikenal tingkatan berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan seseorang dengan raja.

Toono dadio (orang kebanyakan) atau *maradika* (orang merdeka) membentuk golongan menengah dalam tatanan kemasyarakatan suku Tolaki. Kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang. Petani dan nelayan digolongkan pula ke dalamnya. Secara umum golongan ini adalah anggota masyarakat yang bukan budak, tetapi tidak tergolong ke dalam kaum bangsawan. Belakangan, para nelayan, petani, dan pekerja kasar mulai terdesak menjadi golongan bawah. *Ata* (budak) merupakan lapisan masyarakat terbawah. Menurut tradisi, ada empat hal yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam perbudakan, yakni karena diwariskan, dibeli, tidak dapat membayar utang, atau mencari perlindungan kepada seseorang. Menurut laporan Vosmaer, kehidupan dan keamanan budak-budak tersebut dijamin oleh majikannya serta dianggap sebagai anggota keluarga. Meskipun demikian, pemerintah Belanda melarang praktik perbudakan ini.

Selain Tolaki, di Laiwui masih ada suku Bugis dan Bajo. Orang-orang Bugis berhasil menduduki tempat yang penting dalam strata sosial Laiwui. Para penguasa Laiwui dari suku Tolaki menikah dengan kaum bangsawan Bugis sehingga mendudukkan mereka ke dalam elite pemerintahan Laiwui, bahkan bahasa Bugis banyak digunakan sebagai bahasa pengantar (*lingua franca*) dalam kehidupan sehari-hari, terutama di Kota Kendari. Orang Bugis makin banyak berdatangan setelah

kedatangan seorang tokoh Bugis bernama Aru Bakeng pada 1824, yang pernah gagal mematahkan dominasi Buton di Kerajaan Tiworo. Kendati Aru Bakeng harus meninggalkan Laiwui pada 1830, orang Bugis tetap menjadi komponen masyarakat yang penting di Teluk Kendari. Orang Bajo telah mendiami Teluk Kendari sejak lama, yang ditandai dengan adanya kampung Bajo. Setelah Belanda menyerang pusat pemukiman orang Bajo dalam ekspedisi militer ke Bone pada 1824–1825, mereka terpencar dan banyak yang pindah ke Kendari. Pada abad 19 dan awal abad 20, Kendari sudah menjadi pusat pemukiman yang besar bagi orang Bajo.

Suku-suku lain yang juga patut disebutkan di sini adalah To Rete yang mendiami kawasan berbukit-bukit di utara Teluk Kendari, To Kapontori yang mendiami kawasan Kapontori di sebelah barat Kendari, serta suku Muna dan Buton bermukim di Kampung Buton, timur Kendari. Kedatangan orang Muna diawali dengan larinya seorang tokoh bernama Laode Ngkada (Kantada) dari Muna karena berselisih paham dengan Raja Muna, Laode Bulai pada 1861. Kedatangannya ini diiringi oleh 300 orang pengikutnya. Ia kemudian menikah dengan bibi La Mangu, Raja Laiwui. Orang To Rete berasal dari Pulau Wawonii di Teluk Kendari. Mereka meninggalkan kampung halamannya karena gangguan perompak dari Maluku. Sementara itu, suku To Kapontori pindah dari kampung halamannya di Buton karena penindasan dari para pejabat pemerintahan di sana yang membebani mereka pajak yang berat.

Belakangan, pada awal abad 20 datanglah tiga orang bersaudara keturunan cina bernama Hom Po Seng, Hom Po Siu, dan Hom Po Kong ke Kendari untuk membuka usaha perdagangan di sana. Sesudah masuknya Belanda, makin banyak orang cina yang berdatangan ke Kendari dan membuka pemukiman di tengah kota. Kelompok asing lainnya adalah orang Jepang yang datang pada 1920-an. Selain berprofesi sebagai pedagang, kaum keturunan cina banyak yang bekerja sebagai tukang sebagaimana halnya orang-orang Bugis.

IV. MEKONGGA

a. Cikal Bakal dan Perkembangan Kerajaan Mekongga

Mekongga didirikan oleh Larumbalangi yang merupakan saudara Wekoila, pendiri Kerajaan Konawe.[766] Mula-mula lokasi pusat pemerintahan Mekongga berada di Bende, tetapi belakangan dipindahkan ke Wundulako. Kerajaan Mekongga

766. Lihat *Kebudayaan Tolaki*, halaman 52.

konon pernah tertimpa musibah besar yang digambarkan dalam cerita rakyat sebagai keganasan burung garuda raksasa. Hewan ini memangsa banyak penduduk Mekongga. Larumbalangi berhasil menewaskan garuda raksasa (*kongga*) tersebut. Berkat jasa besarnya tersebut, tujuh kepala kampung (*toono matuo*) yang merupakan cikal bakal Kerajaan Mekongga sepakat mengangkatnya sebagai raja mereka. Sementara itu, tujuh *toono matuo* menjadi dewan kerajaan. Menurut sumber lainnya, kedua bersaudara ini datang dari tanah Jawa.[767]

Para keturunan Larumbalangi yang selanjutnya memerintah Mekongga adalah Lakonunggu (Sangia Bubundu), Malanga (Sangia Mengaa), La Galiso (Sangia Mbedua), Lamba Lambasa (Sangia Rumbalasa), Lombo Lombo (Sangia Sinambakai), Teporambe (Sangia Nilulo), dan Laduma (Sangia Nibandera).[768] Menurut legenda, tatkala Larumbalangi telah lanjut usia, terdengarlah suara guruh disertai kilat sambar menyambar sehingga rakyat menjadi ketakutan. Setelah gejala alam tersebut mereda, Larumbalangi telah lenyap dan sebagai gantinya muncul pemuda gagah yang mengaku bernama Lakonunggu. Ia mengatakan bahwa ayahnya telah kembali ke langit dan kini ia ditugaskan menggantikannya sebagai Raja Mekongga. Setelah beberapa lama memerintah, Lakonunggu juga raib dan digantikan oleh Malanga. Proses pergantian yang sama juga berlaku bagi raja berikutnya, La Galisa.

Pengganti La Galisa, Lamba Lambasa menikah dengah dengan putri Mokole Toburi (Moronene) dan memperoleh mahar (*tiari*) berupa wilayah sebelah selatan Mekongga. Semasa pemerintahannya, mulai dibentuk jabatan *kapita*, *pabitara*, dan *sapati*. Putra Lamba Lambasa, yakni Lombo Lombo, menikah dengan putri Konawe (anak Sabandara Latoma). *Tiari* pernikahan ini adalah sebagian besar wilayah Latoma diserahkan pada Mekongga. Lombo-Lombo merupakan Raja Mekongga yang pertama kali menggunakan gelar *bokeo* serta mendirikan *sara wonua* (kabinet kerajaan).[769] Wilayah Mekongga dibagi menjadi satuan pemerintahan sebagai berikut.

- Tujuh wilayah *toono motuo* yang membentuk inti kerajaan dan diperintah langsung oleh raja.
- Enam wilayah yang diperintah oleh seorang *mokole* dan disebut *puu tobu* (*mbu tobu*).

767. Lihat *Kota Pelabuhan Kolaka di Teluk Bone, 1906–1942*, halaman 43.
768. Menurut sumber *Kota Pelabuhan Kolaka di Teluk Bone, 1906–1942*, halaman 143, Lombo Lombo memerintah pada 1550–1598, sedangkan Laduma (Sangia Nibandera) memerintah pada 1699–1748.
769. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Tenggara*, halaman 38.

Menurut penuturan cerita rakyat, kendati sudah berumur empat tahun, ubun-ubun Lombo Lombo belum keras. Dalam bahasa setempat, *lombo lombo* berarti 'ubun-ubun,' yang tampaknya merupakan asal muasal namanya. Suatu ketika, pengasuhnya yang bernama Inaweduangga bermimpi berjumpa neneknya yang bernama Wasasi Wasabenggali. Sang nenek berpesan bahwa tulang ubun-ubun Lombo Lombo baru dapat tumbuh setelah diadakan upacara adat *Sinosambakai*. Benar saja, setelah upacara diadakan, tumbuhlah tulang ubun Lombo Lombo. Peristiwa ini menjadi asal muasal penyelenggaraan upacara adat yang diadakan khusus bagi anak pertama tersebut. Sedangkan anak kedua dan selanjutnya tidak perlu diadakan lagi upacara semacam itu.

Lombo Lombo digantikan oleh putranya, Teporambe, yang setelah meninggal digelari Sangia Nilulo. Pada masa Teporambe, masuklah agama Islam melalui Luwu. Meskipun demikian, Teporambe belum menganut agama Islam. Putra dan penggantinya, Laduma (Sangia Nibandera), merupakan Raja Mekongga pertama yang menganut agama Islam. Makamnya masih dipelihara oleh keturunannya hingga kini.[770] Pada masa Laduma, berlangsung peperangan antara Gowa dan Bone yang dipimpin oleh Arung Palakka. Laduma menempatkan seorang raja bawahan (*mokole*) di Kondoeha (Lelewawo) guna mengamankan bagian barat kerajaan. Mekongga boleh dikatakan mencapai zaman keemasannya pada masa pemerintahan Laduma.

Hubungan dengan Luwu menjadi makin erat dan Mekongga masuk ke dalam daerah pengaruh Luwu. Rangkaian penguasa Mekongga berikutnya setelah Laduma adalah Lapobandu (Sea i Kapu-kapu), Lasipala (Sea i Puuduria), Lasikiri (Sea i Puuduria), Pobe (Sea I Lombasia), Mburi (Sea i Wundulako, seorang *bokeo* wanita, 1828–1863), Bioha (Sea i Wundulako), Latambaga (Sea i Kambobaru, 1906–1932), Indumo (Opu Daeng Makkalu, 1932–1945), Guro (1945), dan Puwatu. Pada masa pemerintahan Bokeo Mburi, industri anyaman mengalami perkembangan.[771] Hasil kerajinan rakyat tersebut lantas dipasarkan hingga Bone dan Palopo. Sumber lainnya menyebutkan mengenai seorang *bokeo* bernama Boela (1863–1904) yang mendahului Latambaga. Pada masa pemerintahannya, hutan-hutan damar telah dijadikan sebagi penopang perekonomian Mekongga.[772] Semasa pemerintahan Latambaga, damar makin penting peranannya sehingga menjadi komoditas perdagangan bagi raja beserta kepala-kepala kampungnya. Belanda tidak mengakui Mekongga sebagai kerajaan yang

770. Lihat *Kebudayaan Tolaki*, halaman 54.
771. Lihat *Kota Pelabuhan Kolaka di Teluk Bone, 1906–1942*, halaman 93.
772. Lihat *Kota Pelabuhan Kolaka di Teluk Bone, 1906–1942*, halaman 76.

terpisah dari Luwu. Oleh karena itu, segenap perjanjian antara Luwu dengan Belanda mencakup pula Mekongga.

Seiring dengan masuknya pengaruh Belanda, pemilihan dan pengangkatan *bokeo* (Raja Mekongga) tidak lagi berdasarkan adat, melainkan ditentukan oleh pemerintah kolonial. Sewaktu Latambaga mangkat pada 1932, yang diangkat sebagai penggantinya adalah Indumo, tanpa meminta persetujuan dewan adat Mekongga. Seharusnya yang lebih berhak adalah Kapita Konggoasa, putra Raja Latambaga. Indumo selanjutnya diangkat pula sebagai *sulewatang* Kolaka merangkap Raja Mekongga dan Kepala Distrik Kolaka.[773]

Sebagai tambahan, pada 14 Februari 2013 penulis sempat berjumpa dengan Bapak Abbas Pullah yang memberikan silsilah Kerajaan Mekongga. Namun, isinya memiliki perbedaan dengan data di atas. Demi melengkapi pembahasan dalam buku ini, penulis akan cantumkan pula silsilah tersebut.

Menurut data yang diberikan oleh Bapak Abbas Pullah, urutan raja-raja Mekongga adalah Larumpalangi, Ranggapo'u, Sikiri, Lapotende, Siti Nauso, dan Muhammad Kondi Pullah selaku raja terakhir Mekongga.[774]

Silsilah Kerajaan Mekongga yang berasal dari Bapak Abbas Pullah
Foto koleksi pribadi

773. Lihat *Kota Pelabuhan Kolaka di Teluk Bone, 1906–1942*, halaman 57.
774. Wawancara dengan Bapak Abbas Pullah pada 14 Februari 2013.

b. Sistem Pemerintahan

Raja-raja Mekongga mulanya bergelar *mokole*, namun belakangan diubah menjadi *bokeo*. Makna harfiahnya adalah 'buaya.' Sebagian pihak menafsirkan bahwa gelar tersebut dapat diartikan bahwa seorang raja hendaknya ditakuti oleh rakyatnya, sebagaimana ketakutan mereka terhadap buaya. Tetapi ada pula yang menafsirkan bahwa gelar tersebut mengacu pada raja yang menguasai pinggir laut.

Sehubungan dengan administrasi pemerintahan, Kerajaan Mekongga terbagi atas empat wilayah besar,[775] yaitu

- Wilayah sebelah timur kerajaan dikepalai oleh seorang tokoh bergelar *pabitara*, yang berkedudukan di Epe.
- Wilayah sebelah barat kerajaan dikepalai oleh seorang tokoh bergelar *sapati*, yang berkedudukan di Kolaka.
- Wilayah sebelah timur kerajaan dikepalai oleh seorang tokoh bergelar *kapita*, yang berkedudukan di Balandete.
- Wilayah sebelah selatan kerajaan dikepalai oleh seorang tokoh bergelar *putobu*, yang berkedudukan di Lamekongga.

Ibu kota Kerajaan Mekongga awalnya berada di Kowioha, tetapi belakangan dipindahkan ke Wundulako. Kerajaan ini hanya meliputi tujuh kampung saja, yakni Tikonu, Pu'ehu, Sabilambo, Po'ondui, Lalomba, Ulu Nggolaka, dan Manggolo. Setiap kampung ini dikepalai oleh seorang kepala kampung (*tonomotuo*). Pada masa pendudukan Belanda, Mekongga dibagi menjadi berbagai distrik. Nama-nama distrik yang ada pada 1907 adalah Kolaka, Singgere, Lapai, Mambulu, Tawanga, Konaweha, dan Kondoeha. Pada 1933, dibentuk tiga *onderdistrik* di Mekongga, yakni Solewatu, Kolaka, dan Patampanua.[776]

V. MORONENE

Wilayah Kerajaan Morone kini terletak di Kabupatan Bombana, Sulawesi Tenggara. Kerajaan ini kemudian terbagi menjadi tiga kerajaan, yakni Rumbia, Poleang, dan Kobaena. Raja-raja pertama Moronene adalah Dendeangi, Lukubaresse, Nukulangi, Eluntoluwu, Suu', Sura, Sangia Dowo, Sangia Retena, Sangia Puso, Onda, dan Muhammad Ali. Silsilah raja-raja Moronene ini terputus dan baru pada 1700

775. Lihat *Kebudayaan Tolaki*, halaman 187.
776. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Tenggara*, halaman 66.

diketahui lagi rangkaian penguasanya, yaitu Sangia Niweha (1700–1760), Sangia Nikinale (1960–1830), Sangia Rahawatu (1830–1943), Sangia Tandole (1943–1950), dan Ipimpie (1950–1962).[777]

Menurut sumber lain, Dendeangi beserta permaisurinya, Morimpopo, merupakan pemimpin bagi kelompok masyarakat yang pertama kali tiba dan menghuni kawasan tersebut.[778] Konon, Dendeangi dilantik sebagai raja pertama Moronene oleh Sawerigading. Sementara itu, masyarakat yang ada di Rumbia dan Poleang menyatakan bahwa leluhur mereka berasal dari bambu gading (*datebota ao gading*), sedangkan istrinya berasal dari bunga kayu waru (*haitolomeano waru*).[779] Disebutkan pula bahwa pada abad 13 terdapat seorang raja bernama Kapitan Manjawari yang berkedudukan di Tangkeno. Ia setiap tahunnya menyerahkan beras sebagai upeti kepada Sultan Buton ke-5. Ada pula sumber yang mengatakan bahwa Dendeangi merupakan saudara Mokole Arimatesima, raja pertama Konawe.

Kerajaan Moronene kemudian pecah menjadi tiga, yakni Poleang (berpusat di Toburi), Rumbia (berpusat di Taubonto), dan Kabaena (berpusat di Tangkeno). Raja Poleang tewas dalam peperangan di Pomalaa melawan Luwu. Ia meninggalkan dua orang anak, yakni Wasirimani dan Elu Olentewu.[780] Elu Olentewu lantas menjadi Raja Poleang berikutnya. Orang Moronene tak akan menyebutkan nama asli rajanya. Oleh karena itu, mereka akan menyebutkan gelarnya saja. Sebagai contoh, raja-raja yang memerintah Rumbia adalah Sangia Lerentapupu (Tantuu), Sangia Opisi, Sangia Tepole Lebo, Sangia Pu'ungkuta, Sangia Oloe, Sangia Ntweni, Sangia Nginale, Sangia Rahawatu, Apua Tandole, Apua Mongura (Sangia Powatu), Sangia Bolousu, Sangia Tambera, dan Sangia Aoea. Sedangkan di daerah Poleang urutan raja-rajanya adalah Sangiaea, Sangia Toburi, Sangia Mlemba, Sangia Ntina, Sangia Pooea, Sangia Wunumea, dan Sangia Moauno.[781]

Perlawanan terhadap pemerintah kolonial dikobarkan oleh Sangia Dowo dari Kerajaan Poleang yang dilahirkan pada 1875. Ayahnya bernama Sura, sedangkan ibunya bernama Wahoga. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten De Jongens pada mulanya mengalami kekalahan sehingga De Jongens mengajak Sangia Dowo

777. Lihat *http://firac.multiply.com/journal* (diunduh pada 13 Juni 2010).
778. Lihat *Sejarah Sulawesi Tenggara dan 45 Tahun Sultra Membangun,* halaman *58*. Dendeangi juga disebut Tongkimpu'u Wonua, sedangkan permaisurinya juga disebut Waipode Lere.
779. Lihat *Sejarah Sulawesi Tenggara dan 45 Tahun Sultra Membangun,* halaman 58.
780. Lihat *Sejarah Sulawesi Tenggara dan 45 Tahun Sultra Membangun,* halaman 62
781. Lihat *Sejarah Sulawesi Tenggara dan 45 Tahun Sultra Membangun,* halaman 69-70.

berunding. Namun, pemerintah kolonial menerapkan siasat licik dengan meracuni Sangia Dowo hingga meninggal. Jenazahnya kemudian diusung di tengah hujan lebar menuju ke Toburi, ibu kota Poleang. Itulah sebabnya, ia juga dikenal sebagai Sangia Nilemba (Raja yang Diusung).[782] Perjuangan Sangia Dowo menentang penjajahan dilanjutkan oleh Mbohogo. Meskipun demikian, ia tertangkap pada 1912 dan dijatuhi hukuman gantung.

VII. MUNA

Raja Muna pertama adalah La Eli Bata Laiworu yang terkenal dengan sebutan Simpatani. Ia memiliki anak bernama Sugilaende atau Sugimpeari yang menjadi Raja Muna ke-2. Putra Sugilaende yang bernama Sugimanuru kemudian menjadi Raja Muna ke-3. Lakilaponto yang merupakan putra Sugimanuru menikah dengan putri Raja Buton bernama Wa Tampaidonga karena berhasil menewaskan perampok bernama La Bolontio yang merajalela di Buton. Ketika ayahnya mangkat, Lakilaponto (1538–1541) menggantikannya sebagai Raja Muna. Meskipun demikian, Lakilaponto diangkat pula sebagai Raja Buton ke-6. Karenanya, kedudukan sebagai Raja Muna diserahkannya kepada adiknya, La Posasu (1541–1551).

Menurut sumber lainnya, raja pertama Muna adalah Zulzaman yang konon ditemukan dalam ruas bambu. Itulah sebabnya ia digelari Beteno Netumbula (Berasal dari Dalam Ruas Bambu). Raja pertama Muna ini dikenal sebagai tokoh yang sakti.[783] Raja-raja Muna berikutnya adalah Zulzaman, Sugi Patola, Sugi Ambona, Sugi Patani, dan Sugi Laende.[784] Semasa pemerintahan Sugi Manuru, putra Sugi Laende, terjadi perubahan sistem pemerintahan dan kemasyarakatan di Muna. Sugi Manuru menciptakan sistem lapisan-lapisan kemasyarakatan. Dasarnya adalah pandangan yang mengumpamakan masyarakat layaknya tubuh manusia, yakni terdapat bagian kepala, badan, dan anggota tubuh. Oleh karenanya, Sugi Manuru lantas membagi rakyatnya menjadi lima golongan, yakni *kaomu* (anak lelaki Sugi Manuru dengan permaisurinya); *walaka* (anak perempuan Sugi Manuru yang menikah dengan pendatang); *anangkolaki* (anak Sugi Manuru yang berasal dari selir); *maradikano ghoera* (masyarakat penghuni empat kampung yang dikepalai seorang *kino*); dan *maradikano papara* (masyarakat penghuni empat kampung yang dikepalai seorang *mino*). Namun, pada perkembangan

782. Lihat *Sejarah Sulawesi Tenggara dan 45 Tahun Sultra Membangun,* halaman 71.
783. Lihat *Peranan Elite dalam Proses Modernisasi Suatu Studi Kasus di Muna*, halaman 112.
784. Lihat *Peranan Elite dalam Proses Modernisasi Suatu Studi Kasus di Muna*, halaman 111.

selanjutnya hanya dikenal tiga lapisan masyarakat saja, yakni *kaomu*, *walaka*, dan *maradika*.[785]

Timbul pergolakan di Muna karena rakyat tak bersedia lagi mengakui La Posasu. Oleh karena itu, Lakilaponto memimpin pasukan guna menertibkan keadaan di Muna. Akhirnya, para pemberontak dapat dikalahkan melalui peperangan dan mereka bersedia mengakui kembali La Posasu sebagai raja mereka. Raja-raja Muna selanjutnya adalah La Rampe I Somba (1551–1600), Titakono (1600–1625), dan La Ode Saa (1625–1626). Pada perkembangan selanjutnya, Muna masuk ke dalam payung kekuasaan Ternate. Pada 1655, Sultan Hasanuddin dari Gowa menyerang Buton dan berhasil menguasai Muna.[786] Tetapi secara sepihak Sultan Ternate menyerahkan Muna kepada Buton pada 1664. Raja Muna yang saat itu dijabat oleh Sangia Kaindea (1626–1667) tidak bersedia mengakui kekuasaan Buton, sekutu Ternate. Oleh karenanya, dengan bantuan VOC dan Ternate, Sangia Kaindea berhasil ditangkap serta dibawa ke Ternate. Selama Sangia Kaindea berada dalam tawanan, roda pemerintahan Muna dipegang oleh Wa Ode Wakelu, istrinya, yang merupakan putri Sapati Buton. Semenjak penyerahan ini, Muna dianggap sebagai salah daerah kekuasaan (*barata*) Buton. Meskipun demikian, Muna sendiri menganggap bahwa dirinya adalah kerajaan yang berdaulat dan tidak berada di bawah kekuasaan Buton. Inilah pemicu pertentangan antara keduanya pada masa-masa selanjutnya.

Setelah berakhirnya peperangan dengan Gowa, Sangia Kaindea dikembalikan ke Buton, tetapi sesungguhnya yang berkuasa adalah *kapitalau* dari Buton bernama La Ode Idris (1668–1671). Pemerintahan La Ode Idris disebut *Sarano Kraindeadea* oleh rakyat Muna. Sangia Kaindea memerintah lagi pada 1671, tetapi berada di bawah kekuasaan Buton dan Belanda. Ia digantikan oleh La Ode Abdul Rahman (1671–1716). Cucu Sangia Kaindea bernama La Ode Husain Omputo Sangia (1716–1757) tidak bersedia mengakui kekuasaan Buton dan bahkan sumber Belanda sendiri menyatakan bahwa Muna terlepas dari Buton. Perkembangan selama abad 18 dan 19 kembali diwarnai pertentangan dan peperangan antara kedua belah pihak. Pemerintahan di Muna saat itu dijalankan oleh Raja La Ode Kentu Koda Omputa Kantolalo (1758–1764). Peperangan besar berkecamuk antara kedua kerajaan tersebut pada 1799, bahkan Raja Muna La Ode Harisi (1764–?) menjadi salah satu korbannya

785. Lihat *Peranan Elite dalam Proses Modernisasi Suatu Studi Kasus di Muna*, halaman 113.
786. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Tenggara*, halaman 20.

sehingga digelari *Omputo Nigege*[787] (Raja yang Dihukum Mati dengan Jeratan Benang di Leher) oleh rakyatnya.

Raja-raja berikutnya yang berkuasa di Muna adalah La Ode Umara dan La Ode Murusali. Pada 1816, bersama-sama dengan Tiworo dan dukungan Syarif Ali–seorang tokoh asal Sulawesi Selatan–Muna menegakkan kembali kedaulatannya. Akibatnya, berkobarlah peperangan dengan Buton yang baru berakhir pada 1823, yang berakhir dengan kekalahan Muna beserta Tiworo. Sultan Buton lantas menunjuk La Ode Ngkumabusi sebagai pejabat Raja Muna. Sultan Buton mengeluarkan undang-undang mengenai daerah kekuasaan (*barata*) yang baru pada 1838. Raja Muna, La Ode Sumaili, turut menandatanganinya. Dewan adat Muna mengangkat La Ode Saete sebagai raja. Sementara itu, Buton mengangkat La Ode Wita sebagai Raja Muna. Akibatnya, terdapat dua orang raja di Muna.

La Ode Sumaili digantikan oleh La Ode Bulai (–1861). Raja La Ode Bulai terlibat perselisihan dengan pembantunya, Kapitalao Lohia (La Ode Ngkada), pada 1861. Sebagai pemecahan atas persoalan ini, Buton mengasingkan La Ode Bulai dan La Ode Ngkada menyingkir ke Kendari. Sepeninggal La Ode Bulai, sultan Buton mengundang kembali La Ode Ngkada dan menjadikannya sebagai raja Muna.

Sejak wafatnya Raja La Ode Kaili (1872–1899), kedudukan Raja Muna mengalami kekosongan. Kebetulan pada 1904, Sultan Buton ke-32, Muhammad Umar, mangkat. Calon terkuat penggantinya adalah La Ode Akhmad Maktubu. Belanda khawatir apabila ia yang terpilih sebagai Sultan Buton akan banyak merepotkan pemerintah kolonial. Karenanya, Belanda lantas mengangkat Muhammad Asyikin sebagai Sultan Buton berikutnya dan menjadikan La Ode Akhmad Maktubu sebagai Raja Muna (1904–1913/ 1914). Pada kurun waktu yang hampir bersamaan, La Ode Ijo, cucu La Ode Ngkada, berniat melancarkan perlawanan terhadap Belanda, namun gagal. Raja La Ode Ahmad Maktubu meninggal pada 1913/ 1914 dan dimakamkan di Badia. Penggantinya adalah Muhammad Syafiu (1914–1924), yang kelak dipilih sebagai Sultan Buton.

Seiring dengan masuknya pengaruh Belanda, kondisi Muna menjadi kacau. Akibat beratnya beban pajak yang harus dipikul rakyat dan tindakan kejam para penagih pajak, pecah berbagai pemberontakan. La Ode Pagora dan La Ode Pulu, dua orang bangsawan, menghasut rakyat agar tidak membayar pajak serta bangkit melawan

787. Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Tenggara*, halaman 20.

penjajah. Meskipun demikian, perlawanan boleh dikatakan gagal dan La Ode Pulu tewas tertembak. Penderitaan rakyat makin menjadi-jadi dengan diberlakukannya kewajiban kerja rodi. Oleh sebab itu, sikap antipati rakyat makin memuncak. Muna merupakan salah satu daerah yang kurang bersahabat terhadap Belanda sehingga semenjak 1906, Belanda menempatkan pejabat-pejabat militernya di sana yang dijabat oleh Let. Inf. Palack (1907–1909), Let. Inf. Ball (1909–1911), Let. Inf. Ross (1911–1913), Let. Inf. van Belt (1913–1917), Let. Inf. Gualing (1917–1919), Let. Inf. Gertmas (1919–1923), Let. Inf. Mars (1923–1925), Let. Inf. van Gigen (1925–1926), Adp. Cont. v Vieser (1926), Gezaghebber THP Gaans (1926–1927), Let. Inf. Hansbergen (1927), Contr. B.B. de Jong (1927–1928), dan Gezaghebber Gitsels (1928).[788]

Pada 1927, Raja La Ode Rere (1924–1927) yang menggantikan Muhammad Syafiu kembali menentang kekuasaan Buton. Karena Belanda mengakui kekuasaan Buton atas Muna, pemerintah kolonial menganggap hal ini sebagai pembangkangan pula terhadap mereka. La Ode Rere dipecat dari kedudukannya dan sebagai pejabat Raja Muna diangkatlah sesorang bernama Warouw (1928–1929). La Ode Dika (1929–1930) diangkat sebagai Raja Muna menggantikan Warouw. Namun, baru setahun memerintah ia bernasib sama seperti La Ode Rere. Sejak disingkirkannya La Ode Dika ini, tidak ada lagi Raja Muna yang diangkat dan fungsinya digantikan oleh seorang pelaksana.

Pemerintah NICA berpendapat bahwa kekosongan raja dan dewan yang sebelumnya dibentuk guna menangani urusan pemerintahan di Muna tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, status Muna lantas diubah menjadi neo-swapraja dengan La Ode Pandu sebagai rajanya. Ia dilantik pada 1946 dan semenjak saat itu ia banyak melakukan pembenahan terhadap administrasi pemerintahan Muna.[789]

---

788. Lihat Lihat *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Tenggara*, halaman 70.
789. Lihat *Peranan Elite dalam Proses Modernisasi Suatu Studi Kasus di Muna*, halaman 143.

KERAJAAN-KERAJAAN DI SULAWESI TENGAH (I)

@Ivan Taniputera
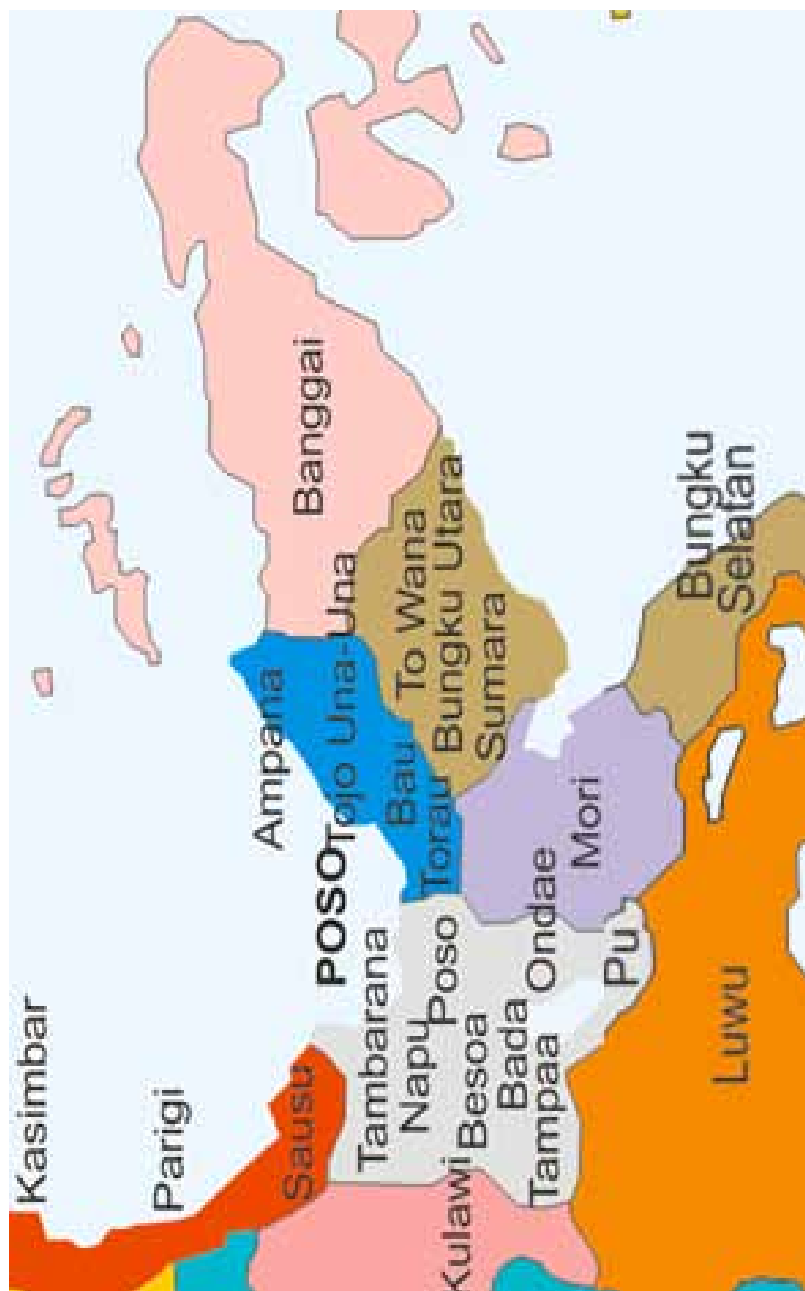
KERAJAAN-KERAJAAN DI SULAWESI TENGAH (II)

@Ivan Taniputera
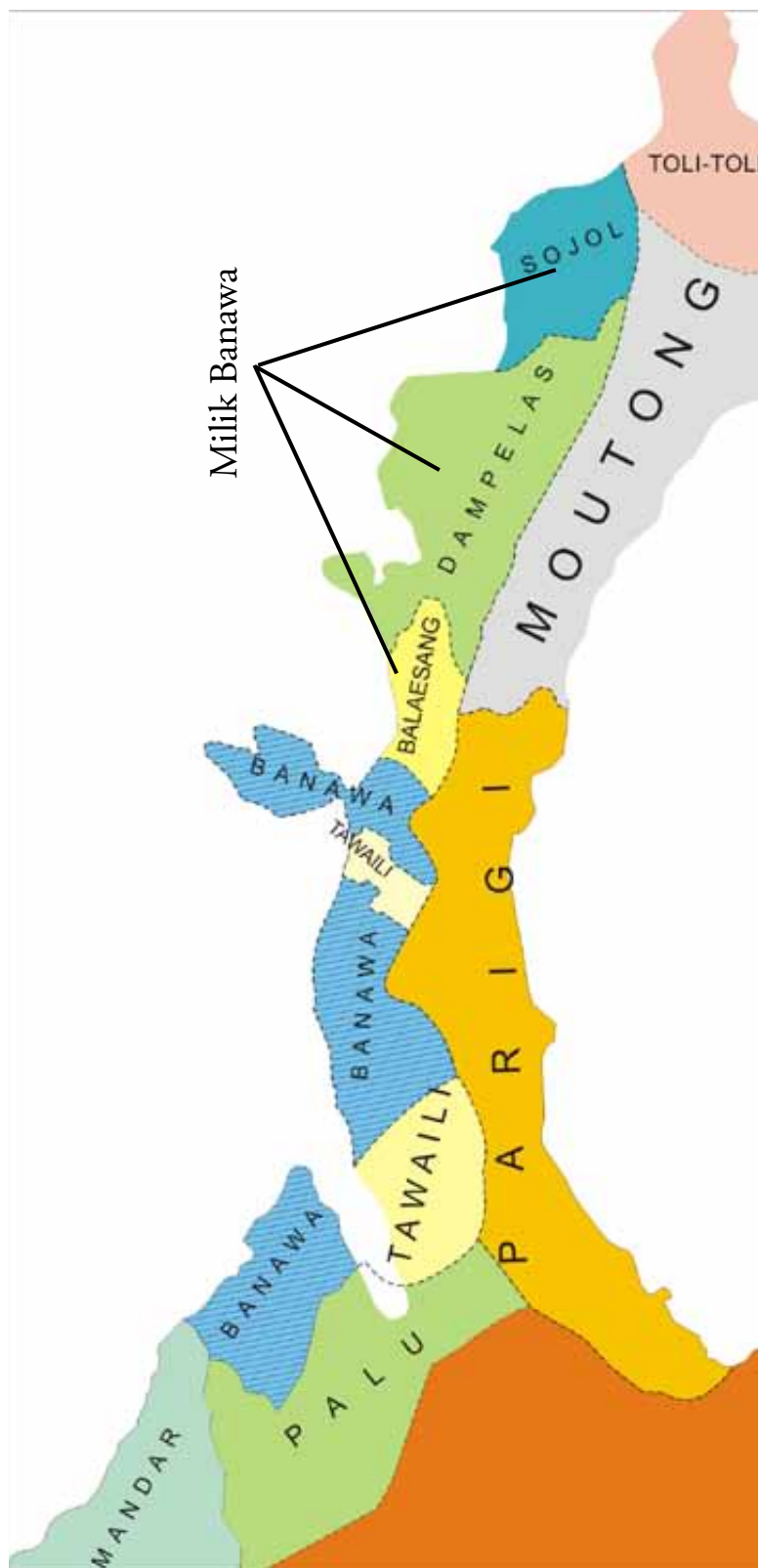
KERAJAAN-KERAJAAN DI SULAWESI SELATAN
@Ivan Taniputera
L U W U
TANA TORAJA
MALUA
ALLA
LETTA
BUNTU BATU
ENREKANG
BATULAPPA
KASSA
MAIWA
SIDENRENG RAPPANG
RAPPANG
SAWITTO
ALITTA
SUPPA
WAJO
MALLUSETASI
BARRU
SOPPENG
Watampone
TANETTE
BONE
NOORDER DISTRICTEN
GOWA
OSTER DISTRICTEN
TAKALAR
BANTAENG
BINAMU
ZUIDER DISTRICTEN

KERAJAAN-KERAJAAN DI SANGIHE-TALAUD
@Ivan Taniputera
KENDAHE TAHUNA
TABUKAN
MANGANITU
SIAU
TAGULANDANG

PETA KERAJAAN-KERAJAAN DI SULAWESI TENGGARA
MEKONGGA
KONAWE (LAIWUI)
Kolaka
Kendari
MORONENE
Tiworo
MUNA
BUTON
Wanci
Bau Bau
Wakatobi
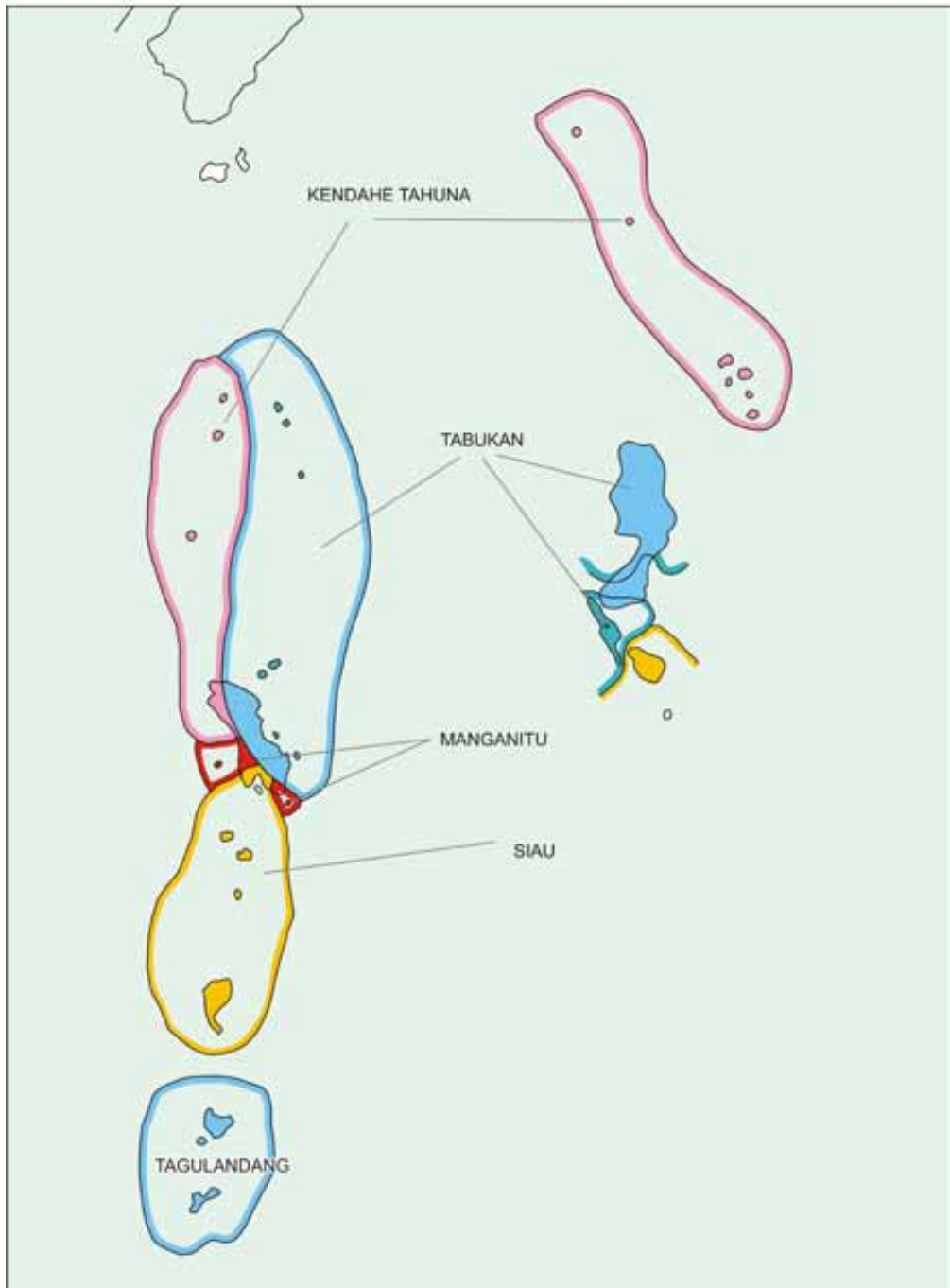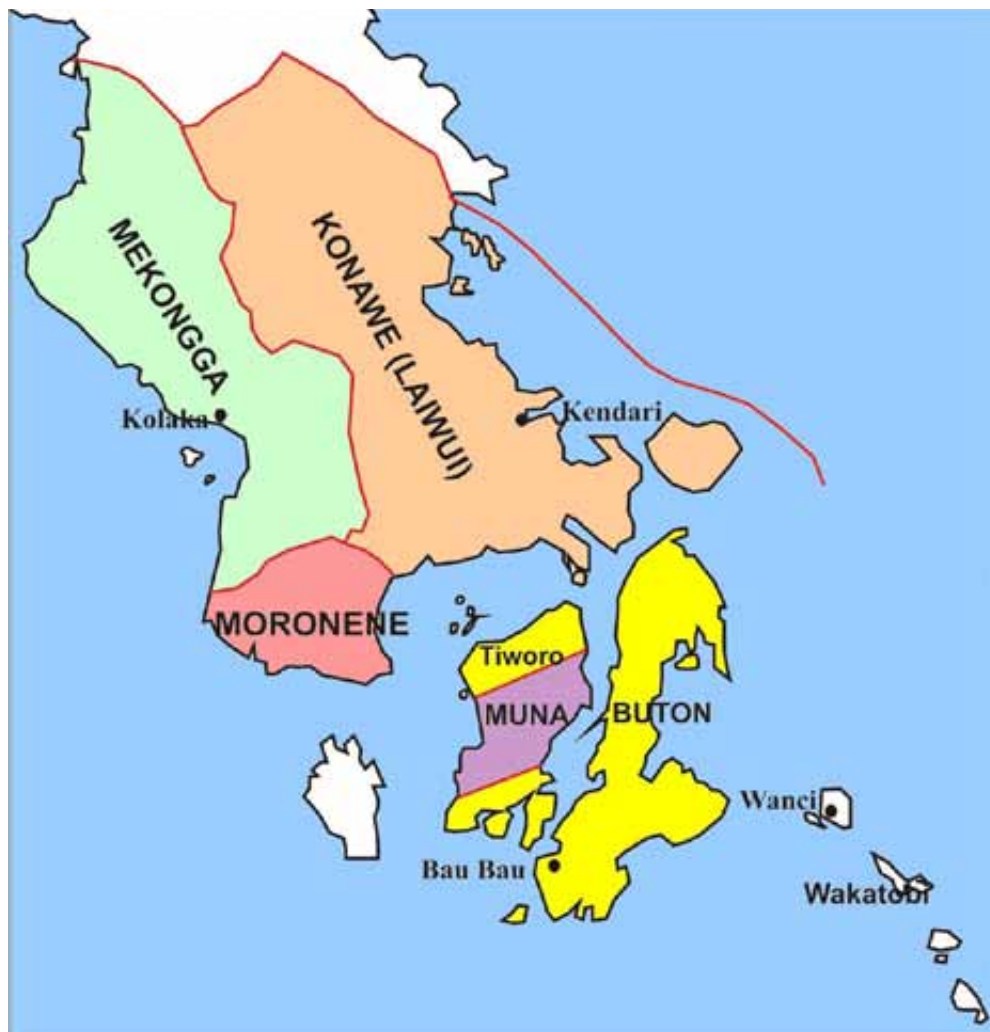
KERAJAAN-KERAJAAN DI GORONTALO BESERTA DISTRIKNYA MASING-MASING
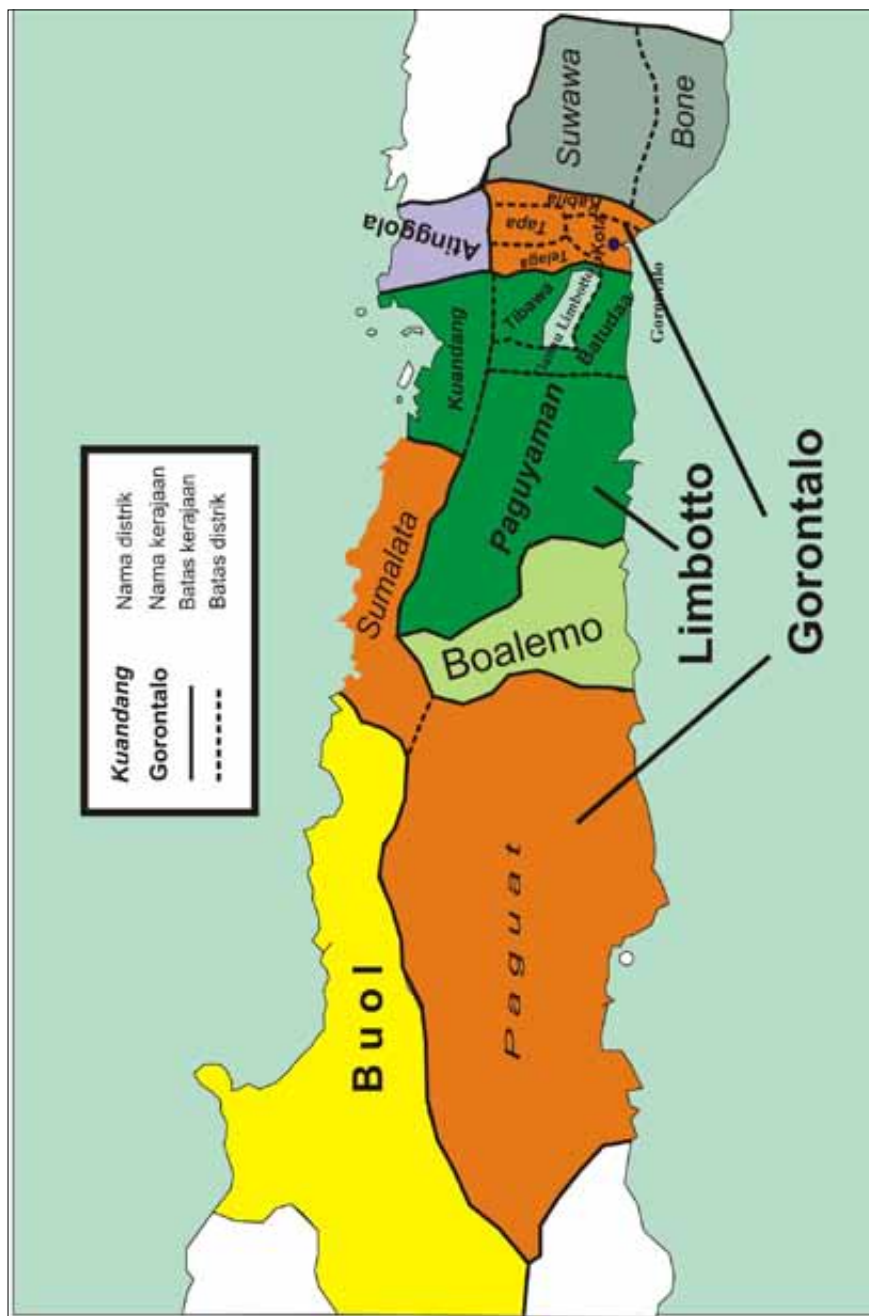
Digambar ulang dari *Lima Pahalaa: Susunan Masyarakat, Hukum Adat dan Kebijaksanaan Pemerintahan di Gorontalo.*

Bab 7
KERAJAAN-KERAJAAN DI KEPULAUAN MALUKU & PAPUA

A. KERAJAAN-KERAJAAN DI KEPULAUAN MALUKU

Maluku merupakan kepulauan yang subur di belahan timur Nusantara. Sejarah awal kawasan ini tidak dapat ditentukan dengan pasti sebagaimana yang diungkapkan oleh Des Alwi.

> Sejarah Maluku sebelum kedatangan Portugis adalah sejarah yang "diterka" atau rekaan saja karena memang tidak ada catatan sejarah dan peninggalan-peninggalan arkeologis penting. Penduduk kepulauan terpencil ini telah mendapat sangat sedikit pengaruh Hinduisasi yang telah mengubah, misalnya, seluruh Pulau Jawa. Maluku juga sama sekali tidak mendekati kepada arus peradaban yang maju sampai masa menyebarnya Islam pada abad 15.[790]

Riwayat cikal bakal masing-masing kerajaan juga diliputi oleh legenda. Meskipun demikian, legenda-legenda itu hendaknya tak dikesampingkan begitu saja. Beberapa di antaranya sanggup menyiratkan bagaimana kondisi kemasyarakatan awal di Maluku sehingga tetap layak dikaji.

790. *Sejarah Maluku: Banda Naira, Ternate, Tidore, dan Ambon*, halaman 294.

I. BACAN

a. Cikal Bakal dan Perkembangan Kerajaan Bacan

Kerajaan Bacan semula berpusat di Makian Timur, tetapi dipindahkan ke Kasiruta karena terancam letusan gunung berapi Kie Besi. Bacan diperkirakan berdiri pada abad 14. Menurut hikayat Bacan, rajanya yang pertama bernama Said Muhammad Bakir atau Said Husin. Ia berkuasa di Gunung Makian serta bergelar *Maharaja yang Bertakhta Kerajaan Moloku Astana Bacan, Negeri Komala Besi Limau Dolik*.[791] Konon, ia bertakhta selama 10 tahun. Selanjutnya, yang berkuasa di Bacan adalah Muhammad Hasan. Ia digantikan oleh putranya, Kolano Sida Hasan. Saat itu, Raja Ternate bernama Tulu Malamo (1343–1347) merebut Makian dan beberapa desa di sekitar Pulau Bacan dari tangan Kerajaan Bacan. Dengan bantuan Tidore, Kolano Sida Hasan merebut kembali daerah kekuasaannya tersebut.

Semasa pemerintahan Sida Hasan, terjadi perpindahan penduduk dari Makian ke Bacan, rakyat yang mengikuti rajanya ditempatkan di Dolik, Talimau, dan Imbu-imbu. Tidak diketahui nama-nama Raja Bacan yang memerintah setelah Sida Hasan. Akhirnya, pada 1522–kurang lebih 180 tahun sesudah Sida Hasan–muncul seorang raja lain bernama Zainal Abidin. Ia dikabarkan mempunyai dua orang putra yang bernama Kaicil Bolatu dan Kaicil Kuliba. Kaicil Bolatu dipercaya memerintah Makian dan sepeninggal ayahnya ia kembali ke Kasiruta serta menjadi Raja Bacan dengan gelar Bayanu Sirullah. Sedangkan saudaranya, Kaicil Kuliba, menggantikannya memerintah Makian. Namun, rakyat kurang suka terhadap mereka sehingga keduanya terpaksa pindah ke Tidore.

Bacan mengadakan perjanjian dengan VOC pada 7 November 1653. Perjanjian ini berkaitan dengan pemusnahan pohon cengkih oleh Belanda agar harganya dapat dikendalikan. Selanjutnya, Bacan, Ternate, dan Tidore mengadakan perjanjian mengenai tapal batas wilayah masing-masing pada 1660. Bacan diakui kedaulatannya di Laiwui, Sembaki, Bacan Tua, Salap, Macoli, Wuiyama, Turongara, Piga Raja, Bariati, dan Taspa. VOC juga mengakui daerah kekuasaan Bacan itu.

Bayanu Sirullah digantikan oleh Sultan Alauddin I. Khawatir terhadap sepak terjang Ternate, Alauddin I meminta bantuan Portugis. Ia menyampaikan pula

---

791. Lihat *Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250–1950*, halaman 196. Menurut catatan kaki no.2 sumber tersebut, informasi ini diperoleh dari *Kroniek van het Rijk Batjan, Tijdschrift BKWG, deel LXIII, aflevering2*, p. 477, karya Coolhaas.

keinginannya memasuki agama Katolik. Karena itu, seorang pastor bernama Pater Antonio Vaz diutus menemui Sultan Bacan dan membaptis Alauddin I beserta anggota keluarganya pada 1 Juli 1557. Sebagai nama baptisnya, Alauddin I memilih Don Joao, sama dengan gelar Raja Portugis masa itu. Bersama-sama dengan Pater Antonio Vaz, Don Joao melakukan penyebaran agama Katolik dan berhasil memperoleh sejumlah pengikut. Rakyat Bacan yang telah beralih agama meyakini bahwa agama Katolik sanggup melawan roh-roh jahat (*suwanggi*). Konon, roh-roh jahat jenis ini gemar memakan jantung anak-anak atau mencabut nyawa orang. Hingga 1562, telah ada 800 warga Bacan yang menganut agama Katolik.

Peristiwa alih agama ini membangkitkan amarah Sultan Hairun dari Ternate. Ia menuntut agar Don Joao kembali ke agama Islam. Takut terhadap ancaman ini, Don Joao membuat kesepakatan dengan panglima Portugis di Ambon dan Sultan Tidore agar melindunginya. Sumber-sumber sejarah seputar peristiwa ini agak simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa Don Joao mati diracun pada 1577 atas perintah Baabullah, pengganti Hairun, sebelum sempat kembali ke agama Islam. Sumber lain menyebutkan bahwa Don Joao kembali ke agama Islam beserta sebagian pengikutnya. Mereka lalu ditawan ke Ternate, tetapi adik Don Joao bernama Don Henrique dikembalikan ke Bacan dan dinobatkan sebagai raja di sana. Kendati demikian, Don Henrique tidak bersedia kembali ke agama Islam. Ia lantas meminta perlindungan Portugis sehingga Ternate melancarkan serangannya terhadap Bacan. Don Henrique gugur dalam peperangan pada 1580. Dengan demikian, Bacan takluk pada Ternate. Putra Alauddin I bernama Kaicil Raxa Raudin (Alauddin II) diangkat sebagai Sultan Bacan. Ia mendengar perihal kematian ayahnya karena diracun dan segera kembali ke agama lamanya.

Riwayat lain menuturkan bahwa sepeninggal Alauddin I, singgasana Bacan beralih kepada Sultan Muhammad Ali, ayah angkat Sultan Baabullah dari Ternate. Pengganti Sultan Muhammad Ali adalah Sultan Alauddin II (1660–1706). Lantaran tubuh mereka yang jangkung, baik Sultan Alauddin I maupun Sultan Alauddin II dijuluki pula Sultan Dubo-dubo. Sultan Alauddin II pernah menjual Pulau Obi kepada VOC seharga 800 Ringgit. Dipicu oleh ketidakpuasan rakyat Seram terhadap pemerintahan Bacan, pada 1672 mereka menghadap Gubernur Belanda di Ambon agar diizinkan berada di langsung di bawah pemerintahan VOC. Keinginan ini disetujui oleh Padtbrugge selaku komisaris VOC dan kawasan tersebut ditempatkan di bawah kekuasaan Belanda.

Tatkala sultan mangkat pada 1706, para pemuka Bacan mengangkat adiknya, Kaicil Musa, sebagai Raja Bacan dengan gelar Sultan Malikiddin. Sebelumnya, Kaicil Musa menduduki jabatan sebagai wakil pemerintah Bacan di Makian. Kedudukan selaku penguasa Makian lantas diserahkan kepada Kaicil Tojimlila. Kepemimpinan Sultan Malikiddin diteruskan oleh Kaicil Kie yang menyandang gelar Sultan Nasruddin. Sebagai wakilnya dalam memerintah Makian, sultan baru ini mengangkat Kaicil Lewan. Ternyata, Kaicil Lewan merupakan wakil Bacan terakhir di Makian, lantaran setelah itu Ternate merebut pulau tersebut.

Masih terdapat sumber lain yang mencatat bahwa pengganti Sultan Alauddin II adalah kakaknya, Sultan Musom. Masih belum dapat dipastikan apakah tokoh ini identik dengan Kaicil Musa atau tidak. Sultan Musom kembali digantikan oleh putranya, Sultan Mansur. Penguasa Bacan yang dinobatkan pada 19 Juli 1683 ini memiliki kekuatan fisik yang menonjol. Selain itu, sultan terampil dalam membuat perhiasan emas. Sultan Mansur gemar pula mendidik rakyatnya agar tidak hidup bermalas-malasan.

Sesudah lewatnya era Sultan Mansur, kedudukan sebagai Sultan Bacan dipegang oleh Sultan Tarafannur. Pada zamannya, Bacan memperoleh tambahan daerah baru, yakni Saketa, Obi, Gane, Mafa, dan Foya. Wilayah Bacan di Seram yang dikuasai langsung oleh VOC semenjak 1672 dikembalikan kepada Sultan Muhammad Sahiddin (1707). Ketika Maluku Utara terancam oleh Sultan Nuku dari Tidore, Belanda meminta bantuan Sultan Bacan yang saat itu dijabat oleh Iskandar Alam. Sultan segera menyiapkan dewan peperangan yang diketuai dirinya sendiri beserta *Gezaghebber* (Kontrolir) G.F. Durr dan beranggotakan *Jogugu* (Perdana Menteri) Naim, Hukum Atiatun, Mayor Abdul Halim, Kapita Laut Malik, Sangaji Mandioli Totoho, Kimalaha Marsaoli Haiyat, dan Kimalaha Sapangala Bahadin. Tetapi ketika Nuku beserta Inggris menyerbu Bacan pada 1781, Sultan Iskandar Alam berbalik mendukung Nuku. Akibatnya, Sultan Iskandar Alam disingkirkan dan digantikan oleh Kaicil Ahmad. Sultan Bacan yang tercatat memerintah setelah masa Kaicil Ahmad adalah Kamarullah. Ia digantikan oleh Muhammad Hayatuddin Syah (1826–1862).

Alfred Russel Wallace mengunjungi Bacan antara Oktober 1858 hingga April 1859. Ia sempat pula berjumpa dengan Sultan Bacan dan menggambarkannya sebagai "seorang tua berwajah kusut, berambut putih, berjanggut kotor, serta mengenakan

baju katun biru berbintik-bintik dengan celana merah longgar."[792] Sultan menjabat tangan Wallace dan mempersilakannya duduk. Selama seperempat jam mereka membicarakan mengenai pekerjaan Wallace yang sangat menarik perhatian sultan, selama perbincangan itu ia disuguhi teh beserta kue-kue yang lezat. Sultan diundang oleh Wallace menyaksikan berbagai koleksinya, sultan pun berjanji datang memenuhi undangan tersebut. Sultan Bacan disebut Wallace sebagai orang yang bijaksana. Ia meyakini bahwa negerinya sangat kaya akan barang tambang, hanya saja kekurangan orang untuk menggalinya. Wallace menceritakan mengenai bertambahnya penduduk Australia setelah ditemukannya tambang emas di sana. Sultan menjawab bahwa seandainya ia memiliki orang sebanyak itu, tentu saja negerinya akan menjadi kaya raya. Sayangnya Wallace dalam catatannya tidak menyebutkan nama sultan atau penguasa yang dijumpainya, tetapi tampaknya sultan yang dimaksud Wallace ini adalah Mohamad Haijatudin atau Muhammad Hayatuddin.

Berbagai kegiatan penambangan sebenarnya pernah dilakukan di Bacan, seperti emas dan batu bara. Hanya saja kegiatan tersebut kemudian mengalami kemacetan yang kemungkinan disebabkan tidak banyaknya kandungan barang tambang di sana. Sultan Mohamad Haijatudin merasa sangat kecewa karenanya sehingga ia pun menjadi penambang amatir.[793] ia menjelajahi pulau tersebut dengan mendaki bukit-bukit, menyeberangi sungai beserta rawa, serta mengobservasi daerah-daerah yang belum dikenal. Berbagai spesimen mineral-mineral ia kumpulkan dan diperlihatkan kepada siapa saja yang tertarik. Salah seorang tokoh yang merasa tertarik adalah Jhr. van Soeterwode.

Orang Belanda ini menandatangani kontrak dengan sultan guna memperoleh konsensi atas tanah seluas 335.500 *bouw* dan membayar fl1.500 ditambah fl1 bagi setiap *bouw* tanah yang telah diolah. Van Soeterwode kembali ke negeri Belanda untuk menghimpun dana sebesar fl2.800.000 dan mendirikan perusahaan bernama *Batjan Maatschappij*, yang mulai beroperasi semenjak 1882. Meskipun demikian, perusahaan ini hanya sempat bertahan kurang dari satu dekade sebelumnya akhirnya bangkrut. Seiring dengan kematian sultan Mohamad Haijatudin, sultan berikutnya adalah Muhammad Sadik Syah (1862–1889) dan van Soeterwoude sendiri.

792. Lihat *Kepulauan Nusantara* (terjemahan Indonesia), halaman 246.
793. Lihat *Sejarah Maluku: Banda Naira, Ternate, Tidore, dan Ambon*, halaman 528.

Sepeninggal Muhammad Sadik Syah, terjadi kekosongan kekuasaan di Bacan antara 1889 hingga 1900. Setelah masa lowong, Sultan Muhammad Usman Syah diangkat sebagai Sultan Bacan (1900–1917). Ia digantikan oleh Sultan Dede Muhsin Usman Syah, yang pernah menjabat pula sebagai Residen Maluku Utara. Sultan Usman Syah terkenal sebagai tokoh pejuang Maluku. Ia pada 1967 memperjuangkan agar Maluku Utara memperoleh status provinsi. Kiprah lain Sultan Usman Syah–bersama-sama dengan bupati Cianjur, R.A. Prawiradireja–menjadi penyumbang terbesar bagi koran *Medan Priyayi* yang kerap menyuarakan ketidakadilan pemerintah kolonial.[794] Berkat sumbangan-sumbangan tersebut, *Medan Priyayi* berhasil dicetak oleh percetakan Khong Tjeng Bie, Jakarta, dan diterbitkan dengan format mingguan sederhana berukuran 12,5 x 19,5 cm.

b. Sistem Pemerintahan

Penguasa tertinggi di Bacan adalah seorang sultan. Sistem pemerintahannya mirip dengan Ternate dan Tidore, hanya saja bedanya di Bacan ada lembaga Sekretaris Kesultanan yang bertugas membantu sultan dalam urusan-urusan pemerintahan. Selanjutnya, terdapat aparat atau dewan pemerintahan yang disebut *bobato*. Apa yang disebut bobatu ini masih dibedakan menjadi *bobato* dalam, luar, dan akhirat. *Bobato* dalam terdiri dari *mayor*, *kapitan ngofa*, *kapita kie*, empat orang *letnan* (dua *letnan ngofa* dan dua *letnan kie*). *Letnan* membawa *alfiris* dan *sersan*, yang bertugas menjaga kubu-kubu pertahanan sultan. Berdasarkan gelar-gelarnya, *bobato* dalam tugasnya lebih berkaitan dengan kemiliteran.

Bobato luar tanggungjawabnya berkenaan dengan urusan pemerintahan. Anggotanya terdiri dari *jogugu* (perdana menteri atau mangkubumi), *hukum* (hakim), dan *kimalaha sapanggala*. Seorang hukum atau hakim wewenang tugasnya mencakup masalah keamanan negeri sehingga dapat disetarakan dengan kepala polisi pada zaman sekarang. *Bobato* akhirat tugasnya berhubungan dengan masalah keagamaan. Anggotanya antara lain adalah *kalem* atau kadi kesultanan. Ia dibantu oleh sejumlah imam, khatib, dan modin. Pada praktiknya, imam bekerja sama dengan *hukum* dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana maupun perdata.

Jabatan-jabatan penting di Bacan lainnya adalah *kapita laut* atau panglima angkatan perang kesultanan, *kapala bangsa* yang ditunjuk sebagai penanggung jawab

794. Lihat *Daerah Istimewa Surakarta: Wacana Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Surakarta Ditinjau dari Perspektif Historis, Sosiologis, Filosofis, & Yuridis,* halaman 213. Sultan Bacan menyumbangkan fl500, sedangkan bupati Cianjur fl1000.

atau pelaksana kesultanan, *imam juru tulis*, *khatib juru tulis*, *modin juru tulis*, *imam ngofa*, *khatib ngofa*, dan *dano.*[795] Kendati demikian, pemerintah kolonial Belanda hanya mengakui jabatan *kapita laut*, *jogugu*, *kalem* dan bawahannya, *hukum*, dan *kimalaha sapanggala*. Para pejabat ini tidak diangkat oleh sultan melainkan dipilih oleh rakyat.

c. Sosial Kemasyarakatan

Masyarakat Bacan terbagi menjadi tiga golongan. Kelompok pertama adalah kerabat raja dan kaum bangsawan. Putra raja biasanya bergelar *kaicil* (pangeran), sedangkan putri raja disebut *boki* (putri). Selanjutnya, terdapat rakyat kebanyakan yang dinamakan *bala*. Mereka dibedakan menjadi dua, yakni yang telah menganut agama (*soasio*) dan belum beragama (*soa nyagimoi*). Golongan ketiga dinamakan *soa ngongare* yang mencakup para budak.

II. GORONG

Pulau Gorong (disebut Goram dalam karya Alfred Russel Wallace) terletak di sebelah timur Pulau Seram. Di sini terdapat tiga negeri yang diperintah oleh seorang pemimpin bergelar raja, yakni Kataloka (terdiri dari 8 kampung), Ondor (11 kampung), dan Amar.[796] Menurut Wallace, yang mengadakan kunjungan ke kawasan tersebut pada Oktober 1859–Juni 1860, di pulau sepanjang 8 hingga 10 ini terdapat 12 orang raja.[797] Kendati demikian, kekuasaan yang mereka miliki tidak besar dan kehidupan mereka juga hanya sedikit lebih baik dibandingkan rakyatnya. Tatkala menerima perintah dari pemerintah kolonial Belanda, barulah para raja itu memperlihatkan kekuasaannya. Sahabat Wallace, Raja Ammer – biasanya disebut Raja Gorong–menyatakan bahwa sebelum kedatangan Belanda, perdagangan di sana tak dapat dilaksanakan dengan aman. Namun, kini hal-hal yang mengganggu kegiatan perniagaan sudah tidak ada lagi. Kendati demikian, perselisihan antar kampung masih saja terjadi dan diselesaikan dengan kekerasan. Wallace pernah menyaksikan 50 orang membawa senapan panjang berjalan melintasi kampung dengan berselempangkan peluru. Mereka datang dari sisi lain pulau untuk menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan perbatasan. Apabila perundingan secara damai gagal barulah ditempuh jalan kekerasan.

795. Lihat *Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250–1950*, halaman 200.
796. Lihat *Halmahera Timur dan Raja Jailolo*, halaman 41.
797. Lihat *Kepulauan Nusantara* (terjemahan Indonesia), halaman 275.

Menurut laporan Kolff, pejabat pemerintah kolonial yang ditugaskan meninjau kawasan itu antara tahun 1825–1826, menjelang dekade pertama abad 19 negeri-negeri di Kepulauan Gorong dan Seram Laut tertata rapi. Negeri-negeri tersebut dikelilingi tembok terutama pada sisi yang menghadap ke laut.[798] Negeri-negeri yang saling berbatasan di darat membangun pula tembok di antara mereka. Rumah orang-orang penting juga dipagari oleh tembok. Dengan mencermati kondisi rumah, dapat diketahui status penghuninya. Rumah para pemuka memiliki beberapa pucuk meriam kecil yang akan ditembakkan sebagai penghormatan saat menerima kehadiran tamu penting. Selain itu terdapat pula meriam-meriam lainnya yang dipergunakan sebagai hiasan. Benda-benda berharga seperti piring-piring tembikar, senapan, pedang indah, tombak, dan lain sebagainya turut memenuhi tempat kediaman mereka. Sebagai contoh, rumah penguasa negeri Amar dihiasi dengan delapan meriam kecil dan dua meriam besar yang dipandang sebagai lambang kekuatan serta kekuasaannya.

III. JAILOLO

a. Cikal Bakal dan Perkembangan Jailolo

Jailolo dianggap sebagai kerajaan tertua di Maluku, walaupun tidak menutup kemungkinan terdapat kerajaan lain yang lebih tua ketimbang Jailolo. Hingga kini belum dapat dipastikan kapan Kerajaan Jailolo berdiri. Hanya saja menurut legenda kerajaan ini pernah diperintah seorang ratu yang menikah dengan raja Kerajaan Loloda di sebelah utara Halmahera. Penguasa wanita itu dikabarkan memerintah dengan tangan besi. Oleh karenanya, timbul pembangkangan di kalangan rakyat sehingga mereka akhirnya melarikan diri ke pulau-pulau kecil di sekitar Halmahera, yaitu Ternate, Tidore, Moti, dan Makian (± 1250). Para pelarian politik ini merupakan cikal bakal kerajaan-kerajaan lain di Kepulauan Maluku, bahkan kelak Ternate berkembang makin besar dan kuat sehingga sanggup mencaplok Jailolo.

Kolano (Raja) Ternate yang bernama Siale berambisi menaklukkan Jailolo pada 1824. Ia mengirim angkatan perangnya dan menduduki beberapa desa Jailolo. Perjalanan sejarah Jailolo berikutnya diwarnai oleh serangkaian agresi Ternate, antara lain

- Kolano Ngara Malamo menduduki beberapa desa di Batu Cina, bagian selatan Jailolo (1304).

798. *Halmahera Timur dan Raja Jailolo*, halaman 43.

- Kolano Tulu Malamo menyerang Jailolo (1343), sekalipun pada Pertemuan Moti (1322) disepakati bahwa Jailolo merupakan kerajaan peringkat pertama di antara ketiga kerajaan besar lainnya.
- Kolano Gapi Malamo kembali menyerbu Jailolo (1359), tetapi dapat dipukul mundur.
- Kolano Kumala Putu menyerang Jailolo (1380).
- Serangan terhadap Jailolo dilancarkan lagi semasa pemerintahan Kolano Marhum (1465).
- Taruwese, raja muda Ternate, meneruskan upaya penaklukan Jailolo pada 1524, tetapi tidak membuahkan hasil yang diharapkan.
- Pada 1527, Taruwese dengan bantuan Spanyol sanggup menduduki sebagian wilayah Jailolo, tetapi tidak bertahan lama.

Sesudah serangan Gapi Malamo berhasil ditangkis oleh Jailolo, dilangsungkan pernikahan politik antara putra Gapi Malamo, Gapi Baguna, dengan putri Kaicil Kawalu, Kolano Jailolo pada 1372. Namun, perkawinan itu belum sanggup meredam ambisi Ternate menguasai Jailolo.

Kedatangan Spanyol disambut gembira oleh Jailolo yang mendambakan perlindungan terhadap Ternate. Sultan Yusuf merelakan kerajaannya sebagai bawahan Spanyol, namun tawaran ini tidak begitu ditanggapi oleh Spanyol. Penggantinya, Sultan Zainal Abidin Syah, berupaya menarik perhatian Raja Charles V dari Spanyol melalui pelayanannya yang baik terhadap orang-orang Spanyol. Pada 1523, ia mengulangi tawaran yang sama dengan ayahnya. Kali ini Spanyol yang baru saja memukul mundur orang-orang Portugis dan Ternate dari Tidore melanjutkan pelayarannya ke Jailolo. Spanyol setuju menempatkan 27 orang pasukannya di sana pada 1527. Sultan Zainal Abidin Syah mangkat di tahun yang sama dan digantikan oleh putranya, Sultan Yusuf (1527–1533).

Prajurit Spanyol membagikan senjata kepada rakyat dan mengajari mereka cara menggunakannya. Selain itu, benteng pertahanan Jailolo diperbaiki dan dilengkapi dengan berbagai jenis persenjataan. Katarabumi, seorang bangsawan dan negarawan terbesar yang pernah dimiliki Jailolo, diangkat sebagai mangkubumi (perdana menteri) pada 1529. Berkat kepiawaian Katarabumi dan dukungan Tidore, Ternate dibuat kewalahan sehingga sementara waktu terpaksa melupakan niatnya menginvasi Jailolo. Sultan Yusuf wafat pada 1533 dan putranya bernama Firuz Alauddin menaiki

singgasana Jailolo. Kendati demikian, Firuz Alauddin masih di bawah umur dan kondisi kesehatannya tak begitu baik. Karena itu, Katarabumi memerintah sebagai wakilnya.

Ternyata Katarabumi memendam agenda tersembunyi yang belum terungkap. Peristiwanya berawal dari tuduhan Gubernur Portugis Tristao de Ataide terhadap orang-orang Spanyol yang ada di Jailolo bahwa mereka telah melindungi empat hingga lima negeri bawahan Portugis. Oleh karenanya, Portugis lantas menyerang Jailolo dan berhasil mengalahkannya. Raja Firuz Alauddin yang sakit-sakitan dibawa ke Benteng Gamalama dengan dalih berobat. Serangan ini sesungguhnya adalah hasil persekongkolan antara Ataide dengan Katarabumi sendiri. Ataide telah menyuap Katarabumi dengan berbagai hadiah. Raja Jailolo yang dibawa oleh Portugis itu meninggal tak lama kemudian di rumah sakit Portugis karena diracun orang-orang suruhan Katarabumi.

Katarabumi menobatkan dirinya sebagai Kolano Jailolo pada 1534 dan menyatakan bahwa dirinya memerintah atas nama Raja Portugal. Ia berhasil menghalau Ternate dari wilayah kekuasaannya dan membendung ambisi mereka menaklukkan Jailolo. Di sini tampak betapa rumitnya permainan politik zaman itu, mengingat Ternate adalah sekutu Portugis yang justru membantu Jailolo. Percaturan politik makin rumit dengan serbuan Katarabumi ke Moro–negeri sekutu Portugis yang warganya banyak menganut agama Katolik. Berulangkali Katarabumi menyerang misi Yesuit (sebuah ordo Gereja Katolik Roma) di Moro. Deyalo, Sultan Ternate yang kurang disukai dan didongkel oleh Portugis, malah dilindungi oleh Katarabumi. Tindakan ini membingungkan Portugis karena Katarabumi pernah menyatakan bahwa dirinya adalah sahabat setia Portugis.

Hairun, Sultan Ternate, ingin menguasai Moro dan berupaya mengambil hati Portugis. Ia memberikan keleluasaan kepada Portugis menyebarkan agama Katolik di Moro sehingga komunitas Kristen bertumbuh pesat di sana. Akhirnya, sebagian besar Moro berada di bawah kekuasaan misi Yesuit yang mendapat dukungan Portugis. Kenyataan ini pada gilirannya mengesalkan Hairun. Oleh sebab itu, ia menggalang persekutuan rahasia dengan raja Bacan, Tidore, dan Jailolo. Mereka sepakat membendung perkembangan misi Yesuit yang disokong Portugis. Serangan besar-besaran dilancarkan pada 1536. Sultan Ternate menyerahkan pelaksanaan operasi militernya kepada Katarabumi. Fakta ini membuktikan bahwa tidak ada kawan atau lawan yang abadi karena Ternate adalah bekas musuh bebuyutan Jailolo.

Serbuan di atas benar-benar merupakan pukulan bagi Moro dan banyak warganya yang akhirnya kembali ke agama Islam. Ketika Portugis mendengar perihal serangan Jailolo tersebut, hilang sudah kepercayaan mereka terhadap Katarabumi. Kini giliran Jailolo menjadi target serangan Portugis pada 1551. Ternate diajak Portugis ikut serta dalam ekspedisi militer ini. Mulanya, Sultan Ternate menolak, tetapi belakangan terpaksa menerimanya. Rencana Portugis bocor ke telinga Katarabumi sehingga ia lantas melakukan persiapan seperlunya. Benteng Jailolo diperkuat dan dipersenjatai. Setelah melalui pengepungan selama tiga bulan, Katarabumi menyerah. Salah satu sumber menyatakan bahwa Katarabumi menolak menyaksikan penyerahan Jailolo pada Portugis dan menghilang ke hutan. Konon, ia menjalani kehidupan sebagai pertapa.

Sumber lain menyebutkan bahwa Katarabumi setelah menyerah menyatakan keinginannya dibaptis ke agama Katolik. Namun, ketika para pastor telah siap membaptisnya, mereka minta agar Katarabumi menceraikan istri-istrinya dan menyisakan seorang saja. Permintaan ini ditolak oleh Katarabumi sehingga upacara pembaptisan gagal. Beberapa hari kemudian, Katarabumi tewas minum racun. Kedudukannya sebagai Kolano Jailolo digantikan oleh Saubo. Perseteruan antara Ternate dan Jailolo bangkit kembali. Sultan Said dari Ternate menyerang Jailolo pada 1600 sehingga Kolano Saubo terpaksa hengkang dari kerajaannya. Saubo menggalang kembali kekuatannya dan Sultan Said ditangkap oleh Spanyol serta diasingkan ke Manila. Dengan demikian, Saubo sanggup merebut kekuasaannya lagi.

Spanyol menyerang dan menduduki Jailolo pada 1611 dan rajanya dibawa ke Ternate. Peristiwa ini boleh dikatakan merupakan titik awal kehancuran Jailolo. Semenjak itu, Raja Jailolo tidak pernah bertakhta lagi di negerinya. Spanyol meninggalkan Jailolo pada 1620 dan Ternate mengambil alih wilayahnya. Demi memantapkan aksinya menduduki Jailolo, Sultan Mandar Syah dari Ternate pernah menempatkan Kaicil Kalamata sebagai Raja Jailolo pada 1652, tetapi dua bulan kemudian ia dicopot dari kedudukannya. Kolano Jailolo terakhir, Kaicil Alam, tidak diizinkan memerintah kerajaannya dan harus berdiam di Ternate. Ia dinikahkan dengan Boki Gamalama, adik Sultan Sibori dari Ternate. Kaicil Alam mangkat pada 1684 dan berakhir sudah Kerajaan Jailolo untuk selama-lamanya. Semenjak itu, tinggal tersisa tiga kerajaan besar di Maluku

b. Restorasi Kerajaan Jailolo

Penghapusan Kerajaan Jailolo tak menggembirakan kerajaan-kerajaan lainnya. Sultan Syaifuddin dari Tidore berpendapat bahwa Maluku secara tradisional seharusnya ditopang oleh empat kerajaan besar, yakni Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Dengan runtuhnya Jailolo, penopangnya tinggal tiga kerajaan sehingga terjadi kepincangan. Syaifuddin menyarankan bahwa kemelut di Maluku baru dapat diakhiri apabila kondisi dikembalikan seperti semula. Ia mengusulkan kepada Gubernur VOC bernama Padtbrugge agar Kaicil Alam dipulihkan kedudukannya sebagai Raja Jailolo yang berdaulat. Kendati demikian, VOC merasa berutang budi kepada Ternate dan menganggap angin lalu saran Syaifuddin. Gagasan membangkitkan lagi Kesultanan Jailolo sebenarnya mendapatkan tanggapan positif beberapa bangsawan Ternate sendiri. Tetapi Sultan Ternate tidak menyetujuinya dan berdalih bahwa yang meruntuhkan Jailolo adalah Portugis, bukan Ternate.

Gagasan Sultan Syaifuddin merestorasi Jailolo terus bergaung hingga zaman Sultan Nuku. Setelah dinobatkan sebagai Sultan Tidore, Nuku mengangkat salah seorang bangsawan tinggi bernama Muhammad Arif Billa sebagai Sultan Jailolo. Tokoh ini telah berpengalaman dalam bidang politik dan kemiliteran. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Sangaji Tahane (Makian) dan kemudian menjadi Jogugu Tidore selama 13 tahun pada masa berkuasanya Sultan Kamaluddin (1784–1797). Ketika Nuku memperjuangkan haknya sebagai Sultan Tidore dan berniat mengusir kekuatan asing dari negerinya, Muhammad Arif Billa turut bergabung dengannya serta diangkat sebagai panglima perang.

Nuku menawarkan perundingan dengan Belanda pada 1804, tetapi syaratnya mereka harus mengakui Jailolo sebagai kesultanan merdeka dan berdaulat. Namun, persyaratan Nuku ini ditolak Belanda sehingga perundingan tak dapat dilangsungkan. Akibat penolakan Belanda ini, pasukan Sultan Jailolo di Toniku bersiap siaga menggempur Halmahera Utara. Kendala yang dihadapi Nuku beserta Billa adalah sebagian rakyat di kawasan tersebut yang telah menyatakan kesetiaannya kepada Ternate selaku pemegang otoritas di sana. Hal itu tidak mengherankan mengingat bekas wilayah Jailolo telah lama lebur ke dalam Kesultanan Ternate. Suku Alifuru tidak bersedia mengakui Sultan Jailolo yang diangkat Nuku. Mereka tetap setia kepada Sultan Ternate. Dengan demikian, Jailolo hanya sanggup menguasai beberapa

kampung saja di pantai barat Halmahera. Operasi militer ke Halmahera di atas boleh dikatakan tidak memperoleh hasil menggembirakan.

Sultan Muhammad Yasin dari Ternate berupaya menengahi kemelut Jailolo dan mengusulkan agar kawasan Toniku di pantai barat Halmahera yang merupakan wilayah Tidore ditetapkan sebagai daerah kekuasaan Jailolo. Sementara itu, ia akan mengizinkan penyediaan bahan pangan dari Gane Dalam yang berada di bawah kekuasaannya. Meskipun telah direstorasi, Kesultanan Jailolo sebenarnya hanya merupakan kerajaan bawahan Tidore. Konflik terus berlangsung hingga wafatnya Nuku pada 14 November 1805, yang digantikan oleh Zainal Abidin. Belanda meminta agar Zainal Abidin menyerahkan Billa. Tetapi tuntutan ini ditolak oleh Tidore dan Zainal Abidin menyatakan bahwa Muhammad Arif Billa tidak berbahaya bagi Belanda. Pemerintah kolonial tidak menerima argumen Zainal Abidin dan merasa otoritasnya tertantang. Mereka segera melancarkan serangannya ke Tidore pada 1806 dan membumihanguskan Soasiu, ibu kota Kesultanan Tidore.

Serangan terhadap Tidore tentunya juga diarahkan kepada Jailolo. Menyadari datangnya ancaman agresi militer Belanda, Sultan Jailolo menyingkir ke Weda di Halmahera Timur. Angkatan perang pemerintah kolonial terus mengejar Sultan Muhammad Arif Billa hingga ke Weda. Oleh sebab itu, markas Jailolo dipindahkan ke pedalaman Weda. Sultan Jailolo pertama yang diangkat Nuku ini mangkat karena terjatuh ke dalam jurang pada 1807. Ia digantikan oleh putranya, Kimalaha Sugi, yang menyadang gelar Sultan Muhammad Asgar. Inggris menduduki kawasan itu pada 1810 dan tidak mengakui Muhammad Asgar dengan dalih bahwa ia tak pernah diangkat oleh otoritas yang sah. Karenanya, Muhammad Asgar tak berhak menyandang gelar sultan serta menangkapnya. Hingga 1817, Muhammad Asgar hidup sebagai tawanan Inggris.

Kekuasaan atas Maluku dikembalikan oleh Inggris ke tangan Belanda dan Muhammad Asgar turut diserahterimakan sebagai tahanan. Ia mengajukan permohonan agar dibebaskan dan diizinkan memimpin rakyatnya di Halmahera. Tetapi harapannya ini bertepuk sebelah tangan. Karena itu, dilayangkannya sepucuk surat kepada Laksamana A.A. Buyskes, komandan pasukan Belanda yang tengah memadamkan pemberontakan Pattimura. Dalam suratnya, Muhammad Asgar menegaskan kembali harapannya agar dipulihkan haknya sebagai Sultan Jailolo, mengingat bahwa kesultanan itu memang pernah ada dan ayahnya telah diangkat

rakyat Halmahera sebagai raja mereka. Sayangnya, Buyskes tidak memedulikan surat Asgar, bahkan Raja Jailolo ke-2 ini diasingkan ke Jepara.

Kini pembahasan beralih kepada Hajuddin, putra Muhammad Arif Billa lainnya. Sejak penyerangan Belanda terhadap Tidore pada 1806, ia terus tinggal berpindah tempat bersama 3.000 pengikutnya demi menghindari kejaran pasukan kolonial. Akhirnya, ia melarikan diri ke Seram Pasir. Oleh sebagian kalangan, Hajuddin dikenal sebagai Sultan Jailolo ke-3. Lama kelamaan pengikutnya bertambah banyak. Mereka tidak hanya berasal dari Halmahera Timur, melainkan juga kawasan-kawasan Halmahera lainnya, seperti Tobelo, Kao, Galela, dan Papua. Penduduk asli Seram Pasir ada pula yang mendukung Hajuddin. Selain itu, orang-orang dan kaum bangsawan yang tak setuju pengangkatan Sultan Muhammad Tahir turut melarikan diri ke Seram Pasir dan bergabung dengan Hajuddin.

Mempertimbangkan kekuasaan dan wibawanya yang makin besar, Hajuddin merasa perlu meminta legitimasi pemerintah kolonial. Dikirimkannya sepucuk surat kepada Gubernur Ambon guna memohon izin pendirian sebuah kerajaan di Seram Pasir bagi komunitas Halmahera di sana. Mula-mula, usahanya ini menemui kegagalan dan alih-alih mendapatkan legitimasi atau pengesahan, pemerintahan kolonial justru makin gencar memburunya. Belanda mengumumkan bahwa Hajuddin tak lebih dari seorang penjahat dan bersedia memberikan hadiah bagi siapapun yang sanggup menangkapnya. Namun, imbalan yang dijanjikan Belanda tak menggoyahkan hati pengikut Hajuddin. Belanda menyadari betapa kuat pengaruhnya di Seram Pasir.

Oleh sebab itu, ketika Peter Markus menjadi Gubernur Ambon, Belanda tidak lagi memandang Hajuddin sebelah mata. Ajakan damainya mulai mendapatkan tanggapan positif. Apalagi para pejabat kolonial di Ambon berpandangan bahwa maraknya bajak laut di perairan Maluku didalangi oleh Hajuddin. Menurut mereka, kegiatan perompakan akan berkurang apabila Hajuddin berhasil dijinakkan. Dengan demikian, tuntutan Hajuddin perlu dipertimbangkan. Peter Markus menjalin hubungan resmi dengan Hajuddin yang berakhir di meja perundingan. Hajuddin mengajukan permintaan agar ia diperkenankan menjadi penguasa di Halmahera. Tetapi pemerintah kolonial tidak menyetujuinya dan mengusulkan agar kerajaan itu didirikan di Seram Pasir. Wilayahnya hanya meliputi pantai utara Seram Pasir saja dan tak mencakup wilayah pedalaman. Usulan ini akhirnya disetujui oleh Hajuddin. Kendati demikian, ia menyarankan agar kakaknya, Muhammad Asgar–yang saat itu

masih diasingkan di Jepara–diangkat sebagai rajanya. Sementara ia sendiri cukup puas menjabat sebagai raja muda.

Pemerintah kolonial di Batavia menyetujui permintaan Hajuddin dan Muhammad Asgar dipulangkan lagi ke Maluku. Ia menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial pada 25 Januari 1826 dan tidak lama kemudian dilantik sebagai Sultan Jailolo ke-2. Sumpah setia kepada pemerintah kolonial diucapkannya di Benteng Victoria, Ambon, dan setelah itu ia resmi menyandang gelar Paduka Seri Tuwan Sulthan al-Wasatu Billahil Alim, Sulthan Muhammad Saleh Amiruddin Khalifatullah Atas Muka Bumi Daerah Alam Maluku Yang Maha Mulia, Yang Memegang Parenta di atas Takhta Kerajaan Tanah Seram.[799] Pemerintah kolonial sendiri memberikan tunjangan sebesar fl250 setiap bulannya. Kegiatan perompakan yang marak di perairan Maluku sementara waktu berhasil diatasi. Kerajaan yang dipimpin Muhammad Asgar ini tidak bernama Jailolo, melainkan Kerajaan Seram atau Tanah Seram. Wilayahnya berbatasan dengan Hatiling dan Waru.[800]

Sewaktu Peter Markus tak lagi menjabat gubernur, timbul perselisihan antara Muhammad Asgar dengan pemerintah kolonial. Belanda berniat menangkap Sultan Jailolo ke-2 ini karena dituduh mendalangi perampokan, tetapi ia dibebaskan kembali karena laporan tersebut terbukti palsu. Kawasan Seram Pasir yang menjadi lokasi Kerajaan Jailolo termasuk daerah yang kurang subur sehingga rakyat terjerumus dalam kemiskinan dan beralih profesi menjadi bajak laut. Guna mengatasi hal ini, sultan mengajukan permohonan agar ia dan rakyatnya diperkenankan pindah ke Halmahaera, tempat kedudukan Kerajaan Jailolo yang seharusnya, namun pemerintah kolonial tidak mengizinkannya. Dalam kunjungannya ke Ambon pada 1832, Sultan Jailolo meminta agar ia diperbolehkan pindah ke Pulau Obi yang telah dibeli VOC dari Bacan. Sekali lagi keinginan sultan Jailolo ini bertepuk sebelah tangan. Meskipun demikian, sultan pernah mengutus adiknya ke Obi guna menjajaki kemungkinan pindah ke sana.

Permasalahan Jailolo yang berlarut-larut ini akhirnya memaksa Belanda menghapuskan Kesultanan Jailolo pada 1832. Sebelumnya, Belanda berniat menurunkan Muhammad Asgar dan mengangkat Hajuddin sebagai sultan, tetapi yang bersangkutan menolak menggantikan kakaknya. Gubernur Ellinghuijzen mengundang Sultan Jailolo, raja muda, dan pengikutnya berunding di atas kapal perang Belanda.

---

799. *Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250–1950*, halaman 44.
800. Lihat *Halmahera Timur dan Raja Jailolo*, halaman 227.

Kesempatan itu, dipergunakan pemerintah kolonial menangkap mereka dan mengasingkannya ke Cianjur. Baru pada 1844 para tawanan ini dipulangkan ke Maluku, terkecuali Hajuddin dan Jamaluddin. Pada episode sejarah selanjutnya masih terdapat serangkaian upaya menghidupkan kembali Kesultanan Jailolo, tetapi seluruhnya berujung pada kegagalan. Dano Baba Hasan, kerabat Ternate, menuntut agar dirinya diakui sebagai Sultan Jailolo dan menerbitkan pemberontakan pada 1876. Berikutnya, Dano Jaeyudin yang mengaku keturunan Dano Baba Hasan mengangkat dirinya sebagai Yang Dipertuan Agung Kesultanan Jailolo pada 1914. Gerakan ini berhasil ditumpas dan ia ditangkap serta dipenjarakan.

IV. KISAR

Menurut penuturan cerita rakyat, leluhur yang pertama mendiami Pulau Kisar adalah Lewenmali-Asamali dengan *soa* (marga)-nya adalah Honoo. Leluhur ini berasal dari Timor Timur serta berdiam di kawasan Oirata Timur (Manheri). Selanjutnya, datang Jawuru yang merupakan leluhur Resijotowawa dan Suri Mati beserta Kelij Halij sebagai leluhur bagi Wonreli. Selanjutnya, dilakukan pembagian Pulau Kisar dengan leluhur Wonreli di barat dan timur bagi Oirata.[801]

Sumber lain menyebut bahwa sebelum hadirnya bangsa Barat di pulau ini, telah terdapat dua suku asli yang bernama Meher dan Oirata. Adapun orang Meher berkedudukan di Wonreli dan mengenal kedudukan raja yang dibantu oleh para *penongkat luhu walimanya*. Sementara itu, orang Oirata tidak mempunyai raja dan dipimpin oleh lima tuan tanah. Mereka adalah pemimpin bagi orang Oirata yang berdiam di Oirata barat dan timur. Kelima tuan tanah itu terbagi menjadi lima keluarga, yakni Latukoi dan Ratumali berkedudukan di Oirata timur serta berperan sebagai pendeta adat, keluarga Mauki, Tamindael, dan Katihara berdiam di Oirata barat serta bertugas sebagai pengatur adat.[802]

Peperangan pernah terjadi antara suku Meher dan Oirata akibat ternak suku Oirata yang memangsa habis tumbuhan ubi jalar suku Meher. Oleh karenanya, orang Meher menjadi marah dan pecahlah peperangan di sebuah tempat bernama Lorlopai. Peperangan ini dapat diselesaikan karena VOC turun tangan mendamaikannya. Sebagai wujud perdamaian dilangsungkan upacara adat penyerahan Kain Tanah

801. Lihat *Arsitektur Tradisional Masyarakat Oirata*, halaman 17.
802. Lihat *Sejarah Kerajaan Kisar*, halaman 29.

Tuhur Lau dan Ko o (sejenis minuman keras) oleh suku Oirata sebagai wujud ganti rugi atas tumbuhan suku Meher yang dimangsa ternak suku Oirata tersebut. Meskipun demikian, peperangan akibat masalah yang sama kemudian berkecamuk kembali.[803]

Kerajaan Kisar juga disebut Hihi Leli Halono. Nama tersebut diambil dari *mata rumah* (istana) utama atau pemimpin adat tertinggi di Kisar. Nama istananya adalah Kerak Ono yang terletak di Wonreli. Saat itu, Wonreli masih bernama Leke Yoto Ruhun Teprulu atau Myotomyau. Penguasa atau tuan tanah di sana bergelar Or Noho Or Rai, berasal dari *mata rumah* Hilhi Leli Halono.[804]

Menurut salah satu versi, riwayat pendirian Kerajaan Kisar berawal dari lima orang dari Kisar bernama Pakkar, Norimarna, Poroe, Perulu, dan Paununu (tiga orang pertama bersaudara, sedangkan dua terakhir berasal dari Kampung Abusur) ke pulau Timor yang dikuasai Portugis. Mereka mendarat di pantai bernama Yalu. Di sana mereka berjumpa dengan seorang Portugis bernama Risanpuna yang mempunyai banyak benda berharga, antara lain keris emas. Orang yang berasal dari Abusur ingin memiliki keris itu dan terpaksa membunuh Risanpuna. Setelah peristiwa tersebut, mereka kembali ke Kisar.

Tindakan itu memancing kemarahan Portugis yang menyerang Kisar sehingga mereka terpaksa meminta bantuan Belanda di Banda Neira. Koholouk Pakar mengajukan permohonan kepada VOC yang kemudian disanggupi. Armada Belanda yang dipimpin oleh Jan de Leuw (dalam pelafalan setempat disebut Yambelein) bersama dengan Pakar berlayar ke Kisar serta mendarat di pantai Nama pada 1664.

Meskipun demikian, pendekatan dengan kekerasan tidak dilakukan dan Belanda menanyakan duduk perkara serangan mereka itu kepada orang Portugis. Orang-orang Portugis menjawab bahwa tujuan mereka adalah mencari serta menangkap pembunuh rekan mereka, Risanpuna. Setelah mengetahui permasalahannya, disepakati penyelesaian secara damai bagi hal itu. Pakar harus menyerahkan emas sebagai pengganti keris yang dicuri tersebut kepada orang Portugis. Demikianlah, orang Portugis lalu kembali ke Timor.

Keris milik Risanpuna itu lantas diserahkan kepada Pakar sebagai pengganti emas yang diberikan kepada orang Portugis sebagai ganti rugi. Semenjak saat itu, keris

803. Lihat *Sejarah Kerajaan Kisar*, halaman 30.
804. Lihat *Sejarah Kerajaan Kisar*, halaman 32.

tersebut menjadi pusaka kerajaan. Koholouk (Koholok)[805] Pakar dibaptis dengan nama Cornelis Bakker dan menjadi Raja Kisar pertama pada 1665. Setelah berlalunya orang Portugis, penduduk yang mengungsi kembali lagi kampung halamannya. Kekuasaan Belanda makin besar. Sebagai tanda perjanjian persahabatan antara Kisar dan VOC, ditanamlah sebatang pohon beringin yang dimanai Beringin Yambelein.[806] Pada kurun waktu tersebut dibangun pemukiman baru bernama Leke Woorili Ruhun Sokolay, yang kelak menjadi ibu kota Kisar. Nama Woorili tersebut kemudian terkenal dengan sebutan Wonreli.

Berdasarkan perjanjian, VOC diperkenankan menempatkan wakilnya–setingkat residen–dan membangun benteng di Kisar.

Raja-raja yang memerintah Kisar selanjutnya adalah Maulewen Frederick Bakker (1686–1710) selaku Raja Kisar kedua. Ia digantikan oleh Loisokolai Filiphus Bakker (1732–1752), Koholouk Johannes Bakker, dan Hairmere Philipus Bakker (1769–1782). Pada 1777, ditempatkan seorang pendeta di Kisar dan dibangun gereja bagi keperluan ibadah.[807] Raja-raja selanjutnya adalah Maulewen Frederik Bakker (1783–1792, wakil raja), Utanmeru Zacharias Bakker (1792–1826), Hairmere Philipus Bakker, Utanmere Zacharias Bakker (1882), Wanamau Yesayas Bakker (1915), Hairmere Agus Octovianus Bakker (1925–1941), Heimere Philipus Bakker (1946–1992), dan Wanamau John Yesayas Bakker (1997–2007). Raja Utanmere Zacharias Bakker dan penggantinya, Wanamau Yesayas Bakker, dikenal pandai berbahasa Inggris dan mendapatkan pengetahuan langsung dari para guru asal Australia.[808]

V. LOLODA

Lolonda merupakan salah satu kerajaan yang cukup tua usianya di Kepulauan Maluku. Lokasinya terletak di ujung utara Pulau Halmahera. Kapan Kerajaan Loloda didirikan masih merupakan misteri sejarah. Legenda meriwayatkan bahwa dahulu di Loloda belum ada raja dan rakyatnya dipimpin oleh para pemuka masyarakat yang dianggap memiliki kelebihan dibandingkan lainnya. Lama-kelamaan timbul kekacauan karena suatu kelompok ingin mendominasi yang lainnya. Suatu kali salah seorang

805. Pada buku *Sejarah Kerajaan Kisar*, ada bagian yang mengeja nama ini sebagai Koholok (halaman 32) dan bagian lain yang mengejanya Koholouk (halaman 34).
806. Lihat *Sejarah Kerajaan Kisar*, halaman 37.
807. Lihat *Sejarah Kerajaan Kisar*, halaman 47.
808. Lihat *Sejarah Kerajaan/ Kisar*, halaman 51.

pemuka masyarakat asal Pulau Bacan bernama Bikusagara pergi melaut. Dijumpainya serumpun rotan yang tumbuh di tebing curam. Ia memerintahkan para pengikutnya menebang rotan tersebut. Ajaibnya, darah mengucur dari batang-bantang rotan ketika ditebas parang. Menyaksikan keanehan ini, Bikusagara terjun ke laut dan menemukan empat butir telur naga di antara bebatuan karang.

Bikusagara mendengar suara yang memerintahkannya agar membawa pulang keempat telur naga itu karena akan menetaskan orang-orang mulia. Mematuhi amanat tersebut, Bikusagara dengan hati-hati mengambil telur-telur itu dan setibanya di rumah, ia meletakkannya pada sebuah kotak rotan. Tak berapa lama menetaslah telur-telur tersebut dan keluarlah tiga anak laki-laki serta seorang anak perempuan. Mereka merupakan cikal bakal raja-raja yang berkuasa di Kepulauan Maluku dan sekitarnya. Tiga anak laki-laki masing-masing menjadi Raja Bacan, Papua, dan Bungku-Banggai. Sedangkan anak perempuannya menikah dengan Raja Loloda.

Raja-raja Loloda bergelar *kolano*. Konon, salah seorang Kolano Loloda menikah dengan Ratu Jailolo, yang memerintah dengan kejam. Setelah Ratu Jailolo mangkat, Loloda melepaskan dirinya dari Jailolo. Kerajaan Loloda bisa dikategorikan miskin dan tak banyak pula jumlah pendudukannya. Raja dan Ratu Loloda tak memiliki budak dan harus mengerjakan serta mengupayakan sendiri segenap kebutuhan rumah tangganya. Raja harus mencari sagu dan memancing ikan di laut sendiri demi keperluan keluarganya. Ratu Loloda mencuci sendiri pakaiannya, memasak, mencari kayu bakar, dan mendidik anak-anaknya. Kerajaan kecil ini hanya didukung pasukan sejumlah 16 orang yang telah menganut agama Islam dan 60 orang lainnya dari suku Alifuru. Tetapi karena dipercaya berasal dari keturunan telur naga, Raja Loloda diperkenankan menyandang gelar *kolano* dan setara kedudukannya dengan raja-raja kerajaan besar lainnya, seperti Tidore, Ternate, Jailolo, dan Bacan.

VI. MORO

Kerajaan kecil Moro terletak di pantai timur Halmahera Utara. Usia Moro boleh dibilang cukup tua, hanya saja sejarah pendirian dan perkembangannya masih diliputi bayang-bayang kegelapan. Tidak jelas pula siapa saja yang pernah menjadi raja-raja Moro. Wilayahnya terbagi dua, yakni yang terletak di daratan (disebut *Morotia* atau 'Moro Daratan') dan di pulau seberang laut (disebut *Morotai* atau 'Moro Lautan'). Ibu kotanya terletak di Mamuya, Morotia–yang kini masuk Kecamatan Galela.

Catatan sejarah menyebutkan bahwa yang berkuasa di Moro pada abad 16 adalah seorang raja bernama Tioliza. Saat itu, Moro kerap terancam oleh Ternate yang memperlakukan mereka layaknya budak. Orang-orang Ternate merampas hasil kebun mereka dan tidak jarang membakar tempat kediaman rakyat Moro. Suatu kali datanglah seorang pedagang Portugis bernama Gonsalo Veloso ke Mamuya. Raja Tioliza mengeluhkan hal tersebut kepadanya. Pedagang Portugis itu menyarankan Raja Moro agar bersedia masuk agama Kristen Katolik dan meminta perlindungan Portugis.

Raja Tioliza menganggap bahwa saran tersebut masuk akal. Ia mengutus pengikutnya menemui Gubernur Portugis guna melaporkan kesengsaraan yang dialami rakyatnya serta meminta bantuan Portugis. Disampaikan pula keinginan mereka menganut agama Katolik. Gubernur Tristao de Ataide sangat senang dan menyambut gembira permohonan mereka. Sebelum kembali ke kampung halamannya, para utusan Raja Moro itu menerima pembaptisan. Setibanya di Moro, mereka melaporkan sambutan yang diberikan Gubernur Portugis. Raja Moro dan para *bobato* atau menterinya bertolak ke Ternate, tempat kedudukan Gubernur de Ataide, guna dibaptis ke dalam agama Katolik oleh Pastor Simon Vaz. Pada kesempatan itu, raja mengenakan pakaian kebesaran bangsawan Portugis yang diberikan gubernur dan bersama para pengikutnya beralih menganut agama Katolik. Nama baptis yang diterimanya adalah Don Joao de Mamuya.

Alih agama ini diikuti oleh rakyat Moro. Inilah asal muasal komunitas Katolik di Moro. Sangaji Tolo, pemimpin masyarakat di Tolo, 5 kilometer selatan Mamuya, turut dibaptis dengan nama Don Ataide de Tolo. Dua buah gereja didirikan di Moro, yakni di Mamuya dan Tolo. Pastor Simon Vaz diutus mengajarkan agama Katolik ke dua kawasan tersebut. Ia berhasil merombak tradisi setempat dan menyesuaikannya dengan iman kristiani. Pada mulanya, Ternate memberikan kelonggaran kepada Portugis menyebarkan agama Katolik di Moro, namun akhirnya sultan Ternate, Hairun, merasa pesatnya perkembangan Katolik sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Bersama dengan Katarabumi, Raja Jailolo, ia memutuskan menyerang komunitas Kristen di Moro. Serbuan ini merupakan pukulan hebat bagi Moro dan rajanya memutuskan menyerah. Sebagian penduduk dialihkan lagi ke agama Islam. Kehidupan keagamaan Katolik mengalami kemunduran hingga kedatangan Fransiscus Xaverius pada 1546. Pada akhir abad 16, Moro dianeksasi oleh Ternate dan padam sudah eksistensinya di tengah-tengah percaturan kerajaan-kerajaan Maluku.

VII. OBI

Obi merupakan kerajaan kecil yang berpusat di Pulau Obi. Pengaruhnya dalam percaturan politik Maluku tidak besar. Sejarah Obi masih belum diketahui secara pasti. Hanya saja, Bacan menaklukkan kerajaan ini dan Obi pun lenyap dari panggung sejarah Maluku. Ketika Sultan Alauddin II bertakhta di Bacan, ia menjual Obi kepada VOC seharga 800 Ringgit. Menurut Perjanjian Bungaya, Obi dinyatakan sebagai bagian Ternate, namun pada kenyataannya tetap menjadi daerah kekuasaan Kesultanan Bacan.

VIII. SAMU SAMU (ABUBU, NUSA LAUT)

Menurut sumber sejarah, Raja Samu Samu merupakan pelaut tangguh yang berasal dari Abubu Nusa Laut. Pada 1520, Raja Samu Samu pernah membantu Kesultanan Ternate melawan Portugis yang saat itu tengah berupaya menanamkan hegemoninya di Kepulauan Nusantara. Samu Samu sendiri mengalami masa kejayaannya pada 1556. Raja Samu Samu III membantu Sultan Aceh memerangi Belanda, dan ketika perang itu usai, ia beserta para pengikutnya singgah di sebelah timur Batavia sehingga kawasan tersebut selanjutnya dikenal sebagai Kampung Ambon. Menurut salah satu sumber, Kampung Ambon didirikan pada 1699.[809]

Demi memperkuat ketahanan wilayahnya, Kesultanan Banten menjalin hubungan kekeluargaan dengan Raja Samu Samu III melalui pernikahan antara putra sulung Raja Samu Samu III, Williem Samu Samu (Bing), dengan cucu Sultan Banten, Siti Sundari (Rike). Kelak Williem Samu Samu ini diangkat sebagai Raja Samu Samu IV dan berdiam di Pancoran Mas, Serang, Banten. Ia dikenal pula sebagai Tuan Gede atau Bapak Gede karena rumah kediamannya merupakan satu-satunya bangunan mewah di kawasan itu.

Semasa hidupnya, Raja Samu Samu IV yang pernah menjabat sebagai jaksa, banyak menolong masyarakat sekitar, termasuk mendamaikan kerusuhan etnis. Raja Samu Samu IV tidak dikaruniai anak. Pada 1976, di Rumah Sakit Umum Serang, ia meminta adik kandungnya, S. P. Samu Samu, yang kelak menggantikannya sebagai Raja Samu Samu V, mencatat seluruh perihal sejarah leluhur mereka. Oleh karenanya,

809. Lihat *Asal-Usul Nama Tempat di Jakarta*, halaman 81.

S. P. Samu Samu mengundang putra kandungnya, Benny Ahmad Samu Samu (kelak Raja Samu Samu VI) agar turut mendengarkan dan mencatatnya.

Raja Samu Samu IV (Tuan Gede)

Raja Samu Samu V
Sumber: dokumentasi Raja Samu Samu VI

Raja Samu Samu VI

Raja Samu Samu VI memberitahu penulis bahwa di Maluku terdapat dua jenis raja, yakni *raja adat* dan *raja negeri*. Raja adat atau raja besar adalah seorang penguasa yang turun-temurun dan bukan pilihan rakyat. Ia bertugas mengeluarkan dan

menetapkan adat. Sementara itu, raja negeri dapat disetarakan dengan kepala desa dan bertanggung jawab menjalankan pemerintahan tingkat desa (negeri). Kedudukannya dapat diwarisi turun-temurun atau dipilih rakyat. Raja adat menyandang gelar adat di awal namanya (misalnya Upulatu). Sebaliknya, yang bukan raja adat tidak menyandang gelar adat meskipun penobatannya dilakukan menurut adat.

Raja Samu Samu memiliki *mata rumah* (istana) dengan *soa* (adat) *rumalau* dan *teon*-nya (persekutuan keluarga Samu Samu) *luakutu* dan *pewai*. *Mata rumah* Raja Samu Samu dihuni oleh Samuel Martinus Samu Samu, yang bertugas menjaga tatanan adat beserta kebesaran Samu Samu.

Menurut Raja Samu Samu VI, seorang raja dan sultan Nusantara seyogianya memiliki lima komitmen, yakni

- Komitmen amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
- Komitmen kemanusiaan.
- Komitmen kehidupan dan keselarasan alam.
- Komitmen kebijaksanaan dan kearifan lokal.
- Komitmen identitas.

Pejabarannya adalah sebagai berikut.

Komitmen identitas terdiri dari

1. Bahwa amanah yang diemban oleh raja atau sultan Nusantara hendaknya dilaksanakan sungguh-sungguh.
2. Amanah yang dipegang raja atau sultan Nusantara adalah anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dan bukan gelar sebagai tanda jasa pemberian suatu lembaga atau perseorangan.
3. Fungsi dan tugas raja atau sultan dalam amanah, bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Raja atau sultan sebagai hamba Tuhan hendaknya senantiasa ingat kebesaran Tuhan.

Komitmen kemanusiaan terdiri dari

1. Raja dan sultan adalah manusia sehingga dalam hidup dan kehidupannya layak sebagai manusia sama dengan hamba Tuhan yang lain.
2. Raja dan sultan mengemban amanah mempunyai kewajiban menjadi panutan, berani, jujur, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan amanah, demi kepentingan kemanusiaan.

3. Raja dan sultan mempertahankan hak-haknya yang meliputi kekayaan wilayah, baik hak pribadi, hak keluarga, hak atas hartanya, yang lebih dikenal sebagai HAM dewasa ini, hak berdemokrasi, hak pembelaan, hak intelektual, serta hak pembelaan terhadap masyarakatnya.

Komitmen kehidupan dan keselarasan lingkungan terdiri dari

1. Raja atau sultan dalam menjalankan amanahnya harus dapat memelihara dan menjaga keutuhan hubungan dalam kehidupan bermasyarakat serta kecintaan terhadap lingkungan/ alamnya.
2. Raja atau sultan mencintai lingkungan/ alam agar bermanfaat dalam kelangsungan hidup beserta kehidupan secara terus menerus, yakni dari generasi ke generasi berikutnya.
3. Raja atau sultan sebagai hamba Tuhan hendaknya senantiasa ingat kekuasaan Tuhan.

Komitmen kebijakan dan kearifan lokal terdiri dari

1. Raja atau sultan harus dapat bertindak bijaksana dan arif dalam menjalankan amanahnya.
2. Raja atau sultan dengan menjalankan kebijakan dan kearifannya maka akan terpelihara dan terjaga hubungan dua arah yang baik. Raja atau sultan hendaknya tidak memutuskan sendiri segenap permasalahan, melainkan meminta saran dewan adat atau orang-orang yang dianggap bijaksana.
3. Raja atau sultan dengan melaksanakan kebijakan dan kearifannya maka segala sesuatu akan kecil risikonya. Dengan bertumpu pada kearifan lokal, risikonya akan kecil karena sebelumnya telah bertanya pada patih atau penasihatnya.
4. Raja atau sultan sebagai hamba Tuhan harus selalu ada dalam dirinya sifat-sifat Tuhan.

Komitmen identitas terdiri dari

1. Raja dan sultan harus memiliki jati diri atau identitas yang melihat pada dirinya yang tidak dapat diubah atau ditambah atau diganti oleh yang lain. Dengan kata lain, status sultan atau raja telah melekat semenjak awalnya.
2. Bahwa jati diri atau identitas itu akan menunjukkan siapa sebenarnya diri seseorang dalam membawa dirinya sendiri maupun terhadap yang lain. Bila dia seorang raja atau sultan dan melakukan hal-hal negatif maka orang itu bukanlah sultan atau raja.

3. Jati diri atau identitas yang melekat akan membawa kelangsungan hidup dan kehidupan serta memberi dampak positif dari generasi ke generasi selanjutnya. Jika seorang raja atau sultan melakukan sesuai komitmen akan memberikan dampak positif.
4. Raja atau sultan sebagai hamba Tuhan senantiasa memohon rahmat dan kemurahan Tuhan.

Tombak Emas Raja Samu Samu yang Ada di Museum Konferensi Asia Afrika Bandung
(foto koleksi pribadi)

Dokumen Milik Raja Samu Samu VI

Surat turut berbelasungkawa yang dikirimkan oleh Ratu Wilhemina atas terbunuhnya salah seorang kerabat Samu Samu oleh bala tentara pendudukan Jepang.

Beberapa piagam penghargaan yang diperoleh oleh Raja Samu Samu VI

IX. SERAM

Di Seram terdapat berbagai negeri yang pemimpinya bergelar raja. Kepulauan Seram Laut terdiri dari berbagai pulau yang masing-masing dipimpin seorang raja, yakni Seram Laut, Kefeng, Serarei, dan Kilawaru. Negeri-negeri di pesisir selatan Pulau Seram adalah Kisar Laut, Seilor, Kilmuri, Kilbon, Davang, Kuaus, Erinama, Ena-ena, Guli-guli, Orong, dan Kuamar. Negeri-negeri di pesisir utara adalah Hoti, Waru, dan Rarakit.[810]

X. TANAH HITU
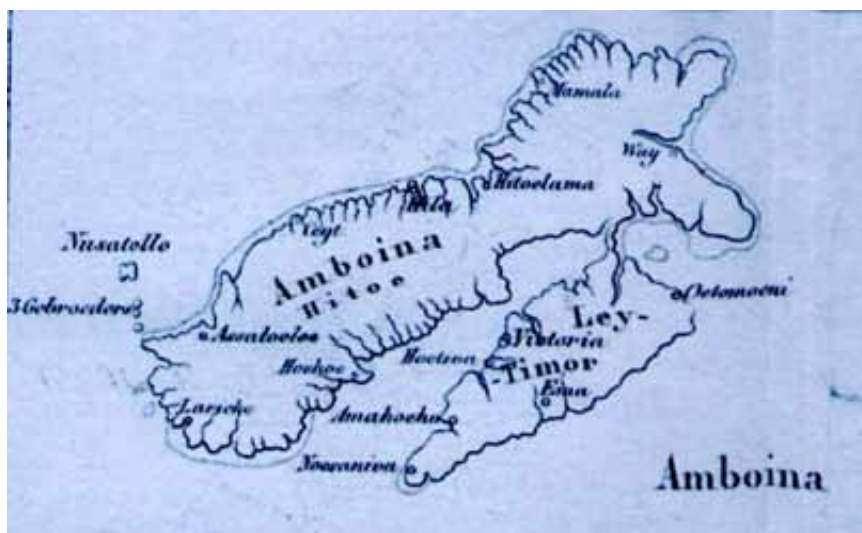
Peta Tanah Hitu
Sumber: *De Opkomst van Het Nederlandisch Gezag in Oost Indie (1595–1610)* halaman 556.

Sumber sejarah mengenai Tanah Hitu berasal dari sebuah karya berjudul *Hikayat Tanah Hitu* buah karya seorang ulama bernama Ridjali.[811] Catatan sejarah ini juga disinggung oleh Fransiscus Valentijn, seorang tokoh Belanda yang gemar mengumpulkan sumber-sumber sejarah Kepulauan Nusantara. Menurut penuturan Ridjali, Tanah Hitu telah lama disinggahi dan didiami oleh kelompok-kelompok masyarakat yang berasal dari Tanuno (Seram Barat), Jailolo (Halmahera), Tuban (Pulau Jawa), dan Goram (sebuah pulau di sebelah utara Seram). Selain itu, ada pula pendatang yang berasal dari Bacan. Penyebab perpindahan mereka adalah kekacauan

810. Lihat *Halmahera Timur dan Raja Jailolo*, halaman 41.
811. Lihat *Sejarah Ambon Sampai Pada Akhir Abad ke-17*, halaman 10.

di tempat asal mereka akibat perebutan kekuasaan. Kendati demikian, kisah-kisah pada kurun waktu tersebut banyak pula diselubungi legenda dan kegaiban.

Selanjutnya, keempat kelompok masyarakat tersebut (Tanuno, Jailolo, Tuban, dan Goram) menjadi leluhur bagi empat serangkai *perdana* (penguasa) Hitu (*raja ampat*), yakni Tanahhitumessen, Nustapy (Nusatapi), Totohatu, dan Pati Tuban. Di samping *raja ampat*, masih dikenal pula seorang tokoh yang digelari Raja Tanah Hitu, tetapi ia tak memiliki kekuasaan dan hanya berfungsi sebagai tokoh pemersatu saja. Kendati Raja Tanah Hitu dianggap lebih tinggi dibanding *raja ampat*, ia tak memegang kedudukan politik. Masing-masing *raja ampat* ini mempunyai warnanya sendiri-sendiri, yakni hitam, merah, kuning, dan hijau. Saat berlangsungnya upacara, Raja Tanah Hitu selaku pemimpin tertinggi simbolis mereka mengenakan keempat warna tersebut. Di antara keempat pemimpin Hitu, terdapat seseorang yang memegang kekuasaan lebih tinggi dibandingkan lainnya dan digelari *kapitan* Hitu. Gelar ini tampaknya diberikan pada abad 16 oleh Sultan Ternate.

Pendatang pertama di Tanah Hitu adalah Pattisilang Binaur yang berasal dari Seram Barat. Ia kemudian berdiam di Nunusaku dan setelah itu ke Tanah Hitu. Ia mendirikan negeri bernama Soupele dan bermarga Tomu Totohatu. Pattisilang Binaur kemudian disebut sebagai Perdana Totohatu atau Perdana Jaman Jadi.[812] Pendatang ke-2 adalah Kiyai Daud dan Kiyai Turi. Mereka masing-masing disebut Pattikawa dan Pattituri. Selain itu, masih ada lagi saudara perempuan mereka yang disebut Nyai Mas.[813] Ibu mereka berasal dari keluarga Raja Mataram yang berdiam di Tuban. Ridjali dan Hikayat Tanah Hitu menyebutkan bahwa mereka adalah orang Jawa yang datang dengan kelengkapan dan hulubalangnya bernama Tubanbessi. Pattikawa kemudian dikenal sebagai Perdana Tanah Hitu. Negeri Pattikawa adalah Wapaliti dengan Pelu sebagai marganya. Pendatang k-3 adalah Jamilu dari Kerajaan Jailolo yang tiba di Tanah Hitu pada 1465. Karena ia datang saat salat magrib maka disebut Kasumba Muda (merah) yang sesuai dengan warna langit saat itu. Jamilu mendirikan negeri bernama Laten, yang kemudian menjadi asal muasal nama marganya, yakni Lating. Jamilu disebut juga Perdana Nusatapi yang artinya 'pendamai' karena ia pernah mendamaikan permusuhan antara Perdana Tanah Hitu dengan Perdana Totohatu. Pendatang ke-4 atau terakhir adalah Kie Patti dari Gorom (Seram bagian timur), yang tiba pada 1468.

812. Lihat *Maluku Negeri Para Raja*, halaman 57.
813. Lihat *Maluku Negeri Para Raja*, halaman 57.

Oleh karena Kie Patti tiba saat sore hari maka ia disebut Halo Pa'u (kuning), sesuai dengan warna langit ketika itu. Ia mendirikan negeri Olong, yang juga menjadi asal muasal nama marganya. Kie Patti kemudian disebut Perdana Pattituban karena pernah diutus ke Tuban guna mempelajari tatanan pemerintahan di sana.

Setelah lengkap kedatangan empat *perdana* di atas, mereka mendirikan negeri yang terletak kurang lebih satu kilometer dari Negeri Tanah Hitu. Selanjutnya, mereka bermusyawarah guna mengangkat seorang raja. Terpilihlah seorang pemuda cerdas yang masih merupakan putra Pattituri. Pemuda bernama Zainal Abidin itu diangkat sebagai Raja Tanah Hitu pertama pada 1470. Gelarnya adalah Upu Latu Sitania, yang berarti 'raja tanya,' karena waktu itu para *perdana* menanyakan baik dan buruknya mempunyai seorang raja. Belakangan bergabung lagi tiga orang keturunan Alifuru yang membentuk negeri Tomu, Hunut, dan Masapal. Dengan demikian, Negeri Hitu kini merupakan gabungan tujuh negeri (Soupele, Wapaliti, Laten, Olong, Tomu, Hunut, dan Masapal).[814]

Raja-raja Tanah Hitu berikutnya adalah Maulana Imam Ali Mahdum Ibrahim, Pattilain, Popo Ehu', Mateuna, dan Hunilamu (1637–1682).[815] Semasa pemerintahan Mateuna, pusat pemerintahan Tanah Hitu dipindahkan ke pesisir pantai. Mateuna mempunyai dua orang putra, yakni Silimual dan Hunilamu. Putra keduanya, Hunilamu, menjadi Raja Tanah Hitu berikutnya, sedangkan putra pertamanya, Silimual, pindah ke Kerajaan Huamual dan menjadi Kapitan Huamual. Ia memimpin perang melawan Belanda yang dikenal sebagai Perang Huamual (1625–1656). Guna membendung pengaruh Belanda, Hunilamu menitahkan ketiga *perdana*-nya mendirikan negeri baru, yang dikenal sebagai Hitu Helo atau Hitu Baru. Nama Helo ini kemudian berubah menjadi Hila. Sementara itu, negeri lama mereka lalu disebut Negeri Hitu Lama. Peperangan melawan Belanda pecah lagi di bawah pimpinan Kapitan Pattiwane, putra Perdana Jamilu, beserta Perdana Tubanbessi ke-2, Kapitan Tahalele, pada 1634–1643.

Pada 1512, armada Portugis di bawah pimpinan d'Abrao mendarat di Hitu dan disambut dengan ramah tamah. Waktu itu, Portugis tidak dianggap sebagai ancaman karena kedatangan mereka hanya untuk berdagang. Orang-orang Portugis baru memperoleh izin membangun tempat pemukiman di pantai utara Hitu pada 1525.[816]

814. Lihat *Maluku Negeri Para Raja*, halaman 60.
815. Lihat *Maluku Negeri Para Raja*, halaman 62.
816. Lihat *Sejarah Ambon Sampai Akhir Abad ke-17*, halaman 15–16.

Tetapi hubungan antara penduduk setempat dan Portugis memburuk ketika mereka memaksa mendirikan benteng dan melanggar kedaulatan kawasan tersebut. Empat pemuka Hitu menolaknya dengan tegas. Sebagai langkah awal menghadapi Portugis, mereka meminta bantuan Jepara dan Ternate. Berkali-kali terjadi bentrokan antara dua kekuatan tersebut.

Pada 1633, Kakiali menjadi Kapitan Hitu menggantikan ayahnya. Ia merupakan penentang Belanda yang gigih. Guna mengelabui VOC, ia berpura-pura menjalin persahabatan dengan mereka. Perlawanan terhadap VOC dilancarkan Kakiali pada 1634. Ia lantas mundur ke daerah pegunungan. Sementara itu, pada saat bersamaan tibalah bala bantuan dari Gowa berkekuatan 43 perahu dan 2.000 prajurit yang mendarat di Hoamoal. Kakiali ditipu oleh Belanda dan diajak berunding. Karena termakan tipu daya tersebut, Kakiali dan 11 kepala suku lainnya ditangkap. Meskipun demikian, ia dibebaskan kembali setelah menjanjikan kesetiaan kepada VOC. Karisma Kakiali makin meningkat di mata rakyat. Kedudukannya sebagai Kapitan Hitu dipulihkan. Ketika tiba kembali kampung halamannya, rakyat menyambutnya dengan penuh kemegahan. Mereka berebut menggendongnya hingga tiba di Gunung Wawani.

Janji kesetiaan terhadap VOC ternyata hanya siasat Kakiali saja. Kapitan Hitu ini menabuh kembali genderang perangnya melawan Belanda. Dengan bantuan Gowa, mereka menyerang kubu pertahanan VOC di Hitu Lama. Kemenangan datang silih berganti antara kedua pihak. Meskipun demikian, VOC gagal mematahkan pertahanan Kakiali di Wawani. Belanda memblokade Hitu dan menebangi tanaman sumber pangan penduduk setempat. Akibatnya, sebagian penduduk yang kelaparan memilih menyerah. Di tengah-tengah kondisi sulit itu, Kakiali beserta Gowa tetap bertahan dan pantang menyerang. VOC lantas mengupah seseorang membunuh Kakiali. Pembunuh bayaran tersebut berhasil menunaikan tugasnya pada petang hari 16 Agustus 1643. Berakhir sudah riwayat Kakiali dan begitu pula dengan perlawanannya.

Belanda berniat menghapuskan jabatan Kapitan Hitu dan demikian pula *raja ampat*. Wilayah tersebut akan diperintah langsung oleh VOC. Keputusan itu ditentang oleh kepala-kepala suku di Hitu sehingga perlawanan terus merebak hingga pertengahan abad 17. Tulucabessy dengan dibantu pejuang-pejuang Hitu meneruskan perlawanannya hingga 1646. Kubu pertahanannya yang terletak di Kapaha sungguh sulit dijangkau. Berulangkali Belanda menghadapi kegagalan saat berusaha merebutnya. Orang-orang Hitu secara diam-diam mengangkat kembali *raja*

ampat dan putra bungsu Kakiali bernama Wangsa diangkat sebagai Kapitan Hitu menggantikan almarhum ayahnya.

Kejatuhan Benteng Kapaha berawal pada Juli 1646 ketika seorang pemuda tertawan oleh VOC. Ia bersedia menunjukkan jalan rahasia menuju Benteng Kapaha. Dengan dipandu oleh pemuda itu, pasukan VOC bergerak dengan susah payah ke Kapaha. Penyergapan dilakukan dan pasukan Hitu yang tidak siap dapat dikalahkan. Wangsa tertangkap oleh Belanda. Sementara itu, Tulucabessy dan Ridjali sanggup meloloskan diri. Tulucabessy menyerahkan dirinya dan dijatuhi hukuman penggal. Ridjali dalam pelariannya tiba di Makassar dan menulis buku *Hikayat Tanah Hitu*. Setelah kekalahan tersebut, Belanda dalam rangka politik pecah belahnya membagi Hitu Lama menjadi dua, yakni Hitulama dan Hitumessing.[817]

XI. TERNATE

Lukisan Yang Menggambarkan Ternate
Sumber: Geschiedenis van Nederlandsch Indie, Deel II, halaman 369.

a. Cikal bakal Kerajaan Ternate

Sejarah awal Kerajaan Ternate berhasil direkonstruksi oleh seorang ulama bernama Ridjali dari Hitu sehingga layak disebut sebagai Bapak Sejarah Maluku. Ia mengumpulkan sejarah para raja, kaum bangsawan, beserta legenda rakyat pedesaan dan menatanya kembali. Fransiscus Valentijn, seorang Belanda yang tertarik dengan

817. Lihat *Maluku Negeri Para Raja*, halaman 62.

sejarah, mulai mengumpulkan, menerjemahkan, dan menerbitkan hasil karya Ridjali itu dalam bukunya yang berjudul *Oud en Nieuw Oost Indie*. Karya itu terdiri dari 8 jilid dan berisikan catatan lengkap mengenai sejarah, kemasyarakatan, kondisi geografis, hewan, dan tumbuhan yang berada di kawasan itu.

Kerajaan Ternate diawali dengan pelarian besar-besaran penduduk Halmahera yang diperintah oleh Kerajaan Jailolo pada 1250 atau pertengahan abad 13. Konon, Raja Jailolo saat itu memerintah dengan sewenang-wenang sehingga rakyat yang tidak tahan menanggungnya melarikan diri dan mencari tempat kediaman baru. Di antara para pelarian itu ada yang mendarat di Pulau Ternate dan berdiam di dekat puncak Gunung Gamalama. Mereka merupakan asal muasal komunitas Tobona atau pemukiman Halmahera tertua di Ternate. Sebagai pemimpin kelompok masyarakat itu, diangkatlah seorang pemimpin bergelar *momole* dan bernama Guna. Tidak berapa lama kemudian, terbentuk dua pemukiman pelarian lainnya yang terletak dekat pantai, yakni Foramadiahi di bawah pimpinan Momole Matiti, dan Sampala yang dipimpin oleh Ciko (dibaca Siko).

Menurut Ridjali, leluhur Kerajaan Ternate yang paling berpengaruh adalah seorang tokoh bernama Guna. Ia adalah kepala Desa Tobona yang terletak di lereng Gunung Merapi. Suatu kali saat mencari kelapa, kakinya tersandung sebongkah batu yang ternyata adalah emas murni. Benda itu dianggap sebagai milik bangsa jin dan sanggup menganugerahkan kekuatan gaib beserta kemampuan supernatural bagi pemiliknya sehingga layak dianggap sebagai pemimpin atau pemuka masyarakat. Demikianlah, Guna beserta keturunannya menjadi pemimpin atas Pulau Ternate.[818]

Buku karya M. Adnan Amal mengutip sebuah kisah yang menyebutkan bahwa sebongkah emas itu berbentuk lesung. Banyak orang berdatangan ingin menyaksikan lesung itu sehingga Guna merasa tidak betah dan menyerahkannya kepada Momole Molematiti, kepala Kampung Foramadiahi. Momole Molematiti mengalami hal yang sama dengan Guna dan memindahtangankan lesung emas itu kepada Ciko dari Sampala.[819] Dengan demikian, Ciko diakui sebagai pemuka atas ketiga kampung atau pemukiman yang ada di Ternate dan menyandang gelar raja atau *kolano*. Ia digelari pula sebagai Mashur Malamo (1257–1272). Para *kolano* berikutnya yang menggantikan

818. Lihat *Sejarah Maluku: Banda Naira, Ternate, Tidore, dan Ambon*, halaman 296–297.
819. Lihat *Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250–1950*, halaman 54–55.

Ciko adalah Kolano Yamin (1272–1284), Kolano Siale (1284–1298), Kolano Kamalu (1298–1304), dan Kolano Ngara Malamo (1304–1317).

Seiring dengan peningkatan kekuasaan para penguasanya, mereka mulai menyandang gelar *kaicil* (dapat disepadankan dengan raja atau sultan). Dengan memerangi bajak laut, diplomasi, dan mengadakan perkawinan antara anggota keluarga penguasa pulau-pulau lainnya, Ternate barhasil menjadi pemuka di antara negeri-negeri Kepulauan Maluku, seperti Jailolo, Tidore, Morotai, Bacan, dan lain sebagainya. Ternate mulai berambisi meluaskan teritorialnya, terutama semasa pemerintahan Kolano Ngara Lamo. Pada zaman itu, dikenal keluarga Fala Raha yang terdiri dari klan Tomaito, Tomagola, Limatahu, dan Marsaoli. Raja Ternate memercayakan perluasan wilayah kerajaannya kepada mereka. Klan Tomaito sanggup menduduki Kepulauan Sula dan menjadikannya sebagai koloni atau wilayah seberang lautan Ternate pertama. Berkat jasa-jasanya, klan Tomaito diangkat sebagai *salahakan* (gubernur) di Kepulauan Sula dan Sulabesi. Selain itu, klan-klan lainnya juga turut andil memperluas teritorial Ternate.

Kolano Ngara Malamo mangkat dan digantikan oleh Patsyaranga Malamo (1317–1322) dan Sida Arif Malamo (1322–1331). Semasa pemerintahan Sida Arif Malamo, pedagang-pedagang Nusantara dan mancanegara (Arab, Cina, serta Gujarat) mulai mengunjungi Maluku. Sebagai seorang penguasa yang mumpuni, Sida Arif Malamo menyadari ramainya perniagaan ini harus diimbangi dengan pembangunan fasilitas yang menarik. Dengan demikian, Ternate makin ramai dan tersohor di dunia perdagangan. Kolano Sida Arif Malamo bergaul akrab dengan para pedagang dan bahkan ia belajar bahasa Arab serta Cina. Ia mengenakan jubah beserta tutup kepala yang biasa dikenakan pedagang Arab. Selain itu, ia tidak jarang pula memakai pakaian sebagaimana yang dikenakan oleh pedagang Cina. Rakyatnya diperintahkan belajar membuat perahu dari kaum pedagang Cina dan Arab.

Pesatnya perkembangan Ternate mengakibatkan iri hati tetangganya, Tidore dan Bacan. Demi meredam perselisihan di antara mereka, diadakan Perjanjian Moti pada 1322 antara Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Semula Loloda juga mengirimkan utusannya, tetapi perahu mereka dilanda badai dan terdampar di Dufa-dufa, Ternate. Pertemuan ini berhasil menciptakan perdamaian di Maluku. Sida Arif Malamo kemudian digantikan oleh Paji Malamo (1331–1332), Sah Alam (1332–1343), dan Tulu Malamo (1343–1347). Perdamaian yang diupayakan semasa Perjanjian

Moti mulai goyah pada zaman Tulu Malamo. Raja Ternate ini kembali memiliki kebijakan-kebijakan ekspansionis. Ia melancarkan serbuan ke Makian guna menguasai perdagangan rempah-rempah di sana. Serbuan dilancarkan pula ke Jailolo pada 1343 meski pada Pertemuan Moti disepakati bahwa Jailolo merupakan kerajaan peringkat pertama. Rangkaian *kolano* Ternate berikutnya hingga kedatangan Islam adalah Boheyat (Kaicil Kie Mabiji, memerintah pada 1347–1350), Ngolo Macahaya (Cahaya Laut atau Molomateya, memerintah pada 1350–1357), Momole (1357–1359), Gapi Malamo (1359–1372), Gapi Baguna I (1372–1377), dan Kumala Putu (1377–1432).

b. Perkembangan Kerajaan Ternate

Kemajuan yang paling pesat terjadi semasa pemerintahan Gapi Baguna II (1432–1465), saat ia mengundang para pedagang Cina, Arab, dan Jawa menetap di kerajaannya dengan harapan bahwa mereka dapat menularkan pengetahuannya kepada penduduk Ternate. Warga di sana yang pada mulanya mengenakan kulit kayu dan daun-daunan sebagai penutup tubuh mulai beralih pada kain yang dibawa para pendatang tersebut. Mereka juga belajar cara menenun dan menanam kapas. Pengetahuan tentang pembuatan rumah dan kapal mengalami kemajuan pesat. Akhlak dan moralitas penduduk mengalami peningkatan pula. Saat itu, seorang pedagang Muslim asal Jawa mengajarkan baca tulis kepada raja dengan Alquran sebagai buku teksnya. Inilah yang mendorong raja beserta pengikutnya memasuki agama Islam. Gapi Baguna II kemudian digantikan oleh Marhum (1466–1486). Dapat dipastikan bahwa Marhum merupakan penguasa Ternate pertama yang menganut agama Islam karena jenazahnya tercatat dimakamkan menurut syariat Islam.

Penyebar agama Islam di Ternate yang tersohor masa itu adalah Datu Maula Husein asal Minangkabau. Sebelum bermukim di Ternate, Datu Maula Husein sempat tinggal beberapa lama di Gresik. Ia kemudian bertolak ke Ternate dengan tujuan berdagang serta berdakwah. Datu Maula Husein setiap malam membaca Alquran dengan suara merdu sehingga menarik hati penduduk setempat. Mereka kemudian berbondong-bondong mengunjungi rumah Datu Maula Husein sekedar untuk mendengarkan pembacaan Alqurannya. Lama kelamaan, ada di antara penduduk setempat yang meminta Datu Maula Husein agar mengajari mereka membaca Alquran. Datu Maula Husein menyampaikan bahwa Alquran adalah kitab suci umat Islam sehingga untuk membacanya seseorang hendaknya menganut agama Islam terlebih

dahulu. Ternyata, rakyat Ternate tidak keberatan memeluk agama Islam. Jumlah yang menganut agama Islam makin banyak hingga Datu Maula Husein akhirnya membuka sebuah pengajian.

Seni kaligrafi merupakan keahlian lain Datu Maula Husein dan ia kerap menuliskan ayat-ayat suci Alquran di atas sebilah papan. Keindahan buah karya Datu Maula Husein memesona penduduk asli Ternate sehingga menambah minat mereka mempelajari agama Islam. Lambat laun, Marhum, Raja Ternate, mendengar perihal ulama asal Minangkabau di atas dan mengundangnya ke istana. Ia sering diminta raja melantunkan ayat-ayat suci Alquran dan berdakwah. Akhirnya, Marhum bersedia menerima agama Islam. Demikianlah asal mula komunitas Muslim di Ternate.

Penguasa berikutnya, Zainalabidin (1486–1500), mengadakan perjalanan hingga ke Giri di Jawa guna menimba ilmu agama Islam. Ia merupakan seorang terpelajar dan prajurit yang dihormati. Selain itu, ia terkenal pula dengan sebutan Raja Cengkeh. Dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya, Zainalabidin singgah ke Makasar dan Ambon guna menjalin persahabatan dengan para penguasa di sana. Guna memantapkan penyebaran Islam di negerinya, ia merekrut pula seorang ulama bernama Tuhubahahul.

Pengganti Zainalabidin yang bernama Bayan Sirullah (Bayang Ullah atau Boleif, memerintah pada 1500–1522) merupakan orang yang lebih pandai dan terpelajar lagi. Bersamaan dengan era pemerintahannya, datanglah armada Portugis di bawah pimpinan Fransisco Serrao ke Ambon. Semenjak lama, Ternate terlibat persaingan akut dengan Tidore. Perihal kedigdayaan bangsa Portugis ini terdengar oleh Sultan Ternate dan Tidore. Karenanya, baik Sultan Ternate maupun Sultan Tidore berlomba-lomba menjemput Serrao ke negerinya guna membangun aliansi dengan Portugis. "Perlombaan" ini dimenangkan oleh Ternate. Ketika utusan Tidore tiba di Nusa Telu, ternyata Serrao telah berada dalam perjalanan ke Ternate bersama Kaicil Vaidua.

Bayan Sirullah berniat memperbaiki kehidupan akhlak para menteri dan rakyatnya. Ia menetapkan pembatasan poligami dan menerapkan persyaratan ketat. Ia melarang para *bobato* memelihara banyak gundik dan bila ada yang berani melanggarnya sanksi pemecatan telah menantikan mereka. Hingga mangkatnya, Bayan Sirullah hanya memiliki seorang istri saja, yakni Nyai Cili Boki Raja Nukila, putri Sultan Almansyur dari Tidore. Bayan Sirullah mengurangi besarnya biaya mas kawin dan tata cara pernikahan diatur sesuai agama Islam dan hukum adat. Baik pria

maupun wanita diwajibkan berpakaian secara pantas. Kaum pria dilarang mengenakan cawat di depan umum dan pelanggarnya akan dijatuhi hukuman.

Sultan yang banyak melakukan perombakan terhadap tatanan kehidupan di Ternate ini menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 1522. Ia seharusnya digantikan oleh putra sulungnya, Deyalo (Deijalo, 1522–1529). Namun, usianya masih di bawah umur sehingga pemerintahan sementara waktu dipegang oleh ibunya, Nyai Cili Boki Raja Nukila, dan seorang tokoh yang besar pengaruhnya di Ternate bernama Taruwese. Ia merupakan seorang yang berambisi dan menjalin hubungan erat dengan de Menezes, Gubernur Portugis. Setelah cukup umur pada 1528, Deyalo resmi dinobatkan sebagai Sultan Ternate. Namun, tak berapa lama kemudian, ia terlibat perselisihan dengan Taruwese. Mengingat betapa kuatnya pengaruh Taruwese, pertikaian ini membahayakan kedudukan Deyalo. Taruwese berkomplot dengan Portugis guna mendongkel Deyalo dari takhtanya pada 1529. Nyai Cili Boki Raja Nukila mencium ancaman yang mengintai keselamatan putranya. Pada malam buta, Deyalo dilarikan ke Tidore guna menerima perlindungan Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain, yang masih pamannya sendiri. Mencermati intrik politik tersebut, Nyai Cili dan Taruwese sebenarnya merupakan musuh bebuyutan. Nyai Cili berambisi mengangkat anak-anaknya sebagai Raja Ternate dan Raja Tidore. Sementara itu, Taruwese ingin melenyapkan keduanya beserta ibu mereka, ia pun berambisi merebut takhta Ternate dan pada gilirannya menaklukkan Tidore.

Selama sultan baru belum terpilih, pemerintahan Ternate sementara waktu dipegang oleh Pati Sarangi, suami kedua Nyai Cili. Menyadari bahwa Deyalo telah menerima suaka di Tidore, komplotan yang menyingkirkan Deyalo menuntut agar ia dikembalikan ke Ternate. Kendati demikian, Sultan Tidore menampik segenap tuntutan tersebut sehingga pasukan gabungan Ternate-Portugis menyerang Tidore. Untungnya, Deyalo berhasil menyingkir ke Jailolo, dan berakhirlah pertumpahan darah tersebut.

Taruwese dihabisi oleh rakyat Ternate yang merasa khawatir terhadap sepak terjangnya. Pembunuhan ini sesungguhnya dilakukan dengan dukungan orang-orang Portugis karena sebelumnya Taruwese telah berselisih dengan mereka. Rupanya Portugis ingin ikut campur pada urusan internal Ternate. Hal ini kurang disukai Taruwese dan hubungan kedua belah pihak mulai retak. Deyalo kemudian digantikan oleh adiknya, Boheyat (1529–1532). Seharusnya, dengan kematian Taruwese yang

ambisius, Sultan Boheyat dapat memerintah lebih baik. Kendati demikian, timbul intrik baru di Ternate yang dipicu oleh pembunuhan Gubernur Portugis Gonzalo Pereire. Motif pembunuhan adalah beberapa tindakan gubernur yang dianggap menghina sultan.

Boheyat dituduh terlibat dalam pembunuhan tersebut dan dipenjarakan oleh Portugis. Tetapi baru setahun ditahan ia dibebaskan oleh gubernur pengganti Pereire bernama Vicente da Fonceca dan dikembalikan ke singgasananya. Namun, kali ini Boheyat tak lagi mendapatkan dukungan rakyat sehingga roda pemerintahan tidak berjalan lancar. Boheyat dikenal otoriter dalam pemerintahannya dan berjiwa pendendam. Berbagai keputusan penting diambilnya dengan terburu-buru sehingga tak membuahkan hasil terbaik. Rakyat yang muak terhadap kondisi semacam itu menyerbu istana. Tabariji, saudara tiri Boheyat, bertindak cepat dengan mengasingkan Boheyat ke Malaka hingga akhir hayatnya.

Tabariji (1532–1535) kemudian menduduki singgasana Ternate. Semasa pemerintahannya, pengaruh Portugis makin kuat mencengkeram Ternate. Gubernur de Fonceca digantikan oleh Tristao de Ataide yang memerintah dengan tangan besi. Ia pernah menyerang Bacan dan Jailolo dengan dukungan Ternate beserta Tidore. Gubernur Tristao de Ataide pernah memeras Sultan Bacan dengan ancaman ia akan menghancurkan pemakaman sultan-sultan Bacan terdahulu bila yang bersangkutan tak bersedia menyerahkan sejumlah uang kepadanya. Mau tak mau Sultan Bacan memberikan uang sebanyak yang dimintanya agar pekuburan leluhurnya tidak diusik.

Portugis menuduh Tabaraji tidak loyal dan berniat berkhianat kepada mereka. Oleh karenanya, Tabariji mereka turunkan dari takhta dan diasingkan ke Goa, India, bersama dengan ibunya, Nyai Cili Nukila, serta ayahnya, Pati Sarangi. Sepeninggal Tabaraji ke Goa, Hairun (1535–1570) dinobatkan sebagai Sultan Ternate. Di Goa, Tabariji bertemu dengan Jordao de Freitas, calon komandan benteng Gamalama di Ternate. Tabariji disarankan menganut agama Katolik demi memperoleh simpati Portugis. Tertarik dengan saran de Freitas, Tabariji bersedia dibaptis dengan nama Don Manuel. Setelah itu, Tabariji membuat surat yang menghadiahkan Ambon dan sekitarnya kepada de Freitas beserta segenap keturunannya. Ia mengumumkan pula bahwa semenjak itu Ternate merupakan kerajaan Kristen yang berada di bawah naungan Portugis. Sultan Ternate yang terguling ini membuka kasusnya lagi di hadapan

raja muda Portugis dan pembelaannya begitu menyakinkan sehingga Tabariji diizinkan kembali ke Ternate.

Bersama dengan de Freitas, Tabariji berlayar kembali ke Ternate. Setibanya di Malaka barulah mereka menyadari kesulitan yang bakal timbul apabila Tabariji didudukan kembali di atas singgasananya. Hairun yang menggantikan Tabariji selama ini ternyata memperoleh dukungan rakyat. Oleh karenanya, sementara waktu Tabariji ditinggal dulu di Malaka dan pada November 1544 de Freitas berlayar sendirian ke Ternate Guna mengetahui reaksi rakyat Ternate, de Freitas berbohong dengan mengumumkan bahwa Tabariji yang hendak diangkat lagi sebagai Sultan Ternate sedang dalam perjalanan. Namun, belum sempat pemulihan kekuasaan Tabariji terlaksana, ia lebih dahulu wafat di Malaka pada 30 Juni 1545.

Sultan Hairun ditangkap oleh Portugis tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, ia meminta agar dikirim ke Goa sehingga kasusnya dapat diselidiki. Selanjutnya, berkat kepandaiannya berstrategi, ia sanggup memaksa Portugis agar menempatkannya kembali ke atas singgasana. Saat Portugis ingin mendirikan benteng kedua di Ambon, sultan berhasil membujuk Portugis agar menunda niat mereka tersebut. Sambil menjalin hubungan yang baik dengan para pejabat dan perwira Portugis serta membiarkan mereka memperkaya diri, Hairun secara tak terduga menyerang perkampungan-perkampungan Kristen yang sedang bertumbuh di Moro dan membantai penduduknya. Akibatnya, ribuan orang meninggalkan gereja. Tindakan Hairun terlaksana berkat dukungan Katarabumi, Kolano Jailolo. Hairun berhasil pula memperluas kekuasaannya hingga Mindanao hingga seluruh pulau mulai dari Mindanao hingga Ambon mengirimkan upeti kepadanya.

Oleh karenanya, tidak mengherankan apabila Hairun dirasa sebagai ancaman oleh Portugis yang ingin menancapkan kekuasaannya di kawasan tersebut. Pada 1565, misi penyebaran Kristen Katolik dihancurkan olehnya sehingga beberapa imam (pemimpin upacara di gereja) terbunuh. Sebagian yang selamat meminta bantuan kepada wakil raja Portugis yang berkedudukan di Goa. Pihak Portugis segera mengirimkan bala bantuan guna menertibkan keadaan. Sebuah benteng didirikan di Ambon dan orang-orang Katolik yang merasa memperoleh kembali dukungan Portugis kembali ke gereja. Kini keadaan seolah-olah telah pulih. Gubernur Maluku yang ditempatkan oleh Portugis menyangka bahwa kekuasaan Sultan Hairun sudah melemah sehingga memutuskan menyerangnya. Motif ekonomi untuk menegakkan monopoli perdagangan cengkeh,

yang saat itu didominasi oleh Ternate, sesungguhnya juga besar peranannya. Ternyata, Hairun tidak gentar sedikitpun menghadapi Portugis dan perang besar antara kedua kekuatan itu tampaknya mustahil dielakkan lagi. Pihak-pihak yang berkepentingan mengupayakan perdamaian di antara mereka. Upaya ini kelihatannya membuahkan hasil dan kedua belah pihak yang bertikai bersedia memperbaharui persahabatan mereka. Sultan bersumpah di atas Alquran, sedangkan Gubernur Portugis di atas Alkitab. Namun, keesokan harinya saat sultan berkunjung ke Benteng Portugis, ia dihabisi nyawanya secara keji. Berakhirlah sudah pemerintahan Hairun.

Meskipun tampaknya merupakan penganut agama yang fanatik–sebagaimana yang dituduhkan kepadanya oleh orang-orang Portugis–Hairun sesungguhnya mempunyai jiwa toleran. Ia menjalin persahabatan yang cukup erat dengan Fransiskus Xaverius, misionaris Katolik terkemuka yang datang ke Maluku. Ia menegaskan kepada misionaris tersebut bahwa baginya Islam dan Kristen memiliki tujuan yang sama sehingga ia tak merasa perlu mengganti agamanya.[820] Hairun bahkan ingin mengirimkan putranya bernama Baabullah bersekolah di Kolese Santo Paulus, sebuah sekolah tinggi Jesuit di Goa. Pernah pula Hairun berkata kepada Xaverius bahwa ia ingin salah seorang putranya memeluk agama Kristen dan dipersiapkan sebagai Raja Moro. Tidak hanya dengan Xaverius, Hairun membina pula persahabatan terhadap pastor-pastor lainnya. Pastor Alfonso de Castro memberitakan bahwa kebijakan Hairun justru memudahkan misi Katolik melakukan tugas-tugas penyebaran agama mereka. Meskipun demikian, pesatnya pertumbuhan komunitas Katolik lambat laun dirasakan Hairun sebagai ancaman terhadap kekuasaannya sehingga mendorongnya menyerang mereka dengan bantuan Katarabumi, Raja Jailolo.

Pembunuhan Hairun secara licik mengguncang Ternate. Penguasa baru Ternate, Sultan Baabullah (1570–1583), bersumpah membalas dendam kematian ayahnya dengan berjuang mengusir Portugis dari Maluku hingga titik darah penghabisan. Baabullah mengakhiri keleluasaan yang diberikan terhadap misi Katolik. Ia memberikan dua alternatif kepada orang-orang Kristen pribumi; kembali ke agama Islam atau dijadikan tawanan. Sebagian besar memilih alternatif pertama, bahkan orang-orang Kristen Moro dan penduduk beberapa kawasan lainnya merusak gerejanya sendiri serta membakar altar mereka. Persiapan melawan Portugis dilakukannya dengan menggalang dukungan wilayah-wilayah yang setia terhadap Ternate.

---

820. Lihat *Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250–1950*, halaman 78.

Pengepungan dilancarkan terhadap Benteng Gamalama milik Portugis. Akibatnya, orang-orang Portugis yang berada di benteng tersebut tak sanggup berkutik sama sekali. Setelah pengepungan berlangsung selama tiga tahun, kelaparan dan penyakit mulai berjangkit di antara mereka. Warga benteng terpaksa menyantap hewan-hewan liar, seperti tikus, anjing, kucing, cecak, dan bahkan ular. Akhirnya, Portugis menyerah pada 26 Desember 1575 dan meninggalkan Ternate. Benteng Gamalama diduduki oleh Baabullah dan dialihkan fungsinya sebagai tempat kediaman Sultan Ternate hingga 1606. Orang-orang Portugis yang terusir dari Ternate kemudian berpindah ke Tidore atas izin Sultan Tidore. Mereka diperkenankan membangun benteng di dekat istana Kesultanan Tidore. Tujuan utama penerimaan terhadap orang-orang Portugis ini adalah penggalakkan perdagangan rempah-rempah dan melindungi diri dari Ternate.

Setelah mengusir Portugis dari negerinya, Baabullah menaklukkan daerah-daerah lain, seperti Buru, Manipa, Ambalau, Buano, Kelang, Banggai, Tobungku, Buton, dan lain sebagainya. Ternate selanjutnya menjadikan Buton sebagai salah satu pangkalan perniagaan mereka. Karena wilayah kekuasaannya yang luas, Baabullah dijuluki "Raja atas Tujuhpuluhdua Pulau." Masih pada kurun waktu kekuasaan Baabullah, tiba penjelajah Inggris bernama Sir Francis Drake di Maluku pada 14 November 1579 dengan menumpang kapal Golden Hind beserta empat kapal lainnya. Kedatangan Drake ini disambut hangat oleh Baabullah, apalagi ia menyatakan bahwa kunjungannya semata-mata untuk berdagang. Drake mengundang Baabullah naik ke kapalnya. Dengan senang hati, Baabullah menerima undangan tersebut dan ia disambut dengan penuh kehormatan oleh orang-orang Inggris.

Keesokan harinya, Baabullah mengundang Drake beserta awak kapal mengikuti jamuan makan di istana. Di sepanjang jalan, rakyat menyambut mereka dengan meriah. Sultan Baabullah sendiri diberitakan mengenai pakaian kebesaran dan perhiasan yang mewah. Setelah perundingan antara Drake dan Baabullah selesai diadakan barulah makanan dihidangkan. Menunya adalah sagu, nasi, daging kambing, kepiting, ikan bubara bakar, dan ayam yang diolah dengan cengkih. Pada kunjungan perdananya, Drake hanya membeli lima kuintal cengkeh karena kapalnya telah sarat muatan hasil rampokan dari kapal-kapal Spanyol. Tatkala Drake hendak bertolak lagi ke negerinya, Sultan Baabullah sempat menitipkan surat kepada Ratu Inggris, Elizabeth I, yang isinya mengajak Inggris berkerjasama dengan Ternate dalam hal perdagangan serta permohonan bantuan mengusir Portugis dari Maluku.

Kematian Baabullah sendiri masih diselimuti kabut misteri dan terdapat beberapa versi yang saling berbeda satu sama lain. Versi pertama menyebutkan bahwa Baabullah dijebak oleh orang Spanyol dan Portugis–semenjak 1580 kedua kerajaan itu telah bergabung menjadi satu. Mereka mengundang Baabullah ke atas kapal mereka guna memperbaharui persahabatan yang pernah terjalin di antara mereka. Tetapi begitu berada di atas kapal Baabullah ditangkap dan dijebloskan ke dalam tahanan. Perlakuan buruk selama dalam tahanan mengakibatkan Baabullah jatuh sakit dan wafat dalam perjalanan ke Goa. Jenazah Baabullah kemudian ditenggelamkan ke laut. Sumber lain menyebutkan bahwa jenazah Baabullah diawetkan dan diserahkan kepada raja muda Portugis di Goa. Tetapi masih ada versi lain yang menyebutkan bahwa Baabullah tidak ditawan Portugis dan wafat dengan tenang dalam istananya di Benteng Gamalama.

Sultan Ternate berikutnya, Said (Sa'id al Din atau Saidi Barakati, 1584–1610), adalah putra Baabullah. Ia merupakan pribadi yang kompleks dan penuh kontradiksi. Pada awal pemerintahannya, banyak pengikutnya yang menganggap dirinya merupakan pribadi menjijikkan dan lalim. Ia meminta Portugis agar mengembalikan jenazah ayahnya yang telah diawetkan dari tempat pembuangannya di Goa. Setelah jenazah itu tiba kembali di Ternate, sultan merencanakan pemakaman kenegaraan dengan mengundang para raja lainnya di kawasan Maluku, termasuk Sultan Tidore yang merupakan saingan Ternate. Saat puncak upacara ketika para hadirin mengucapkan sumpah setia menegakkan perdamaian, Sultan Said memberikan isyarat kepada para pengawalnya untuk menyerang Sultan Tidore beserta anggota rombongannya. Sultan Tidore tewas bersimbah darah bersama para pengiringnya. Peristiwa ini memicu kembali permusuhan antara Ternate dan Tidore. Tindakan licik lainnya dilakukan karena jatuh cinta kepada seorang putri bernama Filola, tetapi gadis itu telah bertunangan dengan Gapaguna, Sultan Tidore. Permusuhan antara kerajaannya dengan Tidore yang baru saja timbul akibat ulahnya sendiri itu, makin membulatkan tekad Said merebut Filola. Namun, ia tidak mau bertindak terang-terangan. Oleh karena itu, direncanakannya suatu niat licik dengan meminjam tangan pamannya yang bernama Pangeran Mudafarsyah. Ia seolah-olah ingin memberikan putri itu kepada pamannya. Pamannya diminta menculiknya. Setelah itu, mereka akan berdiam di sebuah pondok yang telah disediakan sebelumnya. Sultan Said akan berpura-pura mencarinya dan Mudafarsyah diminta menyerahkan diri untuk

diadili. Tetapi setelah itu, ia akan diampuni. Demikianlah, drama ini berlangsung. Mudafarsyah yang mengira bahwa ia tidak akan diadili sungguh-sungguh, menghadiri persidangan seakan-akan hendak berpesta. Namun, atas isyarat Sultan Tidore, seorang budak Papua turun dan memenggal kepala Mudafarsyah.

Tidak beberapa lama setelah insiden ini, salah seorang putra kesayangan Sultan Said yang bernama Gariolano kedapatan berselingkuh dengan istri kesayangannya, putri dari Kerajaan Jailolo. Ayah putri ini lalu memaksa anaknya meminum racun mematikan sebagai hukuman atas perbuatannya tersebut, lalu ia meminta sultan agar melakukan hal yang sama terhadap putranya. Sultan berpura-pura menangkap Gariolano, tetapi setelah itu melepaskannya lagi. Kehidupan di Istana Ternate saat itu memang kacau dan mengerikan. Sultan sendiri sempat melakukan tukar menukar istri dengan sahabatnya, Pangeran Amuksa.

Perselisihan timbul kembali dengan pihak Kesultanan Tidore. Suatu ketika kedua sultan sedang berperahu dengan kapal *kora-kora* (perahu tradisional Maluku) masing-masing guna melakukan survei kawasan. Ketika keduanya berpapasan para pengawal Sultan Said menangkap Sultan Gapi Maguna (Gapaguna) dari Tidore dan menyekapnya di Benteng Gamalama. Terkadang Gapi Maguna diarak keliling benteng guna mempertontonkan keunggulan Ternate atas Tidore. Sebagai pengisi kekosongan kekuasaan di Tidore, saudara sultan yang bernama Pangeran Aleazan berlaku sebagai wali. Ia berupaya mengembalikan sultan ke singgasananya, tetapi gagal. Saudari perempuan sultan, Putri Kisahria, menggunakan kecerdikannya demi memulangkan sultan dari Ternate. Banyak orang yang berniat melamarnya, antara lain Sultan Said sendiri, Pangeran Salama dari Tidore, Sultan Bacan, dan Hector Brito, seorang kapten dari benteng Portugis di Tidore. Kisahria mengumumkan bahwa ia bersedia menikahi siapa saja yang dapat membebaskan kakaknya. Sebenarnya, Putri Kisahria telah jatuh cinta kepada Hector Brito, tetapi pria Portugis tersebut terlalu penakut sehingga tidak berani membebaskan Gapaguna. Akhirnya, yang muncul sebagai pahlawan adalah Pangeran Salama, yang sebenarnya tidak diharapkan oleh Kisahria. Pangeran Salama melakukan serangan saat malam hari dengan membunyikan meriam dan memukul gong sehingga mengejutkan pasukan Ternate yang berjaga di dalam benteng. Mereka berhamburan keluar dan pada saat itulah dengan gagah berani Pangeran Salama turun ke darat serta membebaskan sultan. Atas jasanya itu, Pangeran Salama menikah dengan Putri Kisahria.

c. Persaingan Kekuatan Asing di Maluku

Episode berikutnya dalam sejarah Maluku diwarnai persaingan antar berbagai kekuatan asing dalam memperebutkan monopoli perdagangan di kepulauan tersebut, yakni antara Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Berita tentang kekejaman Sultan Said di atas diperoleh dari sumber Portugis dan Spanyol yang tentunya tidak bersimpati kepada sultan. Mungkin saja mereka memperolehnya dari desas-desus atau sumber yang tidak akurat. Kendati demikian, banyak pula anggota keluarga Kerajaan Ternate sendiri yang juga tidak menyukai sultan, seperti Pangeran Tulo, paman Sultan Said. Ia mengirim surat kepada Gubernur Jenderal Spanyol di Filipina agar mengirimkan ekspedisi menghukum kemenakannya yang jahat itu. Gubernur Jenderal Don Santiago de Vera baru tertarik pada undangan ini karena mengira bahwa Spanyol dapat memperoleh supremasi dalam perdagangan rempah-rempah yang berpusat di Manila. Pada 1585, dikirimlah ekspedisi yang dipimpin oleh Laksamana Don Juan Marones guna menyingkirkan Said dari takhtanya. Ternyata ekspedisi militer ini boleh dikatakan gagal total. Armada mereka tercerai berai karena cuaca buruk dan salah perhitungan, bahkan kapal yang membawa amunisi dan persenjataan tenggelam di laut. Mereka tiba di Ternate tanpa perlengkapan perang yang memadai. Pangeran Tulo, beberapa pangeran dari Tidore, dan Sultan Bacan menyambut mereka dengan hangat. Don Juan yang terlalu percaya diri mengadakan serangan darat dan laut guna merebut Benteng Gamalama dan satu benteng lain dari pasukan Ternate. Namun, serangan ini hanya membuahkan kegagalan. Wabah penyakit akhirnya menghalau Spanyol untuk kembali ke kapal mereka.

Ekspedisi militer dikirim kembali semasa pemerintahan Gubernur Jenderal Gomez Perez Desmarinas pada 1593. Armada kali ini dilengkapi dengan satu kapal tempur yang sangat baik kondisinya, enam kapal layar, dan sekitar 100 kapal kecil yang mengangkut 1.000 serdadu Spanyol. Ekspedisi ini bergabung di Pantai Cebu, Filipina, tempat gubernur jenderal dan 80 orang Spanyol, termasuk beberapa bangsawan terkemuka, bergabung dengan mereka. Dengan penuh kemegahan gubernur jenderal menaiki kapal. Tetapi petualangan militer kali ini juga menemui kegagalan karena 250 pendayung mereka yang berkebangsaan Cina mengadakan pemberontakan dan membajak kapal tersebut. Mereka membunuh gubernur jenderal dan beberapa orang lainnya. Yang selamat di antara mereka dalam keadaan luka berat, mereka berenang ke daratan dan melaporkan apa yang terjadi. Kapal-kapal lain baru mengetahui peristiwa

itu keesokan harinya. Putra gubernur, Luys Desmarinas, yang menumpang kapal lain, segera memerintahkan mereka semua kembali ke Filipina. Demikianlah, armada itu berakhir dengan kegagalan sebelum sempat melakukan pertempuran.

Pada 1596, giliran Sultan Said mengirimkan ekspedisi militer ke Mindanao, Filipina, yang saat itu dikuasai Spanyol. Ia mengirimkan armada kapal *kora-kora* yang dilengkapi 600 hingga 1.000 orang bersenjata lengkap dan bergabung dengan para bajak Melayu beserta kaum pemberontak Mindanao yang ingin membebaskan diri dari Spanyol. Namun, Spanyol berhasil mengalahkan mereka. Serangan ke Mindanao ini memperlihatkan bahwa Said tidak takut lagi terhadap Spanyol ataupun Portugis.

Peristiwa penting yang kelak akan merubah jalannya sejarah di Maluku terjadi pada 1596 ketika armada dagang Belanda yang dipimpin Laksamana Cornelis de Houtman berlabuh di pantai Jawa Barat. Mereka berniat mencari sumber-sumber rempah di Kepulauan Maluku dan telah berlayar hingga Bali. Tentu saja orang-orang Portugis dan Spanyol yang telah lebih dahulu bercokol di sana menjadi cemas. Pada 1599, orang-orang Belanda yang merupakan pemain baru di Kepulauan Nusantara mengadakan ekspedisi dari Jawa ke Maluku di bawah pimpinan Laksamana van Neck. Mereka mendatangi Ambon dan menjalin persekutuan dengan kepala suku Hitu. Sultan Said tentu saja sangat senang dengan kehadiran saingan Spanyol dan Portugis ini. Ia mempersilakan mereka datang ke kerajaannya asalkan bersedia menjadi sekutu dan mitra dagang yang baik bagi Ternate. Laksamana van Neck menerima undangan ini dan memerintahkan Kapten Wijbrand van Warwijk berlayar ke sana.

Warwijk tiba di Ternate pada 22 Mei 1599 dengan membawa rombongan sebanyak 560 orang. Sultan Said datang menyambut mereka ketika armada Belanda berlabuh di Benteng Gamalama, namun ia menolak naik ke kapal Belanda itu. Sultan kembali keesokan harinya dengan membawa armada 32 perahu *kora-kora* yang mengelilingi kapal Belanda sebagai ajang memamerkan kekuatan Ternate. Sultan duduk di atas singgasana dengan busana kebesarannya, sementara itu para pemusik bernyanyi dan menabuh gong dan genderang. Sultan tetap menolak undangan Belanda naik ke kapal mereka dan memilih berkomunikasi saja melalui perantaraan seorang penerjemah, tetapi ia mengizinkan rakyatnya mengadakan barter barang dengan Belanda. Baru pada 25 Juli, sultan bersedia menapakkan kakinya ke kapal Belanda. Said tampaknya sangat mengagumi kecanggihan kapal tersebut, sebagaimana tampak dari laporan berikut ini.

> Semuanya menyenangkan hati sang Sultan di kapal. Baginda menuju ke dapur dan mengagumi alat pengembus, yang ditiupnya bagaikan orang gila dengan mulutnya.[821]

Tiga hari kemudian, ia kembali lagi dan melihat-lihat kapal itu dengan penuh perhatian. Sultan sangat tertarik dan terkesan dengan pengetahuan yang dibawa Belanda dan menanyakan banyak hal kepada mereka. Ia ingin pula merekrut beberapa orang Belanda untuk bekerja di istananya, tetapi keinginan itu tidak dipenuhi oleh Belanda.

Sultan Said mengajak Belanda memerangi Tidore, musuh bebuyutan Ternate, namun mereka menolaknya. Oleh karena itu, demi memperlihatkan keberaniannya, sultan menyerang sendiri Tidore. Dalam serangan itu, mereka menewaskan tiga warga desa dan menawan 43 orang, yang diantaranya adalah kemenakan Sultan Tidore. Telinga yang tewas mereka tancapkan pada pedang dan perisai mereka. Sementara itu, kemenakan sultan mereka bunuh dan mayatnya dihanyutkan ke sungai.

Ketika van Warwijk meninggalkan Ternate pada 1599, kapalnya dimuati oleh cengkeh. Sementara itu, van der Doos, salah seorang anggota rombongannya, tetap tinggal di sana guna mengumpulkan cengkeh bagi armada Belanda berikutnya. Van der Doos belakangan menjadi sahabat sultan. Rombongan berikutnya dipimpin oleh Laksamana van Neck sendiri dan bertolak dari Banten pada 2 April 1601. Ia tiba di Ternate pada 2 Juni 1601 dan disambut oleh Sultan Said sendiri. Van Neck menggambarkan sultan sebagai seorang pria sangat gemuk yang hanya mengenakan cawat tipis. Sultan kembali keesokan harinya yang bertepatan dengan hari Minggu, saat ia menyaksikan armada kapal Belanda sedang mengadakan kebaktian. Sultan memerintahkan beberapa anak buahnya ikut bersujud, sementara yang lainnya diminta berdiam diri guna menghormati ibadah tersebut, bahkan ia ikut mengawasi dengan membawa sebatang tongkat agar jalannya ibadah tak terganggu.

---

821. *Sejarah Maluku*, halaman 404.

Penyambutan Terhadap Misi Belanda Oleh Sultan Ternate Pada Tahun 1601
Sumber: Geschiedenis van Nederlandsch Indie, Deel II, halaman 429.

Sambutan baik sultan terhadap Belanda itu mengesalkan orang Portugis di Tidore. Mereka mengirim surat kepada sultan yang menjelek-jelekkan orang Belanda. Mereka menulis surat bahwa orang Belanda tidak bermoral dan berniat merampas takhtanya. Surat ini diperlihatkan sultan kepada van Neck, yang langsung menyetujui permintaan Said agar menggempur Portugis demi memperlihatkan kedigdayaan mereka. Saat serangan berlangsung, sultan beserta kaum bangsawan naik perahu *kora-kora* guna menonton jalannya pertempuran. Kendati demikian, peperangan ini sebenarnya tidak dapat dikatakan pertempuran besar dan armada Belanda mundur setelah itu. Van Neck tinggal di Ternate hingga 30 Juni dan sebelum kepulangan mereka, sultan menyajikan berbagai hiburan meriah kepada mereka.

Kedatangan Belanda menggelisahkan hati raja muda Portugis yang berkedudukan di Goa. Ia memutuskan untuk mengirimkan ekspedisi militernya yang dipimpin oleh Pereira de Sande berkekuatan 8 kapal besar dan 1.000 orang prajurit. Armada ini kembali mengalami ketidakberuntungan karena cuaca buruk. Mereka segera kembali ke Goa tanpa memperoleh hasil apapun. Ekspedisi berikutnya melibatkan kekuatan laut lebih besar yang dikomandoi oleh Laksamana Dom Andrea de Furtado. Meskipun demikian, ekspedisi ini juga tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Cuaca dan kemampuan navigasi yang buruk menjadi penghambat bagi ekspedisi ini dan

menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Hambatan lainnya adalah pertempuran kecil dengan Belanda serta menertibkan rakyat Ambon dan Seram yang gemar memberontak. Demi mengatasi segenap hambatan tersebut, pihak Portugis meminta bantuan Spanyol, mantan saingannya yang berkedudukan di Filipina. Gubernur Jenderal Spanyol menyetujui permohonan bantuan itu. Ia menghimpun armada di bawah pimpinan Kapten Juan Xuares Gallinato yang terdiri dari 150 serdadu Spanyol, 1.500 tentara Filipina, empat kapal layar tempur, dan kapal-kapal lain yang lebih kecil. Kedua armada bertemu di Ternate pada 16 Februari 1603, namun segera terjadi perselisihan antara keduanya. Karena kurang koordinasi yang baik antara kedua panglima perang itu, serangan ke Ternate boleh dikatakan gagal dan masing-masing kembali ke negaranya. Saat melancarkan serangan, Gallinato dan Furtado memberikan perintah sendiri-sendiri sehingga tidak ada kesatuan komando. Selain itu, kondisi persenjataan mereka yang buruk gagal menembus benteng pertahanan Ternate.

Kegagalan serangan ini mendorong Belanda untuk bertindak. Saat itu, armada Belanda yang berkekuatan 7 kapal dan 1.500 serdadu baru saja tiba di Kepulauan Nusantara di bawah pimpinan Laksamana Steven van der Hagen. Mereka segera meneruskan pelayarannya ke Maluku guna menertibkan kawasan tersebut. Di Ambon, Belanda memperlihatkan parade kekuatannya di hadapan benteng Portugis yang ada di sana sehingga Gaspar de Melo yang bertugas mempertahankan benteng tersebut ketakutan dan menyerah. Belanda berhasil menguasai Ambon tanpa rintangan berarti. Laksamana van der Hagen lantas mengutus Kapten Cornelis Sebastiaanzoon, pucuk pimpinan kedua dalam ekspedisi itu, berlayar ke utara guna mengamankan kawasan tersebut.

Keberhasilan Belanda dengan mudah ini mengecewakan pihak atau pemain keempat, yakni Inggris, yang berada di bawah panji perusahaan dagang East India Company (EIC). Mereka merasa kalah cepat dengan Belanda. Kalau saja mereka tiba lebih dahulu dibanding Belanda, mungkin mereka akan berhasil menguasai Ambon dan mengusir Portugis. Karena itu, demi menebus keterlambatan ini, Inggris berlomba-lomba tiba lebih cepat di kawasan utara Maluku dibanding Belanda. Agar rencana ini terwujud dengan mudah, Inggris mengirim kapal kecil di bawah pimpinan Kapten Henry Middleton. Secara kebetulan, kapal itu berpapasan dengan armada Sultan Said yang dikejar oleh dua kapal *kora-kora* penuh prajurit. Hal ini justru merupakan keberuntungan bagi Inggris karena berhasil menyelamatkan sultan dan empat orang

Belanda lainnya sehingga mereka merasa berhutang budi kepada Inggris. Setibanya di Ternate, sultan mengadakan pesta penyambutan bagi penolongnya itu. Pada saat yang hampir bersamaan, tibalah Kapten Sebastiaanzoon. Kehadiran Belanda ini menyiagakan pihak Portugis dan Spanyol. Belanda mengatakan bahwa kedatangannya ini demi memenuhi undangan sultan untuk berdagang dan membantunya mengusir Spanyol dan Portugis. Dengan demikian, sultan hendaknya tidak mengadakan hubungan atau perdagangan dengan Inggris yang baru tiba tersebut. Sultan diajak pula oleh Belanda untuk memerangi Tidore. Menanggapi tawaran tersebut, sultan dilanda dilema. Akhirnya, ia mengatakan bahwa ia bersedia menyediakan bantuan berupa logistik dan perahu *kora-kora*, tetapi tidak berupa pasukan. Ini dilakukannya agar tidak kehilangan hubungan persahabatan yang baru dijalinnya dengan pihak Inggris.

Pihak Inggris sendiri memberikan bantuan kepada Spanyol dan Portugis berupa strategi, perbekalan, dan amunisi. Pertempuran pecah tak lama kemudian antara Belanda dengan Portugis yang berada di Tidore. Keberuntungan berpihak kepada Belanda sehingga Portugis beserta Spanyol harus rela terusir dari kawasan tersebut dan Sultan Tidore sendiri terpaksa meminta suaka kepada Belanda. Meskipun demikian, serdadu Belanda segera meninggalkan tempat tersebut guna memadamkan kerusuhan yang terjadi di Ambon. Secara simbolis Belanda menanamkan kekuasaannya dengan menempatkan seorang pedagang dan empat serdadunya. Pihak Inggris kembali mendesak sultan agar menjual cengkeh kepada mereka, tetapi sultan memperlihatkan pada mereka surat pihak Belanda yang melarangnya berdagang dengan mereka dan menyatakan bahwa Inggris datang terlambat. Ia berisiko menghadapi pembalasan Belanda yang mengerikan jika ketahuan berdagang dengan mereka. Kendati demikian, sultan tetap memberikan cengkeh kepada Inggris secara diam-diam dan menulis surat persahabatan kepada James I, Raja Inggris.

Kemunculan Belanda dan Inggris di Maluku tidak menyenangkan Portugis dan Spanyol selaku pemain lama di kawasan tersebut. Gubernur Jenderal Spanyol di Filipina, Don Pedro de Acuna, berniat memulihkan lagi kewibawaan bangsanya di Maluku. Ia mengutus Gaspar Gomez menemui Raja Philip II dari Spanyol dan memintanya agar membiayai ekspedisi militer ke Ternate. Raja Spanyol akhirnya bersedia mengucurkan dana sebesar 120.000 Ducat (koin emas atau perak). Armada Spanyol dan Portugis diberangkatkan dari Filipina pada 5 Januari 1606. Mereka memperoleh pula dukungan Tidore, sekutu lama mereka dan sekaligus musuh

bebuyutan Tidore. Serangan gabungan Spanyol dan Tidore dilancarkan pada 1 April 1606. Pengepungan dilakukan terhadap Benteng Gamalama yang pernah direbut oleh Sultan Baabullah, ayah Sultan Said. Kendati demikian, Sultan Said sanggup meloloskan dirinya ke Jailolo dan pasukan Spanyol dan Tidore segera menduduki serta menjarah benteng.

Sultan Said menyatakan penyerahan tanpa syarat kepada para pemenang perang. Spanyol mengajukan syarat agar sultan mengakui kedaulatan Spanyol dan menyerahkan dirinya. Perjanjian perdamaian ditandatangani pada 10 April 1606, yang meneguhkan hak Spanyol memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, larangan berhubungan dengan orang-orang Belanda ataupun Inggris, dan rakyat Ternate berjanji tak memusuhi lagi misi Katolik. Demi mencegah terjadinya perlawanan di kemudian hari, Spanyol mengasingkan Sultan Said ke Manila. Don Pedro de Acuna tak lama menikmati kemenangannya karena ia wafat kurang lebih tiga minggu kemudian. Menurut desas-desus, ia mati diracun.

Menghadapi kekalahan dan penawanan raja mereka, dua orang *bobato* Ternate, yakni Jogugu Hidayat dan Kapita Laut Kaicil Ali berlayar ke Banten guna memohon bala bantuan Belanda. Mereka tiba di sana pada Desember 1606 dan menjumpai Laksamana Matelief de Jonge. Mereka menyampaikan kepada laksamana tersebut mengenai serbuan Spanyol yang baru berlangsung dan ditawannya Sultan Said ke Manila. Setelah mendengar penuturan dua orang bangsawan tinggi Ternate di atas, Matelief de Jonge menyatakan kesetujuannya menurunkan bala bantuan. Tentu saja "kebaikan hati" Belanda itu tidak cuma-cuma dan ada persyaratannya. Meskipun demikian, syarat-syaratnya akan dirundingkan setelah de Jonge tiba di Ternate.

Setibanya di Ternate, Belanda mengajukan persyaratan sebagai berikut.

- Pemberian hak monopoli rempah-rempah bagi Belanda.
- Ternate bersedia menyediakan pasukan bila diperlukan oleh Belanda.
- Izin mendirikan benteng serta pemukiman bagi orang-orang Belanda di Ternate.
- Segenap biaya peperangan menjadi tanggungan Kesultanan Ternate.

Segenap persyaratan di atas disetujui oleh Kaicil Ali dan bala bantuan Belanda diturunkan pada April 1607. Armada Belanda yang dikirimkan saat itu terdiri dari 7 kapal, 2 kapal pemburu, 530 serdadu Belanda, dan 50 pasukan bersuku Ambon. Sebelumnya, Mudaffar–putra Sai–beserta Jogugu Hidayat dipanggil pulang dari

pelariannya di Jailolo. Pemerintahan Ternate sepeninggal Said pada 1606–1610 dijalankan oleh Jogugu Hidayat karena Mudaffar masih dibawah umur. Perundingan antara Belanda dan Ternate dilangsungkan, yang berujung pada penandatanganan sebuah perjanjian pada 26 Juni 1607. Perjanjian tersebut berisikan penerimaan resmi bagi syarat-syarat yang diajukan Matelief de Jonge. Peristiwa tersebut sekaligus menandai masuknya pengaruh Belanda di Ternate. Berkat bantuan Belanda, Spanyol berhasil dihalau dari Ternate pada 1609.

Mudaffar (1610–1627) dilantik sebagai Sultan Ternate pada 1610 dalam usia 15 tahun. Dalam memerintah, ia harus didampingi oleh suatu dewan yang terdiri dari 8 orang dan diketuai orang Belanda bernama Gerard van der Buis. Hadirnya bangsa Belanda menandakan bahwa mereka mulai ikut campur dalam urusan pemerintahan Ternate. Putra Said ini ternyata bukan seorang penguasa yang cakap. Ia adalah seorang pecandu madat. Permaisurinya yang berasal dari Jailolo menyarankan agar suaminya menghentikan kebiasaan tercela itu. Namun, Mudaffar yang merasa kesal lantas menikamnya dengan keris dan membuang jenazah permaisurinya ke laut. Peristiwa penting yang terjadi semasa pemerintahan Mudaffar adalah pengambilalihan pemerintahan Jailolo oleh Ternate pada 1620.

Setelah memerintah selama kurang lebih 17 tahun, Mudaffar jatuh sakit pada 1627. Spanyol yang bercokol di Filipina mendengar perihal sakit kerasnya Mudaffar dan memperkirakan bahwa hidupnya tak lama lagi. Oleh karena itu, mereka memulangkan salah seorang kemenakan Sultan Said yang turut diasingkan ke Manila bernama Kaicil Hamzah. Menurut mereka, Hamzah adalah calon pengganti Mudaffar yang paling tepat. Selama berada di Filipina, Hamzah telah beralih menganut agama Katolik. Ia mendesak kaum bangsawan dan petinggi kerajaan agar mengangkatnya sebagai sultan menggantikan Mudaffar yang baru saja meninggal.

Mereka sebenarnya setuju mengangkat Hamzah sebagai sultan yang baru, tetapi masalahnya belum pernah Kesultanan Ternate diperintah oleh raja non-Muslim. Itulah sebabnya, Hamzah menyatakan kesediaannya memeluk kembali agama Islam. Di hadapan *kalem* (kadi) Ternate, Hamzah melafalkan dua kalimat syahadat. Dengan demikian, diangkatlah Hamzah (1627–1648) sebagai penguasa Ternate. Spanyol menaruh harapan besar bahwa Hamzah akan membela kepentingan mereka di Ternate. Ternyata harapan ini bertepuk sebelah tangan karena Hamzah lebih condong kepada Belanda.

Berbagai tantangan berat yang harus dihadapi Hamzah adalah pergolakan di berbagai wilayah yang dikuasai Ternate, bahkan Kerajaan Gowa kini makin berambisi meluaskan daerah kekuasaannya, Buton dan Selayar pun dicaplok dari tangan Ternate. Itulah sebabnya, hubungan Gowa dan Ternate memburuk. Oleh karena itu, Kaicil Ali mengirim sepucuk surat kepada Gubernur Jenderal Spix yang isinya meminta agar Raja Gowa diperintahkan mengembalikan Buton, Selayar, beserta wilayah-wilayah Ternate lainnya. Tetapi, popularitas Hamzah makin menurun terutama setelah terbitnya pemberontakan *salahakan* (gubernur) Luhu dan Majira.

Era pemerintahan Hamzah berakhir dan ia digantikan oleh Mandar Syah (1648–1675), putra sulung Mudaffar. Sesungguhnya, yang lebih berhak atas takhta Kerajaan Ternate adalah Kalamata atau Kaicil Manila. Namun, Mandar Syah adalah pribadi yang pandai mencari muka di hadapan Belanda sehingga akhirnya ia yang diangkat sebagai Sultan Ternate berikutnya oleh VOC. Akibatnya, Mandar Syah harus menghadapi banyak musuh, terutama orang-orang yang tidak menyetujui pengangkatannya sebagai sultan. Keputusan Mandar Syah kerap menguntungkan Belanda, seperti penyerahan beberapa daerah di Seram (Elepaputi makariki, Kaibobo, dan Amahai) kepada VOC, yang dilakukan tanpa sepengetahuan petinggi kerajaannya. Akibatnya, rentetan musuh-musuh Mandar Syah makin banyak. Berbagai pemberontakan pecah di mana-mana, namun dapat ditumpas berkat bantuan VOC. Tentu saja kenyataan ini menenggelamkan martabat Ternate selaku salah satu kerajaan besar di Maluku.

Beberapa *bobato* dan pemuka kerajaan ingin menggulingkan Mandar Syah. Mereka lantas menerbitkan pemberontakan. Akibatnya, Sultan Ternate yang tak populer ini terpaksa meminta perlindungan di Benteng Oranje milik Belanda. Permasalahan timbul karena Mandar Syah membawa serta banyak pengawalnya sehingga Belanda mengalami kesulitan menyediakan makanan bagi mereka. Yang lebih menjengkelkan Belanda, para pengikut Mandar Syah kerap mengambil begitu saja barang penghuni benteng lainnya. Gubernur Ternate merasa bahwa Mandar Syah mustahil selamanya menumpang di benteng mereka. Karena itu, ia mengirim surat kepada gubernur jenderal di Batavia guna memohon penyelesaiannya. Arnold de Vlamming, panglima militer Belanda di Ambon, diperintahkan membereskan persoalan tersebut. Ia membawa kapal perang ke Ternate beserta serombongan besar tentara guna menakut-nakuti para pemuka kerajaan yang membenci Mandar Syah.

Kekhawatiran timbul dalam hati mereka sehingga bersedia menerima kembali Mandar Syah. De Vlamming kemudian bertolak memadamkan pergolakan lainnya.

Harga cengkeh merosot semenjak 1652. Oleh karena itu, VOC setelah berunding dengan Mandar Syah sepakat melakukan pemusnahan pohon-pohon cengkeh yang ada di Maluku demi mendongkrak harga cengkeh di pasaran. Apabila produksi cengkeh berkurang tentunya harga akan naik, demikian pemikiran mereka. Pada 31 Januari 1652, ditandatangani suatu perjanjian yang mengukuhkan kebijaksanaan pemusnahan itu. Sebagai kompensasinya, sultan akan memperoleh *recognitie penningen* (ganti rugi) yang tak sedikit jumlahnya. Pembayaran ini masih ditambah pula oleh bonus berupa perhiasan dan bahan pakaian yang mahal-mahal harganya. Selain itu, para *bobato* juga menerima ganti rugi. Meskipun demikian, pada praktiknya diganti oleh sultan dengan barang lain dengan nilai yang jauh di bawah uang yang seharusnya mereka terima. Dengan demikian, penghasilan para *bobato* merosot drastis. Sebaliknya, rakyat menerima ganti rugi yang amat kecil jumlahnya.

Pemusnahan pohon cengkeh ini pada gilirannya justru menyengsarakan rakyat. Belanda melakukan patroli guna mengawasi pelaksanaan kebijaksaan ini yang disebut pelayaran *hongi* (*hongi tochten*). Pemerintahan Mandar Syah bukanlah masa yang tenang karena Buton kerap menjadi incaran aneksasi Gowa. Kerajaan tersebut beberapa kali menyerang Buton. Menjelang masa akhir pemerintahannya, Mandar Syah menderita penyakit dan mangkat pada 1675.

d. Perkembangan Ternate Berikutnya Hingga Era Kemerdekaan.

Sultan Sibori (1675–1689) naik takhta menggantikan Mandar Syah. Uniknya, penguasa Ternate ini merasa dirinya sebagai orang Belanda sehingga dijuluki Sultan Amsterdam (*Koning van Amsterdam*). Perilaku hidupnya memperlihatkan sikap kebarat-baratan yang nyata. Ia gemar minuman keras yang seharusnya dilarang oleh agamanya. Suatu kali ia pernah terpergoki seorang ulama sedang makan daging babi. Oleh karenanya, sultan lalu meminta kawan-kawan Belandanya berbohong kepada ulama tersebut bahwa yang dimakannya adalah daging sapi Westhafen yang terkenal kelezatannya. Banyak perilaku negatif yang terkenal dalam diri sultan ini, antara lain emosinya yang tak stabil, pemalas, penuh nafsu, pemabuk, dan menggemari wanita. Valentijn masih menambahkan lagi dengan menyebutkan bahwa sultan ini tidak manusiawi dan gemar berlaku sekehendaknya sendiri.

Pantai Ternate
(foto dibuat sekitar 1880)
Sumber: Arsip Institut KITLV, Leiden
(kitlv.nl)

Terhadap istri-istrinya, Sultan Sibori terkenal kekejamannya. Apabila telah bosan terhadap mereka, ia tak segan-segan membunuhnya. Sebagai contoh, sultan pernah menikah dengan Dain Roze, tetapi setelah bosan ia berniat menghabisi nyawanya. Tetapi, wanita itu sempat mencium rencana jahat suaminya dan berhasil melarikan diri ke Makassar. Setelah itu, Sibori menikah dengan seorang janda Cina beranak satu. Kendati demikian, Sibori merasa bosan dengannya tak lama kemudian. Janda itu dibenamkan dalam bak mandi dan dicekik hingga tewas. Sultan yang berakhlak buruk ini kemudian menikahi anak janda Cina tersebut.

Pada zamannya, isu Jailolo bergaung lagi. Sultan Syaifuddin dari Tidore pernah mencanangkan restorasi Jailolo agar di Maluku terdapat empat kerajaan besar lagi. Pandangan ini ternyata mendapatkan pengikut di kalangan bangsawan Ternate sendiri, seperti Jogugu Baressi, Kapita Laut Pancona, dan Hukum Marsaoli. Namun, Sultan Sibori menanggapi dengan enteng bahwa yang meruntuhkan Jailolo adalah Portugis, bukannya Ternate. Oleh karena itu, bukan wewenangnya untuk merestorasi lagi Jailolo.

Sebagai penguasa yang gemar menjilat Belanda, Sultan Sibori menandatangani perjanjian pada 12 Oktober 1676 dengan Gubernur Jenderal Jan Maatsuyker. Isinya berupa penyerahan wilayah-wilayah Ternate di Maluku Tengah kepada VOC. Dengan demikian, praktis berakhir sudah kedaulatan Ternate di kawasan tersebut. Sebagai

kompensasinya, Belanda berjanji membantu Ternate dengan kekuatan militernya. Wilayah-wilayah pengaruh Ternate di Sulawesi Utara dan Tengah mulai berniat melepaskan dirinya. Oleh karena itu, dengan merujuk pada janji Belanda, ia memohon bantuan VOC menuntaskan masalah tersebut. Permintaan ini disetujui Belanda dan kekuasaan Ternate di Sulawesi dapat dipulihkan.

Persahabatan antara Sibori dan Belanda tidak kekal adanya. Sultan Ternate ini menerbitkan perlawanan pada 1680. Ia mengutus Pati Lima, seorang Muslim asal Seram, ke Hitu, Ambon, Manipa, dan Buru, guna membangkitkan rakyat di sana melawan Belanda. Sultan melalui utusannya menyerukan agar setiap orang Belanda dihabisi nyawanya, terkecuali mereka yang bersedia mengabdi kepada Kesultanan Ternate. Rencana pemberontakan ini sampai ke telinga Gubernur Ambon, yang menyiapkan pasukan untuk memburu Pati Lima. Setelah yang bersangkutan tertangkap, dari tangannya disita surat edaran Sultan Sibori. Pati Lima mengakui bahwa misinya dilakukan atas perintah Sultan Ternate tersebut. Hukuman gantung kemudian dijatuhkan kepada Pati Lima. Sebagai langkah pengamanan, gubernur memerintahkan agar keturunan Belanda yang berdiam di Ambon sementara waktu mengungsi ke Benteng Victoria demi keselamatan jiwa mereka.

Menyadari bahwa niat mereka telah terbongkar, para *bobato* memutuskan menyerah dan memohon pengampunan VOC. Tetapi sumber Belanda mencatat bahwa mereka tertangkap ketika dilancarkan serbuan terhadap istana Ternate. Ada pula yang mengatakan bahwa penyerahan mereka dikarenakan tak menyetujui rencana Sibori. Sultan sendiri menyatakan bahwa ia sesungguhnya telah mengutus para pengikutnya berunding dengan VOC di Benteng Oranje, tetapi mereka semua langsung ditangkap oleh Belanda. Oleh karenanya, sultan menolak memenuhi panggilan Belanda.

Serangan dilancarkan terhadap istana Ternate dengan tujuan menangkap Sultan Sibori. Para pengikut sultan yang berada di sekitar istana berupaya mencegah penangkapan ini sehingga Sibori berhasil melarikan diri ke Jailolo. Untuk sementara waktu sultan sanggup bertahan, tetapi lama kelamaan terdesak karena kurangnya bahan pangan dan persenjataan. Apalagi orang-orang Jailolo dan Sahu tidak bersedia memberikan dukungannya. Ia memohon bantuan kepada Sultan Mindanao, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya, sultan tertangkap ketika sedang mandi dan dipijat istrinya. Pengasingan ke Batavia menantikan Sultan Sibori.

Ternyata Gubernur Jenderal Belanda di Batavia menerimanya dengan ramah. Mereka menyadari bahwa Sibori masih dapat dimanfaatkan dan ia dibebaskan tak lama kemudian. Persetujuan ditandatangani oleh Sibori dan Gubernur Jenderal Belanda pada 7 Juli 1683, yang isinya adalah sebagai berikut.[822]

- Gubernur VOC berhak duduk dalam dewan pemerintahan Ternate.
- Hukuman mati hanya boleh dijatuhkan atas persetujuan VOC.
- Pengangkatan Sultan Ternate wajib mendapatkan persetujuan Belanda.

Demikianlah, pasal-pasal di atas jelas menandakan hilangnya kedaulatan Ternate, yang seolah-olah kini menjadi negara bawahan VOC. Sultan Sibori dikembalikan ke Ternate, tetapi memerintah sebagai boneka Belanda. Ia menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 27 April 1689, kurang lebih enam tahun setelah dibebaskan.

Sepeninggal Sultan Sibori, pemerintahan Ternate dipegang oleh para *bobato* dan pemuka kerajaan selama 2 tahun. Baru pada 1692, Kaicil Toloko (Tulloco, 1692–1714) yang sebelumnya menjabat sebagai *jogugu* diangkat sebagai Sultan Ternate. Ia adalah saudara Sibori. Apabila kakaknya dikenal dengan nama "Amsterdam", ia tersohor pula dengan nama "Rotterdam." Belakangan, ia mengganti namanya menjadi Said Fathullah. Sultan Toloko gemar mengenakan pakaian yang indah-indah dan mahal buatan Eropa. Sebelumnya, ia gemar mengkonsumsi minuman keras. Namun, kebiasaan ini dihentikannya setelah dinobatkan sebagai sultan. Ia bergaul akrab dengan orang-orang Belanda sehingga fasih berbahasa Belanda.

Sultan Toloko dikatakan kurang menarik penampilannya.[823] ia gemar mengenakan celana beludru dan jaket bersulam yang tampak terlalu lebar. Surban penuh berlian dan ikat pinggang tempat menyelipkan keris selalu dipakai pula oleh Raja Ternate ini. Sultan Toloko dikabarkan pula gemar minuman keras, yang dikatakannya sebagai sari buah. Malam hari dihabiskannya dengan berpesta, berdansa, serta bercinta. Kendati demikian, tokoh Ternate ini gemar belajar dan selalu meminta buku-buku dari orang Belanda, terutama yang berkaitan dengan sejarah kerajaannya. Istana barunya cukup mewah dan dilengkapi dengan taman beserta rumah-rumah bergaya Belanda. Sultan kerap mengeluhkan tindakan para pejabat yang melanggar aturan-aturan protokol sehingga dirasa merendahkan martabatnya.

822. Lihat *Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250–1950*, halaman 142.
823. Lihat *Sejarah Maluku: Banda Naira, Ternate, Tidore dan Ambon*, halaman 462.

Sultan Toloko menata kembali administrasi pemerintahannya yang dipelajari dari orang-orang Belanda. Berbagai aturan baru dikeluarkannya dan para bawahan wajib mematuhinya. Kondisi Ternate boleh dibilang damai semasa pemerintahan Sultan Toloko. Salah satu warisannya adalah pembangunan jalan antara Dodinga dan Bobaneigo, yang masih dipergunakan hingga sekarang. Sultan Toloko atau "Sultan Rotterdam" mangkat pada 8 Desember 1714 dan digantikan Amir Iskandar Zukarnain, putra tertua dari istri keempatnya.

Sultan Ternate yang baru ini dikenal pula dengan sebutan Sultan Raja Laut (1714–1751). Hubungan baik yang telah lama dibina dengan Tidore terganggu dengan adanya pemberontakan rakyat Halmahera Timur terhadap kekuasaan Sultan Tidore. Rakyat di kawasan tersebut merasa bahwa pajak yang dibebankan oleh Tidore kepada mereka terlalu berat. Itulah sebabnya, mereka menghadap Sultan Raja Laut dan memohon agar diizinkan bergabung dengan Ternate. Sultan Raja Laut mengabulkan keinginan ini sehingga timbul gesekan dengan Sultan Tidore. Demi mendamaikan mereka, Gubernur Maluku Antonie Heinsus, bermaksud mempertemukan dan membawa mereka ke meja perundingan.

Perundingan dihadiri oleh Sultan Raja Laut dari Ternate dan Sultan Hasanuddin dari Ternate. Tetapi begitu pertemuan dibuka, timbul permasalahan-permasalahan sepele. Sultan Hasanuddin memprotes baju berwarna abu-abu yang dikenakan oleh Sultan Raja Laut. Warna itu dalam bahasa Belanda disebut *lokje*, yang dalam bahasa Ternate berarti “hati palsu.” Sultan Raja Laut mengganti pakaiannya dengan kemeja bergaris serta mengenakan ikat kepala warna gelap, sebagaimana yang dikenakan Sultan Sibori saat berunding dengan Sultan Hamzah dari Tidore pada 1689. Kendati masalah pakaian telah terselesaikan, perundingan menemui kegagalan dan tidak ada kesepakatan yang dicapai.

Gubernur berjanji bahwa ia akan tetap mengupayakan penyelesaian masalah ini. Sementara itu, Sultan Hasanuddin mengemukakan bahwa pemberontakan rakyat Halmahera Timur di atas telah menimbulkan kerugian yang tak sedikit bagi Tidore. Ia mencela VOC karena kurangnya tekad mengatasi persoalan ini. Akhirnya, diputuskan bahwa permasalahan tersebut hanya dapat diselesaikan dengan kekuatan militer. Sejumlah pasukan gabungan Belanda dan Tidore dikirim ke daerah-daerah yang dilanda konflik. Halmahera Timur kembali ke pangkuan Tidore pada 1722. Agar di kemudian hari tak terjadi lagi kericuhan semacam itu, diadakan perjanjian

pada 6 Juni 1722 yang pada intinya tidak memperbolehkan rakyat suatu kerajaan beralih menjadi rakyat kerajaan lainnya. VOC diberi wewenang menindak pelanggar perjanjian tersebut. Setelah penandatanganan perjanjian tersebut, rakyat Papua dan Patani menghadap Sultan Raja Laut dan melaporkan tindakan sewenang-wenang para pemuka Tidore. Mereka memohon agar diizinkan menjadi bawahan Ternate dan VOC, tetapi Sultan Raja Laut menolaknya karena telah terikat perjanjian dengan Tidore.

Pemberontakan serupa dengan yang berlaku di Tidore kini terjadi juga di Ternate. Rakyat Makian menyatakan keinginannya menjadi bawahan Kesultanan Tidore karena tidak puas dengan perlakuan para pejabat Ternate. Sultan Raja Laut sendiri tak berhasil menyelesaikannya. Oleh karena itu, Makian ditempatkan di bawah pemerintahan langsung VOC. Akibatnya, Raja Laut dianggap kurang mampu menjalankan tugasnya sebagai sultan. Pemuka kerajaan dan rakyat Ternate menuntutnya agar turun takhta. Pada 1751, ia setuju meninggalkan kedudukannya sebagai Sultan Ternate dan digantikan putra tertuanya, Oudhoorn Kaicil Ayan Syah (1751–1754).

Sebagai Sultan Ternate yang baru, Sultan Ayan Syah bekerja keras melakukan berbagai perombakan. Ia mengisi kembali jabatan-jabatan *jogugu, hukum*, dan *kimalaha marsaoli* yang lowong semenjak zaman Sultan Raja Laut. Sultan Ayan Syah berusaha membuktikan bahwa ia memperhatikan nasib rakyatnya sehingga wilayah-wilayah yang hendak melepaskan diri bersedia kembali ke pangkuan Ternate. Pada Mei 1752, Sultan Ayan Syah mengundang para pemuka Makian yang sempat memberontak semasa pemerintahan ayahnya. Sebagai seorang penguasa, ia bersedia memperhatikan segenap kritik mereka selama pertemuan berlangsung. Rakyat Makian kemudian kembali menjadi bawahan Ternate. Kondisi kesehatan Ayan Syah kurang baik sehingga ia ingin mengundurkan diri, tetapi rakyat mengharapkan agar ia tetap menjadi sultan. Oleh sebab itu, ia menjabat sebagai Sultan Ternate hingga wafatnya pada 24 Agustus 1755.

Sultan Ayan Syah digantikan oleh adiknya, Amir Iskandar Muda (Sahmardan atau Zwammerdam, memerintah 1754–1777). Ia adalah putra kedua Sultan Raja Laut. Sultan-sultan Ternate berikutnya adalah Arunsah (1777–1796), Sarka (Sarkan, memerintah 1796–1801), dan Muhammad Yasin (1801–1807). Semasa pemerintahan Sultan Muhammad Yasin, Belanda menyerahkan Maluku kepada Inggris, tepatnya pada 21 Juni 1801. Tetapi pada 1803, Inggris mengembalikan Ternate kepada Belanda. Sultan Muhammad Ali (Sarmole van der Parra, memerintah pada1807–1823),

pengganti Muhammad Yasin, menandatangani kontrak politik pada 16 Mei 1807 di Benteng Oranje. Isinya menyatakan kesetiaan Ternate kepada pemerintah kolonial Belanda.

Maluku diserahkan kepada Inggris kembali pada 1810. Pemerintah kolonial Inggris mengangkat Kapten Forbes pada 1811 sebagai kepala pemerintahan sipil dan militer. Mereka menempatkan pula residen-residen selaku wakil Inggris di Ternate. Maluku diambil alih oleh "pemilik" lamanya, Belanda, pada 1816. Demi mengukuhkan kekuasaannya, pada 1817 Belanda mengadakan perjanjian dengan Ternate dan Tidore.[824]

- Kedua kesultanan mengakui kedaulatan pemerintahan kolonial Belanda atas mereka.
- Seluruh wilayah Ternate dan Tidore adalah wilayah pemerintah kolonial Belanda.
- Kedua kesultanan wajib memberikan bantuannya bila diminta.
- Tidak membuat perjanjian apapun tanpa seizin pemerintah kolonial Belanda.
- Kedua kesultanan tidak akan mengeluarkan peraturan-peraturan perdagangannya sendiri, melainkan akan merujuk pada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah kolonial.
- Pemerintah kolonial memiliki wewenang atas pegawai-pegawai yang berada di bawah kewenangan sultan.

Perjanjian di atas menandakan masuknya Ternate dan Tidore ke dalam payung kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.

Sepeninggal Muhammad Ali, sultan-sultan Ternate berikutnya adalah Muhammad Zain (1823–1861), Muhammad Arsyad (1861–1876), Ayanhar (1876–1900), Haji Muhammad Ilham (1900–1902), dan Haji Muhammad Usman Syah (1902–1914). Pada September 1914, meletus pemberontakan di Jailolo yang dipicu oleh beban pajak serta kerja rodi. Massa yang marah membunuh Kontrolir G. K.B. Agerbeek dan membakar rumahnya. Belanda menduga bahwa pemberontakan ini didalangi oleh Sultan Muhammad Usman Syah karena ia sebelumnya pernah menentang Belanda terkait perpajakan. Dalam rangka memadamkan pemberontakan ini, Belanda menangkap sultan dan mengasingkannya ke Batavia serta Bandung. Barulah setelah

824. Lihat *Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250–1950*, halaman 156.

itu, pemberontakan ditumpas dengan kejam. Para pemimpinnya dijatuhi hukuman berat, mulai dari hukuman mati hingga penjara seumur hidup.

Sultan Muhammad Usman Syah menjalani hukumannya tanpa proses peradilan. Berdasarkan keputusan pemerintah kolonial no.47 tanggal 23 September 1915, ia diberhentikan sebagai Sultan Ternate. Selama 19 tahun ia hidup sebagai tahanan dan baru dipulangkan ke Ternate pada 1933. Semasa sultan berada di pengasingan, tidak ada Sultan Ternate yang diangkat. Pemerintahan dipegang oleh *jogugu.* Putra Muhammad Usmah Syah yang bernama Jabir Syah (1927–1975) akhirnya dinobatkan sebagai Sultan Ternate berikutnya pada 1927. Ia mengajukan permohonan agar ayahnya dikembalikan ke Ternate, yang dikabulkan oleh pemerintah kolonial.

Kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Maluku diakhiri dengan berawalnya pendudukan Jepang pada April 1942. Jepang mengeluarkan ultimatum bila para pejabat pemerintahan kolonial Belanda tidak mau menyerah, Ternate akan dihujani tembakan. Menghadapi situasi yang makin genting, Kontrolir Syirk van der Groot menyerahkan Ternate kepada bala tentara pendudukan Jepang yang diwakili oleh Mayor Fujiu Egawa. Kekuasaan Belanda di Ternate tamat sudah, tetapi di bawah penjajahan Jepang rakyat makin menderita. Demi membangun fasilitas militernya, Jepang memaksa rakyat bekerja paksa tanpa gaji dan makanan yang memadai.

Untunglah penjajahan Jepang tidak berlangsung lama. Pada September 1944, pasukan Sekutu mendarat di Morotai dan terus mendesak pertahanan bala tentara Jepang. Sayangnya, pendaratan Sekutu ini diboncengi oleh pasukan NICA yang hendak menegakkan kembali kekuasaan kolonial Belanda. Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, H. J. van Mook mengirimkan surat kepada Sultan Jabir Syah yang isinya menyatakan bahwa sultan akan diungsikan ke Australia karena serangan Sekutu akan dilancarkan. Dari Morotai, sultan dan keluarganya diterbangkan ke Australia pada 8 Oktober 1944.

Kaisar Jepang, Hirohito, mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus 1945. Dua hari kemudian, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Dengan demikian, berakhir sudah segenap ikatan penjajahan yang membelengu bangsa Indonesia selama ratusan tahun. Ternate sendiri berada dalam kondisi kacau akibatnya munculnya sekelompok pengacau yang mengatasnamakan perjuangan. Mereka menghukum mati orang-orang yang dituduh bekerja sama dengan Jepang, padahal ada di antara mereka yang sesungguhnya merupakan pejuang sejati.

Sultan Jabir Syah sendiri baru kembali ke Ternate pada akhir September 1945. Pada November 1945, sultan mengadakan pembicaraan di istana Ternate dengan para pemimpin masyarakat Ternate, seperti Mononutu dan Boesoirie, mengenai langkah-langkah politik yang perlu diambil.
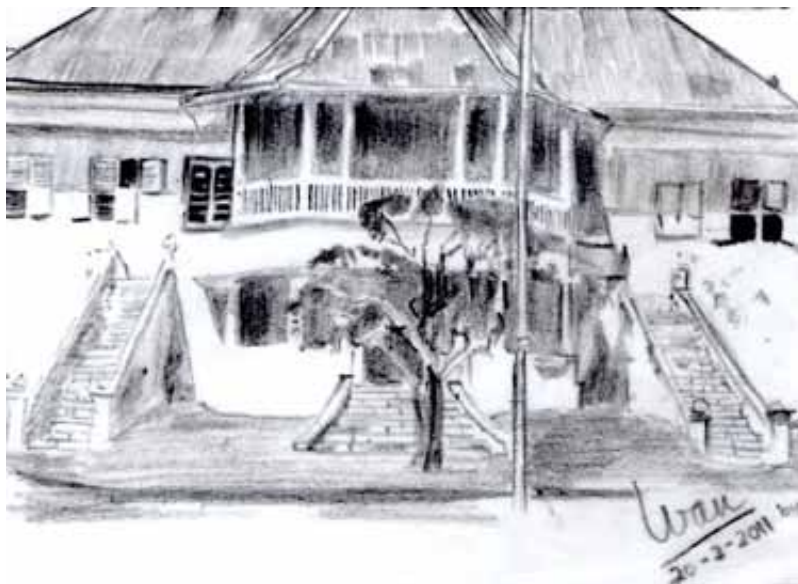
Istana Kesultanan Ternate
Sumber: Digambar ulang dari *Sekitar Tradisi Ternate*, halaman 217

Sultan menyarankan agar dibentuk suatu partai politik yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial (*rijks verband*), tetapi Boesoirie dan Mononutu tidak menanggapinya. Kendati demikian, setelah pertemuan itu terbentuklah organisasi politik bernama Persatuan Indonesia (PI). Sebagai ketuanya diangkat saudara Sultan Jabir Syah bernama Muhammad Nasir Syah. Para pemuda kurang mendukung PI karena khawatir dimanfaatkan oleh Belanda yang sedang berjuang keras menegakkan kekuasaannya kembali di Kepulauan Nusantara. Pada Desember 1945, mereka menuntut agar PI secara tegas mendukung kemerdekaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke melalui perubahan anggaran dasarnya.

Monotutu menyetujui tuntutan ini, akibatnya tokoh-tokoh yang menyetujui konsep *rijks verband*, seperti Muhammad Nasir Syah, Dano Syafei, Hasan Ayanhar, dan lain sebagainya mengundurkan diri dari PI. Semenjak saat itu, kedudukan kaum nasionalis dalam PI makin kuat. Rapat raksasa mendukung kemerdekaan diadakan pada 5 April 1946 yang dihadiri oleh Sultan Jabir Syah sendiri dan ribuan rakyat Ternate. Cabang-cabang PI saat itu telah dibentuk hampir di seluruh kecamatan di

Maluku Utara. Boesoirie terpilih sebagai ketua PI. Sultan Jabir Syah meminta agar PI tidak menimbulkan gangguan keamanan. Sementara itu, Muhammad Nasir Syah dan tokoh-tokoh lain yang menganut konsep *rijks verband* mendirikan partai sendiri yang disebut Partai Sedjarah Maloekoe Oetara (PASMO). Kaum wanita tak ketinggalan pula mendirikan perkumpulan yang disebut Persatuan Kaum Ibu Muslimat Indonesia (Perkaimindo). Ketuanya adalah Ibu Boki Nasir dan Ibu Chasan Boesoirie. Organisasi kaum wanita ini banyak berafiliasi pada PI.

Semasa awal kemerdekaan, Sultan Jabir Syah merangkap jabatan sebagai residen dan kepala swapraja atau Sultan Ternate. Pada pembicaraannya dengan van Hoven, komisaris pemerintah Belanda Kalimantan dan Indonesia Timur, sultan mengemukakan gagasannya membentuk federasi antara berbagai swapraja di Maluku dan Sulawesi yang anggotanya terdiri dari Ternate, Tidore, Bacan, dan Luwu. Berdasarkan sejarahnya, Luwu memang pernah berada di bawah pengaruh Ternate. Mulanya, Hoven menyampaikan bahwa ia akan mempertimbangkan gagasan itu. Tetapi belakangan ia menolak pembentukan dewan federasi seperti itu tidak demokratis dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, usulan Jabir Syah gagal terlaksana dan sebagai gantinya dibentuk ikatan longgar antara Kerajaan Ternate, Tidore, dan Bacan (TTB).

Belanda menerapkan politik pecah belah dengan membentuk berbagai negara boneka. Sebagai langkah awal pembentukan negara-negara boneka itu, Belanda mengadakan Konferensi Malino (16–24 Juli 1946) yang dihadiri utusan berbagai daerah. Sultan Jabir Syah terpilih mewakili Maluku Utara bersama dengan Chasan Boesoirie (PI) dan Salim Azizuddin (PASMO). Sultan Jabir Syah menyampaikan tuntutan kesetaraan status antara Indonesia dan Belanda. Chasan Boesoirie menekankan bahwa Indonesia harus segera diberi kemerdekaan penuh dan tidak ada lagi alasan bagi Belanda melanggengkan kekuasaannya. Sementara itu, Salim Azizuddin juga menyerukan dengan berapi-api bahwa Indonesia harus bebas dari Negeri Belanda. Ia mengingatkan pula bahwa hak para sultan dijamin menurut UUD RI pasal 8. Ditegaskannya pula tuntutan akan kesatuan Indonesia yang tak terbagi-bagi. Bendera merah putih hendaknya diakui oleh Belanda dan nama Nederlands-Indië seyogianya tak dipergunakan lagi serta diganti dengan Indonesia. Meskipun semangat nasionalis mewarnai Malino, ada sebagian kalangan yang menentangnya dan tak bersedia ikut serta di dalam konferensi tersebut.

Negara boneka bernama Negara Indonesia Timur (NIT) terbentuk dan Ternate menjadi salah satu bagiannya. Peristiwa penting yang terjadi pada kurun waktu itu adalah pemberontakan Haji Salahuddin. Tokoh yang dilahirkan pada 1874 ini sebelumnya pernah ditahan beberapa kali oleh pemerintah kolonial karena aksi politiknya. Tak berapa lama setelah kemerdekaan RI diproklamasikan, Haji Salahuddin membentuk suatu organisasi bernama *Sarikat Jamiatul Iman wal Islam* (disingkat SI–berbeda dengan organisasi SI [Sarekat Islam] yang telah ada sebelumnya). Tujuannya adalah mempertahankan agama Islam, menyebarluaskan berita proklamasi, dan menjunjung tinggi kemerdekaan RI di bawah pemerintahan Soekarno-Hatta. Awalnya, organisasi ini hanya diikuti oleh masyarakat Pulau Gebe saja, tetapi kemudian meluas ke daerah lainnya. Pada Januari 1947, anggotanya telah mencapai 3.000 orang.

Haji Salahuddin mengeluarkan fatwa haram bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Pemerintah kolonial Belanda yang datang kembali dengan membonceng Sekutu merasa tidak nyaman dengan gerakan ini dan berencana menumpasnya. Mereka mengutus seseorang bernama Haji Gani memata-matai kegiatan Haji Salahuddin. Selain itu, kepala distrik Gebe, Mohammad Yasin, terus menerus melaporkan kepada Belanda mengenai sepak terjang SI. Kegiatan spionase Haji Gani ini tercium juga oleh Haji Salahuddin, yang kemudian berhasil ditangkapnya. Haji Gani dieksekusi oleh para pengikut Haji Salahuddin dan mayatnya dibuang ke laut. Kini sasaran diarahkan kepada Mohammad Yasin dan tokoh-tokoh lainnya yang dianggap membahayakan gerakan. Secara keseluruhan ada 7 orang yang dihukum mati oleh para anggota SI.

Belanda bergerak menangkap Haji Salahuddin pada 14 Februari 1947, tetapi gagal. Akhirnya, Belanda memanfaatkan jasa Sultan Jabir Syah dalam meringkus pemimpin SI tersebut. Pada 17 Februari 1947, dua orang utusan diperintahkan membawa pesan kepada Haji Salahuddin bahwa Sultan Ternate ingin berjumpa dengannya. Tentu saja, Haji Salahuddin yang tak menyadari perangkap itu merasa mendapat kehormatan. Demi memperlihatkan rasa hormat mereka kepada sultan, Haji Salahuddin memerintahkan pengikutnya agar tak melakukan tindak kekerasan apapun. Sultan menjabat tangannya dan mengatakan bahwa ia datang guna menjemputnya ke Ternate dan berjumpa dengan Sultan Tidore. Haji Salahuddin terpancing oleh siasat ini dan mengikuti Sultan Jabir Syah. Ternyata tahanan dan pengadilan Belanda telah menunggunya. Setelah melalui proses pengadilan, Haji Salahuddin dijatuhi hukuman mati.

NIT sendiri tidak berumur panjang. Sebagian kaum nasionalis hanya menggunakannya sebagai alat perjuangan saja. Kerjasama dengan pemerintah RI kian ditingkatkan. Sebagai contoh, Mr. Tajuddin Noor, ketua parlemen NIT yang pro-RI mengirimkan misi persahabatan ke Yogyakarta pada 18 Februari 1948, ibu kota RI masa itu. Tatkala Belanda melancarkan agresinya kepada pemerintah RI, pihak NIT turut mengutuknya. Nasib NIT berakhir pada 1950 dan bersamaan dengan itu kembalilah Ternate sepenuhnya ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sultan Jabir Syah diperbantukan sebagai pegawai tinggi pada Departemen Dalam Negeri hingga ia wafat pada 1974.[825]

e. Sistem Pemerintahan Kesultanan Ternate

Kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang sultan. Meskipun demikian, di Ternate juga mengenal lembaga eksekutif dan legislatif. Lembaga eksekutif disebut *bobato madopolo* dan terdiri dari *jogugu* (perdana menteri yang juga menjabat sebagai kepala staf angkatan bersenjata berpangkat *majoru perang*), *kapita perang* (menteri pertahanan dan keamanan), *kapita lau* (laksamana angkatan laut kesultanan), *hukum soa sio* (menteri dalam negeri), dan *hukum sangaji* (menteri luar negeri).[826] Sementara itu, dewan legislatif disebut *bobato delapan belas* dan beranggotakan wakil delapan belas marga di Ternate, yang disebut *soa*. Secara keseluruhan, terdapat 41 *soa* atau marga di Ternate yang diwakili kedelapan belas orang tersebut. Setiap soa mempunyai kepala marganya sendiri-sendiri. Gelar delapan belas wakil marga itu berbeda-beda, ada yang bergelar *kimalaha*, *fanyira*, atau *sangaji*. Wakil yang bergelar *kimalaha* adalah Kimalaha Marsaoli, Tomaito, Tomagola, Tamadi, dan Payahe. Wakil yang bergelar *fanyira* adalah Fanyira Jiko, Jawa, Tolangara, dan Tabala. Selanjutnya, yang bergelar *sangaji* adalah Sangaji Tomajiko, Malayu, Limatahu, Kulaba, Malaicim, Tobolen, Tafmutu, Tafaga, dan Takafi.

Sultan selaku kepala pemerintahan mempunyai hak veto yang disebut *jaib kolano* guna menolak keputusan lembaga legislatif. Dalam bidang keagamaan, sultan merupakan imam agung di negerinya. Ia dibantu oleh para ulama dengan pangkat berbeda-beda. Ulama tertinggi di Ternate bergelar *Qadhie* atau *Kali,* yang dikenal pula sebagai Jo Kalem. Selanjutnya, masih terdapat lima orang imam, yakni Imam Jiko, Imam Jawa, Imam Sangaji, Imam Moti, dan Imam Bangsa.

825. *Sekitar Tradisi Ternate*, halaman 44.
826. Lihat *Sekitar Tradisi Ternate*, halaman 47.

Adanya Imam Jawa menunjukkan hubungan keagamaan yang erat antara Ternate dan Jawa. Terlebih lagi, semasa mudanya para sultan Ternate gemar menuntut ilmu agama di Gresik.

XII. TIDORE

a. Cikal Bakal Kerajaan Tidore

Menurut catatan Valentijn-Keyzer, Kerajaan Tidore mula-mula berpusat Pegunungan Batu Cina, selatan Dodinga.[827] Namun, belum dapat ditentukan kapan kerajaan tersebut dipindahkan ke Pulau Tidore. Sebelum masuknya agama Islam, raja-raja Tidore menyandang gelar *kolano*. Para *kolano* Kerajaan Tidore awal adalah Kolano Sah Jati, Kolano Bosamuangi, Kolano Bubu, Kolano Balibanga, Kolano Buku Madoya, Kolano Kie Matiti, Kolano Sele, dan Kolano Metagena. Menurut perkiraan, Kerajaan Tidore telah berdiri semenjak abad 13. Raja yang pertama kali menganut agama Islam adalah Kolano Nuruddin (1334–1373). Meskipun belum menyandang gelar sultan, menilik dari namanya dapat diketahui bahwa ia seorang muslim. Nuruddin digantikan oleh Hasan Syah, yang juga belum bergelar sultan. Penguasa Tidore pertama yang menyandang gelar sultan adalah Caliati atau Ciriliati (1495–1512). Oleh pembimbing spiritualnya bernama Syekh Mansur, ia digelari Sultan Jamaluddin. Tidak berbeda dengan Ternate–saingannya–Tidore sangat berambisi meluaskan daerah pengaruhnya. Wilayah kekuasaan Tidore tidak hanya terbatas pada Pulau Tidore saja, melainkan meluas hingga Halmahera Tengah dan Timur, Weda, Maba, Seram Timur, Ambon, Kepulauan Raja Ampat, dan Papua Barat.

b. Perkembangan Kesultanan Tidore

Tidore dan Ternate senantiasa terlibat dalam persaingan yang ketat. Ketika bangsa Portugis memihak Ternate, kedatangan orang-orang Spanyol ke Tidore pada Desember 1521 disambut suka cita oleh Sultan Almansyur (1512–1526), pengganti Caliati. Sultan yang diundang ke kapal Spanyol menyatakan dengan penuh kegembiraan bahwa, "Sejak beberapa waktu lalu ia pernah bermimpi dalam tidurnya, ... akan datang beberapa kapal ke Maluku dari tempat yang agak jauh. Raja telah bertukar pikiran dengan bulan untuk memastikan kedatangan kapa-kapal yang kini

---

827. Lihat *Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250–1950*, halaman 159.

telah berlabuh."[828] Tatkala para awak kapal Spanyol diizinkan turun ke darat, sultan menyampaikan agar Tidore dianggap sebagai rumah mereka sendiri dan seluruh rakyat Tidore rindu mengadakan persahabatan serta menghaturkan kesetiaan terhadap Raja Spanyol. Nakhoda kapal segera menyerahkan berbagai hadiah berharga pada Sultan Almansyur. Dua hari kemudian orang-orang Spanyol itu diundang makan siang dan aliansi dengan Spanyol segera dijalin.

Sultan mengizinkan orang-orang Spanyol berdagang di Maluku. Barang-barang dagangan orang-orang Spanyol digelar di pasar dan sultan membantu membuatkan tempat berjualan yang terbuat dari bambu. Perdagangan dilakukan secara barter, barang-barang dagangan orang-orang Spanyol ditukar dengan cengkih. Tidak berapa lama kemudian, habislah seluruh cengkih di Tidore sehingga harus didatangkan dari Moti, Makian, dan Bacan. Sesudah mendapatkan muatan cukup banyak cengkih, kapal-kapal Spanyol yang dinakhodai del Cano siap bertolak kembali ke tanah airnya pada akhir Desember 1521, tetapi Sultan Almansyur mendesak mereka agar meninggalkan empat orang anak buahnya di Tidore. Sebelum berangkat, pihak Spanyol berjanji bahwa mereka akan datang lagi guna melanjutkan misi perdagangan dengan Tidore. Kedatangan armada Spanyol tersebut merupakan awal bagi persahabatan antara Tidore dan Spanyol, bahkan Spanyol menjanjikan pula bantuan militer terhadap Sultan Almansyur.

Dalam rangka perseteruan dengan Ternate, Sultan Almansyur memberi perintah kepada anak buahnya bernama Sahmardan, Sangaji Patani, agar mencari orang-orang yang berani serta bersedia membantunya melawan Ternate. Sahmardan menjelajahi pulau-pulau yang berada dalam wilayah kekuasaan Tidore. Akhirnya, tibalah ia di Kabu, Waigeo, dan berjumpa dengan Gurabesi, Kapita Waigeo. Gurabesi menyanggupi titah sultan dan bersama-sama Sahmardan menghadap Almansyur. Mereka berdua kemudian menaklukkan Papua serta mempersembahkannya kepada Sultan Tidore tersebut.

Pada 1524, Ternate dan Portugis menyerbu Tidore. Saat itu, pasukan Ternate dipimpin oleh Taruwese, wakil sultan Ternate. Ekspedisi gabungan Ternate-Portugis berkekuatan 600 orang itu meluluhlantakkan ibu kota Tidore. Setelah itu, para penyerbu meninggalkan tempat itu kecuali beberapa orang Portugis yang tetap berdiam

---

828. *Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250–1950*, halaman 162–berdasarkan laporan Pigafetta, etnolog Italia yang turut serta dalam ekspedisi itu.

di Tidore. Ini merupakan awal bercokolnya Portugis di Tidore, kendati Sultan Tidore telah menjalin persahabatan dengan Spanyol.

Sepeninggal Sultan Almansyur pada 1526, singgasana Tidore kosong hingga 1529. Berdasarkan Perjanjian Saragosa pada 1529, Spanyol tak memiliki hak lagi atas Maluku, namun tidak berarti Spanyol terusir sepenuhnya dari sana. Kapal-kapal mereka masih sering mondar-mandir di Maluku. Lowongnya singgasana Kerajaan Tidore menciptakan kebingungan di kalangan rakyat karena Spanyol dan Portugis yang saling bersaing satu sama lain berupaya mengembangkan kekuasaannya. Dengan demikian, timbul dualisme kepemimpinan di Tidore.

Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain (1529–1547), putra bungsu Almansyur, akhirnya terpilih sebagai Sultan Tidore berikutnya. Namun, kala itu usianya masih sangat muda sehingga sebagai walinya diangkat seorang bangsawan tinggi Tidore bernama Kaicil Rade. Tokoh ini dikenal sebagai diplomat andal serta cerdas yang disegani oleh orang-orang Spanyol dan Portugis. Ia fasih berbahasa Spanyol dan Portugis. Pada zaman Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain, Ternate dilanda kemelut karena sultannya yang bernama Deyalo diturunkan dari takhta dan ditahan oleh orang Portugis di Benteng Gamalama. Meskipun demikian, ia berhasil meloloskan diri dari penjagaan ketat Portugis dan melarikan diri ke Tidore. Sultan Amiruddin ternyata bersedia memberikan suaka kepadanya.

Ternate dan Portugis menuntut agar Tidore menyerahkan Deyalo, tetapi ditolak oleh Sultan Amiruddin. Akibatnya, nyaris pecah peperangan antara Ternate dan Tidore. Krisis tersebut baru mereda setelah Tabariji diangkat sebagai Sultan Ternate menggantikan Deyalo. Namun, peperangan antara Ternate dan Tidore masih saja terjadi. Pada 1535, Ternate beserta Portugis, sekutunya, melancarkan serbuan ke Tidore dan berhasil merebut beberapa desa. Meskipun demikian, serangan dapat dipatahkan oleh pasukan dan rakyat Tidore yang berjuang bahu-membahu. Tahun berikutnya, Taruwese yang dibantu seorang petualang Portugis kembali menyerbu ibu kota Tidore tanpa sepengetahuan Gubernur Portugis. Ibu kota Tidore dibakar dan dijarah, yang sebenarnya telah dibangun kembali setelah hancur akibat serbuan tahun sebelumnya. Pada kesempatan tersebut, pasukan Spanyol tetap menolak menyerah, walau kalah dalam jumlah. Pasukan gabungan Tidore dan Spanyol mengajukan perdamaian dengan syarat agar Deyalo diizinkan hengkang ke Jailolo. Dengan disetujuinya syarat tersebut, barulah peperangan diakhiri.

Bentrokan antara Tidore yang didukung kerajaan lain di Maluku dengan Portugis terjadi pada 1536. Peristiwa itu diawali saat kedatangan gubernur Portugis baru bernama Antonio Galvao yang ditunjuk oleh raja Portugal. Ia mendapatkan kabar bahwa sultan Tidore telah bersekutu dengan raja-raja lainnya guna menghalau Portugis dari Maluku. Awalnya Antonio Galvao menawarkan perdamaian, tetapi ditolak oleh para sultan. Baku tembak antara Portugis dan Tidore pecah di sepanjang pantai Tidore. Antonio Galvao sekali lagi menawarkan perdamaian dan menyatakan bahwa kedatangannya bukanlah untuk berperang melainkan demi menjalin persahabatan. Tetapi utusan Portugis dibunuh oleh Tidore dan peperangan berlanjut kembali.

Portugis berusaha mendaratkan pasukannya tetapi disambut tembakan gencar meriam Tidore sehingga terpaksa mundur kembali ke kapalnya. Salah seorang anggota pasukan Tidore tertawan oleh Portugis dan dipaksa membocorkan rahasia pertahanan negerinya. Berkat informasi ini, Portugis berhasil merebut benteng pertahanan Tidore dan meraih kemenangan pada 21 Desember 1536. Sultan Tidore menawarkan perdamaian dan Portugis menyetujuinya asalkan Tidore mengirimkan pejabat resminya. Kesepakatan dicapai dan perundingan dilangsungkan antara Antonio Galvao dengan Kaicil Rade, diplomat serta ahli strategi andal Kesultanan Tidore.

Antonio Galvao memuji-muji kehebatan Kaicil Rade dan berjanji akan menyerahkan Kesultanan Tidore padanya. Kendati demikian, Kaicil Rade yang setia pada rajanya menampik hal itu. Ia meminta agar Sultan Amiruddin dibiarkan bertakhta, sementara ia akan memberikan jaminan bahwa Tidore tak akan lagi melawan Portugis. Keesokan harinya sultan bersama Kaicil Rade berjumpa sendiri dengan Galvao dan ditandatanganilah perjanjian perdamaian, dengan pokok-pokok isinya sebagai berikut:

- Tidore hanya diperbolehkan menjual rempat-rempah kepada Portugis dengan harga yang sama di Ternate.
- Angkatan Portugis akan ditarik dari Tidore.[829]

Berdasarkan perjanjian di atas dimulailah monopoli Portugis di Tidore. Atas prakarsa Kaicil Rade, perjanjian serupa dibuat antara Bacan dan Jailolo dengan Portugis, namun Portugis harus hengkang dari wilayah kekuasaan sultan-sultan

829. Lihat *Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250–1950*, halaman 175.

Maluku. Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain mangkat pada 1547. Kaicil Rade telah terlampau lanjut apabila diangkat sebagai sultan Tidore. Karena itu, diangkatlah Kie Mansyur (1547–1569) sebagai sultan berikutnya.

Selanjutnya yang bertakhta di Tidore adalah Miri Tadu Iskandar Sani Amir ul-Muzlimi (1569–1586), Gapi Maguna (Gapaguna, 1586–1599), Mole Majimu (1599–1626), Ngora Malamo (1626–1633), Gorontalo (1633–1653), dan Magiau (1653–1657). Sultan Gapi Maguna sendiri pernah ditawan oleh Ternate, tetapi berhasil dibebaskan dan dikembalikan ke singgasananya. Pada kurun waktu tersebut, kekuasaan Belanda makin besar, sebaliknya pamor Portugis beserta Spanyol bertambah suram. Peran Portugis dan Spanyol mulai digantikan oleh Belanda dengan VOC, maskapai dagangnya.

Sultan Syaifuddin (1657–1659) naik takhta pada 1659. Ia merupakan seorang diplomat dan negarawan yang piawai. Dalam menyelesaikan permasalahan, ia lebih memilih menggunakan cara-cara damai. Ia merupakan Sultan Tidore yang berhasil mengangkat Tidore menjadi kerajaan penting di Maluku sehingga sejajar martabatnya dengan Ternate. Syaifuddin menoleh kembali pada sejarah Maluku lama saat disana terdapat empat kerajaan besar (*Molioku Kie Raha*) di Maluku, yakni Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Karena itu, Syaifuddin mengungkapkan kepada Padtbrugge, Gubernur Maluku, bahwa keberadaan empat kerajaan besar ini merupakan suatu keharusan apabila Maluku yang damai serta sejahtera ingin diwujudkan. Ia mengatakan bahwa absennya Jailolo yang telah lama runtuh mengakibatkan Maluku seolah-olah hanya ditopang tiga pilar saja sehingga kurang kokoh. Itulah sebabnya, pembangkitan kembali Kerajaan Jailolo hendaknya dilakukan. Gagasan ini tidak dilaksanakan oleh Padtbrugge walau ia masih hidup hingga pemerintahan Sultan Nuku di akhir abad 18. Faktor utama yang mengganjal pemulihan Jailolo adalah Ternatelah yang telah menaklukkan kerajaan tersebut.

Prestasi yang dicapai Sultan Syaifuddin adalah keberhasilannya memperoleh pengakuan atas wilayah Tidore di Kepulauan Raja Ampat serta Papua daratan. Saat kedatangan Laksamana Speelman pada 13 Maret 1667, berlangsung perundingan antara Sultan Syaifuddin dengan Belanda di Benteng Oranje, Ternate. Sultan Syaifuddin mengangkat permasalahan Raja Ampat dan Papua daratan di atas dan setuju mengizinkan monopoli perdagangan terhadap VOC asalkan hak teritorialnya atas kawasan-kawasan tersebut diakui oleh Belanda. Kesepakatan ini dituangkan dalam

perjanjian pada 28 Maret 1667. Sebagai kompensasi atas monopoli rempah-rempah, sultan menerima 2.400 Ringgit per tahunnya.

Berbeda dengan sultan-sultan Tidore sebelumnya yang tidak sudi bekerja sama dengan Belanda, Sultan Syaifuddin tampaknya lebih pragmatis. Ia menyadari kekuatan Belanda saat itu yang telah berhasil menaklukkan kekuatan kerajaan-kerajaan Nusantara. Ketika para ulama dan bawahannya mengecam sultan karena telah menggadaikan negaranya kepada Belanda setelah penandatanganan perjanjian di atas, sultan menjawab bahwa tindakan itu dilakukan agar Tidore memperoleh peran lebih besar dalam percaturan regional.

Apabila pada masa silam Tidore kerap berseteru dengan tetangganya, Ternate, kini politik hidup damai secara berdampingan mulai dijalankan. Sultan Syaifuddin menjalin persahabatan dengan Sultan Mandar Syah dari Ternate. Sultan Syaifuddin merupakan penguasa yang giat meningkatkan kemakmuran rakyat. Ia hidup sederhana dan jarang bercakap-cakap dengan rakyat yang dijumpai, bahkan pintu istananya terbuka bagi rakyat yang ingin datang menghadap guna mengadukan ketidakadilan para pemuka masyarakat. Begitu menerima laporan rakyatnya, Sultan Syaifuddin akan menyelesaikannya selekas mungkin. Sultan Syaifuddin memiliki pengetahuan yang dalam mengenai agama Islam. Ia secara teratur menguraikan makna kitab suci Alquran saat ibadah di masjid. Dengan suaranya yang merdu dan nyaring, ia merangkai pesannya secara puitis dan mistis.

Menjelang akhir hayatnya, Sultan Syaifuddin terjangkit penyakit lepra yang saat itu belum ada obatnya dan sangat ditakuti. Meskipun tubuhnya digerogoti penyakit, sultan tetap bekerja seperti biasa. Ia mengasingkan dirinya dalam sebuah ruang kerja khusus dan memberikan perintah dari balik bilik. Kondisinya makin memburuk sehingga putranya bernama Kaicil Seram diangkat sebagai pejabat sultan. Sultan Syaifuddin akhirnya tutup usia pada 2 Oktober 1687 dan Kaicil Seram dinobatkan sebagai Sultan Hamzah Fakhruddin (1659–1700). Ia kemudian digantikan secara oleh Abul Falahal-Mansyur (1700–1708), Hasanuddin (1708–1728), dan Amir Muhiddin Bifallilajij (1728–1756). Sepeninggal Syaifuddin, Tidore memasuki masa kemundurannya.

Kewajiban menyerahkan hasil bumi menyebabkan munculnya pemberontakan di Halmahera Timur. Rakyat di kawasan itu yang diwajibkan menyerahkan hasil tambang langka berupa amber, menantang seraya berkata bahwa mereka siap dibunuh

mengingat mustahilnya memperoleh komoditas tersebut. Pemberontakan tersebut terpaksa dipadamkan dengan bantuan VOC. Ketidakpuasan rakyat di Halmahera Timur dimanfaatkan oleh Sultan Raja Laut dari Ternate. Rakyat yang memberontak menghadap Sultan Ternate dan meminta izin agar diperbolehkan menjadi warga kerajaan tersebut. Sultan Ternate menyambut mereka dengan penuh kebesaran serta menempatkan mereka di Kayoa, Gane Barat, Foya Kao, dan Galela. Setelah perjanjian antara Ternate dan Tidore dilangsungkan atas perantaraan VOC pada 1772, masa pemerintahan Sultan Jamaluddin (1756–1780) yang menggantikan Amir Muhiddin Bifallilajij, rakyat Tidore yang meminta suaka tersebut dikembalikan ke kampung halaman asalnya. Meskipun demikian, hubungan mereka dengan Sultan Tidore baru pulih beberapa tahun kemudian.

Sultan Jamaluddin menyerahkan wilayah Seram Timur kepada VOC (1768). Alasannya, daerah Seram Timur kerap dijadikan pangkalan perdagangan gelap dan perompakan. Sebagai upaya memperkecil kekuasaan Jamaluddin, VOC membentuk dewan pemerintahan transisi yang beranggotakan lima orang dengan dipimpin Kaicil Gajira. VOC menuduh Tidore dan Bacan bekerja sama dengan para bajak laut Mindanao pada 1780. Sultan Jamaluddin sendiri kerap membangkang perintah-perintah Belanda sehingga diturunkan dari takhtanya dan digantikan oleh Patra Alam (1780–1784). Tetapi usia pemerintahan Patra Alam juga tak panjang. Ia dicopot dari kedudukannya karena dianggap kurang serius memberantas para perompak dan penyelundup Mindanao beserta Sulu. Di mata Belanda, kegiatan semacam ini merupakan kejahatan berat karena berpotensi mengurangi keuntungan mereka dalam menerapkan monopoli perdagangan.

c. Tidore di Bawah Pemerintahan Sultan Nuku dan Sesudahnya

Sebagai pengganti Patra Alam, Belanda mengangkat Kamaluddin (1784–1797). Sayangnya, Kamaluddin merupakan raja yang lemah dan gemar berjudi. Tindakan Belanda yang kerap ikut campur dalam pemerintahan Tidore menggusarkan salah seorang pangeran Tidore bernama Nuku. Karena tidak setuju dengan penobatan Patra Alam, Nuku melarikan diri dari Tidore dan membangun basis perlawanannya di sekitar Patani dan Weda. Ia mengutus pengikut-pengikutnya mencari dukungan berbagai kawasan yang termasuk dalam wilayah kekuasaan Tidore, seperti Maba, Seram Timur, Raja Ampat, dan lain sebagainya.

Nuku menobatkan dirinya sebagai Sultan Tidore pada 1780 bersamaan dengan masa pemerintahan Patra Alam dan Kamaluddin. Ia memproklamasikan Tidore sebagai kerajaan berdaulat yang bebas dari pengaruh asing manapun. Negarawan andal ini terus melakukan konsolidasi kekuatan demi mengenyahkan Belanda dari tanah airnya. Kemenangan gemilang secara bertahap diraihnya. Akhirnya, pada 1797 Nuku berhasil melengserkan Kamaluddin dari takhtanya. Sultan Tidore yang gemar berjudi itu melarikan diri ke Ternate dengan membawa kartu judinya. Kini Nuku menjadi satu-satunya raja di Tidore dan, pada era kekuasaannya, Tidore memasuki kembali zaman keemasaannya. Kedaulatan Tidore berhasil dipulihkan Sultan Nuku.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita Sultan Syaifuddin menghidupkan Kerajaan Jailolo, Sultan Nuku yang dikenal pula sebagai Jou Barakati mengangkat Muhammad Arif Billah sebagai Sultan Jailolo. Tokoh ini merupakan mantan *jogugu* di masa pemerintahan Sultan Kamaluddin dan sekaligus pengikut setia Nuku. Dengan demikian, kini di Maluku telah berdiri empat kerajaan besar seperti dahulu kala. Sultan Nuku berniat menjalin kerjasama dan menggalang persatuan antara keempat kerajaan tersebut guna menghadapi Belanda, tetapi niat ini diganjal oleh Ternate yang merupakan sekutu setia VOC serta musuh bebuyutan Tidore. Oleh karena itu, persekutuan hanya terjalin antara tiga kerajaan saja, yakni Tidore, Bacan, dan Jailolo. Dengan demikian, Nuku tidak hanya berniat membebaskan kerajaannya saja melainkan seluruh Maluku dan bahkan Kepulauan Nusantara dari penjajahan bangsa Barat. Ia telah pula mengadakan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Johor Riau Lingga, Banjarmasin, dan Sulu di Mindanao, beserta orang Inggris di Bengkulu, semenjak 1780.[830]

Salah satu Sultan Tidore terbesar ini mangkat pada 14 November 1805. Sebelum wafat, Nuku mewasiatkan agar adik tirinya, Muhammad Zainal Abidin (1805–1810), diangkat sebagai penggantinya. Dengan demikian, Muhammad Zainal Abidin dinobatkan sebagai Sultan Tidore berikutnya. Muhammad Zainal Abidin merupakan pengikut setia Nuku dan penobatannya juga tidak meminta persetujuan Belanda. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pemerintah kolonial Belanda sama sekali tak menyukai pengangkatan Zainal Abidin. Mereka mencari-cari cara bagaimana mendongkel pengganti Nuku tersebut dari singgasananya.

830. Lihat *Nuku: Perjuangan Kemerdekaan di Maluku Utara*, halaman 176.

Mula-mula Belanda yang diwakili Gubernur Carel Lodewijk Wieling melayangkan tuduhan bahwa Muhammad Arif Billah, Sultan Jailolo yang diangkat Nuku, telah mendalangi kegiatan perompakan dan meminta agar Zainal Abidin menyerahkannya. Tetapi hal ini mustahil dilakukan, mengingat Sultan Jailolo tersebut memiliki kekuasaan yang besar, apalagi ia adalah mantan panglima perang pada zaman Sultan Nuku. Karena menolak menyerahkan Muhammad Arif Billah, Belanda menyerang Soasiu, ibu kota Tidore, pada 1806. Angkatan laut Tidore berupaya mematahkan agresi Belanda, tetapi gagal dan banyak perahu mereka ditenggelamkan. Sultan Zainal Abidin terpaksa memindahkan markasnya ke Maba. Jatuhlah Tidore ke tangan Belanda.

Pemerintah kolonial terus menerus memburu Zainal Abidin yang mengungsi ke Patani ketika Maba diserang dan diduduki Belanda. Bersamaan dengan itu, sultan mengangkat putranya, Jamaluddin, sebagai calon penggantinya. Kerabat kesultanan lainnya bernama Muhammad Tahir yang juga dikenal sebagai Prins Missool membangun pertahanan di Waru, Seram Timur, ketika Soasiu jatuh ke dalam cengkeraman Belanda. Ibu kota Tidore kembali diserbu pada 1807 sehingga pusat pemerintahan terpaksa dipindahkan ke Pulau Maitara. Sebagai wujud penerapan politik adu domba, Belanda merangkul dan mengangkat Muhammad Tahir (1810–1822) sebagai Sultan Tidore menggantikan Zainal Abidin pada 1810. Akibatnya, para pemuka kerajaan di Tidore terpecah menjadi dua golongan. Kelompok pertama mendukung Muhammad Tahir, sedangkan yang satunya lagi tetap memihak Zainal Abidin beserta putranya, Jamaluddin. Anggota dewan kerajaan Tidore lantas dipaksa Belanda menandatangani perjanjian yang menempatkan Tidore di bawah kekuasaan pemerintah kolonial.

Pada 1811, kekuasaan atas Kepulauan Nusantara beralih ke tangan Inggris yang memihak Muhammad Tahir, tetapi dengan cerdik mengangkat Jamaluddin sebagai raja muda dan calon pengganti Muhammad Tahir bila ia mangkat. Selain itu, Jamaluddin diberi wilayah kekuasaan di beberapa kawasan di Halmahera Timur, yakni Weda, Maba, dan Patani. Bahkan Sultan Tidore sendiri tak berhak mencampuri urusan di wilayah Jamaluddin. Sultan Zainal Abidin ditinggalkan oleh para pengikutnya karena melakukan tindakan tercela, yakni merebut istri bawahannya sendiri.

Kepulauan Nusantara berpindah tangan lagi kepada Belanda pada 1816. Sultan Muhammad Tahir yang kurang menyukai penyerahan Halmahera Timur

kepada Jamaluddin mengadukan masalah tersebut kepada Belanda. Oleh karena itu, pemerintah kolonial menangkap dan mengasingkan Jamaluddin ke Sumedang. Wilayahnya dikembalikan kepada Sultan Tidore. Jamaluddin diizinkan kembali ke Tidore pada 1831 asalkan bersedia melepaskan haknya sebagai bangsawan. Dengan demikian, janji pengangkatannya sebagai Sultan Tidore menggantikan Muhammad Tahir gagal terlaksana hingga ia wafat sebagai rakyat biasa pada 8 Januari 1846.

Sultan Muhammad Tahir mangkat pada 17 November 1821 dan digantikan oleh Akhmadul Mansyur (1821–1857). Sultan Tidore ini menerima kunjungan Gubernur Jenderal van der Capellen pada 20 Mei 1824. Pembicaraan keduanya berkisar pada masalah Kepulauan Raja Ampat dan Papua Utara serta perompakan. Gubernur jenderal meminta agar Sultan Akhmadul Mansur berperan serta aktif dalam menumpas kaum perompak. Selanjutnya, antara 22–30 Mei 1824 dilakukan perundingan dengan Sultan Ternate serta Sultan Tidore dan suatu perjanjian ditandatangani pada 27 Mei 1824. Pokok-pokok isinya antara lain.

- Pengakuan kedua kesultanan atas kedaulatan Belanda di Maluku.
- Baik Ternate maupun Tidore berjanji memberikan bantuan militer kepada pemerintah kolonial Belanda bila diminta.
- Kedua kesultanan tak akan menjalin hubungan dengan pihak asing manapun selain Belanda.
- Pemerintah kolonial diizinkan menempatkan pejabatnya dalam wilayah kesultanan.
- Menerima berlakunya hukum pemerintah kolonial Belanda. Hukuman mati dan hukuman berat hanya boleh dijatuhkan atas izin residen.
- Pemberian subsidi tahunan kepada Sultan Ternate dan Sultan Tidore.

Jumlah *recognitie penningen* (subsidi tahunan) ditetapkan sebesar fl17.400, sebesar fl3.000 bagi Sultan Tidore dan fl3.200 akan dibayarkan kepada wakil kesultanan di Moti dan Makian. Setelah menerima subsidi di atas, sultan tak diperkenankan lagi menjalankan perniagaan rempah-rempah. Tidore pun kian pudar pamornya.

Sultan-sultan Tidore berikutnya setelah Akhmadul Mansyur adalah Akhmad Safiuddin (1857–1865), Johar Alam (1865–1867), dan Akhmad Kawiuddin Alting (1867–1905). Sultan Akhmad Kawiuddin Alting menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial Belanda pada 22 Oktober 1894. Sementara itu, Belanda makin mencampuri pemerintahan di Tidore. Sebagai contoh, pemerintah kolonial

memisahkan administrasi pemerintahan Papua Selatan dari Tidore pada 1898. Sultan Akhmad Kawiuddin Alting ditangkap dan diasingkan oleh Belanda pada 1905. Setelah itu, takhta Tidore dibiarkan kosong karena Belanda tidak memperkenankan pemilihan sultan baru. Setelah berakhirnya kekuasaan Belanda, pada 1946 Zainal Abidin "Alting" Syah (1946–1956) terpilih sebagai Sultan Tidore.

XIII. TAMBAHAN TENTANG KERAJAAN-KERAJAAN DI MALUKU TENGAH DAN TENGGARA

Sebelumnya perlu diulas mengenai sistem pemerintahan di Maluku Tengah dan Tenggara. Di Maluku Tengah dikenal "republik-republik desa" (*Dorps-Republieken*)[831] yang disebut "negeri" atau "kampung." Pemimpinnya digelari *upu latu, upu patih,* atau *orang kaya.*[832] Republik-republik itu bergabung membentuk perserikatan yang disebut *uli*. Terdapat dua jenis *uli*, yakni *patasiwa* (perserikatan sembilan desa atau negeri) dan *patalima* (perserikatan lima desa atau negeri). Berbagai *uli* ini berkembang menjadi semacam kerajaan. *Uli* yang ada di Maluku Tengah adalah Soya, Kilang, Urimessing, dan Nusaniwe di jazirah Leitimur; Hatuhaha dan Oma di pulau Haruku; Ina Haha di bawah pimpinan negeri Titiwai dan Ina Luhu di bawah pimpinan negeri Ameth; serta Negeri Iha di pulau Saparua.[833] Menurut sumber lainnya, kerajaan-kerajaan di Maluku Tengah adalah Kerajaan Hitu, Soya, Iha, Luhu, Sahulau, dan Lautaka.[834]

Sementara itu, di Maluku Tenggara juga terdapat "negeri" atau *ohoiratun*. Pemimpinnya bergelar *rat, orang kaya,* atau *kepala soa*. Negeri-negeri tersebut membentuk perserikatan bernama *ursiu* (*siu-ivaak*) dan *lorlim* (*lim-itel*).[835] Pada awal abad 15, di Maluku Tenggara muncul Kerajaan Ohoiwur di Pulau Kei Kecil yang mencoba mempersatukan negeri-negeri di sana. Menurut sumber tradisional, perserikatan *lorlim* diprakarsai oleh Raja Tabtut dari Ohoiwur, sedangkan *ursiu* diprakarsai oleh Raja Ar Nuhu dari Danar. Namun, negeri bernama Lerohoilim di Pulau Kei Besar menyatakan bahwa pembentukan *lorlim* berasal dari mereka.[836] Raja Tabtut ini dikenal sebagai seorang tokoh pembaharu serta peletak dasar hukum di Kei.[837]

831. Lihat *Sejarah Daerah Maluku*, halaman 39.
832. Lihat *Sejarah Daerah Maluku*, halaman 37.
833. Lihat *Sejarah Daerah Maluku*, halaman 39.
834. Lihat *Amahai Dalam Lintasan Sejarah*, halaman 18.
835. Lihat *Sejarah Daerah Maluku*, halaman 40.
836. Lihat *Sejarah Daerah Maluku*, halaman 47.
837. Lihat *Sejarah Daerah Maluku*, halaman 53.

Pada perkembangan selanjutnya, terbentuk Kerajaan Amahai yang pada mulanya dipimpin secara bergantian oleh keluarga Wattimena dan Hallatu. Leluhur Wattimena adalah seorang pelaut bernama Topanusa (Tabanusa) yang berasal dari Bandan di Malaka.[838] Ruhupessy Kamela dari suku Wemale tak bersedia mengakui kekuasaan Ternate, lantas ia berlayar dengan rakit dan tiba di pesisir Seram selatan. Kedua pendatang ini diterima oleh penguasa setempat bernama Waeloruno. Tabanusa kemudian digelari Leripatola dan Ruhupessy Kamela menerima gelar Ular Patola. Belakangan dilangsungkan perjanjian antara keluarga Wattimena (yang saat itu telah disebut Wattimena-Lokollo) dan Hallatu. Perjanjian itu menyatakan bahwa jika tidak terjadi sesuatu dalam pemerintahannya, raja dari keluarga Hallatu boleh terus memegang kekuasaannya hingga meninggal. Namun, bila terjadi suatu masalah yang menyebabkan ia diturunkan dari kedudukannya, pemerintahan sementara waktu dipegang oleh keluarga Wattimena Lokollo, dan setelah keadaan menjadi tenang kembali, tampuk pemerintahan harus dikembalikan kepada keluarga Hallatu.[839] Dengan demikian, Hallatu dan Wattimena Lokollo harus saling membantu berdasarkan hukum adat.

Pada 1605, armada Belanda di bawah pimpinan Steven van der Haghen merebut benteng Portugis di Ambon. Mereka lalu berniat mengadakan perjanjian dengan para pemimpin setempat. Meskipun demikian, Hallatu yang menentang kekuasaan asing menolak berjumpa dengan Belanda. Tetapi karena adanya tekanan dari pihak Belanda, mereka mengutus Ahuno Wattimena, putra Tabanusa, menjumpai Steven van der Haghen. Pada kesempatan itulah, Ahuno dibaptis dengan nama Ahuno Steven Wattimena Lokollo. Pihak Belanda menyerahkan tanda kekuasaan dan mengangkatnya sebagai *Orang Kaya* (Raja) Amahai. Ruhupessy Kamela turut menyertai Ahuno ke kapal dan diangkat pula sebagai Orang Kaya Soa Huku.[840]

Hingga masa pemerintahan Patti Hendrek Wattimena pada 1821, penguasa kawasan itu belum digelari raja dan masih disebut *sahkeber orang kaya* atau *patti*. Patti Hendrek Wattimena diturunkan dari kedudukannya karena melakukan berbagai kesalahan. Sejak saat itu, keturunan Wattimena Lokollo tidak diperkenankan lagi memegang pemerintahan di Amahai. Pada 1830, pemerintah kolonial Belanda mengangkat Ellisa Hallatu sebagai *sahkeber orang kaya*. Raja Wilhelem Hallatu yang

838. Lihat Amahai Dalam Lintasan Sejarah, halaman 24.
839. Lihat *Amahai Dalam Lintasan Sejarah*, halaman 28.
840. Lihat *Amahai Dalam Lintasan Sejarah*, halaman 31.

memerintah pada sekitar 1890 pernah membantu Raja Alfaris Tamaela dari Soahuku membangun gedung gereja.[841] Pada 1907, Belanda mengangkat Abraham Hallatu sebagai Raja Amahai. Sejak saat itulah penguasa Amahai bergelar raja.

B. MALUKU MENURUT BERITA CINA

Dalam catatan *Sejarah Dinasti Ming* (1368–1644), buku 323, Maluku disebut dengan *měimíngjū*[842] (美洺居). Maluku telah terkenal sebagai negeri yang kaya. Apabila rajanya bepergian, ia akan diiringi oleh rombongan yang besar. Rakyat yang berjumpa dengan rombongan raja akan segera berbaring di tepi jalan dan menyilangkan tangannya sebagai tanda hormat. Diberitakan pula bahwa di Maluku terdapat "gunung dupa" yang bila turun hujan maka "dupa" ini akan berjatuhan dan menutupi tanah. Jumlahnya sangat banyak sehingga rakyat tidak mengumpulkan semuanya. Yang dimaksud dengan *dupa* ini adalah cengkeh, hasil bumi utama Kepulauan Maluku. Raja atau pemuka masyarakat Maluku akan mengumpulkan dan menyimpannya dalam jumlah banyak guna dijual lagi kepada para pedagang yang singgah di kerajaannya. Catatan sejarah di atas menyebutkan pula bahwa Maluku merupakan satu-satunya negeri di lautan timur yang menghasilkan cengkeh. Karena cengkeh bermanfaat untuk menyehatkan badan, banyak pedagang Tiongkok yang mengunjungi negeri ini guna membeli rempah-rempah tersebut.

Semasa pemerintahan Kaisar Wanli (1573–1619) dari Dinasti Ming, orang Portugis datang menyerang Maluku. Portugis berhasil memenangkan peperangan dan Raja Maluku menyatakan takluk. Bangsa Portugis mengampuni dan membiarkannya kembali memerintah, namun ia diminta memberikan upeti tahunan berupa cengkeh. Selanjutnya, Portugis meninggalkan negeri tersebut tanpa meninggalkan pasukan sama sekali. Tak lama kemudian, muncul orang Belanda, yang disebut barbar berambut merah. Mereka mengetahui bahwa Portugis telah pergi meninggalkan tempat itu. Oleh karenanya, orang Belanda yang baru datang tersebut memasuki ibu kota dan menangkap rajanya seraya menuntutnya agar bersikap baik terhadap mereka. Sebagai balasannya, Belanda akan membantu mengalahkan Portugis. Raja negeri itu tidak memiliki pilihan dan mematuhi kehendak Belanda.

841. Lihat *Amahai Dalam Lintasan Sejarah*, halaman 51.
842. Lihat buku *Nusantara dalam Catatan Tionghua* halaman 165, yang mengejanya sebagai Mi-Li-Kiu.

Berita mengenai kedatangan Belanda tersiar sampai ke telinga Portugis. Mereka sangat marah begitu mengetahui kedatangan saingannya tersebut. Oleh karena itu, dengan segera dikumpulkanlah pasukan untuk melawan Belanda. Meskipun demikian, di tengah jalan pasukan ini terbunuh oleh orang Tionghoa sehingga serangan dapat dikatakan gagal dan Belanda tetap bercokol di Melayu. Putra pemimpin pasukan Portugis yang menggantikan ayahnya ingin melanjutkan cita-cita menghalau Belanda dari Maluku. Ia mengumpulkan pasukan yang besar dan memberangkatkannya ke Maluku. Kali ini, ia menuai keberhasilan karena Belanda memang sedang tidak berada di Maluku. Raja Maluku dibunuh dan sebagai pengganti diangkat orang yang dipercayainya. Tidak lama kemudian, Belanda datang lagi di Maluku dan berhasil mengusir pemimpin yang diangkat Portugis. Sebagai gantinya, Belanda mendudukkan putra raja terdahulu ke atas singgasana. Setiap tahun terjadi pertempuran yang banyak merenggut korban jiwa. Para pedagang Tionghoa menyarankan kedua belah pihak untuk menghentikan pertempuran. Mereka sepakat membagi negeri ini menjadi dua dengan pegunungan tinggi di Banda sebagai garis (*wànlǎogāoshān*, 萬老高山). Sebelah utara pegunungan menjadi milik Belanda, sedangkan Portugis berkuasa di bagian selatannya. Dengan demikian, pertempuran untuk sementara dapat dihentikan. Riwayat yang terdapat dalam berita Cina di atas tampaknya mengacu pada persaingan politik antara Portugis dan Belanda semasa pemerintahan Sultan Baabullah dan Sultan Said. Bahkan dikisahkan pula pembantaian armada Portugis oleh orang-orang Cina yang menyebabkan Portugis gagal menaklukkan Maluku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberitaan yang berasal dari Tiongkok itu meriwayatkan mengenai Ternate selaku kerajaan paling dominan di Maluku pada zaman tersebut.

Berita mengenai Maluku dapat pula diperoleh dari *Dongxi Yangkao*, buku ke-5, yang berangka 1618 M. Berdasarkan sumber tersebut, kaum pria di Maluku biasa menggunduli rambutnya, sedangkan kaum wanita menyanggul rambutnya. Apabila seorang gadis menikah, keluarganya akan membeli banyak sekali mangkuk Tiongkok yang akan mereka cat bagian luarnya. Status seseorang juga dilihat dari banyaknya mangkuk yang mereka miliki. Saat pesta diselenggarakan, dua kuali besar berisi arak akan disediakan. Setiap mangkuk dipegang dua orang yang dipergunakan untuk mengambil serta meminum araknya. Kemudian orang-orang dewasa yang menghadiri pesta akan bangkit dan melakukan tarian. Anak-anak dan remaja akan membentuk lingkaran mengelilingi para penari.

C. KERAJAAN-KERAJAAN DI TANAH PAPUA

Raja dan Bangsawan Papua Beserta Pengiringnya Saat Berlangsungnya Silatnas Raja/ Sultan Nusantara Pada 25–26 Juni 2011 di Bandung.
(Foto koleksi pribadi)

Tumbuh dan berkembangnya berbagai kerajaan di Tanah Papua erat kaitannya dengan kesultanan-kesultanan di Kepulauan Maluku, seperti Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Sultan-sultan Maluku memberikan otonomi bagi para penguasa kerajaan di Papua tersebut. Berdasarkan letak geografisnya, kerajaan-kerajaan Papua dapat dibedakan menjadi tiga, yakni[843]

- Kepulauan Raja Ampat, yang terdiri dari Waigeo, Salawati, Misool, dan Sailolof.
- Semenanjung Onin (Fakfak), yang terdiri dari Rumbati, Fatagar, dan Ati-Ati.
- Kaimana, yang terdiri dari Namatota, Komisi, Patippi, Sekar, Wertuar, Ugar, dan Arguni.

Berbagai kerajaan tersebut merupakan wujud proses akulturasi antara kebudayaan Maluku dan Papua yang telah berlangsung selama berabad-abad.

Para raja di Papua tersebut diangkat oleh Sultan Tidore dan merupakan wakilnya dalam hal perniagaan serta pemungutan pajak. Oleh karena itu, penduduk wajib menyerahkan upeti setiap tahunnya kepada Sultan Tidore, yang kemudian diantarkan

843. Lihat *Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua*, halaman 89.

para raja Papua ke Tidore. Sebaliknya, Sultan Tidore juga secara berkala mengirimkan utusannya ke Papua guna mengawasi penarikan pajak. Ketika itu, pajak atau upeti yang dibayarkan berupa budak, gong, burung cenderawasih, meriam, dan benda-benda lain bernilai tinggi di zaman tersebut.[844] Pengaruh Tidore di Papua makin memudar setelah ditegakkannya kekuasaan pemerintah kolonial pada 1898. Para raja Papua kemudian ditempatkan di bawah payung kekuasaan Belanda. Semenjak saat itu, pajak tidak lagi disetorkan kepada Sultan Tidore melainkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Raja-raja tersebut pada perkembangan selanjutnya digaji oleh pemerintah kolonial.

Dari segi susunan pemerintahan di Papua, selain raja, dikenal pula *raja muda* dan *raja komisi*. *Raja muda* bertugas membantu raja dalam hal duniawi. Ia juga merupakan pelaksana perintah raja dalam tugas-tugas tertentu. Dahulu, tidak semua *raja muda* merupakan keluarga raja. Pemerintah kolonial kemudian memanfaatkan para *raja muda* ini sebagai penghubung antara pemerintah dengan penduduk di daerah pengaruh suatu kerajaan dan sekaligus sebagai pengawas. Raja Muda Rumbati bertugas mengawasi kawasan Kais yang merupakan daerah pengaruh Rumbati. Raja Muda Patipi bertugas mengawasi daerah Metamani. Raja Muda Arguni bertugas mengawasi daerah Sebiyar. Sementara itu, *raja komisi* bertugas memungut pajak di wilayah kekuasaannya. Setelah masuknya pemerintah kolonial Belanda, *raja muda* juga memiliki tugas seperti *raja komisi* dalam hal memungut pajak.[845] Pada perkembangan selanjutnya, wilayah Patipi di Bira memerlukan pengawasan sehingga diangkatlah Raja Komisi Bira. Bagi wilayah Sekar di Tarof juga diangkat seorang *raja komisi*. Wilayah kekuasaan Raja Namatota juga terlampau luas sehingga di daerah Kaimana juga diangkat seorang *raja komisi*.

I. Kerajaan-kerajaan di Kepulauan Raja Ampat

Para raja di kepulauan Raja Ampat bergelar *korano* yang dapat disepadankan dengan *kolano* di Kepulauan Maluku. Secara umum kepulauan ini merupakan daerah pengaruh raja-raja Maluku, tetapi kekuasaan mereka diatur oleh para penguasa setempat. Salah satu persinggungan antara Maluku dan Papua terjadi semasa pemerintahan Sultan Muhammad Bakir dari Bacan, yang menyebarkan agama Islam ke berbagai penjuru Kepulauan Nusantara, termasuk Papua. Ekspedisi ini mendudukkan penguasa-penguasa sebagai berikut di kawasan Raja Ampat dan sekitarnya.[846]

---

844. Lihat *Singgirei Rumagesan: Pejuang Integrasi Papua*, halaman 15.
845. Lihat *Singgirei Rumagesan: Pejuang Integrasi Papua*, halaman 22-23.
846. Lihat *Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua*, halaman 90.

(a) Kaicil Patrawar bergelar Komalo Gurabesi (Kapitan Gurabesi atau Kurabesi) di Pulau Waigeo.
(b) Kaicil Patrawar bergelar Kapas Lolo di Pulau Salawati.
(c) Kaicil Patra Mustari bergelar Komalo Nagi di Misool.
(d) Kaicil Boki Lima Tera bergelar Komalo Boki Saila di Seram.

Selanjutnya, Sultan Tidore, Almansyur, bersama dengan Sangaji Patani Sahmardan dan Kapita Waigeo yang bergelar Kapitan Gurabesi (Kurabesi), melancarkan ekspedisi ke Tanah Papua. Ekspedisi yang terdiri dari satu armada *kora-kora* ini berhasil menaklukkan kawasan Papua bagian barat serta memasukkannya ke dalam payung kekuasaan Tidore.

Sebelum masuknya pengaruh Maluku, di Kepulauan Raja Ampat sudah ada beberapa kerajaan. Salah satu legenda mengisahkan mengenai pasangan suami istri bernama Alyab dan Boki Deni.[847] Suatu kali, Boki Deni menemukan tujuh butir telur di tepi Sungai Wawage. Alyab berkeinginan menyantap telur-telur tersebut, tetapi ia dicegah istrinya. Beberapa hari kemudian, lima di antara tujuh telur-telur itu menetas menjadi manusia. Dua telur yang tersisa masing-masing mengeluarkan makhluk halus dan batu. Saudara tertua yang menetas dari telur, Fun Giwar, tetap tinggal di Wawage dan menjadi Raja Waigeo. Saudara kedua, Fun Tusan, pindah dan mendirikan kerajaan di Salawati. Saudara ketiga, Fun Mustari, membangun kerajaan di Pulau Misol. Sedangkan yang keempat, pindah ke Pulau Seram. Saudara kelima merupakan seorang wanita bernama Pin Take.

Suatu ketika, Pin Take hamil tanpa diketahui suaminya. Karena merasa malu, saudara-saudara Pin Take menghanyutkannya ke laut hinga terdampar di Pulau Nunfor. Pin Take akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Gurabesi (Kurabesi). Setelah dewasa, ia kembali ke Waigeo dan bersama pamannya, Fun Giwar, beserta anak pamannya, Mereksopen, membantu Raja Tidore mengalahkan Ternate. Berkat jasanya, Kurabesi dinikahkan dengan putri Raja Ternate bernama Boki Taiba. Ia merupakan leluhur seluruh raja-raja di Kepulauan Raja Ampat. Lebih jauh lagi, menurut laporan seorang misionaris bernama Marcos Prancunda, pada 1561 di Papua terdapat Kerajaan-kerajaan Miam, Missol, Ogneo (Waigeo), dan Noton.[848]

847. Lihat *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya, Indonesia: Studi Perbandingan*, halaman 201.
848. Lihat *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya, Indonesia: Studi Perbandingan,* halaman 196.

Para raja di Kepulauan Raja Ampat bergelar *fun* atau *kalana* dan dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh suatu dewan adat di bawah pimpinan seorang kepala adat. Masing-masing *gelef* (marga) memiliki wakilnya dalam dewan tersebut. Raja memiliki pula wakilnya dengan tugas meneruskan perintahnya kepada rakyat di kawasan-kawasan yang jauh letaknya. Setiap marga mempunyai kepala adatnya masing-masing. Sebagai contoh, marga Mentawai kepala adatnya bergelar *jojau*, marga Umalelen kepala adatnya bergelar *domlaha* atau *gimalaha*, marga Gemor kepala adatnya bergelar *sawohit*, marga Ulla dengan kepala adatnya yang bergelar *sadaha*, dan marga Umpeles dengan kepala adatnya yang bergelar *mahimo*.

a. SALAWATI

Pusat pemerintahan Salawati berada di Samate, Pulau Salawati bagian utara, yang kini meliputi Kecamatan Salawati Utara, Sorong bagian utara, Makbon, Moraid, dan Sausapor. Raja pertama Salawati adalah Fun Malaban yang berasal dari klan Arfan. Berdasarkan *Regeerings-Almanak*, Salawati pernah diperintah oleh Raja Abdul Kasim (1873–1890) yang menerima pengesahan dari pemerintah kolonial pada 4 Agustus 1873. Ia digantikan oleh Muhammad Amin (1890–1918) yang menerima pengukuhan pada September 1900. Raja-raja berikutnya yang memerintah di Salawati adalah Baharuddin Arfan (1918–1935) dan Abu'l Kasim Arfan (1935–?).

b. SAILOLOF

Kerajaan Sailolof berpusat di Sailolof, Pulau Salawati bagian selatan. Pendirinya adalah Fun Mo yang berasal dari klan Mayalibit. Daerah kekuasaan Sailolof di Semenanjung Kepala Burung membentang dari Pulau Katimin di utara, memanjang melalui Selat Sele, daerah Seget hingga Gisim, dan Kalabra di selatan. Di Pulau Salawati, kerajaan itu menguasai sebelah selatan Kampung Walyam yang terletak di timur Salawati dan sebelah selatan Kampung Kalwal di barat Salawati.

c. MISOOL LILINTA & WAIGAMA

Kerajaan Misool memiliki pusat pemerintahan yang berada di Lilinta, Pulau Misool. Pendiri kerajaan ini adalah Fun Bis.[849] Keturunan Fun Bis lalu terpecah menjadi dua klan, yakni Umkabu dan Soltip. Kedudukan raja dipegang oleh klan

849. Lihat *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya, Indonesia: Studi Perbandingan*, halaman 206.

Umkabu yang berkedudukan di Lilinta dengan raja pertamanya Fun Madero. Sementara itu, klan Soltip memegang jabatan pembantu bergelar *kapitan laut* dan berkedudukan di Fafanlap. Ibu kota Misool kemudian dipindahkan ke Sel Peleket yang terletak di sebelah timurnya. Rajanya yang bernama Abdul Majid (dalam *Regeerings-Almanak* dieja Abdul Madjied, memerintah pada1872–1904) menerima akta pengukuhan dari pemerintah Hindia Belanda pada 21 Juli 1887. Ia digantikan oleh Usman (1904–1945) yang disahkan oleh pemerintah kolonial pada 18 Juli 1905.

Selain itu, di Misool masih ada kerajaan lain yang berpusat di Waigama. Rajanya merupakan keturunan Tidore bernama Tuimadahe. Sebelumnya, kawasan itu dikuasai oleh para *jaja* (tuan tanah). Karena hubungan yang baik antara Tuimadahe dengan para *jaja*, akhirnya terjadi persatuan keluarga dan keturunan mereka disebut klan Tafalas. *Regeerings-Almanak* mencatat bahwa Raja Waigama bernama Abdul Rahman (1872–1891) menerima pengesahan dari pemerintah Hindia Belanda pada 11 Juni 1891. Ia digantikan oleh Hassan (1891–1916) yang dikukuhkan pada Oktober 1900. Pengganti Hassan adalah Samsuddin Tafalas (1916–1953)

d. WAIGEO

Kerajaan Waigeo pusat pemerintahannya terletak di Wewayai, Pulau Waigeo. Raja pertamanya adalah Fun Giwar. Menurut catatan *Regeerings-Almanak,* Raja Waigeo adalah Ganyum (1901–1918).

II. Kerajaan-kerajaan di Semenanjung Onin dan Kaimana

Kerajaan-kerajaan yang berada di Semenanjung Onin dan Kaimana disebut pula sebagai *petuanan*. Di kawasan ini terdapat Petuanan Fatagar, Rumbati, Ati-Ati, Namatota, Komisi, Patippi, Sekar, Wertuar, Ugar, dan Arguni. Berbagai *petuanan* ini memiliki bahasa beserta adat-istiadatnya sendiri-sendiri, yang meliputi sistem marga, upacara perkawinan, sistem kebapakan, pengangkatan anak, pengaturan harta warisan, hak ulayat, upacara penobatan raja, dan lain sebagainya.

a. ARGUNI

Menurut catatan pemerintah kolonial tertanggal 1 Januari 1932, Raja Arguni yang menerima gaji dari pemerintah kolonial Belanda bernama Irit.[850]

850. Lihat *Singgirei Rumagesan: Pejuang Integrasi Papua*, halaman 30, yang diambil dari ANRI, *Nota Omtrent het Inlandsch Hoofden Bestuur in de Onderafdeeling West Nieuw, Afdeeling West Nieuw Guinea, Gouv. Nieuw Guinea*, A. L. Vink, Reel No. 38, MvO Serie 13, hal.1.

b. ATI-ATI

Raja-raja yang memerintah Ati-Ati adalah Mampati Bauw (± 1850), Wainesin (± 1860), Yusuf K. (± 1890–1897), Haji Haruna (1899–1932), dan Ali (1942–1953). *Regeerings-Almanak* mencatat bahwa Haji Haruna (dieja Haroena) disahkan kedudukannya sebagai penguasa Ati-Ati pada April 1899. Sementara itu, berdasarkan catatan pemerintah kolonial tertanggal 1 Januari 1932, Raja Ati-Ati yang menerima gaji dari pemerintah kolonial bernama Maroena,[851] yang tampaknya adalah Haji Haruna pada *Regeerings-Almanak*.

c. FATAGAR

Raja pertama Fatagar adalah Tewar yang memerintah sekitar 1724. Pusat pemerintahannya berada di Tubirseram, yang sebelumnya berada di Rumbati (daerah Was). Agama Islam masuk ke Fatagar sebelum pemerintahan Tewar pada kurang lebih abad 16. Raja-raja Fatagar yang berkuasa berikutnya adalah Nawai (± 1730–1750), Nasurai (± 1750–1780), Naraitat (± 1780–1810), Parar (± 1810–1850), Kanumbas (± 1850–1870), Kurkur (± 1870–1878), Mafa (1899–1942), Kamaruddin (1942–1943), dan Ahmad Uswanas (1943–). Berdasarkan catatan *Regeerings-Almanak*, Raja Mafa menerima akta pengukuhan dari pemerintah kolonial pada April 1899.

d. KOMISI (AITURAUW atau SRAN KAIMANA atau UMISI)

Cikal bakal Kerajaan Komisi adalah kerajaan Islam yang berdiri di Pulau Adi pada kurang lebih abad 15[852] bernama Eraam Moon. Nama ini diambil dari bahasa Adijaya yang berarti 'Tanah Haram.' Leluhur raja-raja Aiturauw sendiri berasal dari kawasan Pegunungan Mbaham, Tri Abuan Wanas, yang selanjutnya berdiam di Gunung Baik, Semenanjung Kumawa (belakangan dikenal pula sebagai kawasan Patimunin).[853] Pemukanya, Ade Aria Way, menerima agama Islam yang disiarkan Syarif Muaz. Ulama ini digelari pula Syekh Jubah Biru. Setelah menganut agama Islam, Ade Aria Way berganti nama menjadi Samay. Tetapi silsilah yang terdapat dalam *Renaissance Nusantara: Edisi Raja Sran Kaimana VIII*, halaman 5, mencantumkan bahwa Way

851. Lihat *Singgirei Rumagesan: Pejuang Integrasi Papua*, halaman 30, yang diambil dari ANRI, *Nota Omtrent het Inlandsch Hoofden Bestuur in de Onderafdeeling West Nieuw, Afdeeling West Nieuw Guinea, Gouv. Nieuw Guinea*, A. L. Vink, Reel No. 38, MvO Serie 13, hal.1.
852. Lihat *Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua*, halaman 92.
853. Lihat *Renaissance Nusantara: Edisi Raja Sran Kaimana VIII*, halaman 12.

merupakan putra Alam, ayah Samay. Dengan demikian, menurut sumber tersebut Samay tidaklah sama dengan Way.

Way memiliki putra yang bernama Imuli dan Imaga. Imaga menyatakan dirinya sebagai Raja Patimunin serta menamakan negerinya Sran. Ia dikenal sebagai pendiri dinasti Sran Adi. Sementara itu, Imuli, kakaknya, mendirikan kerajaan yang beribu kota di Gar Ati Unin serta menamakan dirinya Raja Baham. Basir Onin, putra Imaga, memindahkan pusat kekuasaannya ke Pulau Adi, dan setelah lanjut usia, ia mengangkat putranya, Woran, sebagai raja berikutnya. Ibu kota kerajaan saat itu terletak di Borombouw.

Woran memerintah cukup lama. Konon ia pernah menerima Patih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit di istana Borombouw dengan upacara kebesaran. Sebelumnya, ia sempat mengangkat Wau'a sebagai putra mahkota, namun meninggal sebelum sempat dinobatkan sebagai raja. Oleh karenanya, yang mewarisi singgasana berikutnya adalah putranya yang lain, Nduvin. Semasa pemerintahannya, ibu kota kerajaan kembali dipindahkan ke E'man, yang kemudian dikenal sebagai Kaimana. Gelar Nduvin adalah Rat Umis Aiturauw dan dikenal pula sebagai *raja komisi*. Nduvin dikenal sebagai raja yang sakti dan konon dapat menghilang secara gaib di Selat Nautillus antara Semenanjung Kumawa dan Pulau Adi.

Penggantinya adalah putranya, Nawaratu atau Naro'E (1898–1923). Raja ke-5 dinasti Sran ini memperluas kerajaannya ke penjuru barat dan timur melalui ikatan perkawinan. Putrinya bernama Koviai Bata dinikahkan dengan Lakatei, yang kemudian menjadi Raja Wertuwar. Sekar Bata, putrinya yang lain, dinikahkan dengan Lamora, Raja Namatota. Naro'e memiliki pasukan tangguh yang disebut Sabakor. Putra-putranya bernama Iwawusa dan Achmad.[854] Meskipun demikian, pada *Renaissance Nusantara: Edisi Raja Sran Kaimana VIII*, halaman 4, disebutkan bahwa Iwawusa merupakan nama lain Naro'E. *Regeerings-Almanak* mencatat bahwa yang menjadi *raja komisi* pada akhir abad 19 dan awal abad 20 adalah Wawusa (dieja Wawoesa). Tampaknya, raja ini dapat disamakan dengan Iwawusa. Ia menikahkan putrinya dengan pangeran Kerajaan Fer di Langgiar (Nuhu Yuut). Raja ini tersohor pula sebagai panglima perang yang tanggung dan ditakuti di kawasan Arafura.

Raja berikutnya adalah Achmad Aiturauw (1923–1966), adik Iwawusa. Gelarnya saat dinobatkan adalah Ran Sran Rat Eman Umisi VI. Ia merupakan *raja komisi*

854. Ibid. Halaman 12.

yang memperoleh banyak penghargaan dari para raja di Jawa, Maluku, serta Eropa. Bintang penghargaan yang Achmad Aiturauw peroleh berjumlah enam sehingga ia dikenal pula sebagai Raja Bintang. Salah satu penghargaan itu adalah Bintang Oranje van Nassau yang ia peroleh pada 1930. Putra Mahkota Muhammad Achmad yang seharusnya diangkat sebagai raja pada 1966 menggantikan Achmad Aiturauw tidak bersedia dinobatkan dan menyerahkan kedudukannya kepada adiknya, Muhammad Rais (1966–1980). Pangeran Muhammad Achmad sendiri merupakan pejuang yang gigih mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ia turun tangan berjuang melawan Belanda antara 1945–1946 dan memimpin *long march* Kaimana-Bobo-Wondama-Serui-Biak.

Setelah melalui perjuangan panjang, Irian Barat kembali ke pangkuan ibu pertiwi. UNTEA (*United Nations Temporary Executive Authority*) mewakili PBB melakukan serah terima Irian Barat kepada Raja Achmad Aiturauw. Dengan demikian, resmilah Sang Saka Merah Putih berkibar di penghujung timur Nusantara tersebut. Kini, yang menjabat sebagai *raja komisi* adalah Abdul Hakim Achmad Aiturauw, putra Pangeran Muhammad Achmad.

e. NAMATOTA

Raja Namatota yang tercatat dalam *Regeerings-Almanak* adalah Muhammad Tahir. Berdasarkan catatan pemerintah kolonial Belanda tertanggal 1 Januari 1932, disebutkan bahwa Raja Namatota yang menerima gaji dari pemerintah kolonial Belanda bernama Mooi Boeserau.[855]

f. PATIPPI

Berdasarkan catatan *Regeerings-Almanak*, Patippi pernah diperintah oleh Raja Abdul Rahim. Selanjutnya, Raja Achmad memerintah Patippi yang dikukuhkan pada Mei 1903.

855. Lihat *Singgirei Rumagesan: Pejuang Integrasi Papua*, halaman 30, yang diambil dari ANRI, *Nota Omtrent het Inlandsch Hoofden Bestuur in de Onderafdeeling West Nieuw, Afdeeling West Nieuw Guinea, Gouv. Nieuw Guinea*, A. L. Vink, Reel No. 38, MvO Serie 13, hal.1.

g. RUMBATI

Raja Rumbati pertama, menurut legenda, adalah Sakidan Bauw, yang diperkirakan memerintah pada 1678–1700. Raja-raja Rumbati berikutnya[856] adalah Tela Bauw (± 1700–1720), Manimomoa Bauw (± 1720–1750), Gefasani Bauw (± 1750–1770), Natiasa Bauw (± 1770–1780), Ritubuan Bauw (± 1780–1800), Anakoda Bauw (± 1800–1820), Patmaguri Bauw (± 1820–1840), Mampati Bauw (± 1840–1850), Nawarisa (± 1850–1870), Tajam (± 1870–1875), Ismail (± 1875–1880), Abdul Jalil (± 1880), Samali (1880–1902), Muhammad (1902–1945), dan Ibrahim (1946–1962). *Regeerings-Almanak* mencatat pula mengenai Raja Abdul Jalil. Masih menurut *Regerings-Almanak*, Raja Muhammad disahkan kedudukannya oleh pemerintah kolonial pada 19 Desember 1902.

Sementara itu, sumber berupa catatan pemerintah kolonial tertanggal 1 Januari 1932 menyebutkan bahwa Raja Rumbati yang menerima gaji dari pemerintah kolonial bernama Aboebakar.[857] Sebelumnya, Rumbati diperintah oleh wakil raja bernama Mohamad Sedik karena raja yang berhak, Aboebakar, masih kanak-kanak. Ketika itu, ia menerima gaji sebesar fl50 dan masih ditambah lagi dengan tunjangan sebesar fl25 (disebut *uang pantai-pantai*) guna pendidikan Aboebakar. Mohamad Sedik mangkat pada 1914 dan Aboebakar diangkat sebagai raja, namun kini tunjangan berupa *uang pantai-pantai* itu tidak lagi dibayarkan sehingga ia hanya menerima fl50 saja.[858]

h. SEKAR

Pada kurang lebih 1850, Sekar diperintah oleh Raja Weker. Menurut *Regeerings-Almanak*, Sekar selanjutnya diperintah oleh raja bernama Kapita (Pandai, memerintah pada 1880–1899), yang menerima pengesahan dari pemerintah kolonial pada 14 Juni 1896. Raja Sekar berikutnya berdasarkan *Regeerings-Almanak* adalah Lakate yang disahkan kedudukannya pada Maret 1899. Para penguasa Sekar berikutnya adalah Pipi (1911–1915), Singgaraja (1915–1936, pemerintahan pertama), Abdul Karim

856. Lihat juga *http://pl.wikipedia.org/wiki/w%c5%82adcy_Papui* (diunduh tanggal 10 Maret 2010). Dalam daftar tersebut raja yang menggantikan Abdul Jalil bernama Abu Bakar. Tetapi karena *Regeerings-Almanak* mencantumkan nama Raja Muhammad maka yang ditampilkan di sini adalah nama menurut sumber tersebut tersebut.

857. Lihat *Singgirei Rumagesan: Pejuang Integrasi Papua*, halaman 30, yang diambil dari ANRI, *Nota Omtrent het Inlandsch Hoofden Bestuur in de Onderafdeeling West Nieuw, Afdeeling West Nieuw Guinea, Gouv. Nieuw Guinea*, A. L. Vink, Reel No. 38, MvO Serie 13, hal.1.

858. Lihat *Singgirei Rumagesan: Pejuang Integrasi Papua*, halaman 29.

Baraweri (1936–1942), Singgaraja (1942–1945, pemerintahan kedua), dan Abdul Karim (1945–1946). Sumber lainnya menyebutkan bahwa Pandai atau Congan menerima gelar raja dari Sultan Tidore. Ia secara tidak resmi disebut sebagai *raja komisi* oleh masyarakat, seperti ayahnya, Weker (Paduri). Sewaktu Pandai mangkat, putra tunggalnya, Abubakar, masih kanak-kanak, sedangkan ia tidak mempunyai saudara.[859] Oleh karenanya, guna mengurus pemerintahan di Sekar, diangkatlah Raja Muda Wertuar bernama Lakate, putra tiri Pandai. Lakate pada akhirnya diangkat sebagai Raja Wertuar ke-7. Sewaktu Pandai masih memerintah, seorang tokoh bernama Pipi atau Saban secara tidak resmi diangkat sebagai Raja Muda Sekar. Ia merupakan putra Dimin, anak emas Weker.[860] Pipi dinobatkan sebagai Raja Sekar pada 1911. Putranya, Machmud Singgirei Rumagesan, diangkat sebagai Raja Muda Sekar. Sementara itu, putrinya, Werioem, menikah dengan Lakate, Raja Wertuar.

Yang Mulia Ratu Rustuty Rumagesan, Silatnas Raja/ Sultan Nusantara, Bandung 25–26 Juni 2011
(foto koleksi pribadi)

859. Lihat *Singgirei Rumagesan: Pejuang Integrasi Papua*, halaman 7–8.
860. Lihat *Singgirei Rumagesan: Pejuang Integrasi Papua*, halaman 8.

Pada 1915, Machmud Singgirei Rumagesan diangkat sebagai Raja Sekar. Tampaknya, yang dimaksud sebagai Singgaraja dalam daftar di atas merupakan Machmud Singgirei Rumagesan. Raja Machmud Singgirei Rumagesan bergelar pula Raja Al Alam Ugar Sekar. Ia lahir pada 27 Desember 1885.[861] ia dilantik sebagai pengganti ayahnya saat berusia 21 tahun.[862] ia merupakan penguasa yang berjuang keras melindungi rakyatnya. Sewaktu Maskapai Collijn mengadakan kegiatan di Kokas, Raja Machmud Singgirei Rumagesan diserahi pembayaran upah rakyatnya yang bekerja di kawasan tersebut karena ia telah banyak berjasa. Meskipun demikian, *bestuur assistent* merasa iri dan melaporkannya kepada Kontrolir G. Terwijk, yang lalu menanyai Raja Machmud. Dengan berani ia menjawab bahwa itu adalah uang milik rakyatnya sehingga akhirnya terjadi pertengkaran dengan kontrolir. Rakyat membela rajanya dan berupaya membunuh G. Terwijk. Pemerintah kolonial yang berkedudukan di Fak-fak lantas mengirimkan pasukannya guna menangkap para pemberontak dan Raja Machmud Singgirei Rumagesan. Ia dan 73 orang lainnya beserta lima kepala kampung ditangkap. Raja dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, namun dibebaskan sebelum akhir masa penahanannya karena berkirim surat kepada M. Husni Thamrin, yang ketika itu menjabat sebagai anggota *Volksraad*.

Semasa pendudukan Jepang, Raja Machmud Singgirei Rumagesan digelari *minanu tokyo* dan dipercaya memimpin Irian. Sewaktu runtuhnya penjajahan Jepang, ia diminta mengibarkan kembali bendera Belanda, namun ditolaknya dengan tegas. Pertempuran melawan penjajahan Belanda kembali membara. Meski ia ditahan oleh pemerintah kolonial, cita-cita perjuangannya tidaklah pernah putus.

i. UGAR

Raja Ugar pertama adalah Rabana yang diperkirakan hidup pada kurang lebih abad 16. Semasa pemerintahannya, masuklah agama Islam ke Ugar dan makamnya beserta para imam pengikutnya telah memperlihatkan karakteristik Islam. Keturunan Rabana yang menjadi Raja Ugar berikutnya adalah Wahwa, Dulin Ugar (sekitar abad 18), Hiriet Tetery, dan Moi Damar Ugar (Maidama). Pada 5 November 1929, Sultan Tidore menyerahkan surat keputusan pengangkatan Moi Damar Ugar sebagai Kepala Kampung Ugar dengan gelar *kapitan*.

861. Lihat *Singgirei Rumagesan: Pejuang Integrasi Papua*, halaman 1.
862. Lihat *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Irian Jaya*, halaman 42.

j. WERTUAR

Raja Wertuar pertama adalah Vijao yang diyakini penduduk berasal dari cahaya. Raja-raja yang memerintah selanjutnya adalah Ukir dan Winey. Raja Ukir menikah dengan Boki Kopiyai dari Namatota. Sultan Muhammad Tahir dari Tidore pernah melantik Lakate (Lakatey) sebagai Raja Wertuar ke-7. Upacara penobatan yang dilangsungkan di Kampung Karek, Sekar Lama, ini dihadiri pula oleh Raja Abdul Jalil dari Rumbati dan Raja Abdul Majid dari Misool. Lakatey tercatat pernah membangun masjid kerajaan yang pertama di Kampung Patimburak pada 1870.[863]

III. Kerajaan-kerajaan Lain di Papua

Di pantai utara Papua terdapat pula kerajaan bernama Mapia, yang menurut *Regeerings-Almanak* rajanya bernama Marwedi.

863. Lihat *Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua*, halaman 90.

Kerajaan-Kerajaan di Kepulauan Maluku (Abad ke–17–19)

Ivan Taniputera
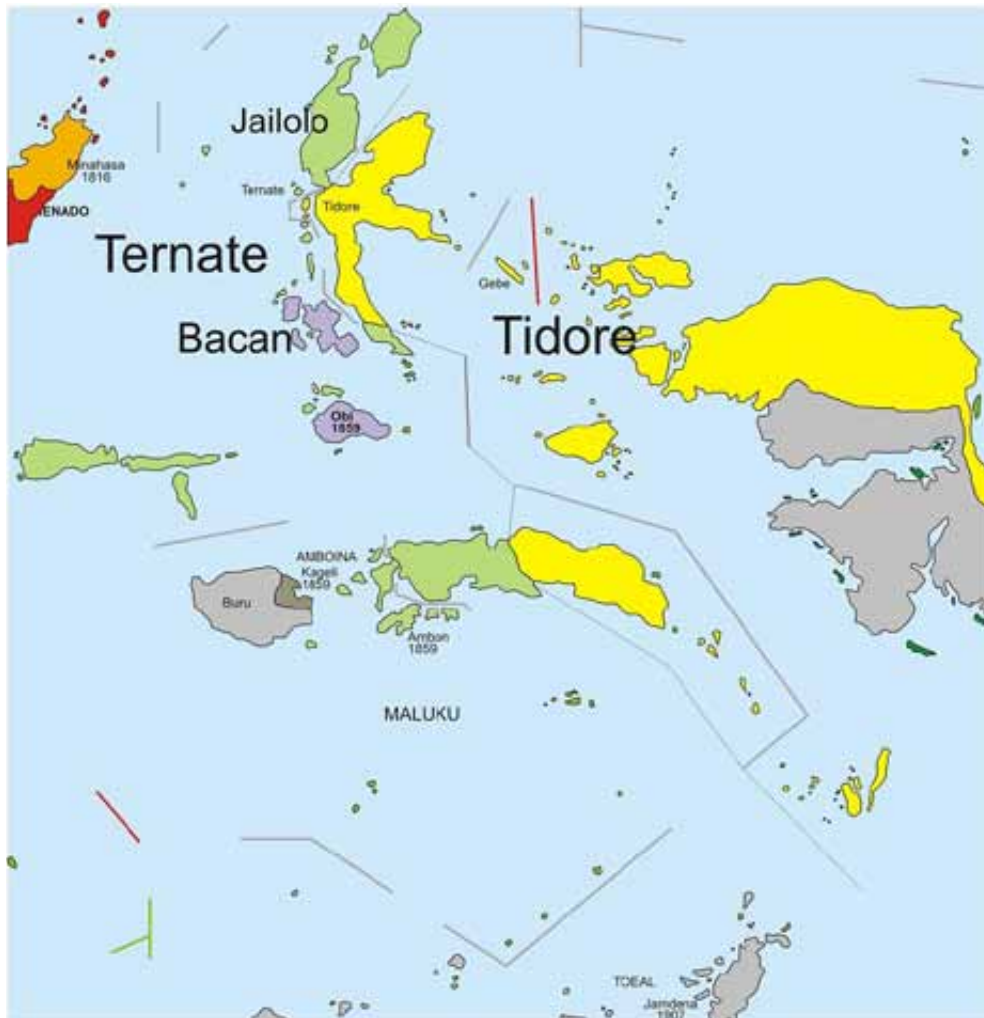
Kerajaan-Kerajaan di Papua
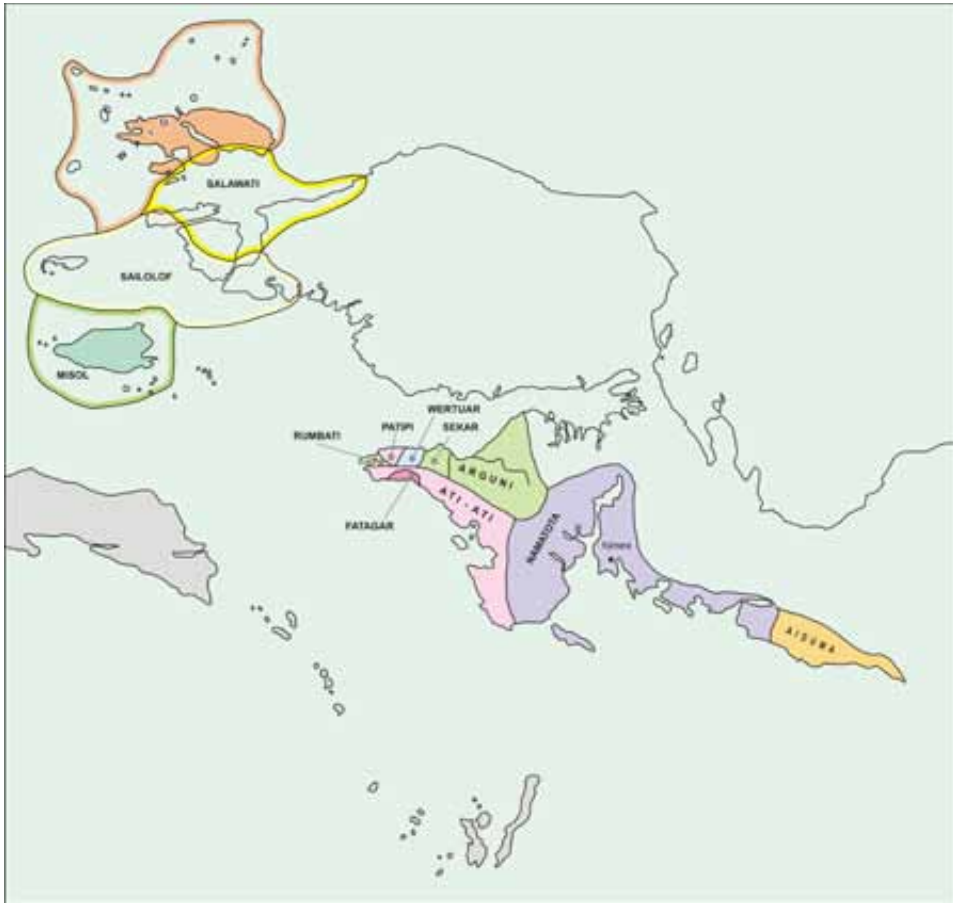
Digambar ulang dari *"Be my Witness to the Ends of the Earth!"*, halaman 65.

GLOSARI

Amaf	=	sebutan bagi jabatan yang setingkat kepala desa (*temukung*) di Timor.
Arumpone	=	gelar bagi raja di Bone, selain *mangkau'e*
Bawar	=	pusaka yang dianugerahkan Sultan Aceh kepada raja-raja bawahannya.
Besluit	=	surat keputusan pemerintah kolonial Belanda.
Blah	=	suku, puak, atau keturunan di Tanah Gayo, Aceh.
Bobato	=	menteri atau anggota dewan kerajaan di Maluku.
Boki	=	sebutan bagi putri raja atau bangsawan wanita di Maluku dan daerah pengaruhnya.
Eenheidstaat	=	Negara Kesatuan (Belanda)
Fetnai	=	sebutan bagi putri raja di Timor.
Garwa padmi	=	permaisuri atau istri resmi raja-raja di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Jannang	=	terkadang juga dieja *jennang*. Jabatan setingkat bupati bagi daerah-daerah bawahan atau taklukkan Gowa ataupun kerajaan-kerajaan lain yang berada di bawah pengaruhnya.
Jogugu	=	sebutan bagi perdana menteri di Maluku (Ternate, Tidore, dll.) beserta daerah-daerah pengaruhnya.
Jumenengan	=	upacara penobatan raja-raja di Jawa.
Kaicili (*kaicil*)	=	gelar bagi putra raja di Maluku.
Kemutar	=	daerah-daerah taklukan atau vasal Kerajaan Sumbawa.

Kenpetai = polisi rahasia Jepang yang terkenal kebiadabannya.

Kolano = gelar lama raja-raja di Maluku.

Meo = panglima perang di Timor.

Mokole = sebutan bagi raja atau penguasa (terutama di Sulawesi Tengah).

Naimnuke = sebutan bagi putra raja di Timor.

Nusak = sebutan bagi kerajaan di Pulau Rote.

Nyaicili = gelar bagi putri raja di Maluku.

Pangeran ratu = jabatan setingkat perdana menteri

Penyimbang = kepala adat di Lampung.

Petulai = satuan kemasyarakatan atau kesukuan di Bengkulu.

Riwabatang = wali sultan di Sumbawa.

Salahakan = gubernur di kerajaan-kerajaan Maluku

Sangaji = gelar bagi raja di Kepulauan Maluku dan daerah pengaruhnya (seperti Solor dan Manggarai). Namun, gelar ini juga mencerminkan pengaruh Jawa.

Sonaf = sebutan bagi istana raja (terutama di Pulau Timor).

Suco = gelar bagi raja atau kepala swapraja semasa penjajahan Jepang. Terkadang juga dieja *syuco*.

Sunan = gelar bagi raja-raja Mataram setelah Sultan Agung dan raja-raja Surakarta.

Syuco = lihat *suco*.

Wano kalada = desa inti atau induk di Pulau Sumba.

Weti = sebutan bagi upeti di Buton.

Zelfbestuurder = gelar bagi raja atau kepala swapraja semasa pemerintahan kolonial Belanda.

Tambahan 1
KRONOLOGI RAJA-RAJA NUSANTARA PASCA KERUNTUHAN MAJAPAHIT

RAJA-RAJA DI BALI

BADUNG		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Kyai Anglurah Jambe Merik	
2	Kyai Anglurah Jambe Ketewel	
3	Kyai Anglurah Jambe Tangkeban	
4	Kyai Anglurah Jambe Aji	
5	Kyai Anglurah Jambe Ksatrya	

PEMECUTAN			DENPASAR			KESIMAN		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**		**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**		**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Kyai Jambe Pule (Kyai Anglurah Pemecutan I)		1	I Gusti Ngurah Made Pemecutan (Raja Denpasar I)	1779-1813	1	I Gusti Gede Ngurah Kesiman atau Kyai Agung Gede Kesiman	1817-1865
2	Kyai Anglurah Ketut Pemedilan atau Kyai Macan Gading (Kyai Anglurah Pemecutan II)		2	I Gusti Gede Ngurah Pemecutan (Raja Denpasar II)	1813-1817	2	I Gusti Ngurah Ketut	1865-1875
3	Kyai Ngurah Sakti Pemecutan (Kyai Anglurah Pemecutan III)		3	I Gusti Made Ngurah Pemecutan (Raja Denpasar III)	1817-1829	3	I Gusti Ngurah Mayun	1890-1906

4	Kyai Agung Ngurah Pemecutan (Kyai Anglurah Pemecutan IV)		4	I Gusti Gede Ngurah Pemecutan (Raja Denpasar IV)	1829-1848	4	I Gusti Ngurah Made Kesiman	
5	Kyai Agung Pemecutan Bija atau Shang Arya Mecutan Bhija (Kyai Anglurah Pemecutan V)		5	I Gusti Alit Ngurah Pemecutan (Raja Denpasar V)	1848-1902	5	I Gusti Ngurah Agung Kusuma Yuda	
6	Arya Ngurah Gede Raka atau Kyai Agung Gede Raka atau Kyai Ngurah Gede Raka Pemecutan (Kyai Anglurah Pemecutan VI)	1770-1810	6	I Gusti Ngurah Made Agung (Raja Denpasar VI)	1902-1906	6	I Gusti Ngurah Agung Kusumawardana	
7	Kyai Ngurah Made Pemecutan atau Shang Adi Hyang ing Kurbhasana atau Mur ring Gedong (Kyai Anglurah Pemecutan VII)	1810-1830	7	Cokorda Alit Ngurah (Raja Denpasar VII)	1929-1947			
8	Kyai Agung Gede Oka (Anglurah Pemecutan VIII)	1830-1854	8	Cokorda Ngurah Agung atau Cokorda Denpasar (Raja Denpasar VIII)	Wafat 5 Juli 1988			

9	Kyai Agung Lanang atau I Gusti Ngurah Agung Pemecutan atau Kyai Agung Ngurah Agung (Kyai Anglurah Pemecutan IX)	1854-1906	9	Ida Cokorda Ngurah Jambe Pemecutan (Raja Denpasar IX)	2005-			
10	I Gusti Ngurah Gede Pemecutan atau Cokorda Ngurah Gede Pemecutan (Kyai Anglurah Pemecutan X)	1927-1986						
11	Anak Agung Ngurah Manik Parasara (Ida Cokorda Pemecutan XI)	1989-						

BANGLI		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	I Dewa Gede Tangkeban II	± 1815 – 1833
2	Dewa Gede Tangkeban III (Dewa Gede Besakih)	1833 – 1875
3	Dewa Gede Oka	1875 – 1880
4	Dewa Gede Ngurah	1881 – 1892
5	Dewa Gede Cokorda (Dewa Gede Anom Oka)	1894 – 1911
6	Dewa Gede Rai	1913 – 1925
7	Dewa Gede Taman	1925 – 1930
8	Anak Agung Ketut Ngurah	1931 – 1950

BULELENG		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Ki Barak Panji (I Gusti Ngurah Panji)	
2	I Gusti Ngurah Panji Gede dan I Gusti Ngurah Panji Made	
3	I Gusti Ngurah Panji Bali	
4	I Gusti Ngurah Panji dan I Gusti Ngurah Jelantik	
5	I Gusti Ngurah Jelantik dan I Gusti Gede Karangasem	
6	I Gusti Gede Karangasem	1806 – 1818

7	I Gusti Pahang	1818 – 1823
8	I Gusti Ngurah Made Karangasem Sori	1823 – 1825
9	Ngurah Made Karangasem	1825 – 1849
10	Gusti Made Rahi	1849 – 1853
11	Gusti Ngurah Ketut Jelantik	1854 – 1873
12	Anak Agung Putu Jelantik	1929 – 1944
13	Anak Agung Nyoman Panji Tisna	1944 – 1948
14	Anak Agung Ngurah Ketut Jelantik	1948 – 1950

GIANYAR[864]		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Dewa Manggis Kuning (Dewa Manggis I)	
2	Dewa Manggis Pahang (Dewa Manggis II)	
3	Dewa Manggis Bengkel (Dewa Manggis III)	
4	Dewa Manggis Jorog (Dewa Manggis IV)	1771 – 1814
5	Dewa Manggis di Madia (Dewa Manggis V)	1814 – 1839
6	Dewa Manggis di Rangki (Dewa Manggis VI)	1839 – 1847
7	Dewa Manggis Mantuk di Satria (Dewa Manggis VII)	1847 – 1892
8	Dewa Pahang	1893 – 1896
9	Dewa Gde Raka (Dewa Manggis VIII)	1896 – 1913
10	Dewa Ngurah Agung (Ide Anak Agung Ngurah Agung)	1913 – 1943
11	Ide Anak Agung Gde Agung	1943 – 1946
12	Anak Agung Gde Oka	1946 – 1950

JEMBRANA		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Gusti Agung Basangtamiang	
2	Gusti Gede Giri	± 1700
3	Gusti Ngurah Tapa dan Gusti Made Yasa	
4	Gusti Gede Andul	
5	Gusti Ngurah Agung Jembrana (Gusti Alit Takmung)	
6	Gusti Gede Jembrana	
7	Gusti Putu Andul	± 1797 – 1809
8	Gusti Rahi	± 1805
9	Kapitan Patimi	± 1805 – 1808
10	Gusti Putu Sloka	±1809
11	Gusti Wayan Pasekan dan Gusti Made Pasekan	± 1812 – 1814
12	Gusti Alit Mas dan Gusti Putu Dorot	± 1835 – 1840
13	Gusti Ngurah Made Penarungan	1840 – 1849
14	Gusti Putu Ngurah Sloka (Gusti Putu Ngurah Jembrana,	1849 – 1855
15	Gusti Ngurah Made Pasekan	1855 – 1866

864. Sumber utama: *Kenangan Masa Lampau: Zaman Kolonial Hindia Belanda dan Zaman Pendudukan Jepang di Bali.*

16	Anak Agung Made Rai	1866 – 1882
17	Anak Agung Bagus Negara	1929 – 1950
Menurut sumber lainnya:[865]		
1	Gusti Ngurah Agung Jembrana (Anak Agung Ngurah Jembrana)	1705-1755
2	Anak Agung Gede Jembrana	1755-1790
3	Agung Putu Agung	1790-1818
4	Anak Agung Gde Seloka	1818-1839
5	Anak Agung Putu Ngurah	1839-1867
6	Anak Agung Made Rai	1867-1882

KARANGASEM[866]		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	I Dewa Karangamla	
Dinasti Batanjeruk		
2	I Gusti Oka (Pangeran Oka)	±1588-1615[867]
3	I Gusti Nyoman Karang	±1615-1650[868]
4	I Gusti Anglurah Ketut Karang	1660/ 1661 – 1680[869]
5	I Gusti Anglurah Wayan Karangasem, I Gusti Anglurah Nengah Karangasem, dan I Gusti Anglurah Ketut Karangasem	1680 – 1705
6	Anglurah Made Karang	±1705-1755[870]
7	Gusti Wayahan Karangasem[871]	
8	Anglurah Made Karangasem Sakti[872] (Bagawan Atapa Rare)	
9	I Gusti Made Karangasem (Anglurah Made Karangasem), I Gusti Nyoman Karangasem, I Gusti Ketut Karangasem	1730/1750 – 1775[873]
10	Gusti Gede Ngurah Karangasem	1775 – 1806[874]
11	I Gusti Lanang Paguyangan (I Gusti Gede Ngurah Lanang Karangasem)	1806 – 1827
12	Dewa Pahang (Gusti Gede Ngurah Pahang)	1822-1823
13	Gusti Bagus Karang	1827 – 1838[875]
14	Gusti Gede Ngurah Karangasem	1838 – 1849

865. Lihat http://sejarah-puri-pemecutan.blogspot.com/2011/02/kerajaan-jembrana.html, diunduh tanggal 12 Desember 2011.
866. Disusun dari berbagai sumber, seperti *Bali in the 19th Century, Bali Profile, Keris di Lombok*, dan lain-lain.
867. Menurut *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 92
868. Menurut *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 92
869. Menurut *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 92, memerintah ±1650-1680.
870. Menurut *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 92.
871. Tidak ada dalam daftar raja Karangasem menurut *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 92
872. Tidak ada dalam daftar raja Karangasem menurut *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 92
873. Menurut *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 92, memerintah ±1755-1801.
874. Menurut *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 92, memerintah 1801-1806.
875. Menurut *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 92, I Gusti Bagus Karang digantikan oleh I Gusti Gede Cotong (1838-1840), yang digantikan kembali oleh I Gusti Gede Karangasem (Dewata di Sesana, 1840-1849). I Gusti Anglurah Ketut Karangasem, raja Mataram Lombok, pernah memerintah selama kurang lebih setahun (1849). Lalu memerintah I Gusti Gede Putu (1849-1893), I Gusti Gede Oka (1849-1890), dan I Gusti Gede Jelantik (1887-1896).

15	Gusti Made Jungutan	1849 – 1850
16	Anak Agung Gede Oka (Gusti Gede Oka)	1850 – 1890
	Anak Agung Gede Putu (Gusti Gede Putu)	1850 – 1893
17	Anak Agung Gusti Gede Jelantik	1890 – 1908[876]
18	Anak Agung Bagus Jelantik (Anak Agung Agung Anglurah Ketut Karangasem)	1908 – 1950
19	Anak Agung Gede Jelantik (Anak Agung Agung Ngurah Ketut Karangasem)	1950 – 1991

KLUNGKUNG		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Ida I Dewa Agung Jambe (Dewa Agung Jambe)	
2	Dewa Agung Gede (Surawirya)	± 1722 – 1736
3	Dewa Agung Made	1736 - ± 1760
4	Dewa Agung Sakti	± 1760 – 1790
5	Dewa Agung Putra I Kusamba	1790 – 1809
6	Dewa Agung Putra II (Dewa Agung Gede Putera) didampingi Dewa Agung Istri Kanya	± 1815 – 1850
7	Dewa Agung Putra III Bhatara Dalem	1851 – 1903
8	Dewa Agung Jambe II	1903 – 1908
9	Dewa Agung Oka Geg	1929 – 1950

TABANAN[877]		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Arya Kenceng	± 1334
2	Sri Magada Nata (Sri Megadhanata)	
3	Sirarya Ngurah Langwang (Prabu Singgasana)	
4	Prabhu Winalwan (Bhatara Mur Makules)	Pemerintahan pertama
5	Ki Gusti Made Pamedekan	1639-1641
	Prabhu Winalwan (Bhatara Mur Makules)	1641-1646 Pemerintahan kedua
6	Da Gusti Nisweng Penida	1646-1648
	Kyai Nengah Mal Kangin Kyai Made Dalang	1648-1650 1648-1649
7	Ki Gusti Alit Dauh (Sri Magadha Sakti)	1650-1725
8	Bhatara Lepas Pemade (Ratu Singgasana)	1725-1750
9	Sri Ngurah Sekar	1750-1800
10	Ki Gusti Ngurah Gede (Gusti Ngurah Agung)	1800-1838
11	Ki Gusti Ngurah Made Rai	1838-1842
12	Kyai Buruan	1842-1844
13	Ki Gusti Ngurah Rai	1844-1847
14	Ki Gusti Ngurah Ubung	1847-1851
15	Ki Gusti Ngurah Agung	1851-1868

876. Menurut *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, halaman 93, memerintah 1896-1908.
877. Sumber *Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng di Bali.*

16	Sirarya Ngurah Tabanan (Bathara Ngeluhur)	1868-1903
17	Ki Gusti Ngurah Rai Perang (Da Cokorda Rai Dangin)	1903-1906
Dikuasai Belanda setelah berlangsungnya peristiwa puputan		
18	I Gusti Ngurah Ketut	1929 – 1939
19	I Gusti Ngurah Gede (Cokorda Ngurah Gede)	1939 – 1950 (semenjak 1950 menjadi bupati pertama Tabanan)
20	I Gusti Ngurah Rupawan (Ida Cokorda Angluran Tabanan	2008-

RAJA-RAJA DI KALIMANTAN

Kalimantan Barat

BUNUT		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Abang Barita (Adi Sutri)	1815 – 1855
2	Abang Suria	1855 – 1859
3	Abang Utih	1859 – 1876
4	Abang Tella	1876 – 1884
5	Abang Tanah	1884 – 1909

JONGKONG		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Kiai Pati Uda	
2	Raden Nata	
3	Raden Abdul Arab	
4	Abang Unang (Pangeran Sulaiman Suriya Negara)	1864 – 1886
5	Abang Alam (Pangeran Muda Gusti Alam)	1886 – 1917

KUBU		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Syarif Idrus	
2	Syarif Muhammad	1823 – 1839
3	Syarif Abdurrachman	1839 – 1841
4	Syarif Ismail	1841 – 1871
5	Syarif Hassan	1871 – 1900
6	Syarif Abbas	1900 – 1911
7	Syarif Zin	1911 – 1919
8	Syarif Saleh	1919 – 1949
9	Syarif Hassan	1949 – 1958

AMBAWANG		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Syarif Alwi bin Idrus	-1833
2	Syarif Khalid	1833-1837

LANDAK[878]		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
Pusat di Ningrat Batur (1292 – 1472)		
1	Sang Nata Pulang Pali I	
2	Sang Nata Pulang Pali II	
3	Sang Nata Pulang Pali III	
4	Sang Nata Pulang Pali IV	
5	Sang Nata Pulang Pali V	
6	Sang Nata Pulang Pali VI	
7	Sang Nata Pulang Pali VII	
Pusat di Mungguk Ayu (1472 – 1703)		
8	Raden Ismahayana (Raja Dipati Karang Tanjung Tua)	1472 – 1542
9	Raden Pati Karang atau Raja Adipati Karang Tanjung Muda	1542—1584
10	Raden Cili Pahang Tua atau Raja Adipati Karang Sari Tua	1584—1614
11	Raden Karang Tedung Tua atau Raja Adipati Karang Tedung Tua	1614—1644
12	Raden Cili Pahang Muda (Raja Adipati Karang Sari Muda)	1644—1653
13	Raden Karang Tedung Muda (Raja Adipati Karang Tedung Muda)	1679—1689 Wakil raja
14	Raden Mangku Tua (Raja Mangku Bumi Tua)	1679—1689 Wakil raja
15	Raden Kusuma Agung Tua	1689—1693
16	Raden Mangku Muda (Pangeran Mangku Bumi Muda)	1693—1703 Wakil raja
Pusat di Bandong (1703 – 1768)		
17	Raden Kusuma Agung Muda	1703—1709
18	Raden Purba Kusuma (Pangeran Purba Kusuma)	1709—1714 Wakil raja
19	Raden Nata Tua Pangeran Sanca Nata Kusuma Tua	1714—1764
20	Raden Anom Jaya Kusuma (Pangeran Anom Jaya Kusuma)	1764—1768
Pusat di Ngabang (1768 – sekarang)		
21	Raden Nata Muda Pangeran Sanca Nata Kusuma	1768—1798
22	Raden Bagus Nata Kusuma (Ratu Bagus Nata Kusuma)	1798—1802 Wakil raja
23	Gusti Husin (Gusti Husin Suta Wijaya)	1802—1807 Wakil raja
24	Panembahan Gusti Muhammad Aliuddin	1807—1833
25	Haji Gusti Ismail (Pangeran Mangkubumi Haji Gusti Ismail)	1833 – 1835 Wakil panembahan
26	Panembahan Gusti Mahmud Akamuddin	1835 – 1838

878. Sumber: melayuonline.com, diunduh tanggal 22 Juli 2010.

27	Ya Mochtar Unus (Pangeran Temenggung Kesuma)	1838 – 1843 Wakil panembahan
28	Gusti Muhammad Amaruddin Ratu Bagus Adi Muhammad Kusuma	1843 – 1868
29	Gusti Doha	1868 – 1872 Wakil panembahan
30	Gusti Abdulmajid Kusuma Adiningrat	1872 – 1875
31	Gusti Andut Muhammad Tabri (Pangeran Wira Nata Kusuma)	1875 – 1890 Wakil panembahan
32	Gusti Ahmad (Pangeran Mangkubumi Gusti Ahmad)	1890 – 1895 Wakil panembahan
33	Gusti Abdulazis Kusuma Akamuddin	1895 – 1899
34	Gusti Bujang Isman Tajuddin (Pangeran Mangkubumi Gusti Bujang)	1899 – 1922 Wakil panembahan
35	Gusti Abdul Hamid	1922 – 1943
36	Gusti Sotol	1943 – 1945 Wakil panembahan
37	Gusti Muhammad Appandi Ranie	1946 Wakil panembahan
38	Pangeran Ratu Haji Gusti Amiruddin Hamid	

MELIAU		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Pangeran Prabu Anom	
2	Pangeran Adimijaya	
3	Pangeran Suma Ningrat	
4	Pangeran Mangku Negara	? – 1819
5	Pangeran Adipati Mangku Negara	1819 - 1866
6	Pangeran Perdana Manti	1866 - 1869
7	Raden Mustapa (Panembahan Anum Paku Negara)	1869 – 1885
8	Abdul Salam (Panembahan Muda Paku Negara)	1885 – 1889

MEMPAWAH		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Patih Gumantar	abad ke-14
2	Panembahan Kodong	1610 – 1680
3	Panembahan Senggauk	1680 – 1740
4	Opu Daeng Menambun	1740 – 1766
5	Gusti Jamiril (Panembahan Adi Wijaya Kesuma)	1766 – 1790
6	Gusti Jati (Sultan Muhammad Zainal Abidin)	1820 – 1831
7	Gusti Amin (Panembahan Adinata Krama Umar Kamaruddin)	1831 – 1839
8	Gusti Mukmin (Panembahan Mukmin Nata Jaya Kusuma)	1839 – 1872
9	Gusti Makhmud (Panembahan Muda Mahmud Alauddin)	-
10	Gusti Usman (Panembahan Usman Mukmin Nata Jaya Kusuma)	-
11	Gusti Ibrahim (Panembahan Ibrahim Muhammad Syafiuddin)	1872 – 1887

12	Gusti Intan (Panembahan Anom Kesuma Yuda)	1887 – 1902
13	Gusti Muhammad Taufik (Panembahan Muhammad Taufik Accamuddin)	1902 – 1944

PIASA		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
	Jaka Lemana	
	Abang Suwara (Kiai Dipati Martapura)	
	Abang Nuh (Pangeran Osman Dirja Kesuma Negara)	1859 – 1896
	Abang Santuk	

PONTIANAK		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Syarif Abdurrahman Alkadrie	1771 – 1808
2	Syarif Kasim Alkadrie	1808 – 1819
3	Syarif Usman Alkadrie	1819 – 1855
4	Syarif Hamid Alkadrie	1855 – 1872
5	Syarif Yusuf Alkadrie	1872 – 1895
6	Syarif Muhammad Alkadrie	1895 – 1944
7	Syarif Thaha Alkadrie	1945
8	Syarif Hamid II Alkadrie	1945 – 1950

SAMBAS		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Muhammad Syafiuddin (Shafiuddin) I	1675 – 1685
2	Muhammad Tajuddin	1685 – 1708
3	Umar Akamuddin (Aqamaddin) I	1708 – 1732
4	Abu Bakar Kamaluddin	1732 – 1764
5	Umar Akamuddin (Aqamaddin) II	1764 – 1786 Pemerintahan pertama
6	Abu Bakar Tajuddin	1786 – 1793
5	Umar Akamuddin (Aqamaddin) II	1793 – 1802
7	Abu Bakar Tajuddin I (Pangeran Anom)	1802 – 1814
8	Muhammad Ali Syaifuddin I	1814 – 1828
9	Usman Kamaluddin	1828 – 1832
10	Umar Akamuddin (Aqamaddin) III	1832 – 1846
11	Abu Bakar Tajuddin II	1846 – 1854
12	Umar Kamaluddin	1854 – 1866
13	Muhammad Syafiuddin II	1866 – 1924
14	Muhammad Ali Syafiuddin II	1924 – 1926
15	Muhammad Mulia Ibrahim (Muhammad Ibrahim Shafiuddin)	1926 – 1944
Sultan Muhammad Mulia Ibrahim dibunuh oleh Jepang. Kesultanan Sambas berakhir.		

SANGGAU		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Dayang Mas	
2	Dayang Puasa (Nyai Sura)	
3	Abang Gani (Kiai Dipati Kusuma Busu Negara)	
4	Abang Basun (Pangeran Mangkubumi)	
5	Abang Bungsu (Sultan Muhammad Jamaluddin)	
6	Akhmad Kamaruddin	
7	Panembahan Ratu Surya Negara	
8	Abang Taberani (Pangeran Ratu Surya Negara)	
9	Muhammad Thahir I	
10	Usman Paku Negara	
11	Muhammad Ali Mangku Negara	1814 – 1825
12	Ayub Paku Negara	1825 – 1830
13	Adi Akhmad (Panembahan Akhmad Paku Negara)	1832 – 1875
14	Muhammad Thahir II	1875 – 1876
15	Adi Sulaiman (Panembahan Haji Sulaiman Paku Negara)	1876 – 1908
16	Gusti Muhammad Ali Surya Negara	1908 – 1915
17	Gusti Muhammad Said Paku Negara	1915 – 1921
18	Thahir Surya Negara	1921 – 1941
19	Gusti Muhammad Arif	1941 – 1944
20	Gusti Ali Akbar	1944 – 1956

SEKADAU[879]		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Pangeran Engkong	
2	Pangeran Kadar	
3	Pangeran Suma	
4	Abang Todong (Sultan Anum)	
5	Abang Ipong (Pangeran Ratu)	
6	Sultan Mansur	
7	Gusti Mekah (Panembahan Gusti Mekah Kesuma Negara)	
8	Gusti Akhmad Sri Negara	
9	Gusti Abdullah	
10	Gusti Akhmad	
11	Gusti Hamid	
12	Gusti Kelip	- 1944
13	Gusti Adnan	1944 – 1946
14	Gusti Kolen	1945 – 1952

879. Menurut *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*

Alternatif lain:

SEKADAU[880]		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Nang Lukis	
2	Abang Busang	
3	Kiai Dipati Suma Negara	
4	Abang Itam	
5	Abang Kadrang (Kiai Dipati Tumbah Baya)	
6	Abang Narung	
7	Pangeran Agung	±1780
8	Pangeran Suta Abang Kadar	
9	Pangeran Kusuma Negara	± 1822 - ± 1830
10	Sultan Anom Muhammad	± 1830 – 1861
11	Sultan Mansur Kusuma Negara	1861 – 1867
12	Panembahan Gusti Mekka Muhammad Kusuma Negara	1867 – 1902
13	Panembahan Ahmad Ratu Seri Negara	1902 – 1911
14	Haji Gusti Muhammad	1911 – 1931
15	Gusti Muhammad Hamid	1931 – 1942
16	Panembahan Gusti Kelip	1942 – 1944
17	Abang Kolin (Gusti Kolen)	1944 – 1952

SELIMBAU[881]		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Abang Bhindu (gelar: Guntur Baju Bhindu Kilat Lambai Lalu)	
2	Abang Aji Lidi	
3	Abang Tedung	
4	Abang Jambal Megat Sari	
5	Abang Upak Pati Agung Nata	
6	Abang Bujang Natasari	
7	Abang Ambal Dipati Kluarga	
8	Abang Tela Agung Jaya	
9	Abang Para Ira	
10	Abang Gunung Agung	
11	Abang Tedung Suryanata	
12	Abang Idin Agung Sri	
13	Abang Tajak Suradila Sri Pakunegara	
14	Dayang Payung Surya Negara	
15	Abang Kina Agung Nata Negara	
16	Abang Keladi Agung Cakranegara	
17	Sasap Agung Kusuma Negara	
18	Abang Telapati Setia Negara	
19	Pangeran Kunjan Jaya Mengkunegara	
20	Pangeran M. Jalalludin Sutakusuma	

880. Lihat *Kerajaan2 Indonesia*, halaman 208.
881. Sumber: *Kesaksian Sejarah di Masa Kejayaan Kerajaan Selimbau Darussalam*

21	Raden Mahidin Suta Natanegara	
22	Panembahan Agung M. Abbas Suryanegara	
23	Panembahan Agung Raja Haji. M. Saleh Pakunegara	
24	Pangeran Haji M. Yunus Indra Sri Negara (raja sementara)	
25	Panembahan Raja Muhammad Usman	
26	Raden Asbi bin Raden Husin bin Panembahan H. Gusti Usman (gelar Panembahan Agung Pakunegara II)	Terpilih 14 Mei 2004 dan diresmikan pada tanggal 29 Januari 2005
	Sumber lain:	
	Nama raja	Tahun pemerintahan
	Masa pemerintahan kepala suku	
(1)	Guntur Baju Binduh	± 1700
(2)	Aji	
(3)	Abang Tedong	
(4)	Abang Jambal	
(5)	Abang Upak	
(6)	Abang Bujang	
(7)	Abang Ambal	
(8)	Abang Tella	
(9)	Abang Parah	
(10)	Abang Gunung	
(11)	Abang Teding	
(12)	Abang Mahidin (kepala suku pertama yang menganut Agama Islam)	
	Masa pemerintahan raja	
1	Abang Tajak (Sura di Laga Paku Negara)	
2	Abang Genah	
3	Abang Tajak	
4	Abang Keladi	
5	Abang Sasap	
6	Abang Tella	
7	Pangeran Hadji Muhammad Abas	1830 – 1878
8	Panembahan Haji Muda Agung Paku Negara	1878 – 1890
9	Haji Muhammad Usman	

	SILAT	
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Panambahan Titie	
2	Abang Mas Tutie/ Pangeran Anoem	
3	Panambahan Bago	
4	Panambahan Mitjoek	
5	Pangeran Anoem	
6	Pangeran Ratoe	

SIMPANG		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Pangeran Batu Agung	1735 – 1824
2	Jamaluddin (Mu'aziddin) –	1824 Sultan Tanjungpura merangkap Simpang
3	Gusti Asma	1845 – 1853
4	Gusti Makhmud (Panembahan Anom Suryaningrat)	1853 – 1892
5	Gusti Rum (Panembahan Kusuma Yuda)	1892 – 1902
6	Gusti Panji	1902 – 1910
7	Gusti Muhammad Roem	1911 – 1940
8	Gusti Mesir	1940 – 1944
9	Gusti Machmud	1945 – 1954

SINTANG			
	Nama raja	Tahun pemerintahan	Gelar
1	Aji Melayu		
2	Dayang Lengkong		
3	Dayang Randung		
4	Abang Panjang (Pencin)		
5	Demong Karang		
6	Pati Kara (Demong Kara)		
7	Demang Minyak (Macak)		
8	Senari		
9	Hasan		
10	Demang Irawan (Jubair Irawan I)		
11	Dara Juanti		
12	Abang Samad		
13	Jubair Irawan II		
14	Abang Suruh		
15	Abang Tembilang (Abang Pencin)		Pangeran Agung
16	Abang Tunggal		Pangeran Tunggal
17	Abang Nata		Sultan Nata
18	Adi Abdurrahman		Sultan Abdurrahman
19	Adi Abdurrosyid		Sultan Abdurrosyid
20	Adi Muhammad Nuh	1796 – 1823	Pangeran Ratu Muhammad Kamaruddin
21	Gusti Muhammad Yasin	1823 – 1855	Pangeran Adipati Muhammad Djamaluddin
22	Adi Abdurrasyid Kesuma Negara	1855 – 1899	Panembahan Abdurrasyid
23	Panembahan Ismail Kesuma Negara	1899 – 1905	
24	Gusti Abdul Majid	1905 – 1913	Panembahan Abdul Majid Pangeran Ratu Kesuma

25	Abdul Muhammad Jum	1913 – 1934	
26	Raden Abdulbahri Danu Perdana	1934 – 1944	
27	Syamsuddin	1944 – 1945	
28	Adi Muhammad Johan	1945 – 1960	

SUHAID		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Ripong	
2	Saman Agung	
3	Payang Anom	
4	Loyan Kyai Dipati Agung	
5	Kyai Dipati Mangku	
6	Pangeran Suma di Laga Mangku Negara	± 1804 – 1879
7	Kesuma Anom Suriya Negara	1879 – 1916

SUKADANA		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Raja Akil	1827 – 1849
2	Panembahan Tengku Besar Anom	1849 – 1878
3	Tengku Putera	1878 – 1910
4	Tengku Andut	1910 – 1933
5	Tengku Abdul Hamid	1933 – 1940
6	Tengku Idris	1940 – 1943
7	Tengku Muhammad	1943 – 1945 masa jabatan pertama
8	Tengku Adam	1945
9	Tengku Muhammad	1946 – 1956 masa jabatan kedua

MATAN		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Raja Baparung	
2	Karang Tunjung (Panembahan Pudong Prasap/ Tuntong Asap)	1431 – 1501
3	Panembahan Kalahirang	
4	Panembahan Bandala	
5	Sibiring Mambal (Panembahan Dibarokh)	1538 – 1550
6	Girikusuma	
7	Syarif Hassan (Sultan Aliuddin/ Muhammad Syafiuddin)	
8	Zainuddin I	1659 – 1717
9	Sultan Dirilaga (Pangeran Mangkurat)	
10	Kamaluddin/ Jamaluddin (Mu'azziddin)	
11	Zainuddin II	
12	Pangeran Jaya Anom	1833 – 1845

13	Muhammad Sabran	1845 – 1908
14	Laksamana Uti Mukhsin	1908 – 1924
15	Gusti Mas Saunan	1924 – 1944
16	Majelis Pemerintahan Kerajaan Matan	1945 – 1959

TAYAN		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Gusti Likar	
2	Gusti Gagok (Pangeran Mancaningrat)	1718 – 1751
3	Gusti Ramal (Pangeran Martajaya)	1751 – 1780
4	Gusti Kamarudin (Panembahan Suma Yuda atau Panembahan Tua)	1780 – 1812
5	Gusti Mekah (Panembahan Nata Kesuma atau Panembahan Muda)	1812 – 1825
6	Gusti Repa (Panembahan Ratu Kesuma)	1825 – 1828
7	Utin Belondo dan Gusti Hasan Pangeran Ratu Kesuma (Marta Jaya Kusuma gelar Panembahan Mangku Negara Kusuma)	1828 – 1855
8	Gusti Inding (Panembahan Mangku Negara Surya Kesuma – gelar sama dengan ayahnya) Gelar diganti pada tahun 1858 menjadi: Pangeran Anum Paku Negara Surya Kesuma.	1855 – 1873
9	Gusti Kerma (Panembahan Adiningrat Kesuma Negara)	1873 – 1880
10	Gusti Muhammad Ali (Panembahan Paku Negara Surya Kesuma)	1880 – 1905
11	Gusti Tamzid Pangeran Ratu (Panembahan Anum Paku Negara)	1905 – 1929
12	Gusti Jafar (Panembahan Anum Adi Negara)	1929 – 1944
13	Gusti Ismail (Panembahan Paku Negara)	1945 – 1952

Kalimantan Tengah dan Selatan

BANJAR			
	Nama raja	Tahun Pemerintahan	Nama lain
1	Suriansyah	1526 – 1550	Pangeran Samudera
2	Rahmatullah	1550 – 1570	Panembahan Batu Putih
3	Hidayatullah I	1570 – 1595	Panembahan Batu Irang
4	Mustain Billah	1595 – 1620	Pangeran Kacil, Panembahan Marhum, Mustakim Billah, Musta Ayinubillah, Mustain Allah, Mustain Ziullah, Raja Maruhum, Marhum Panembahan
5	Inayatullah	1620 – 1637	Ratu Agung, Ratu Lama
6	Saidullah	1637 – 1642	Wahidullah
7	Ri'ayatullah	1642 – 1660	

8	Amirullah Bagus Kusuma (pemerintahan pertama)	1660 – 1663	Tahmidullah I, Panembahan Kuning
9	Sultan Agung	1663 – 1679	
10	Amirullah Bagus Kusuma (pemerintahan kedua)	1679 – 1700	
11	Hamidullah	1700 – 1734	Sultan Kuning
12	Tamjidullah I	1734 – 1759	
13	Muhammad Aliuddin Aminullah	1759 – 1761	Muhammad Iya'uddin Aminullah
14	Tahmidullah II	1761 – 1801	Susuhunan Nata Alam,
15	Sulaiman Saidullah	1801 – 1825	
16	Adam Al-Watsiq Billah	1825 – 1857	
17	Tamjidullah Al Watsiq Billah (Sultan Banjar terakhir)	1857 – 1859	
Kesultanan Banjar dihapuskan oleh Belanda pada tanggal 11 Juni 1860			
Pemimpin perlawanan rakyat Banjar terhadap pemerintah kolonial Belanda			
(18)	Hidayatullah II	1859 – 1862	
(19)	Pangeran Antasari	1862	
(20)	Muhammad Seman	1862 – 1905	

Kawasan Tanah Bumbu		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Pangeran Dipati Tuha	1660 – 1700
2	Pangeran Mangu	1700 – 1740
3	Ratu Mas	1740 – 1780
BANGKALAAN		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Pangeran Prabu	1780 – 1800
2	Pangeran Nata	1800 – 1820
3	Pangeran Seria	merangkap sebagai raja Cingal pertama
4	Ratu Agung Gusti Besar	merangkap sebagai ratu Sampanahan ke-1 dan Manunggul ke-1
5	Gusti Kamir	1830 – 1838
6	Pangeran Haji Musa	1838 – 1840
7	Aji Jawi	merangkap sebagai raja Manunggul ke-2 dan Sampanahan ke-2
8	Aji Tukul (Ratu Intan II)	merangkap sebagai ratu Cingal ke-2 dan Manunggul ke-3
9	Aji Pati	1845 – 1846
10	Pangeran Muda Muhammad Arifbillah Aji Samarang	1846 – 1883 merangkap sebagai raja Cingal ke-3 dan Manunggul ke-4
11	Arya Kasuma	1884 – 1905
BATULICIN dan CANTUNG		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Ratu Intan I	
2	Raja Gusti Besar	

BATULICIN		
1	Ratu Intan I	1780 – 1800
2	Pangeran Seria, putera Pangeran Prabu. Selain	Merangkap sebagai raja Cingal pertama dan raja Bangkalan ke-3
3	Pangeran Muhammad	
4	Pangeran Haji Musa	
5	Pangeran Panji	
6	Aji Landasan	
7	Daeng Magading	
8	Pangeran Muhammad Nafis	
9	Pangeran Abdul Kadir	
10	Pangeran Syarif M. Toha	
11	Pangeran Syarif Hamid	
12	Pangeran Syarif Taha	
13	Pangeran Syarif Achmad	
14	Pangeran Syarif Abbas	
CANTUNG		
1	Gusti Muso	
2	Pangeran Aji Jawi	
3	Aji Madura	
4	Pangeran Kusumanegara atau Pangeran Aji Darma	
CINGAL		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Pangeran Seria	merangkap sebagai raja Cantung dan Batulicin kedua, serta raja Bangkalaan ke-3
2	Aji Tukul atau Ratu Intan II	1845
3	Pangeran Muda Muhammad Arifillah Aji Semarang	1846 – 1883 merangkap sebagai raja Bangkalaan ke-10 dan raja Menunggul ke-4
4	Pangeran Arga Kusuma	1887 – 1905 Raja Bangkalaan, Manunggul, dan Cingal
KUSAN		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Pangeran Amir	Abad ke-18
2	Pangeran Nasohot (Pangeran Masud)	
3	Pangeran Haji Musa	
4	Pangeran Muhammad Napis	1840 – 1845
5	Pangeran Abdullah Kadir Kasuma	1845 – 1861
Kusan disatukan dengan Pagatan		
MANUNGGUL		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Ratu Agung Gusti Besar	1820 - 1830 merangkap sebagai ratu Bangkalaan ke-4 dan Sampanahan pertama

2	Aji Jawi yang merupakan putera Ratu Agung Gusti Besar. Aji Jawi	merangkap sebagai raja Bangkalaan ke-7 dan Sampanahan ke-2
3	Pangeran Muda Muhammad Arifillah Aji Samarang, yang juga	Merangkap sebagai raja Cingal ke-3 dan Bangkalaan ke-10.
	PAGATAN	
	Nama raja	Tahun pemerintahan
	Puanna Dekke	
1	La Pangewa (Hasan)	
2	La Palebi (Abdurrahman)	1830 – 1838
3	Arung Palewan Abdul Rahim	1838 – 1855
4	La Mattunru (Abdul Karim)	1855 -1863
5	La Makkarau	1863-1871
6	Abdul Jabar	1871-1875
7	Ratu Senggeng (Daeng Mangkau)	1875 – 1883
8	Pangeran Syarif Thaha	1883 – 1885, (merangkap sebagai raja Cantung dan Batulicin ke-9)
9	Daeng Mahmud	1885 – 1893
10	Andi Sallo (Arung Abdul Rahim)	1893-1908
	PULAU LAUT	
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Pangeran Jaya Sumitra	1850 – 1861
2	Pangeran Abdul Kadir	1861 – 1873
3	Pangeran Brangta Kasuma	1873 – 1881
4	Pangeran Amir Husin Kasuma	1881 – 1900
5	Pangeran Abdurrahman Kasuma	1900 – 1903
6	Pangeran M. Aminullah Kasuma	1903 - 1905
	SABAMBAN	
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Syarif Ali Al-Idrus	Abad ke-18
2	Syarif Hasan Al-Idrus	1860 - 1894
3	Pangeran Syarif Kasim Al Idrus	1894 - 1904
	SAMPANAHAN	
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Ratu Agung Gusti Besar	merangkap sebagai ratu Manunggul pertama dan Bangkalaan ke-4
2	Aji Jawi	merangkap sebagai raja Manunggul ke-2 dan Bangkalaan ke-7
3	Pangeran Mangkubumi (Gusti Ali)	

KOTAWARINGIN		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Pangeran Adipati Antakusuma	1679 – 1686
2	Pangeran Mas	
3	Pangeran Prabu	

4	Pangeran Panembahan Anom	
5	Pangeran Adipati Muda	
6	Pangeran Penghulu	
7	Pangeran Ratu Bengawan	
8	Pangeran Ratu Anom Kusuma Yudha	
9	Pangeran Ratu Imanudin	
10	Pangerah Akhmad Hermansyah	1850 – 1865
11	Pangeran Ratu Anom Kusuma Yudha	1865 – 1904
12	Pangeran Ratu Sukma Negara	1905 – 1913
13	Pangeran Ratu Kusuma Alamsyah	1914 – 1939
14	Pangeran Ratu Kusuma Anom Alamsyah	1939 – 1947

Kalimantan Timur

BULUNGAN		
Zaman kepala suku		
	Nama kepala suku	**Tahun pemerintahan**
1	Kuwanji’	
2	Jau Iru (Guntur Besar)	
3	Djau (Jau) Anji’	
4	Paren Djau	
5	Paren Anji’	
6	Lahai Bara	
7	Sadang	1458 – 1555
Zaman kerajaan		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Datuk Mancang & Asung Luwan	1555 – 1594
2	Singa Laut	1594 – 1631
3	Wira Kelana	1631 – 1640
4	Wira Keranda	1640 – 1695
5	Wira Digendung	1695 – 1731
Zaman kesultanan		
1	Wira Amir (Amiril Mukminin)	1731 – 1777
2	Alimuddin	1777 – 1817
3	Muhammad Kaharuddin (Kaharuddin I)	1817 – 1861 pemerintahan pertama
4	Sultan Jalaluddin I	1861 – 1866
	Muhammad Kaharuddin (Kaharuddin I)	1866 – 1873 pemerintahan kedua
5	Kalifatul Alam Muhammad Adil	1873 – 1875
6	Kaharuddin II	1875 – 1889
7	Azimuddin	1889 – 1899
	Pengiran Kesuma dan Datu Mansur	1899 – 1902 wali
8	Kasimanuddin	1901 – 1925

	Datu Mansur	1925 – 1930 wali
9	Ahmad Sulaiman	1930 (9 bulan)
10	Maulana Muhammad Jalaluddin II (Jalaluddin II)	1931 – 1958

GUNUNG TABUR		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Zainul Abidin II	1768 – 1800
2	Muhammad Badaruddin	1800 – 1833
3	Aji Kuning II Gozi Mahayuddin	1833 – 1850
4	Amiruddin Maharaja Dendah I	1850 – 1876
5	Hasanuddin II Maharaja Dendah II	1876 – 1882
6	Aji Kuning (wakil sultan)	1882 – 1897
5	Siranuddin (Si Atas)	1897 – 1921
6	Muhammad Khalifatullah Jalaluddin	1921 – 1951
8	Aji Raden Muhammad Ayub	1951 – 1961

KUTAI KARTANEGARA[882]		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Aji Batara Agung Dewa Sakti	1300-1325
2	Aji Batara Agung Paduka Nira	1325-1360
3	Aji Maharaja Sultan	1360-1420
4	Aji Raja Mandarsyah	1420-1475
5	Aji Pangeran Tumenggung Bayabaya	1475-1545
6	Aji Raja Mahkota Mulia Alam	1545-1610
7	Aji Dilanggar	1610-1635
8	Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa ing Martapura	1635-1650
9	Aji Pangeran Dipati Agung ing Martapura	1650-1665
10	Aji Pangeran Dipati Maja Kusuma ing Martapura	1665-1686
11	A ji Ragi gelar Ratu Agung	1686-1700
12	Aji Pangeran Dipati Tua	1700-1730
13	Aji Pangeran Anum Panji Mendapa ing Martapura	1730-1732
14	Aji Muhammad Idris	1732-1778
15	Aji Muhammad Aliyeddin	1778-1780
16	Aji Muhammad Muslihuddin	1780-1816
17	Aji Muhammad Salehuddin	1816-1845
	Masa perwalian	1845 – 1850
18	Aji Muhammad Sulaiman	1850-1899
19	Aji Muhammad Alimuddin	1899-1910
	Masa perwalian di bawah pimpinan A.P. Mangkunegoro	1910 – 1920
20	Aji Muhammad Parikesit	1920-1960
21	H. Aji Muhammad Salehuddin II	1999-sekarang

882. Sumber: kutaikartanegara.com.

TANJUNG (PINANG SENTAWAR/ SENDAWAR)				
Catatan: Nama-nama yang bunyinya hampir bersamaan akan diletakkan dalam satu baris.				
Versi 1[883]		Versi 2[884]		Tahun pemerintahan
1	Aji Tulur Jejangkat	1	Tulur Aji Jangkat	1310-1360 (versi 1)
2	Sualas Gunaaq	2	Sualas Guna	1360-1400 (versi 1)
3	Selutatn Gantukng Langit	3	Gantung Langit	1400-1430 (versi 1)
4	Selutatn Inaar Giri	4	Inaar Giri	1430-1450 (versi 1)
5	Selutatn Pejapm	5	Pejaamp	1450-1470 (versi 1)
6	Selutatn Hareq Lebih	6	Hareeq Lebih	1470-1480 (versi 1)
7	Timang Maharajan Tonyooi	7	Timaang/ Entoot	1480-1510 (versi 1)
8	Hajiq Mahing	8	Hajiiq Mahing	1510-1520 (versi 1)
		9	Tingang	
9	Ratu Angin	10	Angin (perempuan)	1520-1580 (versi 1)
10	Uyaang	11	Uyaang (perempuan)	1580-1600 (versi 1)
11	Tiukng Radetn Gelumakng			1600-1620 (versi 1)
12	Ririh Radetn Baroh			1620-1640 (versi 1)
13	Idiiq Radetn Tusuk			1640-1650 (versi 1)
14	Terutn Raden Gelumakng	12	Terutn Radent Gelumakng	1650-1660 (versi 1)
		13	Ginang Radent Teba	
15	Riaaq Adaaq	14	Adaaq	1660-1670 (versi 1)
16	Riaaq Gadaakng	15	Gadaang	1670-1680 (versi 1)
17	Riaq Ginang Radetn			
		16	Jangkat Empon Tang	
		17	Gemak Taman Uaan	
		18	Kolaaq Empon Maas	
18	Badas Tabungah	19	Badas Tebungah	
		20	Rahaden Empon Dehang	
19	Bungai Empon Bonoh Hajin	21	Bungai Empon Bonoh	
		22	Bungai Empon Bonoh	
20	Ngapaan Baromoong Ayakng			
21	Lagitn Empon Useen Riaag Lagitn			
		23	Ajaang Empon Balui	
		24	Timaang Empon Baraau	
		25	Sentawaaq/ Ongkooq	
		26	Medetn Empon Dodoq	
		27	Ngapaan/ Beromonong	
		28	Lagitn Empon Useen	
		29	Tegai/ Uraang Empon Loyaan	
		30	Lomos Taman Agong	

883. Lihat *Sejarah Sentawar: Dari Mitologi Hingga Histori Suatu Kajian Sejarah Lokal*, halaman 55; disebutkan bahwa sumbernya adalah *Sejarah Sentawar* (naskah yang belum diterbitkan) karya Korrie Layun Rampan (2001).

884. Lihat *Sejarah Sentawar: Dari Mitologi Hingga Histori Suatu Kajian Sejarah Lokal*, halaman 56-57; disebutkan bahwa sumbernya adalah Adrius Amaan A, Kampung Juaq Asa (2002).

		31	Pemuhuq Empon Runuung	
		32	Luih Empon Tengkan	
		33	Karongoq Mas Singo Mudo	

TIDUNG		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Sultan Abdul Rasyid gelar Datu Raja Laut	1557 – 1571
2	Amiril Pengiran Dipati I	1571 – 1613
3	Amiril Pengiran Singa Laut	1613 – 1650
4	Amiril Pengiran Maharajalila I	1650 – 1695
5	Amiril Pengiran Maharajalila II	1695 – 1731
6	Amiril Pengiran Dipati II	1731 – 1765
7	Amiril Pengiran Maharajadinda	1765 – 1782
8	Amiril Pengiran Maharajalila III	1782 – 1817
9	Amiril Pengiran Amir Tajuddin	1817 – 1844
10	Pengiran Jamalul Kiram	1844 – 1867
11	Datu Maulana Amir Bahar	1867 – 1896
12	Datu Adil	1896 – 1916

Raja-raja di Sulawesi Tenggara

KONAWE		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Onggabo	
2	Anamiandapo	± 1530 – 1540
3	Tanggolowuta	± 1540 – 1570
4	Elu Langgai	± 1570 – 1600
5	Melamba (Melamba I)	± 1600 – 1620
6	Pati	± 1620 – 1640
7	Maago	± 1660 – 1680
8	Sangia Ngginoburu	± 1680 – 1700
9	Sorumba	± 1700 – 1720
10	Melamba II	± 1720 – 1740
11	Sendebunggu	± 1740 - 1770
12	Sea Tiningga	± 1770 – 1800
13	Tebawo	± 1800 – 1830

RAJA-RAJA DI SULAWESI

Raja-raja di Sulawesi Utara

BOOLANG ITANG		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Salmon Muda	1793 – 1823
2	Daud	1823 – 1863
3	Israel	1863 – 1880
4	Togupat	1880
5	Pade	1881 – 1882
6	Suit	1882 – 1883
7	Bonji Pontoh	1883 - 1907
8	Ram Suit Pontoh	1907 - 1950

BOOLANG MONGONDOW		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Mokoduludut	
2	Yayubangkai	± 1460
3	Damopoli	±1475 – 1550
4	Butiti	± 1510
5	Makalolo	± 1540
6	Mokodampit	
7	Mokoagow	
8	Tadohe	± 1600
9	Loloda Mokoagow	1653 - 1689
10	Jacobus Manoppo (Jacobus I)	1689 - 1731
11	Fransiscus Manoppo	1731 - 1734
12	Salomon Manoppo	1734 - 1764
13	Eugenius Manoppo	1764 - 1770
14	Christoffel Manoppo	1770 - 1779
15	Manuel Manoppo	1779 - 1811
16	Cornelis Manoppo	1811 - 1829
17	Ismail Manoppo	1829 - 1833
18	Jacobus Manuel Manoppo	1833 - 1858
19	Adrianus Cornelis Manoppo	1858 - 1862
20	Johanis Manuel Manoppo	1862 - 1880
21	Abraham Sugeha	1880 - 1893
22	Riedel Manuel Manoppo	1893 - 1902
23	Datu Cornelis Manoppo	1901 - 1927
24	Laurens Cornelis Manoppo	1927 - 1938
	Zelfbestuur Commissie	1938 - 1943
25	Henry Jusuf Cornelis (H.J.C.) Manoppo	1943 - 1948

KAIDIPANG		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Pugu-Pugu Datu Binangkol Korompot (Mauritz)	± 1677
2	Tiaha I	
3	Dadoali	
4	Philips	± 1729
5	Piantai (Albertus Karompot)	1729 - ± 1750
6	Antogia (David Karompot)	1750 – 1763
7	Gonggala I (Yakobus Karompot)	1763 – 1782
8	Tatu (Waladdin Karompot atau Willem David Cornput)	1787 – 1817
9	Toruru	1817 – 1835
10	Tiaha II	1835 – 1863
11	Pandis (van Dienst, Muhammad Nurdin)	1863 – 1866
12	Gonggala II (Makensi)	1866 – 1898
13	Louis	1898 – 1903
14	Antugio Karompot	1903 - 1910

KENDAHE[885]		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Wagama (Wagania)	
2	Sarib Mansyur	
3	Boeisang	
4	Syam Syah Alam Samausialang	± 1688 – 1711
5	Johannes Karambut I	1711 – 1729
6	Makaado (Manuel Manabung)	1773 – 1792
7	Johannes Karambut II (Ansaawuwo)	1793 – 1827
8	Frederik Karambut II (Umboliwutang)	1827 – 1845
9	Daniel Petrus (D.P.) Simbat Yanis	1845 – 1893

KOLONGAN[886]		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
	Pontorolage	abad ke-16

MANGANITU[887]		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Tolosang	1600 – 1645
2	Tompoliu	1645 – 1670
3	Bataha Santiago (Don Siut Jugou)	1670 – 1675
4	Don Charles Diamanti (Carlos Piantai)	1675 – 1694
5	Martin Takaengetang atau Djoutulung (Dotulong) Takaengetang	1694 – 1725

885. Sumber: *Sejarah Daerah Sulawesi Utara*, halaman 48 – 49 dan manuskrip Hans Hägerdal berjudul *Kerajaan2 Indonesia*, halaman 109.
886. Sumber: *Sejarah Daerah Sulawesi Utara*, halaman 46 – 47.
887. Sumber utama: *Kerajaan2 Indonesia*, halaman152 – 153.

6	Martin Don Lasaru (Jacob Lazarus)	1725 – 1740
7	Katiangdagho (Daniel Katiandago)	1740 – 1770
8	Salomon Katiandago (Lombangsuwu)	1771 – 1794
9	Manuel Mokodampis (Lokongbanua)	1794 – 1806
10	Darunu	1806 – 1816
11	Bagunda	1816 – 1817
12	Bastian Jacob Tamarol (Tampungang)	1817 – 1845
13	C.J.L. Tamarol (Nonde)	1845 – 1855
14	Jacob Laurens Tamarol	1859 – 1860
15	Manuel Mokodampis (Soaha)	1864 – 1880
16	Lambert Ponto	1880 – 1892 Presiden Pengganti Raja
17	W.K.P. Mokodampis (Johannis Mokodampis atau Tampilang)	1892 – 1905
18	Willem Manuel Pandensolang Mokodampis	1905 – 1944
19	W. Kansil	1944 – 1945
20	Ambon Darondo	1946 – 1949

Alternatif lain:

MANGANITU[888]		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Tolosang (Liuntolowoang)	1600 – 1645
2	Tompoliu	1645 – 1670
3	Bataha Santiago (Don Siut Jugou)	1670 – 1675
4	Don Charles Diamanti	1675 – 1694
5	Djoutulung (Dotulong) Takaengetang	1694 – 1725
6	Martin Don Lasaru	1725 – 1740
7	Katiangdagho	1740 – 1770
8	Lombangsuwu	1770 – 1785
9	Daniel Katiandagho Darunualing II	1785 – 1792
10	Bagenda (Bagunda)	1792 – 1817
11	Dirk Mocodampis Lokenbanua	1817 – 1848
12	Jacob Bastian bin Tamarol	1848 – 1855
13	Hendrik Cornelis Tamarol Monde	1855 – 1860
14	Kamehang Jacob Laurens Tamarol	1860 – 1864
15	Hari Raya Manuel Mocodampis	1864 – 1880
16	Tengkue Pantolaeng (presiden raja)	1880 – 1882
17	Johannis Makahekum Manginteno (presiden raja)	1882 – 1883
18	Daniel Katiandagho Kirahang	1883 – 1884
19	Salmon Katiandagho Wintuaheng	1884 – 1886
20	Lambert Ponto	1886 – 1894
21	Tampilang Johannis Mocodampis	1894 – 1905
22	Willem Manuel Pandesolang (W.M.P.) Mocodampis	1905 – 1942

888. Sumber: *Sejarah Daerah Sulawesi Utara*, halaman 50.

SIAU[889]		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan[890]**
1	Lokongbanua II	1510 -1549 (1510 – 1545)
2	Pasumah (Pesuma atau Pansumang)	1549 – 1587 (1545 – 1575)
3	Wuisang (Ponto Wuisan atau Himbawe atau Wetewiwihe)	1587 – 1591 (1575 – 1612)
4	Winsulangi[891]	1591 – 1631 (1612 – 1642)
5	Don Harcius (Harvius) Fransiscus Batahi	1631 – 1678 (1642 – 1678)
6	Monasehiwu	1678 – 1680
7	Pareme (Rarame) Nusa (Hendric Daniel Yacobus)	1680 – 1716 (1678 – 1716)
8	Daniel Jacobus Lohintadali (Lohontundali)	1716 – 1752
9	Ismail Yacobus Mohengkelangi	1752 – 1788
10	Ericus Jacobus Bagandelu	1788 – 1790
11	Eugenius Jacobus Umboliwutang	1790 – 1821 (1790 – 1822)
12	Fransisco Tapianus Paparang Batahi	1822 – 1839
13	Nikolaus Ponto Tawere	1839 – 1842
14	Markus Dulage (presiden raja)	1842 – 1850
15	Jacob Ponto	1851 – 1889 (1850 – 1882)
16	Lemuel (Semuel) David (presiden raja)	1890 – 1895 (1882 – 1896)
17	Manalong Dulang (M.D.) Kansil	1900 – 1908 (1896 – 1908)
18	A.J. Mohede (presiden raja)	1908 – 1913 (1908 – 1912)
19	Antoni Jafet Kansil (A.J.K.) Bogar	1913 – 1918 (1912 – 1918)
20	Antoni Dulage (A.D.) Laihad	1918 – 1920 (1918 – 1921)
21	Lodewyk Nicolaus (L.N.) Kansil	1920 – 1929 (1921 – 1929)
22	Hendrik Philips (H. Ph.) Jacobs (wakil raja Siau)	1929 – 1930 (1929 – 1934)
23	Aling Janis	1930 – 1935 (1934 – 1937)

889. Sumber: Sejarah Daerah Sulawesi Utara, halaman 45 dan http://historyroemahboenga.blogspot.com/2009/12/siau-kingdom.html (diunduh tanggal 19 Desember 2009).

890. Angka tahun di dalam kurung diambil dari http://historyroemahboenga.blogspot.com/2009/12/siau-kingdom.html (diunduh tanggal 19 Desember 2009).

891. Website http://historyroemahboenga.blogspot.com/2009/12/siau-kingdom.html tidak menyebutkan raja ini.

24	Paul Frederik Parengkuan	1936 – 1946
25	Ch. David	1946 – 1956

TABUKAN[892]		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan[893]**
1	D. Makaampo (Makaampow Bawengehe)	1530 – 1575 (1600 – 1620)
2	Wuatengsemba (Wuaten Semba Yudha I)	1575 – 1610 (1620 – 1665)
3	Gamambanua (Ghama Vasco da Gama Gamam Banua)	1610 – 1650 (1665 – 1670)
4	Don Fransische Makaampo Juda II (Fransisco Makkampow Yudha II)	1650 – 1700 (1670 – 1700)
5	Matheos Makaampo Mahengkelangi[894]	1700 – 1718 (1720 – 1745)
6	Markus Yacobus Dalero	1718 – 1724 (1700 – 1720)
7	Don Vilva Makaampo Karula	1724 – 1752 (1745 – 1770)
8	Fransisco Philip Makaampo Sani	1752 – 1780 (1770 – 1795)
9	Julius Hendrik David (H. D.) Paparang Pahawuateng	1780 – 1785 (1795 – 1820)
10	Laudagima Paparang	(1820 – 1875)
11	Webesan Ignatius Nicolas Paparang	(1875 – 1880)
12	Kumuku Antonius David Paparang	(1889 – 1900)
13	Siri Darea (presiden raja)	(1900 – 1908)
14	Papukule David Sarapil	(1908 – 1924)
15	Kahendake Willem Sarapil	(1924 – 1929)
16	Levinus Johannis Macpal	(1929 – 1942)

TAGULANDANG		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Lohowaung	1570 – 1609
2	Balango	1609 – 1649
3	Bawias (Patu Wawiosi Bawias)	1649 – 1683
4	Philips Anthoni Aralungnusa	1683 – 1720
5	Johannis Batahi Jacobus Manihise (Philip Jacobsz)	1720 – 1753
6	Andries Tamarol	1754 – 1782
7	Cornelis (Christiaan) Tamarol	1782 – 1798

892. Sumber : *Sejarah Daerah Sulawesi Utara*, halaman 46 dan http://historyroemahboenga.blogspot.com/2009/12/kerajaan-rimpulaeng-tabukan.html (diunduh 19 Desember 2009).
893. Angka tahun dalam kurung diambil dari http://historyroemahboenga.blogspot.com/2009/12/kerajaan-rimpulaeng-tabukan.html (diunduh 19 Desember 2009).
894. Pada daftar raja di website http://historyroemahboenga.blogspot.com/2009/12/kerajaan-rimpulaeng-tabukan.html (diunduh 19 Desember 2009), raja ini dicantumkan memerintah setelah Markus Yacobus Dalero.

8	Philip Jacobszoon	1798 – 1820
9	Johannes Philip Jacobszoon	1820 – 1842
10	Frederik Philip Jacobszoon	1843 – 1851
11	Lukas Philip Jacobszoon	1851 – 1871
12	Christian Matheoszoon	1871 – 1885
13	Salmon Bawoleh	1885 - 1901
14	Laurentius Manuel Tamara	1901 – 1912
15	Cornelis Tamaleroh	1912 – 1917
16	A.J.K. Bogar	1917 – 1918 merangkap raja Siau
17	A.D. Laihad	1918 – 1920 merangkap raja Siau
18	L.N. Kansil	1920 – 1922 merangkap raja Siau
19	Hendrik Philip Jacobs (Malempe)	1922 – 1935 merangkap raja Siau
20	Frans Pieter Parengkuan	1935 – 1937
21	Willem Philip Jacobs	1937 – 1944
22	Paul Adrian Tindas	1944 – 1946
23	Hermanus Obed Hamel	1946 – 1949
24	Philip Willem Jacobs	1949 – 1951

TAHUNA		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Tetehawoba (Ansaawuaso)	1580 - 1625
2	Wuntuang	± 1625 – 1665
3	Tatandang (Don Martin Tatandangnusa)	1665 – 1691
4	Takaulimang	± 1691 – 1705
5	Zacharias Papahangsulung Paparang	± 1705 - ± 1736
6	Dirk Rasubala	1747 – 1756
7	Zacharias Paparang	1757 – 1779
8	Zacharias Dirk Rasubala	1779 – 1800
9	Tabaleta Rasubala	1800 – 1820
10	Jacob Rasubala Saraweta	1820 – 1841
11	Eugenos Laurens Tamarol	1841 – 1858
12	Walanda Jacob Rasubala	1858 – 1870
13	A.T. Rasubala Limampulo	1870 – 1875
14	Eugenis Laurens Tanaru Rasubala	1878 – 1887
15	Raja yang tak diketahui namanya	1887 – 1896
16	Salmon Dumalang	1896 – 1902
17	Marcus Mohonis Dumalang	1902 – 1904
18	Solomon Ponto	1904 – 1914
19	Christian Ponto	1914 – 1928
20	W.M.P. Mocodampis	1928 – 1930
21	Albert Bastian	1930 – 1939
22	Engelhard Bastian	1939 - 1944

23	Frederik Imanuel Adriaan	1945 – 1949
24	Afdeeling Karambut	1949 – 1955

Raja-raja di Gorontalo

ATINGGOLA		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Linugu	1500-1530
2	Kalumata	1530-1550
3	Pasila	1550-1570
4	Dugia	1550-1570
5	Mollaunt	1570-1580
6	Gulomkon	1580-1620
7	Timbangon	1620-1650
8	Mokodite	1650-1670
9	Langi	1670-1700
10	Barend Dua'ulu	1700-1720
11	Ansaliueta	1720-1747
12	Adrian Patalima	1747-1768
13	Dirk Kolongkodu	1768-1774
14	Biato	
15	Nako	1800-1810
16	Gubul	1810-1820
17	Kakatua	1820-1830
18	Bolongkodu Humagi	1830-1840
19	Iskandar Pamalo	1840-1841
20	Bolongkodu Iskandar Mao Pangka	1841-1856
21	Ba Ito	1856-1866

GORONTALO		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Wolanga	abad ke-15
2	Polamolo	1481 – 1490
3	Ntihedu	1490 - 1503
4	Detu	1503 – 1523

Gorontalo hulu (*to tilayo*)			**Gorontalo hilir (*to huliyaliyo*)**		
	Nama raja	Tahun pemerintahan		Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Amai	1523 – 1550	1	Padungge	1530 – 1560
2	Matolodulahu	1550 – 1585	2	Tuliyabu	1560 -1578
3	Pongoliwu	1585 – 1615	3	Wulatileni	1578 – 1611
4	Molie	1615 – 1646	4	Poheleo	1611- 1532
5	Raja Eyato (Tato Selongi)	1646 – 1674	5	Bumulo	1632 – 1647
6	Polamolo II	1674 – 1686	6	Tiduhula	1647 – 1677
7	Lepehulawa	1686 – 1735	7	Bia	1677 – 1680

8	Nuwa	1735 – 1767	8	Walangadi	1680 – 1718
9	Wolanga II	1767 – 1790	9	Piola	1718 – 1737
10	Iskandar Bia	1790 – 1809	10	Botutige	1737 – 1757
11	Hajdari	1809 – 1828	11	Iskandar Monoarfa	1757 – 1777
12	Walangadi	1828 – 1835	12	masa kosong	1777 – 1780
13	Wadipalapa	1836 – 1849	13	Ubomongo	1780 – 1782
14	Pandjarois (Panjuroro)	1849 – 1851	14	Pongoliwu Mbuingadaa	1782 – 1795
			15	Mbuingakiki Monoarfa	1795 – 1818
			16	Muhammad Iskandar Pui Monoarfa	1818 – 1829
			17	Lihawa Monoarfa	1829 – 1830
			18	Abd al-Bab Jonggo	1830 – 1831
			19	Bumulo	1831 – 1836
			20	Hasan Pui Monoarfa	1836 – 1851
			21	Abdullah Pui Monoarfa	1851 – 1859
			22	Zainal Abidin Monoarfa	1859 – 1878

LIMBOTTO		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Ratu Tolangohula	
2	Yilonggowa	
3	Hulado	
4	Nggealo	
5	Tobuto	
6	Datautapu	
7	Mitu	
8	Moito	
9	Pulubulawa	
10	Ratu Moliye	abad ke-15
11	Polamolo	
12	Ratu Moliye	1490 - 1503

Limbotto hulu (*to tilayo*)			**Limbotto hilir (*to huliyaliyo*)**		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**		**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Datau	1536 - 1539	1	Pilohibuta	± 1525
2	Bia	1539 - 1551	2	Puloyoto	
3	Molie (Lembidu)	1551 - 1562	3	Apolo	
4	Humonggilu (Raja Hunggiludaa)	1562 - 1564	4	Dulapo	sekitar abad ke 16-17
5	Detubiya	1564 – 1566	5	Tilahunga	1600 - 1630
6	Mitu	1566 – 1636	6	Momiyo	1630 - 1650
7	Delilauwo	1636 – 1660	7	Pomontolo	
8	Ntihedu	1660 – 1671	8	Pilohibuta	
9	Ilato	1671 - 1707	9	Pongaito	
10	Humonggilu	1707 - ± 1710	10	Bumulo	- 1742
11	Pulu	± 1710 – 1750	11	Hulupango	1742 – 1765

12	Biauddin	1750 – 1777	12	Naki	1765 - ± 1776
13	Laya	1777 – 1782	13	Lahai	- 1783
14	Tilahunga	1782 – 1790	14	Humungo	1783 – 1784
15	Tapu	1790 – 1800	15	Bilatula	1784 – 1793
16	Humonggilu	1800 – 1809	16	Modanggu	1793 – 1800
17	Iskandar Tamau	1809 – 1812	17	Zainuddin Abdul Rauf	1800 – 1810
18	Jafar Naki	1812 – 1818	18	Baruwadi	1810 – 1812
19	Pakaya	1818 – 1820	19	Jafar	1812 – 1826
20	Abdurrahman	1820 – 1826 pemerintahan pertama	20	Mahmud Naki	1826 – 1835
21	Muhammad Iskandar Pui Monoarfa	1826 – 1828	21	Kuka (Muh. Arsad)	1835 – 1838
22	Abdurrahman	1828 – 1831 pemerintahan kedua	22	Hasan Pui Monoarfa	1838 – 1841
23	Kuka (Muhammad Arsad)	1831 – 1835	23	Muhammad Iskandar Hasanuddin Olii	1841 – 1863
24	Katili	1835 – 1836			
25	Moopangga (Haji Abdul Jalil)	1836			
26	Abdul Rachman	1836 – 1855			

SUWAWA (BONE SUWAWA)		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Ige	1350-1380
2	Dulanoali	1380-1390
3	Luadu	1390-1400
4	Buruali	1400-1410
5	Aidugia	1410-1420
6	Purubulawan	1420-1430
7	Ohito	1430-1450
8	Maindoa	1450-1470
9	Mooduto I	1470-1500
10	Biini I	1500-1510
11	Bomboluawo	1510-1530
12	Tilagunde	1530-1550
13	Gulimbala	1550
14	Dagutanga	1550-1570
15	Mooduto II	1570-1590
16	Mooluado	1590-1600
17	Aibugia	1600-1610
18	Dulandimo	1610-1620
19	Pongoliu	1620-1640
20	Gulanguma	1640-1650

21	Bouwa	1650-1660
22	Gintaelangi	1660-1680
23	Biini II	1680-1700
24	Bobigi	1700-1706
25	Tilombe	1706-1720
26	Pulubulawan	1720-1730
27	Bumbulo	1730-1746
28	Walango	1746-1798
29	Mogolaingo	1798-1800
30	Pulumodoiong	1800-1830
31	Humungo	1830-1839
32	Sapjatidien Iskandar Muhammad Wartabone Illahu	1839-1858

Sulawesi Tengah

BANAWA		
	Nama raja[32]	**Tahun pemerintahan**
	Sanga Lea Daeng Paluna	1854 – 1888
	La Makagili Tomaidoda	1888 – 1902
	La Marauna Aru Ganti	1902 – 1916
	La Gaga	1916 – 1932
	Rohana	1932 – 1942

Menurut buku *Sawerigading*[896], urutan raja-raja Banawa adalah sebagai berikut:

(1) I Badantasa (wanita), memerintah 1484 – 1552

(2) I Tasa Banawa (wanita), memerintah 1552 – 1557

[Kotambulawa (wanita), memerintah 1557 – 1650]

(3) Intoraya (wanita), memerintah 1650 – 1698

(4) La Bugia (pria), memerintah 1698 – 1758

(5) I sa Bida (wanita), memerintah 1758 – 1800

(6) Sandudogie (wanita), memerintah 1800 – 1845

(7) La Sa Banawa (pria), memerintah 1845 – 1889

(8) Lamakagili (pria), memerintah 1889 – 1903

(9) La Marauna (pria), memerintah 1903 -1926

(10) La Gaga (pria), memerintah 1930 – 1932

(11) La Ruhana (pria), memerintah 1935 – 1947

(12) La Parenrengi (pria), memerintah 1947 – 1959.

895. Sumber: *Raja Banawa dari Belanda*, halaman 125, lampiran V.
896. halaman 438 – 444.

BANGGAI		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Tomumdoi Doi Jawa	
2	Mandapar	1600 – 1630
3	Mumbu (Mbumbu) Doi Kintom (Molen)	1630 – 1648
4	Mumbu Doi Banteng (Paudagar)	1648 – 1689
5	Mumbu Doi Balantak (Mulang)	1689 – 1705
6	Mumbu Doi Kota (Abdul Gani)	1705 – 1728
7	Mumbu Doi Bacan (Abu Kasim)	1728 – 1753
8	Mumbu Doi Mondono	1753 – 1768
9	Mumbu Doi Padongko	1768 – 1773
10	Mumbu Mandaria (Nasiruddin)	1773 – 1809
11	Atondeng (Mumbu Doi Galila)	1808 – 1821
12	Mumbu Doi Sau (Tadja)	1821 – 1827
13	Mumbu Doi Tenebak (Laota)	1827 – 1837
14	Mumbu Doi Bugis (Agama)	1837 – 1846
15	Mumbu Doi Jere (Tatu Tonga)	1846 – 1858
16	Tomundo Soak	1858 – 1870
17	Tomundo Nurdin	1870 – 1892
18	Tomundo Abdul Azis	1892 – 1906
19	Tomundo Abdul Rahman	1906 – 1925
20	Tomundo Haji Awaluddin	1925 – 1939
21	Tomundo Haji Sukuran Aminuddin Amir (S.A. Amir)	1940 – 1959
Menurut sumber lain:[897]		
1	Mumbu Doi Godong (Maulana Prins Mandapar)	1571-1601
2	Mumbu doi Kintom	1602-1630
3	Mumbu doi Banteng	1630-1650
4	Mumbu doi Balantak Mulang	1650-1689
5	Mumbu doi Kota	1690-1705
6	Mumbu doi Bacan "Abu Kasim"	1705-1749
7	Mumbu doi Mandono	1749-1753
8	Mumbu doi Padangko	1754-1763
9	Mumbu doi Dinadat Raja Mandaria	1763-1808
10	Mumbu doi Galela Raja Atondeng	1808-1815
11	Mumbu Tenebak Raja Laota	1815-1831
12	Mumbu doi Pawu Raja Taja	1831-1847
13	Mumbu doi Bugis Raja Agama	1847-1852
14	Mumbu doi Jere Raja Tatu Tonga	1852-1858
15	Raja Soak	1858-1870
16	Raja Nurdin	1872-1880
17	Raja H. Abdulazis	1880-1900
18	Raja H. Abdurrachman	1901-1922
19	Raja Awaluddin	1925-1940
20	Raja Nurdin Daud (simbolis)	
21	Raja H.S.A. Amir	1941-1957

897. *Babad Banggai Sepintas Kilas*, halaman 31-32.

BUNGKU		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Pea pua Sangia Kinambuka	
2	Pea pua Papa	
3	Pea pua Arsyad	
4	Pea pua Kolono Surabi	
5	Pea pula Kasili Lamboja	
6	Pea pua Kasili Syadili	
7	Pea pua Kasili Baba	
8	Kasili Maloko Tondu Le-Obi	1674
9	Kasili Lau Peke	1886
10	Kurusi Ismail	- 1907
11	Abdul Wahab	1907 – 1920
12	Abdullah	1920 – 1925
13	Ahmad Hadi	1926 – 1931
14	Abdul Razak	1932 – 1937
15	Abdul Rabbie	1937 – 1950
Menurut sumber lainnya[898]		
1	Marannu	1655
2	Lamboja	1672
3	Surabi	1747
4	Bukungku	1840-1841
5	Dongke Kombe	1841-1847
6	Papa	1847-
7	Sadek	-1851
8	Baba	1851-1869
9	Moloku Tondu Le Obi	1873
10	Latojo	1879-1881
11	Kaicil Laopeke	1884-1907
12	H. Poetra Abdul Wahab	1907-1922
13	H. Abdullah	1922-1925
14	Achmad Hadie	1925-1931
15	Abdul Razak	1931-1937
16	Abdurrabbie	1941-1950

BUOL			
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**	**Pusat pemerintahan**
1	Pombang Lipu	1595 – 1633	
2	Ndubu II	1633 – 1650	Mulat
3	Dololangit	1650 – 1662	Lankatikadigo
4	Todael	1662 – 1690	Kadolagon
5	Dokliwan	1690 – 1712	Biau (Antinggolu)

898. Sumber: *Sejarah Kerajaan Bungku*, halaman 469.

6	Makalah	1712 – 1720	Moyaki (Unone)
7	Daimakio	1720 – 1745	Kantanan
8	Pondu	1745 – 1770	Lonu
9	Punu Bwulaan	1770 – 1778	Lamolang
10	Boia Mangilalo (Taa Marahum)	1778 – 1786	Potangoan
11	Kalui	1786 – 1795	
12	Ndain (Undaing)	1795 – 1802	
13	Timumun	1802 – 1804	
14	Datu Mimo	1804 – 1813	
15	Mokoapat	1813 – 1818	
16	Ndubu III	1818- 1820	
17	Takuloe	1820	
18	Datu Mula	1820 – 1830	
19	Elam Sirajudin	1834 – 1857	
20	Modeiyo (wakil raja)	1857 – 1858	
20	Muhammad Nur Aladin (Lahadun)	1858 – 1861	
Dinasti Turunku			
21	Trubku (Turumbu, Turunku, atau Taa Meraji)	1861 – 1890	
22	Patra (Haji Patra Turunku)	1890 – 1899	
23	Datu Alam	1899 – 1914	
24	Haji Akhmad	1914 – 1947	

KULAWI		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Tempere	
2	Balo	
3	Paloigi	
4	Potempa (Tomai Pau)	
5	Mesagala (Tomai Mampeli)	
6	Intowaa Tomarengke (Intivoalangi atau Tomatoirengke)	1906 – 1910
7	Tomape	1910 – 1918
8	Lakuntu (Tomai Mampo)	1919 – 1920
9	Jiloi (W. Jiloi)	1920 – 1950-an

MORI		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Marunduh I	± 1580 – 1620
2	Marunduh II (sebenarnya tidak diketahui namanya)	± 1620 – 1650
3	Ratu Wedange	1650 – 1670
4	Anamba	1670 – 1680
5	Sungkawawo	1680 – 1720
6	Lawolio	
7	Landika	
8	Alala Owulu Lamale	

9	Lambautoh	
10	Tosaleko	
11	Marunduh III (Marunduh Datu ri Tana Mokole Wawa Inia Tawe I Wulanderi)	1870 – 1907
12	Ede Kamesi	1907 – 1928
13	Marunduh IV (Owulu Marunduh)	1928 – 1950

MOUTONG		
1	Manggalatung	
2	Pondatu	
3	Tombolotutu	
4	Daeng Malino	± 1896
5	Borman	1917 – 1924
6	H. Saenso Lahia	1922 – 1928
7	Kuti Tombolotutu (I Kuti Puwa Dae Malisa)	1929 – 1950

PALU		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Pue Nggori (Siralangi)	1796 – 1805
2	I Dato Labungulili	1805 – 1815
3	Kadi Palo (Malasigi Bulupalo)	1815 – 1826
4	Daelangi	1826 – 1835
5	Jalalembah	1835 -1850
6	Lamakaraka	1850 – 1868
7	Mangge Risa (Maili)	1868 – 1888
8	Yojo Kodi	1888 – 1906
9	Parampasi	1906 – 1921
10	Janggola	1921 – 1949
11	Caco Ijazah	1949 – 1960

PARIGI[899]		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Makagero atau Magau Lomba	1515-1533
2	Boga	1535-1557
3	Ntavu	1557-1579
4	Langimoili	1579-1602
5	Ibrahim atau Tonikota	1602-1627
6	Ma'ruf atau Janggo	1627-1661
7	Ntadu	1661-1690
8	Palopo atau Kodi Palo	1690-1724
9	Mansyur atau Bombo Onge	1724-1760
10	Abduh atau Pangabobo	1760-1792

899. Informasi diperoleh dari facebook Bapak Muhammad Oza Tagunu (http://www.facebook.com/profile.php?id=1351971987&ref=ts#!/note.php?note_id=205102786202293), diunduh tanggal 26 Juli 2011.

11	Puselembah	1792-1821
12	Sawali atau Baka Palo	1821-1855
13	Raja Lolo atau Paledo	1855-1880
14	Njengi atau Djengintonambaru	1880-1898
15	Hanusu	1898-1927
16	Tagunu	1927-1960
17	Andi Ada Tagunu	
18	Andi Palawa Tagunu	
19	Andi Tjimbu Tagunu	semenjak 2007

SIGI		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Bakulu	
2	Sairalie Intobongo	
3	Tondalabua	
4	Newalemba	
5	Pue Bawa	
6	Baka Keke	
7	Lolontamame	
8	Daeng Masiri	
9	Karanjalembah (Toma Dompo)	
10	Itondei	
11	Lamakarate	

TAWAILI		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Daemasia Pue Kurukire	
2	Nurudin	±1850 - ± 1870
3	Sopelemba	± 1873
4	Jangge Bodu Tome Tanggu	1873 – 1900
5	Jaelangkara	1900 – 1905
6	La Marauna	1905 – 1910 Raja Banawa
7	Lambulemba Papa I Jolo	1910 – 1912
8	I Joto (Joto Lembah atau Tome Ince Saleh, memerintah)	1912 – 1926
9	Muhammad Yusuf	1927 – 1931
10	Lamakampale (Lamakapala)	1931 – 1940
11	Jayalangkara	1940 - 1950

TOJO[900]		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Tokoh yang tak disebutkan namanya dari Bone	
2	Jupandan	

900. Lihat *Kerajaan2 Indonesia*, halaman 270.

3	Lasaera	
4	Latondo (Makole Wungku)	
5	I Raja	
6	Lariu	- 1902
7	Pagare (Papaiketa)	1902 – 1905
8	I Roe	1905 – 1914
9	Pariusi	1914 – 1915
10	Muslaeni	1916 – 1926
11	Tanjumbulu	1926 – 1942

TOLI-TOLI		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Baisungputra Datuamas	
2	Marahum (S. Jamalul Alam atau Timumun)	
3	Bantuan (Yusuf Malatuang Syaiful Muluk)	1810 – 1858
4	Bantilan Syafiuddin	1858 – 1868
5	Abdul Hamid	1868 – 1905
6	Haji Ismail	1905 – 1918
7	Moggi H. Ali	1918 - 1919
8	Yali Muhammad Saleh	1919 – 1926
9	Muhammad	1927 – 1929
10	Matata Daeng Masese	1929 – 1940an

UNA-UNA		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Haji Muhammad Laudjeng Daeng Materru	± 1916 – 1925
2	Lapalege	1925 – 1946
3	Bestari A. Laberahima	1946 – 1950
Sumber lain:[901]		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Sari Buah	1762-1791
2	Kasa Bunga	1791-1816
3	Amintasaria	1816-1836
4	Daramantasia	1836-1861
5	Ruiah Buasariah	1861-1883
6	Halidjah	1883-1893
7	Zakariah	1893-1899
8	Muhammad Marudjeng Daeng Materru	1899-1926
9	Lapalege Laborahima	1927-1946
10	Sainuddin Lasahido	1946-1950

901. Sumber: *Sejarah Tojo Una-Una*, halaman 182.

Raja-raja Sulawesi Selatan dan Barat

ALLAK		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
	I Lorong	- 1913
	La Wello	1913 – 1936
	Pasanrangi	1936 – 1950-an

ALITTA				
	Versi 1		**Versi 2**[902]	
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	We Cella		We Cella	1581-1603
2	La Masora		La Gojeng	1603-1608
3	We Tenrilekke		La Massora	1608-1617
4	We Cella		We Tenrilekka	1617-1642
5	La Pamessangi	1700 – 1740	Moppangnge	1642-1647
6	La Patasi		We Cella	1647-1677
7	We Tasi Arung Ganrang		To Dani	1677-1681[903]
8	La Posi		La Toware	1759-1779
9	To Sibengare		La Pamessangi	1779-1787
10	We Mapalewa		La Pattasi	1787-1789
11	Muhamed Tahir Daeng Mamaro		We Passa	1789-1792
12	Aru Patta Lacabalai	memerintah hingga 1859	La Posi	1792-1810
13	Aru Anipong (Nipo)	1859 – 1861	Tosibengareng	1810-1824
14	We Tenripadarang	1861 – 1902	We Mapalewa	1824-1825
15	La Pangorisang (La Pangurisang)	1902 – 1906	Muhammad Saleh Arung Sijelling	1825-1862
16	La Bonde (Bode) Karaeng Ri JampuE	1906 – 1908	We Cella	1862-1900
17	Andi Sitta		La Pangoriseng	1900-1906
18	Ake Puang Haji (Andi Ake)		La Bode	1906-1920
19	Labiding (Andi Abiding)			
20	Ambo Patta (Puang Ambo Patta)			
21	La Moddu (Puang Moddu)			
22	La Selle Daeng Mattola (Andi Selle Mattola)			
23	La Makkasau Daeng Perumpa (Andi Makkasau)			
24	La Binang			
25	La Bakkaredding (Labading)			
26	La Naga			
27	Andi Muhammad Nur			

902. Lihat Para *Penguasa Ajatappareng: Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis*, halaman 291.
903. Perhatikan bahwa setelah 1681 tahunnya melompat ke 1759.

BALANIPA[904]				
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**	**Keterangan**	**Generasi**
1	Todilaling (I Mannyambungi)	± 1550 – 1565		I
2	Tomepayung	± 1565 – 1580	Putera raja ke-1	II
3	Todijallo	± 1580 – 1590	Putera raja ke-1	II
4	Daetta	± 1590 – 1615	Putera raja ke-3	III
5	Todigayang	± 1615 – 1620	Putera raja ke-4	IV
6	Todiboseang	± 1620 – 1632	Putera raja ke-4	IV
7	Tomatindo di Burio	1632 – 1636	Putera raja ke-4	IV
8	Tomatindo di Sattoko		Putera raja ke-4	IV
9	Tolambus	1636 – 1638	Putera raja ke-7	V
10	Tomatindo di Buttu	1638 - ?	Putera raja ke-6	V
11	Tomatindo di Langgana	pemerintahan pertama	Putera raja ke-8	V
12	Pammerica		Cucu raja ke-4	V
13	Tomatindo di Langgana	pemerintahan kedua		V
14	Tomate Malolo		Putera raja ke-10	VI
15	Tomatindo di Limboro		Cucu raja ke-6	VI
16	Tokasi-asi		Cucu raja ke-6	VI
17	Tomatindo di Langgana	pemerintahan ketiga		V
18	Tomatindo di Barugana	pemerintahan pertama	Putera raja ke-11	VI
19	Tomatindo di Tammangalle		Putera raja ke-15	VII
20	Tomatindo di Patinna	merangkap raja Majene pemerintahan pertama	Cucu raja ke-8	V
21	Tomatindo di Barugana	pemerintahan kedua		VI
22	Tomatindo di Patinna	pemerintahan kedua		V
23	Daeng Manguju		Cucu raja ke-12	VII
24	Tomatindo di Patinna	pemerintahan ketiga		V
25	Tomatindo di Salassana	merangkap raja Majene	Putera raja ke-18	VII
26	Tomappelei Musuna	merangkap raja Majene	Putera raja ke-18	VII
27	Tomessu di Kotana		Putera raja ke-18	VII
28	Daeng Massikki		Putera raja ke-18	VII
29	Daeng Paewai		Putera raja ke-19	VIII
30	Tomatindo di Binanga Karaeng		Putera raja ke-18	VII
31	Tomatindo di Lanrisang		Cucu raja ke-15	VIII
32	Tomessu di Talolo		Putera raja ke-19	VIII
33	Tomattole Ganrana	merangkap raja Majene	Putera raja ke-26	VIII
34	Tomappelei Pattujunna	merangkap raja Majene	Putera raja ke-26	VIII
35	Pakkacoco		Putera raja ke-31	IX
36	Pakkalobang Tomate Maccida		Putera raja ke-33	IX
37	Tomonge Alelanna	merangkap raja Majene	Putera raja ke-34	IX
38	Panggandang	Pemerintahan pertama	Cucu raja ke-26	IX
39	Tomatindo di Marica	Pemerintahan pertama	Putera raja ke-35	X
40	Tomessu di Mosso		Cucu raja ke-26	IX
41	Tomatindo di Marica	Pemerintahan kedua		X

904. Sumber: *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan* Sampai Tahun 1905, halaman 30-31.

42	Paggandang	Pemerintahan kedua		IX
43	Tomatindo di Lekopadis	± 1850	Putera raja ke-36	X
44	Passaleppa (Amanna I Bali)	± 1850 – 1867	Putera raja ke-37	X
45	Tomelloli (Mandawari)	1870 – 1871 Pemerintahan pertama	Putera raja ke-44	XI
46	Tokape	1871 – 1873	Putera raja ke-43	XI
47	Tomelloli (Mandawari)	1873 – 1880 Pemerintahan kedua		XI
48	Tonaung Anjoro (Sanggaria)	Merangkap raja Majene	Cucu raja ke-37	XI
49	Tomelloli (Mandawari)	1885 – 1907 Pemerintahan ketiga		XI
50	Tomatindo di Judda	1909 – 1927	Cucu raja ke-36	XI
51	H. Andi Baso	1927 – 1947	Cucu raja ke-46	XIII
52	H. Andi Depu	1950 – 1957	Putera raja ke-50	XII
53	H. A. Syaribulan (Puang Mandaq)	1959 – 1963	Cucu raja ke-46	XIII

BANGGAE (MAJENE)		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Daetta Melanto	Abad ke-16
2	Tomatindo di Pattinna	
3	Tomatindo di Salassana	
4	Tomappelei Musuna	
5	Tomattole Ganranna	
6	Tomappelei Pattujunna	
7	Tomonge Alelanna	
8	I Sama To Buku	
9	La Tenribali Tomate Puabang (Tanrawalie - merangkap sebagai raja Balanipa)	±1850 - 1867
10	Sanggaria	1867 – 1874
11	Sang Kilang	1874 – 1889
12	Juwara (I Juwara)	1892 – 1907
13	Rammang Patta Lolo	1907 – 1950an

BARRU		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	To Pawalaie	
2	Matinroe ri Kasuwarang	
3	Matinroe ri Daung Lesang	
4	Matinroe ri Data	
5	Matinroe ri Bulu	
6	Matinroe ri Lamuru	
7	Matinroe ri Ajuarae	
8	Matinroe ri Tengana Barru	
9	Matinroe ri Duwa-jenna	
10	Toriwetae ri Bampung	

11	Matinroe ri Gamecana (ratu),	
12	I Limpo Daeng Manakko (ratu)	
13	La Mallewai Matinroe ri Tana Maridie	± 1702
14	Werakkia Karaeng Agangjene Matinroe ri Siddenreng (ratu)	
15	Toappo (To Appok)	merangkap *Addatuang* Sidenreng ke-8
16	Toapasawe Matinroe ri Amalana	
17	To Patarai Matinroe ri Masigina	± 1815 – 1836
18	I Tenripada Sultana Aisyah	1836 – 1887
19	Ratu I Batari Toja (ratu)	1887 – 1908
20	I Jonjo Karaeng Lembangparang	1908 – 1945
21	Bau Saheribanong Karaengta Tanite (ratu)	1949 – 1951
22	Sumange Ruka	1951 – 1960

BATULAPPA		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Puang Baso	1750 – 1780
2	Aru We Langrungi Puang Buttukanan Matinroe ri Sikkirana	± 1780 – 1800
3	Puang Mali Conra	± 1800 – 1840
4	Semagga	± 1840 – 1862
5	Puang Pondi Luwu	± 1862 – 1880
6	Puang Mosang Andi Baso	± 1880 – 1886
7	Andi I Coma	1886 – 1941
8	Andi Tanri	1941 – 1950
9	Puang Tarokko Padiring	1950 -

BINUANG		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
	Ammasangeng si Payung Langi	
	Daeng Malliyungang	
	Motawanging Daeng Mangiri	± 1850 - ± 1880
	La Maga Daeng Silasa	± 1888 – 1903
	Majalengka (Majalekka) Daeng Patompo	1905 – 1917
	La Pa Enrongi	1918 – 1929
	La Matulada Puanna Saleng	1930 – 1940-an

BONE		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	TumanurungE Ri Matajang (Matasi LompoE)	1392 – 1424
2	La Umasse Petta Panre BessiE (To Mulaie Panreng)	1424 – 1441
3	La Saliyu Karaeng Pelua' (Pasadowakki)	1441 – 1470
4	We Ban-ri Gau Daeng Marawa Arung Majang Makalappi Bisu-ri La Langpili Patta-ri La We Larang (MalajangE ri Chiena)	1470 – 1490

5	La Tenri Sukki MappajungE	1490-1517
6	La Wulio BotoE (MatinroE-ri Itterung)	1517-1542
7	La Tenrirawe Bongkange Matinrowe-ri Gucinna	1542-1584
8	La Icca' (Matinrowe-ri Adenenna)	1584-1595
9	La Pattawe (Matinrowe-ri Bettung)	? – 1590
10	We Ténrituppu (Matinrowe ri Sidenreng)	1590 – 1607
11	La Ténriruwa Sultan Adam (Matinrowe ri Bantaeng)	1607 – 1608
12	La Ténripale (Matinrowe ri Tallo)	1608 – 1626
13	La Madarémméng Matinrowe ri Bukaka	1626 – 1644
Bone diduduki Gowa		
	Tobala', Arung Tanete Riawang (bupati)	1644 – 1660
	La Madarémmeng Matinrowe ri Bukaka (diangkat kembali oleh Sultan Hasanuddin)	1667
Bone memperoleh kemerdekaannya kembali		
14	Arung Palaka (La Tenritatta Matinrowe ri Bontoala' Arung Palakka petta malampeE Gemme'na Daeng Serang)	1667 – 1696
15	La Patau Matanna Tikka Matinrowe ri Nagauléng	1696 – 1714 merangkap sebagai *datu* Soppeng ke-18
16	Batari Toja Daeng Talaga Arung Timurung Datu-ri Chitta Sultana Zainab Zakiyat ud-din binti al-Marhum Sultan Idris Azim ud-din (MatinroE-ri Tipuluna)	1714 – 1715 masa jabatan pertama merangkap sebagai *datu* Soppeng ke-22 serta 24 dan *datu* Luwu ke-23
17	La Padang Sajati To' Apawara Paduka Sri Sultan Sulaiman ibni al-Marhum Sultan Idris Azim ud-din (MatinroE-ri Beula)	1715 – 1720 merangkap sebagai *datu* Soppeng ke-19 dan 21
18	La Parappa To' Aparapu Sappewali Daeng Bonto Madanrang Karaeng Anamonjang Paduka Sri Sultan Shahab ud-din Ismail ibni al-Marhum Sultan Idris Azim ud-din	1720-1724 juga menjadi sultan Gowa ke-20 dengan gelar Tumamenanga ri Sambaopu dan raja (*datu*) Soppeng ke-20
	I-Mappaurangi Karaeng Kanjilo Paduka Sri Sultan Siraj ud-din ibni al-Marhum Sultan 'Abdu'l Kadir	1721 – 1724 juga menjadi sultan Gowa dengan gelar Tuammenang ri Pasi dan Sultan Tallo dengan gelar Tommaliang ri Gaukana
19	La Panuangi Toappawawoi Arung Mampu Karaeng Bisei Paduka Sri Sultan 'Abdu'llah Mansur ibni al-Marhum Sultan Idris Azim ud-din (MatinroE ri Bisei)	1724
20	Batari Toja Daeng Talaga Arung Timurung Datu-ri Chitta Sultana Zainab Zakiat ud-din binti al-Marhum Sultan Idris Azim ud-din (MatinroE-ri Tipuluna)	1724 – 1748 masa jabatan kedua merangkap sebagai *datu* Soppeng ke-22 serta 24 dan Luwu
	I-Danraja Siti Nafisah Karaeng Langelo binti al-Marhum	1738 – 1741

21	La Temmassonge Mappasossong To' Appaware' Petta Sultan 'Abdu'l Razzaq Jalal ud-din ibni al-Marhum Sultan Idris Azim ud-din (MatinroE ri-Malimongang)	1749 – 1775 merangkap sebagai *datu* Soppeng ke-25
22	La Tenritappu (Tan-ri Tappu) To' Appaliweng Arung Timurang Sultan Ahmad Salem Syamsuddin (Ahmad as-Saleh Shams ud-din) MatinroE-ri-Rompegading	1775 – 1812
24	La Mappatunru To Appatunru' Paduka Sri Sultan Muhammad Ismail Muhtajuddin (MatinroE-ri Laleng-bata)	1812 – 1823
25	I-Maneng Arung Data Paduka Sri Ratu Sultana Salima Rajiat ud-din (MatinroE-ri Kassi)	1823 – 1835
26	La Mappaseling Paduka Sri Sultan Adam Nazi mud-din (MatinroE-ri Salassana)	1835 – 1845
27	La Parenringi Paduka Sri Sultan Ahmad Saleh Muhi ud-din (MatinroE-ri Aja-benteng)	1845 – 1857
28	La Pamadanuka Paduka Sri Sultan Sultan Abdul-Hadi	1857 – 1860
29	La Singkara Rukka Paduka Sri Sultan Ahmad Idris (MatinroE-ri Lalambata)	1860 – 1871
30	I-Banri Gau Paduka Sri Sultana Fatima (MatinroE-ri Bola Mappare'na)	1871 – 1895
31	La Pawawoi Karaeng Sigeri (MatinroE-ri Bandung)	1895 – 1905
32	La Mappanyuki (Haji Andi Bacho La Mappanyuki Karaeng Silayar) Sultan Ibrahim	1931 1946 pemerintahan pertama
33	Andi Pabbenteng Petta Lawa	1947-1949
34	La Mappanyuki (Haji Andi Bacho La Mappanyuki Karaeng Silayar) Sultan Ibrahim	1957 – 1960 pemerintahan kedua

BUNTUBATU[905]		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Kapataha	
	Puang Batahan	1815 – 1840
	Puang Kalimbuang (Anggoro)	1840 – 1870
	Puang Madata	1870 – 1895
	Buttu	± 1920
	Bangon	1924 – 1940-an
	Jalante	1940-an

ENREKANG		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Takkebuku	
2	Kota	1540 – 1565
3	Bissu Tonang	1565 – 1590

905. Sumber: *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 166.

4	La Mappatunru	1590 – 1615
5	Baso Panca	1615 – 1645
6	Massaguni	1645 – 1680
7	Muhammad Yusuf Puang Daeng	1680 – 1709
8	Andi Toalala	1709 – 1825
9	Puang Baso	1825 – 1860
10	Andi Tonang	1860 – 1890
11	Pancaitana BungawaliE	1890 – 1918
12	Patta Ahmad	1918 - 1935
13	Muhammad Tahir	1935 - 1950

GOWA		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Tumanurunga	
2	Tumassalangga Baraya	
3	Puang Loe Lembang	
4	I Tuniatabanri	
5	Karampang ri Gowa	
6	Tunatangka Lopi	
7	Batara Gowa Tuminanga ri Paralakkenna	
8	Pakere Tau Tunijallo ri Passukki	
9	Daeng Matanre Karaeng Tumapa'risi' Kallonna	
10	I Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiyung Tunipallangga Ulaweng	1546 – 1565
11	I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibatte	
12	I Manggorai Daeng Mameta Karaeng Bontolangkasa Tunijallo	1565 – 1590
13	I Tepukaraeng Daeng Parabbung Tuni Pasulu	1593
14	I Mangari Daeng Manrabbia Sultan Alauddin Tuminanga ri Gaukanna	1593 – 1639
15	I Mannuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiyung Sultan Malikussaid Tuminanga ri Papang Batuna	1639 – 1653
16	I Mallombassi Daeng Mattawang Karaeng Bonto Mangape Sultan Hasanuddin Tuminanga ri Balla'pangkana	1653 – 1669
17	I Mappasomba Daeng Nguraga Sultan Amir Hamzah Tuminanga ri Allu'	1669 – 1674
18	Sultan Mohammad Ali (Karaeng Bisei) Tumenanga ri Jakattara	1674 – 1677
19	I Mappadulu Daeng Mattimung Karaeng Sanrobone Sultan Abdul Jalil Tuminanga ri Lakiyung	1677 – 1709
20	La Pareppa Tosappe Wali Sultan Ismail Tuminanga ri Somba Opu	1709 – 1711
21	I Mappaurangi Sultan Sirajuddin Tuminang ri Pasi	pemerintahan pertama
22	I Manrabbia Sultan Najamuddin	
23	I Mappaurangi Sultan Sirajuddin Tuminang ri Pasi	1735 pemerintahan kedua
24	I Mallawagau Sultan Abdul Chair	1735 – 1742
25	I Mappibabasa Sultan Abdul Kudus	1742 – 1753

26	Amas Madina Batara Gowa	1747 – 1795
27	I Mallisujawa Daeng Riboko Arungmampu Tuminanga ri Tompobalang	1767 – 1769
28	I Temmassongeng Karaeng Katanka Sultan Zainuddin Tuminanga ri Mattanging	1770 – 1778
29	I Manawari Karaeng Bontolangkasa	1778 – 1810
30	I Mappatunru (I Manginyarang) Karaeng Lembang Parang Sultan Abdul Rauf Tuminanga ri Katangka	1816 – 1825 pernah menjabat pula sebagai raja Tallo
31	La Oddang Riu (Oddanriu) Karaeng Katangka Sultan Muhammad Zaenal Abidin Abdul Rahman Amiril Mukminin Tuminanga ri Suangga	1825 – 1826 pernah menjabat pula sebagai raja Tallo
32	I Kumala Karaeng Lembang Parang Sultan Abdul Kadir Muhammad Aidid Tuminanga ri Kakuasanna (Abdul Kadir III)	1826 – 1893 pernah menjabat pula sebagai raja Tallo
33	I Malingkaan Daeng Nyonri Karaeng Katangka Sultan Idris Tuminanga ri Kalabbiranna	1893 – 1895
34	I Makkulau Daeng Serang Karaeng Lembangparang Sultan Husain Tuminang ri Bundu'na	1895 – 1906
35	I Mangimangi Daeng Matutu Karaeng Bonto Nompo Sultan Muhammad Tahur Muhibuddin Tuminanga ri Sungguminasa	1936 – 1946
36	Andi Ijo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Kadir Aidudin	1956 – 1960

–		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Andi Samang	±1880 – 1897
2	Buabara	1897 – 1940
3	Andi Coppo	1940 – 1952

LETTA[906]		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Puang To Manurung Lambing Susu	
2	Puang di Buttu Bajai	
3	Puang Massaguni	
4	Puang To Sakka	
5	Puang To Reu	
6	Puang Tomeraja	
7	La Galenrang	
8	Puang Batara Lomba	
9	Puang Lampe Susu	
10	Puang di Buttu Raja	
11	Tanri Lawa	
12	Baso Datu di Kawa	

906. Sumber: Yang Mulia Bapak Andi Hasan Parigi Petta Nassa.

13	Baso Sangga Rumah	
14	Puang di Panjing Maddea Kaju	
15	Puang Beteng	
16	Petta Tellu Mappajunge La Mappesanae Puang Tellu Tombinna Bakka Mattammanua Letta	
17	Andi Tenri Angka	
18	Puang Cemniring Matindo Wala Walanna	
19	I Makkulau Arung Puang Daeng Mattepu	
20	Puang Daeng Sitopa	
21	Arung Puang Daeng Mangopo	
22	Arung Puang Katoja	
23	Arung Cala Puang Daeng Pasari	
24	Lipu Puang Daeng Pako	
25	H. A. Kitta Puang Daeng Pawara	
26	A. Tawakkal H. Kitta	
27	Andi Lasanrong Kitta	
28	Barokke	
29	H. Andi Beroh Tjangke	
30	Andi Hasan Parigi Petta Nassa	

LUWU[907]		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Batara Guru	
2	Batara Lattu	
3	Tomanurung Simpuru Siang (Simpurusiang) Mannurunge ri Luwu (Tomanurunge ri Attangware)	
4	Anakaji	1293 – 1330
5	Tanpa Balusu	1330 – 1365
6	Tanra Balusu	1365 – 1402
7	Toappanange (Toampanage)	1402 – 1426
8	Batara Guru II	1426 – 1458
9	La Mariawa	1458 – 1465
10	Datu Risaung Le'bi	1465 – 1507
11	Dewaraja ManinggoE ri Bajo	1507 – 1541
12	Tosangkawana	1541 – 1556
13	Datu Maoge	
14	We Tenrirawe	
15	Patiarase (La Pattiware Daeng Parembung Sultan Muhammad)	
16	Patipasaung (Pati Passaung) Sultan Abdullah MatinroE ri Patimang	1615 – 1637
17	Petta MatinroE ri Gowa	1637 – 1663
18	Settiaraja MatinroE ri Tompotikka	1663 – 1704 pemerintahan pertama
19	MatinroE ri Polka	
20	Settiaraja MatinroE ri Tompotikka	pemerintahan kedua

907. Sumber: *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 188 - 189.

21	To Palaguna Sultan Muhammad Muhidin MatinroE ri Langkanana	1704 – 1706
22	Batari Tungke Sultana Fatima MatinroE ri Patturo	1706 – 1715
23	Batari Toja Sultana Siti Saenab MatinroE ri Timpuluna	1715 – 1748
24	We Tenrileleang	1748 – 1778 pemerintahan pertama
25	La Kaseng MatinroE ri KalukubodoE	1760 – 1765
26	We Tenrileleang	pemerintahan kedua
27	La Tenripeppang	1778 – 1810
28	We Tenriawaru	1810 – 1825
29	Laoddampero	1825 – 1854
30	Patipatau Toappanyimpa Laoddampero	1854 – 1880
31	MatinroE ri Tamalullu	1880 – 1883
32	Iskandar Opu Daeng Pali	1883 – 1901
33	Andi Kambo Opu Daeng Risompa MatinroE ri Bintana	1901 – 1935
34	Andi Djemma	1935 – 1965 pemerintahan pertama
35	Andi Jelling	
36	Andi Djemma	pemerintahan kedua
37	Andi Alamsyah (Andi Bau)	
38	Andi Tenripadang Opu Datu	
39	Andi Luwu Opu Daengna Patiware	1994-sekarang

MAIWA		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	La Calo	± 1850
2	La Pakanteng Muhammad Ali	1890 – 1905
3	La Sappewali	1905 – 1907
4	La Sini	1907 – 1918
5	La Naki	1919 – 1920
6	La Cori	1922 – 1925
7	La Oga	1925 – 1926
8	La Sassu	1926 – 1950 an

MALLUSETASI		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	I Simatanah (Ratu Aru I Samatana)	1906 – 1917
2	I Makung	1917 – 1932
3	Andi Calo (La Calo)	1932 – 1950

MALUA		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Kadere	
2	Patta Salassa	± 1780 – 1800
3	Tandi	± 1800 – 1820
4	Sira	± 1820 – 1840

5	Aru Silassa	± 1840 – 1870
6	Petta Siratang	± 1870
7	Assang	- 1890
8	La Gali	1890 – 1917
9	La Parang Barana Lolo	1917 – 1934
10	Tambone	1934 – 1940-an

MAMUJU		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Todipali	
2	Tomojammeng	
3	Malindo di Sambajanga	
4	Tomatindo di Puasana	
5	Kunjung Baram	
6	Pura Purabue (Matindo di Buttupaja	
7	Puatta Masaile	
8	Ana Puatta Karema	
9	Ammana Kombi	
10	Tomappelei Kasu ditana (Tomappelai Asugianna)	
11	Panre, Nai Latang	± 1850 – 1862
12	Abdul Rahman Nae Syukur	1862 – 1895
13	Karanene	1895 – 1908
14	Jalalu Amana Inda	1908 – 1950-an

NEPO		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	La Bongo	
2	I Timangratu	
3	La Makkaraka	
4	La Pasampoi	
5	La Pabbiseang	
6	La Ippung	
7	La Solong	
8	Laica	
9	I Messang	
10	I Simatanah (Ratu Aru I Samatana)	
11	Singkerukka	
12	I Makung	
13	La Calo atau Andi Calo	

PAMBUANG		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Tomerora Saba	
2	Daeng Palewa Tomelake (Tomelaki Bulawan)	
3	Daetta Risappu	

4	I Salarang (Tomatindo di Agamana)	
5	Tomassawe dikappai	
6	Tomatindo di Wata	
7	Tomepajung Patola	
8	Kapuang	
9	Puanna I Aso	
10	Pagandang	
11	I Jatilabalu Malotong	
12	Madusila	Pemerintahan pertama
13	Saeni	
14	Jalangkara	
15	Madusila	pemerintahan kedua
16	Anranata	1866 – 1888
17	I Latta	1888 – 1907
18	Simanagi Pakarama (Simanange)	1907 - 1921
19	Andi Batara	1921 – 1934
20	Tonra Lipu	1935 – 1952

PANGKAJENE[908]		
	Nama karaeng/ *regent*	**Tahun pemerintahan**
Ke*karaeng*an Pangkajene		
1	Karaengta Allu	
2	Johor (Johoro' atau Mappasoro)	
3	Pattola Daeng Malliongi	
4	Pasempa Daeng Paraga	
5	Mangaweang Daeng Sisurung	
6	Pancandak Daeng Sirua (Karaeng Bonto-Bonto)	
7	La Palambe Daeng Pabali (Karaeng Talllanga)	1824-1839 Pemerintahan pertama
8	Karaeng Kaluarrang	1840-1841
9	Ince Wangkang	1841-1842
	La Palambe Daeng Pabali (Karaeng Talllanga)	1842-1847 Pemerintahan kedua
10	La Sollerang Daeng Malleja	1847-1857
11	La Pappe Daeng Massiki	1857-1885
12	La Bapa Daeng Massale	1885-1893
13	La Djajalangkara Daeng Sitaba	1893-1918
14	La Mauraga Daeng Malliungang	1918-1942
15	Andi Burhanuddin	1942-1946
16	Andi Muri Daeng Lulu	1947-1960
Ke*karaeng*an Bungoro		
	La Palowong Daeng Pasampo	1824
	Mallantingang Daeng Pabeta	-1868
	Karaeng La Mannaggongang Daeng Pasawi (wakil)	

908. Sumber: *Sejarah Kekaraengan di Pangkep.*

	La Pabbicara Daeng Manimbangi	1893-1906
	Andi Tambi	
	La DolohaE Daeng Palallo	
	Andi Mustari	Camat Bungoro pertama
Ke*karaeng*an Balocci		
1	Karaeng Balocci I	
2	Karaeng Balocci II	
3	Karaeng Balocci III	
4	Karaeng Balocci IV	
5	Karaeng Balocci V	
6	Karaeng Balocci VI	
7	Karaeng Ammoterang Daeng Pabali	
8	Daeng Pabeta	
9	Karaeng Tinggia	
10	Karaeng Pattoddo	1881-1911
11	H. A. Kadir Daeng Matteppo	1911-1937
12	H. A.. Rahim Daeng Masalle	1937-1962
Ke*karaeng*an Labakkang (sebelumnya bernama kerajaan Lombasang)		
1	Somba Lombasang I	
2	Somba Lombasang II	
3	Somba Lombasang III	
4	Somba Lombasang IV	
5	Somba Lombasang V	
6	Somba Lombasang VI	
7	La Upe Karaeng Ilanga Rikasombana	Karaeng Labakkang pertama
8	I Balango Daeng Pasai	Wakil Karaeng
9	Pallajarang Daeng Mamangung	Wakil Karaeng
10	Baja-Baja Daeng Tantang	Wakil Karaeng
	I Arif Karaengta Kaluarrang Matinroe ri Balang	1749
11	I Tjalla Daeng Muntu Karaengta Ujung	1801
12	I Mannanggongang Daeng Pasawi	1820
13	I Ummarang Daeng Lira	1825
14	I Ali Daeng Lira Matinroa ri Balla Bulona	1831
15	I Late Daeng Muntu Matinrowa ri Papan Batunna	1831
16	I Mannanggongang Daeng Pasawi Niselonganga ri Bandung	1846
17	I Paga Daeng Pali Karaengta Lembaya Niselonganga ri Padang	1871
18	I Bapa Daeng Masalle Karaengta Gusung	1904
19	La Pappang Daeng Siruwa	1919
20	Andi Calla Daeng Muntu Karaeng Towaya	1929
21	Andi Bauru Daeng Gau Karaeng Loloa	1952-1965
Ke*karaeng*an Ma'rang		
	Daeng Mattola	
	La Tawakkal Daeng Marola	1920
	Andi Pintara'	
	Andi Makin	
	Andi Sadda'	

Kekaraengan Segeri		
	Datu GollaE	
	La Tenri Sessu Arung Pantjana Petta LaoE ri Segeri	
	La Abdul Wahab Mattotorangpage Daeng Mamangung	
	Andi Page	
Kekaraengan Mandalle		
	Mallewai Daeng Manimbangi	wafat 1848
	La Sumange Rukka Karaeng Kekeang	1848-1861
	La Pallawaruka Daeng Mallawa	1861-1909
	La Dongkang Daeng Massikki	
	Andi Sakka	

RAPPANG		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	We Tipu Uleng	
2	We Pawawoi	
3	La Makkarawi	merangkap pula sebagai *datu* Suppa
4	Songkoplawengnge	
5	We Cinang	
6	La Pasampoi	
7	La Pancaitana	Merangkap pula sebagai *datu* Suppa
8	La Pakkalongi	
9	We Dangkau	
10	Tonee	
11	We Tasi	
12	Todani	
13	La Tenri Tatta	
14	La Toware	
15	We Tenri Paonang	
16	La Pabittei	
17	We Madditana	
18	We Bangki	
19	La Panguriseng (merangkap sebagai *addatuang* Sidenreng ke-11)	
20	La Sadapotto (merangkap sebagai *addatuang* Sidenreng ke-12)	
21	I Tenri Fatimah (merangkap sebagai *addatuang* Sawitto)	

SANROBONE[909]		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Karaeng Pancabiluka	
2	Karaeng Pancabiluka ri Parangna	

909. Sumber: *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 438 - 439.

3	Karaeng Massawaya	
4	Karaeng Tunibosara	
5	Karaeng Tumenanga ri Parallakenna	
6	Karaeng Tumenanga ri Campaganna	
7	Karaeng I Pueu	
8	Karaeng Sidra (Karaeng Banyuarang I Tunijeqneq)	
9	I Mappadulung Daeng Mattimaung Karaeng Campagaya	
10	I Jatta Tojeng Karaeng Bontomajannang	
11	Pakkana Karaeng Pangkajenneq	
12	Tumenanga ri Masigiqna	
13	Tumenanga ri Sanrobone	
14	Tumenanga ri Paqrasanganna	
15	Tumenanga ri Laguruda	
16	La Patau	
17	I Memang Karaeng Bulu-bulu	
18	Bantang Daeng Ngilau Tumenanga ri Kabarana	
19	I Guttu Datu Lolo	
20	Pammusurang Daeng Pabeta	
21	Yusuf Daeng Marampu	
22	Baso Daeng Menjoka	
23	I Mallombasi Daeng Kilo	

SAWITTO				
Versi 1			**Versi 2**[910]	
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**	**Nama raja**	**Tahun pemerintahan**
1	Puang RisompaE		La Bangenge	1441-1466
2	I Tamanroli		La Teddulloppo	1466-1494
3	La Katu		La Pute Bulu	1494-1519
4	La PaleteangE (La Pute Bulu)	merangkap pula sebagai *datu* Suppa	La Paleteang	1519-1549
5	La Cella Mata		We Gempo	1549-1569
6	La Pancaitana	merangkap pula sebagai *datu* Suppa dan *arung* Rappang ke-7	La Cella Mata	1569-1582
7	We Pasulle Daeng Buleang	merangkap pula sebagai *datu* Suppa	La Pancaitana	1582-1603
8	La Tenri Sau	merangkap pula sebagai *datu* Suppa	We Pasulle	1603-1612
9	La Makkasau		La Tenripau (La Sampocacca	1612-1627
10	La Kuneng		La Makkasau	1627-1642
11	La Cibu		We Time	1642-1652
12	I Pasulle		La Toraja	1652-1677

910. Lihat *Para Penguasa Ajatappareng: Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis*, halaman 289.

13	La Tamma	1873 – 1912	To Dani	1677-1681
14	I Subaeda		La Tenritatta Daeng Tomaming	1681-1714
15			La Doko	1714-1759
16			La Kuneng	1812-1837
17			We Time	1837-1848
18			We Cinde	1848-1854
19			La Cibu	1854-1870
20			We Pasulle Daeng Bulaeng	1870-1886
21			La Pallawagau	1886-1901
22			La Tamma	1901-1912
23			We Beda	1912-1940
24			We Tenri	1940-1942
25			We Rukiya Bau Bocco Karaeng Balla Tinggi	1942-1960

SENDANA (CENRANA)		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Tonalarung Mangiwang	
2	Puatta I Kubur	
3	Puatta I Battayanna	
4	Puatta I Naung Luyo	
5	Tomatindo di Puasana	
6	Tomeluang Cera	
7	Puatta I Pappalang	
8	Kunjung Barani	
9	Tomatindo di Bembaga	
10	Pakkatiting Puanna I Bakku	
11	Tomaling	
12	Paccalo-calo	
13	Todiallung di Sirua	
14	Tomatindo di Balitung	
15	Arajang Matua	
16	Tomatindo di Tigas	
17	Tomappelei Ganrananna	
18	Jalangkara	
19	Samani	
20	Mangamang (I Notto)	± 1850 - ± 1865
21	I Sabu	
22	La Pasau	1865 – 1883
23	Tandiwali	1885 – 1889
24	I Merette	1889 – 1896
25	La Galigu	1896 – 1901
26	I Rukalumu	1901 – 1907

27	Pagiling	1907 – 1917
28	PawelaE	1917 – 1949

SIDENRENG		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
	Raja-raja bergelar *addaoang*	
1	La Mallibureng (sumber lain: Manurungnge ri Lowa) – *Addaoang* Sidenreng ke-1	
2	La Pawawoi (sumber lain Songkopulawengnge) – *Addaoang* Sidenreng ke-2	
3	La Makkarakka – *Addaoang* Sidenreng ke-3	
4	We Tipulinge – *Addaoang* Sidenreng ke-4	
5	We Pawawoi – *Addaoang* Sidenreng ke-5	
6	La Batara – *Addaoang* Sidenreng ke-6	
7	La Pasampoi – *Addaoang* Sidenreng ke-7	
8	La Pattedungi – *Addaoang* Sidenreng ke-8	
9	La Patiro – *Addaoang* Sidenreng ke-9	
10	We Abeng – *Addaoang* Sidenreng ke-10	
	Raja-raja bergelar *Addatuang*	
11	La Makkarakka – *Addatuang* Sidenreng ke-1	1634 – 1671
12	La Suni (La So'ni) Karaeng Massepe – *Addatuang* Sidenreng ke-2	
13	Todani – *Addatuang* Sidenreng ke-3	
14	La Tenri Tatta – *Addatuang* Sidenreng ke-4	
15	La Mallewai – *Addatuang* Sidenreng ke-5	
16	Bau Rukiyah – *Addatuang* Sidenreng ke-6	
17	Taranatie – *Addatuang* Sidenreng ke-7	
18	Toappo – *Addatuang* Sidenreng ke-8	
19	La Wawo – *Addatuang* Sidenreng ke-9	
20	La Panguriseng – *Addatuang* Sidenreng ke-10	
21	Sumange Rukka – *Addatuang* Sidenreng ke-11	1889 – 1904
22	La Sadapotto – *Addatuang* Sidenreng ke-12	1904 – 1906
23	La Cibu – *Addatuang* Sidenreng ke-13	

SOPPENG			
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**	**Gelar**
	Masa sebelum kedatangan Islam		
1	La Temmamala	1300 – 1350	ManurungngE ri Sekkannyili
2	La Maracinna	1350 – 1358	
3	Lamba	1358 – 1408	
4	We Tekkewanua	1408 – 1438	
5	La Makkanengnga	1438 – 1468	
6	La Makkarela	1468 – 1500	
7	La Pawiseang	1500 – 1530	

8	La Pasampoi SorompaliE	1530 – 1534	
9	La Manussa Towakkareng	1534 – 1556	MatinroE ri Tanana
10	La'de MabolongE	1556 – 1560	
11	La Mataesso Puang LipuE PatolaE	1560 – 1575	
12	La Sekkati MallajangE ri Asseleng	1575 – 1580	
13	La Mappaleppe PatolaE	1580 – 1601	
Masa setelah kedatangan Islam			
14	Beowe	1601 – 1620	
15	La Tenribali	1620 – 1654	MatinroE ri Addatuanna
16	We Adang	1654 – 1666	MatinroE ri Madello
17	Tenrisenge Toesa	1666 – 1696	MatinroE ri Salassana
18	La Patau Matanna Tikka	1696 – 1714 merangkap sebagai raja Bone ke-15	MatinroE ri Nagauléng
19	La Padang Sajati To' Apawara Paduka Sri Sultan Sulaiman ibni al-Marhum Sultan Idris Azim ud-din	1714 – 1721 pemerintahan pertama merangkap sebagai raja Bone ke-17	MatinroE-ri Beula
20	La Parappa To' Aparapu Sappewali Daeng Bonto Madanrang Karaeng Anamonjang Paduka Sri Sultan Shahab ud-din Ismail ibni al-Marhum Sultan Idris Azim ud-din	1721 – 1722 merangkap sebagai raja Bone ke-20 dan sultan Gowa ke-20	MatinroE ri Sombaopu
21	La Padang Sajati To' Apawara Paduka Sri Sultan Sulaiman ibni al-Marhum Sultan Idris Azim ud-din	1722 – 1727 pemerintahan kedua	MatinroE-ri Beula
22	Batari Toja Daeng Talaga Arung Timurung Datu-ri Chitta Sultana Zainab Zakiyat ud-din binti al-Marhum Sultan Idris Azim ud-din	1727 – 1737 pemerintahan pertama Merangkap sebagai ratu Bone ke-16 dan 20.	MatinroE-ri Tipuluna
23	La Tenriodang (La Tenri Oddang atau La Oddang Riu)	1737 – 1742	MatinroE ri Musuna
24	Batari Toja Daeng Talaga Arung Timurung Datu-ri Chitta Sultana Zainab Zakiyat ud-din binti al-Marhum Sultan Idris Azim ud-din	1742 – 1744 pemerintahan kedua	MatinroE ri Tipuluna
25	La Temmassonge Mappasossong To' Appaware' Petta Paduka Sri Sultan 'Abdu'l Razzaq Jalal ud-din ibni al-Marhum Sultan Idris Azim ud-din	1744 – 1746 Merangkap sebagai raja Bone ke-21.	MatinroE-ri Malimongang
26	La Tongeng	1746 – 1747	MatinroE ri Launa
27	La Mappajanci	1747 – 1765	

28	La Mappapoleonro	1765 – 1820	
29	Tenriawaru	1820 – 1840	
30	Tenriampareng	1840 – 1849	MatinroE ri Barugana
31	La Unru	1849 – 1850	MatinroE ri Tengngana Soppeng
32	La Onrong	1850 – 1858	
33	Tolempeng	1858 – 1878	
34	Abdul Gani	1878 – 1895	MatinroE ri PakkasaloE
35	Sitti Zainab	1895 – 1940	
36	H. Andi Wana	1940 – 1957	

SOPPENG RIAJA		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
	Andi Toto Petta Coa	
	Yusuf Andi Dagong (gelar Petta Soppeng)	

SUPPA				
Versi pertama			**Versi kedua**[911]	
	Nama raja	Tahun pemerintahan	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	La Bombang	± 1370 – 1400	We Teppulinge	1441-1466
2	We Tekewanua	± 1400 – 1405	La Teddulloppo	1466-1494
3	We Tipulinge	1495 – 1510	La Pute Bulu	1494-1519
4	La Teddung Loppo	1510 – 1530	La Makkarawi	1519-1564
5	La Pute Bulu	± 1544	We Lampe Welua	1564-1574
6	La Makkarawi	1559 – 1580 merangkap sebagai *arung* Rappang ke-3	We Tosappai	1574-1581
7	We Lampe Welua	1580 – 1608	La Pancaitana	1581-1603
8	Tosappae	1608 – 1610	We Pasulle	1603-1612
9	La Pancaitana	1610 – 1620 merangkap sebagai *arung* Rappang ke-7 dan *addatuang* Sawitto ke-6	La Tenrisessu	1612-1625
10	We Pasulle Daeng Buleang	1620 – 1640 merangkap sebagai *addatuang* Sawitto ke-7	Tomannippie	1625-1650
11	La Tenri Sau	1640 – 1650 merangkap sebagai *addatuang* Sawitto ke-8	We Tasi	1650-1677
12	Tomanipie	1650 – 1660	Todani (To Dani)	1677-1681
13	We Tasi	1660 – 1665	La Tentritatta Daeng Tomaming	1681-1714
14	La Tenritatta	1665 – 1670	La Doko	1714-1759
15	La Dongkong	1670 – 1675	La Toware	1759-1779

911. Lihat *Para Penguasa Ajatappareng: Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis*, halaman 290.

16	Todani	1675 – 1681	La Pamessangi	1779-1787
17	La Toware	1681 – 1700	La Sangka	1787-1812
18	La Pamessangi	1700 – 1740	La Kuneng	1812-1837
19	La Sangka	1740 – 1770	La Tenrilengka	1837-1861
20	La Kuneng Sultan Adam	1770 – 1820	We Tenriawaru Pancaitana Besse Kajuara	1861-1874
21	La Tenri	1820 – 1830	We Bubeng	1874-1901
22	I Towakka Arung Kalibong	1830 – 1855	La Mappanyuki	1901-1906
23	Basse Kajuara	1860 – 1881 merangkap pula sebagai ratu Bone	We Madelu	1906-1930
24	Madellung Aru Kajuwara	1881 – 1900	La Parenrengi Karaeng Tinggimae	1930-1943
25	La Mappanyuki	1902 – 1905 pernah menjabat pula sebagai sultan Bone	La Makkasau	1943-1946
26	La Parenrengi Karaeng TiggimaE	1905 – 1926	La Temmasongenge Abdullah Bau Massepe	1946-1947
27	La Makkasau	1926 – 1938	La Patettengi	1947-1949
28	Abdullah Bau Maseppe	1938 – 1947	We Soji Datu Kanjenne	1949-1952
29	Andi Cinta	1947 – 1950	La Kuneng	1952-1961
30	I Sugi Karaeng Kajene	1950 – 1959		

TALLO		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Karaeng LoE ri Sero	
2	Karaeng Tunilabu ri Suriwa	
3	Mangoyang Berang Karaeng Pasi (Tunipasuru’)	± 1511 - ± 1516
4	Karaeng Tumenanga ri Makkoayang (I Daeng Padulu)	
5	I Sambo Daeng Niasseng	1577 – 1590
6	I Mallingkaang Daeng Nyonri (Sultan Abdullah Awwalul Islam Karaeng Matoaya)	1593 – 1636
7	I Manginyarang Daeng Makkioq Karaeng Kanjiloq (Sultan Muzhaffar)	1636 – 1641
8	Karaeng Patingaloang (I Mangngadacinna Daeng Sitaba)	1641 – 1655 wali bagi Sultan Harun al Rasyid
9	I Mappaijo Daeng Manyurung (Sultan Harun al Rasyid)	1655 – 1673
10	I Mallawakkang Daeng Mattiring Karaeng Kanjilo (Sultan Abdul Kadir I)	1673 – 1710
11	I Mappaurangi Sultan Sirajuddin	1710 – 1714 Pemerintahan pertama
12	I Manrabia Sultan Najamuddin	1714 – 1735

13	I Mappaurangi Sultan Sirajuddin	1729 – 1735 Pemerintahan kedua
14	Sultan Saifuddin	1735 -1760
15	Tu Timoka Karaeng Sapanang	1760 – 1761
16	Sultan Abdul Kadir II	1761 – 1767
17	Sultana Siti Saleha I	1767 – 1777
	masa kosong	1777 – 1778
18	Batara Gowa (I Sangkilang)	1778 – 1780
19	Sultana Siti Saleha II	1780 – 1824
20	I Mappatunru (I Manginyarang) Karaeng Lembang Parang Sultan Abdul Rauf Tuminanga ri Katangka	1824 – 1825 pernah menjabat pula sebagai raja Gowa
21	I Kumala Karaeng Lembang Parang Sultan Abdul Kadir Muhammad Aidid Tuminanga ri Kakuasanna (Abdul Kadir III)	1825 pernah menjabat pula sebagai raja Gowa
22	La Oddang Riu (Oddanriu) Karaeng Katangka Sultan Muhammad Zaenal Abidin Abdul Rahman Amiril Mukminin Tuminanga ri Suangga	1826 – 1845 pernah menjabat pula sebagai raja Gowa
23	Batari Toja Siti Aisya Karaeng Bontomasugi	1845 – 1850
24	La Makkarumpa (La Makka Daeng Parani)	1850 – 1856
Diperintah langsung oleh pemerintah kolonial Belanda		

TANA TORAJA		
	Nama raja	
1	Puang Tamboro Langi	Puang Tomatasak I
2	Puang Papai Langi’	Puang Tomatasak II
3	Puang Payak Allo	Puang Tomatasak III
4	Puang Patta La Bantan	Puang Tomatasak IV
5	Puang Timban Boro	Puang Tomatasak V
6	Puang Kapu’ Boro	Puang Tomatasak VI
7	Puang Tangmarakia	Puang Tomatasak VII
8	Puang Paseno langi’	Puang Tomatasak VIII
9	Puang Tanggulungan	Puang Tomatasak IX
10	Puang Sampa Raya	Puang Tomatasak X
11	Puang Galugu	Puang Tomatasak XI
12	Puang Pabuaran Dolo	Puang Tomatasak XII
13	Puang Raya Sampin	Puang Tomatasak XIII
14	Puang Bullu Matua	Puang Tomatasak XIV

SANGGALA		**MAKALLE**		**MENGKEDEK**	
1	Puang Kanna’	1	Puang Tiang Langi’	1	Puang Kombo Langi’
2	Puang Palodang	2	Puang Todierong	2	Puang Salle bitti/biti
3	Puang Bullean Batu	3	Puang Polanga	3	Puang Sombolangi’
4	Puang Palloan	4	Puang Pate’dangan	4	Puang To Ma’Datu
5	Puang Pata’dungan	5	Puang Sugi’	5	Puang Belo Somba
6	Puang Pasalin	6	Puang Sui’ Lalong	6	Puang Tumba Pangloli
7	Puang Lima Bayu	7	Puang Parapa’	7	Puang Mata Kulla

8	Puang Pala' Mundan	8	Puang Lolo Angin		
9	Puang Pasang	9	Puang Payung Allo		
10	Puang Tandi Langi	10	Puang Tumba' Makongkan		
11	Puang Limbu Langi	11	Puang Tarongko		
12	Puang Laso' Rinding	12	Puang Rante Allo atau Puang Tondon (kepada distrik Makkale, 1923-1943)		
		13	Puang Adrial Duma' (A.D.) Andilolo (kepala distrik Makkale, 1943-1949)		
		14	Puang Tandi Lesse Rante Allo (kepala distrik Makkale, 1950-1960)		
		15	Puang Nataniel Taruk Allo Andilolo (kepala distrik Makkale, 1960-1962)		

TANETE[912]		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Datu GollaE (Arung Segeri)	
2	Daeng Ngaseng MatinroE ri Bokokajuru'na	
3	Daeng Majanna	
4	Torijallo ri Addenenna	
5	Daeng Sinjai	
6	Petta Tosugi (Petta Palse-laseE)	
7	Orang yang tak disebutkan namanya	
8	Ri MatinroE ri Buliana	
9	Daeng Mattalu	± 1672 - ± 1677
10	La Mappajanci Daeng Matajang	± 1677 – 1716
11	We Pattekana Daeng Tanisanga	1716 – 1735
12	La Tenriodang (La Tenri Oddang) Sultan Yusuf Fakhruddin Matinroe ri Musu'na (La Oddang Riu)	1735 – 1747 Menguasai Bone dan Soppeng. Menjadi raja Soppeng ke – 23.
13	Tenri Leleang	1747 – 1776
14	La Maddusila	1776 – 1807
15	La Patau	1807 – 1824 pemerintahan pertama
16	Daeng Tanisanga	1824 pemerintahan pertama
17	La Patau	1824 – 1825 pemerintahan kedua
18	Daeng Tanisanga	1825 – 1827 pemerintahan kedua
19	La Patau	1827 – 1840 pemerintahan ketiga

912. Sumber terutama diambil dari *Iyanae Poada-Adangengngi Attoriolongnge Ri Tanete*.

20	La Rumpang Maegga Matinroe ri Mutiara	1840 – 1856
21	La Tenriolle (Siti Aisyah La Tenriolle)	1856 – 1910
22	I Pancaitana Bunga Walie	1910 – 1926
23	I Pateka Tana	1926 – 1927
24	Andi Baso	1927 – 1950
25	Andi Iskandar	1950 – 1960

Sumber lain:

TANETE[913]		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Datu GollaE	1552-1564
2	Puang Lolo Ujung	1565-1568
3	MatinroE ri Bokojurunna	1567-1573
4	Daeng Ngasseng	1573-1585
5	Daeng Majannang	1585-1589
6	Torijallo ri Adenenna	1589-1593
7	Daeng Sinjai	1593-1597
8	Tumaburu Limanna	1597-1603
9	Petta Palasa LaseE	1603-1625
10	Petta MatinroE ri Buliana	1625-1666
11	Daeng Matulung	1666-1667
12	La Mappajanji Daeng Matayang	1667-1690
13	La Patteke Tana Daeng Tennisangnga	1690-1773
14	La Odangriyung Daeng Matinring Sultan Yusuf Fahruddin	1733-1744
15	We Tenri Leleang	1744-1750
16	Madusilla Tomampangewa	1750-1806
17	La Patau	1806-1824 Pemerintahan pertama
18	Daeng Tanisangnga	1824-1829
19	La Patau	1829-1840 Pemerintahan kedua
20	La Rumpang	1840-1855
21	We Tenri Olle	1855-1910
22	We Pancaitana Bungawali Arung Pancana	1910-1919
23	H. Andi Baso	1940-1950

TAPPALANG		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
	Puatta Karanamo	
	Gunung	
	Tomappelai Asugianna	
	Nae Latang	

913. Sumber: *Gerakan Sosial di Tanah Bugis*, halaman 171-172.

	Tomanggung Gagallang Patta ri Malunda	
	Abdul Rahman Nae Syukur	1867 – 1889
	Pabannari Daenna Tonga	1889 – 1892
	Andi Musu Paduwa Limba	1892 - 1908
	Bustari Patana Lantang	1908 - 1937
	Abdul Hafid	1937 – 1950-an

WAJO[914]				
Keterangan: E = Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905 W = Wajo' Pada Abad XV-XVI				
Kerajaan Cinnotabi (raja bergelar *arung*)				
Urutan *Arung* Cinnotabi		Nama raja	Tahun pemerintahan	
1		La Paukke	Abad ke-14	
2		We Panangngareng		
3		We Tenrisui (W) atau We Tenri Sui' (E)		
4		La Patiroi		
5		La Tenribali dan La Tenri Tippe (W) atau La Tenritappek (E)		
Pemerintahan para *batara* Wajo				
Urutan *batara* Wajo		Nama raja	Tahun pemerintahan	
1		La Tenribali		
2		La Mataesso		
3		La Pate'dungi To Samallangi (W) atau La Pattedungi To Samallangi' (E)	1436 – 1456 (E)	
Pemerintahan para *arung matoa* Wajo				
Urutan *arung matoa* Wajo		Nama raja	Tahun pemerintahan	
W	E		W	E
1		La Palewo To Palipu'	1474 – 1481	1456 – 1466
2		La O'bi' Settiriware' (W) atau La Obbi' Settriware (E)	1481 – 1486	1466 – 1469
3	1	La Tenriumpu' To Langi' (W) atau La Tenri Umpu' To Langi' (E)	1486 – 1491	1474 – 1482
4	2	La Tadampare' Puang ri Ma'galatung (W) atau La Tadangpare Puang ri Maggalatung (E). Sumber W menyatakan bahwa setelah ini kosong tiga tahun	±1491 – 1521	1482 – 1487
5	3	La Tenripakado To Nampe (W) atau La Tenri Pakado To Nampe (E)	1524 – 1535	

914. Sumber: *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, halaman 206 - 209, dan Wajo' Pada Abad XV - XVI, halaman 574 - 578.

	4	La Tadampare' Puang ri Ma'galatung (W) atau La Tadangpare Puang ri Maggalatung (E).		1491 – 1521 Sumber W tidak menghitung pemerintahan kedua ini
	5	La Tenripakado To Nampe (W) atau La Tenri Pakado To Nampe (E)		1524 – 1535 Sumber W tidak menghitung pemerintahan kedua ini
6 angka urutan bersesuaian setelah ini		La Temmasonge	1535 – 1538 setelah ini sumber W dan E bersesuaian dalam angka tahunnya	
7		La Warani To Temmagiang	1538 – 1547	
8		La Mallageni	1547 (dua bulan)	
9		La Mappauli To Appamadeng (W) atau La Mappapuli To Appamadeng (E)	1547 – 1564	
10		La Pakoko' To Pa'bele' (W) atau La Pakoko To Pabbele (E)	1564 – 1567	
11		La Mungkace' To U'damang (W) atau La Mungkace To Uddamang (E)	1567 – 1607	
12		La Sangkuru Patau' Mulajaji Sultan Abdurrahman (W) atau La Sangkuru Patau Sultan Abdur Rahman (E)	1607 – 1610	
		Lowong	1610 – 1612	
13		La Mappepulu To Appamole	1612 – 1616	
14		La Samalewa To Appakiu(ng). Sumber E mencantumkan Appakiu.	1616 – 1621	
15		La Pakkallongi To Alinrungi (W) atau La Pakalongi To Allinrungi (E), juga dikenal sebagai To Ali	1621 – 1626 pemerintahan pertama	
		Lowong		
16		To Mappassaungnge La Passaung (W) atau La Mappasaunge' (E)	1627 – 1628	
17		La Pakkallongi To Alinrungi (W) atau La Pakalongi To Allinrungi (E), juga dikenal sebagai To Ali	1628 – 1636 pemerintahan kedua	
18		La Tenrilai' To U'dammang atau To A'dumemmang	1636 – 1639	
19		La Sigajang To Bunne (W) atau La Isigajang To Bunne (E)	1639 – 1643	
20		La Makkaraka To Patemmui	1643 – 1648	
21		La Temmassonge' Puanna Daeli (W). Sumber E mencantumkan Daelli.	1648 – 1651	
22		La Paramma' To Rewo (W) atau La Paremma Torewo (E).	1651 – 1658	
23		La Tenrilai' To Sengngeng (W) atau La Tenrilai' Tosengngeng (E)	1658 – 1670	

24	La Palili' To Malu' Puanna Cella' (W) atau La Palili Tomallu (E)	1670 – 1679
25	La Pariusi Daeng Manyampa	1679 – 1699
26	La Tenrisessu' To Timo'e Puanna To Denra (W) atau La Tenrisessu' Tomoe/ To Denra (E)	1699 – 1702
27	La Mattone' To Sakke' Daeng Paguling Puanna La Rumpang (W) atau La Mattaone La Sakke Daeng Paguling Puanna Larumpang (E)	1702 – 1703
28	La Galigo To Sunia (W) atau La Galigo Tosennia (E)	1703 – 1712
29	La Tenriwerung Puanna Sangaji (W) atau La Tenri Werung (E)	1712 – 1715
30	La Salewangeng To Tenrirua (W) atau La Salewangent to Tenriruwa (E)	1715 – 1736
31	La Maddukelleng	1736 – 1754
32	La Ma'danaca (W) atau La Maddanaca (E)	1754 – 1755
33	La Passaung Puanna La Omo'	1758 – 1761
34	La Mappajung Puanna Salewong (tidak ada dalam daftar W) – hanya disebutkan saja lowong selama 25 tahun.	1764 – 1767
35	La Malliungeng To Alleong	1767 – 1770
	kosong	1770 – 1795
36	La Mallalengeng La Cella Puanna To Appamadeng	1795 – 1817
	kosong	1817 – 1821
37	La Manang To Appamadeng Puanna Raden Gallong (W) atau La Mamang Toappamadeng Radeng Gallong (E)	1821 – 1825
	kosong	1825 – 1839
38	La Pa'dengngeng Puanna Palaguna	1839 – 1845
	kosong	1845 – 1854
39	La Pawellangi Pajumperoe Datue ri Akkajeng	1854 – 1859
40	La Cincing Akil Ali	1859 – 1885
41	La Koro Arung Padali	1885 – 1891
	kosong	1891 – 1892
42	La Passamula' Datu Lompulle	1892 – 1897
	kosong	1897 – 1900
43	Ishak Manggabarani Karaeng Mangeppe' Datu Pammana	1900 – 1916
	kosong	1916 – 1926
44	La Tenri Od'ang (W) atau La Tenri Oddang (E)	1926 – 1933
	kosong	4 bulan
45	Haji Andi Mangkona	1933 – 1949

Kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tenggara

BUTON[915]

	Nama raja	Tahun pemerintahan
	Para penguasa bergelar raja	
1	Wa Kaa Kaa	
2	Bulawambona	
3	Bataraguru	
4	Tuarade	
5	Rajamulae	

Para penguasa bergelar sultan

Catatan:

T = Tanailandu

K = Kumbewaha

Ta = Tapi-Tapi

T ke-1 artinya kaum Tanailandu pertama yang menduduki singgasana Buton.

	Nama pribadi	Nama lain	Gelar Sultan	Kaum	Tahun pemerintahan
1	Lakilaponto Gelar: Sultan Kaimuddin.	Latolaki, Halu-oleo, Timbang-timbangan, Murhum	Kaimuddin		1491 – 1537 Semenjak 1511 menjadi sultan Buton pertama
2	La Tumparasi	Boleka, Musabuna I Boleka			1545 – 1552
3	La Sangaji	Makengkuna			1566 – 1570
4	La Elangi	Mobolina Pauna	Dayanu Ikshanuddin	T ke-1	1578 – 1615
5	La Balawo	Kamaruddin, Mosambuna I Watole, Sangia Watole	Abdul Wahab	T ke-2	1617 – 1619
6	La Buke	Mosabuna I Kembewaha, Sangia La Kumbewaha	Gafurul Waduudu	K ke-1	1632 – 1645
7	La Saparagau	Kopogaana Pauna, Sangia I Wawoangi		T ke-3	1645 – 1646
8	La Cila	Ali, Gogoli Liwuto	Mardan Ali	T ke-4	1647 – 1654
9	La Awu	La Ode Lay, Kaicili (Kaitsyili) Lau, Moposuruna Arataana	Malik Sirullah	T ke-5	1654 – 1664
10	La Simbata	Mosabuna I Lea-Lea	Adilil Rakhiya	T ke-6	1664 – 1669
11	La Tangkaraja	La Tunga, Musabuna I Lakambau	Kaimuddin	T ke-7	1669 – 1680
12	La Tumpamana	Cili-Cili, Mosabuna I Kaesabu	Zainuddin	T ke-8	1680 – 1689
13	La Umati	La Bele, Sangia Kopea	Liyauddin Ismail	T ke-9	1689 – 1697
14	La Dini	Kabumbu, Daeng Malaba	Syaifuddin	K ke-2	1697 – 1704

915. Sumber: *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton) I, II, dan III.*

15	La Rabaenga	Buana Bone	Syaiful Rijali	Ta ke-1	1702 (hanya 7 hari)
16	La Sadaha	La Idi, La Mane, Mosabuna	Syamsuddin	T ke-10	1704 – 1709
17	La Ibi	La Woelangke, Mosabuna I Lawangke, Oputa Momabelana	Nasraruddin	T ke-11	1709 – 1711
18	La Tumparasi	Mosabuna I Jupanda	Muluhiruddin Abdul Rasyid		1711
19	Lang Kariri	Raja Lasselin, Oputa Sangia, Sangia Manuru	Sakiyuddin Durul Alam	K ke-3	1712 – 1750
20	La Karambau	Himayatuddin, Oputa Mosabuna I Wasuamba, Oputa Mosabuna I Koo	Himayatuddin	T ke-13	1751 – 1752 pemerintahan pertama
21	Hamim	Sakiyuddin, Sangia Wolowa	Sakiyuddin	K ke-4	1752 – 1759
22	La Seha	La Maani, Sangia I Tobe-Tobe	Rafiuddin	K ke-5	1759 – 1760
23	La Karambau	Himayatuddin, Oputa Mosabuna I Wasuamba, Oputa Mosabuna I Koo	Himayatuddin	T ke-13	1760 – 1763 pemerintahan kedua
24	La Jampi	Galampa Batu, Oputa Mosabuna I Rakia, Oputa Lakina Agama Mancuana	Kaimuddin	K ke-6	1763 – 1788
25	La Masalumu	Muslim, Oputa Mosabuna I Wandailolo, Oputa Lakina Sorawolio	Alimuddin	Ta ke-2	1788 – 1791
26	La Kopuru	Moediddinen, Sangia Lawangke	Muhuyuddin Abdul Gafur	T ke-14	1791 – 1799
27	La Badaru	Badaruddin, Oputa Lakira Agama Ana	Dayanu Asraduddin	K ke-7	1799 – 1822
28	La Dani	Oputa Musabuna I Baluwu, Oputa Lakina Sorawolio Ana	Muhammad Anharuddin	Ta ke-3	1822 – 1823
29	Muhammad Idrus	Aedurusu Matambe, Mokobadiana, Oputa I Kuba, Oputa Mancuana	Kaimuddin I	K ke-8	1824 – 1851
30	Muhammad Isa	Oputa I Tanga, Sangia I Badia, Sangia I Tobe-Tobe	Kaimuddin II	K ke-9	1851 – 1871
31	Muhammad Salihi	Oputa I Munara	Kaimuddin III	K ke-10	1871 – 1885
32	Muhammad Umar	Oputa I Baria, Sangia I Baria	Kaimuddin IV	T ke-15	1885 – 1904
33	Muhammad Asyikin	Oputa I Antara Maedani	Adilil Rakhiym	Ta ke-4	1906- 1911
34	Muhammad Husein	Oputa I Talumbulana, Oputa I Alemari	Bayanu Ikshanu Kaimuddin	T ke-16	1914

35	Muhammad Ali	Oputa Maogena Bukuna, Oputa Moilaakana Kaweo, Oputa I Dalana Owe	Muhammad Ali Kaimuddin	Ta ke-5	1918 – 1921
36	Muhammad Syafiu		Muhammad Syafiul Anami	K ke- 11	1922 – 1924
37	Muhammad Hamidi	Oputa Moilana I Malige, Oputa Moilaakana Kaweo	Muhammad Hamidi Kaimuddin	K ke-12	1928 – 1937
38	Muhammad Falihi	Oputa I Badia, Oputa Moilana I Badia	Muhammad Falihi	K ke-13	1938 – 1960

MUNA[916]		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Zulzaman	
2	Sugi Patola	
3	Sugi Laende	
4	Sugi Patanai	
5	Sugi Ambona	
6	Sugi Manuru	
7	Lakilaponto	
8	Lapoasu	
9	Titakono	
10	Tikara Wawono	
11	Saidhi Dunani	
12	La Ode Ngkadiri (Sangia Kaindea)	
13	Wa Ode Wakelu (permaisuru Sangia Kaindea)	
14	La Ode Idris	
15	Abdurrachman (Sangia Latugho)	
16	La Ode Huseini	
17	La Ode Kentu Koda (Kantolato)	
18	La Ode Murusali (Sangia Gola)	
19	La Ode Ngkumabusi (Koburu Te Kalolai)	
20	La Ode Sumaili (Omputo Nesombo)	
21	La Ode BulaE (Sangia Laghada)	
22	La Ode Ngkada (Kantolalo Anahi)	
23	La Ode Ali (Sangia Sarakia)	
24	La Ode Kaili (Sangia Tetobhea)	
25	La Ode Moh. Makutubu (Milano Te Laende)	
26	La Ode Afiuddin (Milano Te Waara)	Merangkap sultan Buton
27	La Ode Rere (Aroo Wuna)	
28	La Ode Dika (Komasigino)	
29	La Ode Pandu	1946-1959

916. Lihat *Peranan Elite dalam Proses Modernisasi Suatu Studi Kasus di Muna*, halaman 300-303.

RAJA-RAJA DI MALUKU & PAPUA

Raja-raja di Maluku

BACAN			
	Nama raja		**Tahun pemerintahan**
	Said Muhammad Bakir (Said Husin)		abad ke-14
	Muhammad Hasan		
	Kolano Sida Hasan		
	Zainal Abidin		1522 -
	Kaicil Bolatu (Bayanu Sirullah)		
	Sultan Alauddin I (Don Joao)		
	Muhammad Ali		
	Sultan Alauddin II		1660 – 1706
		Sumber lain	
	Kaicil Musa (Sultan Malikiddin)	Sultan Musom	
	Kaicil Kie (Sultan Nasruddin)	Sultan Mansur (dinobatkan 19 Juli 1683)	
	Tarafannur		
	Muhammad Sahiddin		
	Iskandar Alam		
	Kaicil Ahmad		
	Kamarullah		
	Muhammad Hayatuddin Syah		1826 – 1862
	Muhammad Sadik Syah		1862 – 1889
	Masa kosong		1889 – 1900
	Sultan Muhammad Usman Syah		1900 – 1917
	Sultan Dede Muhsin Usman Syah		1917 -

JAILOLO		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Zainal Abidin Syah	
2	Sultan Yusuf	1527 - 1533
3	Firuz Alauddin	1533 - 1534
4	Katarabumi	1534 - 1551
5	Saubo	
6	Kaicil Kalamata	1652
7	Kaicil Alam	1652 - 1684
Restorasi Kerajaan Jailolo		
	Muhammad Arif Billa	- 1807
	Sultan Muhammad Asgar	1807 - 1832
	Hajuddin	
	Dano Baba Hasan	

SAMU SAMU		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
	Moyang Kota	
	Moyang Silawane	
	Raja Samu Samu	1556
	Raja Samu Samu I	1643
	Raja Samu Samu II	1710
	Raja Samu Samu III	1782
	Raja Samu Samu IV (Tuan Gede)	1854
	Raja Samu Samu V	1976
	Raja Samu Samu VI	1980

TERNATE		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Guna	
2	Ciko (Mashur Malamo)	1257 - 1272
3	*Kolano* Yamin	1272 - 1284
4	*Kolano* Siale	1284 - 1298
5	*Kolano* Kamalu	1298 - 1304
6	*Kolano* Ngara Malamo	1304 - 1317
7	Patsyaranga Malamo	1317 - 1322
8	Sida Arif Malamo	1322 - 1331
9	Paji Malamo	1331 - 1332
10	Sah Alam	1332 - 1343
11	Tulu Malamo	1343 - 1347
12	Boheyat (Kaicil Kie Mabiji)	1347 - 1350
13	Ngolo Macahaya (Cahaya Laut atau Molomateya)	1350 - 1357
14	Momole	1357 - 1359
15	Gapi Malamo	1359 - 1372
16	Gapi Baguna I	1372 - 1377
17	Kumala Putu	1377 - 1432
18	Gapi Baguna II	1432 - 1465
19	Marhum	1466 - 1486
20	Zainalabidin	1486 - 1500
21	Bayan Sirullah (Bayang Ullah atau Boleif	1500 - 1522
22	Deyalo (Deijalo)	1522 - 1529
23	Boheyat	1529 - 1532
24	Tabariji	1532 - 1535
25	Hairun	1535 - 1570
26	Sultan Baabullah	1570 - 1583
27	Said (Sa'id al Din atau Saidi Barakati)	1584 - 1610
28	Mudaffar	1610 - 1627
29	Hamzah	1627 - 1648
30	Mandar Syah	1648 - 1675
31	Sibori	1675 - 1689

	Dipegang para *bobato*	1689 - 1692
32	Kaicil Toloko (Tulloco)	1692 - 1714
33	Raja Laut	1714 - 1751
34	Oudhoorn Kaicil Ayan Syah	1751 - 1754
35	Amir Iskandar Muda (Sahmardan atau Zwammerdam	1754 - 1777
36	Arunsah	1777 - 1796
37	Sarka (Sarkan)	1796 - 1801
38	Muhammad Yasin	1801 - 1807
39	Sultan Muhammad Ali (Sarmole van der Parra)	1807 - 1823
40	Muhammad Zain	1823 - 1861
41	Muhammad Arsyad	1861 - 1876
42	Ayanhar	1876 - 1900
43	Haji Muhammad Ilham	1900 - 1902
44	Haji Muhammad Usman Syah	1902 - 1914
	Diperintah *jogugu*	1914 - 1927
45	Jabir Syah	1927 - 1975

TIDORE			
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**	**Nama lain**
1	Kolano Sah Jati		
2	Kolano Bosamuangi		
3	Kolano Bubu		
4	Kolano Balibanga		
5	Kolano Buku Madoya		
6	Kolano Kie Matiti	1317 - ?	
7	Kolano Sele		
8	Kolano Metagena		
9	Kolano Nuruddin	1334 – 1373	
10	Kolano Hasan Syah	1373 – ?	
11	Caliati atau Ciriliati	1495 – 1512	Sultan Jamaluddin
12	Almansyur	1512 – 1526	
	Kosong	1526 – 1529	
13	Amiruddin Iskandar Zulkarnain	1529 – 1547	
14	Kie Mansyur	1547 – 1569	
15	Miri Tadu Iskandar Sani Amir ul-Muzlimi	1569– 1586	
16	Gapi Maguna	1586 – 1599	Zainal Abidin Sirajuddin, Kaicil Sirajul Arafin
17	Mole Majimu	1599 – 1626	Molemgini Jamaluddin, 'Alauddin Syah
18	Ngora Malamo	1626 – 1633	'Alauddin ibni Sultan Jamal ud-din
19	Gorontalo	1633 – 1653	Kaicil Sehe
20	Magiau	1653 – 1657	Saiduddin ibni Sultan 'Ala uddin, Kaicil Saidi

21	Syaifuddin	1657 – 1659	Kaicili Golofino
22	Hamzah Fakhruddin	1659 – 1700	Kaicil Seram
23	Abul Falahal-Mansyur	1700 – 1708	
24	Hasanuddin	1708 – 1728	
25	Amir Muhiddin Bifallilajij	1728 – 1756	Kaicil Bisalalihi
26	Jamaluddin	1756 – 1780	
27	Patra Alam	1780 – 1784	
28	Kamaluddin	1784 – 1797	
29	Nuku	1797 – 1805	Saidul Jehad Muhammad al-Mabus Amiruddin Syah, Kaicil Paparangan, Jou Barakati
30	Muhammad Zainal Abidin	1805 – 1810	
31	Muhammad Tahir	1810 – 1821	Prins Missool
32	Akhmadul Mansyur	1821 – 1857	
33	Akhmad Safiuddin	1857 – 1865	Khalifat ul-Mukarram Sayid-din Kaulaini ila Jaabatil Tidore, Jou Kota
34	Johar Alam	1865 – 1867	
35	Akhmad Kawiuddin Alting	1867 – 1905	Kaicil Syahjoan
	Lowong	1905 – 1946	
36	Zainal Abidin Alting Syah	1946 – 1956	

Raja-raja di Papua

ATI-ATI		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Mampati Bauw	± 1850
2	Wainesin	± 1860
3	Yusuf K.	± 1890 – 1897
4	Haji Haruna	1899 – 1932
	Diperintah oleh Fatagar (1932 – 1942)	
5	Ali	1942 – 1953

FATAGAR		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Tewar	± 1724
2	Nawai	± 1730 – 1750
3	Nasurai	± 1750 – 1780
4	Naraitat	± 1780 – 1810
5	Parar	± 1810 – 1850
6	Kanumbas	± 1850 – 1870
7	Kurkur	± 1870 – 1878
8	Masa kosong	1878 – 1899
9	Mafa	1899 – 1942
10	Kamaruddin	1942 – 1943
11	Ahmad Uswanas	1943 -

KOMISI (SRAN KAIMANA atau UMISI)[917]		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
	Alam	1872 – 1904
	Way	1904 – 1945
	Samay	
	Imaga	
	Basir Onin	
	Woran	
	Nduvin	
	Naro'e	
	Achmad Aiturauw	1923-1966
	Muhammad Rais Aiturauw	1966-1980
	Abdul Hakim Achmad Aiturauw	1980-sekarang

MISOOL LILINTA		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Abdul Majid	1872 – 1904
2	Usman	1904 – 1945

MISOOL WAIGAMA		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Abdul Rahman	1872 – 1891
2	Hassan	1891 – 1916
3	Samsuddin Tafalas	1916 – 1953

RUMBATI		
	Nama raja	Tahun pemerintahan
1	Sakidan Bauw	±1678 – 1700
2	Tela Bauw	± 1700 – 1720
3	Manimomoa Bauw	± 1720 – 1750
4	Gefasani Bauw	± 1750 – 1770
5	Natiasa Bauw	± 1770 – 1780
6	Ritubuan Bauw	± 1780 – 1800
7	Anakoda Bauw	± 1800 – 1820
8	Patmaguri Bauw	± 1820 – 1840
9	Mampati Bauw	± 1840 – 1850
10	Nawarisa	± 1850 – 1870
11	Tajam	± 1870 – 1875
12	Ismail	± 1875 – 1880
13	Abdul Jalil	± 1880
14	Samali	1880 – 1902
15	Muhammad	1902 – 1945
16	Ibrahim	1946 – 1962

917. Sumber: *Renaissance Nusantara: Edisi Raja Sran Kaimana VIII*, halaman 5.

SALAWATI		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Abdul Kasim	1873 – 1890
2	Muhammad Amin	1890 – 1918
3	Baharuddin Arfan	1918 – 1935
4	Abu'l Kasim Arfan	1935 - ?

SEKAR		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
1	Weker	± 1850
2	Kapita (Pandai)	1880 – 1899
3	Lakate	± 1899
4	Pipi	1911 – 1915
5	Singgaraja	1915 – 1936 pemerintahan pertama
6	Abdul Karim Baraweri	1936 – 1942
7	Singgaraja	1942 – 1945 pemerintahan kedua
8	Abdul Karim	1945 – 1946

WAIGEO		
	Nama raja	**Tahun pemerintahan**
	Ganyum	1901 – 1918

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Drs. Ma'moen (ketua). *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*, Departemen Pendidikan & Kebudayaan–Bagian Proyek Inventarisasi & Pembinaan Nilai-nilai Budaya Provinsi Sumatera Selatan, 1991/ 1992.

Abdullah, Prof. Dr. Hamid. *Andi Pangerang Petta Rani: Profil Pemimpin yang Manunggal dengan Rakyat*, Grasindo, Jakarta 1991.

Abdullah, Taufik (ed.). *Sejarah Lokal di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Abidin, Prof. Mr. Dr. Andi Zainal. *Wajo' Pada Abad XV–XVI: Suatu Penggalian Sejarah Terpendam Sulawesi Selatan dari Lontara'*, Penerbit Alumni, Bandung, 1985.

________, dibantu oleh: Sabang, Drs. Sudirman. *Capita Selecta Kebudayaan Sulawesi Selatan*, Hasanuddin University Press, Ujungpandang, 1999.

Adiningrat, KRAT. Mas'ud Thoyib. *Renaissance Nusantara: Edisi Raja Sran Kaimana VIII*.

Adjin, Abdul Hadi; Y. A. H., Salim; Sahib, Rosihan. *Sejarah Perjuangan Rakyat Belitung 1924–1950*, 1992.

Agung, Prof. DR. A.A. Gde Putra. *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

Agung, A.A. Gde Putra; Wirawan, A.A. Bagus; Sutjiatiningsih, Sri; Kuswiah, Wiwi (penyunting). *Puputan Badung 20 September 1906: Perjuangan Raja dan Rakyat Badung Melawan Kolonialisme Belanda*, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional-Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional-Direktorat Jenderal Kebudayaan-Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1999.

Ahmad, A. Samad. *Sulalatus Salatin: Sejarah Melayu*, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, 1997.

Ahmad, Zakaria; Ibrahim, Muhammad; Sulaiman, Nasruddin. *Cut Nyak Meutia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Direktorat Jenderal Kebudayaan - Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional - Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta, 1993.

Alisjahbana, Puti Balkis. *Natal Ranah Nan Data: Kisah Perjalanan Dilengkapi Pokok-pokok Adat Istiadat Perkawinan Daerah Natal*, Dian Rakyat, 1996.

Alkhajar, Eka Nada Shofa. *Pahlawan2 Yang Digugat: Tafsir Kontroversi Sang Pahlawan*, Penerbit Katta, Solo, 2008.

Alwi, Des. *Sejarah Maluku: Banda Naira, Ternate, Tidore, dan Ambon*, Dian Rakyat, Jakarta, 2005.

Amal, M. Adnan. *Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250–1950*, Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, 2010.

Amran, Rusli. *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1981.

Amran, Rusli. *Padang Riwayatmu Dulu*, C.V. Yasaguna, 1988.

Anak Agung Gde Agung, Ide. *Bali in the 19th Century*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991.

________, *From The Formation of The State of East Indonesia Towards The Establishment of the United States of Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996.

________, *Kenangan Masa Lampau: Zaman Kolonial Hindia Belanda dan Zaman Pendudukan Jepang di Bali*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.

Andre, WP dkk. *Peta Tematik Kebudayaan dan Sejarah Pemerintahan Kalimantan Barat,* Depbudpar, Pontianak, 2008.

Anonim. *Sejarah Permulaan Jadinya Pulau Madura*, tanpa penerbit dan tahun terbit.

Anwar, Rosihan. *Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005.

Ardhana, I Ketut. *Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915–1950*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Arfah, Muhammad; Amir, Muhammad; Alimuddin, Muhammad; Amin, Asmah; Ernawati, A; Rachmad, Nur Asia; Rosmiah, Andi. *La Sinrang Bakka Lolona*

Sawitto Petta Lolo La Sinrang: Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan Republik Indonesia, diterbitkan: dengan biaya dana Inpres Daerah Tingkat-I Provinsi Sulawesi Selatan, 1997/ 1998.

Arifin, Winarsih Partaningrat. *Babad Blambangan*, Ecole Française de'Extrême-Orient & Yayasan Bentang Budaya, 1995.

Arsip Nasional. *Surat-surat Perdjanjian Antara Keradjaan-keradjaan Bali/ Lombok dengan Pemerintah Hindia Belanda 1811 s/d 1938*, Arsip Nasional, Jakarta, 1964.

Asba, A. Rasyid. *Kerajaan Nepo: Sebuah Kearifan Lokal Dalam Sistem Politik Tradisional Bugis di Kabupaten Barru*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2010.

________, *Gerakan Sosial di Tanah Bugis: Raja Tanete Lapatau Menantang Belanda*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2010.

Aspar, Muhammad. *Sejarah Kekaraengan Bontoa di Maros*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2011.

Assegaff, A.S. *Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir*, Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir, 1982

Azhari, Ichwan & Syafri, Syaiful. *Jejak Sejarah dan Kebudayaan Melayu di Sumatera Utara*, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara, Medan, 2009.

Azwar, Hj. Pocut Haslinda Muda Dalam. *Tun Sri Lanang: Dalam Sejarah Dua Bangsa Indonesia-Malaysia Terungkap Setelah 380 Tahun*, Dewan Penerbit Yayasan Tun Sri Lanang, 2011.

Badan Arsip Provinsi Jawa Timur. *Pembentukan Negara Madura Tahun 1948 dan Dampaknya Terhadap Republik*, Badan Arsip Provinsi Jawa Timur, 2002.

Badan Perencana Pembangunan Daerah Wajo. *Spirit of Wajo*, Yayasan Penamas, 2000.

Banunaek, Don Yesriel Yohan Kusa Banunaek. *Raja-raja Amanatun yang Berkuasa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.

Bell, Alexander Drs.(penanggung jawab); Widyatmika, Munandjar Drs. (ketua); Loimalitna, Chatarina SE. (sekretaris); Djukana, Vonny S.Sos (anggota); Otemusu, Simson (anggota); Paratu, Dorkas (anggota). *Sistem Pemerintahan Tradisional di Kabupaten Alor*, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Arkeologi, Sejarah, Nilai Tradisional - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinisi Nusa Tenggara Timur, 2009.

Berg, H.J. van den; Kroeskamp, Dr. H.; Prijohutomo, Dr.; Simandjoentak, I.P. *Asia dan Dunia Sedjak 1500*, JB. Wolters, Jakarta, 1954.

Bigalke, Terance. W. *Tana Toraja: A Social History of an Indonesian People*, KITLV Press, Leiden, 2005.

Bilfaqih, H.S. Ali Amin. *Sekilas Sejarah Kesultanan Bulungan dari Masa ke Masa*, C.V. Eka Jaya mandiri, Tarakan, 2006.

Bock, Carl. *The Head Hunters of Borneo: A Narrative of Travel Up the Mahakam and Down the Barito; also Journeyings in Sumatra*, Oxford University Press, 1985.

Bongenaar, Karel E.M. *De Ontwikkeling van het zelfbesturend landschap in Nederlandsch-Indie: gedurende de Japanse bezeiting*, 2001.

Broersma, Dr. R. *Atjeh als Land voor Handel en Bedrijf*, Boekhandel Cohen, Utrecht, 1925.

Budhisantoso, S.; Gani, Ambo; G.S., Husnah; B. Baco; Yunus, Ahmad. *Wasiat-wasiat Dalam Lontarak Bugis*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990.

Bukhari, RA.; Burhan, Drs.; Kasman, Ir.; & Suhami, Drs. *Kluet Dalam Bayang-bayang Sejarah*, Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet (IKMK) Banda Aceh, 2008.

Buku Panduan KKL IV: Kota Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Sejarah Kerajaan di Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Program Studi Pendidikan Sejarah, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP-PGRI) Pontianak, 2001.

Bunru, Drs. Baharuddin; Cakrawaty, Dra. Dian; Dra. Rusmini; Muhammading, Dra. Sahriah (editor). *Bendera Kerajaan Sawitto*, Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sulawesi Selatan, 1995/ 1996.

Bustamam, Tengku Ferry. *Bunga Rampai Kesultanan Asahan*, ----

Chalik, Husein A (ketua); Bhurhanuddin, B.; Gonggong, Dr. Anhar. *Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Tenggara*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984/ 1985.

Chambert-Loir, Henri. *Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2004 (terjemahan dari bahasa Perancis).

Chamber-Loir, Henri; Abdullah, Massir Q.; Oman Fathurahman, Suryadi; Maryam Salahudin, Siti. *Iman dan Diplomasi: Serpihan Sejarah Kerajaan Bima*, KPG, Jakarta, 2010.

Crawfurd F.R.S., John. *History of the Indian Archipelago*, *vol III*, Archibald Constable and Co., Edinburgh, 1820.

Creese, Helen; Putra, Dharma; & Nordholt, Henk Schulte (ed.). *Seabad Puputan Badung: Perspektif Belanda dan Bali*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2006.

Cribb, Robert. *Historical Atlas of Indonesia*, Curzon Press, 2000.

Da Gomez, E. P. & Mandalangi, Oscar P. *Don Thomas Peletak Dasar Sikka Membangun*, Yayasan Pendidikan Thomas (Yapenthom), Maumere, 2003.

Damanik, Jahutar. *Raja Sang Naualuh: Sejarah Perjuangan Kebangkitan Bangsa Indonesia*, Medan, 1987.

_______, *Jalannya Hukum Adat Simalungun*, bekerja sama dengan P.D. Aslan, 1974.

Damayanti, Desi & Atmoko, Rudi. *Mengenal Pahlawan Bangsa: Sejarah Perjuangan & Kisah-kisah Kehidupan Mereka*, Pustaka Phoenix, Jakarta, 2007.

Davidson, Jamie S.; Henley, David; dan Moniaga, Sandra. *Adat Dalam Politik Indonesia*, KITLV-Jakarta & Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010.

De Graaf, H.J. & Pigeaud, T.H. *Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Babad Arya Tabanan dan Ratu Tabanan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tanpa tahun terbit.

_______, *Biografi Pahlawan Haji Andi Mappanyuki Sultan Ibrahim*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.

_______, *Cerita Rakyat Daerah Kalimantan Tengah*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1982.

_______, *Lontarak TellumpoccoE*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tanpa tahun terbit.

_______, *Sejarah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tanpa tahun terbit.

_______, *Sejarah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1997.

_______, *Sejarah Daerah Jawa Barat*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1984.

_______, *Sejarah Daerah Kalimantan Tengah*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/ 1978.

_______, *Sejarah Daerah Lampung*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981.

_______, *Sejarah Daerah Maluku*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.

_______, *Sejarah Daerah Riau*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1982.

_______, *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tahun anggaran 1996/ 1997.

_______, *Sejarah Daerah Sulawesi Utara*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/ 1978.

_______, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Tengah*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya - Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978/ 1979.

_______, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusatenggara Timur*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah–Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, 1978/ 1979.

_______, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Tenggara*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Pusat Penelitian Sejarah Budaya - Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sulawesi Utara, 1978/ 1979.

_______, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Utara*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Pusat Penelitian Sejarah Budaya - Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sulawesi Utara, 1978/ 1979.

_______, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Pusat Penelitian Sejarah Budaya - Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sulawesi Utara, 1977/ 1978.

_______, *Sejarah Pendidikan Daerah Riau*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tanpa tahun terbit.

_______, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Kalimantan Tengah*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1983.

_______, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 s/d 1949) Daerah Nusa Tenggara Timur*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Daerah Nusa Tenggara Timur, 1979/ 1980.

_______, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Utara*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1983.

_______, *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Kalimantan Timur*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

_______, *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Sulawesi Selatan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1982.

_______, *Syair Sultan Mahmud*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1990.

_______, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Utara*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta 1984.

_______, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Riau*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta 1984.

Detaq, Aco. *Memperkenalkan Kota Kupang*, tanpa penerbit, 1972.

Detaq, Yakob Y. *Memperkenalkan Kebudayaan Suku Bangsa Sawu*, Penerbit Nusa Indah, Flores, 1973.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. *Sistem Kemasyarakatan/ Sistem Pemerintahan Tradisional di Kabupaten Sikka*, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Arkeologi, Sejarah dan Nilai Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2010.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Raja-raja Timor dan Pulau-pulaunya*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Arkeologi - Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang, 2007.

_______, *Sistem Pemerintahan Tradisional di Timor Tengah Selatan*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Arkeologi - Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang, 2007.

Djajadiningrat, Hoesein. *Tinjauan Kritis Tentang Sajarah Banten*, Djambatan, Jakarta, 1983.

Djelenga, Ir. H. Lalu. *Keris di Lombok*, Yayasan Pusaka Selaparang, Mataram, Lombok, 2000.

Doko, I.H. *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Nusa Tenggara Timur*, Balai Pustaka, Jakarta 1981.

_______, *Timor Pulau Gunung Fatuleu "Batu Keramat*", Balai Pustaka, Jakarta, 1982.

Drakard, Jane (penyunting). *Sejarah Raja-raja Barus: Dua Naskah dari Barus*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Dwinanto, Djoko. *Perang Kusamba*, Balai Pustaka, 2007.

Dwiyanto M.Hum, Drs. Djoko. *Ensiklopedi Serat Centhini*, Panji Pustaka, Yogyakarta, 2008.

_______, *Puro Pakualaman: Sejarah, Kontribusi dan Nilai Kejuangannya*, Paradigma Indonesia, 2009.

Emanuel; Dyson, Laurentius; dan Matius, Paulus. *Sejarah dan Mitologi Suku Asli Kalimantan Timur*, Citra Wacana, 2012.

Gayo, M.H. *Perang Gayo-Alas Melawan Kolonialis Belanda*, P.N. Balai Pustaka, 1983.

Geschiedenis van Nederlandsch Indië, NV. Uitgeversmaatschappij "Joost van den Vondel", Amsterdam 1938. Deel I: DR. A.N.J. Thomassen A Thessink van Der Hoop, Prof DR. N.J. Krom, & R. A. Kern; Deel II: Prof DR. C.C Berg, C. Wessels S.J. & DR. H. Terpstra.

Gomang, Drs. H. Syarifuddin; Hons, MA; Widiyatmika, Drs. Munandjar; Luth, Prof. Dr. Thohir. *Lohayong Solor: Refleksi Menuju Masa Depan*, JP. Books, Surabaya, 2008.

Gonggryp, G.F.E. *Geillustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*, N.V. Leidsche Uitgeversmaatschappij, Leiden, 1934.

Gouda, Dr. Frances. *Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900–1942*, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2007.

Groeneveldt, W.P. *Nusantara Dalam Catatan Tionghua*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2009.

Guillot, Claude. *Banten Sejarah dan Peradaban (Abad X–XVII)*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2008 (terjemahan dari bahasa Perancis).

Haga, Dr. B.J. *Lima Pahalaa: Susunan Masyarakat, Hukum Adat dan Kebijaksanaan Pemerintahan di Gorontalo*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1981.

Hägerdal, Hans. *Kerajaan2 Indonesia: An alphabetic enumeration of the former princely states of Indonesia, from the earliest time to the modern period, with simplified genealogies and order of succession*, manuskrip yang tidak diterbitkan.

Hamkaz, Ismail. *Sejarah & Adat Istiadat Masyarakat Kepenuhan*, 2000
Hanna, Willard A. & Alwi, Des. *Turbulent Times Past in Ternate and Tidore*, Yayasan Warisan dan Budaya Banda Naira, 1990.
Hanna, Willard Anderson. *Bali Profile: People, Events, Circumstances (1001–1976)*, American Universities Field Staff, New York, 1976 (reprinted by Rumah Budaya Banda Naira, 1990).
Harahap, E.St. *Perihal Bangsa Batak*, Bagian Bahasa Djawatan Kebudajaan - Dep. P.P. dan K., Jakarta, 1960.
Harahap SH., H. M. D. *Adat Istiadat Tapanuli Selatan*, Grafindo Utama, Jakarta, 1986.
Harahap, Parada. *Toradja.* N.V. Penerbitan W. Van Hoeve, Bandung, 1952.
Hardjasaputra, Sobana A. *Bupati di Priangan: Kedudukan dan Peranannya pada abad ke-17–19* dalam Seri Sundalana, Pusat Studi Sunda, Bandung, 2004.
Hasan; Darwis; Mahdi, Syakir; Haliadi. *Sejarah Poso*, Tiara Wacana, Yogya, 2004.
Hasan M. Hum, Drs.; Nuraedah S.Pd, M.Pd; Lumangino, Wieman Darsono S.Pd. *Sejarah Tojo Una-Una*, Penerbit Ombak, 2006.
Hasan, Sabriah. *Andi Makkasau: Menakar Harga 40.000 Jiwa*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2010.
Heidhues, Mary Somers. *Penambang Emas, Petani, dan Pedagang di "Distrik Tionghoa" Kalimantan Barat*, Yayasan Nabil, 2008.
Hermansyah. *Ilmu Gaib di Kalimantan Barat*, Kepustakaan Populer Gramedia; École française d'Extrême-Orient; STAIN Pontianak; & KITLV - Jakarta, 2010.
Heuken SJ, Adolf. *Be my Witness to the Ends of the Earth!: The Catholic Church in Indonesia before the 19th Century*, Cipta Loka Caraka, Jakarta, 2002.
Hisyam, Muhammad. *Sayyid-Jawi: Studi Kasus Jaringan Sosial Di Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar-Sulawesi Selatan*. Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1983.
Hugronje, Snouck C. *Tanah Gayo dan Penduduknya*, INIS, Jakarta, 1996.
________, *De Atjehers*, Batavia Landsdrukerij, 1893 (Terjemahan Inggris: *The Achehnese*, terjemahan A.W. S. O'Sullivan, Late E. J. Brill, Leyden, 1906).
________, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1896–1936: Seri Khusus Inis jilid V*, Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), Jakarta, 1991.

Husny, Tengku H.M. Lah. *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu-Pesisir Deli Sumatra Timur 1612–1950*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta 1978.

Inglin, Flora. *UluMahakam: dari Long Iram sampai Long Apari: Riwayatmu Doeloe, Kini dan Esok*, CV. Sendawar Ayumas, 2005.

Ismail, M. Hilir. *Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*, Penerbit Lengge, Mataram, 2004.

Jonge, JHR. Mr. J. K. J. de. *De Opkomst van Het Nederlandisch Gezag in Oost Indie (1595–1610)*, 's Gravenhage, 1864.

Juniarti. *Raja Banawa Dari Belanda: Elite dan Konflik Politik Kerajaan Banawa 1888–1942*, Intra Pustaka Utama, Semarang, 2004.

Juwono, Harto & Hutagalung, Yosephine. *Limo Lo Pohalaa: Sejarah Kerajaan Gorontalo*, Ombak, 2005.

________, *Tiga Tungku Sejarangan: Sejarah Kesultanan Indragiri Sampai Peristiwa 5 Januari 1949*, Ombak, 2006.

Kalimati, Wahyu Sunan. *Pilar-pilar Budaya Sumbaya*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat, 2005.

Kam Hing, Lee. *The Sultanate of Aceh: Relations with the British 1760–1824*, Oxford University Press, 1995.

Kana, Nico L. *Dunia Orang Sawu*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Kartadarmadja, Soenyata Drs. M (editor) & Kutoyo, Sutrisno (editor). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Barat*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah - Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya - Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978/ 1979.

Katoppo, E. Nuku: *Perjuangan Kemerdekaan di Maluku Utara*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1984.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. *Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar Tentang Kerajaan Gowa Pascaperjanjian Bungaya*, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Makassar, 2004.

Kementerian Penerangan. *Republik Indonesia: Provinsi Kalimantan*, Kementerian Penerangan.

Kementerian Penerangan. *Republik Indonesia: Provinsi Sumatra Tengah*, Kementerian Penerangan.

Kertawibawa, Besta Besuki. *Pangeran Cakrabuana: Sang Perintis Kerajaan Cirebon*, Kiblat Buku Utama, Bandung, 2007

Kesuma, Andi Ima. *Migrasi dan Orang Bugis: Penelusuran Kehadiran Opu Daeng Rilakka Pada Abad XVIII di Johor*, Ombak, 2004.

Keuning, J. *Sejarah Ambon Sampai Pada Akhir Abad ke-17*, Bhratara, Jakarta, 1973.

Kila, Drs. Syahrir; Amir, Drs. Muhammad; Sarapang SS, Simon S. *Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar Tentang Kerajaan Gowa Pascaperjanjian Bungaya*, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata - Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan - Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar, 2004.

Koentjaraningrat (red.). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002.

Koestarta, Drs. Tarib (koordinator); Finandar, Drs. Fidy; ARS, M. Noor; Ahmad, Hasjim; Hanan, Drs. Sjahrial. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Kalimantan Timur*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983/ 1984.

Kolit, D.K. *Pengaruh Majapahit atas Kebudayaan Nusa Tenggara Timur*, tanpa penerbit dan tahun terbit.

Komando Resor Militer 121/ABW, Komando Distrik Militer 1206, *Sejarah Berdirinya Kota Putussibau yang Diawali dari Berdirinya Kerajaan Bunut,* Putussibau, 2006.

Kol, H.H. van. *Driemaal Dwars Door Sumatra En Zwerftochten Door Bali*, W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij, 1914.

Kotten, BK.; Tukan, Beni; Kopong, Elias; Zesi, A.M.; Kotten, Domi D. *Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Nusa Tenggara Timur*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan–Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1990–1991

Kozok, Uli. *Surat Batak: Sejarah Perkembangan Tulisan Batak Berikut Pedoman Menulis Aksara Batak dan Cap Si Singamangaraja XII*, Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.

Kuntowijoyo. *Raja Priyayi dan Kawula*, Ombak, Yogyakarta, 2006.

Kurniawan, Dwi Mixa. *Maluku Negeri Para Raja*, PT. Multi Kreasi Satu Delapan, Jakarta, 2010.

Kutoyo, Sutrisno, dkk. (penyunting). *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya–Pusat Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisinoal Direktorat Jenderal Kebudayaan, Jakarta, 1977.

Lahajir. *Etnoekologi Perladangan Orang Dayak Tunjung Linggang: Etnografi Lingkungan Hidup di Dataran Tinggi Tunjung*, Galang Press, Yogyakarta, 2002.

Lapian, Adrian B. *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17*, Komunitas Bambu, 2008.

_______, *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2009.

Latif, Abd. *Para Penguasa Ajatappareng: Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis*, Penerbit Ombak, 2014.

Leirissa, R. Z. *Halmahera Timur dan Raja Jailolo*, Balai Pustaka, 1996.

Lembaga Adat Nagari Talu. *Adaik Salingka Nagari Talu*, edisi I, 2008.

Lewis, E.D. & Mandalangi, Oscar Pareira (editor dan penerjemah). *Hikayat Kerajaan Sikka: Edisi Gabungan dari Dua Tulisan Tangan Tengang Sumber dan Sejarah Kerajaan Sikka oleh Dominicus Dionitius Pareira Kondi dan Alexander Boer Pareira*, Penerbit Ledalero, Maumere, 2008.

Locher-Scholten, Elsbeth. *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830–1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*, Banana, Jakarta, 2008 (terjemahan dari bahasa Inggris, berjudul: *Sumatran Sultanate and Colonial State: Jambi and the Rise of Dutch Imperialism, 1830–1907*).

Loebis, Parlindoengan. *Orang Indonesia di Kamp Konsentrasi NAZI: Autobiografi Parlindoengan Loebis*, Komunitas Bambu, Depok, 2006.

Lombard, Denys. *Nusa Jawa: Silang Budaya (Jilid 3): Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

_______, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607–1636)*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2008.

Lontaan, J.U. *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, Pemda Tingkat I Kalbar, 1975.

Lubis, Mhd. Arbain. *Sejarah Marga-marga Asli di Tanah Mandailing*, 1993.

Lubis M.S., Dr. Hj. Nina H. dkk. *Sejarah Kota-kota Lama di Jawa Barat*, Alqaprint, Bandung, 2000.

Lufti, Drs. Muchtar; M S, Drs. Suwardi; Syair, Drs. Anwar; Amin, Drs. Umar. *Sejarah Riau*, Pemerintah Daerah Provinsi Riau, 1977.

Machmud HK., *Babad Banggai Sepintas Kilas*,---------

Mahid, Syakir; Sadi, Haliadi, dan Darsono, Wilman. *Sejarah Kerajaan Bungku*, Penerbit Ombak, 2012.

Makkulau, M. Farid W. *Sejarah Kekaraengan di Pangkep*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2008.

Manca, Lalu. *Sumbawa pada Masa Lalu: Suatu Tinjauan Sejarah*, Penerbit Rinta, Surabaya, 1984.

Mansoer, Drs. M.D.; Imran, Drs. Amrin; Safwan, Drs. Mardanas; Idris, Dra. Asmaniar Z.; Buchari, Drs. Sidi I. *Sedjarah Minangkabau*, Bhratara, Jakarta, 1970.

Mangkuto, H.A. Dt. Rajo. *Kesulthanan Minangkabau Pagaruyuang Darul Quorar: Sejarah dan Tambo Adatnya*, Taushia, 2010.

Manyambeang, A. Kadir. & Mone, Abd. Rahim. *Lontarak Patturio Patturioloangari Tutalloka (Sejarah Tallo),* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta 1979.

Mappangara, Suriadi. *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2004.

Mappasanda, H.A.M. (penerjemah). *Kerajaan Luwu: Catatan Gubernur Celebes 1888 D.F. van Braam Morris*, Toaccae Publishing, Makassar, 2007.

Marihandono, Djoko & Juwono, Harto. *Sultan Hamengku Buwono II: Pembela Tradisi dan Kekuasaan Jawa*, Banjar Aji, Yogyakarta, 2008.

Marsden, William. *Sejarah Sumatra*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2008 (terjemahan dari bahasa Inggris).

Matulada. dkk. (ed.). *Sawerigading*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1990.

Maulana, Andi Munir, SH. *La Maddukelleng: Sultan Pasir, Arung Peneki, Arung Siengkang, Arung Matoa Wajo XXXI*, Lamacca Press, 2003.

Mboi, Ben. *Ben Mboi: Memoar Seorang Dokter, Prajurit, Pamong Praja*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2011.

Melamba, Basrin. *Kota Pelabuhan Kolaka di Teluk bone, 1906–1942*, Pustaka Larasan, 2011.

Meuraxa, Dada. *Peristiwa Berdarah di Atjeh*, Pustaka Sedar, Medan, 1956.

Mirsha, Drs. I Gusti Ngurah Rai (koordinator); Parimartha, Drs. I Gde; Rama, Drs. Ida Bagus; Sukiada, Drs. I Nyoman; Ardhana, Drs. I Ketut; & Eddy, Drs. I Wayan Tagel. *Cokorda Alit Ngurah: Dari Pembuangan di Lombok Sampai Revolusi Fisik di Bali (1907–1950),* Pusat Dokumentasi Kebudayaan Bali, 1989.

Moedjanto M.A., Drs. G. *Kasultanan Yogyakarta & Kadipaten Pakualaman: Tinjauan Historis Dua Praja Kejawen Antara 1755–1992*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1994.

Moestadji BA., H. Mohammad & Hadidjah HS., Hj. Didik. *Perjuangan Rakyat Madura dari Daerah RI ke Daerah RI*, Agung Karya Perkasa, Surabaya, 2003.

Mu'jizah. *Iluminasi dalam Surat-surat Melayu Abad ke-18 dan ke-19,* Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2009.

Mukhlis (editor). *Dinamika Bugis-Makassar*, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu sosial dan YHS.

Munandar, Agus Aris. *Istana Dewa Pulau Dewata: Makna Puri Bali Abad ke-14–19*, Komunitas Bambu, 2005.

Munoz, Paul Michel. *Kerajaan-kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia: Perkembangan Sejarah dan Budaya Asia Tenggara (Jaman Pra Sejarah–Abad XVI)*, Penerbit Mitra Abadi, Yogyakarta, 2009 (terjemahan dari *Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Penisula*, Editions Didier Millet, 2006).

Musa, H. Abd. Gaffar, Taufik, M., Agussalim, Musyawir. *Iyanae Paoda Adaengngi Attoriolonggne ri Tanete (Sejarah Kebudayaan Tanete)*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan - Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional - Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1990.

Napitupulu, S.P., Sanusi, Sidabutar S., Lubis, Mukti. *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Sumatera Utara*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional - Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta, 1991.

Nordholt, Henk Schulte, *The Spell of Power: Sejarah Politik Bali 1650–1940*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2006.

Noresah bt. Baharom, BSc (Ketua Editor). *Kamus Dewan: Edisi Keempat*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2010.

Noor, H. Muhammad. Calon *Pahlawan Nasional Dari Kabupaten Berau Kalimantan Timur: Sejarah Perjuangan Raja Alam (Sultan Alimuddin)*.

Nooy-Palm, Hetty. *The Sa'dan-Toraja: A Study of Their Social Life and Religion*, Verhandelingen van Het Koninklijk Instituut voor Taal, Land, en Volkenkunde 87, jilid 1, The-Hague-Martinus Nijhoff, 1979.

Ointoe, Reiner Emyot, & Mokodampit, M. Firasat. *Bolaang Mongondow: Etnik, Budaya dan Perubahan*, Yayasan Bogani Karya & Pemda Kabupaten Boolang Mongondow, 1996.

P. Mukhlis; Poelinggomang, Edward; Kallo, Abdul Majid; Sulistio, Bambang; Thosibo, Anwar; Maryam, Andi. *Sejarah Kebudayaan Sulawesi*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Jakarta, 1995.

Palar, H.B. & Anes, L.A. Minahasa: Sejarah dan Derap Langkahnya Menuju Kemerdekaan Indonesia, Tarsius Celebes, Manado, 1994.

Pangeran Haji Muda Indra Sri Negara, gelar Pangeran Bendahara. *Kesaksian Sejarah di Masa Kejayaan Kerajaan Selimbau Darussalam*, Majelis Pemangku Keraton Selimbau Darussalam, 2004/ 2005.

Panghoeloe, M. Rasjid Manggis Dt. Radjo. *Minangkabau: Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1985.

Panitia Seminar Sejarah Lounusa Maatita di Amahai, *Amahai Dalam Lintasan Sejarah*, manuskrip tidak diterbitkan.

Parera, A.D.M. *Sejarah Pemerintahan Raja-raja Timor: Suatu Kajian atas Peta Politik Pemerintahan Kerajaan-kerajaan di Timor Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1994.

Patiara, Drs. John; Renwarin, Drs. Herman; Soedharto, Drs. Bondan; Palangan, M. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Irian Jaya,* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983/1984.

Pattipeilohy, J.J. SH. *Arsitektur Tradisional Masyarakat Ohirata*,--

Pelras, Christian. *Manusia Bugis*, Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta Paris, Jakarta, 2006 (terjemahan Indonesia dari *The Bugis*, Oxford Blackwell Publishers Ltd, 1996).

Pelzer, Karl J. *Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1985.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang. *Kupang dari Masa ke Masa*, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang.

Pemerintah Kota Tanjungpinang. *Tanjungpinang: Land of Malay History*, Pemerintah Kota Tanjungpinang - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2006.

Perret, Daniel. *Kolonialisme dan Etnisitas Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Jakarta 2010.

Pik Tjoe, Tan. *Madoera en zijn Vorstenhuis*, Boekhandel Kolf,-----

Poelinggomang, Edward L. *Kerajaan Mori, Sejarah dari Sulawesi Tengah*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2008.

_______, *Makassar Abad XIX: Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2002.

Poesponegoro, Marwati Djoenoed & Notosusanto, Nugroho. *Sejarah Nasional Indonesia III*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

_______, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

_______, *Sejarah Nasional Indonesia V*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

Praja, Putra. *Sejarah Berdirinya Kerajaan Padang Tebing Tinggi*, manuskrip tidak diterbitkan.

Prinst SH., Darwan dan Prinst SH., Darwin. *Sejarah dan Kebudayaan Karo*, Yrama.

Proyek A.P.B.D. Prop. Dati I Bali. *Sejarah Perang Jagaraga*, Proyek A.P.B.D. Prop. Dati I Bali, tahun 1980/ 1981.

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta, 1978.

Purba SH., D. Kenan & Poerba, Drs. J.D. *Sejarah Simalungun*, Bina Budaya Simalungun, Parsadaan Ni Purba Pak-pak, Boru Pakon Panagolan, Jakarta, 1995.

Purba Tambak, Drs. Herman. *Kerajaan Silou: Historiae Politia*, Edisi Kedua, Pematang Siantar, 2008.

Purwadi, M. Hum, Dr. *The History of Javanese Kings: Sejarah Raja-raja Jawa*, Ragam Media, 2010.

Purwadi, M. Hum, Dr. & Dwiyanto, Drs. Djoko. *Kraton Surakarta: Sejarah, Pemerintahan, Konstitusi, Kesustraan, dan Kebudayaan,* Panji Pustaka, Yogyakarta, 2008.

Pustaha Panei Bolon.

Putra, Heddy Shri Ahimsa. *Minawang: Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*, Gajah Mada University Press, 1988.

Putro, Brahma. *Sejarah Karo dari Zaman ke Zaman*, Penerbit Ulih Saber, Medan, 1995.

Raba, Manggaukang. *Fakta-fakta Tentang Samawa*, Yayasan Pemuda Kreatif Sumbawa–KASA Indoneisa dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Besar, 2002.

Rahman, Drs. Ansar; Achmad, H. Ja'; Muhadi. *Syarif Abdurrahman Alkadri: Perspektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak*, Pemerintah Kota Pontianak, 2000.

Ranawidjaja, Mr. Usep. *Swapradja: Sekarang dan dihari Kemudian*, Penerbit Djambatan.

Rapi, H. Ahmad Massiara Daeng. *Menyingkap Tabir Sejarah Budaya di Sulawesi Selatan*, Lembaga Penelitian & Pelestarian Sejarah dan Budaya Sulawesi Selatan dari Yayasan Bhineka Tunggal Ika, 1988.

Rauf, Prof. Dr. H. La Ode Abdul. *Peranan Elite dalam Proses Modernisasi: Suatu Studi Kasus di Muna*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

Reid, Anthony. *Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera Hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.

Resink G.J. *Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850–1910: Enam Tulisan Terpilih*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1987.

Rifai, Mien A. *Lintasan Sejarah Madura*, Yayasan Lebbur Legga, Surabaya 1993.

Riwut, Tjilik. *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, NR Publishing, Yogyakarta, 2007.

Rizal, Hannabi; Tika, Zainuddin; & Syam, M. Ridwan. *Profil Raja & Pejuang Sulawesi Selatan*, jilid 1 dan 2, Pustaka Refleksi, Makassar, 2007.

Robinson, Geoffrey. *Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik*, LKiS, Yogyakarta, 2006 (judul asli: *The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali*, Cornell University Press, 1995).

Ruchiat, Rachmat. *Asal-Usul Nama Tempat di Jakarta*, Masup Jakarta, 2011.

Rudyansjah, Tony. *Kekusaan, Sejarah, & Tindakan: Sebuah Kajian Tentang Lanskap Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Sagimun, M.D. *Sultan Hasanudin Menentang V.O.C.*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1985.

Said, Mohammad. *Atjeh Sepandjang Abad*, diterbitkan oleh pengarang sendiri, 1961.

Said, Moehamad. *De Zelfsbesturende Landschappen Buitengewesten (Keradjaan-Keradjaan Boemipoetera Jang Berhak Memerintah Sendiri)*, N.V. Handelmaatschappij en Drukkerij "Sinar Deli", Medan, April 1937.

Said, H. Mohammad. *Soetan Koemala Boelan (Flora): Raja, Pemimpin, Wartawan, Penentang Kezaliman Belanda Masa 1912–1932*, UI-Press.

Saleh. Idwar M. *Pangeran Antasari*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 1993.

Salim, Syahbuddin. *Memperkenalkan Kenegerian Belantu*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1983.

Salindeho, Winsulangi & Sombowadile, Pitres. *Kawasan Sangihe–Talaud–Sitaro: Daerah Perbatasan Keterbatasan Pembatasan*, Fuspad, Jogja, 2008.

Samin, Prof. Suwardi M, dkk. *Pemutakhiran Adat Kuantan Singingi*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2006

Samingoen, Ir. Sampoerno (pengantar). *Album Arsitektur Tradisional Aceh. Sumatera Barat. Sulawesi Selatan, Nusatenggara Barat*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Proyek Media Kebudayaan, 1983/1984.

Samroni, Imam; Astiyanto, Heniy; Sugiarto, Toto; Ebo, Kurnia; Munarsih; Rudi; Hananti, Hilda; Yusdani; Megandaru; Sukatmi; Yuliani; Sulistyorini, Dyah; Soekirman; Junita, Dewi. *Daerah Istimewa Surakarta: Wacana Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Surakarta Ditinjau dari Perspektif Historis, Sosiologis, Filosofis, & Yuridis*, Pura Pustaka Yogyakarta, 2010.

Sangti, Batara. *Sejarah Batak*, Karl Sianipar Company, Balige, 1978.

Schoorl, Pim. *Masyarakat, Sejarah, dan Budaya Buton,* Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003.

Sedyawati, Edi & Zuhdi Susanto (penyunting). *Arung Samudera: Persembahan Memperingati Sembilan Windu A.B. Lapian*, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, Depok, 2001.

Sellato, Bernard. *Forest, Resources and People in Bulungan: Elements for a History of Settlement, Trade, and Social Dynamics in Borneo, 1880-2000, Center* for International Forestry Research, Jakarta, 2001.

Setiyanto, Agus. *Elite Pribumi Bengkulu: Perspektif Sejarah Abad ke-19*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Siddik, Prof. Dr. H. Abdullah. *Sejarah Bengkulu: 1500–1990*, Balai Pustaka, 1996.

Sidemen, Ida Bagus. *Nilai Historis Uang Kepeng*, Larasan–Sejarah, Denpasar, 2002.

Sinaga, Rosmaida & Syukur, Abdul. *Singgirei Rumagesan: Pejuang Integrasi Papua*, Ruas, 2013.

Sinar, Tengku Luckman. *Sari Sejarah Serdang 1*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta 1985.

_______, *Sari Sejarah Serdang 2*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta 1985.

_______, *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu Di Sumatera Timur*, Kesultanan Negeri Serdang, 2001.

Sitonda, Mohammad Natsir. *Sejarah Massenrempulu jilid 1*, Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir, 2012.

Situmorang, Sitor. *Toba Na Sae: Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XIII–XX*, Komunitas Bambu, Jakarta 2004.

Soebandi, Jro Mangku Gde Ktut. *Mengenal Leluhur dari Dunia Babad*, Penerbit BP, Denpasar. 1998.

Soejono, Imam. *Yang Berlawanan*, Resist Book, Yogyakarta, 2006.

Soelarto, B. *Sekitar Tradisi Ternate*, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, Ditjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, ---

Stuart-Fox, David J. *Pura Besakih: Pura, Agama, dan Masyarakat Bali*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2010.

Stutterheim, Dr. W. F. *Het Hinduisme in de Archipel*, seri *Cultuurgeschiedenis van Indonesie II*, J.B. Wolters, Groningen, Jakarta, 1951.

Sudrajat, M. Usep, & Ardi, Toni. *Atlas Lengkap Kabupaten Sumedang*, CV. Sudrajat & CV Cintya Group, 2013.

Sueta, Drs. I Wayan. *Babad Ksatrya Taman Bali*, Upada Sastra, Denpasar, 1992.

Suhusilawane, Dra. Florence, et.al. *Sejarah Kerajaan Kisar*, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Provinsi Maluku dan Maluku Utara Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2008.

Sulendraningrat, P.S. *Sejarah Cirebon*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985.

Sunardjo SH., RH. Unang. *Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cerbon 1479–1809*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1983.

Suny, Prof Dr. Ismail. *Bungai Rampai Tentang Aceh*, Penerbit Bhratara Karya Askara, Jakarta, 1980.

Supit, Bert. *Minahasa*, Sinar Harapan, 1986.

Suprayitno. *Mencoba (Lagi) Menjadi Indonesia*, Yayasan Untuk Indonesia, Yogyakarta, 2001.

Sutaba, I Made; Astawa, Anak Agung Gede Oka; Wirawan, Anak Agung Bagus. *Sejarah Gianyar Dari Jaman Prasejarah Sampai Masa Baru-Modern*, Pemerintah Kabupaten Gianyar-Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2007.

Suyanto, Sunar Tri. *Sejarah Berdirinya Kerajaan Surakarta Hadiningrat*, Tiga Serangkai, Solo, 1985.

Syahzaman & Hasanuddin. *Sintang Dalam Lintasan Sejarah*, Romeo Grafika, Pontianak, 2003.

Tajabu, A. *Riwayat Benteng Otanaha, Otahiya, dan Ulupahu*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta, 1986.

Tambak, T.B.A. Purba. *Sejarah Simalungun*, tanpa penerbit dan tahun terbit.

Tamburaka, M.A., Prof. DR. H. Rustam E, et. al. *Sejarah Sulawesi Tenggara dan 45 Tahun Sultra Membangun* (Cetakan Kedua), Unhalu Press, 2010.

Tangke, W. Wanua dan Nasyaruddin, Anwar (editor). *Orang Soppeng Orang Beradab: Sejarah, Silsilah Raja-raja, Obyek Wisata*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2006.

Tarimana, Abdurrauf. *Kebudayaan Tolaki*, Balai Pustaka, Jakarta 1993.

Tasrif S.H., S. *Pasang Surut Keradjaan Merina: Sedjarah Sebuah Negara Jang Didirikan Oleh Perantau2 Indonesia di Madagaskar*, Balai Buku Media, Djakarta, 1966.

Team Perumus Hasil-hasil Diskusi Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II. *Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II*, Biro Bina Mental Spiritual Setwilda Provinsi Daerah Tk. I Sumatera Selatan, Palembang, 1981.

Terombo Siri Kerajaan Tambusai dari Ibu Tengku Dini (www.TengkuDini.com).

Tim Bali. *Islam Masuk Jembrana*, PT. Karya Unipress, 1984.

Tim Sejarah Yayasan Kerti Budaya (Drs. A.A.N. Putra Darmanuraga-penulis utama). *Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng di Bali*, Pustaka Larasan, Denpasar, Bali, 2011.

Tim Yayasan Mitra Budaya Indonesia, *Cerbon*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta 1982.

Tjandrasasmita, Uka. *Arkeologi Islam Nusantara*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2009.

Tobing, Adniel L. *Sedjarah Si Singamangaraja I-XII*, Toko Buku & Co. Penerbit Mutiara, Tarutung, 1951.

Tjokrowinoto, Prof. Drs. H. Sardanto. *Sejarah Hari Jadi Kota Semarang: Edisi Revisi*, Wisma Tjakrawinatan, Semarang, 2004.

Umberan, Musni; Nurcahyani, Lisyawati; Purba, Juniar; Hendraswati. *Sejarah Kebudayaan Kalimantan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Direktorat Jenderal Kebudayaan - Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional - Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta, 1994.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Arkeologi, Sejarah dan Nilai Tradisional. *Perlawanan Ndaumanu Sinlae Terhadap Kekuasaan Kolonial Belanda di Termanu*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009.

Untoro, Heriyanti Ongkodharma, *Kapitalisme Pribumi Awal: Kesultanan Banten 1522–1684*, Komunitas Bambu, 2007.

Usfinit, Alexander Un. *Maubes Insana: Salah Satu Masyarakat di Timor dengan Struktur Adat yang Unik*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2003.

Usman, Syafaruddin & Din, Isnawita. *Peristiwa Mandor Berdarah: Eksekusi Massal 28 Juni 1944 oleh Jepang*, Media Pressindo, 2009.

Usman, Syafaruddin. *Dari Koubou ke Kubu Raya*, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, 2010.

_______, *Landak Dibalik Nukilan Sejarah*.

Utomo, Mulyanto; Susilo, Wahyu; & Achmadi, Farid. *Di Balik Suksesi Keraton Surakarta Hadiningrat*, PT. Aksara Solopos, Solo, 2004.

Utrecht, Dr. E. *Sedjarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok*, Penerbitan Sumur Bandung, 1962.

Van Bemmelen, Sita & Raben, Remco (penyunting). *Antara Daerah Dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011.

Veth, P. J. *Borneo's Wester Afdeeling: Geographisch, Statistisch, Historisch Voorafgegaan der Eene Algemeene Sehets des gansehen Eilands* (jilid 1 dan 2), Zalbommen Joh. Noman en Zoon, 1854.

Vlekke. Bernard H.M. *Nusantara: Sejarah Indonesia*, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Jakarta, 2008 (Terjemahan dari: *Nusantara: A History of Indonesia*).

Wahl, S.L. van der. (penyunting). *Kenang-kenangan Pangrehpraja Belanda 1920–1942*, Penerbit Djambatan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2001.

Wallace, Alfred Russel. *Kepulauan Nusantara: Sebuah Kisah Perjalanan, Kajian Manusia dan Alam*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2009 (terjemahan bahasa Inggris dari *The Malay Archipelago. The Land of the Orang-utan and the Bird of Paradise. A Narrative of Travel, with Studies of Man and Nature*, Macmilland and Company, London, 1869).

Wani, Drs. Yusuf A.; Ansyori, M. Nur; Ismail, M. Yusuf; Balip, A. Gopar. *Batanghari Sembilan dari Abad ke Abad*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta, 1980.

Widyatmika, Munandjar. *Syarif Abdurahman bin Abubakar Algadrie Pendiri Kota Waingapu*, Pusat Pengembangan Madrasah, Kupang, 2005.

_______, *Cendana & Dinamika Masyarakat Nusa Tenggara Timur*, Pusat Pengembangan Madrasah NTT, 2007.

Willink, H.D. Tjeenk. *Landschappen en Volkstypen van Nederlandsch-Indië*, Harlem, 1883.

Winkler Prins' Geïllustreerde Encyclopaedie. 4th ed.

Wiryawan, Hari. *Mangkunegoro VII & Awal Penyiaran Indonesia*, LPPS, Solo, 2011.

Wiryoprawiro, Zein M. *Arsitektur Tradisional Madura Sumenep dengan Pendekatan Historis dan Deskriptif*, Laboratorium Arsitektur Tradisional FTSP ITS Surabaya, 1986.

Wolf, Charles Jr. *The Indonesian Story: The Birth, Growth, and Structure of Indonesian Republic*, John Day Company, New York, 1948.

Yamin, Muhammad. *Atlas Sedjarah*, Djambatan, 1956.

Yayasan Parisada Hindu Dharma Kabupaten Badung, *Babad Buleleng*, Yayasan Parisada Hindu Dharma Kabupaten Badung, 1974.

Yudoseputro, Wiyoso. *Jejak-jejak Tradisi Bahasa Rupa Indonesia Lama*, Yayasan Seni Visual Indonesia, 2008.

Yusuf, Drs. Tayar; Effendy, Drs. Rousman; Kutoyo Sutrisno. *Sejarah Sosial Daerah Lampumg:Kotamadya Bandar Lampung Sang Bumi Ruwa Jurai*, Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1984/1985.

Zahari, A.M. *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton) I*, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan - Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1977.

________, *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton) II*, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan - Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1977.

________, *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton) III*, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan - Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1977.

Zainuddin, H.M. *Tarich Atjeh dan Nusantara*, jilid 1, Pustaka Iskandar Muda, Medan, 1961.

Zaman, Kahrul. *Riwayat Kesultanan Dompu Setelah Tahun 1934: Perjuangan Sebuah Negeri yang Berdaulat untuk Memenuhi Kehendak Rakyat*, Maharani Persada, Mataram, 2005.

Zuhdi, Susanto (penyunting). *Pasai Kota Pelabuhan Jalan Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1993.

Zuhro, R. Siti, dkk. *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali*, Penerbit Ombak, 2009.

Zulkarnain, Drs. H. Iskandar (ketua). *Sejarah Sumenep*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep.

ARTIKEL, JURNAL, & TESIS

Achyan, Drs. Ade Djamadin. *Aji Melayu: Pendiri Kerajaan Sintang dan Perkembangan Sejarah Kerajaan Melayu di Kabupaten Sintang*, makalah seminar di Hotel Holiday Inn, Kuching, Sarawak, 22-24 Agustus 2006.

Caldwell, I & Bougas, W. of *The Early History Binamu and Bangkala*, South Sulawesi dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 160 (2004), no: 4, Leiden, 456-510 (didownload dari http://www.kitlv-journals.nl).

Suryadi. *Sepucuk Surat dari Seorang Bangsawan Gowa di Tanah Pembuatan (Ceylon)* dalam Wacana: Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, vol. 10 No.2, Oktober 2008, halaman 214–245, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

Mansoben, Johszua Robert. *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya, Indonesia: Studi Perbandingan*, tesis doktoral di Rijkuniversiteit te Leiden, 14 Juni 1994.

Mattulada, Prof. Dr. H.A. *Sekelumit Sejarah Kebudayaan Kaili* dalam Antropologi Indonesia: Majalah Antropologi Sosial dan Budaya Indonesia, no. 48 th XV Januari April 1991, halaman 133–156, Jurusan Antropologi - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Okushima, Mika. *Commentary on the Sebuku Document: Local History from the Perspective of a Minor Polity of Coastal Northeast Borneo* dalam *The Journal of Sophia Asian Studies No. 20 (2002).*

________, *Ethnic Background of the Tidung: Investigation of the Extinct Rulers of Coastal Northeast Borneo* dalam *The Journal of Sophia Asian Studies No. 21 (2003)*.

Schapper, Antoinette. *Crossing the border: Historical and linguistic divides among the Bunaq in central Timor* dalam *Wacana: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Budaya*, vol. 13 no.1 (April, 2011).

Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde, XXXIX, 1897.

SURAT KABAR

Geger Pakualaman Mencuat Kembali, *Jawa Pos*, 19 Oktober 2009, halaman 11.

Penobatan, Sultan Deli XIV Isap Permen, Jawa Pos, 23 Juli 2005, halaman 1.

Permaisuri Jogja Bacabub Bantul, Jawa Pos, 19 Oktober 2009, halaman 11

Raja Minta Diikutsertakan Pembahasan RUU Hukum Adat, Suara Merdeka, 8 Agustus 2009, halaman 2.

Raja Jogja Tak Harus Sultan: Hamengkubuwono X Bicara Suksesi Kraton, Jawa Pos, 14 Mei 2010, halaman 16.

Raja Kembar Keraton Solo Berakhir, Jawa Pos, 21 Mei 2012, halaman 3.

VCD

Situs-situs Tiga Kerajaan Besar yang Berkuasa di Kab. Timor Tengah Selatan: Amanatun (Onam), Amanuban (Banam), dan Mollo (Oenam), Hasta Community–dari Yang Mulia Bapak Don Yesriel Yohan Kusa Banunaek.S.T., M.T.

WEBSITE

http://www.kitlv-journals.nl/

http://kitlv.pictura-dp.nl/

http://www.kutaikartanegara.com

http://kerajaan-indonesia.blogspot.com

http://www.sultanpalembang.com

http://www.kesultananasahan.com/

http://melayuonline.com/?lang=Indonesia

http://pagatan.co.cc/sejarah-kerajaan-tanah-bumbu

http://www.royaltimor

http://www.sidrap.go.id/

http://pinrangkab.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=10

http://pangkep.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=68

http://muhlissuhaeri.blogspot.com/2008/04/roborob.html

http://pontianakonline.com/

http://www.sumbawanews.com/berita/photo/perjalanan-ke-sumbawa-23-keris-pedang-kerajaan-sumbawa.html

http://www.dompu.go.id/index.php?option=isi&task=view&id=103&Itemid=104

http://mandar.web44.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=1

http://www.polewalimandarkab.go.id/index.php?jenis=content&id=202

http://djawatempodoeloe.multiply.com/photos/album/144#9.JPG

http://east-borneo.co.cc/general/50-history

http://peusangan.wordpress.com/2008/12/01/the-history-of-uleebalang-keudjroeen-peusangan-bag-terakhir/#comment-260

http://beritasore.com/2007/05/22/titah-raja-raja-untuk-amandemen-uud-45/

epress.anu.edu.au/austronesians/sharing/pdf/ch08.pdf

http://epress.anu.edu.au/austronesians/precedence/mobile_devices/index.html

http://kratonsurakarta.com/pakubuwono1.shtml

http://thetidung.blogspot.com/

http://www.thefreelibrary.com/Abang+in+the+middle+and+upper+Kapuas%3a+additional+evidence.-a0166350035
http://serdangbedagaikab.go.id/indonesia/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=117
http://kerajaanbanjar.wordpress.com/silsilah-anak-sultan/
http://www.guide2womenleaders.com/indonesia_substates.htm
http://www.asiafinest.com/forum/lofiversion/index.php/t16300.html
http://www.inimaumere.com/2008/10/kerajaan-nita.html
http://www.inimaumere.com/2008/04/don-thomasketurunanpendidikan-dan.html
http://iimanda.multiply.com/journal/item/2/Kerajaan_Kotawaringin_Yang_Pertama
http://jalian.wordpress.com/2008/02/18/peranan-keturunan-sultan-kotawaringin-di-beberapa-bidang-sebelum-dan-sesudah-tahun-1950-an/
http://www.bongkar.co.id/khas-kaltim/cerita-khas-johansya-balham/850-sambaliung-berontak.html
http://kesultanan_pasir.tripod.com/sadurangas/id10.html
http://sumedanglarang.blogspot.com/
http://anakgununglakaan.blogspot.com/
http://www.gatra.com/artikel.php?id=23352
http://www.myheritage.com/site-50124411/kerajaan-bone-web-site
http://sejarahkerajaan-indonesia.blogspot.com/2008/12/kerajaan-tanah-hitu.html
http://sejarahkerajaan-indonesia.blogspot.com/2008/12/kerajaan-pagatan.html
http://mdopost.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=4426&Itemid=9
http://www.nttprov.go.id/ntt_09/index.php?hal=sejsobe
www.geocities.com/konferensinasionalsejarah/didik_prajoko.pdf
http://www.guide2womenleaders.com/womeninpower/Womeninpower1800.htm
http://www.guide2womenleaders.com/womeninpower/Womeninpower1840.htm
http://www.guide2womenleaders.com/womeninpower/Womeninpower1870.htm
http://www.guide2womenleaders.com/womeninpower/Womeninpower1900.htm
http://www.pos-kupang.com/read/artikel/35387
http://www.putralangkat.blogspot.com/2008_09_01_archive.html
http://takapana.blogspot.com/2009/07/kerajaan-tidung-bag-1.html
http://takapana.blogspot.com/2009/07/kerajaan-tidung-bag-1.html

http://historyroemahboenga.blogspot.com/2009/12/kerajaan-rimpulaeng-tabukan.html
http://historyroemahboenga.blogspot.com/2009/12/kingdom-manganitu-kauhis.html
http://historyroemahboenga.blogspot.com/2009/12/siau-kingdom.html
http://www.mandailing.org/ind/asal-ren2.html
http://aneukcotirie.blogspot.com/2009/02/teuku-panglima-maharaja-tibang-muhammad.html
http://nazarmargolang.com/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=85
http://www.pinatih.org/category/sejarah
http://www.semestaindonesia.com/cbn/?p=2404
http://www.karoweb.or.id/page/3/
http://www.reocities.com/Heartland/8178/sejarah1.htm
http://www.reocities.com/Heartland/8178/sejarah2.htm
http://www.sagangonline.com/index.php?sg=full&id=274&kat=16#
http://www.pelalawankab.go.id/index.php?action=news.detail&id_news=22
http://buol.org/bole/node/1
http://rokan.org/?Sejarah_Rokan:Silsilah_Raja
http://belitungkab.go.id/module.php?id=sejarah1
http://frirac.multiply.com/journal
http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3027
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/12/02424075/batas.keraton.majapahit.harus.segera.ditentukan
http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=30034
http://www.antaranews.com/print/?i=1185687059
http://forum.detik.com/showthread.php?p=2529504
http://sinagaeone.blogspot.com/

http://rajasamusamuvi.blogspot.com
http://en.rodovid.org/wk/Person:305400
http://www.buaynyerupa.blogspot.com/
http://sultanskalabrak23.blogspot.com/2008/12/naik-tahta.html

http://buaypernong.blogspot.com/2008/12/pangeran-suhaimi.html
http://buaypernong.blogspot.com/2008/12/pangeran-maulana-balyan.html
http://www.paksibuaybejalandiway.blogspot.com/
http://buaybelunguh01.wordpress.com/category/buay-belunguh/
http://melayuonline.com/ind/history/dig/409
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Celebesu#W.C5.82adcy_Attinggoli
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Celebesu#Kr.C3.B3lowie_Suwawy
http://puakmelayu.blogspot.com/search/label/IKHWAL%20DAN%20SEJARAH%20MELAYU
http://sejarah-puri-pemecutan.blogspot.com/2011/02/kerajaan-jembrana.html
http://sejarah-puri-pemecutan.blogspot.com/2011/02/sejarah-kerajaan-karangasem.html
http://www.ubb.ac.id/featurelengkap.php?judul=Menguak%20Sejarah%20Di%20Pulau%20Belitung%20%28Belitong%20/%20Biliton%29&&nomorurut_berita=109
http://manukallodanga.wordpress.com
http://khuzmayudi.blogspot.co.id/2013/03/sejarah-awal-mula-nama-kotabaru-tanah.html

RIWAYAT HIDUP

Ivan Taniputera dilahirkan pada 1974 di Semarang, Jawa Tengah. Seselesai pendidikan SMA pada 1992, setahun kemudian ia melanjutkan studinya ke *Technische Fachhochschule* (*University of Applied Science*) Berlin, Jerman. Setelah lulus pada 1997, ia kembali tanah air dan bekerja sebagai tenaga profesional. Sebelum buku *Ensiklopedi Kerajaan Nusantara*, pemerhati sejarah ini juga punya karya lain seperti *History of China* dan *Astrologi dan Sejarah Dunia*, yang diterbitkan oleh penerbit Ar-Ruzz Media.

Bersalaman dengan Yang Terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia
Tanggal 31 Mei 2011

BHINNEKA TUNGGAL IKA
Pahlawan Nasional Indonesia
Abdoel Moeis (1883–1959)
Ki Hadjar Dewantara (1889–1959)
Raden Mas Soerjopranoto (1871–1959)
Mohammad Hoesni Thamrin (1894–1941)
K.H. Samanhoedi (1868–1956)
Raden H. Oemar Said Tjokroaminoto (1883–1934)
Danoedirdja Setiaboeddhi (1897–1950)
Raja Si Singamangaradja XII (1849–1907)
Dr. G.S.S.J. Ratulangi (1890–1949)
dr. Soetomo (1888–1938)
K.H. Ahmad Dahlan (1868–1923)
H. Agus Salim (1884–1954)
Jend. Gatot Soebroto (1907–1962)
Sukardjo Wirjopranoto (1903–1962)
Dr. Ferdinand Lumban Tobing (1899–1962)
K.H. Zainul Arifin (1909–1963)
Tan Malaka (1884–1949)
Mgr. Albertus Soegijapranata, S.J. (1896–1963)
Ir. R. Djoeanda Kartawidjaja (1911–1963)
Dr. Sahardjo, S.H. (1909–1963)
Tjoet Nja' Dhien (1848–1908)
Tjoet Nja' Meutia (1870–1910)
Raden Adjeng Kartini (1879–1904)
dr. Tjipto Mangoenkoesoemo (1886–1943)
K.H. Fakhruddin (1890–1929)
K.H. Mas Mansoer (1896–1946)
Alimin bin Prawirodirdjo (1889–1964)
dr. Moewardi (1907–1948)
K.H. Abdul Wahid Hasjim (1914–1953)
Sri Susuhunan Paku Buwono VI (1807–1849)
K.H. Mohammad Hasjim Asj'arie (1875–1947)
RMT Ario Soerjo (1896–1948)
Jend. Besar Soedirman (1916–1950)
Jend. Oerip Soemohardjo (1893–1948)
Prof. Dr. Mr. Soepomo (1903–1958)
Dr. Soelaiman Effendi Koesoemah Atmadja (1898–1952)
Jend. Ahmad Yani (1922–1965)
Letjen R. Soeprapto (1920–1965)
Letjen Mas Tirtodarmo Harjono (1924–1965)
Letjen Siswondo Parman (1918–1965)
Mayjen Donald Isaac Pandjaitan (1925–1965)
Mayjen Soetojo Siswomihardjo (1922–1965)
Kapten Pierre Tendean (1939–1965)
Aipda Karel Satsuit Tubun (1928–1965)
Brigjen Katamso Darmokusumo (1923–1965)
Kol. Sugijono Mangunwijoto (1926–1965)
Soetan Sjahrir (1909–1966)
Laks. R. Edy Martadinata (1921–1966)
Raden Dewi Sartika (1884–1947)
Prof. Dr. Wilhelmus Zakaria Johannes (1895–1952)
Pangeran Antasari (1809–1862)
Sersan Usman alias Djanatin bin H. Ali (1943–1968)
Kopral Harun alias Tohir bin Said (1947–1968)
Jend. Basoeki Rachmat (1921–1969)
Arie Frederik Lasut (1918–1949)
Martha Christina Tiahahu (1800–1818)
Maria Walanda Maramis (1872–1924)
Supeno (1916–1949)
Sultan Ageng Tirtajasa (1631–1683)
Wage Rudolf Soepratman (1903–1938)
Nyai Hj. Siti Walidah Ahmad Dahlam (1872–1946)
K.H. Zainal Moestafa (1907–1944)
Sultan Hasanuddin (1631–1670)
Kapitan Pattimura (1783–1817)
Pangeran Diponegoro (1785–1855)
Tuanku Imam Bondjol (1772–1864)
Tengku Tjik di Tiro (1836–1891)
Teuku Oemar (1854–1899)
dr. Wahidin Soedirohoesodo (1852–1917)
Raden Oto Iskandar di Nata (1897–1945)
Robert Wolter Monginsidi (1925–1949)
Prof. Mr. Mohammad Yamin (1903–1962)
Laksda Josaphat Soedarso (1925–1962)
Prof. dr. R. Soeharso (1912–1971)
Marsda Prof. dr. Abdurrachman Saleh (1909–1947)
Marsda Mas Agustinus Adisutjipto (1916–1947)
Teuku Njak Arief (1899–1946)
Nji Ageng Serang (1752–1828)
Hj. Rangkayo Rasuna Said (1910–1965)
Marsda Abdul Halim Perdana Kusuma (1922–1947)
Marsma R. Iswahjudi (1918–1947)
Brigjen I Gusti Ngurah Rai (1917–1946)
Soeprijadi (1923–1945)
Sultan Agung Anyokrokusumo (1593–1645)
Untung Suropati (1660–1706)
Tengku Amir Hamzah (1911–1946)
Sultan Thaha Sjaifuddin (1816–1904)
Sultan Mahmud Badaruddin II (1767–1852)
Dr. Ir. H. Soekarno (1901–1970)
Dr. H. Mohammad Hatta (1902–1980)
Raden Pandji Soeroso (1893–1981)
Radin Inten II (1834–1856)
KGPAA Mangkunegara I (1725–1795)
Sri Sultan Hamengku Buwono IX (1912–1988)
Sultan Iskandar Muda (1593–1636)
I Gusti Ketut Jelantik (????–1849)
Frans Kaisiepo (1921–1979)
Silas Papare (1918–1978)
Marthen Indey (1912–1986)
Sultan Nuku Muhammad Amiruddin (1738–1805)
Tuanku Tambusai (1784–1882)
Syekh Yusuf Tajul Khalwati (1626–1699)
R.A. Hj. Fatimah Siti Hartinah Soeharto (1923–1996)
Raja Haji Fisabilillah (1727–1784)
H. Adam Malik (1917–1984)
Marsma Tjilik Riwut (1918–1987)
La Maddukelleng (1700–1765)
Sultan Syarif Kasim II (1893–1968)
H. Ilyas Yacoub (1903–1958)
Prof. Dr. Hazairin, S.H. (1906–1975)
Abdul Kadir (1771–1875)
Hj. Fatmawati Soekarno (1923–1980)
Ranggong Daeng Romo (1915–1947)
Brigjen H. Hasan Basry (1923–1984)
Jend. Besar Abdul Haris Nasution (1918–2000)
Jend. GPH Djatikoesoemo (1917–1992)
Andi Djemma (1901–1965)
Pong Tiku alias Ne' Baso (1846–1907)
Prof. Mr. R. H. Iwa Koesoema Soemantri (1899–1971)
H. Nani Wartabone (1907–1986)
Maskoen Soemadiredja (1907–1986)
Andi Mappanyukki (1885–1967)
Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad (1808–1873)
K.H. Ahmad Rifa'i (1786–1870)
Gatot Mangkoepradja (1898–1968)
Ismail Marzuki (1914–1958)
Kiras Bangun alias Garamata (1852–1942)
Bagindo Azizchan (1910–1947)
Andi Abdullah Bau Massepe (1918–1947)
Dr. Mr. H. Teuku Mohammad Hasan (1906–1997)
R.M. Djokomono Tirto Adhi Soerjo (1880–1918)
K.H. Noer Ali (1914–1992)
H. Pajonga Daeng Ngalle (1901–1958)
Opu Daeng Risadju (1880–1964)
Izaak Huru Doko (1913–1985)
Sri Sultan Hamengku Buwono I (1717–1792)
H. Andi Sultan Daeng Radja (1894–1963)
Mayjen dr. Adenan Kapau Gani (1905–1968)
Mr. dr. Ide Anak Agung Gde Agung (1921–1999)
Mayjen Prof. Dr. Moestopo (1913–1986)
Brigjen Ignatius Slamet Rijadi (1927–1950)
Dr. Mohammad Natsir (1908–1993)
K.H. Abdul Halim (1887–1962)
Soetomo alias Bung Tomo (1920–1981)
Laksda Jahja Daniel Dharma alias John Lie (1911–1988)
Prof. Dr. Ir. Herman Johannes (1912–1992)
Prof. Mr. R. Achmad Soebardjo (1896–1978)
Dr. Johannes Leimena (1905–1977)
Mayor Dr. Johannes Abraham Dimara (1916–2000)
Mr. Sjafruddin Prawiranegara (1911–1989)
K.H. Idham Chalid (1921–2010)
H. Abdul Malik Karim Abdullah (1908–1981)
Ki Sarmidi Mangunsarkoro (1904–1957)
I Gusti Ketut Pudja (1908–1977)
Sri Susuhunan Paku Buwono X (1866–1939)
Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahjono (1900–1986)
dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat (1879–1957)
Lambertus Nicodemus Palar (1900–1981)
Letjen Tahi Bonar Simatupang (1920–1990)
Letjen Djamin Ginting (1921–1974)
Soekarni Kartodiwirjo (1916–1971)
H. R. Mohamad Mangoendiprodjo (1905–1988)
K.H. Abdul Wahab Hasbullah (1888–1971)

BHINNEKA TUNGGAL IKA
AR·RUZZMEDIA